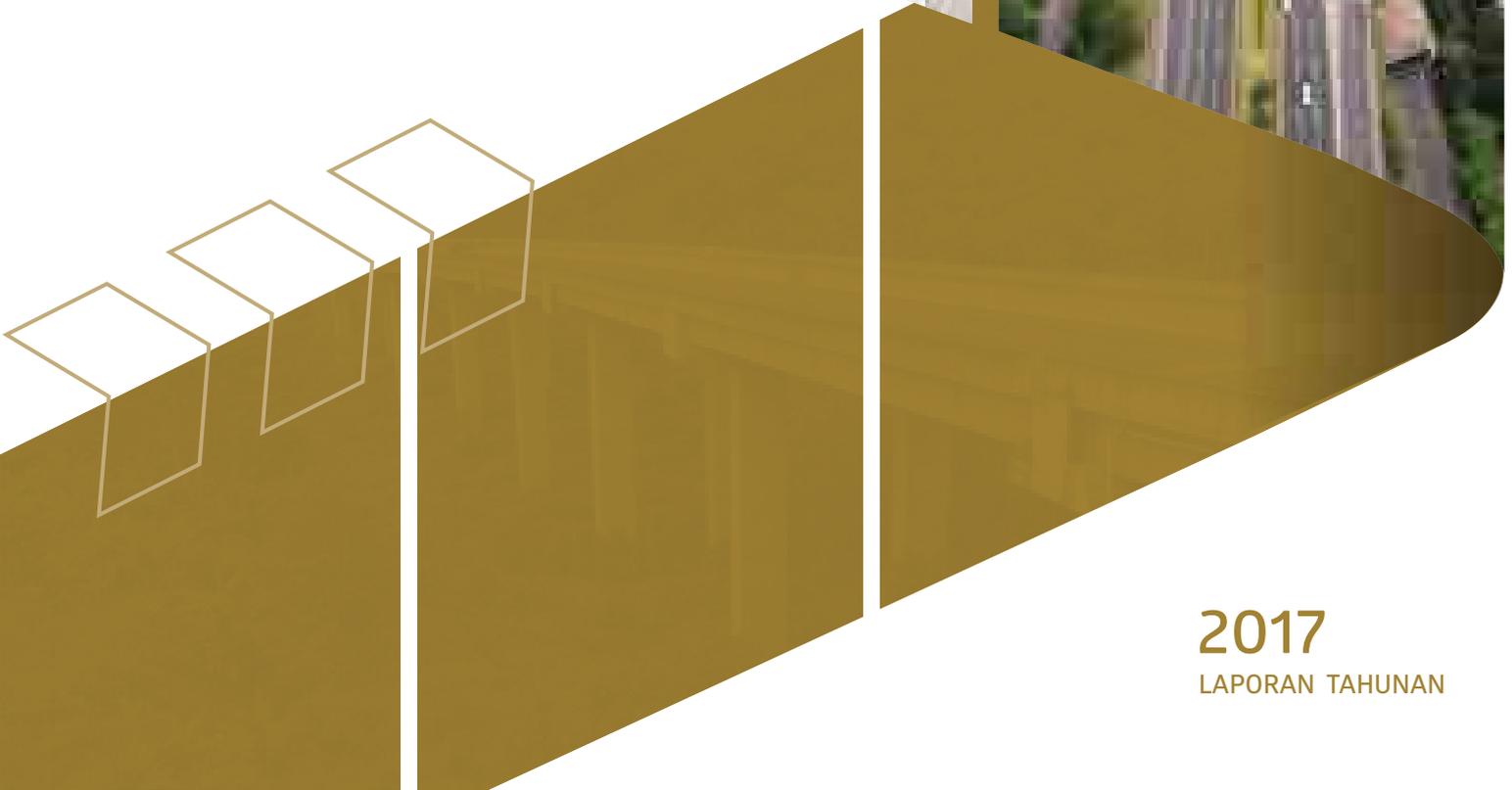
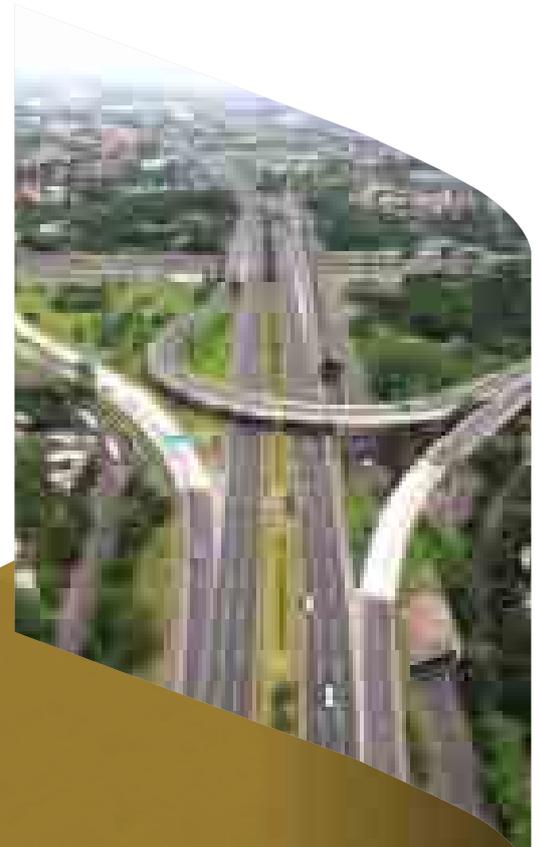
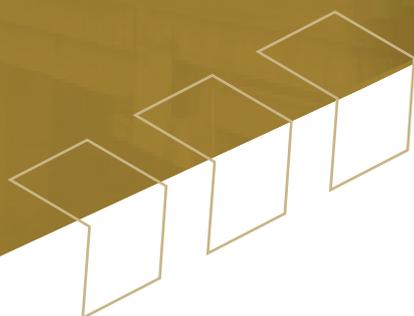
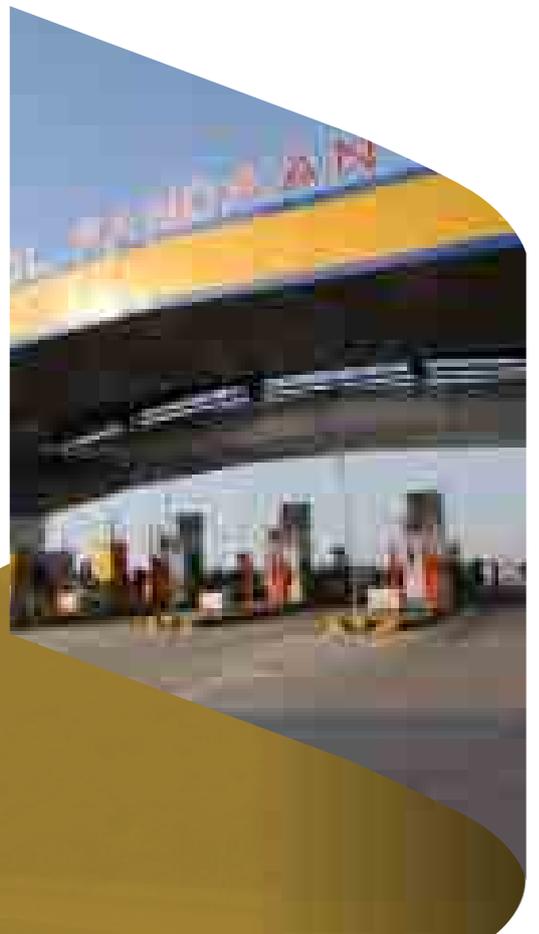


TRANSFORMASI UNTUK PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN





TRANSFORMASI UNTUK PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Sebagai pionir pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia, Jasa Marga tidak pernah berhenti melakukan berbagai macam inovasi guna melancarkan segenap transformasi untuk membangun konektivitas negeri.

Ketatnya persaingan dunia usaha mengharuskan setiap perusahaan untuk melakukan inovasi dan bertransformasi seiring dengan perkembangan zaman. Hukum besi ini berlaku juga untuk Jasa Marga. Dengan terbukanya peluang di industri jalan tol seiring dengan nawacita Pemerintah untuk membangun ribuan kilometer hingga tahun 2025, beberapa pemain baru dalam bisnis infrastruktur transportasi, baik dari dalam maupun luar negeri, mulai menggeliat. Selain itu, perkembangan transportasi massal semakin meningkat.

Hal ini menandakan kompetisi dalam bisnis infrastruktur transportasi, khususnya jalan tol, menjadi semakin ketat. Jasa Marga menganggap hal tersebut sebagai tantangan yang harus dijawab, seiring dengan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya dan berkesinambungan.

Sejak didirikan pada tahun 1978, Jasa Marga tidak pernah berhenti berinovasi untuk selalu berkontribusi dalam membangun negeri. Jasa Marga melihat kebutuhan akan jalan alternatif yang semakin mendesak di Jakarta raya, oleh karena itu Perseroan melakukan inovasi dengan membangun Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) yang mulai beroperasi sejak tahun 1978 hingga hari ini.

Sejalan dengan itu, Jasa Marga terus melakukan inovasi dan bertransformasi menjadi perusahaan modern yang memegang kepemilikan jalan tol terbesar di Indonesia. Berbagai inovasi dalam perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional di jalan tol mulai dikembangkan oleh Jasa Marga guna memenuhi misi Perseroan dalam memimpin pembangunan jalan tol di Indonesia untuk meningkatkan konektivitas nasional, menjalankan usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional dan berkesinambungan, memaksimalkan pengembangan kawasan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan keuntungan perusahaan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang prima.

Pada perjalanannya, Jasa Marga terus mengembangkan infrastruktur jalan tol yang mengoneksikan berbagai daerah di negeri ini. Tidak sekadar dalam aspek pembangunan jalan tol, Jasa Marga juga menjadi pionir dalam berbagai inovasi bisnis jalan tol, baik dari segi operasional maupun pelayanan.



Jembatan Tuntang, Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Bawen-Salatiga (17,6 km), dioperasikan pada 25 September 2017.

Pada tahun 2017, Jasa Marga kembali memelopori sederet inovasi dan transformasi yang signifikan guna meningkatkan kapabilitas Perseroan dalam rantai nilai dan lini bisnis. Tahun 2017, menjadi tahun yang bersejarah bagi Jasa Marga, dimana Perseroan berhasil menorehkan capaian prestasi yang luar biasa baik pada bidang pengembangan, pengoperasian jalan tol, serta mencari solusi alternatif pendanaan.

Salah satu terobosan yang telah dilakukan Jasa Marga pada tahun 2017 adalah program *recycling* dengan menerbitkan sekuritisasi yang berbasis hak atas sebagian pendapatan Ruas Jagorawi, yang merupakan salah satu ruas tol paling *mature* yang dimiliki oleh Jasa Marga. Produk sekuritisasi ini mendapat respon yang sangat baik, dimana penjualannya *oversubscribed* hingga 3 kali.

Selain itu, untuk memenuhi pendanaan, Jasa Marga tidak berhenti dalam melakukan inovasi terkait alternatif pendanaan. Melalui program *Debt Recycling*, kali ini Jasa Marga berinovasi dengan mengeluarkan obligasi di level anak perusahaan, atau *project bond*, dimana untuk pertama kalinya dilakukan oleh anak usaha Jasa Marga, yaitu PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) untuk Ruas Jalan Tol JORR W2 Utara atau Kebon Jeruk-Ulujami sepanjang 7,7 km, yang telah beroperasi penuh sejak tahun 2014.

Melengkapi sederet prestasi Jasa Marga dalam bidang pendanaan, untuk pertama kalinya obligasi global berdenominasi Rupiah dicatatkan di London Stock Exchange dan Singapore Stock Exchange pada bulan Desember 2017 dengan nilai Rp4 triliun. Obligasi tersebut juga mendapatkan peringkat Baa3 oleh Moody's dan BB + oleh S&P. Tingginya permintaan yang masuk mencapai lebih dari Rp15 triliun mengindikasikan kelebihan pemesanan lebih dari 3 kali. Oleh karena itu, Jasa Marga dimungkinkan untuk menurunkan tingkat bunga dari indikasi awal menjadi 7,50%.

Selain dari bidang pendanaan, Jasa Marga pun melakukan beragam inovasi dalam bidang pengoperasian dan layanan. Program Pemerintah atas Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau mewujudkan *cashless society* disambut baik oleh Jasa Marga. Jasa Marga melalui serangkaian inovasi berhasil menjadi pelopor yang mewujudkan transformasi sistem pembayaran 100% elektronik sesuai dengan instruksi Pemerintah.

Dalam waktu yang cukup singkat, Jasa Marga berhasil mengimplementasikan 100% pembayaran non tunai di seluruh wilayah operasi jalan tolnya. Jika dibandingkan dengan transaksi konvensional, transaksi menggunakan uang elektronik di gerbang tol dapat memangkas lebih dari setengah waktu transaksi, serta lebih aman dan praktis digunakan oleh para pengguna jalan tol.

Jasa Marga juga telah berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang transaksi, salah satunya adalah melakukan integrasi jalan tol. Integrasi yang diterapkan oleh Jasa Marga pada tahun 2017 ialah Ruas Jakarta-Tangerang dan Ruas Tangerang-Merak yang dikelola oleh PT Marga Mandala Sakti. Dengan dilakukannya integrasi jalan tol, pengguna jalan tol dimudahkan dengan hanya perlu membayar satu kali di gerbang tol keluar tempat tujuan.

Selain itu, Jasa Marga sebagai operator dan pengembang jalan tol terbesar di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan dan pengoperasian jalan tol sebagai prasarana distribusi barang dan jasa maupun prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Pada sektor pengembangan usaha di tahun 2017, Jasa Marga berhasil menambah konsesi jalan tol yang dimilikinya sepanjang 237 km.

Saat ini, Jasa Marga telah mengoperasikan lebih dari 680 km jalan tol di seluruh Indonesia. Tidak berhenti hingga di situ, Jasa Marga terus melakukan inovasi dalam mewujudkan pengoperasian seluruh konsesi jalan tol sepanjang 1.260 km hingga tahun 2019. Segenap percepatan dan pengembangan jalan tol ini merupakan upaya berkelanjutan Jasa Marga sesuai dengan misi untuk meningkatkan konektivitas nasional.

Percepatan dalam pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus Jasa Marga sejalan dengan program pemerintah yang memprioritaskan pembangunan jalan tol sebagai konektivitas. Langkah itu pula yang dilakukan oleh Jasa Marga dalam membangun bangsa.

Tidak berhenti sampai di situ, Jasa Marga melalui rangkaian upaya inovasinya, melebarkan sayap hingga merambah aspek bisnis lainnya di luar pembangunan dan pengelolaan jalan tol. Jasa Marga mengembangkan bisnis melalui anak-anak usaha yang dimilikinya, di antaranya adalah dalam bidang properti, layanan operasional jalan tol, dan layanan pemeliharaan jalan tol.

Segala langkah inovasi yang dilakukan oleh Jasa Marga untuk bertransformasi tidak berbuah percuma. Dalam memaknai tata kelola perusahaan yang baik, Jasa Marga memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu mendorong *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai bagian dari pengelolaan Perseroan melalui penerapan suatu sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, kesetaraan dan tanggung jawab.

Melalui *self-assessment* GCG yang dilakukan berdasarkan parameter penilaian Kementerian BUMN, pada tahun 2017 Jasa Marga memperoleh nilai sebesar 97,17%. Hal ini berarti, secara keseluruhan pada tahun 2017, Jasa Marga berada pada kualitas penerapan GCG "Sangat Baik".

Dengan semangat inovasi dalam melakukan transformasi, Jasa Marga selalu berkomitmen dalam membangun bangsa. Selain itu, melalui pengalaman, kompetensi dan sumber daya yang berdaya saing dan mumpuni, Jasa Marga siap mendorong percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, di seluruh Indonesia. Hal tersebut demi menumbuhkan taraf perekonomian bangsa secara merata serta mewujudkan Indonesia menjadi yang lebih baik lagi***.



9

MENGENAL JASA MARGA



28

RIWAYAT SINGKAT JASA MARGA



77

IKHTISAR 2017



93

SAHAM JSMR DAN OBLIGASI JASA MARGA



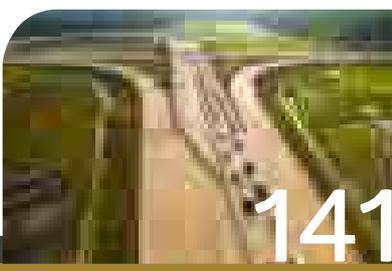
109

LAPORAN DEWAN KOMISARIS



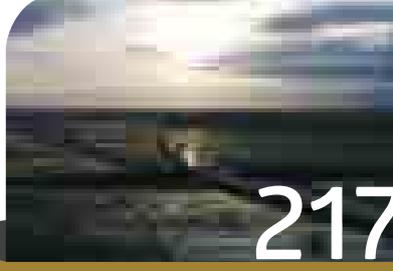
123

LAPORAN DIREKSI



141

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN



217

KINERJA PEMBANGUNAN JALAN TOL JASA MARGA



251

KINERJA PENGEMBANGAN USAHA LAIN



261

TATA KELOLA PERUSAHAAN



451

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

DAFTAR ISI

Transformasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan	1	Kinerja Dewan Komisaris	112
Daftar Isi	5	Program Kerja, Rapat, Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Kepada Direksi	112
Mengenal Jasa Marga	9	Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris dan Kepatuhan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	112
Identitas Jasa Marga	11	Pandangan Atas Prospek Usaha Perseroan yang Disusun oleh Direksi	113
Logo Jasa Marga	12	RKAP dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik	114
Visi & Misi dan Strategi Jasa Marga	13	Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perseroan	116
Tata Nilai dan Budaya Jasa Marga	16	Penilaian Terhadap Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan Perseroan Sesuai dengan RKAP	116
Jasa Marga Selayang Pandang	22	Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan	119
Perjalanan Penting Jasa Marga	22	Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal	119
Riwayat Singkat Jasa Marga	28	Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik	120
Kegiatan Usaha	29	Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System/WBS</i>)	121
Perkembangan Industri Jalan Tol di Indonesia	31	Laporan Direksi	123
Perkembangan Bisnis Jasa Marga	31	Strategi dan Kebijakan Strategis Perseroan	126
Struktur Organisasi	34	Analisis Kinerja Perseroan	130
Struktur Korporasi Jasa Marga	37	Perbandingan Target dan Pencapaian Kinerja Perseroan	130
Struktur Kelompok Usaha Jasa Marga	37	Kendala yang Dihadapi Perseroan dan Langkah Penyelesaiannya	131
Entitas Anak	38	Prospek Usaha Perseroan ke Depan	133
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	46	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Berkesinambungan	134
Aset Keuangan	47	Pengelolaan Human Capital	135
Modal Insani Jasa Marga	49	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	135
Transformasi di Bidang Modal Insani	49	Perubahan Komposisi Direksi dan Alasan Perubahannya	136
Jumlah dan Komposisi Karyawan	51	Ucapan Terima Kasih	137
Kebijakan dalam Kesempatan Kerja	55	Analisa dan Pembahasan Manajemen	141
Pengembangan Kompetensi, Kinerja dan Karir Karyawan	56	Tinjauan Umum	142
Pendidikan dan Pelatihan	56	Tinjauan Kinerja Perseroan Dibandingkan dengan Industri Jalan Tol	142
Produktivitas Karyawan	59	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	145
Remunerasi Karyawan	59	Dasar Penerapan Segmen Usaha Jasa Marga	146
Penghargaan kepada Karyawan	60	Segmen Usaha Jalan Tol	146
Harmonisasi Hubungan Industrial	60	Kinerja Tol Segmen Utama	151
Biaya Sumber Daya Manusia	60	Kinerja tol Segmen Lainnya	156
Situs Web Jasa Marga	61	Segmen Usaha Pengembangan Usaha Lain	168
Manajemen Jasa Marga	62	Analisa Kinerja Keuangan Komprehensif	170
Dewan Komisaris	62	Kinerja Keuangan 2017 dan 2016	170
Direksi	64	Laporan Laba Rugi Konsolidasian	170
Komite Audit	66	Pendapatan Usaha	171
Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko	67	Beban Usaha	171
Pejabat Senior Jasa Marga	68	Pendapatan Tol	171
Ikhtisar 2017	77	Pendapatan usaha lainnya	173
Ikhtisar Keuangan 2013-2017	78	Pendapatan konstruksi	173
Ikhtisar Operasional 2013-2017	80	Beban tol dan usaha lainnya	175
Program Transaksi non tunai di jalan tol	84	Laba bruto	176
Kilas Balik 2017	86	Beban umum dan administrasi	176
Penghargaan dan Sertifikasi	90	Penghasilan keuangan dan penghasilan lain- lain	177
Saham JSMR dan Obligasi Jasa Marga	93	Laba Usaha	179
Saham JSMR dan Obligasi	94	Biaya keuangan dan bagian atas rugi neto entitas asosiasi	179
Kronologi Pencatatan Saham JSMR	94	Laba sebelum pajak	180
Informasi Harga dan Volume Perdagangan Saham JSMR	94	Beban Pajak penghasilan	180
Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham JSMR Selama Tahun 2017	98	Laba Tahun Berjalan	181
Komposisi Kepemilikan Saham JSMR	98	Penghasilan (beban) komprehensif lain	181
Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali	99	Laba komprehensif tahun berjalan	182
Pemegang Saham JSMR dengan Kepemilikan 5% atau Lebih	99	Bagian atas rugi neto entitas asosiasi	183
Pemegang Saham JSMR dengan Kepemilikan Kurang dari 5%	99	Laba per saham	183
Kepemilikan Saham JSMR oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan	100	Laporan posisi keuangan konsolidasian Aset	184
Pemegang Saham JSMR	100		
Obligasi Jasa Marga	101		
Kronologi Emisi Obligasi Jasa Marga	101		
Obligasi Jasa Marga Beredar Tahun 2016 dan 2017	102		
Sepuluh Pemegang Obligasi terbesar Jasa Marga	103		
Komodo Bond	105		
Informasi Aksi Korporasi	106		
Sekuritisasi Aset Jagorawi	106		
Laporan Dewan Komisaris	110		
Perubahan Komposisi dan Perubahan Pembagian Tugas Dewan Komisaris	111		

DAFTAR ISI

Aset Lancar	185	RUPS Tahunan 15 Maret 2017	292
Kas dan setara kas	186	Tindak Lanjut Keputusan RUPS yang Diselenggarakan pada Tahun 2016	304
Investasi jangka pendel	186	Dewan Komisaris	306
Persediaan	187	Komposisi Dewan Komisaris	306
Aset tidak lancar	189	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Board Manual)	307
Aset Tetap	192	Persyaratan dan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	308
Liabilitas	195	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris	310
Utang usaha	197	Komisaris Independen dan Independensi Dewan Komisaris	330
Laporan Arus Kas Konsolidasian	207	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	333
Rasio Keuangan	208	Rapat Dewan Komisaris	334
Prospek Usaha	211	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Dewan Komisaris	343
Kebijakan Dividen	212	Prosedur, Dasar Penetapan dan Besarnya Remunerasi Anggota Dewan Komisaris	344
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum	213	Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris	347
Informasi material	215	Direksi	348
Kinerja Pembangunan Jalan Tol Jasa Marga	217	Komposisi Direksi	348
Jaringan Jalan Tol Jasa Marga	218	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board Manual)	349
Konsesi-konsesi yang Dimiliki Perseroan	220	Persyaratan dan Keberagaman Komposisi Direksi	350
Pengembangan Usaha Jalan Tol	222	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	352
Jaringan Jalan Tol Jasa Marga: Pulau Sumatera	225	Direktur Independen dan Independensi Direksi	358
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	226	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi	361
Jaringan Jalan Tol Jasa Marga: Wilayah Jabotabek	227	Rapat Direksi	361
Jalan Tol Cengkareng-Kunciran	228	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Direksi	370
Jalan Tol Kunciran-Serpong	229	Prosedur, Dasar Penetapan dan Besarnya Remunerasi Anggota Direksi	370
Jalan Tol Serpong-Cinere	230	Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi	374
Jalan Tol Bogor <i>Outer Ring Road</i>	231	Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris	375
Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated	232	Rapat Dewan Komisaris-Direksi	375
Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan	233	Hubungan Afiliasi Direksi dan Dewan Komisaris	380
Jaringan Jalan Tol Jasa Marga: Pulau Jawa	234	Assessment Direksi dan Dewan Komisaris	381
Jalan Tol Batang-Semarang	236	Kriteria dan Dasar Penilaian Kinerja atas Kepatuhan Terhadap Penerapan Prinsip-prinsip GCG	381
Jalan Tol Semarang-Solo	237	Hasil Assessment GCG Direksi dan Dewan Komisaris	383
Jalan Tol Solo-Ngawi	239	Proses dan Pihak yang Melakukan Assessment	383
Jalan Tol Ngawi-Kertosono	240	Komite-komite	385
Jalan Tol Gempol-Pasuruan	241	Komite Audit	385
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	242	Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit	385
Jalan Tol Gempol-Pandaan	243	Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja	385
Jalan Tol Pandaan-Malang	244	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	386
Jaringan Jalan Tol Jasa Marga: Pulau Kalimantan	245	Independensi Komite Audit	386
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda	246	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit	388
Jaringan Jalan Tol Jasa Marga: Pulau Sulawesi	247	Rapat Komite Audit	388
Jalan Tol Manado-Bitung	248	Remunerasi Komite Audit	389
Target Kinerja 2018	249	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Komite Audit	389
Kinerja Pengembangan Usaha Lain	251	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit	389
Pengembangan Usaha Jasa Layanan Operasi	252	Profil Komite Audit	390
PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO)	252		
PT Jakarta Lingkarluar Jakarta (JLJ)	254		
Pengembangan Usaha Jasa Layanan Pemeliharaan	254		
PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM)	255		
Pengembangan Usaha Properti	256		
Perkembangan Bisnis	259		
Tata Kelola Perusahaan	261		
Dasar Hukum Penerapan GCG Jasa Marga	262		
Prinsip-prinsip GCG	264		
Tujuan Penerapan GCG Jasa Marga	265		
Kebijakan Internal GCG Jasa Marga	266		
Komitmen Jasa Marga dalam Penerapan GCG	269		
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	271		
Penilaian atas Penerapan GCG Jasa Marga Tahun 2017	275		
Rekomendasi Hasil Penilaian GCG	279		
Struktur, Kebijakan dan Mekanisme Penerapan Tata Kelola Perusahaan	286		
Rapat Umum Pemegang Saham	290		
Pemegang Saham Jasa Marga	291		
Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam RUPS	291		
Proses Penyelenggaraan RUPS	291		
Penyelenggaraan RUPS Jasa Marga di Tahun 2017	292		

Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko	391
Dasar Hukum Pembentukan Komite	391
Nominasi, Remunerasi dan Risiko	
Tugas dan Tanggung Jawab Komite	391
Nominasi, Remunerasi dan Risiko	
Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko	392
Kebijakan Suksesi Direksi	393
Pelatihan dan Pengembangan	394
Kompetensi Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko	
Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko	394
Remunerasi Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko	395
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci	395
Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko	
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko	395
Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko	396
Sekretaris Dewan Komisaris	399
Sekretaris Perusahaan	400
Struktur Organisasi Corporate Secretary	400
Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Secretary	401
Pelaksanaan Kegiatan Corporate Secretary	401
Riwayat Jabatan Corporate Secretary	402
Pengembangan Kompetensi Corporate Secretary	402
Profil Corporate Secretary	402
Unit Internal Audit	403
Pengangkatan dan Pemberhentian Head of Internal Audit	403
Struktur dan Kedudukan Unit Internal Audit	403
Pedoman Kerja Internal Audit	404
Kode Etik Auditor Internal	404
Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit	405
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Internal Audit dan Sertifikasi Profesi Audit	405
Hasil Audit Unit Internal Audit	406
Kegiatan Pendukung Audit Lainnya	406
Evaluasi Kinerja Unit Internal Audit	406
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Internal Audit Tahun 2017	407
Profil Head of Internal Audit	407
Sistem Pengendalian Internal Perusahaan	407
Sosialisasi Pemahaman Kerangka SPIP	408
Review atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan	408
Manajemen Risiko Jasa Marga	409
Kebijakan Manajemen Risiko	410
Perjalanan Pengelolaan Risiko Jasa Marga	410
Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko	411
Risiko Perseroan dan Pengelolaannya	414
Implementasi Program Kerja Manajemen Risiko	418
Profil VP Risk and Quality Management	423
Perkara Penting yang Dihadapi Jasa Marga	424
Informasi tentang Sanksi Administratif	428
Kode Etik	429
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen	434
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)	435
Konsistensi Penerapan GCG	439
Perlakuan yang Sama Terhadap Seluruh Pemegang Saham	439
Pengadaan Barang dan Jasa	439

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	440
Tata Kelola Teknologi Informasi	440
Auditor Eksternal	447
Akses Terhadap Informasi dan Data Perseroan	449
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	451
Lingkungan Hidup	456
Pelestarian Lingkungan Hidup	456
Rencana Kegiatan	456
Ketengakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja	458
Rencana Kegiatan	460
Kegiatan yang Dilakukan	462
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	465
Rencana Kegiatan	465
Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kegiatan	466
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	469
Rencana Kegiatan	469
Kegiatan yang Dilakukan	470
Tanggung Jawab kepada Konsumen	476
Rencana Kegiatan	476
Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kegiatan	476
Daftar Alamat	482
Kantor Pusat Jasa Marga	482
Kantor Cabang Jasa Marga	483
Entitas Anak Jasa Marga	483
Entitas Asosiasi Jasa Marga	485
Aset Keuangan Jasa Marga	486
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	486
Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Tahunan 2017	488
Lampiran	490
Daftar Istilah	490
Referensi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016 dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016	491
Laporan Keuangan Konsolidasian	502

Dalam Laporan Tahunan ini, nama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dapat disingkat "Jasa Marga", "Perseroan" atau "Perusahaan".

Pernyataan Penyangkalan

Dokumen ini dapat berisi beberapa pernyataan yang merupakan proyeksi dan pandangan masa depan yang menggambarkan cara pandang Perseroan terhadap kejadian-kejadian dan kinerja keuangan di masa depan, serta kondisi keuangan, hasil operasi dan hasil usaha, kondisi ekonomi, kondisi sektor, kondisi lalu lintas, serta rencana dan tujuan terkait. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada beberapa estimasi dan asumsi saat ini yang dapat berubah seiring dengan ketidakpastian, kontijensi dan berbagai risiko bisnis, ekonomi dan kompetisi yang dapat berubah sewaktu-waktu; dapat menyebabkan hasil, kinerja dan kejadian sebenarnya berbeda secara material dari yang telah diprediksi atau diproyeksi; dan hal ini berada di luar kendali Perseroan dan Direksi Perseroan. Pernyataan-pernyataan tersebut tidak terkait baik secara langsung maupun secara eksklusif dengan fakta-fakta historis dan tidak mencerminkan niat, rencana, ekspektasi, asumsi dan keyakinan Perseroan mengenai kejadian-kejadian di masa datang. Tidak ada jaminan bahwa kejadian di masa datang akan muncul, proyeksi akan tercapai, atau asumsi Perseroan benar. Pernyataan-pernyataan tersebut bukan dan tidak dapat dianggap sebagai representasi atas kinerja Perseroan di masa datang.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di situs web www.jasamarga.com

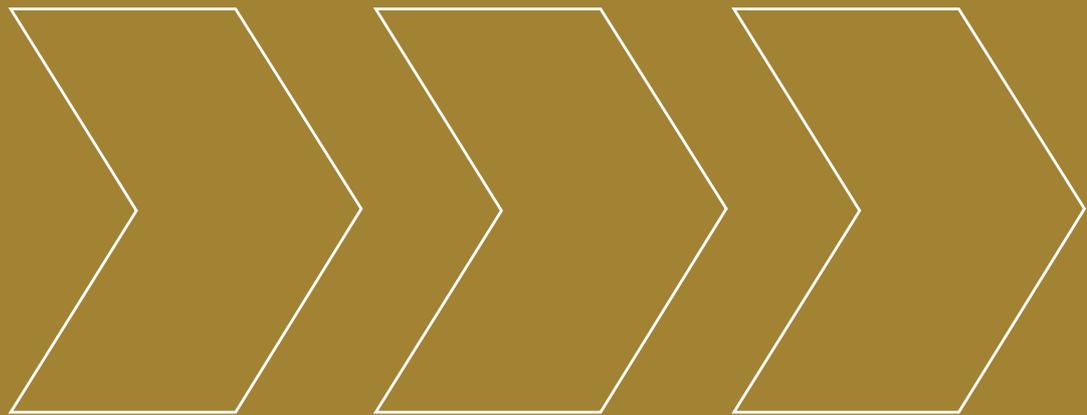


Sebagai bentuk peningkatan pelayanan untuk pengguna jalan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. melakukan integrasi Jalan Tol Jakarta-Tangerang dengan Jalan Tol Tangerang-Merak, milik PT Marga Mandala Sakti.



01

MENGENAL
JASA MARGA



MENGENAL JASA MARGA



Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang terletak di Plaza Tol TMII Jakarta

IDENTITAS JASA MARGA

NAMA DAN KEDUDUKAN

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Berkedudukan di Jakarta

Instagram: @official.jasamarga
Facebook: PT Jasa Marga – Persero Tbk
Aplikasi Mobile: JMCARe

KANTOR PUSAT

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550 Indonesia
Tel. 62-21 841 3526, 841 3630
Fax. 62-21 841 3540
e-mail jsmr@jasamarga.co.id
investor.relations@jasamarga.co.id
Situs Web www.jasamarga.com

INFORMASI PENDIRIAN

Tanggal Pendirian : 01 Maret 1978
Dasar Hukum Pendirian : Peraturan Pemerintah No. 04 tahun 1978
Modal Dasar : Rp 9,52 triliun
Modal Ditempatkan &
Disetor Penuh : Rp 3,6 triliun

PUSAT INFORMASI LALU LINTAS DAN PELAYANAN LAINNYA

JMTIC
(Jasa Marga Traffic
Information Center): 14080
Twitter: @PTJASAMARGA
(khusus informasi lalu lintas)
@official_JSMR
(untuk informasi umum lainnya)

INFORMASI SAHAM

Kepemilikan : - Pemerintah Indonesia 70%
- Publik 30%

Nama Bursa : PT Bursa Efek Indonesia/BEI
(The Indonesia Stock Exchange/IDX)
Tanggal IPO : 12 November 2007
Kode Bursa : BEI/IDX: JSMR
Bloomberg: JSMR IJ
Reuters: JSMR.JK

KEGIATAN USAHA

KEGIATAN USAHA SESUAI ANGGARAN DASAR

Sesuai Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dalam rangka standarisasi BUMN Terbuka dan pemenuhan tata kelola di bidang peraturan Pasar Modal sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98 tanggal 28 April 2017 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian HAM No. AHU-0055628.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 28 April 2017 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036530.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 28 April 2017 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 15 Maret 2017 No. 20 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 23 Maret 2017 No. 37, yang keduanya dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 24 Maret 2017 No. AHU-AH.01.03-0121417, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang perusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha dan penunjang sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol.
2. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Bidang pengembangan properti di wilayah yang berdekatan dengan koridor jalan tol.
2. Bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda-moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol.
3. Bidang jasa dan perdagangan untuk layanan konstruksi pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol.

LOGO JASA MARGA

PERUBAHAN LOGO JASA MARGA DARI MASA KE MASA



1978 - 1993



1993-2007



2007-sekarang

Sejak tahun 1978, logo Perseroan telah dua kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1993 dan 2007.

Logo Perseroan yang digunakan sejak tahun 2007 memperlihatkan perubahan yang merupakan cerminan atas komitmen yang kuat untuk tumbuh menjadi perusahaan yang bercitra sebagai pemimpin, modern dan profesional di industrinya.

Konfigurasi jalan membentuk huruf "J" (huruf pertama nama Perseroan) yang merupakan cermin perjalanan historis Perseroan, mencitrakan Perseroan yang semakin dinamis.

Warna biru dan kuning pada logo mencerminkan harapan dan masa depan, serta semangat dan komitmen.

Bola berwarna biru menunjukkan bahwa Jasa Marga menuju perusahaan yang memiliki standar global. Pelayanan jalan tol terus dikembangkan untuk memenuhi standar tersebut.



VISI & MISI DAN STRATEGI JASA MARGA

VISI & MISI JASA MARGA

Perumusan Visi, Misi, dan Tata Nilai Perseroan dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait, yaitu antara lain: Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan, serta memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan.

Visi dan Misi Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan melalui Keputusan Direksi No. 67/KPTS/2017 tanggal 05 Mei 2017 tentang Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan.

Tahapan Penyusunan Visi, Misi dan Tata Nilai Jasa Marga

1. Direksi melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan kekuatan internal Perseroan.
2. Direksi melakukan evaluasi terhadap perubahan strategis lingkungan eksternal Perseroan dan mempertimbangkan peluang bisnis di masa akan datang.
3. Direksi melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.
4. Dengan mempertimbangkan Kekuatan Internal dan Peluang Eksternal serta harapan para pemangku kepentingan, Direksi merumuskan Visi dan Misi Perseroan.
5. Visi dan Misi tersebut kemudian disampaikan dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris yang kemudian ditetapkan dan disepakati bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Direksi menetapkan Visi dan Misi Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala setiap tahun melakukan evaluasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Perseroan dan untuk tahun buku 2017, visi dan misi telah direview dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris.

BAGAN PROSES PENYUSUNAN VISI DAN MISI



Dalam rangka percepatan transformasi ekonomi Indonesia dan penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu pilar utama dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (MP3EI) yang ditetapkan Pemerintah, diperlukan pondasi keuangan dan aset Perseroan yang kuat sebagai market leader yang menguasai mayoritas jalan tol di Indonesia dengan kapasitas keuangan yang memungkinkan Perseroan untuk mengambil

peluang dan terus meningkatkan pengembangan bisnis jalan tol maupun usaha lain.

Untuk itu, dilakukan review kembali terhadap Visi dan Misi Perseroan dengan memperhatikan arah pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang, sehingga Perseroan dapat terus meningkatkan potensi bisnis dan peluang bagi Perseroan untuk tetap tumbuh dan berkembang baik di jalan tol maupun usaha lain.

Visi Jasa Marga

Menjadi Perusahaan Jalan Tol Nasional Terbesar, Terpercaya dan Berkesinambungan.



Perusahaan Jalan Tol Nasional

Pengertian:

- Memiliki bisnis jalan tol sebagai bisnis utama.
- Memiliki sebaran aset dan wilayah operasi di seluruh Indonesia.

Potensi Indikator Pengukuran:

- Komposisi aset jalan tol vs. non-jalan tol.
- Persebaran aset dan wilayah operasi.



Terbesar

Pengertian:

- Memiliki total aset jalan tol terpanjang di Indonesia
- Memiliki cakupan bisnis di seluruh rantai nilai jalan tol.

Potensi Indikator Pengukuran:

- Panjang jalan tol yang dimiliki vs. kompetitor.
- Cakupan bisnis di setiap rantai nilai.



Terpercaya

Pengertian:

- Menjadi tulang punggung pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol.
- Menjadi pilihan utama investor, mitra, dan pelanggan.
- Beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Potensi Indikator Pengukuran:

- Persepsi pemerintah, investor, dan mitra.
- Tingkat kepuasan pelanggan.
- Jumlah dispute dengan investor dan mitra.
- GCG Score.



Berkesinambungan

Pengertian:

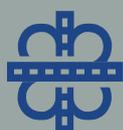
- Memiliki pertumbuhan skala bisnis dan keuntungan yang berkelanjutan.
- Memiliki bisnis non-tol yang bersinergi dengan bisnis jalan tol.

Potensi Indikator Pengukuran:

- Pertumbuhan aset.
- Pertumbuhan kinerja keuangan bisnis jalan tol dan non-tol.

Misi Jasa Marga

1. Memimpin Pembangunan Jalan Tol di Indonesia untuk Meningkatkan Konektivitas Nasional.
2. Menjalankan Usaha Jalan Tol di Seluruh Rantai Nilai Secara Profesional dan Berkesinambungan.
3. Memaksimalkan Pengembangan Kawasan untuk Meningkatkan Kemajuan Masyarakat dan Keuntungan Perusahaan.
4. Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dengan Pelayanan Prima.



Memimpin Pembangunan Jalan Tol di Indonesia untuk Meningkatkan Konektivitas Nasional

Penjelasan:

- Meningkatkan konektivitas antar daerah di Indonesia melalui pengembangan jalan tol dengan berbagai skema bisnis.
- Turut serta dalam proyek-proyek jalan tol flagship pemerintah dengan tetap memperhatikan factor kelayakan komersial.



Menjalankan Usaha Jalan Tol di Seluruh Rantai Nilai Secara Profesional dan Berkesinambungan

Penjelasan:

- Menjalankan usaha di seluruh rantai nilai jalan tol dengan berbagai skema bisnis secara efisien dan kompetitif.
- Memastikan pertumbuhan bisnis di seluruh rantai nilai jalan tol berkelanjutan.
- Mengoptimalkan sinergi antar bisnis di seluruh rantai nilai jalan tol.



Memaksimalkan Pengembangan Kawasan untuk Meningkatkan Kemajuan Masyarakat dan Keuntungan Perusahaan

Penjelasan:

Memastikan potensi-potensi bisnis yang timbul dari pembangunan jalan tol dapat dimanfaatkan dengan berbagai skema bisnis untuk kemajuan masyarakat dan keuntungan Perusahaan.



Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dengan Pelayanan Prima

Penjelasan:

Memastikan kepuasan pelanggan melalui:

- Penyediaan jalan tol yang aman dan berkualitas.
- Pelayanan lalu lintas dan transaksi yang baik, cepat tanggap, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi secara optimal.

STRATEGI JASA MARGA

Sejak ditetapkannya Visi dan Misi Perseroan pada tahun 2017, Perseroan melakukan langkah-langkah strategis dan terus melakukan pengembangan di berbagai bidang guna tercapainya Visi tahun 2027 “Menjadi Perusahaan Jalan Tol Nasional Terbesar, Terpercaya dan Berkesinambungan”.

Untuk mencapai sasaran pokok yang telah ditetapkan, Perseroan telah menetapkan strategi yang dibagi berdasarkan 4 (empat) bidang sebagai berikut:

1. Operasional

Di level operasional khususnya pada transaksi tol, pelayanan lalu lintas, dan pelayanan konstruksi, strategi yang ditetapkan meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional untuk meningkatkan EBITDA ruas-ruas tol yang sudah beroperasi. Secara bertahap, pengoperasian dan pemeliharaan akan menjadi kompetensi utama anak perusahaan yang bergerak di bidang pengoperasian tol dan pemeliharaan dengan konsep *cost leadership* dan *operational excellence* berbasis teknologi melalui metode *operating lease* sampai tahun 2022.

2. Pengembangan Usaha

Dengan total konsesi sepanjang 1.497 km pada akhir 2017, Perseroan adalah pemegang hak konsesi 33 ruas jalan tol, yang 21 ruas di antaranya dengan panjang 681 km telah beroperasi (baik seluruhnya atau sebagian) dan sisanya masih dalam proses pembebasan lahan dan/atau konstruksi. Pengembangan usaha dilakukan dengan menyeleksi ruas-ruas potensial berdasarkan skala prioritas disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh Perseroan dan disesuaikan dengan skema pendanaan, serta dengan mengembangkan usaha lain melalui pemanfaatan koridor jalan tol dan *property development*.

3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Strategi di bidang organisasi dan SDM ditetapkan melalui pembagian peran dan lingkup tugas di antara fungsi *asset owner*, *asset manager*, dan *service provider* dalam kelompok usaha (*group*) Jasa Marga. Selanjutnya, dilakukan pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan pengembangan kapabilitas organisasi. Selain itu, budaya Perseroan dikembangkan dan harus dapat diukur dalam kontribusinya bagi peningkatan kinerja Perseroan. Sementara, pengembangan sistem teknologi informasi dikelompokkan dalam fungsi *enterprise* dan *bisnis*.

4. Keuangan

Strategi Perseroan adalah dengan melakukan penerbitan alternatif pendanaan untuk memperoleh sumber pendanaan baru dalam rangka memenuhi kebutuhan *capex* yang cukup tinggi, sehingga Perseroan memiliki fleksibilitas dalam melakukan pendanaan jalan tol baru, serta memastikan setiap transaksi material atau investasi melalui proses kajian yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Seluruh langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka pencapaian Visi dan Misinya dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), manajemen risiko dan mitigasinya, serta pengendalian internal.

TATA NILAI DAN BUDAYA JASA MARGA

Untuk mencapai Visi dan menjalankan Misinya, Jasa Marga telah menyusun Tata Nilai yang menjadi pedoman prinsip (guiding principles) dalam berperilaku (*behavior*) dan membuat keputusan (*decision making*). Untuk itu, Jasa Marga membangun Tata Nilai atas dasar empat nilai pokok yang diakui dan dikembangkan bersama, yaitu JSMR (Jujur – Sigap – Mumpuni – Respek).

Tata Nilai ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan Keputusan Direksi No. 50/KPTS/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan. Sebagai suatu bentuk keseriusan

dan untuk memantau efektivitas penerapan tata nilai perseroan, dibuat suatu pedoman sosialisasi dan evaluasi Visi, Misi dan Tata Nilai perusahaan yang tertuang pada Keputusan Direksi No. 173/KPTS/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

PERNYATAAN MENGENAI BUDAYA PERUSAHAAN (*CORPORATE CULTURE*) YANG DIMILIKI PERSEROAN

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan berhasil dilaksanakan apabila disokong oleh budaya perusahaan yang kuat. Pendekatan internalisasi budaya dilakukan



J

JUJUR

Jasa Marga dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu JUJUR, adil, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan.

JUJUR:

Semangat integritas dari hati nurani, bukan hanya mematuhi peraturan.

ADIL:

Menjunjung tinggi kesetaraan dan fairness.

Transparan dan Bebas dari Benturan Kepentingan:
Independen dan obyektif.



S

SIGAP

Jasa Marga SIGAP melayani pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dengan bertindak peduli dan proaktif serta tetap mengedepankan kehati-hatian.

SIGAP MELAYANI:

Bertindak dengan semangat tinggi dalam melayani.

PEDULI:

Memberikan perhatian dengan penuh empati.

PROAKTIF DENGAN MENGEDEPANKAN KEHATI-HATIAN:

Mempersiapkan tindakan ke depan dengan mempertimbangkan risiko.

melalui intervensi pada ketiga aspek yaitu kepemimpinan, sistem dan karyawan. Dengan pendekatan tersebut, budaya Jasa Marga selain tertulis dalam kebijakan dan prosedur, juga menjadi suatu disiplin (soft skills) yang dipraktikkan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Untuk menyesuaikan dengan arah pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang perusahaan dimana potensi bisnis jalan tol untuk masa yang akan datang masih besar, serta untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan, maka Tata Nilai Jasa Marga pada tahun 2013 diubah menjadi: Jujur, Sigap, Mumpuni, dan Respek.

Empat Nilai inilah yang menjadi landasan dalam interaksi Insan Jasa Marga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

POKOK-POKOK BUDAYA JASA MARGA

Perseroan telah menetapkan Tata Nilai Jasa Marga sebagai budaya perusahaan yang menjadi landasan dalam interaksi Insan Jasa Marga dengan para stakeholders. Penjabaran Tata Nilai Jasa Marga berdasarkan Keputusan Direksi Jasa Marga No. 08/KPTS/2016 tentang Penjabaran Tata Nilai PT Jasa Marga (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:



M

MUMPUNI

Jasa Marga MUMPUNI dalam bekerja atas dasar kompetensi, konsisten, dan inovatif.

KOMPETEN:

Memiliki kemampuan dan kemauan melaksanakan pekerjaan.

KONSISTEN:

Berani bersikap dan menjadi teladan (role model).

INOVATIF:

Mengembangkan gagasan untuk melakukan perbaikan berkesinambungan.



R

RESPEK

Jasa Marga RESPEK terhadap pemangku kepentingan dalam bersinergi mencapai prestasi.

RESPEK:

Menghargai pihak lain secara proporsional.

SINERGI DALAM MENCAPI PRESTASI:

Menjunjung tinggi kerja sama kelompok dan mengelola keberagaman untuk memberi nilai tambah.

SOSIALISASI TATA NILAI PERSEROAN

Untuk menjamin penerapan Tata Nilai JSMR tersebut ke dalam kegiatan Perseroan sehari-hari, Perseroan secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada segenap Insan Jasa Marga. Penyebaran dan sosialisasi tata nilai ini dilakukan melalui situs internal dan eksternal Perseroan, penayangan slide tata nilai di setiap kegiatan pelatihan ataupun rapat, pemasangan banner di tempat-tempat strategis di Perseroan.

BAGAN TUJUAN IMPLEMENTASI TATA NILAI JSMR



Beberapa program yang telah dilakukan antara lain:

1. Kewajiban pencantuman Tata Nilai Perseroan dalam dokumen pengadaan barang/jasa di lingkungan Perseroan dan pada saat dilakukannya *aanwijzing* (rapat penjelasan).
2. Dilakukannya survey online Visi, Misi dan Tata Nilai Perseroan pada seluruh unit kerja dan Cabang. Evaluasi mencakup evaluasi pemahaman terhadap Visi, Misi dan Tata Nilai serta evaluasi terhadap tingkat efektivitas sosialisasi Visi, Misi dan Tata nilai.
3. Dilakukannya penjabaran Visi, Misi dan Tata Nilai sampai dengan tingkat operasional oleh konsultan. Sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direksi No. 08/KPTS/2016 tentang Penjabaran Tata Nilai PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

4. Sosialisasi dan survey pemahaman dan efektifitas sosialisasi Keputusan Direksi No. 173/KPTS/2014 tanggal 15 Oktober 2014 perihal pedoman sosialisasi dan evaluasi Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan pada Oktober 2014.

Program peluncuran awal Tata Nilai JSMR telah dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2014 sesuai dengan SK Direksi No. 173/KPTS/2014, baik secara langsung maupun berjenjang (*cascading*), namun belum diukur efektifitasnya. Dengan bantuan Konsultan Manajemen, maka tanggal 06-22 Maret 2015 telah dilakukan *Culture Assessment* (Pengukuran Budaya) secara online yang ditujukan kepada seluruh responden Jasa Marga, dengan mempertimbangkan upaya sosialisasi dan internalisasi yang telah dilakukan oleh Jasa Marga beberapa waktu yang lalu.

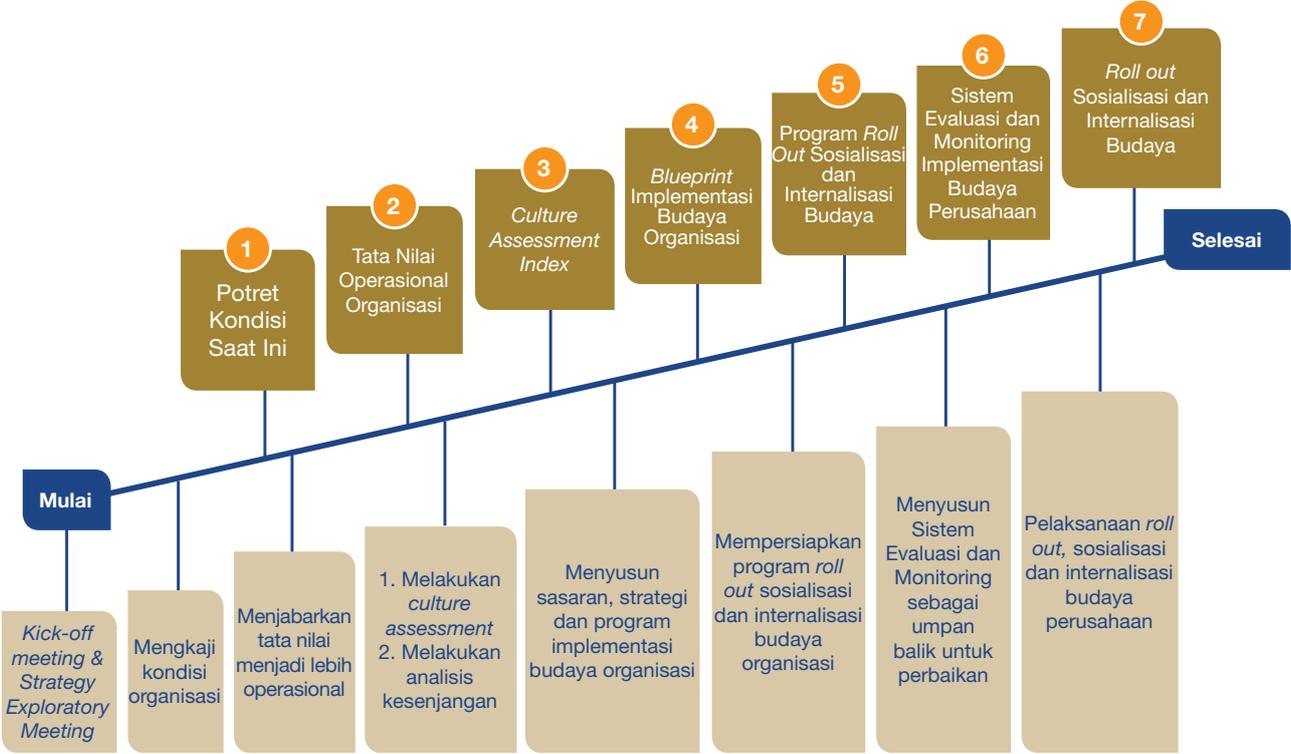
Culture Assessment (Pengukuran Budaya) JSMR lebih dititikberatkan kepada:

1. Pengenalan (*awareness*).
2. Pemahaman (*understanding*).
3. Indeks Budaya.

Selanjutnya *Culture Assessment* (Pengukuran Budaya)

JSMR akan dilakukan secara berkala setiap tahun untuk mengevaluasi dan memantau perkembangan implementasi Tata Nilai JSMR. Dengan demikian semua kegiatan terkait dengan implementasi Tata Nilai JSMR dapat terukur efektifitasnya dan dapat dipahami kelebihan serta kekurangannya sehingga terkelola dengan baik.

BAGAN TAHAPAN IMPLEMENTASI BUDAYA



Dengan mempertimbangkan hasil *Culture Assessment* (Pengukuran Budaya) JSMR, Perseroan merancang program peluncuran ulang penjabaran JSMR yang bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat dalam menerapkan JSMR lebih lanjut dengan memperhatikan upaya sosialisasi dan internalisasi yang telah dilakukan dinilai cukup berhasil, berdasarkan klasifikasi kriteria sebagai berikut:

TABEL KLASIFIKASI KRITERIA HASIL SURVEY BERDASARKAN NILAI HASIL SURVEY

Nilai	Kriteria
<50	Buruk
50-80	Cukup
>80	Efektif

Hasil Pengukuran Tingkat Pemahaman Visi, Misi dan Tata Nilai Perseroan Tahun 2016 dan 2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL HASIL PENGUKURAN TINGKAT PEMAHAMAN VISI, MISI DAN TATA NILAI PERSEROAN TAHUN 2016 DAN 2017

Responden	Hasil (%)	
	2016	2017
Internal Perseroan	89,25 (Efektif)	95,9 (Efektif)
External Perseroan	76,00 (Cukup)	99,3 (Efektif)

PENYELARASAN TATA NILAI PADA TAHUN 2018

Dalam rangka mendukung transformasi dan menyelaraskan Tata Nilai Perseroan yang sesuai dengan model operasi dan strategi bisnis Perseroan, maka Perseroan telah melakukan penyelarasan Tata Nilai yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Perseroan. Berdasarkan Keputusan Direksi No. 06/KPTS/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Tata Nilai Perusahaan, Tata Nilai Jasa Marga terdiri dari 4 (empat) nilai pokok yang diakui dan dikembangkan bersama, serta digunakan sebagai landasan Insan Jasa Marga dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Tata Nilai Jasa Marga beserta Makna dan Perilaku Utamanya adalah sebagai berikut:

TABEL TATA NILAI JASA MARGA SEJAK 23 JANUARI 2018

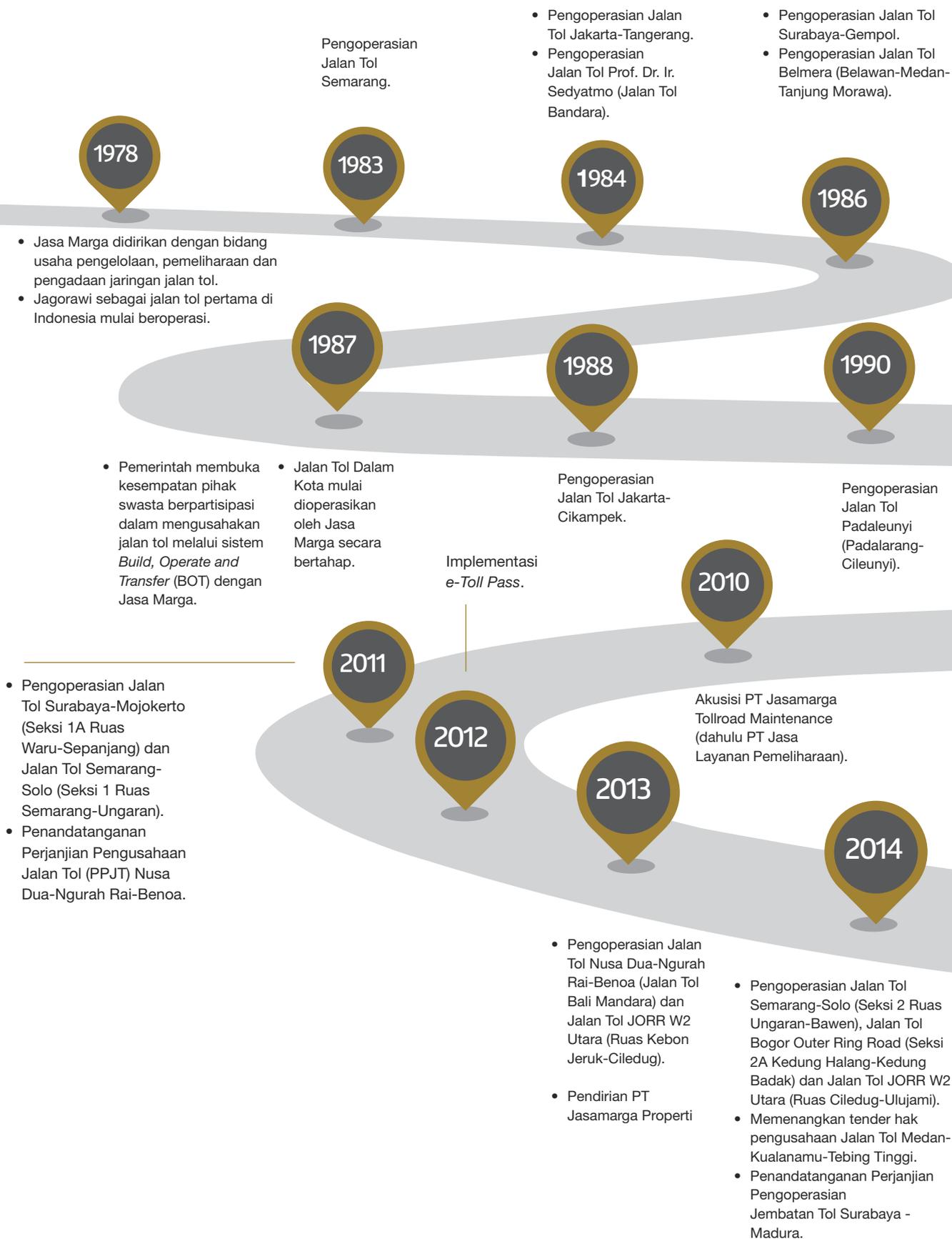
Tata Nilai	Makna Nilai	Perilaku Utama
Agility	Gesit dan mampu menghadapi perubahan serta berkembang secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.	<ul style="list-style-type: none"> Cepat, lincah dan adaptif. Gigih, tangguh, pantang menyerah.
Professionalism	Memiliki kompetensi terbaik dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan secara sistematis, dengan penuh semangat dan berorientasi ke depan.	<ul style="list-style-type: none"> Disiplin dan bekerja tuntas. Kreatif dan inovatif. Kerja sama sinergis.
Integrity	Konsistensi antara pikiran, perkataan dan tindakan berlandaskan kejujuran, kebenaran, keadilan serta taat pada aturan dan etika yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> Jujur dan beretika. Memenuhi komitmen.
Customer Focus	Memberikan pelayanan yang terbaik dan berkelanjutan kepada pelanggan di seluruh rantai proses bisnis sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan.	<ul style="list-style-type: none"> Peduli dan saling menghargai. Sigap dan proaktif. Memberikan solusi terbaik.



Interchange Gempol, Jalan Tol Gempol-Pasuruan, km 47.

JASA MARGA SELAYANG PANDANG

PERJALANAN PENTING JASA MARGA



Pengoperasian Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (Seksi S Ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung).

1991

Pengoperasian Jalan Tol Palikanci (Palimanan-Kanci).

1998

Pendirian PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta.

2002

Pengoperasian Jalan Tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang).

2003

Fungsi Otorisator dikembalikan kepada Pemerintah (Departemen Pekerjaan Umum c.q. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

2004

2009

2008

2007

2006

- Pengoperasian Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (Seksi 1 Ruas Sentul Selatan-Kedung Halang).
- Implementasi e-Toll Card.
- Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Cengkareng-Kunciran.
- Akuisisi Jalan Tol Surabaya - Mojokerto.

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Kunciran-Serpong.

- Perubahan Logo Jasa Marga yang Menggambarkan Modernisasi dan Transformasi Perseroan.
- Jasa Marga menjadi perusahaan terbuka melalui *Initial Public Offering* (IPO) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.
- Jalan tol JORR terintegrasi dari Ulujami-Cilincing.

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Bogor Outer Ring Road, PPJT Semarang-Solo, PPJT Gempol-Pasuruan, PPJT Gempol-Pandaan, PPJT JORR W2 Utara, PPJT Surabaya-Mojokerto dan 13 ruas jalan tol yang telah dioperasikan oleh Perseroan.

2015

2016

2017

- Akuisisi Jalan Tol Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Cinere-Serpong.
- Pengoperasian Jalan Tol Gempol-Pandaan
- Pendirian PT Jasamarga Tollroad Operator (dahulu PT Jasa Layanan Operasi).

- Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 4 Ruas Krian-Mojokerto.
- Memenangkan tender hak pengusahaan Jalan Tol Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung, Pandaan-Malang dan Jakarta-Cikampek II Elevated.
- Integrasi sistem transaksi Jalan Tol Jakarta-Brebes.

- Pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Bawen-Salatiga.
- Pengoperasian Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Ruas Kualanamu-Sei Rampah.
- Pengoperasian Jalan Tol Gempol-Pasuruan Ruas Gempol-Rembang.
- Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Ruas Sepanjang-Krian.
- Memenangkan tender hak pengusahaan jalan tol dan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Probolinggo-Banyuwangi dan Jakarta-Cikampek II Selatan yang merupakan proyek inisiasi Perseroan.

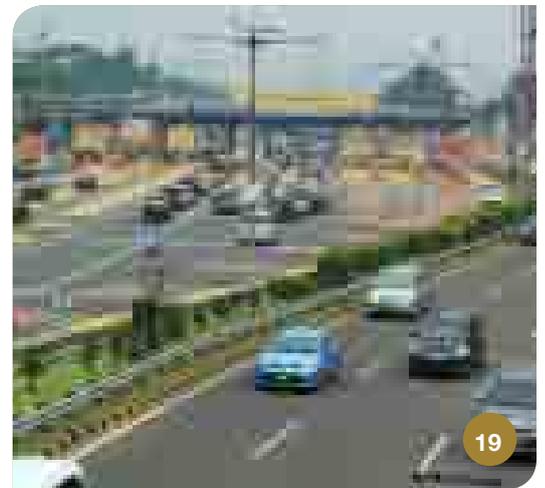
- Pengoperasian jalan tol dengan transaksi non tunai sejalan dengan program Pemerintah GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) 100%.
- Emisi Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 yang merupakan obligasi di level proyek/Anak Perusahaan Jasa Marga PT Marga Lingkar Jakarta (Project Bond) untuk Ruas Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami).
- Sekuritisasi Pendapatan Tol Jagorawi melalui Penawaran Umum Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset (EBA) Mandiri JSMR01.
- Emisi Obligasi Global Rupiah (IDR Global Bond) dengan nama Komodo Bond di London Stock Exchange.

TONGGAK SEJARAH JASA MARGA





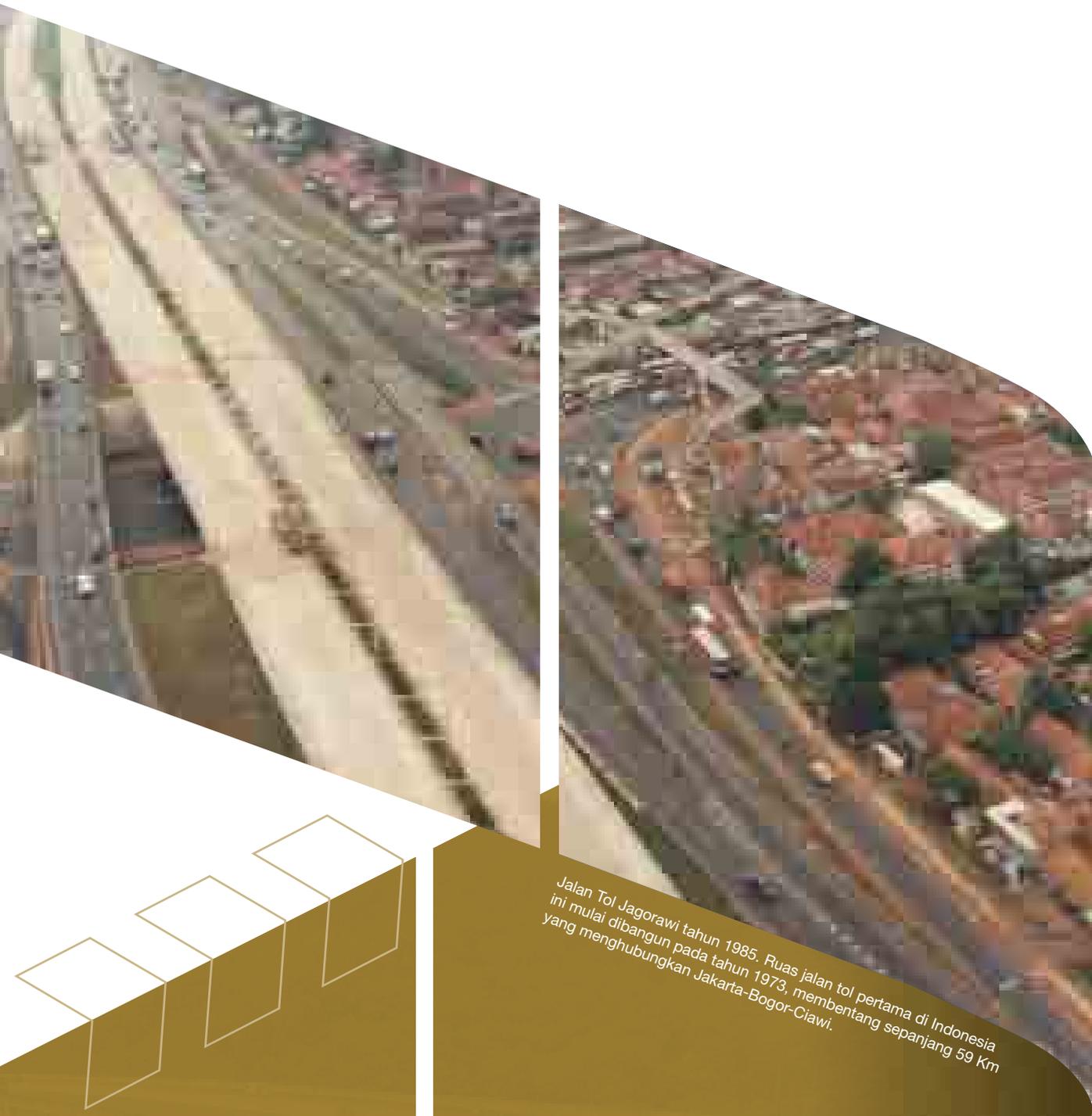
- 1 **1978**
 - Jasa Marga didirikan dengan bidang usaha pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol.
 - Jagorawi sebagai jalan tol pertama di Indonesia mulai beroperasi.
- 2 **1983** Pengoperasian Jalan Tol Semarang
- 3 **1984** Pengoperasian Jalan Tol Jakarta-Tangerang
- 4 **1987** Pengoperasian jalan tol dalam kota secara bertahap
- 5 **1988** Pengoperasian Jalan Tol Jakarta-Cikampek
- 6 **1990** Pengoperasian Jalan Tol Padaleunyi
- 7 **1991** Pengoperasian Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road
- 8 **1998** Pengoperasian Jalan Tol Palikanci
- 9 **2002** Pendirian PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
- 10 **2003** Pengoperasian Jalan Tol Cipularang
- 11 **2004** Fungsi Otorisator dikembalikan kepada Pemerintah
- 12 **2006** PPJT Bogor Outer Ring Road
- 13 **2007** Integrasi JORR Ulujami-Cilincing





- 14 **2007** Initial Public Offering (IPO) dan Pencatatan harga saham di Bursa Efek Indonesia
- 15 **2008** PPJT Kunciran-Serpong
- 16 **2009** Pengoperasian Jalan Tol Bogor Outer Ring Road
- 17 **2010** Akuisisi Jasa Layanan Pemeliharaan
- 18 **2011** Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto
- 19 **2012** Implementasi e-Toll Pass
- 20 **2013** Pengoperasian Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa
- 21 **2014** Tender hak pengusahaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi
- 22 **2015** Akuisisi Jalan Tol Cinere-Serpong
- 23 **2016** Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto
- 24 **2017** Pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo
- 25 **2017** Seremoni pencatatan Komodo Bond

RIWAYAT SINGKAT JASA MARGA



Jalan Tol Jagorawi tahun 1985. Ruas jalan tol pertama di Indonesia ini mulai dibangun pada tahun 1973, membentang sepanjang 59 km yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi.

DASAR PENDIRIAN

Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang andal. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 04 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol, serta ketentuan-ketentuan pengusahasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 04 tahun 1978 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/KMK.06/1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga tanggal 27 Februari 1978).

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 01 Maret 1978, dengan nama, "PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation)", yang kemudian diubah berdasarkan Akta No. 187 tanggal 19 Mei 1981 dan nama Perseroan diubah menjadi "PT Jasa Marga (Persero)", keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH., pada saat itu Notaris di Jakarta.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 September 2007 tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham, perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan perubahan nama Perseroan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation) Tbk. atau PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Keputusan mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar tersebut dinyatakan dalam Akta No. 27 tanggal 12 September 2007 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. W7-10487 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21 September 2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir telah disesuaikan dalam rangka standarisasi BUMN Terbuka dan pemenuhan tata kelola di bidang peraturan Pasar Modal sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98 tanggal 28 April 2017 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, berikut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0131742 tanggal 28 April 2017 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-055628.AH.01.11TAHUN 2017 tanggal 28 April 2017 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan tertanggal 15 Maret 2017 No. 20 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 23 Maret 2017 No. 37, yang keduanya dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tanggal 24 Maret 2017 No. AHU-AH.01.03-0121417 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040235. AH.01.11TAHUN 2017 tanggal 24 April 2017.

PERUBAHAN NAMA PERSEROAN

Selain perubahan nama terkait perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka pada 12 November 2007, Perseroan tidak pernah melakukan perubahan nama.

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang perusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol.
2. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatot) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatot untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya.

Kegiatan usaha tersebut dilakukan Perseroan melalui proses merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, selain melakukan kegiatan usaha utama, Perseroan juga melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu:

1. Bidang pengembangan properti di wilayah yang berdekatan dengan koridor jalan tol.
2. Bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda-moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol.
3. Bidang jasa dan perdagangan untuk layanan konstruksi, pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol.

PROSES BISNIS JASA MARGA

Pada tahun 2016, Jasa Marga melakukan review sistem kerja yang disebut dengan JM WAY. Jasa Marga Integrated Management System (JM WAY) terbentuk dari identifikasi dan integrasi beberapa proses. Integrasi dari proses-proses tersebut termasuk interaksi di antara proses-proses yang digambarkan dalam suatu bagan alir Sistem Kerja. Sistem Kerja Jasa Marga adalah gambaran secara menyeluruh proses-proses dalam organisasi yang merupakan bagaimana pekerjaan organisasi dilaksanakan. Sistem kerja melibatkan tenaga kerja, pemasok dan mitra kunci, kontraktor, dan komponen rantai pasokan lainnya yang dibutuhkan untuk memproduksi dan menyampaikan produk, layanan, serta proses bisnis dan pendukung. Sistem kerja terdiri dari proses kerja internal dan sumber daya eksternal yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memproduksi, menyampaikannya kepada pelanggan, dan agar sukses di pasar.

Sistem Kerja tersebut mengintegrasikan beberapa Sistem Manajemen yang diimplementasikan Jasa Marga meliputi persyaratan Standar Internasional ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/DIS 45001:2016, dan Persyaratan *BALDRIGE CRITERIA* 2015-2016. Proses-proses tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis dan status pentingnya proses dilihat dari hubungannya terhadap realisasi produk atau proses produksi. Klasifikasi proses-proses tersebut dikelompokkan menjadi empat kategori proses, yaitu: Proses Inti (*Core Process*), Proses Pendukung (*Support Process*), Proses Perencanaan (*Planning Process*), dan Proses Tinjauan & Perbaikan (*Review & Improvement Process*).

1. Proses Inti (Core Process)

Proses Inti adalah proses yang dilaksanakan atas dasar dorongan permintaan Pelanggan dan *Stakeholders* lainnya berupa produk & layanan, sehingga persyaratan tersebut dapat dipenuhi dalam produk yang ditawarkan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Proses yang terdapat pada Proses Inti meliputi: Pengelolaan Layanan Transaksi, Pengelolaan Layanan Lalu Lintas, Pengelolaan Layanan Konstruksi, Pengembangan Usaha Jalan Tol, dan Pengembangan Usaha Lain.

2. Proses Pendukung (Support Process)

Proses Pendukung adalah proses-proses yang muncul atas dasar kebutuhan karena adanya proses inti atau proses perencanaan yang hasilnya secara langsung maupun tidak langsung mendukung proses inti. Dilihat dari sifat proses, proses pendukung juga merupakan proses penting di Jasa Marga sebab tanpa proses ini pelaksanaan proses inti tidak akan bisa dilaksanakan. Proses yang terdapat pada Proses Pendukung meliputi: Pengelolaan SDM, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Administrasi Perusahaan, Pengelolaan Logistik, dan Manajemen Bisnis.

3. Proses Perencanaan (Planning Process)

Proses Perencanaan adalah proses-proses yang dilaksanakan atas dasar rencana bisnis dan sasaran Jasa Marga. Proses ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan bisnis, baik internal maupun eksternal, sehingga konsistensi mutu produk dan kinerja organisasi tetap bisa terpelihara. Proses yang terdapat pada Proses Perencanaan meliputi: Perencanaan Perusahaan, Perencanaan dan Pengembangan Teknik Jalan Tol, dan Manajemen Risiko.

4. Proses Tinjauan dan Perbaikan (Review & Improvement Process)

Proses Tinjauan dan Perbaikan adalah proses-proses yang dilaksanakan dengan melihat hasil dari berbagai elemen Sistem Kerja yang memerlukan adanya perbaikan/penyempurnaan. Berkaitan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas Jasa Marga secara berkesinambungan. Secara spesifik aktivitas yang terdapat pada proses ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan dan konsistensi terhadap implementasi JM WAY. Proses yang terdapat pada Proses Tinjauan dan Perbaikan meliputi: Pengelolaan Audit, Pengukuran Kinerja Manajemen, Pengelolaan IMS, dan Pengelolaan Inovasi.

PERKEMBANGAN INDUSTRI JALAN TOL DI INDONESIA

1978

Sejarah perkembangan industri jalan tol di Indonesia dimulai ketika pada tahun 1978, Jalan Tol Jagorawi resmi dioperasikan untuk pertama kalinya. Pembangunan Jalan Tol Jagorawi, yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi, dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri, yang diserahkan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai penyertaan modal.

1980

Pada akhir dasawarsa tahun 1980-an Pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme Build, Operate and Transfer (BOT).

2004

Penerbitan Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang menggantikan Undang Undang No. 13 tahun 1980 serta terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol, terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol di antaranya adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia, serta penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan penyesuaian setiap dua tahun berdasarkan angka inflasi.

PERKEMBANGAN BISNIS JASA MARGA

Pada awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987 Perseroan adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Jasa Marga. Sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh Perseroan, Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di Tanah Air yang mulai dioperasikan sejak tahun 1978.

Pada dasawarsa tahun 1990-an Perseroan lebih berperan sebagai lembaga otoritas yang memfasilitasi investor-investor swasta yang sebagian besar ternyata gagal mewujudkan proyeknya. Beberapa jalan tol yang diambil alih Perseroan antara lain adalah JORR (Jakarta Outer Ring Road) dan Cipularang.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 yang mengatur tentang jalan tol, peran otoritas dikembalikan dari Perseroan kepada Pemerintah. Sebagai konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang akan mendapatkan ijin penyelenggaraan tol dari Pemerintah.

Pembangunan dan pengoperasian jalan tol sejak saat itu didasarkan kepada konsep investasi dimana Perseroan sebagai investor akan berinvestasi pada jalan-jalan tol yang mempunyai tingkat kelayakan pengembalian secara finansial sesuai dengan masa konsesi. Proses untuk mendapatkan konsesi jalan tol baru juga harus melalui pembentukan entitas bisnis usaha tersendiri. Perolehan konsesi jalan tol didapatkan melalui beberapa cara, yaitu dengan berpartisipasi dalam tender ruas jalan tol yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun akuisisi dengan menambah kepemilikan saham pada ruas-ruas tol potensial. Selain itu, Perseroan juga dapat mengajukan kepada Pemerintah untuk membangun suatu ruas jalan tol yang tidak terdapat dalam rencana Pemerintah, yang merupakan skema yang disebut *unsolicited*.

Untuk mendukung ekspansi dan pengembangannya, Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) sejak Pemerintah melepas 30% sahamnya kepada masyarakat/publik pada tanggal 12 November 2007.



Management Trainee PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tengah mempelajari proyek Jalan Tol Kunciran-Cengkareng.

PERKEMBANGAN BISNIS JALAN TOL

Melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2006, 13 (tiga belas) ruas jalan tol Perseroan yang sudah beroperasi saat itu mempunyai masa konsesi selama 40 tahun berlaku efektif sejak 01 Januari 2005, dengan pengecualian PPJT JORR Seksi S yang pada tahun 2013, Jasa Marga telah ditunjuk sebagai operator sementara berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 80.1/KPTS/M/2013 tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR S). Dalam perkembangannya, Perseroan terus melakukan upaya untuk menambah kepemilikan konsesi jalan tol baru. Sejak tahun 2006, Perseroan telah menandatangani 6 (enam) perjanjian

pengusahaan jalan tol (PPJT) yaitu Jalan Tol Bogor Outer Ring Road yang konsesinya dipegang oleh PT Marga Sarana Jabar, Jalan Tol Semarang-Solo oleh PT Trans Marga Jateng, Jalan Tol Gempol-Pasuruan oleh PT Jasamarga Gempol Pasuruan, PPJT Gempol-Pandaan oleh PT Jasamarga Pandaan Tol, Jalan Tol JORR W2 Utara oleh PT Marga Lingkar Jakarta, dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto oleh PT Jasamarga Surabaya Mojokerto.

Selain terus berupaya menambah jumlah konsesi jalan tol baru, Perseroan juga menambah porsi kepemilikan di Anak Perusahaan pemegang konsesi jalan tol. Tahun 2009, Perseroan meningkatkan penyertaan kepemilikan saham dan menjadi pemegang saham mayoritas pada

PT Marga Kunciran Cengkareng, pemegang konsesi Jalan Tol Cengkareng-Kunciran; PT Marga Trans Nusantara, pemegang konsesi Jalan Tol Kunciran-Serpong; dan PT Marga Nujyasumo Agung, pemegang konsesi Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang mempunyai masa konsesi 35 tahun. Tahun 2011, Perseroan meningkatkan penyertaan kepemilikan saham hingga menjadi pemegang saham mayoritas dengan melakukan pembelian saham pemegang saham eksisting pada PT Marga Bumi Adhikaraya sebagai pemilik konsesi Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan masa konsesi 35 tahun. Selain itu, bersama konsorsium 4 (empat) BUMN, BUMD dan Pemerintah Daerah, Perseroan ditunjuk sebagai pemrakarsa proyek Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa di Bali dengan masa konsesi 45 tahun.

Pada tahun 2014, bersama 3 (tiga) konsorsium BUMN, Perseroan memenangkan tender pengusahaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, sehingga sampai dengan akhir tahun 2014 melalui Anak Perusahaan yang dibentuk Perseroan dengan beberapa partner usaha dimana Perseroan mempunyai kepemilikan mayoritas lebih dari 51%, Perseroan memiliki tambahan 10 (sepuluh) ruas jalan tol baru dengan panjang 273 km. Kemudian pada tahun 2015, Perseroan mengakuisisi Jalan Tol Solo-Ngawi, Jalan Tol Ngawi-Kertosono, dan Jalan Tol Cinere-Serpong.

Tahun 2016, Perseroan telah memenangkan tender Jalan Tol Semarang-Batang (75 km), Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99,35 km), Jalan Tol Manado-Bitung (39,9 km), Jalan Tol Pandaan-Malang (37,6 km), dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (36,4 km) yang merupakan proyek inisiasi Perseroan. Sampai dengan akhir tahun 2016, Perseroan telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 593 km, termasuk ruas-ruas baru yang dioperasikan secara bertahap yaitu Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Ruas Sentul Selatan-Kedung Badak (5,8 km); Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Semarang-Bawen (23,1 km); serta Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Ruas Waru-Sepanjang (2,3 km), dan Ruas Krian-Mojokerto (18,5 km); dan mengoperasikan secara penuh Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 km), Jalan Tol JORR W2 Utara (7,7 km), dan Jalan Tol Gempol-Pandaan (13,61 km).

Sedangkan pada tahun 2017, Jasa Marga mengoperasikan jalan tol sepanjang 88,59 km, yaitu Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Bawen-Salatiga (17,5 km), Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Ruas Kualanamu-Sei Rampah (41,69 km), Jalan Tol Gempol-Pasuruan Ruas Gempol-Rembang (13,9 km), dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi Sepanjang-Krian (15,5 km). Selain itu, pada tahun 2017, Jasa Marga telah memenangkan tender Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (172,9 km) dan Jakarta-Cikampek II Selatan (64 km) yang merupakan proyek inisiasi Perseroan.

Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2017, melalui 8 Cabang dan 22 Anak Perusahaan di bidang usaha jalan tol (APJT-Anak Perusahaan Jalan Tol), Perseroan adalah pemegang hak konsesi untuk 33 ruas jalan tol sepanjang 1.497 km, yang 21 ruas di antaranya dengan panjang 681 km telah beroperasi (baik seluruhnya atau sebagian), sehingga Perseroan masih menjadi pemimpin pasar dengan menguasai pangsa pasar sebesar 62% dalam panjang jalan tol beroperasi di Indonesia.

PERKEMBANGAN USAHA LAIN

Selain bergerak dalam bisnis jalan tol, Perseroan juga melakukan beberapa kegiatan usaha lain untuk mensinergikan dan memaksimalkan pengembangan aset-aset yang dimiliki Perseroan. Kegiatan usaha tersebut diperkuat dengan mendirikan tiga entitas anak perusahaan yaitu PT Jasamarga Tollroad Maintenance (dahulu PT Jasa Layanan Pemeliharaan/JLP, sebelumnya PT Sarana Marga Utama), yang didirikan pada tahun 1988 dan diakuisisi sejak tahun 2010 bergerak dalam bidang jasa konstruksi, perdagangan dan persewaan kendaraan; PT Jasamarga Properti yang didirikan pada tahun 2013 dan bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa terkait properti; serta PT Jasamarga Tollroad Operator (dahulu PT Jasa Layanan Operasi) yang didirikan pada tahun 2015 dan bergerak dalam bidang usaha layanan pengoperasian Jalan Tol.

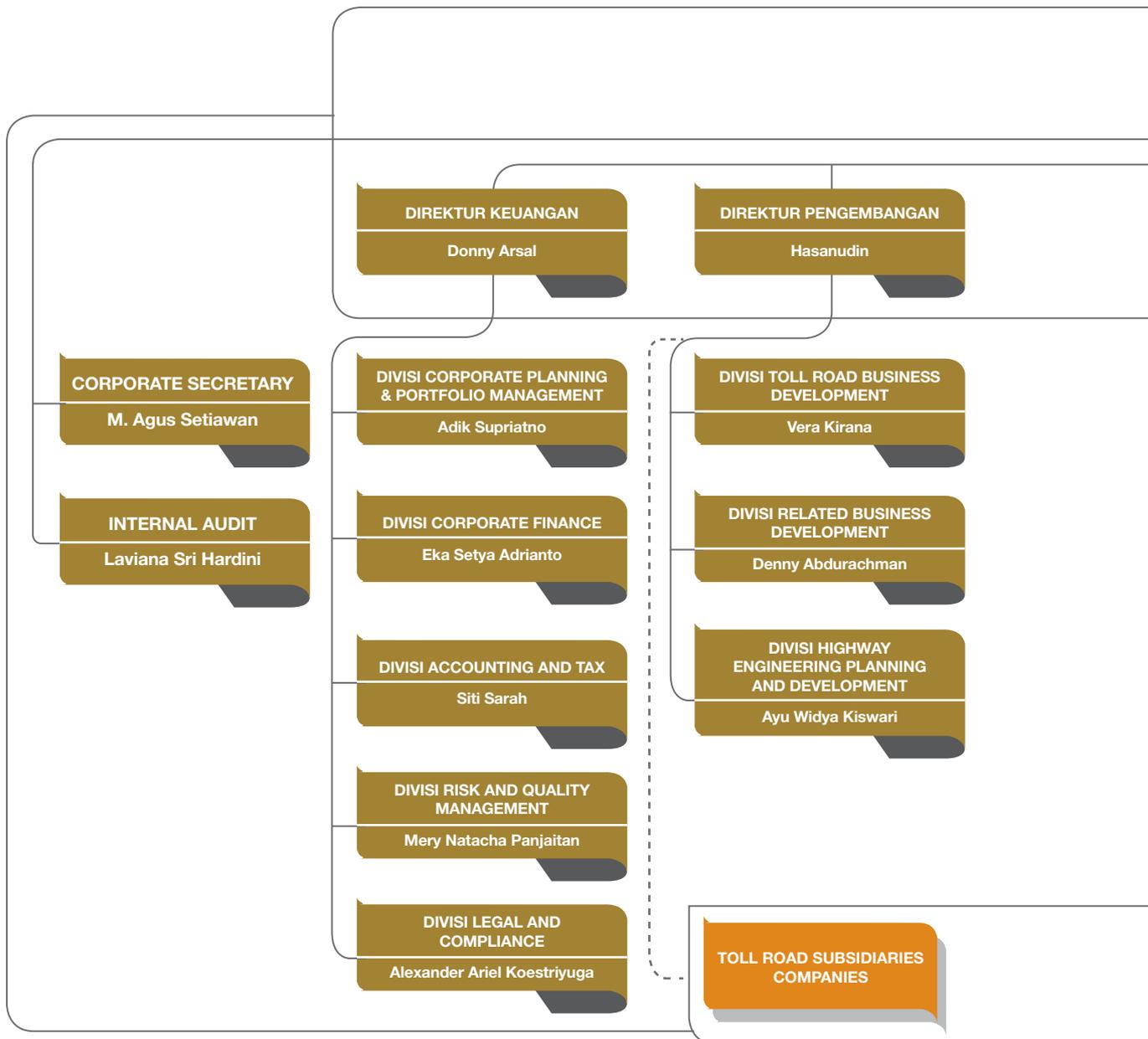
Berdasarkan jenis usaha yang dilakukan maka pendapatan usaha Perseroan berasal dari transaksi kendaraan yang melewati jalan tol (pendapatan tol) dan pendapatan usaha lain yang terdiri dari sewa lahan, pendapatan iklan, tempat peristirahatan dan jasa pengoperasian jalan tol pihak lain serta jasa pemeliharaan.

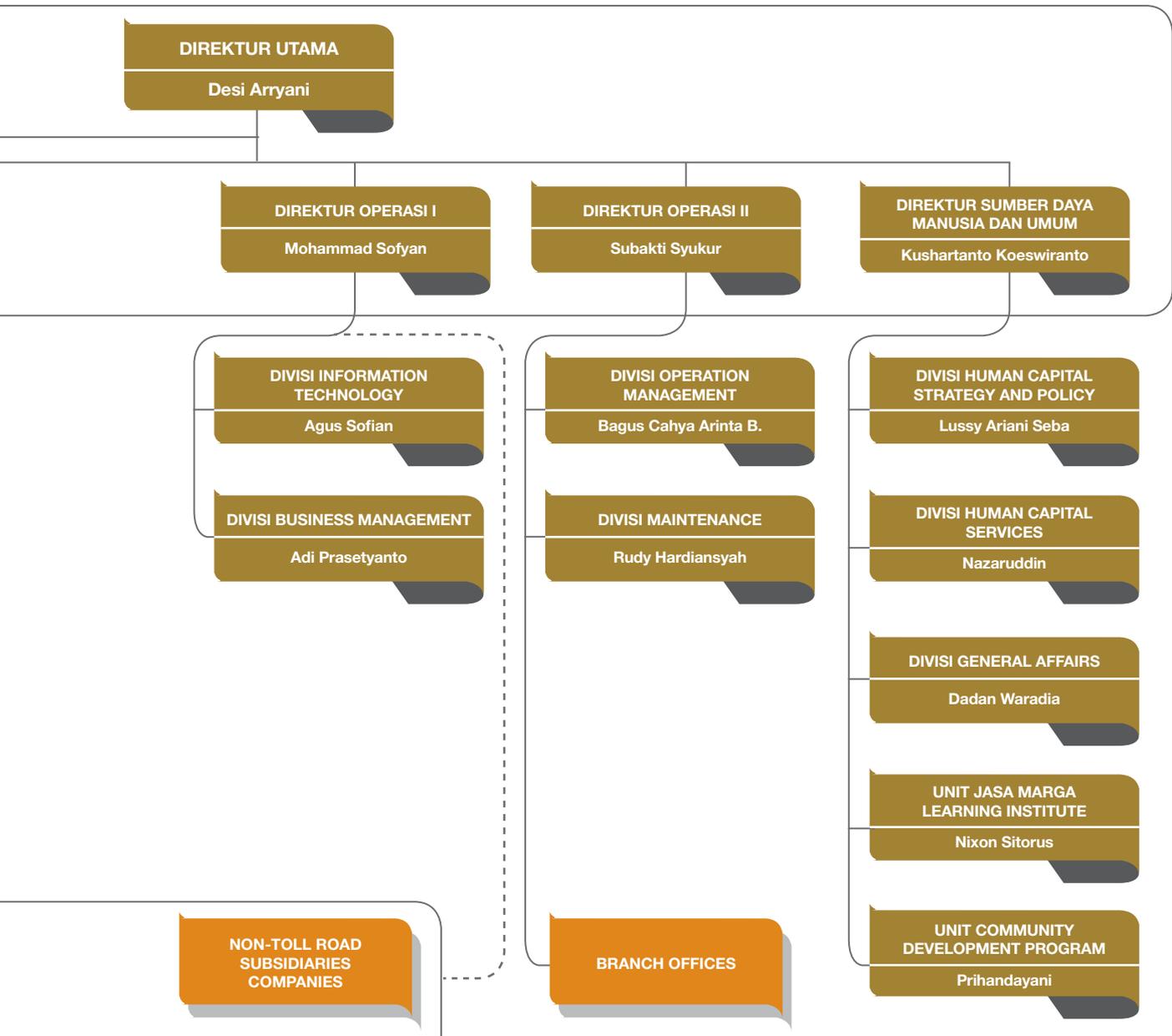
STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta rencana strategis bisnis Perseroan dan sesuai dengan kebijakan strategis di bidang modal insani yang berbasis pada kompetensi, Perseroan memerlukan organisasi yang merupakan pengelompokan fungsi dengan pendekatan hard dan soft competencies untuk menunjang efektifitas dan kinerja organisasi.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI JASA MARGA

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 194/KPTS/2017 tanggal 29 Desember 2017





Perseroan memiliki 5 direktorat dimana setiap direktorat memiliki fungsi dan ruang lingkup kerja masing-masing.

DIREKTORAT PENGEMBANGAN

UNIT KERJA:

Divisi Toll Road Business Development; Divisi Related Business Development; dan Divisi Highway Engineering Planning and Development.

Fungsi dan Ruang Lingkup Kerja:

- Memastikan rencana strategis pengembangan usaha jalan tol dan bisnis lain serta perencanaan dan pengembangan teknik jalan tol.
- Mengkoordinir pengendalian Anak Perusahaan Jalan Tol dan Anak Perusahaan Usaha Lain terutama bidang eksekusi investasi pengembangan bisnis jalan tol tahap persiapan dan konstruksi dan usaha lain tahap perencanaan, pengembangan dan pengendalian investasi.

DIREKTORAT OPERASI I

UNIT KERJA:

Divisi Information and Technology dan Divisi Business Management.

Fungsi dan Ruang Lingkup Kerja:

- Memastikan tersedianya rencana strategis bidang teknologi dan komunikasi perusahaan dan mengarahkan, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pengoperasian Jalan Tol Anak Perusahaan.
- Mengoordinasikan pengendalian Anak Perusahaan Jalan Tol tahap operasi dan konstruksi-operasi serta pengendalian Usaha Lain dan Anak Perusahaan.

DIREKTORAT OPERASI II

UNIT KERJA:

Divisi Operation Management, Divisi Maintenance dan Cabang.

Fungsi dan Ruang Lingkup Kerja:

- Memastikan tersedianya rencana strategis bidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dan mengarahkan, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang

pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilaksanakan oleh Cabang.

- Mengarahkan pengelolaan Anak Perusahaan Jalan Tol di bidang operasi dan pemeliharaan.

DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

UNIT KERJA:

Divisi Human Capital Strategy and Policy, Divisi Human Capital Services, Unit Jasa Marga Learning Institute, Unit Community Development Program dan Divisi General Affairs.

Fungsi dan Ruang Lingkup Kerja:

- Memastikan tersedianya rencana strategis bidang pengembangan dan pengelolaan bidang human capital, bidang umum dan program kemitraan dan bina lingkungan.
- Mengarahkan pengelolaan Anak Perusahaan di bidang pengelolaan human capital dan umum.

DIREKTORAT KEUANGAN

UNIT KERJA:

Divisi Corporate Planning & Portfolio Management, Divisi Corporate Finance, Divisi Accounting and Tax, Divisi Risk and Quality Management dan Divisi Legal and Compliance.

Fungsi dan Ruang Lingkup Kerja:

- Memastikan tersedianya rencana strategis bidang keuangan dan investasi, bidang manajemen risiko dan mutu, serta bidang hukum dan kepatuhan Perusahaan untuk memastikan terjadinya keselarasan antara strategi bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dengan kegiatan operasional Perusahaan dan Anak Perusahaan sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan.
- Memberikan arahan pengelolaan Anak Perusahaan di bidang keuangan, hukum dan kepatuhan dan risiko, mutu, K3 dan lingkungan serta kinerja ekselen.

Selain unit-unit kerja di atas, Perseroan juga memiliki beberapa unit kerja yang langsung dikendalikan oleh Direktur Utama yaitu Unit Internal Audit dan Corporate Secretary. Sedangkan Toll Road Subsidiaries dan Non Toll Road Subsidiaries berada di bawah kendali Direksi Perseroan.

STRUKTUR KORPORASI JASA MARGA

STRUKTUR KELOMPOK USAHA JASA MARGA

BAGAN STRUKTUR KELOMPOK USAHA JASA MARGA



Catatan:

* Investasi di PT Trans Marga Jateng (TMJ) dicatat sebagai investasi pada Ventura Bersama, sehingga Perseroan tidak mengkonsolidasi laporan keuangan TMJ ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

ENTITAS ANAK

1. PT JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA (JLJ)



JLJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang bergerak dalam bidang jasa pengoperasian jalan tol. Pendapatan utama JLJ diperoleh dari pengoperasian, pemeliharaan dan pengamanan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR). JLJ didirikan pada tanggal 22 Desember 2000.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 99%
Inkopkar Jasa Marga: 0,1%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road

Status*

Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Ricky Distawardhana
Direktur Keuangan dan Umum: Satria Ganefanto
Komisaris Utama:
Kushartanto Koeswiranto
Komisaris: Siswadi
Komisaris: R. Kristianto

Total Aset
(Rp miliar)

2. PT MARGA SARANA JABAR (MSJ)



MSJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan perusahaan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi 1 sepanjang 3,8 km dioperasikan sejak tanggal 23 November 2009 dan Seksi 2A sepanjang 2 km dioperasikan sejak 04 Juni 2014. MSJ didirikan pada tanggal 11 Mei 2007.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 55%
PT CMNP Tbk: 30%
PT Jasa Sarana: 15%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road

Status*

Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Hendro Atmodjo
Direktur Keuangan: Muhdor Nurohman
Direktur Teknik & Operasi: Tita Paulina
Komisaris Utama: Sari Putra Joseph
Komisaris: Roy Ardian Darwis
Komisaris: Mulyadi

Total Aset
(Rp miliar)

3. PT TRANS MARGA JATENG (TMJ)



TMJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan Perusahaan Jalan Tol Semarang-Solo yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Semarang-Ungaran (10,8 km) beroperasi sejak 12 November 2011, Ruas Ungaran-Bawen (12,3 km) beroperasi sejak 04 April 2014 dan Ruas Bawen-Salatiga (17,6 km) beroperasi sejak 15 September 2017. TMJ didirikan pada tanggal 07 Juli 2007.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 58,91%
PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah: 1,09%
PT Astratel Nusantara: 40,00%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Solo

Status*

Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Yudhi Krisyunoro
Direktur Administrasi dan Keuangan: Novianto Dwiwibowo
Direktur Teknik: Ali Zainal Abidin
Komisaris Utama: Irawan Santoso
Komisaris: Sunaryo
Komisaris: Sutomo

Catatan:

Investasi di TMJ dicatat sebagai investasi pada Ventura Bersama, sehingga Perseroan tidak mengkonsolidasi laporan keuangan TMJ ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Total Aset
(Rp miliar)

4. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM)



JSM merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JSM didirikan pada tanggal 19 Agustus 1994. Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Ruas Waru-Sepanjang (2,3 km) beroperasi sejak 05 September 2011 dan Ruas Sepanjang-Krian (15,5 km) beroperasi sejak 19 Desember 2017.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 55%
Moeladi Grup: 25%
PT Wijaya Karya: 20%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto

Status*

Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Budi Pramono
Direktur Keuangan: Syafaruddin A.R.
Direktur Teknik dan Operasional: Ari Wibowo
Direktur Administrasi dan Umum: Kamil Rusnandar
Komisaris Utama: Agung Yunanto
Komisaris: Amien Moeladi
Komisaris: Muh Najib Fauzan

Total Aset (Rp miliar)



5. PT JASAMARGA BALI TOL (JBT)



JBT merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JBT didirikan pada tanggal 22 Agustus 2011. Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa sepanjang 10 km diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 24 September 2013.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 55%
PT Angkasa Pura I : 8%
PT Pelindo III: 17,58%
PT Pengembangan Pariwisata Bali: 1%
PT Adhi Karya: 1%
PT Utama Karya: 1%
Pemerintah Provinsi Bali: 8,01%
Pemerintah Kabupaten Badung: 8,01%
PT Wijaya Karya: 0,40%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa

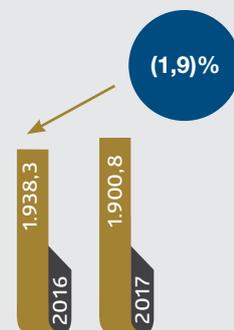
Status*

Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Enkky Sasono A. W.
Direktur Keuangan: Sukariyadi Rudi Meidiyanto
Direktur Teknik dan Operasional: Komisaris Utama: Subakti Syukur
Komisaris: I Gusti Putu Nuriatha
Komisaris: Kompyang Raka Swandika
Komisaris: Polana B. Pramesti
Komisaris: Agung Praseyto Guritno

Total Aset (Rp miliar)



6. PT MARGA LINGKAR JAKARTA (MLJ)



MLJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol JORR W2 Utara, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. MLJ didirikan pada tanggal 24 Agustus 2009. Jalan Tol JORR W2 Utara diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada tanggal 27 Desember 2013 dan beroperasi secara penuh sepanjang 7,7 km pada tanggal 22 Juli 2014.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 65%
PT Jakarta Marga Jaya: 35%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol JORR W2 Utara

Status*

Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: R. Kristianto
Direktur: Sri Nugroho
Komisaris Utama: Satya Heragandhi
Komisaris Independen: Yusid Toyib
Komisaris: Frans S. Sunito

Total Aset (Rp miliar)



7. PT JASAMARGA GEMPOL PASURUAN (JGP)



JGP (sebelumnya bernama PT Transmarga Jatim Pasuruan) merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pasuruan, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JGP didirikan pada tanggal 28 Juni 2010. Jalan Tol Gempol-Pasuruan Ruas Gempol-Rembang beroperasi sejak Maret 2017.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 98,81%
PT Jatim Prasarana Utama: 1,19%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pasuruan

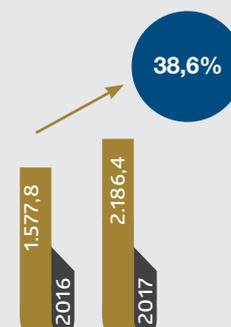
Status*

Beroperasi

Susunan Pengurus

Plt. Direktur Utama: Rahardjo
Direktur Teknik: -
Direktur Keuangan: Syachriani Atim
Komisaris Utama: Christantio Prihambodo
Komisaris: Imron
Komisaris: Moh. Noor Marzuki

Total Aset (Rp miliar)



8. PT JASAMARGA PANDAAN TOL (JPT)



JPT merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pandaan, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JPT didirikan pada tanggal 25 September 1996. Jalan Tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,61 km diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 18 Juni 2015.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 92,2%
Perusahaan Daerah Jalan Tol Kabupaten Pasuruan: 7,8%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pandaan

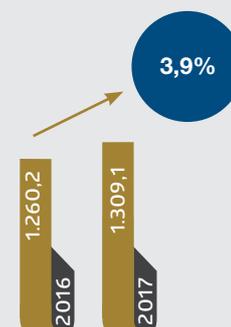
Status*

Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Sari Purnawarman
Direktur Teknik:
Direktur Keuangan: Bahrul Alam
Komisaris Utama: Muslim
Komisaris: Sarwono Oetomo

Total Aset (Rp miliar)



9. PT MARGA TRANS NUSANTARA (MTN)



MTN merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Serpong, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. MTN didirikan pada tanggal 14 Mei 2008. Sampai dengan 31 Desember 2017, Jalan Tol Kunciran-Serpong belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 60%
PT Astratel Nusantara: 30%
PT Transumata Arya Sejahtera: 10%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Serpong

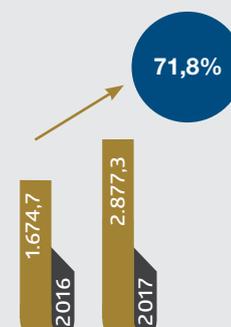
Status*

Belum Beroperasi

Susunan Pengurus

Presiden Direktur: Truly Nawangsasi
Direktur Operasional dan Teknik: Jinto Sirait
Presiden Komisaris: Irawan Santoso
Wakil Presiden Komisaris: Subagyo
Komisaris: Wiwiek Dianawati Santoso

Total Aset (Rp miliar)



10. PT JASAMARGA KUNCIRAN CENGKARENG (JKC)



JASAMARGA KUNCIRAN CENGKARENG
PENYELENGGARA JALAN TOL KUNCIRAN-CENGKARENG
Kelompok Usaha Jasa Marga

JKC merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JKC didirikan pada tanggal 14 Mei 2008. Sampai dengan 31 Desember 2017, Jalan Tol Kunciran-Cengkareng belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 76,24%
CMS WIL: 21,01%
PT Wijaya Karya: 2,10%
PT Nindya Karya: 0,28%
PT Istaka Karya: 0,37%

Bidang Usaha

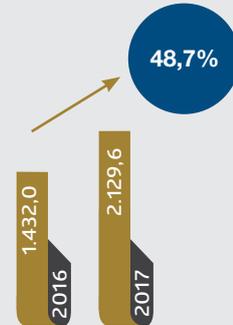
Pengusahaan Jalan Tol
Cengkareng-Kunciran

Status*

Belum Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Edwin Cahyadi
Direktur Teknik:
Mirza Nurul Handayani
Direktur Keuangan: Zaidi bin
Ibrahim
Komisaris Utama: Ibnu Purna
Muchtart
Komisaris: Mohamad bin Husin

Total Aset
(Rp miliar)

11. PT JASAMARGA KUALANAMU TOL (JKT)



**JASAMARGA
KUALANAMU TOL**

JKT merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JKT didirikan pada tanggal 25 November 2014. Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Ruas Kualanamu-Sei Rampah (41,69 km) beroperasi sejak Oktober 2017.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 55%
PT Pembangunan Perumahan: 15%
PT Waskita Toll Road: 30%

Bidang Usaha

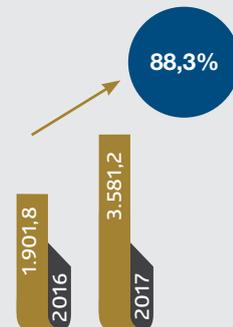
Pengusahaan Jalan Tol Medan-
Kualanamu-Tebing Tinggi

Status*

Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Agus Suharjanto
Direktur Keuangan: Asmuji
Direktur Teknik: Agus Choliq
Komisaris Utama:
Iwan Rosa Putra
Komisaris: Jonni Hutahaean

Total Aset
(Rp miliar)

12. JASAMARGA SOLO NGAWI (JSN)



JSN merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Solo-Ngawi, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JSN didirikan pada tanggal 24 Maret 2009. Sampai dengan 31 Desember 2017, Jalan Tol Solo-Ngawi belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 60%
PT Waskita Toll Road: 40%

Bidang Usaha

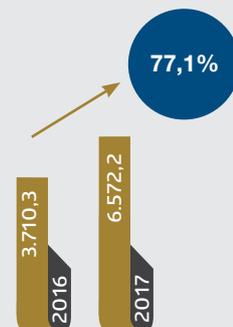
Pengusahaan Jalan Tol Solo-
Ngawi

Status*

Belum Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: David Wijayatno
Direktur Teknik: Thorry Hendrarto
Plt. Direktur Keuangan dan
Umum: Yudhi Mahyudin
Komisaris Utama: Waskito Pandu
Komisaris: Dody Sunandar

Total Aset
(Rp miliar)

13. PT NGAWI KERTOSONO JAYA (NKJ)



NKJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Ngawi-Kertosono, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. NKJ didirikan pada tanggal 24 Maret 2009. Sampai dengan 31 Desember 2017, Jalan Tol Ngawi-Kertosono belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 60%
PT Waskita Toll Road: 40%

Bidang Usaha

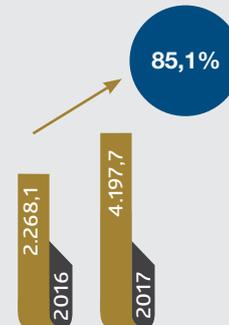
Pengusahaan Jalan Tol Ngawi-Kertosono

Status*

Belum Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Iwan Moedyarno
Direktur Teknik: Yudhi Dharmawan
Direktur Keuangan dan Administrasi: Mei Prabowo
Komisaris Utama: A. Pandu Djajanto
Komisaris: Munib Lusianto

Total Aset
(Rp miliar)

14. PT CINERE SERPONG JAYA (CSJ)



CSJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Cinere-Serpong, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. CSJ didirikan pada tanggal 10 Juli 2008. Sampai dengan 31 Desember 2017, Jalan Tol Cinere-Serpong belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 55%
PT Waskita Toll Road: 35%
PT Jakarta Propertindo: 10%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Cinere-Serpong

Status*

Belum Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Silvester Aryan Widodo
Direktur Keuangan: Sri Dewi Mustikarini
Direktur Teknik: Mokh. Sadali
Komisaris Utama: Adityawarman
Komisaris: Yuli Ariandi Siregar
Komisaris: Abdul Hadi Hs.

Total Aset
(Rp miliar)

15. PT JASAMARGA SEMARANG BATANG (JSB)



JSB merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Batang-Semarang, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JSB didirikan pada tanggal 21 April 2016. Sampai dengan 31 Desember 2017, Jalan Tol Batang-Semarang belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 60%
PT Waskita Toll Road: 40%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Batang-Semarang

Status*

Belum Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Arie Irianto
Direktur Keuangan: Heru Zulkarnaen
Direktur Teknik: Abdul Rokhim
Komisaris Utama: Nyoman Wirya Adnyana
Komisaris: Truly Nawangsasi

Total Aset
(Rp miliar)

16. PT JASAMARGA BALIKPAPAN SAMARINDA (JBS)

JBS merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JBS didirikan pada tanggal 06 Juni 2016. Sampai dengan 31 Desember 2017, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 55%
PT Wijaya Karya: 15%
PT Pembangunan Perumahan: 15%
PT Bangun Tjipta Sarana: 15%

Bidang Usaha

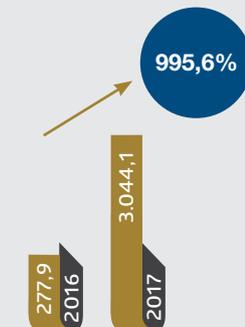
Pengusahaan Jalan Tol
Balikpapan-Samarinda

Status*

Belum Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: STH Saragi
Direktur Keuangan: Netty Renova
Direktur Teknik: Bandung
Sasmitoharjo
Komisaris Utama: Agung Budi
Waskito
Komisaris: Trihadi Karnanto
Komisaris: Ayu Widya Kiswari

Total Aset
(Rp miliar)**17. PT JASAMARGA MANADO BITUNG (JMB)**

JMB merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Manado-Bitung, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JMB didirikan pada 06 Juni 2016. Sampai dengan 31 Desember 2017, Jalan Tol Manado-Bitung belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 65%
PT Wijaya Karya: 20%
PT Pembangunan Perumahan: 15%

Bidang Usaha

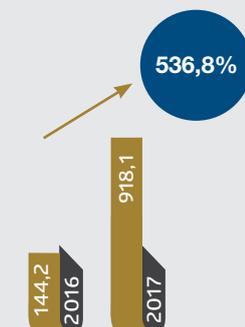
Pengusahaan Jalan Tol Manado-
Bitung

Status*

Belum Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: George IMP
Manurung
Direktur Keuangan: Surya
Panyuluh
Direktur Teknik: Bambang Saptadi
Sukarno
Komisaris Utama: Hadjar Seti Adji
Komisaris: Theodorus
Dondokambey
Komisaris: Dedi Krisnariawan
Sunoto

Total Aset
(Rp miliar)**18. PT JASAMARGA PANDAAN MALANG (JPM)**

JPM merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Pandaan-Malang, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JPM didirikan pada 06 Juni 2016. Sampai dengan 31 Desember 2017, Jalan Tol Pandaan-Malang belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 60%
PT Pembangunan Perumahan: 35%
PT Sarana Multi Infrastruktur: 5%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Pandaan-
Malang

Status*

Belum Beroperasi

Susunan Pengurus

Plt. Direktur Utama: Agus
Purnomo
Direktur Keuangan:
Eko Hari Purwanto
Direktur Teknik:
Agus Samuel Kana
Komisaris Utama: Abdul Hadi Hs.
Komisaris: Lukman Hidayat

Total Aset
(Rp miliar)

19. PT JASAMARGA JALANLAYANG CIKAMPEK (JJC)



JJC merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JJC didirikan pada tanggal 24 November 2016. Sampai dengan 31 Desember 2017, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated belum beroperasi karena masih dalam tahap konstruksi.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 80%
PT Ranggih Sugiron Perkasa: 20%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated

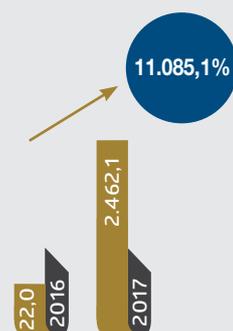
Status*

Belum Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Djoko Dwijono
Direktur: Harris Prayudi
Direktur: Biswanto
Komisaris Utama: Hasanudin
Komisaris: Intani Choirina

Total Aset (Rp miliar)



20. PT JASAMARGA TRANSJAWA TOL (JTT)



JTT merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Trans Jawa yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. JTT didirikan pada tanggal 02 Juni 2017.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 65%
PT Waskita Toll Road: 35%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Trans Jawa

Status Perusahaan

Dalam tahap pengembangan

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Christantio Prihambodo
Direktur Business Support: Ridwan Darma
Komisaris Utama: Donny Arsal
Komisaris: Agus Sugiono

Total Aset (Rp miliar)



21. PT JASAMARGA JAPEK SELATAN (JJS)



JJS merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JJS didirikan pada tanggal 29 Desember 2017. Sampai dengan 31 Desember 2017, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan masih dalam tahap pembebasan lahan.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 80%
PT Wira Nusantara Bumi: 20%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan

Status*

Belum Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Dedi Krisnariawan Sunoto
Direktur Keuangan: Ida Bagus Kade Yudharta
Komisaris Utama: Marijanto
Komisaris: Reza Febriano

22. PT JASAMARGA PROBOLINGGO BANYUWANGI (JPB)

JPB merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. JPB didirikan pada tanggal 29 Desember 2017. Sampai dengan 31 Desember 2017, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi masih dalam tahap pembebasan lahan.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 55%
PT Waskita Toll Road: 40%
PT Brantas Abipraya (Persero): 5%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi

Status*

Belum Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: D. Hari Pratama
Direktur Keuangan: Rudi Kurniadi
Komisaris Utama: Subakti Syukur
Komisaris: R. Herman Dwi Haryanto

23. PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR (JMTO)

JMTO (dahulu PT Jasa Layanan Operasi) merupakan entitas anak Jasa Marga yang bergerak dalam bidang jasa layanan pengoperasian jalan tol, baik untuk ruas-ruas jalan tol yang hak pengusahaannya dimiliki Perseroan maupun Badan Usaha Jalan Tol lainnya. JMTO didirikan pada tanggal 21 Agustus 2015.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 99,90%
Inkopkar Jasa Marga: 0,1%

Bidang Usaha

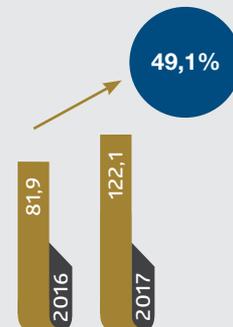
Layanan Operasi Jalan Tol

Status*

Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Septerianto Sanaf
Direktur SDM dan Keuangan: Benny Soediarto Diadi
Direktur Teknik dan Operasi: Taruli M. Hutapea
Komisaris Utama: Kushartanto Koeswiranto
Komisaris: Sigit Widhyharo
Komisaris: Raddy L. Lukman

Ikhtisar Keuangan
(Rp miliar)**24. PT JASAMARGA TOLLROAD MAINTENANCE (JMTM)**

JMTM (sebelumnya bernama PT Jasa Layanan Pemeliharaan) merupakan entitas anak Perseroan yang didirikan dalam rangka pengusahaan jasa konstruksi dan pemeliharaan jalan tol, jasa sewa peralatan tol, serta jasa sewa kendaraan. JMTM didirikan pada tanggal 26 Agustus 1988.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 99,7%
Inkopkar Jasa Marga: 0,3%

Bidang Usaha

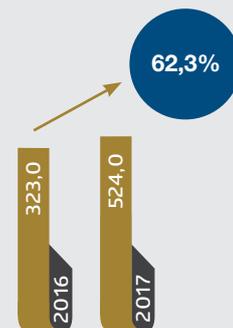
Jasa Konstruksi, Pemeliharaan Jalan Tol, Persewaan Kendaraan Tol

Status*

Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Roy Ardian Darwis
Direktur Teknik: Florysco Partogi Siahaan
Direktur Keuangan dan Umum: Surta Nababan
Komisaris Utama: Muh Najib Fauzan
Komisaris: Arief Witjaksana
Komisaris: Rudy Hardiansyah

Ikhtisar Keuangan
(Rp miliar)

25. **PT JASAMARGA PROPERTI (JMP)**

JMP merupakan entitas anak Jasa Marga yang bergerak dalam bidang pengembangan bisnis properti. JMP didirikan pada tanggal 15 Januari 2013.

Kepemilikan Saham

Jasa Marga: 99,8%
Inkopkar Jasa Marga: 0,2%

Bidang Usaha

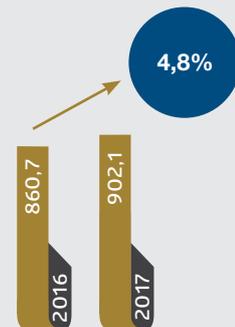
Bisnis Pengembangan Properti,
serta Perdagangan dan Jasa

Status*

Beroperasi

Susunan Pengurus

Direktur Utama: Irwan Artigyo
Sumadiyo
Direktur Keuangan:
Direktur Pengembangan Bisnis
dan Teknik:
Komisaris Utama: Anggiasari

**Total Aset
(Rp miliar)****Keterangan:**

*) Status merupakan status pengoperasian jalan tol untuk bidang usaha jalan tol dan status pengoperasian jasa/usaha lain untuk bidang usaha non-tol.

**) Investasi di PT Trans Marga Jateng (TMJ) dicatat sebagai investasi pada Ventura Bersama, sehingga Perseroan tidak mengkonsolidasi laporan keuangan TMJ ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA**1. PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)**

TLKJ didirikan pada tanggal 19 Januari 2005 dalam rangka perusahaan ruas tol Cinere-Jagorawi.

Kepemilikan Saham Jasa Marga

21,24%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Cinere-Jagorawi

Status*

Beroperasi

2. PT Ismawa Trimitra (IT)

IT didirikan tanggal 14 Juni 1995 dalam rangka perusahaan jasa sewa ruang perkantoran.

Kepemilikan Saham Jasa Marga:

25%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jasa Sewa Ruang Perkantoran

Status*

Beroperasi

3. PT Hutama Marga Waskita (HAMAWAS)

HAMAWAS didirikan tanggal 20 Februari 2017 dalam rangka perusahaan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat.

Kepemilikan Saham Jasa Marga

30%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat

Status*

Belum Beroperasi

ASET KEUANGAN

1. PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

JLB merupakan pemegang hak perusahaan Jalan Tol JORR Seksi W1 dengan masa konsesi selama 35 tahun dan berlaku efektif sejak 02 Februari 2017.

Kepemilikan Saham Jasa Marga

19,1%

Bidang Usaha

Pengusahaan Jalan Tol JORR Seksi W1

Status*

Beroperasi

2. PT Marga Mandala Sakti (MMS)

MMS didirikan pada tanggal 04 Oktober 1989. Penyertaan pada MMS dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Tangerang-Merak.

Kepemilikan Saham Jasa Marga

1,94%

Bidang Usaha

Penyelenggaraan Jalan Tol Tangerang-Merak

Status*

Beroperasi

3. PT Citra Margatama Surabaya (CMS)

CMS didirikan pada tanggal 26 Desember 1996. Penyertaan pada CMS dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Waru-Juanda.

Kepemilikan Saham Jasa Marga

5,26%

Bidang Usaha

Penyelenggaraan Jalan Tol Waru-Juanda

Status*

Beroperasi

4. PT Margaraya Jawa Tol (MJT)

MJT didirikan pada tanggal 06 Juni 1997. Penyertaan pada MJT dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Waru (Aloha)-Tanjung Perak.

Kepemilikan Saham Jasa Marga

2,47%

Bidang Usaha

Penyelenggaraan Jalan Tol Waru (Aloha)-Tanjung Perak

Status*

Beroperasi

5. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)

BMN didirikan pada tanggal 20 April 1993. Penyertaan pada BMN dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Ujung Pandang, yaitu Jalan Satando-Simpang Urip Sumoharjo/Petta Rani (Tahap I)-Jalan Sultan Alauddin (Tahap II).

Kepemilikan Saham Jasa Marga

1,47%

Bidang Usaha

Penyelenggaraan Jalan Tol Ujung Pandang

Status*

Beroperasi

6. PT Jatim Prasarana Utama (JPU)

JPU didirikan pada tanggal 27 Desember 2002. Sejak 08 Mei 2007, JPU ikut serta dalam penyertaan saham TJP untuk proyek Jalan Tol Gempol-Pasuruan.

Kepemilikan Saham Jasa Marga

7%

Bidang Usaha

Penyelenggaraan Jalan Tol Gempol-Pasuruan

Status*

Beroperasi

7. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

PSBI didirikan pada tanggal 02 Oktober 2015 dalam rangka pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kepemilikan Saham Jasa Marga

12%

Bidang Usaha

Pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Status*

Belum Beroperasi

8. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)

KKDM didirikan pada tanggal 20 Desember 1996. Penyertaan pada KKDM dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Bekasi Timur-Cawang-Kampung Melayu yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.

Kepemilikan Saham Jasa Marga

1,03%

Bidang Usaha

Penyelenggaraan Jalan Tol Bekasi Timur-Cawang-Kampung Melayu

Status*

Beroperasi

MODAL INSANI JASA MARGA

Sejalan dengan program Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, dan selaras dengan sasaran Visi Perseroan pada tahun 2027 untuk Menjadi Perusahaan Jalan Tol Nasional Terbesar, Terpercaya dan Berkesinambungan, maka pada tahun 2017 Jasa Marga meneruskan berbagai transformasi di berbagai bidang, termasuk di bidang sumber daya manusia yang merupakan modal insani dan aset paling berharga bagi Perseroan. Sebelumnya, pada tahun 2016, Perseroan melakukan penyempurnaan organisasi sebagai tindak lanjut Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2016 terkait perubahan nomenklatur jabatan Direksi, serta pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

TRANSFORMASI DI BIDANG MODAL INSANI

PEMBENTUKAN JASA MARGA LEARNING INSTITUTE (JMLI)



Di tengah berbagai tantangan dalam iklim bisnis saat ini yang telah berubah drastis serta dengan adanya

target percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Jasa Marga juga dituntut untuk berubah. Dalam rangka menyelaraskan berbagai perubahan yang sedang terjadi di Jasa Marga, maka Jasa Marga meningkatkan peran Jasa Marga Development Center dan mengubahnya menjadi Jasa Marga Learning Institute (JMLi).

JMLi diharapkan dapat mendukung Manajemen dalam pencapaian target Perseroan yang saat ini sedang melakukan transformasi dengan speed yang tinggi, sehingga JMLi harus mampu bergerak lebih cepat dibanding saat menjadi JMDC, yakni dengan menyiapkan program-program pelatihan untuk meningkatkan kualitas modal insani Jasa Marga yang memiliki mindset yang sama terhadap perubahan yang terjadi di Perseroan.

Perseroan juga menyiapkan para pengajar internal yang memiliki kapabilitas tinggi di bidang jalan tol. Oleh karenanya JMLi juga ingin mengubah dari tacit knowledge (ilmunya hanya untuk diri sendiri), menjadi sharing knowledge. Sehingga nantinya para pejabat dan expert Jasa Marga dapat menjadi pengajar di JMLi agar ilmunya tidak hanya jadi milik sendiri tapi bisa menjadi milik Perseroan dan karyawan lainnya. Ke depan, JMLi berencana melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk dapat menerbitkan sertifikasi.



Leading in the High Challenges Disruptions Workshop, untuk para Senior Leader, pada 24 Agustus 2017 di Aston Hotel Jakarta.



Perubahan JMDC menjadi JMLi juga merupakan bagian dari proses transisi menjadi Corporate University yang akan berperan sebagai pusat pencarian dan tindak lanjut pengembangan talent, guna menunjang suksesi dan organization competencies/capabilities agar mampu mendukung Jasa Marga dalam bertransformasi.

Agar karyawan Jasa Marga mampu berkompetisi dan berperan aktif dalam mempertahankan posisi Jasa Marga sebagai leader dalam industri jalan tol di Indonesia, JMLi terus melaksanakan pelatihan baik yang bersifat hard skill, yaitu pelatihan yang disesuaikan dengan bidang tugas atau profesinya masing-masing, maupun yang bersifat soft skill, seperti pelatihan motivasi, Disruption Workshop, TOT, dan lain-lain.

PROGRAM ALIH PROFESI

Seiring dengan beragam inovasi dalam modernisasi yang diterapkan dalam tuntutan era berbasis teknologi dan digital untuk mempermudah pekerjaan, Jasa Marga mendukung program nawacita Pemerintah yang mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dalam rangka mewujudkan cashless society (masyarakat tanpa uang tunai) dan menggiatkan transaksi menggunakan uang elektronik. Program perubahan sistem transaksi tersebut digagas oleh Pemerintah, guna mempermudah dan memperlancar

berbagai urusan masyarakat yang berkaitan dengan transaksi. Dengan uang elektronik, proses transaksi menjadi lebih cepat.

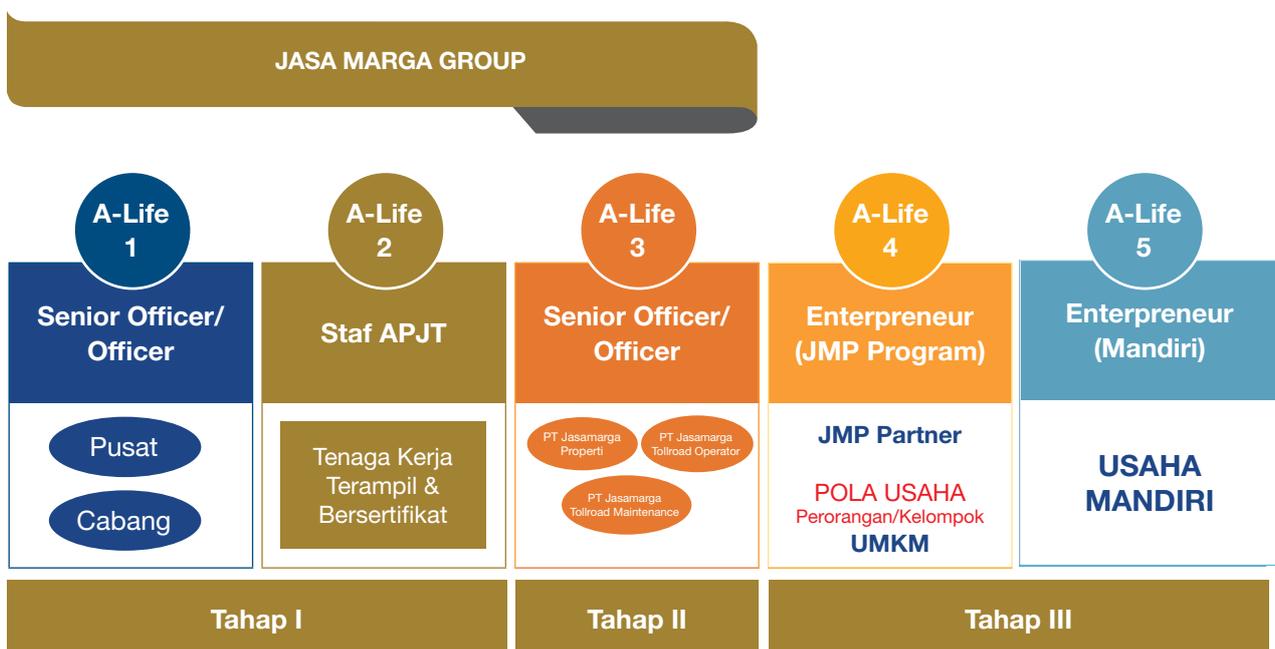
Dengan diimplementasikannya program elektronifikasi, Jasa Marga memastikan tidak adanya pengurangan karyawan. Untuk itu, agar program elektronifikasi tanpa pengurangan karyawan dapat terlaksana, Jasa Marga menggagas program yang dinamakan Program Alih Profesi atau A-Life sebagai solusi bagi karyawan yang terdampak oleh elektronifikasi. A-Life merupakan pengalihan pekerjaan atau perubahan jalur karir ke bidang yang berbeda dengan bidang sebelumnya yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada karyawan untuk menambah dan mengembangkan pengalaman baru sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Program A-Life merupakan penegasan bahwa Jasa Marga tidak mengorbankan kepentingan karyawan dalam menerapkan modernisasi.

Terdapat ± 900 formasi dari Jasa Marga Group yang dapat dijadikan pilihan bagi para karyawan yang mengambil opsi alih profesi, yang terdiri dari 291 formasi Senior Officer dan Officer di Kantor Pusat atau Cabang, 170 formasi staf Anak Perusahaan Jalan Tol (APJT) sebagai tenaga kerja terampil

dan bersertifikat, dan 439 formasi staf Anak Perusahaan Usaha Lain (APUL) yang meliputi PT Jasamarga Properti, PT Jasamarga Tollroad Operator (dahulu PT Jasa Layanan Operasi), dan PT Jasamarga Tollroad Maintenance (dahulu PT Jasa Layanan Pemeliharaan). Selain itu, Jasa Marga juga mendorong karyawannya untuk menggeluti bidang wirausaha dengan menyediakan sekitar 100 outlet usaha UMKM di berbagai rest area yang tersebar di seluruh ruas jalan tol. Dengan demikian, karyawan mendirikan bisnisnya sendiri sekaligus turut berpartisipasi dalam mengembangkan rest area yang dikelola oleh Jasa Marga.

Karyawan dipersilakan untuk memilih profesi baru sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, sebelum dilakukan seleksi untuk melakukan alih profesi, Jasa Marga akan melakukan pelatihan guna meningkatkan kompetensi karyawan di bidang yang baru, dan dalam rangka mempersiapkan karyawan Jasa Marga agar mampu bertahan dalam perubahan era berbasis tenaga manusia menjadi berbasis teknologi. JMLi melaksanakan program-program pelatihan terkini di antaranya untuk membekali karyawan yang melakukan alih profesi. Jasa Marga melalui JMLi terus membina karyawan Perseroan untuk mengelola perubahan dengan cara terus belajar.

BAGAN PROGRAM A-LIFE



KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pelayanan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan merupakan kewajiban seluruh penduduk Indonesia dan perusahaan BUMN wajib mendaftarkan karyawannya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015. Untuk memenuhi hal tersebut maka mulai tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan telah mendaftarkan karyawan sebagai peserta program BPJS Kesehatan, dan sejak Maret 2015 Perusahaan telah membayarkan pembayaran iuran kepesertaan bagi karyawan dan keluarganya. Per 31 Desember 2017, seluruh jajaran Direksi, Komisaris, Karyawan beserta keluarganya telah 100% terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Total kepesertaan BPJS Kesehatan Perusahaan per 31 Desember 2017 dan biaya yang dikeluarkan Perusahaan untuk premi kepesertaan tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Peserta BPJS Kesehatan Per Desember 2017	Jumlah
Direksi	6
Komisaris	6
Karyawan	4216
Keluarga Direksi, Komisaris dan Karyawan	13.169
Biaya Kepesertaan BPJS Kesehatan pada tahun 2017	Rp 15.974.706.897

JUMLAH DAN KOMPOSISI KARYAWAN

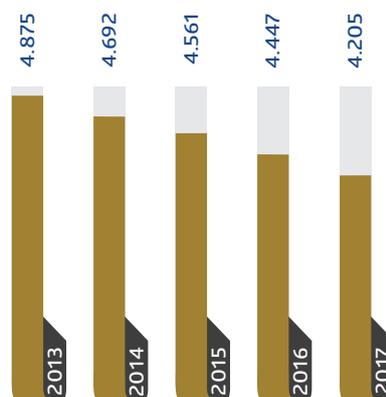
Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, saat ini Perseroan berusaha mengoptimalkan pendayagunaan modal insani yang ada. Jumlah Karyawan Tetap Induk pada tahun 2017 mencapai 4.205 orang, turun 5,44% dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 4.447 orang. Jumlah ini semakin menurun jika dibandingkan dengan jumlah Karyawan Tetap Induk tahun 2015 yang mencapai 4.561 orang, tahun 2014 yang mencapai 4.692 orang, dan tahun 2013 yang mencapai 4.875 orang.

Sementara itu, jumlah Karyawan Induk dan Anak Perusahaan baik tetap dan tidak tetap mengalami kenaikan dari 9.153 orang pada 2015, menjadi 9.376 orang pada 2016, dan menjadi 9.080 pada tahun 2017. Total karyawan secara konsolidasi di Induk dan Anak Perusahaan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,16% dari tahun 2016 yang mengalami kenaikan sebesar 2,44% dari tahun 2015 dengan dibentuknya anak perusahaan PT Jasamarga Tollroad Operator (dahulu PT Jasa Layanan Operasi).

TABEL JUMLAH KARYAWAN TETAP INDUK 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Karyawan Tetap Induk (orang)	4.875	4.692	4.561	4.447	4.205

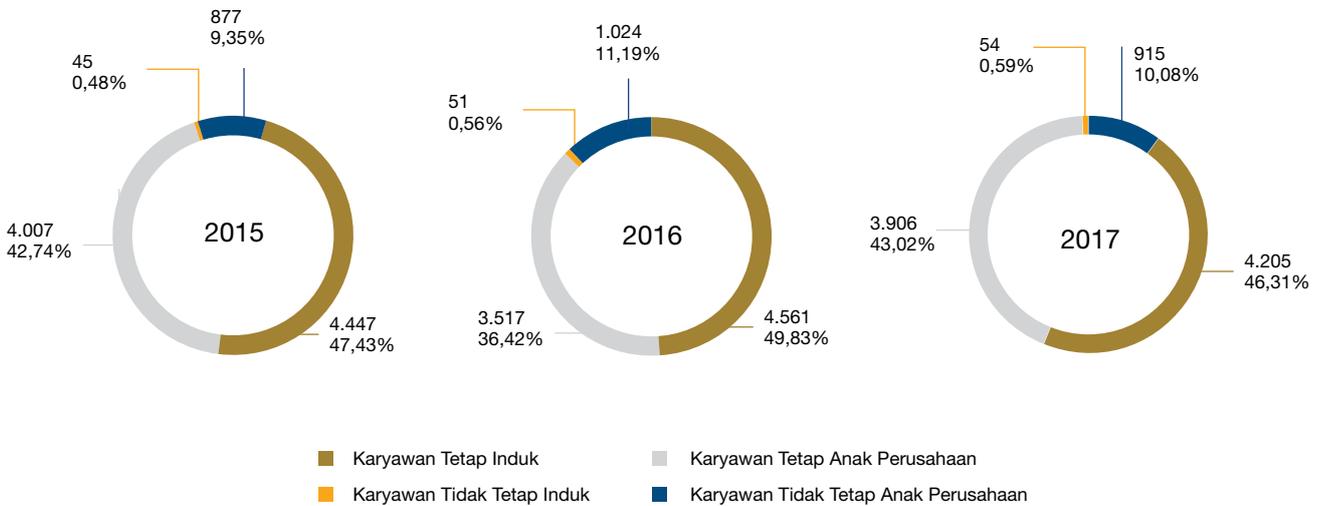
GRAFIK JUMLAH KARYAWAN TETAP INDUK 2013-2017



TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN 2015-2017

Status	2015		2016		2017	
	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi
	(orang)	(%)	(orang)	(%)	(orang)	(%)
Karyawan Tetap Induk	4.561	49,83	4.447	47,43	4.205	46,31
Karyawan Tetap Anak Perusahaan	3.517	38,42	4.007	42,74	3.906	43,02
Sub Total	8.078	88,26	8.454	90,17	8.111	89,33
Karyawan Tidak Tetap Induk	51	0,56	45	0,48	54	0,59
Karyawan Tidak Tetap Anak Perusahaan	1.024	11,19	877	9,35	915	10,08
Sub Total	1.075	11,74	922	9,83	969	10,67
Total	9.153	100,00	9.376	100,00	9.080	100,00

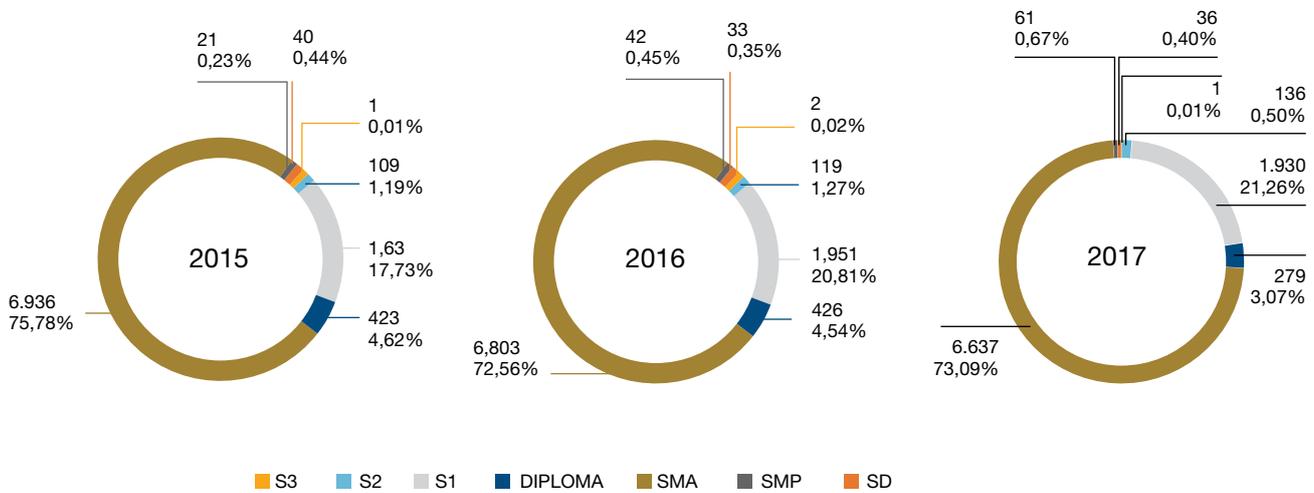
GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN 2015-2017



TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 2015-2017

Status	2015		2016		2017	
	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi
	(orang)	(%)	(orang)	(%)	(orang)	(%)
S3	1	0,01	2	0,02	1	0,01
S2	109	1,19	119	1,27	136	1,50
S1	1.623	17,73	1.951	20,81	1.930	21,26
Diploma	423	4,62	426	4,54	279	3,07
SMA	6.936	75,78	6.803	72,56	6.637	73,09
SMP	21	0,23	42	0,45	61	0,67
SD	40	0,44	33	0,35	36	0,40
Total	9.153	100,00	9.376	100,00	9.080	100,00

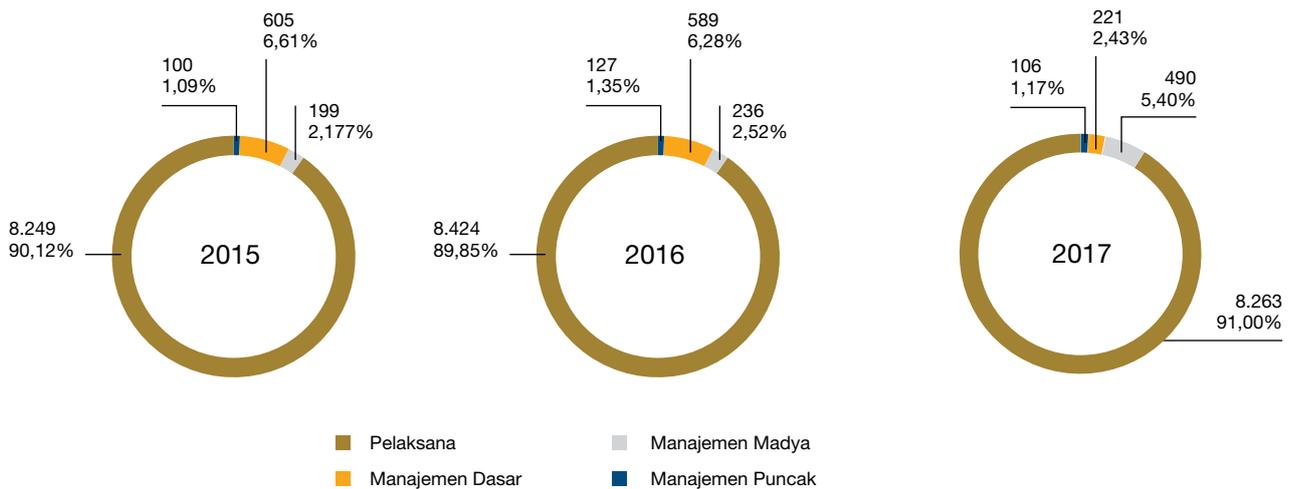
GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 2015-2017



TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN 2015-2017

Status	2015		2016		2017	
	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi
	(orang)	(%)	(orang)	(%)	(orang)	(%)
Manajemen Puncak	100	1,08	127	1,35	106	1,17
Manajemen Madya	199	2,15	236	2,52	221	2,43
Manajemen Dasar	605	6,55	589	6,28	490	5,40
Pelaksana	8.249	90,21	8.424	89,25	8.263	91,00
Total	9.153	100,00	9.376	100,00	9.080	100,00

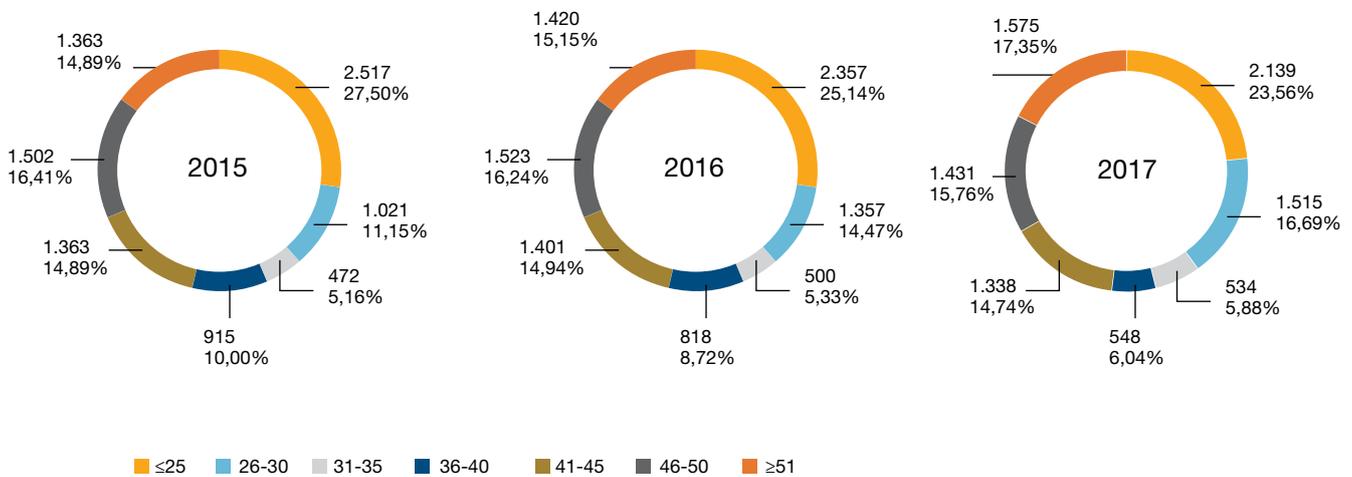
GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN 2015-2017



TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA 2015-2017

Usia (tahun)	2015		2016		2017	
	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi
	(orang)	(%)	(orang)	(%)	(orang)	(%)
≤25	2.517	27,50	2.357	25,14	2.139	23,56
26-30	1.021	11,15	1.357	14,47	1.515	16,69
31-35	472	5,16	500	5,33	534	5,88
36-40	915	10,00	818	8,72	548	6,04
41-45	1.363	14,89	1.401	14,94	1.338	14,74
46-50	1.502	16,41	1.523	16,24	1.431	15,76
≥51	1.363	14,89	1.420	15,15	1.575	17,35
Total	9.153	100,00	9.376	100,00	9.080	100,00

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA 2015-2017



KEBIJAKAN DALAM KESEMPATAN KERJA

Kebijakan dalam hal kesempatan kerja, baik penempatan karyawan maupun pengembangan karir karyawan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perseroan melaksanakan pengisian formasi dan pengembangan karir secara selektif dan terbuka tanpa diskriminasi (gender ras suku agama), dengan memprioritaskan sumber dari dalam Perseroan dengan memperhatikan prestasi kerja, kemampuan dan kompetensi Karyawan.

Selain itu, Perseroan memberikan kesempatan bagi karyawan yang memiliki keterbatasan secara fisik berupa ketidakmampuan fungsi gerak motorik tangan atau kaki dengan tetap memenuhi persyaratan jabatan pada kelompok jabatan fungsional keahlian dan fungsional staf.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI, KINERJA DAN KARIR KARYAWAN

Kompetensi Perseroan dan kompetensi karyawan memiliki keterkaitan, yaitu kompetensi karyawan merupakan cascading dari kompetensi Perseroan. Sebagai wujud implementasi konsep *Competency Based Human Resources Management* (CBHRM) maka pengembangan SDM berdasarkan pada peningkatan kompetensi karyawan. Untuk itu, Perseroan telah merumuskan model kompetensi yang dilengkapi dengan Kamus Kompetensi yang merupakan kombinasi *hard skill* dan *soft skill* yang harus dimiliki setiap individu berdasarkan kebutuhan kompetensi setiap unit. Kamus Kompetensi dituangkan dalam Keputusan Direksi No. 183/KPTS/2013 tanggal 24 Desember 2013.

Sejalan dengan pengembangan bisnis Perseroan yang terus tumbuh melalui pembentukan Anak-anak Perusahaan baik yang bergerak di bisnis tol maupun non tol telah memberikan peluang bagi karyawan Jasa Marga untuk mengembangkan kariernya. Mulai meningkatnya jumlah pemangku jabatan yang berada pada posisi strategis di Perseroan yang memasuki masa pensiun selain menjadi tantangan bagi Manajemen untuk menciptakan sistem kaderisasi yang andal, disini lain menciptakan peluang karier bagi karyawan yang kompeten dalam Sistem Manajemen Karier berbasis kompetensi. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan sistem manajemen karier yaitu untuk melakukan penempatan karyawan sesuai formasi jabatan secara optimal dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi jabatan dan kompetensi individu, sehingga karyawan

dapat memberikan unjuk kerja terbaik dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

Sistem Manajemen Karier berbasis kompetensi mengacu pada konsep cluster dimana jabatan dikelompokkan berdasarkan kompetensi, sehingga perpindahan karier bagi karyawan menjadi lebih fleksibel dan kesempatan karier bagi karyawan menjadi lebih luas. Siklus manajemen karier berbasis kompetensi terbagi atas:

1. Periode Peminatan: dilaksanakan untuk mengidentifikasi minat karyawan sebagai acuan dalam penyusunan rencana karier karyawan.
2. Periode Pemantapan: dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan mengembangkan kompetensi individu secara optimal.
3. Periode Pengayaan: dilaksanakan untuk membuka wawasan karyawan dan untuk memberikan pengalaman yang dapat memperkaya kompetensi individu karyawan.

Perseroan telah mengatur sistem pemilihan kandidat yang akan menduduki suatu jabatan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang selektif dan kompetitif dengan tetap berlandaskan azas keadilan. Masa kerja tidak lagi menjadi faktor dominan, namun kompetensilah yang memainkan peranan penting.

Pergerakan karier karyawan baik berupa promosi dan maupun rotasi tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL PENGEMBANGAN KARIER KARYAWAN 2015-2017

Uraian	Wilayah Kerja									Jumlah		
	Kantor Pusat			Kantor Cabang & Proyek			Anak Perusahaan			2015	2016	2017
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017			
Promosi	30	101	71	124	127	149	31	63	54	185	291	274
Rotasi	143	52	317	267	417	838	47	42	164	457	511	1.319
TOTAL	173	153	388	391	544	987	78	105	218	642	802	1.593

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

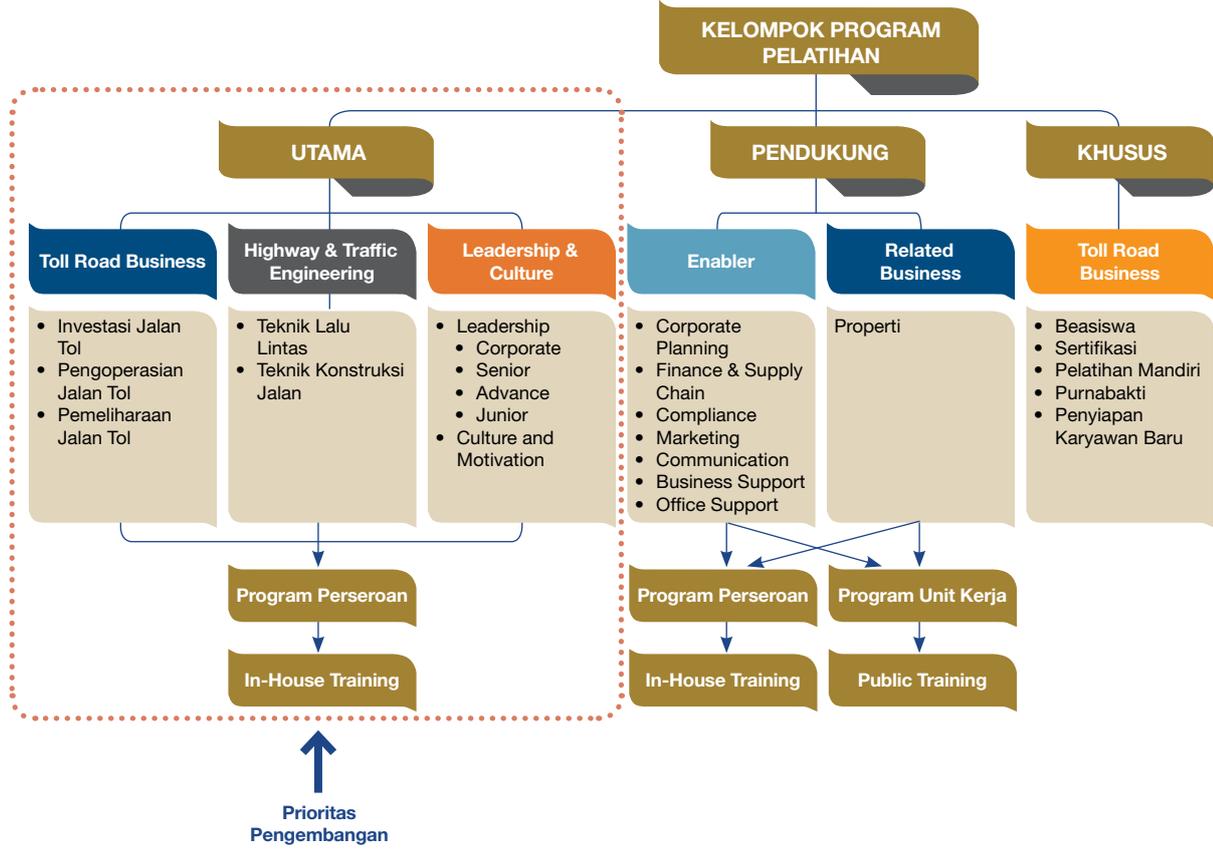
Penentuan program-program pengembangan kompetensi karyawan didasarkan pada Training Need Analysis (TNA) yang ditentukan berdasarkan job description setiap level jabatan. Prioritas program pengembangan sejalan dengan upaya pencapaian target bisnis Perseroan pada tahun 2017 dalam rangka mencapai Visi dan Misi Perseroan di antaranya dengan terus menambah konsesi yang dimiliki, serta untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas karyawan, Perseroan fokus dalam pencapaian Key Performance Indicator (KPI) untuk pemenuhan kompetensi teknis dan non-teknis. Melalui Unit Jasa Marga Learning Institute (JMLi), program-program pengembangan kompetensi karyawan berupa pendidikan dan pelatihan terus dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan 3 (tiga) fokus utama yaitu:

- Pengembangan kompetensi teknis dan non teknis karyawan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- Program mandiri setara pelatihan, di antaranya kegiatan *sharing knowledge*, studi banding (*benchmarking*), penulisan jurnal, dan lainnya.
- Beasiswa kader.



Induction Training Staffing Trainee Program A-Life 1 (Tahap Kesamaptaan), pada 22-27 Januari 2018, Batalyon 14, Grup 1 Kopassus, Bogor. Dilaksanakan guna meningkatkan motivasi serta memberikan pembinaan disiplin dan mental karyawan.

BAGAN KELOMPOK PROGRAM PELATIHAN



Sistem pengembangan kompetensi dan pembelajaran karyawan dengan memprioritaskan kompetensi inti Perusahaan, yaitu menjadi Perusahaan yang Unggul dalam Investasi Pengembangan Jalan Tol dan Inovatif dalam Pengoperasian Jalan Tol dengan Tata Kelola yang Baik. Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan yaitu dengan 5 (lima) akademi: Toll Road Business, Related Business, Highway and Traffic Engineering, Leadership and Culture dan Corporate Enabler. Susunan dan prioritas program pelatihan dikelompokkan dalam program Core Business dan Non Core (Support) dan Program Khusus.

Program Pelatihan pada tahun 2017 difokuskan pada Kelompok Program Utama dan tujuan masing-masing sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi di Bidang Bisnis Jalan Tol
Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan jalan tol serta menunjang performansi dan kesinambungan proses bisnis eksisting Perusahaan, maka Jasa Marga Learning Institute (JMLi) menyelenggarakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan.

Pada aspek bisnis pengoperasian jalan tol diadakan pelatihan Peramalan Lalu Lintas berbasis IT (IT Traffic Forecasting) menggunakan aplikasi CUBE. Selain itu, dilaksanakan pula pelatihan Manajemen Lansekap terkait upaya beautifikasi ruas tol eksisting serta pelatihan mengenai pengendalian mutu pekerjaan di lapangan secara in-house. Adapun JMLi juga menyelenggarakan pelatihan publik, seperti pelatihan mengenai Leger Jalan Tol guna mendukung akuntabilitas pencatatan aset jalan tol.

Pada aspek bisnis konstruksi, JMLi menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan melalui experience site yang sarat pembelajaran. Program dimaksud diberi nama Construction Challenge, yang telah berjalan beberapa batch sepanjang tahun 2017. Adapun pelatihan dimaksud termasuk percepatan untuk memperkaya wawasan dan kompetensi karyawan terkait permasalahan pada proyek-proyek strategis yang berjalan, seperti Proyek Jalan Tol Bogor Ring Road, Proyek Jalan Tol Ngawi Kertosono dan Proyek Jalan Tol Porong Gempol.

Di samping itu, turut diupayakan untuk mengambil peran aktif di taraf nasional dan internasional, seperti pada konferensi internasional Road Engineering Association of Asia and Australasia (REAAA), Pelatihan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Infrastructure Seminar and Workshop: Structural and Geotechnical Concept of Toll Road Engineering, serta International Conference 3rd Annual Infrastructure Project Finance.

2. Program Leadership and Culture
Selaras dengan upaya menyiapkan kader-kader pemimpin di masa depan, pada tahun 2017 JMLi menyelenggarakan berbagai Program Pelatihan Leadership, antara lain adalah Basic Leadership bagi karyawan baru setingkat Assistant Manager dan Junior Leadership untuk para calon Manager. Program ini yang dipersiapkan sebagai kader pemimpin masa depan Perseroan untuk menduduki posisi-posisi kunci di Perseroan.

Dalam rangka memberikan kesadaran akan posisi bisnis Jasa Marga di era Disruption, tantangan-tantangan yang dihadapi serta cara memimpin yang efektif, dilakukan program pelatihan yang berjudul Leading in The High Challenges (Disruptions) Workshop. Pelatihan ini diikuti oleh berbagai level jabatan mulai dari setingkat Vice President sampai dengan Senior Officer/Officer serta Serikat karyawan. Diharapkan dengan adanya workshop ini akan meningkatkan kesadaran karyawan untuk tetap berperan serta aktif mendukung rencana strategis Perseroan di tengah VUCA world (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dengan memberikan kinerja yang optimal.

3. Program Pelatihan dalam Rangka Mendukung Rencana Strategis Perseroan (Dampak Transaksi Cashless)
Dalam rangka mempersiapkan karyawan operasional yang mengalami pengalihan pekerjaan atau perubahan jalur karir ke bidang yang berbeda, JMLi menyelenggarakan pelatihan Beat the Challenge Workshop and Selection (Program A-Life 1) yang dilaksanakan di seluruh Kantor Cabang Jasa Marga. Pelatihan tersebut memberikan materi kepada karyawan yang mengikuti Program A-Life 1 mengenai pemahaman tugas dan tanggung jawab officer serta pengenalan dasar-dasar komputer administrasi dan gambaran umum mengenai proses pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan pengetahuan dan best practice menjadi seorang Entrepreneur kepada Karyawan yang memilih Program A-Life 4 & 5, dilaksanakan Program Pelatihan Beat The Challenge Entrepreneurship Training yang berlokasi di Kantor Pusat dan Cabang Jasa Marga. Pelatihan ini memberikan pemahaman dan gambaran mengenai strategi pengelolaan keuangan bagi mereka yang akan menjalani masa pensiun serta kiat-kiat membangun bisnis atau wirausaha.

Selain pelatihan di dalam negeri, Perseroan juga menugaskan beberapa orang karyawan untuk mengikuti pelatihan di luar negeri agar dapat tetap mengikuti perkembangan yang ada di dunia internasional, serta Beasiswa Luar Negeri sebagai salah satu program pengembangan Future Leader Jasa Marga.

Pada tahun 2017, Perseroan sudah menetapkan target hari pelatihan per karyawan, dengan realisasi sejumlah 23.824 hari pelatihan per karyawan. Jumlah hari pelatihan dan peserta pelatihan tahun 2015-2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL REALISASI PROGRAM DIKLAT 2015-2017

Uraian	2015			2016			2017		
	Jumlah Hari Orang	Jumlah Peserta	Jumlah Program	Jumlah Hari Orang	Jumlah Peserta	Jumlah Program	Jumlah Hari Orang	Jumlah Peserta	Jumlah Program
1. Toll Road Business	1.249	745	53	341	148	15	834	568	15
2. Highway and Traffic Engineering	443	55	7	489	71	4	613	292	17
3. Leadership and Culture	15.287	1.088	30	15.739	3.274	146	4.843	4.140	132
4. Corporate Enabler	4.321	1.651	209	3.280	1.310	175	8.646	3.529	261
5. Related Business	162	19	11	150	15	8	317	194	22
6. Beasiswa	-	4	4	-	3	3	-	2	2
7. Program Mandiri Setara Pelatihan	11.501	9.963	325	11.103	10.374	385	8.571	7.142	258
Total	32.963	13.525	639	31.102	15.195	736	23.824	15.867	707

Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam meningkatkan kompetensi karyawan yang berkelanjutan serta dalam rangka menciptakan pemimpin Perseroan yang mumpuni, biaya pendidikan dan pelatihan pada tahun 2015 dan 2016 terealisasi sebesar Rp 15,75 miliar dan Rp 17,46 miliar atau meningkat 10,87%. Sedangkan pada tahun 2017 biaya pendidikan dan pelatihan menjadi Rp 21,05 miliar atau meningkat 20,60% dibandingkan dengan tahun 2016, seiring dengan peningkatan program-program pengembangan karyawan dikarenakan target peningkatan kompetensi secara merata untuk seluruh karyawan dengan ditetapkannya target jumlah hari pelatihan minimum/tahun per karyawan.

TABEL BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2015-2017 (RP PENUH)

Jenis	2015	2016	2017
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	15.746.611.916	17.458.508.986	21.054.608.254

PRODUKTIVITAS KARYAWAN

Manajemen berkomitmen penuh untuk senantiasa menyediakan karyawan yang andal dan berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Perseroan. Perhitungan kebutuhan karyawan baik secara jumlah maupun kualitas dikaji secara komprehensif melalui perencanaan tenaga kerja dengan mempertimbangkan rencana kerja dan pengembangan bisnis Perseroan.

Perseroan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap sistem-sistem pengelolaan human capital yang terangkum dalam Sembilan Proses Strategis Sistem Human Capital dilakukan agar terjadi akselerasi pengembangan kompetensi karyawan yang diharapkan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan Perseroan. Perkembangan bisnis Perseroan yang menuntut peningkatan jumlah tenaga pendukung tetap dikendalikan melalui peningkatan kompetensi, prioritas rekrutmen karyawan baru untuk kaderisasi pemimpin serta peningkatan peran teknologi informasi, khususnya dalam otomatisasi transaksi tol.

Berbagai upaya pengelolaan human capital ini telah menunjukkan perbaikan produktivitas karyawan yang terlihat

dalam rasio jumlah karyawan per pendapatan dari sebesar 1: Rp 1,8 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar 1 : Rp 3,9 miliar pada tahun 2017.

REMUNERASI KARYAWAN

Jasa Marga memberikan kepastian remunerasi yang menarik (*attractive*) dan kompetitif sehingga dapat memelihara keterikatan serta dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk menghasilkan kinerja tinggi. Pengaturan penghasilan karyawan dilakukan dengan menetapkan struktur gaji berbasis pasar. Selain itu kenaikan gaji dan pemberian insentif didasarkan pada pencapaian kinerja karyawan. Perubahan pengaturan penghasilan karyawan dilakukan dari yang berbasis pada masa kerja dengan sistem table menjadi berbasis kinerja dengan menetapkan struktur gaji berbasis pasar, serta memperhatikan pemenuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku serta kemampuan Perusahaan. Remunerasi karyawan diatur dalam Keputusan Direksi No. 99/KPTS/2014 tentang Kelompok dan Komponen Remunerasi serta No. 122.1/KPTS/2014 tentang Kompensasi Bulanan bagi Karyawan Tetap.

PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN

Perseroan memberikan penghargaan atas kinerja, pelaksanaan tugas, inovasi atau perbaikan serta penghargaan atas kesetiaan karyawan. Untuk memberikan apresiasi terhadap karyawan yang telah bekerja selama masa kerja tertentu, Perseroan memberikan penghargaan atas masa kerja kepada karyawan. Sepanjang tahun 2017, penghargaan masa kerja diberikan kepada 867 karyawan yang telah melampaui masa kerja 10, 15, 20, 25, dan 30 tahun.

TABEL PENGHARGAAN KESETIAAN KARYAWAN JASA MARGA 2016-2017

Masa Kerja	Jumlah Penerima Penghargaan	
	2016	2017
10 Tahun	0	0
15 Tahun	113	72
20 Tahun	297	296
25 Tahun	328	197
30 Tahun	96	302
Total	834	867

Sementara untuk karyawan yang bekerja sampai mencapai usia pensiun, Perseroan memberikan penghargaan pensiunan berupa logam mulia, dan untuk tahun 2017 telah diberikan kepada 229 orang yang telah memasuki usia pensiun (pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun meninggal dunia, pensiun sakit/cacat).

HARMONISASI HUBUNGAN INDUSTRIAL

Keseimbangan hubungan industrial antara Manajemen dan serikat karyawan merupakan tujuan ideal yang ingin dicapai untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara Manajemen dan serikat karyawan. Manajemen memahami bahwa hubungan industrial merupakan sinergi antara manajemen dan serikat karyawan yang memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan Perseroan. Dalam upaya menciptakan dan menjaga keharmonisan antara manajemen dan karyawan yang dibingkai dalam hubungan sinergi, manajemen

memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat dalam organisasi Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM) yang merupakan bentuk komitmen Manajemen terhadap Peraturan Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Secara periodik Manajemen dan SKJM melakukan komunikasi dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang dibentuk melalui keputusan bersama antara Direktur Utama Perseroan dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat SKJM untuk bersama-sama membahas dan mengevaluasi kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan pedoman dan arah kerja sama dalam melakukan hubungan industrial. Selain itu manajemen dan SKJM bersama-sama menempatkan diri sebagai komponen Perseroan untuk mensosialisasikan segala bentuk kebijakan yang diambil perseroan kepada karyawan yang terkait dengan kebijakan Perseroan. Hingga akhir tahun 2017 telah dilakukan 10 (sepuluh) kali pertemuan antara manajemen dan SKJM untuk membahas berbagai kebijakan Perseroan yang terkait dengan sistem Human Capital dan kebijakan lainnya.

Harmonisasi hubungan industrial ini juga tergambar dalam proses Alih Profesi (A-life) yang dicanangkan Manajemen sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak penerapan elektronifikasi jalan tol secara 100%. Manajemen dan Serikat Karyawan bersama-sama merumuskan sampai dengan mensosialisasikan program ini, sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan baik dan lancar, terbukti sinergi ini dapat meredakan gejolak yang terjadi di lapangan, khususnya dari sisi internal Perseroan.

BIAYA SUMBER DAYA MANUSIA

Seiring dengan bertambah dan berkembangannya bisnis Anak Perseroan Perseroan baik bidang tol maupun non tol yang berdampak pada jumlah dan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya biaya Sumber Daya Manusia pada tahun 2016. Peningkatan biaya SDM juga merupakan dampak dari transformasi di bidang pengelolaan Human Capital, terutama akibat restrukturisasi/ penataan ulang sistem remunerasi, khususnya pada kompensasi bulanan.

Biaya Sumber Daya Manusia sebesar Rp 1,56 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 1,72 triliun pada tahun 2016 atau meningkat 10,40%. Sedangkan pada tahun 2017 biaya SDM menjadi Rp 1,80 triliun, meningkat 4,61% dibandingkan dengan tahun 2016 disebabkan penambahan konsesi baru yang dimiliki Perseroan.

TABEL BIAYA SUMBER DAYA MANUSIA 2015-2017

(Rp Ribu)

Jenis	2015	2016	2017
Biaya Sumber Daya Manusia	1.558.072.471	1.720.182.691	1.799.435.682

SITUS WEB JASA MARGA



PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan informasi komprehensif terkait jalan tol dan usaha lainnya di web resmi www.jasamarga.com yang dapat diakses dengan mudah.

Jasa Marga telah memiliki situs web resmi dengan dua Bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di alamat www.jasamarga.com yang merupakan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi bagi stakeholders, di samping sebagai bentuk kepatuhan Perseroan selaku perusahaan publik dalam hal keterbukaan informasi. Di dalam situs web tersebut juga terdapat tautan Jasa Marga Live Streaming yang dikelola oleh Jasa Marga Traffic Information Centre (JMTIC).

Selain informasi yang bersifat umum, situs web Perseroan yang dapat di akses baik melalui Desktop maupun Mobile (Smartphone) ini, juga memberikan informasi yang lebih spesifik, di antaranya terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur korporasi grup Jasa Marga.
2. Informasi kepemilikan saham JSMR.
3. Profil Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga.
4. Analisa kinerja keuangan.
5. Laporan keuangan tahunan dan triwulanan lebih dari 5 tahun terakhir.
6. Laporan tahunan lebih dari 5 tahun terakhir.
7. Tata Kelola Perusahaan
8. Penyaluran Kemitraan dan Bina Lingkungan serta CSR
9. Kontak/Alamat Perusahaan

Situs Web Jasa Marga telah melalui proses perbaikan tampilan dan peningkatan beberapa fungsi guna memberikan pemanfaatan yang optimal bagi para stakeholders. Tampilan yang disajikan saat ini lebih terlihat modern dan dinamis, serta memudahkan pengguna untuk mengakses informasi terkait Perseroan.

Yang berbeda dari fungsi Situs Web Jasa Marga tahun ini adalah penambahan menu:

1. Pemandu Tol
Fungsi ini memberikan layanan kepada pengguna jalan yang ingin mengetahui informasi ruas tol, rute, tarif serta lalu lintas (*traffic*) tol yang akan dilintasi (map based)
2. Informasi lalu lintas yang real time
Informasi lalu lintas yang disajikan di Situs Web Jasa Marga mengakses langsung ke live streaming dan media sosial (twitter) Jasa Marga yang memberikan informasi terkait kondisi lalu lintas secara real time
3. Fasilitas Tol
Menu ini memberikan informasi tentang fasilitas penunjang yang ada di tol seperti lokasi gerbang tol, rest area dan tarif ruas jalan tol Jasa Marga
4. CCTV
Pantauan kondisi lalu lintas di area tol dengan bantuan CCTV yang tersebar di seluruh ruas tol dapat anda akses melalui Situs Web Jasa Marga.
5. Aplikasi Keluhan Pelanggan
Aplikasi keluhan pelanggan online Jasa Marga (JM Act) dapat diakses melalui situs web Jasa Marga untuk memudahkan pengguna jalan menyampaikan keluhan/saran/kritik untuk Perseroan.
6. Portal Berita Perseroan
Kegiatan Perseroan serta informasi lainnya yang terkini juga dapat dilihat melalui portal berita yang ada di situs web Jasa Marga.

MANAJEMEN JASA MARGA

Profil ringkas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Senior Jasa Marga adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS



REFLY HARUN
Komisaris Utama/
Komisaris Independen

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 47 tahun.
- Diangkat menjadi Komisaris Utama/ Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015.
- Saat ini juga menjadi Konsultan Hukum Tata Negara pada Refly Harun & Partners (sebelumnya Harpa Law Firm) (sejak 2009), Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Pengajar (tidak tetap) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (sejak 2014). Sebelumnya pernah menjabat

sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Hukum (Desember 2014-Maret 2015), Direktur Eksekutif Constitutional and Electoral Reform Centre (2013-2014), Staf Ahli Kelompok DPD di MPR (2009-2014), Staf Ahli Ketua DPR (2010), Peneliti Senior Centre for Electoral Reform (2008-2013), dan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi (2003-2007).

- Meraih gelar S1 Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1995), gelar S2 Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002), dan gelar LL.M. (Master Hukum) dari University of Notre Dame, Amerika Serikat (2007), serta gelar Doktor dari Universitas Andalas (2016).



BOEDIARSO TEGUH WIDODO
Komisaris

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 59 tahun.
- Diangkat menjadi Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 11 Maret 2014.
- Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (sejak 2013) dan anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) (sejak 2016). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perbendaharaan (September-November 2013), Anggota Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik (2012-2014), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara (2012-2013), Anggota Dewan Komisaris PT Bank

Bukopin (2005-2009) dan Anggota Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (2004-2009).

- Meraih gelar S1 Sarjana dalam bidang Ekonomi Umum dari Universitas Diponegoro Semarang (1982), gelar S2 Magister Ekonomi dengan kekhususan Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (2005), dan gelar S3 Doktor dalam bidang Ekonomi Publik dari Universitas Indonesia (2012).
- Di samping itu, pernah mengikuti Course on Government Finance Statistic di IMF Institute, Washington DC, Amerika Serikat (2000), Course on Macroeconomic Management and Fiscal Issues, di IMF-Singapore Regional Training Institute, Singapura (2004), dan mengikuti Course on Strategic Leadership Programme, Executive Training Oxford University, Inggris (2012).



AGUS SUHARYONO
Komisaris

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 52 tahun.
- Diangkat menjadi Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2016.
- Saat ini juga menjabat sebagai Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata II, Kementerian BUMN (sejak 2014). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero) (2014-2016), dan Direktur Keuangan PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2000-2003).

- Menyelesaikan pendidikan S1 dari Universitas Brawijaya (1987) dan S2 Master of Agricultural Economic dari University of Maine, Amerika Serikat (1994).



SUGIHARDJO
Komisararis

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 56 tahun.
- Menjabat sebagai Komisararis sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017.
- Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (2015-sekarang). Sebelumnya menjabat pada Badan

Usaha Milik Negara sebagai Komisararis Utama PT Pelni (2014-2015), dan Dewan Komisararis PT ASDP Indonesia Ferry (2015-2017), dan pernah menjabat pada Instansi Kementerian Perhubungan sebagai Staf Ahli Logistik dan Multimoda (2014-2015) dan Direktur Lalu Lintas dan Transportasi Kementerian Perhubungan (2012-2014).

- Meraih gelar S1 Teknik Sipil Universitas Indonesia (1989) dan S2 Administrasi Kebijakan Publik Universitas Indonesia (2005).



MUHAMMAD SAPTA MURTI
Komisararis

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 59 tahun.
- Diangkat menjadi Komisararis berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2016.
- Saat ini menjabat sebagai Deputy Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara (2007-sekarang), dan

sebelumnya pernah menjabat sebagai dewan komisararis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (2008-2016).

- Menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Hukum Jurusan Perdata/Agraria dari Universitas Trisakti (1983), Program Magister pada tahun 1994 di Reading University Inggris, Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia (2003) dan gelar Doktor dari Universitas Padjajaran (2014).



SIGIT WIDYAWAN
Komisararis Independen

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Solo, Jawa Tengah.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 52 tahun.
- Diangkat menjadi Komisararis Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015.
- Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT Roda Pembangunan Jaya, Yogyakarta (2003-2015), Direktur Keuangan Roda Jati Group, Solo (2002-2013),

Kepala Bagian Perpajakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (1994-1997) dan Kepala Bagian Keuangan PT Wijaya Karya Beton (1997-2001).

- Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (1988) dan S2 Magister Akuntansi di Universitas Indonesia (2001).

DIREKSI



DESI ARRYANI
Direktur Utama

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 55 tahun.
- Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (2011-2016).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Universitas Indonesia (1987) dan gelar S2 Magister Manajemen dari Prasetya Mulya (2008).



MOHAMMAD SOFYAN
Direktur Operasi I

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 46 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak tahun 1997. Diangkat menjadi Direktur Operasi I sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017.
- Sebelumnya menempati berbagai posisi kunci di Jasa Marga di antaranya sebagai Corporate Secretary (2015-2017), VP Corporate Planning (2012-2015), Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Perusahaan Biro Perencanaan Perusahaan (2010-2012), dan Kepala Bagian Analisa Pengembangan Teknologi Biro Teknologi Informasi Perusahaan (2008-2010).
- Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1996), gelar S2 Project Management dari Universitas Indonesia (2003) dan S2 Business & IT dari The University of Melbourne (2007).



SUBAKTI SYUKUR
Direktur Operasi II

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 55 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 1986. Diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 29 Agustus 2016.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Marga Lingkar Jakarta (2014-2016), dan GM Cawang-Tomang-Cengkareng (2008-2014).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1986) dan S2 Magister Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2010).



HASANUDIN
Direktur Pengembangan

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Depok.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 54 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga tahun 1988. Diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016.
- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Trans Lingkar Kita Jaya (sejak 2015), Komisaris

- Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (sejak 2016). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasamarga Pandaan Malang (2016-2017), Komisaris PT Trans Marga Jateng (2012-2015), Komisaris PT Marga Mandala Sakti (2008-2010), dan Kepala Divisi Pemeliharaan (2006-2012).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil Transportasi di Institut Teknologi Sepuluh Noverber, Surabaya (1987) dan gelar S2 Master Engineering bidang Transportasi dari University of New South Wales, Sydney, Australia (1994).



DONNY ARSAL
Direktur Keuangan

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 47 tahun.
- Diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017.

- Sebelumnya menjabat sebagai Managing Director PT Mandiri Sekuritas (2016-2017), Senior Executive Vice President PT Mandiri Sekuritas (2016), Director Head of Investment Banking, PT Mandiri Sekuritas (2010-2016), Associate Director of Investment Banking, PT Mandiri Sekuritas (2004-2010), AVP of Investment Banking PT Mandiri Sekuritas (2003-2004), Manager of ICO, Treasury Division (2000-2003), dan Account Officer of Corporate Banking Bank Bumiputera (1996-2000).
- Meraih gelar S1 Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1994).



KUSHARTANTO KOESWIRANTO
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum/Direktur Independen

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 56 tahun.
- Diangkat menjadi Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum/Direktur Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017.

- Sebelumnya menjabat sebagai President Director KTalents Asia (2016-2017), Group Human Resources Director Agung Podomoro Group (2010-2016), Human Resources and Business Support Director PT Lotte Shopping Indonesia (2007-2010), Country Director Watson Indonesia (2006-2007), Group Human Resources Director PT Mitra Adi Perkasa Tbk. (2004-2006), Corporate Human Resources Director PT Hero Supermarket Tbk. (2002-2004), Human Resources Division Head Coca Cola Amatil Indonesia (1996-2002), dan National BAT Indonesia Tbk. (1989-1996).
- Meraih gelar S1 Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (1985) dan gelar S2 Master of Business Administration dari IPMI International Business School (2000).

KOMITE AUDIT



SIGIT WIDYAWAN
Ketua

- Menjadi Ketua Komite Audit sejak April 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-066/IV/2015, diangkat kembali menjadi Ketua Komite Audit sejak April 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-036/III/2016 dan diangkat

kembali menjadi Ketua Komite Audit sejak April 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP 83/IV/2017.

- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Jasa Marga.
- Profil ringkas dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris.



TEGUH PRASTIYO
Anggota

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 52 tahun.
- Menjadi Anggota Komite Audit sejak Maret 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-036/III/2016 dan diangkat kembali menjadi Anggota Komite Audit sejak April 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP 85/IV/2017.
- Saat ini juga merupakan Managing Partner of Tax Accounting & Management Consultants, Prastiyo & Co. (sejak 2007). Sebelumnya pernah menjadi Anggota Komite Audit PT Reasuransi Nasional Indonesia (2014-2016), Partner of Tax Accounting and Management Consultants ABW & Co. (2000-2007), Auditor Eksternal

Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Darmawan & Co. (1996-2000) dan Auditor Eksternal KAP Prasetio Utomo (1992-1996).

- Meraih gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo (1991) dan merupakan pemegang Sertifikat Akuntan Negara Terdaftar dari Kementerian Keuangan, Konsultan Pajak Bersertifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak, Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Certification in Audit Committee Practices (CACP) dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dan Certified Professional Auditor of Indonesia (CPAI) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP), serta merupakan anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI).



AGITA WIDJAJANTO
Anggota

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 46 tahun.
- Menjadi Anggota Komite Audit sejak April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP 84/IV/2017.
- Saat ini juga menjabat Kepala ISub Direktorat Bimbingan Teknis Jalan Daerah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga (sejak Maret 2017) dan Ketua Bidang Pembinaan Anggota, Sertifikasi dan Pengembangan Profesi, Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Provinsi DKI Jakarta (sejak Oktober 2017). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015), Kepala Bidang Pengembangan Pola Investasi, Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi, Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum (2011-2015), dan Kepala Sub Bidang Pengendalian Investasi, Bidang Investasi, Sekretariat BPJT, Departemen Pekerjaan Umum (2005-2011). Sejak 2005 aktif dalam berbagai kepanitiaan tender, kelompok kerja, proyek, task force, dan lain-lain di Kementerian Pekerjaan Umum.

- Meraih gelar Insinyur Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1995), gelar Master dalam Bidang Underground Space Technology dari International Institute for Infrastructures, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) Delft, Netherlands (2001), serta gelar International Certificate in Supply Chain Management (2016) dan gelar Certification in Audit Committee Practices (CACP) dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) (2017).

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN RISIKO



REFLY HARUN
Ketua

- Menjadi Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko sejak Desember 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-160a/XII/2015, diangkat kembali menjadi Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko sejak April 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-040a/IV/2016 dan

- diangkat kembali menjadi Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko sejak April 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-75/IV/2017.
- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Jasa Marga.
- Profil ringkas dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris.



AGUS SUHARYONO
Wakil Ketua

- Menjadi Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko sejak April 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP 040a/IV/2016 dan diangkat kembali menjadi Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan

- Risiko sejak April 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-75/IV/2017.
- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Jasa Marga.
- Profil ringkas dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris.



TJAHJANTO BUDISATRIO
Anggota

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 52 tahun.
- Menjadi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko sejak April 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP 076/IV/2017.
- Saat ini juga merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan berbagai pengalaman mengajar di bidang Ekonomi (sejak 1992). Sebelumnya menjabat sebagai

- Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko PT Pelindo II (Persero) (2012-2017), Anggota Komite Audit PT PGN (Persero) Tbk. (2006-2012), Wakil Direktur Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Indonesia/LM FEUI (2001-2004) dan Kepala Divisi Penelitian dan Konsultasi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Indonesia/LM FEUI (2000-2001).
- Meraih gelar S1 Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1990), gelar S2 Magister Ekonomi dari the Australian National University (1999), dan Kandidat Doktor di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia (2011).



ABRAM ELSAJAYA BARUS
Anggota

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 51 tahun.
- Menjadi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko sejak April 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP 040a/IV/2016 dan diangkat kembali menjadi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko sejak April 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP 77/IV/2017.
- Saat ini juga menjabat Kepala Sub Direktorat Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Direktorat Jalan

- Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga (sejak 2015). Sebelumnya pernah menjabat berbagai posisi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di antaranya sebagai Kepala Bidang Teknik, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol/BPJT (2005-2008, 2014-2015), Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan, Sekretariat BPJT (2008-2014), dan Kepala Sub Bidang Pemberdayaan, Bidang Pembinaan, Pusat Pengembangan Investasi, BAPEKIN (2001-2005).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1990) dan S2 Transportasi dari University of New South Wales, Sidney, Australia (2000).

PEJABAT SENIOR JASA MARGA

KANTOR PUSAT



MOHAMAD AGUS SETIAWAN
Corporate Secretary

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 46 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 02 Desember 1996. Diangkat menjadi Corporate Secretary sejak tanggal 28 April 2017 berdasarkan Keputusan Direksi No. 080/AA.P-6a/2017 tanggal 28 April 2017.
- Sebelumnya menempati berbagai posisi kunci di Jasa Marga di antaranya Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Malang (2016-2017), Direktur Utama PT Jasamarga Properti (2014-2016), dan VP Related Business Development (2012-2014).
- Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung (1995) dan S2 Teknik Pengelolaan Jaringan Jalan, kerjasama Departemen Pekerjaan Umum dengan Universitas Parahyangan Bandung (2009).



LAVIANA SRI HARDINI
Head of Internal Audit

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang Selatan.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 55 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak tahun 1989. Diangkat menjadi Head of Internal Audit sejak 24 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Direksi No. 009/AA.P-6a/2017 tanggal 24 Januari 2017.
- Sebelumnya menempati berbagai posisi kunci di antaranya Senior Auditor, Internal Audit (2015-2017), Deputy General Manager Maintenance Planning and Administration, Cabang Jagorawi (2013-2015) dan Kepala Bagian Program dan Administrasi Teknik, Cabang Jagorawi (2012-2013).
- Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil Transportasi dari Universitas Trisakti, Jakarta (1988).



VERA KIRANA
VP Toll Road Business Development

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 39 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 06 Oktober 2003. Diangkat menjadi VP Toll Road Business Development berdasarkan Keputusan Direksi 059/AA.P-6a/2018 tanggal 12 Februari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai VP Related Business Development (2017-2018), Assistant Vice President Highway Engineering, Divisi Highway and Traffic Engineering (2016-2017), Kepala Divisi Pemeliharaan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2015) dan Assistant Vice President Maintenance Program, Divisi Maintenance (2013-2015).
- Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil dari Universitas Sriwijaya (2000) dan S2 Magister Management dari Universitas Indonesia (2003).



DENNY ABDURACHMAN
VP Related Business Development

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 49 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 September 1995. Diangkat sebagai VP Related Business Development berdasarkan Keputusan Direksi No. 060/AA.P-6a/2018 tanggal 14 Februari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Teknik PT Jasa Marga Properti (2016-2018), General Manager Teknik dan Operasional PT Jasa Marga Properti (2015-2016), dan AVP Property Business Development, Divisi Related Business Development (2013-2015).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1992) dan S2 Magister Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2011).



AYU WIDYA KISWARI
VP Highway Engineering Planning and Development

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 47 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 September 1995. Diangkat sebagai VP Highway Engineering Planning and Development dengan Surat Keputusan Direksi No. 209/AA.P-6a/2016 tanggal 31 Desember 2016.
- Sebelumnya menjabat sebagai VP Highway and Traffic Engineering (2015-2016), VP Maintenance (2014-2015), Maintenance Project Control Advisor (2013-2014), dan Staf Utama Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Divisi Pemeliharaan (2011-2013).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil Perhubungan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).



AGUS SOFIAN
VP Information and Technology

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 46 tahun.
- Diangkat menjadi VP Information and Technology berdasarkan Kontrak Direksi No. 73/KONTRAK-DIR/2016 tanggal 13 Juni 2016.
- Sebelumnya menjabat sebagai Manager Decision Support & EIS Development, Divisi IT PT Telkom Indonesia (2014-2016) dan Manager Decision Support System & Data Mining, Divisi IT PT Telkom Indonesia (2012-2014).
- Meraih gelar S1 Teknik Elektro dari Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung (1995), dan S2 Business Telecommunication dari Telkom University (2016).



ADIK SUPRIATNO
VP Corporate Planning &
Portfolio Management

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 54 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 18 Januari 1988. Diangkat sebagai VP Corporate Planning berdasarkan Keputusan Direksi No. 148/AA.P-6a/2016 tanggal 21 September 2016.
- Sebelumnya menjabat sebagai Senior Auditor, Internal Audit (2014-2016), dan Direktur Keuangan dan Umum, PT Sarana Marga Utama (2013-2014).
- Meraih gelar S1 Sarjana Akuntansi dari STIE YAI Jakarta (1997).



ADI PRASETYANTO
VP Business Management

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 44 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 Agustus 1997. Diangkat sebagai VP Business Management berdasarkan Keputusan Direksi No. 131/AA.P-6a/2018 tanggal 09 Januari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasa Layanan Pemeliharaan (2015-2018), Direktur Teknik PT Jasa Layanan Pemeliharaan (2015), Assistant Vice President Area 1 Subsidiary Management, Divisi Toll Road Business Development (2014), dan Pemimpin Proyek JORR W2 Utara, PT Marga Lingkar Jakarta (2012-2014).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro (1996) dan S2 Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia (2003).



BAGUS CAHYA ARINTA B.
VP Operation Management

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 49 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 September 1995. Diangkat sebagai GM Cawang-Tomang-Cengkareng berdasarkan Keputusan Direksi No. 002/AA.P-6a/2017 tanggal 10 Januari 2017. Selanjutnya sejak 01 Juni 2017 menjabat sebagai GM Cawang-Tangerang-Cengkareng.
- Sebelumnya menjabat sebagai GM Jagorawi (2015-2017), GM Semarang (2014-2015), dan Assistant Vice President Traffic Management, Divisi Operation Management (2013-2014).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya (1993).



RUDY HARDIANSYAH
VP Maintenance

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 46 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 Agustus 1997. Diangkat sebagai VP Maintenance berdasarkan Keputusan Direksi No. 158/AA.P-6a/2016 tanggal 12 September 2017.
- Sebelumnya menjabat sebagai Plt. Direktur Teknik, PT Trans Marga Jatim Pasuruan (2017), Project Manager, PT Trans Marga Jatim (2013-2017), dan Kepala Bagian Perencanaan Teknik, Proyek Bisnis Pengembangan Properti di Koridor Jalan Tol di Jawa Timur (2012-2013).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1996) dan S2 Magister Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan (2010).



LUSSY ARIANI SEBA
VP Human Capital Strategy
and Policy

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 43 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 Agustus 1996. Diangkat sebagai VP Human Capital Strategy and Policy berdasarkan Keputusan Direksi No. 041/AA.P-6a/2018 tanggal 09 Februari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai Senior Manager Career Management, Divisi Human Capital Services (2016-2018), Assistant Vice President Human Capital Development, Divisi Human Capital Strategy and Policy (2013-2016), dan Staf Madya Bidang Pelatihan dan Pengembangan SDM, Biro Pengembangan Organisasi dan Manajemen (2011-2013).
- Meraih gelar Sarjana D3 Teknik Komputer dari Politeknik ITB (1996) dan S1 Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Respati Jakarta (2007).



NAZARUDDIN
GM Human Capital Services

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 53 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 19 Juli 1984. Diangkat sebagai GM Human Capital Services berdasarkan Keputusan Direksi No. 105/EA.P-6a/2017 tanggal 31 Mei 2017.
- Sebelumnya menjabat sebagai Manager Divisi Human Resources, PT Kereta Cepat Indonesia China (2016-2017), Senior Manager Remuneration, Human Capital Services (2011-2016), dan Kepala Bagian Hubungan Industrial, Biro Manajemen Sumber Daya Manusia (2004-2011).
- Meraih gelar S1 Sarjana Ilmu Administrasi dari STIA LAN RI, Jakarta (1999).



DADAN WARADIA
GM General Affairs

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 51 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 09 Desember 1991. Diangkat sebagai GM General Affairs berdasarkan Keputusan Direksi No. 027/AA.P-6a/2018 tanggal 30 Januari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Utama Marga Waskita (2017-2018), GM Keuangan dan Administrasi PT Cinere Serpong Jaya (2016-2017), dan Assistant Vice President IT Planning and Development, Divisi Information Technology (2013-2016).
- Meraih gelar S1-Sarjana Teknik Statistika dari Institut Pertanian Bogor (1990).



NIXON SITORUS
GM Jasa Marga Learning Institute

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 45 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak tahun 1997. Diangkat sebagai GM Jasa Marga Learning Institute berdasarkan Keputusan Direksi No. 053/AA.P-6a/2015 tanggal 09 Februari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai VP Risk and Quality Management (2015-2018), dan Deputy General Manager Toll Collection Management, Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng (2013-2015).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung (1995) dan S2 Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia (2005).



PRIHANDAYANI
GM Community Development Program

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 50 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 16 April 1987. Diangkat sebagai GM Community Development Program berdasarkan Keputusan Direksi No. 094/AA.P-6a/2015 tanggal 29 Juni 2015.
- Sebelumnya menjabat sebagai Assistant Vice President Services Business Development, Divisi Related Business Development (2013-2015), dan Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Pengendalian Program, Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (2007-2013).
- Meraih gelar S1 Sarjana Akuntansi dari STIE YAI Jakarta (1991).



SITI SARAH
VP Accounting and Tax

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 47 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 Agustus 1997. Diangkat sebagai VP Accounting and Tax berdasarkan Keputusan Direksi No. 057/AA.P-6a/2018 tanggal 14 Februari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Jasamarga Pandaan Malang (2016-2018), Assistant Vice President Accounting, Divisi Finance and Accounting (2014-2016), dan Senior Specialist Financial Accounting Divisi Finance and Accounting (2009-2013).
- Meraih gelar S1 Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran Bandung (1996) dan S2 Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia (2010).



MERY NATACHA PANJAITAN
VP Risk and Quality Management

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 43 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 06 Oktober 2003. Menjabat sebagai VP Risk and Quality Management berdasarkan Keputusan Direksi No. 054/AA.P-6a/2018 tanggal 09 Februari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai Assistant Vice President Maintenance Program, Divisi Maintenance (2015-2018), Deputy General Manager Toll Collection Management, Cabang Jagorawi (2014-2015), Deputy General Manager Toll Collection Management, Cabang Jakarta-Tangerang (2012-2014), dan Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Proyek Penataan dan Perluasan Kantor Pusat, Gerbang Tol TMII Utama, Jagorawi dan Sekitarnya (2012).
- Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil dari Universitas HKBP Nommensen Medan (1998) dan meraih gelar S2 Teknik Sipil dari Universitas Indonesia (2002).



ALEXANDER ARIEL KOESTRIYUGA
VP Legal and Compliance

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 35 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 Mei 2017. Diangkat sebagai VP Legal and Compliance berdasarkan Kontrak Direksi No. 67/KONTRAK-DIR/2017 tanggal 02 Mei 2017.
- Sebelumnya menjabat sebagai Legal and Business Contract Advisor, PT GMF Aero Asia (Garuda Indonesia Group) (2009-2017), Legal Expert, PT Pertamina (Persero) (2007-2009), dan Corporate Lawyer, Marsinah Marotoatmodjo Iskandar K Law Office (2005-2007).
- Meraih gelar S1 Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (2006).



EKA SETYA ADRIANTO
Plt. VP Corporate Finance

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 33 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 September 2010. Diangkat sebagai Plt. VP Corporate Finance berdasarkan Keputusan Direksi No. 009/EA.P-6a/2018 tanggal 12 Januari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai AVP Strategic Planning, Divisi Corporate Planning (2015-2017), Business Strategy Manager, Divisi Corporate Planning (2013-2015), dan Staf Pratama Satu Bidang Manajemen Investasi, Biro Perencanaan Perusahaan (2010-2013).
- Meraih gelar S1 Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Gajah Mada (2007).

KANTOR CABANG



FITRI WIYANTI
GM Jagorawi
(Jakarta-Bogor-Ciawi)

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 43 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 Januari 1998. Diangkat sebagai GM Jagorawi berdasarkan Keputusan Direksi No. 034/AA.P-6a/2018 tanggal 09 Februari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai Assistant Vice President Toll Collection Management, Divisi Operation Management (2012-2018), Kepala Bagian Manajemen Pengumpulan Tol Cabang Jakarta-Tangerang (2010-2012), dan Kepala Seksi Perencanaan Program dan Pengelolaan Data, Divisi Manajemen Operasi (2007-2010)
- Meraih gelar S1 Teknik Mesin dari Universitas Indonesia (1997).



TEDDY ROSADI
GM Jakarta-Tangerang-
Cengkareng

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 49 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 04 September 1995. Diangkat sebagai GM Jakarta-Tangerang-Cengkareng berdasarkan Keputusan Direksi No. 024/AA.P-6a/2018 tanggal 30 Januari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai GM Surabaya-Gempol (2017-2018), GM Semarang (2017), dan GM Palikanci (2015-2017).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura Pontianak (1993) dan S2 Teknik Sipil Universitas Taruma Negara (2015).



RADDY R. LUKMAN
GM Jakarta-Cikampek

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 50 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 02 Desember 1996. Diangkat sebagai VP Operation Management dengan Surat Keputusan Direksi No. 056/AA.P-6a/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- Sebelumnya menjabat sebagai GM Surabaya-Gempol (2015-2017), GM Belmera (2014), dan Deputy General Manager Toll Collection Management, Cabang Jakarta-Cikampek (2012-2014).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Universitas Indonesia (1994).



REZA FEBRIANO
GM Purbaleunyi (Purwakarta-
Bandung-Cileunyi)
Merangkap Pgs GM Palikanci

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 38 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 06 Oktober 2003. Diangkat sebagai GM Purbaleunyi berdasarkan Keputusan Direksi No. 157/AA.P-6a/2017 tanggal 12 September 2017. Diangkat sebagai Pejabat Pengganti Sementara GM Palikanci berdasarkan Surat Perintah Direksi No. 82/EA.P-6c/2018 tanggal 9 Februari 2018
- Sebelumnya menjabat sebagai VP Maintenance (2015-2017) merangkap Pgs. Pemimpin Proyek Penataan dan Perluasan Kantor Pusat, Kantor Cabang Jagorawi dan sekitarnya (2016-2017), Assistant Vice President Traffic Engineering, Divisi Highway and Traffic Engineering (2014-2015), dan Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan, Proyek Penambahan Lajur Jalan Tol Jagorawi & Relokasi Gerbang Tol Taman Mini Utama (2014).
- Meraih gelar S1 Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (2002), S1 Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan (2003), dan S2 Teknik Sipil dari Universitas Indonesia (2007).



A. J. DWI WINARSA
GM Surabaya-Gempol

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 46 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 Agustus 1997. Diangkat sebagai GM Surabaya-Gempol berdasarkan Keputusan Direksi No. 024/AA.P-6a/2018 tanggal 30 Januari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai GM Semarang (2017-2018), Pemimpin Proyek PT Ngawi Kertosono Jaya (2015-2017), dan General Manager Teknik dan Operasi, PT Trans Marga Jateng (2015).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1996) dan S2 Manajemen Proyek, Universitas Indonesia (2005).



JOHANNES MANCELLY
GM Semarang

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 45 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 06 Oktober 2003. Diangkat sebagai GM Semarang berdasarkan Keputusan Direksi No. 025/AA.P-6a/2018 tanggal 30 Januari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Proyek PT Solo Ngawi Jaya (2015-2018), Deputy General Manager Operation, Cabang Semarang (2014-2015), dan Manager Pengendalian Proyek, PT Trans Marga Jateng (2013-2014).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung (1997) dan S2 Geoteknik, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung (2002).



IWAN ROSA PUTRA
GM Belmera
(Belawan-Medan-Tanjung Morawa)

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 46 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 02 Desember 1996. Diangkat sebagai GM Belmera berdasarkan Keputusan Direksi No. 048/AA.P-6a/2017 tanggal 13 Maret 2017.
- Sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Proyek PT Solo Ngawi Jaya (2015-2017), Coordinator Project Management Office, Divisi Maintenance (2015), dan Deputy General Manager Maintenance Execution, Cabang Jagorawi (2015).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (1996).

ENTITAS ANAK



RICKY DISTAWARDHANA
Direktur Utama
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 52 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 November 1989. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jalantol Lingkarluar Jakarta berdasarkan Keputusan Direksi No. 046/AA.P-6a/2017 tanggal 13 Maret 2017.
- Sebelumnya menjabat sebagai GM Purbaleunyi (2014-2017), VP Maintenance (2012-2014), dan Kepala Cabang Jakarta-Tangerang (2010-2012).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1989).



HENDRO ATMODOJO
Direktur Utama
PT Marga Sarana Jabar

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 57 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 November 1989. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar berdasarkan Keputusan Direksi No. 115/AA.P-6c/2015 sejak tanggal 11 Juni 2015.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik PT Marga Kunciran Cengkareng (2012-2015), dan Kepala Cabang Jagorawi (2009-2012).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1986) dan S2 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (2008).



YUDHI KRISYUNORO
Direktur Utama
PT Trans Marga Jateng

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Depok.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 58 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 02 Juni 1986. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Trans Marga Jateng berdasarkan Akta RUPS Luar Biasa No. 13/207 tanggal 22 Maret 2017.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2015-2017), GM Jakarta-Cikampek (2012-2015), Pemimpin Proyek Penambahan Lajur Jalan Tol Jagorawi dan Relokasi Gerbang Tol Taman Mini (2010-2012).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil Struktur dari Institut Teknologi Bandung (1985) dan S2 Teknik Sipil Transportasi Universitas Indonesia (1998).



BUDI PRAMONO
Direktur Utama
PT Jasamarga Surabaya
Mojokerto

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 57 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 02 Juni 1986. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Surabaya Mojokerto berdasarkan Keputusan Direksi No. 072/AA.P-6a/2014 tanggal 09 Juni 2014.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik PT Trans Lingkar Kita Jaya (2012-2014), Kepala Cabang Jakarta-Cikampek (2009-2012), dan Kepala Cabang Jagorawi (2006-2009).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil Transportasi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (1985).



ENKKY SASONO A. W.
Direktur Utama
PT Jasamarga Bali Tol

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 51 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 10 Juli 1986. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol berdasarkan Keputusan Direksi No. 039/AA.P-6a/2018 tanggal 09 Februari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Operasi PT Ismawa Trimitra (2015-2018), GM Community Development Program (2015), dan GM Jasa Marga Development Center (2011-2015).
- Meraih gelar S1 Administrasi Niaga dari STIA LAN Jakarta (1996), gelar Magister Manajemen dari STIE IPWI Jakarta (2001), dan gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Mercu Buana (2016).



R. KRISTIANTO
Direktur Utama
PT Marga Lingkar
Jakarta

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 55 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 November 1989. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Marga Lingkar Jakarta berdasarkan Keputusan Direksi No. 022/AA.P-6a/2018 tanggal 08 Januari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai GM Jakarta-Cikampek (2017-2018), GM Semarang (2015-2017), dan Kepala Bagian Manajemen Lalu Lintas, Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng (2007-2012).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil, Universitas Indonesia (1988).



RAHARDJO
Plt. Direktur Utama
PT Jasamarga Gempol
Pasuruan

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 55 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 18 Januari 1988. Diangkat sebagai Plt. Direktur Utama Jasamarga Gempol Pasuruan berdasarkan Keputusan Direksi No. 140/AA.P-6a/2017 tanggal 31 Juli 2017.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik PT Jasamarga Gempol Pasuruan (2015-2017), Advisor PT Jasamarga Pandaan Tol (2013-2015), dan Staf Utama Bidang Pelaksanaan Pemeliharaan, PT Margabumi Adhikaraya (2012-2013).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (1985).



SARI PURNAWARMAN
Direktur Utama
PT Jasamarga
Pandaan Tol

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 54 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 02 Juni 1986. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Tol berdasarkan Keputusan Direksi No. 078/EA.P-6a/2017 tanggal 07 April 2017.
- Sebelumnya menjabat sebagai GM Jakarta-Tangerang (2014-2017), GM Semarang (2012-2014), dan Kepala Bagian Manajemen Lalu Lintas, Cabang Jagorawi (2010-2012).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro (2003).



TRULY NAWANGSASI
Direktur Utama
PT Marga Trans Nusantara

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 49 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 02 Desember 1996. Diangkat menjadi Direktur Utama PT Marga Trans Nusantara berdasarkan Keputusan Direksi No. 050/AA.P-6a/2018 tanggal 12 Februari 2018.
- Sebelumnya menempati berbagai posisi kunci di antaranya VP Toll Road Business Development (2015-2018), VP Highway Traffic and Engineering (2014-2015), dan Assistant Vice President Toll Road Investment Development, Divisi Toll Road Business Development (2013-2014).
- Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil dari Universitas Indonesia (1992).



EDWIN CAHYADI
Direktur Utama
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 54 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 18 Januari 1988. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Kunciran Cengkareng berdasarkan Keputusan Direksi No. 011/AA.P-6a/2018 tanggal 08 Januari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Marga Lingkar Jakarta (2016-2018), Direktur Teknik dan Operasi, PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2015-2016), Direktur Teknik dan Operasi PT Marga Nuyasumo Agung (2009-2015), Kepala Cabang Semarang (2008-2009), dan Kepala Cabang Belmera (2006-2008).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Universitas Medan Area (1998).



AGUS SUHARJANTO
Direktur Utama
PT Jasamarga Kualanamou Tol

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 58 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 Juni 1986. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Kualanamou Tol berdasarkan Keputusan Direksi No. 011/AA.P-6a/2015 tanggal 02 Februari 2015.
- Sebelumnya menjabat sebagai VP Toll Road Business Development (2014) merangkap Direktur Utama PT Jasamarga Kualanamou Tol dan Direktur Utama PT Marga Trans Nusantara (2011-2014), dan Direktur Utama PT Trans Marga Jateng (2007-2011).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil Konstruksi dari Universitas Gajah Mada (1986).



DAVID WIJAYATNO
Direktur Utama
PT Jasamarga Solo Ngawi

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 58 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 Januari 1988. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Solo Ngawi berdasarkan Keputusan Direksi No. 091/AA.P-6a/2015 tanggal 02 Februari 2015.
- Sebelumnya menjabat sebagai Corporate Secretary (2012-2015), Pemimpin Proyek Bisnis Pengembangan Properti JORR 2, BORR, Semarang-Solo dan Surabaya-Mojokerto (2010-2012), dan Kepala Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng (2006-2008).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil Transportasi dari Universitas Gajah Mada (1986).



IWAN MOEDYARNO
Direktur Utama
PT Ngawi Kertosono Jaya

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 58 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 02 Juni 1986. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya berdasarkan Keputusan Direksi No. 091/AA.P-6a/2015 tanggal 01 Juli 2015.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Ismawa Trimitra (2013-2015), Pemimpin Proyek Pengembangan Properti di Lahan Ex-Workshop dan Kantor Cabang Jagorawi (2010-2015), dan Kepala Divisi Pengembangan Usaha Lain (2008-2010).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1985), dan S2 Bisnis, IIM-Pittsburgh State University (1993).



SILVESTER ARYAN WIDODO
Direktur Utama
PT Cinere Serpong Jaya

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 58 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 29 Juli 1985. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Cinere Serpong Jaya berdasarkan Keputusan Direksi No. 132/AA.P-6a/2015 tanggal 01 September 2015.
- Sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Proyek Bisnis Pengembangan Usaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (2010-2015), Kepala Divisi Teknik PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2003-2007), dan Kepala Sub Divisi Administrasi Teknik, Divisi Perencanaan Teknik (1997-2002).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1985).



ARIE IRIANTO
Direktur Utama
PT Jasamarga Semarang Batang

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 45 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 Agustus 1997. Diangkat sebagai Direktur Utama PT PT Jasamarga Semarang Batang berdasarkan Keputusan Direksi No. 036/AA.P-6a/2016 tanggal 09 Februari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (2016-2018), Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng (2015-2016), Assistant Vice President Area 1 Subsidiary Management, Divisi Toll Road Business Development (2014-2015), dan Senior Specialist Bidang Perencanaan Teknik, PT Trans Marga Jateng (2012-2014).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1996) dan S2 Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia (2005).



STH SARAGI
Direktur Utama
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 51 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 September 1995. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda berdasarkan Keputusan Direksi No. 037/AA.P-6a/2018 tanggal 09 Februari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (2017-2018), Highway Engineering Planning and Development Advisor, Divisi Highway Engineering Planning and Development (2016-2017), dan Highway Engineering Advisor, Divisi Highway and Traffic Engineering (2013-2016).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1992).



GEORGE IMP MANURUNG
Direktur Utama
PT Jasamarga Manado Bitung

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 46 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 Desember 1996. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung berdasarkan Keputusan Direksi No. 056/AA.P-6a/2016 tanggal 06 Juni 2016.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik dan Operasi PT Marga Sarana Jabar (2015-2016), Assistant Vice President Toll Road Investment Development, Divisi Toll Road Business & Development (2015), dan Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi 2A (2012-2014).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1996) dan S2 Business and Technology dari University of New South Wales, Australia (2002).



AGUS PURNOMO
Plt. Direktur Utama
PT Jasamarga Pandaan Malang

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 54 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 18 Januari 1988. Diangkat sebagai Plt. Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Malang berdasarkan Keputusan Direksi No. 104/AA.P-6a/2017 tanggal 31 Juli 2017.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Gempol Pasuruan (2015-2017), Head of Internal Audit (2015), dan GM Cawang-Tomang-Cengkareng (2014-2015).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (1987).



DJOKO DWIJONO
Direktur Utama
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 58 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 02 Juni 1986. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 13 tanggal 24 November 2016.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi PT Trans Lingkar Kita Jaya (2015-2016), Head of Internal Audit (2008-2015), dan Kepala Divisi Pengembangan Usaha Lain (2006-2008).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1986) dan S2 Engineering University of Melbourne, Australia (1994).



CHRISTANTIO PRIHAMBODO
Direktur Utama
PT Jasamarga Transjawa Tol

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 54 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 18 Januari 1988. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Transjawa Tol berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 22 tanggal 02 Juni 2017.
- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasamarga Gempol Pasuruan (sejak 2015). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (2016-2017), Direktur Operasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (2015-2016), VP Highway and Traffic Engineering (2015), dan GM Surabaya-Gempol (2014-2015).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Universitas Indonesia (2002).



DEDI KRISNARIAWAN SUNOTO
Direktur Utama
PT Jasamarga Japek Selatan

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 54 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 November 1989. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Japek Selatan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasamarga Japek Selatan No. 19 tanggal 29 Desember 2017.
- Sebelumnya menjabat sebagai VP Business Management (2016-2017), VP Corporate Planning (2015-2016), VP Related Business Development (2014-2015), dan VP Toll Road Business Development (2006-2014).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada (1988).



D. HARI PRATAMA
Direktur Utama
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 46 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 Agustus 1997. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi No. 21 tanggal 29 Desember 2017.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2017), VP Related Business Development (2015-2017), VP Information Technology (2013-2015), Pemimpin Proyek Bisnis Pengembangan Properti di Koridor Jalan Tol di Jawa Timur (2012-2013), dan Kepala Divisi Pengembangan Usaha Lain (2010-2012).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (1995) dan S2 Teknik Sipil dari Queensland University of Technology, Australia (2001).



SEPTERIANTO SANAF
Direktur Utama
PT Jasamarga Tollroad Operator

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 58 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 02 Juni 1986. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Tollroad Operator berdasarkan Keputusan Direksi No. 128/AA.P-6a/2015 terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2015.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2012-2015), Kepala Divisi Manajemen Operasi (2006-2012), dan Kepala Divisi Pengumpulan Tol (2003-2006).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1986).



ROY ARDIAN DARWIS
Direktur Utama
PT Jasamarga Tollroad Maintenance

- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 53 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 01 November 1989. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Tollroad Maintenance berdasarkan Keputusan Direksi No. 033/AA.P-6a/2018 tanggal 09 Februari 2018.
- Sebelumnya menjabat sebagai GM Jagorawi (2017-2018), GM Cawang-Tomang-Cengkareng (2015-2017), GM Palikanci (2014-2015), dan GM Belmera (2009-2014).
- Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Sains & Teknologi Nasional (1991) dan S2 Sumber Daya Manusia dari Universitas Krisnadwipayana (2004).



IRWAN ARTIGYA SUMADIYO
Direktur Utama
PT Jasamarga Properti

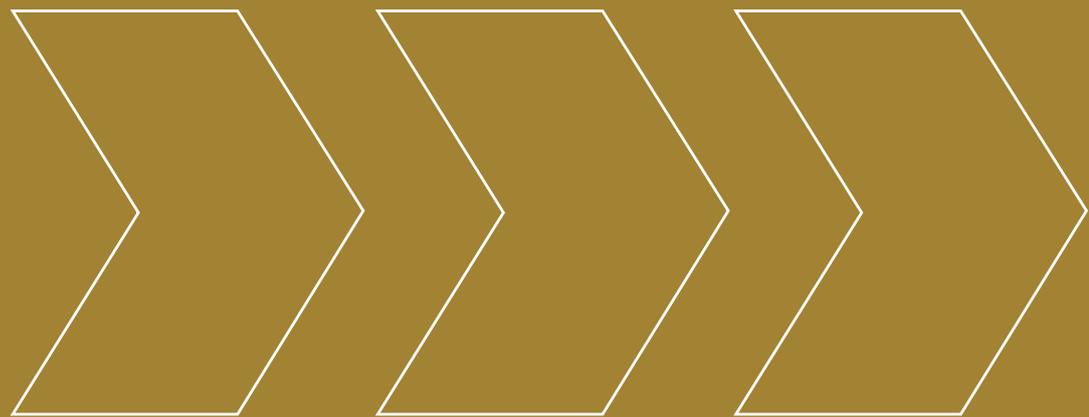
- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.
- Usia per 31 Desember 2017 adalah 47 tahun.
- Bergabung dengan Jasa Marga sejak 12 Juni 2015. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Properti berdasarkan RUPS sirkuler tanggal 27 Juli 2016.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur di perusahaan swasta nasional bidang properti (2009-2015), Direktur di perusahaan swasta nasional bidang konstruksi (2000-2008), dan Direktur di perusahaan swasta nasional bidang konsultan perencanaan (1997-2001).
- Meraih gelar S1 Manajemen dari Universitas Trisakti (1996).



Jalan Tol Dalam Kota atau Jakarta Intra Urban Tollways, mulai dioperasikan secara bertahap sejak tahun 1987 seiring dengan pertumbuhan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis.



02 | IKHTISAR 2017



IKHTISAR 2017

IKHTISAR KEUANGAN 2013-2017

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

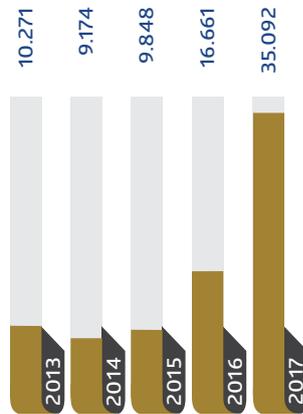
LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	2013*	2014*	2015	2016	2017
Pendapatan	10.271	9.174	9.848	16,661	35.092
Beban Pendapatan	(8.012)	(5.484)	(5.720)	(11,805)	(29.784)
Laba Usaha	2.259	3.073	3.478	4,166	4.648
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.311	1.851	2.068	2,650	3.250
Beban Pajak Penghasilan	(382)	(614)	(749)	(847)	(1.157)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:					
Pemilik Entitas Induk	1.028	1.422	1.466	1,889	2.200
Kepentingan Non Pengendali	(99)	(185)	(147)	(86)	(107)
Total Laba Tahun Berjalan	929	1.237	1.319	1,803	2.094
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:					
Pemilik Entitas Induk	1.027	1.366	1.449	1,771	1.988
Kepentingan Non Pengendali	(99)	(185)	(147)	(87)	(107)
Total Penghasilan Komprehensif	928	1.180	1.302	1,684	1.881
DATA SAHAM					
Jumlah Saham yang Beredar (juta lembar)	6.800	6.800	6.800	7.257	7.257
Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh)	151	209	216	277	303
Dividen per Saham (Rupiah penuh)	79	72	43	78	**
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
Total Aset	28.058	31.860	36.725	53.500	79.193
Total Liabilitas	17.500	20.839	24.356	37.161	60.833
Total Ekuitas	10.558	11.021	12.369	16.339	18.359
Belanja Modal	4.931***	4.788***	4.158***	9.598***	26.783***
Investasi pada Perusahaan Asosiasi	179	171	166	158	887
Modal Kerja Bersih	(1.083)	(485)	(4.015)	(5.661)	(6.011)
RASIO KEUANGAN (%)					
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset	3,66	4,46	3,99	3,53	2,78
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas	10,08	12,90	11,86	11,56	11,97
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan	10,01	15,50	14,89	11,34	6,27
Rasio Lancar	77,77	82,44	48,16	69,60	75,95
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	175,41	189,09	196,92	227,44	330,89
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	63,69	65,41	66,32	66,32	76,82
RASIO INDUSTRI					
Rasio Pendapatan Tol terhadap Panjang Jalan (Rp miliar/km)	10,36	11,85	12,33	13,37	12,18

*) Disajikan kembali

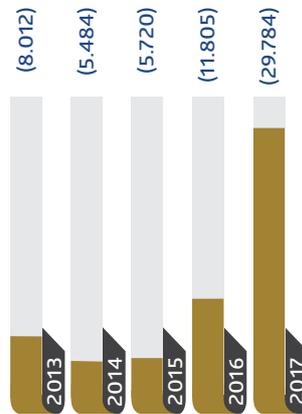
***) Akan ditentukan dalam RUPS Tahunan pada tahun 2017

****) Total Belanja Modal Konsolidasi

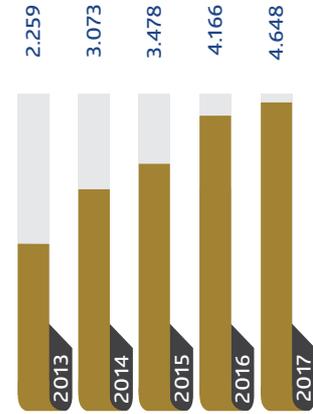
GRAFIK PENDAPATAN 2013-2017
(miliar Rupiah)



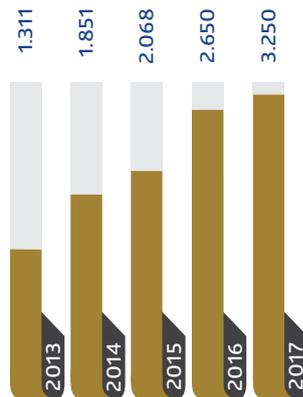
GRAFIK BEBAN PENDAPATAN 2013-2017
(miliar Rupiah)



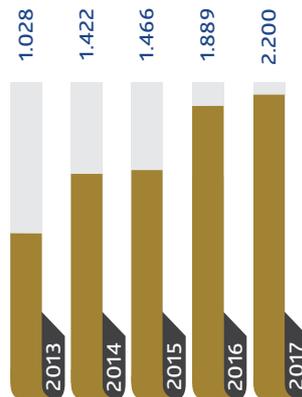
GRAFIK LABA USAHA 013-2017
(miliar Rupiah)



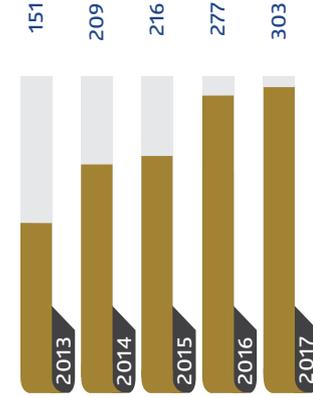
GRAFIK LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 2013-2017
(miliar Rupiah)



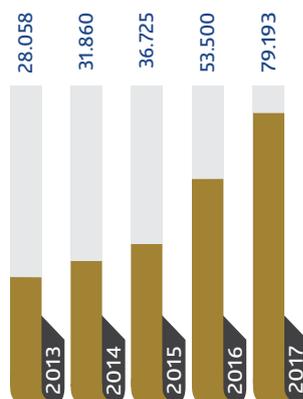
GRAFIK LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 2013-2017
(miliar Rupiah)



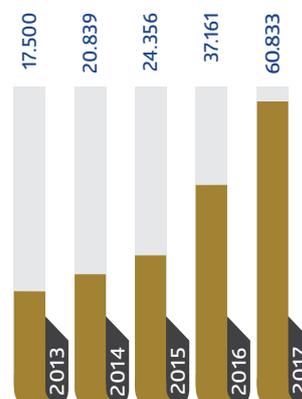
GRAFIK LABA BERSIH PER SAHAM 2013-2017
(miliar Rupiah)



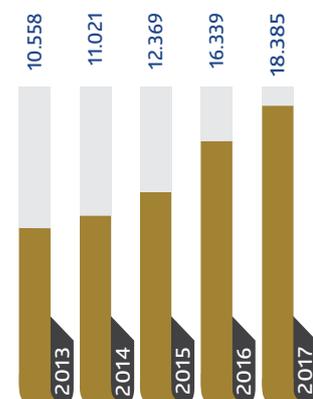
GRAFIK ASET 2013-2017
(miliar Rupiah)



GRAFIK LIABILITAS 2013-2017
(miliar Rupiah)



GRAFIK EKUITAS 2013-2017
(miliar Rupiah)



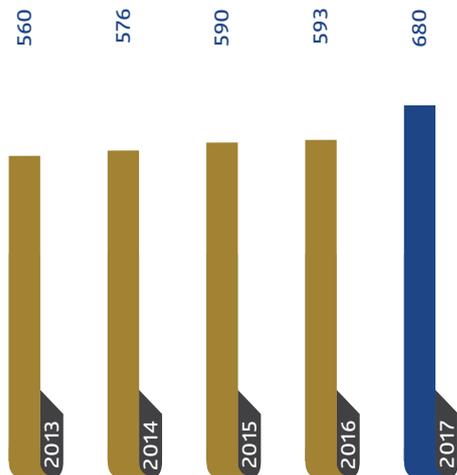
IKHTISAR OPERASIONAL 2013-2017

TABEL IKHTISAR OPERASIONAL 2013-2017

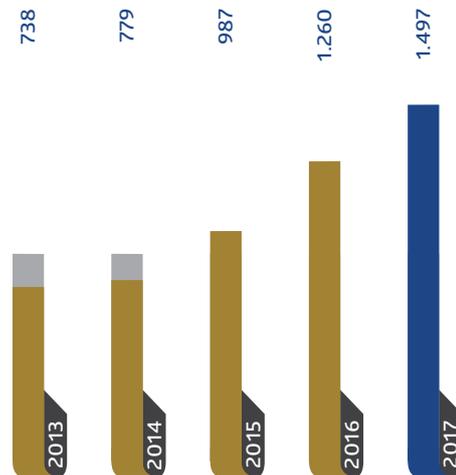
Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan Tol (km)	554	576	590	593	680
Hak Konsesi Jalan Tol (km)	738	779	987	1.260	1.497
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal/SPM	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Jumlah Karyawan (Orang)*	6.654	6.645	9.153	9.376	9.080
Jumlah Petugas Pengumpulan Tol/Pultol (Orang)*	2.521	2.468	4.662	4.652	4.542
Pendapatan Tol Harian Rata-rata (ribuan Rupiah)	15.897.897	18.209.295	19.509.657	21.716.923	22.688.414

*Jumlah Karyawan Konsolidasian

PANJANG JALAN TOL OPERASI 2013-2017 (km)



HAK KONSESI JALAN TOL (km)





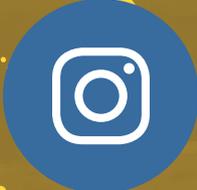
Sebagai bentuk komitmen dalam melayani, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memiliki layanan informasi 24 jam bagi pengguna jalan tol melalui *call center* Jasa Marga di nomor telepon 14080. Di *call center* ini setidaknya melayani minimal 1.000 penelpon setiap harinya.

TALKSHOW

FUN RALLY



TEMU PELANGGAN



MEDIA LUAR RUANG

ADlibs COH

PUBLISHER

CINEMA

ADVERTORIAL

MEDIA MASSA

Flyer

TRANSAKSI

100%

Digital

BALIHO

IKLAN

VMS

GNNT

BTL

PGSM

GDN

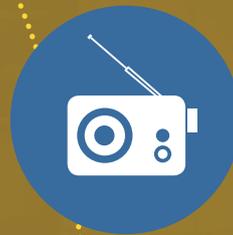
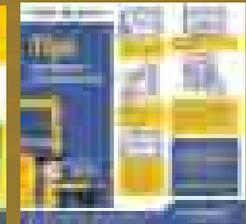
Social Media

JMCARe

INSTAGRAM

SMS BLAST

TWITTER



NON TUNAI

BROSUR

TALKSHOW
INFO PUBLIK
FOCUS MEDIA

PRESS RELEASE

RADIO

SPANDUK

PrintAd

DISKUSI PUBLIK

LEAFLET

INFOGRAFIS

POSM



Manfaat Elektronifikasi Jalan Tol bagi pengguna jalan

- Mudah dan Praktis : tidak perlu membawa uang tunai, higienis
- Akses lebih luas : Meningkatkan akses masyarakat ke sistem pembayaran
- Transparansi Transaksi : Membantu usaha pencegahan dan identifikasi kejahatan criminal
- Mengurangi antrean di gerbang tol akibat waktu transaksi yang lebih cepat di gerbang tol
- Perencanaan Ekonomi lebih Akurat : transaksi tercatat secara lebih lengkap sehingga perencanaan lebih akurat

PROGRAM TRANSAKSI NON TUNAI DI JALAN TOL

LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan maksud meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara terpadu untuk mengoptimalkan tugas BI dan Kementerian PUPR, maka terdapat cakupan kesepakatan sebagai berikut:

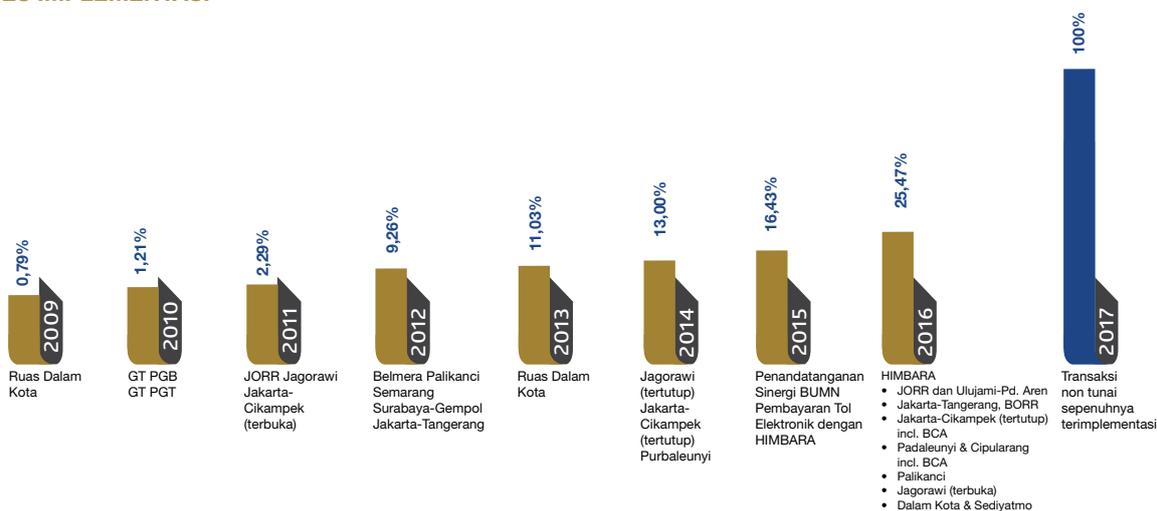
- Program transaksi non tunai di jalan tol sebagai bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
 - Fasilitas pembiayaan infrastruktur
 - Kajian ekonomi dan moneter pembangunan infrastruktur
- Transaksi Non Tunai Jalan Tol tertuang juga dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 16/ PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol. pasal 6 ayat 1 butir a : “Penerapan transaksi tol non tunai di jalan to dilakukan dengan tahapan : Penerapan Transaksi Tol Non Tunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017” dan pasal 6 ayat 3, butir b : “Peningkatan proporsi gardu tidak terima tunai paling sedikit 60% terhadap total jumlah gardu paling lambat bulan September 2017”.

Perseroan sangat mendukung program ini dikarenakan terdapat banyak manfaat dilihat dari beberapa sisi seperti berikut:

- Nasional:
 - ✓ Hemat Energi
 - ✓ Hemat Biaya (biaya produksi instrument nontunai dengan biaya pencetakan, peredaran serta pengelolaan uang tunai tunai)
 - ✓ Pencatatan transaksi secara otomatis sehingga memudahkan dalam menghitung aktivitas ekonomi

- ✓ penggunaan alat pembayaran non tunai juga akan meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*velocity of money*)
- Pengguna Jalan:
 - ✓ Mudah dan Praktis : tidak perlu membawa uang tunai, higienis
 - ✓ Akses lebih luas : Meningkatkan akses masyarakat ke sistem pembayaran
 - ✓ Transparansi Transaksi : Membantu usaha pencegahan dan identifikasi kejahatan criminal
 - ✓ Mengurangi antrean di gerbang tol akibat waktu transaksi yang lebih cepat di gerbang tol
 - ✓ Perencanaan Ekonomi lebih Akurat : transaksi tercatat secara lebih lengkap sehingga perencanaan lebih akurat
- Badan Usaha Jalan Tol:
 - ✓ Meminimalisir biaya penyediaan uang kembalian dan cash handling
 - ✓ Keamanan Pendapatan Tol
 - ✓ Meminimalkan potensi adanya alat pembayaran tol yang diragukan keasliannya
 - ✓ Peningkatan Kualitas SDM Operasional (peningkatan kualitas kesehatan pengumpul tol)
 - ✓ Meningkatkan kapasitas transaksi tanpa harus menambah titik transaksi
 - ✓ Efisiensi biaya pengumpul tol

PROSES IMPLEMENTASI



Pada faktanya Perseroan telah melakukan implementasi transaksi non tunai ini sejak tahun 2009, dengan dimulai dari ruas dalam kota dimulai dengan progress transaksi non tunai sebesar 0.79% dari total transaksi perseroan. Pada tahun 2015 terdapat penandatanganan sinergi BUMN Pembayaran Tol Elektronik dengan Himpunan Bank Negara (HIMBARA) dan terimplementasi hingga tahun 2016 dan meningkatkan porsi transaksi non tunai menjadi 25,47% pada akhir tahun. Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol diatas, untuk mengimplementasikan hal tersebut, Perseroan melakukan beberapa tahapan proses yaitu:

1. **Penyiapan Peralatan dan Pentahapan Gerbang Non Tunai**
Perubahan Gardu Reguler Terbuka/Keluar (*Hybrid*) menjadi Gardu Semi Otomatis (GSO), sehingga memudahkan pengguna jalan melakukan *tapping* e-Toll Card secara mandiri dan juga menambah titik top up tunai di beberapa titik gardu. Selain itu dilakukan rencana secara bertahap implementasi pemilihan gerbang non tunai yang dimulai dari gerbang tol pada ruas JORR yang dimulai pada tanggal 10 September 2017 hingga berakhir pada ruas tol yang berada di Medan. Guna mendukung kelancaran penerapan 100% pembayaran non tunai, Perseroan juga memastikan infrastruktur yang laik fungsi serta dukungan petugas di lapangan melalui Standard Operating Procedure (SOP) untuk mengantisipasi apabila terjadi kepadatan di gerbang tol, yang dapat diakibatkan karena saldo Uang Elektronik yang habis/kurang atau Uang Elektronik yang tidak terbaca/rusak/hilang.
2. **Mempersiapkan Uang Elektronik Multibank**
Selain dengan Himpunan Bank Negara (HIMBARA) perseroan juga melakukan kerja sama dengan bank swasta yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kartu elektronik.
3. **Melakukan Strategi Komunikasi**
Perseroan melakukan strategi komunikasi dengan melakukan sosialisasi diberbagai daerah dengan beberapa cara seperti melakukan edukasi, membuat

media luar ruang, melakukan komunikasi melalui Media Massa, Leaflet, Infografis, Diskusi Publik, dan juga melalui digital seperti VMS, Twitter, Instagram dan JMCARe

Sampai dengan pada tanggal 31 Oktober Perseroan berhasil sepenuhnya mengimplementasikan transaksi non tunai diseluruh gerbang tol. 7 Gerbang Tol (GT) yang terakhir menerapkan 100% pembayaran non tunai adalah GT Surabaya dan GT Madura di Ruas Jalan Tol Surabaya-Madura, serta GT Kriyan, GT Penompo, GT Driyorejo 1, GT Driyorejo 2, dan GT Warugunung di Ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto.

Di hari pertama implementasi sistem pembayaran tol tanpa uang tunai di seluruh jalan tol di Indonesia, Jasa Marga selalu menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai upaya untuk mengurangi antrean dan penumpukan kendaraan di setiap gerbang tolnya. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Jasa Marga adalah dengan menyiapkan petugas operasional untuk membantu kelancaran di setiap gerbang tol. Para petugas juga dikerahkan guna melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna jalan tol terkait sistem pembayaran non-tunai. Selain memberikan edukasi kepada para pengguna jalan terkait elektronifikasi di gerbang tol, pada masa transisi ini, para petugas pengumpul tol berperan untuk memberikan bantuan kepada pengguna jalan tol yang mengalami kendala saat melakukan tapping uang elektronik. Pada sisi SDM, hal ini juga membuktikan bahwa penerapan pembayaran non tunai di jalan tol tidak berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan. Sebagai bentukantisipasi terhadap pengurangan SDM yang terdampak elektronifikasi, Perseroan telah menyiapkan program Alih Profesi (A-Life). Program A-Life menyediakan kurang lebih 900 formasi di Kantor Pusat Jasa Marga, Cabang, Anak Perusahaan, atau menjadi *entrepreneur* yang dapat dipilih oleh para karyawan yang ingin mengubah haluan karirnya.

KILAS BALIK 2017



01



02



03



05



04



06

01 **1 Mar** Ulang Tahun PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ke 39.

02 **15 Mar** Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

03 **16 Mar** Pembukaan Kembali Jembatan Cisomang Untuk Kendaraan Golongan I Non Bus.

04 **9 Apr** Integrasi Sistem Transaksi Pembayaran Tol Ruas Jakarta-Tangerang-Merak Mulai Berlaku, Transaksi Tol di Gerbang Tol Karang Tengah Ditiadakan.

05 **13 Apr** Peresmian Jalan Tol Gempol-Pasuruan Ruas Gempol-Rembang Seksi Bangil-Rembang (7,1 km).

06 **19 Mei** Jasa Marga Resmikan Masjid Al Safar, Masjid Terbesar se-rest area di Indonesia



07



08



09



10



11



12



13

07 **22 Jun** Diskon Tarif Tol 10% Dalam Rangka Idul Fitri 1438 H/ Tahun 2017.

08 **12 Jul** Jasa Marga Raih Dua Penghargaan Dari Kementerian Perhubungan, Kategori II Apresiasi atas Pelayanan Jasa Transportasi yang Optimal dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2017 dan Kategori III Dukungan Sepenuhnya secara aktif dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran.

09 **30 Jul** Jasa Marga kembali menerima penghargaan atas upaya kelancaran arus mudik balik Lebaran 1438 H/2017, penghargaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia diberikan atas prestasi meningkatnya keselamatan dan kelancaran arus mudik Lebaran 2017.

10 **3 Agst** Peresmian Jalan Tol Gempol Pasuruan Ruas Gempol-Rembang Seksi Gempol-Bangil (6,8 km).

11 **17 Agst** Sinergi BUMN (PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga), PT Surveyor Indonesia (SI) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)) dalam Program BUMN Hadir di Provinsi Bali Tahun 2017.

12 **25 Agst** Penawaran Umum KIK EBA Mandiri JSMR01 Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi.

13 **28 Agst** Dalam Rangka Mendukung GNNT, Jasa Marga Berikan Diskon 10% Bagi Pengguna Uang Elektronik.

KILAS BALIK 2017



14



15



16



17



18

- 14 **31** **Pencatatan Perdana KIK EBA**
Agst **JSMR 01**
- 15 **8** **8 September Pukul 00.00 WIB,**
Sep **Perubahan Sistem Transaksi**
Transaksi Tol di GT Cimanggis
Utama dan GT Cibubur Utama
Ditiadakan.

- 16 **25** **Presiden Republik Indonesia**
Sep **Joko Widodo meresmikan**
Jalan Tol Semarang – Solo
Ruas Bawen – Salatiga

- 17 **13** **Peresmian Jalan Tol Medan-**
Okt **Kualanamu-Tebing Tinggi**
Ruas Kualanamu-Sei Rampah
oleh Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo.
- 18 **13** **Investor Gathering PT Marga**
Okt **Lingkar Jakarta.**



19



20



21



22



23



24

19 **13 Okt** Perjanjian Sindikasi Jalan Tol Pandaan-Malang dan Jalan Tol Manado-Bitung.

21 **31 Okt** Pemberlakuan serentak pembayaran 100% non tunai di jalan tol.

23 **13 Des** Seremoni Pencatatan Komodo Bond Jasa Marga di London Stock Exchange.

20 **28 Okt** Sinergi BUMN (Jasa Marga, Bank Mandiri, Bhanda Ghara Rekasa, dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dalam Program BUMN hadir Di Kampus UIN Syarif Hidayatullah.

22 **9 Nov** Seremoni pencatatan Project Bond Ruas Tol MLJ JORR W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami).

24 **19 Des** Peresmian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB, II dan III (Sepanjang-Krian) oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

PENGHARGAAN



72 Emiten Pilihan Analisis 2017
Emiten pilihan Analisis dalam acara CSA (Certified Securities Analyst) Gathering

Asosiasi Analisis Efek Indonesia (AAEI) dan CSA Institute

Main Hall Bursa Efek Indonesia
14 Maret 2017



Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) 2017
kategori Public Service dengan nilai 89.729 atau predikat Excellent untuk ke lima kalinya.

Carre CCSL dan Majalah Service Excellence

Hotel Mulia Jakarta,
12 April 2016



Corporate Image (IMAC) Award 2017

Tempo Media Group

Hotel Mulia Jakarta, 09 Juni 2017



Kategori II Apresiasi atas Pencapaian Hasil yang Optimal dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2017

Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Kementerian Perhubungan,
11 Juli 2017



Kategori III Atas Pelayanan Jasa Transportasi yang Optimal dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2017

Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Jakarta, 10 Juli 2017



Penghargaan atas upaya keselamatan dan kelancaran arus mudik lebaran 1438H/2017

Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Jakarta, Minggu, 30 Juli 2017



Social Business Innovation Award 2017 Category Toll Road Product

Majalah Warta Ekonomi

10 Agustus 2017



The Most Popular Company Category Transportation (Indonesia Corporate PR Award 2017)

Majalah Warta Ekonomi

Balai Kartini, 29 September 2017



The Best PR For Company (Indonesia Corporate PR Award 2017)

Majalah Warta Ekonomi

Balai Kartini, 29 September 2017



The Best Head Of PR (Indonesia Corporate PR Award 2017)

Majalah Warta Ekonomi

Balai Kartini, 29 September 2017



Best Rights of Shareholders

Indonesian Institute for Corporate Director

Ballroom Hotel Pullman, Jakarta,
27 November 2017



Best Communicators 2017

Kategori CEO BUMN TBK
Majalah PR Indonesia

Yogyakarta, 26 Agustus 2018



The Most Popular Company in GCG

Indonesia Corporate Secretary Award 2017

Mawar Ballroom Balai Kartini,
6 Desember 2017



Top 5 GCG Issue in Infrastructure Sector

Indonesia Corporate Secretary Award 2017

Mawar Ballroom Balai Kartini,
6 Desember 2017

SERTIFIKASI

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

Seluruh Kantor Cabang Jasa Marga telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 untuk mutu pengoperasian jalan tol dan sertifikat OHSAS 18001:2007 untuk kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bukti Jasa Marga telah memenuhi standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau kualitas dan standar internasional untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang bertujuan untuk mengelola aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada setiap proses kerja di tempat kerja. Sertifikasi di seluruh Cabang Jasa Marga dilakukan oleh Badan Sertifikasi SGS.

Manfaat Penerapan ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 antara lain sebagai berikut:

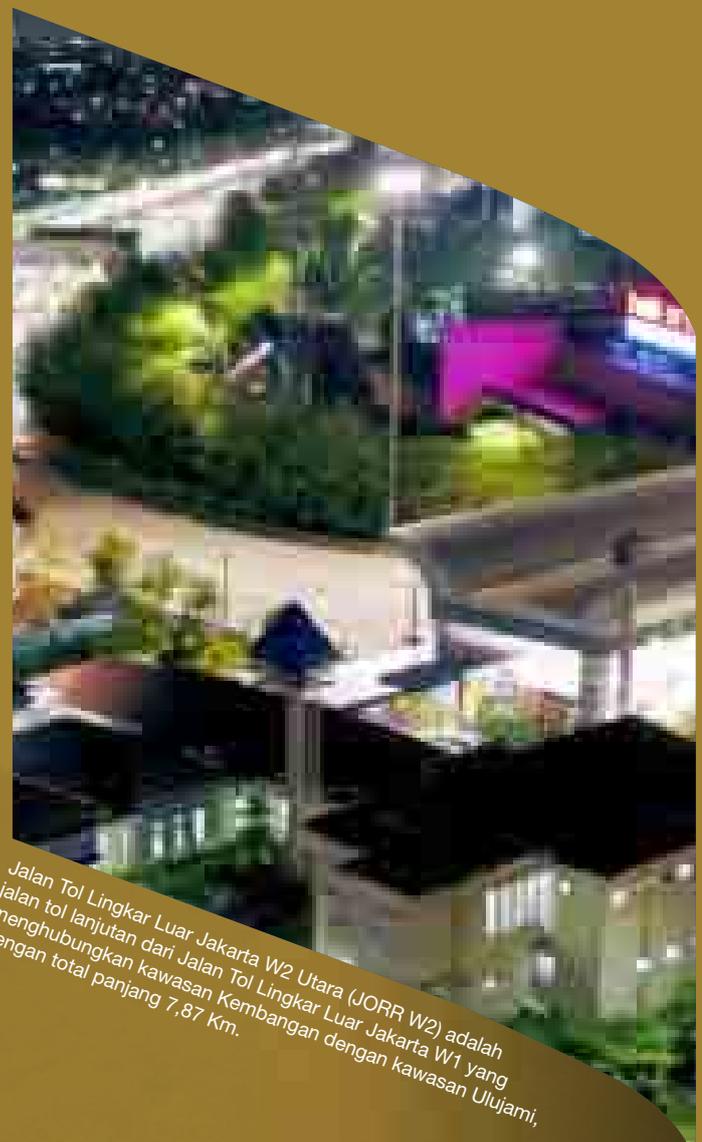
TABEL SERTIFIKASI MUTU PENGOPERASIAN JALAN TOL DAN K3 JASA MARGA

No.	Cabang	Sertifikasi OHSAS 18001:2007			Sertifikasi ISO 9001:2008		
		Lembaga Audit	Sertifikasi Sejak (tahun)	No Registrasi	Lembaga Audit	Sertifikasi Sejak (tahun)	No Registrasi
1	Jagorawi	SGS	2011	ID11/1102954096	SGS	2000	ID00/17172
2	Cawang-Tomang-Cengkareng	SGS	2011	ID11/1102954092	SGS	2005	ID04/D0554
3	Jakarta-Cikampek	SGS	2011	ID11/1102954070	SGS	2005	ID05/D0550.01
4	Jakarta-Tangerang	SGS	2011	ID11/1102954016	SGS	2013	ID04/D0516
5	Purbaleunyi	SGS	2013	ID11/1102954054	SGS	2004	ID04/D0515
6	Semarang	SGS	2014	ID11/01882	SGS	2005	ID05/D0530.01
7	Palikanci	SGS	2012	ID12/02180	SGS	2004	ID04/D0439
8	Surabaya-Gempol	SGS	2011	ID11/1102954122	SGS	2001	ID04/D0376
9	Belmera	SGS	2014	ID14/02870	SGS	2004	ID04/D0481

Dalam rangka mencapai tujuan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada pelanggan mengantisipasi perkembangan jalan tol di Indonesia serta membentuk pola pengorganisasian yang memiliki kesamaan untuk mendukung pengelolaan bisnis yang optimal dan harmonis, dikembangkan Jasa Marga Integrated Management System dengan nama JM WAY yang mengintegrasikan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/DIS 45001:2016, dan Baldrige Criteria.

Manfaat Penerapan Integrated Management System antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan kepercayaan pelanggan
- Memberikan jaminan kualitas produk dan proses
- Meningkatkan produktivitas Perseroan dan *market gain*
- Meningkatkan motivasi, moral dan kinerja karyawan serta komunikasi internal
- Meningkatkan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok
- Meningkatkan cost efficiency dan keamanan produk dengan adanya sistem yang terdokumentasi, serta meminimalkan kehilangan waktu kerja karena kecelakaan, penurunan kesehatan dan biaya kompensasi hukum
- Meningkatkan image positif Perseroan dengan adanya verifikasi pihak independen berdasarkan standar yang diakui Melindungi pekerja dari berbagai bahaya kerja yang juga dapat mengganggu kesehatan saat kerja
- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja dengan mencegah/mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja
- Menerapkan peraturan Pemerintah terkait perlindungan tenaga kerja
- Mendukung Perusahaan mencapai kinerja tinggi berkelas dunia dengan memperhatikan 11 tata nilai inti perusahaan yaitu :
 - Kepemimpinan yang visioner
 - Keunggulan yang didorong oleh pelanggan
 - Pembelajaran organisasi dan individu
 - Penghormatan tenaga kerja dan mitra
 - Kecekatan
 - Fokus pada masa depan
 - Pengelolaan inovasi
 - Manajemen berdasarkan fakta
 - Tanggung jawab kemasyarakatan
 - Fokus pada hasil dan pencapaian nilai
 - Perspektif kepemimpinan

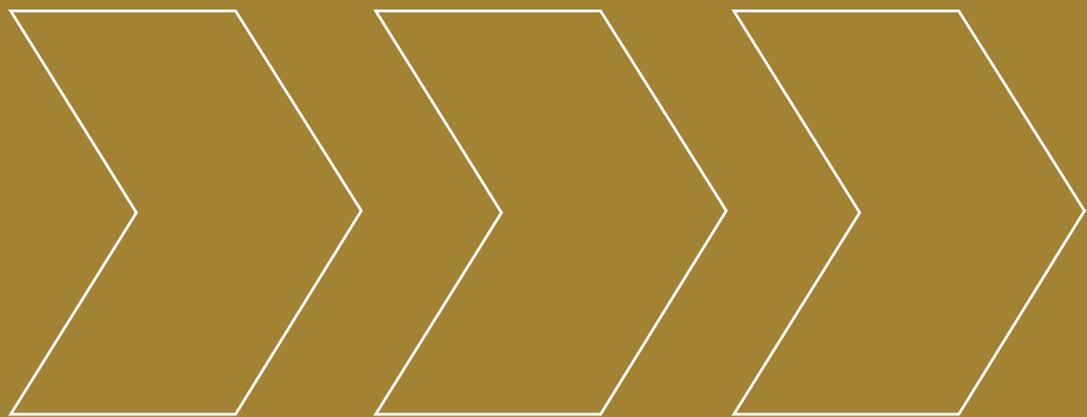


Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta W2 Utara (JORR W2) adalah jalan tol lanjutan dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta W1 yang menghubungkan kawasan Kembangan dengan kawasan Ulujami, dengan total panjang 7,87 Km.



03

SAHAM JSMR
DAN OBLIGASI
JASA MARGA



SAHAM JSRM DAN OBLIGASI

SAHAM JSRM

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM JSRM

TABEL KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM JASA MARGA

Tanggal	Aksi Korporasi	Komposisi Kepemilikan						
		Pemerintah Republik Indonesia			Publik		Saham Pembelian Kembali (Buyback)	
		Saham Seri A	Saham Seri B	%	Saham Seri B	%	Saham Seri B	%
Status Sebelum IPO		1	4.759.999.999	100	-	-	-	-
12 November 2007	IPO di Bursa Efek Jakarta	1	4.759.999.999	70	2.040.000.000	30	-	-
13 Oktober 2008 - 12 Januari 2009	Pembelian Saham Kembali (Buyback)	1	4.759.999.999	70	2.015.476.500	29,6	24.523.500	0,4
05 April 2012 - 25 Juni 2012	Penjualan Kembali Saham <i>Buyback</i>	1	4.759.999.999	70	2.040.000.000	30	(24.523.500)	-
Status per 31 Desember 2015		1	4.759.999.999	70	2.040.000.000	30	-	-
2-8 Desember 2016	Penawaran Umum terbatas I melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue)	1	5.080.509.839	70	2.177.361.360	30	-	-
Status per 31 Desember 2017		1	5.080.509.839	70	2.177.361.360	30	-	-

INFORMASI HARGA & VOLUME PERDAGANGAN SAHAM JSRM

TABEL INFORMASI HARGA & VOLUME PERDAGANGAN SAHAM JSRM DI BURSA EFEK INDONESIA PER TRIWULAN 2007-2017

Tahun	TW	Harga Tertinggi (Rupiah penuh)	Harga Terendah (Rupiah penuh)	Harga Penutupan (Rupiah penuh)	Volume Perdagangan (lembar)	Jumlah Saham Beredar (lembar)	Kapitalisasi Pasar (Rp miliar)
2007	4	2.200	1.700	1.900	7.779.000	6.800.000.000	12.920
	1	2.025	1.220	1.400	844.500	6.800.000.000	9.520
2008	2	1.450	1.150	1.160	2.034.500	6.800.000.000	7.888
	3	1.380	830	1.010	667.500	6.800.000.000	6.868
	4	1.000	610	910	10.152.500	6.800.000.000	6.188
	1	1.060	830	900	11.740.000	6.800.000.000	6.120
2009	2	1.740	900	1.550	1.768.000	6.800.000.000	10.540
	3	1.920	1.540	1.870	6.375.000	6.800.000.000	12.716
	4	1.940	1.710	1.810	5.534.500	6.775.476.500	12.264
	1	1.900	1.660	1.790	12.074.000	6.775.476.500	12.128
2010	2	2.200	1.750	2.025	7.123.000	6.775.476.500	13.720
	3	3.375	2.000	3.200	8.456.500	6.775.476.500	21.682
	4	3.900	3.150	3.425	9.506.500	6.775.476.500	23.206
	1	3.575	2.925	3.400	10.509.500	6.775.476.500	23.037
2011	2	3.650	3.250	3.625	16.022.000	6.775.476.500	24.561
	3	4.275	3.400	3.975	6.335.500	6.775.476.500	26.933
	4	4.275	3.550	4.200	2.323.500	6.775.476.500	28.457

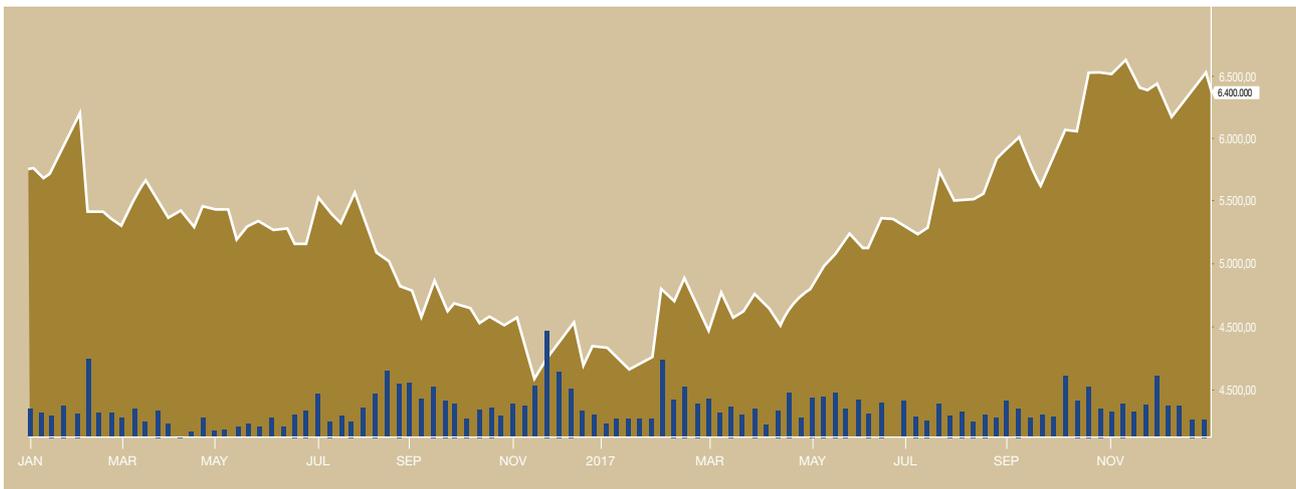
Tahun	TW	Harga Tertinggi (Rupiah penuh)	Harga Terendah (Rupiah penuh)	Harga Penutupan (Rupiah penuh)	Volume Perdagangan (lembar)	Jumlah Saham Beredar (lembar)	Kapitalisasi Pasar (Rp miliar)
2012	1	5.150	4.125	5.150	17.973.000	6.775.476.500	34.894
	2	5.700	4.875	5.400	8.058.500	6.800.000.000	36.720
	3	6.000	5.300	5.850	10.731.500	6.800.000.000	39.780
	4	5.950	5.450	5.450	10.019.500	6.800.000.000	37.060
2013	1	5.950	5.100	5.950	17.130.000	6.800.000.000	40.460
	2	6.950	5.700	6.050	16.095.500	6.800.000.000	41.140
	3	6.000	5.300	5.200	11.699.000	6.800.000.000	35.360
	4	5.800	4.525	4.725	4.192.000	6.800.000.000	32.130
2014	1	6.000	4.450	6.000	8.783.600	6.800.000.000	40.800
	2	6.175	5.800	5.975	6.053.800	6.800.000.000	40.630
	3	6.625	5.925	6.450	5.031.500	6.800.000.000	43.860
	4	7.050	5.950	7.050	5.713.100	6.800.000.000	47.940
2015	1	7.250	6.900	7.200	6.392.800	6.800.000.000	48.960
	2	7.200	5.275	5.475	11.233.600	6.800.000.000	37.230
	3	6.075	4.680	4.825	5.138.600	6.800.000.000	32.810
	4	5.625	4.500	5.225	9.124.700	6.800.000.000	35.530
2016	1	5.525	5.350	5.400	13.848.300	6.800.000.000	36.720
	2	5.325	5.250	5.275	9.417.900	6.800.000.000	35.870
	3	4.720	4.600	4.600	7.498.800	6.800.000.000	31.280
	4	5.660	3.910	4.320	6.963.200	7.157.142.857	30.919
2017	1	4.820	4.430	4.620	5.159.500	7.157.142.857	33.066
	2	5.450	4.980	5.350	5.483.400	7.157.142.857	38.291
	3	6.050	5.525	5.600	6.353.900	7.157.142.857	40.080
	4	6.775	4.180	6.400	7.635.800	7.157.142.857	45.806

Keterangan:

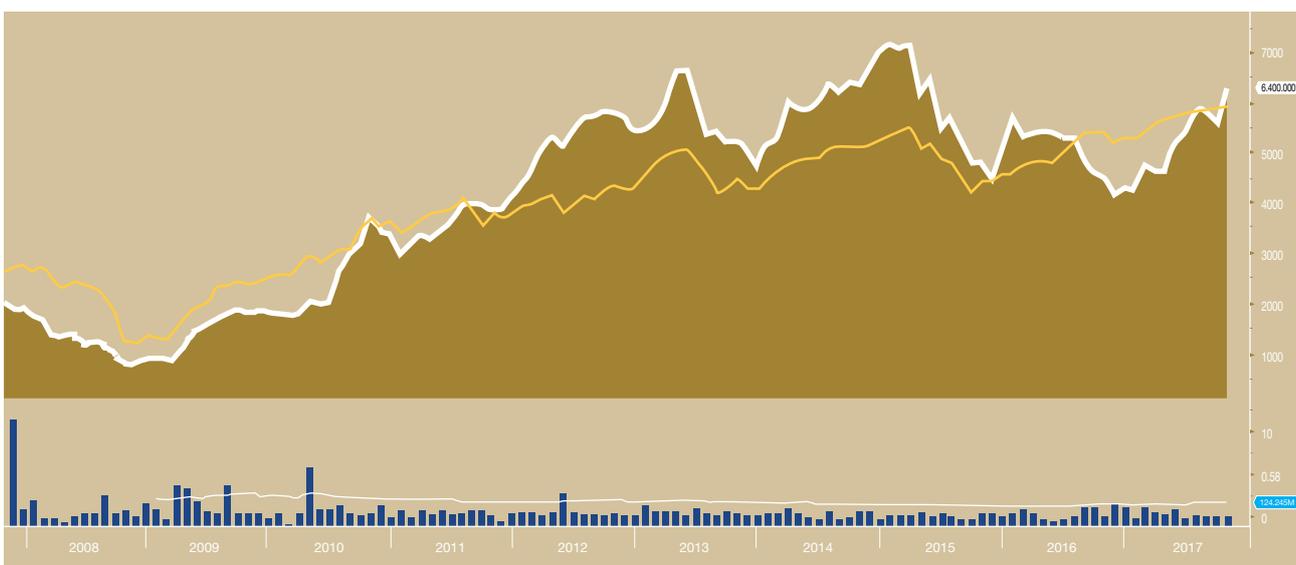
*) Pada Triwulan 4 2009, Perseroan melakukan buyback sebesar 24.523.500 lembar saham dan pada Triwulan 2 2012 Perseroan melakukan penjualan kembali saham buyback tersebut.

**) Pada Triwulan 4 2016, Perseroan melakukan rights issue sebesar 457.871.200 lembar saham

GRAFIK VOLUME DAN HARGA SAHAM JASA MARGA (JSMR) 2016-2017



GRAFIK KOMPARASI TINGKAT PENGEMBALIAN JSMR VS IHSG 2007-2017

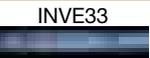
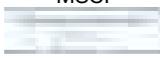
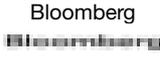


— IHSG ■ JSMR

Sejak tercatat di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 12 November 2007 sampai dengan 31 Desember 2017, JSMR memberikan tingkat pengembalian sebesar 237% dan sebesar 48% selama tahun 2017.

Sampai dengan 31 Desember 2017, JSMR juga tercatat dalam beberapa Indeks Lokal dan Internasional.

TABEL INDEKS DENGAN SAHAM JASA MARGA (JSMR) SEBAGAI KONSTITUEN

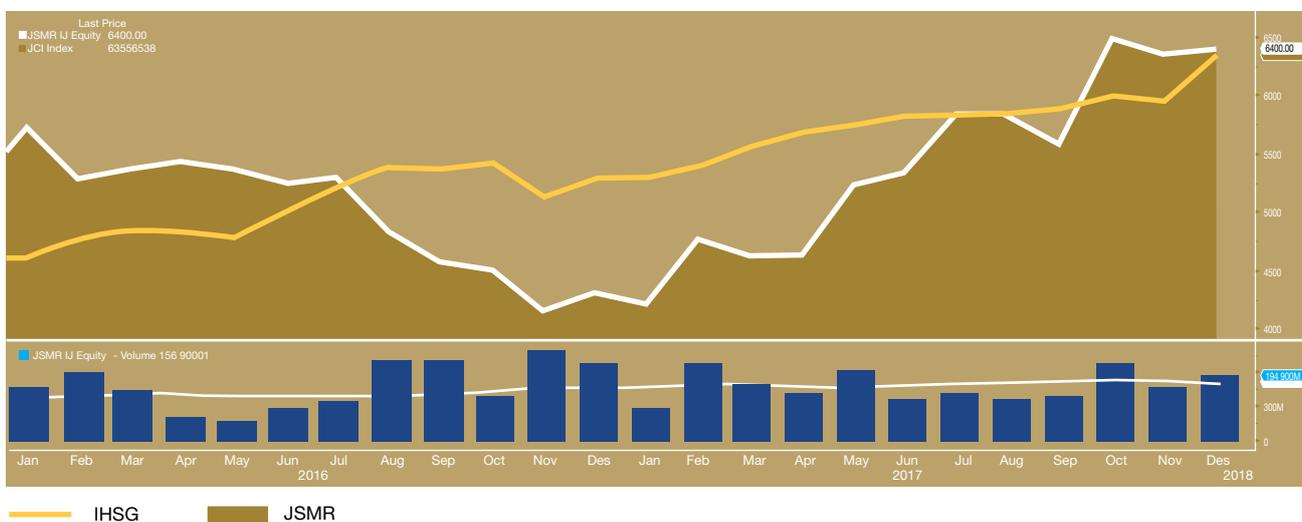
No.	Indeks	Deskripsi	Definisi
1	 LQ45 Jakarta Stock Exchange LQ45 Index	Jakarta Stock Exchange LQ45 Index	Index dari 45 saham yang terpilih berdasarkan Likuiditas perdagangan saham dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar yang disesuaikan setiap enam bulan
2	 JAKINFR Jakarta Stock Exchange Infrastructure Utility and Transportation Index	Jakarta Stock Exchange Infrastructure Utility and Transportation Index	Index yang berisi perusahaan tercatat dalam bidang Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi di Indonesia
3	 SKEHATI Sustainable Responsible Investment Index – SRI KEHATI INDEX	Sustainable Responsible Investment Index – SRI KEHATI INDEX	Indeks dari 25 saham perusahaan tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.
4	 INVE33 Investor33	Investor33	Indeks dari 33 konstituen yang terdiri dari saham/emiten yang dipilih berdasarkan kriteria kapitalisasi pasar, likuiditas pasar dan faktor-faktor fundamental.
5	 SMINFRA18 Jakarta Stock Exchange dan PT SMI Infrastructure Index	Jakarta Stock Exchange dan PT SMI Infrastructure Index	Indeks yang berisi 18 saham yang dipilih dari daftar saham sektor infrastruktur dan penunjangnya yang berperan dalam pembangunan infrastruktur dengan faktor fundamental yang baik, memiliki kapitalisasi pasar besar, serta memiliki free float saham dan aktivitas transaksi saham yang tinggi (nilai, frekuensi, dan hari transaksi).
6	 KOMPAS100 Kompas 100 Index	Kompas 100 Index	Indeks 100 saham perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang secara resmi diterbitkan oleh BEI bekerja sama dengan koran Kompas.
7	 MNC36 MNC 36 Index	MNC 36 Index	Indeks yang berisi 36 saham yang dipilih berdasarkan kriteria kapitalisasi pasar, likuiditas transaksi dan faktor fundamental.
8	 MSCI MSCI Indices	MSCI Indices	Indeks-Indeks Morgan Stanley Capital International
9	 FTSE FTSE Indices	FTSE Indices	Indeks-Indeks Financial Times Stock Exchange
10	 Bloomberg Bloomberg Indices	Bloomberg Indices	Indeks-Indeks Bloomberg
11	 FTSE4Good FTSE4Good Emerging Index	FTSE4Good Emerging Index	Indeks perusahaan yang dipilih berdasarkan kepedulian terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik

Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Bloomberg

KONDISI PASAR MODAL DAN KINERJA SAHAM JSMR SELAMA TAHUN 2017

Sepanjang tahun 2017, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dibuka Rp5.275 pada 2 Januari 2017 dan ditutup Rp6.355 pada akhir tahun 2017 atau naik 21%. Pertumbuhan IHSG tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi global. Pada awal tahun 2017, saham JSMR menunjukkan kinerja yang positif dan masih lebih baik dari IHSG.

GRAFIK PERGERAKAN HARGA SAHAM JSMR DAN IHSG 2016-2017

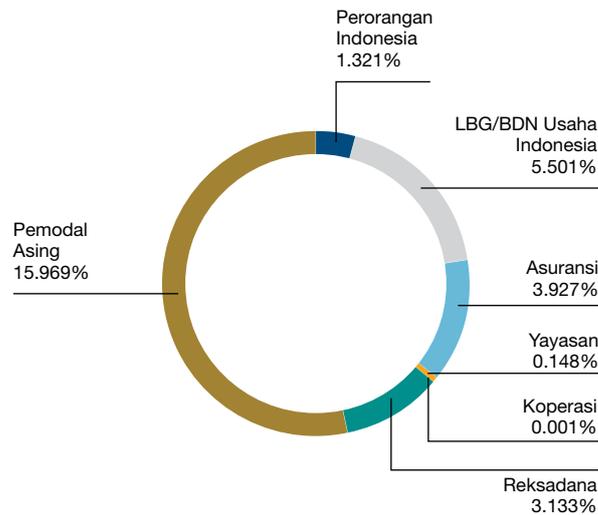


KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM JSMR

TABEL KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM JSMR

Status Pemilik	31 Desember 2017	
	Jumlah Efek	% Kepemilikan
Pemerintah Indonesia		
Saham Dwi Warna	1	
Saham Seri B	5.080.509.839	
Jumlah	5.080.509.840	70,000%
Pemodal Nasional		
Perorangan Indonesia	95.867.759	1,321%
LBG/BDN Usaha Indonesia	399.224.354	5,501%
Asuransi	285.051.179	3,927%
Yayasan	10.716.763	0,148%
Koperasi	105.781	0,001%
Reksadana	227.391.758	3,133%
Jumlah	1.025.139.356	14,031%
Pemodal Asing		
Perorangan Asing	2.278.240	0,031%
Badan Usaha Asing	1.156.725.526	15,938%
Jumlah	1.159.003.766	15,969%
TOTAL	7.257.871.200	100%

GRAFIK KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM JSMR



KEPEMILIKAN SAHAM JSMR YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH

TABEL KEPEMILIKAN SAHAM JSMR YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH

Nama	Status Pemilik	Jumlah Saham (lembar)	Persentase (%)
Negara Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia	5.080.509.840	70,00

KEPEMILIKAN SAHAM KURANG DARI 5%

TABEL KEPEMILIKAN SAHAM JSMR YANG KURANG DARI 5%

Nama	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Persentase (%)
Pemodal Nasional	9.783	1.018.357.594	14,031%
Pemodal Asing	693	1.159.003.766	15,969%

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Utama memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna dan 5.080.509.839 lembar Saham Biasa Seri B. Sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Negara Republik Indonesia memiliki hak-hak

istimewa dalam hal menambah atau mengurangi modal dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penggabungan, peleburan, pengambilalihan serta pembubaran dan likuidasi Perseroan.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KARYAWAN

TABEL KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KARYAWAN

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase (%)
1	REFLY HARUN	Komisaris Utama/ Komisaris Independen		
2	MUHAMMAD SAPTA MURTI	Komisaris		
3	BOEDIARSO TEGUH WIDODO	Komisaris		
4	SIGIT WIDYAWAN	Komisaris Independen		
5	SUGIHARJO	Komisaris		
6	AGUS SUHARYONO	Komisaris		
7	DESI ARRYANI	Direktur Utama	996.500	0,0137299
8	Ir. HASANUDIN, M.Eng. Sc.	Direktur Pengembangan	8.500	0,0001171
9	DONNY ARSAL	Direktur Independen	33.600	0,0004629
10	MOHAMMAD SOFYAN	Direktur Operasi I		
11	SUBAKTI SYUKUR	Direktur Operasi II	154.000	0,0021218
12	KUSHARTANTO KOESWIRANTO	Direktur SDM dan Umum		
			1.192.600	0,0164317

PEMEGANG SAHAM JSMR

TABEL DUA PULUH TERBESAR PEMEGANG SAHAM JASA MARGA

No.	Nama	Jumlah Saham	Persentase (%)
1	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	5.080.509.840	70,00
2	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	228.470.033	3,15
3	BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDEN	193.113.924	2,66
4	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORW	75.079.700	1,03
5	PT. TASPEN	73.209.800	1,01
6	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP	59.000.015	0,81
7	BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INF	40.778.402	0,56
8	PT TASPEN (PERSERO) - THT	40.689.120	0,56
9	REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS-9	40.118.200	0,55
10	BNYMSANV RE BNYM RE CITY NATIONAL ROCH E	34.503.943	0,48
11	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL	29.109.461	0,40
12	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	26.999.800	0,37
13	PT AIA FINL - UL EQUITY	23.773.273	0,33
14	GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	22.436.370	0,31
15	PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MA	19.288.398	0,27
16	RBC IST S/A RARE EMERGING MARKETS FUND	19.100.522	0,26
17	SSB 2Q27 S/A ISHARES CORE MSCI EMERGING	18.702.080	0,26
18	BNYMSANV RE BNYMILLUX RE RE MILLUX RE BL	18.371.442	0,25
19	CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH/ MOST DIV	18.302.800	0,25
20	HSBC TRINKAUS AND BURKHARDT AG S/A ALLIA	17.089.500	0,24
	TOTAL	6.078.646.623	83,75

OBLIGASI JASA MARGA

KRONOLOGIS EMISI OBLIGASI JASA MARGA

Hingga tahun 2017, Jasa Marga telah menerbitkan 29 (Dua Puluh Sembilan) obligasi yang tercatat di dalam maupun luar negeri dan selalu menjaga kualitas hutangnya dengan pembayaran obligasi yang selalu tepat waktu. Adapun kronologis pencaatatan obligasi Jasa Marga adalah sebagai berikut:

TABEL KRONOLOGIS PENCATATAN OBLIGASI JASA MARGA

Obligasi **	Jumlah (Rp Juta)	Tenor (Tahun)	Tanggal Penerbitan (tgl-bln-thn)	Tanggal Jatuh Tempo (tgl-bln-thn)	Peringkat	Status
1 Jasa Marga I (A)	23.718	5	11-03-1983	11-03-1988	Lunas	
2 Jasa Marga II/1 (B)	40.000	5	31-10-1983	31-10-1988	Lunas	
3 Jasa Marga II/2 (C)	20.000	5	06-02-1984	06-02-1989	Lunas	
4 Jasa Marga II/2 (D)	20.000	5	05-03-1984	05-03-1989	Lunas	
5 Jasa Marga II/2 (E)	20.000	5	31-03-1984	31-03-1989	Lunas	
6 Jasa Marga III/1 (F/1)	40.000	5	28-12-1984	28-12-1989	Lunas	
7 Jasa Marga III/2 (F/2)	30.000	5	01-03-1985	01-03-1990	Lunas	
8 Jasa Marga IV/1 (G/1)	40.000	5	27-12-1985	27-12-1990	Lunas	
9 Jasa Marga IV/2 (G/2)	60.000	5	24-03-1986	24-03-1991	Lunas	
10 Jasa Marga V/1 (H)	60.000	5	06-07-1987	06-07-1992	Lunas	
11 Jasa Marga V/2 (I)	40.000	5	19-11-1987	19-11-1992	Lunas	
12 Jasa Marga VI/1 (J)	75.000	8	20-6-1988	20-06-1996	Lunas	
13 Jasa Marga VI/2 (K)	50.000	8	01-02-1989	01-02-1997	Lunas	
14 Obligasi Indeks Pendapatan Tahap I	40.000	12	31-07-1989	31-07-2001	Lunas	
15 Obligasi Indeks Pendapatan Tahap II	30.000	12	21-09-1989	21-09-2001	Lunas	
16 Jasa Marga VII (L)	100.000	8	08-06-1990	08-06-1998	Lunas	
17 Jasa Marga VIII (M)	150.000	8	27-03-2000	27-03-2008	Lunas	
18 Jasa Marga IX (N)	400.000	5	12-04-2002	12-04-2007	Lunas	
19 Jasa Marga X (O)	650.000	8	04-12-2002	04-12-2010	Lunas	
20 Jasa Marga XI (P)	1.000.000	10	10-10-2003	10-10-2013	_{id} AA	Lunas
21 Jasa Marga I (JM-10)	500.000	3	10-12-2010	10-12-2013	_{id} AA	Lunas
22 JORR I ¹⁾	274.260	10	19-11-2003	19-11-2013	-	Lunas
23 JORR II (A) ¹⁾	77.377	10	05-01-2006	05-01-2016	-	Lunas

Obligasi **	Jumlah (Rp Juta)	Tenor (Tahun)	Tanggal Penerbitan (tgl-bln-thn)	Tanggal Jatuh Tempo (tgl-bln-thn)	Peringkat	Status
JORR II (B) ¹⁾	77.377	12	05-01-2006	05-01-2018	-	Lunas
JORR II (C) ¹⁾	104.400	15	05-01-2006	05-01-2021	-	Lunas
24. Jasa Marga XII (Q)	1.000.000	10	06-07-2006	06-07-2016	_{id} AA	Lunas
25. Jasa Marga XIII (R)	1.500.000	10	06-21-2007	06-21-2017	_{id} AA	Lunas
26. Jasa Marga XIV (JM-10)	1.000.000	10	10-12-2010	10-12-2020	_{id} AA	Belum Lunas
27. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri A	700.000	370 hari	27-09-2013	02-10-2014	_{id} AA	Lunas
Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri B	400.000	3	27-09-2013	27-09-2016	_{id} AA	Lunas
Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri C	1.000.000	5	27-09-2013	27-09-2018	_{id} AA	Belum Lunas
28. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T	1.000.000	5	22-09-2014	19-09-2019	_{id} AA	Belum Lunas
29. Komodo Bond***	4.000.000	3	13-12-2017	13-12-2017	Baa3 (Positive) oleh Moody's BB+ (Stable) oleh S&P	Belum Lunas

Keterangan:

* Tidak Dicatatkan

** Obligasi Jasa Marga dicatatkan di Bursa Efek Indonesia

*** Obligasi Jasa Marga dicatatkan di London Stock Exchange

OBLIGASI BEREDAR JASA MARGA 2016 DAN 2017

TABEL OBLIGASI BEREDAR JASA MARGA TAHUN 2016

Obligasi **	Kode	Jumlah (Rp Juta)	Tingkat Bunga (%)	Jatuh Tempo	Peringkat
1. JORR II (A) ¹⁾	-	77.377	15.25	2016	-
2. JORR II (B) ¹⁾	-	77.377	15.25	2018	-
3. JORR II I ¹⁾	-	104.400	15.50	2021	-
4. Jasa Marga XII (Q)	JMPD12Q	1.000.000	13.50	2016	_{id} AA
5. Jasa Marga XIII I	JMPD13R	1.500.000	10.25	2017	_{id} AA
6. Jasa Marga XIV (JM-10)	JMPD14JM10	1.000.000	9.35	2020	_{id} AA
7. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri B	JSMR01BCN1S	400.000	8.70	2016	_{id} AA
8. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri C	JSMR01CCN1S	1.000.000	8.90	2018	_{id} AA
9. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T	JSMR01CN2T	1.000.000	9.85	2019	_{id} AA

Keterangan:

* Tidak Dicatatkan

**Seluruh Obligasi Jasa Marga dicatatkan di Bursa Efek Indonesia

TABEL OBLIGASI BEREDAR JASA MARGA TAHUN 2017

Obligasi **	Kode	Jumlah (Rp Juta)	Tingkat Bunga (%)	Jatuh Tempo	Peringkat
1. Jasa Marga XIV (JM-10)	JMPD14JM10	1.000.000	9.35	2020	AA _{id}
2. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri C	JSMR01CCN1S	1.000.000	8.90	2018	AA _{id}
3. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T	JSMR01CN2T	1.000.000	9.85	2019	AA _{id}
4. Komodo Bond		4.000.000	7%	2020	Baa3 (Positive) oleh Moody's BB+ (Stable) oleh S&P

Keterangan: * Tidak Dicatatkan
 ** Obligasi Jasa Marga dicatitkan di Bursa Efek Indonesia
 *** Obligasi Jasa Marga dicatitkan di London Stock Exchange

PEMEGANG OBLIGASI JASA MARGA

TABEL SEPULUH TERBESAR PEMEGANG OBLIGASI JASA MARGA

Obligasi Jasa Marga XIV (JM-10)				
No.	Nama	Jumlah Efek	%	
1	PT BPJS Ketenagakerjaan JHT (dh PT Jamsostek)	230.000.000.000	23,00	
2	BPJS KESEHATAN	100.000.000.000	10,00	
3	BANK CENTRAL ASIA	90.000.000.000	9,00	
4	PT JASA RAHARJA (PERSERO)	80.000.000.000	8,00	
5	PT Asuransi BRI Life	56.500.000.000	5,65	
6	PT ASURANSI ASTRA BUANA	35.000.000.000	3,50	
7	REKSA DANA OPTIMA PENDAPATAN ABADI	30.000.000.000	3,00	
8	BNI TREASURY	25.000.000.000	2,50	
9	Reksa Dana Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal	25.000.000.000	2,50	
10	DP KALTIM PRIMA COAL	21.000.000.000	2,10	

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri C				
No.	Nama	Jumlah Efek	%	
1	PT BPJS Ketenagakerjaan JHT (dh PT Jamsostek)	120.000.000.000	12,00	
2	PT Bank CIMB Niaga Tbk,	105.000.000.000	10,50	
3	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) - DIVISI TREASURY	77.000.000.000	7,70	
4	DPLK Bank BNI	70.000.000.000	7,00	
5	BPJS KETENAGAKERJAAN - JKK	50.203.000.000	5,02	
6	PT JASA RAHARJA (PERSERO)	50.000.000.000	5,00	
7	PT BANK SBI INDONESIA	37.000.000.000	3,70	
8	BPJS KETENAGAKERJAAN - BPJS	36.228.000.000	3,62	
9	DP BNI	30.000.000.000	3,00	
10	REKSA DANA RHB SMILE FIXED INCOME FUND	30.000.000.000	3,00	

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T

No.	Nama	Jumlah Efek	%
1	PT Bank Mandiri	155.000.000.000	15,50
2	BPJS Ketenagakerjaan JHT (dh PT Jamsostek)	100.000.000.000	10,00
3	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) - DIVISI TREASURY	76.000.000.000	7,60
4	Dana Pensiun PLN	75.000.000.000.00	7,50
5	DPLK Bank BNI	70.000.000.000.00	7,00
6	PT. JASA RAHARJA (PERSERO)	50.000.000.000.00	5,00
7	REKSA DANA TERPROTEKSI BNI-AM PROTEKSI XXXIX	50.000.000.000.00	5,00
8	REKSA DANA TERPROTEKSI AVRIST PROTECTED FUNDI	44.000.000.000	4,40
9	DPLK BANK RAKYAT INDONESIA	25.000.000.000	2,50
10	REKSA DANA MANDIRI OBLIGASI UTAMA	25.000.000.000	2,50

Obligasi Jasa Marga secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan obligasi yang diterbitkan. Untuk obligasi yang diterbitkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, Jasa Marga menggunakan Pefindo sebagai lembaga pemeringkat obligasi.

Sementara itu, dengan diterbitkannya Komodo Bond, Jasa Marga menunjuk dua Lembaga Rating International yaitu Moody's dan S&P Global sebagai Lembaga Pemeringkat Komodo Bond Jasa Marga. Adapun definisi dari setiap peringkat obligasi yang diberikan adalah sebagai berikut:



idAA merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.

Berdasarkan surat Pefindo kepada Perseroan No. RC-512/PEF-DIR/VI/2017, No. RC-513/PEF-DIR/VI/2017 dan RC-514/PEF-DIR/VI/2017. tanggal 12 Juni 2017 atas Obligasi Jasa Marga di atas. ditetapkan peringkat **idAA (double A; Stable Outlook)**.



Baa3 merupakan peringkat yang menggambarkan obligasi dengan risiko moderat dan oleh karenanya memiliki karakteristik spekulatif



BB+ merupakan obligor yang memiliki tingkat risiko lebih baik (moderat) dibandingkan dengan obligor dengan rating lebih rendah lainnya.

KOMODO BOND

Seiring dengan kebutuhan investasi perusahaan, Pada tahun 2017 Jasa Marga melakukan inovasi dibidang pendanaan dengan mengeluarkan Global IDR Bond yang dicatatkan di London Stock Exchange pada tanggal 13 Desember 2017. Obligasi ini merupakan obligasi pertama Jasa Marga yang berdenominasi Rupiah dan tercatat di luar negeri. Penerbitan obligasi ini disambut baik oleh Investor dan terbukti dengan penawaran kepada investor yang *oversubscribed* sebanyak 3,8 kali. Adapun detail dari Komodo Bond tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Instrument	Komodo Bond
Nilai	Rp4.000.000.000.000
Jangka Waktu	3 tahun
Peringkat	Baa3 (positive) oleh Moody's BB+ (stable) oleh S&P
Penggunaan Dana	Untuk pendanaan capital expenditure, aktivitas akuisisi, kebutuhan working capital, dan kebutuhan perusahaan lainnya.
Kupon	7,5%
Pembayaran Kupon	Fixed rate, semi annual (semester)
Pencatatan	LSE (London Stock Exchange) dan SGX (Singapore Exchange Limited)

OBLIGASI ANAK PERUSAHAAN JASA MARGA

Selain Komodo Bond, Jasa Marga juga melakukan inovasi dibidang pembiayaan proyek dengan menerbitkan obligasi berbasis proyek atau Anak Perusahaan pertama yaitu Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017. Obligasi ini diterbitkan oleh anak perusahaan Jasa Marga yaitu PT Marga Lingkar Jakarta (PT MLJ) yang mengoperasikan untuk Ruas Tol JORR W2 Utara atau Kebon Jeruk-Ulujami sepanjang 7,67 km, dan telah beroperasi penuh sejak tahun 2014.

Melalui dukungan para stakeholder, obligasi ini mendapatkan apresiasi yang sangat positif dari publik, terlihat dari tingkat permintaan yang oversubscribed mencapai Rp 1,8 triliun atau setara dengan 1,37 kali dari total nilai penerbitan Rp 1,5 Triliun, adapun hal ini juga mencerminkan minat yang tinggi dari para investor terhadap Project Bonds ini. Adapun detail dari Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama Instrument	Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017
Nilai	Rp1.500.000.000.000
Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> Seri A (MLJK01A) : 3 tahun, Rp200.000.000.000 (7,45%) Seri B (MLJK01B) : 5 tahun, Rp217.000.000.000 (7,75%) Seri C (MLJK01C) : 7 tahun, Rp299.000.000.000 (8,30%) Seri D (MLJK01D) : 10 tahun, Rp320.000.000.000 (8,70%) Seri E (MLJK01E) : 12 tahun, Rp464.000.000.000 (8,85%)
Peringkat	idAAA _(sf) (Triple A; Structured Finance) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Penggunaan Dana	<ul style="list-style-type: none"> 90% refinancing kredit investasi 8% untuk dana cadangan 2% untuk modal kerja
Pembayaran Kupon	Triwulan (30/360)
Pencatatan	Bursa Efek Indonesia

INFORMASI AKSI KORPORASI

SEKURITISASI

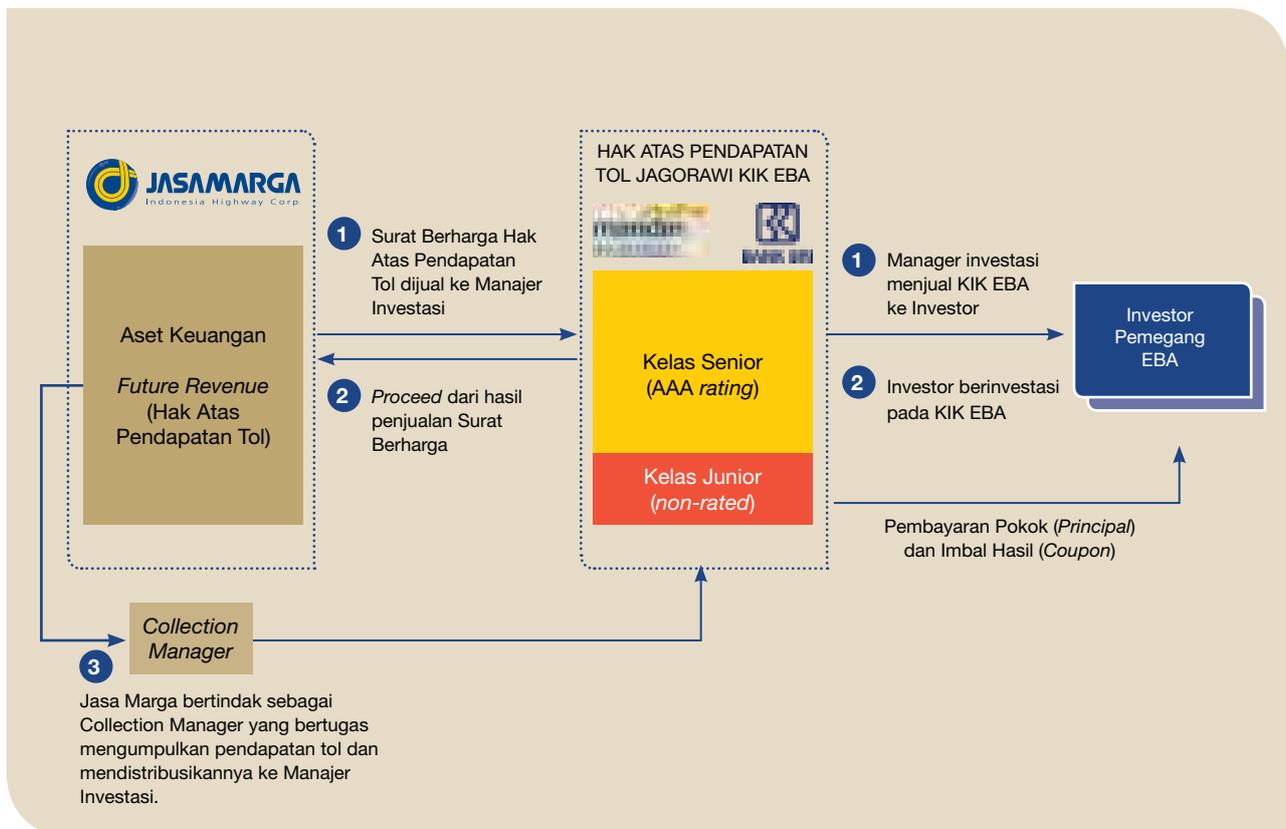
Disamping mengeluarkan obligasi baru di level Korporasi dan Anak Perusahaan, pada tahun 2017, Jasa Marga telah melakukan aksi korporasi berupa Sekuritisasi Aset. Sekuritisasi tersebut adalah sekuritisasi Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi dan pada tanggal 31 Agustus 2017 Perseroan telah melakukan pencatatan perdana KIK EBA Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi tersebut atau disebut dengan KIK EBA JSMR01 di Bursa Efek Indonesia. Investor menyambut baik terbukti dengan produk sekuritisasi yang oversubscribe mencapai 2,7 kali dari total nilai penerbitan.

Adapun detail dari KIK EBA adalah sebagai berikut:

Struktur Investasi	KIK EBA Mandiri JSMR01 – Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi
Penerbit	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Aset Keuangan	Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi, berjangka waktu 5 (lima) tahun, bernilai sampai dengan Rp 2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) dengan harga penerbitan sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah)
Tenor	5 (Lima) tahun
Nilai Transaksi	Rp2.000.000.000.000,00
Imbal Hasil	8,4%
Pembayaran Imbal Hasil	Tiga bulanan
Pembayaran Pokok	Tahunan
Lembaga Pemeringkat	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Rating	idAAA (sf) (Triple A: Structured Finance)
Listings	Bursa Efek Indonesia

Skema Sekuritisasi

Sekuritisasi menggunakan skema jual putus dimana Jasa Marga menjual surat berharga hak atas pendapatan tol Jagorawi KIK EBA Mandiri JSMR01 kepada manajer investasi yang kemudian manajer investasi menjual KIK EBA Mandiri JSMR01 tersebut kepada investor. Jasa Marga juga bertindak sebagai collecting manager yang bertugas untuk mengumpulkan pendapatan tol dan mendistribusikannya kepada manajer investasi. Adapun detail skema KIK EBA Mandiri JSMR01 adalah sebagai berikut:



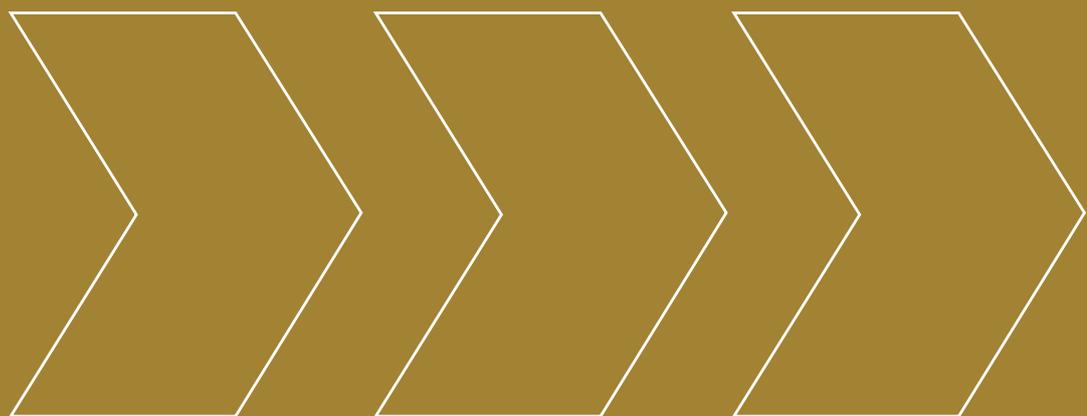


Kunjungan Dewan Komisaris ke PT Jasamarga Kunciran Gengkareng (JKC) selaku anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang mengelola Jalan Tol Kunciran-Cengkareng sepanjang 14,19 km sebagai alternatif menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada 4 November 2017.



04

LAPORAN DEWAN
KOMISARIS





Refly Harun
Komisaris Utama/
Komisaris Independen

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Dari hasil penilaian Konsultan Independen atas penerapan GCG di lingkungan Dewan Komisaris tahun 2017 diperoleh skor penilaian 98,86% dengan predikat penilaian **“Sangat Baik”**.

Pemegang Saham yang terhormat,

Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan segala berkah dan rahmat-Nya, Dewan Komisaris dapat melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban memberikan pengawasan dan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan Perseroan selama tahun 2017, dengan pokok-pokok penjelasan sebagai berikut.

PERUBAHAN KOMPOSISI DAN PERUBAHAN PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam mengawali laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris, perlu kami laporkan bahwa pada tahun 2017, terdapat perubahan susunan komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 15 Maret 2017, telah diputuskan untuk memberhentikan Taufik Widjoyono, anggota Dewan Komisaris yang telah memasuki masa purnatugas sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan sebagai penggantinya diangkat anggota baru Dewan Komisaris, yaitu Sugihardjo, yang saat ini menjabat Sekretaris

Jenderal Kementerian Perhubungan, sehingga susunan Dewan Komisaris Tahun 2017 menjadi sebagai berikut.

1. Komisaris Utama/Komisaris Independen: Refly Harun
2. Komisaris Independen: Sigit Widyawan
3. Komisaris: Boediarso Teguh Widodo
4. Komisaris: Sugihardjo
5. Komisaris: Agus Suharyono
6. Komisaris: Muhammad Sapta Murti

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris telah mengatur dan menata kembali uraian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Dewan Komisaris, serta menetapkannya dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-087/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Revisi Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pengaturan dan penataan uraian tugas dan tanggung jawab itu bertujuan mempertahankan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan Perseroan.

KINERJA DEWAN KOMISARIS

PROGRAM KERJA, RAPAT, FREKUENSI, DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

Untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris tahun buku 2017, disusun dan ditetapkan program kerja tahunan Dewan Komisaris Tahun 2017 yang meliputi agenda-agenda rapat bulanan Dewan Komisaris selama satu tahun dan kunjungan kerja ke cabang-cabang perusahaan termasuk ke proyek-proyek jalan tol baru yang sedang dibangun di dekat cabang yang bersangkutan. Setiap bulannya diselenggarakan minimal 2 kali rapat, yaitu rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi. Dalam hal ada suatu aksi korporasi atau permasalahan yang sangat mendesak untuk dibahas dan diputuskan, tidak tertutup kemungkinan diselenggarakannya rapat khusus Dewan Komisaris bersama Direksi. Dengan tersusunnya program kerja itu, pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi lebih efektif dan mengenai sasaran.

Selama tahun kerja 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 13 kali rapat dan 10 kali kunjungan ke cabang dan ke anak perusahaan jalan tol dan 1 kali rapat persiapan RUPS dan 1 kali RUPS Tahunan Perseroan pada 15 Maret 2017, serta 14 kali rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi. Jumlah tersebut termasuk 3 kali rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi yang diselenggarakan oleh Direksi. Setiap rapat, dikeluarkan undangan rapat yang ditandatangani oleh Komisaris Utama, yang berisi keterangan acara/agenda, tanggal, waktu, dan tempat rapat dan setiap rapat selalu dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan memimpin rapat, Komisaris Utama menunjuk salah satu anggota Dewan Komisaris untuk memimpin rapat. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris rata-rata di atas 86%. Semua keputusan rapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat, dan ketika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. Tindak lanjut setiap keputusan rapat dipantau dan dievaluasi.

Sampai dengan akhir tahun 2017, lebih dari 94% (129 dari 137 keputusan rapat) telah selesai ditindaklanjuti dan sisanya yang 6% (8 keputusan) masih dalam proses penyelesaian, yang pada awal tahun 2018 diharapkan sudah

dapat diselesaikan, kecuali masalah-masalah hukum yang prosesnya cukup memakan waktu yang lama.

Di setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris, yang mengundang kehadiran Direksi, dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Sebagai dokumen perusahaan, risalah rapat diadministrasikan dengan baik oleh Corporate Secretary dan Sekretaris Dewan Komisaris.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN KEPATUHAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2017

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada saat ditetapkan Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris juga diputuskan dan ditetapkan tolok ukur kinerja utama (*key performance indicator/KPI*) untuk Dewan Komisaris Tahun 2017. Dokumen itu dipergunakan untuk melihat dan mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN, yang kemudian dijabarkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam KPI Dewan Komisaris Tahun 2017 skor pencapaian nilai kinerja untuk klasifikasi nilai "A" ("Sangat Baik" dalam 4,5-5,0).

Pada akhir tahun 2017, dengan menggunakan sistem *self-assessment* kinerja Dewan Komisaris yang ada, target yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu dengan perolehan nilai berklasifikasi "A" dengan skor penilaian 4,92. Capaian itu meningkat lebih baik daripada capaian nilai tahun 2016 sebesar 4,77. Dewan Komisaris bertekad untuk bekerja lebih baik dan lebih keras lagi sehingga minimal dapat mempertahankan prestasi kerja tahun 2017 tersebut.

Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Tahun 2017

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban memberikan pengawasan dan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris secara konsisten mengedepankan penerapan prinsip-prinsip tata kelola

perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*). Setiap tahunnya, penerapan prinsip-prinsip itu dievaluasi dan dinilai oleh konsultan independen, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Dari hasil penilaian konsultan independen atas penerapan GCG di lingkungan Dewan Komisaris Tahun 2017 diperoleh skor penilaian 98,86% dengan predikat penilaian “Sangat Baik” meskipun sedikit turun dari capaian skor penilaian GCG tahun 2016 yang sebesar 99,36%.

Dewan Komisaris akan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan membudaya dalam menjalankan tugas pengawasan, dengan sasaran mendorong seluruh jajaran Perseroan mewujudkan visi dan misi Perseroan dalam bisnis jalan tol dan nontol, yang akan menguntungkan seluruh stakeholder dan dengan demikian, Perseroan akan memiliki kemampuan dan daya saing yang kuat untuk berkembang baik di tingkat nasional maupun regional, serta menyukseskan program pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, khususnya jalan tol di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERSEROAN YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Rencana Pengembangan Perseroan

Terkait dengan rencana pengembangan Perseroan sebagaimana yang disebut dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2013–2017, atas pencapaian sasaran-sasaran target sampai dengan tahun 2017 sebagai tahun kelima RJPP, Dewan Komisaris menyarankan agar target sasaran pembangunan jalan tol baru tahun 2017 dipacu dan diselesaikan secepatnya dan beberapa program baru yang tidak dapat diakomodasi dalam RKAP 2017 dimasukkan ke RKAP 2018, sebagai tahun pertama RJPP 2018-2022 yang sedang dibahas Dewan Komisaris bersama Direksi dan ditargetkan dapat disetujui dan disahkan sebelum akhir tahun 2017.

Dalam rangka diskusi tentang pengembangan strategi untuk meningkatkan nilai Perseroan yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan menetapkan visi-misi perusahaan sebagai dasar arahan strategis penyusunan usulan RJPP 2018-2022, pada 4 Maret 2017 Dewan Komisaris telah diundang Direksi untuk mendengarkan

paparan konsultan dan kemudian memberikan masukan-masukan. Kemudian Direksi merangkum masukan-masukan hasil diskusi pada 4 Maret 2017 tersebut dan menyusun kembali pengembangan strategi untuk meningkatkan nilai Perseroan untuk didiskusikan dengan Dewan Komisaris pada 10 Agustus 2017. Pokok-pokok diskusi meliputi (1) transformasi dan prosesnya, (2) visi dan misi, (3) arahan strategis dan arahan strategi lini bisnis dan model bisnisnya, (4) peran dan lingkup pekerjaan dan pembagian peran dan tanggung jawab grup JSMR, (5) potensi pengelompokan fungsi sesuai dengan arahan strategis, (6) potensi struktur organisasi JSMR jangka panjang dan jangka pendek, (7) potensi pembentukan struktur holding BUMN konstruksi dan jalan tol dan potensi pengambilalihan bisnis jalan tol dan bisnis nontol, (8) potensi struktur organisasi JSMR tanpa adanya *business alignment holding* BUMN dan dengan adanya *alignment*, (9) potensi struktur organisasi JSMR dengan adanya holding BUMN, dan (10) skenario proyeksi keuangan JSMR (tanpa divestasi).

Dewan Komisaris secara umum menerima penjelasan Direksi mengenai konsep dasar kebijakan dan strategi usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2018-2022 dan meminta Direksi untuk menyiapkan strategi komunikasi kepada publik terkait proyeksi keuangan Perseroan pada tahun 2018 dan 2019, serta menyiapkan langkah-langkah korporasi untuk menjaga target pertumbuhan laba Perseroan. Kemudian dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi pada 27 September 2017, Dewan Komisaris menerima hasil review atas pelaksanaan RJPP 2013-2017 serta usulan pokok kebijakan dan strategi untuk penyusunan RJPP 2018-2022, dan menegaskan kembali perlunya Direksi menyiapkan materi dan strategi komunikasi publik mengenai RJPP 2018-2022 serta menyetujui pokok-pokok kebijakan dan strategi serta sasaran program untuk penyusunan RKAP 2018.

Rencana pengembangan Perseroan yang tecermin dalam RJPP 2018-2022 itu akhirnya disetujui oleh Dewan Komisaris pada 27 November 2017 setelah Direksi menyampaikan skenario-skenario proyeksi keuangan dan dibahas bersama Dewan Komisaris dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi pada 27 November 2017. Dalam kesempatan tersebut Dewan Komisaris juga menyetujui secara prinsip usulan RKAP 2018 (sebagai tahun pertama dan RJPP 2018-2022).

Perubahan Lingkungan Bisnis yang Berdampak Besar pada Usaha Perseroan

Selain isu pembentukan holding BUMN yang akan berdampak besar pada usaha Perseroan, Dewan Komisaris minta agar Direksi juga membuat antisipasi dalam penyiapan dan penyediaan sumber daya Perseroan, kebijakan dan strategi Perseroan yang tepat, efektif, dan efisien, serta manajemen risiko dan mitigasinya, agar target-target sasaran yang telah dirumuskan dalam RJPP 2018-2022 tetap tercapai dengan baik, yakni sehubungan dengan program pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, yang perlu mendapat dukungan dan keterlibatan Perseroan sebagai salah satu BUMN pemerintah yang cukup besar dan andal.

Salah satu program yang telah melibatkan Jasa Marga ialah pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung dan LRT, yang keduanya dibangun di koridor jalan tol Jasa Marga, serta percepatan penyelesaian ruas-ruas Jalan Tol Trans-Jawa yang berpotensi. Dalam melakukan akuisisi ruas-ruas jalan tol yang belum dibangun, Dewan Komisaris minta Direksi mengkaji lebih dalam dan teliti aspek-aspek legal, teknis, dan finansial, risiko yang ada dan mitigasinya, serta prospeknya di masa depan.

Hal-hal tersebut tentunya akan memengaruhi jumlah pengguna jalan tol dan berpengaruh pada likuiditas keuangan Perseroan pada saat pembangunan proyek dan pengoperasiannya selama masa *cost recovery* atau *breakeven point* belum tercapai. Selain itu, ada dampak dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pembebasan tanah yang diperlukan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk proyek jalan tol Jasa Marga, melalui pemberian fasilitas dana talangan. Dalam pelaksanaan pemanfaatannya, proses pengadministrasiannya cukup berisiko sehingga Dewan Komisaris memutuskan agar Direksi mendorong percepatan penyelesaian administrasi dan melakukan kajian risiko pembayaran dana talangan, serta kajian risiko atas keterlibatan dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, LRT. Hasil evaluasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi persetujuan Dewan Komisaris terhadap tindakan-tindakan Direksi selanjutnya.

Selain permasalahan yang telah diuraikan di atas, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan SDM yang profesional dan berintegritas bagi anak-anak perusahaan jalan tol baru yang akan atau sedang dibangun agar nantinya pengelolaan perusahaan berjalan efektif dan efisien dalam menghasilkan pendapatan dan laba usaha, serta SDM profesional dan berpengalaman dalam bidang pengawasan dalam jumlah yang cukup agar bisnis jalan tol dilakukan dengan bersih dan memenuhi ketentuan-ketentuan *governance*-nya.

RKAP DAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

RKAP Tahun 2018

Dalam memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 2 huruf b2, yaitu kewajiban Dewan Komisaris untuk memberikan pendapat dan persetujuan atas usulan RKAP yang disiapkan dan diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dalam rapat koordinasi bersama Direksi pada 27 November 2017 pada prinsipnya menyetujui RKAP 2018 dengan menerbitkan surat Dewan Komisaris No. DK-202/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Persetujuan dan Pengesahan RKAP PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun 2018. Persetujuan Dewan Komisaris tersebut lebih cepat dua bulan daripada ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. Penyusunan RKAP 2018 tersebut telah memperhatikan dan diselaraskan dengan aspirasi pemegang saham tersebut pada surat Plt. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. S-19/D4.MBU/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017. Selain itu, Dewan Komisaris telah meneliti, mengkaji, dan memberikan persetujuan atas usulan revisi RKAP 2017, yaitu yang pertama dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi pada 12 Maret 2017 dan revisi RKAP 2017 yang kedua pada 9 November 2017 dalam rapat khusus Dewan Komisaris.

KAP untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Tahun Buku 2017

Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan hasil evaluasi Komite Audit atas kinerja kantor akuntan publik (KAP), audit tahun buku 2016 yang dinyatakan layak, dan memutuskan untuk menunjuk kembali KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja yang bekerja sama dengan Ernst & Young Global Limited (selanjutnya disebut KAP E&Y). Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris menyusun jadwal pengadaan dan membentuk Panitia Negosiasi Harga. Untuk mengantisipasi apabila negosiasi gagal, Dewan Komisaris akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada Maret 2017 untuk melimpahkan kewenangan penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Kemudian Panitia Negosiasi Harga merumuskan Kerangka Acuan Kerja dan merumuskan biaya audit yang dilakukan dengan cara menggabungkan pelaksanaan audit Kantor Induk Jasa Marga dengan audit seluruh anak perusahaan sekaligus supaya memperoleh perhitungan biaya yang lebih efisien.

Setelah dilakukan negosiasi harga dengan KAP E&Y dan berdasarkan Laporan Ketua Panitia Negosiasi Harga Jasa Akuntan Publik dalam Rangka Audit Umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2017 No. 10/PAN/KAP-2017/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Laporan Hasil Negosiasi Harga Kontrak Jasa Akuntan Publik dalam Rangka Audit Umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2017, Dewan Komisaris menunjuk dan menetapkan kantor akuntan publik untuk melaksanakan audit tahun buku 2017 dengan harga kontrak untuk biaya jasa audit umum Rp4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan out of pocket expenses (OPE) maksimum Rp853.600.000 (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) g dan Pasal 20 ayat (2) d Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diminta mengusulkan kantor akuntan publik tersebut kepada RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 Jasa Marga pada 15 Maret 2017 untuk disetujui dan ditetapkan melakukan audit umum PT

Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2017 termasuk 22 entitas anak perusahaan. Penunjukan itu juga dilaporkan Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna, melalui surat No. DK 047/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 pada 15 Maret 2017 dengan suara terbanyak menyetujui dan memutuskan menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (KAP E&Y) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017.

Tahun Buku 2018

Untuk rencana pengadaan KAP tahun buku 2018 dalam rangka melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018, Dewan Komisaris dalam rapat pada 10 Agustus 2017, setelah mempertimbangkan hasil evaluasi Komite Audit atas kinerja KAP E&Y pada 2017 yang dinilai belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan, memutuskan untuk melakukan pengadaan KAP audit Laporan Perusahaan Tahun Buku 2018 melalui prosedur lelang dan pengadaan agar segera dilaksanakan. Kemudian Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP 161/IX/2017 tanggal 14 September 2017 membentuk Tim Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk Tahun Buku 2018.

Dalam rapat pada 20 September 2017, Dewan Komisaris menerima laporan progres pengadaan KAP untuk audit tahun buku 2018 dan meminta agar pemenuhan jadwal pengadaan dijaga. Dalam laporannya pada rapat Dewan Komisaris pada 20 November 2017, Ketua Komite Audit selaku Ketua Panitia Pengadaan KAP untuk audit tahun 2018 menyampaikan progres pengadaan dan untuk mendapatkan calon penawar yang lebih banyak dan tetap *qualified*, mengusulkan perlunya diadakan perubahan kriteria pengalaman, yaitu dari sebelumnya pernah melakukan audit aset senilai Rp60 triliun menjadi Rp50 triliun. Dewan Komisaris menyetujui usulan tersebut dan menekankan agar pengadaan KAP harus selesai sebelum Februari 2018.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI

STRATEGI PERSEROAN

Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi dalam menerapkan strategi Perseroan yang telah dirumuskan dalam RJPP 2013-2017 dan direalisasikan melalui pencapaian RKAP khususnya RKAP 2017 sebagai RKAP tahun buku ke-5, yang juga dipergunakan sebagai masukan dalam menyusun dan menetapkan RJPP 2018-2022 dan RKAP 2018.

Sejalan dengan hal tersebut, pengawasan juga dilakukan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG, serta memberikan saran dan rekomendasi yang diperlukan. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan Dewan Komisaris melalui forum rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi, serta kunjungan kerja Dewan Komisaris ke cabang-cabang Perseroan dan/atau termasuk ke beberapa proyek jalan tol Jasa Marga yang sedang dalam tahap pembangunan dan tahap awal beroperasi lapangan.

Pada 2017 Dewan Komisaris memberikan perhatian untuk peningkatan efektivitas pengendalian intern yang dilakukan Direksi beserta Unit Internal Audit atas anak perusahaan jalan tol (APJT) dan anak perusahaan usaha lain (APUL) serta cabang-cabang Perseroan. Dewan Komisaris juga mencermati laporan hasil audit auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi eksternal auditor tersebut, serta saran-saran Dewan Komisaris yang disampaikan pada saat kunjungan Dewan Komisaris ke cabang, APJT, dan APUL.

Dalam hal menjalankan pengelolaan Perseroan untuk merealisasikan sasaran-sasaran program yang ditargetkan dalam RKAP 2017, Dewan Komisaris menilai bahwa tindakan/aksi korporasi yang dilakukan Direksi telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menyimpang dari RKAP sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian dimuka tentang penilaian terhadap kinerja direksi dalam pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya, butir 5 tentang evaluasi dan penilaian atas kepatuhan Direksi menjalankan perusahaan sesuai dengan RKAP 2017 dan RJPP 2013-2017. Untuk tindakan-tindakan korporasi lainnya oleh Direksi sebagaimana yang telah diprogramkan dalam RKAP 2017, yakni mengadakan kerja sama investasi dan operasi dengan pihak lain dalam rangka

pembangunan jalan-jalan tol baru atau pengembangan usaha lain, pemberian shareholder loan, pinjaman jangka menengah, divestasi saham, penerbitan obligasi PUB dan global bond, penerimaan pinjaman perbankan, sekuritasi ruas jalan tol, membentuk anak perusahaan dan lain-lain, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 7 huruf i butir (a) s.d. (o) dan huruf ii dan iii .

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERSEROAN DAN DASAR PENILAIANNYA

Selain menilai kinerja diri sendiri melalui metode *self-assessment*, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Direksi dalam pengelolaan Perseroan. Dasar penilaian kinerja Direksi ialah Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MB/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Lampiran I/6-15 Aspek Pengujian/Indikator Butir 17 Parameter No. 58 dan 59, serta Aspek Pengujian/Indikator Butir 19 Parameter No. 67. Selain itu penilaian anggota Direksi memperhatikan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, Lampiran BAB II Persyaratan Anggota Direksi BUMN Butir B Persyaratan Materii. Pelaksanaan penilaian anggota Direksi Tahun 2017 dilakukan melalui Surat Komisaris Utama Perseroan No. DK-0190/A/XI/2017 tanggal 9 November 2017.

Cara dan metode pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi ialah melakukan evaluasi atas Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan Tahun 2017 dan menilai kepatuhan Direksi menjalankan perusahaan sesuai dengan RKAP 2017 dan/atau RJPP 2013-2017, serta menilai kinerja Direksi dalam menindaklanjuti keputusan-keputusan rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi dan tindak lanjut atas saran-rekomendasi hasil audit auditor eksternal, serta kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dengan pihak ketiga.



Kunjungan Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ke proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Sabtu, 18 November 2017.

1. Evaluasi dan Penilaian atas Kinerja Direksi dalam Pencapaian atas Target Kinerja Utama Tahun 2017 Tersebut pada Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan Tahun 2017

- a. Kinerja utama korporat, yang diukur dari penilaian atas perspektif (1) keuangan dan pasar, (2) efektivitas produk dan proses, (3) fokus tenaga kerja, dan (4) kepemimpinan, tata kelola, dan tanggung jawab kemasyarakatan.
- b. Kinerja keuangan, yang terdiri dari pencapaian *return on equity* (ROE) dan *interest coverage ratio* (ICR).
- c. Kinerja pengembangan, yang terdiri dari kinerja (1) pertumbuhan aset dan (2) progres pelaksanaan proyek jalan tol baru dan pengembangan usaha lain.
- d. Kinerja operasional yang terdiri dari kinerja (1) realisasi volume lalu lintas transaksi, (2) pendapatan tol, dan (3) pemenuhan standar pelayanan minimal.
- e. Kinerja sumber daya manusia (SDM) dan umum, yang terdiri dari (1) pemenuhan kompetensi dan (2) program *corporate social responsibility* (CSR).

Sesuai dengan struktur organisasi Jasa Marga hasil RUPS Luar Biasa Tahun 2016, termasuk perubahan nomenklatur jabatan Direksi, kinerja operasional di bawah tanggung jawab Direktur Operasi II. Hal-hal yang menyangkut risiko dan mutu serta hukum dan kepatuhan menjadi tanggung jawab Direktur Keuangan. Hal yang menyangkut teknologi informasi dan manajemen bisnis sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur Operasi I.

Dari hasil evaluasi Dewan Komisaris, kinerja utama korporat tercapai cukup baik, kinerja keuangan tercapai dengan baik, sedangkan kinerja pengembangan tidak mencapai target sebab dari sasaran target sebesar 14,00, realisasinya mencapai 12,92, terutama karena kinerja pelaksanaan proyek jalan tol dan pengembangan usaha lain yang di bawah target. Kinerja operasional tercapai cukup baik karena kinerja capaian volume lalu lintas transaksi tercapai dengan baik, dan pemenuhan SPM sesuai dengan target, tetapi pendapatan tol tercapai sedikit di bawah rencana (99,32%). Kinerja SDM & umum untuk pemenuhan kompetensi tercapai sesuai dengan target, tetapi untuk program CSR, capaiannya masih di bawah target.

2. Evaluasi dan Penilaian atas Kinerja Direksi dalam Menindaklanjuti Keputusan-Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris Bersama Direksi

Dari hasil pemantauan terhadap keputusan rapat yang perlu ditindaklanjuti selama tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut sebagian besar keputusan rapat telah selesai dilaksanakan oleh Direksi dan sebagian kecil masih dalam proses tindak lanjut. Sampai dengan akhir 2017 dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) keputusan rapat, 129 (seratus dua puluh sembilan) atau 94% telah selesai ditindaklanjuti dan 8 (delapan) keputusan/permasalahan atau 6% masih dalam proses tindak lanjut.

3. Evaluasi dan Penilaian atas Kinerja Direksi dalam Menindaklanjuti Saran/Rekomendasi atas Temuan-Temuan yang Dilaporkan oleh Auditor Eksternal

Dari hasil evaluasi atas penjelasan Direksi mengenai Laporan Auditor Independen Tahun Buku 2016, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan saran tindak lanjut yang direkomendasi auditor (KAP). Namun, Direksi diminta untuk menyampaikan bukti-bukti atas pelaksanaan tindak lanjut temuan tersebut. Selain itu, Direksi diminta untuk menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan operasionalisasi ruas-ruas jalan tol seperti penggunaan aplikasi proyeksi lalu lintas, data transaksi elektronik yang belum terkoneksi, dan langkah Direksi untuk mengatasi permasalahan jeda waktu rekonsiliasi data transaksi elektronik antara Jasa Marga dan Bank,

termasuk mengkaji kemungkinan penerapan *payment gateway*.

4. Evaluasi dan Penilaian atas Kepatuhan Direksi Menjalankan Perusahaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan/atau Ketentuan yang Diatur dalam Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Secara umum Dewan Komisaris menilai bahwa kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan isi ketentuan dalam perjanjian dengan pihak ketiga sudah baik. Dalam hal akan terjadi penyimpangan ataupun terjadi masalah hukum, Direksi akan melakukan kajian legal dan nonlegal, serta melakukan penyelesaian melalui jalur hukum agar terpenuhinya aspek-aspek *governance*, serta menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut dan mitigasi risiko yang diperlukan.

5. Evaluasi dan Penilaian atas Kepatuhan Direksi Menjalankan Perusahaan Sesuai dengan RKAP 2017 dan RJPP 2013-2017.

Dewan Komisaris menilai bahwa kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan RKAP 2017 dan RJPP 2013-2017 sudah baik. Hal itu didasarkan pada beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

Dalam tahun buku 2017, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan ruas-ruas jalan tol baru dan prasarana-sarana transportasi yang terkait dengan bisnis Jasa Marga, seperti pembangunan LRT Bekasi-Cawang-Dukuh Atas yang menyatu dengan ruas LRT Cibubur-Cawang, jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung, percepatan penyelesaian dan pengoperasian Jalan Tol Trans-Jawa yang dijadwalkan tahun 2019, serta percepatan pembangunan ruas-ruas jalan tol baru di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, Manajemen dituntut untuk menjawab tantangan tersebut dengan aksi-aksi korporasi Perseroan, baik di bidang keuangan, pengembangan usaha, maupun penyediaan sumber daya manusia yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, program kegiatan yang harus dilaksanakan belum terwadahi dalam RKAP 2017 dan/atau RJPP 2013-2017

dan sekiranya tidak tertampung dalam kedua dokumen tersebut, diprogramkan dalam RKAP 2018 dan RJPP 2018-2022.

Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi yang diselenggarakan di Kantor Pusat Jasa Marga pada 12 Maret 2017 diputuskan untuk melakukan revisi pertama RKAP tahun buku 2017. Revisi diperlukan antara lain untuk membiayai adanya kebutuhan peningkatan investasi, aksi korporasi untuk melakukan restrukturisasi keuangan, adanya divestasi saham di anak perusahaan jalan tol (PT Trans Marga Jateng dan PT Jalan Lingkar Baratsatu) dan untuk menambah alokasi *capital expenditure* seiring dengan pembangunan ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, serta untuk menampung aspirasi pemegang saham tersebut pada surat Menteri BUMN No. S-51/D4.MBU/11/2016 tanggal 14 November 2016. Selain itu, revisi RKAP 2017 dilakukan untuk mengakomodasi keputusan dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi Dewan pada 20 Juli 2017 tentang perkembangan rencana pembentukan perusahaan *subholding* Trans-Java, serta karena telah banyak rencana implementasi kegiatan dalam RKAP 2017 yang tidak tercapai dan adanya usulan rencana kegiatan proyek tol baru.

Dewan Komisaris juga telah menerima menerima laporan Direksi mengenai laporan keuangan s.d. triwulan III 2017 dan prognosis laporan keuangan berkala dan langkah-langkah yang dilakukan Direksi untuk menjaga pemenuhan target keuangan Perseroan tahun 2017. Revisi kedua RKAP 2017 telah disetujui Dewan Komisaris pada 13 November 2017.

Penilaian bagi setiap anggota Direksi Tahun 2017 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui surat Komisaris Utama Perseroan No. DK-0190/A/XI/2017 tanggal 9 November 2017 dan hasilnya akan dilaporkan kepada pemegang saham pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan Komisaris selalu mendorong Direksi dalam melakukan pengelolaan Perseroan agar selalu mematuhi dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen perjanjian dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, sebelum RUPS Tahunan diselenggarakan, Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit meneliti dan mengevaluasi laporan awal hasil temuan audit oleh KAP, yang untuk tahun buku 2016 dilakukan oleh KAP E&Y. Tujuannya ialah meyakini apakah temuan-temuan hasil audit tersebut benar-benar terjadi karena kelalaian Direksi atau karena kurangnya penjelasan dan/atau klarifikasi dan/atau dokumen/data yang disampaikan kepada auditor atau kurangnya pemahaman auditor atas permasalahan dan solusi yang telah ditempuh Direksi. Hasil kajian Dewan Komisaris itu akan dibahas bersama Direksi dan dengan demikian, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan laporan realisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang disampaikan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 pada pertengahan Maret 2017 benar-benar telah sesuai dengan yang seharusnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara finansial dan legal.

Setelah penyelenggaraan RUPS, selanjutnya Dewan Komisaris akan memantau rekomendasi dan saran KAP atas temuan yang ada, apakah telah selesai ditindaklanjuti oleh Direksi. Selain itu Dewan Komisaris selalu memantau serta menekankan kepada Direksi agar temuan-temuan yang pernah ada tidak terjadi lagi dan menjadi temuan ulang.

Dalam rapat Dewan Komisaris pada awal Februari 2017, Dewan Komisaris menerima laporan Komite Audit adanya 5 isu audit tahun buku 2016 dan 2 di antaranya tetap menjadi temuan dan dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi pada Maret 2017, rapat meresmikan hasil akhir audit KAP Tahun Buku 2016 sebagai berikut.

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yang di antaranya sebagai berikut:
 - a. Rekonsiliasi pendapatan tol.
2. Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal, yang di antaranya sebagai berikut:
 - a. Pengkinian data volume lalu lintas.
 - b. Pencatatan modal saham tidak sesuai dengan fakta dan pengesahan Kemenkumham.
 - c. Jaminan pelaksanaan kontraktor yang habis masa berlakunya sebelum berita acara sementara PHO hasil pekerjaan.
 - d. Data proyeksi volume lalu lintas tidak termutakhirkan (*updated*).

Atas temuan-temuan tersebut, Dewan Komisaris terus memantau tindak lanjut penyelesaiannya, antara lain pada rapat Dewan Komisaris pada Juni 2017, Dewan Komisaris minta agar Direksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

- a. Penggunaan aplikasi proyeksi lalu lintas oleh konsultan independen tiap tahun.
- b. Data transaksi elektronik yang belum terkoneksi.
- c. Langkah Direksi untuk mengatasi permasalahan jeda waktu rekonsiliasi data transaksi elektronik, termasuk mengkaji kemungkinan penerapan *payment gateway*.

Dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi pada 20 Juni 2017 Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melanjutkan langkah-langkah tindak lanjut atas hal-hal berikut.

- a. Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengoperasian Terpadu pada ruas jalan tol yang saling terkait.
- b. Penyelesaian amendemen perjanjian untuk mengabaikan atau mengecualikan kewajiban pembatasan rasio keuangan.
- c. Peninjauan ulang terhadap penggunaan aplikasi proyeksi lalu lintas dengan konsultan independen dan melaporkannya dalam rapat Dewan Komisaris-Direksi berikutnya.

Sebagai persiapan pelaksanaan audit tahun buku 2017, pada rapat Dewan Komisaris pada November 2017 Dewan Komisaris menyarankan agar Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) disusun dengan memperhatikan area-area yang memiliki risiko tinggi sesuai laporan Divisi Risk & Quality Management, mendorong Unit Internal Audit agar lebih intensif melakukan klarifikasi atas temuan-temuan yang ada, serta melibatkan Komite Audit dalam penyusunan PKAT.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Untuk tahun buku 2017, dalam rangka menilai konsistensi baik Dewan Komisaris maupun Direksi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pada awal November 2017 telah dimulai proses penilaian secara *self-assessment* GCG tahun 2017 yang dilakukan oleh tim dari Kantor Pusat Jasa Marga yang dibantu dan disupervisi oleh konsultan independen. Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan 23 berkas dokumen yang terkait dengan pelaksanaan GCG yang terdiri dari 34 macam pertanyaan, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh konsultan independen yang melaksanakan penilaian tahun 2016.

Hasil penilaian secara *self-assessment* itu akan disampaikan pada pertengahan Desember 2017, yaitu dengan capaian nilai sebagai berikut.

Jasa Marga	97,17%
Dewan Komisaris Jasa Marga	98,86%
Direksi Jasa Marga	97,37%

Ketiganya mendapat predikat “Sangat Baik” meskipun untuk Dewan Komisaris capaian penilaian tersebut sedikit menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, yaitu 99,36%, karena keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan ke OJK tentang adanya perubahan personalia di Komite Audit dan tidak dibuatnya laporan hasil keikutsertaan anggota Dewan Komisaris/anggota Komite dalam program-program pelatihan dan/atau pelatihan dan/atau seminar di dalam maupun di luar negeri.

Sejalan dengan konsistensi penerapan tata kelola perusahaan yang baik tersebut, pada tahun 2017 Dewan Komisaris bersama Direksi telah melakukan peninjauan dan pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi telah menyatakan persetujuan dan menandatangani kedua dokumen tersebut.

Selain itu, Dewan Komisaris telah melakukan *self-assessment* atas kinerja Dewan Komisaris Tahun 2017 dengan capaian nilai sebesar 4,92 dari nilai maksimal sebesar 5,0 dengan predikat penilaiannya ialah “Sangat Baik”. Pencapaian skor itu lebih baik dan meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 4,77. Piagam (*Charter*) Komite Audit juga telah dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-204/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.

PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM/WBS)

Dewan Komisaris memberikan perhatian yang besar atas risiko-risiko korporat, khususnya risiko *fraud* atau kecurangan yang dapat terjadi dalam menjalankan bisnis tol dan nontol. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menekankan perlunya dibuat mekanisme pencegahan aktivitas terkait dengan *fraud* yang efektif dalam pedoman pelaksanaan manajemen risiko yang didasarkan pada framework pengendalian internal yang dapat terdiri dari (a) *control environment*, (b) pengendalian

kegiatan, (c) penilaian risiko, (d) informasi dan komunikasi, dan (e) *monitoring*.

Pengembangan prosedur *whistleblowing* perlu terus dikembangkan oleh Direksi dengan membudayakan kepatuhan terhadap kode etik yang telah disepakati bersama, meningkatkan efektivitas prosedur pendeteksian, serta investigasi atas terjadinya pelanggaran kepatuhan dan mekanisme komunikasi di perusahaan atas suatu pelanggaran.

Dewan Komisaris menyetujui penempatan *feedback box* di Kantor Dewan Komisaris serta memfasilitasi Sekretariat Dewan Komisaris dengan e-mail khusus sebagai saluran pengaduan secara langsung kepada Dewan Komisaris atas indikasi *fraud*/kecurangan. Komite Audit juga ditugasi untuk melakukan kajian, evaluasi atas laporan-laporan *whistleblower* dari Direksi dan melaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas dan ditindaklanjuti Direksi.

PENUTUP

Sebagai akhir kata, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas perhatian, partisipasi, dan kerja sama dalam mengawasi dan membina Jasa Marga sehingga dapat tumbuh dengan pesat dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta berkontribusi dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya jalan tol. Dewan Komisaris terus meningkatkan komitmen untuk mengawal agar visi dan misi Jasa Marga s.d. tahun 2022 tercapai dengan baik, yaitu menjadi perusahaan yang terus bertumbuh dan meningkat nilainya dengan total aset. Secara tidak langsung, Perseroan juga memberikan andil dalam rangka meningkatkan investasi dan meningkatkan efisiensi-efektivitas distribusi barang dan jasa, yang pada gilirannya akan menekan harga serta menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia.



Refly Harun
Komisaris Utama/Komisaris Independen

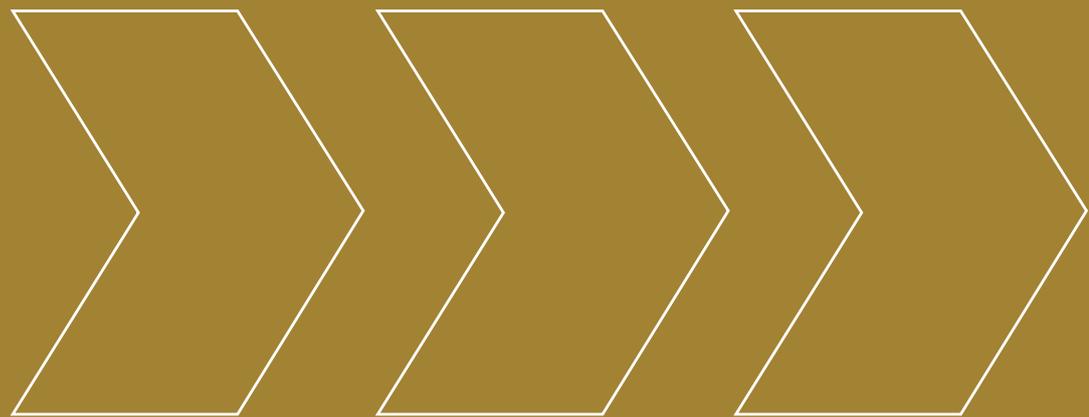


Jajaran Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
(Dari Kiri ke Kanan: Donny Arsal, Mohammad Sofyan,
Hasanudin, Kushartanto Koeswiranto, Subakti Syukur.
Duduk: Desi Aryanj)



05

LAPORAN
DIREKSI





Desi Arryani
Direktur Utama

LAPORAN DIREKSI

Tahun 2017 menjadi momentum langkah penting bagi transformasi perusahaan guna mencapai tujuan strategis Perseroan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka panjang.

Pemegang Saham yang terhormat,

Tantangan mewujudkan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan tol menjadikan perusahaan bertransformasi menjadi lebih modern, efektif, dan efisien. Hal tersebut tampak dari target penambahan pengoperasian jalan tol lebih dari 600 km hingga 3 tahun kedepan, serta penerbitan beberapa inisiasi alternatif pendanaan untuk pembangunan jalan tol baru. Dalam pelayanan transaksi, bersama program pemerintah 100% *cashless*, diterapkan elektronifikasi di seluruh gardu tol.

Tahun 2017 menjadi momentum langkah penting guna transformasi perusahaan dalam mencapai tujuan strategis Perseroan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka panjang. Tahun ini juga menjadi momentum besar, setelah tahun 2004 Perseroan menjadi perseroan terbatas dan bagian dari perusahaan badan usaha milik negara, dengan fungsi regulator telah dikembalikan ke pemerintah. Saat itu Perseroan hanya menjadi operator dan pengembang

jalan tol. Kemudian momen bersejarah berikutnya terjadi pada tahun 2007 saat Perseroan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) melepaskan sebagian sahamnya (30%) ke publik yang mendapatkan respon sangat baik. Dengan demikian, bisa kami sampaikan bahwa pada tahun ini, pada tahun 2017, Perseroan menetapkan target yang luar biasa akan menambah lebih dari dua kali lipat panjang jalan tol beroperasi yang pada akhir tahun 2016 telah mengoperasikan 593 km dan menargetkan penambahan lebih dari 660 km jalan tol hingga tiga tahun ke depan dimulai pada tahun 2017 ini.

Tentunya, target itu memiliki dampak dan tantangan tersendiri bagi Perseroan. Jasa Marga melakukan transformasi menuju perusahaan yang lebih baik. Perseroan juga melakukan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan strategi bisnis, yang tecermin dalam pembaruan visi dan misi perusahaan untuk menghadapi tantangan dan menjawab peluang bisnis serta meningkatkan posisi Perseroan sebagai *industry leader*.

VISI

Menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya dan berkesinambungan.

MISI

1. Memimpin pembangunan jalan tol di Indonesia untuk meningkatkan konektivitas nasional
2. Menjalankan usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional dan berkesinambungan
3. Memaksimalkan pengembangan kawasan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan keuntungan Perusahaan
4. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan prima

Menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional membuat Perseroan terus melangkah maju mengembangkan infrastruktur, khususnya di bidang jalan tol, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang bertujuan meningkatkan konektivitas nasional dengan menargetkan pembangunan 1.000 km jalan tol baru. Dengan mengingat potensi yang sangat besar bagi keberlanjutan perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan negeri, dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol untuk mendorong hal-hal sebagai berikut ini.

- Pertumbuhan ekonomi agar memperluas penciptaan lapangan kerja;
- Menurunkan biaya logistik untuk menurunkan harga barang dan jasa sehingga meningkatkan daya saing barang dan jasa dalam negeri; dan
- Mengendalikan inflasi agar pertumbuhan pendapatan lebih tinggi daripada pertumbuhan harga barang sehingga tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia lebih baik.

Dalam upaya mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, peningkatan investasi pemerintah, terutama untuk sektor infrastruktur, menjadi sangat menentukan. Dengan semangat membangun untuk pertumbuhan dan pemerataan, penekanan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur itu diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun mendatang sekaligus mengurangi ketimpangan baik antarindividu maupun antarwilayah.

Untuk terus bertahan dan memimpin di industri jalan tol, Perseroan mengembangkan dan menjalankan strategi

unit bisnis, melayani kebutuhan konsumen, menghadapi kompetitor di lini bisnis, serta meningkatkan kinerja bisnis. Perseroan juga terus meningkatkan kapabilitas melalui peyediaan layanan dengan biaya yang efisien serta penyediaan jasa layanan ahli.

Selain itu, Perseroan melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan Perseroan melalui usaha lain di bidang jasa pengoperasian jalan tol, jasa pemeliharaan jalan tol dan jasa pengelolaan properti di sekitar jalan tol. Pada sisi jasa pengoperasian jalan tol, Perseroan melihat potensi untuk mengoperasikan jalan tol yang hak konsesinya dimiliki oleh anak perusahaan Perseroan dan yang dimiliki oleh investor lain. Pada sisi pemeliharaan jalan tol, Perseroan juga melihat adanya potensi untuk melakukan pemeliharaan pada jalan tol yang dioperasikan oleh Perseroan dan anak perusahaan serta yang dioperasikan oleh investor lain. Dari sisi jasa pengelolaan properti di sekitar jalan tol, Perseroan melihat potensi untuk dapat mengelola bisnis properti di wilayah koridor jalan tol, seperti tempat istirahat (*rest area*) dan pembangunan apartemen dan perumahan serta perkantoran.

Dari sisi tantangan, Perseroan menghadapi tantangan dalam hal upaya untuk meningkatkan pelayanan operasional dan produktivitas kinerja SDM. Pada sisi pelayanan operasional, Perseroan menghadapi tantangan untuk meningkatkan pelayanan operasional untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas di tengah semakin meningkatnya volume lalu lintas yang telah melebihi kapasitas jalan yang ideal terutama pada jalan tol di Jakarta dan sekitarnya. Program implementasi 100% transaksi nontunai juga menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi Perseroan karena program itu diharapkan dapat meningkatkan waktu transaksi serta efisiensi dalam pelayanan pengumpulan tol. Selain itu, Perseroan menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas kinerja SDM untuk mempertinggi daya saing dalam menghadapi persaingan di industri jalan tol yang semakin meningkat.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN

Dengan mencermati tantangan dan peluang yang dihadapi, Perseroan mencanangkan pada tahun 2019, Perseroan akan menyelesaikan hak konsesi dan mengoperasikan 1.260 km jalan tol baru dengan pertumbuhan nilai aset, sekaligus mempertahankan posisi *market leader* di industri jalan tol Indonesia. Perusahaan melakukan berbagai upaya

untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya secara menyeluruh.

Untuk mendukung hal tersebut, menjadi penting dalam manajemen mengembangkan prinsip kepemimpinan strategis, pemantauan kinerja, strategi pendanaan yang tepat sasaran, pengembangan kapabilitas, serta meningkatkan nilai positif identitas dan citra Perusahaan. Selain itu, Perseroan terus-menerus meningkatkan nilai-nilai fundamental dan memaksimalkan potensi aset yang dimiliki. Tidak hanya itu, Perseroan memaksimalkan peluang investasi jalan tol dengan berbagai skema bisnis, memaksimalkan potensi bisnis jasa operasi, pemeliharaan, konstruksi tol, dan teknologi tol, serta memaksimalkan potensi bisnis di sepanjang aset jalan tol (*toll corridor development*).

Untuk mencapai visi dan misi serta sasaran strategis Perseroan, disusun beberapa strategi kunci yang dibagi ke dalam strategi operasi dan strategi pendanaan. Adapun untuk strategi kunci pengoperasian ialah sebagai berikut.

1. Pengembangan bisnis jalan tol

- Memaksimalkan perolehan ruas jalan tol baru yang fokus pada kelayakan dan minimum IRR melalui berbagai skema bisnis dan pendanaan.
- Memastikan pengoperasian penambahan jalan tol baru yang sudah dimiliki konsesinya 1.260 km pada tahun 2019. Penambahan panjang jalan tol baru itu diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan menjaga posisi *market leader* industri jalan tol di masa mendatang.
- Dalam jangka panjang, menargetkan untuk terus menjadi operator jalan tol komersil yang memiliki kualitas tinggi serta memiliki diferensiasi dengan para kompetitor.

2. Pengoperasian dan pendukung operasi jalan tol

- Mengoperasikan jalan tol yang efisien, aman dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan kinerja dan performa yang ekselen.
- Menyediakan pelayanan *excellent* kepada pengguna jalan tol, komunitas di wilayah sekitar, dan pemerintah.
- Meningkatkan kapabilitas dan penerapan teknologi untuk layanan operasi, transaksi, pemeliharaan, konstruksi dan konsultasi bisnis tol.

- Menjadi lini bisnis yang mandiri dan berorientasi pada *cost leadership* dan *operational excellence* serta meningkatkan *competitive advantage* di seluruh kelompok usaha Jasa Marga.

3. Prospektif bisnis

- Mengembangkan bisnis usaha lain yang terkait secara strategis menguatkan dan mendukung pertumbuhan bisnis jalan tol.
- Memaksimalkan potensi pasar *toll corridor development* (TCD), *transit oriented development* (TOD), tempat istirahat dan pelayanan (TIP) secara proaktif dan selektif.
- Meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan dengan memaksimalkan potensi bisnis yang ada.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Perseroan memfokuskan pencapaian sasaran-sasaran utama tersebut pada tahun 2017 ini sebagai berikut. Di bidang pengembangan bisnis jalan tol, Perseroan memfokuskan penyelesaian 15 konsesi ruas jalan tol baru hingga tahun 2019 dapat beroperasi penuh dan dapat memberikan kontribusi di pendapatan tol. Perusahaan juga terus mencari dan mengkaji potesi penambahan konsesi baru yang terkoneksi dengan ruas tol *existing* serta memiliki IRR yang layak. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan juga mencari peluang dan potensi bisnis usaha lain yang terkait dengan bisnis inti melalui Anak Perusahaan.

Dalam bidang pengoperasian jalan tol, Perseroan menjaga pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) secara berkelanjutan, dengan tiga poin utamanya ialah pelayanan

Tahun 2017, Perseroan meningkatkan kapasitas keuangan dengan melakukan upaya inisiatif alternatif pendanaan untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan baru untuk mendukung akselerasi pembangunan jalan tol.

transaksi tol, pelayanan lalu lintas, dan pelayanan kualitas konstruksi. Untuk meningkatkan layanan operasi, Perseroan bekerja sama dengan Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan dalam mengelola jalan tol di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang telah mengalami kepadatan lalu lintas melalui penataan dan perbaikan rekayasa lalu lintas pada daerah-daerah yang tingkat kepadatan lalu lintasnya tinggi. Perseroan juga melakukan integrasi sistem transaksi pembayaran tol untuk mengefisienkan proses transaksi pembayaran tol dan mengurangi antrean pada gerbang-gerbang tol utama melalui pengurangan jumlah gerbang transaksi. Dalam pengembangan pelayanan transaksi, Perseroan telah **berhasil mengimplementasikan 100% cashless payment** di ruas-ruas tol yang dimilikinya. Hal itu dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan penggunaan transaksi nontunai melalui kartu pembayaran elektronik (*e-payment*).

Untuk memperkuat lini bisnis usaha lain, Perseroan akan menaikkan peningkatan kapasitas dan daya saing anak perusahaan Perseroan di bidang jasa layanan operasi untuk meningkatkan pendapatan usaha lain baik melalui jasa pengoperasian ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan maupun ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh badan usaha jalan tol lainnya. Perseroan juga akan mempertinggi peran dan daya saing anak perusahaan Perseroan di bidang jasa layanan pemeliharaan untuk meningkatkan pendapatan usaha lain baik melalui jasa pemeliharaan ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan maupun ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh badan usaha jalan tol lainnya. Perseroan juga akan melakukan peningkatan peran dan daya saing anak perusahaan Perseroan di bidang properti, khususnya peningkatan pelayanan di tempat istirahat dan pelayanan (*Rest Area*) serta meningkatkan pendapatan usaha lain melalui peningkatan investasi properti di sekitar koridor jalan tol.

Sejalan dengan target pencapaian strategi Perseroan tersebut, bidang sumber daya manusia juga perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kapabilitas organisasi dan kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas. Perseroan merencanakan perbaikan proses bisnis dan penataan kembali struktur organisasi melalui pembagian lingkup dan peran bisnis di kelompok usaha

Jasa Marga. Perseroan mencanangkan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas dan layanan operasional, serta modernisasi sistem peralatan tol untuk mengantisipasi perkembangan teknologi *e-payment*. Yang tidak kalah penting, sejalan dengan implementasi penuh transaksi nontunai, penyelenggaraan program Alih Profesi (A-Life) menjadi momentum penting dalam transformasi Perseroan menuju *industry leader*. Program-program pengayaan kompetensi tersebut dilengkapi dengan pengembangan budaya perusahaan untuk bertransformasi berbasis kinerja.

Di sisi peningkatan kapasitas keuangan, Perseroan meningkatkan kapasitas keuangan dengan melakukan upaya inisiatif alternatif pendanaan untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan baru untuk mendukung akselerasi pembangunan jalan tol serta menjaga rasio-rasio keuangan Perseroan. Saat ini Perseroan sedang membangun 18 ruas tol baru dengan total investasi lebih dari Rp100 triliun, dengan sisa pembangunan yang ada masih membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Perseroan juga merestrukturisasi utang di level anak perusahaan dan memperbaiki struktur keuangan Perseroan. Strategi pendanaan yang potensial, sesuai dengan kondisi Perseroan untuk meminimalkan risiko keuangan, ialah sebagai berikut.

Dalam pengembangan pelayanan transaksi, Perseroan telah berhasil mengimplementasikan 100% cashless payment di ruas-ruas tol yang dimiliki. Hal itu dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan penggunaan transaksi nontunai melalui kartu pembayaran elektronik (*e-payment*).



Jajaran Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menjalankan tugas pelaksanaan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. (Dari Kiri - ke Kanan: Mohammad Sofyan, Hasanudin, Kushartanto Koeswiranto, Subakti Syukur, Donny Arsal. Duduk: Desi Arryani)

- a. Pinjaman perbankan
Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek sebelum mendapatkan pendanaan dari pasar modal.
- b. Bond/sukuk pada level korporat
Untuk mendanai proyek-proyek jalan tol baru melalui investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- c. *Project bond* di level proyek atau anak perusahaan
Untuk menggantikan pendanaan pinjaman perbankan dengan obligasi proyek di pasar modal yang memiliki *fixed rate* dan pembayaran pokok yang sesuai dengan kemampuan *cash flow* perusahaan.
- d. Sekuritisasi
Teknik pembiayaan dengan mengemas aset keuangan dari *mature asset* menjadi likuid dan dapat diperjualbelikan tanpa menimbulkan beban bunga.
- e. *Equity Fund Raising*
Untuk menjaga profitabilitas dan meningkatkan kapasitas pendanaan.

Sesuai dengan visi Perseroan untuk “Menjadi Perusahaan Jalan Tol Nasional Terbesar, Terpercaya dan Berkesinambungan”, pada tahun 2017 ini Perseroan juga membentuk Tim **Strategic Transformation Office (STO)** yang memiliki tugas membantu Manajemen dalam mengelola program-program strategis yang telah ditetapkan dalam jangka menengah, antara lain mengembangkan laporan pemantauan dan melacak proyek serta laporan evaluasi proyek; memberikan masukan/rekomendasi kepada Dewan Transformasi atau Direksi untuk membuat keputusan dalam rangka memaksimalkan penciptaan nilai serta menghindari perusakan nilai; dan membantu mengidentifikasi permasalahan dan pemecahannya. Dalam melaksanakan tugas, STO dibantu Tim Kerja untuk mengelola, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan progres perkembangan program-program strategis Perseroan.

ANALISIS KINERJA PERSEROAN

PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN

Pada tahun 2017, di bidang pengoperasian jalan tol baru, Perseroan telah berhasil mengoperasikan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Ruas Gempol-Rembang (13,9 km), terdiri atas Seksi Bangil-Rembang (7,1 km) yang dioperasikan pada 13 April 2017 dan Seksi Gempol-Bangil (6,8 km) yang dioperasikan pada 3 Agustus 2017. Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Bawen-Salatiga (17,5 km) dioperasikan pada 25 September 2017. Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Ruas Kualanamu-Sei Rampah (41,69 km) dioperasikan pada 20 Oktober 2017, dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi Sepanjang-Krian (15,5 km) dioperasikan pada 19 Desember 2017, sehingga panjang jalan tol operasi Perseroan menjadi 680 km dari total konsesi jalan tol sepanjang 1.497 km pada akhir tahun 2017.

Perseroan berhasil meningkatkan hak konsesi jalan tol dengan menambah 2 konsesi tol baru sepanjang 237 km dari 1.260 km pada akhir 2016 menjadi 1.497 km pada akhir 2017. Konsesi ruas jalan tol baru diperoleh melalui proses tender, yaitu Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang sekitar 173 km, dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan sepanjang 64 km yang diperoleh melalui *project initiative* dengan persetujuan proyek tersebut sudah diterima pada tahun 2016 lalu dan tetap melalui proses tender, tetapi Perseroan memiliki *right to match* untuk mendapatkan hak konsesi.

Selama tahun 2016, Perseroan juga telah berhasil meningkatkan aktivitas konstruksi dan pembebasan lahan pada ruas-ruas jalan tol baru, sehingga penyerapan anggaran investasi jalan tol baru ialah sebesar Rp23,58 triliun atau mencapai sekitar 106,21% dari rencana tahun 2017.

Dari kinerja aspek pengoperasian jalan tol, target volume lalu lintas transaksi tercapai sebesar 1,35 miliar transaksi kendaraan. Pencapaian volume lalu lintas transaksi tersebut juga lebih tinggi 1,05% daripada rencana tahun 2017.

Sesuai dengan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol,

Perseroan mendapatkan penyesuaian tarif tol pada tahun 2017 yang diberlakukan mulai 8 Desember 2017 di 5 ruas tol milik Perseroan, yaitu Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit, Jalan Tol Surabaya-Gempol, Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Jalan Tol Semarang dan 3 ruas jalan tol anak perusahaan. Besaran angka penyesuaian tarif ruas tersebut didasarkan pada inflasi selama 2 tahun yang rata-rata sebesar 7%.

Di bidang pelayanan pengoperasian jalan tol, Perseroan telah berhasil mengimplementasikan 100% transaksi nontunai, yang ditargetkan pada awal tahun untuk dapat dicapai pada akhir Oktober 2017. Hal itu, selain meningkatkan pelayanan transaksi, merupakan upaya untuk mengendalikan beban usaha Perseroan.

Pada tahun 2017, Perseroan juga menyederhanakan sistem transaksi bersama-sama dengan badan usaha jalan tol lain melalui integrasi pelayanan transaksi pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Jalan Tol Tangerang-Merak dengan mengeliminasi Gerbang Tol Karang Tengah. Penyederhanaan sistem transaksi itu memberi kemudahan bagi pengguna jalan tol karena jumlah transaksi berkurang. Perseroan juga melakukan penyesuaian sistem transaksi di Ruas Jalan Tol Jagorawi, dari sistem transaksi tertutup menjadi sistem transaksi terbuka, sehingga diberlakukan *single tariff* di destinasi atau setiap transaksi gerbang tol. Di ruas tersebut juga dieliminasi Gerbang Tol Cibubur Utama dan Gerbang Tol Cimanggis Utama untuk mempercepat dan memperlancar arus lalu lintas.

Pada bagian layanan informasi jalan tol, Perseroan juga melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas informasi melalui penggantian *call center* pelayanan pusat informasi dari Traffic Information Center melalui 14080 dan peningkatan layanan JMCARe yang memberikan informasi terkini kondisi jalan tol dengan fitur berbasis *push notification message*.

Pada tahun 2017, pengembangan usaha lain ditopang oleh jasa pemeliharaan jalan tol, jasa pengoperasian jalan tol, serta pengelolaan investasi properti dan tempat istirahat dan pelayanan. Pendapatan usaha lain Perseroan pada tahun 2017 sebesar Rp 640,4 miliar. Terdapat penyesuaian perlakuan akuntansi atas transaksi afiliasi atas Induk dan Anak, sehingga terlihat terjadi penurunan sebesar 29,3%.

Untuk mendukung upaya ekspansi Perseroan, baik di pengembangan usaha tol dan usaha lain maupun peningkatan pelayanan operasional, Perseroan juga terus berupaya memperbaiki proses bisnis dan mengimplementasikan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, Perseroan terus meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta program Alif Profesi.

Pada tahun 2017, Perseroan berhasil membukukan total aset sebesar Rp79,19 triliun, yang meningkat sebesar 48,02% dari tahun 2016 sebesar Rp58,50 triliun. Pertumbuhan aset yang signifikan tersebut merupakan cerminan dari meningkatnya aktivitas konstruksi Perseroan di beberapa ruas jalan tol. Hal itu sejalan dengan strategi Perseroan untuk mempercepat pembangunan jalan tol dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka panjang.

Di tengah ekspansi dan akselerasi pembangunan jalan tol yang sedang gencar dilakukan oleh Perseroan, Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp2,20 triliun atau meningkatkan sebesar 16,4% dari tahun 2016 sebesar Rp1,89 triliun. Pencapaian laba bersih itu didukung oleh pencapaian pendapatan tol dan usaha lain sebesar Rp8,92 triliun atau tumbuh 1,01% jika dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu sebesar Rp8,83 triliun. Pencapaian laba bersih juga didukung oleh upaya pengendalian beban usaha yang tecermin dari pencapaian EBITDA *margin* sebesar 61,4% yang meningkat dari tahun 2016 yang mencapai 59,2%. Selain itu, pencapaian laba bersih juga ditopang oleh upaya Perseroan dalam mengendalikan beban bunga di tengah meningkatnya utang Perseroan untuk mendukung ekspansi pengembangan jalan tol baru.

Pada tahun 2017 Perseroan melakukan tiga inovasi alternatif pendanaan. Terobosan pertama yang telah dilakukan oleh Jasa Marga pada Juli 2017 lalu ialah program *asset recycling* dengan melakukan penerbitan sekuritisasi yang berbasis hak atas sebagian pendapatan ruas Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi), yang merupakan salah satu ruas tol paling *mature* yang dimiliki oleh Jasa Marga. Produk itu mendapat respon yang sangat bagus karena penjualannya *oversubscribed* hingga 3 kali. Terobosan berikutnya ialah melalui program *debt recycling*. Kali ini Jasa Marga dan pemegang saham minoritas, PT Jakarta Marga Jaya, berinovasi untuk mengeluarkan obligasi di level anak perusahaan atau *project*

Pada tahun 2017, Perseroan berhasil membukukan total aset sebesar Rp78,19 triliun, yang meningkat sebesar 48,02% dari tahun 2016 sebesar Rp 53,5 triliun. Pertumbuhan aset yang signifikan tersebut merupakan cerminan dari semakin meningkatnya aktivitas konstruksi Perseroan dalam pembangunan jalan tol baru

bond, yang untuk pertama kalinya dilakukan oleh anak usaha Jasa Marga, yaitu PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) untuk Ruas Tol JORR W2 Utara atau Kebon Jeruk-Ulujami sepanjang 7,7 km, yang telah beroperasi penuh sejak tahun 2014. Penerbitan itu bertujuan untuk mendapatkan bunga yang tetap selama periode pinjaman dan juga pembayaran pokok atas pinjaman dapat menyesuaikan kemampuan *cash flow* dari proyek. Produk itu pun mendapat respon positif dari pasar dan mendapatkan *oversubscribed* hingga hampir 2 kali.

Tidak berhenti di situ, Jasa Marga menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah di pasar global (Global IDR Bond), Komodo Bond, dan mencatatkan produk tersebut di London Stock Exchange pada pertengahan bulan Desember 2017. Nilai Komodo Bond yang diterbitkan sebesar Rp4 triliun dengan masa tenor 3 tahun. Perseroan berkeyakinan bahwa penerbitan Komodo Bond ini akan menjadi diversifikasi sumber pendanaan di tengah kebutuhan capex Perseroan yang cukup tinggi. Itu juga dapat memperluas cakupan investor global dan meningkatkan target jumlah pendanaan, serta meningkatkan fleksibilitas pendanaan.

KENDALA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN LANGKAH PENYELESAIANNYA

Selama tahun 2017, Perseroan menghadapi kendala-kendala yang terutama ialah kemungkinan kompetisi di industri jalan tol karena kini banyak pemain baru dalam pengembangan dan pengoperasian jalan tol. Percepatan pembebasan lahan,



Seremoni Listing Komodo Bond PT Jasa Marga (Persero) Tbk. di London Stock Exchange, Rabu, 13 Desember 2017. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. telah membuka jalan bagi masa depan pasar modal Indonesia dengan melakukan penawaran global perdana obligasi berdenominasi Rupiah atau disebut Komodo Bond.

penanganan kepadatan lalu lintas yang tinggi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, peningkatan produktivitas dan penyiapan kader pemimpin perusahaan dan pendanaan juga masih menjadi tantangan tersendiri bagi Perseroan.

Dalam mengantisipasi kompetisi di industri jalan tol, Perseroan terus meningkatkan kompetensi inti dan mengembangkan struktur anak perusahaan yang dikhususkan untuk menghadapi penetrasi pasar pengoperasian tol di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lain.

Pada aspek pembebasan lahan, Perseroan berupaya melakukan percepatan pembebasan lahan dengan secara aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di tingkat pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Selain itu, dengan memperhatikan keterbatasan APBN dalam alokasi anggaran pembebasan lahan, Perseroan menyiapkan dana talangan tanah terlebih dahulu.

Khususnya dalam menangani masalah kepadatan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang volume lalu lintasnya telah melampaui kapasitas jalan tol yang ada, Perseroan berupaya meningkatkan kelancaran lalu lintas melalui penyederhanaan sistem transaksi di gerbang tol, meningkatkan penetrasi penggunaan pembayaran nontunai (*e-payment*) dan rekayasa lalu lintas pada lokasi-lokasi yang tingkat kepadatan lalu lintasnya tinggi. Upaya lain yang dilakukan Perseroan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang telah mencapai V/C ratio lebih dari 1,5 ialah mengusulkan pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated dan Jakarta-Cikampek II Selatan.

Di tengah ekspansi yang dilakukan, Perseroan mengalami kekurangan sumber daya manusia pada posisi pimpinan senior perusahaan yang memasuki masa pensiun. Dalam menghadapi kendala ini, Perseroan mengupayakan rekrutmen karyawan baru dan melakukan peningkatan kompetensi dan akselerasi terhadap generasi muda, kader-kader pimpinan perusahaan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi modal utama dalam menyiapkan

kader pimpinan di masa mendatang. Nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik tidak berhenti disosialisasikan dan diinternalisasikan di seluruh kelompok usaha Jasa Marga.

Pada aspek pendanaan jalan tol baru di masa mendatang, Perseroan akan dihadapkan pada kendala berupa terbatasnya dana yang dimiliki untuk melakukan ekspansi secara masif di bisnis jalan tol. Untuk itu, pada tahun 2017, Perseroan telah melakukan beberapa inisiatif alternatif pendanaan, seperti sekuritisasi pendapatan tol di muka Jalan Tol Jagorawi, *project bond* JORR W2N dan Komodo Bond (Global IDR Bond). Selain itu, Perseroan menerapkan metode pembiayaan konstruksi proyek jalan tol baru, yaitu dengan menggunakan *Contractor Pre Financing* (CPF) di beberapa proyek jalan tol baru, dengan Perseroan membayarkan seluruh biaya konstruksi kepada kontraktor setelah proses konstruksi selesai. Kebijakan itu dilakukan agar kinerja keuangan Perseroan dapat terjaga lebih baik dengan mengelola *cash flow* yang ada.

PROSPEK USAHA PERSEROAN KE DEPAN

Pertumbuhan pembangunan jalan tol menjadi sangat dibutuhkan, karena diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah di Indonesia. Potensi pertumbuhan daya beli masyarakat juga akan memberikan efek positif bagi sektor infrastruktur, khususnya jalan tol. Kecenderungan turunnya suku bunga juga akan membantu masyarakat membeli hunian baru dan kendaraan baru. Peningkatan komposisi usia produktif juga diproyeksikan akan terus terjadi hingga 20 tahun ke depan.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah mengupayakan memperbaiki infrastruktur yang diperlukan seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia. Transformasi pada percepatan infrastruktur ini dapat menciptakan peluang pertumbuhan bisnis logistik memicu kebutuhan akan jaringan jalan.

Setelah mencermati upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Perseroan optimistis akan menambah pengoperasian jalan tol baru sepanjang 200 km setiap tahunnya hingga dua tahun ke depan. Perseroan optimistis bahwa seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, volume lalu lintas transaksi akan terus meningkat.

Meningkatnya daya beli masyarakat serta program pemerintah melalui Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) menjadikan produk keuangan e-Payment memiliki potensi penetrasi penggunaan kartu elektronik pre-paid sebagai alat transaksi pembayaran tol. Setelah berhasil mengimplementasikan 100% pembayaran transaksi nontunai menggunakan *e-Toll card* baik dengan bank negara maupun swasta pada 31 Oktober 2017 lalu, Perseroan melihat adanya peluang untuk meningkatkan pelayanan transaksi ini menjadi potensi bisnis transaksi tol. Hal itu selaras dengan tujuan Perseroan untuk dapat mengendalikan beban usaha pelayanan operasional dan meningkatkan pendapatan dari usaha lain.

Dalam mendukung pelayanan operasional, Perseroan juga akan terus meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan dengan melanjutkan proses integrasi pengoperasian di ruas tol lain serta akan dilakukan juga perubahan sistem transaksi di ruas-ruas jalan tol yang telah dikaji terlebih dahulu.

Dari sisi pengembangan usaha lain, seiring dengan semakin bertambahnya panjang jalan tol di Indonesia baik yang dimiliki oleh Perseroan maupun oleh perusahaan jalan tol lain, Perseroan optimistis dapat meningkatkan pendapatan usaha jasa layanan pemeliharaan, jasa pengoperasian jalan tol, dan pengelolaan properti dan *rest area* melalui anak perusahaan Perseroan. Potensi bisnis yang terkait dengan industri jalan tol masih sangat besar dan perlu dikaji lebih lanjut. Mengembangkan bisnis usaha lain yang terkait secara strategis menguatkan dan mendukung pertumbuhan bisnis jalan tol. Potensi pasar *toll corridor development* (TCD), *transit oriented development* (TOD), Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) menjadi salah satu prospek usaha Jasa Marga di masa depan yang saat ini sedang dikaji dan

Jasa Marga menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah di pasar global (Global IDR Bond), Komodo Bond dan mencatatkan produk tersebut di London Stock Exchange pada bulan Desember 2017.

dipersiapkan. Hal itu dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan dengan memaksimalkan potensi bisnis yang ada.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKESINAMBUNGAN

Perseroan berkomitmen memastikan aktivitas pengelolaan bisnis dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Perseroan juga terus berupaya menyempurnakan praktik-praktik GCG yang selama ini telah diterapkan. Untuk mewujudkan perusahaan yang berdaya saing tinggi dan tumbuh berkelanjutan, Perseroan telah dan terus mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan *best practice* yang ada.

Jasa Marga senantiasa berupaya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Untuk mewujudkan hal tersebut, Jasa Marga telah memiliki *Code of Conduct* yang dinamakan Kode Etik Jasa Marga yang telah diberlakukan sejak tahun 2005. Kode Etik Jasa Marga ini merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai atau norma yang dianut oleh seluruh insan Jasa Marga dalam melaksanakan tugas, yang di dalamnya memuat etika bisnis dan perilaku seluruh insan Jasa Marga dalam mencapai tujuan, visi dan Misi Perseroan dengan seluruh pemangku kepentingan dan lingkungannya.

Untuk memperkuat implementasi GCG, Perseroan secara aktif telah melakukan beberapa program pengembangan penerapan tata kelola perusahaan, yakni penerapan Kode Etik Jasa Marga dan internalisasi prinsip GCG; penerapan Pedoman Benturan kepentingan; Program Pengendalian Gratifikasi; pengelolaan *Whistleblowing System*; Komitmen Pakta Integritas; serta pengelolaan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Dalam mendukung program tersebut, Perseroan juga turut berpartisipasi aktif dalam beberapa ajang penghargaan atau award di bidang GCG, *assessment* atau penilaian implementasi GCG oleh lembaga independen maupun *self-assessment*, penerapan ISO dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mendukung operasional perusahaan, serta menanamkan budaya inovasi di seluruh aspek dan lapisan manajemen dan kelompok usaha Jasa Marga yang kemudian diukur dalam sasaran kerja masing-masing atau *Key*

Performance Indicator (KPI) yang disepakati pada awal tahun.

Upaya untuk selalu meningkatkan praktik-praktik GCG tecermin pada kemampuan Perseroan mempertahankan hasil penilaian skor GCG Perseroan. Pada tahun 2017 Perseroan kembali berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dengan nilai 97,17%, yang naik dari skor tahun sebelumnya.

Penerapan GCG merupakan landasan bagi Perseroan melakukan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai tambah, baik bagi internal Perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Infrastruktur di Indonesia.

Sebagai upaya untuk terus memperbaiki tata kelola perusahaan, Perseroan juga secara berkala mengikuti proses *assessment* KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2017, skor KPKU Perseroan mencapai nilai 725,5 (*level industry leader*) atau meningkat 37 poin dari tahun 2016.

Dalam menjalankan operasional dan melakukan bisnis, Perseroan berupaya untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam pengelolaan perusahaan. Perseroan juga terus memperbaiki tata kelola manajemen risiko Perseroan. Pada tahun 2017, tingkat kematangan risiko Perseroan mencapai 3,85 (kategori mahir) atau naik 0,07 poin dari tahun 2016. Pada sisi pengelolaan teknologi informasi, Perseroan terus berupaya memperbaiki tingkat implementasi IT Perseroan sebagai upaya untuk terus meningkatkan produktivitas dan perbaikan proses bisnis dalam mendukung pengembangan Perseroan. Pada tahun 2017, tingkat maturitas tata kelola IT Perseroan mencapai skor 3,22 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 3,15.

Pengembangan penerapan tata kelola perusahaan ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menjamin hak-hak pemegang saham dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Dalam menjamin hak-hak pemegang saham, Perseroan menjaga keberlangsungan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku, serta meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan dengan para pemegang saham melalui website, forum-forum dengan investor dan merespons kebutuhan informasi yang diperlukan. Kemudian dalam meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan,

Perseroan juga memiliki kebijakan untuk mencegah adanya kemungkinan *insider trading*, kebijakan antikorupsi dan *anti-fraud*, kebijakan dalam menyeleksi pemasok, kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur, kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) dan kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan.

Pelaksanaan keterbukaan informasi juga menjadi penting dilakukan secara menyeluruh di kelompok usaha Jasa Marga. Pemanfaatan teknologi sebagai media penyampaian informasi juga terus ditingkatkan. Guna mendukung pengembangan penerapan tata kelola perusahaan, tata nilai budaya kerja Jasa Marga, JSMR (Jujur, Sigap, Mumpuni, dan Respek) menjadi landasan Perseroan mencapai visi dan misi perusahaan untuk senantiasa unggul dalam memberikan pelayanan dan menjaga kinerja serta komitmen yang kuat dari segenap insan Jasa Marga kepada seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan sekitar. Tata nilai tersebut kami perbarui kembali pada awal tahun 2018 ini, disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang ada, menjadi APIC (*Agility, Professionalism, Integrity, dan Consumer Focus*). Kami berharap tata nilai tersebut sebagai cerminan nilai-nilai yang mendasari insan Jasa Marga bekerja dan berkarya untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan.

PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

Dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan, telah dilakukan perubahan dan pengembangan struktur organisasi secara terintegrasi dan menyeluruh. Efektivitas organisasi menjadi penting untuk dikelola melalui perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM), proses rekrutmen, pengembangan manajemen karir, pengembangan manfaat karyawan, serta penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan kompetensi.

Perencanaan kebutuhan tenaga kerja di Perseroan memperhatikan peningkatan bisnis jalan tol, jumlah konsesi yang dimiliki dan target penambahan panjang jalan tol beroperasi sejalan dengan peningkatan jumlah anak perusahaan. Efektivitas pengelolaan juga ditunjang dengan pembagian tugas dan tanggung jawab seluruh karyawan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kompetensi dari masing-masing fungsi yang ada. Pengembangan kompetensi dilakukan dalam rangka penyediaan sumber daya manusia yang andal dan berdaya saing tinggi untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan.

Perseroan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap sistem-sistem pengelolaan human capital yang diharapkan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan Perseroan. Perkembangan bisnis Perseroan yang menuntut peningkatan jumlah tenaga pendukung tetap dikendalikan melalui peningkatan kompetensi, prioritas rekrutmen karyawan baru untuk kaderisasi pemimpin serta peningkatan peran teknologi informasi, khususnya dalam otomatisasi transaksi tol atau elektronifikasi.

Dengan diimplementasikannya program elektronifikasi, Jasa Marga memastikan tidak adanya pengurangan karyawan. Untuk itu, agar program elektronifikasi tanpa pengurangan karyawan dapat terlaksana, Jasa Marga menggagas program yang dinamakan Program Alih Profesi atau *A-Life* sebagai solusi bagi karyawan yang terdampak oleh elektronifikasi. *A-Life* merupakan pengalihan pekerjaan atau perubahan jalur karir ke bidang yang berbeda dengan bidang sebelumnya yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada karyawan untuk menambah dan mengembangkan pengalaman baru sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Program *A-Life* merupakan penegasan bahwa Jasa Marga tidak mengorbankan kepentingan karyawan dalam menerapkan modernisasi.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Jasa Marga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Perseroan yakin dengan peningkatan kualitas program TJSL akan memberikan respon positif untuk pertumbuhan bisnis pada tahun-tahun mendatang. Keberlanjutan program tanggung jawab sosial dan lingkungan senantiasa memerlukan inovasi dalam peningkatan kualitas program. Perseroan tidak berhenti dalam mengembangkan program baru yang dapat menjangkau masyarakat luas serta terus memperbaharui program yang telah memberikan dampak nyata bagi *stakeholder*.

Dengan berlandaskan pada itikad untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjalankan amanah dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan, Perseroan mengajak setiap insan Jasa Marga untuk mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sinergi antara perusahaan dan pemangku kepentingan menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan komitmen perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan sosial. Kami berkeyakinan bahwa dengan keunggulan daya saing dan nilai-nilai berkelanjutan yang dimiliki, Perseroan mampu mewujudkan keseimbangan antara kinerja ekonomi (*profit*), dukungan karyawan dan lingkungan sosial (*people*), serta dukungan lingkungan alam sekitar (*planet*). Kami menyadari bahwa *Triple Bottom Line* (3Ps) bukanlah hanya sekedar konsep yang perlu dipahami, melainkan harus diimplementasikan dalam strategi dan proses bisnis keseharian.

Komitmen tersebut kemudian dijabarkan melalui adanya unit yang bertanggung jawab atas berbagai program kerja khususnya terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Komitmen tersebut juga tertuang dalam anggaran yang kami alokasikan secara khusus untuk mendorong berbagai aktivitas dan program di bidang antara lain: pengembangan sosial dan masyarakat (*community development*), kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan dan edukasi konsumen, serta program di bidang kelestarian alam sekitar.

Komitmen Jasa Marga untuk terus berkontribusi dan tampil sebagai pilar dan penggerak bagi lajunya pembangunan ekonomi nasional melalui penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang berkualitas khususnya jalan tol. Sebagai badan usaha yang memfasilitasi operasi jalan tol, Jasa Marga berperan strategis dalam menghubungkan sentra dan distribusi ekonomi masyarakat sehingga mampu menghasilkan nilai tambah perekonomian dan pemerataan pembangunan nasional.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 pada 15 Maret 2017, telah terjadi pergantian jabatan di Direksi dan Komisaris berdasarkan usulan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui surat No. SR-171/MBU/03/2017 tentang Usulan Perubahan Pengurus PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut, usulan pemegang saham Seri A Dwiwarna tersebut disetujui dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal penutupan RUPS Tahunan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya

dan paling lama 5 tahun dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS telah melalui proses pencalonan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang kemudian diusulkan melalui keputusan RUPS. Penetapan komposisi dan jumlah anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi serta rencana strategis Perseroan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta menjunjung tinggi independensi, dan semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Di jajaran Dewan Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menetapkan memberhentikan Moh Najib Fauzan dari menjabat Direktur Operasi I, Anggiasari dari menjabat Direktur Keuangan/Direktur Independen, dan Christantio Prihambodo dari menjabat Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Kemudian selanjutnya mengangkat Mohammad Sofyan sebagai Direktur Operasi I, Donny Arsal sebagai Direktur Keuangan, dan Kushartanto Koeswiranto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum/Direktur Independen. Di jajaran Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memberhentikan Taufik Widjoyono dari menjabat Komisaris, dan mengangkat Sugihardjo sebagai Komisaris.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan RUPS Tahunan Perseroan tersebut, Risalah RUPS Tahunan No. 20 tanggal 15 Maret 2017, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut.

Direktur Utama:	Desi Arryani
Direktur Operasi I:	Mohammad Sofyan
Direktur Operasi II:	Subakti Syukur
Direktur Pengembangan:	Hasanudin
Direktur Keuangan:	Donny Arsal
Direktur SDM dan Umum/	
Direktur Independen:	Kushartanto Koeswiranto

Susunan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut.

Komisaris Utama:	Refly Harun
Komisaris:	Agus Suharyono
Komisaris:	Boediarso Teguh Widodo
Komisaris:	Muhammad Sapta Murti
Komisaris:	Sugihardjo
Komisaris Independen:	Sigit Widyanan

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Perseroan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di kelompok usaha Jasa Marga. Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang berisi petunjuk tata laksana kerja sehingga tercapai standar kerja yang tinggi. Dalam *Board Manual* tersebut diatur tugas Direksi; kewajiban Direksi; wewenang Direksi; hak Direksi; persyaratan Direksi; keanggotaan Direksi; Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas; etika jabatan Direksi; rapat Direksi; dan evaluasi kinerja Direksi.

Direksi Jasa Marga terdiri dari 6 orang, yaitu 1 Direktur Utama dan 5 Direktur, seluruhnya berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan. Perseroan juga memiliki 1 Direktur Independen, yang memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Keberadaan Direktur Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga *fairness* serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas termasuk pemegang saham publik dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam mengelola Perseroan, Direksi secara berkala menjalankan rapat Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional, investasi, pengelolaan finansial, SDM, peluang dan prospek usaha ke depan.

Pada tahun 2017, kinerja Direksi yang tecermin dalam indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicator/KPI*) terdiri dari 5 perspektif. Secara keseluruhan, realisasi pencapaian indikator kinerja kunci Direksi tahun 2017 mencapai nilai 106,7. Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mewakili Perseroan untuk mencapai visi dan misi

perusahaan untuk menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya dan berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh di seluruh aspek jenjang organisasi untuk mendapatkan evaluasi dan rekomendasi menjadikan Perseroan lebih baik lagi di kemudian hari dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG serta tata nilai perusahaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan semangat kerja yang tinggi serta disertai kebersamaan yang erat, kami optimistis kinerja Perseroan di masa yang akan datang akan terus membaik. Perseroan juga optimistis mampu berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas nasional sesuai dengan tema Laporan Tahunan Tahun 2017 ini "**Transformasi**".

Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan sehingga Jasa Marga dapat mencapai kinerja yang baik selama tahun 2017. Semua pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan dedikasi para karyawan Jasa Marga yang telah memberikan kontribusi positif kepada Perseroan.

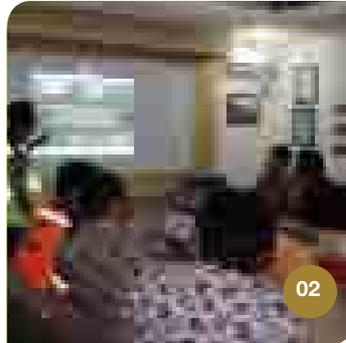
Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemegang saham atas segala dukungan yang diberikan, sehingga pada tahun 2017 Perseroan dapat terus melaksanakan berbagai pengembangan. Penghargaan juga kami sampaikan kepada pemerintah, masyarakat, pengguna jalan tol, serta para mitra kerja dan *stakeholder* lainnya atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan kepada Jasa Marga.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia-Nya kepada kita semua.



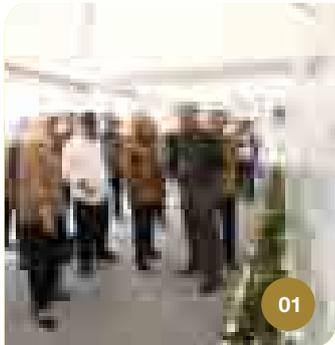
Desi Arryani
Direktur Utama

KEGIATAN DEWAN KOMISARIS JASA MARGA 2017



- 1 Kunjungan Komisaris dan Komite ke Proyek Jalan Tol Semarang-Batang
- 2 Kunjungan Komisaris dan Komite ke Proyek Jalan Tol Jalanlayang Cikampek
- 3 Kunjungan Komisaris dan Komite ke Proyek Jalan Tol Solo-Ngawi
- 4 Kunjungan Komisaris dan Komite ke Proyek Jalan Tol Ngawi-Kertosono
- 5 Kunjungan Komisaris dan Komite ke Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto
- 6 Kunjungan Komisaris dan Komite ke Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang
- 7 Kunjungan Komisaris dan Komite ke Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
- 8 Kunjungan Komisaris dan Komite ke Proyek Jalan Tol Manado-Bitung

KEGIATAN DIREKSI JASA MARGA 2017



- 1 **Direktur Utama Menghadiri Peresmian Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Bawen-Salatiga**
- 2 **Direktur Operasi I Menghadiri Seremonial Elektronifikasi Jalan Tol Bali- Mandara**
- 3 **Kunjungan Direktur Pengembangan ke Proyek Jalan Tol Ngawi-Kertosono**
- 4 **Aksi Direktur Keuangan Memeriahkan Festival Jalan Tol Medan-Kualanamu**
- 5 **Sambutan Direktur Operasi II Dalam Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai**
- 6 **Direktur SDM dan Umum Menghadiri Festival Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Bawen-Salatiga**

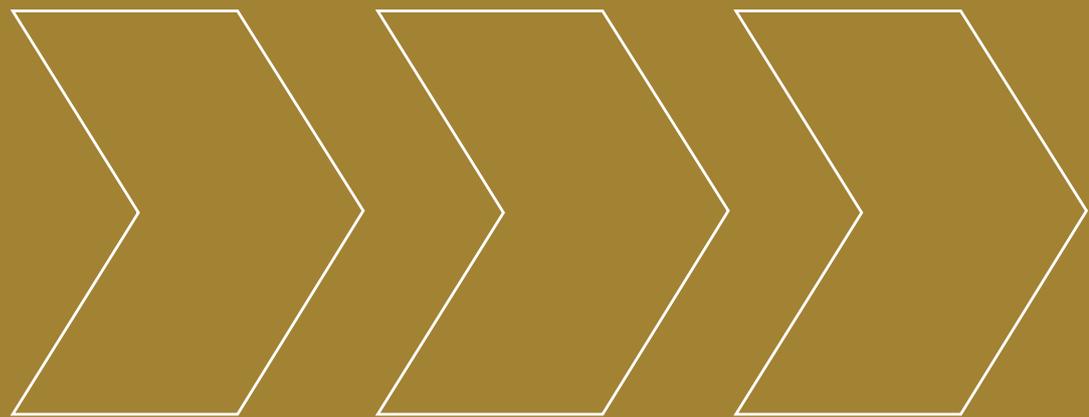


Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Bawen-Salatiga, jalan tol yang memiliki panorama sangat indah dengan bertatar belakang belakng beberapa gunung di Jawa Tengah seperti Gunung Merbabu.



06

ANALISA
DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN



ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN UMUM

Ditinjau dari aspek makro ekonomi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan diantaranya (i) laju pertumbuhan GDP, (ii) komposisi masyarakat, (iii) suku bunga, (iv) kebijakan pemerintah.

Pertama, laju pertumbuhan GDP Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat. Peningkatan ini menjadi salah satu pendukung dalam peningkatan daya beli masyarakat yang akan memberikan efek positif bagi pertumbuhan di sektor ritel. Proyeksi peningkatan ini tidak hanya terjadi pada laju pertumbuhan GDP tetapi juga terjadi pada komposisi masyarakat ekonomi menengah. Meningkatnya kedua hal tersebut akan mendorong permintaan khususnya pada kendaraan bermotor. Dimana seiring dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut maka dibutuhkan pula peningkatan pembangunan jalan dalam rangka meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Sementara itu, kecenderungan turunnya suku bunga akan membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang pada umumnya berada di area Kota Terpadu Mandiri (KTM). Hal ini didukung pula oleh kebijakan pemerintah untuk memudahkan kepemilikan rumah bagi masyarakat. Oleh karena itu, percepatan konstruksi dibutuhkan untuk menangkap peluang pertumbuhan industri khususnya di bidang infrastruktur. Diharapkan dengan infrastruktur yang semakin baik, semakin membaik pula pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun di sisi lain hingga saat ini, kesenjangan dari kontribusi pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia masih tinggi. Perbandingan antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa yakni masing-masing sebesar 60% dan 40%. Ketimpangan

ini terjadi akibat pembangunan yang tidak merata dan secara umum masih berpusat di Pulau Jawa. Dapat dilihat luas lahan kawasan industri sebesar 72% masih berada di Pulau Jawa sementara sisanya berada di Luar Pulau Jawa. Ketimpangan ini berbanding lurus dengan kenaikan tingkat urbanisasi dimana wilayah perkotaan akan semakin berkembang dan padat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengupayakan perbaikan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia dengan salah satu caranya mengusahakan pembangunan jalan tol dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung implementasi masterplan infrastruktur ASEAN.

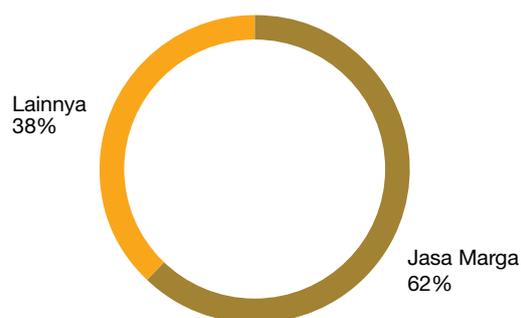
STRATEGI DAN TINJAUAN KINERJA PERSEROAN

DIBANDINGKAN INDUSTRI JALAN TOL

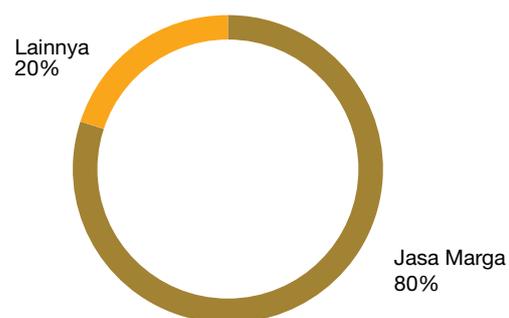
Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pada tahun 2025 Indonesia memiliki jalan tol sepanjang 6.115 km. Target pemerintah tersebut berdampak pada peningkatan prospek tumbuhnya industri jalan tol ke depan.

Sementara, perusahaan hingga akhir tahun 2017 telah mengoperasikan 680 km jalan tol atau sebesar 62% dari total panjang jalan tol beroperasi di Indonesia. Direncanakan pula perusahaan akan menambah jalan tol baru sepanjang ±800 km sehingga, keseluruhan jalan tol yang dioperasikan perusahaan hingga akhir tahun 2020 yakni sepanjang ±1.497 km.

MARKET SHARE



680 km Jalan Tol Beroperasi



Volume transaksi

BIDANG PENGEMBANGAN JALAN TOL

Dalam rangka mempertahankan posisi perusahaan sebagai market leader di bidang pengoperasian jalan tol, perusahaan berfokus menyelesaikan pembangunan ruas jalan tol yang konsesinya telah diperoleh. Pada tahun 2017, perusahaan telah menyelesaikan pembangunan atas jalan tol sepanjang 88,97 km meliputi ruas Gempol-Pasuruan seksi Gempol-Rembang, ruas Semarang-Solo seksi Bawen-Salatiga, ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, dan ruas Surabaya-Mojokerto. Sehingga, keseluruhan jalan tol yang dioperasikan oleh perusahaan pada akhir tahun 2017 sepanjang 680 km. Tidak hanya itu, perusahaan juga menginisiasi pembangunan atas ruas-ruas jalan tol baru yang potensial dan layak secara finansial. Potensi penambahan atas pembangunan ruas-ruas jalan tol tersebut diperkirakan mencapai ±800 km. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan perusahaan di tahun 2017 untuk memenangkan tender atas dua ruas jalan tol baru yakni ruas Jakarta-Cikampek II Selatan dan ruas Probolinggo-Banyuwangi. Dengan bertambahnya 2 konsesi ruas jalan tol baru tersebut, perusahaan secara keseluruhan telah memiliki 33 hak konsesi atau setara 1.497 km. Dengan hak konsesi tersebut Perseroan menargetkan lebih dari 600 km tambahan ruas jalan tol beroperasi hingga 3 tahun kedepan, tidak hanya di Pulau Jawa, Perseroan juga telah melakukan ekspansi ke pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, hal ini menegaskan komitmen Jasa Marga untuk terus membangun jalan tol di Indonesia.

BIDANG PENGOPERASIAN JALAN TOL

Bidang pengoperasian jalan tol terdiri dari tiga bagian utama yakni transaksi tol, pelayanan lalu lintas, dan pemeliharaan jalan tol. Kegiatan di bidang ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam melayani pengguna jalan.

Pencapaian perusahaan dalam bidang pengoperasian jalan tol salah satunya yakni perusahaan berhasil dalam mengimplementasikan transaksi elektronik untuk pembayaran tol di seluruh gardu tolnya pada tanggal 31 Oktober 2017. Hal ini merupakan satu pencapaian penting perusahaan dalam keikutsertaannya mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh pemerintah. Di sisi lain, dampak dari keberhasilan elektronifikasi tersebut telah berhasil pula diantisipasi oleh perusahaan. Program Alife adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk menjembatani keberlangsungan kerja para karyawan yang bekerja di gerbang

tol. Program ini merupakan program alih profesi dimana para karyawan yang bekerja di gerbang tol diberikan kesempatan untuk mengubah jalur karirnya mengembangkan diri, dan menambah pengalaman sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki.

Selain itu, perusahaan juga melakukan upaya lain untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan diantaranya adalah meniadakan transaksi di gerbang tol yang menjadi simpul kepadatan, melakukan integrasi ruas, dan melakukan perubahan sistem transaksi pembayaran tol.

Keberhasilan perusahaan dalam melakukan integrasi ruas dan perubahan sistem transaksi pada tahun 2017 ditunjukkan pada ruas Jakarta-Tangerang. Integrasi ini dilakukan dengan menggabungkan ruas Jakarta-Tangerang dengan ruas Cawang-Tomang-Cengkareng yang kini dikenal dengan ruas Jakarta-Tangerang-Cengkareng. Sementara, perubahan sistem transaksi pembayaran tol di ruas Jakarta-Tangerang dilakukan dengan mengintegrasikan sistem transaksi pembayaran tol di ruas Jakarta-Tangerang dengan ruas Tangerang-Merak segmen simpang susun Tomang-Tangerang Bawar-Cikupa. Selain itu, peniadaan transaksi dilakukan perusahaan di gerbang tol karang tengah yang berada di ruas Jakarta-Tangerang.

Keberhasilan lain perusahaan atas upaya peningkatan pelayanan ditunjukkan pula pada ruas Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi). Perusahaan berhasil melakukan peniadaan transaksi pada gerbang tol cimanggis utama dan gerbang tol cibubur utama. Di samping itu, perusahaan juga melakukan perubahan sistem transaksi pembayaran tol di ruas ini menjadi sistem transaksi terbuka sepenuhnya. Pengguna jalan tol hanya perlu melakukan satu kali transaksi pembayaran. Selaras hal tersebut, kenyamanan pengguna jalan tol akan semakin meningkat karena efisiensi waktu dan biaya operasi kendaraan lebih optimal.

BIDANG PENGEMBANGAN USAHA LAIN

Perusahaan menyadari pentingnya peran dari bidang pengembangan usaha lain sebagai pendukung bisnis utamanya di bidang usaha jalan tol. Oleh karena itu, perusahaan menyusun strategi dalam rangka melakukan sinergi antara bisnis jalan tol dan bisnis usaha lain. Strategi perusahaan di bidang pengembangan usaha lain dilakukan

dengan cara membagi peran diantara anak perusahaan usaha lain. Jasa Layanan Operasi (JLO) yang berubah nama menjadi Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) menjadi *asset operator*; Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP) yang berubah nama menjadi Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTR) menjadi *asset maintener*; Jasa Marga Properti (JMP) menjadi *asset optimizer* yang bergerak di bidang pengelolaan tempat istirahat dan pelayanan (TIP).

JMTO dan JMTR dibentuk dengan tujuan agar kompetensi inti di bidang operasional pengelolaan jalan tol dapat difokuskan dan terus dikembangkan, kelincuhan dalam bersaing dapat ditingkatkan, dan mencapai *economic of scale* sehingga dari aspek beban dapat ditekan. JLO dan JLP disiapkan untuk mampu menangkap peluang ke depan dengan semakin banyaknya ruas jalan tol yang pembangunannya telah diselesaikan. JMTO dan JMTR diharapkan dapat memberikan layanan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol tidak hanya di ruas jalan tol yang dimiliki oleh perusahaan saja tetapi juga ruas jalan tol yang dimiliki oleh investor lainnya. Sehingga, direncanakan anak perusahaan usaha lain ini kedepannya mampu berkontribusi besar dalam mengefisienkan beban operasional perusahaan dan meningkatkan kontribusi pendapatan usaha yang berasal dari usaha lain.

Selain itu, perusahaan melaksanakan pula pengembangan TIP dan mengembangkan properti melalui JMP. Pengembangan tersebut dilakukan dengan melakukan *land banking* dan akuisisi properti pada kawasan di sekitar koridor jalan tol. Nilai tambah yang dihasilkan meliputi apresiasi nilai tanah dan properti seiring dengan pengembangan jalan tol perusahaan.

BIDANG KEUANGAN

Pada bidang keuangan perseroan telah melakukan strategi pendanaan lain untuk mendukung percepatan pembangunan proyek jalan tol, dengan tiga program pendanaan strategis yaitu *asset recycling*, *debt recycling* dan *equity fund raising*.

Salah satu terobosan yang telah dilakukan oleh Perseroan pada bulan juli 2017 lalu adalah program *asset recycling* dengan melakukan penerbitan sekuritisasi yang berbasis hak atas sebagian pendapatan ruas Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi), yang merupakan salah satu ruas tol paling *mature* yang dimiliki oleh Jasa Marga. Produk ini mendapat respon yang sangat bagus dimana penjualannya *oversubscribed* hingga tiga kali.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, Jasa Marga tidak berhenti untuk melakukan inovasi alternatif pendanaan. Melalui program *debt recycling*, pada Oktober 2017, Perseroan berinovasi untuk mengeluarkan Obligasi di level Anak Perusahaan atau Project Bond, dimana untuk pertama kalinya dilakukan oleh anak usaha Jasa Marga, yaitu PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) untuk Ruas Tol JORR W2 Utara atau Kebon Jeruk-Ulujami sepanjang 7,7 km, yang telah beroperasi penuh sejak tahun 2014.

Pada pertengahan Desember tahun 2017, Perseroan telah berhasil melakukan pencatatan obligasi pertama berdenominasi rupiah yang dijual di pasar global oleh perusahaan Indonesia, di London Stock Exchange dan Singapur Stock Exchange. Pencatatan obligasi pertama yang kita dinamakan Komodo Bond dengan jangka waktu tiga tahun ini meraih Rp 4 triliun atau setara dengan USD 295,7 juta.

Ke depannya Perseroan akan tetap menjaga *covenant* keuangan yaitu Debt Equity ratio yang tidak lebih dari 5, dan Interest Current Ratio yang tidak dibawah 1,25.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

DASAR PENERAPAN SEGMENT USAHA JASA MARGA

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pendekatan segment usaha Jasa Marga dibagi berdasarkan sifat usaha Perseroan, dimana sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Segment Usaha Perseroan dibagi menjadi:

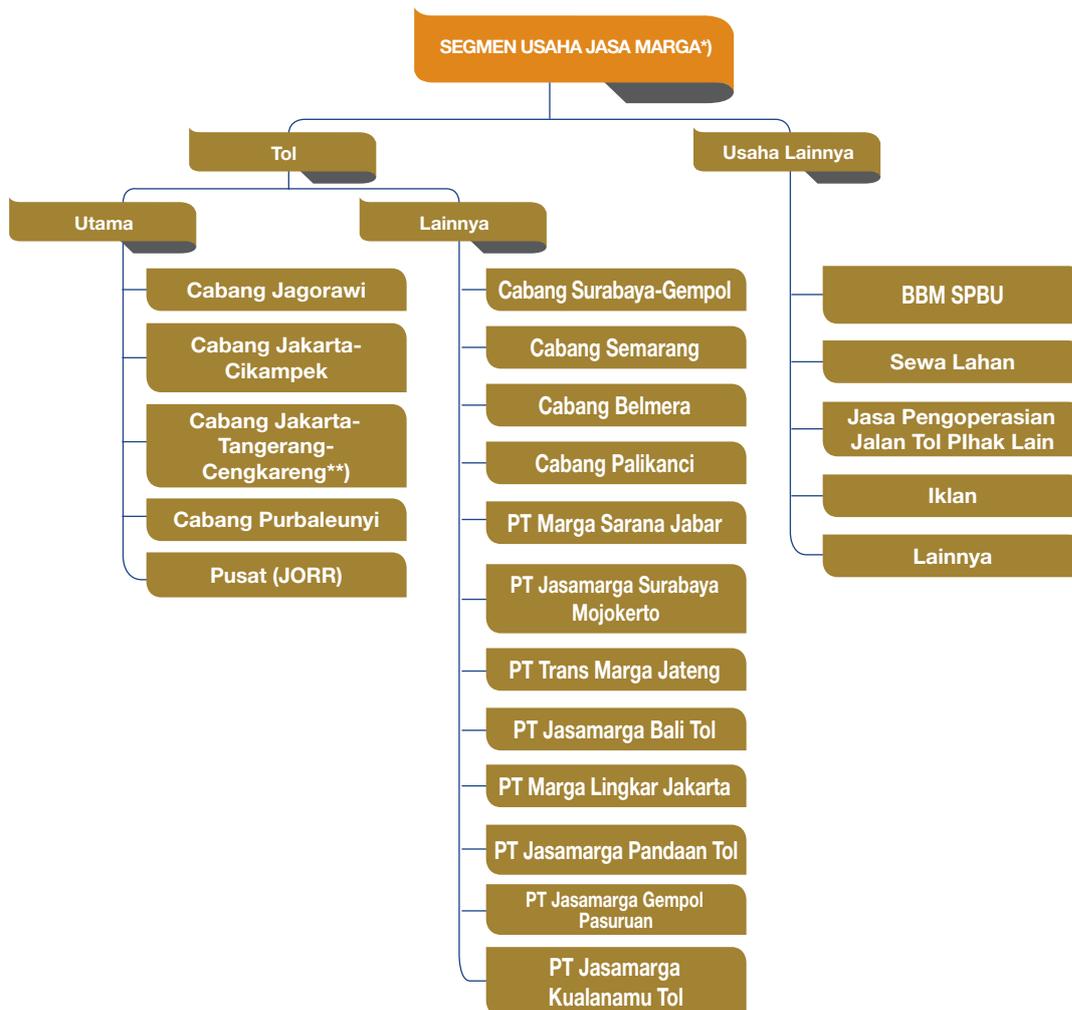
I. Segment Usaha Tol

Sesuai PSAK 5 (Revisi 2009) mengenai Segment Operasi, Segment Usaha Tol Perseroan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu segment usaha tol yang berkontribusi sekitar 93% dari total pendapatan usaha dan segment usaha lain yang berkontribusi 7% dari total pendapatan usaha. Kelompok pertama

merupakan 5 (lima) segment tol utama dengan hasil usaha terbesar atau segment-segmen dengan hasil usaha yang digabungkan sebesar 75% dari total hasil usaha, sedangkan kelompok kedua segment tol lainnya berkontribusi 17% dari total pendapatan usaha. Sedangkan kelompok kedua adalah Segment Usaha Lainnya yang bukan merupakan bagian dari segment pada kelompok pertama, atau yang memenuhi 7% dari total hasil usaha.

II. Segment Usaha Lainnya

Sebagai bagian dari optimalisasi aset Perseroan sebagaimana Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, Pengembangan Usaha Lain terbagi atas beberapa segment usaha.



*) Informasi detail terkait informasi segment usaha dapat dilihat pada catatan 47 Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

***) Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng telah diintegrasikan dengan cabang Jakarta-Tangerang menjadi Jakarta-Tangerang-Cengkareng

KINERJA SEGMENT PERSEROAN 2016 DAN 2017

Berikut adalah hasil kinerja segmen usaha Perseroan untuk tahun 2016 dan 2017

SEGMENT USAHA JALAN TOL

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 370/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol yang Sudah Beroperasi dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol, ditetapkan Golongan jenis kendaraan sebagai berikut:

Golongan	Jenis Kendaraan
I	Sedan, jip, <i>pick up</i> /truk, dan bus
II	Truk dengan 2 (dua) gandar
III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

Pada Tahun 2017, total Volume Lalu Lintas transaksi Perseroan mencapai 1,35 miliar kendaraan, dengan 88% merupakan kendaraan golongan I (sedan, pick up) dan 12% merupakan golongan kendaraan besar (truk dan bus). Kontribusi terbesar pencapaian volume lalu lintas Perseroan diperoleh dari pengoperasian Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, Sedyatmo dan Jakarta Tangerang, dimana kontribusinya mencapai 32,2% dari total transaksi secara keseluruhan atau sebesar 433,9 juta transaksi. Dengan pencapaian volume lalu lintas tersebut, Pendapatan Tol Perseroan mencapai Rp 8,3 triliun Rupiah. Kontribusi Pendapatan Tol terbesar berasal dari Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, Sedyatmo dan Jakarta Tangerang, dengan kontribusi Pendapatan Tol sebesar 26,9% atau Rp 2,2 triliun.

Meningkatnya Pendapatan Tol antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan volume lalu lintas jalan tol milik Perseroan. Ketentuan penyesuaian tarif telah ditetapkan dalam Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan Pasal 48 dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa operator jalan tol dapat menyesuaikan tarif setiap dua tahun sekali berdasarkan laju inflasi.

Sampai saat ini kenaikan tarif tol masih sesuai dengan jadwal yang diatur dalam UU tersebut di atas. Pemerintah telah menunjukkan konsistensinya dalam memelihara iklim investasi jalan tol yang kondusif. Penyesuaian tarif tol ini bertujuan untuk memberikan kepastian pengembalian atas investasi yang dilakukan oleh investor. Besarnya penyesuaian tarif tol pada tahun 2017 mengikuti besaran inflasi kumulatif daerah yaitu rata-rata sekitar 7%.

RUAS-RUAS JALAN TOL YANG MENGALAMI PENYESUAIAN TARIF TAHUN 2017

No.	Segmen	Ruas	Cabang/Anak Perusahaan	Tanggal Penyesuaian Tarif	
1	Cawang-Toman-Pluit dan Cawang-Tj. Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit	Jakarta-Tangerang-Cengkareng	Jakarta-Tangerang-Cengkareng	08/12/2017	Keputusan Menteri PUPR No. 973/KPTS/M/2017
2	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	08/12/2017	Keputusan Menteri PUPR No. 974/KPTS/M/2017
3	Belawan-Medan-Tanjung Morawa	Belawan-Medan-Tanjung Morawa	Belawan-Medan-Tanjung Morawa	08/12/2017	Keputusan Menteri PUPR No. 975/KPTS/M/2017
4	Palimanan-Kanci	Palimanan-Kanci	Palimanan-Kanci	08/12/2017	Keputusan Menteri PUPR No. 976/KPTS/M/2017
5.	Semarang (Seksi A,B,C)	Semarang	Semarang	08/12/2017	Keputusan Menteri PUPR No. 977/KPTS/M/2017
6.	Surabaya-Mojokerto	Surabaya-Mojokerto	PT Jasamarga Surabaya-Mojokerto	15/11/2017	Keputusan Menteri PUPR No. 916/KPTS/M/2017
7.	Gempol-Pandaan	Gempol-Pandaan	PT Jasamarga Pandaan Tol	31/10/2017	Keputusan Menteri PUPR No. 851/KPTS/M/2017
8.	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	Bali Mandara	PT Jasamarga Bali Tol	30/11/2017	Keputusan Menteri PUPR No. 971/KPTS/M/2017

PENCAPAIAN VOLUME LALU LINTAS TRANSAKSI 2016 DAN 2017

(juta transaksi kendaraan)

No.	Segmen	Ruas	Cabang/Anak Perusahaan	2016		2017		Δ	Δ%
				Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)		
1	Jagorawi*	Jagorawi	Jagorawi	207,7	15,4	189,5	14,0	(18,2)	(8,8)
2	Jakarta-Cikampek**	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	221,7	16,4	205,5	15,2	(16,3)	(7,3)
3	Cawang-Tomang-Cengkareng***	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	Cawang-Tomang-Cengkareng	79,6	5,9	84,2	6,2	4,6	5,7
		Dalam Kota Jakarta/JIRR		215,3	15,9	216,6	16,0	1,3	0,6
		Jakarta-Tangerang		130,9	9,7	133,1	9,9	2,2	1,7
4	Purbaleunyi	Padaleunyi	Purbaleunyi	61,0	4,5	62,2	4,6	1,2	2,0
		Cipularang		6,5	0,5	6,6	0,5	0,1	1,1
5	Pusat (PT JLJ)	Jakarta Outer Ring Road/JORR	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	95,8	7,41	98,3	7,3	2,5	2,6
		Ulujami-Pondok Aren	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	46,1	3,4	47,5	3,5	1,4	3,0

No.	Segmen	Ruas	Cabang/Anak Perusahaan	2016		2017		Δ	Δ%
				Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)		
6	Segmen Lainnya	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	97,7	7,2	101,0	7,5	3,3	3,4
		Semarang	Semarang	51,8	5,1	52,6	3,9	0,9	1,7
		Belmera	Belmera	25,8	2,5	27,9	2,1	2,1	8,3
		Palikanci****	Palikanci	19,0	1,9	14,6	1,1	(4,4)	(23,3)
		Bogor Outer Ring Road/BORR	PT Marga Sarana Jabar	16,5	1,6	15,8	1,2	(0,7)	(4,2)
		Surabaya-Mojokerto	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	15,4	1,5	17,1	1,3	1,8	11,6
		Semarang-Solo	PT Trans Marga Jateng	20,5	2,0	19,8	1,5	(0,7)	(3,6)
		Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	PT Jasamarga Bali Tol	17,5	1,7	18,2	1,3	0,7	4,2
		Kebon Jeruk-Ciledug (JORR W2 Utara)	PT Marga Lingkar Jakarta Utara)	26,9	2,7	30,5	2,3	3,6	13,3
		Gempol-Pandaan	PT Jasa Marga Pandaan Tol	5,8	0,6	7,2	0,5	1,4	23,4
		Gempol-Pasuruan	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	-	-	0,7	0,1	0,7	N/A
		Medan-Kualanamu	PT Jasamarga Medan Kualanamu			0,8	0,1	0,8	N/A
TOTAL				1.361,3	100,9	1.349,7	99,9	(11,7)	(0,9)

Catatan: *)

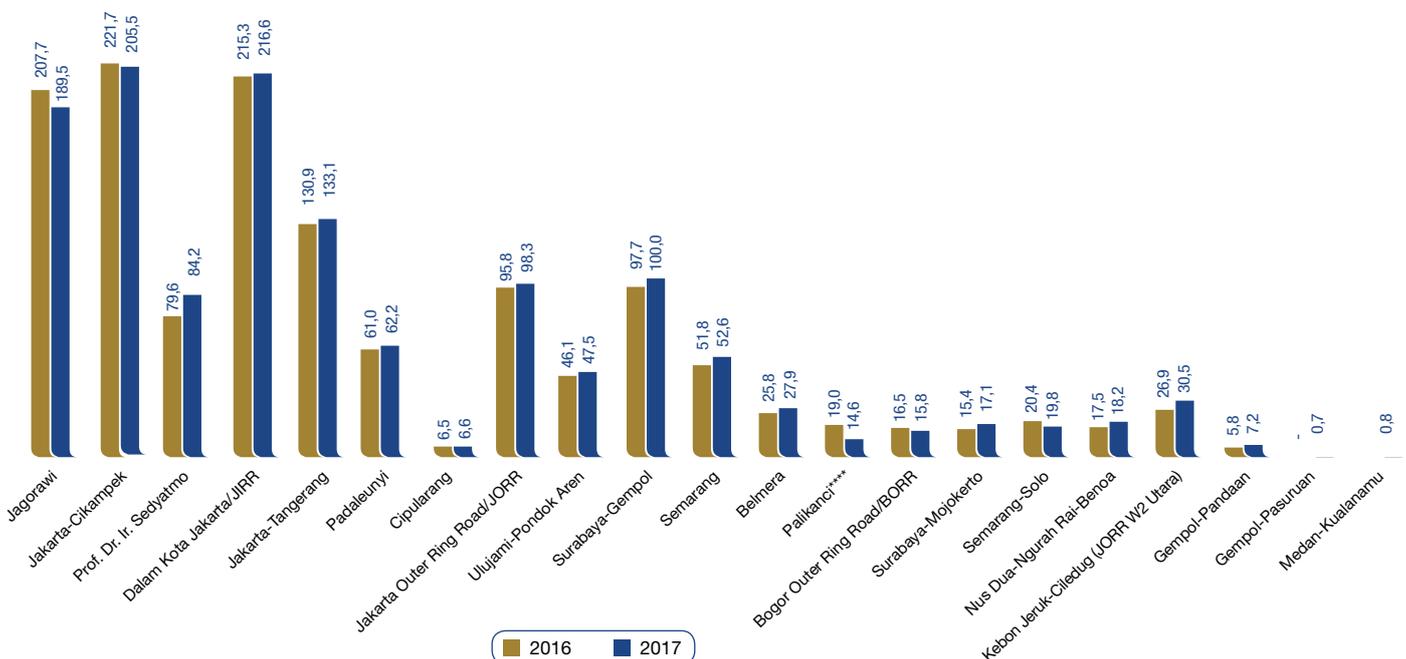
* Terdapat perubahan system pencatatan volume lalu lintas transaksi menjadi sepenuhnya sistem transaksi terbuka

** Terdapat perubahan pada sistem transaksi dan impact dari peniadaan gerbang tol cikopo dikarenakan integrasi cluster 1 (Cikampek, Padaleunyi, Cipularang, Cikopo-Palimanan) yang telah berlaku sejak juni 2016.

*** Terdapat integrasi ruas cawang Tomang Cengkareng dengan Jakarta-Tangerang

**** Terdapat perubahan pencatatan transaksi menjadi sistem transaksi tertutup serta peniadaan gerbang tol Plumbon 3, Plumbon 4 dan Ciperna Utama dikarenakan integrasi Cluster II (Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, dan brebes timur)

PENCAPAIAN VOLUME LALU LINTAS TRANSAKSI 2017 (juta transaksi kendaraan)

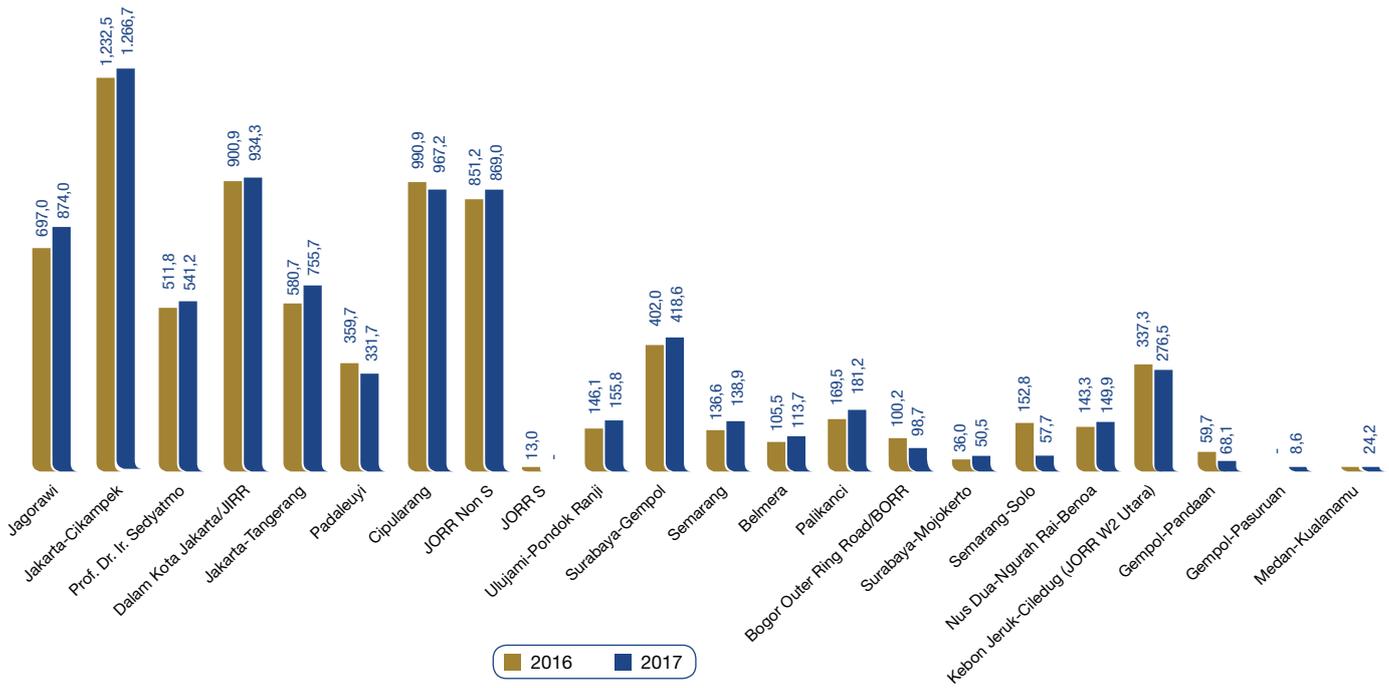


PENCAPAIAN PENDAPATAN TOL 2016 DAN 2017

(miliar Rupiah)

No.	Segmen	Ruas	Cabang/Anak Perusahaan	2016		2017		Δ (Rp)	Δ%
				Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)		
1	Jagorawi	Jagorawi	Jagorawi	697,0	8,8	874,0	10,06	177,0	25,4
2	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	1.232,5	15,5	1.265,7	15,3	33,2	2,7
3	Cawang-Tomang-Cengkareng	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	Jakarta-Tangerang-Cengkareng	511,8	6,5	541,2	6,5	29,3	5,7
		Dalam Kota Jakarta/JIRR		900,9	11,4	934,0	11,3	33,2	3,7
4	Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang		580,7	7,3	755,7	9,1	175,0	30,1
5	Purbaleunyi	Padaleunyi	Purbaleunyi	359,7	4,5	331,7	4,0	(28,0)	(7,8)
		Cipularang		990,9	12,5	967,3	11,7	(23,6)	(2,4)
6	Pusat (PT JLJ)	JORR Non S	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	851,2	10,7	869,0	10,5	17,8	2,1
		JORR (S)		13,0	0,2	-	-	(13,0)	(100,0)
		Ulujami-Pondok Ranji		146,1	1,8	155,8	1,9	(9,8)	6,7
7	Segmen Lainnya	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	402,0	5,1	418,6	5,1	16,5	4,1
		Semarang	Semarang	136,6	1,7	138,9	1,7	2,4	1,7
		Belmera	Belmera	105,5	1,3	113,7	1,4	8,2	7,8
		Palikanci	Palikanci	169,5	2,1	181,2	2,2	11,7	6,9
		Bogor Outer Ring Road/BORR	PT Marga Sarana Jabar	100,2	1,3	98,7	1,2	(1,5)	(1,5)
		Surabaya-Mojokerto	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	36,0	0,5	50,5	0,6	14,5	40,4
		Semarang-Solo	PT Trans Marga Jateng	152,8	1,9	57,7	0,7	(95,1)	(62,2)
		Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	PT Jasamarga Bali Tol	143,3	1,8	149,9	1,8	6,6	4,6
		Kebon Jeruk-Ciledug (JORR W2 Utara)	PT Marga Lingkar Jakarta	337,3	4,3	276,5	3,3	(60,8)	(18,0)
		Gempol-Pandaan	PT Jasamarga Pandaan Tol	59,7	0,8	68,1	0,8	8,4	14,0
		Gempol-Pasuruan	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	-	-	8,6	0,1	8,6	N/A
	Medan-Kualanamu	PT Jasamarga Kualanamu Tol	-	-	24,2	0,3	24,2	N/A	
TOTAL				7.926,7	100,0	8.281,3	99,7	321,7	4,5

PENCAPAIAN PENDAPATAN TOL 2017
(miliar Rupiah)



KINERJA TOL SEGMENT UTAMA

1. Cabang Jagorawi



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi Cabang Jagorawi tercatat sebesar 189,5 juta kendaraan, turun sebesar 8,8% dibandingkan dengan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 207,7 juta kendaraan. Tahun 2017, kontribusi Cabang Jagorawi terhadap total volume lalu lintas transaksi Perseroan mencapai 14,0%. Sementara itu, pendapatan tol mencapai Rp 874,0 miliar, naik sebesar 25,4% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 697 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol mencapai 10,6% terhadap total pendapatan tol Perseroan.

Profitabilitas

Tahun 2017, Laba Usaha Cabang Jagorawi mencapai sebesar Rp 508,9 miliar atau meningkat sebesar 35,8% dari tahun lalu Rp 374,8 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2017

Peningkatan volume lalu lintas transaksi disebabkan oleh perkembangan daerah pemukiman di sekitar Cibubur, Sentul dan Bogor yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi pada Kota Bogor. Selain itu, peningkatan volume lalu lintas transaksi juga dipengaruhi oleh beroperasinya Jalan Tol Bogor Outer Ring Road sejak tahun 2009 dan Jalan Tol Cinere-Jagorawi sejak tahun 2012.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor : JL.03.04-P/64 tanggal 21 Maret 2017 perihal Perubahan Sistem Transaksi Pembayaran Tol pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, maka telah dilakukan perubahan sistem transaksi dari yang sebelumnya tertutup dan terbuka menjadi terbuka seluruhnya pada tanggal 8 September 2017 pukul 00.00 WIB serta adanya peniadaan transaksi juga dilakukan di Gerbang Tol Cimanggis Utama dan Gerbang Tol Cibubur Utama. Hal ini menyebabkan perubahan pencatatan Volume Lalu Lintas

Transaksi yang berdampak pada penurunan Volume Lalu Lintas Transaksi Ruas Jakarta-Bogor-Ciawi pada tahun 2017 terhadap Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2016. Dengan diberlakukannya perubahan sistem transaksi pada Ruas SS Cimanggis s.d Bogor/Ciawi, maka mengakibatkan adanya penyesuaian tarif tol pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Golongan 1=Rp.6500, Golongan 2=Rp.9500, Golongan 3=Rp.13.000, Golongan 4=Rp.16.000, Golongan 5=Rp.19.500). Sehingga terjadi peningkatan pendapatan tol total sebesar 850 juta per hari atau 40% terhadap kondisi sebelum perubahan sistem transaksi.

Pada tahun 2017, Perseroan melakukan sekuritisasi aset dengan menerbitkan Kredit Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Pendapatan tol Jagorawi sebesar Rp 2 triliun. Adapun perlakuan terhadap sekuritisasi aset tersebut adalah pokok dan bunga KIK-EBA mengurangi pendapatan tol jagorawi. Adapun skema pengurangan pendapatan tol adalah bersifat tetap (fixed) yang dikurangkan setiap bulannya dan dibayarkan setiap triwulan.

Prospek Usaha

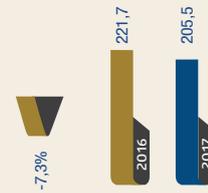
Ke depan, pertumbuhan volume lalu lintas transaksi di Jalan Tol Jagorawi akan ditopang oleh adanya pengembangan wilayah di sekitar Jalan Tol Jagorawi khususnya di daerah Cibubur, Ciawi dan Bogor, serta pengoperasian Jalan Tol JORR 2.

Selain itu, rencana penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor Outer Ring Road seksi 2B, seksi 3A dan seksi 3B yang nantinya akan tersambung dengan ruas tol Jagorawi akan menimbulkan bangkitan Lalu Lintas Baru dari dan ke arah Ruas Bogor Outer Ring Road.

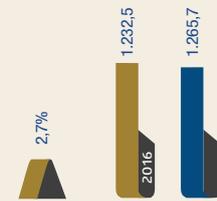
2. Cabang Jakarta-Cikampek



Volume Transaksi (juta transaksi)

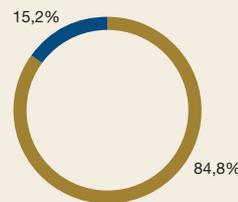


Pendapatan Tol (Rp miliar)

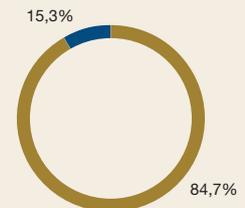


Ruas	: Jakarta-Cikampek
Panjang jalan	: 83 km
Konsesi s.d tahun	: 2044
Tahun beroperasi	: 1988
Jumlah Pegawai	: 629 orang
Jumlah gardu	: 177
V/C Rasio rata-rata	: 0,32-1,35
Sistem pengoperasian	: Terbuka & Tertutup
Lokasi jalan tol	: Jakarta, Bekasi, Karawang, Cikampek

Proporsi Volume Transaksi



Proporsi Pendapatan Tol



Kinerja Tahun 2017

Pada triwulan tahun 2017, volume lalu lintas transaksi Cabang Jakarta-Cikampek tercatat sebesar 205,5 juta transaksi, turun sebesar 7,3% dibandingkan dengan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 221,75 juta kendaraan. Tahun 2016, kontribusi Cabang Jakarta-Cikampek terhadap total volume lalu lintas transaksi mencapai 15,2%, yang merupakan kontribusi terbesar terhadap volume lalu lintas transaksi Jalan Tol Jasa Marga. Sementara itu, pendapatan tol mencapai Rp 1,27 triliun, naik sebesar 2,7% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 1,23 triliun. Kontribusi pendapatan tol mencapai 15,3% terhadap total pendapatan tol Perseroan.

Profitabilitas

Tahun 2017, Laba Usaha Jakarta-Cikampek mencapai sebesar Rp 794,9 miliar atau meningkat sebesar 20,8% dari tahun 2016 sebesar Rp 658,3 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2017

Adanya integrasi cluster 1 (Cikampek, Padaleunyi, Cipularang, Cikopo-Palimanan) dan Kepadatan di Ruas Cikunir-Ramp Cikarang Barat dikarenakan pekerjaan pembangunan moda transportasi lain di sekitar jalan tol dan pekerjaan proyek konstruksi Jasamarga Jalan Layang Cikampek sejak 27 Februari 2017 menyebabkan adanya penurunan Volume Lalu Lintas Transaksi Ruas Jakarta-Cikampek pada tahun 2017.

Prospek Usaha

Ke depan pertumbuhan Jalan Tol Jakarta-Cikampek akan ditopang oleh pengembangan wilayah di sekitar koridor Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan peningkatan sistem jaringan Jalan Tol Trans Jawa, pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Selatan dan JORR 2.

3. Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng



Kinerja Tahun 2017

Pada Tahun 2017 dilakukan integrasi antara Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Jalan Tol Cawang-Tomang-Cengkareng guna meningkatkan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan. Jalan tol tersebut sebelumnya dioperasikan oleh Perseroan melalui dua cabang yaitu cabang Jakarta-Tangerang dan cabang Cawang-Tomang-Cengkareng.

Saat ini kedua cabang tersebut telah terintegrasi menjadi cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng dan mengelola tiga ruas jalan tol yaitu jalan tol Dalam kota, Jalan tol Ir. Prof. Soedyatmo dan jalan tol Jakarta-Tangerang.

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi jalan tol dalam kota tercatat sebesar 216,6 juta transaksi, naik sebesar 0,6% dibandingkan dengan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 215,3 juta kendaraan. Volume lalu lintas transaksi jalan tol Ir. Prof. Soedyatmo tercatat sebesar 84,2 juta transaksi, naik sebesar 5,7% dibandingkan dengan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 79,6 juta kendaraan. Selain itu, volume lalu lintas transaksi jalan tol Jakarta Tangerang tercatat sebesar 133,1 juta transaksi, naik sebesar 1,7% dibandingkan dengan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 130,9 juta kendaraan. Sehingga total volume lalu lintas transaksi Jakarta-Tangerang-Cengkareng tercatat sebesar 433,9 juta transaksi atau naik sebesar 1,9% dari tahun 2016 sebesar 425,8 juta transaksi dan memberikan kontribusi sebesar 32,2% dari total volume lalu lintas transaksi Perseroan. Sementara itu, Pendapatan Tol Jakarta-Tangerang-Cengkareng mencapai Rp 2.230,9 miliar, naik sebesar 11,9% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 1.993,4 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol mencapai 26,9% terhadap Total Pendapatan Tol. Pendapatan tol dalam kota tercatat sebesar Rp 934,0 miliar atau naik 3,7% dari tahun 2016 sebesar Rp 900,9 miliar, sedangkan pendapatan tol ruas Ir. Prof. Soedyatmo tercatat sebesar Rp. 541,2 miliar atau naik 5,7% dari tahun 2016 sebesar Rp 511,8 miliar. Pendapatan tol ruas Jakarta Tangerang tercatat sebesar Rp 755,7 miliar atau naik 30,1% dari tahun 2016 sebesar 580,7 miliar.

Profitabilitas

Tahun 2017, Laba Usaha Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng mencapai sebesar Rp 1,5 triliun atau naik sebesar 15,3% dari tahun lalu sebesar Rp 1,3 triliun.

Analisa Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor JL.03.04-P/121 tanggal 30 Juni 2016 perihal Integrasi Sistem Transaksi Pembayaran Tol pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak, maka telah dilakukan Integrasi Sistem Transaksi pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang (PT Jasa Marga (Persero) Tbk) dan Ruas Jalan Tol Tangerang-Merak (PT Marga Mandala Sakti) pada tanggal 9 April 2017.

Dengan diberlakukannya integrasi pada Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak Segmen Simpang Susun Tomang-Tangerang Barat-Cikupa, maka diperlukan perubahan mekanisme transaksi tol yang mengakibatkan penyesuaian tarif tol untuk segmen tersebut di atas (Golongan 1=Rp.7.000, Golongan 2=Rp 9.500, Golongan 3=Rp 12.000, Golongan 4=Rp 16.000, Golongan 5=Rp 20.000).

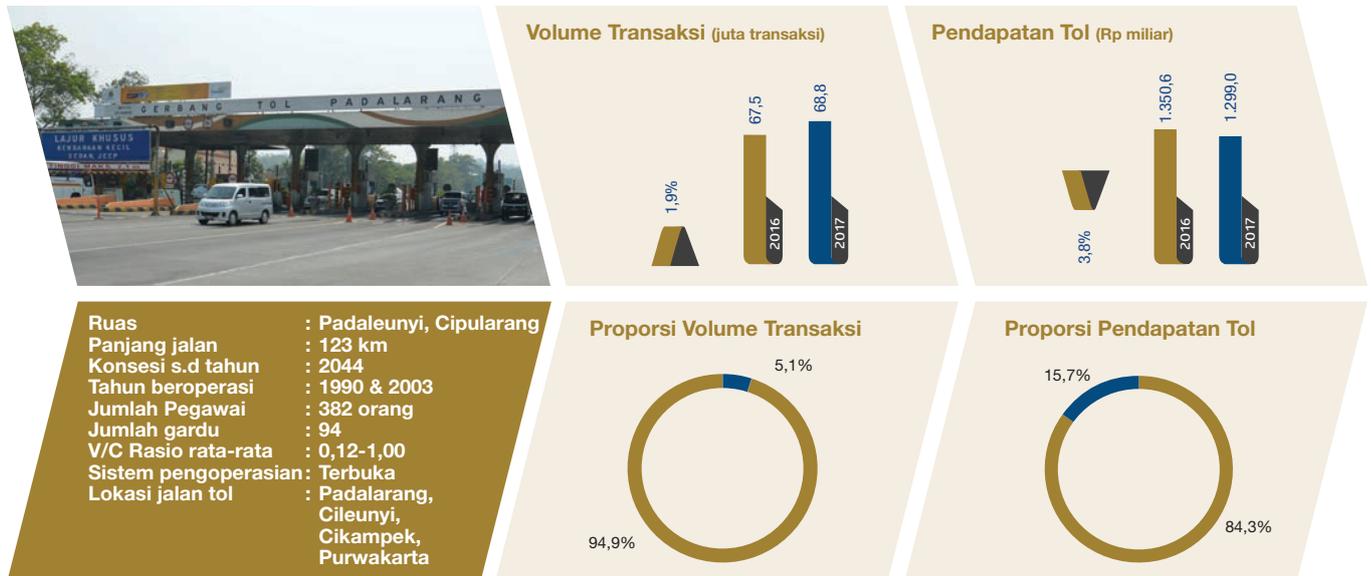
Prospek Usaha

Ke depan pertumbuhan volume lalu lintas jalan tol ini akan ditopang oleh semakin meningkatnya aktivitas ekonomi pada wilayah sekitar jalan tol dengan berkembangnya pusat-pusat perkantoran, perniagaan dan perumahan. Selain itu, integrasi yang dilakukan perseroan dan hilangnya gerbang tol karang tengah memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan pendapatan tol. Hal ini merupakan cerminan dari transaksi pengguna jalan yang lebih efisien.

Selain itu, pengoperasian secara penuh jalan tol JORR 2 Sisi Barat (Ruas Cengkareng-Cinere) pada tahun 2019 yang konsesinya dimiliki oleh Perseroan akan turut meningkatkan volume lalu lintas di ruas ini.

Pada Tahun 2019, Ruas Jakarta-Tangerang rencananya akan tersambung dengan Ruas Jakarta-Kunciran-Cengkareng dan Ruas Kunciran-Serpong, yang akan menimbulkan bangkitan Volume Lalu Lintas Baru dari dan ke arah Cengkareng dan Serpong.

4. Cabang Purbaleunyi



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi Cabang Purbaleunyi tercatat sebesar 68,8 juta transaksi, naik sebesar 1,9% dibandingkan dengan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 67,5 juta transaksi. Tahun 2017, kontribusi Cabang Purbaleunyi terhadap total volume lalu lintas transaksi mencapai 5,1%. Sementara itu, pendapatan tol mencapai Rp 1,29 triliun turun sebesar 3,8% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 1,35 triliun. Kontribusi Pendapatan Tol dari Cabang Purbaleunyi mencapai 15,7% terhadap total pendapatan tol Perseroan.

Profitabilitas

Tahun 2017, laba usaha cabang Purbaleunyi mencapai sebesar Rp 858,2 miliar atau turun sebesar -12,8% dari tahun lalu sebesar Rp 984,4 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE 41 Tahun 2016 mengenai Pengaturan Kendaraan yang Melintasi Jembatan Cisomang di Ruas Jalan Tol Purbaleunyi dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 894 Tahun 2016 mengenai Pengaturan Operasional Kendaraan Bermotor di Jalan Tol Purbaleunyi serta Pengaturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Libur Tahun Baru 2017, maka telah dilakukan pengalihan kendaraan non golongan 1 dan bus yang akan melewati Jembatan Cisomang.

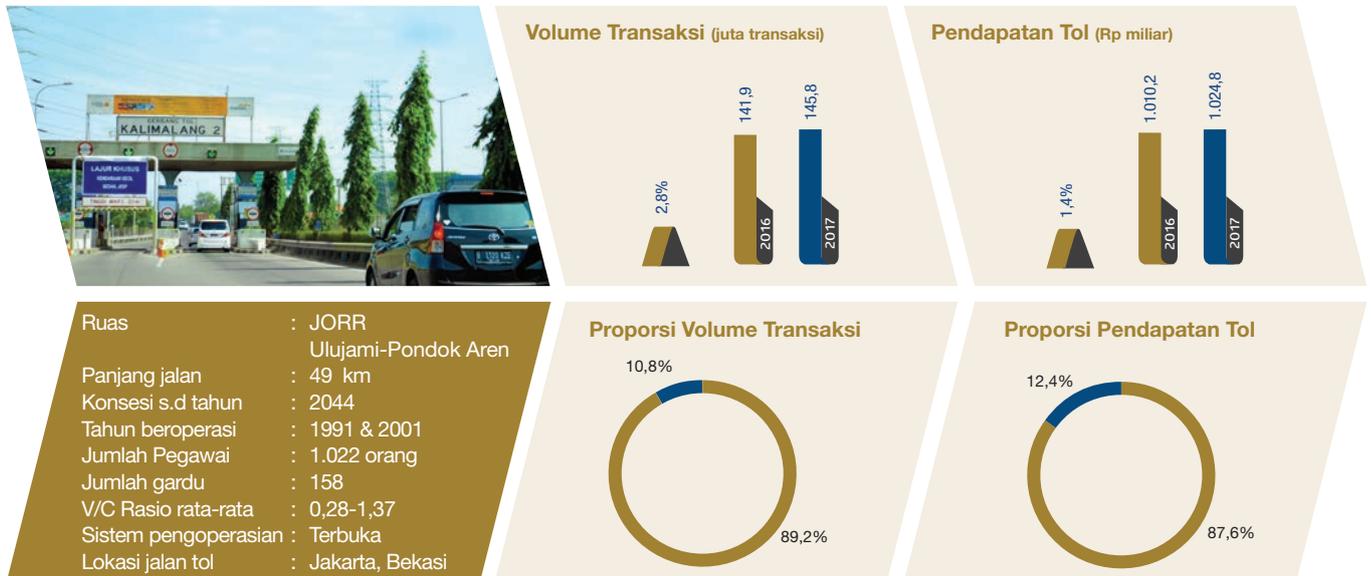
Sejak tanggal 23 Desember 2016, diberlakukan mekanisme pengalihan kendaraan non golongan 1 dan bus dari Jakarta akan dikeluarkan di GT Sadang atau GT Jatiluhur atau menuju Ruas Cikopo Palimanan dan dapat masuk kembali di GT Padalarang, sedangkan kendaraan non golongan 1 dan bus dari Bandung akan dikeluarkan di GT Padalarang dan GT Cikamuning dan dapat masuk kembali di GT Sadang dan GT Jatiluhur. Pada tanggal 23 Maret 2017, kendaraan Bus diizinkan melintas di Jembatan Cisomang dari dan menuju Bandung. Sejak tanggal 1 April 2017 semua golongan kendaraan sudah diperbolehkan melintas.

Hal ini mempengaruhi pencapaian Pendapatan tol Cabang Purbaleunyi turun 3,8% dari tahun lalu serta pencapaian volume lalu lintas.

Prospek Usaha

Sejak tahun 2011 hingga 2017 Ruas Purbaleunyi terus mengalami pertumbuhan lalu lintas. Pertumbuhan lalu lintas di masa depan akan ditopang antara lain oleh pengembangan wilayah di sekitar Cikampek, Purwakarta dan Bandung, serta peningkatan sistem jaringan jalan dengan dibangunnya Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated dan Selatan serta penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.

5. Pusat - Jakarta Outer Ring Road (JORR)



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi pusat (Ruas JORR) tercatat sebesar 145,8 juta transaksi, naik sebesar 2,8% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2016 sebesar 141,9 juta transaksi. Tahun 2017, kontribusi Pusat (JORR) terhadap total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 10,8%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 1,02 triliun, naik sebesar 1,4% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 1,01 triliun. Kontribusi pendapatan tol dari Pusat (JORR) mencapai 12,4% terhadap total pendapatan tol Perseroan.

Profitabilitas

Tahun 2017, Laba Usaha Jakarta Outer Ring Road (JORR) mencapai sebesar Rp 12,1 miliar atau turun dari tahun 2016 dengan rugi sebesar 27,3 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2017

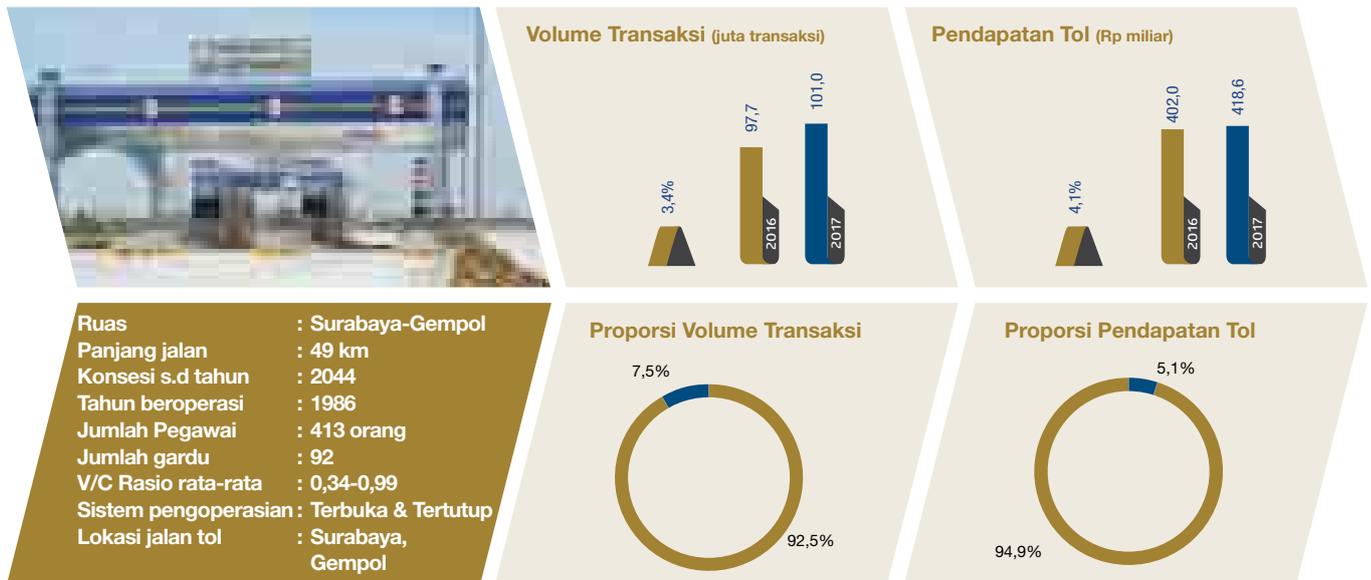
Pendapatan Tol naik sebesar 1,44% dari tahun lalu disebabkan oleh Pertumbuhan volume lalu lintas transaksi yang naik 2,8% dari tahun lalu. Perlu diinformasikan bahwa sejak Maret 2016 Perseroan tidak lagi mengoperasikan ruas JORR S.

Prospek Usaha

Beroperasinya Jalan Tol Ulujami – Kebun Jeruk (JORR W2 Utara) menyebabkan perpindahan pergerakan lalu lintas. Kendaraan besar dari Pulau Jawa yang biasanya menuju Pelabuhan Merak dengan melewati Jalan Tol Dalam Kota, beralih menggunakan Jalan Tol JORR. Ke depan, Jalan Tol JORR diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan volume lalu lintas karena menghubungkan beberapa wilayah seperti Bandara Soekarno - Hatta dan Pelabuhan Merak.

KINERJA TOL SEGMENT LAINNYA

1. Cabang Surabaya-Gempol



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi Cabang Surabaya-Gempol tercatat sebesar 101,0 juta transaksi, naik sebesar 3,4% dibandingkan dengan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 97,7 juta transaksi. Tahun 2017, kontribusi Cabang Surabaya-Gempol terhadap total volume lalu lintas transaksi Perseroan mencapai 7,5%. Sementara itu, pendapatan tol mencapai Rp 418,6 miliar, naik sebesar 4,1% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 402,05 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Cabang Surabaya-Gempol mencapai 5,1% terhadap total pendapatan tol.

Profitabilitas

Tahun 2017, laba usaha Cabang Surabaya-Gempol mencapai sebesar Rp 163,07 miliar atau meningkat sebesar 43,5% dari tahun lalu sebesar Rp 113,67 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2016

Pendapatan Tol Cabang Surabaya-Gempol tumbuh 4,1% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas transaksi yang naik sebesar 3,4%. Salah satunya dikarenakan pada tanggal 2 Agustus 2017, ruas gempol bangil mulai beroperasi, sehingga ruas bangil rebranding terintegrasi dengan ruas gempol pandaan dan ruas porong gempol.

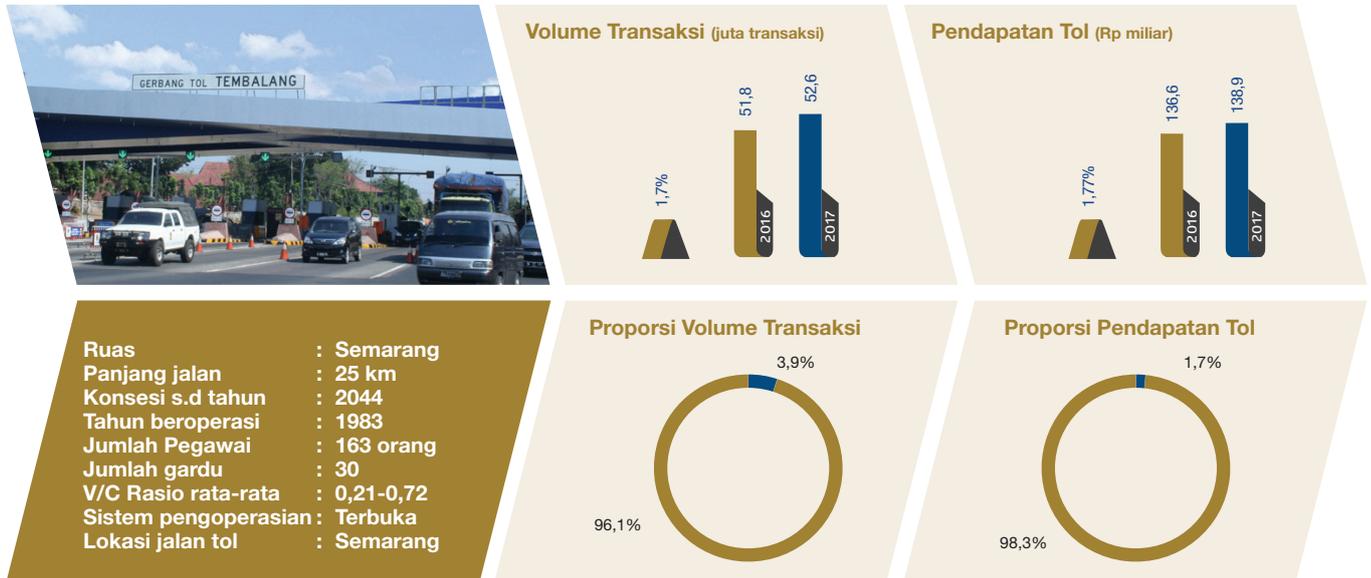
Pertumbuhan volume lalu lintas dan pendapatan tol, terpengaruh juga oleh telah selesainya pelebaran jalan Tol Ruas Sidoarjo - Waru (km 28 s.d km 17) sehingga berpengaruh meningkatnya volume lalu lintas yang berdampak pada kenyamanan pengendara. Sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan kendaraan. Dilanjutkan pembangunan pelebaran sisi sebaliknya Ruas Waru - Sidoarjo (tertutup) sehingga dua jalan sama-sama tiga lajur.

Prospek Usaha

Pertumbuhan lalu lintas akan ditopang oleh penambahan sistem jaringan jalan tol Trans Jawa, Gempol - Pasuruan dan Pandaan-Malang.

Rencana Integrasi Ruas Surabaya-Gempol dengan Ruas Waru-Juanda akan menimbulkan bangkitan Volume Lalu Lintas baru dari dan ke arah Juanda, sehingga berpotensi meningkatkan Volume Lalu Lintas Ruas Surabaya-Gempol.

2. Cabang Semarang



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi Cabang Semarang tercatat sebesar 52,6 juta transaksi, naik sebesar 1,7% dibandingkan dengan Volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 51,8 juta transaksi. Tahun 2017, kontribusi Cabang Semarang terhadap total volume lalu lintas transaksi Perseroan mencapai 3,9%. Sementara itu, pendapatan tol mencapai Rp 138,9 miliar, naik sebesar 1,7% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 136,6 miliar.

Profitabilitas

Tahun 2017, laba usaha Cabang Semarang mencapai sebesar Rp 33,33 miliar atau turun sebesar 12,5% dari tahun lalu sebesar Rp 38,04.

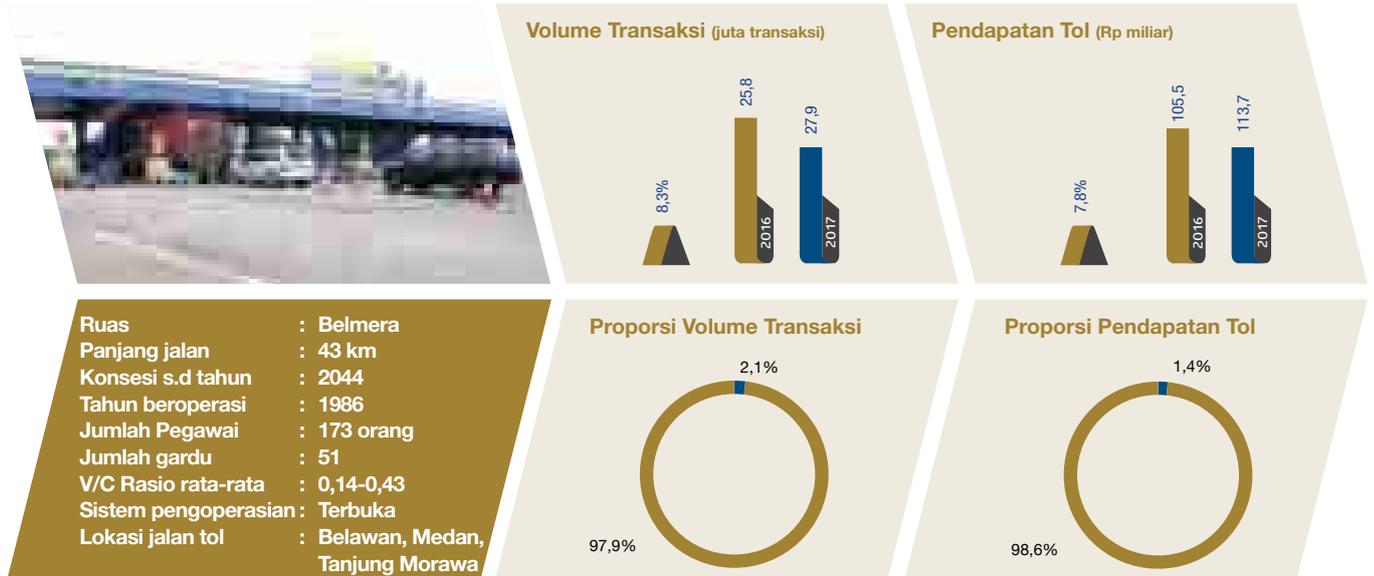
Analisa Kinerja Tahun 2017

Pendapatan Tol Cabang Semarang naik 1,7% dari tahun lalu disebabkan oleh naiknya volume lalu lintas transaksi 1,7%. Peningkatan volume lalu lintas transaksi disebabkan oleh mulai terintegrasinya jalan tol dari Jakarta sampai dengan Brebes sejak Juni 2016.

Prospek Usaha

Pengoperasian Jalan Tol Semarang - Solo Ruas Bawen-Salatiga sejak 25 September 2017 memberi dampak pertumbuhan lalu lintas pada Jalan Tol Semarang. Pertumbuhan volume lalu lintas di wilayah Manyaran, Gayamsari dan Muktiharjo menunjukkan kecenderungan yang positif. Kedepannya diprediksi pertumbuhan volume lalu lintas di Jalan Tol Semarang akan terus tumbuh seiring dengan rencana beroperasinya Trans Jawa pada tahun 2019.

3. Cabang Belmera



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi Cabang Belmera tercatat sebesar 27,9 juta transaksi, naik sebesar 8,3% dibandingkan dengan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 25,75 juta transaksi. Tahun 2017, kontribusi Cabang Belmera terhadap total volume lalu lintas transaksi mencapai 2,1%. Sementara itu, pendapatan tol mencapai Rp 113,7 miliar, naik sebesar 7,8% dibandingkan tahun sebesar Rp 105,5 miliar. Kontribusi pendapatan tol dari Cabang Belmera mencapai 1,4% terhadap total pendapatan tol Perseroan.

Profitabilitas

Tahun 2017, rugi usaha Cabang Belmera mencapai sebesar Rp 1,87 miliar atau turun sebesar Rp 87,5% dari tahun lalu sebesar Rp 14,94 miliar.

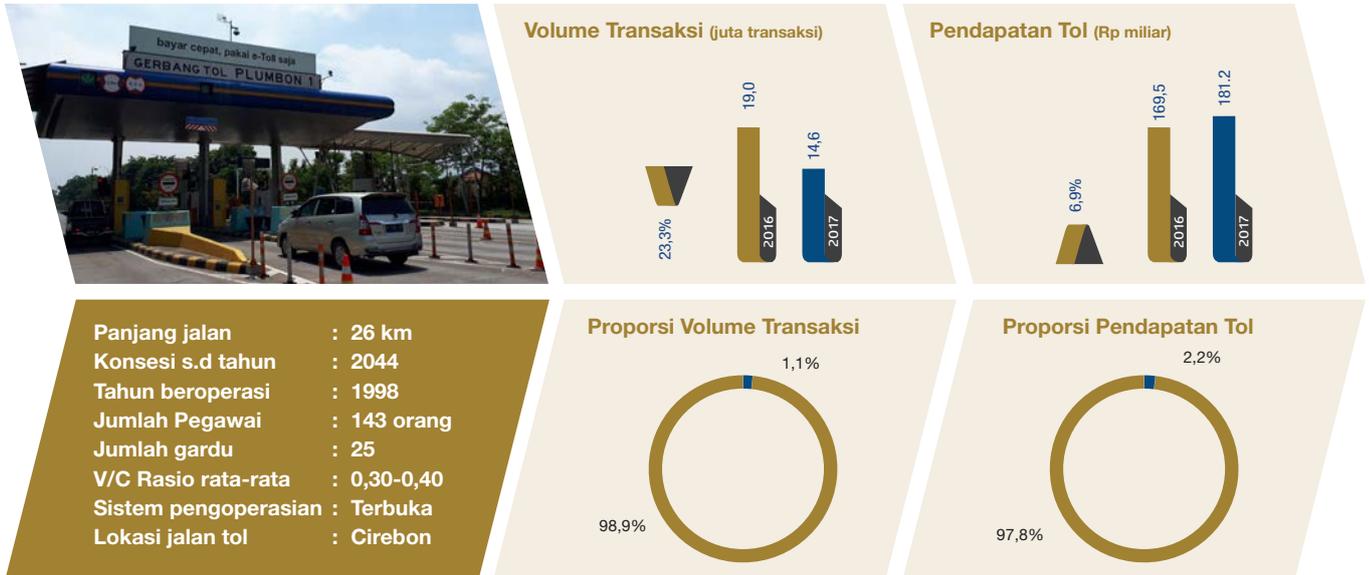
Analisa Kinerja Tahun 2017

Pendapatan Tol Cabang Belmera tumbuh 7,8% dari tahun lalu disebabkan oleh kenaikan volume lalu lintas transaksi 8,3%. Jalan Tol Belmera merupakan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Barang Belawan menuju Medan dan Tanjung Morawa dimana kendaraan yang melewati ruas jalan tol ini sebagian besar adalah angkutan barang besar.

Prospek Usaha

Ke depan, pertumbuhan volume lalu lintas Jalan Tol Belmera akan mengalami pertumbuhan seiring dengan adanya pengembangan Kawasan Industri Medan (KIM) dan terkoneksi jalan tol ini dengan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi yang akan beroperasi pada tahun 2018.

4. Cabang Palikanci



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi Cabang Palikanci tercatat sebesar 14,6 juta transaksi, turun sebesar 23,3% dibandingkan dengan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 19,0 juta transaksi. Tahun 2017, kontribusi Cabang Palikanci terhadap total volume lalu lintas transaksi mencapai 1,1%. Sementara itu, pendapatan tol mencapai Rp 181,2 miliar, naik sebesar 6,9% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 169,5 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Cabang Palikanci mencapai 2,2% terhadap total pendapatan tol Perseroan.

Profitabilitas

Tahun 2017, Laba Usaha Cabang Palikanci mencapai sebesar Rp 61,93 miliar atau naik sebesar 5,9% dari tahun lalu sebesar Rp 58,46 miliar.

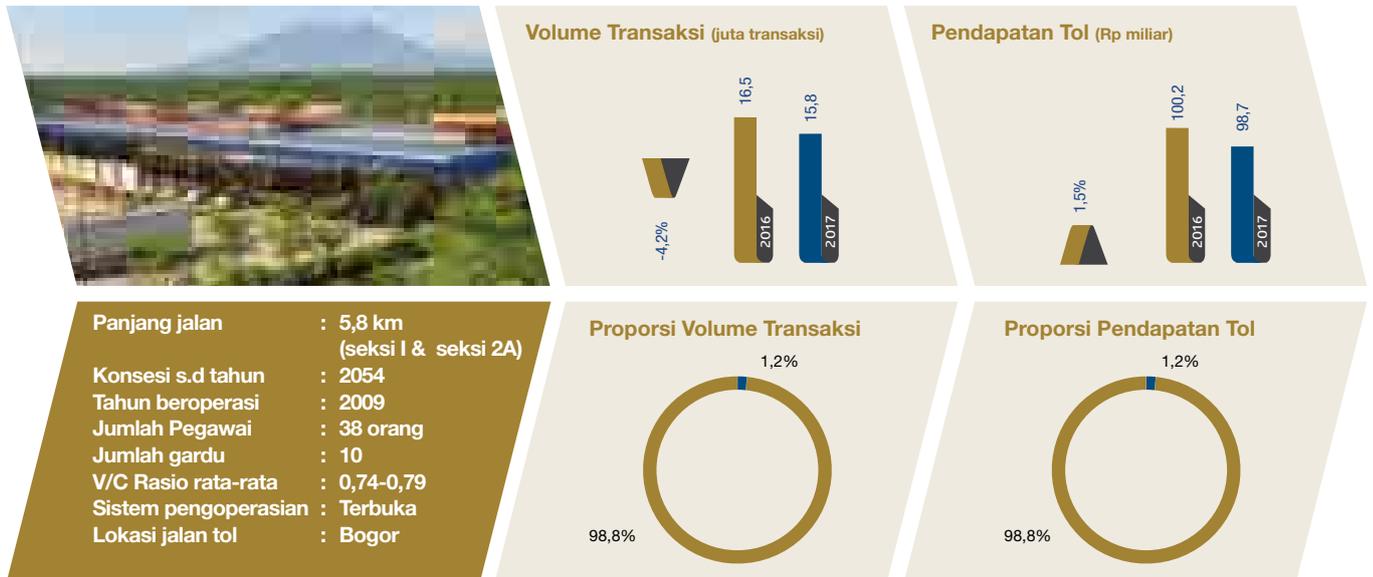
Analisa Kinerja Tahun 2017

Pendapatan Tol Cabang Palikanci tumbuh 6,9% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan wilayah sekitar. Sedangkan penurunan volume lalu lintas transaksi hingga 23,3% dipengaruhi perubahan pencatatan transaksi dikarenakan peniadaan gerbang tol Plumbon 3, Plumbon 4 dan Ciperna Utama dikarenakan integrasi Cluster II (Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, dan brebes timur).

Prospek Usaha

Jalan Tol Palimanan-Kanci merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Kedepan, jalan tol ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan volume lalu lintas yang tinggi, dikarenakan akan segera terkoneksi dengan ruas Trans Jawa Jakarta- Semarang yang rencananya akan dioperasikan pada tahun 2018.

5. PT Marga Sarana Jabar



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi ruas Bogor Outer Ring Road (BORR) tercatat sebesar 15,8 juta transaksi, turun sebesar 4,2% dibandingkan dengan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 16,5 juta transaksi. Tahun 2017, kontribusi BORR terhadap total volume lalu lintas transaksi mencapai 1,2%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 98,7 miliar, turun sebesar 1,5% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 100,2 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari BORR mencapai 1,2% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

Tahun 2017, Laba Usaha PT Marga Sarana Jabar mencapai sebesar Rp 68,6 miliar atau naik sebesar 14,1% dari tahun lalu sebesar Rp 60,11 miliar.

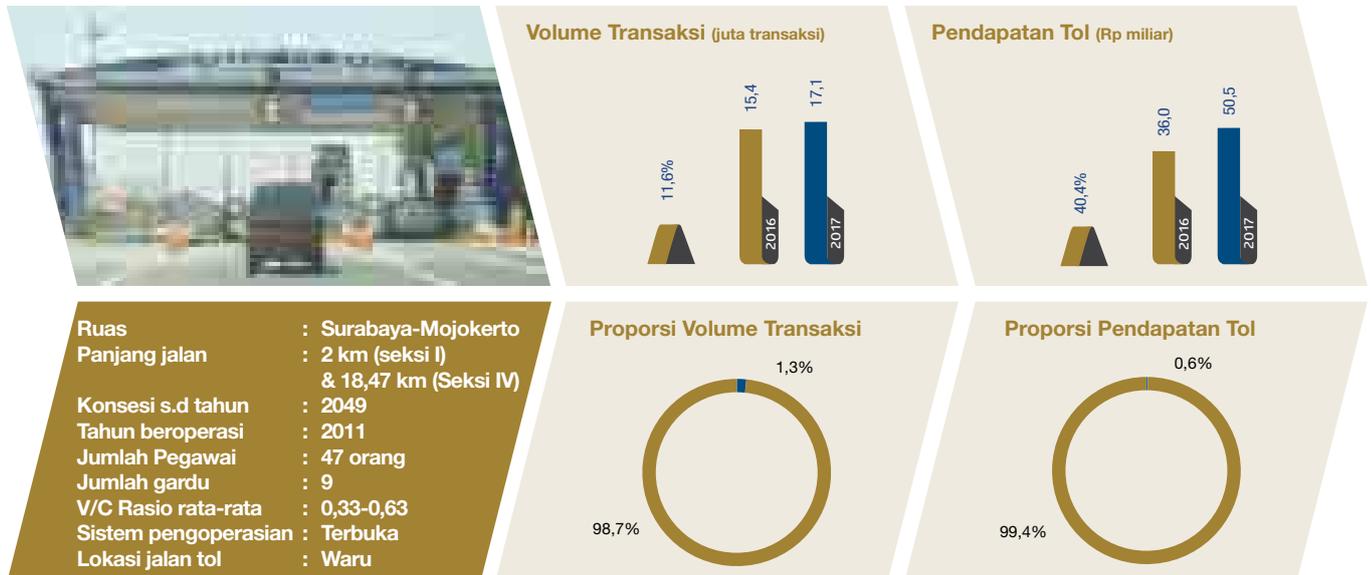
Analisa Kinerja Tahun 2017

Pendapatan Tol ruas BORR turun 1,5%, sedangkan pertumbuhan volume lalu lintas transaksi turun sebesar 4,2%. Penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh perubahan sistem transaksi di ruas Jagorawi yang menetapkan kebijakan satu tarif untuk semua jarak.

Prospek Usaha

Jalan Tol BORR sepanjang 11 km ini menghubungkan wilayah Sentul Selatan hingga Dramaga. Saat ini Ruas Jalan Tol BORR baru beroperasi dari Sentul Selatan hingga Kedung Badak (5,7 Km). Kedepannya, volume lalu lintas Jalan Tol BORR diprediksi akan terus meningkat seiring dengan dioperasikannya jalan tol ini secara menyeluruh.

6. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi jalan tol Surabaya-Mojokerto yang telah beroperasi seluruhnya, tercatat sebesar 17,1 juta transaksi, naik sebesar 11,6% dibandingkan dengan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 15,4 juta transaksi. Tahun 2017, kontribusi ruas Surabaya-Mojokerto terhadap total volume lalu lintas transaksi mencapai 1,3%. Sementara itu, Pendapatan tol mencapai Rp 50,5 miliar, naik sebesar 40,4% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 36 miliar. Kontribusi pendapatan tol dari Jalan Tol Surabaya-Mojokerto mencapai 0,6% terhadap total pendapatan tol Perseroan.

Profitabilitas

Tahun 2017, Laba usaha PT Jasamarga Surabaya Mojokerto mencapai sebesar Rp 16,3 miliar atau naik sebesar 76,5% dari tahun lalu sebesar Rp 9,2 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2017

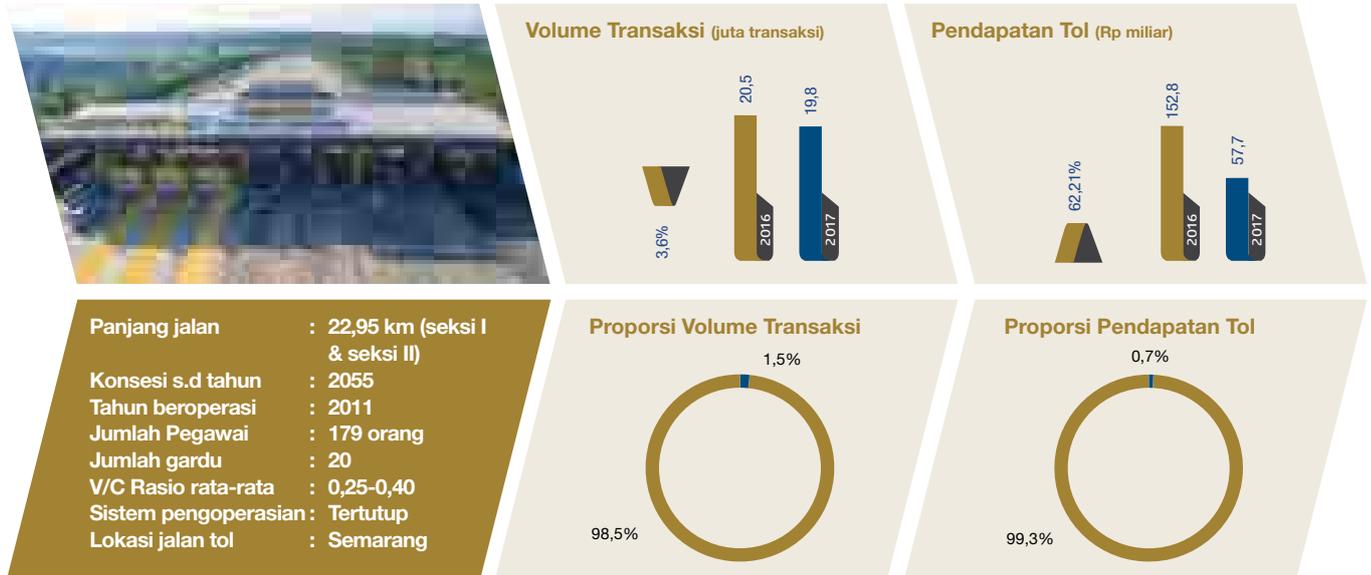
Pendapatan Tol PT Jasamarga Surabaya Mojokerto tumbuh 40,4% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas transaksi sebesar 11,6%. Pertumbuhan tersebut juga disebabkan oleh beroperasinya Ruas Krian-Mojokerto (18,5 km) pada bulan Maret 2016 serta penyelesaian ruas terakhir yaitu Sepanjang-Krian yang beroperasi pada bulan Desember tahun 2017.

Pada tanggal 18 Desember 2017, Ruas Surabaya-Mojokerto yang dioperasikan oleh PT Jasamarga Surabaya-Mojokerto resmi terintegrasi dengan Ruas Mojokerto-Kertosono yang dioperasikan oleh PT Marga Harja Infrastruktur.

Prospek Usaha

Jalan Tol Surabaya – Mojokerto merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dengan panjang 36,27 km dimana saat ini baru beroperasi sepanjang 20,7 km. Kedepannya diprediksi pertumbuhan volume lalu lintas pada jalan tol ini akan terus meningkat sejalan dengan rencana pengoperasian Trans Jawa pada tahun 2019.

7. PT Trans Marga Jateng



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi Ruas Semarang-Salatiga tercatat sebesar 19,8 juta transaksi, turun sebesar 3,6% dibandingkan dengan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 20,5 juta transaksi. Tahun 2017, kontribusi Ruas Semarang-Salatiga terhadap total volume lalu lintas transaksi mencapai 1,5%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 57,7 miliar, turun sebesar 62,2% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 152,8 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Semarang-Salatiga mencapai 0,70% terhadap total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

Tahun 2017, Laba Usaha ruas ini mencapai sebesar Rp 84,8 miliar atau naik sebesar 4,8% dari tahun lalu sebesar Rp80,8 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2017

Pendapatan Tol PT Trans Marga Jateng turun sebesar 62,2% dari tahun lalu ini disebabkan Pada bulan Mei Tahun 2017, Perseroan telah melakukan perubahan pengendalian menjadi Joint Control. Hal ini mengakibatkan hilangnya pencatatan pendapatan tol PT Trans Marga Jateng sehingga pendapatan tol yang dicatatkan merupakan pendapatan tol PT Trans Marga Jateng dari bulan Januari hingga Mei 2017. Pertumbuhan volume lalu lintas transaksi turun sebesar

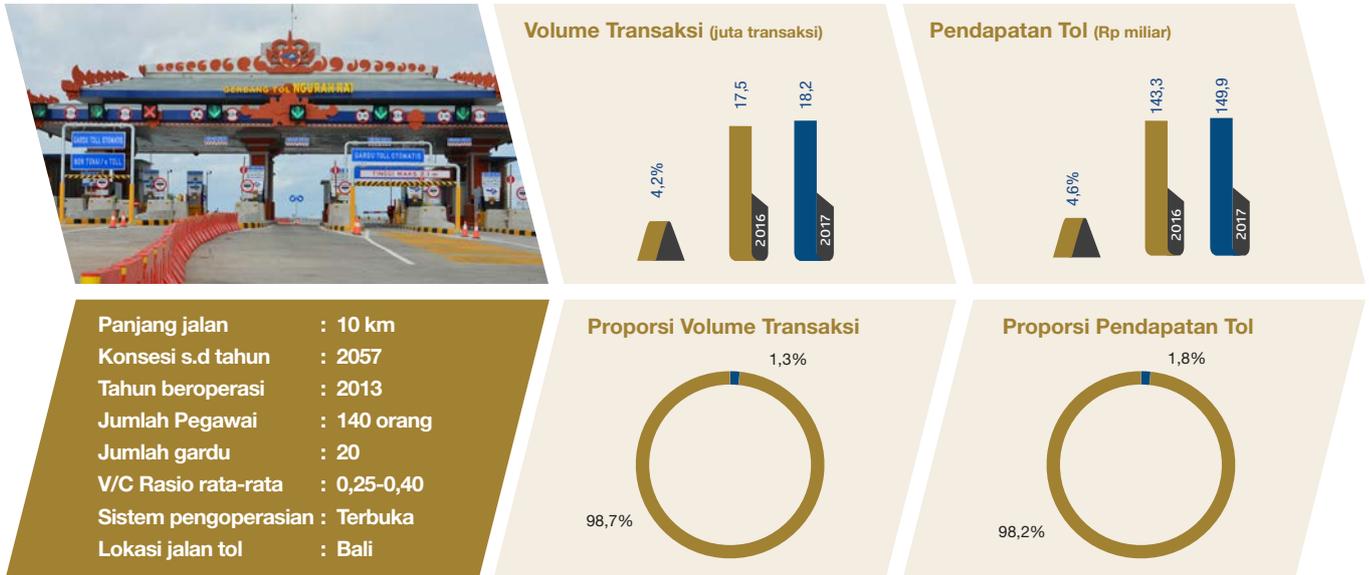
3,66%. Penurunan volume lalu lintas transaksi disebabkan Pada tanggal 16 September 2017, telah dilakukan perubahan sistem transaksi pada Ruas Semarang Solo dari yang sebelumnya sistem transaksi terbuka menjadi sistem transaksi tertutup.

Pada tahun 2017, PT Trans Marga Jateng telah mengoperasikan Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Bawen-Salatiga (17,6 km) sehingga saat ini Jalan Tol Semarang-Solo telah beroperasi sepanjang 40,7 km. Dengan pengoperasian Jalan Tol Seksi Bawen-Salatiga ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja PT Trans Marga Jateng.

Prospek Usaha

Ruas Jalan Tol Semarang - Solo merupakan bagian dari salah satu ruas Jalan Tol Trans Jawa dengan total panjang 72,64 Km. Hingga saat ini Jalan Tol Semarang - Solo yang baru beroperasi adalah Ruas Semarang-Bawen sepanjang 23,10 km. Ke depan, pertumbuhan volume lalu lintas pada Jalan Tol Semarang-Solo diprediksi akan terus tumbuh seiring dengan rencana terkoneksi wilayah Semarang dan Solo Pada Tahun 2018.

8. PT Jasamarga Bali Tol



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa tercatat sebesar 18,2 juta transaksi, tumbuh 4,2% dibandingkan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 17,5 juta transaksi. Ruas ini memberikan kontribusi terhadap total volume lalu lintas transaksi sebesar 1,3%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 149,9 miliar tumbuh sebesar 4,6% dari tahun sebelumnya Rp 143,3 miliar yang merefleksikan kontribusi Pendapatan Tol sebesar 1,8% terhadap total pendapatan tol Perseroan.

Profitabilitas

Tahun 2017, Laba Usaha PT Jasamarga Bali Tol mencapai sebesar Rp 80,80 miliar atau turun sebesar 2,2% dari tahun lalu sebesar Rp 82,61 miliar.

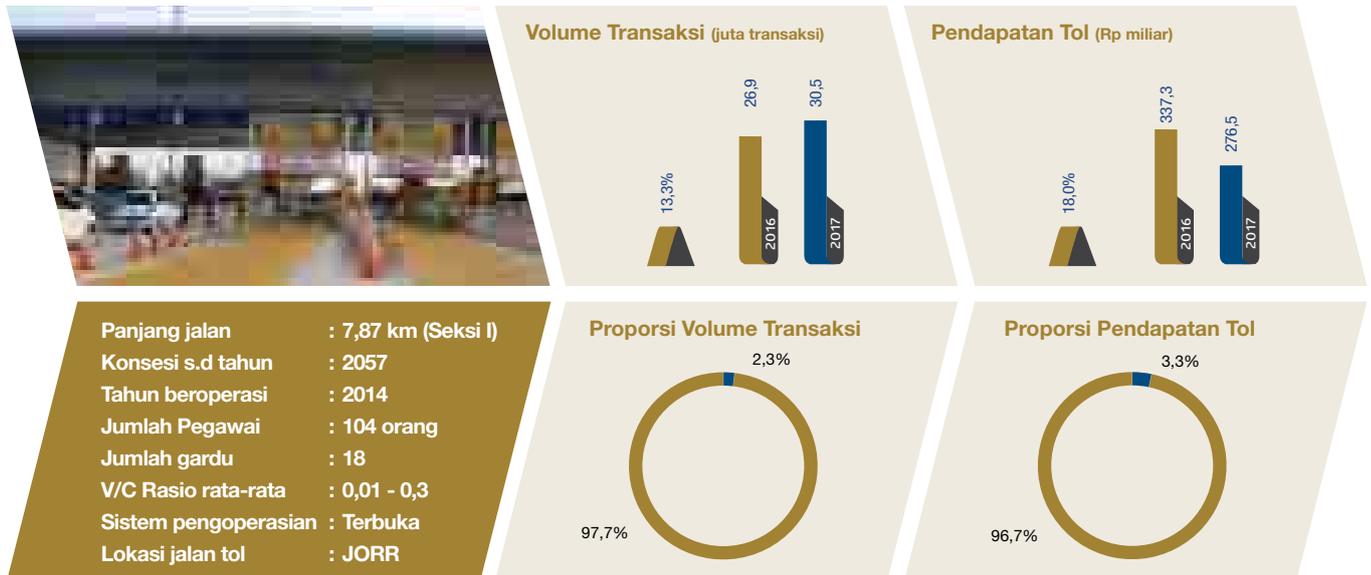
Analisa Kinerja Tahun 2017

Pendapatan tol PT Jasamarga Bali Tol tumbuh 4,6% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas transaksi sebesar 4,2% dibandingkan tahun 2016.

Prospek Usaha

Kedepan, pertumbuhan volume lalu lintas di jalan tol ini diprediksi akan terus tumbuh mengingat potensi wisata yang ada di Provinsi Bali.

9. PT Marga Lingkar Jakarta



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi Jalan Tol Ulujami-Kebun Jeruk tercatat sebesar 30,5 juta transaksi, tumbuh 13,3% dibandingkan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 26,9 juta transaksi. Ruas ini memberikan kontribusi terhadap total volume lalu lintas transaksi Perseroan sebesar 2,3%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 276,5 miliar turun sebesar 18% yang merefleksikan kontribusi Pendapatan Tol sebesar 3,3% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

Tahun 2016, Laba Usaha PT Marga Lingkar Jakarta mencapai sebesar Rp 126 miliar atau turun sebesar 39% dari tahun lalu sebesar Rp 205,1 miliar.

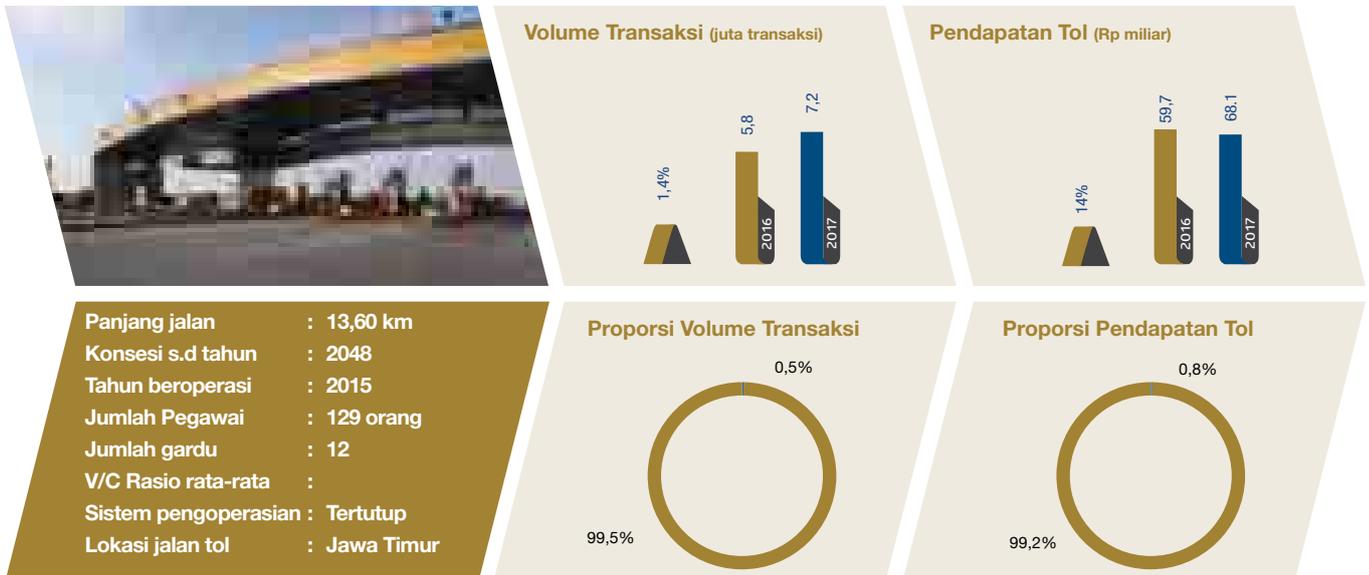
Analisa Kinerja Tahun 2017

Volume lalu lintas transaksi tol PT Marga Lingkar Jakarta tumbuh sebesar 13,3% sedangkan pendapatan tol turun sebesar 18% dikarenakan pada tahun 2016 PT MLJ mendapatkan perubahan bagi hasil dari tahun 2015 sehingga seolah-olah pertumbuhan di tahun 2017 menurun.

Prospek Usaha

Jalan Tol Ulujami – Kebun Jeruk merupakan bagian dari Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Sejak di operasikan pada Juli 2014, terjadi pertumbuhan lalu lintas yang sangat signifikan di ruas jalan tol ini. Pengguna Jalan di sekitar wilayah Kampung Rambutan, Lenteng Agung, Ampera dan Ciputat yang biasa melewati Jalan Tol Jagorawi menuju Jalan Tol Dalam Kota lebih memilih menggunakan Jalan Tol JORR, sehingga terjadi peralihan pergerakan lalu lintas. Begitu pula dengan kendaraan-kendaraan besar yang biasanya melewati Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Merak, berpindah melewati Ruas JORR.

10. PT Jasamarga Pandaan Tol



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017, volume lalu lintas transaksi Jalan Tol Gempol-Pandaan tercatat sebesar 7,2 juta transaksi, tumbuh 1,4% dibandingkan volume lalu lintas transaksi tahun 2016 sebesar 5,8 juta transaksi. Ruas ini memberikan kontribusi terhadap total volume lalu lintas transaksi sebesar 0,5%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 68,1 miliar atau tumbuh sebesar 14% yang merefleksikan kontribusi Pendapatan Tol sebesar 0,8% terhadap total pendapatan tol Perseroan.

Profitabilitas

Tahun 2017, Laba Usaha PT Jasa Marga Pandaan Tol mencapai sebesar Rp 24,2 miliar atau turun sebesar 1,5% dari tahun lalu sebesar Rp 24,5 miliar.

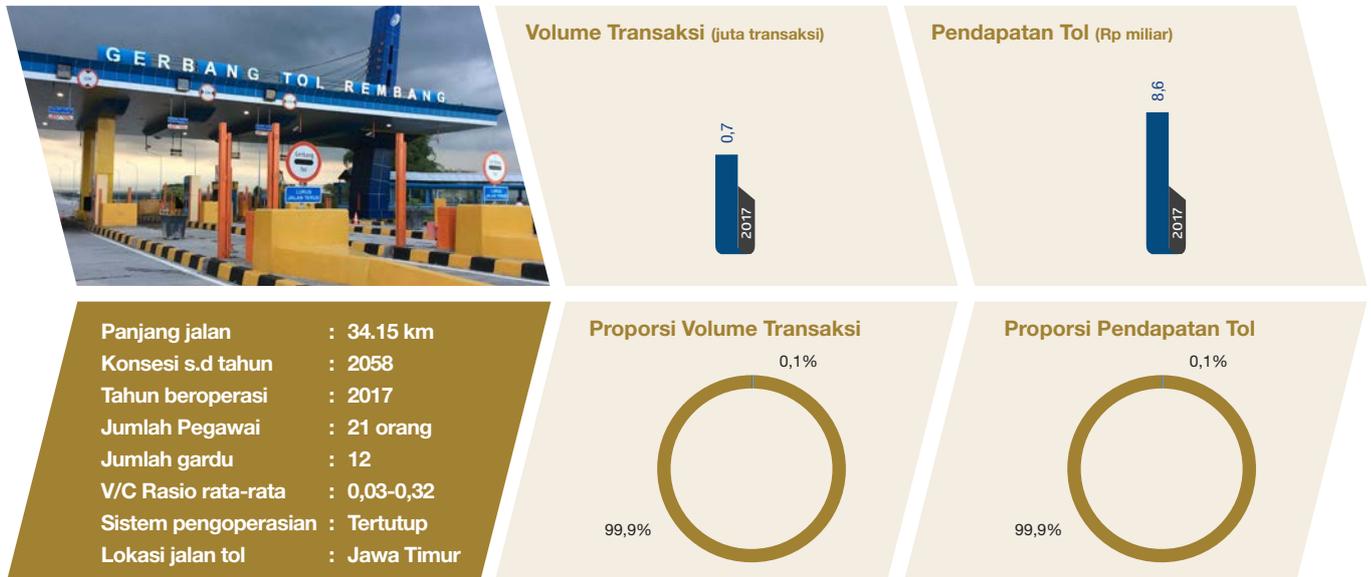
Analisa Kinerja Tahun 2017

Pendapatan tol meningkat sebesar 14,05% sejalan dengan peningkatan volume lalu lintas transaksi mencapai 7,20 juta transaksi atau naik sebesar 23,42%.

Prospek Usaha

Kedepan, Pertumbuhan Lalu lintas di Ruas ini diprediksi akan meningkat pesat mengingat Ruas Jalan Tol ini merupakan akses dari Surabaya menuju Malang. Ditargetkan pada tahun 2018, konektivitas Ruas Jalan Tol Porong – Gempol dan Pandaan – Malang terhubung seluruhnya.

11. PT Jasamarga Gempol Pasuruan



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017 merupakan tahun pertama pengoperasian ruas Gempol Pasuruan Seksi A2 Bangil-Rembang (7,1 km) pada April 2017 dan Seksi A1 Gempol-Bangil (6,8 km) dioperasikan pada Juli 2017 dan atas pengoperasian ruas tersebut, volume transaksi yang tercatat sebesar 0,7 juta transaksi dan berkontribusi sebesar 0,1% dari total volume transaksi Perseroan dan membukukan pendapatan tol mencapai Rp 8,6 miliar yang merefleksikan kontribusi Pendapatan Tol sebesar 0,1% terhadap total pendapatan tol Perseroan.

Profitabilitas

Tahun 2017, rugi usaha PT Jasamarga Gempol Pasuruan mencapai sebesar Rp 10,9 miliar turun dari tahun lalu yang mencatat laba sebesar Rp 1,4 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2017

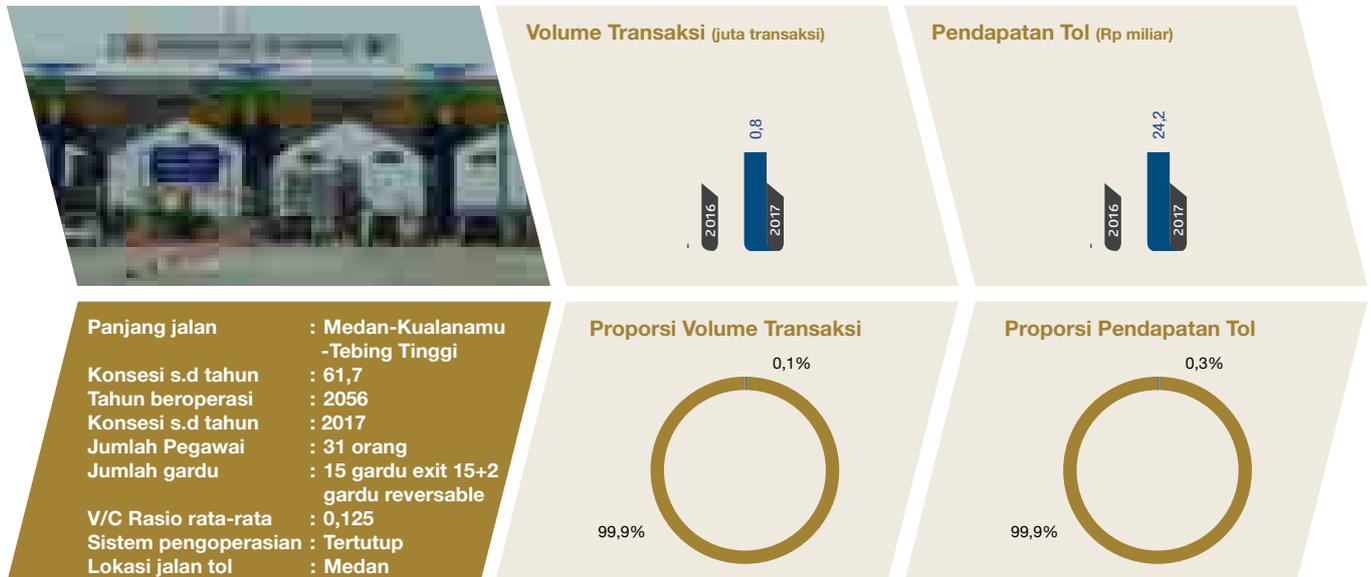
PT Jasamarga Gempol Pasuruan merupakan akses menuju kota Pasuruan dimana jalan tol ini terhubung dengan Jalan Tol Gempol-Pandaan dan Surabaya-Gempol sehingga kedepannya konektivitas jalan tol tersebut dapat saling memberikan dampak yang positif terhadap Perseroan. Saat ini Ruas Bangil-Rembang terintegrasi dengan Ruas Gempol-Pandaan dan Ruas Porong-Gempol.

Ruas Bangil-Rembang seksi A2 (Gempol-Bangil) mulai beroperasi pada 13 April 2017 dengan panjang 7,1 km. Pada tanggal 2 Agustus 2017, seksi A2 (Gempol-Bangil) mulai beroperasi dengan panjang 6,8 km, sehingga Ruas Bangil-Rembang terintegrasi dengan Ruas Gempol-Pandaan dan Ruas Porong-Gempol.

Prospek Usaha

PT Jasamarga Gempol Pasuruan merupakan akses menuju kota Pasuruan dimana jalan tol ini terhubung dengan Jalan Tol Gempol-Pandaan dan Surabaya-Gempol sehingga kedepannya konektivitas jalan tol tersebut dapat saling memberikan dampak yang positif terhadap Perseroan.

12. PT Jasamarga Kualanamu Tol



Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017 bulan Oktober, merupakan tahun pertama pengoperasian seksi 3 sampai dengan 6 ruas Kualanamu-Seirampah-Perbarakan sepanjang 42 km. Atas pengoperasian tersebut, volume lalu lintas transaksi yang tercatat sebesar 0,8 juta transaksi, dan memiliki porsi 0,1% terhadap total volume lalu lintas Perseroan. Pada sisi pendapatan tol tercatat mencapai Rp 24,2 miliar yang merefleksikan kontribusi Pendapatan Tol sebesar 0,3% terhadap total pendapatan tol Perseroan.

Profitabilitas

Tahun 2017, Laba Usaha PT Jasamarga Kualanamu Tol mencapai sebesar Rp 4,5 miliar naik dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 1,9 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2017

Kinerja volume lalu lintas transaksi dan pendapatan tol terlihat cukup baik, mengingat ruas tersebut baru mulai beroperasi pada tanggal 20 Oktober 2017, dan diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi yang semakin baik.

Prospek Usaha

Kedepannya, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi akan terkoneksi dengan Jalan Tol Belmera yang telah dimiliki Perseroan. Jalan tol tersebut apabila telah beroperasi penuh akan menghubungkan pelabuhan Belmera dan bandara internasional Kualanamu serta Ibu Kota Sumatera Utara, Medan. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap prospek usaha jalan tol tersebut.

SEGMENT USAHA PENGEMBANGAN USAHA LAIN

Segmen Usaha Lain merupakan segmen usaha yang berasal dari pemanfaatan aset perseroan baik *tangible* maupun *intangible* serta usaha yang berasal dari entitas anak perusahaan usaha lain. Hasil segmen usaha Pengembangan Usaha Lain pada Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2017

disajikan sebagai Pendapatan Usaha Lain, dimana pada tahun tersebut Pendapatan Usaha Lain mencapai Rp 640,4 miliar terlihat terjadi penurunan 29,3% hal ini dikarenakan adanya transaksi afiliasi sehingga terdapat perubahan perlakuan akuntansi atas transaksi induk dan anak.

KINERJA SEGMENT USAHA PENGEMBANGAN USAHA LAIN

No.	Segment	2016		2017		Δ	
		Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	(%)
1	Pendapatan BBM SPBU	180,8	20,0	109,6	17,1	(71,2)	(39,4)
2	Sewa Lahan	146,9	16,2	145,7	22,7	(1,2)	(0,8)
3	Jasa Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain	208,8	23,0	212,8	33,2	4,0	1,9
4	Pendapatan Iklan	6,3	0,7	15,6	2,4	9,3	148,3
5	Lainnya	45,2	5,0	18,3	2,9	(26,9)	(59,5)
6	Pendapatan Pemeliharaan Jalan Tol	293,4	32,4	104,0	16,2	(189,4)	964,6)
7	Pendapatan Penjualan Properti	24,4	2,7	34,5	5,4	10,0	41,0
	Total	905,7	100,0	640,4	100,00	(265,3)	(29,3)

Segmen usaha pengembangan usaha lain perseroan dibagi menjadi:

Pendapatan Pemeliharaan Jalan Tol

Pendapatan dari Jasa pemeliharaan jalan tol meningkat signifikan seiring dengan upaya Perseroan untuk meningkatkan pendapatan usaha lain melalui anak perusahaan PT Jasa Marga Toll Road Maintenance.

Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain

Jasa Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain diperoleh dari pendapatan Perseroan atau anak perusahaan atas pengoperasian jalan tol pihak lain. Kontrak jasa pengoperasian jalan tol yang dimiliki Perseroan antara lain pengoperasian Jembatan Jalan Tol Suramadu dan Jalan Tol Ulujami-Pondok Aren.

Pengoperasian SPBU Rest Area

Penjualan BBM merupakan pendapatan yang dihasilkan dari penerimaan BBM SPBU pada Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) KM 88 Jalur A dan B Jalan Tol Purbaleunyi serta TIP KM 226 Jalur A Jalan Tol Palikanci. Kontribusi Penjualan BBM sebesar 1,35% dari Total Pendapatan Usaha Lain.

Sewa Lahan

Sewa Lahan diperoleh dari penyewaan lahan untuk pemasangan iklan, pemasangan utilitas, sewa gedung dan pendapatan bagi hasil TIP milik mitra.

Penjualan properti

Pendapatan dari penjualan property diperoleh dari aktivitas yang dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan, PT Jasa Marga Properti.

Pendapatan iklan

Pendapatan iklan diperoleh dari pendapatan iklan di koridor jalan tol yang dikelola oleh Perseroan.

Lainnya

Pendapatan lainnya diperoleh dari pendapatan atas pinjaman anak perusahaan.



Rest area km 88 B Jalan Tol Purbaleunyi.

ANALISA KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF

Analisa kinerja keuangan komprehensif ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan Entitas Anak untuk periode 31 Desember 2016 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) melalui Laporan Audit No. RPC-2903/PSS/2017 tanggal 31 Januari 2018, dan memperoleh pendapat/opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pemahaman atas uraian tinjauan keuangan ini tetap memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan

Konsolidasian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

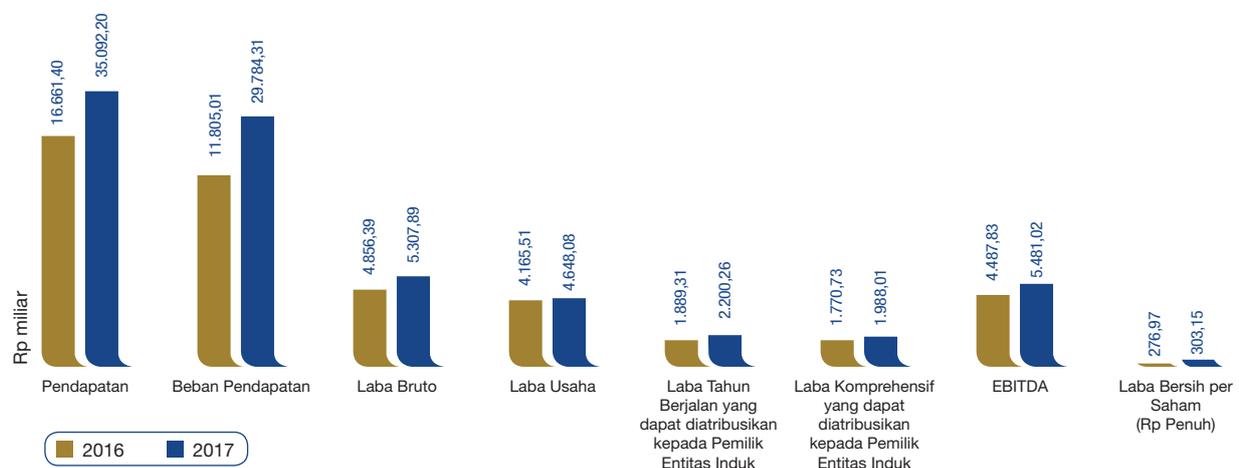
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2017, Perseroan mampu mencatat kinerja yang baik. Kinerja yang baik ini diperoleh saat Perseroan sedang dalam tahapan akselerasi investasi pembangunan jalan tol baru. Pencapaian Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp 2,2 triliun, naik 16,46% atau Rp 310,94 miliar dibandingkan tahun 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Tol Perseroan sebagai dampak dari penyesuaian tarif tol pada akhir tahun 2016 serta mulai beroperasinya ruas-ruas tol baru, peningkatan Pendapatan Usaha Lain dan keberhasilan Perseroan dalam mengelola Beban Tol dan Usaha Lainnya serta Beban Bunga sehingga tidak naik signifikan.

KINERJA KEUANGAN 2017 DAN 2016

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	% Δ
Pendapatan	16.661,40	35.092,20	18.430,79	110,62
Beban Pendapatan	11.805,01	29.784,31	17.979,30	152,30
Laba Bruto	4.856,39	5.307,89	451,50	9,30
Laba Usaha	4.165,51	4.648,08	482,57	11,58
Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.889,31	2.200,26	310,94	16,46
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.770,73	1.988,01	217,29	12,27
EBITDA	5.228,53	5.481,02	252,49	4,83
Laba Bersih per Saham (Rp Penuh)	276,97	303,15	26,18	9,45



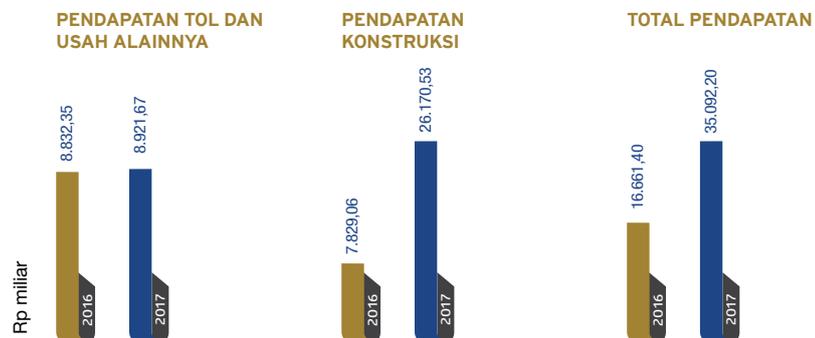
PENDAPATAN USAHA

Rp miliar

Uraian	2016		2017		Δ	
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%
Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya	8.832,35	53,01	8.921,67	25,42	89,32	1,01
Pendapatan Konstruksi	7.829,06	46,99	26.170,53	74,58	18.341,47	234,27
Total Pendapatan	16.661,40	100,00	35.092,20	100,00	18.430,79	110,62

Standar yang Digunakan:

- PSAK 23: Pendapatan
- PSAK 30: Sewa
- PSAK 34: Kontrak Konstruksi
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Pendapatan Perseroan terdiri dari Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya dan Pendapatan Konstruksi. Selama tahun 2017, Pendapatan Perseroan mencapai Rp 35,09 triliun atau naik 110,62% dari Pendapatan tahun 2016 sebesar Rp 16,66 triliun. Untuk dapat melakukan analisa secara lebih tepat, diharapkan untuk dapat menggunakan Pendapatan diluar Pendapatan Konstruksi. Hal ini mengingat, Pendapatan Konstruksi akan net off dengan Beban Konstruksi, dan margin konstruksi yang didapatkan tidak signifikan. Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp 89,32 miliar dari sebelumnya Rp 8,83 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 8,92 triliun pada tahun 2017.

PENDAPATAN TOL

Pendapatan tol merupakan pendapatan dari pengoperasian jalan tol sendiri yang diakui pada saat pengguna jalan melakukan transaksi pembayaran di gardu tol, dan pengoperasian jalan tol dengan investor dengan kuasa penyelenggaraan diakui pada saat penjualan karcis tol setelah dikurangi bagian investor tersebut.

Pada tahun 2017 Pendapatan tol mencapai Rp 8,28triliun atau meningkat 4,5% dari tahun 2016 yang mencapai Rp 7,93 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya volume lalu lintas transaksi dan adanya penyesuaian tarif pada beberapa ruas jalan tol di akhir tahun 2017 dan operasi ruas-ruas tol baru serta adanya integrasi di ruas Jakarta-Tangerang dan perubahan sistem transaksi di ruas tol Jagorawi.

Komposisi Pendapatan Tol tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 sebagai berikut:

Rp miliar

Uraian	2016		2017		Δ	
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%
Kantor Cabang						
Jakarta - Cikampek	1.232,54	15,50	1.265,74	15,28	33,20	2,69
Cikampek - Padalarang	990,94	12,50	967,31	11,68	(23,63)	(2,38)
Jalan Tol Dalam Kota	900,88	11,37	934,03	11,28	33,15	3,68
JORR Seksi Non S	851,19	10,74	868,98	10,49	17,79	2,09
Jakarta - Bogor - Ciawi	696,99	8,79	874,01	10,55	177,01	26,40
Jakarta - Tangerang	580,65	7,33	755,68	9,13	175,02	30,14
Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	511,84	6,46	541,15	6,53	29,32	5,73
Surabaya - Gempol	402,05	5,07	418,58	5,05	16,53	4,11
Padalarang - Cileunyi	359,69	4,54	331,69	4,01	(28,00)	(7,79)
Palimanan - Kanci	169,49	2,14	181,22	2,19	11,73	6,92
Pondok Aren-Ulujami	146,08	1,84	155,84	1,88	9,76	6,68
Semarang	136,59	1,72	138,95	1,68	2,35	1,72
Belmera	105,49	1,33	113,74	1,37	8,25	7,82
JORR S	12,97	0,16	-	-	(12,97)	(100,00)
Total	7.097,40	89,54	7.546,92	91,13	449,52	6,33
Entitas Anak						
JORR W2 Utara	337,29	4,26	276,53	3,34	(60,76)	(18,01)
Semarang - Solo	152,80	1,93	57,74	0,70	(95,06)	(62,21)
Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	143,25	1,81	149,89	1,81	6,64	4,64
Bogor Outer Ring Road	100,21	1,26	98,69	1,19	(1,52)	(1,52)
Gempol - Pandaan	59,73	0,75	68,11	0,82	8,39	14,05
Surabaya - Mojokerto	36,00	0,45	50,53	0,61	14,53	40,36
Gempol-Pasuruan	-	-	8,61	1,10	8,61	N/A
Medan-Kualanamu	-	-	24,24	0,29	24,24	N/A
Total	829,28	10,46	734,36	8,87	(94,92)	(11,45)
Total	7.926,68	100,00	8.281,27	100,00	354,59	4,47

Dari tabel dan grafik diatas, terlihat pertumbuhan hampir disemua ruas tol Perseroan. Kontribusi terbesar pendapatan tol berasal dari ruas jalan tol Jakarta-Cikampek yang mencapai Rp 1,26 triliun atau 15,3% dari total Pendapatan Tol secara keseluruhan, ruas-ruas yang berlokasi di Area Provinsi Jakarta dan Jawa Barat masih menjadi penyumbang

terbesar pendapatan yang diperoleh Perusahaan, dengan total kontribusi sebesar 91,1%. Untuk ruas-ruas tol baru yang sudah beroperasi, memberikan kontribusi sebesar 8,9% dari total Pendapatan Tol. Ke depan, ruas-ruas tol baru diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

PENDAPATAN USAHA LAINNYA

Rp miliar

Uraian	2016		2017		Δ	
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%
Pendapatan pemeliharaan jalan tol	293,36	32,39	103,96	16,23	(189,40)	(64,56)
Jasa Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain	208,75	23,05	212,77	33,22	4,02	1,93
Pendapatan BBM SPBU	180,77	19,96	109,62	17,12	(71,15)	(39,36)
Sewa Lahan	146,86	16,22	145,68	22,75	(1,18)	(0,80)
Pendapatan dari penjualan properti	24,44	2,70	34,45	5,38	10,02	40,99
Pendapatan Iklan	6,29	0,69	15,63	2,44	9,33	148,25
Lainnya	45,20	4,99	18,29	2,86	(26,91)	(59,54)
Total	905,67	100,00	640,40	100,00	(265,27)	(29,29)

Standar yang Digunakan:

- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Pendapatan Usaha Lainnya merupakan pendapatan pemeliharaan jalan tol, jasa pengoperasian jalan tol pihak lain, pendapatan BBM SPBU, Sewa Lahan, Pendapatan dari penjualan properti, pendapatan iklan dan lainnya.

Pada 2017, Pendapatan Usaha Lainnya mencapai Rp 640,40 miliar, turun sebesar 29,28% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 905,67 miliar. Secara total, Pendapatan Usaha

Lainnya memberikan kontribusi sebesar 7,18% terhadap total Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya. Penurunan pendapatan usaha lain ini disebabkan oleh perubahan perlakuan pencatatan akuntansi atas transaksi induk dan anak perusahaan pada tahun 2017 dan penurunan pada penjualan BBM oleh PT Jasa Marga Properti.

PENDAPATAN KONSTRUKSI

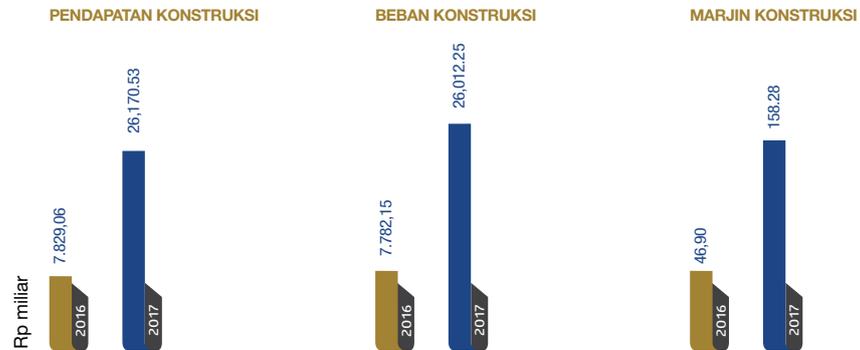
Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
Pendapatan Konstruksi	7.829,06	26.170,53	18.341	234,27
Beban Konstruksi	7.782,15	26.012,25	18.230	234,26
Marjin Konstruksi	46,90	158,28	111	237,48

Standar yang

Digunakan:

- PSAK dan ISAK lain yang relevan.
- PSAK 16



Pendapatan konstruksi merupakan pendapatan jasa pembangunan jalan tol baru dan peningkatan kapasitas jalan tol. Pendapatan konstruksi diakui sesuai dengan tahap penyelesaian aktivitas konstruksi pada akhir periode pelaporan sebesar biaya konstruksi ditambah margin konstruksi (*cost-plus*).

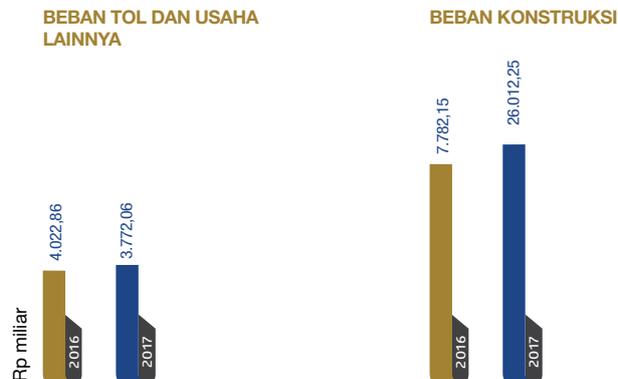
Tahun 2017, Pendapatan Konstruksi naik 234,27% menjadi Rp 26,17 triliun dengan jumlah Beban Konstruksi Rp 26,01 triliun dan Marjin Konstruksi Rp 158,28 miliar atau naik 237,48 % dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas konstruksi pembangunan ruas jalan tol baru di Anak Perusahaan.

BEBAN PENDAPATAN

Uraian	Rp miliar					
	2016		2017		Δ	
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%
Beban tol dan usaha lainnya	4.022,86	34,08	3.772,06	12,66	(250,80)	(6,23)
Beban konstruksi	7.782,15	65,92	26.012,25	87,34	18.230,09	234,26
Total Beban Pendapatan	11.805,01	100,00	29.784,31	100,00	17.979,30	152,30

Standar yang Digunakan:

- PSAK 14: Harga Pokok Pendapatan
- PSAK 16: Amortisasi
- PSAK 19: Aset Takberwujud
- PSAK 24: Gaji
- PSAK 34: Beban Konstruksi
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.
- PSAK 39: KSO



Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut distribusi kepada pemegang saham. Beban Pendapatan adalah beban yang timbul dari aktivitas utama perusahaan sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar perusahaan.

Tahun 2017, Beban Pendapatan Perseroan meningkat 152,30 % dari Rp 11,81 triliun di tahun 2016, menjadi Rp 29,78 triliun di tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan signifikan di sisi Beban Konstruksi yang meningkat 234,26 % dari tahun sebelumnya. Karena meningkatnya aktivitas konstruksi pembangunan ruas jalan tol baru di Anak Perusahaan.

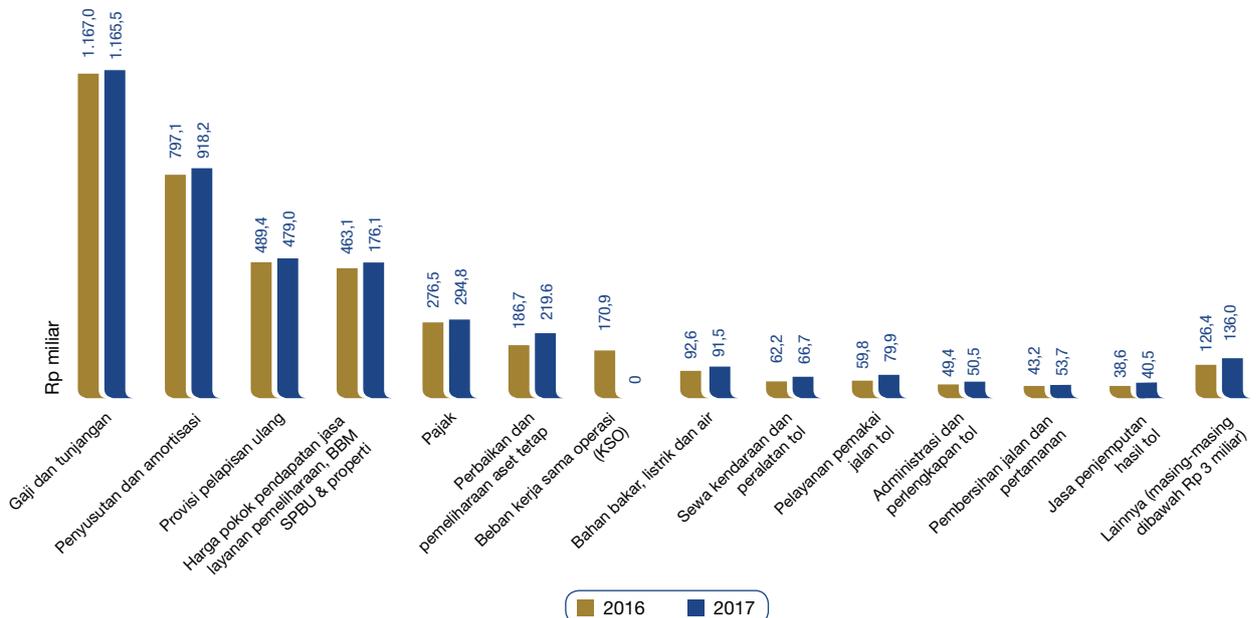
Beban Pendapatan Perseroan terdiri dari Beban Tol dan Usaha Lainnya serta Beban Konstruksi.

BEBAN TOL DAN USAHA LAINNYA

Rp miliar

Uraian	2016		2017		Δ	
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%
Gaji dan tunjangan	1.167,04	29,01	1.165,48	30,90	(1,56)	(0,13)
Penyusutan dan amortisasi	797,08	19,81	918,24	24,30	121,17	15,20
Provisi pelapisan ulang	489,40	12,17	479,01	12,70	(10,39)	(2,12)
Harga pokok pendapatan jasa layanan pemeliharaan, BBM SPBU & properti	463,10	11,51	176,11	4,67	(286,98)	(61,97)
Pajak	276,46	6,87	294,79	7,81	18,33	6,63
Perbaikan dan pemeliharaan aset tetap	186,66	4,64	219,58	5,82	32,91	17,63
Beban kerja sama operasi (KSO)	170,93	4,25	-	-	(170,93)	(100,00)
Bahan bakar, listrik dan air	92,55	2,30	91,48	2,43	(1,07)	(1,16)
Sewa kendaraan dan peralatan tol	62,17	1,55	66,74	1,77	4,57	7,35
Pelayanan pemakai jalan tol	59,85	1,49	79,87	2,12	20,02	33,46
Administrasi dan perlengkapan tol	49,35	1,23	50,49	1,34	1,14	2,31
Pembersihan jalan dan pertamanan	43,23	1,07	53,71	1,42	10,48	24,24
Jasa penjemputan hasil tol	38,60	0,96	40,51	1,07	1,91	4,95
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 3 miliar)	126,43	3,14	136,04	3,61	9,61	7,60
Total	4.022,86	100,00	3.772,06	100,00	(250,80)	(6,23)

- Standar yang Digunakan:
- PSAK 14: Harga Pokok Pendapatan
 - PSAK 16: Amortisasi
 - PSAK 19: Aset Takberwujud
 - PSAK 24: Gaji
 - PSAK 34: Beban Konstruksi
 - PSAK dan ISAK lain yang relevan.
 - PSAK 39: KSO



Beban Tol dan Usaha Lainnya adalah beban yang timbul akibat kegiatan pengumpulan tol, pelayanan kepada pemakai jalan tol, pemeliharaan jalan tol, kerja sama operasi dan harga pokok pendapatan jasa layanan pemeliharaan, BBM SPBU dan penjualan properti.

Pada tahun 2017, Beban Tol dan Usaha Lainnya turun 6,2% dibandingkan tahun 2016, yaitu dari Rp 4,02 triliun menjadi Rp 3,77 triliun. Penurunan disebabkan oleh Harga Pokok Penjualan Jasa Layanan Pemeliharaan akibat dari perubahan perlakuan pencatatan akuntansi atas transaksi induk dan anak dan penurunan penjualan volume BBM SPBU.

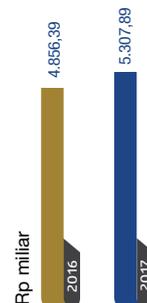
LABA BRUTO

Uraian	2016	2017	Rp miliar	
			Δ	
			Jumlah	%
Pendapatan	16.661,40	35.092,20	18.430,79	110,62
Beban Pendapatan	11.805,01	29.784,31	17.979,30	152,30
Laba Bruto	4.856,39	5.307,89	451,50	9,30

Standar yang Digunakan:

- PSAK dan ISAK lain yang relevan.

LABA BRUTO



Laba Bruto merupakan selisih dari Pendapatan dan Beban Pendapatan Perseroan.

Laba Bruto Perseroan di tahun 2017 mencapai Rp 5.307,89 miliar. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari tahun 2016 yang mencapai Rp 4.856,39 miliar atau tumbuh sebesar 9,30 %. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha dan penurunan beban tol dan usaha lainnya.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Uraian	2016		2017		Rp miliar	
	Δ		Δ			
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%
Gaji dan tunjangan	553,14	58,29	633,95	55,01	80,81	14,61
Penyusutan dan amortisasi	81,56	8,59	86,63	7,52	5,07	6,22
Administrasi kantor dan sumbangan	73,34	7,73	91,98	7,98	18,64	25,41
Perbaikan dan pemeliharaan aset tetap	48,95	5,16	73,19	6,35	24,24	49,52
Jasa profesional	42,63	4,49	48,82	4,24	6,19	14,52
Sewa	28,67	3,02	40,20	3,49	11,53	40,20
Pajak iuran dan retribusi	26,39	2,78	31,26	2,71	4,88	18,48
Transportasi dan perjalanan dinas	23,23	2,45	27,53	2,39	4,31	18,54
Bahan bakar, listrik dan air	22,35	2,36	23,51	2,04	1,16	5,18
Publikasi	14,21	1,50	26,83	2,33	12,62	88,79
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 3 miliar)	34,53	3,64	68,56	5,95	34,03	98,56
Total	949,00	100,00	1.152,47	100,00	203,47	21,44

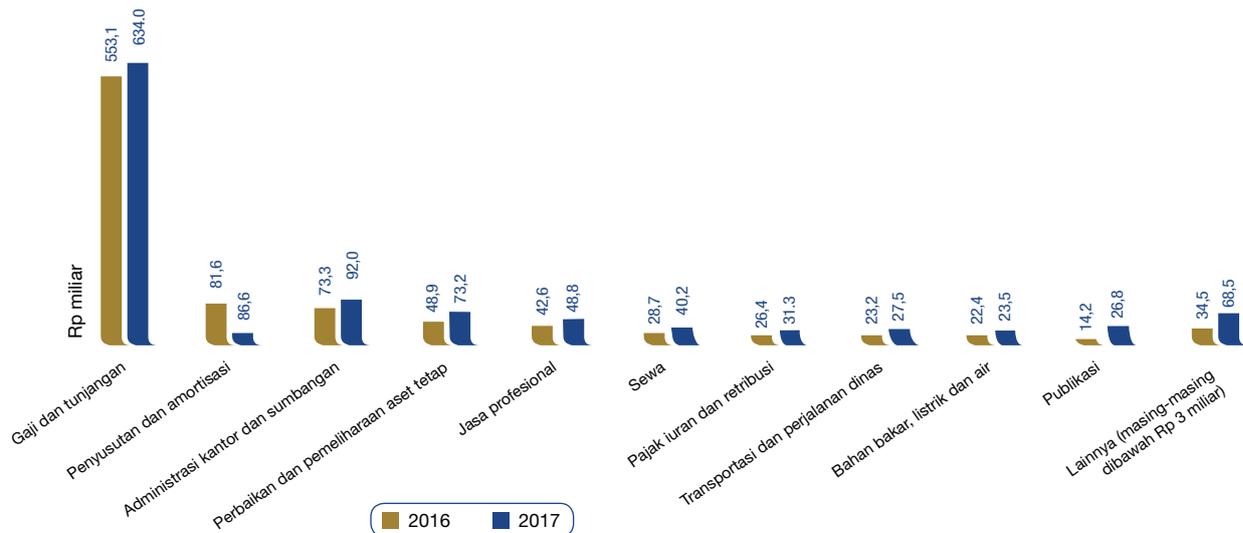
Standar yang Digunakan:

- PSAK 14: Harga Pokok Pendapatan
- PSAK 16: Amortisasi

- PSAK 19: Aset Takberwujud
- PSAK 24: Gaji

- PSAK 34: Beban Kontruksi
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.

- PSAK 39: KSO



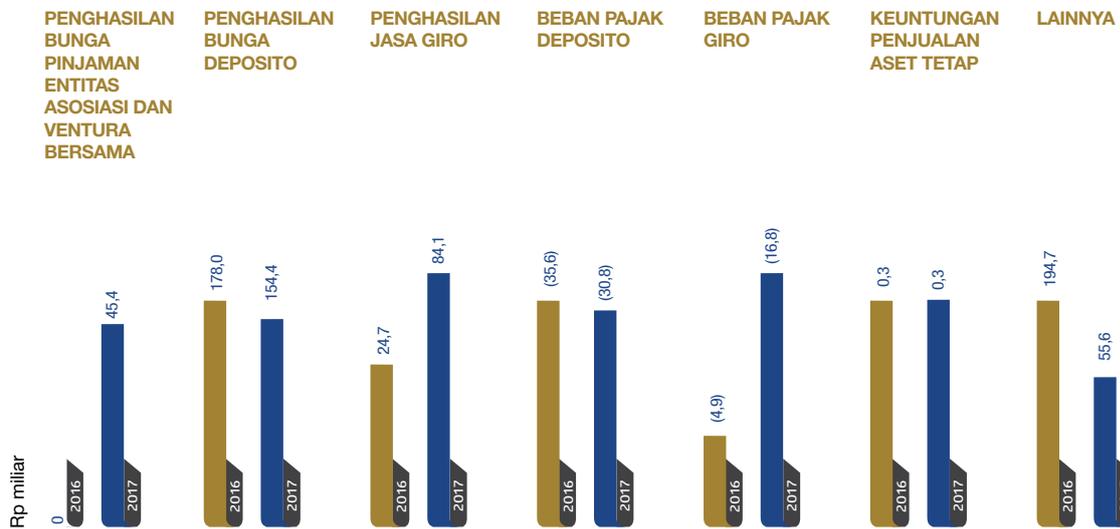
Beban Umum dan Administrasi adalah beban yang timbul akibat kegiatan di bidang umum dan administrasi. Pada tahun 2017, Beban Umum dan Administrasi naik 21,44% dibandingkan tahun 2016, yaitu dari Rp 949,0 miliar menjadi Rp 1,15 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Gaji dan tunjangan bagi karyawan di bidang operasional yang mengikuti program Alih Profesi (A-Life) dimana karyawan operasional yang dialih fungsikan ke non-operasional.

PENGHASILAN KEUANGAN DAN PENGHASILAN LAIN-LAIN

Uraian	2016	2017	Rp miliar	
			Jumlah	%
Penghasilan bunga pinjaman entitas asosiasi dan ventura bersama	-	45,44	45,44	N/A
Penghasilan bunga deposito	178,01	154,39	(23,62)	(13,27)
Penghasilan jasa giro	24,67	84,12	59,45	241,00
Beban pajak deposito	(35,62)	(30,82)	4,79	(13,46)
Beban pajak giro	(4,94)	(16,77)	(11,83)	239,63
Keuntungan penjualan aset tetap	0,27	0,28	0,01	3,49
Lainnya	194,73	55,58	(139,15)	(71,46)
Total	357,12	292,22	(64,90)	(18,17)

Standar yang Digunakan:

- PSAK 23
- PSAK 46: Pajak
- PSAK 16: Aset Tetap



Penghasilan keuangan merupakan penghasilan dari bunga pinjaman talangan tanah, bunga deposito dan penghasilan jasa giro. Pada tahun 2017, Penghasilan Keuangan meningkat sebesar 40,1% dibandingkan tahun 2016.

Penghasilan lain-lain merupakan pendapatan diluar pendapatan usaha. Contohnya keuntungan penjualan aset tetap dan lain-lain.

Penghasilan Lain-Lain Perseroan pada tahun 2017 mencapai Rp 55,9 miliar atau turun sebesar 71,35% dibandingkan dengan tahun 2016.

Sementara itu, Beban Lain-lain Perseroan yang merupakan beban administrasi bank, provisi pinjaman, penghapusan piutang dan lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp 264,01 miliar dibandingkan tahun 2016 dikarenakan adanya termasuk beban pensiun dini sebesar Rp182.559.758.



Jalan Tol Bali Mandara yang dikelola oleh PT Jasamarga Bali Tol merupakan jalan tol hasil karya anak Bangsa pertama di Pulau Dewata sekaligus jalan tol di atas laut pertama di Indonesia.

LABA USAHA

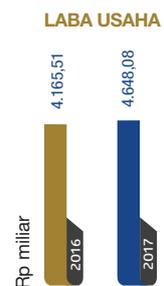
Uraian	2016	2017	Rp miliar	
			Δ	
			Jumlah	%
LABA BRUTO	4.856,39	5.307,89	451,50	9,30
Penghasilan lain-lain	195,00	55,86	(139,14)	(71,35)
Penghasilan keuangan	202,68	283,96	81,28	40,10
Keuntungan dari pelepasan investasi	-	563,46	563,46	N/A
Beban pajak atas penghasilan keuangan	(40,55)	(47,59)	7,04	17,36
Beban umum dan administrasi	(949,00)	(1.152,47)	203,47	21,44
Beban lain-lain	(99,00)	(363,02)	264,02	266,67
LABA USAHA	4.165,51	4.648,08	482,57	11,58

Standar yang Digunakan:

- PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.

Laba Usaha merupakan selisih dari Pendapatan Usaha dan Beban Usaha Perseroan.

Laba Usaha Perusahaan di tahun 2017 mencapai Rp 4,64 triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari tahun 2016 yang mencapai Rp 4,17 triliun atau meningkat 11,58 %. Hal ini relevan dengan pencapaian Pendapatan Usaha dan Beban Usaha Perseroan.



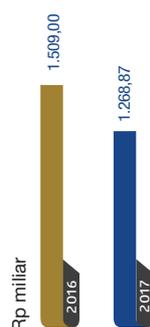
BIAYA KEUANGAN DAN BAGIAN ATAS RUGI NETO ENTITAS ASOSIASI

Uraian	2016	2017	Rp miliar	
			Δ	%
Biaya keuangan - neto	1.509,00	1.268,87	(240,13)	(15,91)
Utang bank	833,22	334,11	(499,11)	(59,90)
Utang obligasi	548,98	396,35	(152,63)	(27,80)
Utang lembaga keuangan bukan bank	99,30	207,71	108,41	109,18
Pembiayaan syariah	0,95	316,13	315,17	33.113,54
Lainnya	26,55	14,58	(11,97)	(45,08)
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi	6,82	128,76	121,93	1.786,73

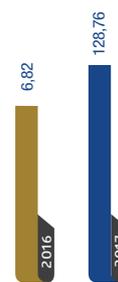
Standar yang Digunakan:

- PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.

BIAYA KEUANGAN - NETO



BAGIAN ATAS RUGI NETO ENTITAS ASOSIASI



Biaya Keuangan Perseroan pada tahun 2017 mengalami penurunan 15,91% Penurunan ini dikarenakan adanya eliminasi bunga atas pinjaman dana talangan dengan pendapatan atas bunga dana talangan

Bagian Atas Rugi Neto Entitas Asosiasi naik sebesar

1.786,73%, dari Rp 6,82 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp 128,76 miliar pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan pencatatan join control pada PT Trans Marga Jateng mempengaruhi penurunan utang bank serta adanya *refinancing* utang bank ke utang lembaga keuangan nonbank dan pembiayaan syariah.

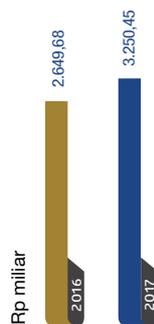
LABA SEBELUM PAJAK

Uraian	Rp miliar			
	2016	2017	Δ	%
Laba Sebelum Pajak	2.649,68	3.250,45	600,77	22,67

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.

LABA SEBELUM PAJAK



Pada tahun 2017, Laba Sebelum Pajak Perseroan mencapai Rp 3,25 triliun, meningkat sebesar Rp 600,77 miliar atau 22,67 % dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,65 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan Pendapatan Usaha Perseroan.

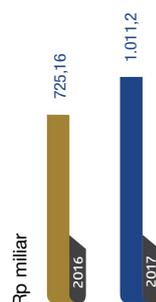
BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Uraian	Rp miliar			
	2016	2017	Δ	%
Pajak Kini	725,16	1.011,22	286,07	39,45
Pajak Tangguhan	121,47	145,57	24,11	19,85
Total Beban Pajak Penghasilan	846,62	1.156,80	310,17	36,64

Standar yang Digunakan:

- PSAK 46: Pajak Penghasilan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.

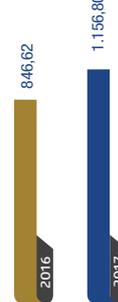
PAJAK KINI



PAJAK TANGGUHAN



TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN



Beban pajak penghasilan adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

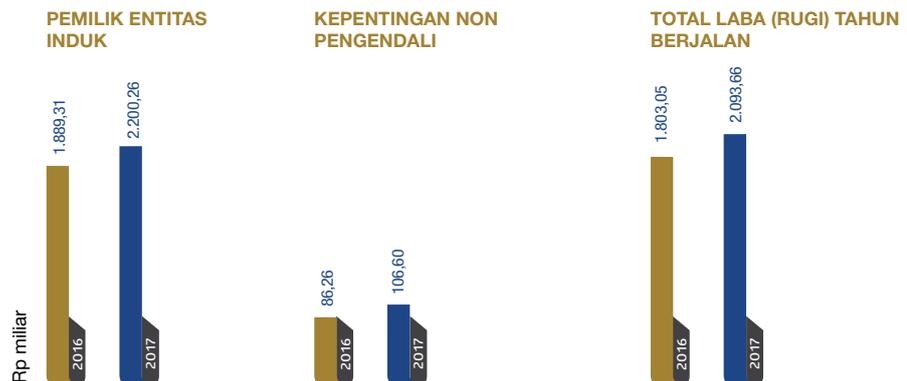
Beban Pajak Penghasilan Perseroan di tahun 2017 meningkat sebesar 310,17 % dari Rp 846,62 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 1,16 triliun di tahun 2017. Kenaikan Beban Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh transaksi penjualan PT TMJ.

LABA TAHUN BERJALAN

Rp miliar				
Uraian	2016	2017	Δ	%
Laba Periode/ Tahun Berjalan yang Dapat diatribusikan kepada :				
Pemilik Entitas Induk	1.889,31	2.200,26	310,94	16,46
Kepentingan Non Pengendali	86,26	106,60	20,34	23,58
Total Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.803,05	2.093,66	290,60	16,12

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Laba Tahun Berjalan Perseroan mencapai Rp 2,09 triliun, apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016, Laba Tahun Berjalan mengalami kenaikan sebesar 16,1 %. Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada Entitas Induk mencapai Rp 2,2 triliun meningkat sebesar 16,5 % dibandingkan pencapaian tahun 2016. Peningkatan laba ini merupakan hal yang sangat positif di tengah masa ekspansi yang tengah gencar dilakukan oleh Perseroan. Di sisi lain, Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali di 2017 mencapai Rp 106,6 miliar.

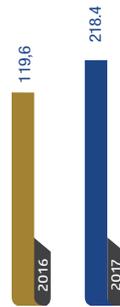
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN

Rp miliar				
Uraian	2016	2017	Δ	%
Rugi aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	119,59	218,45	98,86	82,67
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	(0,76)	(5,98)	(5,22)	687,07
Total beban komprehensif lain tahun berjalan	118,83	212,47	93,64	78,80

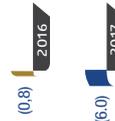
Standar yang Digunakan:

- PSAK 24: Imbalan Kerja
- PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs
- PSAK 15: Investasi pada entitas
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.

RUGI AKTUARIAL ATAS LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG



KEUNTUNGAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI DARI EFEK TERSEDIA UNTUK DIJUAL



Pada tahun 2017 Beban Komprehensif Lain mengalami kenaikan sebesar Rp 93,6 miliar dibanding 2016 hal ini disebabkan adanya naiknya Rugi aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp 218,4 miliar.

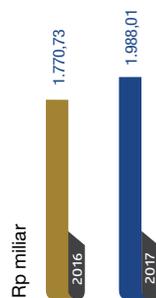
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Uraian	Rp miliar			
	2016	2017	Δ	%
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan yang Dapat diatribusikan kepada :				
Pemilik Entitas Induk	1.770,73	1.988,01	217,29	12,27
Kepentingan Non Pengendali	(86,50)	(106,83)	(20,33)	23,50
Total Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	1.684,23	1.881,19	23,96	1,29

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.

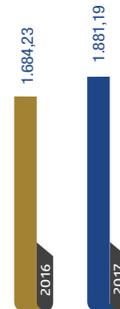
PEMILIK ENTITAS INDUK



KEPENTINGAN NON PENGENDALI



TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN



Labanya Komprehensif Tahun Berjalan mencapai Rp 1,88 triliun, meningkat sebesar 23,96% dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp 1,68 triliun. Labanya Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk mencapai Rp 1,99 triliun, mengalami kenaikan sebesar 12,27 % dibandingkan tahun 2016. Sedangkan Rugi Komprehensif yang diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali mengalami kenaikan sebesar Rp 20,33 miliar.

BAGIAN ATAS RUGI NETO ENTITAS ASOSIASI

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	%
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi	(6,82)	(128,76)	121,93	(94,70)

Terdapat penurunan pada Bagian atas rugi neto entitas asosiasi sebesar 94,7% dikarenakan pencatatan akuntansi atas laba (rugi) PT Trans Marga Jateng sesuai porsi kepemilikan.



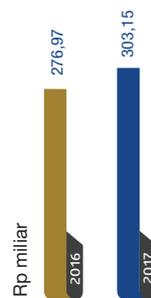
LABA BERSIH PER SAHAM

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	%
Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh)	276,97	303,15	26,18	9,45

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.

LABA BERSIH PER SAHAM
(RUPIAH PENUH)

Tahun 2017 Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh) sebesar Rp 303,15 naik sebesar 9,45 % dari tahun 2016 yang mencapai Rp 276,97. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada Laba Tahun Berjalan yang Dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan di tahun 2017 menunjukkan kinerja yang meningkat. Tahun ini, aset Perseroan tercatat sebesar Rp 79,19 triliun atau tumbuh 48,02% dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan ini disebabkan karena adanya pertumbuhan Hak Pengusahaan Jalan Tol baru, seiring upaya Perseroan untuk terus melakukan pengembangan usaha. Di sisi lain, kondisi

tersebut menyebabkan liabilitas Perseroan meningkat sebesar 63,70% dibandingkan tahun sebelumnya karena terdapat penambahan pinjaman untuk mendukung aktivitas konstruksi jalan tol baru. Sedangkan ekuitas Perseroan meningkat 12,37% dari tahun lalu sebagai cerminan bahwa Perseroan tetap berkomitmen menjaga perolehan laba ditengah upaya ekspansi yang dilakukan.

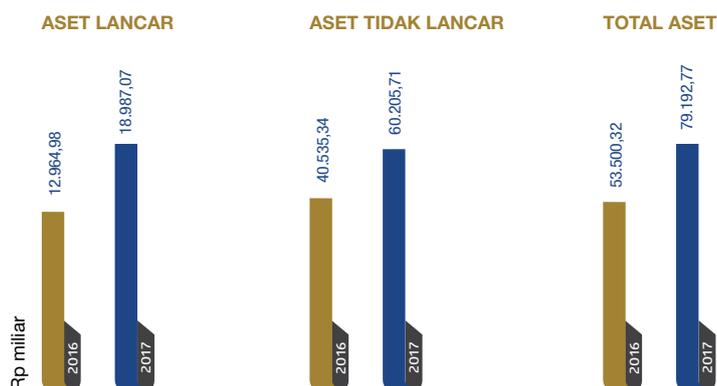
ASET

Rp miliar

Uraian	2016		2017		Δ	
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%
Aset Lancar	12.964,98	24,24	18.987,07	23,98	6.002,08	46,45
Aset Tidak Lancar	40.535,34	75,76	60.205,71	76,02	19.670,37	48,53
Total Aset	53.500,32	100,00	79.192,77	100,00	25.692,45	48,02

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 2 : Laporan Arus Kas
- PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
- PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16: Aset Tetap
- PSAK 19 : Aset Tak Berwujud
- ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa
- PSAK 22 : Kombinasi Bisnis
- PSAK 14 : Persediaan
- PSAK 30 : Sewa
- PSAK 46 : pajak Penghasilan
- PSAK 50 : Instrumen Keuangan: Penyajia
- PSAK 55 : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK 60 : Instrumen Keuangan : Pengungkapan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diperkirakan akan diperoleh perusahaan.

Aset Perseroan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 79,19 triliun yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 18,99 triliun dan aset tidak lancar sebesar Rp 60,21 triliun. Aset Perseroan meningkat sebesar Rp 25,70 triliun atau 48,02% dibandingkan aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 53,50 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tak berwujud neto hak pengusahaan jalan tol Perseroan seiring dengan pembangunan pada ruas-ruas jalan tol baru yang dibangun oleh Perseroan.

ASET LANCAR

Rp miliar

Uraian	2016		2017		Δ	
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%
Kas dan Setara kas	4.124,89	31,82	6.873,02	36,20	2.748,13	66,62
Investasi jangka pendek	7,71	0,06	157,35	0,83	149,64	1.939,67
Piutang lain-lain	8.277,64	63,85	11.547,36	60,82	3.269,73	39,50
Persediaan	86,98	0,67	134,24	0,71	47,27	54,35
Biaya dibayar dimuka	313,74	2,42	227,36	1,20	(86,37)	(27,53)
Pajak dibayar dimuka	154,03	1,19	47,72	0,25	(106,31)	(69,02)
Total Aset Lancar	12.964,98	100,00	18.987,07	100,00	6.022,08	46,45

Aset Lancar adalah aset yang memenuhi klasifikasi, diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan; atau, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan; atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar Perseroan terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang lain-lain lancar, persediaan, biaya dibayar di muka dan pajak dibayar dimuka. Aset lancar Perseroan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 18,99 triliun, meningkat sebesar Rp 6,02 triliun atau 46,45% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 12,96 triliun. Peningkatan ini terutama terjadi pada piutang lain-lain sebesar Rp 3,3 triliun pada tahun 2017, yang dikarenakan peningkatan piutang dana talangan tanah sejalan dengan progress peningkatan pembebasan lahan pada proyek ruas-ruas jalan tol baru.



Jalan Tol Semarang-Solo memiliki total panjang 72,64 Km yang menghubungkan Kota Semarang, Salatiga, dan Surakarta.

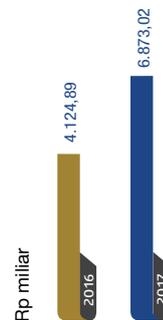
KAS DAN SETARA KAS

Uraian	2016	2017	Rp miliar	
			Δ	
			Jumlah	%
Kas dan Setara kas	4.124,89	6.873,02	2.748,13	66,62

Kas merupakan uang tunai rupiah, valas, dan rekening giro. Sedangkan Setara kas meliputi deposito jangka pendek yang jangka waktunya sama dengan atau kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penempatannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Pada 31 Desember 2017, jumlah kas dan setara kas mengalami peningkatan sebesar 66,62% dari Rp 4,12 triliun di 31 Desember 2016 menjadi Rp 6,87 triliun di 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya aksi korporasi terkait alternative pendanaan di akhir tahun 2017 yang akan terserap maksimal ditahun berikutnya.

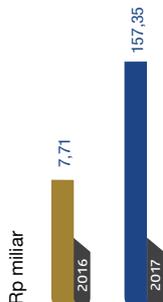
KAS DAN SETARA KAS



INVESTASI JANGKA PENDEK

Uraian	2016	2017	Rp miliar	
			Δ	
			Jumlah	%
Investasi jangka pendek	7,71	157,35	149,64	1.939,67

INVESTASI JANGKA PENDEK



Investasi jangka pendek adalah investasi pada deposito dan surat berharga yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

Pada 31 Desember 2017, investasi jangka pendek sebesar Rp 157,35 miliar, naik sebesar 1.939,67% dari tahun 2016 yang mencapai Rp 7,71 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh penempatan investasi pada instrumen Surat Berharga Hak Pendapatan Tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Atas Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi.

PIUTANG LAIN-LAIN NETO-LANCAR

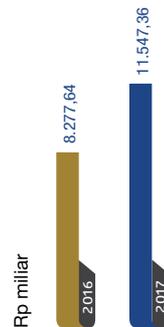
Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Piutang lain-lain-neto	8.277,64	11.547,36	3.269,73	39,50

Piutang lain-lain – Lancar merupakan pendapatan yang akan diterima dari sewa lahan, sewa tempat istirahat, sewa ruang iklan dan bunga yang akan diterima dari deposito berjangka yang akan diterima oleh Perusahaan dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun.

Piutang lain-lain lancar meningkat sebesar Rp 3,27 triliun atau 39,50% menjadi Rp 11,55 triliun pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan nilai piutang lain-lain lancar pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 8,28 miliar. Peningkatan ini terjadi akibat peningkatan piutang dana talangan tanah sejalan dengan progres pembebasan lahan serta adanya proses transisi 100% transaksi non tunai terkait rekonsiliasi pendapatan tol dengan bank penyedia uang elektronik.

PIUTANG LAIN-LAIN

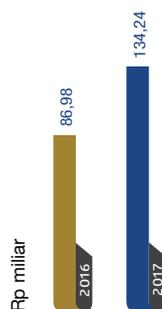


PERSEDIAAN

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Persediaan	86,98	134,24	47,27	54,35

PERSEDIAAN



Persediaan merupakan properti yang diperoleh atau dalam penyelesaian untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang tidak untuk disewakan atau untuk mendapatkan kenaikan nilai, dicatat sebagai persediaan.

Akun ini merupakan persediaan yang dimiliki oleh PT Jasa Marga Property dan PT Jasamarga Tollroad Maintenance, entitas anak, masing-masing sebesar Rp134,24 miliar dan Rp86,97 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

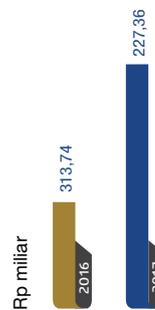
BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Uraian	2016	2017	Rp miliar	
			Δ	
			Jumlah	%
Biaya dibayar dimuka	313,74	227,36	(86,37)	(27,53)

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka yang barangnya akan diterima, atau manfaatnya akan digunakan, dalam dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

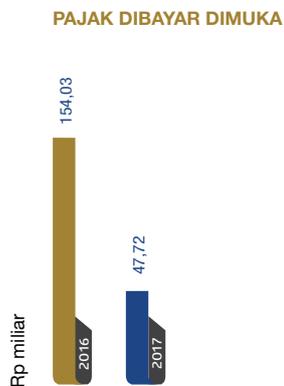
Biaya dibayar dimuka Perseroan turun sebesar Rp 86,37 miliar atau sebesar 27,53% dari sebesar Rp 313,74 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 227,36 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terjadi karena turunnya biaya dibayar dimuka dan uang muka pekerjaan atas berbagai pekerjaan yang ada di Perseroan.

BIAYA DIBAYAR DIMUKA



PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Uraian	2016	2017	Rp miliar	
			Δ	
			Jumlah	%
Pajak dibayar dimuka	154,03	47,72	(106,31)	(69,02)



Pajak dibayar dimuka adalah pembayaran pajak yang akan diperhitungkan dengan kewajiban pajak. Pajak Dibayar di muka turun 69,02% dari sebelumnya sebesar Rp 154,03 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 47,72 miliar pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh tidak terlaksananya restitusi pajak.

ASET TIDAK LANCAR

Rp miliar

Uraian	2016		2017		Δ	
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%
Piutang lain-lain	111,21	0,27	264,24	0,44	153,03	137,60
Dana ditetapkan penggunaannya	1.011,76	2,50	780,09	1,30	(231,68)	(22,90)
Aset pajak tangguhan - neto	66,08	0,16	34,14	0,06	(31,94)	(48,34)
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura - neto	158,28	0,39	886,62	1,47	728,34	460,15
Aset tetap - neto	884,67	2,18	1.035,92	1,72	151,26	17,10
Properti investasi-neto	232,32	0,57	241,93	0,40	9,61	4,14
Aset takberwujud - neto						
Hak perusahaan jalan tol	34.703,31	85,61	55.957,70	92,94	21.254,39	61,25
Lainnya	2.195,58	5,42	131,32	0,22	(2.064,26)	(94,02)
Goodwill	41,85	0,10	41,85	0,07	-	-
Aset keuangan lainnya-neto	247,30	0,61	247,30	0,41	-	-
Aset tidak lancar lainnya-neto	882,98	2,18	584,61	0,97	(298,36)	(33,79)
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	40.535,34	100,00	60.205,71	100,00	19.670,37	48,53

Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar, misalnya aset tetap atau aset tak berwujud.

Aset tidak lancar Perseroan terdiri dari piutang lain-lain, dana dibatasi penggunaannya, aset pajak tangguhan, investasi pada Entitas Asosiasi, aset tetap-neto, properti investasi, Aset tak berwujud-neto, goodwill, aset keuangan lainnya dan aset tidak lancar lainnya.

Nilai aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 60,21 triliun, meningkat sebesar Rp 19,67 triliun atau 48,53% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 40,53 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya hak perusahaan jalan tol Perseroan seiring dengan kegiatan konstruksi ruas-ruas tol baru Perseroan pada entitas Anak Jalan Tol

PIUTANG LAIN-LAIN - TIDAK LANCAR

Uraian	2016	2017	Rp miliar	
			Δ	
			Jumlah	%
Piutang lain-lain	111,21	264,24	153,03	137,60

Piutang lain-lain – Tidak Lancar merupakan pendapatan yang akan diterima dari sewa lahan, sewa tempat istirahat, sewa ruang iklan dan bunga yang akan diterima dari deposito berjangka yang akan diterima oleh Perusahaan dalam jangka panjang atau lebih dari 1 tahun.

Piutang lain-lain tidak lancar merupakan piutang yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol jembatan suramadu, sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum No.KU.03.01-Mn/339 tanggal 18 Juni 2012. Perseroan mendapatkan kontrak pengoperasian dan pemeliharaan selama 6 tahun, berlaku mulai 2012-2017. Piutang lain-lain tidak lancar Perseroan meningkat sebesar Rp 153,03 miliar atau setara 137,60% dari Rp 111,21 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 264,24 miliar pada 31 Desember 2017. Hal ini meningkat karena Perubahan join control pada PT Trans Marga Jateng yang mengakibatkan peningkatan sebesar Rp 261,68 miliar atas shareholder loan yang tidak lagi dieliminasi.

PIUTANG LAIN-LAIN



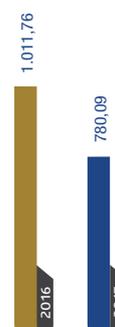
DANA DITETAPKAN PENGGUNAANNYA

Uraian	2016	2017	Rp miliar	
			Δ	
			Jumlah	%
Dana ditetapkan penggunaannya	1.011,76	780,09	(231,68)	(22,90)

Dana Ditetapkan Penggunaannya adalah penyisihan dana untuk jaminan pelunasan Obligasi dan bunga pinjaman Bank.

Dana Ditetapkan penggunaannya Perseroan turun sebesar Rp 231,68 miliar dari sebesar Rp 1,01 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 780,09 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya jaminan sindikasi bank, jaminan pelaksanaan dan jaminan pembebasan tanah.

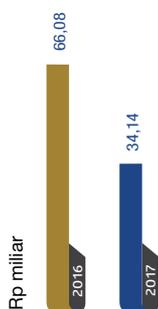
DANA DITETAPKAN PENGGUNAANNYA



ASET PAJAK TANGGUHAN - NETO

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Aset pajak tangguhan - neto	66,08	34,14	(31,94)	(48,34)

ASET PAJAK
TANGGUHAN - NETO

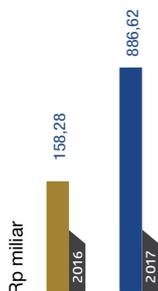
Aset Pajak Tangguhan - Neto adalah pengakuan atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga semua bagian dari aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan. Istilah aset pajak tangguhan muncul akibat adanya beda tetap dan beda pemanen dalam aturan perpajakan. Perkembangan yang terjadi dalam perlakuan laporan keuangan komersial dan fiskal dan juga, berbagai hal yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, sehingga PSAK 46 tentang pajak penghasilan memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya (beda tetap) dan beda permanen).

Aset Pajak Tangguhan – Neto Perseroan turun sebesar Rp 31,94 miliar dari sebesar Rp 66,08 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 34,14 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA-NETO

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Investasi pada entitas asosiasi - neto	158,28	886,62	728,34	460,15

INVESTASI PADA ENTITAS
ASOSIASI - NETO

Investasi pada entitas asosiasi adalah investasi pada saham entitas lain (investee) dimana investor memiliki pengaruh signifikan atas investee.

Seiring perkembangan Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2017 Investasi pada Entitas Asosiasi naik menjadi Rp 886,62 miliar atau naik 460,15% dibandingkan 31 Desember 2016. Berdasar Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., No. 71 tanggal 17 Mei 2017 mengenai Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian usaha Patungan, para pemegang saham PT Trans Marga Jateng (TMJ) telah sepakat bahwa pengendalian TMJ dilakukan secara bersama oleh Perusahaan dan PT Astra Tol Nusantara. Hal ini mengakibatkan sejak tanggal 17 Mei 2017, Perusahaan tidak melakukan konsolidasi atas laporan keuangan Perusahaan.

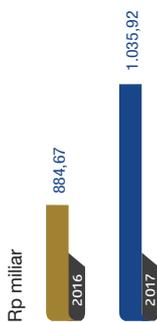
Pada tanggal 17 Mei 2017, Perusahaan melakukan penjualan saham di PT TMJ sebanyak 15% kepemilikan dengan harga sebesar Rp783.354.396.000 (rupiah penuh). Transaksi tersebut diaktakan pada Akta Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn. Nomor 20 tanggal 17 Mei 2017. Kepemilikan saham Perusahaan di TMJ menjadi sebesar 58,91% pada tanggal 30 Desember 2017. Selisih antara harga jual dengan nilai kepemilikan yang dilepas dicatat sebagai penghasilan lain-lain dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Oktober 2017.

ASET TETAP

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Aset tetap - neto	884,67	1.035,92	151,26	17,10

ASET TETAP - NETO



Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau tujuan administratif, serta digunakan lebih dari satu periode. Aset keuangannya lainnya merupakan penyertaan saham yang dikategorikan sebagai aset keuangan tersedia untuk di jual yang dicatat sebagai harga perolehan

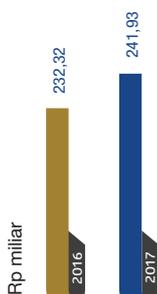
Pada tanggal 31 Desember 2017 Aset Tetap mencapai Rp 1,04 triliun naik 17,10% dari sebelumnya Rp 884,67 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan karena pembelian peralatan tol yang diakibatkan dari elektronifikasi dan pengoperasian jalan tol baru serta pembagunan gedung kantor dan bangunan lain.

PROPERTI INVESTASI

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Properti investasi	232,32	241,93	9,61	4,14

PROPERTI INVESTASI



Properti Investasi adalah Properti investasi Perseroan terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana dan peralatan yang dikuasai Perseroan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrative atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi merupakan akun yang dimiliki oleh entitas anak PT Jasamarga Properti (PT JMP)

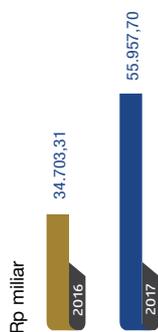
Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai properti investasi naik sebesar 4,14% atau Rp 9,61 miliar, dari Rp 232,32 miliar pada 31 Desember 2016 menjadi Rp 241,93 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh sejalan dengan proses bisnis PT Jasa Marga Properti.

ASET TAKBERWUJUD HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL - BERSIH

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Hak pengusahaan jalan tol	34.703,31	55.957,70	21.254,39	61,25

HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL



Hak pengusahaan jalan tol (HPJT) adalah aset takberwujud yang berasal dari konsesi pembangunan jalan tol, yang merupakan kompensasi atas pembangunan jalan tol.

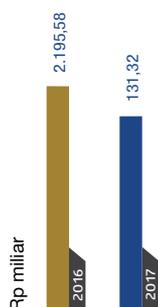
Aset tak berwujud neto dalam bentuk Hak Pengusahaan Jalan Tol meningkat sebesar Rp 21,25 triliun atau 61,25% dari sebesar Rp 34,70 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 55,96 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini salah satunya disebabkan karena adanya pengakuan Hak Pengusahaan Jalan Tol untuk jalan tol yang baru beroperasi yaitu PT PT Jasamarga Gempol Pasuruan pada seksi Bangil-Rembang, Gempol-Bangil, serta PT Jasamarga Kualanamu Tol dan sejalan dengan progres konstruksi pembangunan ruas-ruas tol baru.

ASET TAK BERWUJUD LAINNYA

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Lainnya	2.195,58	131,32	(2.064,26)	(94,02)

LAINNYA



Aset takberwujud lain adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai bentuk wujud fisik selain Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT). Aset takberwujud lain terdiri dari tanah prakonstruksi dan perangkat lunak.

Aset tak berwujud neto lainnya menurun hingga Rp 2,06 triliun atau 94,02% dari sebesar Rp 2,20 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 131,32 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan karena adanya reklasifikasi dari tanah prakonstruksi atas jalan tol yang masih konstruksi ke aset tak berwujud hak pengusahaan jalan tol karena sudah beroperasinya jalan tol.

ASET TAK BERWUJUD GOODWILL

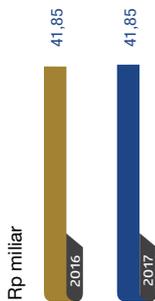
Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Goodwill	41,85	41,85	-	-

GOODWILL

Goodwill adalah selisih lebih antara jumlah yang dibayarkan (*considerations*) dan nilai wajar aset neto bisnis yang diperoleh.

Tidak terdapat perubahan Goodwill pada tanggal 31 Desember 2017.



ASET KEUANGAN LAINNYA-NETO

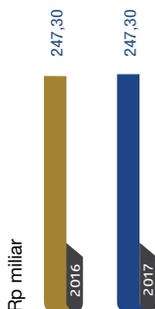
Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Aset Keuangan Lainnya-Neto	247,30	247,30	-	-

ASET KEUANGAN LAINNYA-NETO

Aset Keuangan Lainnya merupakan penyertaan saham ke beberapa entitas yang dikategorikan sebagai aset keuangan tersedia untuk di jual.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Aset Keuangan Lainnya tidak terdapat perubahan.



ASET TAK BERWUJUD ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Aset tidak lancar lainnya	882,98	584,61	(298,36)	(33,79)

ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

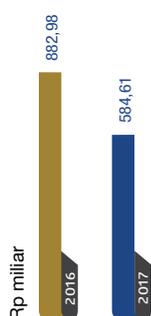
Aset Tidak Lancar Lainnya terdiri dari uang muka kontraktor dan konsultan, uang muka dana talangan tanah, aset diambil alih serta jalan tol Ruas Surabaya-Gempol seksi Porong-Gempol.

Uang muka kontraktor merupakan uang muka dalam rangka pembagunan jalan tol, pelapisan ulang, pengadaan jalan tol dan pengadaan jalan lain yang akan diperhitungkan dengan tagihan atas kemajuan pekerjaan kontraktor dan konsultan.

Uang muka dana talangan merupakan uang muka bunga dana talangan tanah atas nilai yang belum terealisasi kepada pemilik tanah.

Jalan Tol Seksi Porong-Gempol merupakan bagian dari jalan tol Surabaya-Gempol yang mengalami dampak dari musibah genangan lumpur PT Lapindo Brantas sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya jalan tol tersebut

Pada tanggal 31 Desember 2017, Aset Tidak Lancar Lainnya mencapai Rp 584,61 miliar atau meningkat 33,79% dari Rp 882,98 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan uang muka kontraktor dikarenakan sudah diterima manfaatnya.



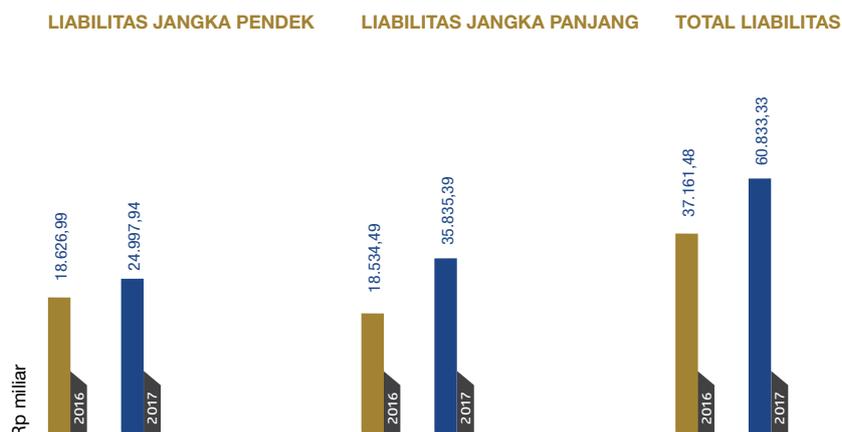
LIABILITAS

Rp miliar

Uraian	2016		2017		Δ	
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%
LIABILITAS JANGKA PENDEK	18.626,99	0,50	24.997,94	0,41	6.370,95	34,20
LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.534,49	0,50	35.835,39	0,59	17.300,90	93,34
TOTAL LIABILITAS	37.161,48	1,00	60.833,33	1,00	23.671,85	63,70

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 30: Sewa
- PSAK 46: Pajak Penghasilan
- PSAK 50 : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK 60 : Instrumen Keuangan :Pengungkapan
- PSAK 57 : Provisi, Liabilitas dan Aset Konstijensi
- PSAK 24 : Imbalan Kerja
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 60,83 triliun yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 25,0 triliun dan liabilitas jangka panjang

sebesar Rp 35,84 triliun. Liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp 23,67 triliun atau 63,70% dibandingkan liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 37,16 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan karena Perseroan memperoleh tambahan pinjaman dari pihak berelasi yang digunakan untuk pembangunan ruas tol-tol baru serta beban akrual akibat kenaikan pembayaran kontraktor sejalan dengan progress konstruksi ruas ruas jalan tol baru.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Uraian	2016		2017		Δ	
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang usaha	134,77	0,72	350,92	1,40	216,15	160,38
Utang kontraktor	1.279,58	6,87	1.289,21	5,16	9,64	0,75
Utang pajak	158,56	0,85	317,25	1,27	158,68	100,08
Liabilitas keuangan lainnya	1.956,03	10,50	2.967,23	11,87	1.011,20	51,70
Beban akrual	2.601,44	13,97	13.814,45	55,26	11.213,02	431,03
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	244,70	1,31	329,33	1,32	84,63	34,59
Utang bank	4.590,85	24,65	1.278,66	5,12	(3.312,19)	(72,15)
Utang lembaga keuangan bukan bank	3.462,68	18,59	500,00	2,00	(2.962,68)	(85,56)
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun						
Utang bank	342,09	1,84	557,80	2,23	215,71	63,06
Utang obligasi	1.500,00	8,05	1.000,00	4,00	(500,00)	(33,33)
Liabilitas pembebasan tanah	2.015,12	10,82	1.872,49	7,49	(142,63)	(7,08)
Utang sewa pembiayaan	8,80	0,05	4,54	0,02	(4,26)	(48,40)
Provisi pelapisan jalan tol	332,37	1,78	341,34	1,37	8,97	2,70
Pendapatan ditangguhkan	-	-	374,71	1,50	374,71	n/a
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	18.626,99	100,00	24.997,94	100,00	5.996,24	34,20

Liabilitas Jangka Pendek merupakan liabilitas dimana diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan atau satu siklus normal operasi perseroan.

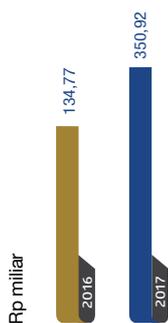
Liabilitas jangka pendek Perseroan terdiri dari utang usaha, utang kontraktor, utang pajak, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek serta liabilitas yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 25 triliun, naik sebesar Rp 6 triliun atau 34,20% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 18,63 triliun. Kenaikan terbesar terlihat dari beban akrual yang terdiri dari beban kontraktor dan konsultan sejalan dengan progress konstruksi di ruas-ruas jalan tol baru.

UTANG USAHA

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Utang Usaha	134,77	350,92	216,15	160,38

UTANG USAHA



Utang usaha adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kas yang timbul dari kegiatan usaha yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan, akun ini merupakan merupakan utang kepada pemasok terkait dengan pengadaan barang cetakan, alat tulis kantor, karcis tol, obat-obatan dan pakaian dinas serta utang usaha atas jasa pemeliharaan dan pembersihan jalan tol.

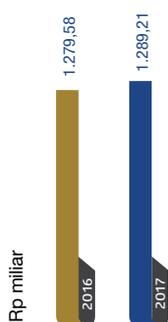
Utang usaha pada 31 Desember 2017 mencapai Rp 350,92 miliar atau naik 160,38% dari tahun sebelumnya yang mencapai 134,77 miliar.

UTANG KONTRAKTOR

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Utang kontraktor	1.279,58	1.289,21	9,64	0,75

UTANG KONTRAKTOR



Utang Kontraktor Merupakan utang kepada kontraktor, konsultan dan rekanan yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan terkait dengan pembangunan jalan, pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol dan bangunan lain.

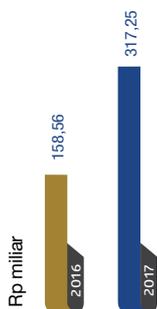
Utang kontraktor naik sebesar Rp 9,64 miliar atau 0,75% dari sebesar Rp 1,28 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1,29 triliun pada 31 Desember 2017.

UTANG PAJAK

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Utang pajak	158,56	317,25	158,68	100,08

UTANG PAJAK



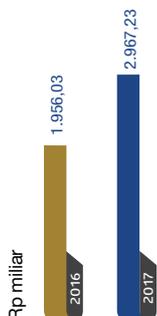
Utang pajak adalah pajak yang belum disetor ke kas negara. Utang pajak naik sebesar Rp 158,68 miliar atau sebesar 100,08% dari sebesar Rp 158,56 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 317,25 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	1.956,03	2.967,23	1.011,20	51,70

LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA



Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya terdiri dari utang dana talangan tanah serta liabilitas pada pihak ketiga. Utang dana talangan tanah adalah utang beberapa entitas anak kepada pemegang saham minoritas.

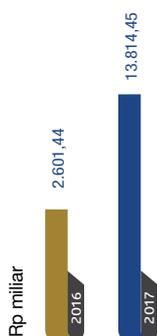
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya meningkat sebesar 51,70% atau Rp 1,01 triliun dari sebesar Rp 1,96 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 2,97 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan utang dana talangan tanah kepada pihak berelasi sejalan dengan progress pembebasan tanah di pembangunan ruas jalan tol baru.

BEBAN AKRUAL

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Beban akrual	2.601,44	13.814,45	11.213,02	431,03

BEBAN AKRUAL



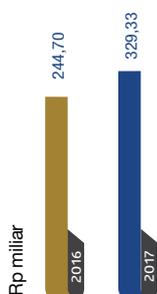
Beban Akrual adalah beban yang sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam akun, yang terdiri dari akrual atas Beban kontraktor dan konsultan, akrual atas beban bunga utang dan dana talangan tanah, dll. Beban akrual Perseroan meningkat sebesar Rp 11,21 triliun atau 431,03% pada tanggal 31 Desember 2017 dari sebesar Rp 2,60 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 13,81 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya beban kontraktor dan konsultan untuk pembangunan ruas-ruas tol baru terkait dengan skema pembayaran secara CPF (*Contractor Prefinancing*).

LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	244,70	329,33	84,63	34,59

LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK



Liabilitas imbalan kerja adalah liabilitas yang timbul dari imbalan kerja (selain pesangon pemutusan hubungan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya, yang akan direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek naik 34,59% dari Rp 244,70 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp 329,33 miliar pada tahun 2017.

UTANG BANK JANGKA PENDEK

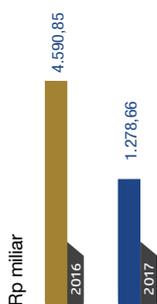
Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Utang bank jangka pendek	4.590,85	1.278,66	(3.312,19)	(72,15)

UTANG BANK JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek merupakan fasilitas pinjaman yang memiliki jangka waktu pembiayaan maksimal selama satu tahun.

Utang bank yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun turun sebesar Rp 3,31 triliun atau 72,15% dari Rp 4,59 triliun pada 31 Desember 2016 menjadi Rp 1,28 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan pelunasan hutang bank dan kebijakan perusahaan untuk mengganti hutang jangka pendek menjadi hutang jangka panjang.



UTANG LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK JANGKA PENDEK

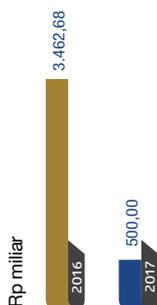
Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	3.462,68	500,00	(2.962,68)	(85,56)

UTANG LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK JANGKA PENDEK

Utang lembaga keuangan jangka pendek merupakan fasilitas pinjaman yang memiliki jangka waktu pembiayaan maksimal selama satu tahun.

Utang lembaga keuangan bukan bank turun sebesar Rp 2,96 triliun atau 85,56% dari Rp 3,46 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 500 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan pelunasan hutang dana talangan tanah kepada lembaga keuangan bukan bank.



LIABILITAS JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Utang bank	342,09	557,80	215,71	63,06
Utang obligasi	1.500,00	1.000,00	(500,00)	(33,33)
Liabilitas pembebasan tanah	2.015,12	1.872,49	(142,63)	(7,08)
Utang sewa pembiayaan	8,80	4,54	(4,26)	(48,40)
Provisi pelapisan jalan tol	332,37	341,34	8,97	2,70
Pendapatan ditangguhkan	-	374,71	374,71	n/a

jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dengan cara merinci jenis kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Utang bank yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun naik sebesar Rp 215,71 miliar atau 63,06% dari Rp 342,09 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 557,80 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini sejalan dengan jadwal pelunasan kredit investasi di anak perusahaan.

Utang obligasi yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun turun sebesar Rp 500 miliar atau sebesar 33,33% dari sebesar Rp 1,50 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1,00 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terjadi akibat pelunasan obligasi seri R yang telah dilunasi pada tahun 2017 dan adanya pelunasan obligasi seri SC yang akan dilunasi pada tahun 2018.

Liabilitas Pembebasan Tanah menurun sebesar Rp 142,63 miliar atau 7,08% dari sebesar Rp 2,02 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1,87 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini diakibatkan oleh pencatatan joint control di PT TMJ.

Utang sewa pembiayaan menurun sebesar 48,40% atau Rp 4,26 miliar dari Rp 8,80 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 4,54 miliar pada 31 Desember 2017.

Provisi pelapisan jalan Perseroan meningkat sebesar Rp 8,97 miliar atau 2,70% dari sebesar Rp 332,37 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 341,34 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas pelapisan jalan tol di masa mendatang.

Pada tahun 2017 terdapat pendapatan ditangguhkan sebesar Rp 374,71 miliar yang mana merupakan efek dari sekuritisasi pendapatan dimasa datang pada ruas Jagorawi yang merupakan hasil dari amortisasi pendapatan Rp 2 Triliun untuk 5 tahun

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Rp miliar

Uraian			2017		Δ	
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%
Liabilitas pajak tangguhan	696,38	3,76	593,67	1,66	(102,71)	(14,75)
Utang kontraktor jangka panjang	394,47	2,13	496,70	1,39	102,23	25,92
Beban akrual jangka panjang	608,80	3,28	2.197,23	6,13	1.588,43	260,91
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun						
Utang bank	11.597,38	62,57	21.160,37	59,05	9.562,98	82,46
Utang lembaga keuangan bukan bank	533,25	2,88	534,05	1,49	0,80	0,15
Utang obligasi	2.993,44	16,15	7.418,39	20,70	4.424,95	147,82
Liabilitas kerjasama operasi	0,82	0,00	0,82	0,00	-	-
Liabilitas pembebasan tanah	320,21	1,73	109,01	0,30	(211,21)	(65,96)
Utang sewa pembiayaan	28,53	0,15	19,04	0,05	(9,49)	(33,27)
Provisi pelapisan jalan tol	221,80	1,20	202,28	0,56	(19,52)	(8,80)
Pendapatan ditangguhkan	112,68	0,61	1.619,13	4,52	1.506,45	1.336,93
Liabilitas jangka panjang lainnya	266,37	1,44	478,96	1,34	212,59	79,81
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	760,35	4,10	1.005,74	2,81	245,39	32,27
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.534,49	100,00	35.835,39	100,00	17.300,90	93,34

Liabilitas Jangka Panjang adalah kewajiban kepada kreditur yang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Liabilitas jangka panjang Perseroan terdiri dari liabilitas pajak tangguhan, utang kontraktor jangka panjang, beban akrual jangka panjang, serta liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun yang terdiri dari utang bank, utang lembaga keuangan bukan bank, utang obligasi, liabilitas kerjasama operasi, liabilitas pembebasan tanah, utang sewa pembiayaan, provisi pelapisan jalan, pendapatan ditangguhkan serta

liabilitas jangka panjang lainnya dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 35,84 triliun, naik sebesar Rp 17,30 triliun atau 93,34% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 18,53 triliun.

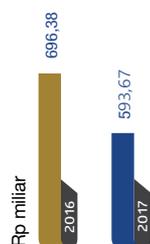
Kenaikan terbesar diakibatkan oleh meningkatnya hutang bank dan penerbitan obligasi untuk pembiayaan jalan tol baru serta kebijakan perusahaan untuk mengganti hutang jangka pendek menjadi hutang jangka panjang

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Liabilitas pajak tangguhan	696,38	593,67	(102,71)	(14,75)

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN



Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya.

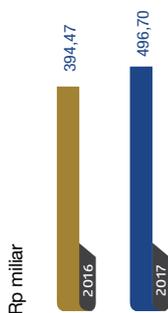
Liabilitas Pajak Tangguhan turun 14,75% dari Rp 696,38 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 593,67 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

UTANG KONTRAKTOR JANGKA PANJANG

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Utang kontraktor jangka panjang	394,47	496,70	102,23	25,92

UTANG KONTRAKTOR JANGKA PANJANG



Utang Kontraktor Jangka Panjang merupakan utang kepada kontraktor, konsultan dan rekanan yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan terkait dengan pembangunan jalan, pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol dan bangunan lain

Utang Kontraktor Jangka Panjang merupakan utang kepada kontraktor, konsultan dan rekanan yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan terkait dengan pembangunan jalan, pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol dan bangunan lain.

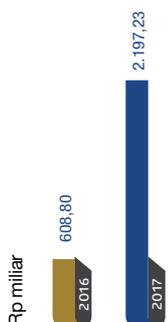
Utang kontraktor jangka panjang naik sebesar Rp 102,23 miliar atau 25,92% dari Rp 394,47 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 496,70 miliar pada 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya utang kontraktor jangka panjang sehubungan dengan aktifnya kegiatan konstruksi jalan tol baru melalui entitas anak.

BEBAN AKRUAL JANGKA PANJANG

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Beban akrual jangka panjang	608,80	2.197,23	1.588,43	260,91

BEBAN AKRUAL JANGKA PANJANG



Beban Akrual jangka panjang adalah beban yang sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam akun, dimana akan terealisasi dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Beban akrual jangka panjang terdiri dari akrual atas beban kontraktor dan konsultan, akrual atas beban bunga utang dana talangan tanah, dll.

Beban Akrual jangka panjang Perseroan meningkat sebesar Rp 1,59 triliun atau 260,91 % pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan terutama karena meningkatnya akrual jangka panjang atas kontraktor dan konsultan untuk pembangunan ruas-ruas jalan tol baru dengan skema pembayaran CPF (*Contractor Prefinancing*).

LIABILITAS JANGKA PANJANG - SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	11.597,38	21.160,37	9.562,98	82,46
Utang lembaga keuangan bukan bank	533,25	534,05	0,80	0,15
Utang obligasi	2.993,44	7.418,39	4.424,95	147,82
Liabilitas kerjasama operasi	0,82	0,82	0	0
Liabilitas pembebasan tanah	320,21	109,01	(211,21)	(65,96)
Utang sewa pembiayaan	28,53	19,04	(9,49)	(33,27)
Provisi pelapisan jalan tol	221,80	202,28	(19,52)	(8,80)
Pendapatan ditangguhkan	112,68	1.619,13	1.506,45	1.336,93



Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun adalah liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan yang disajikan.

Utang bank Perseroan meningkat sebesar Rp 9,56 triliun atau 82,46% dari sebesar Rp 11,60 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 21,16 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan memperoleh pinjaman kredit investasi untuk pembangunan ruas-ruas tol baru

Liabilitas pembebasan tanah turun sebesar Rp 211,21 miliar atau 65,96% dari sebesar Rp 320,21 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 109,01 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan diakibatkan pelunasan pembebasan tanah dana yang menggunakan dana BLU pada beberapa ruas yang telah beroperasi.

Utang lembaga keuangan bukan bank sejumlah Rp 534,05 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

Utang sewa pembiayaan turun sebesar Rp 9,49 miliar atau 33,27% dari sebesar Rp 28,53 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 19,04 miliar tanggal 31 Desember 2017.

Utang obligasi Desember 2017 sebesar Rp 7,42 triliun naik sebesar Rp 4,42 miliar atau 147,82%. Kenaikan ini disebabkan oleh penerbitan global idr bond sebesar Rp. 4 Triliun.

Liabilitas kerja sama operasi sejumlah Rp 0,82 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

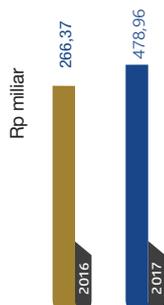
Provisi pelapisan jalan menurun sebesar Rp 19,52 miliar atau 8,80% dari sebesar Rp 221,80 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 202,28 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini diakibatkan oleh perlakuan pencatatan joint control atas PT TMJ.

Pendapatan ditangguhkan naik 1.336,93% atau sebesar Rp1,51 triliun dari sebesar Rp 112,68 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1,62 triliun pada tanggal 31 Desember 2017, kenaikan ini dikarenakan penerbitan Efek Berangun Aset Mandiri JSMR01-Surat Berharga Ha katas Pendapatan Tol Jagorawi sebesar 2 Triliun.

LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

Uraian	2016	2017	Rp miliar	
			Δ	
			Jumlah	%
Liabilitas jangka panjang lainnya	266,37	478,96	212,59	79,81

UTANG KONTRAKTOR JANGKA PANJANG



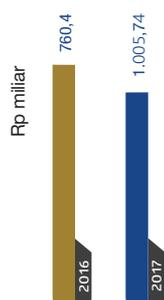
Liabilitas jangka panjang lain adalah liabilitas jangka panjang yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas jangka panjang yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Liabilitas jangka panjang lainnya pada Desember 2017 sebesar Rp 478,96 miliar atau naik sebesar Rp 79,81 miliar dari tahun sebelumnya.

LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Uraian	2016	2017	Rp miliar	
			Δ	
			Jumlah	%
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	760,4	1.005,74	245,39	32,27

LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG



Liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah liabilitas yang timbul dari imbalan kerja (selain pesangon pemutusan hubungan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya, yang akan direalisasikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang naik sebesar Rp 245,39 miliar dari sebesar Rp 760,35 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 1.005,74 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

EKUITAS

Rp miliar

Uraian	2016	2017	Δ	
			Jumlah	%
EKUITAS				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal ditempatkan dan disetor	3.628,94	3.628,94	-	-
Tambahan modal disetor - neto	3.997,09	3.997,09	-	-
Selisih atas transaksi entitas nonpengendali	11,28	8,82	(2,46)	(21,84)
Saldo laba	6.491,37	8.124,83	1.633,46	25,16
Penghasilan komprehensif lain:				
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	3,19	9,16	5,98	187,70
Keuntungan (kerugian) aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(452,73)	(671,18)	(218,45)	48,25
Ekuitas Neto yang Dapat				
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	13.679,13	15.097,65	1.418,53	10,37
Kepentingan Non Pengendali	2.659,71	3.261,79	602,07	22,64
TOTAL EKUITAS	16.338,84	18.359,44	2.020,60	12,37

Standar yang Digunakan:

- PSAK 11: Distribusi asset non kas kepada pemilik
- PSAK 38 : Kombinasi bisnis entitas sepengendali
- PSAK 53 : Pembayaran berbasis saham
- PSAK 65 : Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.

Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas terdiri Modal Saham, Tambahan Modal Disetor, Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Efek Tersedia untuk Dijual, dan Saldo Laba.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 18,36 triliun, meningkat sebesar Rp 2,02 triliun atau 12,37% dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 16,34 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya saldo laba Perseroan sebesar Rp 1,63 triliun dari sebesar Rp 6,49 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 8,12 triliun pada tanggal 31 Desember 2017 serta meningkatnya kepentingan non pengendali akibat setoran modal dari pemegang saham minoritas.

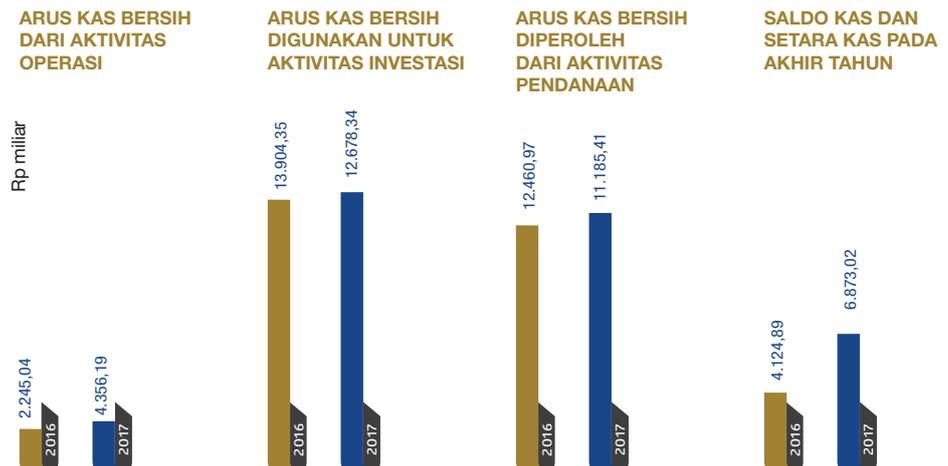
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Rp miliar

Uraian	2016		2017		Δ	%
	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.245,04	54,43	4.356,19	63,38	2.111,14	94,04
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(13.904,35)	(337,08)	(12.678,34)	(184,47)	1.226,01	(8,82)
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	12.460,97	302,09	11.185,41	162,74	(1.275,56)	(10,24)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	4.124,89	100,00	6.873,02	100,00	2.748,13	66,62

Standar yang Digunakan:

- PSAK 23: Pendapatan
- PSAK 30: Sewa
- PSAK 34: Kontrak Kontruksi
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Laporan arus kas adalah komponen laporan keuangan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi pada 2017 mencapai Rp 4,36 triliun atau naik 94,04% dibanding tahun 2016. Peningkatan terbesar disebabkan oleh adanya penerbitan Efek Beragun Aset Mandiri JSMR01-Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi sebesar Rp 2 triliun.

ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi hingga 2017 mencapai Rp 12,36 triliun atau menurun sebesar 8,8% dari aktivitas investasi tahun 2016. Penurunan ini diakibatkan oleh mulai banyaknya kegiatan konstruksi ditahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, sehingga kebutuhan dana pembebasan tanah tidak sebesar tahun 2016 hal sejalan dengan penambahan hak pengusahaan jalan tol dan aset takberwujud lainnya.

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan hingga 2017 mencapai Rp 11,18 triliun akibat penerbitan global IDR bond, Project Bond dan hutang bank, dan hutang lembaga keuangan bukan bank yang digunakan untuk pelunasan, refinancing hutang dan setoran modal pada entitas anak sejalan dengan aktivitas kegiatan pembangunan.

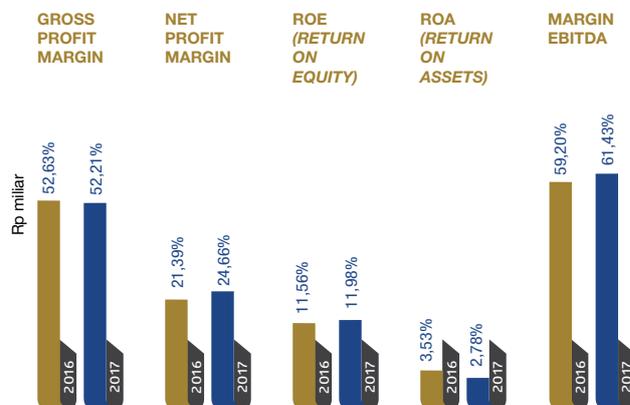
RASIO KEUANGAN

RASIO PROFITABILITAS

Rp miliar

Uraian	2016	2017
Total Aset	53.500,3	79.192,8
Ekuitas	16.338,8	18.359,4
Pendapatan tol dan usaha lainnya	8.832,3	8.921,7
Laba Usaha	4.648,1	4.657,9
Laba Bersih Periode Berjalan	1.889,3	2.200,3
Beban Bunga	1.509,0	1.268,9
EBITDA	5.228,5	5.481,0

Uraian	2016	2017
Gross Profit Margin	52,63%	52,21%
Net Profit Margin	21,39%	24,66%
ROE (Return on Equity)	11,56%	11,98%
ROA (Return on Assets)	3,53%	2,78%
Margin EBITDA	59,20%	61,43%



Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

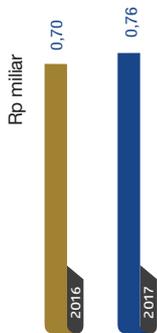
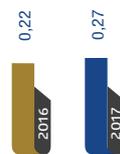
Kemampuan membayar hutang perseroan untuk membayar kewajiban jangka pendek dipengaruhi oleh tingkat likuiditas dan solvabilitas Perseroan tercermin pada rasio-rasio berikut:

RASIO LIKUIDITAS

Kemampuan membayar Utang Jangka Pendek dicerminkan dengan Rasio Likuiditas. Tingkat likuiditas dilihat dari Rasio Lancar (*Current Ratio*) Rasio Kas (*Cash Ratio*).

Rp miliar

Uraian	2016	2017
Kas dan setara kas	4.124,89	6.873,02
Aset Lancar	12.964,98	18.987,07
Liabilitas Jg. Pendek	18.626,99	24.997,94
Rasio:		
Rasio Lancar	0,70	0,76
Rasio Kas	0,22	0,27

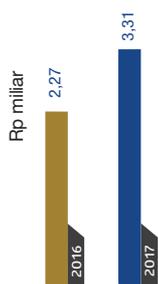
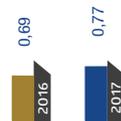
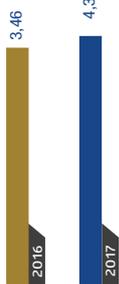
RASIO LANCAR**RASIO KAS**

Dari rasio-rasio Tingkat likuiditas, terlihat bahwa tingkat likuiditas perseroan semakin membaik, Rasio Lancar naik dari 0,70 ditahun 2016 menjadi 0,76 di tahun 2017, sedangkan Rasio Kas meningkat dari 0,22 ditahun 2016 menjadi 0,27 di tahun 2017.

RASIO SOLVABILITAS

Rp miliar

Uraian	2016	2017
Total Aset	53.500,32	79.192,77
Total Liabilitas	37.161,48	60.833,33
Ekuitas	16.338,84	18.359,44
EBTIDA	5.228,50	5.481,00
Beban Bunga	1.509,00	1.268,87
Rasio:		
DER	2,27	3,31
Debt Ratio	0,69	0,77
ICR (<i>Interest Coverage Ratio</i>)	3,46	4,32

DER**DEBT RATIO****ICR (INTEREST
COVERAGE
RATIO)**

Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Pada tahun 2017, rasio Utang terhadap Modal atau *Debt to Equity Ratio* Perseroan mencapai 3,31 kali. Rasio tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 2,27 kali. Sementara EBITDA dibandingkan dengan Beban Bunga atau *Interest Coverage Ratio* Perseroan pada tahun 2017 mencapai 4,32 kali. Hal tersebut meningkat dibandingkan dengan 2016 yang mencapai 3,46 kali. Dengan kondisi tersebut, Perseroan masih berada dalam koridor Pembatasan Keuangan yang dipersyaratkan oleh kreditur dan berada dalam kondisi keuangan yang kuat, dimana rasio DER maksimal 5 kali dan rasio ICR minimal 1,25 kali.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Pada dasarnya sesuai dengan jenis proses bisnisnya Perseroan tidak memiliki piutang dalam kegiatan perusahaan. Jikapun ada piutang Perseroan adalah Piutang atas dana talangan untuk pembebasan lahan. Sehingga, kolektibilitas piutang tergantung pada jadwal pembayaran dari Pemerintah yang mana bersifat pengantian.

STRUKTUR MODAL**Kebijakan Struktur Modal**

Perseroan menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perseroan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri, Perseroan memonitor modal dengan dasar rasio Liabilitas terhadap Ekuitas. Rasio ini dihitung sebagai berikut: Total Liabilitas dibagi Ekuitas. Pada 2017, Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas mencapai 3,31 kali, dengan demikian Perseroan dapat mempertahankan rasio utang terhadap modal sebesar maksimum 5:1 sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh kreditur, dengan struktur modal sebagai berikut:

Struktur Modal Perseroan adalah sebagai berikut:

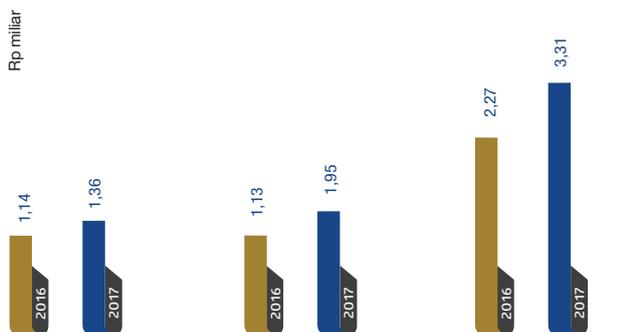
Rp miliar

Uraian	2016	2017
Liabilitas Jangka Pendek	18.626,99	24.997,94
Liabilitas Jangka Panjang	18.534,49	35.835,39
Total Liabilitas	37.161,48	60.833,33
Total Ekuitas	16.338,84	18.359,44
Rasio Liabilitas Jg. Pendek terhadap Ekuitas	1,14	1,36
Rasio Liabilitas Jg. Panjang terhadap Ekuitas	1,13	1,95
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	2,27	3,31

RASIO LIABILITAS JG. PENDEK TERHADAP EKUITAS

RASIO LIABILITAS JG. PANJANG TERHADAP EKUITAS

RASIO LIABILITAS TERHADAP EKUITAS



Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada 2017 mencapai Rp26,78 triliun, dimana Rp23,58 triliun digunakan untuk pengembangan Anak Perusahaan Jalan Tol. Sisanya sebesar Rp4,77 triliun dialokasikan untuk pengembangan di Induk Perusahaan, khususnya di sisi operasional dan peningkatan kapasitas jalan serta Rp259 miliar digunakan untuk pengembang Anak Perusahaan Non-Tol. Berikut adalah rincian dari Belanja Modal Perseroan:

PERBANDINGAN TARGET 2017 DAN REALISASI 2017

Rp triliun

Uraian	Rencana 2017	Realisasi 2017
Capex Induk	6.905,1	4.769,5
Operasional	2.181,2	2.038,2
Pengembangan jalan tol	3.501,4	2.200,2
Investasi Usaha Lain	1.039,8	288,1
Investasi Sarana Penunjang Non Operasional	182,7	243,0

Uraian	Rencana 2017	Realisasi 2017
Capex Anak Perusahaan	22.241,8	23.581,6
Capex Anak Perusahaan Usaha Lain	799,1	259,3
Setoran Modal ke AP Jalan Tol	(2.602,4)	(1.678,6)
Setoran Modal ke AP Usaha Lain	(1.039,7)	(149,0)
Total Capex Konsolidasi	26.304,0	26.782,8

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Di tahun 2017 Perseroan tidak melakukan ikatan yang material atas investasi barang modal.

INFORMASI PERBANDINGAN TARGET & REALISASI SERTA PROYEKSI

PERBANDINGAN TARGET 2017 DAN REALISASI 2017

Rp triliun

Uraian	Rencana 2017	Realisasi 2017
Aset	75,03	79,19
Pendapatan Tol dan Usaha Lain	9,57	8,92
Laba Bersih	2,04	2,20
Belanja Modal	26,30	26,78

TARGET/PROYEKSI YANG INGIN DICAPAI TAHUN DEPAN

Rp triliun

Uraian	Rencana 2018
Aset	±117
Pendapatan Tol dan Usaha Lain	±11
Belanja Modal (cash dan non cash)	±44

Laba Bersih

Perseroan memiliki kebijakan untuk tidak mengungkapkan Laba Bersih.

Struktur Modal

Perseroan memiliki kebijakan untuk tidak mengungkapkan Struktur Modal.

Kebijakan Dividen

Perseroan memiliki kebijakan untuk tidak mengungkapkan Kebijakan Dividen.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Di tahun 2017 Perseroan tidak melakukan ikatan yang material atas investasi barang modal.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca yang memerlukan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

PROSPEK USAHA

Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi

Mencermati upaya Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Perseroan optimis akan memiliki hak konsesi 2.000 km jalan tol dan mengoperasikan 1.497 km jalan tol dengan nilai Aset sebesar Rp 112 triliun. Pada tahun 2018, Perseroan menargetkan akan mengoperasikan jalan tol sepanjang 337 km yang berasal dari Jalan Tol Medan–Kualanamu Tebing Tinggi (Tanjung Morawa–Parbarakan), Bogor Ring Road (Kd.Badak–Yasmin), Batang–Semarang, Semarang–Solo (Salatiga–Kartasura), Solo–Ngawi, Ngawi–Kertosono, Gempol–Pasuruan (Rembang–Pasuruan), Gempol–Pandaan (Pandaan Arah Malang), Pandaan–Malang (Pandaan–Purwodadi, Purwodadi–Lawang, Lawang–Pakis I)

Perseroan optimis bahwa dengan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, volume transaksi akan terus meningkat. Pada tahun 2017, Perseroan menargetkan pertumbuhan volume transaksi sebesar 2%. Pada sisi pelayanan operasional, Perseroan akan terus meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan dengan melanjutkan proses integrasi pengoperasian, di Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak serta telah dilakukan juga Perubahan Sistem Transaksi di Jalan Tol Jagorawi. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan elektronifikasi guna mendukung gerakan non-tunai yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga penetrasi penggunaan transaksi non tunai (e-payment) telah mencapai 100%.

Dari sisi pengembangan usaha lain, seiring dengan semakin bertambahnya panjang jalan tol di Indonesia baik yang dimiliki oleh Perseroan maupun oleh perusahaan jalan tol lain, Perseroan optimis dapat meningkatkan pendapatan usaha jasa layanan pemeliharaan, jasa pengoperasian jalan tol dan pengelolaan properti dan rest area melalui anak perusahaan Perseroan.

Dari sisi pendanaan, Perseroan telah melakukan beberapa inovasi guna memenuhi kebutuhan dana Perseroan untuk membangun ruas-ruas jalan tol baru. Perseroan telah menerbitkan KIK-EBA Pendapatan Tol Jagorawi, Obligasi I (Project Bond) Marga Lingkar Jakarta I serta IDR Global Bond.

Pemasaran dan Pangsa Pasar

Untuk tetap menempati posisi sebagai market leader dalam pengoperasian jalan tol di Indonesia, Perseroan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan panjang jalan tol yang dioperasikan dengan membangun ruas-ruas tol baru yang memiliki kelayakan dari segi finansial. Pengoperasian jalan tol baru yang diusahakan oleh Perseroan harus terkoneksi dengan jalan tol yang telah beroperasi untuk memberikan jaminan adanya volume lalu lintas pada jalan-jalan tol baru. Sebagian besar jalan tol baru yang diusahakan oleh Perseroan saat ini terkoneksi dengan jalan tol eksisting yang telah beroperasi. Jalan Tol Bogor Ring Road terkoneksi dengan Jalan Tol Jagorawi; Jalan Tol Semarang-Solo terkoneksi dengan Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C; Jalan Tol Serpong-Kunciran dan Kunciran-Cengkareng terkoneksi dengan Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Sedyatmo (Bandara); Jalan Tol Gempol-Pasuruan dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto terkoneksi dengan Jalan Tol Surabaya-Gempol; Jalan Tol JORR W2 Utara terkoneksi dengan Jalan Tol JORR; dan Jalan Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi terkoneksi dengan Jalan Tol Belmera yang saat ini juga telah beroperasi. Sampai dengan saat ini Perseroan mengoperasikan 62.5% jalan tol dari seluruh jalan tol yang beroperasi di Indonesia dengan total panjang jalan tol 680 km. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan rencana pengoperasian ± 600 km sampai dengan tahun 2019.

KEBIJAKAN DIVIDEN

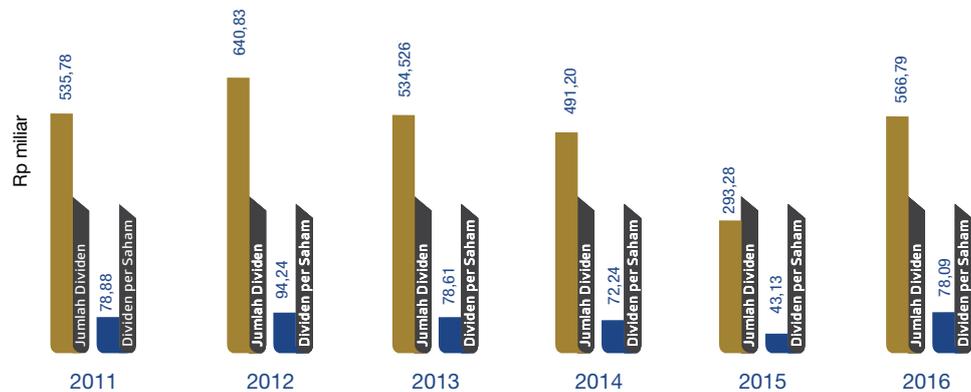
Kebijakan Perseroan adalah memberikan payout dividen minimal 20%, namun untuk hasil pencapaian tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 payout dividen Perseroan sebesar 60%, 60%, 40%, 40%, 30% dan 20%. Perseroan merencanakan tingkat pembayaran dividen yang dapat memberikan hasil atau return yang reguler kepada para Pemegang Saham, namun tetap memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan sebagian besar saldo laba untuk diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan. Besaran payout ratio untuk Dividen diputuskan dalam mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan usulan dari pengurus Perseroan.

Rp miliar

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laba Bersih	1.339,46	1.602,09	1.336,32	1.403,43	1.466,38	1.889,31	2.200,26
Jumlah Dividen	535,78	640,83	534,526	491,20	293,28	566,79	***
Rasio Dividen	40%	40%	40%	35%	20%	30%	***
Waktu Pembayaran	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Dibayar	535,78	640,83	534,526	491,20	293,28	566,79	***
Dividen per Saham (Rupiah penuh)	78,88	94,24	78,61	72,24	43,13	78,09	***
Tanggal Pengumuman Dividen	11 Mei 2012	01 Mei 2013	13 Maret 2014	20 Maret 2015	30 Maret 2016	15 Maret 2017	***
Tanggal Pembayaran Dividen	21 Juni 2012	18 Juni 2013	23 April 2014	17 April 2015	29 April 2016	13 April 2017	***

Catatan :

** Akan ditentukan dalam RUPS tahunan tahun buku 2016



REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realisasi Penggunaan Dana IPO

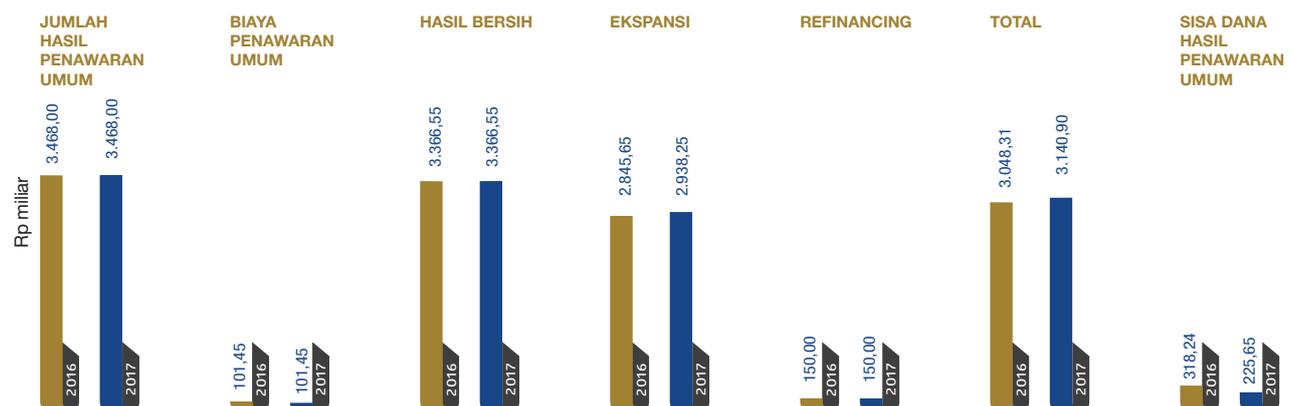
Proceed Dana IPO bersih yang diterima Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp3,36 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2017, Realisasi Penggunaan Dana IPO telah mencapai Rp3,14 triliun. Seiring dengan ketersediaan lahan untuk konstruksi maka Dana IPO yang telah dimanfaatkan adalah 92,29% dari total proceed bersih IPO. Penggunaan Dana IPO tersebut terdiri dari Ekspansi, Refinancing dan Modal Kerja.

Sampai dengan tahun 2017, Ekspansi Perseroan dalam bentuk kontribusi modal Entitas Anak mencapai Rp 2.938,25

triliun yaitu kontribusi modal ke PT Marga Sarana Jabar untuk ruas Jalan Tol Bogor Outer Ring Road sebesar Rp 195,52 miliar, PT Trans Marga Jateng untuk ruas Jalan Tol Semarang-Solo sebesar Rp 1.299,40 miliar, PT Trans Marga Jatim Rp 441,90 miliar, PT Jasamarga Kunciran Cengkareng untuk Jalan Tol Cengkareng-Kunciran sebesar Rp 263,33 miliar, PT Marga Trans Nusantara untuk ruas Jalan Tol Kunciran-Serpong sebesar Rp 194,10 miliar, PT Jasamarga Surabaya Mojokerto untuk ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto sebesar Rp 394,00 miliar dan PT Jasamarga Kualanamu Tol untuk ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Rp 220,00 miliar. Penggunaan Refinancing digunakan untuk melunasi Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000 sebesar Rp 150,00 miliar. Sementara Penggunaan Dana untuk Modal Kerja sebesar Rp 52,65 miliar.

Rp miliar

Uraian	2016	2017
Jumlah Hasil Penawaran Umum	3.468,00	3.468,00
Biaya Penawaran Umum	101,45	101,45
Hasil Bersih	3.366,55	3.366,55
Ekspansi	2.845,65	2.938,25
KONTRIBUSI MODAL ENTITAS ANAK		
PT Marga Sarana Jabar, konstruksi Jalan Tol Bogor Ring Road	195,52	195,52
PT Trans Marga Jateng, konstruksi Jalan Tol Semarang-Solo	1.229,40	1.229,40
PT Trans Marga Jatim, konstruksi Jalan Tol Gempol-Pasuruan	441,90	441,90
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng, konstruksi Jalan Tol Cengkareng-Kunciran	204,55	263,33
PT Marga Trans Nusantara, konstruksi Jalan Tol Kunciran-Serpong	160,29	194,10
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto, konstruksi Jalan Tol Surabaya-Mojokerto	394,00	394,00
PT Jasamarga Kualanamu Tol, konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	220,00	220,00
Refinancing	150,00	150,00
Pembayaran Pelunasan Pokok Obligasi Seri M	150,00	150,00
Modal Kerja	52,65	52,65
Total	3.048,31	3.140,90
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum	318,24	225,65



Realisasi Penggunaan Dana Obligasi

Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa Bunga Pada tahun 2010.

Perseroan menerbitkan Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp 1 triliun dan Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa Bunga sebesar Rp 385,03 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2016 dana Obligasi tersebut telah dimanfaatkan sebesar 99,6% dari Hasil Bersih Obligasi sebesar Rp 1,38 triliun. Penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum Obligasi digunakan untuk Ekspansi, *Refinancing* dan Modal Kerja.

Realisasi dana Obligasi dilakukan untuk ekspansi di bidang Properti sebesar Rp 280 miliar untuk pengembangan Tempat Istirahat & Pelayanan (TIP) dan bidang Engineering sebesar Rp 15 miliar untuk Pemeliharaan Jalan Tol dan Konstruksi lainnya.

Penggunaan Refinancing untuk pelunasan Obligasi Seri O tahun 2002 Sebesar Rp 650,00 miliar dan pelunasan Kredit Investasi PT BCA, Tbk sebesar Rp 400,00 miliar. Sedangkan penggunaan Modal Kerja adalah sebesar Rp 29,41 miliar.

Uraian	2016	2017
Jumlah Hasil Penawaran Umum	1.385,03	1.385,03
Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap	1.000,00	1.000,00
Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa Bunga	385,03	385,03
Biaya Penawaran Umum	5,62	5,62
Hasil Bersih	1.379,41	1.379,41
Ekspansi	295,00	295,00
Bidang Properti		
Pengembangan Kawasan Koridor Jalan Tol	255,00	255,00
Pengembangan Tempat Istirahat & Pelayanan	25,00	25,00
Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi	-	-
Bidang Engineering - Pemeliharaan Jalan Tol & Konstruksi Lainnya	15,00	15,00
Refinancing	1.050,00	1.050,00
Pelunasan Obligasi Jasa Marga Seri O Tahun 2002	650,00	650,00
Percepatan Pelunasan Kredit Investasi PT BCA	400,00	400,00
Modal Kerja	29,41	29,41
Total	1.374,41	1.374,41
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum	5,00	5,00

Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Pada tahun 2016 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah dana yang diterima sebesar Rp 1,78 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang (50%), Jalan Tol Pandaan-Malang (30%) dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (20%). Sampai dengan akhir tahun 2017, dana tersebut telah digunakan sebesar Rp 1,3 triliun dengan rincian Rp 625 miliar digunakan untuk proyek Jalan Tol Semarang-Batang, Rp 375 miliar digunakan untuk proyek Jalan Tol Pandaan-Malang dan Rp301,2 miliar digunakan untuk proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated.

Uraian	2016	2017
Jumlah Hasil Penawaran Umum	1,785.70	1.785,70
Biaya Penawaran Umum	13.57	13,57
Hasil Bersih	1,772.13	1.772,13
Ekspansi	6.00	1.301,19
Jalan Tol Semarang-Batang		624,99
Jalan Tol Pandaan-Malang	6.00	375,00
Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated	-	301,20
Total	6.00	1.301,19
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum	1,766.13	470,94

INFORMASI MATERIAL

Peningkatan Material dari Pendapatan Bersih Terkait dengan Volume Penjualan atau Jasa Baru

Peningkatan Pendapatan Bersih Perseroan disebabkan oleh beroperasinya ruas tol baru di Entitas Anak yang telah mulai menyumbangkan Pendapatan dan kenaikan tarif tol pada triwulan IV tahun 2017. Selain itu, kenaikan volume lalu lintas transaksi yang melalui jalan tol perseroan turut menjadi faktor penyebab lainnya.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan restrukturisasi utang/modal

Di tahun 2017 Perseroan tidak memiliki Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi dan Akuisisi.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Di Tahun 2017 Perseroan tidak memiliki Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi.

Perubahan Peraturan Perundang Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan

Tidak terdapat perubahan Kebijakan akuntansi yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Perseroan

Tidak terdapat perubahan Kebijakan akuntansi yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

Kejadian yang Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat Kejadian yang Luar Biasa dan Jarang Terjadi yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

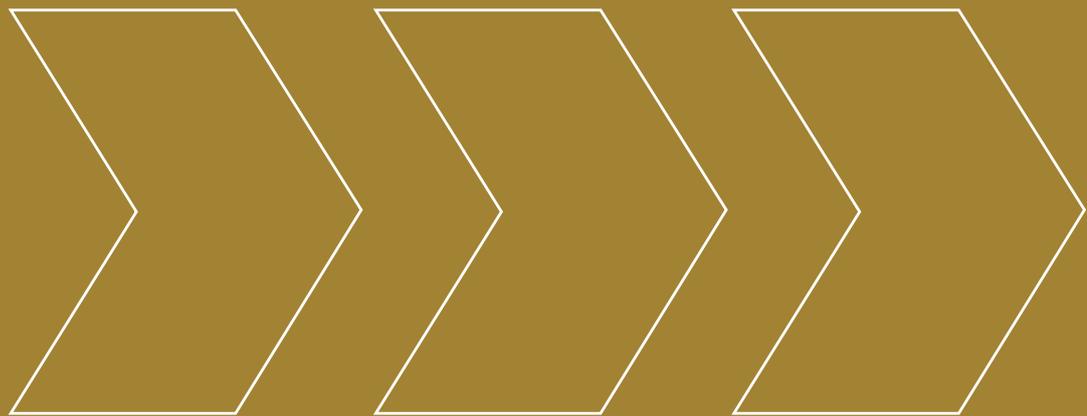


Jalan Tol Ngawi-Kertosono memiliki total panjang 49,50 Km yang tergabung ke dalam proyek Jalan Tol Trans Jawa.



07

KINERJA USAHA
PENGEMBANGAN
JALAN TOL



Hingga akhir tahun 2019, Jasa Marga akan mengoperasikan total 1.260 km jalan tol dengan mengejar pembangunan 600 km jalan tol baru dalam waktu tiga tahun.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Jasa Marga berhasil memiliki total konsesi pengelolaan jalan tol sepanjang 1.497 km dan mengoperasikan jalan tol sepanjang 680 km.

Tidak hanya di Pulau Jawa, dalam proses bisnisnya Jasa Marga juga telah melakukan ekspansi ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Hal ini menegaskan komitmen Jasa Marga untuk terus membangun jalan tol di Indonesia, guna meningkatkan konektivitas dan membangun pertumbuhan ekonomi.

JARINGAN JALAN TOL JASA MARGA



JABODETABEK DAN JAWA BARAT

- Jagorawi : 59,00 Km
- Jakarta - Tangerang : 33,00 Km
- Ulujami- Pondok Aren : 5,55 Km
- Jakarta Inner Ring Road : 23,55 Km
- Prof Dr. Ir. Sedyatmo : 14,30 Km
- Jakarta - Cikampek : 83,00 Km
- Jakarta Outer Ring Road : 28,3 Km
- Cikampek - Padalarang : 58,50 Km
- Padalarang - Cileunyi : 64,40 Km
- Palikanci : 26,30 Km
- Bogor Outer Ring Road : 11,00 Km
- Cengkareng - Kunciran : 14,19 Km
- Kunciran - Serpong : 11,19 Km
- Cinere - Serpong : 10,14 Km
- Jakarta-Cikampek II Elevated: 36,40 Km
- Jakarta-Cikampek II Selatan : 64,00 Km

JAWA TENGAH

- Semarang : 24,75 Km
- Semarang - Solo : 72,64 Km
- Solo - Ngawi : 90,43 Km
- Ngawi - Kertosono : 87,02 Km
- Batang - Semarang : 75,00 Km

JAWA TIMUR

- Surabaya - Gempol : 49,00 Km
- Surabaya - Mojokerto : 36,27 Km
- Gempol - Pasuruan : 34,15 Km
- Gempol - Pandaan : 13,61 Km
- Pandaan - Malang : 37,62 Km
- Probolinggo-Banyuwangi : 172,91 Km

SUMATERA UTARA

- Belmera : 42,70 Km
- Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi : 61,70 Km

KALIMANTAN TIMUR

- Balikpapan-Samarinda : 99,35 Km

SULAWESI UTARA

- Manado-Bitung : 39,90 Km

BALI

- Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa : 10,00 Km

- Telah Beroperasi
- Beroperasi sebagian dan tahap konstruksi
- Tahap pembebasan lahan dan konstruksi

KONSESI-KONSESI YANG DIMILIKI PERSEROAN

Saat ini Jasa Marga memiliki hak konsesi atas 33 ruas jalan tol dengan masa konsesi yang berkisar antara 35 sampai 45 tahun. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2017, sisa masa konsesi yang dimiliki oleh Perseroan masih panjang.

Sampai dengan akhir tahun 2017, status dan masa konsesi ruas-ruas jalan tol Perseroan adalah sebagai berikut:

TABEL KONSESI YANG DIMILIKI JASA MARGA

Konsesi	Operator	Panjang (km)	Tahun Mulai Konsesi	Masa Konsesi (tahun)	Penandatanganan PPJT (tgl-bln-thn)	Status
1. Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi)	Cabang Jagorawi	59,00	2005	40	07-07-2006	Beroperasi Sejak 1978
2. Jakarta-Tangerang	Cabang Cawang-Tangerang-Cengkareng	33,00	2005	40	07-07-2006	Beroperasi Sejak 1984
3. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	Cabang Cawang-Tangerang-Cengkareng	14,30	2005	40	07-07-2006	Beroperasi Sejak 1984
4. Jakarta Inner Ring Road (JIRR)	Cabang Cawang-Tangerang-Cengkareng	23,55	2005	40	07-07-2006	Beroperasi Sejak 1987
5. Jakarta-Cikampek	Cabang Jakarta-Cikampek	83,00	2005	40	07-07-2006	Beroperasi Sejak 1988
6. Padaleunyi (Padalarang-Cileunyi)	Cabang Purbaleunyi	64,40	2005	40	07-07-2006	Beroperasi Sejak 1990
7. Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang)	Cabang Purbaleunyi	58,50	2005	40	07-07-2006	Beroperasi Sejak 2003
8. Palikanci (Palimanan-Kanci)	Cabang Palikanci	26,30	2005	40	07-07-2006	Beroperasi Sejak 1998
9. Semarang	Cabang Semarang	24,75	2005	40	07-07-2006	Beroperasi Sejak 1983
10. Surabaya-Gempol	Cabang Surabaya-Gempol	49,00	2005	40	07-07-2006	Beroperasi Sejak 1986
11. Belmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa)	Cabang Belmera	42,70	2005	40	07-07-2006	Beroperasi Sejak 1986
12. Jakarta Outer Ring Road (JORR) *	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	28,27	2005	40	07-07-2006	Beroperasi Sejak 1991
13. Ulujami-Pondok Aren	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	5,55	2005	40	07-07-2006	Beroperasi Sejak 2001
14. JORR W2 Utara	PT Marga Lingkar Jakarta	7,70	2005	40	07-06-2006	Beroperasi sejak 2014
15. Bogor Outer Ring Road (BORR)	PT Marga Sarana Jabar	11,95	2009	45	29-05-2006	Beroperasi sejak 2009
16. Cengkareng-Kunciran	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	14,19	2017	35	02-03-2009	Pembebasan lahan dan konstruksi

Konsesi	Operator	Panjang (km)	Tahun Mulai Konsesi	Masa Konsesi (tahun)	Penandatanganan PPJT (tgl-bln-thn)	Status
17. Kunciran-Serpong	PT Marga Trans Nusantara	11,19	2017	35	22-09-2008	Pembebasan lahan dan konstruksi
18. Semarang-Solo	PT Trans Marga Jateng	72,64	2010	45	15-12-2006	Beroperasi sejak 2011
19. Surabaya-Mojokerto	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	36,27	2007	42	06-04-2006	Beroperasi sejak 2011
20. Gempol-Pasuruan	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	34,20	2013	45	29-05-2006	Beoperasi sejak 2017
21. Gempol-Pandaan	PT Jasamarga Pandaan Tol	13,61	2012	35	19-12-2006	Beroperasi sejak 2015
22. Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	PT Jasamarga Bali Tol	9,70	2012	45	16-12-2011	Beroperasi sejak 2013
23. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	61,70	2015	40	05-01-2015	Beroperasi sejak 2017
24. Solo-Ngawi	PT Jasamarga Solo Ngawi	90,43	2015	40	28-06-2011	Pembebasan lahan dan konstruksi
25. Ngawi-Kertosono	PT Ngawi Kertosono Jaya	87,02	2015	35	28-06-2011	Pembebasan lahan dan konstruksi
26. Cinere-Serpong	PT Cinere Serpong Jaya	10,14	2017	35	28-06-2011	Pembebasan lahan dan konstuksi
27. Batang-Semarang	PT Jasamarga Semarang Batang	75,00	2017	45	27-04-2016	Pembebasan lahan dan konstruksi
28. Balikpapan-Samarinda	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	99,35	2017	40	09-06-2016	Pembebasan lahan dan konstuksi
29. Manado-Bitung	PT Jasamarga Manado Bitung	39,90	2017	40	09-06-2016	Pembebasan lahan dan konstuksi
30. Pandaan-Malang	PT Jasamarga Pandaan Malang	37,62	2017	35	09-06-2016	Pembebasan lahan dan konstuksi
31. Jakarta-Cikampek II Elevated	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	36,40	2017	45	05-12-2016	Konstruksi
32. Probolinggo-Banyuwangi	PT Jasamarga Probolinggo	172,91	2018	35	29-12-2017	Pembebasan Lahan
33. Jakarta-Cikampek II Selatan	PT Jasamarga Japek Selatan	64,00	2018	35	29-12-2017	Pembebasan Lahan

Keterangan:

*) Tidak termasuk JORR Seksi S

PENGEMBANGAN USAHA JALAN TOL

PROSPEK INDUSTRI JALAN TOL

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menargetkan pencapaian pertumbuhan ekonomi di angka 7,1% dan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas nasional dengan menargetkan pembangunan 1.000 km jalan tol baru sampai dengan tahun 2019, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memangkas waktu distribusi barang, menurunkan *logistic cost*, dan mengendalikan inflasi di kisaran 3,5-4,5%.

Jalan tol merupakan salah satu proyek yang menjadi prioritas Pemerintah dengan memberikan fasilitas jaminan politik, perizinan, dan finansial yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Potensi pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol masih sangat besar dalam jangka panjang. Sebagai gambaran akan potensi tersebut adalah kebutuhan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera sepanjang ±2.700 km dengan nilai investasi ± Rp 375 triliun, demikian pula kebutuhan pembangunan jalan tol di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Di samping potensi yang besar tersebut, Perseroan juga optimis dengan komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, yang ditunjukkan melalui peran aktif Pemerintah dalam mendorong percepatan pembebasan lahan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menciptakan lingkungan yang mendukung investasi secara umum dan jalan tol khususnya.

JASA MARGA: CONNECTING INDONESIA



Komitmen Jasa Marga untuk melakukan ekspansi infrastruktur, khususnya jalan tol, ke seluruh wilayah Indonesia sejalan dengan potensi yang masih sangat besar dalam jangka panjang. Sebagai gambaran akan potensi tersebut adalah kebutuhan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera sepanjang ±2.700 km dengan nilai investasi ± Rp 375 triliun, demikian pula kebutuhan pembangunan jalan tol di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Selain itu, Perseroan tengah melakukan konstruksi Jalan Tol Batang-Semarang (75,00 km), Jalan Tol Solo-Ngawi (90,10 km), Jalan Tol Ngawi-Kertosono (87,02) dan Jalan Tol Gempol-Pasuruan (34,15 km) dimana jalan tol tersebut ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2018.

PENGEMBANGAN USAHA JALAN TOL JASA MARGA

Target Pengoperasian 600 KM Jalan Tol Baru Dalam Waktu 3 Tahun

Tahun 2017 menandai perkembangan terbesar Perseroan dalam melakukan percepatan pembangunan jalan tol baru, dengan target akhir tahun 2019 Perseroan akan mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.260 km. Hal ini disebabkan sejak tahun 1978 hingga tahun 2016 atau dalam waktu 38 tahun, Jasa Marga baru mengoperasikan sejumlah ±600 km jalan tol di Indonesia. Dengan target jalan tol operasi 1.260 km di tahun 2019, Jasa Marga optimis dan berkomitmen untuk menambah ±600 km jalan tol baru dalam waktu 3 tahun dengan menyelesaikan pembangunan 200 km jalan tol setiap tahunnya.

Demi percepatan, penyempurnaan peraturan dan kebijakan untuk dana talangan pembebasan lahan memang terus dilakukan. Seperti melalui penandatanganan nota kesepahaman mengenai Percepatan Pembayaran Penggantian Dana Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ditjen Bina Marga – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ditjen Pengadaan Tanah – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk percepatan pembiayaan dana talangan jalan tol yang mulai dilakukan sejak Tahun 2016.

Nota kesepahaman ini berisi mekanisme kerja dalam rangka percepatan pembayaran dan tanggung jawab masing-masing pihak penandatanganan. Ini bertujuan untuk mempercepat proses penggantian dana oleh LMAN kepada badan usaha yang telah terlebih dahulu membayarkan uang ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol. Hal ini sebagaimana diatur dalam BAB V Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan PSN.

Selain itu, dalam rangka mendukung rencana pemerintah dan untuk meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka panjang, Perseroan juga menargetkan untuk menambah hak konsesi baru sepanjang ±800 km dari 1.260 km yang dimiliki Perseroan pada akhir tahun 2016, sehingga pada akhir tahun 2019, Perseroan akan memiliki ±2.000 km hak konsesi jalan tol.

Pada tahun 2017 Perseroan berhasil menambah panjang jalan tol operasi dengan mengoperasikan ruas-ruas baru, sehingga pada akhir tahun 2017 total jalan tol operasi Perseroan menjadi 680 km.

TABEL PENGOPERASIAN JALAN TOL JASA MARGA TAHUN 2017

No.	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	Operator
1	Gempol-Pasuruan Seksi Gempol Rembang	13,90	PT Trans Jatim Pasuruan
2	Semarang-Solo Seksi Bawen Salatiga	17,60	PT Trans Marga Jateng
3	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi Kualanamu-Sei Rampah	41,69	PT Jasamarga Kualanamu Tol
4	Surabaya-Mojokerto Seksi Sepanjang-Krian	15,50	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
TOTAL		88,69	

Jasa Marga terus berupaya untuk meningkatkan hak konsesi untuk meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka panjang. Untuk itu, Jasa Marga berpartisipasi dalam proyek jalan tol potensial baik melalui tender, akuisisi, maupun *unsolicited*.

Pada tahun 2017, Perseroan telah berhasil menambah hak konsesi 2 (dua) ruas jalan tol baru sepanjang 237 km sehingga pada akhir tahun 2017 Perseroan telah memiliki secara total 1.497 km.

Pada tahun 2017 Perseroan juga secara bertahap melakukan aktivitas pembebasan lahan dan konstruksi jalan tol baru melalui anak perusahaan Perseroan dengan total nilai penyerapan investasi pembangunan jalan tol baru di anak perusahaan pada tahun 2017 sebesar Rp 23 triliun.

TABEL SERAPAN INVESTASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BARU TAHUN 2017

(Rp miliar)

No.	Anak Perusahaan Jalan Tol	Serapan Belanja Modal
1	PT Marga Lingkar Jakarta	12.43
2	PT Marga Sarana Jabar	786.30
3	PT Marga Trans Nusantara	641.46
4	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	174.93
5	PT Trans Marga Jateng	695.46
6	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	524.45
7	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	1,428.12
8	PT Jasamarga Pandaan Tol	45.46
9	PT Jasa Marga Bali Tol	10.67
10	PT Jasamarga Kualanamu Tol	1,599.82
11	PT Jasamarga Solo Ngawi	3,005.87
12	PT Ngawi Kertosono Jaya	2,132.08
13	PT Cinere Serpong Jaya	275.24
14	PT Jasamarga Semarang Batang	5,339.45
15	PT Jasamarga Pandaan Malang	1,566.03
16	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	2,537.55
17	PT Jasamarga Manado Bitung	411.47
18	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	2,394.79
TOTAL		23,581.58

Jasa Marga terus berupaya meningkatkan panjang jalan tol konsesinya dengan melakukan investasi pada proyek jalan tol sepanjang 954 km dengan nilai total investasi sebesar Rp 133 triliun yang saat ini telah beroperasi sebagian, serta dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

TABEL STATUS PROYEK JALAN TOL BARU

No.	Ruas	Panjang (km)	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Keterangan
Status Beroperasi Sebagian				
1	Bogor Outer Ring Road	11,95	0,20	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Sentul-Kedung Halang (3,85 km) beroperasi sejak 23 November 2009 Seksi Kedung Halang-Kedung Badak (1,95 km) beroperasi sejak 04 Juni 2014
2	Gempol-Pasuruan	34,15	4,03	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Gempol Bangil (6,8 Km) beroperasi sejak 3 Agustus 2017 Seksi Bangil-Rembang (7,10 km) beroperasi sejak 13 April 2017
3	Semarang-Solo	72,64	7,48	Seksi Bawen-Salatiga sepanjang (17,50 km) beroperasi sejak 25 September 2017
4	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	61,7	4,96	Seksi Kualanamu-Sei Rampah (42 Km) sejak 20 Oktober 2017
5	Surabaya-Mojokerto	36,27	4,98	Seksi Sepanjang-Krian sepanjang (15,50 km) beroperasi sejak 19 Desember 2017
Status Konstruksi dan Pembebasan Lahan				
6	Solo-Ngawi	90,43	11,34	
7	Ngawi-Kertosono	87,02	3,83	
8	Semarang-Batang	75	11,05	
9	Pandaan-Malang	37,62	5,97	
10	Jakarta Cikampek <i>Elevated</i>	36,4	16,23	
11	Cengkareng-Kunciran	14,19	5,01	
12	Kunciran-Serpong	11,19	3,49	
13	Balikpapan-Samarinda	99,35	9,97	
14	Manado-Bitung	39,9	5,12	
15	Serpong-Cinere	10,14	2,22	
16	Probolinggo-Banyuwangi	172,91	23,39	
17	Jakarta-Cikampek II Selatan	64,00	14,69	
TOTAL		954,86	133,96	

Berikut adalah perkembangan proyek jalan tol baru Perseroan hingga akhir tahun 2017:

PULAU SUMATERA

Perseroan terus melakukan ekspansi dengan turut berinvestasi dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Saat ini Perseroan sedang melakukan konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi yang mempunyai peranan penting dalam memperlancar arus distribusi barang jasa yang berdampak pada sektor riil di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara, dimana jalan tol tersebut ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2019.



Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (61,7 km)

JALAN TOL MEDAN-KUALANAMU-TEBING TINGGI (PT JASAMARGA KUALANAMU TOL)

Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dengan panjang 61,70 km dioperasikan oleh PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT). Jalan tol ini merupakan jalan tol kedua yang berada di Provinsi Sumatera Utara setelah Jalan Tol Belmera yang menghubungkan Belawan-Medan-Tanjung Morawa. Jalan Tol ini akan menghubungkan Kota Medan dengan bandara Kualanamu dan Tebing Tinggi. Diharapkan, keberadaan jalan tol yang ditargetkan untuk beroperasi penuh pada tahun 2018

akan memperluas pergerakan ekonomi Sumatera Utara ke daerah sekitar dan tidak hanya terpusat di kota Medan.

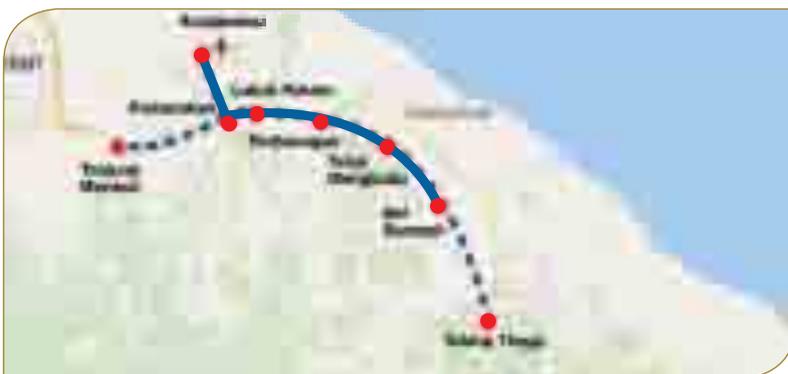
Jalan tol ini beroperasi pada tahun 2017 untuk beberapa seksi, yaitu seksi 2 Perbarakan-Kualanamu, seksi 3 Perbarakan-Lubuk Pakam, seksi 4 Lubuk pakam-Perbaungan, seksi 5 Perbaungan-Teluk Mengkudu, dan seksi 6 Teluk mengkudu-Sei Rampah.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL MEDAN-KUALANAMU-TEBING TINGGI

Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2016	2017	2016	2017
Seksi 1 dan 2 Tanjung Morawa-Perbarakan-Kualanamu	17,8	92,00	100	28,70	98,48
Seksi 3 Perbarakan-Lubuk Pakam	8,85	99,89	100	99,30	100
Seksi 4 Lubuk Pakam-Perbaungan	12,39	97,29	100	66,00	100
Seksi 5 Perbaungan-Teluk Mengkudu	9,57	99,32	100	52,07	100
Seksi 6 Teluk Mengkudu-Sei Rampah	7,83	88,45 *	100	53,05	100
Seksi 7 Sei Rampah-Tebing Tinggi	9,26	35,77 *	76,99	-	9,61

Keterangan:

* Progres pembebasan tanah setelah ditambahkan dengan luasan tanah yang belum terakomodir dalam Final Engineering Design (FED).



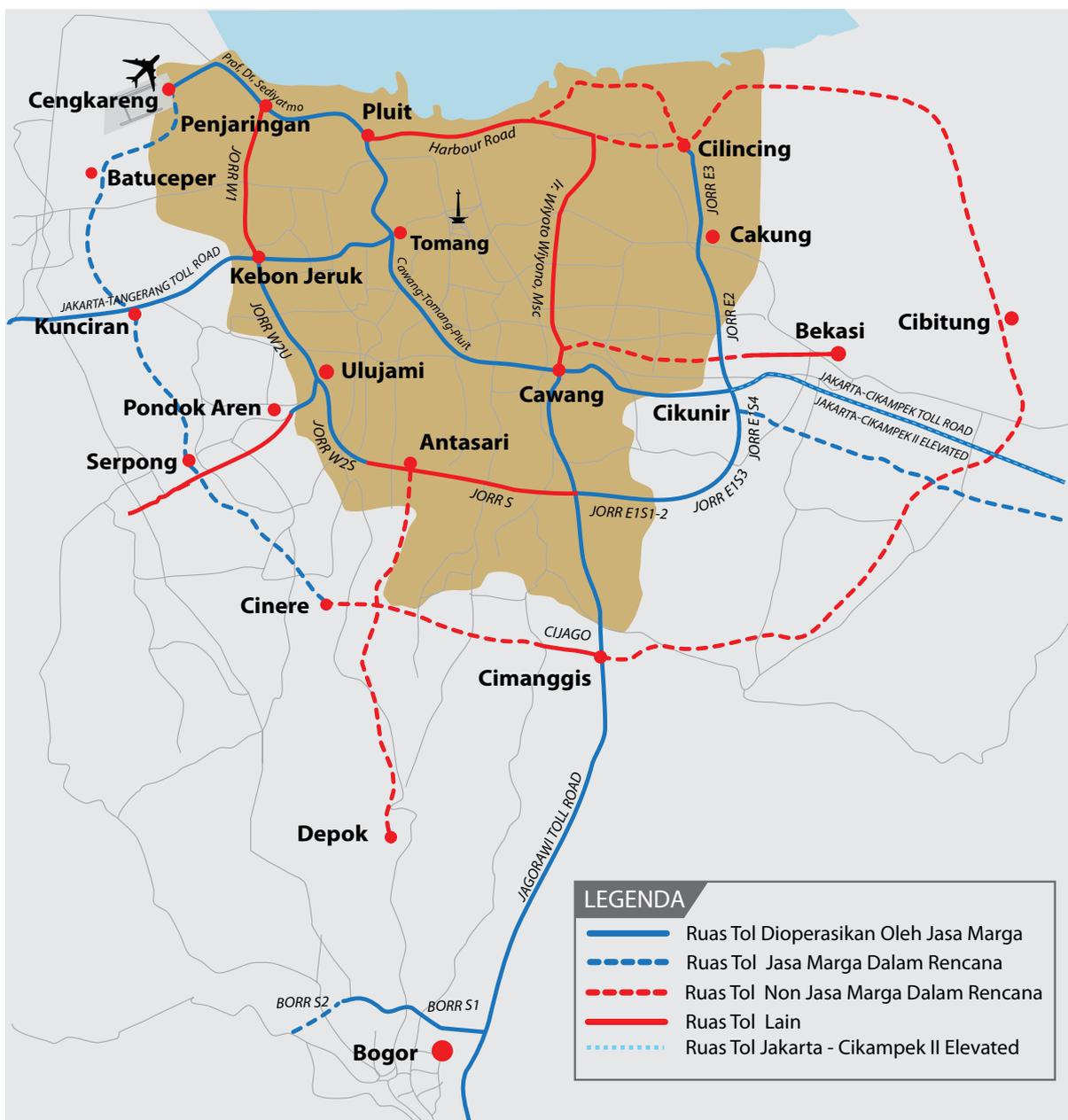
WILAYAH JABOTABEK

Di wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) merupakan ruas-ruas jalan tol milik Jasa Marga dengan jumlah lalu lintas tinggi, Jasa Marga selaku operator jalan tol terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanannya.

Selain peningkatan kualitas pelayanan, Jasa Marga juga turut mengurangi kepadatan di jalan tol wilayah Jabotabek dengan

meningkatkan kapasitas lajur seperti pelebaran jalan yang dilakukan di Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo.

Selain itu, Jasa Marga saat ini juga tengah membangun Jakarta Cikampek II (Elevated) (36.40 km) serta memenangkan konsesi atas Jakarta-Cikampek II Selatan (64,00 km) yang juga menjadi salah satu upaya mengurangi kepadatan ruas Jakarta-Cikampek eksisting.



**JALAN TOL CENGKARENG-KUNCIRAN
(PT JASAMARGA KUNCIRAN CENGKARENG)**

Jalan Tol Cengkareng-Kunciran dengan panjang 14,19 km dioperasikan oleh PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC).

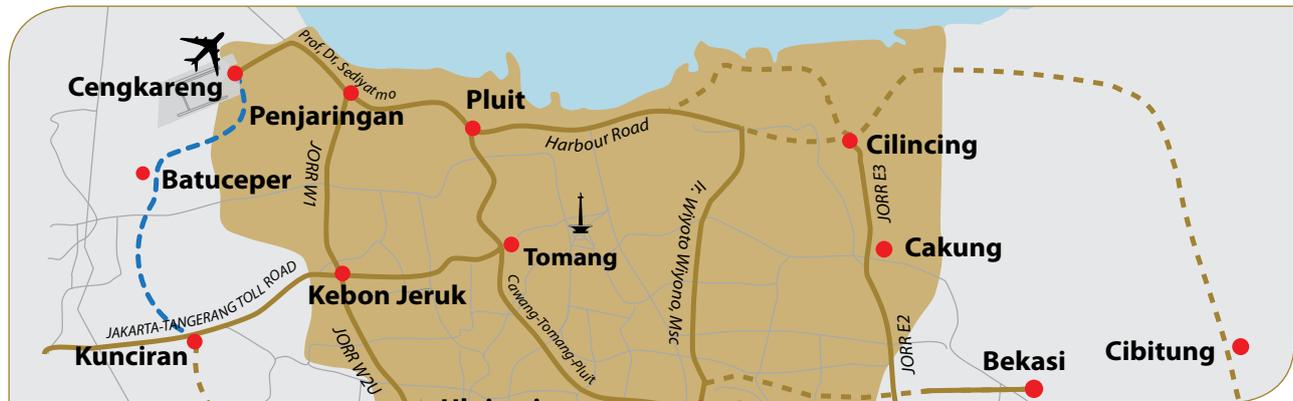
Jalan Tol Kunciran-Cengkareng merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 yang berlokasi di wilayah Barat Kota Jakarta. Jalan tol ini diharapkan dapat menjadi solusi

baru untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang terjadi di Ibu Kota Jakarta.

Sampai dengan tahun 2017, Jalan Tol Cengkareng-Kunciran telah memasuki tahap konstruksi yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2018.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL CENGKARENG-KUNCIRAN

Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2016	2017	2016	2017
Cengkareng-Kunciran	14,19	23,06	32,39	-	5,94



JALAN TOL KUNCIRAN-SERPONG (PT MARGA TRANS NUSANTARA)

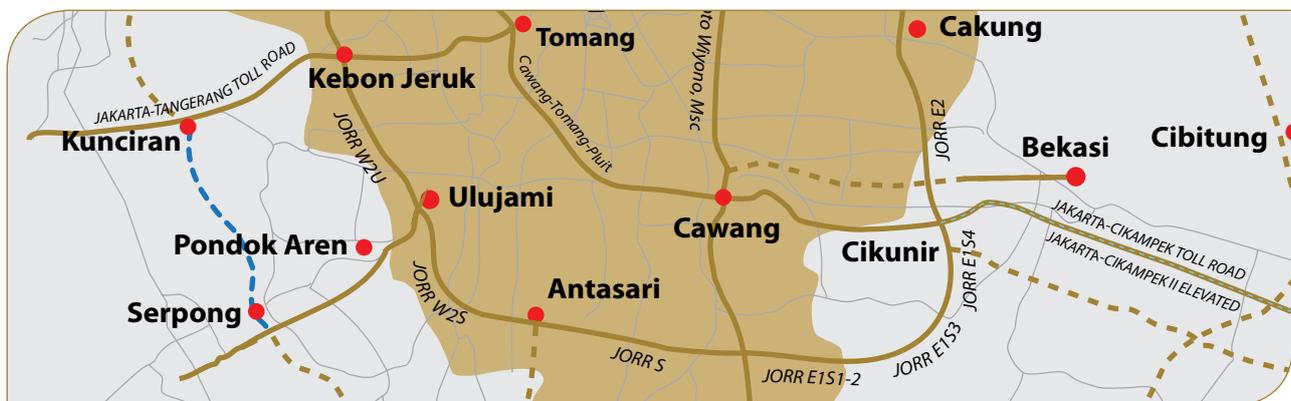
Jalan Tol Kunciran-Serpong dengan panjang 11,20 km dioperasikan oleh PT Marga Trans Nusantara (MTN). Jalan Tol Kunciran-Serpong merupakan bagian dari jalan tol yang membentang di wilayah Barat Kota Jakarta. Keberadaan tol ini bersama dengan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng

diharapkan dapat menambah keleluasaan distribusi barang dan pergerakan ekonomi dari wilayah Jakarta ke wilayah sekitarnya.

Sampai dengan tahun 2017, Jalan Tol Kunciran-Serpong telah memasuki tahap konstruksi yang ditargetkan untuk beroperasi pada tahun 2018.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL KUNCIRAN-SERPONG

Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2016	2017	2016	2017
Kunciran-Parigi	6,90	71,25	94,11	-	24,58
Parigi-Serpong	4,30	71,25	91,34	-	35,91



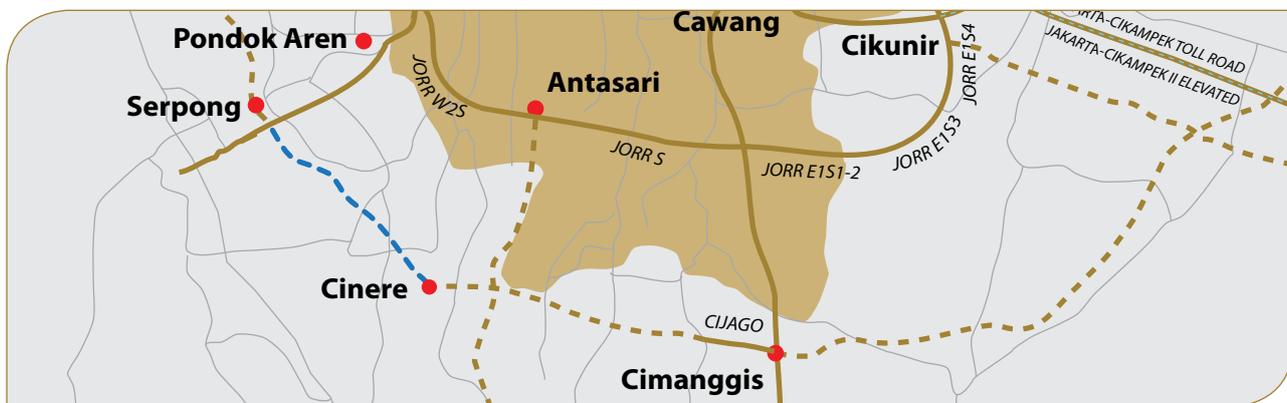
**JALAN TOL SERPONG-CINERE
(PT CINERE SERPONG JAYA)**

Jalan Tol Serpong-Cinere dengan panjang 10,14 km dioperasikan oleh PT Cinere Sepong Jaya (CSJ). Jalan Tol Serpong-Cinere merupakan salah satu kunci konektivitas transportasi Jakarta Outer Ring Road (JORR).

Dengan keberadaan Jalan Tol Cinere-Serpong, diharapkan dapat menambah mobilitas warga Jakarta dan menumbuhkan ekonomi di wilayah-wilayah pendukung. Sampai dengan tahun 2017, Jalan Tol Serpong-Cinere masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL SERPONG-CINERE

	Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
			2016	2017	2016	2017
Seksi 1	Serpong-Pamulang	6,73	30,40	60,62	-	7,04
Seksi 2	Pamulang-Cinere	3,41	-	-	-	-



JALAN TOL BOGOR OUTER RING ROAD (PT MARGA SARANA JABAR)

Jalan Tol Lingkar Luar Bogor atau yang lebih dikenal dengan Bogor Outer Ring Road (BORR) dengan panjang 11 km, dioperasikan oleh PT Marga Sarana Jabar (MSJ). BORR merupakan jalan tol yang terbentang mulai dari Sentul Selatan sampai dengan Darmaga. Jalan tol ini menjadi jawaban atas kebutuhan akses jalan yang semakin tinggi

sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi, industri, maupun perumahan di wilayah Bogor.

Keberadaan jalan tol ini sangat memudahkan masyarakat yang menggunakan Jalan Tol Jagorawi dan ingin melanjutkan perjalanan menuju Bogor bagian Utara tanpa harus melalui kota Bogor terlebih dahulu. Jalan Tol BORR ditargetkan untuk beroperasi pada tahun 2018.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL BOGOR OUTER RING ROAD

Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2016	2017	2016	2017
Seksi 1	Sentul Selatan-Kedung Halang	3,85	100	100	100
Seksi 2A	Kedung Halang-Kedung Badak	1,95	100	100	100
Seksi 2B	Kedung Badak-Yasmin	2,65	72	99	-
Seksi 3	Yasmin-Darmaga	3,00	-	-	--



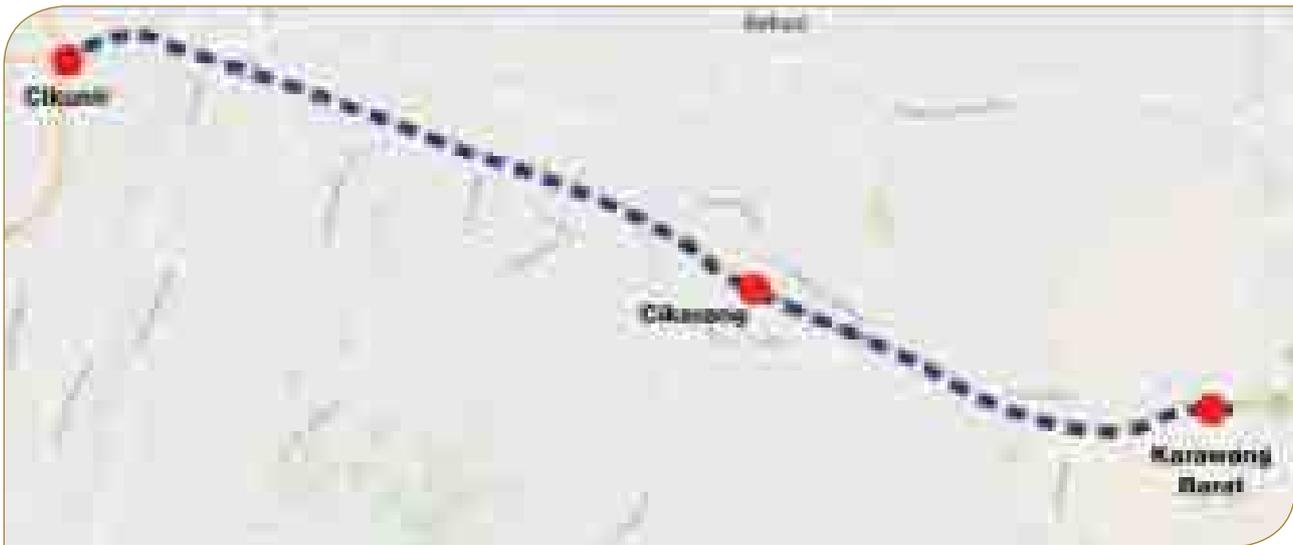
**JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK II ELEVATED
(PT JASAMARGA JALANLAYANG CIKAMPEK)**

Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated dioperasikan oleh PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) yang merupakan anak perusahaan Jasa Marga ini memulai proses konstruksi pada awal tahun 2017, dan ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2019. Dengan pembangunan Jalan Tol Jakarta

Cikampek II Elevated yang merupakan langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan kepadatan di ruas Jakarta-Cikampek, diharapkan dapat meningkatkan arus distribusi barang dan orang dari dan menuju Jakarta.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL JAKARTA CIKAMPEK II ELEVATED

Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2016	2017	2016	2017
Seksi 1 Jakarta Cikampek		-	-	-	18,29



JALAN TOL JAKARTA CIKAMPEK II SELATAN (PT JASAMARGA JAPEK SELATAN)

Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan terbentang sepanjang 64 Km di sisi Selatan Jalan Tol Jakarta Cikampek yang ada, dimana saat ini nilai investasinya adalah Rp. 14,6 Triliun.

Jalan tol ini dioperasikan oleh PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) yang terdiri dari konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Wira Nusantara Bumi.

Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan merupakan salah satu upaya mengurangi kepadatan ruas Jakarta-Cikampek yang diharapkan dapat menjadi alternatif pengguna jalan tol menuju jalan tol Cipularang. Selain itu, dengan adanya jalan tol ini juga diharapkan dapat membangun pusat pertumbuhan baru di sisi selatan Jalan Tol Jakarta-Cikampek.



PULAU JAWA

Guna memperlancar arus distribusi barang dan jasa serta menurunkan biaya logistik di pulau Jawa, Pemerintah menargetkan pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa pada tahun 2019. Hingga akhir tahun 2017, Jasa Marga memiliki hak konsesi terpanjang di Jalan Tol Trans Jawa, termasuk penambahan salah satu konsesi yang dimenangkan oleh Perseroan pada Desember 2017, yaitu Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.



LEGENDA

- Ruas Tol Dioperasikan Oleh Jasa Marga
- - - Ruas Tol Jasa Marga Dalam Rencana
- - - Ruas Tol Non Jasa Marga Dalam Rencana
- Ruas Tol Lain

Saat ini Perseroan telah mengoperasikan Jalan Tol Jakarta-Tangerang (33,00 km), Jalan Tol Dalam Kota (23,55 km), Jalan Tol Jakarta-Cikampek (83,00 km), Jalan Tol Palikanci (26,30 km), Jalan Tol Semarang (24,75 km), Jalan Tol Surabaya-Gempol (49,00 km), Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (36,27 km) dan sebagian Jalan Tol Semarang-Solo (23,10 km).



JALAN TOL BATANG-SEMARANG (PT JASAMARGA SEMARANG BATANG)

Jalan Tol Batang-Semarang dengan panjang 75 km dioperasikan oleh PT Jasamarga Semarang Batang. Sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Jawa, Jalan Tol Batang-Semarang dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah pada beberapa kota vital di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo. Jalan tol ini dibangun sepanjang 75 km mulai dari

Kota Semarang sampai dengan Kabupaten Batang, dan nantinya akan terhubung dengan dua ruas tol lainnya, yaitu Pemalang-Batang dan Semarang-Solo sepanjang 72,64 km. Ruas Tol Batang-Semarang sudah mulai konstruksi sejak Agustus 2016 dan ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2018.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL BATANG-SEMARANG

Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2016	2017	2016	2017
Seksi 1 Batang-Batang Timur	3,20	100	100	8,62	88,07
Seksi 2 Batang Timur-Weleri	36,35	94,09	99,88		58,07
Seksi 3 Weleri-Kendal	11,05	46,11	97,89	7,52	67,15
Seksi 4 Kendal-Kaliwungu	13,50	33,27	98,28	10,05	67,14
Seksi 5 Kaliwungu-Krapyak	10,90	75,54	93,88		77,91



JALAN TOL SEMARANG-SOLO (PT TRANS MARGA JATENG)

Jalan Tol Semarang-Solo dengan panjang 72,64 km dioperasikan oleh PT Trans Marga Jateng (TMJ). Jalan tol ini merupakan salah satu bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang terus dikebut Pemerintah penyelesaiannya. Sebagai bagian dari Trans Jawa, Jalan Tol Semarang-Solo ini akan menghubungkan beberapa daerah di wilayah Jawa Tengah, yaitu Semarang, Ungaran, Bawen, dan Salatiga.

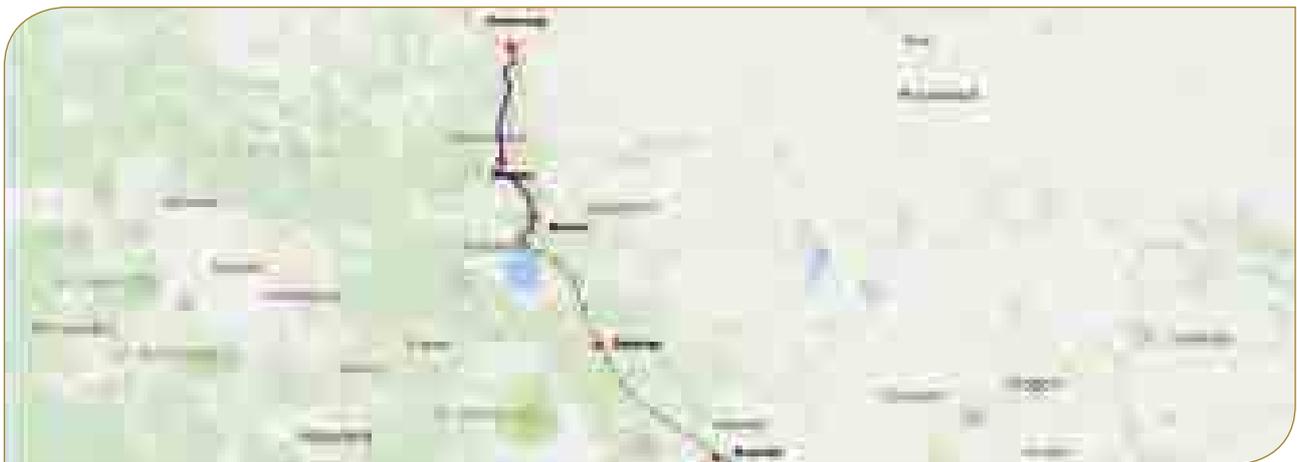
Pada September 2017, Jasa Marga telah mengoperasikan Seksi Bawen-Salatiga (17,50 Km), melengkapi Jalan Tol Semarang-Solo yang telah beroperasi sebelumnya, yaitu

Seksi 1 Semarang-Ungaran sepanjang 10,80 km telah beroperasi sejak tahun 2011 silam yang disusul dengan pengoperasian Seksi 2 Ungaran-Bawen pada tahun 2014.

Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat memperluas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah ke wilayah-wilayah lain di luar Ibu Kota Semarang. Pertumbuhan volume lalu lintas pada Jalan Tol Semarang Solo diprediksi akan terus tumbuh seiring dengan rencana terkoneksinya wilayah Semarang dan Solo ketika Jalan Tol Semarang Solo beroperasi penuh pada tahun 2018.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO

Ruas		Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
			2016	2017	2016	2017
Seksi 1	Semarang-Ungaran	10,80	100	100	100	100
Seksi 2	Ungaran-Bawen	12,30	100	100	100	100
Seksi 3	Bawen-Salatiga	17,50	100	100	78,71	100
Seksi 4	Salatiga-Boyolali	24,40	99,97	98,80	-	43,76
Seksi 5	Boyolali-Solo	7,64	100	100	-	





GERBANG TOL SALATIGA

Gerbang Tol Salatiga acapkali disebut mirip dengan salah satu Gerbang Tol di Swiss, karena memiliki panorama yang sangat indah yang berlatarkan Gunung Merbabu.

JALAN TOL SOLO-NGAWI (PT JASAMARGA SOLO NGAWI)

Jalan Tol Solo-Ngawi dengan panjang 90,43 km dioperasikan oleh PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN). Jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Timur yang melewati wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Ngawi. Jalan Tol Solo-Ngawi diharapkan dapat beroperasi penuh pada tahun 2018 untuk melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Jawa.

Keberadaan Jalan Tol Solo-Ngawi diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas barang dan jasa serta pergerakan manusia baik menuju dan keluar Kota Solo. Sehingga secara langsung dapat mempengaruhi pergerakan roda ekonomi daerah dengan meningkatkan produktivitas dan menekan biaya distribusi.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL SOLO-NGAWI

	Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
			2016	2017	2016	2017
Seksi 1	Solo-Mantingan	56,23	91,74	95,25	70,16	87,29
Seksi 2	Mantingan-Ngawi	34,20	91,45	95,67	44,31	84,43



JALAN TOL NGAWI-KERTOSONO (PT NGAWI KERTOSONO JAYA)

Jalan Tol Ngawi-Kertosono dengan panjang 87,02 km dioperasikan oleh PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ). Jalan tol ini merupakan lanjutan dari Jalan Tol Solo-Ngawi yang juga merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa. Jalan Tol Ngawi-Kertosono merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang melewati wilayah Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur.

Jalan tol yang diakuisisi pada tahun 2015 ini terbagi dalam 4 seksi pembangunan, dimana seksi 1 Ngawi-Magetan, Seksi 2 Magetan-Madiun, seksi 3 Madiun-Saradan dan Seksi 4 Saradan-Kertosono. Keberadaan jalan tol yang ditargetkan untuk beroperasi penuh pada tahun 2018 ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan jalan dalam melayani lalu lintas di koridor Trans Jawa.

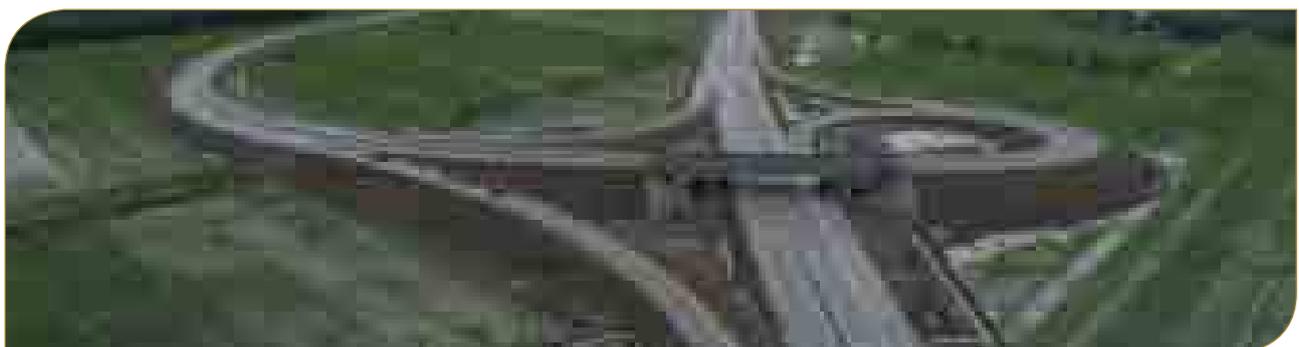
TABEL KEMAJUAN JALAN TOL NGAWI-KERTOSONO

Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2016	2017	2016	2017
Seksi 1 Ngawi-Magetan	20,00	95,59	99,74	40,15	92,89
Seksi 2 Magetan-Madiun	8,45	85,27 *	100	49,48	99,06
Seksi 3 Madiun-Saradan	21,06	93,19	99,97	53,34	97,65
Seksi 4 Saradan-Kertosono**	37,51				39,44

Keterangan:

* Progres pembebasan tanah setelah ditambahkan lahan untuk *under pass*, *over pass*, dan *interchange* yang tidak terakomodir pada *Row Plan* yang telah disetujui

** Dibangun oleh Pemerintah.



JALAN TOL GEMPOL-PASURUAN (PT JASAMARGA GEMPOL PASURUAN)

Jalan Tol Gempol-Pasuruan dengan panjang 34,15 km dioperasikan oleh PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP). Jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang memiliki nilai strategis bagi kelancaran arus transportasi barang dan jasa serta diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar jalan tol yang akan menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di kawasan industri.

Jalan tol ini diharapkan dapat saling mendukung dengan dua ruas jalan tol lainnya di Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Gempol untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa di sepanjang jaringan Jalan Tol Trans Jawa. Jalan Tol Gempol-Pasuruan ditargetkan untuk beroperasi penuh pada tahun 2018.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL GEMPOL-PASURUAN

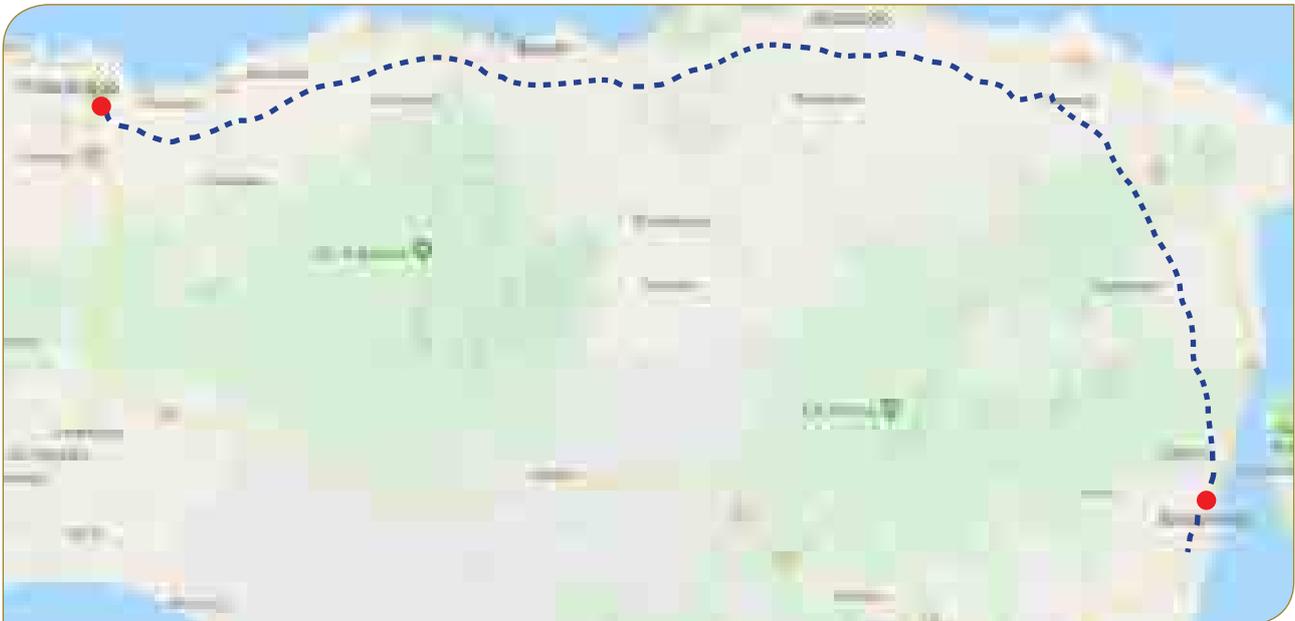
Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2016	2017	2016	2017
Seksi 1 Gempol-Rembang	13,90	98,59	100	92,71	100
Seksi 2 Rembang-Pasuruan	6,60	88,63	98,94	-	64,89
Seksi 3 Pasuruan-Grati	13,65	27,64	75,32	-	1,45



JALAN TOL PROBOLINGGO-BANYUWANGI (PT JASAMARGA PROBOLINGGO BANYUWANGI)

Sebagai salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN), Jalan tol Probolinggo-Banyuwangi diharapkan dapat mendorong kelancaran arus barang dan manusia dari dan ke Banyuwangi. Nilai investasi sebesar Rp. 23,39 Triliun, akan dikerjakan oleh PT Jasamarga Probolinggo-Banyuwangi (JPB) yang terdiri dari konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Toll Road dan PT Brantas Abipraya.

Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ditargetkan dapat selesai dan beroperasi pada 2019. Saat ini, perjalanan dari Probolinggo menuju Banyuwangi ditempuh 4-5 jam lamanya melalui jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) dengan jarak tempuh sekitar 200 km. Dengan terbangunnya jalan tol ini dapat memangkas waktu tempuh hanya menjadi sekitar 2 jam.



JALAN TOL GEMPOL-PANDAAN (PT JASAMARGA PANDAAN TOL)

Jalan Tol Gempol – Pandaan merupakan bagian dari rencana pembangunan jalan bebas hambatan Surabaya-Malang yang sejak tahun 1970 telah dibuat pra-studi kelayakannya oleh Pemerintah. Sebagai jalan penghubung alternatif antara Surabaya dengan Malang, jalan tol ini akan berperan strategis untuk pengembangan wilayah, yaitu sebagai penghubung pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti Pelabuhan Tanjung Perak, Kawasan Industri dan Perdagangan serta Perkebunan/Pertanian/ Pariwisata di wilayah Surabaya, Pasuruan, dan Malang.

Pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Gempol – Pandaan dimulai tahun 2012 dan telah dioperasikan pada tanggal 12 Juni 2015, dimana pada Tahun 2017, pembangunan Jalan Tol Gempol Pandaan Tahap II yang merupakan akses Pandaan arah Malang sepanjang 1,60 km mulai dibangun. Dengan dioperasikannya jalan tol ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemakai jalan serta memberikan waktu tempuh yang lebih pendek dari Surabaya menuju ke Malang atau sebaliknya.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL GEMPOL-PANDAAN

Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2016	2017	2016	2017
Gempol Pandaan Tahap II Seksi Pandaan Arah Malang	1,60	-	100	-	29,52



JALAN TOL PANDAAN-MALANG (PT JASAMARGA PANDAAN MALANG)

Jalan Tol Pandaan-Malang dengan panjang 37,62 km dioperasikan oleh PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM). Jalan Tol Pandaan-Malang dibangun sebagai salah satu alternatif jalan yang menghubungkan kota dan kabupaten di Jawa Timur menuju Kota Malang. Sebagai salah satu kota tujuan wisata di Pulau Jawa, Jalan Tol Pandaan-Malang diharapkan dapat berperan positif dalam meningkatkan arus lalu lintas dari dan menuju Kota Malang. Jalan Tol Pandaan-Malang dibangun sebagai lanjutan dari Jalan Tol Gempol-Pandaan, sehingga dengan tersambungnyanya ruas tol ini sampai ke Kota Malang, diharapkan tidak hanya

meningkatkan jumlah volume lalu lintas menuju Kota Malang, akan tetapi juga dapat menghidupkan ekonomi pada wilayah lalu lintas Surabaya-Pasuruan-Gempol-Pandaan.

Jalan tol dengan target operasi tahun 2019 ini juga merupakan proyek konektivitas dua kota besar di Jawa Timur, yang nantinya masyarakat Surabaya yang ingin menuju Kota Malang atau sebaliknya, dapat langsung melalui jalan tol, dan diharapkan juga membawa dampak positif ekonomi bagi kota dan kabupaten yang dilaluinya.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL PANDAAN-MALANG

Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2016	2017	2016	2017
Seksi 1 Pandaan-Purwodadi	14,92	83,95	86,97	-	23,89
Seksi 2 Purwodadi-Lawang	8,00	67,85	81,57	-	7,98
Seksi 3 Lawang-Pakis I	7,50	59,82	95,85	-	5,92
Seksi 4 Pakis I-Pakis II	4,10	-	56,58	-	0,14
Seksi 5 Pakis II-Malang	3,10	41,40	41,55	-	0,43



PULAU KALIMANTAN

Perseroan juga telah melakukan ekspansi di pulau Kalimantan melalui Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan, yang juga diharapkan menjadi cikal bakal Jalan Tol Trans Kalimantan.

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2019 akan memangkas biaya logistik karena distribusi barang antar dua kota tersebut menjadi lebih cepat, yang semula menghabiskan waktu tiga jam, nantinya dapat ditempuh hanya dalam waktu satu jam.



Balikpapan - Samarinda (99,35 km)

JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA (PT JASAMARGA BALIKPAPAN SAMARINDA)

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dengan panjang 99,35 km dioperasikan oleh PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS). Jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini akan dibangun menghubungkan dua kota besar yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sepanjang 99,35 KM. Dengan pembangunan jalan tol ini, diharapkan dapat meningkatkan arus distribusi barang baik menuju dan dari kota Balikpapan, dan juga kota-kota lain di sekitarnya.

Keberadaan Bandara Internasional di Kota Balikpapan juga menjadikan kota ini memiliki peran vital sebagai pintu masuk menuju kota-kota lainnya, sehingga keberadaan jalan tol diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses barang dan orang di Pulau Kalimantan.

Jalan tol ini sedang dalam tahap pengadaan lahan dan diharapkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2018.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA

Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2016	2017	2016	2017
Seksi 1 Balikpapan-Samboja	22,03	95,16	100	-	75,01
Seksi 2 Samboja-Muarajawa	30,98	95,69	100		39,00
Seksi 3 Muarajawa-Palaran	17,30	93,49	100	2,09	50,34
Seksi 4 Palaran-Samarinda	17,95	46,81	97,31		37,45
Seksi 5 Sepinggang-Balikpapan	11,09	62,12	94,74	-	17,24



PULAU SULAWESI

Pada tahun 2016 Perseroan melakukan ekspansi di pulau Sulawesi melalui Jalan Tol Manado-Bitung. Pembangunan jalan tol tersebut akan menjadi jalan alternative untuk menuju dan dari pelabuhan laut yang ada di wilayah Bitung dan diharapkan mampu memecahkan permasalahan transportasi darat yang akan berdampak pada perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya di Pulau Sulawesi.



JALAN TOL MANADO-BITUNG (PT JASAMARGA MANADO BITUNG)

Jalan Tol Manado-Bitung dengan panjang 39,90 km dioperasikan oleh PT Jasamarga Manado Bitung (JMB). Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah yang menjadi target pemerintah dalam hal pengembangan infrastruktur nasional. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini akan difokuskan pada pengembangan industri pengolahan perikanan, industri pengolahan kelapa, industri farmasi, serta kegiatan logistik. Selain itu Pemerintah juga menargetkan Bitung untuk menjadi salah satu Pelabuhan Singgah Internasional, yang nantinya diharapkan Bitung dapat berperan sebagai pintu masuk perekonomian (ekspor-impor)

di wilayah Indonesia Timur, serta sebagai pelabuhan singgah bagi kapal-kapal dagang dan kapal distribusi barang di wilayah Asia Pasifik. Target pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu kunci dibutuhkan akses jalan yang baik, sebagai kelanjutan distribusi barang dari Pelabuhan dan KEK menuju Kota-kota lain di seluruh Pulau Sulawesi, salah satunya Kota Manado.

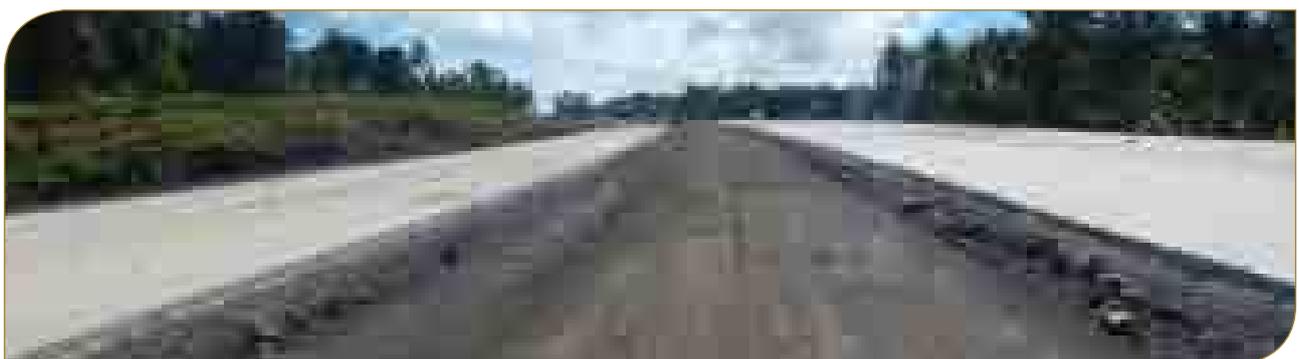
Jasa Marga menargetkan untuk segera memulai konstruksi jalan tol ini pada tahun 2017 dan dapat dioperasikan sesuai target pada tahun 2019.

TABEL KEMAJUAN JALAN TOL MANADO-BITUNG

Ruas	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2016	2017	2016	2017
Seksi 1A Ringroad Manado-Sukur	7,00	93,00	90,00	-	15,67
Seksi 1B Sukur-Airmadidi	7,00	38,60	56,00	-	45,29
Seksi 2A Airmadidi-Danowudu*	11,50	0,89	93,14	-	40,95
Seksi 2B Danowudu-Bitung*	14,40	0,89	47,22	-	4,50

Keterangan:

* Dibangun oleh Pemerintah.

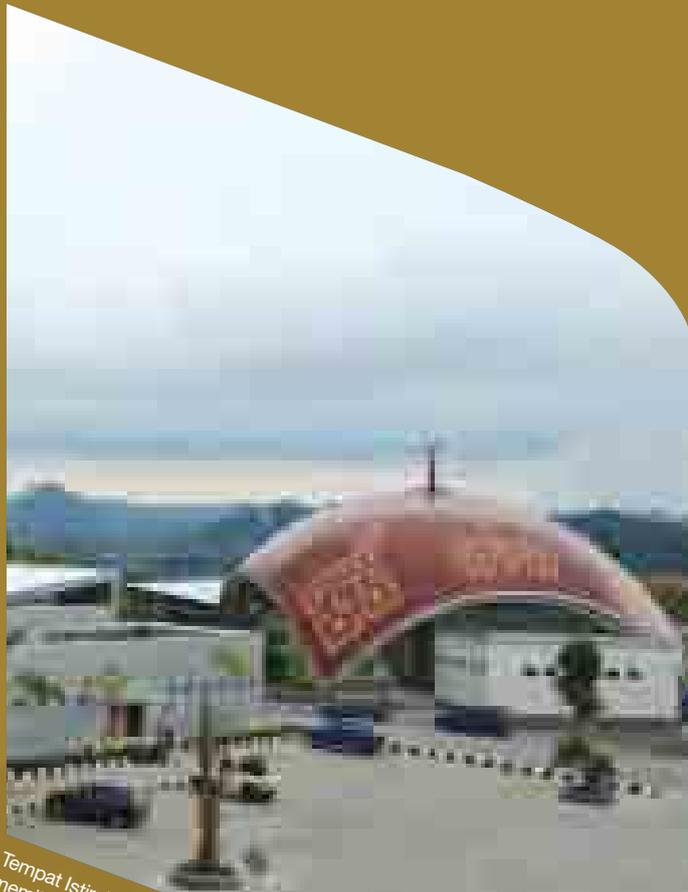


TARGET KINERJA TAHUN 2018

Pada tahun 2018, Jasa Marga tetap berkomitmen untuk mendukung rencana pembangunan Pemerintah dengan melaksanakan pembangunan jalan tol. Target pengembangan jalan tol pada tahun 2018 adalah sepanjang 337,12 km dengan rincian sebagai berikut:

TABEL JALAN TOL OPERASI 2018

No	Wilayah	Proyek	Panjang (km)
1	Pulau Sumatera	Medan Kualanamu Tebing Tinggi:	
		Seksi 1: Tanjung Morawa - Parbarakan	7,45
		Seksi 1A: Tanjung Morawa	3,3
2	Jabotabek	Bogor Ring Road:	
		Seksi 2B Kd. Badak - Yasmin	2,65
3	Pulau Jawa	Batang - Semarang	75
		Semarang - Solo:	
		Seksi Salatiga Kartasaura	32,65
		Solo - Ngawi	90,43
		Ngawi - Kertosono	87,02
		Gempol - Pasuruan:	
		Seksi 2: Rembang-Pasuruan	6,6
		Gempol-Pandaan:	
		Tahap II Seksi Pandaan Arah Malang	1,60
		Pandaan-Malang:	
Seksi 1: Pandaan - Purwodadi	14,92		
Seksi 2: Purwodadi - Lawang	8		
Seksi 3: Lawang - Pakis I	7,5		
TOTAL			337,12

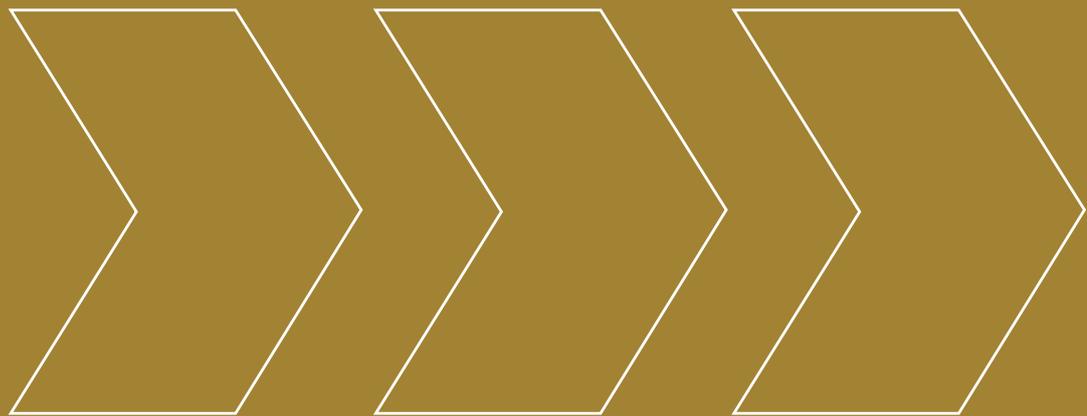


Tempat Istirahat dan Pelayanan km 22 Jalan Tol Semarang-Solo memiliki fasilitas lengkap yang beroperasi selama 24 jam.



08

KINERJA
PENGEMBANGAN
USAHA LAIN



PENGEMBANGAN USAHA LAIN

Perseroan juga akan melakukan peningkatan peran dan daya saing anak perusahaan Perseroan di bidang jasa layanan pemeliharaan untuk memelihara ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan maupun ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol lainnya.

Salah satu arahan strategis Perseroan untuk memperkuat fondasi keuangan Perseroan adalah dengan menambah sumber pendapatan di luar jalan tol atau pengembangan usaha lain, serta untuk mengembangkan lingkup operasi Perseroan, tidak terbatas kepada pengembangan dan pengoperasian jalan tol tetapi juga meliputi pemeliharaan jalan tol, pengembangan bisnis Tempat Istirahat & Pelayanan (TIP), Iklan, Utilitas dan properti. Pendapatan Perseroan melalui Pengembangan Usaha Lain secara konsolidasi dapat memberikan kontribusi sebesar 7%.

Perseroan melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan melalui pengembangan usaha lain di bidang jasa pengoperasian jalan tol, pemeliharaan jalan tol dan pengelolaan properti dan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di sekitar koridor jalan tol. Perseroan melihat potensi yang besar untuk mengembangkan usaha lain pada jalan tol yang hak konsesinya dimiliki Perseroan dan juga yang dimiliki oleh pengembangan jalan tol lain.

Strategi Perusahaan dalam pengembangan usaha lain adalah:

- Perbaiki aspek fundamental dan optimalisasi *existing asset*.
- Memaksimalkan perolehan dan investasi jalan tol dengan berbagai skema bisnis.
- Memaksimalkan potensi bisnis jasa operasi, pemeliharaan, konstruksi tol, dan teknologi tol untuk pasar internal serta eksternal.
- Memaksimalkan potensi bisnis di sepanjang koridor jalan tol (*Toll Corridor Development*).

PENGEMBANGAN USAHA JASA LAYANAN OPERASI

Perseroan akan meningkatkan kapasitas dan daya saing anak perusahaan Perseroan di bidang jasa layanan operasi untuk mengoperasikan ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan dan ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol. Perseroan akan meningkatkan kemampuan anak perusahaan di bidang jasa layanan operasi untuk menguasai jasa layanan transaksi dan layanan lalu lintas jalan tol.

PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR (JMTO)

PT Jasa Layanan Operasi (JLO) yang didirikan berdasarkan akta notaris No. 7 tanggal 21 Agustus 2015 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., yang telah berganti nama menjadi PT Jasamarga Tollroad Operator, merupakan entitas anak Perseroan yang bergerak dalam bidang jasa layanan operasi jalan tol baik layanan transaksi maupun layanan lalu lintas jalan tol. Kedua tujuan utama yaitu Layanan Transaksi dan Layanan Lalu Lintas tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan bisnis jalan tol untuk penyediaan dan pengembangan jasa layanan operasional untuk meningkatkan efisiensi Perseroan.

Sesuai dengan arahan Perseroan, kebijakan strategis PT Jasamarga Tollroad Operator dalam pengembangan di bidang jasa layanan operasi adalah:

- Mengintegrasikan biaya investasi jalan tol dan biaya operasi jalan tol baru.
- Menciptakan nilai tambah secara holistik bagi kepentingan Jasa Marga, industri jalan tol dan Pemerintah.

Adapun ruang lingkup bisnis Layanan Transaksi dari PT JMTO adalah pengendalian pengumpulan tol, pengadaan dan pemeliharaan peralatan tol, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan pengumpulan tol, pelatihan, sewa, kendaraan shuttle, sewa kendaraan operasional, BBM kendaraan, logistik, consumable. Sedangkan dari sisi ruang lingkup bisnis Layanan Lalu Lintas PT JMTO adalah pengadaan dan pemeliharaan traffic information centre, pengaturan lalu lintas, pengadaan satuan pengamanan, penyuluhan, sewa kendaraan patrol, pengadaan derek, pengadaan rescue, pengadaan ambulance, pengadaan dan pemeliharaan CCTV, pengadaan dan pemeliharaan VMS, pengadaan dan pemeliharaan radio komunikasi, BBM kendaraan, dan alat bantu kerja.

Kompetisi industri jalan tol yang kian ketat dengan tingginya target Pemerintah dalam pengembangan Infrastruktur nasional mendorong Jasa Marga berupaya meningkatkan value perusahaan melalui peningkatan kapasitas produksi perusahaan. Jasa Marga tidak hanya berfokus pada pengembangan jalan tol melalui penambahan konsesi ruas baru, tetapi juga dengan meningkatkan kapasitas pelayanan dari sisi operasional meliputi layanan transaksi, layanan lalu lintas, dan layanan pemeliharaan.

Pesatnya pertumbuhan jalan tol saat ini, akan berdampak terhadap bisnis di bidang jasa layanan operasi. Para BUJT akan membutuhkan pihak ketiga yang memiliki kompetensi khusus untuk menyediakan jasa layanan operasi ketika akan mengoperasikan ruas jalan tol. PT JMTO diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini dengan masuk dan terlibat dalam operasional jalan tol, tidak hanya pada ruas tol yang dikelola oleh Jasa Marga dan anak perusahaannya, tetapi juga pada ruas tol di bawah pengelolaan BUJT lainnya.

Realisasi Pendapatan Usaha PT JMTO di tahun 2017 telah mencapai Rp 289 Miliar dari pengoperasian jalan tol cluster PT Jasa Marga (Persero) Tbk maupun beberapa BUJT lainnya. Jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2016, pendapatan meningkat sebesar 12% di tahun 2017.

Potensi Pasar (Cabang, dan BUJT lainnya)

Dalam perkembangannya, PT JMTO diharapkan dapat berperan aktif dalam menggerakkan roda operasional di seluruh cabang Jasa Marga. Pengalaman Jasa Marga dalam pengelolaan jalan tol selama hampir 40 tahun serta perkembangan lalu lintas yang semakin tinggi, diharapkan dapat didukung dengan hadirnya petugas-petugas yang mumpuni di bidangnya, mulai dari petugas pengumpul tol, petugas jasa layanan jalan tol, dan petugas operasional lainnya.

Selain di Kantor Cabang, PT JMTO diharapkan juga dapat mulai mengembangkan sayap bisnisnya, dengan masuk ke lingkaran bisnis operasional jalan tol, baik yang dikelola oleh anak perusahaan Jasa Marga, maupun di bawah pengelolaan BUJT lainnya. Dengan fokus pemerintah di pertumbuhan infrastruktur, bisnis jalan tol masih akan terus berkembang pesat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

Pasar Potensial untuk melakukan pengusahaan di bidang pengoperasian Jalan Tol:

Daerah	Ruas Tol
Sumatera Utara	Sei Rampah-Tebing Tinggi: 9,26 Km Belmera: 34 Km
Jabodetabek	Kunciran-Serpong: 11,19 Km Cinere-Serpong: 10,14 Km Cengkareng-Kunciran: 14,19 Km Jakarta-Cikampek Elevated: 38 Km
Jawa Tengah	Solo-Ngawi: 90,25 Km Semarang-Batang: 75 Km Semarang: 24.75 Km
Jawa Timur	Ngawi-Kertosono: 87,02 Km Pandaan-Malang: 37,62 Km Surabaya-Gempol: 37 Km
Sulawesi Utara	Manado-Bitung: 39 Km
Kalimantan Timur	Balikpapan-Samarinda : 99,35 Km

Inovasi Teknologi



Peningkatan Pelayanan Transaksi serta menuju *Multi Lane Free Flow*, PT Jasa Marga telah menerapkan pembayaran transaksi dengan *On Board Unit (OBU)*, dimana pengguna jalan tidak perlu membuka kaca mobil untuk melakukan uang elektronik.

Perkembangan jaman menuntut PT JMTO untuk semakin berinovasi dan mengembangkan diri di bidang pengoperasian tol. PT JMTO berdasarkan arahan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai induk perusahaan memfokuskan perusahaannya dengan Beralih dari human-based menuju technology-based yang bergerak dalam bidang sistem transaksi elektronik, peralatan tol, serta sistem informasi dan komunikasi dan juga akan Mengembangkan project layanan traffic information center pada tiap region jalan tol, agar pelayanan PT JMTO semakin prima dan semakin terpercaya.

PT JAKARTA LINGKARLUAR JAKARTA (JLJ)

PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta merupakan anak perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk yang didirikan pada tanggal 22

Desember 2000 yang bergerak dibidang Jasa Manajemen Layanan Transaksi, Jasa Manajemen Layanan Lalu Lintas dan Jasa Manajemen Layanan Pemeliharaan Jalan Tol.

PT JLJ sendiri menjalani pengoperasian pada ruas tol mulai dari Ulujami - Pondok Pinang - TMII Junction - Cikunir - Cakung – Rorotan mengelilingi Kota Jakarta sepanjang 45 km.

PENGEMBANGAN USAHA JASA LAYANAN PEMELIHARAAN

Perseroan juga akan melakukan peningkatan peran dan daya saing anak perusahaan Perseroan di bidang jasa layanan

pemeliharaan untuk memelihara ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan maupun ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lainnya. Anak perusahaan Perseroan akan didorong menguasai teknologi dan memiliki peralatan yang khusus serta daya saing yang tinggi di bidang pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan.

PT JASAMARGA TOLLROAD MAINTENANCE (PT JMTM)

PT Jasamarga Tollroad Maintenance, semula bernama PT Sarana Marga Utama didirikan berdasarkan akta notaris No. 41 tanggal 26 Agustus 1988 dari notaris Abdul Latif S.H., diakuisisi Perseroan pada tahun 2010, merupakan entitas Anak Perusahaan Perseroan yang didirikan dalam rangka pengusahaan jasa konstruksi dan pemeliharaan jalan tol, jasa sewa peralatan tol, serta jasa sewa kendaraan. Tujuan akuisisi PT Jasamarga Tollroad Maintenance adalah untuk bersinergi dengan bisnis jalan tol untuk mencapai sasaran strategis perusahaan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol.

Sesuai dengan arahan Perseroan, kebijakan strategis PT JMTM adalah:

- Portofolio usaha adalah sebesar 90% pekerjaan sipil (konstruksi dan pemeliharaan) dan 10% usaha pendukung lainnya (peralatan tol, asphalt mixing plant, dan sewa kendaraan).
- Aktif mencari peluang usaha pada Perseroan dan entitas anak perusahaan jalan tol.
- Mendukung pencapaian standar pelayanan minimum jalan tol.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pencapaian Target Proyek 2017

Pada tahun 2017, PT JMTM menargetkan untuk memegang proyek pemeliharaan ruas tol di beberapa cabang dan anak perusahaan, berperan dalam pembangunan beberapa proyek jalan tol baru, serta memperluas lingkup produksi pada teknis konstruksi jalan tol.

Pada realisasinya PT JMTM telah mendapatkan dan mengerjakan beberapa proyek pemeliharaan serta pembangunan sebagaimana daftar tabel berikut:

No	Nama Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan
1	Pekerjaan Design And Build Pembangunan Infrastruktur Parkir Kendaraan Besar dan Akses Depan Retail Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) KM 88 B Jalan Tol Purbaleunyi	TI KM 88 Jalan Tol Cipularang
2	Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi 1 STA 375+000 - 378+200	Pandaan, Jawa Timur
3	Pekerjaan Pembangunan Ramp On Dan Ramp Off Km 99+200 A/B Dan Km 107+000 A/B Pada Jalan Tol Cipularang	Jalan Tol Cipularang
4	Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi Non-S Jalur B dan Ruas Ulujami-Pondok Ranji Jalur A Tahun 2017	Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Non-S
5	Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Pada Jalan Tol Surabaya Gempol Tahun 2017	Jalan Tol Surabaya - Gempol
6	Pekerjaan Pemeliharaan Periodik dan Rekonstruksi Pada Jalan Tol Semarang Tahun 2017	Jalan Tol Semarang
7	Pekerjaan Pembangunan Gerbang Tol dan Penambahan Lajur Dedicated Lane Dalam Rangka Perubahan Sistem Transaksi Terbuka Pada Jalan Tol Jagorawi 2017	Jalan Tol Jagorawi
8	Pekerjaan Renovasi dan Penambahan Gardu Satelit Gayamsari Pada Jalan Tol Semarang Tahun 2017	Jalan Tol Semarang
9	Pekerjaan Lapis Tambah (Overlay) Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara Jalur A/B Tahun 2017	Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta W2 Utara
10	Pekerjaan Pemeliharaan Periodik (SFO) dan Rekonstruksi Perkerasan Jalan pada Ruas Jalan Jakarta - Cikampek Jalur A Tahun 2017	Jalan Tol Jakarta - Cikampek
11	Pekerjaan Pemeliharaan Periodik (SFO) dan Rekonstruksi Perkerasan Jalan pada Ruas Jalan Jakarta - Cikampek Jalur B Tahun 2017	Jalan Tol Jakarta - Cikampek
12	Pekerjaan Pemeliharaan Periodik (SFO) dan Rekonstruksi Perkerasan Jalan Ramp dan Simbang Susun pada Ruas Jalan Jakarta - Cikampek Tahun 2017	Jalan Tol Jakarta - Cikampek
13	Pekerjaan Pemeliharaan Periodik (SFO) dan Rekonstruksi Perkerasan Jalan pada Ruas Jalan Tol Jakarta- Bogor - Ciawi Tahun 2017	Jalan Tol Jagorawi
14	Pekerjaan Rekonstruksi Perkerasan Jalan dan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Tahun 2017 Lokasi Km 0+000 s.d Km 26_500 AB Pada Ruas Jalan Tol Jakarta - Tangerang	Jalan Tol Jakarta - Tangerang
15	Pekerjaan Pengadaan Pagar Panel Beton di jalan Tol Jakarta-Cikampek Tahun 2017	Jalan Tol Jakarta - Cikampek
16	Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Gempol Pandaan Tahap II STA. 11 +500 (KM 56+350) s.d STA. 13+060 (KM 57+910)	Pandaan, Jawa Timur
17	Pekerjaan Perluasan Gerbang Tol Karawang Barat 1 Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tahun 2017	GT. Karawang Barat 1 Jalan Tol Jakarta - Cikampek

No	Nama Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan
18	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Concrete Barrier Ruas Jalan Tol Jakarta – Tangerang	Jalan Tol Jakarta - Tangerang
19	Pekerjaan Konstruksi Gerbang Tol dan Kantor Gerbang Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Seksi Lematang - Kotabaru Tahun 2017	Lampung
20	Pekerjaan Pemasangan Pagar Panel Beton Damija pada Jalan Tol Jagorawi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2017	Jalan Tol Jagorawi
21	Pekerjaan Pemeliharaan Periodik (Overlay) Perkerasan Jalan Pada Jalan Tol Bogor Ring Road Ruas Sentul Barat – Kedung Halang 2017	Jalan Tol Bogor Ring Road
22	Pekerjaan Penggantian Rambu dan Marka Jalan Pada Jalan Tol Semarang - Solo Ruas Semarang Bawen	Jalan Tol Semarang - Solo, ruas Semarang - Bawen
23	Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Jalan Tol Soker 1B	Jalan Tol Solo - Kertosono
24	Pekerjaan Rehabilitasi Konstruksi Jembatan Kali Cisadane KM. 19+545 Ruas Jakarta - Tangerang	Jalan Tol Jakarta - Tangerang

PENGEMBANGAN USAHA PROPERTI



Green Residence Sidoarjo dikelola oleh PT Jasamarga Properti

Perseroan juga melakukan peningkatan peran dan daya saing anak perusahaan terutama di bidang properti yaitu PT Jasamarga Properti (JMP) melalui peningkatan dan perluasan investasi properti terutama di sekitar koridor jalan tol. Selain itu, PT JMP telah melakukan pengembangan serta pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang merupakan salah satu fokus PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan tol serta menjaga Standar Pelayanan Minimal TIP di jalan tol.

PT JMP yang didirikan berdasarkan akta notaris No. 2 tanggal 15 Januari 2013 dari Notaris Windalina, S.H., merupakan entitas Anak Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, dan jasa terkait properti. Tujuan pendirian PT JMP adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan melalui optimalisasi aset Perseroan dan pengembangan properti di koridor jalan tol serta pengembangan maupun pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di koridor jalan tol.

Realisasi Pendapatan Usaha PT JMP di Tahun 2017 mencapai Rp 174 Miliar yang bersumber dari penjualan properti dan pendapatan pengelolaan Tempat Pelayanan dan Istirahat (TIP) di koridor jalan tol.

Berikut adalah proyek-proyek yang dikembangkan dan dikelola oleh PT JMP:

No	Proyek	Uraian Proyek
1	Cilangkap Residence	Cilangkap Residence adalah proyek pertama Perseroan yang mulai dilaksanakan pembangunannya pada Oktober 2014. Perumahan diperuntukkan untuk kelas menengah dengan lokasi sangat strategis, memiliki akses yang sangat baik ke Gerbang Tol Setu, Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road. Dibangun secara <i>cluster</i> , dalam berbagai tipe rumah dengan Luas Bangunan terkecil 122 m ² , Luas Tanah 91 m ² serta tipe paling besar dengan Luas Bangunan 240 m ² dengan Luas Tanah 180 m ² . Per 31 Desember 2016, konstruksi telah mencapai 100% dan hanya tersisa 1 unit rumah yang belum terjual
2	Global Terpadu Office (GTO) Graha Simatupang	Gedung Perkantoran Graha Simatupang berada pada lokasi strategis di kawasan bisnis Jakarta Selatan. Graha Simatupang memiliki akses langsung ke Jalan Tol JORR yang memudahkan akses menuju sentral bisnis, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok. Graha Simatupang berada tidak jauh dari Perumahan Pondok Indah dan Kemang, sekolah internasional, pusat perbelanjaan. Pengoperasian lantai 1 dan 2 menjadi GTO adalah upaya Perseroan untuk mengoptimalkan pengelolaan gedung, sehingga <i>value</i> -nya jadi lebih besar baik untuk para penyewa maupun Perseroan. GTO dibagi menjadi 13 ruangan <i>service office</i> ditambah 2 ruang rapat beserta kelengkapannya, dengan fasilitas domisili, operator beserta line telepon khusus untuk setiap penyewa serta fasilitas <i>teleconference</i> .
3	Office One Pesanggrahan	Office One merupakan proyek PT Jasamarga Properti di segmen perkantoran yang menawarkan konsep <i>SmartOffice</i> dan memadukan kombinasi unik dari kantor, komersial, dan lingkungan. Gedung perkantoran ini terdiri dari 6 lantai perkantoran, 1 <i>rooftop garden</i> , dan 1 <i>semi basement</i> yang terdiri dari 3 area komersil dan 6 kios. Fasilitas yang ditawarkan pun cukup lengkap, diantaranya adalah <i>meeting room</i> , <i>rooftop garden</i> , area komersil, <i>gym(extension)</i> , dan fasilitas yang lengkap untuk fungsi umum perkantoran, yaitu pusat bisnis dan ruang server.
4	Grand Sawangan Residence	Perumahan Grand Sawangan Residence Depok terletak dilahan seluas 18 Ha, dan bekerjasama dengan mitra, yaitu PT Abdi Luhur Kawulo Alit. Direncanakan akan diprioritaskan untuk perumahan karyawan LIPI sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Koperasi LIPI nomor 05/ SPK/KOP-LIP/II/2015 dan 01/KSO-ALKA-JMP/II/2015 tanggal 5 Februari 2015. Lokasi lahan terletak ± 5 Km dari rencana exit tol Rangkapan Jaya, Jalan Tol Depok-Antasari. Pelaksanaan groundbreaking telah dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015.
5	Green Residence Sidoarjo	Perumahan Green Residence merupakan perumahan sederhana yang dibangun secara bertahap dengan konsep cluster. Perumahan ini memiliki akses lokasi yang baik ke Bandara Juanda Surabaya dan Pusat Kota Sidoarjo. Perumahan ini sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan dan pengembangannya dilakukan dengan bekerjasama dengan PT Bhumimas Sentosa sebagai mitra pengembang lokal di Jawa Timur. Pada tahun 2016 telah dilakukan serah terima dan sisa penjualan 20% akan digabungkan pada pengembangan Green View Residence Sidoarjo.
6	Royal Pandaan Residence	Perumahan Royal Pandaan Residence adalah proyek perumahan menengah ke atas yang dikembangkan oleh PT Jasamarga Properti yang memiliki konsep unik dan dilengkapi dengan kawasan komersial dan permainan wahana air. Pada area komersial juga akan dikembangkan hotel dan <i>supermarket</i> .
7	Kepemilikan Unit Tamansari Jivva	Pembelian unit Tamansari Jivva dilaksanakan pada 22 Desember 2015 sebanyak 33 unit kamar dan 1 unit villa. Progress konstruksi telah selesai pada Juni 2016 dan sudah mulai beroperasi pada November 2016.
8	Kepemilikan Unit Tamansari Lagoon	Pembelian Tamansari Lagoon dilaksanakan pada 22 Desember 2015 sebanyak 22 unit kamar. Progress konstruksi telah selesai pada Juni 2016. Uji coba operasi mulai pada Oktober 2016 dan <i>grand opening</i> akan dilaksanakan pada April 2017.
9	Kepemilikan Unit Tamansari Parama	Pembelian Gedung Perkantoran Tamansari Parama dilaksanakan pada 22 Desember 2015 sebanyak 2 <i>space</i> . Progress konstruksi telah selesai pada Oktober 2016 dan diproyeksikan akan mulai beroperasi pada tahun 2017.
10	Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) KM 88 A Jalan Tol Purbaleunyi	TIP KM 88 A (arah Bandung) Jalan Tol Purbaleunyi memiliki luas 18,6 Ha dan sudah dimanfaatkan oleh Perseroan seluas ± 5 Ha, yang secara optimal digunakan sebagai tempat istirahat bagi pengguna jalan tol dengan sejumlah fasilitas yaitu SPBU, area parkir, toilet, sarana ibadah, pujasera, dan tempat makan. Kedepannya Perseroan berencana untuk mengembangkan TIP ini sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat, namun juga akan berkembang menjadi area wisata kuliner, retail, dan sarana rekreasi dengan tetap memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan pelayanan kepada pengguna jalan tol.
11	Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) KM 88 B Jalan Tol Purbaleunyi	TIP KM 88 B (arah Jakarta) Jalan Tol Purbaleunyi merupakan TIP yang dikelola oleh Perseroan yang memiliki luas 23 Ha. Sampai saat ini, lahan tersebut sudah dimanfaatkan oleh Perseroan seluas ± 5 Ha yang secara optimal digunakan sebagai tempat istirahat bagi pengguna jalan dengan sejumlah fasilitas yaitu SPBU, area parkir, toilet, sarana ibadah, pujasera, dan tempat makan. Kedepannya Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan TIP menjadi area kuliner, retail, dan rekreasi dengan tetap memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan pelayanan kepada pengguna jalan tol.
12	Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) KM 207 A Jalan Tol Palikanci	TIP KM 207 A Jalan Tol Palikanci memiliki lahan seluas ± 6 Ha yang telah beroperasi secara penuh untuk memenuhi kebutuhan pengguna jalan tol dengan sejumlah fasilitas yaitu SPBU, area parkir, sarana ibadah, toilet, pujasera, dan rumah makan.

No	Proyek	Uraian Proyek
13	Lahan Green View Residence Sidoarjo	Lahan Green View Residence merupakan lahan milik Perseroan yang rencananya akan dikembangkan untuk perumahan dengan menyasar pangsa pasar menengah. Jumlah unit rumah yang akan dibangun direncanakan berkisar antara 300-400 unit. Proyek ini merupakan pengembangan dari Green Residence Sidoarjo yang telah dibangun sebelumnya, berada di samping perumahan Green Residence Sidoarjo yang memiliki lokasi strategis serta akses yang baik ke Pusat Kota Sidoarjo dan Bandara Juanda Surabaya.
14	Lahan Pandu Raya	Lokasi lahan sangat strategis karena berada di jalan raya utama dengan lokasi sejauh 1 km dari akses keluar Jalan Exit Tol Bogor Ring Road dan 2,5 km dari Kebun Raya Bogor. Lokasi berada di wilayah yang sudah berkembang, tidak jauh dari pusat perbelanjaan, sekolah dan rumah sakit. Akan dikembangkan menjadi Condotel yang dilengkapi dengan akses keluar Jalan Tol Bogor Ring Road di Jalan Raya Bogor. Lokasi berada di wilayah yang sudah berkembang, tidak jauh dari pusat perbelanjaan, sekolah dan rumah sakit. Setelah perijinan diperoleh, akan dikembangkan menjadi apartemen yang dilengkapi dengan fasilitas retail/komersial pendukung. Adapun luas lahan yang dimiliki oleh Perseroan adalah 3.389 m2
15	Lahan Koridor JORR W2 Utara	Lokasi lahan sangat strategis karena tepat berada di samping <i>frontage</i> akses langsung ke jalan Tol JORR W2 Utara (Exit Tol Ciledug). Peruntukan lahan adalah untuk kawasan jasa dan perdagangan. Perseroan merencanakan lahan ini untuk dikembangkan menjadi <i>Mixed Use Building</i> sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan wilayah tersebut.
PENGEMBANGAN PROYEK		
1	Pangkalan Karawang	PT Jasamarga Properti berencana membangun daerah kawasan industri beserta fasilitas pendukung lainnya di Pangkalan Karawang, Jawa Barat. Luas area Pangkalan Karawang ±170 Ha. Proyek Pangkalan Karawang masih dalam tahap inisiasi dan sudah dimasukkan kedalam RKAP 2017.
2	Apartemen Kaumsari, Bogor	PT Jasamarga Properti berencana untuk membangun Apartemen Kaumsari di wilayah Bogor. Dengan luas tanah ±7.000m2 yang akan dibangun apartemen sebanyak 3 tower, setiap tower terdiri dari 28 lantai. Fasilitas yang tersedia adalah mall/ pusat perbelanjaan. Saat ini Perseroan sedang melakukan tahap pemilihan konsultan perencanaan dan untuk tahap pembangunan akan dilakukan pada akhir tahun 2018.
3	Pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)	Mulai tahun 2016, Perseroan kembali dipercaya Wuntuk bekerjasama dengan Anak Perusahaan Kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk mengembangkan Tempat Istirahat Jalan Tol pada konsesi Jalan Tol yang dimiliki oleh Anak Perusahaan Jasa Marga. Pada tahun 2017 PT Jasamarga Properti telah melakukan pelaksanaan konstruksi. Beberapa TIP tersebut antara lain adalah:
<p>Sudah beroperasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TIP Jalan Tol Purbaleunyi KM 88 A 2. TIP Jalan Tol Purbaleunyi KM 88 B 3. TIP Jalan Tol Palikanci KM 207 A <p>Tahap perencanaan / pembangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TIP Jalan Tol Solo-Ngawi KM 26 A 2. TIP Jalan Tol Solo-Ngawi KM 26 B 3. TI Jalan Tol Solo-Ngawi KM 45 A 4. TI Jalan Tol Solo-Ngawi KM 45 B 5. TIP Jalan Tol Solo-Ngawi KM 82 A 6. TIP Jalan Tol Solo-Ngawi KM 82 B 7. TI Jalan Tol Ngawi-Kertosono KM 104 A 8. TI Jalan Tol Ngawi-Kertosono KM 104 B 9. TIP Jalan Tol Surabaya-Mojokerto KM 725 A <p>Tahap Inisiasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TIP Jalan Tol JORR W2 Utara 2. TI Jalan Tol Batang-Semarang KM 389 B 3. TIP Jalan Tol Batang-Semarang KM 407 A 4. TIP Jalan Tol Batang-Semarang KM 418 B 5. TI Jalan Tol Batang-Semarang KM 420 A 6. TI Jalan Tol Semarang-Solo KM 22 B 7. TI Jalan Tol Semarang-Solo KM 49 A 8. TIP Jalan Tol Semarang-Solo KM 49 B 9. TI Jalan Tol Semarang-Solo KM 62 B 10. TIP Jalan Tol Semarang-Solo KM 65 A 11. TIP Jalan Tol Semarang-Solo KM 80 A 12. TIP Jalan Tol Semarang-Solo KM 80 B 13. TIP Jalan Tol Gempol-Pasuruan KM 16 A 14. TIP Jalan Tol Gempol-Pasuruan KM 16 B 15. TIP Jalan Tol-Pandaan Malang KM 7 A 16. TIP Jalan Tol-Panaan Malang KM 7 B 17. TIP Jalan Tol-Pandaan Malang KM 26 A 18. TIP Jalan Tol-Pandaan Malang KM 26 B 19. TIP Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi KM 65 A 20. TIP Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi KM 65 B 21. TIP Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 26 A 22. TIP Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 26 B 23. TIP Jalan Tol Manado-Bitung KM 26 A 24. TIP Jalan Tol Manado-Bitung KM 26 B 		

Sesuai dengan arahan Perseroan, kebijakan strategis PT JMP dalam pengembangan properti dan usaha lainnya terbagi dalam beberapa sektor lingkup kerja yaitu:

PERKEMBANGAN BISNIS

Bidang properti memiliki daya tarik tersendiri bagi industri konstruksi, khususnya jika dikaitkan dengan keberadaan akses jalan. Hal itu karena nilai sebuah properti akan semakin meningkat jika didukung dengan akses jalan yang baik dan memiliki jangkauan yang luas. Peluang ini yang diharapkan dapat dimanfaatkan Perseroan melalui pembentukan PT JMP sebagai Anak Perusahaan non-jalan tol. PT JMP diharapkan lebih agresif dalam pengembangan properti di wilayah sekitar pintu masuk dan keluar serta pengembangan bisnis Tempat Istirahat dan Pelayanan. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal, mengingat PT JMP merupakan salah satu anak perusahaan Jasa Marga sehingga dengan banyaknya rencana pembangunan jalan tol di berbagai kota di Indonesia, maka peluang pemanfaatan wilayah untuk pengembangan properti maupun mendapatkan hak pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) akan semakin besar.

SDM dan Organisasi

Fokus terhadap peningkatan kompetensi SDM sebagai langkah awal untuk mengelola peluang bisnis properti. Selain itu, didukung dengan pembentukan struktur organisasi yang tepat dalam menghadapi perkembangan bisnis di bidang properti yang terus berubah.

Teknologi Informasi

Implementasi teknologi informasi guna mendukung efektivitas dan efisiensi pengendalian keuangan

Keuangan

Pengelolaan keuangan untuk mendapatkan instrumen pendanaan yang lebih murah dan mendukung pola investasi properti

Manajemen Risiko

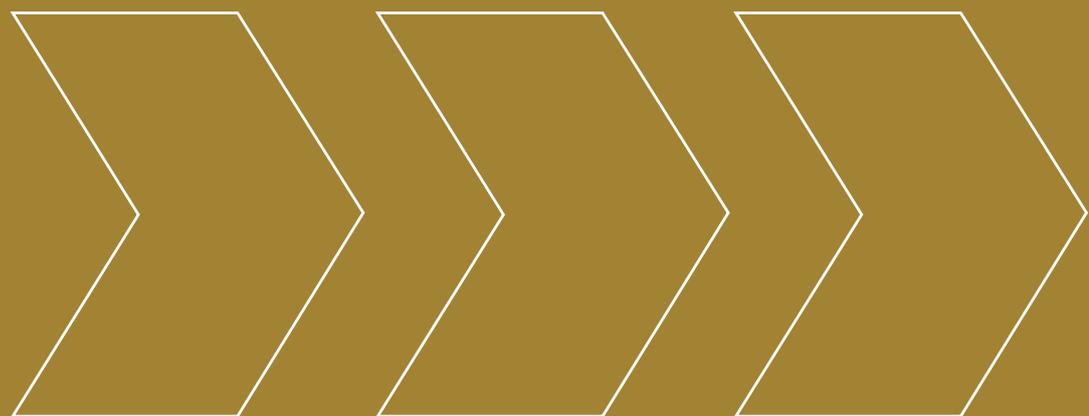
Pengendalian risiko investasi dilakukan secara berkala pada seluruh tahapan investasi



Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 42 km dikelola oleh PT Jasamarga Kualanamu Tol, yang sangat berdampak percepatan distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan perekonomian di Sumatra Utara.



09 | TATA KELOLA PERUSAHAAN



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Jasa Marga memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance-GCG*) yang tercermin salah satunya dalam hasil self-assessment GCG tahun 2017 dengan skor 97,17 atau **“SANGAT BAIK”**

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG JASA MARGA

Jasa Marga memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi Perseroan dalam penerapan GCG, yaitu:

1. Undang Undang Republik Indonesia, di antaranya adalah:
 - a. Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - b. Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
 - c. Undang Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang Jalan.
 - d. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - e. Undang Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
 - f. Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - g. Undang Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah, di antaranya adalah:
 - a. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol dan perubahan-perubahannya.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, di antaranya adalah:
 - a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara, dengan perubahan terakhirnya yaitu No. PER-15/MBU/2012.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahan terakhirnya No. PER-09/MBU/2012.
6. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK – dahulu Bapepam-LK), di antaranya adalah:
 - a. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003, Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
 - b. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-40/PM/2003, Peraturan Bapepam No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan.
 - c. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan No.

- IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perubahan Publik.
- d. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- e. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- f. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik.
5. Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dalam rangka standarisasi BUMN Terbuka dan pemenuhan tata kelola di bidang peraturan Pasar Modal sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98 tanggal 28 April 2017 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, berikut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0131742 tanggal 28 April 2017 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-055628.AH.01.11TAHUN 2017 tanggal 28 April 2017.

6. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., di antaranya adalah:
- Keputusan Direksi No. 129/KPTS/2017 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - Keputusan Direksi No. 128/KPTS/2017 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - Keputusan Direksi No. 127/KPTS/2017 tentang Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - Keputusan Direksi Jasa Marga No. 126/KPTS/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - Keputusan Direksi No. 67/KPTS/2017 tentang Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan.
 - Keputusan Direksi No. 149/KPTS/2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - Keputusan Direksi No. 116/KPTS/2016 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan perubahan-perubahannya.
 - Keputusan Direksi No. 08/KPTS/2016 tentang Penjabaran Tata Nilai PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - Keputusan Direksi No. 43/KPTS/2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Perusahaan.
 - Keputusan Direksi No. 09/KPTS/2013 tentang Pedoman Whistleblowing System PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - Keputusan Direksi No. 197/KPTS/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

- Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga.
- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum dalam Risalah RUPS.

Selain itu, Jasa Marga dalam praktiknya juga memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta *best practice*. Pelaksanaan GCG yang diimplementasikan Perseroan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 yang menyebutkan bahwa “BUMN wajib melaksanakan operasional perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran”.

PRINSIP-PRINSIP GCG

Peningkatan praktik *Good Corporate Governance* di Jasa Marga tidak terlepas dari komitmen segenap insan Jasa Marga untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan dalam menjalankan bisnis jalan tol, yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness* (TARIF).

TRANSPARENCY	Jasa Marga menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh <i>Stakeholders</i> sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan dan Pelanggan serta Mitra Kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
ACCOUNTABILITY	Jasa Marga menjamin kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan pertanggungjawaban Jajaran Perseroan yang memungkinkan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perseroan kepadanya. Tiap kegiatan dapat diukur tanggung jawab dan ketepatan waktunya, serta memberikan rasa kepuasan bagi Pengguna Layanan Jalan Tol.
RESPONSIBILITY	Jasa Marga menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.
INDEPENDENCY	Jasa Marga menjamin pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
FAIRNESS	Jasa Marga menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Stakeholders berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

TUJUAN PENERAPAN GCG JASA MARGA

Untuk mewujudkan perusahaan yang berdaya saing tinggi dan terus tumbuh berkembang, Jasa Marga telah dan terus mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta *best practice*. Pelaksanaan GCG yang diimplementasikan Perseroan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 yang menyebutkan bahwa "BUMN wajib melaksanakan operasional perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajiban".

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) sebagaimana Keputusan Direksi No. 174/KPTS/2013 tanggal 17 Desember 2013, tujuan penerapan GCG di Jasa Marga adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, Pengguna Jalan Tol/Pelanggan lainnya, Mitra Usaha, Kreditur/Investor, serta Masyarakat dan Lingkungan.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan risiko Perseroan secara lebih hati-hati (*prudent*), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.
3. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
4. Memberdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ Perseroan.
5. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif dan efisien demi tercapainya Visi dan Misi Perseroan.
6. Mendorong agar pengelola Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan.



Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) melakukan rapat rutin guna memastikan perkembangan bisnis dan pelayanan Perseroan berjalan dengan baik, Kamis, 14 Desember 2017.

7. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada Stakeholders.
8. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.
9. Memperbaiki budaya kerja perusahaan.
10. Meningkatkan pencitraan Perseroan (image) yang semakin baik.
11. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

KEBIJAKAN INTERNAL GCG JASA MARGA

Pada tatanan internal Jasa Marga telah menyusun dan menerapkan kebijakan operasional bagi seluruh insan Jasa Marga sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG tertuang dalam Visi dan Misi Jasa Marga.

KODE ETIK JASA MARGA

Jasa Marga senantiasa berupaya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Untuk mewujudkan hal tersebut, Jasa Marga telah memiliki Code of Conduct yang dinamakan Kode Etik Jasa Marga. Kode Etik Jasa Marga ini merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai atau norma yang dianut oleh seluruh Insan Jasa Marga dalam melaksanakan tugasnya yang di dalamnya memuat etika bisnis dan perilaku seluruh Insan Jasa Marga dalam mencapai tujuan, Visi dan Misi Perseroan antara lain etika hubungan antara Perseroan dengan Karyawan, Pengguna Jalan Tol, Pemegang Saham, Pemasok, Kreditur/ Investor, Pemerintah, Mitra Usaha, Pesaing, Media Massa, Masyarakat dan Lingkungannya. Kode Etik Jasa Marga diberlakukan tahun sudah diberlakukan dan ditetapkan oleh Jasa Marga sejak tahun 2005 melalui Keputusan Direksi No. 77/KPTS/2005 dan diperbaharui pada tanggal 30 Agustus 2017 melalui SK No. 127/KPTS/2017.

Kode Etik Jasa Marga wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap insan Jasa Marga (Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan Jasa Marga).

Kode Etik Insan Jasa Marga pada prinsipnya mewajibkan segenap Insan Jasa Marga untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Komitmen Insan Jasa Marga.
2. Menjaga nama baik Perseroan.
3. Menjaga hubungan baik antar Insan Jasa Marga.
4. Menjaga kerahasiaan Perseroan.
5. Menjaga dan menggunakan asset Perseroan.
6. Menjaga keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja.
7. Perilaku asusila, narkoba, obat terlarang, perjudian, dan merokok.
8. Melakukan pencatatan data Perseroan dan penyusunan laporan.
9. Menghindari terjadinya konflik kepentingan pribadi (insider trading).
10. Penanganan Gratifikasi.
11. Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

12. Tidak memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi (benturan kepentingan).
13. Aktivitas politik.

Pembahasan lebih rinci mengenai Kode Etik dapat dilihat di Sub Bab Kode Etik pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI GCG

Selain penyempurnaan aturan, Perseroan juga melanjutkan sosialisasi dan internalisasi GCG kepada segenap Insan Jasa Marga untuk memastikan ketaatan terhadap praktik GCG. Perseroan percaya, bahwa penerapan GCG tidak cukup dilakukan hanya dengan mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku, namun harus ditunjukkan dalam praktik sehari-hari. Perseroan meyakini, bahwa dengan melaksanakan GCG, kepercayaan dari para *stakeholder* dapat terus dijaga dan Perseroan pun bertekad menuju *Good Corporate Citizen*.

BAGAN ROADMAP GCG JASA MARGA



POKOK BUDAYA JASA MARGA

Jasa Marga telah menetapkan Tata Nilai Jasa Marga sebagai budaya Perseroan yang menjadi landasan dalam interaksi Insan Jasa Marga dengan para stakeholders, sebagaimana Keputusan Direksi No. 50/KPTS/2013 dan perubahannya No. 67/KPTS/2017.

J	JUJUR	Jasa Marga dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu JUJUR, adil, transparan dan bebas dari benturan kepentingan.
S	SIGAP	Jasa Marga SIGAP melayani pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dengan bertindak peduli dan proaktif serta tetap mengedepankan kehati-hatian.
M	MUMPUNI	Jasa Marga MUMPUNI dalam bekerja atas dasar kompetensi, konsisten dan inovatif.
R	RESPEK	Jasa Marga RESPEK terhadap pemangku kepentingan dalam bersinergi mencapai prestasi.

Tata nilai budaya kerja Jasa Marga menjadi landasan bagaimana Jasa Marga mencapai Visi “Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia”. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kerja diharapkan akan dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Jasa Marga untuk senantiasa unggul dalam layanan dan kinerja karena mencerminkan keinginan sungguh-sungguh dan komitmen yang kuat dari segenap insan Jasa Marga untuk memberi yang terbaik kepada seluruh pihak yang berkepentingan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang diterapkan secara konsisten sehingga semua nilai yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas Perseroan dapat didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang saling menguntungkan.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) sebagaimana perubahan terakhirnya yaitu Keputusan Direksi No. 126/KPTS/2017 merupakan seperangkat peraturan dan praktik yang menjadi dasar atau acuan bagi Organ Perseroan dan Manajemen dalam mengelola Perseroan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) berisikan prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan yang selaras dengan Visi, Misi dan nilai-nilai Perseroan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) merupakan kristalisasi dari kaidah-kaidah GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai budaya, Visi dan Misi, serta praktik-praktik terbaik di bidang GCG. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) menjadi acuan bagi Pemegang

Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan, serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan lainnya dalam berhubungan dengan Perseroan.

Berbagai hal yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*):

1. Hubungan antara Perseroan dengan Pemegang Saham.
2. Fungsi serta peran Dewan Komisaris.
3. Fungsi serta peran Direksi.
4. Hubungan antara Perseroan dengan Stakeholders.
5. Prinsip-prinsip mengenai kebijakan Perseroan yang penting, seperti Kebijakan Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Akuntansi dan Keuangan, Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan kebijakan lainnya.

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten dan berkesinambungan, dan sejalan dengan visi dan misi Perseroan serta untuk meningkatkan nilai tambah Perseroan bagi segenap pemangku kepentingan, maka Perseroan memandang perlu untuk menyusun suatu pedoman yang mengatur penanganan benturan kepentingan. Hal ini perlu dilakukan mengingat dalam kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antar pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya yang mungkin menimbulkan potensi terjadinya benturan kepentingan.

Perseroan menyadari pentingnya pemahaman terhadap benturan kepentingan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar pemangku kepentingan sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik, maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan yang berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku serta diselenggarakan

dengan nilai-nilai yang berlaku di perusahaan. Perseroan telah memiliki kebijakan terkait benturan kepentingan yang cukup lengkap dan tersebar dalam beberapa ketentuan, di antaranya diatur dalam ketentuan kepegawaian, sanksi administratif, pengadaan barang dan jasa, perkreditan, kode etik serta Anggaran Dasar Perseroan.

Pedoman Benturan Kepentingan tersebut telah dimuat dalam Keputusan Direksi No. 128/KPTS/2017.

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)

Dalam rangka pelaksanaan GCG, Direksi dan Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengikat bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Pedoman Tata Tertib Kerja yang ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Board Manual merupakan salah satu bentuk komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Board Manual menjelaskan tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris agar tercipta pengelolaan perusahaan secara professional, transparan dan efisien untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bersepakat untuk menggunakan Board Manual sebagai panduan dalam berhubungan kerja, sehingga tercipta sinergi dan kerja sama yang baik serta sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Pengembangan Board Manual dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan. Board Manual tahun

2017 merupakan penyesuaian dan penyempurnaan tata kelola peraturan Pasar Modal. Proses penyesuaian Board Manual 2017 telah diselesaikan pada akhir tahun 2017 dan ditandatangani pada awal 2018. Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga dapat dilihat di situs web Perseroan www.jasamarga.com

Secara garis besar, isi dari Board Manual adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Dewan Komisaris
- Bab III Direksi
- Bab IV Kegiatan Antar Organ Perusahaan
- Bab V Penutup

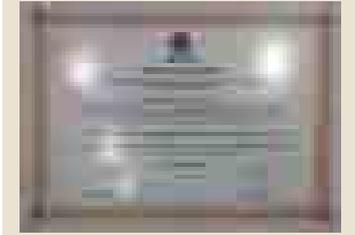
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Implementasi Whistleblowing System (WBS) merupakan salah satu mekanisme deteksi dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran di Jasa Marga yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak image Jasa Marga. Pengelolaan WBS dilakukan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu PT Deloitte Konsultan Indonesia. Dengan demikian, WBS merupakan komitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas dalam bentuk partisipasi aktif insan Jasa Marga untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Jasa Marga.

Pembahasan lebih rinci mengenai WBS dapat dilihat pada Sub Bab Whistleblowing System, Bab Tata Kelola Perusahaan.

KOMITMEN JASA MARGA DALAM PENERAPAN GCG

2008	Pernyataan Penerapan GCG	
------	--------------------------	---

2010	Pernyataan Kebijakan Manajemen Risiko	
2011	Pernyataan Mulai Penerapan Whistleblowing System	
2012	Komitmen Jasa Marga Bersih antara Manajemen dan Serikat Karyawan Jasa Marga	
2013	Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi Disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan Pakta Integritas Setiap Awal Tahun oleh Seluruh Insan Jasa Marga dan pada Saat Pengadaan Barang/Jasa • Implementasi Pengendalian Gratifikasi 	
2016	<p>Peningkatan implementasi Pengendalian Gratifikasi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana komitmen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Gratifikasi di seluruh unit kerja Kantor Pusat dan Cabang • Penyediaan beberapa fasilitas pelaporan penerimaan Gratifikasi berupa portal internal dan drop box pelaporan gratifikasi 	
2017	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Kantor Pusat dengan mengundang perwakilan Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Anak Perusahaan. • Sosialisasi Gratifikasi dan LHKPN yang mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Refly Harun sebagai Narasumber dengan peserta Pejabat Struktural dan Non-Struktural hingga dua tingkat di bawah Direksi. • Survey Visi, Misi dan Tata Nilai secara online. 	

Pada tahun 2017, Perseroan melaksanakan Sosialisasi terkait Gratifikasi secara Intensif, di antaranya sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Kantor Pusat dengan mengundang perwakilan Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Anak Perusahaan.
2. Sosialisasi Gratifikasi dan LHKPN yang mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Refly Harun sebagai Narasumber dengan peserta Pejabat Struktural dan Non-Struktural hingga dua tingkat di bawah Direksi.
3. Survey Visi, Misi dan Tata Nilai secara online.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Pedoman tata kelola perusahaan terbuka diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.

21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Peraturan dan Surat Edaran OJK tersebut mengatur pedoman tata kelola perusahaan yang baik yang dibagi ke dalam 5 (lima) aspek tata kelola perusahaan terbuka, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Tabel Kepatuhan Jasa Marga terhadap Peraturan dan Surat Edaran OJK Terkait Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Kepatuhan Jasa Marga
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Voting terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh Pemimpin RUPS, sedangkan voting tertutup dilakukan dengan cara menggunakan Kartu Suara. Keterangan: Comply
		2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh anggota Direksi Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan. Salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak dapat hadir dalam RUPS Tahunan karena ada tugas yang tidak dapat diwakilkan.
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Keterangan: Explain Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan paling sedikit selama 1 (satu) tahun untuk menyediakan kecukupan waktu bagi Pemegang Saham untuk memperoleh informasi.
	2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Keterangan: Comply Perseroan memiliki peraturan tentang Pedoman Penyampaian Informasi Perseroan melalui Non-Deal Roadshow, Investor Conference, Analyst Meeting dan Public Expose yang memuat waktu penyampaian informasi, lokasi penyelenggaraan, kriteria penyelenggaraan, materi presentasi, frekuensi pelaksanaan kegiatan, feedback dari penyelenggara, dan laporan penyelenggaraan. Keterangan: Comply

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Kepatuhan Jasa Marga
		2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Materi presentasi Perseroan untuk Pemegang Saham atau Investor tersedia dalam situs web Perseroan untuk memberikan kesetaraan pada Pemegang Saham atau Investor atas pelaksanaan komunikasi. Keterangan: Comply
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris.	3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris berpedoman pada peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi Perseroan sebagai perusahaan terbuka. Keterangan: Comply
		2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha Perseroan. Keterangan: Comply
	4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-00177/XI/2012. Keterangan: Comply
		2. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan self-assessment Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Keterangan: Comply
		3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan Dewan Komisaris terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dimuat dalam Pedoman Dewan Komisaris. Keterangan: Comply
		4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Perseroan telah memiliki Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko yang menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Keterangan: Comply
3. Fungsi dan Peran Direksi.	5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Penentuan jumlah anggota Direksi berpedoman pada peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi Perseroan sebagai perusahaan terbuka. Keterangan: Comply

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Kepatuhan Jasa Marga
		2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi anggota Direksi telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha Perseroan. Keterangan: Comply
		3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait. Keterangan: Comply
	6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	Direksi telah memiliki mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment). Keterangan: Comply
		2. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan self-assessment Direksi diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. Keterangan: Comply
		3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan Direksi terkait pengunduran diri anggota Dirkesi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dimuat dalam Pedoman Direksi. Keterangan: Comply
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan.	7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading yang memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. Keterangan: Comply
		2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	Perseroan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud yang merupakan bagian dari kode etik yang menggambarkan pencegahan terhadap segala praktik korupsi baik baik memberi atau menerima dari pihak lain. Keterangan: Comply

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Kepatuhan Jasa Marga
		3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Perseroan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud yang merupakan bagian dari kode etik yang menggambarkan pencegahan terhadap segala praktik korupsi baik baik memberi atau menerima dari pihak lain. Keterangan: Comply
		4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Perseroan memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur, yang mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perseroan kepada kreditur. Keterangan: Comply
		5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.	Perseroan telah memiliki whistleblowing system yang mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan dan hasil penanganan serta tindak lanjut pengaduan. Keterangan: Comply
		6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Karyawan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2017-2019 Pasal 39 tentang Insentif Kinerja. Keterangan: Explain
5. Keterbukaan Informasi.	8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Selain situs web, Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sebagai media keterbukaan informasi. Keterangan: Comply
		2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Laporan Tahunan Jasa Marga mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Keterangan: Comply

PENILAIAN ATAS PENERAPAN GCG JASA MARGA TAHUN 2017

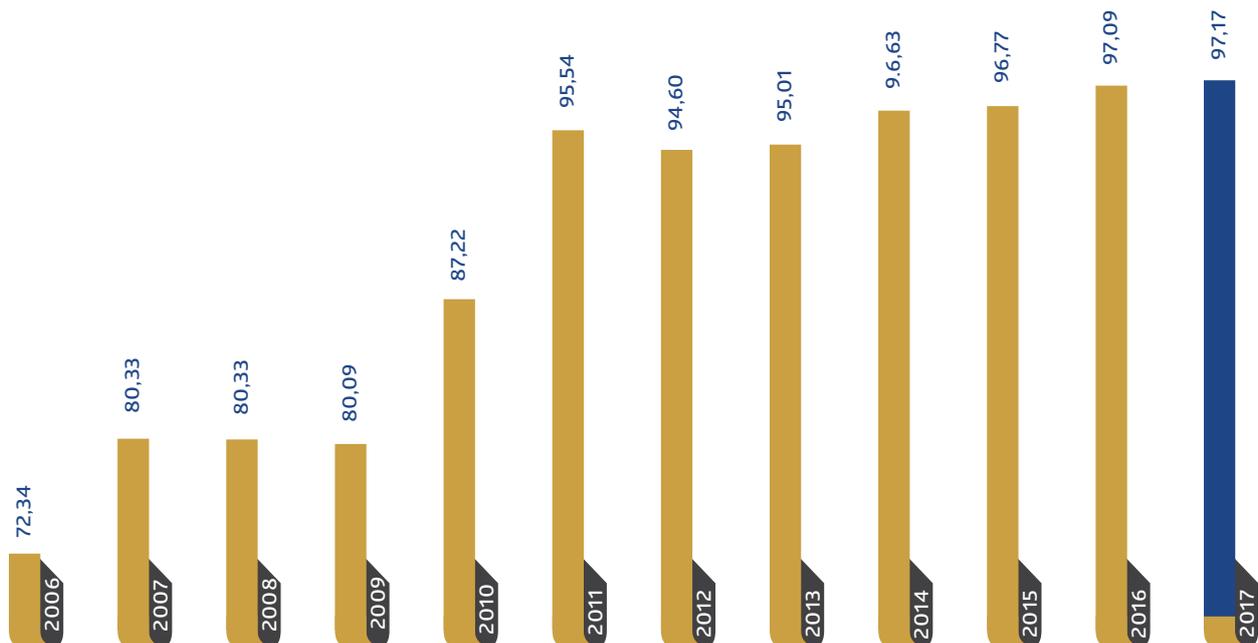
ASSESSMENT GCG

Assessment GCG dilakukan dengan menggunakan parameter penilaian Kementerian BUMN yaitu SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Pada tahun buku 2016, dari total nilai maksimal sebesar 100,00 total nilai Assessment GCG yang diperoleh Perseroan

adalah sebesar 97,09 yang setara dengan 97,09% sehingga secara keseluruhan, hasil assessment atas implementasi GCG Perseroan tahun 2016 menempatkan Perseroan pada Kualitas Penerapan GCG "Sangat Baik". Sedangkan pada tahun buku 2017, dilakukan self-assessment GCG dengan perolehan nilai sebesar 97,17%. Hal ini berarti, secara keseluruhan pada tahun 2017, Perseroan berada pada kualitas penerapan GCG "**Sangat Baik**". **Sedangkan pada tahun buku 2017, dilakukan self-assessment GCG dengan perolehan nilai sebesar 97,17%. Hal ini berarti, secara keseluruhan pada tahun 2017, Perseroan berada pada kualitas penerapan GCG "Sangat Baik"**.

TABEL HASIL ASSESSMENT GCG PERSEROAN



Catatan:

Sejak tahun 2012 diberlakukan parameter penilaian baru yaitu SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Ringkasan hasil assessment penerapan good corporate governance Jasa Marga tahun 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL HASIL SELF-ASSESSMENT GCG JASA MARGA TAHUN 2017

Aspek Pengujian/Indikator Parameter	Bobot	Skor	% Capaian	Penjelasan
I. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7	6,870	98,14	SANGAT BAIK
II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9	8,703	96,70	SANGAT BAIK
III. Dewan Komisaris	35	34,602	98,86	SANGAT BAIK
IV. Direksi	35	34,078	97,37	SANGAT BAIK
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	8,633	95,93	SANGAT BAIK
VI. Aspek Lainnya	5	4,286	85,71	SANGAT BAIK
SKOR KESELURUHAN	100	97,172	97,17	SANGAT BAIK

ASEAN CG Scorecard

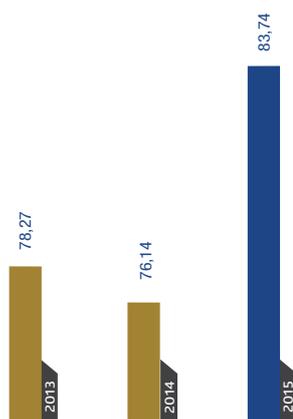
Jasa Marga mengikuti *Assessment GCG* yang dilakukan oleh the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), yang menilai praktik *corporate governance* (CG) berdasarkan ASEAN CG (Corporate Governance) *Scorecard*.

Penilaian tahun 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 didasarkan pada informasi publik, terutama pada laporan tahunan serta situs web Perseroan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa total skor Jasa Marga adalah 83,74% dengan predikat "GOOD". Total skor Perseroan berada di atas skor rata-rata.

Pada penilaian tahun 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016, sesuai dengan keputusan ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dari masing-masing 6 (enam) negara belum terdapat penunjukan sebagai Domestic Ranking Body (DRB). Sehubungan dengan hal tersebut, penilaian ASEAN CG *Scorecard* dilakukan tidak secara regional tetapi secara domestik di masing-masing negara, sehingga tidak ada peer review. Selain itu juga belum ada penentuan Top 50 ASEAN.

Penilaian ASEAN CG *Scorecard* secara domestik dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship bekerja sama dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

GRAFIK HASIL ASSESSMENT GCG JASA MARGA BERDASARKAN ASEAN CG SCORECARD



Sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan praktik penerapan CG yang baik, IICD melakukan penilaian terhadap 200 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dilaksanakan pada bulan Juni-November 2017, berdasarkan penerapan GCG para emiten di tahun 2016. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Jasa Marga mendapat 2 penghargaan yang diberikan pada acara The 9th IICD Corporate Governance Conference & Award pada tanggal 27 November 2017. Kedua penghargaan tersebut adalah penghargaan TOP 50 Big Cap Public Listed Companies (urutan ke-25) dan The Best Right of Shareholder Award.

Memperkuat Implementasi GCG Jasa Marga

Dalam memaknai tata kelola perusahaan yang baik, Jasa Marga memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu mendorong GCG sebagai bagian dari pengelolaan Perseroan melalui penerapan suatu sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, kesetaraan dan tanggung jawab.

Jasa Marga telah melakukan berbagai inisiatif implementasi GCG, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pihak independen dalam mencapai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable governance*).

Dalam rangka memperkuat implementasi GCG tahun 2017, Jasa Marga telah melakukan pencapaian program yang meliputi:

1. Penguatan Komitmen Implementasi GCG.

Kegiatan yang dilakukan adalah penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Insan Jasa Marga dan penandatanganan Komitmen Jasa Marga Bersih oleh Direktur Utama dan Serikat Karyawan Jasa Marga.

2. Perubahan dan/atau Pemutakhiran Pedoman GCG

Kegiatan yang dilakukan adalah review dan/atau pemutakhiran Pedoman dalam bentuk Keputusan Direksi di antaranya:

- a. Surat Keputusan Direksi No. 126/KPTS/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) di PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- b. Surat Keputusan Direksi No. 127/KPTS/2017 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- c. Surat Keputusan Direksi No. 128/KPTS/2017 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) di PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- d. Surat Keputusan Direksi No. 129/KPTS/2017 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

3. Sosialisasi GCG.

Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi GCG bagi karyawan baru.

4. Implementasi Pengendalian Gratifikasi.

Melanjutkan kerja sama dengan KPK sebagaimana komitmen Program Pengendalian Gratifikasi di tahun 2013, Jasa Marga melaksanakan implementasi pengendalian Gratifikasi sesuai dengan jadwal komitmen yang telah disampaikan kepada KPK pada tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Gratifikasi dan LHKPN yang diselenggarakan di Kantor Pusat yang mengundang Direksi, perwakilan cabang dan anak perusahaan dengan turut mengundang perwakilan KPK sebagai narasumber.
- b. Sosialisasi Gratifikasi di Anak Perusahaan.
- c. Penyediaan Drop Box untuk pelaporan penerimaan Gratifikasi di Kantor Pusat, Kantor Dewan Komisaris dan seluruh Kantor Cabang.
- d. Penyediaan Portal Internal GCG untuk Insan Jasa Marga.
- e. Surat Edaran Larangan Gratifikasi untuk internal Perseroan dan Iklan Larangan Gratifikasi di media cetak serta situs web Perseroan.
- f. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam rangka hari raya.
- g. Pengelolaan pelaporan gratifikasi yang diterima oleh Insan Jasa Marga (di luar event Hari Raya).

5. Pengelolaan Whistleblowing System.

Pengelolaan Whistleblowing System bekerja sama dengan pihak eksternal yang independen dan berpengalaman. Tim Pengelolaan Whistleblowing System melakukan evaluasi atas pengelolaan Whistleblowing System di Perseroan.

6. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Dalam rangka memenuhi Undang Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Melalui Surat Keputusan Direksi No. 43/KPTS/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Perusahaan, pada dasarnya Jasa Marga telah menerapkan kewajiban penyampaian LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

7. Pengukuran Implementasi GCG.

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan self-assessment GCG tahun 2017, dengan pencapaian score pada tahun 2017 berdasarkan penilaian parameter Kementerian BUMN dengan skor 96,93% atau SANGAT BAIK.

8. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi ke OJK dan Bursa Efek Indonesia

Kegiatan yang dilakukan adalah menyusun pelaporan dalam bentuk keterbukaan informasi jika terdapat aksi korporasi atau informasi yang bersifat material yang wajib untuk diinformasikan kepada pemegang saham.

9. Program Pengenalan bagi Direksi dan Anggota Komisaris yang baru diangkat

Kegiatan yang dilakukan adalah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat diberikan Program Pengenalan Adapun materi Program Pengenalan adalah Visi, Misi dan Tata Nilai Jasa Marga, Konsep dan Pengusahaan Jalan Tol, Good Corporate Governance Jasa Marga, Jasa Marga Update (Ikhtisar Bisnis dan Kinerja Jasa Marga).

10. Survey Visi Misi dan Tata Nilai

Kegiatan yang dilakukan adalah menghimpun data survey yang dilakukan secara online yang telah diisi oleh Insan Jasa Marga sehingga menghasilkan data tingkat pemahaman karyawan terhadap Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi No. 67/KPTS/2017 tentang Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan.

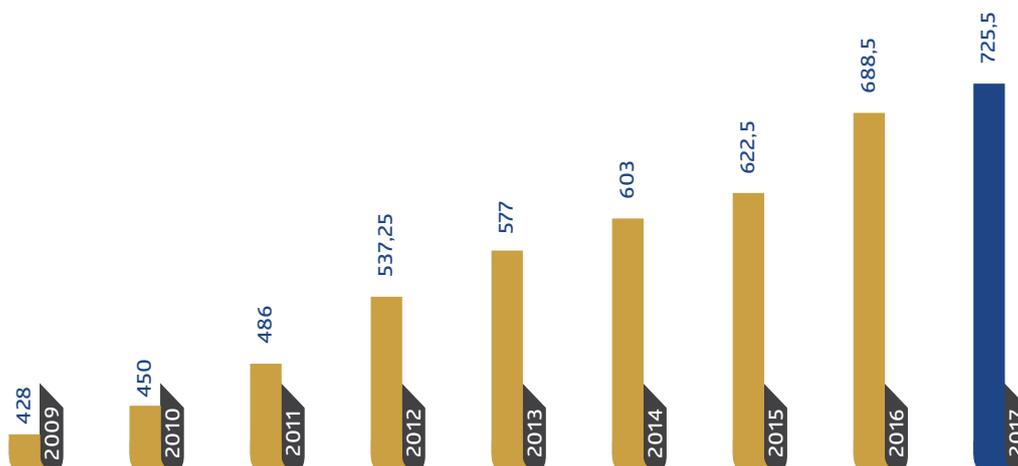
11. Pengukuran Kinerja

Untuk menunjang strategi perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan, sejak tahun 2008 Perseroan menerapkan Malcolm Baldrige sebelum akhirnya pada tahun 2012 beralih ke KPKU yang bersifat mandatori dari Kementerian Negara BUMN. KPKU merupakan alat ukur kinerja perusahaan sebagaimana Surat Kementerian Negara BUMN No. S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN.

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) adalah suatu kriteria yang komprehensif untuk mengukur kinerja BUMN sekaligus sebagai pedoman guna meningkatkan kinerja BUMN sehingga dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam mewujudkan kemakmuran bangsa.

Hasil asesmen KPKU BUMN tahun 2016, Perseroan meraih total skor 688,5 atau di level Industry Leader. Sedangkan pada tahun tahun 2017, Perseroan berhasil meraih total skor sebesar 725,5 atau di level Industry Leader.

GRAFIK HASIL ASESMEN KPKU JASA MARGA 2009-2017



12. Budaya Inovasi

Untuk membangun budaya inovasi, Perseroan menerapkan perbaikan mutu berkelanjutan (Kelompok Perbaikan Mutu/ KPM dan Perbaikan Praktis/PP) sehingga budaya mutu secara intensif dan terintegrasi dapat tercipta dimana setiap tahun dilakukan penilaian dalam event Temu Karya mutu Jasa Marga.

Rekomendasi Hasil Penilaian GCG

Rekomendasi hasil penilaian implementasi GCG di Jasa Marga serta penjelasan/alasan tidak/belum diterapkannya rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL REKOMENDASI HASIL SELF-ASSESSMENT GCG JASA MARGA TAHUN 2017

No.	Aspek/ Indikator	Pencapaian		Rekomendasi/Saran	Penjelasan/Alasan
		Skor	%		
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	6,870	98,14	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan secara berkala Laporan pengelolaan Whistleblowing System kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Kebijakan No. 09/KPTS/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Whistleblowing System PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Melakukan review dan evaluasi kebijakan Whistleblowing System secara menyeluruh termasuk pelaksanaan kebijakan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan Whistleblowing System (WBS) disampaikan oleh Tim Pengelolaan WBS kepada Direksi berdasarkan Nota Dinas No. 01/WBS-XI/2017 tanggal 22 November 2017 perihal Laporan Hasil Penerapan WBS dari Ketua Tim Pengelola WBS kepada Direktur Utama. Berdasarkan konfirmasi dan review dokumen, penyampaian laporan kepada Dewan Komisaris terkait Laporan Hasil Penerapan WBS disampaikan melalui e-mail kepada Komite NRR selaku organ Pendukung Dewan Komisaris pada tanggal 22 November 2017. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan WBS akan disosialisasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Jasa Marga dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/ penyempurnaan WBS ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan.

No.	Aspek/ Indikator	Pencapaian		Rekomendasi/Saran	Penjelasan/Alasan
		Skor	%		
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	8,703	96,70	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mencantumkan alasan pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi/Dewan Komisaris sebelum habis masa jabatannya dalam Keputusan RUPS. 2. RUPS perlu menegaskan bahwa alasan pemberhentian telah disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A kepada anggota Direksi/Dewan Komisaris yang bersangkutan dan telah diterima atau yang bersangkutan tidak berkeberatan. 	<p>Hal ini adalah kebijakan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa yang salah satunya untuk menyetujui dalam RUPS terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta memiliki hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>
				<ol style="list-style-type: none"> 3. Menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Perseroan. 	<p>Saat ini Perseroan telah menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.</p>
3	Dewan Komisaris	34,602	98,86	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun laporan pelatihan yang telah diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris. 	<p>Dewan Komisaris telah membuat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.</p>
				<ol style="list-style-type: none"> b. Mencantumkan Dinamika Rapat Dewan Komisaris dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris sehingga dapat menggambarkan jalannya rapat. 	<p>Dewan Komisaris telah mencantumkan dinamika rapat dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris.</p>

No.	Aspek/ Indikator	Pencapaian		Rekomendasi/Saran	Penjelasan/Alasan
		Skor	%		
				<ul style="list-style-type: none"> c. Melengkapi Program Kerja Komite Audit maupun Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (NRR) terkait self assessment kinerja Komite. d. Melengkapi Piagam Komite Audit sebagaimana Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012, terkait ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan anggaran komite Audit. b. Penandatanganan Laporan Komite Audit. 	<ul style="list-style-type: none"> · Komite Audit memiliki Program Kerja Tahunan Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Ketua Komite Audit pada tanggal 29 Desember 2016. · Komite NRR memiliki Piagam Komite NRR yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-204/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pemutakhiran Piagam Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Risiko.
4	Direksi	34,078	97,37	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Program Peningkatan Kapabilitas Direksi. 2. Mengajukan permohonan persetujuan perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-08/MBU/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yaitu selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum jadwal perjalanan dinas. 3. Menyusun laporan pelatihan yang telah diikuti oleh Anggota Direksi. 	<p>Rencana Kerja dan Anggaran Program Peningkatan Kapabilitas Direksi untuk tahun 2018 sudah disampaikan kepada Jasa Marga Learning Institute (JMLi).</p> <p>Terdapat beberapa SOP yang telah dilakukan peninjauan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah Keputusan Direksi No. 129/KPTS/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.</p>

No.	Aspek/ Indikator	Pencapaian		Rekomendasi/Saran	Penjelasan/Alasan
		Skor	%		
				6. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang senantiasa memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Sosialisasi pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan internal Perseroan dilakukan melalui Intranet Perseroan www.jasamarga.co.id yang dapat diakses oleh seluruh insan Jasa Marga.
				7. Mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan dan memastikan kebijakan internal Perseroan telah sesuai dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan.	Internal Audit Charter sudah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, dan sampai dengan akhir 2017 sedang dalam proses untuk ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
				8. Menyesuaikan Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terbaru.	Saat ini review SK Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi sedang dalam proses.
				9. Memastikan seluruh Personil (Staf) Internal Audit memiliki sertifikasi profesi (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor) untuk menunjang fungsi auditor internal.	Personil (Staf) Internal Audit sudah memiliki sertifikasi profesi (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor) dan sebagian sedang dalam proses pendidikan QIA untuk menunjang fungsi auditor internal.
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	8,633	95,93	1. Mencantumkan di dalam Laporan Tahunan terkait Laporan Dewan Komisaris mengenai pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) dan peran Dewan Komisaris dalam penerapan WBS tersebut	Dalam penyusunan Laporan Tahunan 2017 sudah dimasukkan Laporan Dewan Komisaris atas penerapan/pengelolaan WBS dan peran Dewan Komisaris dalam penerapan WBS tersebut.
				2. Mencantumkan dalam Laporan Tahunan terkait informasi mengenai kepemilikan saham anggota keluarga Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan maupun perusahaan lain.	Kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris sudah dicantumkan dalam Laporan Tahunan
				3. Mencantumkan dalam Laporan Tahunan terkait uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai program pengembangan seni dan budaya.	Dalam penyusunan Laporan Tahunan 2017 sudah dimasukkan program pengembangan seni dan budaya di Balkondes (Balai Ekonomi Desa).

No.	Aspek/ Indikator	Pencapaian		Rekomendasi/Saran	Penjelasan/Alasan
		Skor	%		
6	Aspek Lainnya	4,286	85,71	Memastikan pengelolaan Perseroan dan pengendalian internal Perseroan, sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	Direksi telah membentuk Tim Khusus dalam rangka peningkatan GCG Jasa Marga sebagaimana SK No. 179/KPTS/2017 tanggal 17 November 2017.

TABEL TINDAK LANJUT ASSESSMENT GCG JASA MARGA TAHUN 2016

No.	Aspek/Indikator	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut	Keterangan
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	GCG Code juga ditandatangani oleh Dewan Komisaris.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		GCG Code Perseroan mengacu pada Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Code of Conduct (CoC) ditandatangani juga oleh Dewan Komisaris	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Terdapat survey yang mengukur tingkat pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris terhadap GCG Code dan CoC.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Seluruh pejabat yang ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Seluruh pejabat yang ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN secara tepat waktu kepada KPK.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Pedoman Penanganan Gratifikasi di lingkungan Perseroan mengatur aspek komitmen Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Terdapat survey yang mengukur tingkat pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	

No.	Aspek/Indikator	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut	Keterangan
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	Keputusan (Risalah) RUPS terkait pemberhentian Direksi menyebutkan alasan pemberhentian.	Belum ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Seluruh Komisaris Independen memiliki kompetensi di bidang auditing, keuangan dan akuntansi.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	Sigit Widyawan selaku Komisaris Independen telah memenuhi kompetensi tersebut.
		Keputusan pemberhentian Dewan Komisaris (Risalah RUPS) menyebutkan alasan pemberhentian.	Belum ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah RUPS.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	Dalam RUPS Tahunan, Direksi menjelaskan kinerjanya dan Dewan Komisaris menjelaskan laporan pengawasannya dan dituangkan dalam Risalah RUPS.
3	Dewan Komisaris	Mendokumentasikan proses telaah terkait remunerasi Direksi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan perangkat Dewan Komisaris (Komite).	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Melakukan pemutakhiran secara berkala terhadap Piagam Komite Audit (piagam komite terakhir adalah yang ditetapkan pada tahun 2013).	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Melengkapi Piagam Komite Audit dengan ketentuan mengenai evaluasi kinerja KAP dikaitkan dengan rekomendasi untuk mengganti KAP.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
4	Direksi	Menyampaikan SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara terbuka dalam situs web Perseroan, agar dapat diketahui SPM jalan tol.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit terkait pengadaan yang merugikan Perseroan dalam laporan tindak lanjut hasil audit oleh Internal Audit	Belum ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Mengesahkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary governance) dan perusahaan patungan.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	Pada self assessment 2017, hal tersebut dijadikan saran.

No.	Aspek/Indikator	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut	Keterangan
		Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	Tahun 2017 terdapat program BUMN Hadir untuk Negeri.
		Pelaksanaan kegiatan kemitraan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.	Belum ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Laporan Manajemen Triwulanan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi sebelum diserahkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Apabila terdapat hal-hal yang masih belum dapat disepakati oleh Dewan Komisaris dinyatakan dalam Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Anggota Direksi hadir dalam setiap Rapat Direksi dan apabila tidak hadir harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Anggota Direksi hadir dalam setiap Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dan apabila tidak hadir harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Jumlah tenaga auditor mencukupi kebutuhan Perseroan.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Pimpinan fungsi audit internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (Qualified Internal Auditor).	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Uraian tugas Sekretaris Perusahaan mencakup menatausahakan serta menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Sekretaris Perusahaan memiliki kompetensi di bidang pasar modal.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan kepada Dewan Komisaris tepat waktu yaitu paling lambat 15 hari setelah berakhirnya triwulan.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	Sesuai Anggaran Dasar 30 hari.
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	<p>Pedoman Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi perlu mengatur tentang:</p> <p>a. Pihak/pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik.</p> <p>b. Prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada stakeholders.</p>	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	Perseroan telah mengatur pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dan prosedur pengungkapan informasi berdasarkan Pedoman Pengelolaan Informasi.
		Laporan Tahunan perlu mencantumkan informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.	Belum ditindaklanjuti tahun 2017.	

No.	Aspek/Indikator	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut	Keterangan
		Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan perlu mengungkap program pengembangan seni budaya.	Belum ditindaklanjuti tahun 2017.	
		Perseroan perlu mengikuti lomba Sustainability Report Award.	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	Pada self assessment 2017, hal tersebut dijadikan saran.
6	Aspek Lainnya	Meningkatkan prestasi menuju yang terbaik (the best) untuk proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi dan strategi Perseroan, sehingga Perseroan memiliki best practices di industrinya atau menjadi benchmark bagi perusahaan lain (BUMN/swasta).	Telah ditindaklanjuti tahun 2017.	

STRUKTUR, KEBIJAKAN DAN MEKANISME PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

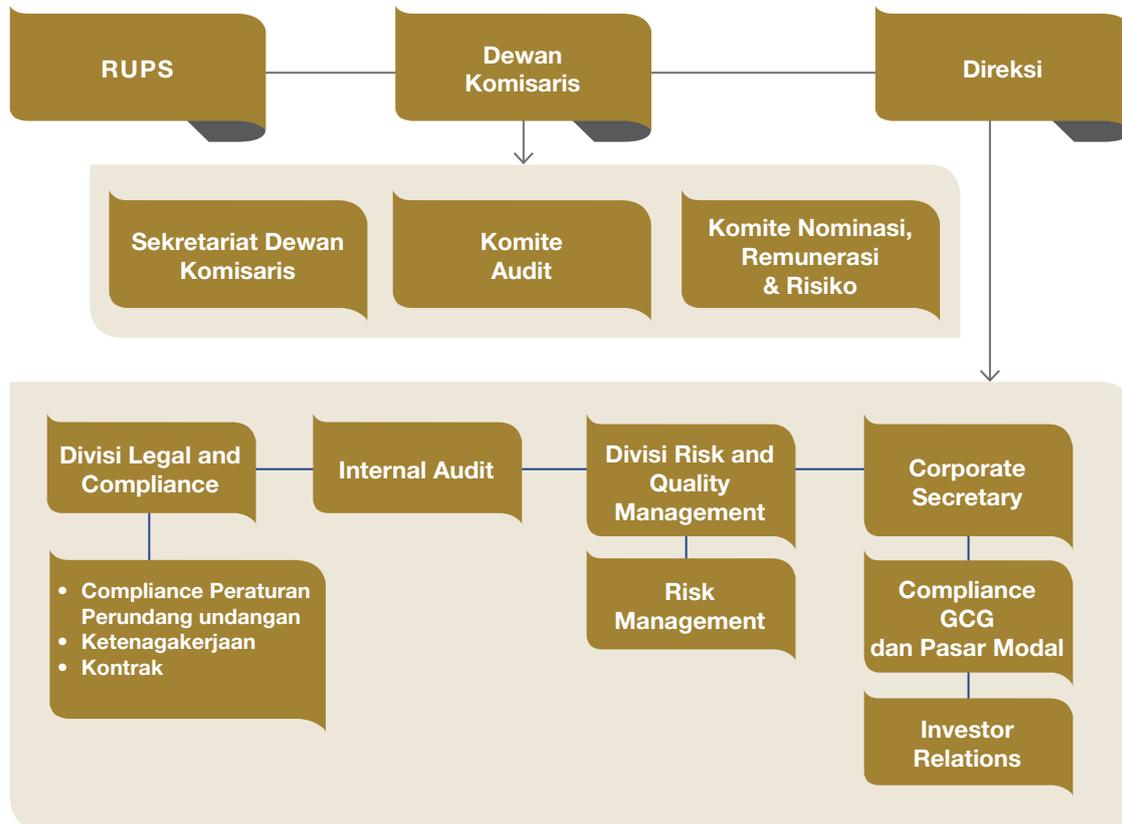
STRUKTUR TATA KELOLA

Sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar.
- Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Jasa Marga telah memiliki Struktur Tata Kelola yang lengkap khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR TATA KELOLA



Organ Perseroan memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perseroan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan.

RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang undangan dan Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan, Direksi dibantu oleh Corporate Secretary dan Internal Audit, serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perseroan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris di bantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris, yang terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite

Nominasi, Remunerasi dan Risiko. Di masing-masing komite, salah satu anggotanya adalah anggota Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

- **Sekretariat Dewan Komisaris.**

Sekretariat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, membuat risalah rapat, mengadministrasikan dokumen baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya, menyusun RKAP Dewan Komisaris, menyusun konsep surat keputusan dan laporan-laporan Dewan Komisaris, serta memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang undangan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG, memberikan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, mengkoordinasikan anggota Komite untuk memperlancar tugas Dewan Komisaris dan bertindak sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lainnya.

- **Komite Audit.**

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal, serta dalam mengkaji dan memberikan persetujuan semua informasi dan usulan yang disiapkan dan diajukan pihak lainnya seperti Laporan Keuangan dan Non Keuangan, serta Laporan Tahunan Perseroan.

- **Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.**

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam aspek nominasi (di antaranya terkait komposisi, kriteria, monitoring, evaluasi kinerja jabatan-jabatan strategis Perseroan), remunerasi (di antaranya terkait penetapan struktur, kebijakan, besaran, monitoring dan evaluasi remunerasi atas jabatan-jabatan strategis Perseroan) dan risiko (di antaranya terkait kajian dan evaluasi atas manajemen risiko investasi Perseroan).

HIERARKI KEBIJAKAN GCG PERSEROAN



MEKANISME TATA KELOLA

Mekanisme Tata Kelola merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. Governance mechanism dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut.

Perseroan menyebut governance mechanism dengan sebutan *soft-structure* GCG. Soft-structure merupakan aspek penting dalam implementasi GCG, karena soft-structure GCG akan menjadi *living document* bagi segenap jajaran dan tingkatan organisasi di suatu perusahaan.

Mekanisme Tata Kelola yang dimiliki Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

TABEL MEKANISME TATA KELOLA JASA MARGA

Mekanisme Tata Kelola	Deskripsi
Board Manual	Kompilasi dari praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang bersumber dari regulasi (Undang Undang/Peraturan), Anggaran Dasar dan best practices yang disepakati bersama dalam rangka implementasi GCG. Board Manual digunakan oleh Organ-organ Perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengelolaan Perseroan, yakni Direksi dan Dewan Komisaris.
Code of Corporate Governance (COCG)	Sekumpulan nilai dan praktik Perseroan yang menjadi suatu pedoman bagi Organ Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola Perseroan yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip GCG yang selaras dengan peraturan perundang undangan, tujuan, isi dan Misi serta nilai-nilai Perseroan.
Code of Conduct (COC)	Sistem nilai atau norma yang dianut oleh seluruh Insan Jasa Marga dalam melaksanakan tugasnya yang di dalamnya memuat etika bisnis dan perilaku seluruh Insan Jasa Marga dalam mencapai tujuan, Visi dan Misi Perseroan antara lain etika hubungan antara Perseroan dengan Karyawan, Pengguna Jalan Tol, Pemegang Saham, Pemasok, Kreditur/Investor, Pemerintah, Mitra Usaha, Pesaing, Media Massa, Masyarakat dan Lingkungannya.
Pakta Integritas	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan, yang berisi ikrar untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan	Pedoman bagi Insan Jasa Marga untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perseroan.
Pedoman Penanganan Gratifikasi	Pedoman bagi Insan Jasa Marga untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Perseroan.
Pedoman Whistleblowing System	Pedoman bagi Insan Jasa Marga dalam mencegah dan mendeteksi potensi pelanggaran di Perseroan
Piagam Komite di Bawah Dewan Komisaris	Memiliki peran sebagai panduan bagi Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dalam pelaksanaan tugas sebagai organ pendukung Dewan Komisaris. Karakteristik Piagam Komite ini bersifat fleksibel dan dilakukan sesuai kebutuhan. Isi Piagam Komite antara lain: tugas dan tanggung jawab serta wewenang, komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, ketentuan mengenai penanganan/kajian suatu masalah dan pelaporannya, serta masa penugasannya.
Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter)	Berperan untuk meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi di lingkup Perseroan dan memastikan kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan main yang berlaku.
Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi	Panduan pengelolaan Teknologi Informasi yang standar secara menyeluruh, sesuai lingkup kebutuhan bisnis Perseroan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Kebijakan Manajemen Risiko	Komitmen untuk penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi, dalam rangka menunjang kepastian pencapaian Sasaran Jangka Panjang Perusahaan dan sebagai kerangka penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur sesuai persyaratan internasional.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM



PT Jasa Marga (Persero) Tbk. membuka Rapat Umum Pemegang Saham, Kamis, 15 Maret 2017, dengan 8 agenda pembahasan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa merupakan instansi tertinggi dalam tata kelola perusahaan, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup permintaan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan pengelolaan Perseroan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, dan lain-lain. RUPS juga merupakan forum bagi pemegang saham dalam menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen Perseroan.

Dalam melaksanakan wewenangnya, RUPS memperhatikan kepentingan pengembangan dan kesehatan Perseroan, kepentingan para stakeholders serta hak-hak Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun buku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 20 ayat 2 huruf a, b, c, dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

PEMEGANG SAHAM JASA MARGA

Pemegang Saham Jasa Marga terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu satu lembar saham Seri A Dwiwarna (sebagai Pemegang Saham pengendali) dan 7.257.871.199 Saham Seri B. Pemegang Saham pengendali Jasa Marga adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Publik dengan persentase masing-masing sebesar 70% dan 30%.

Informasi lebih detail tentang komposisi Pemegang Saham Jasa Marga dapat dilihat di Bab Saham JSMR dan Obligasi Jasa Marga.

HAK & TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Dalam RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam menyuarakan pendapatnya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis Perseroan, di antaranya terkait hal-hal sebagai berikut:

- Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga.
- Penetapan jumlah remunerasi dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga.
- Penilaian kinerja Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan.

- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan, termasuk di antaranya terkait dividen.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Seluruh aksi korporasi yang membutuhkan keputusan RUPS sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS Tahunan berwenang untuk mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham pengendali dengan kepemilikan saham Seri A Dwiwarna wajib memperhatikan tanggung jawabnya dalam menggunakan haknya, baik saat menggunakan hak suara maupun dalam hal lain. Pemerintah memiliki hak khusus yang dapat digunakan ketika memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan usaha (merger), akuisisi, divestasi atau likuidasi melalui forum RUPS.

PROSES PENYELENGGARAAN RUPS

Secara umum, proses penyelenggaraan RUPS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

TABEL TAHAPAN PENYELENGGARAAN RUPS

Kegiatan	Waktu (Selambat-lambatnya)
Surat pemberitahuan rencana RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	H-44
Iklan pemberitahuan RUPS	H-37
Recording date pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS	H-23
Iklan Pemanggilan/Undangan RUPS	H-22
RUPS	H
Iklan Ringkasan Risalah Hasil RUPS	H+2

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan wajib menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 hari sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

- Setelah penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib melaporkan hasil RUPS ke OJK selambat-lambatnya 2 hari kerja serta mengumumkan Ringkasan Risalah Hasil RUPS melalui sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Seluruh saham yang diterbitkan memiliki satu hak suara jika tidak dinyatakan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam RUPS Tahunan, Direksi Perseroan mempresentasikan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan yang telah dilaksanakan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku berjalan, usulan penggunaan laba bersih Perseroan, usulan penunjukan dan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan dan laporan keuangan program kemitraan dan program bina lingkungan untuk tahun buku berjalan berdasarkan usulan Dewan Komisaris atau memberikan kuasa atau wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memproses penunjukan KAP untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna, penetapan Tantiem tahun buku berjalan, gaji,

honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya, laporan penggunaan dana hasil penawaran umum, perubahan susunan pengurus Perseroan, serta hal-hal lain yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam RUPS, sedangkan Dewan Komisaris melaporkan tugas pengawasan terhadap kegiatan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan Direksi.

Sebagai BUMN, Jasa Marga tunduk pada Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Perseroan untuk melaporkan kinerjanya kepada Pemegang Saham yang dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk mendapatkan pengesahan RUPS, paling lambat lima bulan setelah tahun buku berakhir.

PENYELENGGARAAN RUPS JASA MARGA DI TAHUN 2017

Selama tahun 2017 Jasa Marga telah menyelenggarakan 1 (satu) RUPS, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 pada tanggal 15 Maret 2017.

TABEL PENYELENGGARAAN RUPS JASA MARGA PADA TAHUN 2017

RUPS	Hari & Tanggal	Tempat
Tahunan	Rabu, 15 Maret 2017	Ruang Mawar Lantai 2 Gedung Balai Kartini Jln. Gatot Subroto Kav. 37 Jakarta 12950

RUPS TAHUNAN 15 MARET 2017

Penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun buku 2016 Perseroan adalah sebagai berikut:

Hari/tanggal: Rabu, 15 Maret 2017
Waktu: 11:10-14:04 WIB
Tempat: Ruang Mawar Lantai 2
Gedung Balai Kartini
Jln. Gatot Subroto Kav. 37
Jakarta 12950

Penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun buku 2016 pada tanggal 15 Maret 2017 telah melalui proses persiapan dan penyelenggaraan sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 81, 82, dan 83; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan Anggaran Dasar Perseroan.

Proses rencana dan pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut telah tertuang dalam surat Perseroan yang telah disampaikan ke OJK, serta pemasangan iklan Pemberitahuan, Panggilan dan Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPS Tahunan masing-masing pada 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional serta situs web Bursa Efek Indonesia (IDXnet) dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan detail sebagai berikut:

TABEL TAHAPAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN 2017

Penyampaian Rencana dan Mata Acara RUPS Tahunan	Pengumuman RUPS Tahunan	Pemanggilan RUPS Tahunan	Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPS Tahunan
Surat ke Otoritas Jasa Keuangan No. AA.AK06.162 No. AA.AK06.194 No. AA.AK06.241	Iklan di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, serta situs web Perseroan dan IDXnet	Iklan di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, serta situs web Perseroan dan IDXnet	Iklan di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, serta situs web Perseroan dan IDXnet
30 Januari 2017 03 Februari 2017 14 Februari 2017	06 Februari 2017	21 Februari 2017	16 Maret 2017

Mata Acara RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
 2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
 5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2016, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017.
 6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana:
 - a. Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007
 - b. Obligasi Jasa Marga dan;
 - c. Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016
 7. Perubahan Peruntukan Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016.
 8. Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN:
 - a. No. PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
 - b. No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - c. No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
 10. Perubahan Pengurus Perseroan.
- Mata Acara RUPS Tahunan (Rapat) dipublikasikan dalam Iklan Pemanggilan. Dalam Iklan Pemanggilan RUPS, selain dipublikasikan Mata Acara Rapat, juga disebutkan beberapa catatan sebagai berikut:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
- Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017.
- Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550 Telp. (021) 841 3526, 841 3630 ext. 227 dan 223	Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom Puri Datindo-Wisma Sudirman Jln. Jend Sudirman Kav. 34- 35 Telp. (021) 570 9009 Fax (021) 570 9026, 570 8914
---	--
- Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan pukul 16:15 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.jasamarga.com atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, sejak tanggal Pemanggilan ini kecuali untuk bahan terkait Mata Acara Rapat Perubahan Pengurus Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada Corporate Secretary.
- Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham

- Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/	
Komisaris Independen:	Refly Harun
Komisaris:	Muhammad Sapta Murti
Komisaris:	Agus Suharyono
Komisaris:	Taufik Widjoyono
Komisaris Independen:	Sigit Widyanan

Direksi

Direktur Utama:	Desi Arryani
Direktur Operasi I:	Muh Najib Fauzan
Direktur Operasi II:	Subakti Syukur
Direktur Pengembangan:	Hasanudin
Direktur Keuangan/	
Direktur Independen:	Anggiasari
Direktur Sumber Daya	
Manusia & Umum:	Christantio Prihambodo

Penyelenggaraan RUPS Tahunan didukung oleh pihak independen dalam hal ini Konsultan Hukum, Notaris dan Biro Administrasi Efek (BAE). Selain itu, Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016 juga hadir dalam RUPS Tahunan tersebut.

Ketentuan Korum dan Kehadiran Pemegang Saham

Untuk Mata Acara Kesatu sampai dengan Kedelapan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat

1.a. Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan tersebut Rapat ini adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Kesembilan mengenai Perubahan Anggaran Dasar, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Untuk Mata Acara Kesepuluh mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.995.508.452 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 82,60% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 7.257.871.200 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan
- 7.257.871.199 (tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan dengan memperhatikan pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 20 Februari 2017.

**TABEL JUMLAH SAHAM YANG HADIR PADA RUPS
TAHUNAN JASA MARGA 15 MARET 2017**

Jumlah Saham	Persentase (%)
5.995.508.452	82,60

Dengan demikian ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi, dan Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat.

Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris dan hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat.

Pemimpin Rapat

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-028/II/2017 tanggal 08 Februari 2017, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris Independen.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemimpin Rapat menyampaikan Kondisi Umum Perseroan yang secara lebih rinci tersaji dalam Video Profil Jasa Marga.

Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan setiap Mata Acara Rapat, kecuali Mata Acara Keenam, para Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya mengenai materi yang dibahas. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Setiap penanya akan diminta untuk mengangkat tangan, dan kepada yang bersangkutan akan diberikan formulir untuk diisi dengan pertanyaan atau pendapatnya. Selanjutnya Petugas akan menyampaikan formulir tersebut kepada Pemimpin Rapat

Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat.

Jumlah penanya pada Mata Acara Rapat Kesatu dan Kedua ada 4 (empat) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan pada Mata Acara Rapat Ketiga sampai dengan Mata Acara Rapat Kesepuluh tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara

Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi, dilakukan pengambilan keputusan. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk Mata Acara Rapat Kesatu sampai dengan Kedelapan, diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Untuk Mata Acara Rapat Kesembilan, mengenai Perubahan Anggaran Dasar, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Untuk Mata Acara Rapat Kesepuluh, mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan. Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain diminta mengangkat tangan dan memberi tanda pada salah satu kotak pilihan di Kartu Suara dan menyerahkan Kartu Suaranya yang sudah terisi kepada petugas. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat

Setelah pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

Mata Acara, Keputusan, Hasil Voting dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan

Rapat Perseroan dibuka pada pukul 11:10 WIB dan ditutup pada pukul 14:04 WIB.

Perseroan telah menunjuk Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, sebagai pihak independen untuk melakukan validasi suara dan menyusun minuta akta Rapat. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 15 Maret 2017 No. 20, yang minuta aktanya dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara, Keputusan, Hasil Voting dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.

Dasar Mata Acara Rapat

- (i) Pasal 13 ayat 2 huruf (e) dan Pasal 20 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.
- (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- (iii) Pasal 23 ayat 1 Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.995.508.452	saham
Suara Tidak Setuju:	0	saham
Suara Abstain:	3.246.600	saham
Suara Setuju:	5.992.261.852	saham
Total Suara Setuju:	5.995.508.452	saham = 100%

Keputusan

Rapat dengan Suara Bulat memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. RPC-2903/PSS/2017 tanggal 31 Januari 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Tindak Lanjut

-

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.

Dasar Mata Acara

- (i) Pasal 20 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
- (ii) Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU.07/2015.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.995.508.452	saham
Suara Tidak Setuju:	0	saham
Suara Abstain:	7.796.600	saham
Suara Setuju:	5.987.711.852	saham
Total Suara Setuju:	5.995.508.452	saham = 100%

Keputusan

Rapat dengan Suara Bulat memutuskan:

Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL tahun buku 2016 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai laporannya No. RPC-3077/PSS/2017 tanggal 28 Februari 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL tahun buku 2016, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Tindak Lanjut

-

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016.

Dasar Mata Acara

- (i) Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.
- (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPJ.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.995.508.452	saham
Suara Tidak Setuju:	185.120	saham
Suara Abstain:	4.550.000	saham
Suara Setuju:	5.990.773.332	saham
Total Suara Setuju:	5.995.323.332	saham = 99,99%

Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016 sebesar Rp 1.889.312.723.412 (satu triliun, delapan ratus delapan puluh sembilan miliar, tiga ratus dua belas juta, tujuh ratus dua puluh tiga ribu, empat ratus dua puluh dua Rupiah), sebagai berikut:
 - a. Sebesar 30% atau Rp 566.793.817.024 (lima ratus enam puluh enam miliar, tujuh ratus sembilan puluh tiga juta, delapan ratus tujuh belas ribu, dua puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 70,0% saham sebesar Rp 396.755.671.917 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar, tujuh ratus lima puluh lima juta, enam ratus tujuh puluh satu ribu, sembilan ratus tujuh belas Rupiah).
 - b. Sebesar 1,7% atau Rp 32.118.316.298 (tiga puluh dua miliar, seratus delapan belas juta, tiga ratus enam belas ribu, dua ratus sembilan puluh delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - c. Sebesar 68,3% atau Rp 1.290.400.590.090 (satu triliun, dua ratus sembilan puluh miliar, empat ratus juta, lima ratus sembilan puluh ribu, sembilan puluh Rupiah) sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Tindak Lanjut

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016 dipublikasikan pada Ringkasan Risalah Keputusan RUPS Tahunan melalui iklan di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 16 Maret 2017 dalam Bahasa Indonesia dan di IDXnet dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pembayaran dividen tahun buku 2016 dibagikan pada tanggal 13 April 2017.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.

Dasar Mata Acara

Pasal 20 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.995.508.452	saham
Suara Tidak Setuju:	6.917.049	saham
Suara Abstain:	8.035.450	saham
Suara Setuju:	5.980.555.953	saham
Total Suara Setuju:	5.988.591.403	saham = 99,88%

Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2017.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2017.

Tindak Lanjut

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) melakukan pekerjaan dalam lingkup audit yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.925.000.000 (satu miliar, sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) termasuk PPN dan belum termasuk Out of Pocket Expenses (OPE).

MATA ACARA RAPAT KELIMA

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2016, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2017.

Dasar Mata Acara

- (i) Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.
- (ii) Pasal 96 dan 113 UUPT.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.995.508.452	saham
Suara Tidak Setuju:	3.798.783	saham
Suara Abstain:	4.681.300	saham
Suara Setuju:	5.987.028.369	saham
Total Suara Setuju:	5.991.709.669	saham = 99,93%

Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Direksi Perseroan Tahun Buku 2016 serta gaji, tunjangan dan fasilitas untuk Tahun 2017.
2. Menetapkan besaran tantiem untuk Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016, serta honorarium berikut tunjangan dan fasilitas untuk Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya menguasai kepada Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menuangkan secara rinci keputusan ini dalam Keputusan Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham.

Tindak Lanjut

Memperhatikan Keputusan RUPS Tahunan Jasa Marga tahun buku 2016 yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2017 serta berdasarkan surat Menteri BUMN No. SR-467/BMU/D4/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2017 serta Tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2016, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyetujui penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2017 serta tantiem atas kinerja tahun buku 2016.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana:

- a. Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007;
- b. Obligasi Jasa Marga; dan
- c. Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016.

Dasar Mata Acara

- (i) Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No.30").
- (ii) Pasal 41 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33").

Hasil Voting

Mata Acara Rapat Keenam merupakan laporan, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara

Keputusan

Tidak ada keputusan.

Direksi telah menyampaikan laporannya berkenaan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007, Obligasi Jasa Marga dan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016 dan dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat ini

Tindak Lanjut

-

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

Perubahan Peruntukan Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016.

Dasar Mata Acara

- (i) Pasal 6 ayat (1) POJK No. 30.
- (ii) Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 POJK No. 30

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.995.508.452	saham
Suara Tidak Setuju:	283.547.209	saham
Suara Abstain:	4.769.507	saham
Suara Setuju:	5.707.191.736	saham
Total Suara Setuju:	5.711.961.243	saham = 95,27%

Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Menyetujui perubahan peruntukan penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016.

Tindak Lanjut

Realisasi penggunaan dana dilaporkan sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN:

- No. PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
- No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Dasar Mata Acara

- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014.
- UUPT.
- Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Pasal 20 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.995.508.452	saham
Suara Tidak Setuju:	4.484.300	saham
Suara Abstain:	4.550.000	saham
Suara Setuju:	5.986.474.152	saham
Total Suara Setuju:	5.991.024.152	saham = 99,92%

Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN dan perubahan-perubahannya:

- No. PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas.
- No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Tindak Lanjut

Implementasi peraturan-peraturan tersebut pada Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KESEMBILAN

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Mata Acara

Surat Menteri BUMN No. S-112/MBU/02/2017 tanggal 07 Februari 2017, adanya program mengenai standarisasi Anggaran Dasar untuk BUMN Tbk terkait dengan pemenuhan tata kelola di bidang peraturan pasar modal.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.995.508.452	saham
Suara Tidak Setuju:	503.456.415	saham
Suara Abstain:	4.681.300	saham
Suara Setuju:	5.487.361.737	saham
Total Suara Setuju:	5.492.043.037	saham = 91,60%

Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN dan perubahan-perubahannya:

- Menyetujui perubahan dan/atau penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyeragaman Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Terbuka dan pemenuhan tata kelola di bidang peraturan pasar modal.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan berkaitan dengan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. • tanggal • dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, berikut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Plt. Direktur Administrasi Hukum Umum Kementerian HAM No. • tanggal • dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. • tanggal •.

MATA ACARA RAPAT KESEPULUH

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Mata Acara

- (i) Pasal 11 ayat 5 juncto Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- (ii) POJK No. 33.
- (iii) Surat Menteri BUMN No. S-112/MBU/02/2017 tanggal 07 Februari 2017.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.995.508.452	saham
Suara Tidak Setuju:	501.541.054	saham
Suara Abstain:	5.237.349	saham
Suara Setuju:	5.488.730.049	saham
Total Suara Setuju:	5.493.967.398	saham = 91,63%

Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Taufik Widjoyono sebagai Komisaris
 - b. Sdr. Christantio Prihambodo sebagai Direktur SDM dan Umum
 - c. Sdri. Anggiasari sebagai Direktur Keuangan/Direktur Independen
 - d. Sdr. Muh Najib Fauzan sebagai Direktur Operasi I
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Sugihardjo sebagai Komisaris
 - b. Sdr. Mohammad Sofyan sebagai Direktur Operasi I
 - c. Sdr. Donny Arsal sebagai Direktur Keuangan
 - d. Sdr. Kushartanto Koeswiranto sebagai Direktur SDM dan Umum/Direktur Independen
 Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Desi Arryani
Direktur Keuangan	: Donny Arsal
Direktur Operasi I	: Mohammad Sofyan
Direktur Operasi II	: Subakti Syukur
Direktur Pengembangan	: Hasanudin
Direktur SDM & Umum/Direktur Independen	: Kushartanto Koeswiranto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Refly Harun
Komisaris	: Agus Suharyono
Komisaris	: Boediarso Teguh Widodo
Komisaris	: Sugihardjo
Komisaris	: Muhammad Sapta Murti
Komisaris Independen	: Sigit Widyawan
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut

Pembagian tugas dan wewenang bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama mengacu pada Keputusan Direksi Jasa Marga • tanggal • dan Keputusan Rapat Direksi No. • tanggal •.

Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan juga memuat Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen sebagai berikut:

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016

Selanjutnya sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 15 Maret 2017, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai sebesar 30% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yaitu Rp 1.889.312.723.412 (satu triliun, delapan ratus delapan puluh sembilan miliar, tiga ratus dua belas juta, tujuh ratus dua puluh tiga ribu, empat ratus dua belas Rupiah) atau sebesar Rp 78,0937 (tujuh puluh delapan sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) per lembar saham dengan jadwal dan tata cara pembayaran yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut

A. Jadwal

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	22 Maret 2017 27 Maret 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai 	23 Maret 2017 29 Maret 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	27 Maret 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	13 April 2017

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Maret 2017.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 13 April 2017. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom – Jln. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Tel. 021-350 8077 (Hunting) Fax. 021-350 8078 paling lambat pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut akan dikenakan tarif PPh 100% lebih tinggi dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak

Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 31 Maret 2017. Tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom mulai tanggal 22 Mei 2017.

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN RUPS YANG DISELENGGARAKAN PADA TAHUN 2016

Perseroan telah merealisasikan seluruh keputusan RUPS pada tahun 2016 yaitu, RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2016 dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2016. Tindak lanjut dan realisasi keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL TINDAK LANJUT DAN REALISASI KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

No.	Keputusan RUPS	Status	Keterangan
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2015, Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2015, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.	Selesai	Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 telah disampaikan pada tanggal 08 Maret 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
2	Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.	Selesai	Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 telah disampaikan pada tanggal 12 Februari 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.	Selesai	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015 dipublikasikan pada Ringkasan Risalah RUPS Tahunan melalui iklan di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 31 Maret 2016 dalam Bahasa Indonesia, di IDXnet dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. • Pembayaran dividen tahun buku 2015 dibagikan pada tanggal 29 April 2016.
4	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.	Selesai	Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) melakukan pekerjaan dalam lingkup audit yang telah ditetapkan.
5	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2015, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2016.	Selesai	Memperhatikan Keputusan RUPS Tahunan Jasa Marga tahun buku 2015 yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2016 serta berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-20/D4/MBU/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2016 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2015, dan Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-138/MBU/06/2016 tanggal 24 Juni 2016, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyetujui penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016 serta tantiem atas kinerja tahun buku 2015.

No.	Keputusan RUPS	Status	Keterangan
6	Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.	Selesai	Implementasi peraturan tersebut pada Perseroan.
7	Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga	Selesai	Direksi telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga dan dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat ini.
8	Perubahan Pengurus Perseroan.	Selesai	<p>Pembagian tugas dan wewenang serta penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama mengacu kepada Keputusan Direksi Jasa Marga No. 70/KPTS/2015 tanggal 01 April 2015 dan Keputusan Rapat Direksi No. 14/2016 tanggal 05 April 2016 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adityawarman: Direktur Utama 2. Christantio Prihambodo: Direktur Operasi 3. Hasanudin: Direktur Pengembangan Usaha 4. Anggiasari: Direktur Keuangan 5. Muh Najib Fauzan: Direktur Sumber Daya Manusia & Umum 6. Achiran Pandu Djajanto: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <p>Perseroan telah menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri serta telah memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>

TABEL TINDAK LANJUT DAN REALISASI KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2016

No.	Keputusan RUPS	Status	Keterangan
1	Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.	Selesai	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan Telah melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan sejumlah 457.871.199 (empat ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh satu ribu, seratus sembilan puluh sembilan) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah). • Tanggal perdagangan 02-08 Desember 2016. • Laporan penggunaan dana disampaikan ke OJK dan BEI setiap semester.
2	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Selesai	Perseroan telah menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri serta telah memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan Perseroan, Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Jasa Marga melaksanakan GCG. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris yang terdiri Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perseroan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, seperti tersebut pada Pasal 120 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan ketentuan peraturan di bidang pasar modal tersebut pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014

tanggal 08 Desember 2014, dimana jumlah anggota Dewan Komisaris Independen adalah 2 (dua) orang atau 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah efektif sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, dimana 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. Namun demikian hal tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2017, anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 6 (enam) orang dengan komposisi sebagai berikut:

TABEL DEWAN KOMISARIS JASA MARGA SAMPAI DENGAN 15 MARET 2017

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Refly Harun	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015
Sigit Widyawan	Komisaris Independen	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015
Boediarso Teguh Widodo	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 11 Maret 2013
Taufik Widjoyono	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015
Muhammad Sapta Murti	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2016
Agus Suharyono	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2016

Di tahun 2017 terdapat perubahan susunan komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Penguatan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS melalui mekanisme pengambilan suara.

Berdasarkan Risalah RUPS Tahunan No. 20 tanggal 15 Maret 2017, terdapat pengukuhan pemberhentian 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yaitu Taufik Widjoyono serta pengangkatan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yaitu Sugihardjo yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. SR-171/MBU/03/2017 tentang Usulan Perubahan Pengurus PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, maka diusulkan kepada RUPS untuk menyetujui pergantian pengurus Perseroan setelah dilakukan penilaian atas profesionalisme dan integritas calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Minoritas secara wajar, untuk menjamin kompetensi pengawasan di bidang bisnis Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut melengkapi keberagaman pengalaman dan pemahaman atas kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang jalan tol.

Sehingga berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2017, komposisi Dewan Komisaris Jasa Marga adalah sebagai berikut:

TABEL DEWAN KOMISARIS JASA MARGA BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TANGGAL 15 MARET 2017

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Refly Harun	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015
Sigit Widyanan	Komisaris Independen	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015
Boediarso Teguh Widodo	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 11 Maret 2013
Sugihardjo	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017
Muhammad Sapta Murti	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2016
Agus Suharyono	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2016

Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut dilakukan melalui pemungutan suara dari peserta RUPS Tahunan yang hadir dengan Total Suara Setuju sebesar 91,63% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS Tahunan (termasuk suara abstain; sesuai Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham).

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). Proses pembaharuan *Board Manual* telah selesai pada akhir tahun 2017 dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada awal tahun 2018. Buku Pedoman Kerja tersebut berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan

aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG. *Board Manual* dapat dilihat di situs web Perseroan www.jasamarga.com

Selain berpedoman pada *Board Manual*, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah menyatakan komitmen dan persetujuannya dengan menandatangani *Code of Corporate Governance* dan *Code of Conduct* pada akhir tahun 2017. Penyusunan *Board Manual*, *Code of Corporate Governance* dan *Code of Conduct*, merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan visi yang telah ditetapkan.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Pengaturan dari *Board Manual* terkait Dewan Komisaris terdapat dalam Bab II tentang Dewan Komisaris yang secara garis besar mengatur sebagai berikut:

- A. Tugas Dewan Komisaris
- B. Hak dan Kewenangan Dewan Komisaris
- C. Kewajiban Dewan Komisaris
- D. Persyaratan Dewan Komisaris
- E. Keanggotaan Dewan Komisaris
- F. Komisaris Independen
- G. Komite-Komite Dewan Komisaris
- H. Sekretaris Dewan Komisaris
- I. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
- J. Etika Jabatan Dewan Komisaris
- K. Rapat Dewan Komisaris
- L. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris
- M. Kinerja dan Pelaporan Dewan Komisaris

PERSYARATAN DAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memperhatikan adanya keberagaman komposisi Dewan Komisaris, dimana Dewan Komisaris beranggotakan komisaris yang memiliki berbagai bidang disiplin pengalaman, keahlian dan profesionalisme serta kompetensi yang terkait dan diperlukan dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan Visi & Misi serta rencana strategis Perseroan, serta memperhatikan jumlah anggota Direksi sehingga setiap anggota Komisaris mempunyai counterpart-nya masing-masing, meskipun dalam pengambilan setiap keputusan Dewan Komisaris dilakukan secara kolektif, namun tetap menjunjung tinggi independensi dan semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi ketentuan persyaratan formal, materil dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 dan tertuang dalam *Board Manual*, yang mencakup antara lain:

1. Wajib dan memiliki komitmen mengikuti ketentuan Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Peraturan Perundangan di Pasar Modal dan Peraturan Perundangan lain termasuk peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: mempunyai akhlak, moral, integritas dan dedikasi yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dan tata kelola perusahaan yang baik, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang usaha Perseroan yang dibutuhkan Perseroan dimana yang bersangkutan dicalonkan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - 2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam butir 1 s.d. 3 di atas dan/atau dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai berikut:
- a. Bukan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta.
 - b. Pengurus partai politik dan/atau calon anggota dan/atau anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II.
 - c. Calon Kepala /Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala /Wakil Kepala Daerah.
 - d. Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada Perseroan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
 - e. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter.
 - f. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan usulan dari instansi yang bersangkutan.
 - g. Tidak memiliki rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan- an dengan Perseroan dan bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai Anggota Dewan Komisaris.
 - h. Antar para Anggota Dewan Komisaris dan antar Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
5. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 s.d. 5 di atas, bagi Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan.
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Tata cara pengangkatan, alasan dan tata cara pemberhentian, serta ketentuan tentang berakhirnya anggota Dewan Komisaris yang mewakili Pemegang Saham unsur Negara Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang undangan yang terkait.
- Komposisi anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan kompetensi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris merupakan hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan sampai dengan saat ini belum ada ketentuan spesifik terkait keberagaman gender di dalam struktur keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Namun sejak tahun 2016, dalam komponen struktur Direksi Jasa Marga telah ada 2 (dua) orang anggota Direksi wanita, yang seorang menjabat sebagai Direktur Utama dan seorang lagi sebagai Direkstur Keuangan PT Jasa Marga. Dalam struktur keanggotaan Dewan Komisaris belum ada anggota Komisaris yang dijabat oleh wanita, tapi Perseroan meyakini bahwa dengan adanya keberagaman dalam aspek keahlian, pengalaman dan latar belakang pendidikan akan sangat berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris,

sehingga Perseroan tidak mengenal perbedaan gender dan mengimplementasikan kebijakan yang bersifat non-diskriminatif. Anggota Dewan Komisaris Jasa Marga memiliki keahlian di bidang teknik, hukum, keuangan, sumber daya manusia, ekonomi dan tata kelola.

Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Dewan Komisaris yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

TABEL KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris	Tingkat Pendidikan Terakhir			Pengalaman Kerja (tahun)		Usia		Jenis Kelamin	
	S1	S2	S3	< 20	≥ 20	< 50	≥ 50	L	P
Refly Harun			✓		✓	✓		✓	
Sigit Widyanan		✓			✓		✓	✓	
Boediarso Teguh Widodo			✓		✓		✓	✓	
Sugihardjo*		✓			✓		✓	✓	
Muhammad Sapta Murti			✓		✓		✓	✓	
Agus Suharyono		✓			✓		✓	✓	
Taufik Widjoyono**		✓			✓		✓	✓	

Keterangan:

* Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 15 Maret 2017

** Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 15 Maret 2017

L = Laki-laki

P = Perempuan

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas Dewan Komisaris

Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan atas peran masing-masing anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya untuk tetap mempertahankan dan menjamin bahwa Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, transparan dan akuntabel; tidak terafiliasi dengan kepentingan Direksi dan pemegang saham pengendali; serta tidak mengabaikan kepentingan pemegang saham publik, pemegang saham minoritas, dan pemangku kepentingan lainnya, serta dengan memperhatikan bidang tugas masing-masing anggota Direksi. Khusus untuk 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen, masing-masing mendapat tugas sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

Tugas Pokok Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan, termasuk pemberian nasihat dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan memberikan persetujuan atas Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan termasuk usulan revisinya yang disampaikan Direksi, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan peraturan perundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Memberikan nasihat dan dorongan kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan, serta memiliki moral tinggi dalam berusaha.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Dewan Komisaris harus:

1. Tunduk dan mematuhi Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perundangan serta keputusan RUPS dan bertindak dan bersikap profesional, efisien, transparan, menjaga kemandirian, akuntabel, bertanggungjawab dan kewajaran.
2. Bertindak untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak dan golongan tertentu.
3. Beritikad baik, berintegritas, penuh kehati-hatian, menjunjung dan/atau memegang prinsip-prinsip GCG.
4. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, maka Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.



Jajaran Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berkomitmen untuk selalu mendorong Perseroan agar tetap sustain, dengan memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan.

(Dari Kiri ke Kanan): Sigit Widyawan, Agus Suharyono, Sugihardjo, Refly Harun, Muhammad Sapta Murti, Boediarso Teguh Widodo)

9. Mengangkat tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
 10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 11. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern.
 12. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
 13. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
- Kewajiban Dewan Komisaris**
- Dalam menjalankan pengawasan, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Umum.
 - a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
 - b. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 - c. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
 - d. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
 - e. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 - f. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lainnya.
 - g. Memberikan penjelasan tentang hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan Peraturan Perundangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - h. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

2. Tugas terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - a. Menunjuk salah seorang Anggota Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS. Penunjukan tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan pengelolaan Perseroan dan rencana pengembangan Perseroan.
 - c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun Direksi dan dilaporkan kepada RUPS, disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran.
 - d. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
 - e. Mengusulkan kepada RUPS melalui Direksi, penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau tercatat.
 - f. Menyampaikan kepada RUPS laporan target dan realisasi pencapaian indikator pencapaian kinerja (Key Performance Indicator) Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perseroan.
 - g. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 - h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS
 - i. Dalam hal Dewan Komisaris memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan alasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - j. Memberikan tanggapan tertulis atas tindakan-tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS seperti melakukan transaksi material dengan nilai di atas 50% dari ekuitas Perseroan, transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai peraturan yang berlaku di Pasar Modal dan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal. Tanggapan tertulis Dewan Komisaris wajib diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi.
3. Tugas terkait Strategi dan Rencana Kerja
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - b. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi.
 - c. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
 - d. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku, untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

- e. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - f. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/ atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana diatur dalam butir d dan e di atas, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.
 - g. Dewan Komisaris menelaah dan menandatangani Kontrak Manajemen Korporat tentang ukuran kinerja utama Perseroan terkait target dan pencapaian target RKAP yang disampaikan Direksi, sebagai bagian dari dokumen RKAP Perseroan.
 - h. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi antara lain laporan triwulanan pelaksanaan RKAP dan laporan yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
 - i. Menyampaikan laporan triwulanan mengenai perkembangan realisasi indikator pencapaian kinerja Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
4. Tugas terkait Fungsi Pengawasan
- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS serta Peraturan Perundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - b. Melakukan tugas pengawasan terkait dengan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Dewan Komisaris memberikan arahan mengenai kebijakan dan strategi dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perseroan, memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan, serta memberikan pendapat dan persetujuan atas usulan revisi terhadap Rencana Jangka Panjang Perseroan yang diajukan oleh Direksi.
 - c. Melakukan tugas pengawasan terkait dengan pelaksanaan jalannya kepengurusan pengelolaan Perseroan dan pengembangan usaha Perseroan selama satu tahun anggaran, Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas konsep Laporan Tahunan Perseroan yang disusun Direksi, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, serta memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perseroan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain (bila ada), termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat Dewan Komisaris maupun rapat koordinasi Dewan Komisaris yang mengundang kehadiran Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan.
Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
Laporan Tahunan tersebut disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - d. Melakukan tugas pengawasan terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan, Dewan Komisaris melakukan

evaluasi atas Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan yang disampaikan Direksi untuk menilai capaian kinerja Direksi yang meliputi : kinerja utama korporat, kinerja di bidang keuangan, di bidang pengembangan, di bidang operasional, di bidang sumber daya manusia dan umum, serta di bidang korporasi dan manajemen yang antara lain meliputi hal yang menyangkut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat-rapat Direksi, hal-hal yang terkait dengan investasi seperti penyampaian laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan tahunan, laporan hasil pemeriksaan akuntan, laporan penggunaan dana IPO, penyelenggaraan RUPS yang sesuai peraturan OJK dan BEI, serta laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, internal audit, risk and quality management, dan information technology. Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan kajian atas pelaksanaan RKAP serta memberikan penilaian dan persetujuan atas usulan revisi RKAP yang diajukan oleh Direksi.

Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi tersebut kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan yang bersangkutan.

- e. Melakukan tugas pengawasan terkait dengan pelaksanaan Anggaran Dasar Perseroan yang menyangkut perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terlebih dahulu sebelum dipergunakan sebagai dasar dalam memberikan persetujuan atas perbuatan-perbuatan Direksi yang dimaksud.
- f. Melakukan tugas pengawasan terkait dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris dan kemudian disampaikan kepada Direksi untuk dikaji dan/atau dibahas bersama Dewan Komisaris sebelum dilakukan tindak lanjutnya.

g. Memberikan arahan dan pengawasan pelaksanaannya oleh Direksi terhadap hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perseroan, secara tepat waktu dan relevan.
- 2) Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.
- 3) Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum di Indonesia.
- 4) Kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.
- 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/perusahaan patungan.
- 6) Kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 7) Pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan peraturan perundang undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

5. Tugas terkait Nominasi dan Remunerasi.

Nominasi

- a. Mengusulkan bakal calon Anggota Direksi Perseroan dari talenta BUMN (pejabat satu tingkat dibawah Direksi) kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Dalam hal Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Dalam hal Meneteri BUMN memandang ada bakal calon lain yang memiliki potensi untuk menjadi anggota Direksi, namun tidak termasuk dalam daftar calon yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, Meneteri BUMN dapat meminta Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian terhadap yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat agar diusulkan kepada Meneteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- b. Bakal calon yang akan diajukan dalam RUPS dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan Komisaris Utama atau Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

- c. Memastikan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS tersedia pada waktunya dan dapat diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi.
- d. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasannya.
 - 2) Pemberitahuan tersebut butir (1) di atas disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penetapan pemberhentian sementara tersebut.
 - 3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 - 4) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara tsb. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - 5) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud butir (4) di atas atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- e. Rapat Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas perangkatan jabatan oleh anggota Direksi yang tidak termasuk dalam perangkatan jabatan oleh anggota Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan.
- f. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perseroan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a.5. Anggaran Dasar Perseroan.
- g. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris.
- h. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite-komite lain, jika dianggap perlu.
- i. Memberikan persetujuan tertulis atas wakil Perseroan untuk menjadi calon Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 7 huruf g. Anggaran Dasar Perseroan, setelah penetapan batasan dan/atau kriteria yang diusulkan oleh Dewan Komisaris disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan usulan calon Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mendapatkan persetujuan. Keputusan Dewan Komisaris terkait dengan hal tersebut di atas diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi.
- j. Melakukan penelaahan dan pengawasan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memiliki strategi dan kebijakan nominasi yang meliputi proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi dan promosi.

Remunerasi

- a. Memastikan bahwa Perseroan memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel.
- b. Melakukan kajian secara berkala atas sistem remunerasi yang sesuai bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

- c. Dalam hal RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Direksi Perseroan Tahun Buku yang baru lampau serta gaji, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku berjalan.
 - d. Menetapkan besaran tantiem untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang lampau, serta honorarium berikut tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya menguasakan kepada Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menuangkan secara rinci keputusan tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.
 - f. Menelaah usulan honorarium dan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas) Dewan Komisaris dan Direksi bersama dengan Komite terkait dan mengusulkan hal tersebut kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
 - g. Mengusulkan insentif kinerja/tantiem Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan penilaian kinerja Direksi dan pencapaian tingkat kesehatan Perseroan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
6. Tugas terkait Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
- a. Melakukan evaluasi kinerja melalui penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dengan sistem self assessment atau sistem lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan tanggapan dan rekomendasi mengenai penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja.
 - c. Melakukan evaluasi masing-masing kinerja Anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
 - d. Laporan kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan tugas pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - e. Menyusun sistem pengukuran dan penilaian (evaluasi) kinerja Dewan dan individu/Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengajukan kepada RUPS.
 - f. Mengusulkan KPI beserta target-targetnya yang disampaikan setiap tahunnya kepada RUPS untuk disahkan.
 - g. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan dilaporkan kepada Pemegang Saham.
 - h. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris:
 - 1) Menyusun kebijakan mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporannya kepada Pemegang Saham.
 - 2) Menelaah kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam kontrak manajemen Direksi/rencana kerja dan anggaran Perseroan baik secara individu maupun kolegal dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham dalam laporan tugas pengawasan secara semesteran atau tahunan.
7. Tugas terkait Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
- a. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Perseroan.
 - b. Memantau dan memastikan efektivitas praktik GCG di Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penilaian, yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di Perseroan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilaksanakan secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun.
 - 2) Evaluasi, yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perseroan yang dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah penilaian, meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
 - 3) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai (assessor) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di Perseroan, yang jika perlu dapat minta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.

- 4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan penilai Independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
 - 5) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS dalam Laporan Tahunan.
8. Tugas terkait Penerapan Manajemen Risiko
- a. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungannya dengan risiko usaha dengan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di Perseroan.
 - b. Melakukan penelaahan atas Manajemen Risiko Perseroan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perseroan, sistem, strategi dan Kebijakan Manajemen Perseroan, pengendalian internal Perseroan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur, hasil penelaahan atas berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perseroan dan atas pelaksanaan manajemen.
 - c. Menyusun kebijakan dan strategi investasi dalam bisnis jalan tol dan nol tol dalam rangka penyusunan RJPP, menyampaikan kepada Direksi sebagai saran, masukan dan pendapat termasuk unsur risiko investasi dan usaha.
 - d. Melakukan evaluasi atas kebijakan investasi dan mengidentifikasi serta menilai potensi risikonya.
 - e. Melakukan evaluasi tahapan proses manajemen investasi dan risiko Perseroan, mulai dari identifikasi sampai dengan pengungkapan serta mitigasi risiko.
 - f. Menyampaikan hasil evaluasi sebagai bahan Direksi untuk mereview dan memperbaiki berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan mitigasi risiko termasuk untuk menghindari terjadinya "cost over run" dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas di bidang investasi jalan tol dan non tol.
 - g. Menilai risiko atas rencana proyek-proyek dan investasi Perseroan, untuk selanjutnya memberikan pendapat dan/atau saran terkait kelanjutan proyek-proyek tersebut.
9. Tugas terkait Sistem Pengendalian Internal
- a. Memastikan efektifitas sistem pengendalian internal.
 - b. Memastikan pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal, dengan menilai kompetensi, independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris.
 - c. Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
 - d. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam laporan keuangan dan laporan tahunan.
 - e. Membentuk Komite Audit, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS dan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentiannya, serta informasi tersebut wajib dimuat dalam laman atau website Perseroan.
 - f. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
10. Tugas terkait Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
- a. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam Perseroan.
 - b. Memastikan adanya akurasi data, transparansi dan keterbukaan laporan keuangan Perseroan dan menjamin perlakuan yang adil terhadap Pemegang Saham Minoritas dan Stakeholders yang lain, serta akuntabilitas Organ Perseroan dan kepatuhan Perseroan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- c. Memastikan informasi termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan, laporan tahunan yang disampaikan Perseroan kepada shareholder maupun stakeholder Perseroan dilakukan secara tepat waktu, lengkap dan akurat.
 - d. Memastikan data/informasi yang disampaikan ke publik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
11. Tugas Terkait Teknologi Informasi
- a. Mendapatkan informasi atas sistem IT yang digunakan oleh Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan dan penerapannya, serta aplikasi yang digunakan.
 - b. Memberikan arahan atas implementasi dan rencana sistem IT yang diterapkan Perseroan.
12. Tugas Terkait Pelaporan
- a. Melaporkan kepada Perseroan (Corporate Secretary) mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya di Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya untuk dicatat dalam Daftar Khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
13. Tugas Lainnya
- a. Mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman GCG serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
 - b. Membuat pembagian tugas yang diatur sendiri oleh Dewan Komisaris, pembagian tugas tersebut mencakup seluruh bidang tugas Direksi.
 - c. Melakukan pembagian tugas Anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komite Dewan Komisaris.
 - d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perseroan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
 - e. Bersama dengan Direksi menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - f. Bersama dengan Direksi menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - g. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP 087/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Revisi Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 28 April 2017, bidang tugas Anggota Dewan Komisaris dibagi dalam 6 (enam) bidang tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, yang meliputi:

1. Bidang Kebijakan & Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Perseroan.
2. Bidang Keuangan.
3. Bidang Pengembangan.
4. Bidang Operasi I.
5. Bidang Operasi II.
6. Bidang Organisasi, Sumber Daya Manusia & Umum.



Refly Harun

Komisaris Utama/Komisaris
Independen

Bidang Tugas:

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Perseroan.
Merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

Uraian Tugas:

- (1) Mengkoordinasikan serta mengintegrasikan masukan, arahan dan rekomendasi dari 5 (lima) anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka: penyiapan dan penyusunan visi dan misi Perseroan, penyusunan kebijakan dan strategi Rencana Jangka Menengah dan/atau Jangka Panjang Perusahaan, termasuk dalam penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan, serta memimpin RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Mengkoordinasi anggota Komisaris lainnya dalam rangka pelaksanaan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 2 huruf b yang meliputi antara lain (a) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan (b) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (c) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan, (d) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan (e) mengusulkan kepada RUPS

- (f) menunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan (f) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan (g) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta (h) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya (i) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lainnya (j) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS (k) memberikan penjelasan tentang hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan Peraturan Perundangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal (l) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS (m) mendorong dan memastikan pengelolaan Perseroan baik ditingkat Dewan Komisaris maupun ditingkat Direksi memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (n) selaku Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko: (i) menetapkan program kerja tahunan dan indikator kinerja kunci Komite, (ii) mengarahkan agar hasil kajian Komite tepat dan tajam dan dipergunakan Dewan Komisaris sebagai masukan dalam mengambil keputusan-keputusan Dewan Komisaris, serta (iii) laporan Semesteran dan Tahunan Komite serta laporan capaian kinerja Komite secara self assessment selesai pada waktunya.
- (3) Memberikan masukan, arahan, kesimpulan dan rekomendasi Dewan Komisaris, terkait dengan permohonan Direksi untuk mendapatkan tanggapan dan/atau persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas perbuatan-perbuatan Direksi dalam hal sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pasal 12 ayat 7, 8 dan 10.



Sigit Widyawan
Komisaris Independen

Bidang Tugas:

Keuangan.

Merangkap sebagai Ketua Komite Audit.

Uraian Tugas:

Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi, dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam hal:

- (1) Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyiapan penyusunan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Rencana Kerja Tahunan Perseroan (RKAP) serta pengawasan pelaksanaannya dan melakukan evaluasi dan reviewnya setiap tahun.
- (2) Penetapan arah kebijakan dan strategi untuk pengelolaan manajemen keuangan dan akuntansi Perseroan yang sehat, akuntabel, transparan, serta dalam rangka perkuatan struktur keuangan Perusahaan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Perseroan, sehingga diperoleh dana yang murah yang diperlukan untuk investasi pembangunan jalan tol baru, peningkatan kapasitas, perbaikan dan pemeliharaan jalan tol yang ada, serta untuk investasi di bidang bisnis lain/non tol dalam rangka menambah pendapatan Perseroan.
- (3) Peningkatan kemampuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Perseroan termasuk Anak Perusahaannya, serta dalam pengendalian portofolio investasi keuangan Perseroan agar tercapai keselarasan dengan arah, sasaran dan rencana strategis Perseroan.
- (4) Pengembangan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi keuangan, pengendalian likuiditas keuangan Perseroan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan dan dalam rangka pengamanan transaksi keuangan termasuk pendapatan tol dan non tol, yang sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan dan standar administrasi keuangan.
- (5) Pengawasan penyelesaian permasalahan dibidang hukum yang dihadapi Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan memperhatikan temuan-temuan audit oleh auditor eksternal (KAP dan/atau BPK) dan oleh SPI, serta pengawasan terhadap tindak lanjut langkah-langkah penyelesaian yang direkomendasikan.
- (6) Mendorong dan memastikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah dilakukan dan dipenuhi oleh Komite Audit.
- (7) Memberikan masukan, arahan, rekomendasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko Perseroan melalui penyusunan potensi risiko dan mitigasinya, serta pelaksanaan manajemen risiko dibidang keuangan, dibidang investasi pengembangan pembangunan dan perusahaan jalan tol baru, serta pengoperasian jalan tol yang ada dan serta dalam rangka pengembangan usaha lain non tol dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya Perseroan.
- (8) Memberikan masukan, arahan, rekomendasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian manajemen mutu agar produk-produk Perseroan dibidang keuangan, investasi dan operasi dan pemeliharaan tercapai sesuai sasaran target mutu, waktu dan manfaat, sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas usaha.
- (9) Memberikan masukan, arahan, rekomendasi dalam rangka pengawasan dan pengkajian pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Perseroan, terutama dalam rangka pengamanan pendapatan tol, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan manajemen pengoperasian jalan tol dan bisnis jalan tol.
- (10) Memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan program kerja pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit umum laporan keuangan Perseroan tahun buku berjalan.
- (11) Selaku Ketua Audit, menyetujui usulan program kerja tahunan Komite Audit dan menetapkan program kerja tahunan Komite Audit dan menetapkan indikator kinerja kunci Komite Audit.
- (12) Memantau, mengendalikan aktivitas dan kinerja Komite Audit untuk mencapai sasaran target yang ditetapkan dan menyusun evaluasi pencapaian kinerja Komite Audit secara self assessment, serta penyusunan laporan

tahunan Komite Audit sebagai bagian dari laporan tahunan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi untuk bahan penyusunan laporan tahunan Perseroan.

(13) Berdasarkan Pasal 12 ayat 7.i. huruf a. s.d. huruf o dan ayat 7.ii. dan iii serta memperhatikan ayat 8 dan ayat 10 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, bersama anggota Dewan Komisaris lainnya memberikan masukan dan rekomendasi dan/atau tanggapan tertulis dan/atau persetujuan tertulis Komisaris kepada Direksi, antara lain dalam hal:

- a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai tertentu melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.
- b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk kerjasama KSO, KSU, BOT, BTO, BOO dan kerjasama lisensi dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan.
- d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- e. Melakukan penyertaan modal dalam jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.
- f. Mendirikan perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
- g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Dewan Komisaris.
- h. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

- i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
- j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
- k. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
- l. Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- m. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- n. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Perundang undangan di bidang pasar modal dengan nilai dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- o. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.
- p. Melakukan tindakan-tindakan material yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- q. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- r. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

**Bidang Tugas:**

Pengembangan.

Uraian Tugas:

Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi, dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam hal:

- (1) Penyusunan dan penetapan arah kebijakan dan strategi dalam pengembangan bisnis jalan tol dan bisnis lain yang menguntungkan Perseroan, serta dalam manajemen pengendalian Anak Perusahaan Jalan Tol, manajemen proyek lahan dan konstruksi dan pengembangan bisnis properti dan jasa.
- (2) Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyiapan penyusunan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Rencana Kerja Tahunan Perseroan (RKAP) serta pengawasan pelaksanaannya dan melakukan evaluasi dan reviewnya setiap tahun.
- (3) Penyusunan dan penetapan arah kebijakan dan strategi dalam pengembangan teknik jalan tol dan lalu lintas jalan tol, serta dalam pengelolaan kegiatan rekayasa teknik jalan tol dan lalu lintas jalan tol dapat berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan jalan-jalan tol yang dibangun dan dioperasikan Perseroan adalah jalan tol yang bermutu tinggi, efektif dan efisien.
- (4) Pengelolaan pengembangan bisnis jalan tol baru, yaitu meliputi tahap perencanaan investasi, pengajuan permohonan persetujuan investasi kepada dan persetujuan investasi dari Dewan Komisaris, dilanjutkan tahap penyusunan proposal tender investasi dan keikutsertaan dalam tahap prakualifikasi dan pemasukan surat penawaran tender, yang tahapan-tahapan tersebut menjadi wewenang sepenuhnya Direksi, termasuk tahapan persiapan proyek jalan tol (termasuk pengadaan

tanahnya) sampai dengan pelaksanaan tahap konstruksi dan jalan tol tersebut siap dioperasikan.

Pengelolaan pengembangan bisnis jalan tol baru dapat dilakukan dengan cara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal tertentu, pengelolaan pengembangan jalan tol baru dan bisnis lain menggunakan hasil kajian investasi dari Pemerintah atau pihak lain, yang pengadaannya dilakukan secara pelelangan, sehingga keterlibatan Perseroan dimulai dari tahapan prakualifikasi. Dengan demikian sebelum masuk dalam tahap pemasukan surat keikutsertaan prakualifikasi, Direksi menyampaikan terlebih dahulu data kelayakan proyek, manfaat dan risiko investasi dan mitigasinya kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi dan dikaji, yang hasilnya dipakai oleh Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasinya yaitu apakah Direksi dapat meneruskan ke tahap-tahap pelelangan berikutnya atau tidak.
- b. Pengelolaan pengembangan bisnis jalan tol baru melalui akuisisi ruas-ruas jalan tol, yaitu meliputi tahap perencanaan akuisisi ruas jalan tol dalam RKAP Perseroan, pengajuan permohonan persetujuan akuisisi kepada Dewan Komisaris dengan melampirkan data kelayakan ruas jalan tol yang akan diakuisisi, meliputi kelayakan teknis, finansial, legal ekonomis, manfaat, bankable, kemampuan pendanaan Perseroan, rencana bisnis dan profil risiko investasi, untuk dievaluasi dan dikaji oleh Dewan Komisaris, yang hasilnya dipakai Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasinya apakah Direksi dapat meneruskan ke tahap pelaksanaan akuisisi atau tidak.
- c. Pengelolaan pengembangan bisnis jalan tol baru melalui akuisisi sebagian saham atau seluruh saham ruas-ruas jalan tol, yaitu meliputi tahap perencanaan akuisisi ruas jalan tol dalam RKAP Perseroan, pengajuan permohonan persetujuan akuisisi kepada Dewan Komisaris dengan melampirkan data kelayakan ruas jalan tol yang akan diakuisisi, meliputi kelayakan teknis, finansial, legal, ekonomis, manfaat, bankable, kemampuan pendanaan Perseroan dan rencana bisnis dan profil risiko investasi, untuk dievaluasi dan dikaji oleh Dewan Komisaris, yang hasilnya dipakai oleh Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasinya apakah Direksi dapat meneruskan ke tahap pelaksanaan akuisisi atau tidak.

- (5) Melakukan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian terhadap Anak Perusahaan Jalan Tol (APJT) dan Anak Perusahaan Usaha Lain (APUL) yang dilakukan Direksi Pengembangan, sejak pembentukan APJT dan APUL, pengisian Personilnya (Direksi dan/atau Komisaris), pelaksanaan persiapan Proyek (penyediaan lahan) pelaksanaan konstruksi dan sampai dengan jalan tol atau bangunan sarana dan prasarana investasi usaha lain tersebut siap dioperasikan, agar mencapai sasaran strategis, standar sistem operasi dan tolok ukur kinerja (KPI) yang ditetapkan, sehingga jalan tol dan bangunan investasi usaha lain tersebut andal dioperasikan mendatangkan pendapatan usaha yang menguntungkan Perseroan.
- (6) Melakukan pengawasan atas penyusunan dan penetapan rencana investasi, risiko dan pengelolaan manajemen risiko beserta mitigasinya terkait dengan pembangunan jalan tol baru dan akuisisi ruas-ruas jalan tol serta pembangunan sarana dan prasarana investasi usaha lain.
- (7) Berdasarkan Pasal 12 ayat 7.i huruf a. s.d. huruf o dan ayat 7.ii. dan iii serta memperhatikan ayat 8 dan ayat 10 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, bersama anggota Dewan Komisaris lainnya memberikan masukan dan rekomendasi dan/atau tanggapan tertulis serta persetujuan tertulis Komisaris kepada Direksi, antara lain dalam hal:
- a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai tertentu melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk kerjasama KSO, KSU, BOT, BTO, BOO dan kerjasama lisensi dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan.
 - d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - e. Melakukan penyertaan modal dalam jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.
 - f. Mendirikan perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Dewan Komisaris.
 - h. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - k. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - l. Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
 - m. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

- n. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Perundang undangan di bidang pasar modal dengan nilai dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- o. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.
- p. Melakukan tindakan-tindakan material yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- q. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- r. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- (1) Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam pengoperasian jalan tol, pemeliharaan dan peningkatan jalan tol, dan pengendalian kinerja dan pengoperasian Cabang.
- (2) Pengelolaan manajemen pengoperasian jalan tol yang meliputi pengumpulan tol dan manajemen lalu lintas jalan tol yang efektif, aman dan andal dimana:
- Transaksi pembayaran tol lancar, aman dari manipulasi/kerusakan, serta memenuhi standar pelayanan minimum, dan pengumpulan pendapatan tol transparan, aman, akuntabel dan cepat.
 - Kelancaran lalu lintas di gardu tol dan antrian kendaraan di gerbang tol sesuai dengan standar pelayanan minimum.
 - Manajemen pengoperasian jalan tol yang modern, efektif, aman dan andal, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih, penggunaan peralatan teknis gardu tol yang canggih, compatible dan andal, serta didukung dengan sarana dan prasarana penunjang jalan tol yang cukup, dalam rangka pemberian pelayanan lalu lintas jalan tol yang memenuhi standar keamanan, kecepatan tempuh serta peningkatan response time penanganan gangguan perjalanan yang memenuhi standar pelayanan minimal.
- (3) Pengelolaan manajemen pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan tol beserta seluruh sarana dan prasarana penunjang jalan tol dilakukan secara efektif dan efisien, serta tepat pada waktunya, sehingga kondisi jalan tol yang andal untuk mendukung tercapainya kecepatan tempuh rata-rata, keamanan, kenyamanan dan mobilitas, serta dioperasikan dalam kondisi yang selalu memenuhi standar pelayanan minimum dan menjamin kenaikan tarif dicapai tepat sesuai dengan jadwalnya. Selain itu akan terjadi penghematan biaya pemeliharaan dan peningkatan jalan tol, serta kenaikan tarif dicapai tepat sesuai dengan jadwalnya.
- (4) Pengelolaan dan pengendalian kinerja pengoperasian Cabang dalam manajemen pengumpulan tol dan pengembangan sistem teknologi operasi, penyusunan standar pemeliharaan, penyusunan program pemeliharaan dan manajemen proyek pemeliharaan.



Boediarso Teguh Widodo
Komisaris

Bidang Tugas:

Operasi II.

Uraian Tugas:

Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi, dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam hal:

- (5) Berdasarkan Pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 juncto Pasal 16 ayat 1 huruf b dan 11 huruf d dan Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bersama anggota Dewan Komisaris lainnya memberikan masukan, arahan dan rekomendasi persetujuan tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi, antara lain dalam rangka:
- Penyusunan dan penetapan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi, serta dalam hal revisinya.
 - Pencalonan anggota Direksi dan Komisaris pada Anak Perusahaan dari Perseroan, termasuk Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (6) Berdasarkan Pasal 12 ayat 7.i huruf a. s.d. huruf o dan ayat 7.ii. dan iii serta memperhatikan ayat 8 dan ayat 10 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, bersama anggota Dewan Komisaris lainnya memberikan masukan dan rekomendasi dan/atau tanggapan tertulis serta persetujuan tertulis Komisaris kepada Direksi, antara lain dalam hal:
- Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai tertentu melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk kerjasama KSO, KSU, BOT, BTO, BOO dan kerjasama lisensi dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - Menetapkan dan mengubah logo Perseroan.
 - Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - Melakukan penyertaan modal dalam jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.
 - Mendirikan perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Dewan Komisaris.
 - Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - Melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
 - Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Perundang undangan di bidang pasar modal dengan nilai dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- o. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.
- p. Melakukan tindakan-tindakan material yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- q. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- r. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Pembahasan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya untuk perbuatan-perbuatan Direksi lainnya yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris tersebut pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 6 butir a sampai dengan m.



Agus Suharyono
Komisaris

Bidang Tugas:

Operasi I.

Merangkap sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

Uraian Tugas:

Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi, dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam hal:

- (1) Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam pengelolaan manajemen sistem informasi dan teknologi

informasi Perseroan termasuk teknologi operasi jalan tol dan pengembangan teknologi informasi Perseroan.

- (2) Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pengendalian oleh Perusahaan Induk (Kantor Pusat Perseroan) atas Anak Perusahaan Jalan Tol (APJT) dan Anak Perusahaan Usaha Lain (APUL) pada tahap operasional, untuk mencapai sasaran strategis, standar sistem operasi dan tolok ukur kinerja.
- (3) Pengelolaan manajemen bisnis, yang meliputi bisnis jalan tol dan pengembangan bisnis lain, dalam hal melakukan eksekusi dan meningkatkan peluang bisnis baik di dalam maupun diluar wilayah operasi kelompok usaha Perseroan guna memaksimalkan pendapatan pendapatan melalui pengembangan operasi jalan tol Anak Perusahaan dan Usaha lain Induk dan Anak Perusahaan yang telah beroperasi.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan manajemen penyusunan dan penetapan rencana investasi, risiko dan pengelolaan manajemen risiko beserta mitigasinya terkait dengan pembangunan jalan tol baru dan akuisisi ruas-ruas jalan tol.
- (5) Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan manajemen sistem informasi dan teknologi informasi Perusahaan, termasuk manajemen bisnis non jalan tol dan pengembangannya.
- (6) Berdasarkan Pasal 12 ayat 7.i huruf a. s.d. huruf o dan ayat 7.ii. dan iii serta memperhatikan ayat 8 dan ayat 10 huruf a dan b. Anggaran Dasar Perseroan, bersama anggota Dewan Komisaris lainnya memberikan masukan dan rekomendasi dan/atau tanggapan tertulis serta persetujuan tertulis Komisaris kepada Direksi, antara lain dalam hal:
 - a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai tertentu melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk kerjasama KSO, KSU, BOT, BTO, BOO dan kerjasama lisensi dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat sama yang

- jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan.
 - d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - e. Melakukan penyertaan modal dalam jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - f. Mendirikan perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Dewan Komisaris.
 - h. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - k. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - l. Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
 - m. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - n. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Perundang undangan di bidang pasar modal dengan nilai dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - o. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.
 - p. Melakukan tindakan-tindakan material yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - q. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - r. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- (7) Selaku Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko:
- a. Memfinalkan penyusunan program kerja tahunan Komite dan menetapkan indikator kinerja kunci Komite, untuk ditetapkan oleh Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.
 - b. Memantau dan mengendalikan aktivitas dan kinerja Komite untuk mencapai sasaran target yang ditetapkan dilakukan secara efektif dan efisien, serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris hasil kajian-kajian atas usulan-usulan dari Direksi untuk dibahas dan mendapatkan keputusan.
 - c. Memfinalkan penyusunan laporan evaluasi semesteran dan tahunan pencapaian kinerja Komite secara self assessment, serta penyusunan laporan tahunan Komite, sebagai bagian dari laporan tahunan Dewan Komisaris yang akan disampaikan kepada Direksi untuk bahan penyusunan laporan tahunan Perseroan.



Muhammad Sapta Murti
Komisararis

Bidang Tugas:

Sumber Daya Manusia dan Umum; Pelatihan; serta Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Uraian Tugas:

Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka:

- (1) Penetapan arah kebijakan dan strategi *human capital*, pelayanan *human capital* dan umum, serta program kemitraan dan bina lingkungan, termasuk dalam rangka penyusunan struktur organisasi Perseroan, uraian fungsi dan tugas pokok pejabat satu tingkat dibawah jabatan Direksi, sistem tata kelola dan pengembangannya.
- (2) Pengawasan atas manajemen pengelolaan dan pengembangan sistem *human capital* dan organisasi Perseroan, serta pengendalian implementasi sistem dan prosedur pengelolaan *human capital* yang cepat, akuntabel, efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengawasan atas manajemen pengelolaan dan pengembangan sistem logistik, pengamanan aset milik Perseroan dan/atau milik Negara serta aktivitas umum lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (4) Pengawasan atas manajemen pengelolaan dan pengembangan Pusat Pengembangan Jasa Marga.
- (5) Pengawasan atas manajemen pengelolaan program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta mendorong pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan manfaat pelaksanaannya.
- (6) Penyusunan persyaratan dan tata cara nominasi calon Direksi dan Komisararis Anak Perusahaan, penetapan

- komposisi jabatan dan pengangkatannya, termasuk untuk jabatan Sekretaris Perusahaan dan Ketua Satuan Pengawasan Internal.
- (7) Pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisararis Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam mengusulkan gaji/honorarium, tunjangan fasilitas dan tantiem/insentif kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisararis kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas dalam hal Dewan Komisararis diberikan pelimpahan wewenang oleh RUPS Tahunan Perseroan.
 - (8) Berdasarkan Pasal 12 ayat 7.i huruf a. s.d. huruf o dan ayat 7.ii. dan iii serta memperhatikan ayat 8 dan ayat 10 huruf a dan b. Anggaran Dasar Perseroan, bersama anggota Dewan Komisararis lainnya memberikan masukan dan rekomendasi dan/atau tanggapan tertulis serta persetujuan tertulis Komisararis kepada Direksi, antara lain dalam hal:
 - a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai tertentu melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisararis, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk kerjasama KSO, KSU, BOT, BTO, BOO dan kerjasama lisensi dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisararis.
 - c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan.
 - d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - e. Melakukan penyertaan modal dalam jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisararis pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - f. Mendirikan perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisararis pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

- g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Dewan Komisaris.
- h. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
- i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
- j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
- k. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
- l. Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- m. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- n. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- o. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.
- p. Melakukan tindakan-tindakan material yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan

tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- q. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- r. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KOMISARIS INDEPENDEN DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan telah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas termasuk pemegang saham publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Kriteria Komisaris Independen

Sebagai perusahaan publik yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, Jasa Marga telah memenuhi ketentuan yang diatur regulator pasar modal terkait kriteria Komisaris Independen. Ketentuan yang wajib dipenuhi tersebut tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Jasa Marga dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.

- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten (Perseroan), anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten (Perseroan).
- e. Ketentuan lainnya antara lain sebagai berikut:
 - 1) Berasal dari luar perusahaan publik.
 - 2) Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
 - 3) Memahami peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

Jumlah Komisaris Independen Jasa Marga telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, dimana setiap perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember dimana dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh) persen dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 18 Maret 2015, Perseroan memiliki 2 (dua) Komisaris Independen yaitu Refly Harun dan Sigit Widyawan, dari total keseluruhan 6 (enam) anggota Dewan Komisaris atau berjumlah 33,33% yang berarti Perseroan telah memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pernyataan Independensi Anggota Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perseroan, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha Perseroan. Anggota Dewan Komisaris Perseroan telah membuat pernyataan

kepemilikan saham Perseroan, dan Komisaris Independen Perseroan tidak memiliki saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Pernyataan ini ditandatangani oleh masing-masing Komisaris Independen dalam dokumen Pakta Integritas yang dilakukan setiap tahun, pada setiap awal tahun.

Bersama dengan anggota Komisaris lainnya, Komisaris Independen telah menandatangani Pernyataan Komitmen dan Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. Pemutakhiran yang terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2017 melalui Surat Keputusan No. 126/KPTS/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dan telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komisaris dan Direksi pada bulan November 2017. Independensi anggota Komisaris Independen ini juga dinyatakan dan ditegaskan dalam Pakta Integritas *Good Corporate Governance* dan Pernyataan Komitmen dan Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku yang ditandatangani oleh kedua Komisaris Independen di Dewan Komisaris Perseroan.

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Perusahaan Lain yang Terafiliasi dengan Perseroan

Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda.

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan keluarganya telah dilaporkan dan disimpan dalam Daftar Khusus kepemilikan saham Dewan Komisaris. Daftar Khusus tersebut disimpan di Perseroan, dalam hal ini unit Corporate Secretary.

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham dapat dilihat di Bab Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris.

Kepengurusan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perseroan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL KEPENGURUSAN DIREKSI JASA MARGA DI PERUSAHAAN LAIN YANG TERAFILIASI DENGAN JASA MARGA

Nama	Sebagai Dewan Komisaris	Sebagai Direksi	Sebagai Pemegang Saham Utama/Pengendali
Refly Harun	x	x	x
Sigit Widyawan	x	x	x
Boediarso Teguh Widodo	x	x	x
Sugihardjo*	x	x	x
Muhammad Sapta Murti	x	x	x
Agus Suharyono	x	x	x
Taufik Widjoyono**	x	x	x

Keterangan:

✓ ada

x tidak ada

* Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 15 Maret 2017

** Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 15 Maret 2017

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta.
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangan.
4. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Selama tahun 2017, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, setiap Anggota Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk membuat Daftar Khusus, yang berisikan keterangan kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan maupun perusahaan lain. Daftar Khusus disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Untuk menjaga independensi dan profesionalisme, setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki etika sebagai berikut:

1. Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Perseroan yang seimbang dengan kepentingan *Stakeholders*.
2. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan menempatkan kepentingan Dewan Komisaris secara keseluruhan, di atas kepentingan pribadi.
3. Selama menjabat, Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:
 - a. Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain.
 - b. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
 - c. Berkompetisi dengan Perseroan yaitu menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (*inside information*) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perseroan.

- d. Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Dewan Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS.
4. Menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perseroan yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 5. Tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 6. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
 7. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.
 8. Tidak merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung dengan Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 9. Menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan (Pakta Integritas) dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS dan/atau OJK.
 10. Mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (insider trading) untuk memperoleh keuntungan pribadi.
 11. Dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung imbalan dan/atau hadiah, dan/atau hibah dan/atau sumbangan dan/atau entertainment dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perseroan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhinya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
 12. Tidak diperkenankan memberikan dan menerima hadiah, bingkisan, parcel, karangan bunga dan bentuk pemberian lainnya pada hari raya keagamaan maupun hari-hari besar/tertentu lainnya kepada pejabat/karyawan di lingkungan instansi Pemerintah dan/atau pihak yang memiliki hubungan bisnis.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2017 anggota Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut:

TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DIKUTI OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017

No.	Anggota Dewan Komisaris	Pelatihan
1	Refly Harun	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop "Negotiation Skill". • Workshop "Legal Opinion & Legal Audit"
2	Sigit Widyawan	Expand Leadership Program For Bod/Boc
3	Boediarso Teguh Widodo	-
4	Sugihardjo*	-
5	Muhammad Sapta Murti	-
6	Agus Suharyono	-
7	Taufik Widjoyono**	-

Keterangan:

* Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 15 Maret 2017.

** Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 15 Maret 2017.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris secara berkala yaitu setiap bulan mengadakan rapat, baik rapat Dewan Komisaris (rapat internal) maupun rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi (rapat koordinasi), maupun rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Pusat atas undangan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rapat sewaktu-waktu di luar rapat berkala untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak ataupun hal-hal yang perlu segera mendapatkan keputusan Dewan Komisaris.

Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Komisaris mengacu dan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta tata tertib rapat sebagaimana yang diatur dalam Board Manual. Rapat-rapat tersebut di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama atau dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.

Hasil rapat dituangkan dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dan/atau oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Risalah rapat didokumentasikan oleh Perseroan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Untuk keperluan Dewan Komisaris, risalah rapat (copy dokumen) diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Selama tahun 2017, berdasarkan jadwal yang dibuat di bulan Desember 2016, Dewan Komisaris menjadwalkan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 10 kali dengan realisasi sebanyak 14 kali.

TABEL RENCANA JADWAL DAN AGENDA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017

Bulan	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda
Januari	18-01-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris carry-over tahun 2016. Hasil pelaksanaan tugas Komite Audit dan Komite NRR tahun 2016. Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris dan Komite tahun 2017. Laporan proses pengadaan KAP untuk audit tahun buku 2017.
Februari	08-02-2017	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pengembangan TI dan arahan kebijakan pengembangannya. Laporan hasil pengadaan KAP untuk audit tahun buku 2017. Laporan awal temuan KAP atas audit tahun buku 2016 dan memastikan audit telah dilaksanakan dengan efektif. Penyusunan usulan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016 untuk disampaikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016. Laporan hasil penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dewan Komisaris tahun 2016.
Maret	23-03-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. akhir Februari 2017. Laporan hasil kajian Komite Audit yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian arahan Dewan Komisaris kepada Direksi. Laporan hasil kajian NRR yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian arahan Dewan Komisaris kepada Direksi. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016 untuk dipertanggungjawabkan di RUPS Tahunan Tahun Buku 2016.

Bulan	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda
April	18-04-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris Triwulan 1 2017. Pelaksanaan pengembangan usaha lain Triwulan 1 2017 dan pemberian arahan kebijakan dan strategi pengembangannya dari Dewan Komisaris. Rencana dan pelaksanaan pemeliharaan jalan tol Triwulan 1 2017 dan pemberian arahan kebijakan dan strategi peningkatan mutu jalan tol.
Mei	17-05-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. April 2017. Evaluasi dan tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan 1 2017 dari hasil kajian Komite, terkait dengan progres pencapaian KPI. Hasil kajian Komite Audit yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian arahan Dewan Komisaris kepada Direksi. Laporan kinerja Komite Audit dan Komite NRR Triwulan 1 2017.
Juni	14-06-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. Mei 2017. Pemenuhan SPM ruas-ruas jalan tol. Tindak lanjut temuan auditor eksternal.
Juli	19-07-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. Triwulan 2 2017. Hasil kajian Komite NRR selama semester 1 2017 yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian arahan Dewan Komisaris kepada Direksi. Pelaksanaan pengembangan usaha lain Triwulan 2 2017 dan tanggapan Dewan Komisaris. Hasil kajian Komite Audit yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian arahan Dewan Komisaris kepada Direksi.
Agustus	16-08-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. Juli 2017. Evaluasi dan tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan 2 2017 dari hasil kajian Komite, terkait dengan progres pencapaian KPI. Hasil kajian Komite Audit yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian arahan Dewan Komisaris kepada Direksi. Laporan kinerja Komite Audit dan Komite NRR Triwulan 2 2017. Hasil kajian Komite NRR atas rencana dan realisasi pengisian jabatan dan pemenuhan kompetensi pejabatnya s.d. Semester 1 2017.
September	20-09-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris. s.d. Agustus 2017. Hasil kajian Komite Audit atas kebijakan Direksi tentang pengadaan dan pelaksanaannya serta pemberian arahan Dewan Komisaris kepada Direksi. Hasil kajian Komite NRR atas kebijakan Direksi tentang nominasi, remunerasi dan pelaksanaannya, dan arahan Dewan Komisaris kepada Direksi. Rencana pengadaan KAP tahun buku 2018. Hasil kajian Komite NRR atas RJPP 2013-2017 sebagai bahan pemberian arahan Dewan Komisaris kepada Direksi tentang pelaksanaan RJPP dan penyusunan RJPP 2018-2022.
Oktober	18-10-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris Triwulan 3 2017. Paparan dan pembahasan hasil evaluasi Komite Audit dan Komite NRR atas rancangan RKAP 2018 yang diajukan Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi. Laporan hasil kajian Komite Audit atas pelaksanaan kebijakan akuntansi dan sistem administrasi keuangan yang dipergunakan Perseroan dan pemberian arahan Dewan Komisaris kepada Direksi. Kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ke-3 s.d. Triwulan 3 2017. Hasil kajian Komite Audit atas Laporan Keuangan Prognosa s.d. Desember 2016 dan arahan Dewan Komisaris kepada Direksi.

Bulan	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda
November	22-11-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris. s.d. Oktober 2017. Efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dan/atau auditor internal. Evaluasi dan tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan 3 2017 dari hasil kajian Komite, terkait dengan progres pencapaian KPI. Rencana dan realisasi investasi dan akuisisi jalan tol baru s.d. Oktober 2017. Kajian atas finalisasi penyusunan RJPP 2018-2022 oleh Komite NRR dan penyiapan tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi.
Desember	13-12-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. November 2017. Laporan kegiatan dan hasil penugasan yang diterima Komite Audit dan Komite NRR s.d. November 2017. Prognosa pencapaian ROE s.d. akhir Desember 2017. Penyusunan Laporan Hasil Self Assessment Kinerja Dewan Komisaris 2017. Pelaksanaan pengembangan usaha lain Triwulan 3 2017 dan pemberian arahan kebijakan dan strategi pengembangannya.

TABEL REALISASI RAPAT, AGENDA RAPAT DAN REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda	Refly Harun	Muhammad Sapta Murti	Boediarso Teguh Widodo	Agus Suharyono	Sigit Widyawan	Sugihardjo*	Taufik Widjoyono**
1	18-01-2017	<ul style="list-style-type: none"> Status Tindak Lanjut Keputusan Dewan Komisaris (carry over tahun 2016). Tugas Komite Audit dan Komite NRR. 	✓	✓	✓	✓	✓		✓
2	08-02-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Laporan Hasil Temuan KAP. Kajian Agenda RUPS. Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Informasi. 	✓	✓	✓	x	✓		✓

No.	Tanggal Rapat (tgl-bl-thn)	Agenda	Refly Harun	Muhammad Sapta Murti	Boediarso Teguh Widodo	Agus Suharyono	Sigit Widyawan	Sugihardjo*	Taufik Widjoyono**
3	23-03-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Hasil Kajian Komite Audit. Laporan Hasil Kajian Komite NRR. 	✓	✗	✗	✓	✓	✓	
4	13-04-2017	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Joint Venture. Penjajakan mitra pendanaan melalui direct investment pada ruas-ruas jalan tol. 	✓	✗	✗	✓	✓	✓	
5	18-04-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Pengembangan Usaha Lain. 	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
6	17-05-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Laporan Manajemen. Kajian Komite Audit. Laporan Kinerja Komite. 	✓	✗	✓	✗	✓	✗	
7	19-06-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. SPM Jalan Tol. Tindak Lanjut Hasil Audit. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	19-07-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Hasil Kajian Komite NRR. Pengembangan Usaha Lain. Kajian Komite Audit. Kajian Komite NRR. 	✓	✓	✗	✓	✓	✓	

No.	Tanggal Rapat (tgl-bl-thn)	Agenda	Refly Harun	Muhammad Sapta Murti	Boediarso Teguh Widodo	Agus Suharyono	Sigit Widyawan	Sugihardjo*	Taufik Widjoyono**
9	08-08-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Laporan Manajemen. Kajian Komite Audit. Laporan Kinerja Komite. Laporan Hasil Kajian ROE. 	✓	✓	✓	x	✓	✓	
10	20-09-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Laporan Hasil Kajian RJPP. Pengadaan KAP. Kebijakan Cahsless. Proyek Strategis. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	17-10-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. RKAP. Kebijakan Akuntansi dan Administrasi Keuangan. Kepatuhan Direksi. Laporan Keuangan Prognosa. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	09-11-2017	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan usulan Direksi terkait akuisisi ruas-ruas jalan tol. Pembahasan usulan revisi RKAP 2017. 	✓	x	x	✓	✓	✓	
13	22-11-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Efektivitas Audit. Laporan Manajemen Triwulan 3 2017. Progres Pencapaian KPI. Investasi dan akuisisi ruas-ruas jalan tol baru. RJPP 2018-2022 oleh Komite NRR. 	✓	✓	✓	x	✓	✓	

No.	Tanggal Rapat (tgl-bl-thn)	Agenda	Refly Harun	Muhammad Sapta Murti	Boediarso Teguh Widodo	Agus Suharyono	Sigit Widyanan	Sugihardjo*	Taufik Widjoyono**
14	18-12-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Laporan Kegiatan dan Hasil Penugasan Komite Audit dan Komite NRR. Prognosa Pencapaian ROE 2017. Laporan Hasil self Assessment Kinerja Dewan Komisaris 2017. Pelaksanaan Pengembangan Usaha Lain. 	✓	✓	✗	✓	✓	✗	
Jumlah Rapat dalam Setahun						14			
Jumlah Rapat yang Wajib Dihadiri			14	14	14	14	14	12	2
Jumlah Rapat yang Dihadiri			14	10	8	10	14	10	2
Presentase Kehadiran (%)			100	71	80	71	100	83	100
Rata-rata (%)						87			

Keterangan:

- ✓ Hadir
- ✗ Tidak Hadir

* Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 15 Maret 2017.

** Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 15 Maret 2017.

Catatan:

- Ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/ rapat penting yang tidak dapat diwakilkan.
- Perbedaan Jumlah Rapat yang Wajib Dihadiri adalah karena perbedaan periode jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Selain rapat-rapat rutin bulanan, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Rekapitulasi rapat Dewan Komisaris bersama Direksi tersebut secara detail dapat dilihat pada Bab Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris.

Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Dewan Komisaris. risalah rapat di tandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta yang hadir serta didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu organ pendukung Dewan Komisaris yang meliputi Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko. Pembahasan mengenai Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko akan diuraikan dalam bagian tersendiri, yaitu Bab Komite-komite.

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris tahun 2017

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Jasa Marga terus mendorong pelaksanaan keputusan pengawasan dan penasehatan yang semakin efektif.

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah mengeluarkan berbagai surat dan keputusan yang bersifat pengawasan sebagai berikut:

A. Persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi Perseroan

1. Surat No. DK005/I/2017, tanggal 09 Januari 2017, Perihal Persetujuan atas Usulan Calon Komisaris Utama Anak Perusahaan.
2. Surat No. DK006/I/2017, tanggal 09 Januari 2017, Perihal Persetujuan atas Usulan Calon Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan.
3. Surat No. DK007/I/2017, tanggal 10 Januari 2017, Perihal Persetujuan atas Usulan Calon Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan.
4. Surat No. DK013/I/2017, tanggal 19 Januari 2017, Perihal Persetujuan Pengangkatan Head of Internal Audit.
5. Surat No. DK015/I/2017, tanggal 23 Januari 2017, Perihal Persetujuan Ijin Prinsip Dalam Rangka Pemberian Shareholder Loan Tahap II Kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
6. Surat No. DK025/II/2017, tanggal 02 Februari 2017, Perihal Pemberian Persetujuan Perubahan Alokasi Dana PMHMETD.
7. Surat No. DK031/II/2017, tanggal 10 Februari 2017, Perihal Persetujuan Melakukan Investasi dan Pembentukan Perusahaan Patungan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat.
8. Surat No. DK038/II/2017, tanggal 28 Februari 2017, Perihal Persetujuan atas Usulan Calon Direksi Anak Perusahaan
9. Surat No. DK 044/III/2017, tanggal 06 Maret 2017, Perihal Persetujuan Ralat Usulan Perubahan Nomenklatur.
10. Surat No. DK060/III/2017, tanggal 29 Maret 2017, Perihal Pemberian Persetujuan Ijin Prinsip Kerjasama Penyelenggaraan Tempat Istirahat (TI) Km 5 + 200 A/B Jalan Tol Semarang dan TI Km 1A Pasteur Jalan Tol Purbaleunyi
11. Surat No. DK061/III/2017, tanggal 29 Maret 2017, Perihal Pemberian Persetujuan Penambahan Divestasi 5% Saham PT Trans Marga Jateng milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
12. Surat No. DK062/III/2017, tanggal 29 Maret 2017, Perihal Pemberian Persetujuan Terkait Pinjaman PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan Perbankan.
13. Surat No. DK063/III/2017, tanggal 29 Maret 2017, Perihal Pemberian Persetujuan Pembongkaran Gerbang Tol.
14. Surat No. DK069/IV/2017, tanggal 17 April 2017, Perihal Persetujuan Pembentukan Perusahaan Patungan Pengelola Jalan Tol Trans Jawa.
15. Surat No. DK072/IV/2017, tanggal 18 April 2017, Perihal Persetujuan Prinsip Atas Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi.
16. Surat No. DK073/IV/2017, tanggal 18 April 2017, Perihal Persetujuan Pengangkatan Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
17. Surat No. DK078/IV/2017, tanggal 21 April 2017, Perihal Usulan Pengisian Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan.
18. Surat No. DK088/V/2017, tanggal 02 Mei 2017, Perihal Pemberian Persetujuan dan Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Cabang PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
19. Surat No. DK099/V/2017, tanggal 24 Mei 2017, Perihal Pemberian Persetujuan Perpanjangan Pinjaman Dana Talangan Tanah Kepada Anak Perusahaan Jalan Tol (APJT).
20. Surat No. DK112/VI/2017, tanggal 19 Juni 2017, Perihal Usulan Pengisian Direksi Anak Perusahaan.
21. Surat No. DK113/VI/2017, tanggal 19 Juni 2017, Perihal Persetujuan Prinsip atas Program Pengembangan Properti pada Lokasi Lahan Kaum Sari, Andara dan Pangkalan.
22. Surat No. DK114/VI/2017, tanggal 19 Juni 2017, Perihal Pemberian Persetujuan terkait Pinjaman PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan Perbankan.
23. Surat No. DK116/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017, Perihal Persetujuan Penghapusan Gedung Kantor Cabang Semarang dan Pembongkaran Overpass Ketapang.
24. Surat No. DK118/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017, Perihal Usulan Pengisian Direksi Anak Perusahaan.
25. Surat No. DK138/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017, Perihal Persetujuan Ijin Penerbitan Alternatif Pendanaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
26. Surat No. DK145/VIII/2017, tanggal 09 Agustus 2017, Perihal Pengangkatan Pengurus Anak Perusahaan di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
27. Surat No. DK 155/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017, Perihal Usulan Perubahan Susunan Komisaris Anak Perusahaan.

28. Surat No. DK 156/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017, Perihal Rotasi Direktur Anak Perusahaan.
 29. Surat No. DK 177/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017, Permohonan Persetujuan Setoran Modal PT Jasamarga Properti Tahun 2017.
 30. Surat No. DK 179/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Perihal Pinjaman Dana Talangan Tanah Kepada Anak Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 31. Surat No. DK 180/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Perihal Persetujuan Penunjukan Komisaris Independen PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ).
 32. Surat No. DK 181/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, Perihal Pemberian Persetujuan Penghapusan dan Pelelangan Aktiva Tetap Kendaraan dan Barang/ Peralatan Tahun Buku 2016.
 33. Surat No. DK DK 185/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017, Perihal Rotasi Direktur Anak Perusahaan.
 34. Surat No. DK 191/XI/2017, tanggal 9 November 2017, Perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Akuisisi Ruas Jalan Tol Transjawa PT Waskita Toll Road.
 35. Surat No. DK 211/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017, Perihal Pemberian Persetujuan Penghapusbuku U-Turn Arteri STA 36+850 Jalan Tol Surabaya-Gempol.
- B. Surat Keputusan Dewan Komisaris**
1. KEP-028/II/2017, tanggal 08 Februari 2017, tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Penunjukan Anggota Dewan Komisaris untuk Memimpin RUPS PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tanggal 15 Maret 2017.
 2. KEP-029/II/2017, tanggal 08 Februari 2017, tentang Pembentukan Panitia Negosiasi Harga Jasa Akuntan Publik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk Tahun Buku 2017.
 3. KEP 049/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2017.
 4. KEP 056/III/2017, tanggal 24 Maret 2017, tentang Revisi Penetapan Penghasilan, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 5. KEP 75/IV/2017, tanggal 20 April 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 6. KEP 076/IV/2017, tanggal 20 April 2017, tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 7. KEP 077/IV/2017, tanggal 20 April 2017, tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 8. KEP 83/IV/2017, tanggal 26 April 2017 tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 9. KEP 84/IV/2017, tanggal 26 April 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 10. KEP 85/IV/2017, tanggal 26 April 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 11. KEP 087/IV/2017, tanggal 27 April 2017 tentang Revisi Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 12. KEP 119/VI/2017, tanggal 24 Juni 2017 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 13. KEP 161/IX/2017, tanggal 14 September 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa kantor Akuntan Publik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk Tahun Buku 2018.
 14. KEP 193A/XI/2017, tanggal 13 November 2017 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2017.
 15. KEP 201/XI/2017, tanggal 22 November 2017 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2018-2022 PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 16. KEP 202/XI/2017, tanggal 27 November 2017 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2018.
 17. KEP 204/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017 tentang Pemutakhiran Piagam (Charter) Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris-Direksi Selama Tahun 2017

Dalam rapat-rapat Dewan Komisaris dibahas hal-hal yang perlu diputuskan Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan berdasarkan pemikiran, saran dan pendapat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan hasil-hasil kajian dari Komite-Komite yang ditugasi Dewan Komisaris untuk melakukan pendalaman terhadap suatu kasus tertentu, maupun dari hasil kajian Komite atas hal-hal yang telah diprogram sebagai agenda kerja tahunan Komite yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Selain itu Dewan Komisaris, dari hasil kunjungan kerjanya ke Cabang-cabang dan ke lapangan, yang dalam tahun 2017 meliputi Cabang-cabang sebagai berikut: Purbaleunyi, Semarang, Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Jakarta-Tangerang-Cengkareng, Palikanci, Surabaya-Gempol, dan Belmera, serta Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung, guna memperoleh data dan informasi terkait dengan pelaksanaan pengoperasian ruas-ruas jalan tol Perseroan dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan ruas-ruas jalan tol baru, serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Data dan informasi penting serta solusi yang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris yang telah dibahas bersama Kepala Cabang dan/atau Pemimpin Proyek kemudian dicatat sebagai masukan dan saran Dewan Komisaris untuk kemudian akan disampaikan kepada Direksi.

Kesimpulan dan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris serta data, informasi dan informasi-informasi penting dari hasil kunjungan ke lapangan tersebut kemudian disampaikan kepada Direksi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi sebagai saran, pendapat dan/atau arahan Dewan Komisaris kepada Direksi, untuk dibahas dan diputuskan sebagai keputusan rapat. Selain itu dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi tersebut juga dibahas hal-hal yang terkait dengan usulan dan/atau permohonan Direksi untuk mendapatkan tanggapan tertulis dan/atau persetujuan tertulis Dewan Komisaris, maupun hal-hal yang diantisipasi oleh Dewan Komisaris perlu disampaikan kepada Direksi untuk dicermati dan/atau ditindak lanjuti oleh Direksi dalam rangka pengelolaan dan pengembangan

Perseroan saat ini maupun masa yang akan datang dalam jangka waktu dekat, menengah dan panjang, sesuai dengan target sasaran RKAP maupun RJPP Perseroan.

Keputusan-keputusan rapat Dewan Komisaris dan keputusan-keputusan rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi tersebut dipantau dan dievaluasi tindak lanjutnya oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kemudian dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris dan dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi.

Terhadap keputusan-keputusan rapat yang sulit untuk ditindak lanjuti maupun keputusan yang menghadapi permasalahan baru dalam penyelesaiannya akan dibahas bersama Direksi untuk dicari solusi terbaik yang disepakati bersama.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi Dewan Komisaris selama tahun 2017 pada prinsipnya sebagian besar keputusan rapat telah selesai ditindaklanjuti, meskipun ada beberapa keputusan masih dalam proses penyelesaian karena menyangkut kewenangan pihak lain seperti misalnya masalah hukum yang melibatkan pihak pemasok, aparat hukum: Pengadilan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BANI dan sebagainya.

Selanjutnya Dewan Komisaris akan fokus dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang masih dalam proses tersebut tetap berjalan dan dapat dipercepat penyelesaiannya. Jika ada perkembangan baru yang menghambat ataupun menyebabkan suatu keputusan tidak dapat diteruskan penyelesaiannya, maka ditinjau dan dibahas kembali dengan Direksi. Namun terhadap keputusan yang dalam perkembangannya menjadi tidak perlu ditindaklanjuti lagi karena sudah tidak menjadi prioritas dan/atau tidak menjadi suatu persoalan lagi bagi Perseroan, dan/atau dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak, maka keputusan tersebut dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi untuk meralat keputusan yang terdahulu.



Kunjungan kerja rutin Dewan Komisaris ke proyek Jalan Tol Pandaan-Malang, Minggu 29 Oktober 2017. Dewan Komisaris secara berkala melakukan kunjungan kerja dalam rangka memastikan pembangunan proyek jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group berjalan dengan baik.

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (KPI) DEWAN KOMISARIS

Ukuran kinerja utama Dewan Komisaris dalam tahun 2017 terdiri dari 7 (tujuh) perspektif dan 16 (enam belas) indikator kinerja kunci, dimana untuk perspektif Proses Internal Dewan Komisaris terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja. Dari hasil *self assessment* yang dilakukan tahun 2017 diperoleh pencapaian penilaian kinerja yaitu sebesar 4,92.

Terkait dengan kinerja dalam perspektif “Monitoring dan Evaluasi Rencana & Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Baru di Jawa dan Luar Jawa” pengawasan Dewan Komisaris belum memperlihatkan hasil yang maksimal, karena kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan tol baru masih sering dijumpai progres terkendala pengadaan tanah,

meskipun kondisi tersebut jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya sejak terbitnya Undang Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diikuti dengan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Rincian realisasi pencapaian indikator kinerja kunci Dewan Komisaris tahun 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot (%)	Nilai KPI	
			Target	Realisasi
1	RUPS	12	0,60	0,60
2	Pengawasan Keuangan	6	0,30	0,28
3	Pengawasan Operasional	6	0,30	0,30
4	Pengawasan Pengembangan	6	0,30	0,30
5	Pengawasan Sumber Daya Manusia	8	0,40	0,40
6	Pengawasan Kepatuhan	6	0,30	0,30
7	Proses Internal Dewan Komisaris	56	2,80	2,74
TOTAL		100	5,00	4,92

Realisasi nilai pencapaian Key Performance Indicator (KPI) s.d. Desember 2017 sebesar **4,92** atau dengan klasifikasi **“Sangat Baik”**. Capaian ini lebih baik dan meningkat dari tahun 2016 dengan skor sebesar 4,77.

PROSEDUR, DASAR PENETAPAN DAN BESARNYA REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Merujuk pada Pasal 96 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Ketentuan mengenai penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris menurut Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 113 ditetapkan oleh RUPS.

Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya (yang ke-1) melalui Peraturan Menteri Negara

BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 dan perubahannya yang ke-2 dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017.

Dalam rangka penyiapan usulan penetapan besarnya penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2017, serta penggunaan laba bersih tahun buku 2016 dan tantiem tahun buku 2016, Dewan Komisaris dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil kajian yang dilakukan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko, mengusulkan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk disetujui dan diusulkan untuk mendapatkan penetapan dan/atau persetujuan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, yang akan dilaksanakan tanggal 15 Maret 2017.

Khusus untuk besaran gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2017, Dewan Komisaris mengusulkan agar Dewan Komisaris diberikan wewenang dan kuasa RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Surat usulan Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dilakukan dengan surat Dewan Komisaris No. DK 040/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 dan No. DK 048/III/2017 tanggal 08 Maret 2017.

BAGAN PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan saat ini telah mengikuti peraturan tersebut dimana Remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Honorarium.
2. Tunjangan.
3. Fasilitas.
4. Tantiem/Insentif Kinerja.
5. Asuransi Purna Jabatan.

Pengusulan besarnya Tantiem untuk tahun buku 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan pencapaian: target sasaran RKAP Tahun 2016, penambahan hak pengusahaan jalan tol, penambahan pengoperasian jalan tol, pencapaian KPI yang lebih tinggi dari target, skor KPKU dan skor penilaian GCG yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Pengusulan besarnya gaji/honorarium tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2017 adalah dengan memperhatikan: skala dan kompleksitas usaha, industri yang sejenis, tingkat inflasi, serta kemampuan keuangan Perseroan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN, serta Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-122/MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2017, penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari komponen dan besaran komponen sebagai berikut:

TABEL STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Komponen	Besaran
1. Honorarium	
a. Komisaris Utama	45% dari Gaji Direktur Utama
b. Anggota Dewan Komisaris	90% dari Honorarium Komisaris Utama
2. Tunjangan	
a. Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali honorarium
b. Transportasi	20% dari honorarium per bulan
c. Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung Perseroan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun
3. Fasilitas	
a. Kesehatan	dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (sebesar pemakaian/at cost)
b. Bantuan Hukum	Sebesar pemakaian/at cost
4. Tantiem	
a. Komisaris Utama	45% dari Tantiem Direktur Utama
b. Anggota Dewan Komisaris	90% dari Tantiem Komisaris Utama

Realisasi Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2017

Memperhatikan Keputusan RUPS Tahunan Jasa Marga tahun buku 2016 yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2017 sebagaimana tersebut pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesian Highway Corporatama) Tbk. disingkat PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tanggal 15 Maret 2017 No. 20 yang dibuat Notaris & PPAT Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. serta berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-476/MBU/D4/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2017 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2016, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyetujui penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2017 serta tantiem tahun buku 2016 dengan perincian sebagai tersebut dalam tabel di bawah ini.

TABEL REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017 (RUPIAH PENUH)

Nama	Honorarium (per tahun)	Honorarium (per bulan)	Transport (per tahun)	Transport (per bulan)	Tantiem*****	THR	Total
Refly Harun Komisaris Utama/Komisaris Independen	864.000.000	72.000.000	172.800.000	14.400.000	1.042.758.620	72.000.000	2.151.558.620
Sigit Widyawan Komisaris Independen	777.600.000	64.800.000	155.520.000	12.960.000	938.482.757	64.800.000	1.936.402.757
Boediarso Teguh Widodo Komisaris	777.600.000	64.800.000	155.520.000	12.960.000	938.482.757	64.800.000	1.936.402.757
Muhammad Sapta Murti*** Komisaris	777.600.000	64.800.000	155.520.000	12.960.000	710.272.470	64.800.000	1.708.192.470
Agus Suharyono*** Komisaris	777.600.000	64.800.000	155.520.000	12.960.000	710.272.470	64.800.000	1.708.192.470
Sugihardjo* Komisaris	614.946.774	64.800.000	122.989.355	12.960.000	-	64.800.000	802.736.129
Taufik Widjojono** Komisaris	160.954.839	64.800.000	32.190.968	12.960.000	965.426.136	-	1.158.571.942
Hambra**** Komisaris	-	-	-	-	274.511.024	-	274.511.024
Akhmad Syakhroza**** Komisaris	-	-	-	-	274.511.024	-	274.511.024

Keterangan:

- * Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 15 Maret 2017.
- ** Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 15 Maret 2017.
- *** Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 30 Maret 2016.
- **** Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 30 Maret 2016.
- ***** Tantiem yang dibayarkan merupakan Tantiem setelah PPh.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas dan bertanggung jawab secara bersama untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Komite pendukung Dewan Komisaris Jasa Marga meliputi Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

Proses, Dasar Penilaian dan Pihak yang Melaksanakan Penilaian Komite

Proses dan dasar penilaian kinerja Komite Audit dan Komite NRR tahun 2017 yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah melalui pemantauan dan evaluasi atas laporan kinerja Komite dalam mencapai target-target KPI masing-masing Komite. Laporan Hasil Kinerja Komite per triwulan telah diprogramkan dalam agenda-agenda rapat Dewan Komisaris Tahun 2017. Laporan Kinerja Komite dibahas 1 (satu) atau 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan. Dalam forum rapat Dewan Komisaris, Komite diminta untuk memaparkan Laporan Kinerja Komite Audit dan Komite NRR per triwulan dalam Tahun 2017. Dari paparan Komite atas laporan Kinerja Komite per triwulan tersebut, Dewan Komisaris memberikan penilaian atas kinerja Komite. Pada bulan Desember 2017, Komite memaparkan capaian atas KPI Tahun 2017 masing-masing Komite, sehingga Dewan Komisaris dapat memperoleh gambaran lengkap atas kinerja Komite dalam tahun 2017.

Selain itu Komite juga diagendakan dalam rapat-rapat Dewan Komisaris untuk melaporkan dan memaparkan hasil evaluasi dan kajiannya atas topik-topik kajian yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris dan kajian atas hal-hal yang akan diberikan sebagai arahan Dewan Komisaris kepada Direksi terkait dengan parameter dan indikator kinerja Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Surat Keputusan Sekretaris Menteri Negara Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tahun 2012. Parameter/indikator penilaian adalah: penguatan sistem pengendalian intern, manajemen risiko Perseroan, sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kebijakan pengembangan karir, kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan (SAK), kebijakan pengadaan dan kebijakan mutu dan pelayanan.

Pada akhir tahun 2017, Dewan Komisaris berdasarkan hasil penilaiannya atas kinerja Komite selama tahun 2017 akan memutuskan tentang penugasan anggota Komite, yaitu apakah penugasannya akan diperpanjang atau diakhiri sebagai- mana yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dan/ atau Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko. Dalam SK tersebut diatur tentang masa penugasan Komite, yaitu dengan masa penugasan I (pertama) selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 tahun, namun sewaktu-waktu Dewan Komisaris dapat memberhentikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penilaian Kinerja Komite

Dari hasil capaian KPI Kinerja Komite tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Komite Audit Tahun 2017 adalah baik sekali yaitu dengan capaian KPI sebesar 5,31 melebihi target yang ditetapkan sebesar 5,0 atau 6% di atas target.
2. Kinerja Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Tahun 2017 adalah baik yaitu dengan capaian KPI sebesar 81 dari target yang ditetapkan sebesar 100.

Penjelasan mengenai Komite di bawah Dewan Komisaris dan laporan masing-masing Komite dibahas tersendiri dan dapat dilihat di Sub Bab Komite-komite.

DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal untuk melakukan pengelolaan Perseroan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

KOMPOSISI DIREKSI

Direksi diangkat oleh RUPS, dan periode jabatan masing-masing anggota Direksi adalah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu

sebelum masa jabatannya berakhir, dan dapat diangkat kembali oleh RUPS hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya yang disepakati dalam Kontrak Manajemen, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar, terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara yang disebabkan kelalaian atau kesalahan oleh anggota Direksi yang bersangkutan, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan/atau mengundurkan diri. Proses pemberhentian dimaksud akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kecuali pemberhentian dimaksud disebabkan karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau mengundurkan diri.

Di tahun 2017 terdapat perubahan susunan Direksi Perseroan.

Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2017, anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

TABEL KOMPOSISI DIREKSI JASA MARGA SAMPAI DENGAN 15 MARET 2017

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Desi Arryani	Direktur Utama	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016
Muh Najib Fauzan	Direktur Operasi I	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016
Subakti Syukur	Direktur Operasi II	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016
Hasanudin	Direktur Pengembangan	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016
Anggiasari	Direktur Keuangan/Direktur Independen	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2016
Christantio Prihambodo	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015

Berdasarkan Risalah RUPS Tahunan No. 20 tanggal 15 Maret 2017, terdapat pergantian 2 (dua) anggota Direksi, yaitu Anggiasari, yang digantikan oleh anggota Direksi baru yaitu Donny Arsal sebagai Direktur, dan Christantio Prihambodo yang digantikan oleh Kushartanto Koeswiranto berdasarkan usulan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui surat No. SR-171/MBU/03/2017 tentang Usulan Perubahan Pengurus PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Berdasarkan keputusan RUPS, usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut disetujui dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal penutupan RUPS Tahunan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya dan paling lama 5 tahun dengan memperhatikan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2017, komposisi Direksi Jasa Marga adalah sebagai berikut:

TABEL KOMPOSISI DIREKSI JASA MARGA BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TANGGAL 15 MARET 2017

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Desi Arrayani	Direktur Utama	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016
Mohammad Sofyan	Direktur Operasi I	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017
Subakti Syukur	Direktur Operasi II	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016
Hasanudin	Direktur Pengembangan	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016
Donny Arsal	Direktur Keuangan	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017
Kushartanto Koeswiranto	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum/Direktur Independen	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017

Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui pemungutan suara dari peserta RUPS Tahunan yang hadir dengan Total Suara Setuju sebesar 91,63% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS Tahunan (termasuk suara abstain; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam RUPS).

Persyaratan dan tata cara pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi Perusahaan dan pengaturan terkait penyaringan atau nominasi calon Anggota Direksi dan penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) bagi anggota Direksi harus mengikuti Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Peraturan tersebut dapat diunduh di situs web Kementerian BUMN.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD MANUAL)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). Proses pembaharuan Board Manual telah selesai pada akhir tahun 2017 dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada awal tahun 2018. Buku Pedoman Kerja tersebut berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan

aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG. *Board Manual* dapat dilihat di situs web Perseroan www.jasamarga.com

Selain berpedoman pada Board Manual, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah menyatakan komitmen dan persetujuannya dengan menandatangani *Code of Corporate Governance* dan *Code of Conduct* pada akhir tahun 2017. Penyusunan *Board Manual*, *Code of Corporate Governance* dan *Code of Conduct*, merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan visi yang telah ditetapkan.

Pengaturan dari Board Manual terkait Direksi terdapat dalam Bab III tentang Direksi yang secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

- A. Tugas Direksi
- B. Hak dan Wewenang Direksi
- C. Kewajiban Direksi
- D. Persyaratan Direksi
- E. Keanggotaan Direksi
- F. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
- G. Etika Jabatan Direksi
- H. Rapat Direksi
- I. Penilaian Kinerja Direksi
- J. Corporate Secretary
- K. Internal Audit

PERSYARATAN DAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Penetapan komposisi dan jumlah anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan Visi dan Misi serta rencana strategis Perseroan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta menjunjung tinggi independensi dan semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Anggota Direksi menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak penutupan RUPS pada saat pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke-5 setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu.

Direksi harus memenuhi persyaratan formal, materiil dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; dan tertuang dalam Board Manual, yang mencakup antara lain:

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas, kepemimpinan, jujur dan perilaku yang baik serta kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan.
3. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan, pengalaman dengan rekam jejak yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga sebelum pencalonan.
4. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau perusahaan dinyatakan pailit.

- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, perusahaan dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - 2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Tidak menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
6. Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
7. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
8. Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk yang timbul karena perkawinan.

Direksi Jasa Marga terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu 1 (satu) Direktur Utama dan 5 (lima) Direktur, seluruhnya berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan.

Semua anggota Direksi Jasa Marga memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian memadai yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Pembagian tugas masing-masing anggota Direksi Perseroan ditetapkan untuk dapat menjalankan aktivitas manajemen sesuai dengan Visi dan Misi serta rencana Perseroan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengangkatan Direksi telah melalui proses *fit & proper test* sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan GCG. Mekanisme penjurangan atau nominasi calon anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015. Pemegang Saham Dwiwarna melaksanakan *fit and proper test* dengan menggunakan jasa pihak independen. Hasil dari pihak independen ini kemudian diajukan kepada RUPS untuk dilakukan proses selanjutnya.

Berdasarkan peraturan tersebut, status uji kemampuan dan kepatutan Direksi Jasa Marga yang menjabat sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL STATUS UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI JASA MARGA

Nama	Kewarganegaraan	Domisili	<i>Fit and Proper Test</i>
Desi Arryani	Indonesia	Jakarta	Lulus
Mohammad Sofyan*	Indonesia	Jakarta	Lulus
Subakti Syukur	Indonesia	Bekasi	Lulus
Hasanudin	Indonesia	Depok	Lulus
Donny Arsal*	Indonesia	Jakarta	Lulus
Kushartanto Koeswiranto*	Indonesia	Jakarta	Lulus
Muh Najib Fauzan**	Indonesia	Jakarta	Lulus
Anggiasari**	Indonesia	Jakarta	Lulus
Christantio Prihambodo**	Indonesia	Bogor	Lulus

Keterangan:

* Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 15 Maret 2016

** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 15 Maret 2016

Penentuan komposisi anggota Direksi merupakan hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Jasa Marga tidak memiliki ketentuan spesifik terkait keberagaman gender di dalam struktur keanggotaan Direksi Perseroan. Perseroan meyakini bahwa dengan adanya keberagaman dalam aspek keahlian, pengalaman dan latar belakang pendidikan akan

sangat berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Direksi sehingga Perseroan tidak mengenal perbedaan gender dan mengimplementasikan kebijakan yang bersifat non-diskriminatif. Anggota Direksi Jasa Marga memiliki keahlian di bidang teknik, keuangan, sumber daya manusia, hukum, ekonomi, dan tata kelola.

Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

TABEL KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Direksi	Tingkat Pendidikan Terakhir			Pengalaman Kerja (tahun)		Usia		Jenis Kelamin	
	S1	S2	S3	< 20	≥ 20	< 50	≥ 50	L	P
Desi Arryani		✓			✓		✓		✓
Mohammad Sofyan*		✓			✓	✓			✓
Subakti Syukur	✓				✓		✓	✓	
Hasanudin		✓			✓		✓	✓	
Donny Arsal*	✓				✓	✓		✓	
Kushartanto Koeswiranto*		✓			✓		✓	✓	
Muh Najib Fauzan**		✓			✓		✓	✓	
Anggiasari**		✓			✓	✓			✓
Christantio Prihambodo**	✓				✓		✓	✓	

Keterangan:

* Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 15 Maret 2017

** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 15 Maret 2017

L = Laki-laki

P = Perempuan

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Direksi menjalankan tugas pelaksanaan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai amanat dari Pemegang Saham yang ditetapkan dalam RUPS. Direksi bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil pemeriksaan auditor internal yang dilakukan oleh Unit Internal Audit maupun auditor eksternal.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan internal dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pembagian tugas Direksi Perseroan sebagai tindak lanjut Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 15 Maret 2017 mengacu pada Keputusan Direksi Jasa Marga No. 149/KPTS/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan Keputusan Rapat Direksi No. • tanggal •

Tugas Direksi

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan jabatan masing-masing anggota Direksi.

Tugas pokok Direksi adalah:

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direksi:

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
2. Memperhatikan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak dan golongan tertentu.
3. Beritikad baik, berintegritas, profesional, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab serta menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten.
4. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan.

Prinsip dasar dalam melaksanakan tugas Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
 2. Dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha.
 3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 4. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.
 - f. Menyelenggarakan RUPS Tahunan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
 - g. Menyampaikan Laporan Keuangan, laporan berkala lainnya kepada Pemegang Saham menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
 - h. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) kepada Pemegang Saham.
 - i. Wajib memberitahukan perubahan dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Menteri BUMN.
2. Tugas terkait Strategi dan Rencana Kerja
 - a. Merumuskan, menetapkan dan mengkaji visi, misi, strategi dan nilai-nilai Perusahaan untuk dikomunikasikan dan disetujui Dewan Komisaris; sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 - b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
 - c. Menyiapkan pada waktunya RJPP/rencana pengembangan Perseroan yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan pengesahaan.
 - d. Menyiapkan pada waktunya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) selambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku dimulai dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan pengesahannya kepada rapat Dewan Komisaris.
 - e. Mengupayakan pencapaian sasaran jangka panjang dan target jangka pendek sebagaimana yang tertuang dalam RJPP dan RKAP dengan menetapkan target kinerja yang diturunkan per direktorat dan jabatan struktural sesuai struktur organisasi Perseroan.

Kewajiban Direksi

Dalam mengurus Perseroan Direksi wajib melaksanakan:

1. Tugas terkait Pemegang Saham/RUPS
 - a. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan.
 - b. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta laporan lainnya.
 - c. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK selambat-lambatnya bulan ke-4 (empat) sejak tahun buku berakhir.
 - d. Menyediakan Laporan Tahunan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan.
 - e. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

3. Tugas terkait Manajemen Risiko
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko.
 - b. Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
 - c. Melakukan evaluasi dan arahan strategi manajemen risiko yang diterapkan di Perseroan.
 - d. Memastikan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kriteria jabatan yang telah ditetapkan Perseroan.
 - e. Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan.
 - f. Melaksanakan evaluasi atas ketentuan-ketentuan kepegawaian dan kinerja unit kerja, jabatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan secara obyektif dan transparan.
4. Tugas terkait Pengendalian Internal
 - a. Menetapkan dan menerapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi, kegiatan usaha dan aset Perseroan.
 - b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal.
5. Tugas terkait Sistem Akuntansi dan Pembukuan
 - a. Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
 - b. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
6. Tugas terkait Sumber Daya Manusia
 - a. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya.
 - b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan (perencanaan, rekrutmen, promosi, mutasi, rotasi, evaluasi kepegawaian) termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang undangan.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang undangan.
7. Tugas terkait Teknologi Informasi
 - a. Menetapkan dan menerapkan master plan tata kelola Teknologi Informasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan detail/penjabaran lebih lanjut dari master plan sesuai kebutuhan Perseroan.
 - b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan master plan secara berkala untuk mengetahui pencapaiannya termasuk jika diperlukan melakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi yang sedang berkembang.
8. Tugas terkait Pengadaan Barang dan Jasa Serta Peningkatan Mutu dan Pelayanan
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengadaan barang dan jasa serta peningkatan mutu dan pelayanan.
 - b. Memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta mutu produk dan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
9. Tugas terkait Penerapan Good Corporate Governance
 - a. Memastikan dan mengembangkan penerapan Pedoman Good Corporate Governance beserta kebijakan pendukung lainnya.
 - b. Menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk bertanggung jawab terhadap implementasi GCG di Perseroan.
10. Tugas Terkait Penyampaian Informasi, Dokumen Perseroan dan Pelaporan
 - a. Memastikan informasi mengenai Perseroan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

- b. Melaporkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada OJK dan mengungkapkan Laporan Tahunan dan Keuangan pihak lain, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
 - c. Membuat, menyimpan dan memelihara di tempat kedudukan Perseroan, antara lain Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perusahaan lainnya.
 - d. Melaporkan kepada Perseroan (Corporate Secretary) mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya untuk dicatat dalam Daftar Khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
11. Tugas Terkait Anak Perusahaan
- Menetapkan Prosedur Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebagai berikut:
- a. Direksi membentuk Tim Evaluasi calon Anggota Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan yang diketuai oleh Direktur SDM dan Umum.
 - b. Tim Evaluasi menunjuk tenaga ahli atau Lembaga Profesional untuk melakukan penilaian (jika diperlukan), melakukan penjangkaran calon yang menghasilkan daftar bakal calon (long list) yang terdiri dari 5 (lima) bakal calon untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi dan 3 (tiga) kali lipat jumlah jabatan Komisaris yang lowong untuk jabatan Komisaris dan kemudian diserahkan kepada Direksi Perseroan untuk memperoleh persetujuannya.
 - c. Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap calon-calon yang masuk dalam daftar bakal calon yang telah disetujui Direksi Perseroan.
 - d. Hasil penilaian Tim Evaluasi ditetapkan dalam daftar calon (short list) yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi dengan peringkat nilai terbaik dan terdiri dari 2 (dua) kali lipat jabatan Dewan Komisaris yang lowong dengan peringkat nilai terbaik.
 - e. Dalam hal penilaian dilakukan oleh ahli atau lembaga profesional yang ditunjuk, Tim Evaluasi mengevaluasi berdasarkan hasil penilaian oleh ahli atau lembaga profesional.
 - f. Tim Evaluasi menyampaikan daftar calon (short list) tersebut kepada Direksi Perseroan untuk penetapan calon Anggota Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan terpilih.
 - g. Direksi melakukan evaluasi akhir atas hasil penilaian untuk menetapkan masing-masing 1 (satu) Calon Anggota Direksi dan Calon Dewan Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
 - h. Direksi menyampaikan calon Anggota Direksi dan calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan terpilih kepada Dewan Komisaris Perseroan disertai penjelasan mengenai proses penjangkaran, proses penilaian dan proses penetapan calon Anggota Direksi dan calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan terpilih, selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan.
12. Tugas terkait Hubungan Masyarakat dan Stakeholders Lainnya
- a. Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya.
 - b. Memastikan terjaminnya hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Karyawan, Pengguna Jasa, Pemasok dan stakeholders lainnya.
13. Tugas Lainnya
- Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang undangan.

Tanggung Jawab Direksi

Tanggung Jawab Direktur Utama

1. Bertindak sebagai pemimpin Perseroan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas Perseroan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Menetapkan visi, misi dan tata nilai Perseroan.
3. Menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang terdiri dari rencana strategis serta sasaran kerja Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang terdiri dari misi, sasaran usaha, strategi usaha dan kebijakan Perseroan atas setiap program kerja dan anggaran.
5. Menetapkan Laporan Manajemen Perseroan secara berkala mengenai pelaksanaan RKAP serta Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Memastikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris serta Rapat Direksi.
7. Memastikan penyelenggaraan aktivitas Perseroan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan peraturan Perseroan yang berlaku.

Tanggung Jawab Direktur Pengembangan

1. Memimpin dan memastikan kegiatan pengembangan bisnis jalan tol terkait rencana bisnis dalam penyusunan dan pengajuan proposal tender investasi ruas-ruas jalan tol baru serta persiapan dan pelaksanaan akuisisi jalan tol.
2. Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan pengembangan usaha lain dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya Perseroan.
3. Memimpin dan memastikan kegiatan pengendalian eksekusi investasi jalan tol dan usaha lain terlaksana sesuai target.
4. Memimpin dan memastikan kegiatan rekayasa teknik jalan dan lalu lintas dapat terlaksana guna mendukung ketersediaan rekomendasi strategis Perseroan.
5. Memastikan terlaksananya kegiatan pengelolaan manajemen risiko terkait dengan kebijakan di bidang pengembangan usaha jalan tol, pengembangan usaha lain dan rekayasa teknik jalan dan lalu lintas.
6. Berkoordinasi dengan Direktorat lain dalam rangka memastikan terlaksananya kegiatan dan kinerja bisnis Anak Perusahaan Jalan Tol (APJT) dan Anak Perusahaan Usaha Lain (APUL).

Tanggung Jawab Direktur Operasi I

1. Memastikan kegiatan pengoperasian jalan tol Anak Perusahaan Jalan Tol tahap operasi beserta seluruh kelengkapannya dapat terlaksana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum sehingga dapat memberikan pelayanan terhadap pengguna jalan tol.
2. Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Perusahaan.
3. Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan manajemen risiko terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi Perusahaan serta terkait dengan pengoperasian jalan tol, pemeliharaan dan peningkatan jalan tol Anak Perusahaan Jalan Tol dan Anak Perusahaan Usaha Lain tahap operasi.
4. Berkoordinasi dengan Direktorat lain untuk memastikan terlaksananya operasional jalan tol, meliputi transaksi pengumpulan tol, layanan lalu lintas dan pemeliharaan pada Anak Perusahaan Jalan Tol sesuai target yang telah ditetapkan.

Tanggung Jawab Direktur Operasi II

1. Memastikan kegiatan pengoperasian jalan tol meliputi manajemen pengumpulan tol dan manajemen lalu lintas dapat terlaksana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum sehingga dapat memberikan pelayanan terhadap pengguna jalan tol.
2. Memastikan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan tol beserta seluruh kelengkapannya dapat terlaksana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum sehingga dapat memberikan pelayanan terhadap pengguna jalan tol.
3. Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan manajemen risiko terkait dengan pengoperasian jalan tol serta pemeliharaan dan peningkatan jalan tol.
4. Memastikan pengamanan pengumpulan tol yang dilaksanakan oleh Cabang dan Anak Perusahaan mulai dari transaksi pengumpulan tol di gardu sampai dengan uang masuk dalam *cash box* dan dibawa ke Kantor Gerbang.
5. Memimpin dan memastikan penyusunan sistem pengamanan jalan tol dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengoperasian jalan tol.
6. Berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan dan Direktur Operasi I untuk memastikan terlaksananya operasional jalan tol, meliputi transaksi pengumpulan tol, layanan lalu lintas dan pemeliharaan pada Anak Perusahaan Jalan Tol sesuai target yang telah ditetapkan.

Tanggung Jawab Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

1. Mengarahkan dan memimpin pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan *human capital* Perusahaan.
2. Mengendalikan implementasi sistem dan prosedur pengelolaan *human capital* Perusahaan.
3. Mengarahkan dan memimpin pengembangan sistem dan prosedur kegiatan pengelolaan logistik, pengamanan aset milik Negara dan aset Perusahaan dan aktivitas umum lainnya berdasarkan prinsip, peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan terlaksananya kegiatan pengelolaan manajemen risiko terkait kebijakan di bidang pengelolaan *human capital* dan bidang umum dan program kemitraan dan bina lingkungan.
5. Memastikan pengembangan dan implementasi budaya Perseroan.
6. Berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan Usaha untuk memastikan pengembangan sistem human capital dan umum di Anak Perusahaan Jalan Tol dan Anak Perusahaan Usaha Lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan inisiatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Tanggung Jawab Direktur Keuangan

1. Memimpin dan memastikan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan sesuai dengan rencana strategis Perusahaan.
2. Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan keuangan Perusahaan terlaksana sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Memimpin dan memastikan kegiatan penyusunan dan pengendalian portofolio investasi keuangan Perusahaan.
4. Memastikan terlaksananya kegiatan pengelolaan manajemen risiko terkait kebijakan di bidang keuangan, manajemen investasi dan akuntansi, manajemen risiko dan mutu serta bidang hukum dan kepatuhan.
5. Memimpin pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk memastikan integrasi dan keselarasan terhadap arah dan sasaran Perusahaan dan Anak Perusahaan dengan Rencana Strategis Perusahaan.
6. Memimpin dan memastikan pengamanan pendapatan tol yang dilaksanakan oleh Cabang dan Anak Perusahaan mulai dari uang di Kantor Gerbang sampai masuk ke rekening Perusahaan.

7. Memimpin dan memastikan aktivitas Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku.
8. Memimpin dan memastikan terlaksananya kegiatan pengelolaan pelayanan dan penyelesaian permasalahan di bidang hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Memimpin dan memastikan terlaksananya pengembangan sistem manajemen risiko, mutu, K3 dan lingkungan serta kinerja ekselen di lingkungan Perusahaan.
10. Berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan dan Direktur Operasi I untuk memastikan pengendalian pengelolaan keuangan, manajemen risiko dan mutu, serta bidang hukum dan kepatuhan Anak Perusahaan Jalan Tol dan Anak Perusahaan Usaha Lain.

Wewenang Direksi

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Untuk melakukan tindakan tertentu, Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
3. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal yang membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris adalah:
 - a. Menerima dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang.
 - b. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
 - c. Melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (*fixed asset*) Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
 - d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perusahaan atau badan usaha lain atau menyelenggarakan perusahaan baru.

- e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan usaha lain.
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
 - g. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
 - h. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang jumlahnya kurang dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
 - i. Membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan lainnya, kecuali terhadap surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - j. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, berupa kerja sama operasi dan investasi yang bersifat strategis dan mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan serta berlaku untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun (jangka panjang), kecuali kerja sama penggunaan jasa teknis dan/atau operasional dari pihak lain.
 - k. Mengadakan kerja sama bangun guna serah (BOT), bangun guna milik (BOO) atau bangun sewa serah (BRT) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
 - l. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi.
 - m. Mencalonkan anggota Direksi dan Komisaris pada Anak Perusahaan dari Perseroan.
4. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan di bidang Pasar Modal:
- a. Melakukan transaksi material sebagaimana ditentukan dalam perundang undangan di bidang Pasar Modal; atau
 - b. Melakukan transaksi lain, guna memenuhi perundang undangan di bidang Pasar Modal.
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.

DIREKTUR INDEPENDEN DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Direksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang secara material dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Direktur Independen merupakan anggota Direksi yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Keberadaan Direktur Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas termasuk pemegang saham publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Kriteria Direktur Independen

Sebagai perusahaan publik dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, Jasa Marga telah memenuhi ketentuan yang diatur regulator pasar modal terkait kriteria Direktur Independen. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan paling kurang

selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.

2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Calon Perusahaan Tercatat.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain.
4. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Jumlah Direktur Independen Jasa Marga telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, dimana setiap perusahaan publik harus memiliki Direktur Independen berjumlah paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Perusahaan Lain yang Terafiliasi dengan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, antar anggota Direksi serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Hubungan keluarga anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Pengendali dapat dilihat di Bab Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris.

Kepemilikan saham anggota Direksi dan keluarganya telah dilaporkan dan disimpan dalam Daftar Khusus kepemilikan saham Direksi. Daftar Khusus tersebut disimpan di Perseroan, dalam hal ini unit Corporate Secretary.

Kepengurusan Direksi pada perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perseroan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL KEPENGURUSAN DIREKSI JASA MARGA DI PERUSAHAAN LAIN YANG TERAFILIASI DENGAN JASA MARGA

Nama	Sebagai Dewan Komisaris	Sebagai Direksi	Sebagai Pemegang Saham Utama/ Pengendali
Desi Arrayani	x	x	x
Mohammad Sofyan*	✓ ^	x	x
Subakti Syukur	✓ ^	x	x
Hasanudin	✓ ^	x	x
Donny Aرسال*	x	x	x
Kushartanto Koeswiranto*	x	x	x
Christantio Prihambodo**	✓ ^	x	x
Anggiasari**	x	x	x
Muh Najib Fauzan**	✓ ^	x	x

Keterangan:

- ✓ ada
- x tidak ada

* Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 15 Maret 2017

** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 15 Maret 2017

Catatan:

- ^ Kepengurusan Direksi Perseroan sebagai anggota Dewan Komisaris adalah pada Anak Perusahaan Perseroan, terkait porsi kepemilikan Perseroan atas Anak Perusahaan Perseroan tersebut sebagai Pemegang Saham mayoritas.

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan

Berdasarkan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD dan badan usaha swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selama tahun 2017, Direksi Jasa Marga tidak ada yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk menjaga independensi dan profesionalisme, setiap anggota Direksi harus menganut etika sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman GCG serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
 2. Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Perseroan yang seimbang dengan kepentingan *Stakeholders*.
 3. Menjalankan tugas dan kewajibannya dengan menempatkan kepentingan Direksi secara keseluruhan, di atas kepentingan pribadi.
 4. Selama menjabat, Anggota Direksi tidak diperkenankan untuk:
 - a. Mengambil peluang bisnis Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS, untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain.
 - b. Memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - c. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku Anggota Direksi untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
 - d. Berkompetisi dengan Perseroan yaitu menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (*inside information*) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perseroan.
 - e. Merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung dengan Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - f. Memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung imbalan dan/atau hadiah, dan/atau hibah dan/atau sumbangan dan/atau *entertainment* dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perseroan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhinya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
 - g. Memberikan dan menerima hadiah, bingkisan, parcel, karangan bunga dan bentuk pemberian lainnya pada hari raya keagamaan maupun hari-hari besar/tertentu lainnya kepada pejabat/ pegawai di lingkungan instansi Pemerintah dan/ atau pihak yang memiliki hubungan bisnis.
5. Menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perseroan yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 6. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
 7. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.
 8. Mematuhi peraturan Perundang undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (*insider trading*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Selama tahun 2017 anggota Direksi telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut:

TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DIKUTI OLEH ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2017

No.	Anggota Direksi	Materi
1	Desi Arryani	BUMN Executive Leadership Program-2 (ELP-2)
2	Mohammad Sofyan*	BUMN Executive Leadership Program-1 (ELP-1)
3	Subakti Syukur	BUMN Executive Leadership Program-3 (ELP-3)
4	Hasanudin	BUMN Executive Leadership Program-1 (ELP-1)
5	Donny Arsal*	BUMN Executive Leadership Program-1 (ELP-1)
6	Kushartanto Koeswiranto*	BUMN Executive Leadership Program-3 (ELP-3)
7	Christantio Prihambodo**	-
8	Anggiasari**	-
9	Muh Najib Fauzan**	-

Keterangan:

* Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 15 Maret 2017

** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 15 Maret 2017

RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2017, berdasarkan jadwal yang dibuat di bulan Desember 2016, Direksi secara berkala mengadakan rapat untuk membahas berbagai aspek operasional, investasi, pengelolaan finansial dan SDM Jasa Marga. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak.

Selama tahun 2017, Direksi menjadwalkan rapat Direksi sebanyak 47 kali dengan realisasi sebanyak 46 kali.

TABEL RENCANA JADWAL RAPAT DIREKSI TAHUN 2017

Bulan	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Bulan	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)
			08-05-2017
Januari	04-01-2017	Mei	15-05-2017
	11-01-2017		22-05-2017
	16-01-2017		29-05-2017
	23-01-2017		05-06-2017
	30-01-2017		12-06-2017
Februari	07-02-2017	Juni	19-06-2017
	13-02-2017		03-07-2017
	22-02-2017		10-07-2017
	27-02-2017		17-07-2017
	06-03-2017		24-07-2017
Maret	13-03-2017	Juli	31-07-2017
	15-03-2017		
	20-03-2017		
	03-04-2017		
April	13-04-2017		
	17-04-2017		

Bulan	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Bulan	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)
Agustus	07-08-2017	Oktober	02-10-2017
	14-08-2017		09-10-2017
	21-08-2017		16-10-2017
	28-08-2017		23-10-2017
September	04-09-2017	November	30-10-2017
	11-09-2017		06-11-2017
	18-09-2017		13-11-2017
	25-09-2017		20-11-2017
			27-11-2017
		Desember	04-12-2017
			11-12-2017
			18-12-2017

TABEL RENCANA AGENDA RAPAT DIREKSI TAHUN 2017

Rapat	Materi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Rapat Mingguan	Hal-hal aktual yang berkaitan dengan pekerjaan rutin Unit Kerja Kantor Pusat, Cabang, Proyek, Anak Perusahaan.	Setiap 1 minggu sekali yang diadakan setiap hari Selasa pukul 07:00 WIB s.d. selesai (sesuai Keputusan Direksi No. 197/KPTS/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk).	1. Penyampaian materi Rapat disampaikan oleh unit kerja terkait kepada Corporate Secretary paling lambat hari Jum'at. 2. Kompilasi materi Rapat tersebut disampaikan oleh Corporate Secretary kepada Direksi paling lambat hari Senin.
Rapat Triwulanan	1. Realisasi RKAP. 2. Evaluasi Kerja. 3. Laporan Manajemen (Triwulanan).	Setiap 3 bulan sekali yang diadakan setiap hari Selasa pada Rapat Mingguan pertama bulan yang bersangkutan, pukul 07:00 WIB s.d. selesai.	Penyampaian materi Rapat disiapkan oleh Corporate Secretary paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat.
Rapat Semesteran	1. Realisasi RKAP pada Semesteran yang bersangkutan. 2. Evaluasi Kerja. 3. Evaluasi KPI. 4. Laporan Manajemen (Semesteran).	Setiap 6 bulan sekali yang diadakan setiap hari Selasa pada Rapat Mingguan pertama bulan yang bersangkutan, pukul 07:00 WIB s.d. selesai.	Penyampaian materi Rapat disiapkan oleh Corporate Secretary paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat
Rapat Tahunan	1. Laporan Realisasi RKAP pada Tahun tersebut. 2. Laporan Evaluasi Tahunan KPI. 3. Laporan Manajemen (Tahunan). 4. Evaluasi Kerja.	Setiap 1 tahun sekali yang diadakan setiap hari Selasa pada Rapat Mingguan pertama bulan Desember, pukul 07:00 WIB s.d. selesai.	Penyampaian materi Rapat disiapkan oleh Corporate Secretary paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat

TABEL REALISASI RAPAT, AGENDA RAPAT DAN REKAPITULASI KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT DIREKSI TAHUN 2017

No.	Tanggal Rapat (tgl-blh-thn)	Agenda	Desi Arryani	Hasanudin	Subakti Syukur	Mohammad Sofyan*	Donny Arsal*	Kushartanto Koeswiranto*	Anggiasari**	Muh Najib Fauzan**	Christantio Prihambodo**
1	04-01-2017	<ul style="list-style-type: none"> Project Digest Ruas-ruas Jalan Tol Baru Inisiatif. Dana Talangan Tanah Tahun 2017 ke Anak Perusahaan Jalan Tol (APJT). Review PPJT JORR 2. Jembatan Cisomang. 	✓	✓	✓				×	✓	✓
2	11-01-2017	<ul style="list-style-type: none"> Cashless Transaction. Kemajuan Pekerjaan Tempat Istirahat & Pelayanan (TIP) 88. Perkuatan Daya Saing PT JLO. RKAP 2017. 	✓	×	✓				✓	✓	✓
3	16-01-2017	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Program Pra FS Proyek Inisiatif. Integrasi Jalan Tol Jagorawi dan Jakarta-Tangerang. Pensiun Dini Sukarela. Tingkat Pendanaan Pensiun Jasa Marga dan Kewajiban PSAK 24. 	✓	✓	✓				✓	✓	✓
4	23-01-2017	<ul style="list-style-type: none"> Proyek Inisiatif. Persiapan HUT Jasa Marga ke-39. Realisasi Pemenuhan Formasi dan Pelatihan SDM. 	✓	✓	✓				✓	✓	✓
5	30-01-2017	<ul style="list-style-type: none"> RKAP Anak Perusahaan (AP) di Direktorat Operasi I. Laporan Kemajuan Integrasi Operasi Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak. Kebijakan Rekrutmen SDM di AP. 	✓	✓	✓				✓	✓	×
6	07-02-2017	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengoperasian Ruas Jalan Tol Baru. Rencana Transaksi Non Tunai. Rencana Program Elektronifikasi. Ratifikasi Permen BUMN tentang PKBL. Laporan Program Sekuritisasi Aset. RUPS Tahunan. Revisi RKAP 2017. BUMN Hadir untuk Negeri. 	✓	✓	✓				✓	✓	✓
7	13-02-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Prakarsa Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan. Anggaran Pra FS Proyek Inisiatif Tahun 2017. Implementasi SAP. Implementasi JM Care Implementasi Himbara. RUPS Tahunan. PKB dengan SKJM. 	✓	✓	✓				✓	✓	✓
8	22-02-2017	<ul style="list-style-type: none"> Pengusahaan Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Proyek Inisiatif. Jadwal Operasi Jalan Tol Baru. Integrasi Jakarta-Tangerang-Merak Revisi RKAP Tahun 2017. 	✓	✓	✓				✓	✓	✓

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda	Desi Arryani	Hasanudin	Subakti Syukur	Mohammad Sofyan*	Donny Arsal*	Kushartanto Koeswiranto*	Anggiasari**	Muh Najib Fauzan**	Christantio Prihambodo**
9	27-02-2017	<ul style="list-style-type: none"> Kemajuan Konstruksi Proyek-proyek Jalan Tol. Revisi RKAP Tahun 2017. Setoran Modal di AP. Perubahan AD. Restrukturisasi Jakarta-Tangerang. 	✓	✓	✓				✓	✓	✓
10	06-03-2017	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Koordinasi tentang Program Transaksi Non Tunai. Kemajuan Integrasi Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Cawang-Tomang-Cengkareng. Laporan Hasil Audit KAP tahun 2016. 	✓	✗	✓				✓	✓	✓
11	13-03-2017	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Koridor Jalan Tol. Proyek Prakarsa Jalan Tol. Progres Integrasi Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak. Laporan Resrukturisasi Cabang. 	✓	✓	✓				✓	✗	✓
12	20-03-2017	<ul style="list-style-type: none"> Penyerapan Dana Talangan. Bonus dan Kenaikan Gaji Karyawan. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13	03-04-2017	<ul style="list-style-type: none"> Penggantian Pengawas di APJT. Berakhirnya Masa Jabatan Direksi Komisaris APJT. Perubahan Nilai Investasi dan Review Bisnis Plan. RUPS Tahunan AP/Perusahaan Asosiasi. Audit AP Tahun 2017. Progres Pembentukan Perusahaan Electronic Toll Collection (ETC). Tempat Istirahat (TI) dan TIP. Penyeragaman Lingkup Pekerjaan Pengoperasian APJT oleh PT JLO. Program Transformasi PT JLJ Perubahan Sistem Transaksi Jalan Tol Jagorawi. Restrukturisasi Cabang Jakarta-Tangerang dan Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14	13-04-2017	<ul style="list-style-type: none"> Diskon e-Toll Card. Pembentukan JV Trans Jawa. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15	17-04-2017	<ul style="list-style-type: none"> Insentif Kinerja Tahun 2016 Anak Perusahaan. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris AP Tahun 2017. Mitigasi Risiko. Peningkatan Produktivitas Pelayanan Operasi dan Daya Saing PT JLO. Progres Pendirian JV ETC. Laporan Pengoperasian Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Rekrutmen dan Suksesi. Corporate University. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda	Desi Arryani	Hasanudin	Subakti Syukur	Mohammad Sofyan*	Donny Arsal*	Kushartanto Koeswiranto*	Anggiasari**	Muh Najib Fauzan**	Christantio Prihambodo**
16	27-04-2017	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Tender Jalan Tol. Pencapaian Pendapatan Anak Perusahaan. Pergantian Pengurus Anak Perusahaan. Organisasi Trans Jawa (Sub Holding). Sekuritisasi. Insetif Kinerja/Tantiem dan Kenaikan Gaji/Honorarium Direksi/Komisaris/Pengawas APJT, Anak Perusahaan Usaha Lain (APUL) dan Dana Pensiun. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17	08-05-2017	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengembangan Ruas-ruas Potensial. Tender Jalan Tol. Sub Holding Trans Jawa. Sistem Integrasi Transaksi Jalan Tol Trans Jawa Konsultan Hukum Korporasi dan Non Litigasi. Talent Suksesi. 	✓	✓	✓	✓	✗	✓			
18	15-05-2017	<ul style="list-style-type: none"> Perijinan Investasi Ruas-ruas Jalan Tol Baru Sesuai AD/ART yang Baru. Pembentukan Sub Holding Trans Jawa. Persiapan PT JLO Mengoperasikan APJT dan Cabang. Pembentukan Himpunan Pengembang Jalan Tol Indonesia (HPJI). Insetif Kinerja/Tantiem Direksi/Komisaris/Pengawas APJT, APUL dan Dana Pensiun Remunerasi Direksi dan Komisaris Anaka Perusahaan Tahun 2017 Rencana Penerbitan Obligasi 2017-2019. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19	22-05-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tender Jalan Tol dan Rencana Investasi. Rencana Pengoperasian Jalan Tol Baru. Pengoperasian Parsial Cabang oleh PT JLO. Pembentukan Sub Holding Trans Jawa. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20	31-05-2017	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengoperasian Parsial Cabang dan JORR oleh PT JLO. Akuisisi Peralatan Tol. Re-grading dan Talent Mapping. Kajian Pendapatan dan Biaya Pengoperasian. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21	05-06-2017	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Investasi Jalan Tol Baru. Penambahan Nilai Dana Talangan Tanah. Kajian Pengembalian Usaha Lain. Skema Kerjasama TIP. Setoran Modal JV Transjava Program Pengembangan Karir/Talent Pool. Hubungan Industrial. Jasa Marga Learning Institute. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

No.	Tanggal Rapat (tgl-blh-thn)	Agenda	Desi Arryani	Hasanudin	Subakti Syukur	Mohammad Sofyan*	Donny Arsal*	Kushartanto Koeswiranto*	Anggiasari**	Muh Najib Fauzan**	Christantio Prihambodo**
22	20-06-2017	<ul style="list-style-type: none"> Prioritas Proyek Pengembangan. Rencana Investasi Jalan Tol. Alternatif Rencana Tahapan Gardu Tol Elektronik (GTO). Pemenuhan SPM Semester II 2017. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23	05-07-2017	<ul style="list-style-type: none"> Strategi Peningkatan Daya Saing dan Kinerja Pengoperasian Jalan Tol. Pelayanan Arus Mudik Lebaran Tahun 2017. Integrasi Jalan Tol. Program Pemeliharaan. Pendampingan Strategic Transformation Office (STO) dan Transformasi Budaya. 	✓	x	✓	✓	✓	✓			
24	10-07-2017	<ul style="list-style-type: none"> Business Plan Jalan Tol. Peningkatan Kinerja PT JLO. Optimalisasi dan Realokasi RTMS. Kajian Pendapatan dan Biaya Operasional. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25	18-07-2017	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penggunaan Dana Talangan Tanah. Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan. Proyek Pengembangan Usaha Lain. Peningkatan Kinerja PT JLP. Shareholder Aspiration RKAP 2018. Batasan Ijin Aksi Korporasi sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Sistem Manajemen Risiko Korporat. Laporan Keuangan Semester I 2017. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26	24-07-2017	<ul style="list-style-type: none"> Investasi Ruas Jalan Tol Potensial. Rencana Pengoperasian Jalan Tol Baru. Rencana Trans Jawa. Strategi Pengembangan Usaha Lain. Teknologi ETC Berbasis RFID. Evaluasi Pemberian Diskon 20% Pembayaran Non Tunai. Strategi Penerapan 100% Transaksi Non Tunai. STO untuk Jasa Marga Transformasi. Kongres SKJM. 	✓	✓	✓	✓	x	✓			
27	31-07-2017	<ul style="list-style-type: none"> Pengoperasian Jalan Tol Baru. Alternatif Pembiayaan Jalan Tol Rencana Kerjasama dengan Investor. Investasi Usaha Lain. Program Elektronifikasi dan JV ETC. Pengendalian dan Pemenuhan SPM. Integrasi Ruas-ruas Jalan Tol. 	✓	✓	✓	✓	x	✓			

No.	Tanggal Rapat (tgl-blh-thn)	Agenda	Desi Arryani	Hasanudin	Subakti Syukur	Mohammad Sofyan*	Donny Arsal*	Kushartanto Koeswiranto*	Anggiasari**	Muh Najib Fauzan**	Christantio Prihambodo**
28	07-08-2017	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Nama dan Logo PT JLP dan PT JLO. Strategi Penerapan Kebijakan 100% Pembayaran Transaksi Non Tunai. Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Batasan Kewenangan di Anggaran Dasar. Strategic Transformation Office (STO). Remunerasi Anak Perusahaan. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29	14-08-2017	<ul style="list-style-type: none"> Strategi Penerapan Transaksi Non Tunai. Hasil Audit BPK. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30	28-08-2017	<ul style="list-style-type: none"> Progres Investasi. Pemenuhan Kebutuhan Pendanaan atas Dana Talangan Tanah (DTT) Tahun 2016. Sekuritisasi Hak atas Pendapatan Tol Jagorawi. Rencana Penerbitan Global IDR Bonds. Pembentukan Tim Corporate Finance. Strategic Transformation Office (STO). 	✓	✓	*	✓	✓	✓			
31	04-09-2017	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penggunaan Dana PMN. Rencana Tambahan Pinjaman dan Laporan Penggunaan Dana Talangan Tanah. Progres Akuisisi Ruas Jalan Tol. Kebijakan Investasi TIP. Laporan Kenaikan Tarif. Progres Elektronifikasi. Perubahan Sistem Transaksi. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
32	11-09-2017	<ul style="list-style-type: none"> Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Diskon Tarif. Perubahan Struktur Anak Perusahaan. Elektronifikasi. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
33	20-09-2017	<ul style="list-style-type: none"> Status Amandemen PPJT. Persiapan Spin-off 4 Cabang. Sosialisasi Elektronifikasi. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
34	24-09-2017	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Perubahan Sistem Pentarifan dan Mekanisme Transaksi Jalan Tol. Penyusunan dan Draft RJPP 2018-2022. Prognosa RKAP 2017. Penyusunan RKAP 2018. Program Startrek. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
35	02-10-2017	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Progres Trans Jawa. Laporan Progres Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai. Perubahan Sistem Transaksi. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda	Desi Arryani	Hasanudin	Subakti Syukur	Mohammad Sofyan*	Donny Arsal*	Kushartanto Koeswiranto*	Anggiasari**	Muh Najib Fauzan**	Christantio Prihambodo**
36	09-10-2017	<ul style="list-style-type: none"> Peresmian Tol Medan-Kualanamu-Sei Rampah. Tender Investasi Jalan Tol. Laporan Kondisi Keuangan. Laporan Kebutuhan dan Penggunaan Dana. 	✓	✓	*	✓	✓	✓			
37	16-10-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan. Progres Jalan Tol Surabaya-Mojokerto. Rencana Usaha Tol. Strategi Menghadapi Permen Transaksi Non Tunai. JM Access. Project Bond. Integrated Talent Management System. Program A-life. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
38	23-10-2017	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengembangan Kawasan Jalan Tol. Alokasi Capex. Rencana Divestasi Saham dan Restrukturisasi Organisasi Anak Perusahaan. Sistem Transaksi. Analisa Lalu Lintas. Progres Project Bond. Program A-Life. Sinergi BUMN. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
39	30-10-2017	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Hasil Negosiasi Konsultan Bisnis Anak Perusahaan Usaha Lain. Perkembangan ERP DKI. Progres Elektronifikasi. RKAP 2018. Progres Project Bond. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
40	06-11-2017	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Akuisisi Ruas Jalan Tol 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
41	13-11-2017	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Tender Perkembangan Proyek Prakarsa Rencana Shareholder Loan Laporan Progres Settlement Monitoring Tools Akuisisi Ruas Baru Kontrak Manajemen KPI Korporat Tahun 2018 Update Program A-life Kebutuhan Anggaran Tantiem 2017 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
42	20-11-2017	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan Global IDR Bonds dan Transaksi Treasury. Spin Off Transjawa. Laporan Progres Alife. Rejuvenation for Organization Capability. Pelaksanaan Percepatan Pengadaan Program Strategis. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
43	05-12-2017	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). PPJT Jalan Tol Baru. Penerbitan Global IDR Bonds dan Rencana Penggunaan Dana. Kereta Cepat. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda	Desi Arryani	Hasanudin	Subakti Syukur	Mohammad Sofyan*	Donny Arsal*	Kushartanto Koeswiranto*	Anggiasari**	Muh Najib Fauzan**	Christantio Prihambodo**
44	11-12-2017	• Sistem Jaringan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto. • Progres Penerapan 100% transaksi Non Tunai.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
45	18-12-2017	• Kartu Perdana JM Access Surabaya. • Uji Coba Teknologi RFID. • Kontrak Manajemen. • Progres Komodo Bond. • Pengoperasian Jalan Tol Baru.	✓	✗	✓	✓	✓	✓			
46	27-12-2017	• Dana talangan Tanah. • Pembayaran Kontrak Jembatan Tol Suramadu. • Progres Penerapan 100% Transaksi Non Tunai. • Prognosa Laporan Keuangan 2017.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Jumlah Rapat dalam Setahun								46			
Jumlah Rapat yang Wajib Dihadiri			46	47	46	35	35	35	11	11	11
Jumlah Rapat yang Dihadiri			46	42	44	35	32	35	10	10	10
Presentase Kehadiran (%)			100	91	96	100	91	100	91	91	91
Rata-rata (%)								95			

Keterangan:

- ✓ Hadir
- ✗ Tidak Hadir

- * Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 15 Maret 2017
- ** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 15 Maret 2017

Catatan:

- Ketidakhadiran anggota Direksi dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan.
- Perbedaan Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri adalah karena perbedaan periode jabatan sebagai anggota Direksi.

Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi Jasa Marga telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan anggota Direksi yang hadir serta didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat telah dicantumkan dalam Risalah Rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

Keputusan-keputusan Direksi Tahun 2017

Selama tahun 2017 anggota Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, operasional bisnis, maupun aspek strategis.

Keputusan Direksi yang dihasilkan sepanjang tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Perusahaan.
- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pensiun dan Keluarga Pensiunan.

- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan dan Keluarga Karyawan.
- Prosedur Penanganan Muatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Tumpah di Jalan Tol oleh Petugas Pelayanan Lalu Lintas.
- Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- Pendelegasian sebagian Wewenang Direksi kepada Kepala Cabang dalam rangka Pengelolaan Jalan Tol.
- Pemberian Penghargaan kepada Karyawan di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Periode Maret 2017.
- Pemberian Penghargaan kepada Pensiunan Karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Periode Maret 2016-Februari 2017.
- Pedoman Penanganan Ganti Rugi atas Kerusakan Jalan Tol dan Sarana Pelengkap yang disebabkan oleh Pengguna Jalan Tol.
- Pembagian Dividen Tunai tahun buku 2016 PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

- Standar Prosedur Transaksi Keuangan (SPTK) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Elektronik dengan menggunakan e-Toll Card.
- Pembentukan Komite Jabatan I (Satu) Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tipe A dan Tipe B.
- Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan (Perubahan).
- Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- Pedoman dan Prosedur Pemanfaatan Lahan untuk Utilitas di Lahan Jalan Tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (Perubahan).
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (Perubahan).
- Pedoman Prilaku (Code of Conduct) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (Perubahan).
- Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (Perubahan).
- Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (Perubahan).

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (KPI) DIREKSI

Dalam tahun 2017, kinerja Direksi yang tercermin dalam indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicator/KPI*) terdiri dari 5 (lima) perspektif. Secara keseluruhan, realisasi pencapaian indikator kinerja kunci Direksi tahun 2017 mencapai nilai 106,7.

Rincian realisasi pencapaian indikator kinerja kunci Direksi tahun 2017 disajikan dalam table sebagai berikut:

TABEL REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI DIREKSI TAHUN 2017

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot (%)	Nilai KPI	
			Target	Realisasi
1	Keuangan dan Pasar	20	20	22,9
2	Fokus Pelanggan	24	24	25,7
3	Efektivitas Produk dan Proses	18	18	19,0
4	Fokus Tenaga Kerja	20	20	20,8
5	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasayarakatan	18	18	18,3
TOTAL		100	100	106,7

PROSEDUR, DASAR PENETAPAN DAN BESARNYA REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Ketentuan mengenai penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris menurut Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 113 ditetapkan oleh RUPS.

Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya (yang ke-1) melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 dan perubahannya yang ke-2 dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017.

Dalam rangka penyiapan usulan penetapan besarnya penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2017, serta penggunaan laba bersih tahun buku 2016 dan tantiem tahun buku 2016, Dewan Komisaris dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil kajian yang dilakukan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko, mengusulkan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk disetujui dan diusulkan untuk mendapatkan penetapan dan/atau persetujuan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, yang akan dilaksanakan tanggal 15 Maret 2017.

Khusus untuk besaran gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2017, Dewan Komisaris mengusulkan agar Dewan Komisaris diberikan wewenang dan kuasa RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Surat usulan Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dilakukan dengan surat Dewan Komisaris No. DK 040/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 dan No. DK 048/III/2017 tanggal 08 Maret 2017.

BAGAN PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI



Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016.

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, serta kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, serta tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Sedangkan tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*).

Remunerasi Direksi Perseroan saat ini telah mengikuti peraturan tersebut dimana Remunerasi Direksi terdiri dari:

1. Gaji.
2. Tunjangan.
3. Fasilitas.
4. Tantiem/Insentif Kinerja.
5. Asuransi Purna Jabatan.

Pengusulan besarnya Tantiem untuk tahun buku 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan pencapaian: target sasaran RKAP Tahun 2016, penambahan hak perusahaan jalan tol, penambahan pengoperasian jalan tol, pencapaian KPI yang lebih tinggi dari target, skor KPKU dan skor penilaian GCG yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Pengusulan besarnya gaji/honorarium tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2017 adalah dengan memperhatikan: skala dan kompleksitas usaha, industri yang sejenis, tingkat inflasi, serta kemampuan keuangan Perseroan.

Struktur Remunerasi Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN, serta Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-122/MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2017, penghasilan Direksi terdiri dari komponen dan besaran komponen sebagai berikut:

TABEL STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Komponen		Besaran
1.	Gaji	
a.	Direktur Utama	Rp 160.000.000
b.	Anggota Direksi	90% dari gaji Direktur Utama
2.	Tunjangan	
a.	Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali gaji
b.	Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung Perseroan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun
c.	Perumahan	Rp 27.500.000 per bulan
3.	Fasilitas	
a.	Kendaraan	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan
b.	Kesehatan	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (sebesar pemakaian/at cost)
c.	Bantuan Hukum	Sebesar pemakaian/at cost
4.	Tantiem	
a.	Direktur Utama	Rp 1.130.582.250
b.	Anggota Direksi	90% dari Tantiem Direktur Utama

Realisasi Remunerasi Direksi Tahun 2017

Memperhatikan Keputusan RUPS Tahunan Jasa Marga tahun buku 2016 yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2017 sebagaimana tersebut pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesian Highway Corporatama) Tbk. disingkat PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tanggal 15 Maret 2017 No. 20 yang dibuat Notaris & PPAT Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. serta berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-476/MBU/D4/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2017 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2016, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyetujui penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2017 serta tantiem tahun buku 2016.

Berdasarkan penetapan tersebut, maka penghasilan Direksi tahun buku 2017 adalah Gaji Direktur Utama sebesar Rp • per bulan, sedangkan gaji anggota Direksi lainnya masing-masing sebesar 90% dari gaji Direktur Utama. Adapun tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 dan perubahannya No. PER-02/MBU/06/2016.

Total Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2016 ditetapkan sebesar Rp 26.400.000 dengan ketentuan:

- Tantiem Direktur sebesar 90% dari Tantiem Direktur Utama, Tantiem Komisaris Utama sebesar 45% dari Tantiem Direktur Utama dan Tantiem anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Tantiem Komisaris Utama.
- Besaran tantiem dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam tahun buku 2016.
- Pajak Penghasilan (PPH) atas tantiem menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya Perseroan.

TABEL REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2017 (RUPIAH PENUH)

Nama	Perseroan						Anak Perusahaan (AP) Perseroan*****					Total	
	Gaji		Tunjangan Perumahan		THR	Tantiem*****	Sub Total	Honor Komisaris	Tunjangan Komunikasi	Tunjangan Transportasi	THR		Sub Total
	per Tahun	per Bulan	per Tahun	per Bulan									
Desi Arryani* Direktur Utama	1.920.000.000	160.000.000	330.000.000	27.500.000	160.000.000	791.407.575	3.540.582.250	-	-	-	-	-	3.540.582.250
Mohammad Sofyan*** Direktur Operasi I	1.370.322.581	144.000.000	261.693.548	27.500.000	144.000.000	-	1.776.016.129	200.700.000	20.000.000	20.000.000	20.070.000	260.770.000	2.036.786.129
SubaktiSyukur* Direktur Operasi II	1.728.000.000	144.000.000	330.000.000	27.500.000	144.000.000	712.266.817	3.219.524.025	191.250.000	18.000.000	18.000.000	21.250.000	248.500.000	3.468.024.025
Hasanudin Direktur Pengembangan	1.728.000.000	144.000.000	330.000.000	27.500.000	144.000.000	2.085.517.241	5.181.310.345	419.478.140	50.000.000	50.000.000	42.500.000	562.750.000	5.744.060.345
Donny Arsal*** Direktur Keuangan	1.370.322.581	144.000.000	261.693.548	27.500.000	144.000.000	-	1.776.016.129	-	-	-	-	-	1.776.016.129
Kushartanto Koeswiranto*** Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum/Direktur Independen	1.370.322.581	144.000.000	261.693.548	27.500.000	144.000.000	-	1.776.016.129	-	-	-	-	-	1.776.016.129
Muh Najib Fauzan*** Direktur Operasi I	357.677.419	144.000.000	68.306.452	27.500.000	-	2.089.303.068	3.405.294.216	117.585.000	12.000.000	12.000.000	-	141.585.000	3.546.879.216
Anggiasari**** Direktur Keuangan/ Direktur Independen	357.677.419	144.000.000	68.306.452	27.500.000	-	1.580.969.093	2.680.817.110	79.335.000	8.000.000	8.000.000	-	95.335.000	2.776.152.110
Christianto Prihambodo**** Direktur SDM dan Umum	357.677.419	144.000.000	68.306.452	27.500.000	-	2.089.303.068	3.405.294.216	63.750.000	6.000.000	6.000.000	-	75.750.000	3.481.044.216
Adityawarman** Direktur Utama	-	-	-	-	-	1.580.833.805	2.179.762.578	-	-	-	-	-	2.179.762.578
Achiran Pandu Djajanto** Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	1.428.250.424	1.961.786.320	-	-	-	-	-	1.961.786.320
Reynaldi Hermansjah***** Direktur Keuangan/ Direktur Independen	-	-	-	-	-	562.133.974	724.477.106	-	-	-	-	-	724.477.106

Keterangan:

- * Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 29 Agustus 2016
- ** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 29 Agustus 2016
- *** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 15 Maret 2017
- **** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 15 Maret 2017
- ***** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 30 Maret 2016
- ***** Tantiem yang dibayarkan merupakan Tantiem setelah PPh
- ***** Penghasilan Direksi Perseroan sebagai anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan Perseroan, sehubungan dengan porsi kepemilikan Perseroan atas Anak Perusahaan Perseroan tersebut sebagai Pemegang Saham mayoritas

Sedangkan perbandingan klasifikasi remunerasi Direksi tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL PERBANDINGAN KLASIFIKASI REMUNERASI DIREKSI TAHUN 2016 DAN 2017

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	2016 (orang)	2017 (orang)
Di atas Rp 1 miliar	6 dari 6	6 dari 6
Di antara Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	x	x
Di bawah Rp 500 juta	x	x

Keterangan:
x tidak ada

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Penilaian Terhadap Kinerja Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) diketuai oleh Direktur Keuangan dengan Divisi Risk and Quality Management sebagai Sekretaris Komite.

Berdasarkan rapat-rapat serta kajian-kajian Komite Manajemen Risiko, peran Divisi Risk and Quality Management lebih ditingkatkan serta senantiasa mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang Manajemen Risiko kepada seluruh Unit Kerja, Cabang dan Anak Perusahaan sehingga manajemen risiko dapat diimplementasikan oleh seluruh karyawan. Dengan dukungan pemimpin setiap Unit Kerja dalam memberikan arahan kepada karyawannya, masing-masing karyawan akan memiliki risk awareness yang tinggi.

Dari hasil pengukuran efektivitas manajemen risiko dan maturitas implementasi sistem manajemen risiko tahun 2017, Perseroan telah meningkatkan penerapan proses manajemen risiko secara berkesinambungan dan konsisten dalam hal pengelolaan risiko. Dalam hal risiko korporat 2018, Perseroan fokus pada risiko yang mempengaruhi langsung sasaran strategis Perseroan serta isu-isu strategis yang mungkin akan muncul dalam bidang-bidang risiko yang dihadapi Perseroan, serta pelaksanaan sistem manajemen risiko di setiap Unit Kerja Perseroan terutama terhadap regulasi dan per Undang-Undang yang berlaku.

Penilaian Terhadap Kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee) diketuai oleh Direktur Operasi I dengan Divisi Information Technology sebagai Sekretaris Komite.

Melalui kajian yang dilakukan IT Steering Committee, Divisi Information Technology telah lebih meningkatkan perannya dalam mendukung proses bisnis pada Unit Kerja yang ada di Perseroan dengan membuat proses-proses berbasis IT sehingga setiap Unit Kerja dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif dan efisien, serta mendukung penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dengan kualitas dan standar yang tinggi. Sejalan dengan berbagai transformasi yang dilakukan Perseroan, transformasi di bidang IT juga dapat memfasilitasi berbagai inovasi untuk menjaga ketahanan bisnis dan meningkatkan pendapatan Perseroan.

Dari hasil pengukuran tingkat penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi yang tercermin dalam maturitas teknologi informasi, pada tahun 2017, Perseroan telah berhasil memenuhi skor minimal 3 yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/2013, dan meningkat dari skor tahun 2016. Sebagai rencana pada tahun 2018, Perseroan melakukan investasi dan implementasi di bidang teknologi informasi berdasarkan Master Plan Teknologi Informasi yang telah disesuaikan dengan Sasaran Jangka Panjang Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

HUBUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sebagai dua organ perusahaan yang menjalankan operasional secara harian berbeda. Tugas utama Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas dan pemberian nasihat, sedangkan tugas utama Direksi adalah menjalankan pengelolaan operasional Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati dan memahami tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar. Direksi dan Dewan Komisaris harus berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan menjadi *role model* bagi jajaran di bawahnya.

Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, namun tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum diputuskan melalui mekanisme yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam beberapa hal tertentu yang strategis menyangkut aktiva, pinjaman, ekuitas, struktur organisasi serta penetapan direksi dan komisaris Anak Perusahaan, Direksi memerlukan persetujuan Dewan Komisaris secara formal.

Seluruh tata cara, pedoman kerja dan hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam *Board Manual*. Pedoman ini mengikat setiap anggota Direksi dan

Dewan Komisaris dan mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, hak, dan etika Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengaturan rapat dan tata cara hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS-DIREKSI

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional perusahaan, Dewan Komisaris mengagendakan pertemuan berkala dalam forum Rapat Dewan Komisaris-Direksi. Penyelenggara rapat berkala ini adalah guna membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini adalah sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

Keputusan rapat dibuat berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. Pada proses pengambilan suara, jika ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan, tidak boleh ikut memberikan suara dan keterangan mengenai hal ini dicatat pada Risalah Rapat.

Sepanjang tahun 2017, Rapat Dewan Komisaris-Direksi dijadwalkan sebanyak 12 kali dengan realisasi sebanyak 13 kali.

TABEL RENCANA JADWAL DAN AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS-DIREKSI TAHUN 2017

Bulan	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda
Januari	23-01-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan status tindak lanjut keputusan Rapat Dewan Komisaris carry over 2016. 2. Laporan dan realisasi pelaksanaan pengisian formasi jabatan struktur organisasi Jasa Marga 2016 dan rencana 2017 serta evaluasi efektivitas organisasi baru. 3. Hasil evaluasi progres pembangunan jalan tol baru. 4. Pembahasan usulan jadwal dan agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2016.
Februari	28-02-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. akhir Januari 2017. 2. Laporan tindak lanjut hasil evaluasi progres pembangunan jalan tol baru. 3. Laporan hasil temuan KAP atas audit tahun buku 2016. 4. Kajian substansi agenda RUPS dan laporan persiapan akhir penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016. 5. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan arahan kebijakan pengembangannya.

Bulan	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda
Maret	24-03-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016. 2. Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. akhir Februari 2017. 3. Laporan progres pembangunan jalan tol baru. 4. Tindak lanjut hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2016.
April	27-04-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris Triwulan 1 2017. 2. Laporan tindak lanjut hasil evaluasi progres pembangunan jalan tol baru. 3. Laporan akhir temuan KAP atas audit tahun buku 2016. 4. Realisasi pencapaian ROE Triwulan 1 2017.
Mei	24-05-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. April 2017. 2. Laporan progres pembangunan jalan tol baru. 3. Laporan Direksi dan pembahasan tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan 1 2017, terkait progres kinerja masing-masing Direktorat. 4. Laporan kebijakan Direksi tentang pengadaan dan pelaksanaannya dan pemberian arahan Dewan Komisaris kepada Direksi.
Juni	21-06-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. Mei 2017. 2. Laporan pemenuhan SPM ruas-ruas jalan tol dan tanggapan Dewan Komisaris. 3. Laporan progres pembangunan jalan tol baru. 4. Tindak lanjut temuan auditor eksternal.
Juli	26-07-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. Triwulan 2 2017. 2. Laporan Direksi tentang dan tanggapan Dewan Komisaris atas Manajemen Risiko Perusahaan, Sistem TIK, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Perusahaan dan Pengendalian Anak Perusahaan. 3. Evaluasi progres pembangunan jalan tol baru. 4. Realisasi pencapaian ROE Triwulan 2 2017. 5. Pelaksanaan pengembangan usaha lain Triwulan 2 2017 dan pembahasan tanggapan Dewan Komisaris.
Agustus	23-08-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. Juli 2017. 2. Laporan Direksi dan pembahasan tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan 2 2017, terkait progres kinerja masing-masing Direktorat. 3. Laporan tindak lanjut hasil evaluasi progres pembangunan jalan tol baru. 4. Laporan Direksi tentang program dan realisasi pemenuhan SPM di seluruh ruas jalan tol dan pembahasan tanggapan dari Dewan Komisaris. 5. Laporan rencana dan realisasi pengisian jabatan dan pemenuhan kompetensi pejabatnya s.d. Semester 1 2017.
September	27-09-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. Agustus 2017. 2. Pembahasan hasil review Direksi atas pelaksanaan RJPP 2013-2017 tahun ke-5 dan tanggapan Dewan Komisaris serta usulan pokok kebijakan dan strategi untuk penyusunan RJPP 2018-2022. 3. Presentasi dan pembahasan usulan Direksi tentang pokok-pokok kebijakan, strategi dan sasaran program untuk penyusunan RKAP 2018. 4. Evaluasi progres pembangunan jalan tol baru. 5. Laporan Direksi atas laporan keuangan prognosa s.d. Desember 2017.

Bulan	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda
Oktober	25-10-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris Triwulan 3 2017. Evaluasi progres pembangunan jalan tol baru. Penyampaian dan pembahasan atas usulan RKAP 2018. Rencana dan realisasi usulan Direksi untuk pencalonan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan s.d. Triwulan 3 2017. Laporan Direksi tentang Laporan Keuangan Prognosa s.d. Desember 2017.
November	29-11-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. Oktober 2017. Laporan dan evaluasi progres pembangunan jalan tol baru. Laporan Direksi dan pembahasan tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan 3 Thn 2017, terkait progres kinerja masing-masing Direktorat. Persetujuan dan penetapan RKAP 2017. Finalisasi penyusunan dan penetapan RJPP 2018-2022.
Desember	20-12-2017	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris s.d. November 2017. Laporan dan evaluasi progres pembangunan jalan tol baru. Perubahan lingkungan bisnis yang akan berdampak besar pada bisnis dan kinerja Perseroan. Realisasi pencapaian ROE Triwulan 3 dan 4 (Prognosa) 2017. Pelaksanaan pengembangan usaha lain Triwulan 3 2017 dan pembahasan tanggapan Dewan Komisaris.

TABEL REALISASI RAPAT, AGENDA RAPAT SERTA KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS-DIREKSI TAHUN 2017

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda	Desi Arryani	Hasanudin	Subakti Syukur	Mohammad Sofyan*	Donny Aرسال*	Kushartanto Koeswiranto*	Anggiasari**	Muh Najib Fauzan**	Christantio Prihambodo**	Refly Harun	Muhammad Sapta Murti	Boediarso Teguh Widodo	Agus Suharyono	Sigit Widyawan	Sugihardjo*	Taufik Widjoyono**
1	23-01-2017	<ul style="list-style-type: none"> Status Tindak Lanjut Keputusan Dewan Komisaris (Carry Over tahun 2016). Pelaksanaan Pengisian Formasi Jabatan Struktur Organisasi Jasa Marga. Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Usulan Jadwal RUPS Tahunan. Laporan Keuangan. 	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
2	28-02-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Progres Pembangunan Jalan Tol Baru Laporan Hasil Temuan KAP. Kajian Agenda RUPS. Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Informasi. 	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓		✓

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda	Desi Arryani	Hasanudin	Subakti Syukur	Mohammad Sofyan*	Donny Aرسال*	Kushartanto Koeswiranto*	Anggiasari**	Muh Najib Fauzan**	Christianto Prihambodo**	Refly Harun	Muhammad Sapta Murti	Boediarso Teguh Widodo	Agus Suharyono	Sigit Widyawan	Sugihardjo*	Taufik Widjoyono**
3	24-03-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Hasil RUPS Tahunan. Tindak Lanjut Hasil Audit. Penawaran Umum Berkelanjutan II. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	27-04-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Tindak Lanjut Hasil Audit. Laporan Manajemen. 	✓	*	✓	✓	✓	✓				✓	*	✓	✓	✓	✓	
5	24-05-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Kebijakan tentang Pengadaan. 	✓	✓	*	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	20-06-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Manajemen Risiko, Sistem TIK dan SPI. Pencapaian ROE. Pengembangan Usaha Lain. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	*	✓	✓	✓	*
7	20-07-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Pemenuhan SPM. Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Tindak Lanjut Hasil Audit. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	*	✓	*	✓	✓	
8	10-08-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Laporan Manajemen. Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. SPM Jalan Tol. Pengisian Jabatan. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	*	✓	✓	✓	

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda	Desi Arryani	Hasanudin	Subakti Syukur	Mohammad Sofyan*	Donny Arsal*	Kushartanto Koeswiranto*	Anggiasari**	Muh Najib Fauzan**	Christianto Prihambodo**	Reffy Harun	Muhammad Sapta Murti	Boediarmo Teguh Widodo	Agus Suharyono	Sigit Widyawan	Sugihardjo*	Taufik Widjoyono**
9	27-09-2017	Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. - RJPP. - RKAP. - Laporan Keuangan. - Kebijakan Cashless.	✓	✓	✓	×	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	×	
10	19-10-2017	Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. - Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. - Calon Direksi Anak Perusahaan. - Laporan Keuangan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	×	✓	✓	
11	06-11-2017	Pembahasan rencana akuisisi ruas-ruas jalan tol.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	×	×	✓	×	×	
12	27-11-2017	Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. - Progres pembangunan ruas-ruas jalan tol baru. - Laporan Manajemen Triwulan 3 2017. - RKAP 2017. - RJPP 2018-2022.	×	✓	✓	✓	×	×				✓	×	✓	✓	✓	✓	
13	27-12-2017	Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. - Progres ruas-ruas jalan tol baru. - Pembahasan perubahan lingkungan lingkungan bisnis yang akan berdampak besar pada bisnis dan kinerja Perseroan. - Prognosa ROE Tahun 2017. - Pengembangan Usaha Lain.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	×	✓	✓	✓	✓	
Jumlah Rapat dalam Setahun										13								
Jumlah Rapat yang Wajib Dihadiri			13	13	13	11	11	11	2	2	2	13	13	13	13	13	11	2
Jumlah Rapat yang Dihadiri			12	11	12	10	10	10	2	2	2	13	7	9	11	12	8	2
Presentase Kehadiran (%)			92	85	92	91	91	91	100	100	100	100	54	69	85	92	73	100
Rata-rata (%)										88								

Keterangan:

- ✓ Hadir
- ×

- * Menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 15 Maret 2017
- ** Menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 15 Maret 2017

Catatan:

- Ketidakhadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan.
- Perbedaan Jumlah Rapat yang Wajib Dihadiri adalah karena perbedaan periode jabatan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Hubungan Afiliasi Direksi dan Dewan Komisaris

Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda.

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL HUBUNGAN KELUARGA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS JASA MARGA

	Nama	Dewan Komisaris							Direksi							Pemegang Saham Utama/ Pengendali		
		Refly Harun	Sigit Widyawan	Boediarso Teguh Widodo	Sugihardjo*	Muhammad Sapta Murti	Agus Suharyono	Taufik Widjoyono**	Desi Aryyani	Mohammad Sofyan*	Subakti Syukur	Hasanudin	Donny Arsal*	Kushartanto Koeswiranto*	Muh Najib Fauzan**	Anggiasari**	Christantio Prihambodo**	Kementerian BUMN
Dewan Komisaris	Refly Harun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Sigit Widyawan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Boediarso Teguh Widodo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Sugihardjo*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Muhammad Sapta Murti *	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Agus Suharyono	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Taufik Widjoyono**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direksi	Desi Aryyani	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Mohammad Sofyan*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Subakti Syukur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Hasanudin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Donny Arsal*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Kushartanto Koeswiranto*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Muh Najib Fauzan**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Anggiasari**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pemegang Saham Utama/Pengendali	Christantio Prihambodo**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Kementerian BUMN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Keterangan:
 ✓ ada
 x tidak ada

* Menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 15 Maret 2017

** Menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 15 Maret 2017

ASSESSMENT DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

KRITERIA DAN DASAR PENILAIAN KINERJA ATAS KEPATUHAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup antara lain:

1. RUPS.
2. Pengawasan Keuangan.
3. Pengawasan Operasional.
4. Pengawasan Pengembangan.
5. SDM.
6. Pengawasan Kepatuhan.
7. Proses Internal Dewan Komisaris.

Kinerja Dewan Komisaris dinilai dari kepatuhan dan kesesuaiannya pada ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan keputusan RUPS. Secara spesifik penilaian Kinerja Dewan

Komisaris diukur berdasarkan perspektif dan indikator kinerja seperti tersebut pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Pasal 12 ayat 10) dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Sedangkan metode penilaian mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-00177/XI/2012 tanggal 07 November 2012 tentang Penetapan Revisi Sistem Self Assessment Kinerja Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Dari 12 (dua belas) aspek pengujian/indikator dan 43 (empat puluh tiga) parameter indikator kinerja tersebut pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 dirangkum dalam 7 (tujuh) perspektif dan 16 (enam belas) key performance indicator Dewan Komisaris Tahun 2017 sebagai berikut:

TABEL KEY PERFORMANCE INDICATOR DEWAN KOMISARIS

Perspektif	Key Performance Indicator
RUPS	1. Terselenggaranya RUPS Sesuai Jadwal dan Subtansi Agenda RUPS
Pengawasan Pengelolaan Perseroan	2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Manajemen/Direksi dalam mengelola Perseroan sesuai dengan: RKAP, Ketentuan Perundang Undangan dan Prinsip-prinsip GCG.
Pengawasan Keuangan	3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Direksi dalam pencapaian Kinerja Keuangan
Pengawasan Operasional	4. Monitoring dan Evaluasi Operasionalisasi Jalan Tol Sesuai Ketentuan (SPM) dan Peningkatan Mutu Pelayanan
Pengawasan Pengembangan	5. Monitoring dan Evaluasi Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Baru di Jawa dan Luar Jawa 6. Monitoring dan Evaluasi dan Mendorong Pengembangan Usaha Lain yang Terkait Bisnis Jalan Tol
Sumber Daya Manusia	7. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pengembangan dan Pengisian Formasi Jabatan
Proses Internal Dewan Komisaris	8. Penetapan Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris dan KPI-nya 9. Terselenggaranya Rapat-rapat Dewan Komisaris dan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Kunjungan Kerja ke Cabang 10. Monitoring dan Evaluasi dan Review RJPP dan Pemberian Arahan tentang Perubahan Lingkungan Bisnis yang Berdampak Besar pada Usaha/Kinerja Perseroan 11. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 untuk dipertanggung jawabkan di RUPS 12. Pembahasan dan Penetapan RKAP yang Diusulkan Direksi 13. Ketepatan Waktu Pengusulan KAP sebagai Agenda RUPS dan disetujui RUPS 14. Self Assessment Kinerja Dewan Komisaris tahun Buku 2017 15. Hasil Penilaian Konsultan Independen tentang Penerapan GCG di lingkungan Dewan Komisaris 16. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan dalam Pemberian Arahan kepada Direksi terkait: (1) Penguatan Sistem Pengendalian Internal (2) Manajemen Risiko Perseroan (3) Sistem TIK (4) Kebijakan & Pelaksanaan Pengembangan Karir (5) Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK (6) Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya (7) Kebijakan Mutu, Pelayanan dan Pelaksanaannya

Ukuran Kinerja Utama Dewan Komisaris Tahun 2017 disusun dan ditetapkan bersamaan dengan penyusunan Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris Tahun 2017 dalam forum rapat Dewan Komisaris. Dengan denikian masing-masing anggota Dewan Komisaris beserta organ pendukung Dewan Komisaris memahami dan memberikan komitmen bersama terhadap pencapaian indikator penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2017.

Kinerja pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perusahaan dalam tahun 2017 telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan pedoman self assessment kinerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-00177/XI/2012, diperoleh capaian nilai sebesar 4,92 dari nilai maksimal sebesar 5,0 dengan predikat penilainya adalah "Sangat Baik". Pencapaian skor ini lebih baik dan meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 4,77.

TABEL KEY PERFORMANCE INDICATOR DIREKSI

Perspektif	Key Performance Indicator
Keuangan dan Pasar	1. Pertumbuhan Aset 2. Market Capitalization Rank 3. Return on Average Equity (ROE) 4. Interest Coverage Ratio (ICR)
Fokus Pelanggan	5. Indeks Kepuasan Pelanggan Jalan Tol 6. Pencapaian Volume Lalu Lintas Transaksi 7. Pangsa Pasar Jalan Tol Operasi (khusus untuk di luar jalan tol penugasan Pemerintah)
Efektivitas Produk dan Proses	8. Pemenuhan SPM 9. Progres Pelaksanaan Proyek Jalan Tol
Fokus Tenaga Kerja	10. Produktivitas Tenaga Kerja 11. Pemenuhan Kompetensi
Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan	12. KPKU Score 13. GCG Score 14. Program Corporate Social Responsibility

Ukuran kinerja Direksi tersebut disepakati dan ditandatangani bersama oleh Direksi yang menjadi bagian dari Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris.

Dasar penilaian masing-masing anggota Direksi adalah surat Komisaris Utama No. DK-190/B/XI/2017 tanggal 09 November 2017, dimana penilaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara dan ketentuan pelaksanaannya tersebut pada Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria penilaian kinerja Direksi mencakup antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar.
2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan.
3. Pencapaian realisasi dari RKAP.

Kinerja Manajemen diukur berdasarkan Key Performance Indicator berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada Surat Kementerian Negara BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN. Kinerja Direksi diukur terhadap 5 (lima) perspektif dengan total indikator sejumlah 14 (empat belas) kinerja kunci sebagai berikut:

pada Badan Usaha Milik Negara, Lampiran 1/7-15 Aspek Pengujian/Indikator No. 19 Parameter 67 sebagai berikut: "Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian kepada Pemegang Saham".

Kriteria penilaian mengacu pada unsur persyaratan materiil bagi anggota Direksi tersebut pada lampiran Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, yang terdiri dari faktor kepemimpinan, integritas, dedikasi, pemahaman terhadap masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dan faktor dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

HASIL ASSESSMENT GCG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2017, dilakukan self-assessment implementasi GCG untuk Direksi dan Dewan Komisaris dengan proses yang dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang dikembangkan oleh Kementerian Negara BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012. Dari hasil assessment tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris memperoleh nilai dengan kategori "Sangat Baik" dengan tingkat pemenuhan masing-masing sebesar 97,37% dan 98,86%.

Adapun *assessment* GCG Dewan Komisaris secara garis besar meliputi aspek-aspek penilaian sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perseroan sesuai RKAP dan/atau RJPP.
5. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/perusahaan patungan.
6. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tiantem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
7. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
8. Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
9. Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
10. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

Assessment GCG Direksi secara garis besar meliputi aspek-aspek penilaian sebagai berikut:

1. Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.
2. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.
3. Direksi menyusun perencanaan Perseroan.
4. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perseroan.
5. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perseroan.
6. Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
7. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perseroan dan *Stakeholders*.
8. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi
9. Direksi memastikan Perseroan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.
10. Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.
11. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.
12. Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.
13. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai Peraturan Perundang undangan.

PROSES DAN PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, melakukan proses *assessment* menilai kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam tahun buku berjalan. Hasil penilaian dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam menetapkan kepengurusan Perseroan apakah perlu dilakukan perubahan atau tetap seperti sebelumnya. Keputusan dan penetapan

susunan kepengurusan Perseroan melalui proses/mechanisme RUPS Perseroan. Proses penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi juga dilakukan dengan menilai kepatuhan dan konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Proses penilaian dilakukan oleh Konsultan Independen yang khusus ditunjuk untuk keperluan tersebut atau oleh auditor eksternal.

Proses penilaian Dewan Komisaris juga dilakukan melalui metode self-assessment kinerja Dewan Komisaris, sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-00177/XI/2012 tentang Penetapan Revisi Sistem Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun 2012.

Proses penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan Perseroan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan atas kesesuaiannya dengan RKAP, Ketentuan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Proses Pelaksanaan Penilaian Dewan Komisaris

Mekanisme proses penilaian Dewan Komisaris dimulai dengan Sekretaris Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi capaian KPI Dewan Komisaris tersebut dengan mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris No. 177/XI/2012 tanggal 07 November 2012 tentang tata cara penilaian kinerja Dewan Komisaris.

Laporan hasil evaluasi dan capaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2017 tersebut di paparkan dan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit. Hasil evaluasi dan pembahasan serta masukan/rekomendasi rapat Dewan Komisaris kemudian dipergunakan untuk memfinalisasi hasil evaluasi capaian KPI Dewan Komisaris Tahun 2017 menjadi Laporan Self Assessment Kinerja Dewan Komisaris Jasa Marga Tahun 2017.

Untuk proses penilaian kinerja Dewan Komisaris Tahun 2017 di atas dalam beberapa tahun belakangan ini tidak melibatkan peranan KAP ataupun Konsultan Independen karena tidak termasuk dalam salah satu tugas yang dibebankan pada lingkup audit oleh auditor eksternal (KAP) maupun konsultan independen penilai GCG di lingkungan organ Perseroan.

Proses Pelaksanaan Penilaian Direksi

Proses dan dasar penilaian kinerja Direksi tahun 2017 dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pemantauan dan evaluasi Dewan Komisaris atas kinerja Direksi dalam mencapai sasaran-sasaran strategis RKAP tahun 2017 sebagaimana yang dijabarkan dalam Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan Tahun 2017 sesuai dengan capaian KPI (Key Performance Indicator) masing-masing Direktorat, serta yang tersebut dalam Kontrak Manajemen yang telah disepakati Dewan Komisaris dan Direksi bersamaan dengan persetujuan dan penetapan usulan RKAP Tahun 2017 yang diajukan Direksi, menjadi RKAP Tahun 2017.

Selain itu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi tindak lanjut keputusan rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi selama tahun buku 2017, serta penilaian terhadap kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan dan ketentuan tersebut pada perjanjian dengan Pihak ke-3 sebagaimana yang menjadi temuan tersebut pada Laporan Hasil Audit KAP Tahun Buku 2016 dan indikasi-indikasi temuan yang disampaikan KAP untuk audit tahun buku 2017 yang masih dalam proses audit yang baru diharapkan hasil akhirnya pada akhir bulan Februari 2018. Untuk temuan-temuan hasil audit KAP Tahun Buku 2016 Dewan Komisaris menilai atas kinerja Direksi menindaklanjuti saran/rekomendasi yang disampaikan oleh auditor eksternal.

Dewan Komisaris juga memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum terkait dengan perjanjian dengan Pihak ke-3 maupun kasus-kasus hukum menyangkut pembebasan tanah.

Proses penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan cara minta Direktur Utama untuk menyampaikan penilaian bagi masing-masing ke 5 (lima) anggota Direksi dan hasil penilaian masing-masing ke-5 (lima) anggota Direksi terhadap Direktur Utama termasuk penilaian dari Corporate Secretary dan Head of Internal Audit bagi Direktur Utama. Penilaian dilakukan dengan mengisi format penilaian dan menyampaikan hasil penilaiannya kepada Direktur Utama dalam amplop tertutup tanpa mencantumkan nama dan jabatan.

Hasil penilaian tersebut di atas, dikumpulkan oleh Direktur SDM & Umum dan kemudian disampaikan secara tertutup kepada Komisaris Utama. Hasil penilaian akan menjadi bahan bagi Dewan Komisaris untuk membahas dan menetapkan penilaian akhir Direksi Tahun 2017.

KOMITE-KOMITE

KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris. Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite dan 2 (dua) orang anggota Komite.

Dalam Tahun 2017 Anggota Komite Audit Perseroan mengalami pergantian, anggota komite audit sejak 01 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris KEP-036/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Penggantian Ketua dan Pengangkatan sebagai Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Berdasarkan keputusan tersebut, keanggotaan Komite Audit Perseroan 01 Januari sampai 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL KOMPOSISI KOMITE AUDIT JASA MARGA SAMPAI DENGAN MARET 2017

Sigit Widyawan	Ketua (Komisaris Independen) merangkap Anggota
Triono Junoasmono	Anggota – Tenaga Ahli Aspek Teknis
Teguh Indra Prastiyo	Anggota – Tenaga Ahli Aspek Administrasi dan Keuangan

Sehubungan dengan adanya penggantian anggota Komite Audit, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP 83/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Keputusan Dewan Komisaris No. KEP 84/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP 85/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan sejak 01 April 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL KOMPOSISI KOMITE AUDIT JASA MARGA SEJAK APRIL 2017

Sigit Widyawan	Ketua (Komisaris Independen) merangkap Anggota
Agita Widjanto	Anggota – Tenaga Ahli Aspek Teknis
Teguh Indra Prastiyo	Anggota – Tenaga Ahli Aspek Administrasi dan Keuangan

Seluruh Anggota Komite Audit Jasa Marga memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan peraturan peraturan/perundangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA

Komite Audit Perseroan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Audit.

Proses rekrutmen Anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam calon anggota Komite Audit. Selanjutnya, melalui

rapat Dewan Komisaris, ditentukan calon anggota Komite Audit terpilih. Akhirnya, anggota Komite Audit ditetapkan dan diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Seluruh Anggota Komite Audit Jasa Marga memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasan dan pengendaliannya, yaitu agar pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugas dan pelaporannya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Pertanggung-jawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tertuang dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang disahkan dengan keputusan Dewan Komisaris No. KEP-00.06/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Penetapan Piagam Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk., sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-204/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pemutakhiran Piagam (Charter) Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi & Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tersebut, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi:
 - a. Perbedaan pendapat antara Manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya; dan/atau
 - b. Ketidaksesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Rekomendasi diberikan atas dasar aspek independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang diusulkan oleh Komite Audit dan disetujui oleh Dewan Komisaris atas biaya Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan dua anggota profesional lainnya yang berasal dari luar Perseroan serta mempunyai latar belakang Keuangan dan Teknik sesuai dengan bidang industri Perseroan. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam Pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bekerja secara profesional dan independen.

Anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, kompetensi, dan independensi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, serta

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara dan No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

- Komite Audit terdiri dari seorang anggota Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit dan dua orang anggota yang berasal dari luar BUMN.
- Setiap anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai

derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi.

- Salah seorang anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dan memahami manajemen risiko, dan seorang anggota lainnya memahami industri/bisnis/teknis BUMN yang bersangkutan.
- Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bersifat mandiri serta bekerja secara profesional dan independen.

TABEL INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Aspek Independensi	Sigit Widyawan	Agita Widjajanto*	Teguh Indra Prastiyo	Triono Junoasmono**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Jasa Marga, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Jasa Marga	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

* Menjadi anggota Komite Audit sejak April 2017.

** Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Maret 2017.

Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Komite Audit atas terlaksananya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta sebagai upaya merealisasikan ketentuan tentang independensi yang ada dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit Perseroan telah membuat Surat Pernyataan Independensi Komite Audit yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota Komite Audit

Beberapa pernyataan penting dalam Surat Pernyataan Independensi Komite Audit antara lain bahwa Komite Audit Jasa Marga:

- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perseroan.
- Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
- Akan menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite Audit.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Selama tahun 2017, Komite Audit Perseroan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

TABEL PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT TAHUN 2017

No.	Komite Audit	Materi
1	Sigit Widyawan	-
2	Agita Widjanto*	<ul style="list-style-type: none"> • Certification in Audit Committee • LPP HC BUMN • Dispute Resolution Board Foundation
3	Teguh Indra Prastiyo	<ul style="list-style-type: none"> • Certification in Audit Committee • LPP HC BUMN
4	Triono Junoasmono**	-

Keterangan:

* Menjadi anggota Komite Audit sejak April 2017.

** Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Maret 2017.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sebagaimana yang ditetapkan pada Piagam Komite Audit. Sedangkan pertemuan dengan auditor eksternal dilakukan minimal sebulan sekali pada saat pelaksanaan audit.

Dalam pelaksanaan rapat, Komite Audit dapat mengundang Manajemen Perseroan, baik secara langsung maupun melalui Satuan Audit Internal, untuk memberikan informasi yang diperlukan. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam

risalah rapat Komite Audit. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit, baik yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Komite Audit selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE AUDIT DALAM RAPAT DAN KEGIATAN-KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2017

Nama	Jabatan dalam Komite Audit	Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri	Kehadiran dalam Rapat	Persentase (%)
Sigit Widyawan	Ketua	40	30	75
Teguh Prastiyo	Anggota	40	37	93
Agita Widjanto*	Anggota	32	31	97
Triono Junoasmono**	Anggota	8	6	75
			Rata-rata	85

Keterangan:

* Menjadi anggota Komite Audit sejak April 2017.

** Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Maret 2017.

Catatan:

• Ketidakhadiran anggota Komite Audit dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan.

REMUNERASI KOMITE AUDIT

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara, Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris memperoleh remunerasi berupa honorarium sebesar Rp 25.600.000 per bulan.

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada Program Kerja Komite Audit (PKKA). Secara umum, PKKA 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Apabila dilihat dari sudut capaian Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators/KPI), maka kinerja Komite Audit selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL KEY PERFORMANCE INDICATORS KOMITE AUDIT 2017

No.	Perspektif KPI	Bobot (%)	Nilai	
			Target	Realisasi
1	Pengawasan Kegiatan Internal Audit	15	0,75	0,68
2	Pengawasan Kegiatan Eksternal Audit	15	0,75	0,90
3	Pengawasan atas Informasi Keuangan/Manajemen	30	1,50	1,71
4	Proses Internal Komite Audit	20	1,00	1,06
5	Dukungan terhadap Program Kerja Dewan Komisaris	20	1,00	0,96
TOTAL		100	5,00	5,31

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

Menilai Pelaksanaan Kegiatan Serta Hasil Audit yang Dilakukan Oleh Auditor Eksternal dan Independensi Auditor

- Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2017 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited). Audit yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ini merupakan penugasan audit yang kedua kali. Penetapan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah dilakukan dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2016 pada tanggal 15 Maret 2017.

Komite Audit telah melakukan penelaahan atas kecukupan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya. Selain itu, Komite Audit juga telah melakukan pembahasan secara intensif dengan Sdr. E. Batara Manurung, Signing Partner KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang

bertanggung jawab untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, serta pendapat mereka mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, kualitas dan akseptabilitas standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh Perseroan. Penelaahan dan pembahasan yang dilakukan oleh Komite Audit juga telah mencakup semua hal yang menurut Standar Auditing, Peraturan OJK dan peraturan lainnya mengenai komunikasi dengan Komite Audit, harus didiskusikan dengan Komite Audit.

Komite Audit juga telah mendiskusikan mengenai Independensi KAP terhadap Manajemen Perseroan dan terhadap Perseroan sendiri. Selama tahun buku 2017 tidak terdapat penugasan non audit kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dan Komite Audit telah menerima surat dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang memberikan penjelasan mengenai independensi mereka.

2. Penugasan Audit Lainnya kepada KAP Purwanto, Sungkoro & Surja
- Komite Audit telah menelaah Laporan Manajemen dan Laporan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan Evaluasi Kinerja Perseroan. Komite Audit juga telah membahas dengan Manajemen dan KAP, kelemahan-kelemahan penting yang ditemukan dalam proses evaluasi dan proses audit, serta rencana Manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dimaksud.
 - Komite Audit telah membahas dengan Internal Audit Perseroan dan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja mengenai seluruh lingkup dan rencana audit mereka. Komite Audit juga telah mengadakan rapat-rapat dengan Internal Audit dan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja tanpa kehadiran Manajemen untuk membahas hasil audit dan hasil evaluasi KAP terhadap pengendalian internal serta kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan.

Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dengan Manajemen Perseroan

Komite Audit juga telah menelaah dan membahas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dengan Manajemen Perseroan. Pembahasan dimaksud mencakup kualitas dan akseptabilitas Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan Perseroan, kelayakan *accounting judgement* dan kecukupannya dalam laporan keuangan konsolidasian.

Manajemen telah menginformasikan kepada Komite Audit bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2017:

1. Merupakan tanggung jawab Manajemen dan telah disajikan secara objektif dengan penuh integritas.
2. Telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Komite Audit



Sigit Widyawan
Ketua

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit dapat dilihat di Bab Mengenai Jasa Marga.

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN RISIKO

Pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (Komite NRR) Perseroan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-063/IV/2015 tanggal 20 April 2015. Pemberhentian anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-160a/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 dilakukan perubahan terhadap Komposisi Komite NRR sehingga Komite NRR terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap sebagai anggota, dari 1 (satu) orang Wakil Ketua Komite merangkap sebagai anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-040a/IV/2016 tanggal 08 April 2016, susunan keanggotaan Komite NRR Perseroan sejak April 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL KOMPOSISI KNRR JASA MARGA SAMPAI DENGAN MARET 2017

Refly Harun	Ketua (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
Agus Suharyono	Wakil Ketua
Vera Diyanty	Anggota
Abram Elsajaya Barus	Anggota

Sehubungan dengan berakhirnya masa penugasan anggota Komite NRR, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP75/IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko, Keputusan Dewan Komisaris No. KEP076/IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko, dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP076/IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko, susunan keanggotaan Komite NRR Perseroan sejak April 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL KOMPOSISI KNRR JASA MARGA SEJAK APRIL 2017

Refly Harun	Ketua (Komisaris Utama/ Komisaris Independen)
Agus Suharyono	Wakil Ketua
Tjahjanto Budisatrio	Anggota
Abram Elsajaya Barus	Anggota

Seluruh Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Jasa Marga memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

Dasar Hukum Pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Komite NRR Perseroan dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan/perundangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-063/IV/2015 tentang Perubahan Komite Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Komite NRR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya agar pengelolaan Perseroan dapat berlangsung dengan efisien dan efektif melalui sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite NRR tertuang dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko yang disahkan dengan keputusan Dewan Komisaris No. KEP-204/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pemutakhiran Piagam (Charter) Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi & Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite NRR di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Tugas terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Tugas terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Perusahaan, Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
5. Tugas terkait dengan Pemantauan Manajemen Risiko:
 - a. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko serta pelaksanaannya.
 - c. Menyarankan Risk Indicator yang harus disampaikan oleh Manajemen atas perkembangan lingkungan eksternal dan organisasi Perseroan yang mempengaruhi proses bisnis Perseroan.
 - d. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko serta pelaksanaannya.
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
7. Tugas khusus dari Dewan Komisaris:
 - a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
 - 1) Nama yang diberi tugas.
 - 2) Sifat penugasan.
 - 3) Lingkup pekerjaan.
 - 4) Tujuan dan sasaran pekerjaan.
 - 5) Jangka waktu penugasan.
 - b. Lingkup pekerjaan tugas khusus sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Dalam melaksanakan tugas khusus, Komite dapat:
 - 1) Melakukan review terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang perlu disajikan termasuk notulen Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
 - 2) Melakukan analisis dan evaluasi, bekerja sama dengan struktural Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Risiko, dan/ atau struktural unit kerja terkait atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dengan beban Perseroan.
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Komite NRR menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang undangan. Komite NRR diketuai oleh Komisaris Utama yang merupakan Komisaris Independen, dengan wakil ketua salah seorang anggota Komisaris dan anggotanya terdiri dari profesional dengan latar belakang sesuai dengan bidang industri Perseroan.

Independensi anggota Komite NRR tercermin dalam tabel dengan aspek berikut:

TABEL INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE NRR

Aspek Independensi	Refly Harun	Agus Suharyono	Abram Elsajaya Barus	Tjahjanto Budisatrio*	Vera Diyanty **
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Jasa Marga, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Jasa Marga	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

* Menjadi anggota Komite NRR sejak April 2017.

** Menjadi anggota Komite NRR sampai dengan Maret 2017.

Sistem dan prosedur dalam penetapan remunerasi yang diberlakukan di Perseroan mengacu kepada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016.

Kajian mengenai remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh Komite NRR dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris-Direksi untuk kemudian disepakati dan diusulkan dalam RUPS.

Dalam nominasi calon Direksi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pejabat satu level di bawah Direksi berdasarkan hasil *assessment*, kinerja dan integritas untuk mengikuti *fit and proper test* yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan mengusulkan calon-calon Direksi untuk mendapat persetujuan RUPS.

Sedangkan untuk pemilihan Pengurus Anak Perusahaan dalam hal prosedur pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 dengan prinsip dasar yang berlandaskan pada

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Perseroan mempersiapkan kader-kader pimpinan perusahaan melalui mekanisme Talent Management System. Dengan mengidentifikasi posisi kunci untuk executive leader dan jabatan Direktur Anak Perusahaan, Perseroan mengembangkan kompetensi calon pimpinan melalui program Corporate Leadership.

Melalui proses seleksi yang dilaksanakan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, Perseroan memilih calon pemimpin yang dinilai mempunyai personal quality yang baik, pengalaman dan keahlian yang memadai untuk menduduki jabatan pimpinan setingkat di bawah Direksi dan Direktur Anak Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi anggota Direksi Perseroan di masa yang akan datang yang bersumber dari kalangan pejabat internal Perseroan.

Anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada periode saat ini terdiri dari 2 (dua) orang yang berasal dari pejabat internal satu tingkat di bawah Direksi pada Perseroan yang juga merupakan anggota Direksi yang menjabat pada periode sebelumnya, 2 (dua) orang berasal dari pejabat internal satu tingkat di bawah Direksi pada Perseroan dan 2 (dua) orang berasal dari pejabat eksternal.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

TABEL PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NRR TAHUN 2017

No.	Komite NRR	Materi
1	Refly Harun	-
2	Agus Suharyono	-
3	Tjahjanto Budisatrio*	-
4	Abram Elsjaya Barus	-
5	Vera Diyanty**	-

Keterangan:

* Menjadi anggota Komite NRR sejak April 2017.

** Menjadi anggota Komite NRR sampai dengan Maret 2017.

Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Komite NRR melakukan rapat koordinasi secara berkala. Dalam pelaksanaan rapat, Komite NRR dapat mengundang Manajemen Perseroan untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Keputusan Rapat Komite NRR diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap ditolak.

Selama tahun 2017, Komite NRR telah menyelenggarakan rapat sebanyak 35 kali, dengan tingkat kehadiran anggota Komite NRR sebagai berikut:

TABEL KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE NRR DALAM RAPAT KOMITE NRR DAN KEGIATAN-KEGIATAN KOMITE NRR TAHUN 2017

Nama	Jabatan dalam Komite NRR	Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri	Kehadiran dalam Rapat	Persentase (%)
Refly Harun	Ketua	35	25	71
Agus Suharyono	Wakil Ketua	35	30	86
Abram Elsjaya Barus	Anggota	35	32	91
Tjahjanto Budisatrio*	Anggota	26	25	96
Vera Diyanty**	Anggota	9	9	100
Rata-rata				89

Keterangan:

* Menjadi anggota Komite NRR sejak April 2017.

** Menjadi anggota Komite NRR sampai dengan Maret 2017.

Catatan:

- Ketidakhadiran anggota Komite NRR dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan.
- Perbedaan Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri adalah karena perbedaan periode jabatan sebagai anggota Komite NRR.

Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite NRR Jasa Marga telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite NRR yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Remunerasi Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Anggota Komite NRR yang bukan anggota Dewan Komisaris memperoleh remunerasi yang terdiri dari honorarium sebesar Rp 25.600.000 per bulan.

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Pada tahun 2017, indikator kinerja kunci atau key performance indicator (KPI) Komite NRR berhasil mencapai nilai total 81.

TABEL PENCAPAIAN KPI KOMITE NRR TAHUN 2017

No.	Perspektif	Bobot (%)	Indikator	Realisasi	Nilai
1	Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat Bidang Nominasi dan Remunerasi	30	Laporan Review dan Pemberian saran atas Bidang Remunerasi dan Nominasi	1 Laporan	25
2	Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat Bidang Risiko	30	Laporan Review dan Pemberian saran atas Bidang Risiko Usaha baik usaha jalan Tol maupun Non Tol	1 Laporan	25
3	Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat Bidang Investasi	30	Laporan Review dan Pemberian saran atas Bidang Investasi baik Usaha jalan Tol maupun Non Tol	1 Laporan	25
4	Ketertiban Administrasi Pelaporan	10	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Laporan Program Kerja 2017 • 1 Laporan Hasil Self Assessment • 4 Laporan Triwulanan 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Laporan Program Kerja 2017 • 1 Laporan Hasil Self Assessment • 3 Laporan Triwulanan 	6
TOTAL					81

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Komite NRR memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran/nasihat di bidang nominasi, remunerasi, dan risiko. Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, program dan kegiatan Komite NRR dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Nominasi; (2) Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Remunerasi; dan (3) Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Investasi dan Risiko Usaha.

Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Nominasi

Pengawasan dan pemberian saran/nasihat di bidang Nominasi dilakukan dengan cara melakukan review terhadap kebijakan dan sistem nominasi di Perseroan. Dalam hal ini Komite NRR telah melakukan rapat koordinasi sebagai sarana untuk mendapatkan data dan informasi mengenai sistem nominasi Perseroan dan pelaksanaannya, serta melakukan diskusi dengan Unit Kerja terkait yang menangani nominasi. Selain itu, Komite NRR juga melakukan desk study dan rapat internal untuk merumuskan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris. Saran dan masukan tersebut menjadi bahan masukan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian saran/nasihat di bidang nominasi.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2017, Komite NRR memberikan beberapa saran dan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Penjaringan calon pejabat harus berbasis pada kompetensi, dan dilakukan dengan berpedoman pada penghormatan atas Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
2. Direksi BUMN wajib menyampaikan calon Direksi terpilih kepada Dewan Komisaris disertai dengan penjelasan mengenai proses penjaringan, proses penilaian dan proses penetapan calon Direksi terpilih. Selanjutnya Dewan Komisaris akan melakukan penilaian terhadap proses penjaringan, proses penilaian dan proses penetapan calon Direksi untuk memberikan penetapan tertulis.
3. Memberikan usulan untuk penetapan kriteria yang ditetapkan penilaian kelayakan dan kompetensi dari para calon pejabat untuk dapat diajukan sebagai calon direksi anak perusahaan dengan merujuk kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Direksi Anak Perusahaan BUMN dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.
4. Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa Direksi meminta persetujuan tertulis kepada Dewan Komisaris sebelum menetapkan seseorang sebagai Direksi Anak Perusahaan.
5. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan kompetensi dari para calon pejabat dan jabatan keahlian agar mampu memenuhi kompetensi dasar yang dipersyaratkan dalam suatu posisi jabatan.
6. Peningkatan kemampuan dan kompetensi hendaknya dilakukan dalam suatu program pengembangan SDM yang terstruktur dan didesain secara khusus sesuai dengan kebutuhan tingkat keahlian yang dibutuhkan dari jabatan tersebut. Dengan demikian, calon yang terpilih akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab posisi tersebut dengan baik dan memberikan kontribusi bagi pencapaian target-target Perseroan sesuai bidang tugasnya.

Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Remunerasi

Pengawasan dan perumusan saran di bidang remunerasi telah dilakukan dengan cara melakukan review terhadap kebijakan dan sistem remunerasi di Perseroan. Review dilakukan dengan tetap merujuk pada sistem remunerasi berbasis kinerja telah mulai ditransformasikan sejak Jasa Marga melakukan IPO tahun 2007. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang ada di Perseroan yaitu Surat Keputusan Direksi No. 122.1/KPTS/2014 yang telah ditetapkan menggantikan peraturan yang sebelumnya untuk mewujudkan sistem remunerasi yang berbasis kinerja tersebut.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem remunerasi berbasis kinerja tersebut, termasuk dalam hal ini program pensiun dini, Komite NRR memberikan beberapa saran dan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Perlu dibuat kebijakan strategis terkait SDM dengan kebutuhan SDM yang diperlukan dan ketersediaan serta kompetensi SDM yang ada. Kebijakan tersebut harus dibuat dengan dampak yang minimal terhadap gejolak yang akan terjadi di kalangan karyawan, karena dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas operasional Perseroan.
2. Perlunya dilakukan penghitungan mengenai jumlah karyawan dan konsekuensi besaran biaya yang dibutuhkan untuk program pensiun dini. Target jumlah karyawan dan besaran biaya disesuaikan dengan kemampuan Perseroan, dan kemudian dilakukan pentahapan waktu pelaksanaan program pensiun dini yang terukur dan terikat dalam target waktu yang tegas.
3. Dengan dikeluarkannya peraturan baru dimana diterapkannya BPJS sebagai penjamin tunjangan kesehatan karyawan memungkinkan adanya penurunan kualitas dalam tunjangan kesehatan. Untuk itu dinilai perlu dikeluarkan pengaturan tunjangan kesehatan bagi karyawan ini dimana fasilitas yang tidak terlayani dengan BPJS dapat digantikan atau ditambahkan dengan tambahan tunjangan kesehatannya sehingga tetap mendapat tunjangan kesehatan seperti yang sebelumnya. Pengaturan tambahan tunjangan kesehatan di luar BPJS tersebut hendaknya mempertimbangkan aspirasi karyawan dan kemampuan Perseroan.

Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Risiko dan Investasi

Pada tahun 2016, pengawasan dan pemberian saran/nasihat di bidang risiko dan investasi dilakukan dengan cara melakukan kegiatan review atas usulan rencana investasi dan risiko-risiko yang melekat, serta pemantauan atas pelaksanaan investasi tol dan non tol dalam aspek risiko dan mitigasi yang dilakukan.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi tersebut, Komite NRR telah memberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan penyelesaian proyek-proyek jalan tol, permasalahan yang dihadapi secara umum adalah keterlambatan pembebasan lahan yang mengakibatkan realisasi penyelesaian proyek mengalami kemunduran. Dalam hal ini, disarankan kepada Dewan Komisaris agar Direksi Jasa Marga memberikan dukungan kepada Anak Perusahaan dalam hal koordinasi dengan pihak P2T, dan juga instansi terkait di pusat, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Dalam rangka meningkatkan perluasan investasi jalan tol dilakukan review kelayakan untuk mengikuti pelelangan suatu ruas jalan tol. Direksi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada tahapan prakualifikasi, apabila Jasa Marga membentuk konsorsium perlu memastikan kemampuan mitra-nya supaya tidak memberikan risiko dikemudian hari terkait dengan penyetoran modal Anak Perusahaan.
 - b. Selanjutnya apabila lulus tahap prakualifikasi, sebelum memasukkan penawarannya, Direksi agar menyampaikan penjelasan terhadap profil rencana usaha dan risiko terhadap penyelenggaraan jalan tol yang akan ditawarkan.
 - c. Apabila Jasa Marga ditetapkan sebagai pemenang lelang maka untuk membentuk Anak Perusahaan sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ruas jalan tol yang telah dimenangkan dan menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Direksi agar memberikan penjelasan terhadap Perjanjian dalam pembentukan Anak Perusahaan dan PPJT yang akan ditandatangani.
3. Dalam rangka mendukung kegiatan investasi Perseroan dan operasionalisasi jalan tol, Komite NRR memberikan masukan dan rekomendasi untuk:
 - a. Biaya Depresiasi dibebankan berdasarkan jumlah lalu lintas. Dengan demikian, anak perusahaan jalan tol yang baru beroperasi tidak terbebani kerugian yang sangat besar pada masa awal operasi yang selama ini diakibatkan besarnya biaya depresiasi.
 - b. Pengoperasian dan Pemeliharaan akan dikelola oleh anak perusahaan yaitu PT Jasamarga Tollroad Operator dan PT Jasamarga Tollroad Maintenance. Berdasarkan hasil perhitungan, *Financial Engineering* atas Biaya Pemeliharaan dan Biaya Operasional akan memberikan peningkatan atas Total Aset Anak Perusahaan Jalan Tol.
4. Dalam memberikan persetujuan investasi pada ruas-ruas jalan tol yang akan dilaksanakan Perseroan, agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya tambahan dukungan pada biaya konstruksi suatu ruas jalan tol akan memberikan risiko meningkatnya tarif jalan tol untuk menjaga tingkat kelayakannya. Penambahan tarif ini perlu dievaluasi secara cermat.
 - b. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan investasi Perseroan, perlu selalu melakukan evaluasi kemampuan keuangan Perseroan dalam membiayai proyek-proyek jalan tol yang sedang berjalan serta rencana proyek-proyek jalan tol yang baru agar kesehatan keuangan Perseroan tetap terjaga.
 - c. Dalam memperhitungkan biaya investasi suatu proyek agar memperhitungkan dampak finansial atas risiko bencana yang kemungkinan dapat terjadi pada proyek tersebut.
5. Dalam rangka penambahan investasi ruas jalan tol dimana Perseroan menggandeng mitra untuk berinvestasi dalam suatu proyek, perlu selalu mempertimbangkan kemampuan dan risiko finansial mitra konsorsium berinvestasi tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pendanaan proyek yang diinvestasikan tersebut dan mengurangi kemungkinan risiko Perseroan menanggung beban pendanaan apabila mitra tidak mampu menyetorkan dananya.

6. Dalam evaluasi pengelolaan resiko dalam RKAP Perseroan perlu ditambahkan risiko komersial dalam assesment risiko pada anak perusahaan dan perlunya pemisahan risiko *controllable* dan risiko *uncontrollable* pada assesment risiko anak perusahaan jalan tol.
7. Dalam rangka rencana pengelolaan perusahaan jalan tol milik Perseroan dan BUJT lain yang ada di Jalan Tol Trans Jawa perlu dilakukan kajian awal yang antara lain meliputi aspek legal, operasional dan keuangan untuk memberikan gambaran secara umum nilai positif ataupun keuntungan dari kerja sama ini.
8. Perencanaan investasi di jalan tol harus tetap memperhatikan ketersediaan dan kemampuan sumber daya pada Perseroan dalam jangka panjang sehingga tidak akan membebani kelangsungan dan kestabilan Perseroan dalam jangka panjang.
9. Dalam memberikan tambahan modal pada proyek properti perlu dilengkapi dengan kajian pasar yang dapat memberikan gambaran risiko usaha pada properti tersebut.
10. Perlu kecermatan dan kehati-hatian sebelum mengakuisisi rencana pembelian aset dalam perencanaan pembelian properti oleh anak perusahaan untuk menghindari kerugian akibat pembelian properti tersebut

Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko



Refly Harun

Ketua

Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dapat dilihat di Bab Mengenal Jasa Marga.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki seorang Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-048/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Penetapan Sekretariat Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk., susunan Sekretariat Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Sekretaris Dewan Komisaris.
2. Kepala Urusan Penyelenggaraan Rapat dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG).
3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Persuratan.
4. Staf Sekretariat yang terdiri dari:
 - 1) Staf Administrasi Penyelenggaraan Rapat
 - a. Dokumentasi Rapat.
 - b. Notulis Rapat.
 - 2) Staf Urusan Tata Usaha.
 - 3) Staf Urusan Administrasi Persuratan.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Secara rinci fungsi Sekretaris Dewan Komisaris antara lain:

1. Menyusun program/agenda rapat Dewan Komisaris selama satu tahun.
2. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat serta menyediakan bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris-Direksi mengacu dan sesuai dengan agenda rapat tahunan Dewan Komisaris.
3. Membuat risalah rapat dan kesimpulan keputusan rapat serta mengadministrasikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Memantau dan melaporkan kepada Dewan Komisaris status tindak lanjut keputusan-keputusan rapat.
5. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik berupa surat masuk, surat keluar, buku laporan maupun keputusan-keputusan rapat dan dokumen lainnya.
6. Menyiapkan konsep surat-surat Dewan Komisaris dan laporan Dewan Komisaris maupun dokumen lainnya.
7. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.
8. Menyiapkan Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) Dewan Komisaris dan menyusun konsep laporan hasil Self Assessment pencapaian kinerja Dewan Komisaris selama tahun berjalan.

9. Memantau dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah dipenuhi, dipatuhi dan membudaya dilingkungan Dewan Komisaris.
10. Menyiapkan dokumentasi dan memberikan penjelasan hal-hal yang diperlukan Tim Penilai Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dilakukan oleh auditor eksternal/konsultan penilai GCG, baik untuk penerapan dilingkungan Dewan Komisaris maupun dilingkungan PT Jasa Marga yang dinilai dengan menggunakan kriteria-kriteria nasional maupun regional.
11. Menyiapkan laporan tahunan Dewan Komisaris dan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau, untuk disampaikan dan dipertanggung jawabkan di RUPS Tahunan.
12. Menyelenggarakan rapat dan/atau pertemuan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham maupun pihak ke - 3 terkait lainnya.
13. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite dalam Dewan Komisaris.
14. Bertindak sebagai liaison officer Dewan Komisaris dengan pihak lain, termasuk memfasilitasi hal-hal yang diperlukan Dewan Komisaris.
15. Mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
16. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Hasil pelaksanaan tugas-tugas pokok Sekretaris Dewan Komisaris tahun 2017 di antaranya sebagai berikut:

1. Program/agenda rapat Dewan Komisaris Tahun 2017 yang telah dibahas dan disetujui Dewan Komisaris dalam rapat tanggal 18 Januari 2017.
2. Penyelenggaraan 27 kali rapat Dewan Komisaris, rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi dan rapat khusus Dewan Komisaris-Direksi serta 10 kali kunjungan dan rapat kerja Dewan Komisaris dengan Cabang-cabang dan Direksi beberapa Anak Perusahaan Jalan Tol, selama tahun 2017.
3. Dokumentasi penyelenggaraan rapat dibuat secara lengkap, terdiri dari bahan rapat, kesimpulan keputusan rapat, risalah rapat dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

4. Laporan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi Semester I Tahun 2017 dan Semester II Tahun 2017.
5. Menyiapkan dan mengadminitrasikan 20 surat keputusan Dewan Komisaris, 44 surat persetujuan Dewan Komisaris, 7 surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, serta 27 surat lainnya.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris Tahun 2018 yang telah disahkan dalam rapat Dewan Komisaris tanggal 20 September 2017.
7. Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) Dewan Komisaris Tahun 2017 yang disahkan dalam rapat Dewan Komisaris tgl 18 Januari 2017.
8. Laporan hasil self assessment pencapaian kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2016 dan konsepnya untuk tahun buku 2017.
9. Draft Laporan Tahunan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017.
10. Rapat dan/atau pertemuan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham maupun pihak ke-3 terkait lainnya.
11. Memfasilitasi lebih dari 20 rapat-rapat Komite Audit dan/ atau Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dengan unit-unit kerja Direksi dan pihak lainnya.
12. Menyiapkan dan penandatanganan laporan kepemilikan saham dan surat pernyataan Pakta Integritas oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.
13. Laporan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2016 di lingkungan Dewan Komisaris yang telah dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tanggal 08 Februari 2017.
14. Revisi Pembagian Tugas Bagi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2017 sehubungan dengan penggantian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 pada 15 Maret 2017.
15. Pembentukan Panitia Negosiasi Harga Jasa Akuntan Publik Tahun Buku 2017.
16. Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Persetujuan dan Revisi RKAP Tahun Buku 2017.
17. Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Penangkatan Anggota Komite Audit.
18. Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2018.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan atau Corporate Secretary memiliki peranan penting untuk memastikan aspek keterbukaan perusahaan terbuka. Keberadaan Corporate Secretary sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35-POJK.04-2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, yang pada dasarnya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pemegang saham dan investor bagi perusahaan publik.

Tugas dan tanggung jawab pokok Corporate Secretary meliputi komunikasi internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) Perseroan, serta pengelolaan hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan Perseroan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance.

Dalam struktur organisasi Perseroan, Corporate Secretary bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

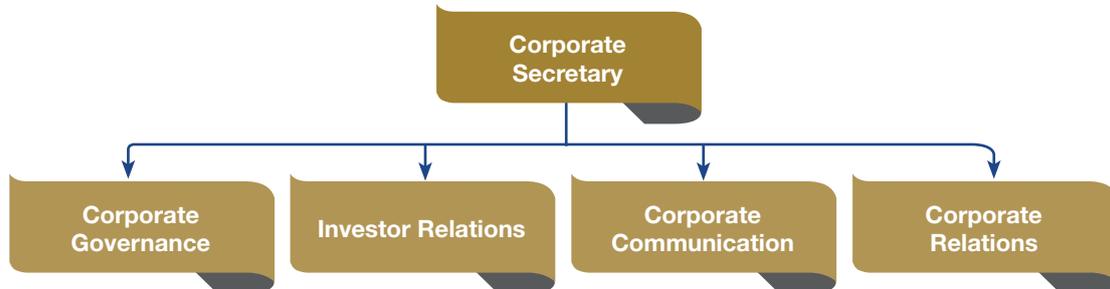
STRUKTUR ORGANISASI CORPORATE SECRETARY

Unit Corporate Secretary Jasa Marga dikepalai oleh M. Agus Setiawan yang diangkat menjadi Corporate Secretary berdasarkan Keputusan Direksi No. 080/AA.P-6a/2017 tanggal 28 April 2017.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 111/KPTS/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Unit Corporate Secretary terdiri dari beberapa Departemen sebagai berikut:

1. Departemen Corporate Governance.
2. Departemen Investor Relations.
3. Departemen Corporate Communications.
4. Departemen Corporate Relations.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CORPORATE SECRETARY

**Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Secretary**

Tugas utama Corporate Secretary adalah memimpin dan menetapkan seluruh penyusunan rencana dan kebijakan yang bersifat strategis di tingkat Perseroan untuk memastikan Perseroan dikelola berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga diperolehnya peningkatan nilai dan citra Perseroan serta terbinanya hubungan baik antara Perseroan dengan stakeholders internal dan eksternal.

Tanggung Jawab Corporate Secretary antara lain adalah sebagai berikut:

- Memastikan Perseroan menjalankan prinsip GCG dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memenuhi persyaratan dari regulator dan lembaga Pemerintah yang berwenang.
- Mengelola informasi yang berkaitan dengan lingkungan bisnis dan menjalin hubungan baik antara Perseroan dengan para pihak industri, pasar modal dan regulator serta stakeholders lainnya agar tersampainya informasi Perseroan secara akurat dan terkini.
- Menyelenggarakan kegiatan komunikasi antara pihak Manajemen Perseroan dengan seluruh stakeholders Perseroan melalui berbagai sarana dan media komunikasi serta kewajiban pelaporan-pelaporan dalam rangka membangun citra Perseroan dan/ atau pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Direksi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengelola kegiatan dan administrasi pemimpin Perseroan serta memfasilitasi hubungan Perseroan dengan para *stakeholders*.

PELAKSANAAN TUGAS CORPORATE SECRETARY

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Corporate Secretary sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan RUPS
 - a. RUPS Tahunan: Jakarta, 15 Maret 2017
 - b. RUPS Luar Biasa: Jakarta, 21 Desember 2017
2. Penyelenggaraan kegiatan terkait investor relations
 - a. Public Expose: Jakarta, 08 Agustus 2017
 - b. Site Visit:

TABEL PELAKSANAAN SITE VISIT BERSAMA INVESTOR TAHUN 2017

No.	Waktu (tgl/bln/thn)	Tempat
1	08/09/2017	Jalan Tol Semarang-Solo
2	21/11/2017	Jalan Tol Semarang-Solo

- c. Non-Deal Roadshow dan Investor Conference

TABEL PELAKSANAAN INVESTOR CONFERENCE TAHUN 2017

No.	Waktu (tgl/bln/thn)	Tempat
1	09/02/2017	Jakarta
2	16-17/02/2017	Hong Kong
3	29-30/03/2017	Hong Kong
4	06/04/2017	Singapore
5	04-05/05/2017	Bali
6	09/05/2017	Jakarta
7	07-08/11/2017	Jakarta

3. Penyelenggaraan kegiatan terkait corporate communications
 - a. Iklan Display (19 kali)
 - b. Iklan Advertorial (3 kali)
 - c. Iklan Pengumuman (11 kali)
 - d. Native in Media Online (24 kali)

- e. Talkshow Televisi (35 kali)
 - f. Talkshow Radio (6 kali)
 - g. Press Release (166 kali)
 - h. Official Statement (107 kali)
 - i. Press Conference (36 kali)
 - j. Press Tour (12 kali)
 - k. Media Briefing (17 kali)
 - l. Pameran (5 kali)
 - m. Media Sosial (twitter, instagram, facebook)
4. Penyelenggaraan kegiatan terkait stakeholders meliputi:
 - a. Temu Pelanggan Jalan Tol.
 - b. Komunikasi dan/atau koordinasi di antaranya dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DPR, DPRD, dan lain-lain.
 5. Penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat Direksi serta Rapat Koordinasi Dewan Komisaris-Direksi.
 6. Penyelenggaraan kegiatan GCG, di antaranya:
 - a. Penandatanganan Pakta Integritas.
 - b. Pengelolaan Whistleblowing System.
 - c. Pengelolaan dan sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 - d. Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Kategori I.
 - e. Assessment GCG.
 - f. Pengelolaan penghargaan Perseroan Bidang GCG.
 - g. Perubahan dan/atau Pemutakhiran Pedoman GCG.
 - h. Sosialisasi GCG bagi karyawan baru.
 - i. Pengukuran Implementasi GCG.
 7. Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi kebijakan Direksi dan kegiatan internal korporat.
 8. Survey online Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan.
 9. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi ke OJK dan Bursa Efek Indonesia.
 10. Program Pengenalan bagi Direksi dan Anggota Komisaris yang baru diangkat

RIWAYAT JABATAN CORPORATE SECRETARY

Riwayat jabatan singkat Corporate Secretary Perseroan Muhamad Agus Setiawan dalam 10 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

TABEL RIWAYAT JABATAN SINGKAT CORPORATE SECRETARY

No.	Nama Jabatan	Satuan Kerja	Periode
1	Direktur Utama	PT Jasamarga Pandaan Malang	2016-2017
2	Vice President Related Business Development	Divisi Related Business Development	2012-2014
3	Kepala Sub Divisi Perencanaan Investasi Usaha Lain	Divisi Pengembangan Usaha Lain	2010-2012
4	Kepala Sub Divisi Pengendalian Jalan Tol	Divisi Pengembangan Jalan Tol	2008-2010
5	Kepala Sub Divisi Perencanaan Investasi Jalan Tol	Divisi Pengembangan Jalan Tol	2007

PENGEMBANGAN KOMPETENSI CORPORATE SECRETARY

Program pelatihan dan pengembangan Corporate Secretary Perseroan Muhamad Agus Setiawan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI CORPORATE SECRETARY TAHUN 2017

No.	Materi	Waktu Pelaksanaan (tgl/bln/thn)	Tempat
1	Sharing Knowledge Implementation of TOD by the Unique "Rail + Property" Model – the Case of Hong Kong	06/10/2017	Jasa Marga Development Center (JMDC)
2	Leading in the High Challenges (Disruptions) Workshop – Batch 1	24/08/2017	Hotel Aston

PROFIL CORPORATE SECRETARY

M. Agus Setiawan adalah warga negara Indonesia, berdomisili di Bogor dan diangkat menjadi Corporate Secretary berdasarkan Keputusan Direksi No. 080/AA.P-6a/2017 tanggal 28 April 2017.

Profil Corporate Secretary dapat dilihat di Bab Mengenal Jasa Marga.

UNIT INTERNAL AUDIT

Fungsi Audit Internal di Jasa Marga dijalankan oleh Unit Internal Audit. Di dalam melaksanakan perannya, Unit Internal Audit bekerja secara profesional, obyektif, dan independen, serta selalu diposisikan sebagai mitra strategis yang dapat dipercaya oleh Manajemen. Unit Internal Audit membantu Direktur Utama dalam melaksanakan audit internal Perseroan, menilai efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan proses tata kelola perusahaan serta memberikan saran perbaikan.

Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Perseroan merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan Perseroan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perseroan dan ketaatan terhadap peraturan per-Undang Undangan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HEAD OF INTERNAL AUDIT

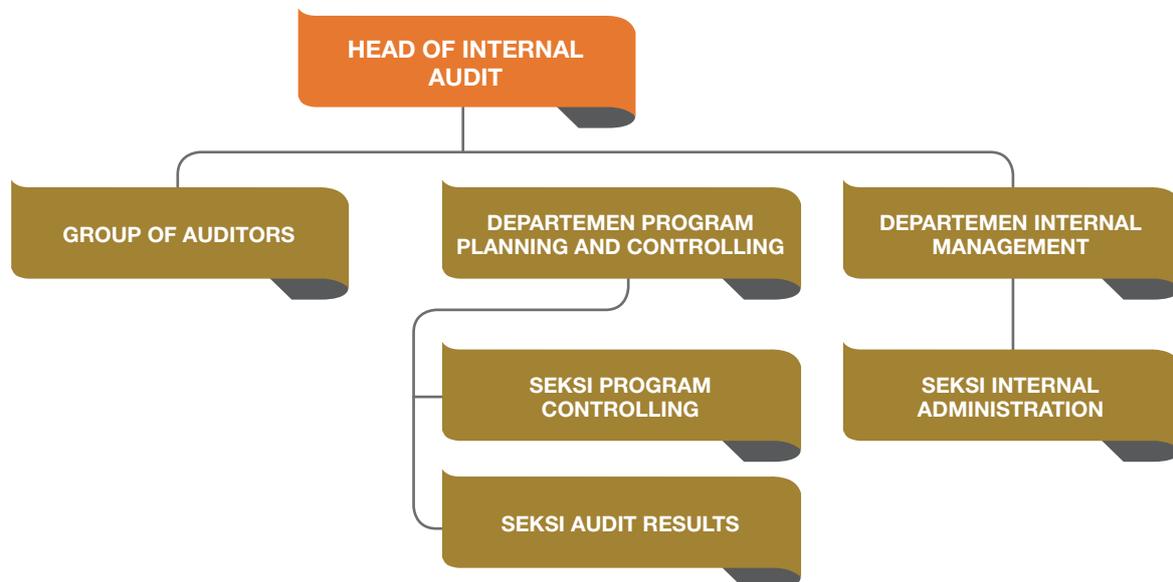
Internal Audit dipimpin oleh seorang Head of Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Head of Internal Audit dibantu oleh AVP Program Planning & Controlling dan AVP Internal Management serta Group of Auditors.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT INTERNAL AUDIT

Sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku, Internal Audit merupakan unit yang independen terhadap unit-unit yang lain dan secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Organisasi Unit Internal Audit ditetapkan dalam Struktur Organisasi Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi No. 111/KPTS/2016 tanggal 30 Juni 2016.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT INTERNAL AUDIT



Unit Internal Audit Jasa Marga dipimpin oleh Laviana Sri Hardini, yang menjabat sebagai Head of Internal Audit sejak 24 Januari 2017, berdasarkan Keputusan Direksi No. 009/AA.P-6a/2017 tanggal 24 Januari 2017. Jumlah personil Unit Internal Audit pada akhir tahun 2017 berjumlah 23 orang dengan 8 orang di antaranya memiliki kualifikasi Qualified Internal Auditor (QIA).

TABEL JUMLAH PERSONIL UNIT INTERNAL AUDIT

No.	Unit Internal Audit	Jumlah Personil
1	Head of Internal Audit	1
2	AVP Program Planning and Controlling	1
3	AVP Internal Management	1
4	Audit Result Manager	1
5	Program Controlling Manager	1
6	Internal Administration Manager	1
7	Assistant Manager Program Controlling	1
8	Senior Officer Administration Information and Reporting	1
9	Senior Officer Internal Administration	1
10	Senior Auditor	3
11	Auditor	4
12	Junior Auditor	2
13	Assistant Auditor	3
14	Seksi Office Administration	2
TOTAL		23

PEDOMAN KERJA INTERNAL AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Internal Audit berpedoman pada Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal, Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang disusun dengan menggunakan pendekatan Risk-Based Audit Planning (Perencanaan Audit Berbasis Risiko).

Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 59/KPTS/2013 tanggal 28 Maret 2013. Selain sebagai pedoman kerja, Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi Internal Audit. Oleh karena itu, Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal juga disebarluaskan agar diketahui oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait sehingga terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Perseroan. Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal telah dimiliki sejak 01 Maret 2003 dan pada tanggal 28 Mei 2009 dan tanggal 28 Maret 2013 telah dilakukan revisi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Secara berkala, Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal dikaji ulang dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Secara garis besar, *Internal Audit Charter* memuat:

1. Definisi Audit Internal.
2. Struktur dan Kedudukan Internal Audit.
3. Peran dan Fungsi Internal Audit.
4. Wewenang Internal Audit.
5. Kode Etik Auditor Internal Audit.
6. Persyaratan Auditor Internal Audit.
7. Pertanggungjawaban Internal Audit.
8. Larangan Perangkapan Tugas.

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, selain mematuhi Code of Conduct Perseroan yang berlaku secara umum, Internal Audit juga memiliki Kode Etik Auditor yang tercantum di dalam Internal Audit Charter, yang di antaranya adalah:

1. Auditor Internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Auditor Internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, Auditor Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang (aktivitas ilegal) atau melanggar hukum.

3. Auditor Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
4. Auditor Internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara obyektif.
5. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesinya.
6. Auditor Internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
7. Auditor Internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Internal Audit.
8. Auditor Internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya dan Auditor Internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan kerugian organisasi.
9. Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran dasar dan/ atau peraturan Perseroan, Auditor Internal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
10. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, Auditor Internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
11. Auditor Internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektifitasnya dan kualitas pelaksanaan tugasnya dan wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Internal Audit berperan memberikan keyakinan dan konsultasi yang independen dan obyektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis Jasa Marga.

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit sesuai *Internal Audit Charter* meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) dan Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
7. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
8. Melakukan Manajemen Audit Internal di Anak Perusahaan sebagai penugasan khusus dari Direktur Utama, dalam rangka melakukan bimbingan (*guidance*), pengawasan (*supervision*), pembelajaran (*learning*) dan konsultasi (*consulting*) dalam mempersiapkan dan melaksanakan Audit Internal di Anak Perusahaan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA INTERNAL AUDIT DAN SERTIFIKASI PROFESI AUDIT

Perseroan senantiasa melakukan program peningkatan kompetensi personil Internal Audit dengan melakukan program pengembangan kompetensi auditor secara sistematis dan berjenjang. Secara umum kebijakan pengembangan kompetensi pada tahun 2017 ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal
2. Pengembangan kompetensi secara internal.

Pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal dilakukan secara formal dalam bentuk kursus atau seminar/lokakarya yang berkaitan dengan masalah audit baik yang dilaksanakan oleh Perseroan maupun Lembaga pendidikan eksternal lainnya.

TABEL PELATIHAN AUDIT SELAMA TAHUN 2017

Nama Pelatihan	Penyelenggara	Jumlah Peserta
1. Audit Intern Tingkat Dasar I	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	4
2. Audit Intern Tingkat Dasar II	YPIA	3
3. Audit Intern Tingkat Lanjutan I	YPIA	6
4. Audit Intern Tingkat Lanjutan II	YPIA	3
5. Audit Intern Tingkat Manajerial	YPIA	4
6. Proses dan Teknik Audit Internal	YPIA	4
7. SNIA 2017	YPIA	6
8. Workshop Tindak Pidana Korporasi, Tanggung Jawab Hukum Direksi dan Komisaris ex Peraturan Mahkamah Agung No. 13/2016	Intrinsics	1
9. Quo Vadis Laporan Hasil Investigasi Auditor: <i>Forensic Auditing</i> untuk Litigasi di Pengadilan	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI)	5
10. Sertifikasi CFE	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)	1
11. Mitigasi Resiko Pengadaan Barang/Jasa BUMN/BUMD	Public Procurement Learning Center	2
12. Konferensi Nasional II FKSPI	FKSPI	6
13. Manajemen Risiko Proyek	Center for Risk Management Studies (CRMS)	2
14. Subsidiary Governance dalam Konteks Holdingisasi dan Trend Korporasi	Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)	1
15. One Day Workshop and Discussion: "Penggunaan Laporan Auditor Internal Sebagai Bukti di Pengadilan (Menakar Risiko Penugasan Seorang Internal Auditor dalam Melakukan Audit Kecurangan)"	Risk Management International (RMI)	1
16. Round Table Discussion "Tantangan Auditor Internal Indonesia sebagai <i>Trusted Advisor</i> di Perusahaan"	PAII (Perhimpunan Auditor Internal Indonesia)	4
17. Penilaian GCG BUMN dan Anak Perusahaan, Pendekatan Subtansial	Holding Company BUMN (HC BUMN)	1
18. Teknik dan Praktik Investigasi Fraud	FKSPI	23
19. Asesor KPKU BUMN Kriteria 2017	Forum Ekselen BUMN (FEB)	2
20. Assessor Preparation Course (APC) KPKU BUMN	FEB	2
21. Integrated Procedure Manual "JM WAY"	Lembayung	1
22. Nota Dinas Elektronik	Jasa Marga Learning Institute (JMLI)	2

HASIL AUDIT UNIT INTERNAL AUDIT

Audit dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan, Manajemen Risiko, dan proses Tata Kelola Perusahaan serta melakukan penilaian efisiensi dan efektivitas atas seluruh aktivitas Perseroan (bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya).

Laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Internal Audit disampaikan kepada Direktur Utama yang selanjutnya merekomendasi dari hasil audit tersebut diperhatikan dan menjadi referensi dalam pelaksanaan tindak lanjutnya. Laporan hasil audit pada saat yang bersamaan juga disampaikan kepada Komite Audit.

KEGIATAN PENDUKUNG AUDIT LAINNYA

Selain kegiatan audit rutin, Internal Audit telah meningkatkan manajemen audit dengan menggunakan aplikasi komputer (*Audit Management System/AMS*). Semua kegiatan audit mulai dari Program Kerja Audit Tahunan (PKAT), Penjadwalan/ Penugasan Tim Audit, Pelaksanaan di lapangan (field work), Pelaporan Audit dan Monitoring Tindak Lanjut hasil audit dikelola dengan *Audit Management System/AMS*.

EVALUASI KINERJA UNIT INTERNAL AUDIT

Kinerja Internal Audit diukur dan dinilai dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI). Terdapat 13 Indikator yang dapat diukur serta dinilai secara tahunan dan merupakan bentuk kontrak manajemen antara Head of Internal Audit

dengan Direksi. Indikator yang memiliki bobot yang besar di dalam KPI adalah:

- Efisiensi biaya pelaksanaan audit
- Pemenuhan permintaan audit dari manajemen
- Ketepatan waktu pembuatan laporan akhir
- Ketepatan waktu penyelesaian Risk-Based Internal Audit Planning
- Pelaksanaan rencana audit
- Pencapaian program kerja unit

Untuk dapat memastikan bahwa pelaksanaan rekomendasi telah ditindak lanjuti, telah diatur dengan mekanisme kontrol melalui suatu Instruksi Direksi tentang Kewajiban Auditee untuk melaporkan tindak lanjut atas rekomendasi Internal Audit pada setiap akhir triwulan kepada Direktur Utama.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT INTERNAL AUDIT TAHUN 2017

Audit Rutin/Audit Operasional

Sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) tahun 2017 yang ditetapkan oleh Direktur Utama, selama tahun 2017 Internal Audit telah melaksanakan pemeriksaan 18 Obyek Audit.

Audit tersebut dilakukan pada Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Unit Bisnis. Monitoring tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit dilakukan melalui mekanisme rutin setiap Triwulan.

Audit Khusus/Audit dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan Audit Khusus/Audit dengan Tujuan Tertentu dilakukan berdasarkan PKAT dan adanya permintaan dari Manajemen untuk melakukan pemeriksaan/review terhadap permasalahan tertentu yang dipandang perlu oleh Manajemen untuk dilakukan evaluasi.

Pada tahun 2017, Internal Audit telah melaksanakan 4 Audit dengan Tujuan Tertentu yaitu Audit terhadap Pengadaan Barang/Jasa dan Audit Manajemen Lahan Kelola Perseroan.

Audit pada Anak Perusahaan

Pelaksanaan Audit pada Anak Perusahaan dilakukan atas permintaan dari Anak Perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan. Pelaksanaan Audit untuk Anak Perusahaan dilakukan dengan membentuk Tim Audit Gabungan antara para pemegang saham.

PROFIL HEAD OF INTERNAL AUDIT

Unit Internal Audit Jasa Marga dipimpin oleh **Laviana Sri Hardini**, yang menjabat sebagai Head of Internal Audit sejak 24 Januari 2017, berdasarkan Keputusan Direksi No. 009/AA.P-6a/2017 tanggal 24 Januari 2017.

Profil Head of Internal Audit dapat dilihat di Bab Mengenal Jasa Marga.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN (SPIP)

Penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Jasa Marga mengacu pada Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BadanUsaha Milik Negara.

Melalui Keputusan Direksi No. 174/KPTS/2013 tentang *Good Corporate Governance* (GCG), ditetapkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perseroan dan ketaatan terhadap peraturan per-Undang Undangan.

Sistem Pengendalian Internal di Perseroan mengadopsi konsep *Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commision* yang terdiri dari 5 (lima) komponen Sistem Pengendalian Internal yang efektif:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activites*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*)
5. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*)

Direksi menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan dan Unit Internal Audit membantu Direktur Utama untuk menilai efektifitas pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan dengan melakukan audit intern keuangan dan operasional Perseroan.

SOSIALISASI PEMAHAMAN KERANGKA SPIP

Sejalan dengan kerangka Pengendalian Internal yang telah dimiliki oleh Perseroan, Internal Audit Unit juga terus melakukan sosialisasi tentang pemahaman prinsip-prinsip Pengendalian Internal berbasis COSO tersebut kepada Unit Kerja di lingkungan Perseroan di seluruh level Jabatan melalui program pelatihan dan workshop yang dilakukan bersama Jasa Marga Development Centre (JMDC).

Tujuan Sosialisasi SPIP dan rencana ke depannya antara lain adalah:

- Kesamaan pemahaman mengenai tujuan dan komponen dalam SPIP.
- Perseroan dapat memastikan bahwa SPIP telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Insan Jasa Marga.

REVIEW ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Dari Laporan-laporan Hasil Audit yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori sasaran (objectives) dan komponen dalam SPIP (kerangka COSO), dilakukan analisis secara periodik tahunan sehingga dengan demikian dapat dilakukan peningkatan (improvement) untuk komponen-komponen yang memerlukannya. Analisis Hasil Audit tersebut juga dilakukan untuk mengukur keefektifan dari pencapaian sasaran SPIP (operasional Perseroan, keakurasian/keandalan laporan-laporan Perseroan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku).

Perseroan juga telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2017 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of The Treadway Commission*. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Perseroan menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 desember 2017 telah berjalan secara efektif.

MANAJEMEN RISIKO JASA MARGA



Rapat Manajemen Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Manajemen risiko bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan. Mengingat bisnis jalan tol merupakan investasi besar dengan pengembalian jangka panjang dan memiliki ketidakpastian tinggi selama masa pembangunan serta pengoperasiannya, maka penerapan manajemen risiko menjadi semakin penting bagi gerak langkah Jasa Marga dalam menjalankan usahanya.

Manajemen risiko membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis Perseroan. Menyadari akan risiko-risiko yang dihadapi, Perseroan secara proaktif berusaha untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko di Perseroan. Untuk dapat memperoleh legitimasi di seluruh organisasi, kebijakan penerapan manajemen risiko perlu ditegaskan melalui komitmen manajemen yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Sistem manajemen risiko dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, terstruktur dan terintegrasi untuk mengantisipasi suatu ketidakpastian atau kerugian yang mungkin terjadi

dalam pengelolaan Perseroan yang meliputi 3 (tiga) bidang utama serta 5 (lima) bidang pendukung yaitu:

Bidang Utama

1. Bidang risiko pengembangan bisnis jalan tol.
2. Bidang risiko pengoperasian jalan tol.
3. Bidang risiko pengembangan usaha lain.

Bidang pendukung:

1. Bidang risiko keuangan.
2. Bidang risiko sumber daya manusia.
3. Bidang risiko teknologi informasi.
4. Bidang risiko regulasi dan hukum.
5. Bidang risiko citra Perusahaan.

Sistem manajemen risiko dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, terstruktur dan terintegrasi untuk mengantisipasi suatu ketidakpastian atau kerugian yang mungkin terjadi dalam pengelolaan Perseroan yang meliputi 3 (tiga) bidang utama yaitu bidang pengembangan bisnis jalan tol, pengoperasian jalan tol dan pengembangan usaha lain serta 5 (lima) bidang pendukung yaitu bidang keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan bidang lainnya.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Direksi menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai acuan dalam mencapai Sasaran Jangka Panjang Perusahaan dan Manual Manajemen Risiko sebagai wujud komitmen untuk penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi, dalam rangka menunjang kepastian pencapaian Sasaran Jangka Panjang Perusahaan, serta memberikan kerangka penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur sesuai persyaratan internasional.

Kebijakan Manajemen Risiko dan Manual Manajemen Risiko di lingkungan Perseroan menggunakan ISO 31000:2009 sebagai acuan dan tertuang dalam Keputusan Direksi Jasa Marga No. 129.2/KPTS/2010 tentang Kebijakan Manajemen Risiko dan Manual Manajemen Risiko di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Selain ISO 31000:2009, pengelolaan risiko di Perseroan juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang direvisi dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Ditandatangani Kebijakan Manajemen Risiko oleh semua Direksi menunjukkan komitmen, kesungguhan dan kepedulian Direksi terhadap pentingnya manajemen risiko dalam keberlangsungan hidup dan mengamankan sasaran Perseroan.

Kebijakan Manajemen Risiko tersebut adalah sebagai berikut:

- Dalam rangka menerapkan kebijakan Risiko, Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness.
- Risiko harus dipahami sebagai semua peristiwa yang mungkin dapat terjadi dalam proses bisnis Perseroan dalam pencapaian sasaran bisnisnya.
- Semua risiko Perseroan harus dikelola secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya Perseroan sehingga tetap berada dalam batas Toleransi Risiko Perseroan.

- Direksi, seluruh Karyawan dan Mitra Usaha Perseroan memiliki peran dalam pengelolaan risiko sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
- Menyempurnakan sistem pengelolaan risiko secara terus-menerus sesuai kondisi terkini dan mendorong seluruh karyawan untuk selalu mengembangkan dan memelihara budaya sadar risiko dalam rangka menjaga nilai Perseroan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Tujuan dari penerapan manajemen risiko di Jasa Marga adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap adanya dampak dari aktifitas dan tindakan bisnis maupun pengaruh faktor eksternal yang mengandung risiko.
2. Menurunkan potensi frekuensi kejadian-kejadian berbahaya yang mungkin terjadi.
3. Meminimalkan potensi kerugian sebagai dampak yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian tersebut.

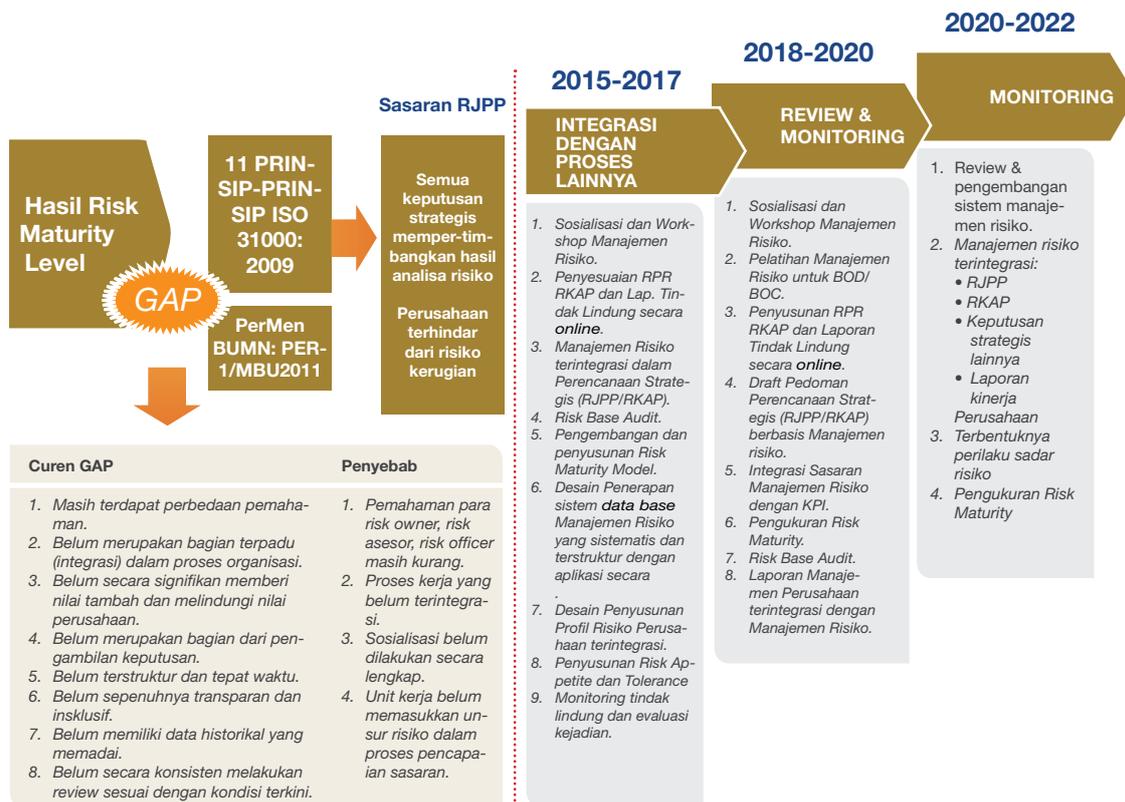
Sejak 2015, Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan komitmen penerapan manajemen risiko di lingkungan perseroan dengan berdasarkan tujuh prinsip yang tertuang dalam piagam penerapan sistem manajemen risiko yang telah ditandatangani pada 13 Juli 2015.

PERJALANAN PENGELOLAAN RISIKO JASA MARGA

Sejak tahun 2007, Jasa Marga telah menerapkan Sistem Manajemen Risiko yang berbasis pada standar AS/NZS 4360:1999 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 139/KPTS/2007 tentang Manual Pengelolaan Risiko. Selanjutnya, dengan terbitnya ISO 31000:2009 pada tanggal 31 Oktober 2009, Jasa Marga melakukan tinjauan manajemen untuk mengubah pedoman penerapan manajemen risiko dengan standar baru yang berorientasi pada Enterprise Risk Management (ERM) dengan menerbitkan Keputusan Direksi Jasa Marga No. 129.2/KPTS/2010 tentang Kebijakan Manajemen Risiko dan Manual Manajemen Risiko di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Skema perjalanan Jasa Marga dalam menerapkan manajemen risiko dapat dilihat pada *Roadmap* Pengembangan Sistem Manajemen Risiko di bawah ini. Roadmap ini di-update setiap tahun mengikuti perkembangan lingkungan serta kebijakan internal dan eksternal Perseroan.

BAGAN ROADMAP PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO JASA MARGA



STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

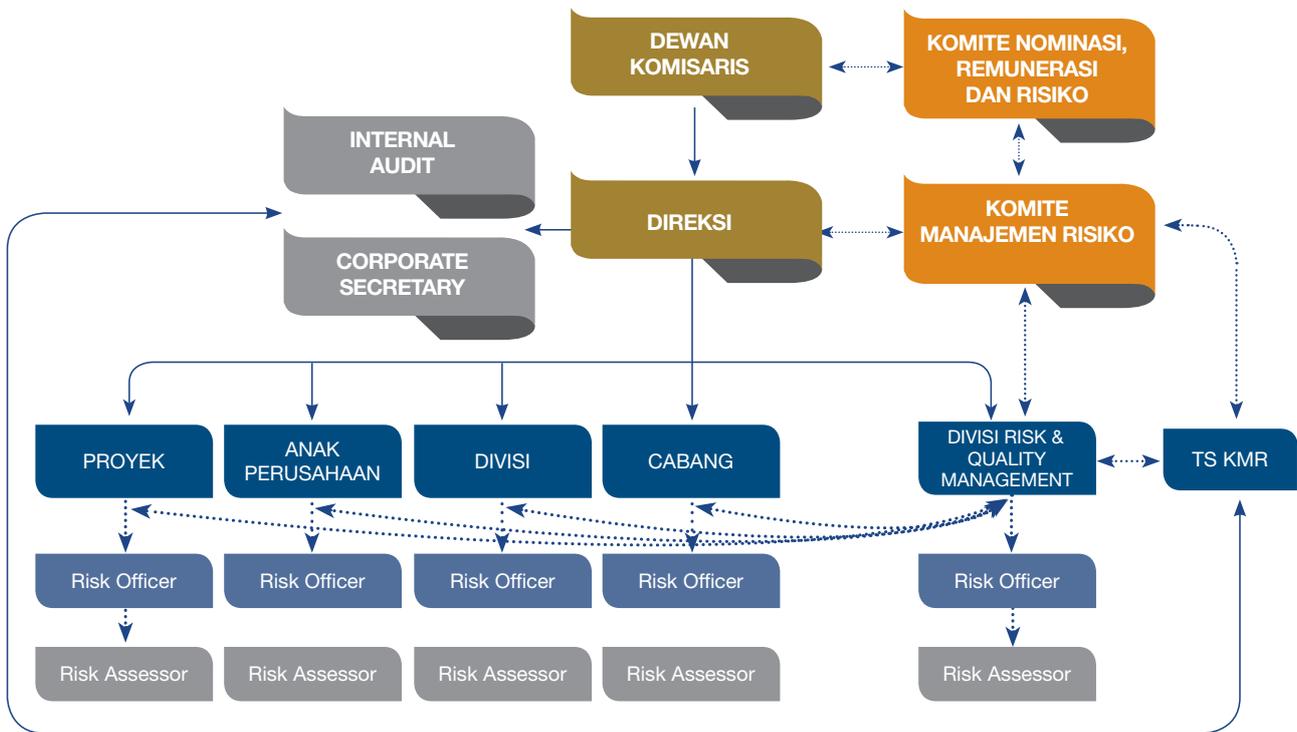
Pada 2017, Jasa Marga tumbuh secara signifikan dengan bertambahnya ruas tol baru dan bisnis lain. Berkembangnya bisnis perseroan yang semakin menjadikan Jasa Marga lebih intensif dalam hal pengelolaan risiko-risiko bisnisnya. Perseroan sadar bahwa manajemen risiko harus diterapkan di semua lini. Oleh karena itu, dibuat suatu Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko, dimana semua orang mempunyai peranan dalam membangun, mengelola dan memastikan penerapan manajemen risiko.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di Jasa Marga telah disempurnakan pada tahun 2016. Pengelolaan manajemen risiko yang sebelumnya merupakan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, menjadi tanggung jawab Direktur Keuangan, sehingga Ketua Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Keuangan.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di Jasa Marga adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris.
- Direksi.
- Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (NRR) yang diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- Komite Manajemen Risiko (KMR), yang diketuai oleh Direktur Keuangan.
- Divisi Risk and Quality Management.
- Tim Sekretariat Komite Manajemen Risiko (TS KMR).
- Risk Owner (Kepala Biro/Satuan/Divisi/Cabang/Unit).
- Risk Officer (sebagai fasilitator dalam pelaksanaan *assessment*).
- Risk Assessor (yang melakukan *assessment* di setiap unit kerja).

STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO JASA MARGA



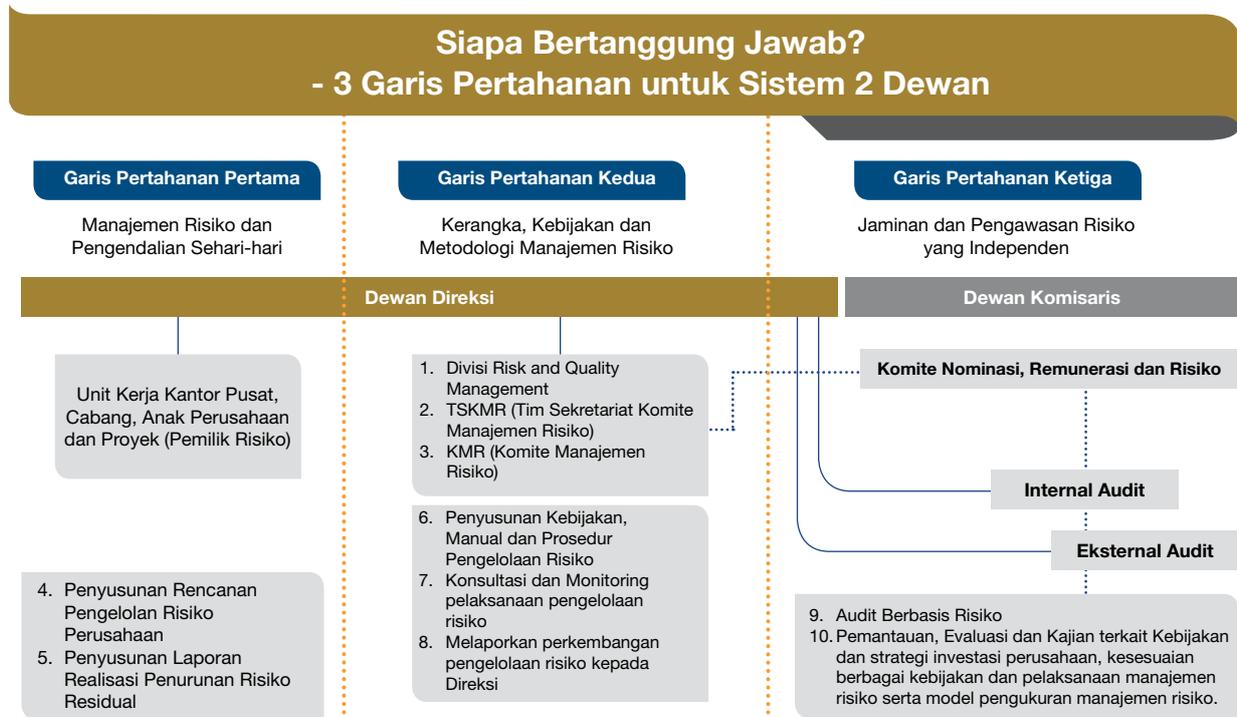
-----> alur komunikasi (Sistem Manajemen Risiko)
 —————> alur komando (sesuai struktur organisasi)

Keterangan:

- Komite Nominasi Remunerasi dan Risiko diketuai oleh Komisaris dengan anggota profesional.
- Komite Manajemen Risiko (KMR) diketuai oleh Direktur Keuangan dengan Divisi Risk and Quality Management sebagai sekretaris komite.
- Profil Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dapat dilihat pada Bab Mengenal Jasa Marga.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Jasa Marga menggunakan pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) dimana proses pengelolaan risiko dilakukan oleh semua lini organisasi. Pada garis pertahanan pertama (*The First Line of Defense*), setiap unit kerja baik di kantor pusat, cabang, anak perusahaan serta kantor proyek berperan sebagai *risk owner* yang fungsinya mengendalikan risiko masing-masing dan bertanggungjawab untuk menyusun rencana pengelolaan risiko serta melaporkan realisasi penurunan risiko residual setiap triwulan. Garis pertahanan kedua (*The Second Line of Defense*), terdapat Divisi Risk and Quality Management, Tim Sekretariat Komite

Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang bertanggungjawab untuk memantau efektivitas pelaksanaan praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh *risk owner*, menetapkan kebijakan, manual dan prosedur pengelolaan risiko, berperan sebagai *counterpart* dari masing-masing unit kerja (*risk owner*) untuk berkonsultasi mengenai implementasi manajemen risiko masing-masing unit kerja serta melaporkan perkembangan pengelolaan risiko kepada Direksi. Pada garis pertahanan ketiga (*The Third Line of Defense*), internal audit bertanggungjawab untuk melakukan audit berbasis risiko serta melakukan audit terhadap pelaksanaan penerapan manajemen risiko secara keseluruhan.



Kerangka kerja manajemen risiko di Jasa Marga merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip manajemen risiko yang memberikan dasar dan penataan organisasi yang mencakup seluruh kegiatan pada semua tingkatan Perseroan. Skema kerangka kerja manajemen risiko Jasa Marga adalah sebagai berikut:

BAGAN SKEMA KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO JASA MARGA



Kerangka Kerja Manajemen Risiko mendorong terlaksananya Pengelolaan Risiko secara efektif dengan menggunakan penerapan proses Manajemen Risiko pada berbagai tingkatan organisasi dan dalam konteks spesifik Perusahaan. Kerangka Kerja Manajemen Risiko pada dasarnya merupakan suatu sistem manajemen dengan struktur sistem yang membentuk siklus *Plan, Do, Check, Action* (PDCA), sehingga memudahkan integrasi sistem Manajemen Risiko pada sistem manajemen Perseroan yang lainnya.

- c) Prosedur Monitoring Pelaksanaan Tindak Lindung (PK/PR/03-BMMR).
- d) Prosedur Penyusunan Profil Risiko Perusahaan (PK/PR/04-BMMR).
- e) Prosedur Dokumentasi dan Pelaporan (PK/PR/05-BMMR).
- f) Prosedur Evaluasi Kejadian Risiko (PK/PR/06-BMMR).
- g) Prosedur Penyusunan Register Risiko (PK/PR/07-BMMR).

Untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko, Jasa Marga telah menyusun beberapa prosedur antara lain:

- a) Prosedur Pengelolaan Risiko (PK/PR/01-BMMR).
- b) Prosedur Penyusunan RPR (PPR PK/PR/02-BMMR).

Untuk mendukung aktivitas pengelolaan manajemen Risiko, maka dilakukan rapat koordinasi dengan penjelasan sebagai berikut:

TABEL RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda	Jumlah Peserta (orang)	Komite
1	15-01-2017	Hasil Pengukuran Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Jasa Marga Tahun 2016.	18	KMR
2	04-08-2017	<ul style="list-style-type: none"> · Pembahasan Kajian Manajemen Risiko di RJPP 2018-2022. · Pembahasan Risk Appetite dan Risk Tolerance. 	16	TSKMR
3	12-10-2017	<ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan Manual Sistem Manajemen Risiko. · Profil Risiko 2018. · Pembaharuan Tim Sekretariat KMR. 	15	TSKMR
4	11-12-2017	Hasil Pengukuran Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Jasa Marga Tahun 2017.	18	TSKMR

RISIKO PERSEROAN DAN PENGELOLAANNYA

Sejalan dengan komitmen Direksi Jasa Marga, untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dan efisien maka pada setiap jenjang organisasi Perseroan yaitu korporat dan unit bisnis harus menerapkan manajemen risiko dengan memperhatikan prioritas dan manfaat tiap program kerja/proyek bagi kelangsungan Perseroan. Pada tahun 2017, Perseroan tetap menggunakan tata cara pengelolaan risiko yang membagi 8 (delapan) bidang risiko (sama seperti tahun 2016) yaitu bidang pengembangan usaha jalan tol, bidang pengoperasian jalan tol, bidang pengembangan usaha non jalan tol, bidang keuangan, bidang sumber daya manusia, bidang hukum/regulasi/lingkungan jalan tol, bidang teknologi informasi serta bidang komunikasi dan pencitraan perusahaan. Selain itu, perseroan telah menetapkan Daftar Minimal Risiko kantor cabang dan anak perusahaan jalan tol baik yang sudah beroperasi maupun yang belum beroperasi serta daftar minimal risiko anak perusahaan non jalan tol. Daftar Minimal Risiko tersebut bertujuan untuk menyelaraskan risiko-risiko antar cabang dan anak perusahaan.

Top Risk RKAP 2017 per Bidang

Top Risk RKAP 2017 per bidang merupakan risiko tertinggi yang telah dikelompokkan menjadi 8 (delapan) bidang yang merupakan hasil konsolidasi risiko dengan status risiko tingkat tinggi yang difilter berdasarkan kriteria keberterimaan korporat dari masing-masing unit kerja Kantor Pusat, Anak Perusahaan Jalan Tol, Anak Perusahaan Usaha Lain dan Kantor Cabang.

Top Risk Perseroan yang teridentifikasi dan telah disusun berdasarkan bobot dari masing-masing risiko adalah sebagai berikut:

TABEL DESKRIPSI BIDANG RISIKO 2017

No.	Bidang	Risiko Inherent		Realisasi Risiko Residual 2017	
		Eksposur	Tingkat	Eksposur	Tingkat
1	Pengembangan Jalan Tol	2,52	2,78	1,91	2,09
2	Operasi	2,10	2,68	1,24	1,41
3	Pengembangan Usaha Lain	2,09	2,68	1,28	1,90
4	Keuangan Jalan Tol	1,95	2,60	1,05	1,82
5	Sumber Daya Manusia Jalan Tol	2,29	2,80	1,71	2,04
6	Regulasi Jalan Tol	2,75	3,36	1,89	1,78
7	Teknologi Informasi Jalan Tol	3,50	3,00	2,71	2,14
8	Komunikasi/Citra Perusahaan Jalan Tol	1,50	3,00	1,00	2,48

E = Ekstrim
T = Tinggi
M = Moderat
R = Rendah

Selain *top risk bidang* yang paling mempengaruhi kinerja Perseroan ke depan, Perseroan juga mengidentifikasi masing-masing bidang risiko secara detail berdasarkan top risk di setiap bidang tersebut.

Berikut rincian identifikasi risiko per direktorat:

A. Risiko Bidang Pengembangan Jalan Tol

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2017 Bidang Pengembangan, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

TABEL PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2017 BIDANG PENGEMBANGAN JALAN TOL

No.	Risiko	Tindak Lindung
1	Risiko jadwal pengoperasian terlambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dana talangan untuk pembebasan lahan 2. Berkoordinasi dan negosiasi dengan warga setempat dan institusi terkait 3. Pengendalian jadwal pengadaan tanah, konstruksi dan pengoperasian
2	Risiko terjadinya kenaikan biaya investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan review Bisnis Plan dengan BPJT untuk memperoleh penyesuaian tarif dan atau konsesi 2. Melakukan negosiasi dan klarifikasi secara maksimal 3. Menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi terjadi kejadian ini

B. Risiko Bidang Pengoperasian Jalan Tol

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2017 Bidang Pengoperasian Jalan Tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

TABEL PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2017 BIDANG PENGOPERASIAN JALAN TOL

No.	Risiko	Tindak Lindung
1	Risiko kemacetan di gerbang dan jalan tol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Lalu Lintas Kedatangan 2. Penambahan Kapasitas Gerbang Tol 3. Modernisasi Peralatan Tol dan Sistem transaksi
2	Risiko kerusakan jalan dan jembatan tol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembalikan performa jalan dengan Scrapping Filling dan Overlay 2. Rekonstruksi Perkerasan, Grouting, dan Perbaikan Expansion Joint 3. Perbaikan dan perkuatan jembatan 4. Melakukan operasi kepada kendaraan yang berlebihan muatan
3	Risiko transaksi non tunai 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan HIMBARA untuk meningkatkan distribusi penjualan kartu e-payment serta sosialisasi bagi pengguna jalan tol 2. Integrasi dengan Divisi Information Technology dalam melakukan pengadaan teknologi dan peralatan tol yang tepat guna 3. Berkoordinasi dengan HIMBARA untuk meniadakan kebijakan batas minimal saldo 4. Pengalihan tenaga kerja pengumpulan tol untuk bidang layanan operasional jalan tol seperti pelayanan lalu lintas dan pemeliharaan jalan tol 5. Menyiapkan strategi komunikasi kepada seluruh masyarakat pengguna jalan tol terkait rencana implementasi transaksi non tunai 100% di seluruh ruas jalan tol Perseroan 6. Berkoordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lain terkait integrasi pembayaran tol antara ruas jalan tol milik Jasa Marga dan BUJT lain, serta menjamin pelayanan yang ekselen kepada pengguna jalan tol

C. Risiko Bidang Pengembangan Usaha Lain

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2017 Bidang Pengembangan Usaha Lain, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

TABEL PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2017 BIDANG PENGEMBANGAN USAHA LAIN

No.	Risiko	Tindak Lindung
1	Risiko kegagalan tender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kerjasama kemitraan dengan supplier untuk memperoleh harga bahan, upah dan alat yang rendah 2. Memberikan training Kompetensi, kemampuan, dan Profesionalitas Team tender
2	Risiko target penjualan produk Anak Perusahaan tidak tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan setoran modal sesuai kebutuhan untuk modal kerja 2. Melakukan kerjasama (KSO) dengan pengembang lain yang telah memiliki lahan
3	Risiko investasi Anak Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari sumber pendanaan baru 2. Restrukturisasi pinjaman/hutang 3. Menyesuaikan harga penawaran yang bersaing sesuai dengan standar yang telah ditentukan 4. Memberikan pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan 5. Melakukan penjadwalan dengan tepat serta membuat rencana cadangan bila diperlukan 6. Memperluas jaringan bisnis, misalnya dengan kerja sama bisnis maupun roadshow

D. Risiko Bidang Keuangan Jalan Tol

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2017 Bidang Keuangan Jalan Tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

TABEL PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2017 BIDANG KEUANGAN JALAN TOL

No.	Risiko	Tindak Lindung
1	Risiko Laporan Keuangan disajikan tidak sesuai dengan PSAK konvergensi IFRS	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan review atas standar kebijakan kapitalisasi aset perusahaan yang dinilai tidak relevan dengan kondisi dan situasi perusahaan saat ini. Melakukan konsultasi kepada profesional yang relevan dan dipercaya dalam hal penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas masuk dalam jajaran Internasional yang bagus. Mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop secara berkesinambungan dan update terus dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS)
2	Risiko tidak tersedianya dana untuk refinancing dan pengembangan usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memonitor setiap hari apakah data atau dokumen yg diminta underwriter sudah memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemilihan underwriter yang profesional dan selalu berkoordinasi dengan underwriter selama proses perumusan bunga. Menempatkan dana hasil penawaran umum Jasa Marga yang tidak terserap sesuai rencana ke pasar uang yang menguntungkan. Menunjuk panitia khusus yang mereview jadwal penawaran umum dari underwriter.

E. Risiko Bidang Sumber Daya Manusia Jalan Tol

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2017 Bidang Sumber Daya Manusia Jalan Tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

TABEL PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2017 BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA JALAN TOL

No.	Risiko	Tindak Lindung
1	Risiko komplain dari karyawan karena mutu pelayanan BPJS kurang optimal dan berpotensi meningkatkan biaya kesehatan bila tidak dikendalikan dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"> Usulan perubahan peraturan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan Sosialisasi proses peralihan program kesehatan kepada seluruh karyawan Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Rumah Sakit mendorong adanya Fasilitas Kesehatan tingkat I perusahaan.
2	Risiko mogok kerja/unjuk rasa dan gugatan tenaga alih daya pada Anak Perusahaan Jasa Marga	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bersama Serikat Optimalisasi fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Sosialisasi Peraturan Sumber Daya Manusia. Memonitor pemenuhan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Melakukan monitoring dan pengawalan terhadap program pengalihan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Rakor Bidang Sumber Daya Manusia secara berkala.

F. Risiko Bidang Regulasi, Hukum, dan Lingkungan Jalan Tol

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2017 Bidang Regulasi/Hukum/Lingkungan Jalan tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

TABEL PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2017 BIDANG REGULASI, HUKUM, DAN LINGKUNGAN JALAN TOL

No.	Risiko	Tindak Lindung
1	Risiko banyaknya perkara kalah di Pengadilan	Penggunaan Konsultan Litigasi
2	Risiko kehilangan aset dan kerugian atas aset	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan instansi keamanan terkait dalam rangka penertiban dan pengamanan di seluruh kantor Cabang Penyerahan dokumen dan sertifikat tanah Negara kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum

G. Risiko Bidang Teknologi Informasi Jalan Tol

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2017 Bidang Teknologi Informasi Jalan tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

TABEL PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2017 BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI JALAN TOL

No.	Risiko	Tindak Lindung
1	Tidak tercapainya <i>Services Level Agreement (SLA)</i> layanan IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Infrastruktur 2. Peremajaan Sistem Server 3. Pengadaan Anti Virus Baru 4. Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Infrastruktur Information Technology 5. Peningkatan Bandwidth
2	Adanya transaksi yang dilakukan manual sehingga menyebabkan human error dan kurangnya kontrol terhadap transaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi Tol Colection System dengan Enterprise Resource Planing 2. Pengadaan Aplikasi Content Management 3. Pengadaan konsultan pengukuran maturity level dan Implementasi Information Technology Governance

H. Risiko Bidang Komunikasi dan Pencitraan Perusahaan

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2017 Bidang Komunikasi dan Pencitraan Perusahaan, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

TABEL PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2017 BIDANG KOMUNIKASI DAN PENCITRAAN PERUSAHAAN

Risiko	Tindak Lindung
Risiko adanya aksi protes dari masyarakat pengguna jalan tol (baik melalui tatap muka, demo, ataupun surat)	Memberikan pelayanan dan informasi perusahaan kepada pelanggan dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pelanggan, perkembangan industri, dan peraturan yang berlaku

IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2017

Sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko pada tahun 2017 program kerja manajemen risiko mengambil konsep plan do check action (PDCA)

1. Integrasi Manajemen Risiko ke dalam Keseluruhan Proses Bisnis Perseroan.

a. Penyusunan RKAP 2017 Berbasis Manajemen Risiko.

Program ini merupakan program rutin tahunan seiring penyusunan RKAP tahunan sesuai dengan prosedur penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko (RPR) dan Perubahan Pengelolaan Risiko (PPR) No. PK/PR/02-BMMR. Dalam penyusunan RKAP 2017 berbasis manajemen risiko dilakukan tahapan sebagai berikut:

- Sosialisasi dan workshop penyusunan Risk Register RKAP 2017.

- Penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko RKAP 2017.
- Penyusunan Rekomendasi dalam rangka penetapan RKAP 2017.
- Penyusunan Profil Risiko RKAP Tahun 2017.

Dalam penyusunan RKAP berbasis manajemen risiko, sejak tahun 2016, Anak Perusahaan diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan Rencana Pengelolaan Risiko. Hal ini dalam rangka memastikan bahwa risiko kegiatan operasional bisnis di tahun berjalan telah teridentifikasi dan telah disusun rencana tindak lindungnya.

b. Penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko Program.

Menindaklanjuti prosedur penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko (RPR) dan Perubahan Pengelolaan Risiko (PPR) No. PK/PR/02-BMMR, maka setiap unit kerja/bisnis setelah program

RKAP-nya disetujui oleh Direksi maka untuk program yang bernilai di atas Rp 5 miliar, unit kerja/bisnis harus membuat RPR program terlebih dahulu sebelum program dilaksanakan.

c. Penyusunan Profil Risiko Tahun 2017.

Penyusunan Profil Risiko tahun 2017 merupakan tindak lanjut dari program penyusunan RKAP tahun 2016 berbasis manajemen risiko. Program penyusunan Profil Risiko tahun 2017 adalah penyesuaian Rencana Pengelolaan Risiko setelah penetapan RKAP 2017, dimana sebelumnya telah disusun Rencana Pengelolaan Risiko sebelum ditetapkan RKAP 2017. Proses penyusunan profil risiko ini sesuai dengan Prosedur Penyusunan Profil Risiko Perusahaan No. PK/PR/04-BMMR.

d. Laporan Pengelolaan Risiko.

Laporan pengelolaan merupakan persyaratan dan kelengkapan dari laporan Perseroan, juga sebagai bahan untuk Risk-Based Audit Internal Audit.

Rencana pengelolaan risiko yang telah ditetapkan dalam Profil Risiko Perseroan dan unit tahun 2017, selanjutnya sesuai dengan prosedur monitoring pelaksanaan tindak lindung No. PK/PR/03-BMMR maka setiap unit kerja/bisnis harus melaksanakan tindak lindung dan melakukan monitoring pelaksanaan tindak lindungnya serta kondisi status risikonya. Hal ini agar risiko yang telah teridentifikasi dalam Profil Risiko Perseroan dapat dimonitor dan diminimalisir.

- i. Pelaksanaan tindak lindung.
 - 1) Unit Kerja/Bisnis melaksanakan tindak lindung dari RPR dan PPR RJP, RKAP dan KPI yang telah disahkan oleh Direksi.
 - 2) Apabila terdapat perubahan program RJP/RKAP, maka setiap Unit Kerja/Bisnis melakukan asesmen ulang dan menyusun Perubahan Pengelolaan Risiko.
- ii. Monitoring Pengelolaan Risiko.
Pelaksanaan monitoring meliputi:
 - 1) Pemantauan berkelanjutan oleh para risk owner yang dilaksanakan sehari-hari.

- 2) Pengawasan oleh atasan (pimpinan unit kerja/bisnis) yang dilaksanakan secara berkala.
- 3) Pengawasan melalui audit internal maupun eksternal yang dilaksanakan secara periodik.
- 4) Investigasi atas kejadian peristiwa yang berkaitan dengan Pengelolaan Risiko.

Program monitoring progress tindak lindung risiko dilaksanakan setiap akhir triwulanan dan merupakan program penyusunan laporan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja/cabang/Anak Perusahaan terhadap Rencana Pengelolaan Risiko (RPR), selanjutnya dikonsolidasikan terhadap risiko korporat sehingga menyusun profil risiko korporat (update) setelah perlakuan tindak lindung.

- iii. Divisi Risk and Quality Management melaksanakan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Pengelolaan Risiko dan mendokumentasikannya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pengelolaan risiko Perseroan dilakukan dengan memantau jumlah program tindak lindung yang direncanakan dan dilaksanakan. Tahun 2017, Perseroan melihat lebih dalam efektivitas pelaksanaan program tindak lindung dengan melihat penurunan tingkat risiko yang telah direncanakan.

Tingkat Risiko Top Risk 2017 mengalami penurunan dari Tingkat Risiko Moderat dengan Eksposur 6,69 (probabilitas 2,35 dan dampak 2,86) pada asesmen tahun 2016 menjadi Tingkat Risiko Rendah dengan Eksposur 3,13 (probabilitas 1,60 dan dampak 1,96). Hal ini menunjukkan bahwa ancaman/risiko yang diperkirakan akan dihadapi oleh Perseroan sudah menurun bahkan melampaui target yang telah ditentukan.

TABEL PENURUNAN RISIKO DARI RISIKO INHERENT (HASIL ASESMEN) KE RISIKO RESIDUAL (HASIL MONITORING)

Periode	Probabilitas	Dampak	Eksposur	Tingkat Risiko
INHERENT (Asesmen Tahun 2016)	2,35	2,86	6,69	MODERAT
Triwulan 1 Tahun 2017	1,79	2,19	3,94	RENDAH
Triwulan 2 Tahun 2017	1,68	2,10	3,52	RENDAH
Triwulan 3 Tahun 2017	1,60	1,96	3,13	RENDAH
Triwulan 4 Tahun 2017	1,60	1,96	3,13	RENDAH

e. Penyusunan Kajian Risiko Bisnis 2017

Penyusunan kajian risiko bisnis merupakan hal penting yang selalu dilakukan Perseroan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan dapat memberi nilai tambah bagi Perseroan. Kajian risiko yang pernah dibuat antara lain kajian risiko perusahaan jalan tol baru, kajian risiko bisnis usaha lain, dan kajian risiko terkait peristiwa penting lainnya seperti libur hari besar.

2. Sosialisasi, Sharing, Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko

Walaupun ada perubahan struktural, mutasi, dan pensiun, Perseroan tetap berusaha memenuhi kompetensi personal yang ada di Perseroan terutama yang termasuk dalam struktur tata kelola pengelolaan risiko. Untuk itu Perseroan melakukan sosialisasi ke setiap Unit kerja/Cabang/Anak Perusahaan, mengikuti seminar, sertifikasi, sharing manajemen risiko dan mengadakan Forum Manajemen Risiko.

a. Pembelajaran Individu Tentang Sistem Manajemen Risiko

Untuk memastikan kecukupan kompetensi mengenai manajemen risiko di Perseroan, Jasa Marga juga telah melaksanakan pelatihan dan seminar serta sertifikasi Manajemen Risiko bagi para karyawan tingkat manajemen dan staf terutama yang terlibat langsung dalam pengelolaan risiko, baik melalui pelatihan yang diselenggarakan melalui Internal Perusahaan maupun Eksternal Perusahaan bekerja sama dengan para profesional di bidang risiko misalnya Center for Risk Management Studies (CRMS), Indonesia Risk and Business Advisory (IRBA PRATAMA).

TABEL PELAKSANAAN PELATIHAN, SEMINAR DAN SERITIFIKASI MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2017

No.	Uraian	Vendor/Nara Sumber	Jumlah Peserta (orang)	Peserta
1	Pelatihan dan Sertifikasi Enterprise Risk management	IRBA, LSPPM	Batch 1: 30 Batch 2: 28	Risk Officer dan Risk Assessor Cabang dan Anak Perusahaan
2	Round Table Discussion Manajemen Risiko "Mengelola Risiko Finansial dalam Ekspansi Investasi Infrastruktur"	Vendor: IRMAPA, CRMS Narasumber: Direktur Keuangan Jasa Marga, Direktur Manajemen Risiko SMI, Partner-EY	Internal: 45 Eksternal: 55	Internal Jasa Marga, Alumni CRMS Indonesia dan anggota IRMAPA
3	Seminar Indonesia Economic Outlook 2017	KPEI, KSEI dan BEI	1	VP Risk & Quality Management
4	Avoiding Disaster of Mega Project	Daya Dimensi	4	Internal Jasa Marga
5	Workshop Penilaian GCG BUMN dan Anak Perusahaan: Pendekatan Substansial	HC BUMN	3	Internal Jasa Marga
6	Workshop Penerapan Manajemen Risiko dan GCG pada Pengadaan Barang & Jasa di BUMN dan Anak Perusahaan		2	Internal Jasa Marga
7	International ERM Event	CRMS Indonesia-ERMA	1	VP Risk & Quality Management
8	Manajemen Risiko Proyek		2	Internal Jasa Marga
9	BIMTEK: Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BUMN/BUMD	Lembaga Kajian Indonesia	2	Internal Jasa Marga

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah personil yang memiliki sertifikasi di bidang Risiko adalah sebagai berikut:

TABEL JUMLAH PERSONIL DENGAN SERTIFIKASI RISIKO

No.	Jenis Sertifikasi Kompetensi	Jumlah		
		Total	Aktif	Pensiun
1	Certified Enterprise Risk Governance (CERG)-ERMA/CRMS	1	1	0
2	Enterprise Risk Management Certified Profesional (ERMCP)-ERMA/CRMS	4	3	1
3	Enterprise Risk management Assosiated Profesional (ERMAP)-ERMA/CRMS	5	5	0
4	Certified Risk Profesional (CRP)-BNSP/LSPPM	65	65	0

Dalam menumbuhkan budaya sadar risiko pada seluruh insan Jasa Marga baik di Cabang maupun Anak Perusahaan, perseroan selalu melakukan sosialisasi mengenai manajemen risiko secara rutin dan melakukan pendampingan penyusunan rencana pengelolaan risiko setiap tahunnya dalam rangka penyusunan RKAP berbasis risiko. Melalui sosialisasi dan pendampingan manajemen risiko, para karyawan di seluruh lini.

b. Pembelajaran Organisasi tentang Sistem Manajemen Risiko

Perseroan rutin melakukan pembelajaran organisasi tentang Sistem Manajemen Risiko untuk selalu up to date dalam pengetahuan manajemen risiko dan perkembangan sistem risiko dari eksternal Perseroan serta untuk bertukar pengalaman dan pikiran antara praktisi dan profesional di bidang Manajemen Risiko di Indonesia.

Pada tahun 2017, Perseroan mengikuti Roundtable Discussion “Mengelola Risiko Finansial dalam Ekspansi Investasi Infrastruktur” yang diselenggarakan di Jasa Marga atas kerja sama dengan CRMS Indonesia, dan Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA).

3. Aplikasi Manajemen Risiko Berbasis Web

Sejak tahun 2014, pengisian rencana pengelolaan risiko oleh unit kerja, cabang dan Anak perusahaan serta laporan monitoring tindak lindung per triwulan harus melalui Aplikasi Manajemen Risiko yang berbasis web. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan administratif pengelolaan risiko sehingga

mempermudah proses pengelolaan risiko menjadi lebih efisien serta mempunyai database dan pelaporan pengelolaan risiko yang lebih mudah dan cepat yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

Setiap awal tahun, Perseroan melakukan pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi Manajemen Risiko Terintegrasi (JM SMART) dengan menambah dan memperbarui fitur yang dapat mempermudah *risk assessor* dalam pengelolaan dokumen manajemen risiko.

4. Pengukuran Efektifitas Implementasi Manajemen Risiko

Untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko efektif dan menunjang kinerja organisasi, maka Jasa Marga telah melakukan Pengukuran Tingkat Kematangan (*Risk Maturity*) dalam Pengelolaan Risiko oleh konsultan independen.

Program ini merupakan pengukuran efektifitas implementasi manajemen risiko, dalam rangka memberikan arah perbaikan terhadap sistem manajemen risiko yang sedang dilaksanakan di Jasa Marga, dengan tujuan sebagai berikut:

- Mendapatkan data atas gap dan gambaran sejauhmana implementasi manajemen risiko di Jasa Marga.
- Mendapatkan rekomendasi (Strength dan OFI) dan sekaligus mendapatkan arah dan saran perbaikan dalam rangka implementasi manajemen risiko ke depan.

Awalnya Jasa Marga melakukan program pengukuran efektifitas implementasi manajemen risiko setiap 2 (dua) tahun sekali dengan harapan dalam selang pengukuran

perbaikan atas pengukuran efektifitas implementasi manajemen risiko dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan, akan tetapi mengingat banyaknya dan cepatnya perubahan perkembangan sistem yang diterapkan di Perseroan maka dipandang perlu untuk melakukan pengukuran setiap tahun untuk melihat efektifitas implementasi perbaikan sistem yang ada.

Model yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat maturitas manajemen risiko setiap tahunnya, memiliki 5 (lima) tingkat yang menggambarkan kompetensi perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko dan 6 Atribut Pengukuran.

TINGKAT MATURITAS MANAJEMEN RISIKO

TINGKATAN				
Awal (Initial) Level 1	Pemula (Beginner) Level 2	Kompeten (Capable) Level 3	Mahir (Proficient) Level 4	Pemimpin (Leader) Level 5
ATRIBUT				
Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)				
Prinsip Manajemen Risiko (<i>Risk Management Principles</i>)				
Proses (<i>Process</i>)				
Aplikasi (<i>Application</i>)				
Pengalaman (<i>Experience</i>)				
Budaya (<i>Culture</i>)				

Berdasarkan tingkat maturitas yang telah dihasilkan, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- Pada atribut Budaya, Perseroan memperoleh tingkat MAHIR. Artinya di Jasa Marga ada dukungan aktif dari manajemen senior, ada kesadaran yang tinggi terhadap Manajemen Risiko dan aktif mencari informasi mengenai Risiko, terdapat komitmen dan konsistensi dalam menjalankan Manajemen Risiko walaupun koordinasi masih perlu ditingkatkan, organisasi paham sarasannya dan terdapat kebutuhan atas Kajian Risiko.
- Pada atribut Proses, Perseroan memperoleh tingkat KOMPETEN. Artinya di Jasa Marga proses Manajemen Risiko belum konsisten, belum terdapat pembelajaran dari pengalaman, dan menggunakan pendekatan yang umum.
- Pada atribut Pengalaman, Perseroan memperoleh tingkat KOMPETEN. Artinya Jasa Marga sudah memiliki pengalaman Manajemen Risiko yang memadai.
- Pada atribut Aplikasi, Perseroan memperoleh tingkat MAHIR. Artinya di Jasa Marga kebijakan dan sistem telah diterapkan dengan konsisten, pelaporan dilakukan dengan terperinci dan terdapat KPI Manajemen Risiko yang konsisten dilaksanakan.
- Pada atribut Kepemimpinan, Perseroan memperoleh tingkat MAHIR. Artinya di Jasa Marga pemimpin sudah proaktif dalam mengarahkan Manajemen Risiko yang terintegrasi.
- Pada atribut Prinsip, Perseroan memperoleh tingkat MAHIR. Artinya di Jasa Marga prinsip Manajemen Risiko telah dipahami dan sebagian besar telah diterapkan.
- Secara umum, nilai maturitas Manajemen Risiko Perseroan tahun 2017 menempati tingkat MAHIR dengan nilai 3,85. Nilai maturitas Perseroan ini meningkat dari tahun 2016 yang menempati level 3 (Mahir) dengan nilai 3,78.

TABEL HASIL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN RISIKO (RISK MATURITY) JASA MARGA BERDASARKAN ATRIBUT

Karakter	Nilai	Tingkat Maturitas	
Budaya	3,94	MAHIR	LEVEL 4
Proses	3,74	KOMPETEN	LEVEL 3
Pengalaman	3,28	KOMPETEN	LEVEL 3
Aplikasi	3,98	MAHIR	LEVEL 4
Kepemimpinan	4,11	MAHIR	LEVEL 4
Prinsip	4,04	MAHIR	LEVEL 4
Tingkat Maturitas	3,85	MAHIR	LEVEL 4

TABEL PENINGKATAN NILAI MATURITAS MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN 2013-2017

Tahun	Jumlah Indikator	Nilai	Tingkat Maturitas
2013	6 Indikator	3,12	Kompeten, Level 3
2014	6 Indikator	3,23	Kompeten, Level 3
2015	6 Indikator	3,72	Kompeten, Level 3
2016	6 Indikator	3,78	Mahir, Level 4
2017	6 Indikator	3,85	MAHIR, LEVEL 4

Peningkatan nilai maturitas manajemen risiko di Jasa Marga menunjukkan bahwa Perseroan semakin intensif dalam menumbuhkan budaya sadar risiko di seluruh jajaran karyawan. Divisi Risk and Quality Management secara proaktif melakukan sosialisasi mengenai manajemen risiko dan melakukan pendampingan secara rutin tentang tata cara identifikasi dan proses input risiko ke dalam aplikasi Manajemen Risiko terhadap karyawan baik di kantor cabang maupun di anak perusahaan.

PROFIL VP RISK AND QUALITY MANAGEMENT

Divisi Risk and Quality Management dipimpin oleh Mery Natacha Panjaitan yang menjabat berdasarkan Keputusan Direksi No. 054/AA.P-6a/2018 tanggal 09 Februari 2018.

Profil VP Risk and Quality Management dapat dilihat di Bab Mengenal Jasa Marga.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI JASA MARGA

Perkara yang dihadapi Perseroan adalah permasalahan hukum yang dihadapi Jasa Marga selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum di Pengadilan. Sedangkan Nilai Gugatan merupakan nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Perseroan sebagai pihak tergugat atau nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Perseroan sebagai pihak penggugat, baik kerugian materiil maupun imateriil.

Sebagai perusahaan *pioneer* di bidang jalan tol, Perseroan terlibat dalam berbagai kasus hukum, yang memposisikan Perseroan baik sebagai Penggugat, Tergugat, ataupun sebagai Turut Tergugat. Selama tahun 2017, keseluruhan perkara yang dihadapi Perseroan merupakan perkara perdata. Berdasarkan jenis pokok perkara yang dihadapi, perkara penting Jasa Marga dapat dikelompokkan menjadi Perkara Tanah dan Perkara Korporasi

Atas perkara-perkara hukum di bawah ini, Perseroan berpendapat bahwa hasil dari kelanjutan pemeriksaan atau keputusan Pengadilan tersebut tidak akan membawa dampak material bagi Perseroan atau entitas anak Perseroan. Berdasarkan estimasi Manajemen untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut maka Perseroan mencadangkan dana untuk penyelesaian perkara sebesar Rp 9.423.039.329 pada RKAP 2017.

TABEL RINCIAN PERKARA TAHUN 2016-2017

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
	2016	2017
Perkara Tanah	12	11
Kasus Korporasi	5	2
Kasus Hubungan Industrial	-	-
Kasus Lain-Lain	-	4
Jumlah	17	17

Secara rinci perkara penting yang dihadapi Perseroan berdasarkan jenis perkara antara lain adalah sebagai berikut:

Perkara Tanah

1. Kasus Mustafa Rahman (Perlawanan)

Perkara No. 7/Pdt/2017/PT.DKI.

Lembaga: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pihak

Penggugat: Mustafa Rahman
Tergugat I: Departemen Pekerjaan Umum
Tergugat II: Walikota Jakarta Timur
Tergugat III: Jasa Marga

Pokok Perkara

Gugatan terkait dengan kepemilikan tanah seluas 6.670 m² yang terkena Jalan Tol JORR E1 Ruas TMII-Cikunir.

Status Perkara

Putusan Pengadilan Negeri menerima gugatan Mustafa Rachman dan menghukum Jasa Marga dengan total Rp 13.505.000.000. Putusan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menguatkan Putusan Pengadilan Negeri.

Jasa Marga melakukan upaya gugatan Perlawanan. Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menolak Gugatan Perlawanan Jasa Marga.

Jasa Marga telah menyerahkan memori kasasi tanggal 22 Agustus 2017 dan sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses Kasasi yang diajukan Jasa Marga.

Upaya Manajemen

Jasa Marga telah mengajukan gugatan Perlawanan terhadap putusan dimaksud dan saat ini sedang dalam proses permohonan kasasi yang diajukan oleh Jasa Marga.

Nilai Gugatan

Rp 13.505.000.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

2. Kasus Fikri Gani

Perkara No. 23/Akta.K/2016/PN.Bks.

Lembaga: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pihak

Penggugat: Fikri Gani
Tergugat I: Kantor Pertanahan Nasional
Tergugat II: Jasa Marga

Pokok Perkara

Gugatan ganti rugi atas sebidang tanah seluas ±1.935 m² di Jln. Raya Caman RT 004/RW 001 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi yang terkena pembangunan off ramp Caman Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Status Perkara

Atas upaya Banding yang diajukan Jasa Marga, pada tanggal 24 Mei 2016, Jasa Marga menerima Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 518/PDT/2015/PT.Bdg melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diterima pada tanggal 25 Mei 2016 dengan isi putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri sebelumnya.

Jasa Marga mengajukan memori kasasi tanggal 16 Juni 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi No. 23/Akta.K/2016/PN.Bks. dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Jasa Marga dan membatalkan putusan sebelumnya.

Pada tanggal 10 November 2017 Jasa Marga telah menerima relas pemberitahuan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Perdata Kasasi Mahkamah Agung No. 2943 K/PDT/2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diajukan oleh Fikri Ghani.

Upaya Manajemen

Terhadap upaya hukum peninjauan kembali dari Fikri Ghani, Jasa Marga telah menyerahkan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 07 Desember 2017 melalui PN Bekasi.

Nilai Gugatan

Rp 13.545.000.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

3. Kasus Raharja Mukti

Perkara No. 303/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL

Lembaga: Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Para Pihak

Penggugat:	Raharja Mukti
Tergugat I:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tergugat II:	Jasa Marga
Tergugat III:	Walikota Jakarta Selatan
Turut Tergugat I:	PT Bank Pacific (Bank Likuidasi)/Momo Adi Suganda
Turut Tergugat II:	Arianto

Pokok Perkara

Gugatan ganti rugi serta pernyataan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah SHM No. 2524 Pesanggrahan (dahulu SHM 456/Bintaro) seluas 1.303 m² pada atas nama Turut Tergugat II Jalan Tol JORR Ruas Pondok Aren-Ulujami.

Status Perkara

Putusan Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat. Atas dasar putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum banding.

Upaya Manajemen

Saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding.

Nilai Gugatan

Rp 11.515.000.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

4. Kasus Kasan Basri

Perkara No. 224/Pdt.G/2017/PN.Smg

Lembaga: Pengadilan Negeri Semarang

Para Pihak

Penggugat:	Kasan Basri
Tergugat:	Jasa Marga
Turut Tergugat I:	Kepala Kelurahan Kalicari
Turut Tergugat II:	Kepala Kelurahan Sendangguwo
Turut Tergugat III:	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang

Pokok Perkara

Gugatan ganti rugi atas tanah Buku C No. 56 Persil 2 Klas S 1 seluas 5.650 m² pada Jalan Tol Semarang Seksi C Ruas Genuk-Jatingaleh.

Status Perkara

Pada tanggal 13 Desember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan penggugat sebagian yaitu:

- Kerugian Materiil Rp 71.190.000.000
- Kerugian Imateriil Rp 678.000.000

Upaya Manajemen

Jasa Marga telah menyatakan Banding.

Nilai Gugatan

Rp 71.868.000.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

Kasus Korporasi

1. Kasus BTS

Perkara No. 299/Pdt.Arb/2017/PN.Jkt.Tim

Lembaga: Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Para Pihak

Pemohon: Jasa Marga

Termohon: PT BTS

Pokok Perkara

BTS mengajukan gugatan melalui BANI terhadap Jasa Marga atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil terkait pembangunan pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cawang-Cibitung. BANI menjatuhkan putusan yang menghukum Jasa Marga untuk membayar BTS sebesar Rp 113.160.713.901. Atas putusan BANI tersebut, Jasa Marga mengajukan upaya hukum Permohonan Pembatalan Putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Status Perkara

Pada tanggal 10 Oktober 2017, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menolak permohonan pembatalan yang diajukan Jasa Marga.

Upaya Manajemen

Jasa Marga telah melakukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung.

Nilai Gugatan

Rp 113.160.713.901

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

2. Kasus Mitra Jujur Indonesia

Perkara No. 252/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim

Lembaga: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Para Pihak

Penggugat: PT Mitra Jujur Indonesia (MJI)

Tergugat I: Jasa Marga

Tergugat II: PT Purnajasa Bimapratama

Turut Tergugat: PT Bank Sumut Cabang Khusus Jakarta

Pokok Perkara

Keberatan atas pemutusan Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Renovasi Gerbang Tol Tomang pada Jalan Tol Cawang-Tomang-Cengkareng.

Status Perkara

Perkara di tingkat Pengadilan Negeri telah diputus oleh Majelis Hakim dengan inti putusan menolak gugatan PT Mitra Jujur Indonesia.

Atas putusan tersebut, MJI mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Upaya Manajemen

Jasa Marga telah mengajukan Kontra Memori Banding. Saat ini sedang dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Nilai Gugatan

Rp 13.200.000.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

Perkara yang Dihadapi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Selama tahun 2017, tidak ada perkara yang dihadapi oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

Perkara di Anak Perusahaan

Sepanjang tahun 2017, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh Anak Perusahaan Perseroan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Perseroan.

TABEL PERKARA DI ANAK PERUSAHAAN PER 31 DESEMBER 2017

No.	Nama Anak Perusahaan	Ada/Tidak ada Perkara	Nilai Gugatan
1	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road)	Tidak Ada	Tidak Ada
2	PT Marga Lingkar Jakarta (Jalan Tol JORR W2 Utara)	Tidak Ada	Tidak Ada
3	PT Marga Sarana Jabar (Jalan Tol Bogor Outer Ring Road)	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (Jalan Tol Cengkareng-Kunciran)	Tidak Ada	Tidak Ada
5	PT Marga Trans Nusantara (Jalan Tol Kunciran-Serpong)	Tidak Ada	Tidak Ada
6	PT Marga Trans Jateng (Jalan Tol Semarang-Solo)	Tidak Ada	Tidak Ada
7	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (Jalan Tol Surabaya-Mojokerto)	Tidak Ada	Tidak Ada
8	PT Jasamarga Gempol Pasuruan (Jalan Tol Gempol-Pasuruan)	Tidak Ada	Tidak Ada
9	PT Jasamarga Bali Tol (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa)	Tidak Ada	Tidak Ada
	Perkara: Gugatan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Gugatan wanprestasi dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WK) kepada PT Jasamarga Bali Tol (JBT) atas perjanjian Jasa Pemborongan untuk Paket 2 dan Paket 4 konstruksi pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.		
	Status: JBT telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri yang diterima dan membatalkan putusan PN sebelumnya. WK mengajukan upaya hukum. Berdasarkan informasi dari situs resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung, atas proses kasasi tersebut, Hakim telah menjatuhkan amar Kabul yang diputus pada 16 Agustus 2017. Namun JBT belum mendapatkan putusan dan pemberitahuan resmi mengenai hal tersebut.		
	Nilai Gugatan: Rp 64.576.067.774		
10	PT Marga Bumi Adhika Raya (Jalan Tol Gempol-Pandaan)	Tidak Ada	Tidak Ada
11	PT Jasamarga Kualanamu Tol (Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi)	Tidak Ada	Tidak Ada
12	PT Jasamarga Solo Ngawi (Jalan Tol Solo-Ngawi)	Tidak Ada	Tidak Ada
13	PT Ngawi Kertosono Jaya (Jalan Tol Ngawi-Kertosono)	Tidak Ada	Tidak Ada
14	PT Jasamarga Semarang Batang (Jalan Tol Semarang-Batang)	Tidak Ada	Tidak Ada
15	PT Jasamarga Manado Bitung (Jalan Tol Manado-Bitung)	Tidak Ada	Tidak Ada
16	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (Jalan Tol Balikpapan-Samarinda)	Tidak Ada	Tidak Ada
17	PT Jasamarga Pandaan Malang (Jalan Tol Pandaan-Malang)	Tidak Ada	Tidak Ada

No.	Nama Anak Perusahaan	Ada/Tidak ada Perkara	Nilai Gugatan
18	PT Cinere Serpong Jaya (Jalan Tol Cinere-Serpong)	Tidak Ada	Tidak Ada
19	PT Jasamarga Tollroad Maintenance (Jasa Konstruksi, Pemeliharaan Jalan Tol, Persewaan Kendaraan Tol)	Tidak Ada	Tidak Ada
20	PT Jasamarga Properti (Pembangunan, Perdagangan dan Jasa Terkait Properti)	Tidak Ada	Tidak Ada
21	PT Jasamarga Tollroad Operator (Layanan Operasi Jalan Tol)	Tidak Ada	Tidak Ada
22	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated)	Tidak Ada	Tidak Ada

INFORMASI TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF

Pada tahun 2017, Jasa Marga menerima sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa Denda sebesar Rp 27.000.000 atas keterlambatan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan terkait pelaksanaan penjabatan Penawaran Umum Terbatas I Perseroan tahun 2016 dan sanksi administratif dari OJK berupa Peringatan Tertulis atas keterlambatan penyampaian informasi terkait pengangkatan Komite Audit Perseroan.

Selama tahun 2017, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan oleh otoritas lainnya kepada Jasa Marga, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan.

TABEL KEPATUHAN JASA MARGA TERHADAP PERATURAN OJK DAN PERATURAN BEI

Aspek Kepatuhan	Bentuk Kepatuhan
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan OJK.
Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik	Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dan menyesuaikan dengan Peraturan OJK.
Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik	Perseroan telah memiliki Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik	Perseroan telah memiliki Corporate Secretary.
Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015	Perseroan telah mengungkapkan bahwa Perseroan telah memenuhi (comply) dan/atau menjelaskan (expain) semua rekomendasi atas pedoman tata kelola perusahaan terbuka berdasarkan Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK.
Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Perseroan melaporkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham dan Obligasi ke OJK dan BEI tepat waktu.
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Butir V	Penyelenggaraan Public Expose Perseroan pada tahun 2017 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aspek Kepatuhan	Bentuk Kepatuhan
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Ketentuan III.3.4 dan III.3.5	Perseroan melaporkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek tepat waktu.
<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-346/BL/2011 Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Ketentuan III.1.6.3 	Publikasi Laporan Keuangan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Ketentuan III.2 	Publikasi Laporan Tahunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

KODE ETIK

Etika dan budaya merupakan landasan penerapan GCG di Jasa Marga, mengingat bahwa organisasi tidak lain adalah terdiri dari orang-orang di dalamnya. Dalam mengelola GCG, maka penerapan GCG tidak dapat dipisahkan dari menjalankan bisnis yang beretika dan membentuk kesadaran Perseroan dan karyawan yang memiliki kepekaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar tidak terjadi benturan kepentingan dan benturan kepada peraturan perundangan yang ada.

Dalam pengembangan GCG, Jasa Marga telah merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut etika perusahaan. Jasa Marga mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan Visi, Misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi Etika Usaha dan Etika Kerja.

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis Perseroan sebagaimana tercantum dalam Etika Usaha dan Etika Kerja.

PEDOMAN PERILAKU

Untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Perseroan telah menetapkan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) sejak tahun 2005, dengan perubahan terakhirnya yaitu Keputusan Direksi No. 175/KPTS/2013 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Dengan adanya perkembangan Peraturan Menteri BUMN dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang Good Corporate Governance, serta dengan telah ditetapkannya penjabaran Tata Nilai Perusahaan sebagaimana Keputusan Direksi No 08/KPTS/2016 tentang Penjabaran Tata Nilai PT Jasa Marga (Persero) Tbk., maka diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct) tersebut, yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 127/KPTS/2017 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dalam rangka pemenuhan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan yang berlaku.

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan acuan bagi seluruh Insan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan dalam bekerja dan berinteraksi dengan segenap *stakeholders* Perseroan. Dengan nilai-nilai pokok Perseroan dan melaksanakan Pedoman Perilaku Perseroan secara konsisten seluruh Insan Jasa Marga, dimanapun ia berada dan bekerja senantiasa mendukung terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang pada akhirnya akan meningkatkan citra perusahaan (corporate image) bagi seluruh *stakeholders*-nya.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pedoman perilaku Perseroan mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan Jasa Marga.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) adalah:

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Perseroan menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh Stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan dan Pelanggan serta Mitra Kerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Perseroan menjamin kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan pertanggungjawaban Jajaran Perseroan yang memungkinkan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perseroan kepadanya.

3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Perseroan menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

4. **Kemandirian (*Independency*)**

Perseroan menjamin pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. **Kewajaran (*Fairness*)**

Perseroan menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Stakeholders berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pedoman Perilaku tersebut disusun untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar sehingga diperlukan suatu pedoman yang bertujuan untuk membentuk dan mengatur kesesuaian tingkah laku sehingga mencapai penerapan GCG yang konsisten sebagai budaya Perseroan yang memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga tercapainya Visi dan Misi Perseroan.

ISI DAN KEBERLAKUAN PEDOMAN PERILAKU

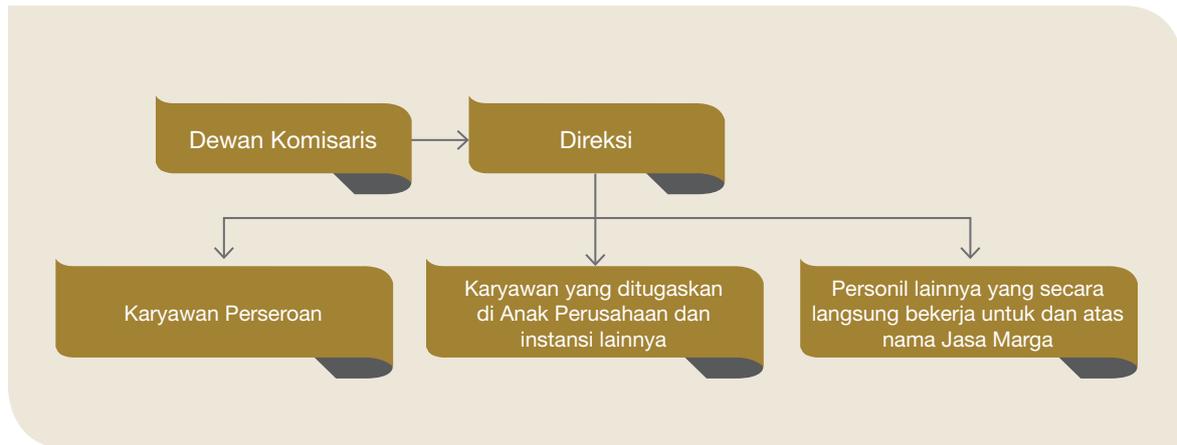
Pedoman perilaku Perseroan mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan Jasa Marga.

Pedoman Perilaku berisi hal-hal sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
- Bab III Etika Bisnis Perusahaan
- Bab IV Etika/Tuntutan Perilaku Insan Jasa Marga
- Bab V Penegakan dan Pelaporan

Sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi No. 127/KPTS/2017 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Pedoman Perilaku berlaku bagi seluruh Insan Jasa Marga, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Vice President/General Manager, Manager/Deputy General Manager, dan Staf.

BAGAN INSAN JASA MARGA



Pedoman Perilaku dalam hubungan dengan *stakeholders* Perseroan adalah sebagai berikut:

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Bertanggung Jawab (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*).

PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 127/KPTS/2017 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct* PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

ETIKA

Nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

ETIKA BISNIS		ETIKA/TUNTUTAN PERILAKU INSAN JASA MARGA	
<p>Cara-cara baik untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, Perseroan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun Perseroan di masyarakat.</p>		<p>Sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Karyawan dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Karyawan dan Perseroan.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan. 2. Penanganan Gratifikasi. 3. Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 4. Pemberian Kesempatan yang Sama kepada Karyawan untuk Mendapatkan Pekerjaan, Promosi dan Pemberhentian Kerja. 5. Standar Etika dalam Berhubungan dengan Stakeholders: <ol style="list-style-type: none"> a. Hubungan dengan Insan Jasa Marga. b. Hubungan dengan Pemerintah. c. Hubungan dengan Pemegang Saham. d. Hubungan dengan Pengguna Jalan Tol dan Pelanggan Lainnya. e. Hubungan dengan Mitra Usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> f. Hubungan dengan Pesaing. g. Hubungan dengan Kreditur/ Investor. h. Hubungan dengan Pemasok/ Kontraktor. i. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar. j. Hubungan dengan Media Massa. k. Hubungan dengan Anak Perusahaan. 6. Standar Etika Jajaran Manajemen dan Karyawan: <ol style="list-style-type: none"> a. Perilaku Sebagai Atasan terhadap Bawahan. b. Perilaku Sebagai Bawahan terhadap Atasan. c. Perilaku Sebagai Rekan Kerja. 7. Hak Atas Kekayaan Intelektual (<i>Intellectual Property Rights</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Insan Jasa Marga. 2. Menjaga Nama Baik Perseroan. 3. Menjaga Hubungan Baik antar Insan Jasa Marga. 4. Menjaga Kerahasiaan Perusahaan. 5. Menjaga dan Menggunakan Aset Perseroan. 6. Menjaga Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja. 7. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok. 8. Melakukan Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan. 9. Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan Pribadi (Insider Trading). 10. Penanganan Gratifikasi. 11. Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 12. Tidak Memanfaatkan Posisi untuk Kepentingan Pribadi (Benturan Kepentingan). 13. Aktivitas Politik. 	

SOSIALISASI DAN UPAYA PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Pedoman Perilaku diungkapkan dan/atau disebarkan kepada semua insan Perseroan melalui berbagai media yang dimiliki Perseroan, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua pegawai dengan mudah setiap saat. Secara periodik, kepada segenap insan Perseroan disampaikan melalui media Memo dan/atau Surat Edaran dari Direksi tentang pelaksanaan etika bisnis.

Media Sosialisasi Penyebaran Pedoman Perilaku antara lain melalui:

- Situs web dan portal internal
- Buku saku
- Spanduk
- *Banner*
- Buletin
- Pernyataan Komitmen yang ditandatangani bersama, diperbanyak dan dibingkai serta didistribusikan ke seluruh Unit Kerja dan Cabang
- *Jingle*
- Iklan di koran

Untuk mewujudkan perilaku Insan Jasa Marga yang berlandaskan etika bisnis, terdapat sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan, antara lain melalui:

1. Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris serta Karyawan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap langkah Perseroan, yang tertuang dalam Pakta Integritas yang diperbaharui setiap awal tahun.
2. Keteladanan Pimpinan dengan memberi contoh sikap dan perilaku yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan Perseroan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Upaya penegakan Pedoman Perilaku dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Insan Jasa Marga yang diperbaharui setiap tahun.
2. Sosialisasi melalui media internal perusahaan (Berita Jalan Tol dan Info Tol).
3. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan tingkat AVP.
4. Pelaporan Gratifikasi kepada KPK dan kerja sama program.
5. Pelaporan Gratifikasi kepada KPK dan kerjasama Program Pengendalian Gratifikasi dengan KPK.
6. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Jasa Marga di Departemen Governance seksi GCG dan Capital Market Compliance.
7. Iklan larangan Gratifikasi di media massa dan website.

Setiap Insan Jasa Marga telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen penerapan GCG dalam operasional Perseroan. Persentase penandatanganan komitmen code of conduct oleh Insan Jasa Marga adalah sebanyak 100%.

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

Setiap Insan Jasa Marga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan yaitu Keputusan Direksi No. 79/KPTS/2014 tentang Pembinaan Karyawan.

- Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Direksi dan Dewan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.

TABEL TINGKAT HUKUMAN DAN SANKSI

Tingkat Hukuman	Jenis Sanksi
Hukuman Displin Ringan	Surat Peringatan Pertama
Hukuman Displin Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Peringatan Kedua • Surat Peringatan Ketiga
Hukuman Displin Berat	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

- Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
- Sanksi bagi mitra kerja atau stakeholders lain yang melakukan pelanggaran adalah sesuai ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Selama tahun 2017, terdapat 1 (satu) pelanggaran Kode Etik dan pengenaan sanksi atas pelanggaran Kode Etik di Perseroan berupa Pemutusan Hubungan Kerja.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

PROGRAM MSOP/ESOP JASA MARGA

Di Jasa Marga tidak terdapat program MSOP/ESOP, namun Perseroan memiliki Program Penjatahan Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation – ESA*). Tujuan utama program ini adalah agar karyawan memiliki *sense of belonging* yang dapat memacu produktifitas kerja, sehingga berdampak pada kinerja korporasi secara keseluruhan dan bermuara pada peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh para stakeholder.

Program ESA terdiri dari:

1. Saham Bonus
Komisaris (selain Komisaris Independen), Direksi dan seluruh karyawan tetap Jasa Marga yang memenuhi kriteria tertentu menerima Saham Bonus pada saat Penawaran Umum Perdana sebesar ekuivalen dengan satu bulan gaji bulan Juni 2007. Jasa Marga mengantisipasi untuk memberikan sekitar 11.862.000 saham di dalam skema Saham Bonus yang diberikan kepada Komisaris non Independen, Direksi dan karyawan masing-masing sebesar 1,7% dan 98,3%. Saham Bonus tersebut tidak dapat dijual maupun dipindahtangankan selama tiga tahun (periode lock up).
2. Saham Jatah Pasti
Selain pemberian Saham Bonus, peserta diberikan kesempatan untuk membeli Saham Jatah Pasti pada saat Penawaran Umum Perdana. Jumlah Saham Jatah Pasti adalah sekitar 192.138.000 saham. Untuk pemesanan Saham Jatah Pasti dilakukan penjatahan secara proporsional berdasarkan gaji bulanan karyawan dan dilakukan beberapa pembatasan tertentu.

JUMLAH SAHAM ESA

Sesuai RUPS Luar Biasa pada tanggal 12 September 2007, pemegang saham menyetujui rencana Program Penjatahan Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation – ESA*), mengacu pada peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 yang memberikan kesempatan bagi karyawan, manajemen dan pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan Perseroan, untuk memiliki maksimum 10% dari saham yang ditawarkan kepada publik (atau sebanyak 204.000.000 lembar).

JANGKA WAKTU ESA

Sesuai dengan ketentuan, salah satu program ESA, yaitu Saham Bonus tidak dapat dijual maupun dipindahtangankan selama 3 (tiga) tahun (periode lock up).

PERSYARATAN KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG BERHAK

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 182.1/KPTS/2007 tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dalam Proses Privatisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., peserta program ESA adalah Karyawan Tetap, Direksi, Dewan Komisaris yang bukan Komisaris Independen, Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan, dan Staf Sekretaris Direksi Perseroan yang tercatat dalam Administrasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2007.

HARGA EXERCISE

Karena merupakan Program ESA, maka tidak ada harga exercise. Harga saham pada saat IPO adalah sebesar Rp 1.700 per lembar saham.

Kepemilikan Saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan sampai dengan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Bab Saham JSMR dan Obligasi Jasa Marga.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Jasa Marga dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk terus menyempurnakan implementasi GCG, pelanggaran terhadap implementasi GCG dan *Code of Conduct* harus dihindari oleh segenap Insan Jasa Marga. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki *Whistleblowing System* sebagai media penyampaian pelaporan pelanggaran terhadap implementasi GCG dan *Code of Conduct* Perseroan.

Perseroan telah menyediakan sarana *whistleblowing system* JASA MARGA AMANAH yang dapat digunakan oleh seluruh Insan Jasa Marga maupun pihak eksternal sejak tanggal 16 Januari 2013. Pengelolaan *whistleblowing system* Perseroan dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Direksi No. 09/KPTS/2013 tanggal 13 Januari 2013 tentang *Whistleblowing System* PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan Keputusan Direksi No. 10/KPTS/2013 tanggal 13 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Setiap laporan yang masuk akan dipelajari, diklasifikasikan dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan mendalam berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Keputusan terhadap terbukti/tidaknya pelaporan tersebut akan dibuat dan diambil berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan.

Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Perseroan tidak akan mentolerir setiap pelanggaran terkait dengan integritas.

PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan suatu mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran yang dilakukan secara rahasia yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan Perseroan. Pelaporan

ditujukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh Komisi Pelaporan Pelanggaran yang dibantu oleh Pengelola Administrasi Sistem Pelaporan Pelanggaran yaitu PT Deloitte Konsultan Indonesia yang terpilih melalui proses pengadaan barang/jasa di Perseroan.

TABEL KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

No.	Susunan Anggota	Kedudukan dalam Tim
1	Head of Internal Audit	Ketua Merangkap Anggota
2	Corporate Secretary	Sekretaris Merangkap Anggota
3	VP Legal	Anggota
4	GM Human Capital Services	Anggota
5	VP Risk and Quality Management	Anggota

LANDASAN PENYUSUNAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Keinginan Perseroan untuk terus menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh lingkungan Perseroan, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi.
2. Sebagai komitmen Perseroan untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab.
3. Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perseroan.

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Maksud, Tujuan dan Manfaat penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) di Perseroan adalah:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*).
3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.

4. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) di internal Perseroan disampaikan melalui berbagai media seperti buletin internal, poster, sosialisasi etika maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi dilakukan melalui website Perseroan dan pengiriman surat edaran/memo.

PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TAHUN 2017

1. Penerapan *Whistleblowing System* sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Sosialisasi *Whistleblowing System* melalui cetak buku saku *Whistleblowing System* dan media internal Perseroan.
3. Evaluasi penerapan *Whistleblowing System* di Perseroan.
4. Penyusunan program tindak lanjut *Whistleblowing System* untuk tahun 2017 oleh Tim Pengelolaam *Whistleblowing System*.

BAGAN SARANA PELAPORAN PELANGGARAN



+62 21 23 50 7022



0811 1255 550



+62 21 2350 7023



<http://jasamarga.tipoffs.asia>



jasamarga@tipoffs.asia



P.O Box 2332, JKP 10023

RUANG LINGKUP WHISTLEBLOWING SYSTEM

Ruang Lingkup Pelaporan Pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh *Whistleblowing System* adalah tindakan yang dapat merugikan Perseroan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perseroan
3. Pemerasan
4. Perbuatan curang
5. Benturan Kepentingan
6. Gratifikasi

SARANA PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan ini disampaikan melalui salah satu di antara cara berikut:

Khusus untuk Pelaporan melalui sarana telepon dan SMS, maka waktu Pelaporan secara *live* adalah pukul 07.00 WIB s.d. 21.00 WIB.

Pelaporan yang masuk di luar waktu tersebut, akan dialihkan ke *voice mail*.

MEKANISME PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

Mekanisme penerimaan pelaporan pelanggaran dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

BAGAN MEKANISME PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN



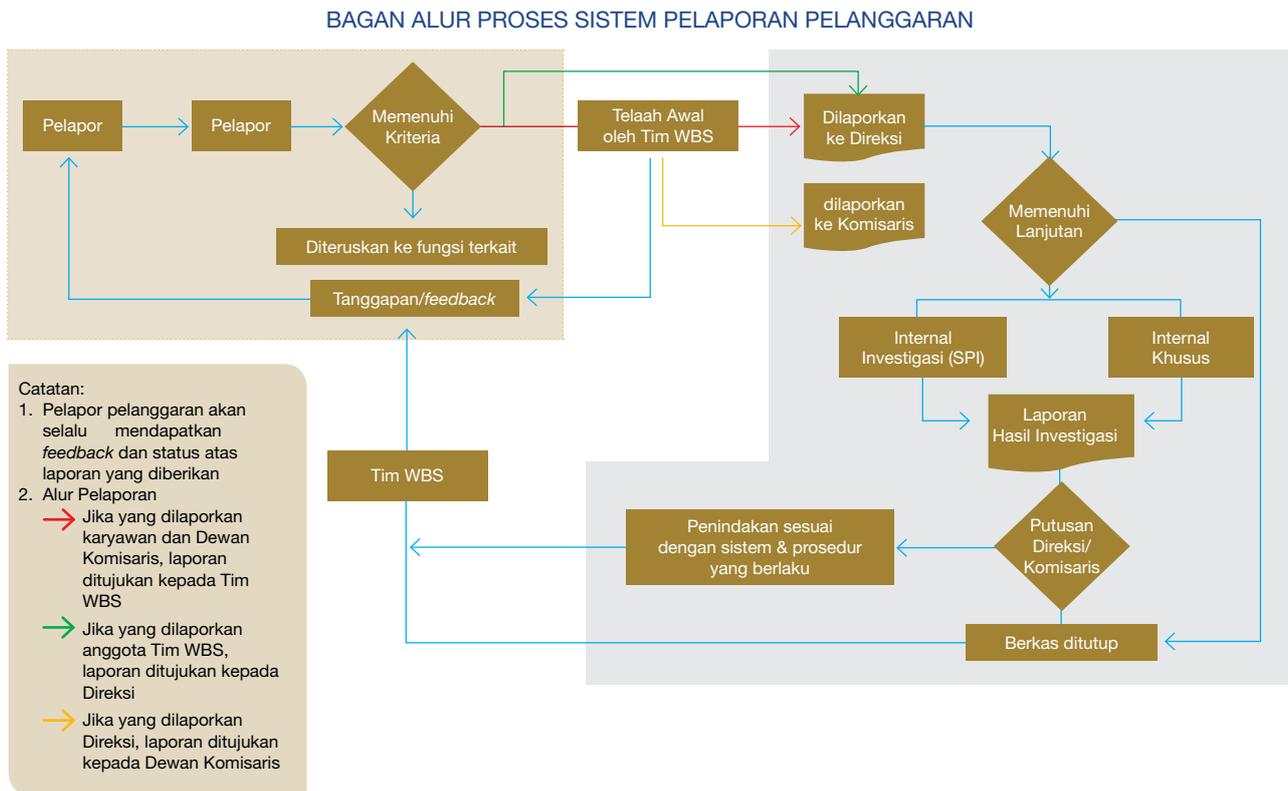
ALUR PROSES SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Jika dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan lengkap, Komisi Pelaporan Pelanggaran melakukan pemilahan data dan memutuskan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyelidikan. Jika keputusannya adalah cukup bukti, maka laporan tersebut akan ditingkatkan statusnya ke tahap penyelidikan.

Laporan yang tidak terbukti akan dikembalikan kepada pelapor. Namun apabila terbukti, Komisi Pelaporan Pelanggaran akan melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Direksi. Laporan yang berkaitan dengan jajaran manajemen di bawah Direksi disampaikan dalam bentuk surat dan ditujukan kepada Direktur Utama, sedangkan laporan-laporan yang berkaitan dengan Direksi akan ditujukan kepada Dewan Komisaris.



Alur proses Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Perseroan menyediakan fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, *email*) yang independen, bebas, dan rahasia bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan yang aman. Selain itu, WBS juga menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor dan anggota keluarga atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Informasi pelaksanaan tindak lanjut laporan akan disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang identitasnya lengkap.

IMPLEMENTASI WHISTLEBLOWING SYSTEM TAHUN 2017

Selama tahun 2017, terdapat pelaporan pelanggaran sebanyak 12 laporan. Dari seluruh laporan pelanggaran yang masuk, sebanyak 12 laporan atau seluruhnya telah ditindaklanjuti sampai dengan proses akhir (status selesai atau *closed*).

TABEL JUMLAH PELAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2017 MELALUI SARANA WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sarana WBS	Jumlah	
	2016	2017
Telepon	1	-
SMS	5	5
Faksimili	-	-
Situs Web	2	4
Kotak Pos	-	-
Surat Elektronik	7	3
Total	15	12

KONSISTENSI PENERAPAN GCG

PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP SELURUH PEMEGANG SAHAM

Jasa Marga menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Jasa Marga juga memberikan perlakuan yang adil terhadap saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktik-praktik *insider trading* dan *self-dealing*, dan mengharuskan Dewan Komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Di samping itu Jasa Marga mengakui hak-hak *stakeholders*, seperti ditentukan dalam Undang Undang, dan mendorong kerja sama yang aktif antara Perseroan dengan para *stakeholders* tersebut.

Jasa Marga menjamin bahwa dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham berhak memperoleh perlakuan yang sama dan kedudukan yang seimbang dalam menyuarakan pendapatnya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang penting dan strategis sesuai dengan jumlah dan jenis saham yang dimiliki, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan self-assessment GCG tahun 2017, pada aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, Perseroan memperoleh nilai sebesar 8,703 dengan tingkat pemenuhan 96,70%.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kebijakan Perseroan dalam menerapkan Pengadaan Barang dan Jasa tertuang dalam Keputusan Direksi No. 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan perubahannya yaitu Keputusan Direksi No. 180/KPTS/2016 tanggal 08 November 2016 dan Keputusan Direksi No. 210/KPTS/2016 tanggal 16 Desember 2016. Sebagai revisi dari peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Direksi No. 15/KPTS/2009 dan turunannya, kebijakan ini mengatur pengguna barang dan jasa, pengelola pengadaan barang dan jasa, pengelola kontrak pengadaan barang dan jasa, pengelola penyedia barang dan jasa, pengelola material, tim pengadaan, dan pejabat berwenang serta penyedia barang dan jasa sesuai dengan tugas, fungsi,

hak dan kewajiban serta peran para pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Perubahan kebijakan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa seiring dengan berjalannya proses pelaksanaan terhadap pedoman dimaksud dan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan pihak-pihak terkait, terutama terhadap hal-hal yang belum diatur dalam pedoman dimaksud, sehingga Perseroan perlu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perseroan.

Kebijakan ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur dasar penunjukan langsung oleh Perseroan kepada Anak Perusahaan serta batas wewenang pemberian persetujuan ijin prinsip, di antaranya kepada General Manager Cabang untuk pengadaan jasa pemborongan sampai dengan nilai Rp 75 miliar, dan pengadaan barang/jasa dengan cara Pemilihan Langsung dengan nilai di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 700 juta.

Selain itu juga diatur pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu dapat dilakukan secara swakelola, yaitu yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Pengguna Barang/Jasa sebagai pejabat berwenang dalam proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.

Keputusan Direksi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam berbagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang demi mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, kompetitif, transparan adil dan wajar serta akuntabel.

Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan Perseroan dengan mempertimbangkan kualitas dan delivery time dari sumber yang tepat dengan total biaya terendah dan dilakukan melalui strategi, perencanaan, proses dan pengendalian pengadaan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Untuk mencapai sasaran utama Pengelolaan Rantai Pasokan yaitu menjamin terlaksananya kegiatan usaha serta penciptaan nilai tambah (*value creation*) dan peningkatan

daya saing Perseroan, Perseroan mempunyai kebijakan manajemen sebagai berikut:

- a. *Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*
- b. *Pengelolaan kontrak Pengadaan Barang dan Jasa*
- c. *Pengelolaan Penyedia Barang dan Jasa*

Kebijakan pengadaan barang dan jasa di Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya No. PER-15/MBU/2012 yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan dana selain dana dari APBN/APBD.

Etika Perseroan dalam Penyediaan Barang dan Jasa

Perseroan melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip kompetitif, transparan, adil, wajar dan akuntabel. Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan penyedia barang dan jasa antara lain:

- Penentuan penyedia barang dan jasa harus didasarkan pada mutu produk, layanan purna jual, garansi, prestasi dan rekam jejak dengan mengutamakan kepentingan Perseroan.
- Menghormati hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian perikatan dan ketentuan perundang undangan.
- Menjalin komunikasi yang terbuka selama proses pelaksanaan pengadaa hingga terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
- Melakukan evaluasi atas penyedia barang dan jasa serta memberikan tindakan tegas kepada penyedia barang dan jasa yang berperilaku tidak etis.

Penerapan e-Procurement

Untuk mencegah timbulnya praktik KKN, selain perlu perbaikan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan akuntabel, perlu pula dicari alternatif lain yang memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), terutama prinsip keterbukaan (transparency) serta prinsip keadilan (fairness).

Di dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Negara BUMN telah merilis Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Peraturan tersebut secara eksplisit menjelaskan Tata Kelola Teknologi Informasi. Dengan adanya peraturan tersebut, BUMN diwajibkan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam aspek bisnis dan pengelolaan Perseroan pada semua jajaran Perseroan dengan dukungan IT.

Sebagai wujud komitmen penerapan GCG dan Pakta integritas, Jasa Marga terus konsisten hingga saat ini untuk mengelola proses pengadaan dan kemitraan dengan menggunakan sistem e-Tendering melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/e-Procurement yang meminimalkan kontak fisik antara pemasok/mitra dengan panitia karena keseluruhan proses tender dan negosiasi telah berbasis komputer sehingga berlangsung adil dan transparan.

e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sesuai dengan keputusan Direksi No. 143/KPTS/DIR/2013 tanggal 25 Agustus 2014 yang telah diperbaharui dengan keputusan Direksi No. 160/KPTS/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., melalui Divisi General Affairs dibuat LPSE dengan bantuan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengadaan secara elektronik (e-Procurement) bagi Perseroan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dengan harga dan biaya transaksi lebih murah, dan siklus pengadaan yang lebih pendek. Dengan demikian menghindari proses korupsi, serta meningkatkan produktivitas kerja.

Beberapa manfaat yang telah diperoleh antara lain kecepatan proses tender, penetapan calon peserta tender secara elektronik sesuai persyaratan yang ditentukan, pemilihan pemenang secara elektronik dan manfaat lainnya terkait

dengan kualitas proses yang semakin baik, kewajaran harga, keadilan, transparansi dan mencegah terjadinya intervensi.

Pakta Integritas Mitra Kerja

Sebagai bentuk komitmen penerapan GCG dalam pengadaan barang dan jasa, Perseroan mewajibkan vendor dan mitra kerja untuk menandatangani Pakta Integritas dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa.

Pakta Integritas Insan Jasa Marga

Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, Perseroan juga mewajibkan Insan Jasa Marga untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk tidak adanya benturan kepentingan dan sebagai wujud transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Dalam rangka memenuhi Undang Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, melalui Surat Keputusan Direksi No. 43/KPTS/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Perusahaan, pada dasarnya Jasa Marga telah menerapkan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi:

1. Dewan Komisaris.
2. Direksi.
3. Corporate Secretary/Head/Vice President/General Manager/Pemimpin Proyek atau yang setingkat.
4. Assistant Vice President/Senior Manager/Deputy General Manager/Coordinator/Kepala Bagian.
5. Jabatan fungsional satu tingkat di bawah Direksi.
6. Jabatan di Anak Perusahaan, Dana Pensiun Jasa Marga, dan Perusahaan Asosiasi.
7. Pegawai Aktif Jasa Marga yang ditempatkan sebagai Direksi/Komisaris pada Anak Perusahaan.

Selain itu Jasa Marga juga telah menunjuk General Manager Human Capital Services sebagai Koordinator Pengelolaan LHKPN Jasa Marga yang bertanggung jawab terhadap pengurusan LHKPN secara keseluruhan, meliputi pemantauan pengisian dan penyampaian formulir LHKPN ke KPK dan Kementerian BUMN serta pemeliharaan aplikasi LHKPN.

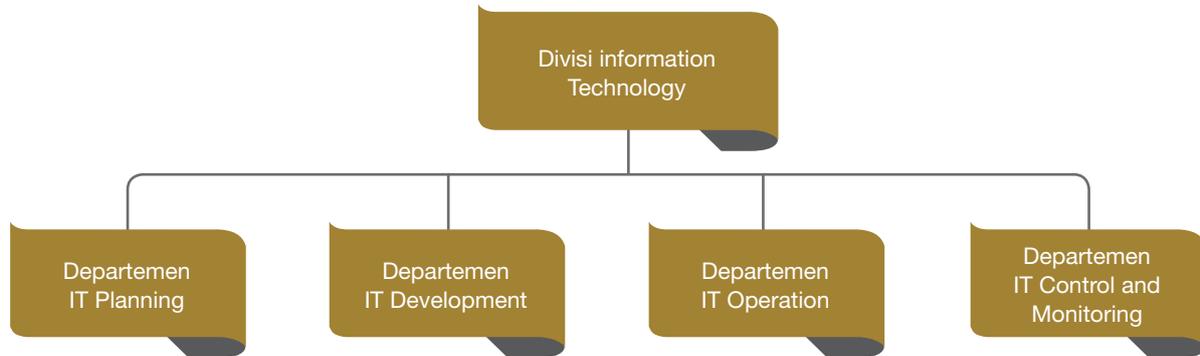
Tugas Koordinator LHKPN adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan KPK dalam pendistribusian formulir, pemantauan pengisian dan penyampaian formulir LHKPN.
2. Menyampaikan daftar nama Wajib Laport yang masuk dalam kriteria wajib menyampaikan LHKPN serta melaporkan kepada KPK dan Kementerian BUMN setiap terjadi promosi, pergantian/mutasi atau mengakhiri jabatan.
3. Menyampaikan daftar tambahan formulir LHKPN serta rencana pendistribusiannya kepada KPK sesuai dengan kebutuhan.
4. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pengisian formulir LHKPN dan perubahannya kepada Wajib Laport di lingkungan Perseroan.
5. Menyampaikan formulir LHKPN kepada setiap Wajib Laport dan memberikan penjelasan tata cara pengisian LHKPN Wajib Laport di lingkungan Perseroan berdasarkan ketentuan dan pedoman dari KPK.
6. Menyampaikan formulir LHKPN yang telah diisi oleh Wajib Laport beserta kelengkapannya kepada KPK cq. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dan salinan LHKPN kepada pejabat yang berwenang di Kementerian BUMN.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Jasa Marga berkomitmen untuk senantiasa menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan kualitas dan standar yang tinggi. Untuk mendukung penerapan GCG dalam kaitannya dengan teknologi informasi, Perseroan menyadari perlunya penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*) ke dalam proses bisnis Perseroan. Mengacu pada Keputusan Direksi No. 156/KPTS/2016, saat ini kedudukan Teknologi Informasi di Perseroan sudah mengalami transformasi tidak hanya sebagai pendukung untuk mencapai efisiensi dan efektivitas proses bisnis namun sebagai inovasi untuk menjaga ketahanan bisnis dan meningkatkan pendapatan Perseroan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIVISI INFORMATION AND TECHNOLOGY



Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/2013 mengenai Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi (TI) Badan Usaha Milik Negara, maka Jasa Marga telah menetapkan Kebijakan Tata Kelola TI sebagai panduan dalam implementasi Tata Kelola TI yang menyeluruh dan untuk mengoptimalkan kontribusi TI dalam pencapaian Sasaran Jangka Panjang Perusahaan. Selain Peraturan Menteri BUMN, kebijakan Tata Kelola TI mengacu pada standar internasional COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) dan ITIL (Information Technology Infrastructure Library) yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

BAGAN KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI



Dengan disahkannya berbagai Kebijakan Tata Kelola TI, maka Direksi telah melaksanakan amanat Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Direksi dapat menetapkan Tata Kelola Teknologi Informasi yang efektif".

Prinsip-prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi

Prinsip-prinsip Tata Kelola TI Perseroan pada Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi adalah:

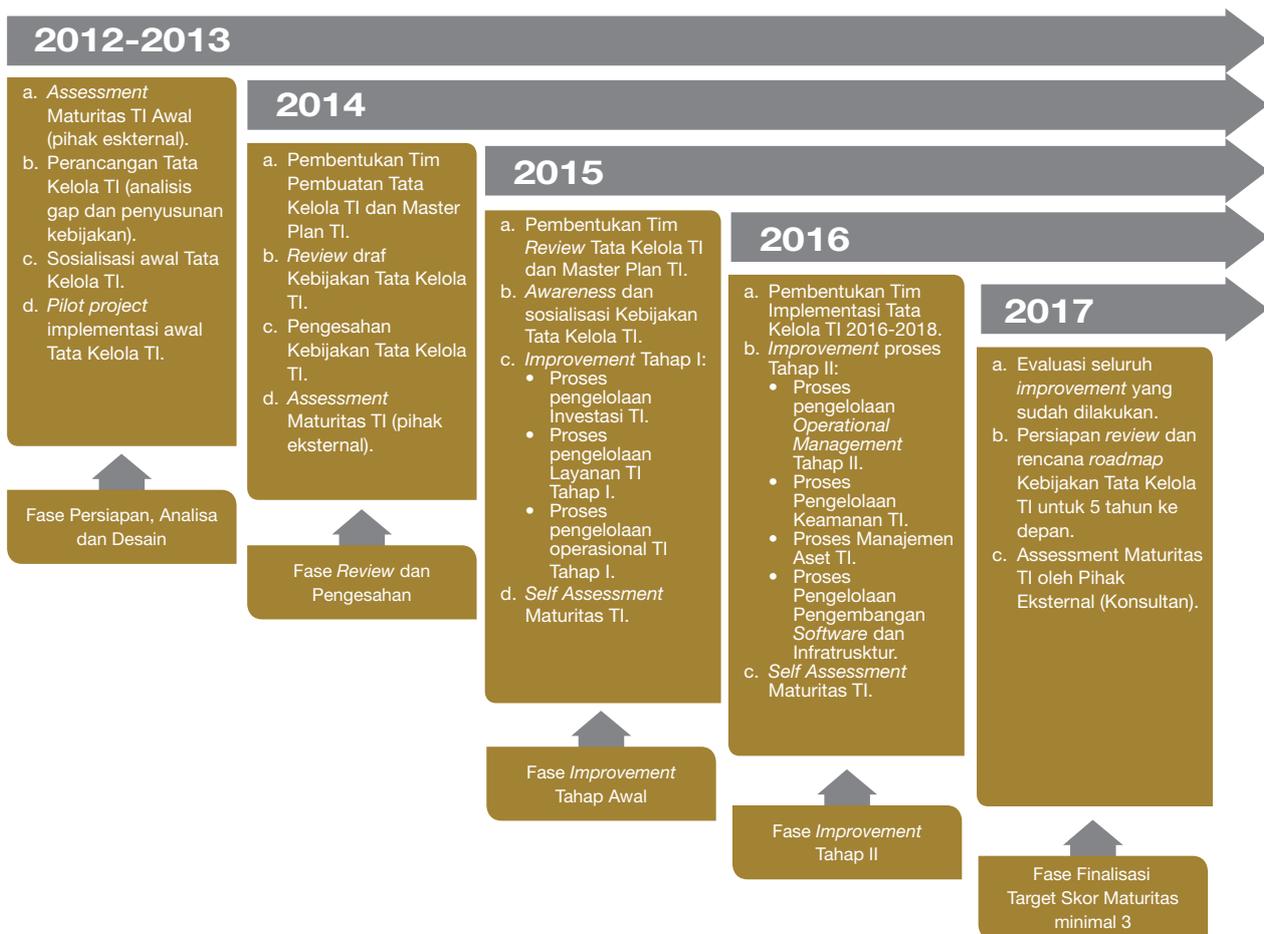
1. Perencanaan TI yang terarah dan sistematis sehingga terjadi kesesuaian antara pengembangan dan implementasi TI dengan Tujuan Bisnis Perseroan.
2. Investasi TI sejalan dan selaras dengan strategi Perseroan dengan memperhitungkan kapabilitas TI sehingga memberikan keuntungan optimal.
3. Implementasi TI yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan mutu dan risiko sesuai peraturan Perseroan.
4. Pengelolaan operasional TI yang efektif dan efisien.
5. Pengendalian yang konsisten terhadap kinerja operasional TI dan kepatuhan terkait peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Perbaikan berkelanjutan terhadap seluruh dimensi pengelolaan TI.

Prinsip-prinsip tersebut akan diterapkan lebih lanjut ke aktivitas pengelolaan TI serta pelaksanaan roadmap pengembangan TI sesuai Master Plan TI melalui berbagai pedoman dan standar yang dituangkan dalam Keputusan VP Information Technology dengan pengawasan Komite Pengarah TI.

Roadmap Tata Kelola Teknologi Informasi

Target yang ingin dicapai oleh Perseroan dari penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi adalah proses perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan TI dilihat dari 4 siklus utama proses TI yaitu Perencanaan, Pengembangan atau Akuisisi, Pengoperasian serta Pemantauan dan Evaluasi. Indikator dari keberhasilan penerapan Tata Kelola TI adalah Skor Maturitas TI, dimana pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/2013 dipersyaratkan target Skor Maturitas TI dalam 5 tahun ke depan adalah minimal 3.

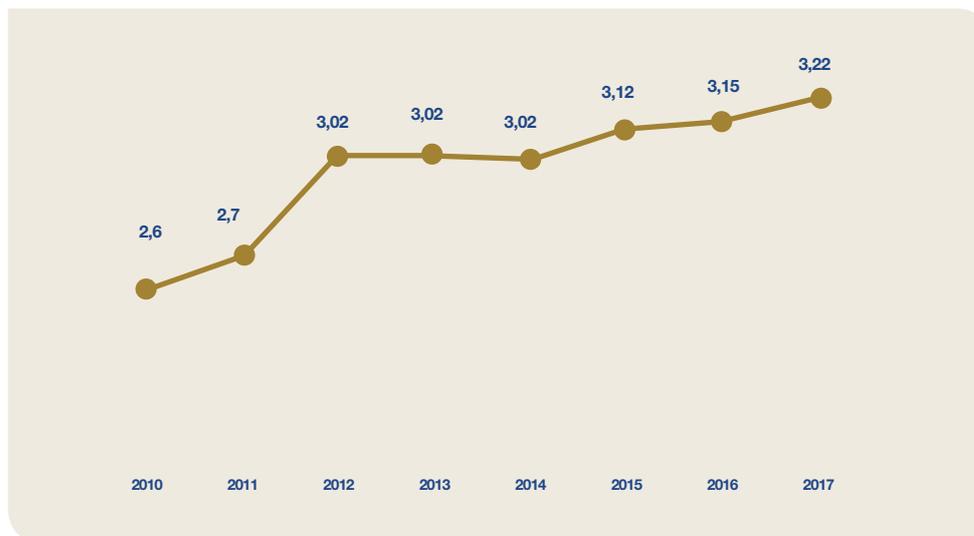
BAGAN ROADMAP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI



Assessment Maturity Level Tata Kelola Teknologi Informasi

Pengukuran Maturity Level Tata Kelola TI merupakan mekanisme untuk mengukur tingkat penerapan Tata Kelola TI dengan keluaran berupa indeks maturitas TI dengan rentang level dari 0 (non eksis) – 5 (optimal) yang menunjukkan kualitas pelaksanaan dari masing-masing pengendalian di dalam organisasi Perseroan. Pada pengukuran tahun 2017 oleh pihak eksternal (konsultan), Jasa Marga telah mencapai nilai 3,22 (meningkat dari tahun 2016 dengan skor 3,15).

GRAFIK MATURITY LEVEL TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI



Master Plan Teknologi Informasi

Sesuai dengan Keputusan Direksi No. 209/KPTS/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Master Plan TI Tahun 2014-2018 disebutkan bahwa Master Plan TI dijadikan panduan bagi Perseroan dalam melakukan investasi dan implementasi di bidang TI yang meliputi kebutuhan arsitektur, infrastruktur, dan aplikasi yang dibutuhkan agar sesuai dengan Sasaran Jangka Panjang Perusahaan. Master Plan TI ini disusun berdasarkan Panduan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi BUMN yang ada pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013. Berikut diberikan program yang dibagi berdasarkan strategi bisnis Perseroan.

TABEL PROGRAM KERJA MASTER PLAN TI JASA MARGA 2014-2018

Bidang	Program Kerja
Strategi Pengembangan Bisnis Jalan Tol (Growth)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Warehouse. 2. Electronic Toll Collection. 3. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja. 4. Implementasi ERP Modul Keuangan di Anak Perusahaan.
Strategi Pengoperasian Jalan Tol (Operational Excellent)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Electronic Toll Collection. 2. Implementasi Asset Management. 3. Integrasi aplikasi Toll Maintenance dengan ERP. 4. Integrasi Toll Collection System dengan ERP. 5. Peningkatan sistem Customer Service. 6. Peningkatan sistem Call Center. 7. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja. 8. Peningkatan pelayanan transaksi non tunai.

Bidang	Program Kerja
Strategi Pengelolaan Keuangan (Financial Sustainability)	<ol style="list-style-type: none"> 1. System Analysis and Program Development (SAP). 2. Implementasi Asset Management. 3. Pendefinisian dan standarisasi data. 4. Integrasi aplikasi Toll Maintenance dengan ERP. 5. Integrasi Toll Collection System dengan ERP. 6. Integrasi Enterprise Management System, Single Sign-on & Security. 7. Implementasi business intelligence. 8. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja. 9. Implementasi ERP Modul Keuangan di Anak Perusahaan. 10. Peningkatan pelayanan transaksi non tunai.
Strategi Organisasi & SDM (Organization & Human Capital)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian transformasi organisasi TI. 2. Pengembangan dan pengelolaan SDM TI. 3. Implementasi e-Procurement. 4. Implementasi knowledge management. 5. Peningkatan implementasi infrastruktur TI (integrasi server terpusat dan firewall). 6. Integrasi Enterprise Management System, Single Sign-on & Security. 7. Peningkatan ERP-HRMS. 8. Implementasi business intelligence. 9. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja.
Strategi Pengembangan Bisnis Lain (Business Diversification)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja. 2. Data Warehouse.
Kepatuhan dan Manajemen Risiko (GCG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja, audit dan tata kelola TI. 2. Pendefinisian dan standarisasi data. 3. Implementasi Corporate Governance System. 4. Integrasi Enterprise Management System, Single Sign-on & Security. 5. Pengembangan keamanan sistem (ISO 27000). 6. Business Continuity Plan. 7. Implementasi content management. 8. Implementasi business intelligence. 9. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja.

Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee)

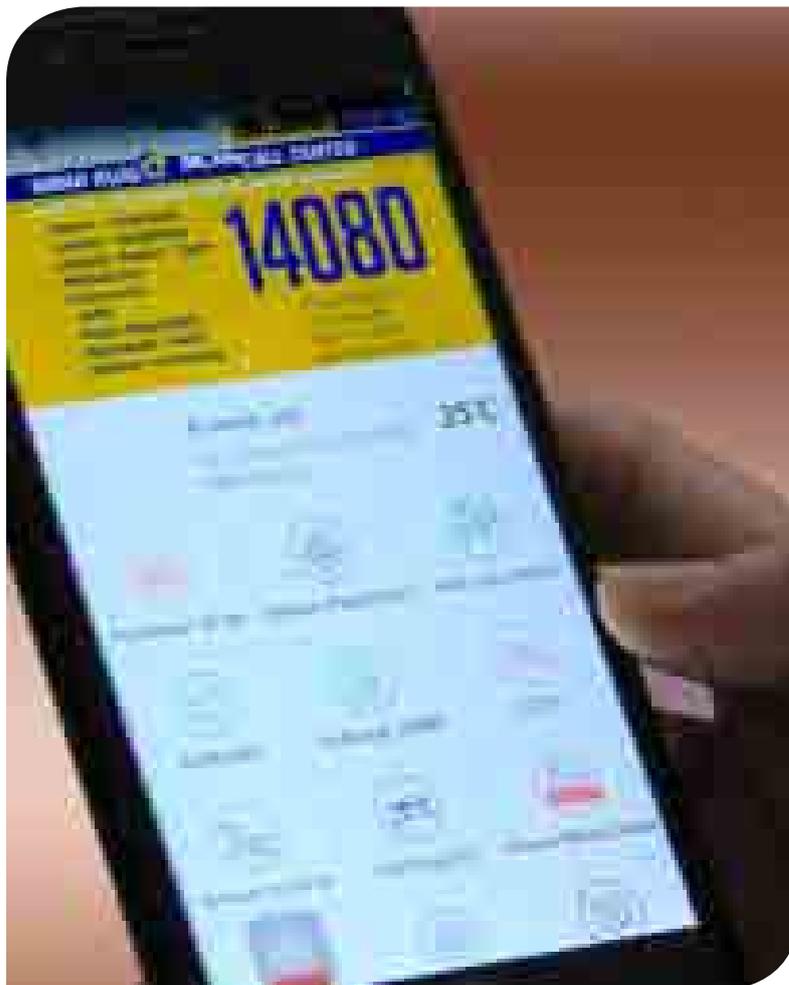
Mengacu pada Keputusan Direksi No. 156/KPTS/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyebabkan terjadinya perubahan terhadap anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *IT Steering Committee* yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyelaraskan Strategi TI dan Bisnis (Strategic Alignment), melalui arahan strategis dan keputusan terkait program implementasi TI/solusi TI yang sejalan dengan strategi, tujuan dan prioritas bisnis Perseroan.
2. Memastikan pengelolaan TI Perseroan berjalan optimal sesuai dengan Master Plan dan Tata Kelola TI sehingga dapat memberikan nilai/manfaat yang ditetapkan (Value Delivery).

3. Mengoptimalkan sumber daya TI (Resource Management) untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas pemanfaatan infrastruktur, aplikasi, human capital dan informasi.
4. Menjaga aset TI dari kejadian yang tidak diinginkan (Risk Management) demi kelancaran operasi bisnis.
5. Melakukan pengawasan terhadap proses dan kinerja TI (Performance Measurement) secara periodik

IT Steering Committee diharapkan dapat menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Tata Kelola Teknologi Informasi Perseroan. Susunan keanggotaan IT Steering Committee ini adalah sebagai berikut:

BAGAN KEANGGOTAAN IT STEERING COMMITTEE



PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memudahkan pengguna jalan tol untuk menerima informasi melalui layanan aplikasi JMCARe yang tersedia pada smartphone. JMCARe merupakan aplikasi "Smart Assistance" yang dapat memberikan informasi tentang rute perjalanan, kondisi lalu lintas, lokasi rest area/gerbang tol, dan dapat melakukan pemesanan mobil derek (jika dibutuhkan).

AUDITOR EKSTERNAL

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Audit laporan keuangan Perseroan pada periode tahun buku 2009, 2010 dan 2011 dilakukan oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan. Pada 3 (tiga) periode tahun buku berikutnya (2012, 2013 dan 2014), audit laporan keuangan Perseroan dilakukan oleh KAP RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto. Audit laporan keuangan Perseroan pada tahun buku 2015, 2016 dan 2017 dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited).

TABEL AUDITOR EKSTERNAL PERSEROAN 2012-2017

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Kontrak (Rp)	Partner Pelaksana
2012	RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	1.622.500.000	Saptoto Agustomo
2013	RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	1.245.750.000	Saptoto Agustomo
2014	RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	1.452.000.000	Saptoto Agustomo
2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	1.925.000.000	E. Batara Manurung
2016	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	1.925.000.000	E. Batara Manurung
2017	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	1.925.000.000	Said Amru

PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL DAN REKOMENDASI KOMITE AUDIT

Dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan tahun buku 2017, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited). Penunjukan KAP tersebut adalah atas rekomendasi Komite Audit dan telah melalui proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan.

Proses penunjukan Auditor Eksternal dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik.
2. Komite Audit melaporkan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2017 kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2017.
4. Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik.

Dalam RUPS Tahunan pada tanggal 15 Maret 2017, atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris mengusulkan untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2017, dan mendapat persetujuan dari RUPS.

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tersebut, Dewan Komisaris diberi kuasa untuk menetapkan biaya dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2017.

BIAYA DAN LINGKUP PEKERJAAN AUDIT

Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.925.000.000,- (satu miliar, sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) termasuk PPN dan belum termasuk Out of Pocket Expenses (OPE). Biaya tersebut sudah berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Lingkup Audit yang dilakukan KAP Purwanton, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) mencakup:

- Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Audit Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku untuk tahun buku 2017.
- Audit Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (PSA 62) untuk tahun buku 2017.

- Management representation letter (jika ada) dan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan audit umum/audit kepatuhan/ PKBL.

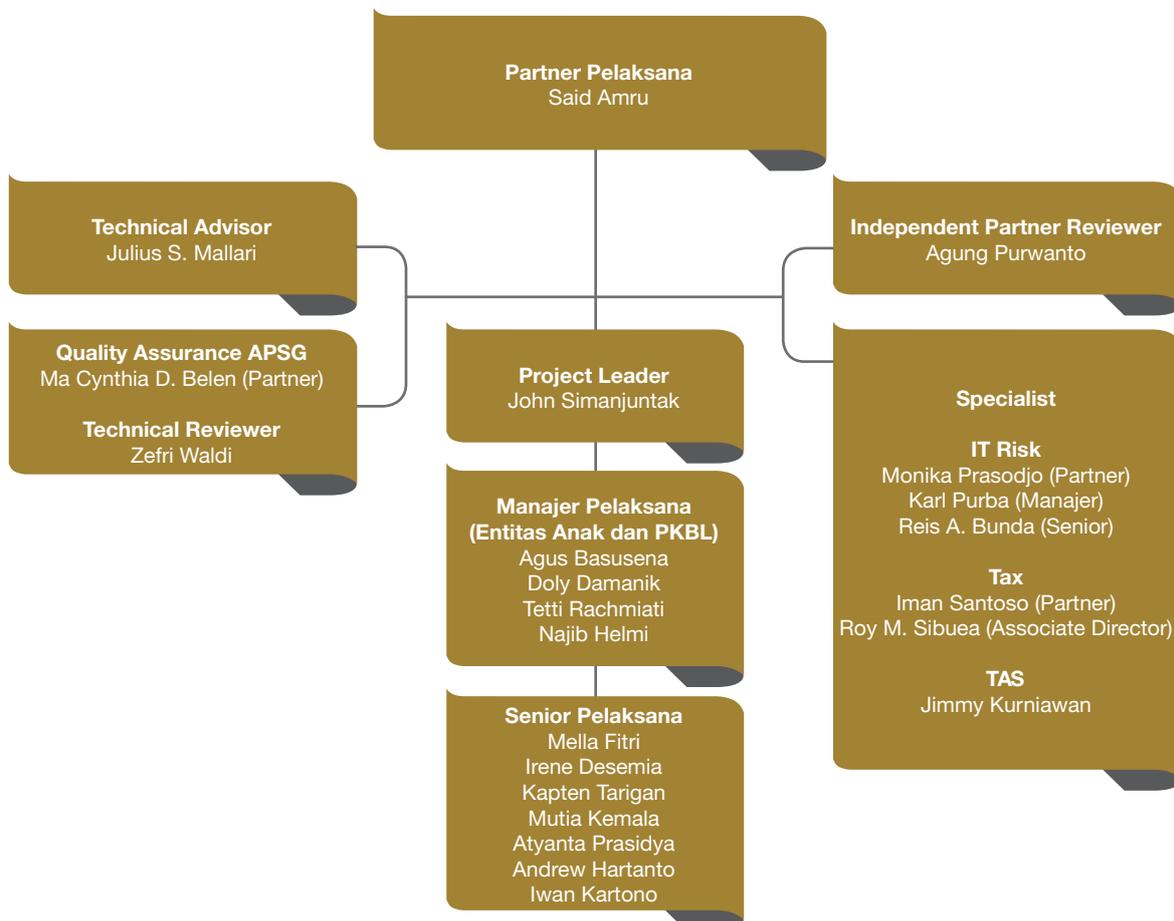
JASA LAIN

KAP Purwanton, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) sebagai pihak yang ditunjuk Perseroan sebagai Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain lingkup audit sebagaimana tersebut di atas. KAP Purwanton, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) telah menyelesaikan tugasnya secara independen sesuai standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

STRUKTUR TIM

Struktur Tim Auditor Eksternal Jasa Marga untuk periode tahun buku 2017 adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR TIM AUDITOR EKSTERNAL JASA MARGA TAHUN BUKU 2017



AKSES TERHADAP INFORMASI DAN DATA PERSEROAN

Perseroan senantiasa melakukan pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi. Selain itu, Perseroan juga terus berupaya memperkuat platform teknologi informasi untuk menjaga dan meningkatkan keandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui situs web www.jasamarga.com.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap keterbukaan informasi, Jasa Marga juga senantiasa melakukan pelaporan terhadap informasi dan fakta material kepada otoritas pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) baik melalui surat maupun melalui pelaporan elektronik. Jasa Marga juga secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi korporasi yang dilakukan melalui *press release*, dan publikasi tersebut dapat diunduh melalui situs web Jasa Marga.

Penyampaian informasi kepada pihak eksternal juga secara aktif dilakukan melalui beberapa saluran informasi Perseroan. Publikasi dari setiap informasi korporasi disampaikan melalui *press release*, *official statement*, *advertorial*, berita foto dan infografis di media massa, dan publikasi tersebut dapat diunduh melalui situs web Jasa Marga.

Untuk mengakomodir stakeholder lainnya, serta untuk pembaharuan informasi yang cepat, Jasa Marga juga telah membuka akun *official* pada beberapa media sosial, seperti Twitter @PTJASAMARGA untuk informasi lalu lintas yang *realtime*, dan untuk informasi lainnya terkait Perseroan, sejak bulan Juni 2017 Perseroan membuka akun Twitter @Official_JSMR, Instagram @official.jasamarga dan Facebook PT Jasa Marga – Persero Tbk. Sampai dengan Desember 2017, jumlah pengikut Twitter @PTJASAMARGA 267.642 akun dengan postingan sebanyak 1.050.000 post, jumlah pengikut @Official_JSMR 1.290 akun dengan 457 post dan jumlah pengikut Instagram @Official.jasamarga sebanyak 11.500 akun, dengan 271 post telah mendapatkan *impression* sebanyak 1.139.113.

Selain media massa dan media sosial, Jasa Marga juga telah memiliki aplikasi info lalu lintas yang *realtime* JMCARe yang dapat diakses melalui *smartphone*, dan telah dilengkapi pula dengan fitur *push notification*, dengan informasi rest area, gerbang tol, tarif dan *panic button* untuk informasi darurat.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi Corporate Secretary (M. Agus Setiawan) dan Investor Relations Department (Lisye Octaviana).

Akses terhadap informasi dan data Perseroan adalah sebagai berikut:

Telfon: (62-21) 841 3630, 841 3526
Faksimili: (62-21) 841 3540
Surat Elektronik: jsmr@jasamarga.co.id
sekper@jasamarga.co.id
investor.relations@jasamarga.co.id
Situs Web: www.jasamarga.com
Call Center: 14080 (24 jam)
Twitter: @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas)
@official_JSMR (untuk informasi umum lainnya)
Instagram: @official.jasamarga
Facebook: PT Jasa Marga – Persero Tbk
Aplikasi Mobile: JMCARe (dilengkapi fitur *push notifications*)



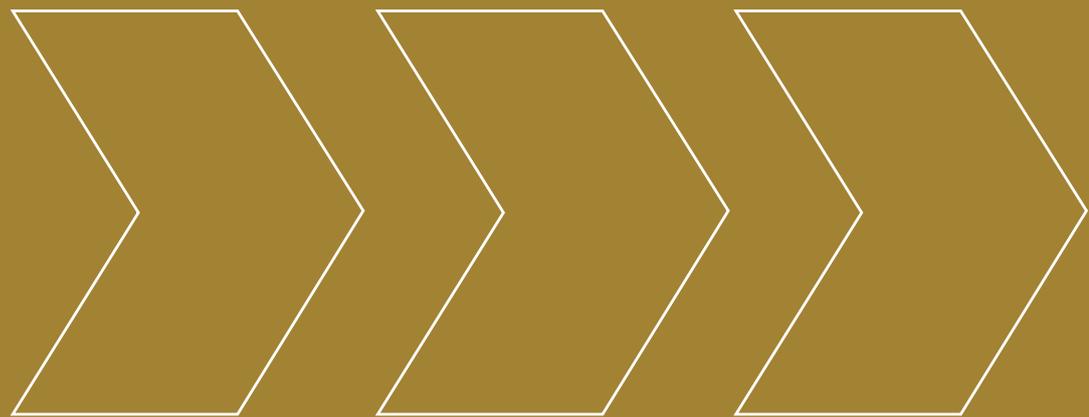


PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berkomitmen turut membangun Bangsa, hal ini terlihat dari partisipasi Jasa Marga dalam program Bedah Rumah Veteran, salah satu program BUMN Hadir Untuk Negeri, di Provinsi Bali, Rabu, 11 Oktober 2017.



10

TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN
LINGKUNGAN



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2017, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup program pelestarian lingkungan hidup, program di bidang ketenagakerjaan, keselamatan & kesehatan kerja, program pengembangan sosial dan kemasyarakatan (CSR), serta Program Kemitraan Masyarakat dan Pelanggan.

KOMITMEN JASA MARGA DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

Jasa Marga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Perseroan yakin dengan peningkatan kualitas program TJSL akan memberikan respon positif untuk pertumbuhan bisnis pada tahun-tahun mendatang.

Keberlanjutan program tanggung jawab sosial dan lingkungan senantiasa memerlukan inovasi dalam peningkatan kualitas program. Perseroan tidak berhenti dalam mengembangkan program baru yang dapat menjangkau masyarakat luas serta terus memperbaharui program yang telah memberikan dampak nyata bagi stakeholder.

Dengan berlandaskan pada itikad untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjalankan amanah dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan, Perseroan mengajak setiap insan Jasa Marga untuk menyingsingkan lengan mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN UMUM

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur, terutama sebagai operator jalan tol, Perseroan memiliki peran besar dalam pengembangan wilayah yang dilewati Jalan Tol Jasa Marga dari berbagai aspek, terutama dari sisi kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain pertumbuhan ekonomi wilayah, aspek lain yang juga menjadi perhatian besar perseroan adalah pada sisi sosial dan Budaya, baik internal Perseroan, maupun yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung keberlanjutan bisnis Perseroan, yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Perseroan terus melaksanakan aktivitas berkelanjutan sebagai tanggung jawab sosial Perseroan yang memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pada ketiga aspek di atas.

Sebagai wujud nyata, aktivitas tanggung jawab sosial Perseroan didasarkan pada triple bottom line, yaitu people, planet, dan profit, yaitu pengembangan tanggung jawab perseroan dalam tiga faktor besar, yaitu people, dimana perseroan bertanggung jawab dan menyusun program-program terpadu dalam merencanakan, mengembangkan, dan dan menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Planet, Perseroan mengambil langkah nyata dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan dengan program-program pelestarian lingkungan serta menyusun rencana kerja ramah lingkungan. Profit, segala aktivitas perseroan didasarkan pada visi dan misi perusahaan.

Pada tahun 2017, Perseroan menitikberatkan pada program edukasi mengenai jalan tol bagi stakeholder yang beragam. Sebagai landasan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perseroan mengacu kepada Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Di samping itu Perseroan juga tunduk kepada peraturan perundangan lainnya.

Dalam mewujudkan komitmennya, di sepanjang tahun 2017, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan TJSL yang mencakup program pelestarian lingkungan hidup, program di bidang ketenagakerjaan, kesehatan & keselamatan kerja, program pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang meliputi program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat, program bantuan bencana alam dan bantuan masyarakat, serta program peningkatan kepuasan pelanggan.

MANAJEMEN PEMANGKU KEPENTINGAN

Jasa Marga menyadari keberadaan pemangku kepentingan sebagai pihak yang memiliki pengaruh dan terpengaruh terhadap pencapaian tujuan Perseroan, serta mempunyai

ekspektasi dan kepentingan yang berbeda-beda di tiap-tiap wilayah operasi. Perseroan berharap dengan interaksi dan hubungan positif dapat memberikan *mutual benefit* antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menunjang keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, kemudian Jasa Marga menyusun kerangka hubungan dan pelibatan para pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Perseroan berupaya mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan dan mengelompokkannya ke dalam 10 kelompok pemangku kepentingan, yakni:

1. Pemegang Saham,
2. Kreditur,
3. Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, termasuk
4. instansi yang ada didalamnya,
5. Karyawan,
6. Pelanggan/Pengguna Jalan Tol,
7. Pesaing,
8. Mitra Usaha/Pemasok/Kontraktor,
9. Komunitas Masyarakat dan lembaganya,
10. Media massa

Analisis identifikasi pemangku kepentingan dilakukan melalui metode diskusi kelompok terarah (focus group

discussion, FGD), wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan untuk menganalisa kekuatan, pengaruh, legitimasi, isu dan kedalaman tingkat kepentingan pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Satuan analisis yang digunakan adalah lembaga atau kelompok yang telah didefinisikan sebagai pemangku kepentingan.

Jasa Marga secara berkelanjutan terus melakukan pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan, yang meliputi internal dan eksternal Perseroan. Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa Perseroan dapat mengetahui ekspektasi dan kepentingan mutakhir para pemangku kepentingan, lalu berupaya menyelaraskan program kerjanya sesuai dinamika yang terjadi.

Dari berbagai kegiatan interaksi dengan para pemangku kepentingan tersebut, Jasa Marga kemudian merealisasikan pola hubungan dan pembinaan dengan masing-masing kelompok kepentingan sesuai dengan topik-topik yang relevan. Pola pembinaan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pemangku kepentingan, demikian juga frekuensi pembinaan. Pola hubungan dan pembinaan disajikan dalam tabel berikut.

HUBUNGAN DAN PEMBINAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku Kepentingan	Basis Identifikasi	Topik Utama	Harapan Pemangku Kepentingan	Pendekatan Interaksi
Pelanggan	Ketertarikan	<ul style="list-style-type: none"> · Manajemen Keluhan pelanggan · Pusat pelayanan pelanggan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu jalan tol yang terjaga. 2. Perlengkapan dan keamanan bagi penggunaan jalan tol. 3. Pertolongan yang sigap pada kejadian kecelakaan. 4. Pelayanan yang melebihi harapan. 	<ul style="list-style-type: none"> · Penyediaan informasi kondisi lalu lintas kepada pelanggan. · Realisasi program pemeliharaan dan perbaikan kondisi jalan secara teratur. · Fasilitas akses layanan pada pelanggan dan · Pelaksanaan kegiatan Temu Pelanggan.
Pemegang saham dan investor	Tanggung jawab, Pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> · Pertanggung-jawaban kinerja Perseroan selama satu tahun · Pelaporan Kinerja operasi, keuangan dan sosial Perseroan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan meningkatkan nilai investasi melalui peningkatan kinerja Perseroan. 2. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham, mayoritas maupun minoritas. 3. Keterbukaan informasi untuk hal-hal yang substantial dan kejelasan arah pengembangan usaha 4. Penghormatan hak-hak pemegang saham sesuai UU, Peraturan, AD/ART. 	<ul style="list-style-type: none"> · RUPS · Investor road shows · Investor gathering · Project visit · Public Expose

Pemangku Kepentingan	Basis Identifikasi	Topik Utama	Harapan Pemangku Kepentingan	Pendekatan Interaksi
Pemerintah/ Regulator	Pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran kewajiban Perseroan kepada Negara Diskusi dan masukan terkait program dan rencana kegiatan Perseroan 	<ol style="list-style-type: none"> Hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan regulator. Jasa Marga dan segenap karyawannya tunduk dan mematuhi hukum, perundangan, Kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. Pemenuhan ketentuan LKHPN. Pemenuhan laporan berkala kepada regulator, termasuk kepada BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan Bipartit baik pemerintahan pusat maupun daerah. Dengar Pendapat DPR Kunjungan Kerja ke Lokasi Proyek Pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, retribusi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Karyawan	Ketertarikan	<ul style="list-style-type: none"> Kesepakatan kerja antara manajemen Perseroan dengan pegawai Penyelesaian masalah kepegawaian Kesempatan peningkatan kompetensi dan karir 	<ol style="list-style-type: none"> Kejelasan hak dan kewajiban. Pemberian paket remunerasi sesuai kinerja. Kesetaraan dalam jenjang karir dan remunerasi. Jaminan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Kenyamanan lingkungan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan penetapan perjanjian kerja bersama (PKB) melalui dialog dengan Serikat Karyawan. Pertemuan rutin antara karyawan dengan Manajemen Perseroan sebagai forum dialog langsung. Pengembangan kompetensi karyawan serta menyiapkan manajemen/ pemimpin Perseroan yang profesional. Pemberlakuan sistem manajemen SDM dan sistem insentif berbasis kinerja
Mitra Kerja/ Kontraktor (Vendor)	Pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan Perseroan Kinerja mitra kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Proses pengadaan secara fair dan transparan Seleksi dan evaluasi secara obyektif dalam penentuan pemenang kontrak jasa pembangunan/suplai barang Prosedur administrasi pengadaan yang akurat namun sederhana Penyelesaian pembayaran produk dan jasa yang tepat waktu. Hubungan saling menguntungkan/ Mutually beneficial growth. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan penawaran (tender) kontrak kerja secara terbuka dan transparan. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kontrak kerja vendor melalui pelaksanaan assessment secara berkala.

Pemangku Kepentingan	Basis Identifikasi	Topik Utama	Harapan Pemangku Kepentingan	Pendekatan Interaksi
Kreditor	Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Informasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> Kejelasan rencana pengembangan. Pembayaran kewajiban tepat waktu. Transparansi kondisi operasional dan keuangan. Update informasi mengenai kondisi pembangunan ruas baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Site Visit, kunjungan langsung kreditor ke lokasi proyek pembangunan atau fasilitas yang dikelola Jasa Marga. Non-deal roadshow, kunjungan manajemen Perseroan ke forum pertemuan dengan para fund manager dari kreditor eksisting maupun calon Investor. Conference-call, dialog atau komunikasi via telepon/ multimedia dengan investor sesuai dengan kebutuhan.
Komunitas Masyarakat/ Lembaga Swadaya	Tanggung jawab, Pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Terjalannya hubungan yang serasi dan harmonis. Meminimalisir dampak pengembangan ruas jalan terhadap lingkungan. Partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Melaksanakan program revegetasi dan reboisasi. Kontribusi positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat sekitar. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan konsultasi publik dan social mapping. Sosialisasi rencana CSR dan koordinasi pelaksanaan CSR Perseroan.
Media Massa	Pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> Relasi konstruktif yang saling memberi benefit antara kebutuhan narasumber berita dengan Jasa Marga sebagai pihak yang memerlukan Media. 	<ol style="list-style-type: none"> Akurasi objek pemberitaan. Penyampaian informasi terkini dan berita tepat waktu. Transparansi kondisi operasional dan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Press release, penyampaian berita mengenai keberhasilan atau realisasi rencana kerja yang telah disiapkan kepada media massa tanpa melalui acara tatap muka. Media Visit, Media Gathering & Press conference, penyampaian berita secara langsung, disertai sesi tanya jawab.
Pesaing	Pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> Persaingan sehat dalam proses tender konsesi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kewajaran dan fairness dalam pelaksanaan proses tender ruas jalan tol. Kelancaran lalu lintas pada jalan tol yang terintegrasi dengan jalan tol pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Forum bersama . Keterlibatan dalam lembaga asosiasi

I. PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Segala aktivitas Perseroan baik secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada lingkungan. Berperan sebagai market leader di industri Jalan Tol, Jasa Marga terus berkomitmen menjalin ketersambungan jalan tol di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan ini disadari akan berdampak positif bagi semangat pertumbuhan ekonomi wilayah di berbagai sektor, namun pembangunan infrastruktur juga akan berpengaruh pada perubahan kondisi lingkungan dan pola sosial budaya masyarakat. Untuk itu Perseroan secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan, tidak saja terhadap karyawan tetapi juga meliputi masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perseroan dalam mengembangkan, membangun dan mengelola jalan tol, selain untuk mendukung program-program nasional yang terkait dengan lingkungan hidup.

Upaya untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas bisnis ini terus menjadi fokus perbaikan utama Perseroan. Untuk memenuhi hal tersebut, Perseroan membangun Sistem Manajemen Lingkungan sejak akhir tahun 2013 dengan menerbitkan Keputusan Direksi No. 165/KPTS/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan di Lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

KEBIJAKAN DAN RENCANA KEGIATAN

PT Jasa Marga (Persero) Tbk., sebagai perusahaan yang mengoperasikan dan mengembangkan jalan tol, Jasa Marga memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan berkaitan dengan aktivitas Perseroan.

Perseroan melakukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan secara komprehensif, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan masyarakat sekitar, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan berdasarkan atas skala prioritas.
- Perseroan mencegah dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.
- Fungsi perencanaan dan pengendalian lingkungan di sekitar usaha Perseroan dilaksanakan oleh Kantor Pusat bersama Kantor Cabang dan Anak Perusahaan.

- Fungsi pelaksanaan dan pengawasan terhadap lingkungan di sekitar usaha Perseroan dilaksanakan oleh Kantor Cabang dan Anak Perusahaan.
- Direksi, seluruh Karyawan dan Mitra Usaha Perseroan memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
- Menyempurnakan sistem manajemen lingkungan secara terus-menerus sesuai kondisi terakhir dan mendorong seluruh karyawan untuk selalu mengembangkan dan memelihara budaya sadar lingkungan, guna meningkatkan nilai Perseroan dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Direksi Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan agar Kebijakan Manajemen Lingkungan ini disosialisasikan, diimplementasikan dan ditinjau efektivitasnya secara berkala.

Berikut adalah penjelasan mengenai Dasar dan Struktur Tata Kelola Sistem Manajemen Lingkungan Perseroan.

Dasar Pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan

Dalam melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup, Perseroan bersandar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya:

1. Undang Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.
4. Surat Edaran Direksi No. 18/SE/2010 tentang Penghematan Energi dan Pelestarian Lingkungan yang berisi:
 - Penghematan energi melalui penggunaan teknologi baru yang dapat mengurangi penggunaan energi.
 - Penggunaan produk-produk yang mengacu kepada eco product (produk yang ramah lingkungan).
 - Inventarisasi jumlah pohon dalam setiap kegiatan proyek yang akan ditanam kembali.
 - Penanaman pohon sebagai akibat dari penebangan pohon yang harus dilakukan.
5. Keputusan Direksi No. 165/KPTS/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di sekitar usaha Perseroan, menjaga kebersihan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Struktur Tata Kelola Sistem Manajemen Lingkungan

BAGAN STRUKTUR TATA KELOLA SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN



1. Menyusun & mengendalikan sistem (termasuk data base terintegrasi)
2. Monitoring & pemetaan kondisi lingkungan
3. Melakukan asesmen (1 kali setahun; pengukuran; pemantauan, evaluasi)
4. Advisor
5. Menyampaikan laporan ke Direksi
6. Laporan untuk Stakeholder

KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Sesuai dengan aspek-aspek pengelolaan lingkungan di Perseroan, dilakukan program-program lingkungan antara lain:

Penhijauan

Dilakukan sebagai salah satu upaya Perseroan untuk memperbaiki kualitas udara sekaligus sebagai bentuk beautifikasi di lingkungan jalan tol. Pada tahun 2017 Perseroan telah menanam sebanyak ± 178.529 tanaman yang terdiri dari berbagai tipe/jenis, diantaranya bougenville, pucuk merah, pohon mahoni, pohon trembesi, pohon akasia dan jenis tanaman lainnya.

Pengelolaan AMDAL dan RKL/RPL

Kepedulian Perseroan terhadap lingkungan dimulai semenjak rencana pembangunan jalan tol, dimana Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan melalui Keputusan Direksi No. 165/KPTS/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan Di Lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Diwajibkan untuk memperhatikan pengelolaan lingkungan melalui penerapan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap proyek jalan tol baru. Dalam rangka menjaga dan memelihara kualitas lingkungan seluruh jalan tol yang telah beroperasi, Perseroan melalui Cabang dan Anak Perusahaan telah melaksanakan program Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada jalan tol beroperasi sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pengelolaan Sampah

Pengolahan sampah diatur melalui Keputusan Direksi No. 165/KPTS/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan di Lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. bahwa Perseroan wajib menyediakan tempat sampah dengan melakukan pemilahan sampah organik dan organik serta sampah B3 di Unit Kerja. Selain di lingkungan kantor, peningkatan pengelolaan sampah juga dilakukan di gerbang tol dengan menerapkan ISO 14001 tahun 2004 melalui pekerjaan pembersihan rutin gerbang tol, gardu tol, dan lajur transaksi. Hal ini dilakukan sebagai bukti kepedulian Perseroan serta untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Efisiensi dan Konservasi Air

Dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan, upaya efisiensi penggunaan air dilakukan melalui beberapa cara, yaitu berupa pembuatan lubang biopori di beberapa area Perseroan, melakukan sosialisasi penghematan air dengan memasang stiker hemat air di setiap sarana penggunaan air seperti toilet dan penampungan air wudhu dari area masjid, serta menggunakan kembali air limbah bersih untuk menyiram tanaman di lingkungan kantor.

Upaya Mitigasi Emisi Karbon

Dilakukan dengan penghematan energi listrik. Perseroan berupaya menerapkan budaya hemat energi dengan mengganti lampu TL dan SL dengan lampu LED serta memasang himbauan hemat listrik dan penggunaan lampu hemat energi di setiap ruangan kantor.

Dampak Kuantitatif dan Dampak Keuangan dari Kegiatan Lingkungan Hidup

Guna mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan, Perseroan secara khusus telah

mengalokasikan biaya pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2017, Perseroan telah mengeluarkan dana untuk pengelolaan lingkungan sebesar Rp 33,53 miliar, yang dialokasikan untuk program-program pengelolaan lingkungan seperti:

1. Penanaman pohon di sepanjang area jalan tol dan sekitar jalan tol.
2. Penyediaan tempat sampah yang dibedakan yang organik dan non organik.
3. Pembersihan saluran drainase di sepanjang jalan tol.
4. Penyuluhan warga di sekitar jalan tol agar tidak buang sampah sembarangan dan dengan membuat tempat sampah di wilayah sekitar jalan tol.
5. Melakukan pengukuran dan pemantauan lingkungan melalui RKL dan RPL.

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

Tahun 2017, telah diimplementasikan ISO 14001 tentang Sistem Manajemen di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

II. KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA



Perawatan rutin media jalan di Ruas Jalan Tol Semarang-Solo. program perawatan median ini merupakan salah satu program Beautifikasi yang secara rutin dan berkala dilaksanakan di seluruh ruas jalan tol milik Jasa Marga.

Konsep karyawan sebagai *human capital* menjadikan karyawan sebagai bagian penting dari pengembangan Perseroan ke depan. Perseroan memberikan perhatian dan komitmen tinggi dalam hal Ketenagakerjaan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja. Hal ini dapat dilihat dari pemantauan efektivitas secara berkala dan melakukan perubahan-perubahan baik untuk kebijakan, program maupun pemberian benefit untuk memastikan hal tersebut terjamin pelaksanaannya dengan baik agar

karyawan dapat berkontribusi dengan optimal dan menjaga eksistensi perseroan seiring dengan segala perubahan dan transformasi yang sedang dialami Perseroan, salah satunya dengan penerapan program 100% transaksi non tunai di seluruh Gerbang Tol.

KETENAGAKERJAAN

Dengan paradigma sumber daya manusia (SDM) sebagai modal insani (*human capital*) maka Perseroan menempatkan SDM sebagai subyek yang harus dikelola dengan baik agar mampu menjadi modal untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam jangka panjang secara berkelanjutan. Mulai dari perencanaan, seleksi dan perekrutan, manajemen karir, remunerasi, dan jaminan sosial dan pensiun. saat ini Perseroan berusaha mengoptimalkan pendayagunaan modal insani yang ada. Jumlah Karyawan Tetap Induk pada tahun

2017 mencapai 4.205 orang, turun 5,44% dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 4.447 orang. Jumlah ini semakin menurun jika dibandingkan dengan jumlah Karyawan Tetap Induk tahun 2015 yang mencapai 4.561 orang, tahun 2014 yang mencapai 4.692 orang, dan tahun 2013 yang mencapai 4.875 orang

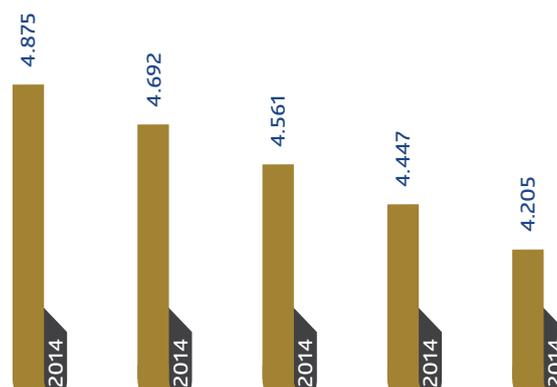
Sementara itu, jumlah Karyawan Induk dan Anak Perusahaan baik tetap dan tidak tetap mengalami kenaikan dari 9.153 orang pada 2015, menjadi 9.376 orang pada 2016, dan menjadi 9.080 pada tahun 2017. Total karyawan secara konsolidasi di Induk dan Anak Perusahaan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,16% dari tahun 2016 yang mengalami kenaikan sebesar 2,44% dari tahun 2015 dengan dibentuknya anak perusahaan Jasamarga Tollroad Operator (dahulu PT Jasa Layanan Operasi).

TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN 2015-2017

Status	2015		2016		2017	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
Karyawan Tetap Induk	4.561	49,83	4.447	47,43	4.205	44,85
Karyawan Tetap Anak Perusahaan	3.517	38,42	4.007	42,74	3.906	41,66
Sub Total	8.078	88,26	8.454	90,17	8.111	86,51
Karyawan Tidak Tetap Induk	51	0,56	45	0,48	54	0,58
Karyawan Tidak Tetap Anak Perusahaan	1.024	11,19	877	9,35	915	9,76
Sub Total	1.075	11,74	922	9,83	969	10,33
Total	9.153	100,00	9.376	100,00	9.080	96,84

TABEL JUMLAH KARYAWAN TETAP INDUK 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Karyawan Tetap Induk (orang)	4.875	4.692	4.561	4.447	4.205



Kebijakan dan Rencana Kegiatan

Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi acuan seluruh kebijakan ketenagakerjaan Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja.

Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia ini diterapkan oleh Perseroan dengan mengupayakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kepatuhan terhadap perundang-undangan ketenagakerjaan.
2. Menjunjung tinggi hak-hak asasi pekerja.
3. Memberikan program peningkatan dan pelatihan kompetensi.
4. Menjunjung kesetaraan gender dan jenjang karir.

Berikut adalah penjelasan terkait kebijakan Perseroan dalam hal ketenagakerjaan:

1. Pengelolaan Hubungan Karyawan dengan Manajemen

Hubungan antara karyawan dengan Manajemen Perseroan telah terbina dengan baik. Hal ini terlihat dari dibentuknya Serikat Karyawan di seluruh kantor Cabang dan Anak Perusahaan dengan Koordinator oleh Serikat karyawan Jasa Marga kantor pusat. Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM) merupakan organisasi yang berhak mewakili karyawan dalam berhubungan dengan Manajemen dan terlibat secara aktif dalam perundingan PKB dengan Manajemen setiap tahunnya.

Pada Tahun 2017, Jasa Marga memberlakukan transaksi non tunai di seluruh gerbang tol Jasa Marga sesuai instruksi Kementerian PUPR dan Bank Indonesia melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Pemberlakuan ini sedikit banyak juga mempengaruhi struktur karyawan yang bekerja di lapangan. Dalam Hal ini, perseroan berusaha

semaksimal mungkin menghindari pemutusan hubungan kerja dengan menawarkan program Alih Profesi untuk karyawan terdampak dengan beberapa pilihan yang disebut dengan pogram A-Life. Program ini terbagi menjadi lima pilihan yang dapat diambil oleh karyawan yaitu sebagai berikut :

- a. Alih profesi menjadi staf Kantor Pusat dan Cabang.
- b. Alih profesi menjadi staf Anak Perusahaan Jalan Tol.
- c. Alih profesi menjadi staf Anak Perusahaan Usaha Lain.
- d. Alih Profesi menjadi Partner bisnis Jasa Marga Properti dalam bidang UMKM.
- e. Alih Profesi menjadi Entrepreneur Mandiri melalui pembimbingan dari Unit Community Development Program (CDP).

2. Hubungan Kerja

• Kesetaraan dalam Rekrutmen SDM

Rekrutmen SDM Perseroan dilakukan melalui rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki agar tercapai efisiensi biaya pergantian karyawan dan didapatkan kandidat terbaik sesuai keperluan serta secara bersamaan memfasilitasi pengembangan karir bagi karyawan yang ada. Rekrutmen eksternal difokuskan pada perekrutan karyawan untuk mengisi kekosongan posisi di Perseroan.

• Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Perseroan tidak memiliki kebijakan internal terkait ketenagakerjaan yang membedakan penerapannya berdasarkan gender. Seluruh peraturan yang berlaku diterapkan secara konsisten dan setara kepada seluruh karyawan tanpa membedakan gender. Demikian pula dengan kesempatan kerja yang ditawarkan berlaku bagi seluruh karyawan.

No	Pengembangan Karier	Tahun					
		2015		2016		2017	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1	Promosi	40	145	83	208	64	210
2	Rotasi	114	343	115	396	357	962
		154	488	198	604	421	1172
	Jumlah	24%	76%	25%	75%	26%	74%
		642		802		1593	

• Pengembangan Kompetensi

Penguatan kompetensi SDM dilakukan dengan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan kompetensi soft skill dan hard skill, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap strategibisnis dan operasional.

Program peningkatan dan pelatihan kompetensi bagi karyawan saat ini dikelola melalui pembentukan Jasa Marga Learning Institute (JMLI).

- **Sistem Manajemen Karir dan Sistem Manajemen Talenta**

Pergerakan karir karyawan baik berupa promosi dan maupun rotasi tahun 2017 meningkat jumlahnya jika dibandingkan dengan tahun 2016. Sistem Manajemen karir Perseroan dituangkan dalam Keputusan Direksi No. 97/KPTS/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Sistem Manajemen Karier. Pergerakan karir karyawan baik berupa promosi dan maupun rotasi tahun 2015 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL PENGEMBANGAN KARIER KARYAWAN 2015-2017 BERDASARKAN LOKASI

Uraian	Wilayah Kerja									Jumlah		
	Kantor Pusat			Kantor Cabang & Proyek			Anak Perusahaan			2015	2016	2017
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017			
Promosi	30	101	71	124	127	149	31	63	54	185	291	274
Rotasi	143	52	317	267	417	838	47	42	164	457	511	1.319
TOTAL	173	153	388	391	544	987	78	105	218	642	802	1.593

Penghargaan Karyawan

Secara rutin, Perseroan memberikan penghargaan atas kinerja, pelaksanaan tugas, inovasi atau perbaikan serta penghargaan atas kesetiaan karyawan. Untuk memberikan apresiasi terhadap karyawan yang telah bekerja selama masa kerja tertentu, Perseroan memberikan penghargaan atas masa kerja kepada karyawan. Sepanjang tahun 2017, penghargaan masa kerja diberikan kepada 867 karyawan yang telah melampaui masa kerja 10, 15, 20, 25, dan 30 tahun.

TABEL PENGHARGAAN KESETIAAN KARYAWAN JASA MARGA 2016-2017

Masa Kerja	Jumlah Penerima Penghargaan	
	2016	2017
10 Tahun	0	0
15 Tahun	113	72
20 Tahun	297	296
25 Tahun	328	197
30 Tahun	96	302
Total	834	867

Sementara untuk karyawan yang bekerja sampai mencapai usia pensiun, Perseroan memberikan penghargaan pensiunan berupa logam mulia, dan untuk tahun 2017 telah diberikan kepada 229 orang yang telah memasuki usia pensiun (pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun meninggal dunia, pensiun sakit/cacat).

3. Hari Kerja dan Waktu Kerja

Untuk menghindari eksploitasi tenaga kerja secara berlebihan, Perseroan telah menetapkan batasan waktu kerja bagi pekerja. Waktu kerja disesuaikan dengan daerah kerja serta sifat pekerjaan. Di Perseroan berlaku waktu kerja normal dan waktu kerja shift.

Hari kerja untuk karyawan yang tidak terkena rotasi adalah 5 hari dengan waktu kerja 8 jam sehari dan selama-lamanya 40 jam per minggu. Sedangkan untuk karyawan yang terkena rotasi kerja shift ditetapkan selama 7 jam dan selama-lamanya 40 jam per minggu. Dalam hal pekerja menjalankan pekerjaan melebihi waktu kerja yang ditentukan, maka kepada pelaksana diberikan kompensasi berupa upah lembur sesuai ketentuan perundangan.

4. Istirahat dan Cuti Karyawan

Perseroan memberikan istirahat dan cuti tahunan antara lain istirahat mingguan, hari libur nasional, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti bersama dan istirahat panjang.

5. Remunerasi Karyawan

Perseroan memahami bahwa kompensasi dan benefit yang diberikan Perseroan berimbang pada kondusivitas kinerja serta perputaran dari karyawan. Oleh karena itu Perseroan memberikan paket remunerasi yang kompetitif bagi karyawannya yang terdiri dari gaji bulanan, berbagai tunjangan dan fasilitas antara lain pensiun dan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku dan secara rutin dievaluasi agar pergerakan gaji karyawan sesuai dengan harga pasar.

- **Penggajian**

Pemberian kompensasi bulanan pekerjaan yang sesuai. Nilai persentase imbal jasa terendah yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Rp 5.376.537. Nilai ini lebih besar 47,3% dibandingkan UMR pada daerah bersangkutan. Pemberian imbal jasa maupun promosi karyawan yang berkompeten tanpa membedakan gender maupun SARA.

- **Tunjangan Hari Raya**
Sebagai bentuk penghargaan untuk karyawan dan bukti adanya keragaman dalam Perseroan, semua karyawan diberikan Tunjangan Hari Raya sesuai dengan agama yang dianutnya.
- **Insentif Kinerja**
Perseroan memberikan insentif kinerja sebagai imbalan atas kinerja Karyawan pada jabatannya. Insentif kinerja terdiri dari Insentif Lalu Lintas untuk karyawan operasional, Bonus sebagai penghargaan atas tercapainya kinerja Perseroan, dan Insentif Kinerja Jangka Panjang

6. Kesejahteraan

- **Jaminan Sosial Tenaga Kerja**
Perseroan mendaftarkan/memasukkan seluruh Karyawan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- **Program Asuransi Kumpulan Diri**
Diperuntukkan bagi Karyawan Operasional Berisiko Tinggi. Mengingat besarnya risiko karyawan operasional yang bekerja di lapangan, Perseroan memberikan tambahan benefit dengan mengikutsertakan Karyawan yang tugas pokok dan fungsinya harus berada di lapangan, dalam program Asuransi Kecelakaan.
- **Jaminan Kesehatan**
 - a. Fasilitas jaminan kesehatan diberikan kepada karyawan dan keluarga karyawan, baik bersifat normatif dalam bentuk program BPJS Kesehatan dan Program Non BPJS Kesehatan untuk melengkapi jaminan kesehatan Perusahaan;
 - b. Manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat dalam bentuk fasilitas kesehatan yang akan diterima bagi para pensiunan. Dengan manfaat ini pensiunan akan merasa nyaman atas biaya kesehatan yang sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- **Program Pensiun**
Karyawan Perseroan diikutsertakan dalam Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Penyelenggaraan PPMP diselenggarakan oleh Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM) yang

didirikan oleh Perseroan. Program PPMP diikuti oleh karyawan yang mulai bekerja di Perseroan sebelum 01 Juli 2012. Sedangkan PPIP diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan diikuti oleh karyawan yang mulai bekerja di Perseroan sejak tanggal 01 Juli 2012.

- **Program Purna Karya**
Program ini diberikan kepada karyawan dengan manfaat ketika berhenti pada usia pensiun normal akan mendapat 24 x PhDA (Penghasilan Dasar Asuransi), sedangkan karyawan yang berhenti pada usia pensiun dipercepat dan sebelum memasuki usia pensiun dipercepat akan mendapatkan manfaat proposional sesuai peraturan Perseroan.
- **Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan**
Perseroan mengikutsertakan seluruh karyawan kedalam program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan. Dasar perhitungan iuran JHT dihitung dari penghasilan yang proporsinya dibayar sebesar 2% oleh karyawan dan 3,7% oleh Perseroan.
- **Jaminan Kesehatan Purna Karya**
Manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat dalam bentuk fasilitas kesehatan yang akan diterima bagi para pensiunan. Dengan manfaat ini pensiunan akan merasa nyaman atas biaya kesehatan yang sewaktu waktu apabila diperlukan.

7. Pembinaan karyawan

Perseroan memastikan bahwa semua karyawan baik atasan maupun bawahan mengetahui kewajiban dan tanggung jawab masing-masing untuk menghindari adanya pelanggaran disiplin dengan melakukan upaya-upaya berupa kegiatan sosialisasi pelanggaran disiplin.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN

1. **Pemberian imbal jasa pekerjaan yang sesuai.**
Perseroan memahami bahwa kompensasi dan benefit yang diberikan Perseroan berimbang pada konduktivitas kinerja serta perputaran dari karyawan. Oleh karena itu, Perseroan mengupayakan imbal jasa terbaik melebihi ketentuan perundang undangan (UMR), sesuai kemampuan Perseroan dan tanpa memberatkan jam kerja karyawan. Nilai persentase imbal jasa terendah

yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Rp 5.376.537. Nilai ini lebih besar 47,3% dibandingkan UMP DKI Jakarta sebagai perbandingan.

2. Dukungan terhadap aspirasi dan kegiatan seni dan olah raga.

Perseroan mendukung terbentuknya beberapa perkumpulan dan perserikatan yang dimaksudkan sebagai wadah aspirasi dan bakat seni maupun olah raga karyawan seperti LKS bipartit, jasmapala, dan baporseni (olah raga dan seni), Badan Kerohanian Kristen (BKK), Badan Kerohanian Islam (BKI), dan Badan Kerohanian Hindu (BKH).

3. Keterbukaan dan kesetaraan dalam rekrutmen SDM.

Perseroan mengumumkan program rekrutmen dan seleksi karyawan baru, diantaranya melalui website resmi Perseroan yakni www.jasamarga.co.id, bekerja sama dengan surat kabar yang beredar secara nasional, portal BUMN, twitter resmi Perseroan, media online, poster dan career development program berbagai universitas ternama di Indonesia. Perseroan menjunjung tinggi asas kesetaraan dimana pelamar berasal dari berbagai suku, wilayah, agama, ras dan gender.

4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2017-2019 yang memuat kesepakatan-kesepakatan antara Manajemen dengan Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM) pada tanggal 27 Februari 2017.

5. Pengembangan Kompetensi.

Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui Jasa Marga Learning Institute (JMLI). Sepanjang tahun 2017, JMLI telah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan dengan total pelaksanaan 22.639 hari orang pelatihan menurut kategori operasional dan non operasional dengan total peserta 15.251 orang yang terbagi dalam 668 jumlah program.

6. Implementasi Prinsip Kesetaraan.

Untuk menjaga tingkat turnover karyawan, Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan dalam mengembangkan karir serta paket remunerasi yang kompetitif dalam bentuk manfaat dan fasilitas yang diterima oleh karyawan. Pemberian imbal jasa maupun promosi karyawan yang berkompoten tanpa membedakan gender maupun SARA.

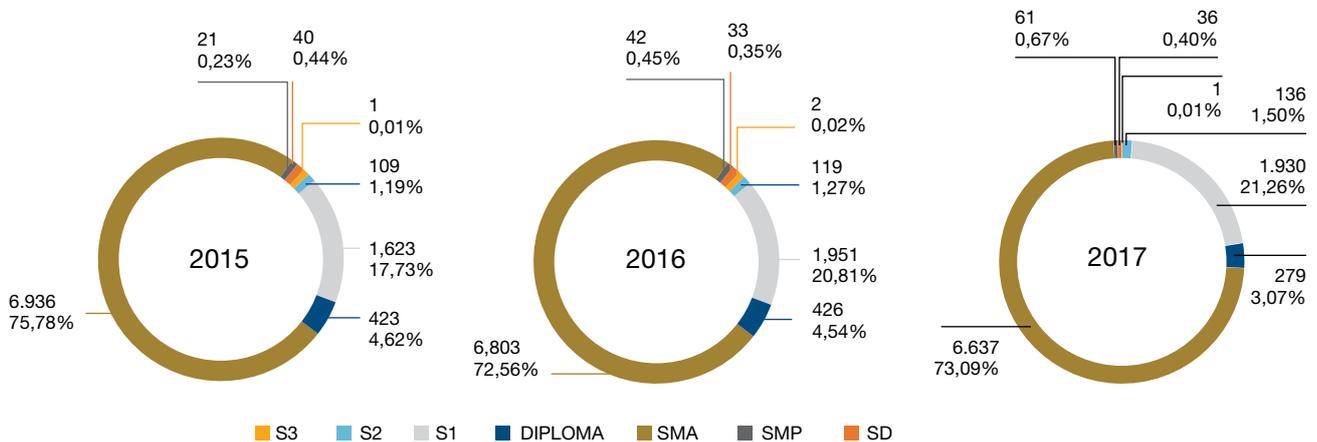
Kebijakan dalam hal kesempatan kerja, baik penempatan karyawan maupun pengembangan karir karyawan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Jasa Marga melaksanakan pengisian formasi dan pengembangan karir secara selektif dan terbuka tanpa diskriminasi (gender ras suku agama), dengan memprioritaskan sumber dari dalam Perseroan dengan memperhatikan prestasi kerja, kemampuan dan kompetensi Karyawan.

Saat ini, Karyawan Jasa Marga grup terdiri dari berbagai tingkat pendidikan yang berbeda dengan alokasi kebutuhan tenaga kerja yang terdata sebagai berikut :

TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 2015-2017

Status	2015		2016		2017	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
S3	1	0,01	2	0,02	1	0,01
S2	109	1,19	119	1,27	136	1,50
S1	1.623	17,73	1.951	20,81	1.930	21,26
Diploma	423	4,62	426	4,54	279	3,07
SMA	6.936	75,78	6.803	72,56	6.637	73,09
SMP	21	0,23	42	0,45	61	0,67
SD	40	0,44	33	0,35	36	0,40
Total	9.153	100,00	9.376	100,00	9.080	100,00

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 2015-2017



Sejauh ini tingkat turnover karyawan Jasa Marga sangat kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah karyawan yang mengundurkan diri dari Perseroan. Pada tahun 2017 terdapat tiga (3) orang karyawan yang mengundurkan diri dan tujuh (7) orang karyawan yang pensiun dini.

TABEL TURNOVER KARYAWAN 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Karyawan	4.875	4.692	4.561	4.447	4205
Jumlah Karyawan Mengundurkan Diri	4	10	24	7	3
Jumlah karyawan Pensiun Dini	2	3	8	7	7
Persentase (%)	0,00082	0,00021	0,00526	0,00157	0,00071

7. Pelatihan dan Keterampilan

Penyelenggaraan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi karyawan dari setiap unit kerja guna mendukung arah perkembangan perusahaan. Selain itu, Perseroan juga menyediakan pelatihan pengembangan keterampilan kepada karyawan yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

8. Pemberian Imbal Jasa

Pemberian imbal jasa maupun promosi karyawan yang berkompeten tanpa membedakan gender maupun SARA. Mulai tahun 2017, Perseroan melakukan pengembangan jenjang karir karyawan melalui mekanisme lelang jabatan. Tercatat pada tahun 2017, telah dibuka 113 lowongan jabatan dengan jumlah peserta terdaftar sebanyak 336 Karyawan

9. Survey Kepuasan Pekerja.

Perseroan secara rutin melakukan survey kepuasan pekerja, sehingga Perseroan dapat menerima feedback langsung dari pekerja. Melalui survey ini diharapkan setiap pekerja Jasa Marga dapat menyampaikan pandangan mengenai berbagai aspek yang menentukan level kepuasan kerja serta dapat menyampaikan saran dan masukan kepada Manajemen Jasa Marga terkait hal yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan dan produktivitas pekerja Jasa Marga.

Pada tahun 2017 hasil Engagement Ratio Index (ERI) adalah 2.21. Hal ini menunjukkan penurunan/kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan skor ERI sebesar 2.21

TABEL SKOR ENGAGEMENT RATIO INDEX (ERI) PERSEROAN

Tahun	Skor
2014	2,17
2015	1,97
2016	2,36
2017	2,21

10. Dukungan dalam persiapan pensiun.

Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi karyawan yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Penghargaan yang Diperoleh

Pada tahun 2017, Perseroan belum mendapatkan penghargaan di bidang manajemen tenaga kerja, namun

tercatat secara korporasi, Jasa Marga memperoleh 14 penghargaan dari berbagai bidang diantaranya pasar modal, *corporate Image*, pelayanan pelanggan, dan bidang lainnya.

Target ke Depan

Target jangka panjang Perseroan adalah menyiapkan karyawan menjadi kader yang siap memimpin dan mengembangkan bisnis Perseroan dalam era globalisasi. Upaya yang akan dilakukan Perseroan di antaranya pemberian beasiswa S2 dan S3 serta pelatihan kepemimpinan dengan fokus pada *global acumen*.

Dampak Keuangan dari Kegiatan Ketenagakerjaan

Perseroan secara berkesinambungan melakukan praktik ketenagakerjaan layak untuk terus menjaga karyawan sebagai aset utama. Dalam upaya untuk melaksanakan praktik ketenagakerjaan ini sepanjang tahun 2017, total biaya yang telah dikeluarkan Perseroan adalah Rp 1,79 triliun, naik 4,96% dari tahun 2016.

III. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Perseroan sadar bahwa karyawan adalah aset Perseroan yang perlu dikelola serta dipenuhi hak dan kewajibannya, salah satunya dalam hal Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk memenuhi hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang mewajibkan Perseroan, baik pusat, Cabang, maupun Anak Perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk karyawan dengan membuat kebijakan, target dan struktur tata kelola K3, serta melakukan review setiap tahunnya.

KEBIJAKAN DAN RENCANA KEGIATAN

Komitmen Perseroan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan lingkungan kerja diwujudkan dalam kebijakan Perseroan yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 162/KPTS/2010 tentang Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan Proyek Konstruksi dan Surat Edaran Direksi No. 20/SE-DIR/2010 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

SMK3 bertujuan melindungi karyawan, pelanggan, aset, mitra kerja dan lingkungan dari potensi bahaya yang mungkin terjadi. Sejak tahun 2011 pengelolaan K3 difokuskan untuk mencapai tingkat *zero accident*. Program ini diselenggarakan

berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja setempat serta dievaluasi dan dinilai setiap tahun. Berikut adalah Dasar dan Struktur Tata Kelola Pelaksanaan Sistem Manajemen K3

1. Dasar Pelaksanaan Sistem Manajemen K3

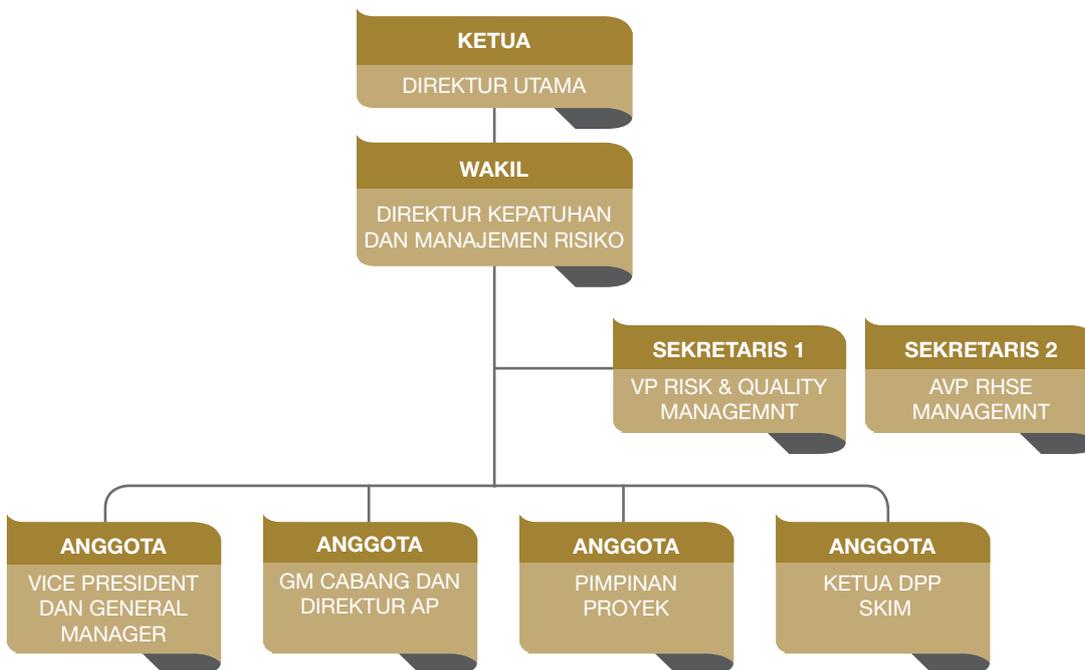
Dasar pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan Perseroan mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang Undang No. 01 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- b. Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
 - Pasal 86: pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
 - Pasal 87: setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- d. OHSAS 18001: 2007.
- e. Keputusan Direksi No. 129/KPTS/2010 tentang Kebijakan Mutu dan K3, Manual Manajemen Mutu dan Pedoman Perbaikan Berkelanjutan di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- f. Keputusan Direksi No. 162/KPTS/2010 tentang Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan Proyek Konstruksi di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- g. Surat Edaran Direksi No. 20/SE-DIR/2010 perihal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- h. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN:
 - Pasal 36: Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMN lainnya, memenuhi peraturan perundang undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

2. Struktur Tata Kelola Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan membentuk Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang memantau pelaksanaan K3 di Perseroan.

BAGAN ORGANISASI PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) KORPORAT



KEGIATAN YANG DILAKUKAN

1. Program K3

- a. Sosialisasi terkait SMK3
Sosialisasi SMK3 dilakukan dalam bentuk parenting visit ke Cabang dan Anak Perusahaan oleh Divisi Risk and Quality Management untuk kembali merefresh pengetahuan unit kerja terkait K3 serta meningkatkan kesadaran dalam berbudaya K3. Selain sebagai media sosialisasi, parenting visit juga dibuat sebagai media bagi Cabang dan Anak Perusahaan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem yang selanjutnya didiskusikan bersama untuk perbaikan.
- b. Cross Audit SMK3 sesuai PP No. 50 Tahun 2012
Untuk mengetahui kesesuaian tingkat penerapan K3 di cabang-cabang dengan PP
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan K3 tahun 2017
 - Evaluasi pelaksanaan Kegiatan K3 Cabang-Cabang
 - Evaluasi data laporan P2K3 Cabang
 - Evaluasi HIRAC Cabang
 - Cross Audit di Cabang dan Anak Perusahaan

50 tahun 2012 maka Perseroan melakukan Cross Audit dengan personil auditor dari cabang lain yang sudah mendapatkan pelatihan Auditor SMK3 Kemenakertrans. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan objektivitas dalam hasil auditnya. Cross audit dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan peningkatan penerapan SMK3 di Cabang.

d. Program kesehatan

1) Pencegahan (preventif)

- Vaksinasi untuk kepentingan pencegahan penyakit bagi anak kandung karyawan dapat dilakukan vaksinasi dasar.
- Uji Kesehatan Berkala (UKB) setiap 1 tahun sekali dalam rangka mendeteksi dini suatu penyakit karyawan.
- Pemberian Gizi Kerja kepada karyawan yang terkena rotasi kerja shift berupa Susu untuk meningkatkan daya tahan tubuh karyawan.
- Penyemprotan dan pengasapan jentik-jentik nyamuk untuk mencegah penyebaran demam berdarah.
- Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan & keluarga karyawan untuk mengikuti program Keluarga Berencana.
- Perseroan melakukan pemeriksaan pap smear 1 (satu) tahun sekali untuk mendeteksi dini penyakit kanker mulut rahim terhadap karyawan dan atau istri karyawan.

2) Pengobatan (kuratif)

- Penggantian biaya sebesar 80% untuk biaya rawat jalan dapat dilakukan oleh karyawan dan keluarga karyawan ke dokter, atau bidan berpraktek di rumah sakit, klinik, atau tempat praktek lainnya.
- Karyawan dan keluarga karyawan yang menjalani rawat inap di rumah sakit dapat langsung ke rumah sakit dengan kelas perawatan I untuk Grade E s.d. 3 dan untuk kelas perawatan II untuk Grade 4 s.d. 5 dan Grade P dan M.
- Pemeriksaan kehamilan dan bantuan persalinan dalam 1 kali proses kehamilan yang ditanggung Perseroan sebanyak-banyaknya 9 kali.
- Perseroan memberikan penunjang diagnostik berupa USG sebanyak-banyaknya 2 kali kecuali

ada kelainan kandungan atas rekomendasi dokter spesialis.

- Pemeliharaan dan pengobatan, perawatan gigi penggantian biayanya sebesar 80%.

3) Mempertahankan kesehatan (promotif)

- Perseroan mengadakan ceramah kesehatan secara periodik secara rutin tiap 3 bulan sekali, baik di Kantor Pusat maupun di Cabang dengan tema kesehatan yang berbeda-beda.
- Perseroan membuat *weekly info* yang terbit setiap Jum'at dengan salah satu temanya adalah tentang kesehatan untuk menambah pengetahuan karyawan.
- Perseroan memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan olah raga (contoh: Senam Kesehatan Jasmani (SKJ) setiap hari Jum'at, olahraga basket, tenis, zumba, yoga, golf, bowling dan kegiatan olah raga lainnya) untuk meningkatkan stamina dan kesehatan para karyawan.

4) Pemulihan kesehatan (rehabilitatif)

- Pembuatan dan pemasangan gigi palsu atas indikasi medis hanya berlaku bagi karyawan yang memiliki masa kerja minimal 3 tahun, maksimal dalam 1 tahun 3 (tiga) gigi palsu.
- Pemeriksaan mata dan pembelian kaca mata bagi karyawan atas rekomendasi dokter, diberikan hanya kepada karyawan yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun hanya untuk 1 kali dalam 2 tahun.
- Alat bantu diberikan kepada karyawan yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun dan diberikan dalam jangka waktu 3 tahun sekali.

2. Data Kecelakaan Kerja

Pada tahun 2017, angka statistik kecelakaan kerja di Jasa Marga mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya, yaitu tidak ada kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, namun ada korban satu meninggal dunia saat tugas.



3. Pemenuhan Kompetensi

Pemenuhan kompetensi di bidang K3 dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan SMK3 agar berjalan dengan baik serta sebagai upaya Perseroan dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tahun 2017 Perseroan berupaya meningkatkan jumlah Ahli K3 Umum, Ahli K3 Konstruksi dan Auditor SMK 3 untuk pemenuhan kompetensi di bidang K3 secara merata di seluruh unit kerja.

TABEL KOMPETENSI K3 KARYAWAN DI KANTOR PUSAT, CABANG, PROYEK DAN ANAK PERUSAHAAN TAHUN 2017

No.	Kompetensi	Terlatih	Pensiun/Purna Bhakti	Aktif
1	Auditor SMK3	26	2	24
2	Ahli K3 Umum	88	3	85
3	Ahli K3 Konstruksi	46	5	41
4	Safety Officer	133	4	129
5	Hiperkes*	4	-	4
6	Supervisor Perancah	2	-	2
7	Teknisi Lift	2	-	2
		301	14	287

Keterangan:
Hiperkes = Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja

1. Pencapaian Bidang K3

- Pencapaian penerapan Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar 75%
- Melakukan Benchmarking ke PT Yamaha Music manufacturing Asia

2. Sertifikasi Bidang K3

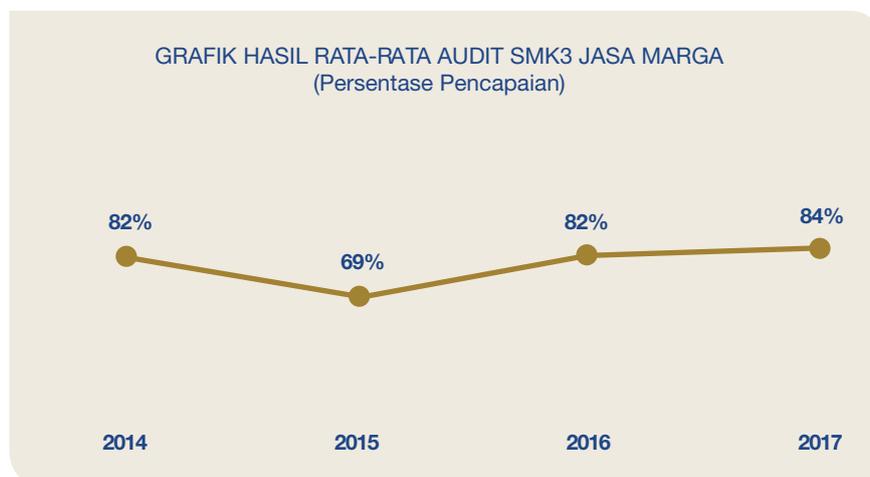
Sebagai upaya dalam menjamin persyaratan K3 dipenuhi oleh Perseroan untuk memastikan K3 berjalan dengan efektif, maka dilakukan sertifikasi OHSAS 18001:2007 (Occupational Health & Safety Assessment Series) yang terintegrasi dengan ISO 9001 untuk semua Cabang dimulai dari tahun 2010 dan diperbaharui setiap 3 tahun sekali. Data sertifikasi dapat dilihat dalam Bab Mengenal Jasa Marga.

3. Data kinerja K3

Dalam rangka peningkatan penerapan Sistem Manajemen K3 di lingkungan Perseroan, Perseroan melakukan cross audit antar Cabang. Pemenuhan persyaratan K3 di Cabang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagai bukti telah tumbuhnya kesadaran akan pentingnya budaya K3 di Perseroan.

TABEL PEMENUHAN PERSYARATAN SMK3 BERDASARKAN PP NO. 50 TAHUN 2012

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Presentase Pemenuhan	67%	82%	69%	82%	84%



DAMPAK KUANTITATIF DAN DAMPAK KEUANGAN DARI KEGIATAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perseroan secara berkesinambungan melakukan praktik K3 untuk terus menjaga karyawan sebagai aset utama. Upaya untuk melaksanakan praktik K3 ini, sepanjang tahun 2017, total investasi yang telah dikeluarkan Perseroan adalah Rp 65,23 miliar.

IV. PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

KEBIJAKAN DAN RENCANA KEGIATAN

Sebagai operator jalan tol dan Badan Usaha Milik Negara, kontribusi Perseroan kepada masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan dilaksanakan melalui Program

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola oleh Unit Corporate Secretary mulai tahun 2014 dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dikelola Unit Community Development Program sejak tahun 1992.

Sumber anggaran dana untuk program CSR menggunakan alokasi anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan setiap tahunnya sedangkan sumber anggaran dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menggunakan anggaran perusahaan dari Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri dalam pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen), untuk tahun 2017 Perusahaan menysisihkan dana yang menjadi beban untuk penyaluran Program Bina Lingkungan sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikelola oleh unit Community Development diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN No.: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- b. Peraturan Menteri Negara BUMN No.: PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri badan Usaha milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN No.: PER-02/MBU/07/2017 tanggal 3 Juli 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri badan Usaha milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- d. Keputusan Direksi No. 166/KPTS/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Seni & Budaya

Program Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Mudik Gratis Bareng Jasa Marga

Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang akan merayakan Lebaran di kampung halaman, Perseroan menyelenggarakan acara “Mudik Gratis Bareng Jasa Marga 2017” yang diikuti oleh 1.307 peserta yang terdiri dari:

- Pekerja yang menunjang aktivitas Perseroan (Pengemudi, Petugas Pembantu Sarana Rumah Tangga, Petugas Kebersihan, Penyapu Jalan, Petugas Harian Lepas, Satpam, dan Hansip) beserta keluarga yang berasal dari Kantor Pusat, Cabang dan Proyek Jasa Marga.
- Masyarakat sekitar jalan tol Jasa Marga yang membutuhkan.



PT Jasa Marga (Persero) Tbk. turut terlibat dalam program Mudik Bareng Guyub Rukun Tahun 2017 yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, Senin, 19 Juni 2017. Tampak Direktur Utama Jasa Marga mendampingi Menteri BUMN untuk menyapa dan bersilaturahmi dengan para pemudik.

Acara ini merupakan peran aktif Perseroan dalam menekan terjadinya jumlah kecelakaan saat arus mudik lebaran. Dalam kegiatan tersebut Perseroan juga memberikan edukasi tentang tertib berlalu lintas di jalan raya kepada para awak bis (sopir dan kondektur).

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- ✓ Untuk menekan penggunaan kendaraan roda dua yang digunakan saat mudik.
- ✓ Untuk membina hubungan baik dengan stakeholder Perseroan, khususnya masyarakat di sekitar lingkungan Perseroan.
- ✓ Untuk memelihara kepercayaan masyarakat kepada Perseroan.
- ✓ Untuk meningkatkan citra positif Perseroan.

Dalam acara ini, Jasa Marga menyiapkan 28 bis dengan tujuan akhir Solo yang melewati dua alternatif jalur yaitu jalur utara dan jalur selatan. Sebagai upaya memberikan edukasi tentang tertib berlalu lintas di jalan raya, para awak bis (supir dan kondektur) mendapat arahan Safety Driving dari pihak Kepolisian. Selain itu, mereka juga menjalani tes kesehatan oleh tim medis dari Jasa Marga yang terdiri dari tiga dokter dan tiga paramedis. Kegiatan ini bertujuan agar acara Mudik Gratis Bareng Jasa Marga dapat berjalan dengan aman dan lancar.

2. Festival Jalan Tol

Festival Jalan Tol (FJT) adalah kegiatan pesta rakyat yang diisiasi oleh jasa Marga dengan menampilkan kegiatan olahraga, seni, dan budaya. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk rasa syukur bersama masyarakat menyambut diresmikannya ruas tol baru.

Pada tahun 2017, Jasa Marga menggelar Festival Jalan Tol di dua lokasi, yaitu di Ruas Tol Bawen Salatiga pada tanggal 13 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh lebih dari 5.000 peserta. Kemudian Festival Jalan Tol menyambut diresmikannya ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi pada tanggal 1 Oktober 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 2.000 orang. Kegiatan Festival Jalan Tol ini diisi dengan berbagai acara mulai dari panggung musik, fun games, pesta kuliner daerah, sampai olahraga seperti jalan sehat, lari, dan bersepeda.

3. BUMN Hadir Untuk Negeri

Salah satu kegiatan yang juga merupakan bentuk CSR Jasa Marga bagi perkembangan dunia pendidikan, seni, dan budaya adalah berpartisipasi dalam kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Kementerian BUMN untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa BUMN selama ini turut berperan dalam pembangunan di daerah, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial, seni, maupun budaya. Kegiatan ini telah berlangsung sejak tahun 2015, dimana untuk pertama kalinya Jasa Marga mengadakan BUMN Hadir Untuk Negeri di Kota Palembang, kemudian dilanjutkan di provinsi Manado pada tahun 2016.

Pada tahun 2017, Jasa Marga bertanggung jawab atas pelaksanaan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Bali bersama PT Surveyor Indonesia (SI) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero). Program ini diisi oleh berbagai kegiatan yang meliputi pendidikan, olahraga, seni, dan budaya, sebagai berikut :

- **Siswa Mengenal Nusantara**

Program pertukaran pelajar dimana siswa dari satu provinsi akan melakukan pertukaran dengan siswa dari provinsi lain. kegiatan meliputi pengenalan budaya dan kesenian daerah setempat, serta mengenal potensi daerah tujuan dengan lebih mendalam.

- **Bedah rumah veteran**

Melakukan perbaikan untuk rumah-rumah mantan pejuang (veteran). kegiatan ini sebagai wujud nyata BUMN menghargai jasa para pejuang yang telah rela berkorban demi bangsa dan negara.

- **Jalan Sehat 5 Km**

Kegiatan olahraga bersama yang dibuka untuk umum bersama warga. olahraga berupa jalan santai sepanjang 5 km dengan harapan meningkatkan keakraban dan nilai sosial warga masyarakat.

- **Penghargaan Mantan Atlet Berprestasi**

Memberikan bantuan bagi mantan atlet berprestasi, dengan harapan para atlet mendapatkan jaminan kehidupan melalui pembukaan usaha-usaha mandiri sesuai kemampuan dan keterampilan masing-masing atlet.

- **Upacara 17 Agustus 2017**

Puncak kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri ditutup dengan penyelenggaraan upacara bendera pada

tanggal 17 Agustus 2017 di lingkungan ITDC dengan jumlah peserta mencapai ±900 orang yang terdiri dari perwakilan Kementerian BUMN, perwakilan BUMN penyelenggara, siswa SMN 2017, dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam bergabai kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Bali.

4. BUMN Hadir di Kampus

Perseroan juga secara aktif hadir di masyarakat untuk mensosialisasikan informasi-informasi perseroan kepada masyarakat umum, termasuk kepada lingkungan akademisi. Salah satu program di tahun 2017 ini yaitu BUMN Mengajar dimana Direksi hadir dan menjadi pembicara di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tanggal 28 Oktober 2017 bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda dengan dihadiri peserta sebanyak 1050 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.

Pengembangan Seni dan Budaya

Salah satu aspek tanggung jawab sosial yang menjadi fokus perseroan adalah pengembangan seni dan budaya melalui program pemberdayaan lingkungan seperti :

1. Siswa Mengetahui Nusantera

Merupakan program pertukaran pelajar tingkat SMA dan Sederajat. 20 siswa terpilih termasuk 2 siswa disabilitas dari Provinsi Bali diberikan kesempatan untuk mengetahui lebih dekat budaya dari Provinsi Maluku. Para siswa diberikan kesempatan untuk belajar tentang pendidikan, pariwisata, sosial budaya dan entrepreneurship. Program telah dilaksanakan dari tanggal 16-24 Juli 2017. Total biaya pelaksanaan dari program ini mencapai Rp 600 juta.

2. Balai Ekonomi Desa

Kementerian BUMN melalui program BUMN Hadir Untuk Negeri memerintahkan kepada BUMN termasuk Jasa Marga untuk mendirikan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di daerah-daerah. Balkondes ini sendiri diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan warga baik dari sisi ekonomi, pagelaran seni budaya, dan juga berperan sebagai balai warga untuk meningkatkan aktivitas sosial. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. telah membangun Balkondes di daerah Majaksingi, Kabupaten Magelang. Balkondes ini berada di sekitar daerah wisata Candi Borobudur.

Untuk pengembangan seni budaya, warga sekitar dapat memanfaatkan Balkondes sebagai tempat latihan tari daerah, pembelajaran alat musik tradisional seperti gamelan, Kendang, Bonang, Saron, Gong dan alat musik lainnya. Serta dapat juga dimanfaatkan sebagai etalase pemasaran hasil produk warga.

3. HUT BUMN Bersama

Kegiatan HUT BUMN Bersama merupakan inisiasi dari Kementerian BUMN untuk menyelenggarakan perayaan ulang tahun beberapa BUMN secara bersamaan. Pada tanggal 21-22 April 2017, Perseroan bersama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Taspen (Persero), dengan total 27 BUMN menggelar perayaan HUT BUMN Bersama di pelataran Candi Prambanan. Pada acara tersebut, ditampilkan peringatan hari kartini dimana seluruh peserta turut memeriahkan acara dengan mengenakan busana Sorjan dan Kebaya khas Yogyakarta. kesan seni budaya juga terasa sangat kental dengan penampilan musik dan tarian-tarian tradisional.

Program Kemitraan

Unit Community Development Program (CDP) Jasa Marga dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 010/KPTS/1997. Unit CDP merupakan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Bagian Laba BUMN. Keputusan ini kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri badan Usaha milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri badan Usaha milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sasaran dari kegiatan Unit Community Development Program yaitu usaha kecil, dalam hal ini perorangan atau badan usaha dan koperasi memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Pemberian pinjaman modal usaha secara bergulir kepada usaha kecil dan menengah serta melakukan pembinaan usaha agar dapat menjadi tangguh dan mandiri. Upaya pembinaan usaha dilakukan dengan:

- Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Bina Program Kemitraan.
- Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), diambil dari alokasi dana Program Bina Lingkungan,

maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Kebijakan Unit Community Development di lingkungan Perseroan dilakukan melalui jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Pusat dan 8 (delapan) kantor cabang sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 61/KPTS/2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor : 44/KPTS/2013 Tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Tangerang dan Cabang Cawang Tomang Cengkareng tergabung menjadi Cawang Tangerang Cengkareng dengan pembagian wilayah binaan dan jumlah mitra binaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

TABEL AKUMULASI MITRA BINAAN DAN WILAYAH BINAAN 2017 DAN 2016

Cabang / Pusat	Wilayah Binaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kantor Pusat	Diluar wilayah operasional kantor Cabang	9.862	9.149
Jagorawi	Jakarta Timur, Bogor, Sukabumi.	1.243	1.143
Jakarta-Cikampek	Bekasi, Cikarang, Karawang, Cikampek, Purwakarta	1.584	1.476
Jakarta-Tangerang	Jakarta Barat, Banten	-	1.185
Cawang-Tomang-Cengkareng	Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat	-	1.248
Jakarta-Tangerang-Cengkareng	Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Banten	2.546	-
Purbaleunyi	Bandung, Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Cimahi.	1.523	1.434
Surabaya-Gempol	Jawa Timur	2.516	2.405
Semarang	Jawa Tengah	2.483	2.433
Belmera	Sumatra Utara	1.736	1.652
Palikanci	Cirebon, Majalengka, Kuningan, indramayu	1.435	1.375
Jumlah Mitra Binaan		24.928	23.500

Mitra Binaan

Pelaksanaan Program Kemitraan (PK) per 31 Desember 2017, Community Development Program telah menyalurkan dana sebesar Rp 52.845.000.000,- dana tersebut diserap oleh 1.428 mitra binaan (MB) yang tersebar di seluruh wilayah Cabang Jasa Marga. Bidang usaha yang dijalankan mitra binaan bervariasi mulai dari sektor Industri, Jasa, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

Selain penyaluran pinjaman, Community Development juga telah melakukan monitoring kepada mitra binaan serta melakukan penagihan terhadap kewajiban MB, guna digulirkan kembali kepada masyarakat yang masih membutuhkan. Untuk mendukung penyaluran program kemitraan diatas, Community Development juga memberi dukungan melalui penyelenggaraan pelatihan dengan berbagai modul kegiatan antara lain pembukuan, kewirausahaan dan motivasi. Guna membantu memajukan para

mitra, selain menyalurkan berupa dana bergulir Community Development juga memberi bantuan promosi kepada mitra binaan dalam bentuk pameran.

TABEL PENYALURAN PINJAMAN PROGRAM KEMITRAAN TAHUN 2017

No	Cabang	Industri		Jasa		Perdagangan		Perikanan		Pertanian		Peternakan		Perkebunan		TOTAL	
		MB	Rp	MB	Rp	MB	Rp	MB	Rp	MB	Rp	MB	Rp	MB	Rp	MB	Rp
1	Jagorawi	6	185.000.000	5	300.000.000	89	2.035.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.520.000.000
2	Jakarta-Tangerang-Cengkareng																
	Ruas Dalam Kota	3	75.000.000	4	285.000.000	58	1.555.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	65	1.915.000.000
	Ruas Tangerang	6	145.000.000	11	220.000.000	30	835.000.000	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	48	1.230.000.000
3	Jakarta-Cikampek	6	100.000.000	24	610.000.000	70	950.000.000	-	-	7	80.000.000	-	-	1	15.000.000	108	1.755.000.000
4	Purbaleunyi	20	460.000.000	12	320.000.000	56	1.475.000.000	1	15.000.000	-	-	-	-	-	-	89	2.270.000.000
5	Surabaya-Gempol	9	370.000.000	11	165.000.000	84	1.470.000.000	2	75.000.000	5	75.000.000	-	-	-	-	111	2.155.000.000
6	Semarang	9	410.000.000	6	160.000.000	32	1.340.000.000	-	-	-	3	90.000.000	-	-	-	50	2.000.000.000
7	Belmera	3	120.000.000	12	375.000.000	69	1.505.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	84	2.000.000.000
8	Palikanci	8	175.000.000	6	180.000.000	46	1.645.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60	2.000.000.000
9	Kantor Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713	35.000.000.000	713	35.000.000.000	
	TOTAL	70	2.040.000.000	91	2.615.000.000	534	12.810.000.000	4	120.000.000	12	155.000.000	3	90.000.000	714	35.015.000.000	1.428	52.845.000.000

Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan (BL) merupakan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian berbagai bentuk bantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 dana Program BL disalurkan dalam bentuk:

1. Bantuan korban bencana alam.
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan dalam Program Kemitraan.
3. Bantuan peningkatan kesehatan.
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.
5. Bantuan sarana ibadah.
6. Bantuan pelestarian alam.
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan berupa:
 - a. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - b. Penyediaan sarana air bersih;
 - c. Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - d. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;

- e. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
- f. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
- g. Bantuan peralatan usaha.

Kegiatan program BL yang telah dilakukan oleh Perseroan sepanjang tahun 2017 di antaranya sebagai berikut:

- Bantuan korban bencana alam.
Sebagai salah satu bentuk kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat sekitar, Perusahaan juga memberikan bantuan untuk korban bencana gunung Sinabung berupa pembuatan sumur dan MCK, bantuan pompa air untuk tanggap darurat banjir di Kec. Baleendah, bantuan sembako untuk korban banjir di Kel. Muktiharjo dan Kel. Kaligawe Semarang serta perlengkapan sekolah untuk korban longsor Kab. Ponorogo.
- Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
Perseroan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan berupa sarana/prasarana belajar, sarana/prasarana sekolah dan memberikan bantuan perpustakaan untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 18 (delapan belas) sekolah di seluruh operasional Perusahaan & di luar operasional Perusahaan.
- Bantuan peningkatan kesehatan.
Perusahaan melakukan bantuan peningkatan kesehatan secara rutin, diantaranya dalam bentuk

pengobatan gratis diantaranya kepada warga sekitar wilayah Cabang dan Anak Perusahaan.

- Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.

Pengembangan sarana dan prasarana umum yang dilakukan Perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial Perusahaan diantaranya:

- ✓ Memberikan gerobak sampah, pembuatan bak sampah untuk meningkatkan pengelolaan sampah masyarakat sekitar
- ✓ Pembangunan taman, saluran dan sarana air bersih di lingkungan warga sekitar
- ✓ Pembangunan jembatan untuk penyeberangan orang
- ✓ Pembuatan rambu dan marka jalan
- ✓ Pembuatan MCK untuk masyarakat umum
- ✓ Bantuan material untuk perbaikan jalan dan talud jalan
- ✓ Bantuan untuk Pasar Phara dan Pasar Mama sebagai bentuk kepedulian di wilayah Indonesia Timur
- Bantuan sarana ibadah.
Upaya peningkatan sarana ibadah di wilayah masyarakat sekitar dilakukan dalam bentuk pembangunan tempat wudhu, perbaikan sarana ibadah dan bantuan bahan material dalam pembangunan sarana ibadah.
- Bantuan pelestarian alam.
Program / kegiatan pelestarian alam yang dilakukan Perusahaan diantaranya: penanaman pohon di berbagai wilayah operasional Cabang, anak Perusahaan dan luar Perusahaan seperti Kulon Progo dan Balkondes Majakingsi.
- Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dalam bidang pengembangan sosial kemasyarakatan dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan pelatihan teknik dasar sablon sebagai upaya menciptakan masyarakat yang mandiri, renovasi MCK untuk masyarakat di wilayah Tangerang Selatan, Lebak, Cirebon, Probolinggo dan Kota Batu serta berbagi bingkisan

sembako, bantuan Elektrifikasi untuk Keluarga Pra Sejahtera di Sulawesi Utara serta bantuan peralatan pengangkutan tani bagi Gapoktan di Kota Bima.

Bantuan program Bina Lingkungan selain diberikan di wilayah operasional Perusahaan, diberikan pula di wilayah Sukabumi, Cianjur, Tegal, Pekalongan Lampung, Palembang, Aceh, Riau, Jambi, Bali, Banjarmasin.

Dampak dari Kegiatan

Dampak keuangan dari tanggung jawab Perseroan terhadap pengembangan sosial dan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 74,83 miliar. Dana tersebut direalisasikan pada penyaluran Program Kemitraan senilai Rp 53,6 miliar untuk 375 Mitra Binaan dan penyaluran Program Bina Lingkungan senilai Rp 21,16 miliar.

TABEL REALISASI PROGRAM KEMITRAAN TAHUN 2017

No	Sektor Usaha	Mitra Binaan	Jumlah Biaya
1	Industri	70	2.040.000.000
2	Jasa	91	2.615.000.000
3	Perdagangan	534	12.810.000.000
4	Perikanan	4	120.000.000
5	Pertanian	12	155.000.000
6	Peternakan	3	90.000.000
7	Perkebunan	714	35.015.000.000
8	Hibah (Pelatihan & Pameran)	56	847.592.000
TOTAL		1.484	53.692.592.000

TABEL REALISASI PROGRAM BINA LINGKUNGAN TAHUN 2017

No	Program Bina Lingkungan	Total Biaya
1	Kesehatan	1.342.255.700
2	Pendidikan	2.981.496.988
3	Sarana Umum	5.200.094.579
4	Sarana Ibadah	2.179.115.510
5	Bencana Alam	274.186.000
6	Pelestarian Alam	1.426.101.300
7	Pengentasan Kemiskinan	7.761.474.492
TOTAL		21.164.724.569

V. TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Perseroan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai aspek yang mendasar dan penting. Keamanan, kenyamanan dan kelancaran di jalan tol bagi pengguna jalan tol adalah komitmen Perseroan untuk mewujudkan kepuasan pelanggan.

KEBIJAKAN DAN RENCANA KEGIATAN

Industri jalan tol di Indonesia mempunyai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Untuk memenuhi SPM tersebut, Perseroan mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SE-DIR/2015 tentang Pedoman Pengukuran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol serta Kebijakan Direksi No. 111/KPTS/2011 tentang Pedoman Pelayanan Ekselen di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Survey Kepuasan Pelanggan

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk memenuhi tanggung jawab kepada pengguna jalan tol sebagai konsumen atau pelanggan. Salah satunya melalui Survey Kepuasan Pelanggan yang rutin dilakukan setiap tahun. Tahun 2017, hasil Indeks Kepuasan Pelanggan Jalan Tol Perseroan adalah 5,2 dalam skala 1-6.

Dalam penyampaian informasi mengenai pelayanan, Perseroan memberikan informasi sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Untuk memahami secara menyeluruh kebutuhan dan pandangan dari berbagai aspek di lingkup industri jalan tol di Indonesia, diperlukan pemetaan persepsi terhadap pemangku kepentingan dan bagaimana masing-masing kelompok *stakeholder* menilai program pelayanan yang telah dilakukan Perseroan.

Jasa Marga berkomitmen untuk mengimplementasikan program kepuasan pelanggan, dengan mengkampanyekan pentingnya pelayanan prima atau *Service Excellence* dengan prioritas utama pada aspek keselamatan pekerja, area kerja, perlengkapan dan lingkungan. Komitmen ini dilakukan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecepatan waktu transaksi guna mengurangi antrian di gerbang-gerbang tol dengan penerapan pembayaran non tunai di gerbang tol.
2. Memperlancar lalu lintas melalui peningkatan kapasitas layanan dan pemberian informasi lalu lintas yang *real time* dalam rangka mengurangi gangguan perjalanan.
3. Meningkatkan kualitas konstruksi jalan, jembatan dan bangunan pelengkap operasional.

Tindakan Yang Dilakukan

Beberapa cara telah dilakukan dan disempurnakan pada tahun 2017, tidak lain untuk memberikan kenyamanan dan jaminan perlindungan konsumen melalui jalan tol yang lancar aman dan nyaman. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Salah satu poin penting dalam evaluasi SPM oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah indikator *Rutting* (tidak ada *rutting* 100%), Tempat Istirahat dan Pelayanan (TI/TIP), Sistem Informasi Kondisi Lalu Lintas (VMS sebelum akses masuk dan di ruas jalan tol), dan Lingkungan (kebersihan, tanaman dan rumput). Evaluasi dan penilaian SPM oleh BPJT menunjukkan hasil bahwa jalan tol Perseroan telah memenuhi standar penyediaan informasi produk layanan yang mendukung keamanan bagi pelanggan. Peningkatan kualitas dari produk layanan ini terus ditingkatkan dengan target melebihi standar peraturan yang berlaku (*beyond the standard*).

Dalam rangka senantiasa meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jalan tol sebagai pelanggan Perseroan, selain juga untuk pemenuhan SPM, Perseroan selama tahun 2017 diantaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

TABEL STRATEGI PELAYANAN DAN APLIKASINYA DI JALAN TOL

Strategi Pelayanan	Aplikasi di Jalan Tol
Meningkatkan akurasi pendapatan tol sehingga tercapai zero loss melalui peningkatan sistem pengamanan pendapatan tol yang dilakukan secara bertahap dengan prioritas cabang yang memiliki volume lalu lintas tinggi dan melakukan pergantian peralatan tol yang berumur lebih dari 5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan GTO Entrance, Gardu Exit dan GTO e-Toll. 2. Pemasangan CCTV, RTMS, TCT, ALB, magazine train dalam gardu tol. 3. Peningkatan peralatan tol.
Menciptakan jalan tol yang lancar, aman dan nyaman melalui modernisasi teknologi operasi dengan penerapan teknologi diutamakan pada ruas-ruas jalan tol dengan volume lalu lintas tinggi dan meningkatkan pusat layanan informasi lalu lintas dan pengaduan yang dengan mudah dapat diakses dan selalu real time	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana teknologi operasional (CCTV, VMS, RTMS, Fiber Optik). 2. Pengadaan sarana penunjang operasional (radio komunikasi, GPS, speed gun, retroreflektometer, moving roller, alat pemadam kebakaran). 3. Peningkatan estetika dan beautifikasi meliputi pengecatan dan penggantian guardrail railing dan concrete barrier pada median pembatas jalan tol; pengecatan struktur jembatan; kebersihan dan kerapian area gerbang tol, kantor gerbang, dan jalur lalu lintas; melakukan beautifikasi struktur; serta melakukan penghijauan dan penataan tanaman/pohon di area gerbang tol, ruang manfaat jalan tol (rumajatotol) dan area Tempat Istirahat 4. Zero Potholes dan preventive maintenance. 5. Program Scrapping-Filling-Overlay (SFO) diutamakan pada lokasi-lokasi dengan repetisi beban dan atau tingkat kerusakan (kondisi jalan) kritis. 6. Program peningkatan kapasitas diprioritaskan pada ruas jalan tol dengan V/C rasio mendekati 0.8 berdasarkan PPJT. 7. Modernisasi penggunaan teknologi operasi tepat guna dan inovatif dengan penggunaan material yang bernilai ekonomi tinggi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pemeliharaan serta memastikan ketersediaan fungsi dan sarana penunjang/pelengkap jalan tol guna menjaga keamanan dan keselamatan sesuai dengan koridor syarat-syarat SPM. 8. Responsif terhadap upaya-paya pelestarian alam melalui penghutan jalan tol dalam rangka mendukung program pengurangan emisi karbon dan penggunaan green technology dan green construction.

Perlindungan terhadap Konsumen

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna jalan tol, Perseroan terus mengembangkan dan memperbaharui sistem pelayanan informasi, lalu lintas, transaksi dan konstruksi.

Pelayanan Informasi

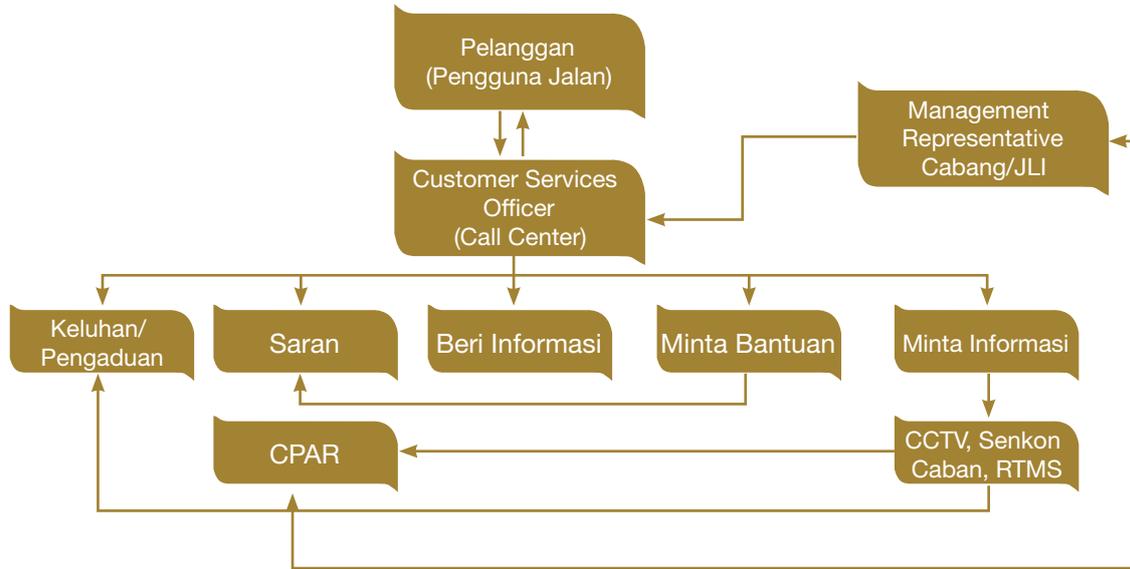
Di bidang pelayanan informasi, Perseroan meningkatkan berbagai macam layanan dalam mempermudah akses informasi kepada pengguna jalan tol melalui:

1. **Jasa Marga Traffic Information Center (JMTIC)**
Sebagai sarana penyediaan informasi produk layanan yang mendukung keamanan bagi pelanggan, Jasa Marga memiliki pusat informasi, yakni Jasa Marga Traffic Information Center (JMTIC) melalui call center baru yaitu 14080 yang merupakan media komunikasi

bagi para pemakai jalan tol. JMTIC akan mencatat dan menindaklanjuti pertanyaan dan keluhan pemakai jalan.



BAGAN SKEMA ALUR PENYEDIAAN INFORMASI MELALUI JMTIC



Sepanjang tahun 2017, jumlah telpon yang masuk sebanyak 368.003 telepon, turun 5% dari tahun 2016 dengan total 389.523 telepon.

TABEL TUJUAN PENELEPON MENGHUBUNGI JMTIC TAHUN 2016 DAN 2017

No.	Tujuan	2016	2017
1	Minta Informasi	381.611	362.324
2	Minta Bantuan	6.560	5.077
3	Beri Informasi	725	349
4	Pengaduan/Keluhan	599	244
5	Saran	28	9
TOTAL		389.523	368.003

Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap call center JMTIC, Perseroan aktif melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan tol melalui *Variable Message Sign* (VMS).

- 2. Twitter @PTJASAMARGA dan @official.jsmr**
 Perseroan memahami bahwa setiap pengguna jalan tol menghendaki kemudahan dalam mengakses informasi mengenai kondisi lalu lintas di jalan tol. Seiring meningkatnya kebutuhan pengguna jalan tol akan informasi kondisi lalu lintas terkini dan demi meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol, selain menyediakan Layanan Call Center, JMTIC

juga menyediakan akses kepada pengguna jalan tol melalui twitter @PTJASAMARGA. Saat ini, twitter @PTJASAMARGA dikendalikan oleh seorang operator twitter yang terintegrasi dengan unit kerja JMTIC.

Informasi yang masuk dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

- Minta informasi kondisi lalu lintas
- Minta bantuan petugas
- Memberikan informasi kondisi lalu lintas
- Pengaduan/keluhan/kritik
- Saran
- Pertanyaan (Selain informasi kondisi lalu lintas)

Saat ini twitter @PTJASAMARGA memberikan informasi kondisi lalu lintas setiap 30 menit sekali. Pada tahun 2017, jumlah *follower* twitter Jasa Marga mencapai 264.899 *follower*, meningkat 9,75% atau sebesar 23.525 *follower* dibanding tahun 2016.

- 3. Website www.jasamarga.com**
 Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan dituntut untuk tampil dengan citra positif yang terus meningkat. Selain itu tuntutan keterbukaan informasi perusahaan yang cepat, tepat dan akurat merupakan salah satu ciri perusahaan terbuka. Guna hal tersebut Perseroan telah memiliki media sosialisasi dan informasi *online* yang

mendukung strategi komunikasi perusahaan yaitu www.jasamarga.com.

4. Website www.jasamargalive.com dan m.jasamargalive.com

Untuk mendapatkan informasi kondisi visual lalu lintas di jalan tol secara *real time*, Perseroan menyediakan fasilitas aplikasi pemantau CCTV lajur jalan tol yang dapat diakses melalui browser lintas sistem operasi (*inter-platform*). Untuk pengguna komputer Desktop berbagai jenis sistem operasi, seperti Microsoft Windows, Apple MacOS ataupun Linux, dapat mengakses CCTV tersebut pada alamat www.jasamargalive.com. Sedangkan untuk pengguna yang memakai *gadget* seperti Google Android ataupun Apple iOS bisa mengakses CCTV tersebut pada alamat m.jasamargalive.com. Hal ini dilakukan agar pengguna jalan tol bisa mengakses data yang disajikan Perseroan dengan berbagai macam komputer dan *gadget* terkini. Untuk dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan penyajian informasi lalu lintas secara *real time*.

Pada tahun 2017, Perseroan melakukan kegiatan transformasi dengan mensukseskan program 100% non tunai di jalan tol. Per tanggal 31 Oktober 2017, sesuai arahan dari Kementerian BUMN, bahwa seluruh transaksi di gerbang tol harus menggunakan kartu elektronik untuk transaksi. Saat ini kartu elektronik yang tersedia adalah dari lima perbankan yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BCA. Untuk mendukung transaksi elektronik ini, sejak Bulan September 2017, Jasa Marga secara bertahap telah mengganti seluruh gardu regulernya menjadi transaksi elektronik yang terbagi menjadi Gardu Tol Otomatis (GTO) dan Gardu Semi otomatis (GSO).

Untuk peningkatan pelayanan di bidang transaksi, Perseroan melakukan berbagai upaya di antaranya peningkatan jumlah Gardu Tol Otomatis (GTO) pada ruas-ruas yang dikelola menjadi sejumlah 619 gardu atau sebesar 52% dari total gardu operasi. Ke depannya, di tahun 2018 Perseroan menargetkan dapat menambah jumlah GTO menjadi sebesar 48% dari total gardu operasi sehingga pada tahun 2018, seluruh gardu tol telah menggunakan sistem GTO.

Dalam menjaga kenyamanan, keamanan, dan kelancaran di jalan tol, Perseroan senantiasa menjaga kualitas jalan tol yang dikelola di antaranya melalui program-program sebagai berikut:

1. Scrapping Filling Overlay (SFO) dan Rekonstruksi Perkerasan Pada tahun 2017 Perseroan telah melakukan kegiatan Scrapping, Filling, Overlay (SFO) dan rekonstruksi untuk menjaga kualitas jalan tol yang tersebar di seluruh ruas yang dikelola oleh Perseroan. Perseroan mengeluarkan dana sekitar Rp. 427,3 Miliar untuk kegiatan SFO serta dana sekitar Rp. 234,5 Miliar untuk kegiatan rekonstruksi perkerasan;
2. Peningkatan Kapasitas Jalan Dalam rangka meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran di jalan tol, Perseroan juga melakukan program Peningkatan Kapasitas pada tahun 2017. Contoh program peningkatan kapasitas tersebut di antaranya adalah Pekerjaan Pembangunan Gerbang Tol dan Penambahan Lajur Dedicated Lane dalam Rangka Perubahan Sistem Transaksi Terbuka pada Jalan Tol Jagorawi 2017 dan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Integrasi Tahap 3 pada Jalan Tol Jakarta Tangerang Tahun 2017. Untuk kedua program tersebut, Perseroan mengeluarkan dana sekitar Rp. 272, 2 Miliar;
3. Peningkatan Estetika dan Beautifikasi Jalan Tol Untuk meningkatkan kenyamanan dalam berkendara di jalan tol, pada tahun 2017 Perseroan juga melakukan Program Peningkatan Estetika dan Beautifikasi pada seluruh ruas jalan tol yang dikelola Perseroan meliputi pengecatan dan penggantian guardrail railing dan concrete barrier pada median pembatas jalan tol; pengecatan struktur jembatan; kebersihan dan kerapian area gerbang tol, kantor gerbang, dan jalur lalu lintas; melakukan beautifikasi struktur; serta melakukan penghijauan dan penataan tanaman/pohon di area gerbang tol, ruang manfaat jalan tol (rumajatot) dan area Tempat Istirahat. Untuk program-program tersebut Perseroan mengeluarkan dana sekitar Rp. 49,6 Miliar;
4. Penerangan Jalan Tol Pada Tahun 2017 juga telah dilakukan pemeliharaan 808 titik lampu penerangan jalan tol berupa pemasangan lampu PJU baru sebanyak 433 titik dan penggantian lampu PJU sebanyak 375 titik. Untuk kegiatan pemasangan serta penggantian lampu PJU tersebut perseroan mengeluarkan dana sekitar Rp. 22 Miliar

5. Peningkatan kapasitas gerbang

Peningkatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan layanan volume lalu lintas yang terus meningkat. Peningkatan pelayanan tersebut difokuskan pada modernisasi sistem pengoperasian dan peningkatan kapasitas gerbang. Modernisasi dilakukan dengan menerapkan Elektronifikasi (100% non tunai) pada seluruh gerbang tol Jasa Marga secara bertahap mulai dari September 2017 hingga 31 Oktober 2017.

6. Tim Sapu Lubang

Tim Sapu lubang merupakan tim yang dibentuk oleh masing-masing Cabang untuk menyelenggarakan penanganan lubang. Tim ini dalam SK Direksi nomor 25/KPTS/2017, tanggal 10 Februari 2017, tentang Prosedur Penanganan Lubang Pada Jalan Tol, disebutkan sebagai Tim Penanganan Lubang.

Tim ini bekerja untuk mewujudkan program Zerophole, yaitu penutupan lubang dalam 1x 24 jam setelah mendapatkan laporan inspeksi ataupun keluhan dari pengguna jalan.

Setiap Cabang masing-masing memiliki jumlah Tim Sapu Lubang selalu siap dalam melayani kenyamanan konstruksi jalan tol adapun tim tersebut

No	Cabang/Ruas	Jumlah Tim Sapu Lubang
1.	Dalam Kota dan Soedyatmo	2 tim
2.	Jakarta-Tangerang	1 tim
3.	Purbaleunyi	6 tim : - Cipularang A (2 tim) - Cipularang B (2 tim) - Padaleunyi (2 tim)
4.	Surabaya-Gempol	1 tim
5.	Semarang	1 tim
6.	Palikanci	2 tim
7.	Belmera	1 tim
8.	JORR	6 tim
9.	Jagorawi	1 tim
10.	Japek	12 tim

7. Operasi kendaraan Overload

Selain upaya peningkatan kualitas pelayanan jalan tol tersebut, Perseroan melakukan Operasi terpadu Penertiban Kendaraan Kelebihan Muatan bekerjasama

dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Kendaraan overload terjaring pada kegiatan operasi yang dilakukan oleh masing-masing cabang dengan waktu bervariasi (5-7 hari).

Tujuan operasi tak lain untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas, sehingga kondisi jalan tol pun lancar, aman dan nyaman bagi pengendara. Kendaraan berat dengan muatan berlebih menjadi sasaran operasi, karena kendaraan tersebut sering menimbulkan dampak kerusakan perkerasan jalan sekaligus menghambat lalu lintas karena berjalan dengan kecepatan underspeed.

DATA KENDARAAN YANG BERMUATAN LEBIH (DALAM SATUAN UNIT)

No	Uraian	Jumlah Kendaraan (Overload)		
		2015	2016	2017
1.	Surabaya Gempol	20	78	418
2.	Cawang Tomang Cengkareng	-	-	251
3.	Jagorawi	248	280	232
4.	Palikanci	104	-	170
5.	Jakarta-Cikampek	451	-	392
6.	Purbaleunyi	159	-	9.925
7.	Semarang	83	426	35
8.	Belmera	1	24	125
9.	Jakarta Tangerang	217	-	8

Dampak dari Kegiatan

Nilai biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeliharaan yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap konsumen selama tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1,59 Triliun yang meliputi program Pemeliharaan Periodik (Scrapping Filling Overlay), Peningkatan Kapasitas, Sarana Penunjang Jalan Tol (SPJT), dan Sarana Penunjang Operasional Jalan tol (SPOJT).



Transaksi menggunakan uang elektronik mampu memangkas setengah waktu transaksi dan mengurangi antrean di gerbang tol. Transaksi non tunai telah diaplikasikan di ruas jalan tol milik Jasa Marga sejak tahun 2008, dan telah 100% diaplikasikan sejak 31 Oktober 2017.

DAFTAR ALAMAT

KANTOR PUSAT JASA MARGA

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta Timur 13550
DKI Jakarta
Indonesia

Tel. (62-21) 841 3526/3630
e-mail: jsmr@jasamarga.co.id
Situs Web: www.jasamarga.com

KANTOR CABANG JASA MARGA

Cabang Jagorawi
Kawasan Kantor Pusat
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 841 3632, 840 0732
Fax. (62 21) 840 0055
e-mail: jagorawi@jasamarga.co.id

Cabang Jakarta-Cikampek
Jln. Teuku Umar, Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu
Bekasi 17114
Jawa Barat

Tel. (62 21) 821 6515, 8243 0045/48
Fax. (62 21) 821 6507
e-mail: jakpek@jasamarga.co.id

Cabang Purbaleunyi
Plaza Tol Pasteur
Jln. Dr. Djundjuran No. 257
Bandung 40164
Jawa Barat

Tel. (62 22) 200 0867/68
Fax. (62 22) 201 1433
e-mail: purbaleunyi@jasamarga.co.id

Cabang Surabaya-Gempol
Plaza Tol Kota Satelit
Jln. Mayjen. Sungkono
Surabaya 60189
Jawa Timur

Tel. (62 31) 567 9401/2008
Fax. (62 31) 732 9941
e-mail: surgem@jasamarga.co.id

Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng
Plaza Tol Cililitan
Jln. Cililitan Besar
Jakarta 13510
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 8088 7227
Fax. (62 21) 8088 7228
e-mail: ctc@jasamarga.co.id

Cabang Palikanci
Jln. Jend. Sudirman No. 138, Ciperna
Cirebon 45171
Jawa Barat

Tel. (62 231) 489 800, 484 268
Fax. (62 231) 483 457
e-mail: palikanci@jasamarga.co.id

Cabang Semarang
Plaza Tol Manyaran
Jln. Tol Semarang
Semarang 50147
Jawa Tengah

Tel. (62 24) 760 6012/14
Fax. (62 24) 762 3940
e-mail: semarang@jasamarga.co.id

Cabang Belmera
Jln. Simpang Tanjung No. 1A
Medan 20241
Sumatera Utara

Tel. (62 61) 661 1701/2920
Fax. (62 61) 661 1055
e-mail: belmera@jasamarga.co.id

ENTITAS ANAK JASA MARGA

PT Jalantol Lingkarluar Jakarta

Plaza Tol Jati Asih
Bekasi 17423
Jawa Barat

Tel. (62 21) 822 3232
Fax. (62 21) 820 5151
e-mail: layanan@jlj.co.id

PT Trans Marga Jateng

Jln. Murbei No. 1
Sumur Boto Banyumanik
Semarang 50269
Jawa Tengah

Tel. (62 24) 747 5222/5735
Fax. (62 24) 747 5735
e-mail: admin@transmargajateng.com
Situs Web: www.transmargajateng.com

PT Jasamarga Bali Tol

Kawasan Ikat Plaza
Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 505
Pemogan 80221, Denpasar
Bali

Tel. (62 361) 725 326
Fax. (62 361) 725 327

PT Jasamarga Gempol Pasuruan

Gedung Jasamarga Pandaan Tol, Lt. 3
Plaza Tol Pandaan, Pandaan
Pasuruan 67156
Jawa Timur

Tel. (62 343) 674 1324
Fax. (62 343) 674 1323

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng

Business Park Tangerang City Blok A19
Jln. Jend. Sudirman No. 1, Cikokol
Tangerang 15117
Banten

Tel. (62 21) 5578 2453
Fax. (62 21) 5578 2456
e-mail: jkc@jkc.co.id

PT Jasamarga Kualanamu Tol

Jln. Tengku Raja Muda No. 10
Lubuk Pakam
Deli Serdang 20511
Sumatera Utara

Tel. (62 61) 795 5941

PT Marga Sarana Jabar

Plaza Tol Sentul Barat
Jalan Tol Lingkar Luar Bogor
Bogor 16710
Jawa Barat

Tel. (62 21) 2925 5000
Fax. (62 21) 2925 9942

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto

Gedung MNA
Jln. Raya Taman
Plaza Tol Waru I & Ramp
Sidoarjo 61257
Jawa Timur

Tel. (62 31) 787 9994, 787 9995
Fax. (62 31) 787 9993

PT Marga Lingkar Jakarta

Plaza Tol Meruya
Jln. Raya Meruya Utara 1, Meruya Utara
Jakarta Barat 11620
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 5898 8462
Fax. (62 21) 5890 8447
e-mail: margalingkarjakarta@mlj-tol.co.id

PT Jasamarga Pandaan Tol

Plaza Tol Pandaan, Pandaan
Pasuruan 67156
Jawa Timur

Tel. (62 343) 565 0727/28/29
Fax. (62 343) 565 0730

PT Marga Trans Nusantara

Astra Biz Centre Commercial Park Barat Lot I No. 11
Jln. BSD Raya Utama, BSD City
Tangerang 15331
Banten

Tel. (62 21) 3045 0666
Fax. (62 21) 3006 2037

PT Jasamarga Solo Ngawi

Jln. Moh. Yamin No. 149
RT 01/RW 02, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan
Surakarta 57154
Jawa Tengah

Tel. (62 271) 789 2066

PT Ngawi Kertosono Jaya

Jln. Borobudur No. 20, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan
Manguharjo
Madiun 63122
Jawa Timur

Tel. (62 351) 477 5555/2200

PT Jasamarga Semarang Batang

Ruko Ivy Arcadia Blok A1/21 Citraland
BSB City
Kelurahan Pesantren, Kecamatan Mijen
Semarang 50212
Jawa Tengah

Tel. (62 24) 7643 3625
Fax. (62 24) 7643 2826

PT Jasamarga Manado Bitung

Graha Simatupang Wing 2B
Jln. T. B. Simatupang Kav. 38, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 782 9412

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

Plaza Tol Jagorawi
Jln. Raya Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta Timur 13550
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 2281 9658

PT Jasamarga Japek Selatan

Kawasan Kantor Pusat Jasa Marga
Gedung Cabang Jagorawi, Lt. 4
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta Timur 13550
DKI Jakarta

PT Cinere Serpong Jaya

Ruko City Market Pondok Cabe Blok D2 No. 07
Jln. Pondok Cabe Raya, Kelurahan Pondok Cabe Udik,
Kecamatan Pamulang
Tangerang Selatan 15418
Banten

Tel. (62 21) 7416 6620
email: csj@jasamarga.co.id

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda

Pesona Mediterania Balikpapan Baru
Jln. Taman Vinolia Blok P1 No. 9 Gunung Samarinda
Balikpapan Utara 76125
Kalimantan Timur

Tel. (62 542) 870 3077
Fax. (62 542) 870 3077
e-mail: tolbalikpapanamarinda@ptjbs.co.id

PT Jasamarga Pandaan Malang

Plaza Tol Pandaan Lt. 1
Jalan Tol Gempol-Pandaan
Pasuruan 67156
Jawa Timur

Tel. (62 343) 674 3241
e-mail: administrator@pt-jpm.co.id

PT Jasamarga Transjawa Tol

Kawasan Kantor Pusat Jasa Marga
Gedung Cabang Jagorawi, Lt. 3-4
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta Timur 13550
DKI Jakarta

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi

Jln. Bina Marga No. 42B RT 002/06
Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung
Jakarta Timur 13840
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 8434 1752
Fax. (62 21) 8434 1752
e-mail: tolprobwangi@jpb.co.id
Situs Web: www.jpb.co.id

PT Jasamarga Tollroad Operator

Kawasan Kantor Pusat Jasa Marga
Gedung Cabang Jagorawi, Lt. 4
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta Timur 13550
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 2298 4722
Fax. (62 21) 2270 1976

PT Jasamarga Tollroad Maintenance

Plaza Tol Jagorawi
Jln. Raya Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta Timur 13560
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 2983 5858
Fax. (62 21) 2281 9474
e-mail: cs@jasamargatollroadmaintenance.com
Situs Web: www.jasamargatollroadmaintenance.com

PT Jasamarga Properti

Gedung Workshop PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Jln. Raya Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta Timur 13560
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 2984 0400
e-mail: jmp@jasamargaproperti.co.id

**ENTITAS ASOSIASI & VENTURA BERSAMA JASA
MARGA****PT Trans Lingkar Kita Jaya**

Jln. Gas Alam Kp. Pedurenan
RT/RW 06/07 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan
Cimanggis
Depok 16954
Jawa Barat

Tel. (62 21) 8775 7676
Fax. (62 21) 8775 0141

PT Hutama Marga Waskita

Kompleks Bina Marga
Jln. Bina Marga No. 2, RT 001/RW 005, Cipayung
Jakarta Timur 13840
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 844 4640

PT Ismawa Trimitra

Graha Iskandarsyah
Jln. Iskandarsyah Raya 66 C Lt. 11 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 7207 5858
Fax. (62 21) 7209 935

ASET KEUANGAN JASA MARGA

PT Jakarta Lingkar Baratsatu

Jln. Gatot Subroto 54
Jakarta 10260
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 570 9091
Fax. (62 21) 570 9120

PT Citra Margatama Surabaya

Jln. Pakis Argosari VI/A-10
Surabaya 60225
Jawa Timur

Tel. (62 31) 567 1266/848 4658
Fax. (62 31) 567 1277/848 4659

PT Bosowa Marga Nusantara

Gedung Menara Bosowa Lt. 16
Jln. Jend. Sudirman No. 5
Makassar
Sulawesi Selatan

Tel. (62 411) 368 1035
Fax. (62 411) 368 1038

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia

Gedung Wika
Jln. D. I. Panjaitan Kav. 9
Jakarta Timur 13340
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 819 1208, 850 8640/50
Fax. (62 21) 819 1235

PT Marga Mandala Sakti

Karawaci Office Park Blok H No. 65-68
Lippo Karawaci
Tangerang 15881
Banten

Tel. (62) 254 2078 78/0 800 1777 879

PT Margaraya Jawa Tol

Jln. Dharmawangsa Raya No. 10, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
DKI Jakarta

Tel. (62 21) 720 2143
Fax. (62 21) 720 8771

PT Jatim Prasarana Utama

Jln. Puncak Permai Utara II/15
Surabaya
Jawa Timur

Tel. (62 31) 732 9781
Fax. (62 31) 734 3577

PT Kresna Kusuma Dyandra Marga

Ruko Eksklusif Radin Inten Kav. 21
Jln. Radin Inten 2 No. 80, Duren Sawit
Jakarta Timur 13440
DKI Jakarta

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)

PT DATINDO ENTRYCOM

Jln. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Tel. (62 21) 350 8077 (Hunting)
Fax. (62 21) 350 8078
www.datindo.com

Jasa

Memelihara daftar pemegang saham (DPS) dan melaksanakan pencatatan perubahan-perubahan pada DPS di pasar sekunder, mengelola voting dan KTUR RUPS Tahunan.

Nilai Kontrak Rp 82.500.000

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.

Jln. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Tel. (62 21) 724 4650, 739 2801, 720 9542
Fax. (62 21) 726 5090

Jasa

Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Nilai Kontrak Rp 35.400.000

KONSULTAN HUKUM**Hanafiah Ponggawa & Partners**

Wisma 46 Kota BNI, 41st Floor (Main Reception) and 32nd Floor

Jln. Jenderal Sudirman Kav. 1

Jakarta Pusat 10220

Tel. (62 21) 574 6545, 570 1837

Fax. (62 21) 571 6464, 570 1835

<http://www.hprplawyers.com>

Jasa

Konsultan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Nilai Kontrak Rp 26.400.000

PERUSAHAAN PEMERINGKAT**PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)**

Panin Tower Senayan City 17th Floor

Jln. Asia Afrika Lot 19

Jakarta 10720

Tel. (62 21) 7278 2380

Fax. (62 21) 7278 2370

www.pefindo.com

Jasa

Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Jasa Marga (Obligasi XII Seri Q Tahun 2006, Obligasi XIII Seri R Tahun 2007, Obligasi XIV Seri JM-10 Tahun 2010, Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri S tahun 2013 dan Obligasi Berkelanjutan Tahap II Seri T tahun 2014).

Moody's

Moody's Investors Service Singapore Pte. Limited

50 Raffles Place #23-06

Singapore Land Tower

Singapore 048623

Tel. (65) 6398 8300

www.moodys.com

Jasa

Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Komodo.

Standard and Poor's

S&P Global Ratings Singapore Pte. Ltd.

12 Marina Boulevard

#23-01, Marina Bay Financial Centre Tower 3

Singapore 018982

Tel. (65) 6438 2881

Fax. (65) 6438 2320

GST Reg No. 201117563C

www.standardandpoors.com

Jasa

Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Komodo.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK**Purwanto, Sungkoro & Surja****(Firma Anggota Ernst & Young Global Limited)**

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 2 Lt. 7

Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Tel. (62 21) 5289 5000

Fax. (62 21) 5289 4100

www.ey.com/id

Jasa

- Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
- Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
- Audit Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku pada tahun buku 2017.
- Audit Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern Perusahaan tahun buku 2017.

Nilai Kontrak Rp 1.925.000.000

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN TAHUNAN 2017

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2017 PT JASA MARGA (PERSERO) TBK.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2018

Anggota Direksi

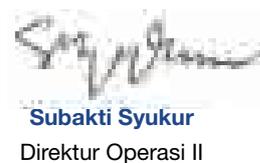


Desi Arryani

Direktur Utama



Mohammad Sofyan
Direktur Operasi I



Subakti Syukur
Direktur Operasi II



Donny Arsal
Direktur Keuangan



Hasanudin
Direktur Pengembangan



Kushartanto Koeswiranto

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum/Direktur Independen

Anggota Dewan Komisaris



Refly Harun

Komisaris Utama/Komisaris Independen



Agus Suharyono

Komisaris



Boediarso Teguh Widodo

Komisaris



Muhammad Sapta Murti

Komisaris



Sugihardjo

Komisaris



Sigit Widyawan

Komisaris Independen

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

Istilah/ Singkatan	Keterangan
JSMR	Jujur, Sigap, Mumpuni dan Respek Tata Nilai Jasa Marga yang menjadi landasan setiap Insan Jasa Marga dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. JSMR juga merupakan kode ticker saham Jasa Marga.
JMTIC	Jasa Marga Traffic Information Center Layanan call center Jasa Marga yang memberikan informasi mengenai kondisi ruas-ruas jalan tol Jasa Marga kepada pemakai jalan serta merupakan media untuk menerima saran/keluhan dari pemakai jalan, dengan menghubungi 14080 .
GTO	Gardu Tol Otomatis Gardu tol dengan proses pelayanan transaksi secara swalayan dengan menggunakan peralatan tol.
e-Toll Card	Kartu yang digunakan untuk transaksi pembayaran tol secara elektronik.
e-Toll Pass	Sistem transaksi tanpa henti pada GTO, dengan menggunakan e-Toll Card yang dipasang pada OBU.
OBU	On Board Unit Alat penunjang transaksi tanpa henti yang terpasang di kendaraan yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara transceiver dan kartu pembayaran elektronik (e-Toll Card).
VMS	Variable Message Sign Papan rambu elektronik yang menampilkan informasi mengenai kondisi lalu lintas jalan tol.
RTMS	Remote Traffic Microwave Sensor Sensor yang dipasang di jalan tol untuk mendeteksi kecepatan kendaraan yang melewati jalan tol.
CCTV	Closed Circuit Television Perangkat kamera video digital yang dipasang di suatu tempat agar situasi dan kondisi di tempat tersebut dapat dipantau melalui layar monitor dari tempat lain.
KTME	Kartu Tanda Masuk Elektronik Tanda bukti masuk jalan tol pada sistem tertutup yang dalam pengoperasiannya menggunakan chip, berfungsi untuk menyimpan identitas kendaraan berupa golongan kendaraan dan asal gerbang yang dilakukan secara elektronik oleh peralatan tol.
TCT	Toll Collector Terminal Peralatan transaksi lalu lintas/kendaraan pada gardu tol berupa komputer khusus yang digunakan untuk menerima dan melayani transaksi serta terhubung dengan berbagai jenis peralatan utama dan peralatan pendukung sesuai dengan jenis gardu.
ALB	Automatic Lane Barrier Peralatan manajemen lalu lintas pada gardu tol yang dilengkapi dengan palang pintu yang dipasang di lajur gardu tol dengan fungsi sebagai penghalang lajur yang bekerja secara otomatis.
Magazine Train	Rel untuk mengangkut tempat KTME.
SPM	Standar Pelayanan Minimal Ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol.
Zero Pothole	Tidak ada lubang Salah satu tolok ukur dalam SPM dalam aspek kondisi jalan, yaitu tidak ada lubang 100%.
SFO	Scrapping Filling Overlay Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk menjaga aspal jalan tol tetap pada kondisi baik.
V/C ratio	Volume/Capacity Ratio Rasio yang digunakan untuk mengukur kepadatan kendaraan di jalan tol.
PJU	Penerangan Jalan Umum Lampu yang dipasang pada sisi jalan tol untuk menerangi jalan tol.
PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol Badan yang merupakan regulator di industri jalan tol di Indonesia yang berada di bawah Kementerian PUPR dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR.
PPJT	Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Perjanjian antara Kepala BPJT yang ditugaskan Menteri PUPR atas nama Pemerintah dengan BUJT untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol.
BUJT	Badan Usaha Jalan Tol Perusahaan pengelola jalan tol yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol.

Istilah/ Singkatan	Keterangan
TPT	Tim Pengadaan Tanah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat (Menteri PUPR) dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol dan berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR.
P2T	Panitia Pengadaan Tanah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
CPAR	Corrective Preventive Action Request Langkah-langkah perbaikan dalam suatu proses atas ketidaksesuaian yang ditemukan untuk segera ditindaklanjuti, dilakukan koreksi dan dicegah supaya tidak terulang lagi.

REFERENSI PERATURAN OJK NO. 29/POJK.04/2016 DAN SURAT EDARAN OJK NO. 30/SEOJK.04/2016

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
Bentuk Laporan Tahunan		
1.	Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid.	✓
2.	Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	✓
3.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	✓
4.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	✓
5.	Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.	✓
6.	Laporan Tahunan dalam bahasa asing paling sedikit menggunakan Bahasa Inggris.	✓
7.	Laporan Tahunan yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Tahunan yang menggunakan Bahasa Indonesia.	✓
8.	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.	✓
9.	Laporan Tahunan dalam bentuk asli wajib ditandatangani secara langsung oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	✓
10.	Salinan dokumen elektronik wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.	✓
11.	Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	✓
12.	Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian Laporan Tahunan.	✓
13.	Tanda tangan dibubuhkan pada surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan pada lembaran tersendiri dalam Laporan Tahunan.	✓
Isi Laporan Tahunan		
1.	Ketentuan umum.	
1.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:	✓
a.	Ikhtisar Data Keuangan Penting.	✓
b.	Informasi Saham (jika ada).	✓
c.	Laporan Direksi.	✓
d.	Laporan Dewan Komisaris.	✓

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik.	✓
f.	Analisa dan Pembahasan Manajemen.	✓
g.	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	✓
h.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Perusahaan Publik.	✓
i.	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit.	✓
j.	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.	✓
2.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	✓
2.	Uraian Isi Laporan Tahunan	
a.	Ikhtisar Data Keuangan Penting	77
	Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	
1.	Pendapatan/penjualan.	78-80
2.	Laba bruto.	78-80
3.	Laba (rugi).	78-80
4.	Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	78-80
5.	Total laba (rugi) komprehensif.	78-80
6.	Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	78-80
7.	Laba (rugi) per saham.	78-80
8.	Jumlah aset.	78-80
9.	Jumlah liabilitas.	78-80
10.	Jumlah ekuitas.	78-80
11.	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	78-80
12.	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	78-80
13.	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	78-80
14.	Rasio lancar.	78-80
15.	Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	78-80
16.	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	78-80
17.	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	78-80
b.	Informasi saham.	93
	Informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat:	
1)	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	94-96
a.	Jumlah saham beredar.	94-96
b.	Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	94-96
c.	Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	94-96
d.	Volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	94-96
	Informasi pada huruf a) diungkapkan oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek.	✓
	Informasi pada huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek.	✓

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
2)	Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham, informasi harga saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	94-95
a)	Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.	94-95
b)	Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham.	94-95
c)	Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.	94-95
d)	Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	94-95
3)	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut.	X
4)	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut.	X
c.	Laporan Direksi	123
	Laporan Direksi paling sedikit memuat:	
1)	Uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	
a)	Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	126
b)	Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan.	130
c)	Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	131
2)	Gambaran tentang prospek usaha.	133
3)	Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	134
4)	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).	136
d.	Laporan Dewan Komisaris	109
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	
1)	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik.	112
2)	Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	116
3)	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	113
4)	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	119
5)	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada).	109
6)	Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	112
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik	9
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	
1)	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku.	11
2)	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	11, 482
a)	Alamat.	11, 482
b)	Nomor telepon.	11, 482
c)	Nomor faksimile.	11, 482
d)	Alamat surat elektronik.	11, 482
e)	Alamat situs web.	11, 482
3)	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik.	28
4)	Visi dan Misi Emiten atau Perusahaan Publik.	13
5)	Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.	11, 29

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
6)	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan.	34
7)	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	64-65
a)	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	64-65
b)	Foto terbaru.	64-65
c)	Usia.	64-65
d)	Kewarganegaraan.	64-65
e)	Riwayat pendidikan.	64-65
f)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	64-65
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi kali pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.	64-65
(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Komite serta jabatan lainnya (jika ada).	64-65
(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	64-65
g)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada).	361
h)	Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi.	380
8)	Profil Dewan Komisaris, meliputi:	62-63
a)	Nama.	62-63
b)	Foto terbaru.	62-63
c)	Usia.	62-63
d)	Kewarganegaraan.	62-63
e)	Riwayat pendidikan.	62-63
f)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	62-63
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.	62-63
(2)	Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.	62-63
(3)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau anggota Komite serta jabatan lainnya (jika ada).	62-63
(4)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	62-63
g)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada).	333
h)	Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham Utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi.	380
i)	Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada).	330
9)	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya.	348, 306
10)	Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku.	51-55
11)	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	98-100
a)	Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima per seratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.	99

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
b)	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik.	100
c)	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.	99
12)	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi.	98-99
a)	Kepemilikan institusi lokal.	98-99
b)	Kepemilikan institusi asing.	98-99
c)	Kepemilikan individu lokal.	98-99
d)	Kepemilikan individu asing.	98-99
13)	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.	37, 99
14)	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada).	37
	Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	483-484
15)	Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada).	94
16)	Kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada).	101
17)	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal.	486-487
18)	Dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan.	486-487
19)	Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	90-91
a)	Nama penghargaan dan/atau sertifikasi.	90-91
b)	Badan atau lembaga yang memberikan.	90-91
c)	Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada).	90-91
f.	Analisa dan Pembahasan Manajemen	141
	Analisa dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	
1)	Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	
a)	Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	151-169
b)	Pendapatan/penjualan.	151-169
c)	Profitabilitas.	151-169
2)	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	
a)	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	185, 189, 184
b)	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas.	196, 201, 195
c)	Ekuitas.	206
d)	Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	171, 174, 181, 182
e)	Arus kas.	207

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
3)	Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	208
4)	Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	209
5)	Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud.	209
6)	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	
a)	Tujuan dari ikatan tersebut.	210
b)	Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut.	210
c)	Mata uang yang menjadi denominasi.	210
d)	Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	210
7)	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	
a)	Jenis investasi barang modal.	210-211
b)	Tujuan investasi barang modal.	210-211
c)	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan.	210-211
8)	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada).	211
9)	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	211
10)	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	
a)	Pendapatan/penjualan.	210
b)	Laba (rugi).	210
c)	Struktur modal (capital structure).	210
d)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	210
11)	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	
a)	Pendapatan/penjualan.	210
b)	Laba (rugi).	210
c)	Struktur modal (capital structure).	210
d)	kebijakan dividen.	210
e)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	210
12)	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	211
13)	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	
a)	Kebijakan dividen.	212
b)	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	212
c)	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	212
d)	Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	212
14)	Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	
a)	Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku.	213-215
b)	Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.	213-215
15)	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
a)	Tanggal, nilai dan obyek transaksi.	215
b)	Nama pihak yang melakukan transaksi.	215
c)	Sifat hubungan afiliasi (jika ada).	215
d)	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.	215
e)	Pemenuhan ketentuan terkait.	215
16)	Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	215
17)	Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	215
g.	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	261
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1)	Direksi, mencakup antara lain:	348
a)	Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.	352
b)	Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi.	349
c)	Prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik.	370
d)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut.	361
e)	Informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi:	
(1)	Keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku.	304
(2)	Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.	X
f)	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	
(1)	Keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku.	292
(2)	Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.	X
g)	Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi.	347
2)	Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	306
a)	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	310
b)	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris.	307
c)	Prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris.	344
d)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut.	334
e)	Kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	381
(1)	Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.	383
(2)	Kriteria yang digunakan.	381
(3)	Pihak yang melakukan penilaian.	383
f)	Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	347
g)	Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	NA
(1)	Alasan tidak dibentuknya komite.	NA
(2)	Prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.	NA
3)	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	NA
a)	Nama.	NA
b)	Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.	NA

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
c)	Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	NA
	(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.	NA
	(2) Kriteria yang digunakan.	NA
	(3) Pihak yang melakukan penilaian.	NA
d)	Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	NA
4)	Komite Audit, mencakup antara lain:	385
a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	66
b)	Usia.	66
c)	Kewarganegaraan.	66
d)	Riwayat pendidikan.	66
e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	66
	(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).	66
	(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	66
f)	Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit.	385
g)	Pernyataan independensi Komite Audit.	386
h)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut.	388
i)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	388
j)	Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit.	389
5)	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	391
a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	67
b)	Usia.	67
c)	Kewarganegaraan.	67
d)	Riwayat pendidikan.	67
e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	67
	(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).	67
	(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	67
f)	Periode dan masa jabatan anggota komite.	391
g)	Uraian tugas dan tanggung jawab.	391
h)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite.	391
i)	Pernyataan independensi komite.	392
j)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	394
k)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	394
l)	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	395
6)	Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain.	400
a)	Nama.	
b)	Domisili.	
c)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan.	68, 402
(2)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	68
d)	Riwayat pendidikan.	68
e)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku.	402
f)	Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku.	401
7)	Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	403
a)	Nama kepala Unit Audit Internal.	68, 403
b)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
(1)	Dasar hukum penunjukan kepala Unit Audit Internal.	68
(2)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	68
c)	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).	405
d)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku.	405
e)	Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal.	403
f)	Uraian tugas dan tanggung jawab.	405
g)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal.	404
h)	Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku.	407
8)	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	407
a)	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	407
b)	Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	408
9)	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	409
a)	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	409
b)	Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	414
c)	Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	418
10)	Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	424
a)	Pokok perkara/gugatan.	424-428
b)	Status penyelesaian perkara/gugatan.	424-428
c)	Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik.	424-428
11)	Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada).	428
12)	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	429
a)	Pokok-pokok kode etik.	430
b)	Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya.	432
c)	Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	430
13)	Informasi mengenai budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada).	16
14)	Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:	
a)	Jumlah saham dan/atau opsi.	434
b)	Jangka waktu pelaksanaan.	434
c)	Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak.	434
d)	Harga pelaksanaan.	434

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
15)	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	435
a)	Cara penyampaian laporan pelanggaran.	437
b)	Perlindungan bagi pelapor.	438
c)	Penanganan pengaduan.	426-438
d)	Pihak yang mengelola pengaduan.	435
e)	Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	
(1)	Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku.	438
(2)	Tindak lanjut pengaduan.	438
16)	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	271
a)	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan.	271
b)	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	271
h.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	451
1)	Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	
a)	Lingkungan hidup, antara lain:	456
(1)	Penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.	456-458
(2)	Sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik.	456-458
(3)	Mekanisme pengaduan masalah lingkungan.	456-458
(4)	Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	456-458
b)	Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	458-469
(1)	Kesetaraan gender dan kesempatan kerja.	458-469
(2)	Sarana dan keselamatan kerja.	458-469
(3)	Tingkat perpindahan (turnover) karyawan.	458-469
(4)	Tingkat kecelakaan kerja.	458-469
(5)	Pendidikan dan/atau pelatihan.	458-469
(6)	Remunerasi.	458-469
(7)	Mekanisme pengaduan masalah Ketenagakerjaan.	458-469
c)	Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:	469
(1)	Penggunaan tenaga kerja lokal.	469-475
(2)	Pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi.	469-475
(3)	Perbaikan sarana dan prasarana sosial.	469-475
(4)	Bentuk donasi lainnya.	469-475
(5)	Komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada).	469-475
d)	Tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	476-480
(1)	Kesehatan dan keselamatan konsumen.	476-480
(2)	Informasi barang dan/atau jasa.	476
(3)	Sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.	477-478
2)	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan.	✓
3)	Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	✓

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit		
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek.		✓
Pertanggungjawaban atas Laporan Tahunan		
1.	Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian Laporan Tahunan.	✓
2.	Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Laporan Tahunan.	-
3.	Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberikan alasan secara tertulis, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain yang menandatangani Laporan Tahunan wajib menyertakan alasan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Laporan Tahunan.	-
4.	Tanda tangan dibubuhkan pada surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan pada lembaran tersendiri dalam Laporan Tahunan.	-
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan		
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		✓

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

**PT Jasa Marga (Persero) Tbk
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries***

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
***Consolidated financial statements as of December 31, 2017
and for the year then ended with independent auditors' report***

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Pages	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Reports</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1 - 3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	4	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	7 - 221	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT JASA MARGA (Persero) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA.**

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT JASA MARGA (Persero) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | | | | |
|-------------------|--|---|----|----------------------------------|
| 1. Nama : | Desi Arsyani | : | 1. | Name |
| Alamat Kantor : | Plaza Tol TMII – Jakarta Timur 13550 | : | | Office Address |
| Alamat Domisili : | Rn. H. Rasidin No. 45
RT002/RW006, Kelapa Dua,
Kabupaten Jeruk, Jakarta | : | | Domicile as Stated in ID
Card |
| Nomor Telepon : | (021) 8413526 | : | | Phone Number |
| Jabatan : | Direktur Utama / President Director | : | | Position |
| 2. Nama : | Benny Arsal | : | 2. | Name |
| Alamat Kantor : | Plaza Tol TMII – Jakarta Timur 13550 | : | | Office Address |
| Alamat Domisili : | Jl. Mandar XIX DP. 7/22 Sektor 3A
RT 001/RW 010 Pondok Karya,
Pondok Arsa, Tangerang | : | | Domicile as Stated in ID
Card |
| Nomor Telepon : | (021) 8413526 | : | | Phone Number |
| Jabatan : | Direktur Keuangan / Finance Director | : | | Position |

Mengatakan bahwa :

State that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Perusahaan) dan Entitas Anaknya; | 1. We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the Company) and its Subsidiaries. |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah dibuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | 3. a. All information contained in the consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries are complete and correct.
b. The consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries do not contain misleading material information or facts, nor do they omit material information or facts. |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan. | 4. We are responsible for the Company's internal control system. |

Dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal ini.

Made and signed at place and date.

di Jakarta, 31 Desember 2017 / Jakarta, December 31, 2017

Desi Arsyani
Direktur Utama
President Director

Benny Arsal
Direktur Keuangan
Finance Director



Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesian Public Accountants (RMB)
No. 03/1961/1980
Jl. Jend. Sudirman No. 99-101
Jakarta 12165, Indonesia

PT. PUSKAS 00091000
PT. PUSKAS 00091000
00091000

The original report attached hereto is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-5655/PSS/2018

**Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-5655/PSS/2018

**The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2017, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-5655/PSS/2018 (lanjutan)

Report No. RPC-5655/PSS/2018 (continued)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Auditors' responsibility (continued)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-5655/PSS/2018 (lanjutan)

Report No. RPC-5655/PSS/2018 (continued)

Opini

Opinion

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tertampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

in our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. and its subsidiaries as of December 31, 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwanto, Sungkoro & Sarja

Agung Purwanto

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0687 / Public Accountant Registration No. AP.0687

31 Januari 2018 / January 31, 2018

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
	2.c, 2.d, 2.o, 2.r, 4,			
Kas dan setara kas	44, 48.e	6.873.020.928	4.124.886.070	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	2.d, 2.o, 5, 48.e	157.354.246	7.714.681	Short term investments
	2.d, 2.o, 6, 44,48.a,			
Piutang lain-lain - neto	48.e	11.547.364.164	8.277.639.096	Other receivables - net
Persediaan	2.e, 7	134.244.636	86.975.202	Inventories
Biaya dibayar di muka - neto	2.f, 8	227.361.524	313.735.475	Prepaid expenses - net
Pajak dibayar di muka	2.m, 18.a	47.719.560	154.033.965	Prepaid taxes
TOTAL ASET LANCAR		18.987.065.058	12.964.984.489	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
	2.d, 2.o, 6, 44,48.a,			
Piutang lain-lain	48.e	264.241.068	111.212.799	Other receivables
	2.c, 2.d, 2.o, 9, 44,			
Dana ditetapkan penggunaannya	48.e	780.085.156	1.011.763.179	Restricted funds
Aset pajak tangguhan - neto	2.m, 18.c	34.138.156	66.081.697	Deferred tax assets - net
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama - neto	2.g, 10	886.617.944	158.281.362	Investment in associates and joint ventures - net
Aset tetap - neto	2.h, 11	1.035.922.309	884.665.521	Fixed asset - net
Properti investasi - neto	2.i, 12	241.926.122	232.318.971	Investment properties - net
Aset takberwujud - neto				Intangible assets - net
Hak pengusahaan jalan tol	2.j, 13	55.957.697.162	34.703.311.350	Toll road concession rights
Lainnya	14	131.320.029	2.195.580.606	Others
Goodwill	2.b, 2.k, 15	41.848.567	41.848.567	Goodwill
Aset keuangan lainnya - neto	16	247.297.444	247.297.444	Other financial assets - net
Aset tidak lancar lainnya - neto	2.k, 17	584.613.775	882.976.674	Other non-current assets - net
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		60.205.707.732	40.535.338.170	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		79.192.772.790	53.500.322.659	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2017
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	2.d, 2.o, 19, 44, 48e	350.924.063	134.771.562	Accounts payable
Utang kontraktor	2.d, 2.o, 20, 44, 48.e	1.289.210.757	1.279.575.017	Contractors payable
Utang pajak	2.m, 18.b	317.245.913	158.561.774	Taxes payable
Liabilitas keuangan lainnya	2.d, 2.o, 21, 44, 48.e	2.967.230.609	1.956.027.037	Other financial liabilities
Beban akrual	2.o, 22	13.814.454.297	2.601.438.550	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.n	329.332.357	244.700.622	Short-term employee benefits liability
Utang bank	2.d, 2.o, 23, 44, 48.e	1.278.658.584	4.590.848.584	Bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank	2.o, 24	500.000.000	3.462.676.119	Non-bank financial institutions loan
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturities of long - term liabilities
Utang bank	2.d, 2.o, 23, 44, 48.e	557.795.484	342.090.128	Bank loans
Utang obligasi	2.o, 25, 48.e	1.000.000.000	1.500.000.000	Bonds payable
Liabilitas pembebasan tanah	2.d, 2.o, 27, 44, 48.e	1.872.488.859	2.015.122.539	Land acquisition liabilities
Utang sewa pembiayaan	2.h, 2.i, 28, 48e	4.542.380	8.802.921	Finance lease payable
Provisi pelapisan jalan tol	2.j, 2.t, 29, 48e	341.344.474	332.374.143	Provision for overlay
Pendapatan ditangguhkan	30	374.712.521	-	Deferred revenues
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		24.997.940.298	18.626.988.996	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	2.m, 18.c	593.669.641	696.380.360	Deferred tax liabilities
Utang kontraktor jangka panjang	2.d, 2.o, 20, 44, 48.e	496.699.951	394.469.576	Long-term contractors payable
Beban akrual jangka panjang	2.d, 2.o, 22, 44	2.197.234.400	608.804.085	Long-term accrued expenses
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	2.d, 2.o, 23, 44, 48.e	21.160.366.364	11.597.384.451	Bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank	2.d, 2.o, 24, 44	534.051.688	533.250.000	Non-bank financial institutions loan
Utang obligasi	2.o, 25, 48.e	7.418.391.797	2.993.441.603	Bonds payable
Liabilitas kerjasama operasi	2.j, 26	820.300	820.300	Joint operation liabilities
Liabilitas pembebasan tanah	2.d, 2.o, 27, 44, 48.e	109.008.350	320.214.853	Land acquisition liabilities
Utang sewa pembiayaan	2.h, 2.i, 28, 48e	19.038.238	28.530.487	Finance lease payable
Provisi pelapisan jalan tol	2.j, 2.t, 29, 48.e	202.278.345	221.796.152	Provision for overlay
Pendapatan ditangguhkan	30	1.619.130.905	112.679.518	Deferred revenues
Liabilitas jangka panjang lainnya	2.o, 48.e	478.964.671	266.370.563	Other long term liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.n, 31	1.005.738.321	760.351.651	Long-term employee benefits liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		35.835.392.971	18.534.493.599	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		60.833.333.269	37.161.482.595	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2017
(Expressed in thousands of,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp 500 (rupiah penuh) per saham				Capital stock - Rp500 par value (full amount) per share
Modal dasar 19.040.000.000 saham				Authorized - 19,040,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham seri A Dwiwarna dan 7.257.871.199 saham seri B	32	3.628.935.600	3.628.935.600	Issued and fully paid - 1 series A Dwivarna share and 7,257,871,199 series B shares
Tambahan modal disetor - neto	33	3.997.085.031	3.997.085.031	Additional paid in capital - net
Selisih atas transaksi entitas nonpengendali		8.818.315	11.282.113	Difference from non-controlling interest transaction
Saldo laba		8.124.829.239	6.491.366.751	Retained earnings
Penghasilan komprehensif lain:				Other comprehensive income:
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual		9.163.196	3.185.031	Unrealized gain on available for sale securities
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.n, 31	(671.178.435)	(452.729.390)	Remeasurements of long-term employee benefits liability
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		15.097.652.946	13.679.125.136	Net Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	35.a	3.261.786.575	2.659.714.928	Non-Controlling Interests
TOTAL EKUITAS		18.359.439.521	16.338.840.064	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		79.192.772.790	53.500.322.659	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam ribuan rupiah)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended
December 31, 2017
(Expressed in thousands of rupiah)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2017	Catatan/ Notes	2016	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan tol dan usaha lainnya	8.921.667.195	2,q,36	8.832.347.704	Toll and other operating revenues
Pendapatan konstruksi	26.170.528.996	2,q,37	7.829.055.294	Construction revenue
Total	35.092.196.191		16.661.402.998	Total
BEBAN PENDAPATAN				COST OF REVENUES
Beban tol dan usaha lainnya	(3.772.061.473)	2,q,38	(4.022.857.349)	Toll and other operating expenses
Beban konstruksi	(26.012.247.894)	2,q,37	(7.782.154.327)	Construction expense
Total	(29.784.309.367)		(11.805.011.676)	Total
LABA BRUTO	5.307.886.824		4.856.391.322	GROSS PROFIT
Penghasilan lain-lain	55.857.735	2q,40	194.998.477	Other income
Penghasilan keuangan	283.955.306	2q,40	202.677.257	Financial income
Keuntungan dari pelepasan investasi	563.463.288	1f,10	-	Gain on divestment
Beban umum dan administrasi	(1.152.466.396)	2q,39	(949.000.963)	General and administrative expenses
Beban lain-lain	(363.022.242)	2o,41	(99.004.864)	Other expenses
Beban pajak atas penghasilan keuangan	(47.594.252)	2q,40	(40.554.246)	Tax expense of financial income
LABA USAHA	4.648.080.263		4.165.506.983	PROFIT FROM OPERATIONS
Biaya keuangan - neto	(1.268.870.415)	2o,42	(1.509.003.370)	Finance costs - net
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi	(128.757.388)	2g,10	(6.824.359)	Share in net loss of associates
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.250.452.460		2.649.679.254	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSE
Kini	(1.011.221.468)	2m,18c	(725.155.873)	Current
Tangguhan	(145.574.930)	2m,18c	(121.468.925)	Deferred
TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1.156.796.398)		(846.624.798)	TOTAL INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	2.093.656.062		1.803.054.456	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya				<i>Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent periods</i>
Rugi aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(218.449.045)	2,n, 31	(119.588.747)	Actuarial loss on long-term employee benefits liability
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya				<i>Item that will be reclassified to profit and loss in subsequent periods</i>
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	5.978.165		759.548	Unrealized gain on available-for-sale securities
BEBAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	(212.470.880)		(118.829.199)	OTHER COMPREHENSIVE EXPENSES FOR THE YEAR
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.881.185.182		1.684.225.257	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	1.988.011.074		1.770.726.017	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	(106.825.892)	35	(86.500.760)	Non-controlling interest
TOTAL	1.881.185.182		1.684.225.257	TOTAL
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	2.200.256.364		1.889.312.724	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	(106.600.302)		(86.258.268)	Non-controlling interest
TOTAL	2.093.656.062		1.803.054.456	TOTAL
LABA PER SAHAM (RUPIAH PENUH)	303,15	2,p, 43	276,97	EARNINGS PER SHARE (FULL RUPIAH)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam ribuan rupiah)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended December 31, 2017
(Expressed in thousands of rupiah)**

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Atributable to Owners of The Parent Entity													
Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Tambahkan Modal Disetor - neto/ Additional Paid in Capital - net	Selisih Atas Transaksi Entitas Non Pengendali/ Difference from Non- Controlling Interest Transaction	Saldo Laba/ Retained Earnings			Penghasilan (beban) komprehensif lain/Other comprehensive income (loss)			Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity		
				Telah ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Total/ Total	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual/ Unrealized gain (loss) on available- for-sale securities	Akumulasi kerugian aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang/ Cumulative actuarial loss on long-term employee benefits liability	Total/ Total				
	3.400.000.000	2.453.890.100	-	4.715.474.503	179.855.842	4.895.330.345	2.425.483	(333.140.643)	(330.715.160)	10.418.505.285	1.950.159.181	12.368.664.466	Balance as of January 1, 2016
	-	-	-	25.000.000	(25.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	Appropriated reserves
34	-	-	-	1.148.105.269	(1.148.105.269)	-	-	-	-	-	-	-	General reserves
34	-	-	-	-	(293.276.317)	(293.276.317)	-	-	(293.276.317)	(18.601)	(293.294.918)	(293.294.918)	Distribution of dividend
43	-	-	-	-	1.889.312.724	1.889.312.724	-	-	1.889.312.724	(86.258.268)	1.803.054.456	1.803.054.456	Income for the year
1b	228.935.600	1.543.194.931	-	-	-	-	-	-	1.772.130.531	-	-	1.772.130.531	Limited public offering
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796.554.658	796.554.658	Capital contributing from non-controlling interest in subsidiaries
	-	-	11.282.113	-	-	-	-	-	-	11.282.113	-	11.282.113	Difference from non-controlling interest transaction
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income
	-	-	-	-	-	-	-	(119.588.747)	(119.588.747)	(119.588.747)	(722.043)	(120.310.790)	Remeasurement of employee benefits obligations
	-	-	-	-	-	-	759.548	-	759.548	759.548	-	759.548	Available-for-sale securities
	3.628.935.600	3.997.085.031	11.282.113	5.888.579.772	602.786.980	6.491.366.752	3.185.031	(452.729.390)	(449.544.359)	13.679.125.137	2.659.714.927	16.338.840.064	Balance as of December 31, 2016
34	-	-	-	25.000.000	(25.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	Appropriated reserves
34	-	-	-	1.297.518.847	(1.297.518.847)	-	-	-	-	-	-	-	General reserves
34	-	-	-	-	(566.793.877)	(566.793.877)	-	-	(566.793.877)	(19.389)	(566.813.266)	(566.813.266)	Distribution of dividend
43	-	-	-	-	2.200.256.364	2.200.256.364	-	-	2.200.256.364	(106.600.302)	2.093.656.062	2.093.656.062	Income for the year
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.088.907.059	1.088.907.059	Capital contributing from non-controlling interest in subsidiaries
	-	-	(2.463.798)	-	-	-	-	-	-	(2.463.798)	2.463.798	-	Difference from non-controlling interest transaction
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income
	-	-	-	-	-	-	-	(218.449.045)	(218.449.045)	(218.449.045)	(225.590)	(218.674.635)	Remeasurement of employee benefits obligations
	-	-	-	-	-	-	5.978.165	-	5.978.165	5.978.165	-	5.978.165	Available-for-sale securities
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(382.453.928)	(382.453.928)	Share Divestment
	3.628.935.600	3.997.085.031	8.818.315	7.211.098.619	913.730.620	8.124.829.239	9.163.196	(671.178.435)	(662.015.239)	15.097.652.946	3.261.786.575	18.359.439.521	Balance as of December 31, 2017

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam ribuan rupiah)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended December 31, 2017
(Expressed in thousands of rupiah)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2017	Catatan/ Notes	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pendapatan tol	7.579.675.111		7.930.217.446	Cash receipts from toll revenues
Penerimaan kas dari pendapatan lainnya	646.699.245		871.102.610	Cash receipts from other revenues
Pembayaran kepada pemasok	(1.462.770.188)		(1.926.850.862)	Cash paid to contractors
Pembayaran kepada karyawan	(1.955.442.108)		(1.928.883.897)	Cash paid to employees
Pembayaran beban kerjasama operasi	-		(170.930.127)	Cash paid to joint operation expenses
Pembayaran biaya pelapisan ulang	(445.370.694)	29	(249.746.100)	Overlay charges expenditure
Pengalihan hak atas pendapatan tol	2.000.000.000		-	Transfer of toll road collection rights
Kas neto diperoleh dari operasi	6.362.791.366		4.524.909.070	Net cash generated from operations
Penerimaan bunga	161.311.248		241.565.220	Receipts from interest income
Pembayaran bunga	(1.256.791.672)		(1.410.260.880)	Interest paid
Pembayaran pajak	(911.125.076)		(1.111.170.598)	Tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	4.356.185.866		2.245.042.812	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan hak pengusahaan jalan tol dan aset takberwujud lainnya	(10.867.013.416)	13,14	(5.723.402.405)	Acquisitions of toll road concession rights and other intangible assets
Penambahan investasi jangka pendek dan entitas asosiasi - neto	(146.597.897)	11,12	(7.283.338)	Acquisition of short-term investment and associated entities - net
Penambahan aset tetap dan properti investasi	(364.029.309)		(285.166.102)	Acquisitions of fixed assets and investment properties
Penerimaan atas pelepasan investasi di entitas anak	783.354.396		-	Proceeds from disposal of investment in a subsidiary
Penambahan piutang talangan tanah kepada Pemerintah	(2.084.051.625)		(7.888.497.972)	Addition of land bridging fund to the Government
Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(12.678.337.851)		(13.904.349.817)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan liabilitas jangka panjang:				Proceeds from long-term liabilities:
Utang bank	18.401.550.806	23	10.026.572.697	Bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank	408.262.703	24	3.252.676.119	Non-bank financial institution loan
Penerbitan utang obligasi	5.500.000.000		-	Issuance of bonds payable
Penerimaan dari penerbitan saham di entitas anak oleh pihak nonpengendali	393.948.714		796.554.659	Proceeds from issuance of shares in a subsidiary to non-controlling interests
Pencairan (penempatan) dana ditetapkan penggunaannya - neto	231.678.023		(507.726.029)	Increase (decrease) of restricted fund - net
Pembayaran dividen	(566.793.876)		(293.276.317)	Payments of dividends
Pembayaran liabilitas jangka panjang:				Payments of long-term liabilities:
Utang bank	(9.314.300.037)	23	(1.870.197.096)	Bank loans
Utang obligasi	(1.500.000.000)	25	(1.659.154.384)	Bonds payable
Utang lembaga keuangan bukan bank	(2.961.874.431)	24	(604.647.302)	Non-bank financial institution loan
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham minoritas	602.940.869		1.855.294.470	Proceeds from minority shareholders loan
Pembayaran liabilitas pembebasan tanah	(10.000.000)		(307.255.376)	Payment for land acquisition liabilities
Penerimaan atas penerbitan saham	-	1b	1.772.130.531	Proceeds from issuance of shares
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	11.185.412.771		12.460.971.972	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	2.863.260.786		801.664.967	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS DARI ENTITAS ANAK YANG DIDEKONSOLIDASIKAN	(115.125.928)		-	CASH AND CASH EQUIVALENTS OF DECONSOLIDATED SUBSIDIARY
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4.124.886.070	4	3.323.221.103	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	6.873.020.928	4	4.124.886.070	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

Informasi tambahan atas transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 49.

Supplementary information on non-cash transaction is disclosed in Note 49.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Perusahaan") dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia mengenai pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol, serta ketentuan-ketentuan pengusahaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1978 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/KMK.06/1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga, tanggal 27 Februari 1978). Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Kartini Mulyadi, S.H., No. 1 tanggal 1 Maret 1978. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/130/1 tanggal 22 Februari 1982 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 766 dan No. 767, tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1982, tambahan No. 1138.

Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir diaktakan dalam akta notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., No. 37 tanggal 23 Maret 2017, mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang dalam hal ini adalah Direksi Perseroan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0121417 tanggal 24 Maret 2017.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan usaha Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang perusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

1. GENERAL

a. The Company's establishment

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the "Company") was established under the Government Regulation of the Republic of Indonesia (the "Government") No. 4 Year 1978 regarding the State Capital Investment for the establishment of a State-Owned Company (Persero) in the area of management, maintenance and development of toll roads, and the detailed management regulations (State Gazette No. 4 Year 1978 in conjunction with the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 90/KMK.06/1978 regarding the Determination of the Share Capital of the Company dated February 27, 1978). The Company was established based on Notarial Deed No. 1 dated March 1, 1978 of Kartini Mulyadi, S.H. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. Y.A.5/130/1 dated February 22, 1982 and was filed in Jakarta High Court No. 766 and 767 on March 2, 1982 and was published in the State Gazette No. 73 dated September 10, 1982, addition No. 1138.

The Company's articles of association has been amended several times, the latest amendment of which was notarized under deed No. 37 dated March 23, 2017 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., concerning the Change in the Composition of the Management of the Company which in this case is the Board of Directors of the Company. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0121417 dated March 24, 2017.

According to Article 3 of the Company's articles of association, its scope of business is mainly to engage in performing and assisting the Government's programs and policies in economy sector and generally in national development, especially in development of toll roads and all their supporting facilities while complying to the principles of limited liability company.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol;
- (ii) Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat kendaraan dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya, baik diusahakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain; dan
- (iii) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, baik secara langsung maupun melalui penyertaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersial pada tahun 1978.

Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah. Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol. Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta. Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.

Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550. Perusahaan mengoperasikan 11 ruas jalan tol yang dikelola oleh delapan kantor cabang dan memiliki 24 entitas anak, dengan rincian kantor cabang adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. The Company's establishment (continued)

To achieve these objectives, the Company performs the following activities:

- (i) Performs technical planning for construction, operation and/or maintenance of toll road;
- (ii) Organizes the land in toll road area (Rumijatol) and the land along the Rumijatol designated for vehicle rest area and service including the facilities and other businesses operating there either separately or in cooperation with other parties; and
- (iii) Performs other activities and business in order to utilize and develop the Company's resources, either directly or through investments, subject to laws and regulations.

The Company started its commercial operations in 1978.

The Company run its operations based on Law No. 38 Year 2004 about the Road and PP No. 15 Year 2005 regarding Toll road management authority of the Government. Some of Government authority in the administration of toll roads are implemented by the Toll Road Regulatory Agency. Toll road concession are implemented by state-owned enterprises and/ or regional owned enterprises and/ or private companies. Concession are granted by the Government to the business entities through transparent and open auctions.

The Company's office is located in Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550. The Company operates 11 toll roads, which are managed by its eight branch offices and owned 24 subsidiaries, with detail of branch offices as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Kantor Cabang/Branch Offices	Ruas Jalan Tol/Toll Road Sections	Panjang jalan/Length (KM)	Mulai konsesi (Tahun/ Start of concession (Year)	Periode masa konsesi (Tahun)/Concession period (Year)
Jagorawi	Jakarta - Bogor- Ciawi	59	2005	40
Jakarta - Tangerang - Cengkareng	Jakarta - Tangerang Cawang - Tomang - Pluit dan/ and Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	33 24 dan/and 14	2005	40
Surabaya - Gempol	Surabaya - Gempol	49	2005	40
Jakarta - Cikampek	Jakarta - Cikampek	83	2005	40
Purbaleunyi	Cikampek - Padalarang dan/and Padalarang - Cileunyi	59 dan/and 64	2005	40
Semarang	Semarang Seksi/Section A B C	25	2005	40
Belmera	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	43	2005	40
Palikanci	Palimanan - Kanci	26	2005	40
Kantor Pusat	Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) dan/ and Ulujami Pondok Aren	36 dan/ and 14	2005	35

Selain itu, Perusahaan juga melakukan usaha penyelenggara pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia melalui Jasa Marga Learning Institute.

In addition, the Company also organizes training and development of human resources through Jasa Marga Learning Institute.

b. Penawaran umum Perusahaan

Pada tanggal 1 November 2007, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), selanjutnya menjadi Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, melalui Surat No. S-5526/BL/2007 untuk melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 2.040.000.000 saham atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp500 (rupiah penuh) setiap saham yang berasal dari saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan kepada masyarakat, dengan harga penawaran sebesar Rp1.700 (rupiah penuh) per saham melalui pasar modal dan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (selanjutnya digabung menjadi Bursa Efek Indonesia).

b. The Company's initial public offering

On November 1, 2007, the Company received from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (BAPEPAM-LK), currently known as the Indonesian Financial Services Authority, its notice letter No. S-5526/BL/2007, which stated the effectivity to conduct an Initial Public Offering (IPO) of 2,040,000,000 Series B shares with par value of Rp500 (full amount) of the Company at an offering price per share of Rp1,700 (full amount) through capital market and registered both in the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges (subsequently combined as the Indonesia Stock Exchange).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum Perusahaan (lanjutan)

Sejak penawaran umum perdana sampai dengan akhir periode pelaporan, Perusahaan telah melakukan aksi korporasi sebagai berikut:

1. Pembelian kembali saham Perusahaan pada 24 Oktober 2008 sampai dengan 12 Januari 2009 dilakukan mengingat kondisi pasar saham saat itu berpotensi krisis dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) menurun cukup signifikan sehingga memberikan peluang pada Perusahaan untuk membeli kembali sahamnya dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Perusahaan dalam hal ini dibantu oleh PT Bahana Securities sebagai Perusahaan Wakil Perantara Perdagangan Efek. Dana yang dikeluarkan Perusahaan untuk membeli kembali 24.523.500 lembar saham (*Treasury Stock*) sejumlah Rp21.837.595.
2. Sesuai dengan Poin 4D Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-105/BL/2010, Peraturan XI.B2 perihal Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka *treasury stock* tersebut telah memasuki periode wajib menjual (sudah dikuasai Perusahaan selama 3 tahun) dan wajib untuk dijual kembali. Perusahaan dalam penjualan kembali saham *Treasury* dibantu oleh PT Danareksa Sekuritas. Masa penjualan berlangsung dari tanggal 5 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012.
3. Sesuai dengan Berita Acara rapat Perseroan yang dimuat dalam akta notaris nomor 139 tanggal 29 Agustus 2016, pemegang saham menyepakati peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Aksi korporasi Perusahaan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam surat nomor S-337/D.01/2016 tanggal 18 November 2016, sehingga jumlah saham perusahaan meningkat dari 6.800.000.000 menjadi 7.257.871.200 lembar saham. Perubahan jumlah saham Perusahaan tersebut tertuang dalam Akta No. 39 tanggal 20 Desember 2016.

1. GENERAL (continued)

b. The Company's initial public offering (continued)

Since its initial public offering until end of reporting period, the Company has made the following corporate actions:

1. Buy back of the Company's shares on October 24, 2008 until January 12, 2009 was done considering the condition of the stock market, indication of potential crisis where the Composite Stock Price Index (CSPI) in Indonesia Stock Exchange (IDX) significantly decreased thus providing an opportunity for the Company to buy back its shares subject to the ability of the Company and applicable regulations. The Company, in this case, was aided by PT Bahana Securities as its Corporate Broker Securities Trading. Funds issued by the Company to buy back 24,523,500 shares (*Treasury Stock*) amounted to Rp21,837,595.
2. Based on Point 4D of Bapepam-LK Regulation No. KEP-105/BL/2010, XI.B2 Regulations regarding Buy Back Shares issued by the Issuer or Public Company, the Company has reached the maximum period of holding its treasury stock (already held by the Company for 3 years) and therefore it was mandatory for resale. The Company was assisted by PT Danareksa Securities in the resale of treasury shares. Sales period lasted from April 5, 2012 to June 25, 2012.
3. According to notarial deed number 139 dated August 29, 2016, shareholders of the company agreed the increase of the company's issued and fully paid capital through Rights Issue. The corporate action were approved by the Financial Services Authorization on its letter number S-337/D.01/2016 dated November 18, 2016, consequently the company's share increased from 6,800,000,000 to 7,257,871,200 shares. The changes were stated on Notarial Deed No. 39 dated December 20, 2016.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum Perusahaan (lanjutan)

Dana yang diperoleh Perusahaan akan digunakan untuk mendanai pembangunan jalan tol, khususnya 3 ruas jalan tol baru yang akan dibangun, yaitu :

- sekitar 50% untuk ruas Semarang - Batang sepanjang 75 km;
- sekitar 30% untuk ruas Pandaan - Malang sepanjang 37,6 km; dan
- sekitar 20% untuk ruas Jakarta - Cikampek II Elevated sepanjang 36,4 km.

c. Penawaran umum obligasi Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah utang obligasi yang belum jatuh tempo adalah sebesar Rp8.500.000.000, dengan rinciannya sebagai berikut:

No.	Obligasi/ Bonds	Total (Rp Juta)/ Par value (Rp Million)	Tenor (Tahun/ Years)	Tanggal Penerbitan/ Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Status
1	Jasa Marga XIV (JM — 10)	1.000.000	10	12/10/2010	12/10/2020	Not Yet Paid Belum Lunas/ Not Yet Paid
2	Jasa Marga Seri / Series S C	1.000.000	5	27/9/2013	27/9/2018	Belum Lunas/ Not Yet Paid
3	Jasa Marga Seri / Series T	1.000.000	5	19/9/2014	19/9/2019	Belum Lunas/ Not Yet Paid
4	Global Bond	4.000.000	3	11/12/2017	11/12/2020	Belum Lunas/ Not Yet Paid
5	Obligasi Marga Lingkar Jakarta Seri					
	- Series A	200.000	3	08/11/2017	08/11/2020	Belum Lunas/ Not Yet Paid
	- Series B	217.000	5	08/11/2017	08/11/2022	Belum Lunas/ Not Yet Paid
	- Series C	299.000	7	08/11/2017	08/11/2022	Belum Lunas/ Not Yet Paid
	- Series D	320.000	9	08/11/2017	08/11/2022	Belum Lunas/ Not Yet Paid
	- Series E	464.000	11	08/11/2017	08/11/2022	Belum Lunas/ Not Yet Paid

d. Dewan komisaris dan direksi, komite audit serta karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. The Company's initial public offering (continued)

Funds generated by the Company will be used for the funding of toll road construction, particularly for three new toll roads to be build, as follows :

- approximately 50% for Semarang - Batang toll road round 75 km;
- approximately 30% for Pandaan - Malang toll road round 37.6 km;
- approximately 20% for Jakarta - Cikampek II Elevated round 36.4 km.

c. The Company's public bond offering

As of December 31, 2017, the total amount of bonds still outstanding amounted to Rp8,500,000,000, as follows:

d. Boards of commissioners and directors, audit committee and employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors was as follows:

Direksi/Directors

Direktur Utama/President Director
Direktur Keuangan/ Finance Director
Direktur Pengembangan/ Development Director
Direktur Operasi I/ Operations I Director
Direktur Operasi II/ Operations II Director
Direktur SDM dan Umum/ Direktur Independen
General and Human Resources/Independent Director

**31 Desember 2017/
December 31, 2017**

Desi Arryani
Donny Arsal
Hasanudin
Mohammad Sofyan
Subakti Syukur
Kushartanto Koeswiranto

**31 Desember 2016/
December 31, 2016**

Desi Arryani
Anggiasari
Hasanudin
Muh Najib Fauzan
Subakti Syukur
Christantio Prihambodo

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan komisaris dan direksi, komite audit serta karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Boards of commissioners and directors, audit committee and employees (continued)

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors are as follows: (continued)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
<u>Dewan Komisaris/Board of Commissioners</u>		
Komisaris Utama dan Komisaris Independen/ <i>President and Independent Commissioner</i>	Refly Harun	Refly Harun
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	Muhammad Sapta Murti	Muhammad Sapta Murti
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	Boediarso Teguh Widodo	Boediarso Teguh Widodo
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	Sugihardjo	Taufik Widjojono
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	Agus Suharyono	Agus Suharyono
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	Sigit Widyawan	Sigit Widyawan

Susunan komite audit adalah sebagai berikut:

The compositions of the audit committee are as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
<u>Komite Audit/Audit Committee</u>		
Ketua/ <i>Chairman</i>	Sigit Widyawan	Sigit Widyawan
Anggota/ <i>Members</i>	Teguh Indra Prastiyo Agita Widjanto	Teguh Indra Prastiyo Triono Junoasmono

Pada tanggal 31 Desember 2017, Ketua Unit Audit Internal adalah Laviana Sri Handini.

As of December 31, 2017, the Head of the Internal Audit Unit is Laviana Sri Handini.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Sekretaris Perusahaan adalah Mohamad Agus Setiawan.

As of December 31, 2017, the Corporate Secretary is Mohamad Agus Setiawan.

Penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Perusahaan mengacu pada Peraturan Meneg BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 26. Unit audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian intern Perusahaan yang di dalam pelaksanaan tugas auditnya menggunakan kerangka sistem pengendalian intern COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*).

Implementation of internal control systems made by the Company refers to the State Enterprises Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the State-owned Enterprise Article 26. Internal audit unit is part of the Company's system of internal control in the execution of audit assignments using the COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) framework for internal control system.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan komisaris dan direksi, komite audit serta karyawan (lanjutan)

Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") memiliki 8.111 dan 8.276 karyawan tetap (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

e. Entitas anak yang dikonsolidasikan

Entitas anak yang dimiliki Perusahaan, secara langsung maupun tidak langsung, adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Boards of commissioners and directors, audit committee and employees (continued)

The Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group") had 8,111 and 8,276 permanent employees (unaudited) as of December 31, 2017 and December 31, 2016, respectively.

e. Consolidated subsidiaries

The Company's subsidiaries, directly or indirectly owned, are as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Aktivitas utama/ Principal activity	Domisili/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Periode masa konsesi (Tahun)/ Concession period (Year)	Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah)/ Total assets before elimination (in million rupiah)	
			31 Des, 2017/ Dec 31, 2017	31 Des, 2016/ Dec 31, 2016			31 Des, 2017/ Dec 31, 2017	31 Des, 2016/ Dec 31, 2016
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), berdiri tanggal 22 Desember 2000 /established on December 22, 2000	Jasa pengoperasian jalan tol /Toll road operation services	Bekasi	99,9	99,9	1 Oktober 2001 /October 1, 2001	35	219.956	135.142
PT Marga Sarana Jabar (MSJ), berdiri tanggal 11 Mei 2007/ established on May 11, 2007	Penyelenggaraan ruas jalan tol Bogor Outer Ring Road /Operator of the Bogor Outer Ring Road toll road	Bogor	55	55	23 November 2009/November 23, 2009	45	1.932.976	1.671.414
PT Trans Marga Jateng (TMJ), berdiri tanggal 7 Juli 2007/ established on July 7, 2007	Penyelenggaraan ruas jalan tol Semarang - Solo /Operator of the Semarang - Solo toll road	Semarang	-	73,9	17 November 2011/November 17, 2011	45	-	5.604.827
PT Marga Trans Nusantara (MTN), berdiri tanggal 14 Mei 2008 /established on May 14, 2008	Penyelenggaraan ruas jalan tol Kunciran - Serpong/Operato r of the Kunciran - Serpong toll road	Tangerang	60	60	Tahap pengembangan /Under development stage	35	2.877.321	1.674.670
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM), berdiri tanggal 19 Agustus 1994 /Established on August 19, 1994	Penyelenggaraan ruas jalan tol Surabaya - Mojokerto /Operator of the Surabaya - Mojokerto toll road	Sidoarjo	55,5	55	5 September 2011/September 5, 2011	42	5.073.745	3.832.541

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Entitas anak yang dikonsolidasikan (lanjutan)

e. Consolidated subsidiaries (continued)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Aktivitas utama/ Principal activity	Domisili/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Periode masa konsesi (Tahun/ Concession period (Year)	Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah)/ Total assets before elimination (in million rupiah)	
			31 Des, 2017/ Dec 31, 2017	31 Des, 2016/ Dec 31, 2016			31 Des, 2017/ Dec 31, 2017	31 Des, 2016/ Dec 31, 2016
PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ), berdiri tanggal 24 Agustus 2009 /established on August 24, 2009	Penyelenggaraan ruas jalan tol Lingkarluar Jakarta Seksi W2 Utara/Operator of the Jakarta Outerring Road section W2 Utara toll road	Jakarta	65	65	4 Januari 2014/ January 4, 2014	40	2.132.478	2.015.503
PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP), berdiri tanggal 28 Juni 2010/established on June 10, 2010	Penyelenggaraan ruas jalan tol Gempol - Pasuruan /Operator of the Gempol - Pasuruan toll road	Pandaan	98,8	98,8	31 Juli 2017/ July 31, 2017	45	2.186.403	1.577.807
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC), berdiri tanggal 14 Mei 2008 /established on May 14, 2008	Penyelenggaraan ruas jalan tol Kunciran - Cengkareng/Ope rator of the Kunciran - Cengkareng toll road	Tangerang	76,2	76,2	Tahap pengembangan /Under development stage	35	2.129.571	1.431.978
PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP), berdiri tanggal 26 Agustus 1988 /established on August 26, 1988	Pengusahaan jasa konstruksi dan Pemeliharaan jalan tol, jasa sewa peralatan tol, serta jasa sewa kendaraan /Services in toll road construction and maintenance, toll road equipments rental, and vehicles rental	Jakarta	99,8	99,7	10 Februari 1989 /February 10, 1989	-	524.008	322.961
PT Jasamarga Pandaan Tol (JPPT), berdiri tanggal 25 September 1996 /established on September 25, 1996	Penyelenggaraan ruas jalan tol Gempol - Pandaan /Operator of the Gempol - Pandaan toll road	Pandaan	92,2	92,2	18 Juni 2015 /June 18, 2015	35	1.309.133	1.260.202
PT Jasamarga Bali Tol (JBT), berdiri tanggal 22 Agustus 2011/established on August 22, 2011	Penyelenggaraan ruas jalan tol Nusa Dua - Tanjung Benoa /Operator of the Nusa Dua - Tanjung Benoa toll road	Bali	55	55	1 Oktober 2013/ October 1, 2013	45	1.900.826	1.938.330
PT Jasa Marga Properti (JMP), berdiri tanggal 15 Januari 2013/ established on January 15, 2013	Pengembangan bisnis properti /Develop business in property	Jakarta	99,9	99,8	15 Januari 2013 /January 15, 2013	-	902.066	860.734

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Entitas anak yang dikonsolidasikan (lanjutan)

e. Consolidated subsidiaries (continued)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Aktivitas utama/ Principal activity	Domisili/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Periode masa konsesi (Tahun) Concession period (Year)	Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah) Total assets before elimination (in million rupiah)	
			31 Des, 2017/ Dec 31, 2017	31 Des, 2016/ Dec 31, 2016			31 Des, 2017/ Dec 31, 2017	31 Des, 2016/ Dec 31, 2016
PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT), berdiri tanggal 25 November 2014 /established on November 25, 2014	Penyelenggaraan ruas jalan tol Medan- Kualanamu- Tebing tinggi/Operator of the Medan- Kualanamu- Tebing tinggi toll road	Medan	55	55	13 Oktober 2017 /October 13, 2017	40	3.581.207	1.901.782
PT Solo Ngawi Jaya (SNJ), berdiri tanggal 24 Maret 2009/ established on March 24, 2009	Penyelenggaraan ruas jalan tol Solo - Ngawi/Operator of the Solo - Ngawi toll road	Solo	60	60	Tahap pengembangan /Under development stage	40	6.572.214	3.710.284
PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ), berdiri tanggal 24 Maret 2009/established on March 24, 2009	Penyelenggaraan ruas jalan tol Ngawi - Kertosono/ Operator of the Ngawi - Kertosono toll road	Madiun	60	60	Tahap pengembangan /Under development stage	35	4.197.681	2.268.068
PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), berdiri tanggal 10 Juli 2008/established on July 10, 2008	Penyelenggaraan ruas jalan tol Cinere - Serpong/ Operator of the Cinere - Serpong toll road	Jakarta	55	55	Tahap pengembangan /Under development stage	35	1.919.063	1.158.963
PT Jasa Layanan Operasi (JLO), berdiri tanggal 21 Agustus 2015 /established on August 21, 2015	Jasa pengoperasian jalan tol/Toll road operation services	Jakarta	99,9	99,9	30 September 2015/September 30, 2015	-	122.092	81.860
PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), berdiri tanggal 21 April 2016/established on April 21, 2016	Penyelenggaraan ruas jalan tol Semarang- Batang dan Terbangi Besar- Kayu Agung /Operator of the Semarang- Batang Toll Road	Semarang	60	60	Tahap pengembangan /Under development stage	45	9.635.970	3.659.580
PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM), berdiri tanggal 6 Juni 2016/established on June 6, 2016	Penyelenggaraan ruas jalan tol Pandaan - Malang/ Operator of the Pandaan - Malang Toll Road	Pasuruan	60	60	Tahap pengembangan /Under development stage	35	3.004.809	982.269
PT Jasamarga Manado Bitung (JMB), berdiri tanggal 6 Juni 2016 /established on June 6, 2016	Penyelenggaraan ruas jalan tol Manado - Bitung/ Operator of the Manado - Bitung Toll Road	Jakarta	65	65	Tahap pengembangan /Under development stage	40	918.093	144.176
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS), berdiri tanggal 6 Juni 2016 /established on June 6, 2016	Penyelenggaraan ruas jalan tol Balikpapan - Samarinda/Oper ator of the Balikpapan - Bitung Toll Road	Jakarta	55	55	Tahap pengembangan /Under development stage	40	3.044.144	277.850

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Entitas anak yang dikonsolidasikan (lanjutan)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Aktivitas utama/ Principal activity	Domisili/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Periode masa konsesi (Tahun) Concession period (Year)	Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah) Total assets before elimination (in million rupiah)	
			31 Des, 2017/ Dec 31, 2017	31 Des, 2016/ Dec 31, 2016			31 Des, 2017/ Dec 31, 2017	31 Des, 2016/ Dec 31, 2016
			PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), berdiri tanggal 28 November 2016 /established on November 28, 2016	Penyelenggaraan ruas jalan tol Jakarta – Cikampek II Elevated /Operator of the Jakarta- Cikampek II Elevated			Jakarta	80
PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), berdiri tanggal 2 Juni 2017 /established on June 2, 2017	Penyelenggaraan ruas jalan tol Trans Jawa/Operator of the Trans Jawa Toll Road	Jakarta	65	-	Tahap pengembangan /Under development stage	-	807	-

f. Pendirian entitas anak selama tahun 2017

PT Jasamarga Japek Selatan

PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) didirikan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 29 Desember 2017 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn. Penyertaan pada JJS dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Jakarta Cikampek Selatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Perusahaan memiliki 32.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp32.000.000.000 (rupiah penuh) yang merupakan 80% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2017.

1. GENERAL (continued)

e. Consolidated subsidiaries (continued)

f. Establishment of subsidiaries during 2017

PT Jasamarga Japek Selatan

PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) was established based on Notarial Deed No. 18 dated December 29, 2017 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn. The investment in JJS was made in accordance with Jakarta Cikampek Selatan toll road project which comprise development, operation and maintenance of toll road. The Company has 32,000 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share or equivalent to Rp32,000,000,000 (full amount), which represents 80% of ownership as of December 31, 2017.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Pendirian entitas anak selama tahun 2017 (lanjutan)

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) didirikan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 29 Desember 2017 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn. Penyertaan pada JJS dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Probolinggo Banyuwangi yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Perusahaan memiliki 32.450 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp32.450.000.000 (rupiah penuh) yang merupakan 55% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2017.

PT Jasamarga Transjawa Tol

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) didirikan berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 02 Juni 2017 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Penyertaan pada JTT dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol trans jawa yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Perusahaan memiliki 812.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp812.500.000 (rupiah penuh) yang merupakan 65% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2017.

g. Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan

PT Trans Marga Jateng (TMJ)

Pada tanggal 17 Mei 2017, Perusahaan melakukan penjualan saham di TMJ sebanyak 15% kepemilikan dengan harga sebesar Rp783.354.396. Transaksi tersebut diaktakan pada Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Mei 2017 dari Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn. Kepemilikan saham Perusahaan di TMJ menjadi sebesar 58,91% setelah transaksi penjualan saham tersebut. Perusahaan mencatat laba pelepasan investasi sebesar Rp563.418.040 dan disajikan sebagai bagian penghasilan lain-lain dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2017.

1. GENERAL (continued)

f. Establishment of subsidiaries during 2017 (continued)

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) was established based on Notarial Deed No. 20 dated December 29, 2017 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn. The investment in JPB was made in accordance with Probolinggo Banyuwangi toll road project which comprise development, operation and maintenance of toll road. The Company has 32,450 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share or equivalent to Rp32,450,000,000 (full amount), which represents 55% of ownership as of December 31, 2017.

PT Jasamarga Transjawa Tol

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) was established based on Notarial Deed No. 22 dated June 2, 2017 of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The investment in JTT was made in accordance with trans jawa toll road project which comprise development, operation and maintenance of toll road. The Company has 812,500 shares with nominal value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp812,500,000 (full amount), which represents 65% of ownership as of December 31, 2017.

g. Changes in ownership in subsidiaries during the year

PT Trans Marga Jateng (TMJ)

On May 17, 2017, the Company sold its shares of TMJ with 15% ownership at a price of Rp783,354,396. The transaction was notarized in Deed No. 20 dated May 17, 2017 of Ni Nyoman Rai Sumawati S.H., M.Kn. The Company's share ownership in TMJ becomes 58.91% after the sales of shares transaction. The Company recorded gain on divestment amounted to Rp563.418.040 and is presented as part of other income in the 2017 consolidated financial statements.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan (lanjutan)

PT Trans Marga Jateng (TMJ) (lanjutan)

Pada tanggal yang sama, para pemegang saham TMJ mengadakan Nota Kesepakatan yang menyepakati bahwa pengendalian TMJ dilakukan secara bersama oleh Perusahaan dan PT Astratel Nusantara, pemegang saham lainnya di TMJ. Transaksi pelepasan saham dan perubahan pengendalian di TMJ diperlakukan sebagai suatu transaksi tunggal sehingga sejak tanggal 17 Mei 2017, Perusahaan tidak mengkonsolidasi laporan keuangan TMJ ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan mencatat investasi di TMJ sebagai investasi pada ventura bersama.

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC)

Berdasarkan Akta Notaris No. 15 Tanggal 14 Desember 2017 dari notaris Umi Chamidah, S.H., M.Kn., dan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0201421 tanggal 15 Desember 2017, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp338.401.700.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 37.187.000 lembar saham menjadi sebesar Rp345.408.700.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 37.957.000 lembar saham.

PT Marga Trans Nusantara (MTN)

Berdasarkan Akta Notaris No. 35 Tanggal 30 Oktober 2017 dari notaris Nanny Wiana Setiawan, S.H., dan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0188022 tanggal 6 November 2017, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp286.100.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 286.100 lembar saham menjadi sebesar Rp323.500.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 323.500 lembar saham.

1. GENERAL (continued)

g. Changes in ownership in subsidiaries during the year (continued)

PT Trans Marga Jateng (TMJ) (continued)

On the same date, the shareholders of TMJ entered into a Memorandum of Agreement which agreed that TMJ is jointly controlled by the Company and PT Astratel Nusantara, another shareholder in TMJ. The sale of share transaction and change in control in TMJ are treated as a single transaction, therefore, from May 17, 2017, the Company did not consolidate TMJ's financial statements into the Company's consolidated financial statements and recorded investment in TMJ as an investment in joint venture.

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC)

Based on Notarial Deed No. 15 dated December 14, 2017 of Umi Chamidah S.H., M.Kn. and approval letter from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0201421 dated December 15, 2017, the shareholders agreed to increase the issued and paid up capital to Rp338,401,700,000 (full amount) or 37,187,000 shares to Rp345,408,700,000 (full amount) or 37,957,000 shares.

PT Marga Trans Nusantara (MTN)

Based on Notarial Deed No. 35 dated October 30, 2017 of Nanny Wiana Setiawan, S.H., and approval letter from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0188022 dated November 6, 2017, the shareholders agreed to increase the issued and fully paid-up capital from Rp286,100,000,000 (full amount) or 286,100 shares to Rp323,500,000,000 (full amount) or 323,500 shares.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan (lanjutan)

PT Jasa Marga Kualanamu Tol (JMKT)

Berdasarkan Akta Notaris No. 25 Tanggal 31 Oktober 2017 dari notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., dan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0191463 tanggal 16 November 2017, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp760.000.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 760.000 lembar saham menjadi sebesar Rp965.000.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 965.000 lembar saham.

PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 Tanggal 28 Juli 2017 dan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03.000157812 tanggal 1 Agustus 2017, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp748.000.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 34.000 lembar saham menjadi sebesar Rp975.063.100.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 44.321 lembar saham.

PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)

Berdasarkan Akta Notaris No. 7 Tanggal 28 September 2017 dari notaris Dra. EC. Inggriati Djojoseputro, S.H., para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp393.000.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 393.000 lembar saham menjadi sebesar Rp696.980.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 696.980 lembar saham.

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 37 Tanggal 12 Januari 2017 dari notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp112.000.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 112.000 lembar saham menjadi sebesar Rp134.000.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 134.000 lembar saham.

1. GENERAL (continued)

g. Changes in ownership in subsidiaries during the year (continued)

PT Jasa Marga Kualanamu Tol (JMKT)

Based on Notarial Deed No. 25 dated October 31, 2017 of Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., and approval letter from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0191463 dated November 16, 2017, the shareholders agreed to increase the issued and paid up capital from Rp760,000,000,000 (full amount) or 760,000 shares to Rp965,000,000,000 (full amount) or 965,000 shares.

PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)

Based on Notarial Deed No. 10 dated July 28, 2017 and letter of approval from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03.000157812 dated August 1, 2017, the shareholders agreed to increase the issued and paid up capital from Rp748,000,000,000 (full amount) or 34,000 shares to Rp975,063,100,000 (full amount) or 44,321 shares.

PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)

Based on Notarial Deed No. 7 dated September 28, 2017 of notary Dra. EC. Inggriati Djojoseputro, S.H., the shareholders agreed to increase the issued and paid up capital from Rp393,000,000,000 (full amount) or 393,000 shares to Rp696,980,000,000 (full amount) or 696,980 shares.

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS)

Based on Notarial Deed No. 37 dated January 12, 2017 of notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to increase the issued and paid up capital from Rp112,000,000,000 (full amount) or 112,000 shares to Rp134,000,000,000 (full amount) or 134,000 shares.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan (lanjutan)

PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)

Berdasarkan Akta Notaris No. 01 Tanggal 4 Desember 2017 dari notaris Ati Mulyati, S.H., M.Kn., dan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0200551 tanggal 14 Desember 2017, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp188.000.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 188.000 lembar saham menjadi sebesar Rp326.000.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 326.000 lembar saham.

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)

Berdasarkan Akta Notaris No. 26 Tanggal 16 Agustus 2017 dari notaris Ni Nyoman Rai, S.H., dan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.02.0017396 tanggal 24 Agustus 2017, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp47.000.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 47.000 lembar saham menjadi sebesar Rp71.000.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 71.000 lembar saham.

PT Jasamarga Layanan Pemeliharaan (JLP)

Berdasarkan Akta Notaris No. 72 Tanggal 22 Desember 2016 dari notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. dan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03.0002524 tanggal 5 Januari 2017 Perusahaan memiliki jumlah saham sebanyak 348.747 lembar senilai Rp348.747.000.000 (rupiah penuh) dan saham pada JLP meningkat dari 99,7% menjadi sebesar 99,8% pada tanggal 31 Desember 2017.

1. GENERAL (continued)

g. Changes in ownership in subsidiaries during the year (continued)

PT Jasamarga Manado Bitung

Based on Notarial Deed No. 01 dated December 4, 2017 of Ati Mulyati, S.H., and letter of approval from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AH.01.03-0200551 dated December 14, 2017, the shareholders agreed to increase the issued and paid up capital from Rp188,000,000,000 (full amount) or 188,000 shares to Rp326,000,000,000 (full amount) or 326,000 shares.

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)

Based on Notarial Deed No. 26 dated August 16, 2017 of notary Ni Nyoman Rai, S.H., and letter of approval from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.02.0017396 dated August 24, 2017, the shareholders agreed to increase Issued and paid up capital from Rp47,000,000,000 (full amount) or 47,000 shares to Rp71,000,000,000 (full amount) or 71,000 shares.

PT Jasamarga Layanan Pemeliharaan (JLP)

Based on Notarial Deed No. 72 dated December 22, 2016 of Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. and letter of approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0002524 dated January 5, 2017, the Company has 348,747 shares or amounting to Rp348,747,000,000 (full amount) and the Company's ownership in JLP increase from 99.7% to 99.8% as of December 31, 2017.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan (lanjutan)

PT Jasamarga Properti (JMP)

Berdasarkan Akta Notaris Umi Chamidah, S.H., M.Kn., No. 283 tanggal 27 Desember 2016 dan disahkan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03.0000537 tanggal 3 Januari 2017, Perusahaan menyetorkan tambahan modal disetor di JMP sehingga jumlah saham perusahaan pada JMP menjadi sebesar 834.120 lembar saham atau senilai Rp834.120.000.000 (rupiah penuh) dan saham pada JMP meningkat dari 99,8% menjadi sebesar 99,9%.

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM)

Berdasarkan Akta Notaris No. 06 Tanggal 28 Desember 2017 dari notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03.0005601, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp1.293.500.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 1.293.500.000 lembar saham menjadi sebesar Rp1.494.177.000.000 (rupiah penuh) atau sebanyak 1.494.177.000 lembar saham.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

1. GENERAL (continued)

g. Changes in ownership in subsidiaries during the year (continued)

PT Jasamarga Properti (JMP)

Based Notarial Deed of Umi Chamidah, S.H., M.Kn., No. 283 dated December 27, 2016 and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03.0000537 dated January 3, 2017, the Company paid on additional paid-in capital in JMP that resulted in total the number of shares of the Company in JMP become 834,120 shares or amounting to Rp834,120,000,000 (full amount) and share ownership in JMP increased from 99.8% to 99.9%.

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM)

Based on Notarial Deed No. 06 dated December 28, 2017 of notary Rina Utami Djauhari, S.H., and letter of approval from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03..0005601, the shareholders agreed to increase Issued and paid up capital from Rp1,293,500,000,000 (full amount) or 1,293,500,000 shares to Rp1,494,177,000,000 (full amount) or 1,494,177,000 shares.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and the regulations and the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority ("OJK").

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**a. Penyajian laporan keuangan konsolidasian
(lanjutan)**

Selain laporan arus kas konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asas akrual, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah rupiah yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1e, dimana Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas tersebut.

Laporan keuangan entitas anak disiapkan untuk periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan dan menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten.

Pengendalian diperoleh ketika Kelompok Usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

Secara spesifik, Kelompok Usaha mengendalikan investee jika dan hanya jika Kelompok Usaha memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas investee (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan investee)
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

Except for the consolidated statement of cash flows, the consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are stated on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statement of cash flows, which has been prepared using the direct method, presents cash receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the consolidated financial statements is the Indonesian rupiah, which is also the functional currency of the Group.

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Group as disclosed in Note 1e, in which the Company have control over the entity.

The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting period as that of the Company and using consistent accounting policies.

Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Specifically, the Group controls an investee if and only if, the Group has:

- *Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee)*
- *Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- *The ability to use its power over the investee to affect its returns.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Ketika Kelompok Usaha memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Kelompok Usaha mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain
- Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain
- Hak suara dan hak suara potensial Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas anak perusahaan dimulai ketika Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas anak perusahaan dan berhenti ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas anak perusahaan. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban atas anak perusahaan yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Kelompok Usaha memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Kelompok Usaha menghentikan pengendalian atas anak perusahaan.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Kelompok Usaha dan pada kepentingan non pengendali, walaupun hasil di kepentingan non pengendali (KNP) mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Kelompok Usaha akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Seluruh akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Kelompok Usaha sebagai satu kesatuan usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- The contractual arrangement with the other vote holders of the investee*
- Rights arising from other contractual arrangements*
- The Group's voting rights and potential voting rights.*

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

All material intercompany accounts and transactions, including unrealized gains or losses, if any, are eliminated to reflect the financial position and the results of operations of the Group as one business entity.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Perubahan kepemilikan di anak perusahaan, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas anak perusahaan, maka:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas Entitas Anak
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau mengalihkan secara langsung ke defisit atau saldo laba.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non-Pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Kombinasi bisnis

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it:

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI*
- *derecognizes the cumulative translation differences recorded in equity*
- *recognizes the fair value of the consideration received*
- *recognizes the fair value of any investment retained*
- *recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*
- *reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to the statement of profit or loss and other comprehensive income or deficit or retained earnings, as appropriate.*

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the non-controlling interests (NCI) even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

Business combinations

NCI represent the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries not attributable to the parent entity, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

A change in a parent's ownership interest in a subsidiary that does not result in a loss of control is accounted for as an equity transaction (i.e., a transaction with owners in their capacity as owners).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Kombinasi bisnis (lanjutan)

Kombinasi bisnis, jika ada, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Kelompok Usaha memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan termasuk dalam beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Kelompok Usaha mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih nilai lebih agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diakui.

Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen menilai kembali identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diasumsikan.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (UPK) dari Kelompok Usaha yang diharapkan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

Business combinations (continued)

Business combinations, if any, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured at the aggregate value of the consideration transferred, measured at fair value on acquisition date and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities recognized.

If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary- acquiree, the difference is recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's cash-generating units (CGU) that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGU.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Setara kas

Deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan yang tidak dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai "Setara Kas".

Bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya untuk digunakan sebagai jaminan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari "Kas dan Setara Kas" melainkan disajikan pada akun "Dana ditetapkan penggunaannya" dan sebagai bagian dari "Aset Tidak Lancar".

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terkait.

e. Persediaan

Properti yang diperoleh atau dalam penyelesaian untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang tidak untuk disewakan atau untuk mendapatkan kenaikan nilai, dicatat sebagai persediaan.

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata.

Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah untuk pengembangan, biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan real estat serta biaya-biaya pinjaman, jika ada. Pada saat dijual, semua biaya dialokasikan secara proporsional berdasarkan luas area masing-masing.

Biaya pengembangan tanah, termasuk tanah yang digunakan sebagai jalan dan prasarana atau area yang tidak dapat dijual lainnya, dialokasikan kepada luas area yang dapat dijual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Cash equivalents

Time deposits with maturities of three months or less at the time of placement, which are not restricted, are classified as "Cash Equivalents".

Cash in banks and time deposits which are restricted as to use or are used as collateral for obligations are not classified as part of "Cash and Cash Equivalents". There are presented in "Restricted funds" and as part of "Non-current Assets".

d. Transactions with related parties

The Group has transactions with certain parties which have related party relationships as defined under PSAK 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

e. Inventories

Properties acquired or being constructed for sale in the ordinary course of business, rather than to be held for rental or capital appreciation, are classified as inventories.

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the average method.

The cost of land under development consists of the cost of land for development, direct and indirect development costs related to real estate development activities and borrowing costs, if any. At the time of sale, total project costs are allocated proportionately based on their respective areas.

The cost of land development, including land which is used for roads and infrastructure or other unsaleable area, is allocated to the saleable area.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Persediaan (lanjutan)

Biaya perolehan bangunan dalam penyelesaian dipindahkan ke rumah, ruko dan apartemen (*strata title*) tersedia untuk dijual pada saat pembangunan telah selesai.

Untuk proyek properti tempat tinggal, pada saat pengembangan dan pembangunan infrastruktur dilaksanakan, akun ini dipindahkan ke persediaan. Untuk proyek properti komersial, pada saat selesainya pengembangan tanah dan pembangunan infrastruktur, akun ini akan tetap sebagai bagian dari persediaan atau direklasifikasi ke aset tetap atau properti investasi, mana yang lebih sesuai.

Komisi yang tidak dapat dikembalikan yang dibayarkan kepada agen penjualan atas penjualan unit real estat dibebankan pada saat dibayar.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal yang didasarkan pada harga pasar pada tanggal pelaporan dan didiskontokan untuk nilai waktu uang, jika material, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya untuk melaksanakan penjualan. Penurunan nilai persediaan ditetapkan setiap tanggal pelaporan untuk mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi neto dan penurunannya diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian periode yang bersangkutan.

f. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada operasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa yang diharapkan dapat memberikan manfaat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Inventories (continued)

The cost of buildings under construction is transferred to houses, shop houses and apartments (strata title) available for sale when the construction is substantially completed.

For residential property project, at the time development and construction of infrastructures are being done, this account is reclassified to inventories. For commercial property project, upon the completion of development and construction of infrastructure, this account either remains as part of inventories or is reclassified to fixed assets or investment property, whichever is more appropriate.

Non-refundable commissions paid to sales or marketing agents on the sale of real estate units are expensed when paid.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, based on market prices at the reporting date and discounted for the time value of money if material, less estimated costs to complete and estimated costs to sell. The decline in value of inventories is determined every reporting date to write down the carrying amount of inventories to their net realizable value and the decline is recognized as a loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the related period.

f. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations using the straight-line method over the years of expected benefit.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi dan ventura bersama diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Kelompok Usaha mempunyai pengaruh signifikan. Kelompok Usaha telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan bersama tersebut sebagai ventura bersama. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama sejak tanggal perolehan.

Investasi pada saham yang tidak tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat pada biaya perolehannya dan disajikan sebagai "Aset tidak lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi dan ventura bersama, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika dapat diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dan ventura bersama dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi dan ventura bersama.

Kelompok Usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi dan ventura bersama mengalami penurunan nilai. Kelompok Usaha menentukan apakah perlu untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi dan ventura bersama.

Apabila terdapat bukti obyektif penurunan nilai, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan ventura bersama dan nilai tercatatnya, dan mengakui penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Investments in associates and joint venture

The Group's investments in its associates and joint venture are accounted for using the equity method. An associate is an entity in which the Group has significant influence. The Group has assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures. Under the equity method, the cost of investment is increased or decreased by the Group's share in net earnings or losses of, and dividends received from, the associate and joint venture since the date of acquisition.

Investment in shares with ownership interest of less than 20% that do not have readily determinable its fair value is stated at cost (the cost method) and disclosed as "Other non-current assets" in the consolidated statement of financial position.

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflects the share of the results of operations of the associates and joint venture. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associates and joint venture, the Group recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associates and joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the associates and joint venture.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that its investments in the associates and joint venture are impaired. The Group determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on the Group's investments in its associates.

If there is objective evidence of impairment, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of investments in associates and their carrying value, and recognizes the impairment in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

h. Aset tetap

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset, sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Gedung kantor dan bangunan lain	20
Peralatan operasional dan kantor	3 - 5
Kendaraan	3 - 5

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek dalam pelaksanaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan amortisasi aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, apabila diperlukan, pada setiap akhir tahun buku.

i. Properti investasi

Properti investasi Kelompok Usaha terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Fixed assets

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets, as follows:

Office and other buildings
Operational and office equipment
Vehicles equipment

Land is stated at cost and not depreciated. Costs associated with the acquisition of legal right of land when the land was first acquired are recognized as part of the cost of land. Costs associated with the extension or renewal of legal right of land are recognized as intangible asset which is amortized over the legal life of the land right or economic life of the land, whichever is shorter.

Construction in progress are stated at cost and presented as part of fixed assets. The accumulated costs are reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and the constructed asset is ready for its intended use.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is credited or charged to current operations in the year the asset is derecognized.

The fixed assets' residual values, useful lives and methods of depreciation and amortization are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

i. Investment properties

Investment properties of the Group consist of land and building and infrastructures held by the Group to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Total tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Penyusutan bangunan dan prasarana dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atas taksiran masa manfaat ekonomis berkisar dari 3 tahun sampai dengan 20 tahun.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Untuk pengalihan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Kelompok Usaha menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan Kelompok Usaha menjadi properti investasi, Kelompok Usaha mencatat properti investasi tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Investment properties (continued)

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any, except for land which is not depreciated. Such cost includes the cost of replacing part of the investment properties, if the recognition criteria are met, and excludes the daily expenses on their usage.

Depreciation of buildings and infrastructures is computed using the straight-line method over their estimated useful lives ranging from 3 years to 20 years.

An investment property should be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of an investment property is credited or charged to profit or loss in the period the asset is derecognized.

Transfers to investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owner-occupation, commencement of an operating lease to another party or end of construction or development. Transfers from investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner occupation or commencement of development with a view to sell.

For a transfer from investment properties to owner-occupied property, the Group uses the cost method at the date of change in use. If an owner-occupied property becomes an investment property, the Group records the investment property in accordance with the fixed assets policies up to the date of change in use.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Perjanjian konsesi jasa

Kelompok Usaha telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22) sehubungan dengan hak konsesi.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Kelompok Usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset tak berwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tanpa syarat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Service concession arrangement

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22) related to the concession rights.

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are toll road concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of the toll road. During the construction period, the accumulated toll road construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) for no consideration.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Aset konsesi yang diberikan kepada Kelompok Usaha dapat dialihkan dengan persetujuan Pemerintah/ BPJT. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/ BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selama periode hak pengusahaan jalan tol, aset hak pengusahaan jalan tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha jika jalan tol diserahkan (dikusasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah/ BPJT mengubah status jalan tol menjadi jalan non-tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Selain itu, Kelompok Usaha mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" dan PSAK 23, "Pendapatan". Ketika Kelompok Usaha menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Kelompok Usaha diakui pada nilai wajar.

Kelompok Usaha mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset tak berwujud dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset tak berwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**j. Service concession arrangement
(continued)**

Concession asset granted to the Group are transferrable with approval from the Government/ BPJT. These concession right assets will be transferred to the Government/ BPJT at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

During the toll road concession rights period, the concession rights assets may be derecognized from the consolidated statement of financial position of the Group if the toll road is transferred to another party or the Government/ BPJT has changed the status of the toll road to non-toll road or if there is no economic benefit expected from usage of the toll road. Gain or loss from discontinuance or disposal of concession assets is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" and PSAK 23, "Revenue". When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. aset hak perusahaan jalan tol untuk jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas.
2. aset hak perusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset kerjasama operasi

Jalan tol yang pembangunannya didanai oleh investor tanpa kuasa penyelenggaraan dengan pola bagi pendapatan atau bagi hasil tol untuk masa tertentu, selama pengoperasiannya dikendalikan oleh Perusahaan, dicatat sebagai jalan tol kerjasama operasi dan liabilitas (jangka panjang) kerjasama operasi pada saat jalan tol selesai dibangun dan diserahkan oleh investor kepada Perusahaan untuk operasi.

Provisi pelapisan jalan tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Kelompok Usaha mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**j. Service concession arrangement
(continued)**

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

The concession assets are amortized over the concession period using the following method:

1. *toll road concession rights for toll roads and toll bridges are amortised using unit of usage method based on traffic volume.*
2. *toll road concession rights aside from toll roads and toll bridges are amortised using straight line method.*

Joint operation assets

The construction of toll road is funded by investors without operation rights under revenue or profit sharing scheme for certain period of time, while the operation is controlled by the Company and is recorded as joint operation toll road and joint operation liabilities (long-term) when the construction is completed and transferred by the investor to the Company for operation.

Provision for overlay

In operating toll roads, the Group is obliged to maintain quality in accordance with the SPM (Minimum Service Standards) established by the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia, i.e., by performing overlay regularly. The cost of this overlay is periodically provided for based on estimated utilization of toll road by customers. The estimated net provision for overlay is discounted to its present value that reflects current provision.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian sesuai maksud penggunaannya selesai secara substansial.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "rugii penurunan nilai", jika ada.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**j. Service concession arrangement
(continued)**

Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use are substantially completed.

k. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or its cash-generating unit's (CGU's) fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment losses", if any.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar terkini dijadikan sebagai acuan, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, digunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset.

Kerugian penurunan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah terbalik. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Apabila terdapat pembalikan penurunan nilai, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah disesuaikan, penyusutan bersih, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**k. Impairment of non-financial assets
(continued)**

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the asset.

Impairment losses, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have reversed. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

If there is reversal of impairment, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. However, the reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill*. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode-periode berikutnya.

i. Sewa

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa". PSAK ini menetapkan bahwa klasifikasi dari setiap elemen sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah bagi suatu perjanjian sewa yang mengandung elemen tanah dan bangunan.

Kelompok Usaha sebagai lessee

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa, atau perjanjian yang mengandung sewa, didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewa pembiayaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**k. Impairment of non-financial assets
(continued)**

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGU) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill can not be reversed in future periods.

i. Leases

The Group has adopted PSAK 30 (Revised 2011), "Leases". This PSAK prescribes separate classification of each element as finance lease or operating lease if a lease consists of land and building.

The Group as lessee

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. A lease that transfers substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset is classified as a finance lease.

At the commencement of the lease term, a lessee recognizes finance lease as an asset and a liability in its consolidated statement of financial position at an amount equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability. The finance charges are allocated to each period during the lease term.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Sewa (lanjutan)

Aset sewa pembiayaan yang dimiliki oleh lessee dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan secara konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewa pembiayaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

m. Perpajakan

Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan".

Pajak penghasilan non-final - pajak kini

Aset dan liabilitas pajak penghasilan kini untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya diukur pada jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak penghasilan final

Penghasilan dari penjualan rumah (subsidi dan non-subsidi) dan penghasilan dari sewa gedung merupakan subjek pajak final masing-masing sebesar 1%, 5% dan 10%. Pajak penghasilan final dihitung pada jumlah total tagihan untuk nilai kontrak yang dikumpulkan selama setahun. Oleh karena itu, tidak ada aset/kewajiban pajak tangguhan yang diakui.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Leases (continued)

Leased asset held by the lessee under a finance lease is depreciated consistently using the same method used with that for depreciable assets that are directly owned, or is fully depreciated over the shorter of the lease term and its useful life, if there is no reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term.

Leases which do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

m. Taxation

The Group has adopted PSAK 46 (Revised 2014), "Income Tax".

Non-final income tax - current tax

Current income tax assets and liabilities for the current and prior years are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted by the reporting date.

Final income tax

Income from sale of real property (subsidi and non-subsidi) and income from rental building is subject to final tax rates of 1%, 5% and 10%, respectively. The final income tax is calculated on the total amount of billings for the contract value which is collected during the year. Accordingly, no deferred income tax asset/liability is recognized.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Perpajakan (lanjutan)

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada periode berjalan untuk tujuan akuntansi.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada periode berjalan untuk tujuan akuntansi.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pendapatan, beban dan aset diakui setelah dikurangi dengan jumlah PPN, kecuali:

- Ketika PPN yang terjadi sehubungan dengan pembelian aset atau jasa tidak dapat diklaim kepada kantor pajak, dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai beban.
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk PPN.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode posisi keuangan atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Taxation (continued)

The differences between the carrying amounts of existing assets or liabilities related to the final income tax and their respective tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities. Current tax expense related to income subject to final income tax is recognized in proportion to total income recognized during the current period for accounting purposes.

The differences between the carrying amounts of existing assets or liabilities related to the final income tax and their respective tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities. Current tax expense related to income subject to final income tax is recognized in proportion to total income recognized during the current period for accounting purposes.

The difference between the final income tax paid and the amount charged as final income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is recognized as prepaid tax or tax payable.

Value Added Tax (VAT)

Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the Tax Office, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable.*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

Deferred tax

Deferred tax is provided using the financial position method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the end of the reporting period.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat penghasilan kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan dapat digunakan.

Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar penghasilan kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

n. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Kelompok Usaha mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek (jika ada) ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut diberikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Taxation (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and unused tax losses carry-forward, to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the deductible temporary differences and the unused tax losses carry-forward can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at the end of each reporting period and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity and taxation authority.

n. Employee benefits

Short-term employee benefits

The Group recognizes short-term employee benefits liability (if any) when services are rendered and the compensation for such services are to be paid within twelve months after such services are rendered.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan paska-kerja

Program pensiun

Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". Selain itu, Kelompok Usaha juga menerapkan ISAK 15, "PSAK 24: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya".

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga obligasi perusahaan berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh temponya kurang lebih sama dengan kewajiban yang bersangkutan.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial disajikan di ekuitas.

Perusahaan memiliki berbagai program pensiun sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan Perusahaan. Program ini pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun sebagaimana ditentukan dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan secara berkala.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits

Pension program

The Group has applied PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits". In addition, the Group also applied ISAK 15, "PSAK 24: The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction".

The liability recognized in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the consolidated statement of financial position date less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the *projected-unit-credit* method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognized in other comprehensive income. Accumulated actuarial gains and losses are reported in equity.

The Company has pension schemes in accordance with prevailing labor-related laws and regulations and the Company's policy. The schemes are generally funded through payments to trustee-administered funds as determined by periodic actuarial calculations.

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors, such as age, years of service or compensation.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan paska-kerja (lanjutan)

Program pensiun (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada tahun kini dan sebelumnya.

Perusahaan harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003 tentang "Ketenagakerjaan" (UU Ketenagakerjaan). Program pensiun Perusahaan berdasarkan perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh program pensiun Perusahaan akan melebihi imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan.

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk pegawai tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM). Manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja pegawai.

DPJM telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP- 370/KM.17/1997, tanggal 15 Juli 1997 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan No.KEP-379/KM.6/2004 tanggal 14 September 2004.

Jumlah iuran karyawan untuk program pensiun sebesar 3% dari gaji pokok dan sisa pendanaan sebesar 13,7% menjadi beban Perusahaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Pension program (continued)

A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (a fund) and will have no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years.

The Company is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 (Labor Law). The Company's pension plan based on the calculation of the benefit obligation performed by the actuaries provide that the expected benefits under the Company's pension plan will exceed the minimum requirements of the Labor Law.

The Company provides a defined benefit pension plan covering all permanent employees which is managed by the Jasa Marga Pension Fund (DPJM). Pension benefit to be paid are determined based on basic pension income and the period of the employment.

The DPJM has been approved by the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No.KEP-370/KM.17/1997, dated July 15, 1997 and amended by the Decree No.KEP-379/KM.6/2004 dated September 14, 2004.

The employees contribute 3% of their basic salaries to the plan and the remaining funding of 13.7% is contributed by the Company.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan paska-kerja (lanjutan)

Program purna karya

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 163/KPTS/2003 tanggal 23 September 2003, Perusahaan akan memberikan tunjangan purna karya berupa pembayaran sekaligus sebanyak 24 kali penghasilan terakhir (diluar lembur dan tunjangan pajak) kepada karyawan yang berhenti bekerja karena pensiun, meninggal, atau cacat. Bagi karyawan yang memasuki usia pensiun dipersyaratkan memiliki masa kerja minimal 25 tahun. Surat keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2003.

Imbalan pelayanan kesehatan pensiun

Jumlah iuran premi bulanan *coming service* setiap bulan adalah sebesar 6% dari Penghasilan Dasar Asuransi (PhDA) dengan proporsi Perusahaan dan karyawan masing-masing sebesar 4% dan 2% dari PhDA.

Perusahaan mengadakan kontrak kerjasama pengelolaan program Purna Karya karyawan dengan AJB Bumiputera 1912, melalui Perjanjian No. 34/Kontrak-DIR/2007 dan No. 441/AJB/JM/PKS/12/07, tanggal 19 Desember 2007. Program Purna Karya dalam kontrak ini akan memberikan manfaat dalam bentuk uang purna karya secara sekaligus (*lumpsum*) kepada karyawan tetap yang berhenti bekerja.

Perusahaan menyediakan imbalan kesehatan pasca-kerja untuk pensiunan yang berhak. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum tertentu. Prakiraan biaya imbalan ini masih harus diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metode akuntansi yang sama dengan metode yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Post retirement benefit program

Based on the Company's Directors Decree No. 163/KPTS/2003 dated September 23, 2003, the Company provides retirement benefit which is equal to 24 times the monthly salary (excluding overtime and tax allowance) for employees who cease work due to retirement, death, or disability. Employees who have reached retirement age are required to have a minimum working period of 25 years to obtain this benefit. The decree was effective on January 1, 2003.

Post-retirement health care benefits

The amount of monthly premium contribution for coming service is 6% from insurance basic income which represent 4% and 2% from insurance basic income of the Company and employee proportion, respectively

The Company entered into a cooperation agreement to manage employee Post Retirement with AJB Bumiputera 1912, through agreement No. 34/Kontrak-DIR/2007 and No. 441/AJB/JM/PKS/12/07, dated December 19, 2007. The post retirement in this contract will give a benefit in post retirement cash in lump sum to the retired of permanent employee.

The Company provides post-retirement health care benefits to its entitled retirees. The entitlement to these benefits is usually based on the employees' remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting method similar to that for defined benefit pension plans. These obligations are valued annually by independent actuary.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan paska-kerja (lanjutan)

**Imbalan pelayanan kesehatan pensiun
(lanjutan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 228/KPTS/2006, tanggal 26 Desember 2006, tentang Penyempurnaan Keputusan Direksi No. 61/KPTS/2001 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan dan Keluarga, yang bertujuan untuk tetap menjaga agar pensiunan dan keluarga pensiunan dapat melakukan pola hidup sehat dan memiliki produktivitas yang tinggi, keluarga pensiunan yang mendapat bantuan pengobatan dari Perusahaan dibatasi dengan jumlah anak sebanyak-banyaknya 3 orang dan telah terdaftar di Perusahaan.

Entitas Anak

Program Pensiun

Entitas Anak menghitung liabilitas imbalan pasca kerja dengan metode *projected-unit-credit*, sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013). Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuarial bagi karyawan aktif diakui langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.

JLJ menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetapnya. Program pensiun didanai seluruhnya oleh JLJ. Kontribusi yang diberikan JLJ dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

**Post-retirement health care benefits
(continued)**

Based on the Directors' Decree No. 228/KPTS/2006, dated Desember 26, 2006 regarding Improvement of the Directors' Decrees No. 61/KPTS/2001 about The Management of Health Maintenance for the Pensioner and Family, which its objective is to allow the pensionary and their family to have a healthy life and high productivity, the pensionary family that are eligible to receive medical assistance from the Company are limited to 3 children that are registered with the Company.

Subsidiaries

Pension Program

Based on PSAK 24 (Revised 2013), the Subsidiary has calculated the liability for other employee benefits using the *projected-unit-credit* method. Current service cost is recognized as an expense in the current year. Past service cost, actuarial adjustments and the effect of changes in actuarial assumptions for active employees are directly recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Employee benefits for terminations are recognized as liabilities and expenses when they occur.

JLJ provides a defined contribution pension program covering all permanent employees. The pension program is entirely funded by JLJ. The contribution borne by JLJ is charged to the consolidated statement of income in the current period.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Program Imbalan Kerja Lainnya

JLJ, JBT, JLP, JSM, MLJ, JPT, MSJ dan JLO (Entitas Anak) membukukan liabilitas program imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenaga-kerjaan No.13 Tahun 2003. Sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013), liabilitas atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Entitas Anak sehubungan dengan estimasi liabilitas tersebut.

Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuarial bagi karyawan aktif diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama sisa masa kerja rata-rata karyawan tersebut. Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.

o. Instrumen keuangan

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian" PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

1. Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Employee benefits (continued)

Subsidiaries (continued)

Other Employee Benefit Program

JLJ, JBT, JLP, JSM, MLJ, JPT, MSJ and JLO (Subsidiaries) recognized other employee benefit liabilities conducted in accordance with Labor Law No.13 Year 2003. Based on PSAK 24 (Revised 2013), employee benefit liabilities are estimated using the *projected-unit-credit* method. No funding is provided by Subsidiaries related with estimation of employee benefits.

Current service cost is recognized as an expense in the current year. Past service cost as effect of changes in actuarial assumptions for active employees are recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income over the estimated average remaining working period of those employees. Employee benefits for terminations are recognized as liabilities and expenses when they occur.

o. Financial instruments

The Group has adopted PSAK 50 (Revised 2014) "Financial Instruments: Presentation", PSAK 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures".

1. Financial assets

Initial recognition

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, and available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each financial year end.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/*regular*) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Kelompok Usaha berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2017, aset keuangan Kelompok Usaha mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang lain - lain dan dana yang dibatasi penggunaannya, yang seluruhnya dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam dua kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

At initial recognition, financial assets are recognized at fair value and, in the case of investments not at fair value through profit or loss, the fair value includes directly attributable transaction costs.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

Subsequent measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.

After initial measurement, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

As of December 31, 2017, the Group's financial assets included, cash and cash equivalents, short-term investments, other receivables and restricted funds, which are all classified as loans and receivables.

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the two preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in the equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in the equity is reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

Kelompok Usaha memiliki penyertaan saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan. Penyertaan ini dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat:
(1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Kelompok Usaha telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through", dan salah satu diantara (a) Kelompok Usaha telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Kelompok Usaha tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Penurunan nilai

Pada setiap akhir periode pelaporan Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

The Group has investments in shares of stock that do not have readily determinable fair value in which the ownership interest is less than 20% and no significant influence. These investments are carried at cost.

Derecognition

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Group has transferred the rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Impairment

The Group assesses at the end of each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events that have occurred after the initial recognition of the asset (incurred "loss events") and those loss events have an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan Kelompok Usaha menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Impairment (continued)

Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and the Group is collectively assessed for impairment.

Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun cadangan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang, beserta dengan penyisihan terkait, dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan atas pemulihan di masa depan dan semua agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Kelompok Usaha.

Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Impairment (continued)

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the financial asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written - off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group.

If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. The reversal shall not result in the carrying amount of the financial asset exceeding what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. The recovery is recognized in profit or loss.

2. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortized cost. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

At initial recognition, financial liabilities are recognized at fair value and, in the case of financial liabilities at amortized cost, less directly attributable transaction costs.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017, liabilitas keuangan Kelompok Usaha mencakup utang usaha, utang kontraktor, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, beban akrual, utang lembaga keuangan bukan bank, utang bank, utang obligasi, liabilitas pembebasan tanah dan liabilitas jangka panjang lainnya yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan diakui dalam laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Financial instruments (continued)

Initial recognition and measurement
(continued)

As of December 31, 2017, the Group's financial liabilities included trade payables, contractor payable, other financial liabilities, accrued expenses, non-bank financial institutions loan, bank loans, bonds payable, land acquisition liabilities and other long term liabilities, which are classified as financial liabilities at amortized cost.

After initial recognition, interest - bearing financial liabilities at amortized cost are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains or losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

A financial liability is derecognized when it is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original financial liability and the recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

4. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau harga yang diminta pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arm's length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

p. Laba per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dan disetor penuh selama periode yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Financial instruments (continued)

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

4. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial assets are recognized and measured at their carrying amount.

p. Earnings per share

Earnings per share amount is computed by dividing the profit for the period attributable to the owners of the parent entity by the weighted average number of outstanding issued and fully paid shares during the period.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan tol

Pendapatan dari hasil pengoperasian jalan tol Kelompok Usaha diakui pada saat penjualan karcis tol. Pendapatan tol dari hasil kerjasama pengoperasian jalan tol dengan investor dengan kuasa penyelenggaraan diakui pada saat penjualan karcis tol setelah dikurangi bagian investor tersebut. Pembayaran kepada investor tanpa kuasa penyelenggaraan dicatat sebagai angsuran liabilitas kerjasama operasi. Selisih antara jumlah pembayaran ini dengan angsuran liabilitas kerjasama operasi dicatat sebagai beban atau penghasilan kerjasama operasi. Imbalan kas yang diterima sehubungan dengan pengalihan hak atas pendapatan tol masa datang dicatat sebagai pendapatan tangguhan dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu pengalihan hak atas pendapatan tol tersebut.

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa iklan, lahan dan tempat peristirahatan serta pendapatan jasa pengoperasian diakui sebagai pendapatan sesuai masa sewa. Sewa diterima dimuka disajikan sebagai "Pendapatan diterima dimuka".

Pendapatan penjualan properti

JMP (entitas anak) mengakui pendapatan dari penjualan real estat dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) sesuai dengan PSAK 44, "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat". Berdasarkan standar ini, pendapatan dari penjualan real estat diakui dengan metode akrual penuh (*accrual method*) bila seluruh syarat berikut telah terpenuhi:

- (i) Pendapatan dari penjualan bangunan rumah, ruko dan bangunan sejenis lainnya beserta kavling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi:
 1. Proses penjualan telah selesai;
 2. Harga jual akan tertagih, jumlah pembayaran oleh pembeli telah memadai, yaitu setidaknya telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Revenue and expense recognition

Toll revenues

The Group's revenues from toll road operations are recognized upon the sale of toll tickets. Revenue from profit sharing arrangement between the Group and investor with operating rights are recognized when toll tickets are sold, net of investor's share. Payments to investors without operating rights are recorded as a mandatory installment under joint operation. The excess of total payments over mandatory installment under joint operation is recorded as joint operation expense or revenue. Cash consideration received in connection with the transfer of the rights on future toll revenue are recorded as deferred revenue and are recognized as revenue over the term of transfer of the rights on future toll revenues.

Rental income

Revenues from advertisement, space and rest area rental and income from toll road operating service are recognized as income over the lease term. Rent revenue received in advance are presented as "Unearned revenue".

Revenue from sale of property

JMP (a subsidiary) recognizes revenues from real estate sales using the full accrual method in accordance with PSAK 44, "Accounting for Real Estate Development Activities". Based on the standard, the revenue from real estate sales is recognized using the full accrual method if all of the following conditions are met:

- (i) Revenues from sales of houses, shop houses, and other similar property and related land are recognized under the full accrual method if all of the following conditions are met:
 1. A sale is consummated;
 2. The selling price is collectible, the amount paid by a buyer is sufficient, i.e., it has reached at least 20% of the agreed selling price, and the amount is not refundable by the buyer;

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan penjualan properti (lanjutan)

- (i) Pendapatan dari penjualan bangunan rumah, ruko dan bangunan sejenis lainnya beserta kavling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi: (lanjutan)
3. Tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi dimasa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan
 4. Penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.
- (ii) Pendapatan dari penjualan kavling tanah tanpa bangunan yang tidak memerlukan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:
1. Total pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan total tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli.
 2. Harga jual akan tertagih.
 3. Tagihan penjual tidak bersifat subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli di masa yang akan datang.
 4. Proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk menyelesaikan kavling tanah yang dijual, seperti liabilitas untuk memantapkan kavling tanah atau liabilitas untuk membangun Fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau yang menjadi liabilitas penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Hanya kavling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kavling tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**q. Revenue and expense recognition
(continued)**

Revenue from sale of property (continued)

- (i) Revenues from sales of houses, shop houses, and other similar property and related land are recognized under the full accrual method if all of the following conditions are met: (continued)
3. The seller's receivable is not subject to future subordination against other loans which will be obtained by the buyer; and
 4. The seller has transferred to the buyer the usual risks and rewards of ownership in a transaction that is in substance a sale and does not have a substantial continuing involvement with the property.
- (ii) Revenues from sales of lots that do not require the seller to construct building are recognized under the full accrual method if all of the following conditions are met:
1. Total payments by the buyer are at least 20% of the agreed selling price and the amount is not refundable.
 2. The selling price is collectible.
 3. The receivable is not subordinated to other loans in the future.
 4. The land development process is complete so that the seller has no further obligations related to the lots sold, such as obligation to construct amenities or obligation to build other facilities applicable to the lots sold as provided in the agreement between the seller and the buyer or regulated by law.
 5. Only the lots are sold, without any requirement of the seller's involvement in the construction of building on the lots.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan penjualan properti (lanjutan)

(iii) Pendapatan penjualan unit bangunan kondominium, apartemen, perkantoran, pusat belanja dan bangunan sejenis lainnya, serta unit dalam kepemilikan secara *time-sharing*, diakui dengan metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*) apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:

1. Proses konstruksi telah melampaui tahap awal, yaitu fondasi bangunan telah selesai dan semua persyaratan untuk memulai pembangunan telah terpenuhi
2. Jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli dan
3. Jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan andal.

Pendapatan penjualan unit bangunan kondominium, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dan bangunan sejenis lainnya, serta unit dalam kepemilikan secara *time-sharing* yang telah selesai proses pembangunannya diakui dengan metode akrual penuh.

Jika terdapat salah satu kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pembayaran uang yang diterima dari pembeli harus diakui sebagai uang muka yang diterima sampai seluruh kriteria tersebut terpenuhi.

Pendapatan sewa

Uang sewa ruko diterima dimuka dicatat sebagai "Pendapatan diterima dimuka". Pendapatan ditangguhkan tersebut diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu sewa. Uang jaminan yang diterima dari pelanggan disajikan sebagai bagian dari "Uang jaminan penyewa".

Pendapatan bunga diakui dengan mempertimbangkan hasil efektif aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**q. Revenue and expense recognition
(continued)**

Revenue from sale of property (continued)

(iii) The revenues from sale of condominiums, apartments, office buildings, shopping centers and other buildings of similar type and time-sharing ownership units are recognized using the percentage of completion method if all of the following criteria are satisfied:

1. The construction process already commenced, that is, the building foundation has been completed and all of the requirements to commence construction have been fulfilled
2. Total payments by the buyer have reached 20% of the agreed sale price and that amount is not refundable and
3. The amount of revenue and the cost of the property can be reliably estimated.

The revenue from the sale of condominiums, apartments, office building, shopping centers, and other buildings of similar type and time-sharing ownership units, the constructions of which have been completed, shall be recognized using the full accrual method.

If any of the above conditions is not met, the payments received from the buyer are recorded as advances received until all of the criteria are met.

Rental revenue

Rental payments received in advance from tenants of shop houses are recorded as "Unearned revenues". Such unearned income is recognized as income over the terms of the lease contracts. Deposits received from customers are presented as part of "Tenants' deposits".

Interest income is recognized as the interest accrues, taking into account the effective yield on the asset.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan konstruksi dan beban konstruksi

Kelompok Usaha mengakui aset tak berwujud untuk jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus. Beban konstruksi diakui sejak kegiatan konstruksi dimulai sampai dengan proses pembangunan aset selesai dan siap untuk digunakan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

Beban pokok penjualan tanah

Beban pokok penjualan tanah ditentukan berdasarkan nilai perolehan tanah ditambah pengeluaran-pengeluaran lain untuk pengembangan tanah. Beban pokok penjualan rumah tinggal meliputi seluruh beban pembangunan untuk menyelesaikan pekerjaan.

r. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**q. Revenue and expense recognition
(continued)**

**Construction revenue and construction
cost**

The Group recognizes intangible assets for construction services and increased capacity in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public usage of the service. In the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction by using cost-plus contract basis. Construction cost are recognized during construction stage up to construction activity was finished and asset ready to use.

Expenses

Expenses are recognized when they are incurred.

Cost of land sold

Cost of land sold is determined based on acquisition cost of the land plus other estimated expenditures for its improvement and development. The cost of residential house sold is determined based on actual cost incurred to complete the work.

**r. Foreign currency transactions and
balances**

Transactions involving foreign currencies are translated to rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

At consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction day of the period, as published by Bank Indonesia. The resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**r. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
(lanjutan)**

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
1 Dolar Amerika Serikat	13.548	13.436	1 United States Dollar

Transaksi dalam mata uang asing tidak signifikan.

s. Segmen Operasi

Segmen adalah komponen dari Kelompok Usaha yang dapat dibedakan yang terlibat dalam penyediaan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen yang dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

t. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dimana ada kemungkinan besar bahwa untuk penyelesaian kewajiban tersebut diperlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik saat ini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**r. Foreign currency transactions and
balances (continued)**

The exchange rates used are as follows:

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
1 Dolar Amerika Serikat	13.548	13.436	1 United States Dollar

Transactions in foreign currencies are insignificant.

s. Operating segment

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported is the measure reported to the chief operating decision-maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intragroup balances and intra-group transactions are eliminated.

t. Provisions

A provision is recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

All provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligations, the provisions are reversed.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

u. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan laporan keuangan konsolidasian. Namun, ketidakpastian atas asumsi dan estimasi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha, manajemen telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

• Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 55 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan pada Catatan 2o.

• Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure to the consolidated financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require a material adjustment to the carrying amounts of the assets or liabilities in future periods.

a. Judgments

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, apart from those including estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

• Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2o.

• Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

· Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

BPJT memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Kelompok Usaha termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol (Catatan 2j). Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT tanpa biaya, dalam keadaan beroperasi dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol.

Kelompok Usaha berpendapat bahwa PPJT memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun/periode berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Kelompok Usaha mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp26.170.528.996 dan Rp7.829.055.294.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima dan menambahkan margin, berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu, pada saat penentuan tarif awal jalan tol sebelum jalan tol dioperasikan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

a. Judgments (continued)

· Service concession arrangement
(continued)

The BPJT granted the Group the rights, obligations and privileges including the authority to finance, design, construct, operate and maintain the toll roads (Note 2j). Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the toll roads to the BPJT without cost, fully operational and in good working condition, including any and all existing land, works, toll road facilities and equipment found therein directly related to, and in connection with, the operation of the toll road facilities.

The Group has made judgment that the PPJT qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year/period in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the year ended December 31, 2017 and 2016, the Group recognized construction revenue amounting to Rp26,170,528,996 and Rp7,829,055,294, respectively.

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received and will add the margin, based on management estimation calculated in certain model, in determining the initial toll road tariff before the toll road is operated.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

- Pengakuan pendapatan penjualan properti

Ketika kontrak untuk penjualan properti atas penyelesaian konstruksi dinilai berdasarkan kontrak konstruksi, pendapatan diakui dengan metode persentase penyelesaian, sesuai dengan tahapan konstruksi (Catatan 2q). Persentase penyelesaian dibuat berdasarkan tahapan penyelesaian proyek atau kontrak, ditentukan berdasarkan pembagian biaya-biaya kontrak yang dikeluarkan sampai dengan saat ini terhadap estimasi biaya proyek atau kontrak.
- Pengklasifikasian properti

Kelompok Usaha menentukan apakah sebuah properti yang diperoleh diklasifikasikan sebagai properti investasi atau persediaan properti:

 - Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan (terutama kantor dan properti ritel) yang tidak bertujuan untuk digunakan oleh atau dalam kegiatan operasi Kelompok Usaha, tidak juga untuk dijual dalam kegiatan bisnis, tetapi digunakan untuk memperoleh pendapatan sewa dan peningkatan nilai.
 - Persediaan properti terdiri dari properti yang bertujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis. Secara khusus, berkaitan dengan properti hunian yang dikembangkan oleh Kelompok Usaha dan digunakan untuk dijual sebelum atau pada saat penyelesaian konstruksi.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan dalam paragraf berikut. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Judgments (continued)

- Revenue recognition of sale of a property

When a contract for the sale of a property upon completion of construction is concluded to be a construction contract, revenue is recognized using the percentage of completion method as construction progresses (Note 2q). The percentage of completion is made by reference to the stage of completion of the project or contract, determined based on the proportion of the contract costs incurred to date to the total estimated costs of the project or contract.
- Classification of property

The Group determines whether an acquired property is classified as investment property or property inventory:

 - Investment property consists of land and buildings (principally offices and retail property) which are not occupied substantially for use by, or in the operations of the Group, nor for sale in the ordinary course of business, but are held primarily to earn rental income and capital appreciation.
 - Property inventory consists of property that is held for sale in the ordinary course of business. In particular, it pertains to the residential property that the Group develops and intends to sell on or before the completion of construction.

b. Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed in the following paragraphs. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes will be reflected in the assumptions when they occur.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

• Instrumen keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Kelompok Usaha.

• Penyusutan aset tetap dan properti investasi

Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi antara 3 sampai dengan 30 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11 dan 12.

• Amortisasi hak perusahaan jalan tol

Kelompok Usaha melakukan amortisasi hak perusahaan jalan tol - jalan dan jembatan selama masa konsesi dengan menggunakan metode "Pola konsumsi jalan tol yang diakibatkan oleh lalu lintas" selama masa konsesi.

Nilai tercatat neto atas hak perusahaan jalan tol Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp55.957.697.162 dan Rp34.703.311.350.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

• Financial instruments

The Group recorded certain assets and financial liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidence, the amount of change in value reasonably may be different when the Group uses different valuation methodologies. Changes in fair value of financial assets and liabilities can indirectly affect profit or loss of the Group.

• Depreciation of fixed assets and investment properties

The costs of fixed assets and investment properties are depreciated using the straight-line method over their estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets and investment properties to be between 3 and 30 years. This is the range of common life expectancies applied in the industry in which the Group conducts its business. Changes in the level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and residual values of assets and, therefore, future depreciation charges may be revised. Further details are disclosed in Notes 11 and 12.

• Amortization of toll road concession right

The Group decided to amortize toll road concession rights - road and bridge using the "Pola konsumsi jalan tol yang diakibatkan oleh lalu lintas" method over the concession period.

The net carrying value of toll road concession rights of the Group as of December 31, 2017 and December 31, 2016 amounted to Rp55,957,697,162 and Rp34,703,311,350, respectively.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

· Estimasi volume lalu lintas

Dalam menentukan amortisasi hak perusahaan jalan tol, manajemen memproyeksikan volume lalu lintas setelah tahun berjalan selama sisa periode perjanjian konsesi. Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan jumlah kendaraan dan disesuaikan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut, bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tarif tol dan volume lalu lintas.

Manajemen melakukan penilaian secara periodik terhadap total proyeksi volume lalu lintas. Kelompok Usaha akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

· Pengendalian atas entitas anak

Direksi Perusahaan menilai apakah Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas Entitas Anak berdasarkan kemampuan Kelompok Usaha untuk mengarahkan kegiatan yang relevan dari Entitas Anak secara sepihak. Dalam membuat pertimbangannya, direksi mempertimbangkan ukuran absolut kepemilikan Kelompok Usaha pada Entitas Anak dan ukuran relatif dan penyebaran kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya. Setelah penilaian, direksi menyimpulkan bahwa Kelompok Usaha memiliki hak suara yang cukup dominan untuk mengarahkan kegiatan yang relevan dari Entitas Anak dan karenanya Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas Entitas Anak.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

· Estimation of traffic volume

In determining amortisation of toll road concession rights, the management has to project traffic volume after current year for the remaining years of the concession agreement. Traffic volume is projected based on the number of vehicles and adjusted by comparison to actual vehicle volume. However, the actual vehicle volume in the future could differ from the estimate, depending upon changes in external factors that may affect toll rates and vehicle volume.

The Management perform periodic assessment on the total projected traffic volume. The Group will appoint an independent professional traffic consultant to perform independent professional traffic studies and make an appropriate adjustment if there is a material difference between projected and actual traffic volume.

· Control over subsidiary

The directors of the Company's management assessed whether or not the Group has control over a subsidiary based on whether the Group has the practical ability to direct the relevant activities of the subsidiary unilaterally. In making their judgment, the directors considered the Group's absolute size of holding in the subsidiary and the relative size of and dispersion of the shareholdings owned by the other shareholders. After assessment, the directors concluded that the Group has a sufficiently dominant voting interest to direct the relevant activities of the subsidiary and therefore the Group has control over the subsidiary.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

• Provisi pelapisan jalan tol

Provisi pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas ini pada tanggal pelaporan.

• Aset konsesi dalam pengerjaan

Umur konsesi atas hak konsesi jalan tol mulai berlaku efektif sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh BPJT, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum kegiatan konstruksi dimulai atau biaya pra konstruksi jalan tol, termasuk biaya pembebasan lahan atau tanah ditangguhkan sehingga belum dihitung margin konstruksinya.

• Imbalan kerja

Penentuan kewajiban Kelompok Usaha untuk menyediakan imbalan kerja bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung nilai-nilai tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Kelompok Usaha langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.005.738.321 dan Rp760.351.651.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

• Provision for overlay

Provision for overlay will be recorded periodically based on the estimated utilization of toll road by customers. This provision is measured using the present value of management's estimate of the expenditures required to settle present obligation at the reporting date.

• Concession asset in progress

The concession period of toll road concession rights effective from Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) published by BPJT, so that the costs incurred before the construction activities started or pre-construction costs of toll roads, including the cost of land or soil acquisition were suspended and therefore, the construction margin has not been determined.

• Employee benefits

The determination of the Group's obligations for cost of providing employee benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rate, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the assumptions set forth by the Group are recognized immediately in profit or loss as incurred. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions used can materially affect the estimated liability for employee benefits and employee benefits expense. The amount of the estimated long term employee benefits liability as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp1,005,738,321 and Rp760,351,651, respectively.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

· Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Rincian atas sifat dan nilai tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 18.

· Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga semua bagian dari aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak masa yang akan datang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

· Income tax

Significant considerations are made in determining corporate income tax liability. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the normal course of business. The Group recognizes the income tax liability based on estimates of whether there will be an additional income tax. Details of the nature and amount of recorded income tax are disclosed in Note 18.

· Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that taxable income will be available so that all of part of the deferred tax assets can be utilized. Significant estimates by management are required in determining the total deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable income together with future tax planning strategies.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Kas			Cash on Hand
Kas	40.527.052	70.101.905	Cash
Kas Proyek	<u>295.446</u>	<u>1.955.482</u>	Cash for Project
Total Kas	<u>40.822.497</u>	<u>72.057.387</u>	Cash on Hand
Bank			Cash in Banks
Rupiah			Rupiah
Pihak Berelasi (Catatan 44)	1.665.006.811	2.524.684.776	Related Party (Note 44)
Pihak Ketiga			Third Party:
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	100.298.079	84.988	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	75.905.787	53.592.133	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	51.187.939	7.431.257	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	23.746.474	1.456.419	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	4.108.312	4.969.329	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank ICBC Indonesia	3.437.081	162.437	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	2.515.430	4.998.947	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	946.428	1.981	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	742.793	1.920.225	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	337.921	376.406	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank Danamon	239.480	-	PT Bank Danamon
PT Bank Artha Graha	197.418	-	PT Bank Artha Graha
PT Bank DKI	148.241	148.003	PT Bank DKI
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	49.969	28.338	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Jabar Banten Syariah	28.999	28.744	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank DBS Indonesia	3.835	3.062.380	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Jasa Jakarta	1.772	1.877	PT Bank Jasa Jakarta
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	605	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	313.494	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
	<u>1.928.902.767</u>	<u>2.603.262.339</u>	
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak Berelasi (Catatan 44)	<u>30.497</u>	-	Related Party (Note 44)
	<u>30.497</u>	-	
Total Bank	<u>1.928.933.264</u>	<u>2.603.262.339</u>	Cash in Banks
Total Kas dan Bank	<u>1.969.755.761</u>	<u>2.675.319.726</u>	Total Cash on Hand and in Banks

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (lanjutan)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Deposito Berjangka			Time Deposits
Rupiah			Rupiah
Pihak Berelasi (Catatan 44)	4.030.622.332	1.086.546.744	Related Party (Note 44)
Pihak Ketiga:			Third Party:
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	280.000.000	20.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	275.840.000	33.840.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	159.900.000	202.300.000	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.	68.000.000	-	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
PT Bank Jabar Banten Syariah	12.000.000	2.000.000	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Riau Kepri	12.000.000	-	PT Bank Riau Kepri
PT Bank Bukopin Syariah	12.000.000	-	PT Bank Bukopin Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	10.000.000	5.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	10.000.000	-	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
PT Bank Victoria Syariah	8.000.000	-	PT Bank Victoria Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	5.000.000	23.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Panin Tbk	3.000.000	-	PT Bank Panin Tbk
PT Bank Riau Kepri (Syariah)	2.000.000	-	PT Bank Riau Kepri (Syariah)
PT Bank Mega Tbk.	35	-	PT Bank Mega Tbk.
PT Bank Sinar Harapan Bali	-	42.000.000	PT Bank Sinar Harapan Bali
PT Bank Panin Syariah	-	15.000.000	PT Bank Panin Syariah
PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	-	5.100.000	PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
	<u>4.888.362.367</u>	<u>1.434.786.744</u>	
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak Berelasi (Catatan 44)	14.902.800	14.779.600	Related Party (Note 44)
Total Deposito Berjangka	4.903.265.167	1.449.566.344	Total Time Deposits
Total Kas dan Setara Kas	6.873.020.928	4.124.886.070	Total Cash and Cash Equivalents

Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Ranges of annual interest rates on time deposits are as follows;

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Rupiah	5,93% - 7,43%	5,91% - 7,95%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,75%	0,75%	United States dollar

Kas proyek merupakan uang tunai dan rekening giro yang tersedia untuk membiayai pemeliharaan dan pembangunan jalan tol.

Cash for project represent cash on hand and in banks to finance expenditures related to construction maintenance and toll roads.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Efek Tersedia untuk Dijual			<i>Sale</i>
Reksadana Mandiri Investasi			<i>Mutual Fund Mandiri</i>
Dana Obligasi Seri II	4.529.650	4.529.650	<i>Investment - Bond II Series</i>
KIK EBA Mandiri JSMR01	142.000.000	-	<i>KIK EBA Mandiri JSMR01</i>
Kenaikan Nilai Aset Neto	10.824.595	3.185.031	<i>Increase in Net Assets Value</i>
Total	157.354.245	7.714.681	Total

Mutasi nilai aset neto adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Saldo Awal	3.185.031	2.425.483	<i>Beginning Balance</i>
Laba Belum Direalisasi	7.639.564	759.548	<i>Unrealized Profit</i>
Saldo Akhir	10.824.595	3.185.031	Ending Balance

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari pendapatan yang akan diterima dari sewa lahan, sewa tempat istirahat, sewa ruang iklan, dana talangan tanah dan bunga deposito berjangka yang akan diterima.

6. OTHER RECEIVABLES

This account consists of revenues received from rent of land, rest areas, advertisement spaces, bridging fund for land and interest on time deposits.

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Piutang Lain-lain - Lancar			<i>Other Receivables - Current</i>
Pihak Berelasi (Catatan 44)	11.413.236.763	8.172.964.663	<i>Related Party (Note 44)</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Party</i>
Tenant TIP	33.468.239	18.250.069	<i>Rest Area Tenant</i>
PT Maligi Permata Industrial Estate	23.217.607	23.217.607	<i>PT Maligi Permata Industrial Estate</i>
Proyek Sidoarjo	11.093.710	-	<i>Sidoarjo Project</i>
Pegawai	18.982.397	18.218.052	<i>Employees</i>
PT Bank Central Asia Tbk	12.194.643	-	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Solitronindo Tol Semesta	7.905.861	6.118.201	<i>PT Solitronindo Tol Semesta</i>
PT Patria Putra	3.542.172	1.096.392	<i>PT Patria Putra</i>
PT Bintaro Serpong Damai	3.012.612	1.993.299	<i>PT Bintaro Serpong Damai</i>
Tenant Graha Simatupang	1.378.815	866.777	<i>Graha Simatupang Tenant</i>
PT Sarana Abadi Jaya Raya	1.235.690	-	<i>PT Sarana Abadi Jaya Raya</i>
KSO Edgenta Propel - NRC	912.803	676.256	<i>Edgenta Propel - Nusa Raya Cipta Joint Operation</i>
Proyek Cilangkap	605.000	1.705.000	<i>Cilangkap Project</i>
PT Kelola Jasa Artha	-	601.167	<i>PT Kelola Jasa Artha</i>
Lain-lain (Masing-masing dibawah Rp 1 Miliar)	30.071.224	32.186.098	<i>Others (Each below Rp 1 Million)</i>
Sub Total	11.560.857.536	8.277.893.580	Sub Total
<i>Dikurangi:</i>			<i>Less:</i>
Cadangan Kerugian Penurunan Piutang			<i>Allowance for Impairment Losses</i>
Pihak Berelasi	(469.000)	-	<i>Related Party</i>
Pihak Ketiga	(13.024.372)	(254.484)	<i>Third Party</i>
Sub Total	(13.493.372)	(254.484)	Sub Total
Neto	11.547.364.164	8.277.639.096	Net

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

6. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>
Piutang Lain-lain - Tidak Lancar		
Pihak Berelasi (Catatan 44)	263.341.068	165.469.198
Pihak Ketiga		
PT Bosowa Marga Nusantara	900.000	900.000
Sub Total	<u>264.241.068</u>	<u>166.369.198</u>
<i>Dikurangi:</i>		
Cadangan Kerugian Penurunan Pihak Ketiga	-	(55.156.399)
Sub Total	<u>-</u>	<u>(55.156.399)</u>
Neto	<u>264.241.068</u>	<u>111.212.799</u>

6. OTHER RECEIVABLES (continued)

<i>Other Receivables - Non Current Related Party (Note 44)</i>
<i>Third Party</i>
<i>PT Bosowa Marga Nusantara</i>
<i>Sub Total</i>
<i>Less:</i>
<i>Allowance for Impairment Losses Third Party</i>
<i>Sub Total</i>
Net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses account are as follows:

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Saldo awal tahun	55.410.882	-	<i>Beginning balance</i>
Cadangan (pemulihan) selama tahun berjalan	(41.917.511)	55.410.882	<i>Provision (recovery) during the year</i>
Saldo akhir tahun	<u>13.493.371</u>	<u>55.410.882</u>	<i>Balance at end of year</i>

Penyisihan kerugian penurunan nilai merupakan penurunan nilai secara individual. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi atas ketidaktagihan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017.

Allowance for impairment losses represents individual impairment. Based on a review of the status of other receivables at the end of the period, management believes that the above allowance for impairment losses on other receivables is sufficient to cover possible losses that may arise from uncollected of other receivables as of December 31, 2017.

7. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan persediaan yang dimiliki oleh JMP dan JLP, entitas anak, masing-masing sebesar Rp134.244.636 dan Rp86.975.202 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

7. INVENTORIES

This account represents inventories owned by JMP and JLP, subsidiaries, which consist of property amounted to Rp134,244,636 and Rp86,975,202 as of December 31, 2017 and 2016.

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

8. PREPAID EXPENSES

This account consists of:

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Biaya dibayar di muka	172.430.724	261.865.256	<i>Prepaid expenses</i>
Uang muka internal	44.123.638	6.849.500	<i>Internal advances</i>
Uang muka pekerjaan	10.807.162	45.020.719	<i>Work advances</i>
Total	<u>227.361.524</u>	<u>313.735.475</u>	<i>Total</i>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

9. DANA DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Jaminan Sindikasi Bank		
Pihak Berelasi (Catatan 44)	154.046.573	334.884.162
Pihak Ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	4.801.449	4.725.487
PT Bank Sumut	1.333.240	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	976.883
Sub Total	<u>160.181.262</u>	<u>340.586.532</u>
Jaminan Pelaksanaan		
Pihak Berelasi (Catatan 44)	59.907.335	366.908.038
Pihak Ketiga		
PT Bank Bukopin Tbk.	11.045.548	-
PT Bank Central Asia	5.123.287	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	22.872.460
Sub Total	<u>76.076.170</u>	<u>389.780.498</u>
Jaminan Pembebasan Tanah		
Pihak Berelasi (Catatan 44)	9.997.478	87.312.495
Pihak Ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	35.590.204	32.000.131
PT Bank Bukopin Tbk	17.900.000	80.660.000
Sub Total	<u>63.487.682</u>	<u>199.972.626</u>
Rekening Lainnya	480.340.043	81.423.523
Total	<u>780.085.156</u>	<u>1.011.763.179</u>

9. RESTRICTED FUNDS

This account consists of:

Syndicated Bank Guarantee
Related Party (Note 44)
Third Party
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Sumut
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Sub Total
Performance Bond
Related Party (Note 44)
Third Party
PT Bank Bukopin Tbk.
PT Bank Central Asia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Sub Total
Land Acquisition Guarantees
Related Party (Note 44)
Third Party
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Bukopin Tbk
Sub Total
Other Account
Total

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA - NETO**

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE - NET**

The details of the investments in associates and joint venture are as follows:

Perusahaan Asosiasi/ Associated Company	Status	Persentase Kepemilikan/ Ownership	Nilai Tercatat Penyertaan Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of Year	Perubahan Selama Tahun Berjalan/ Changes in Current Year				Nilai Tercatat Penyertaan Akhir Tahun/ Carrying Value at End of Year
				Penambahan (Pengurangan) Penyertaan/ Additions/ (Deduction) of Investment	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ Portion in Net Profit (Loss)	Penerimaan Dividen/ Dividend Received	Bagian Penghasilan Komprensensif Lain Portion in Net Other Comprehensive Income	
PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	34,83	56.787.000	-	-	-	-	56.787.000
PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	30	16.914.266	-	-	-	-	16.914.266
PT Ismawa Trimitra (IT)	Operasi/ Operate	25	9.831.883	29.007	2.081.483	(1.516.563)	(15.319)	10.410.491
PT Bukaka Marga Utama (BMU)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	20	9.436.000	-	-	-	-	9.436.000
PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)	Operasi/ Operate	21,24	148.449.477	225.398	(3.020.336)	-	-	145.654.539
PT Utama Marga Waskita (PT HAMA WAS)	Tahap Pengembangan/ Under Development	30	-	-	-	-	-	-
PT Trans Marga Jateng (PT TMJ)	Operasi/ Operate	59	-	4.500.000	(451.627)	-	-	4.048.373
			-	854.157.474	(127.621.312)	-	(31.622)	726.504.540
			<u>241.418.626</u>	<u>858.911.879</u>	<u>(129.011.793)</u>	<u>(1.516.563)</u>	<u>(46.941)</u>	<u>969.755.208</u>
Dikurangi/ Deducted								
Penurunan Nilai Penyertaan pada CBMP/ Impairment of Investment in CBMP			(56.786.999)					(56.786.999)
Penurunan Nilai Penyertaan pada CGMN/ Impairment of Investment in CGMN			(16.914.265)					(16.914.265)
Penurunan Nilai Penyertaan pada BMU/ Impairment of Investment in BMU			(9.435.999)					(9.435.000)
			<u>(83.137.263)</u>					<u>(83.137.264)</u>
Total			<u>158.281.362</u>					<u>886.617.944</u>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA- NETO (lanjutan)**

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE – NET (continued)**

		31 Desember 2016/ December 31, 2016						
		Perubahan Selama Tahun Berjalan/ Changes in Current Year						
Perusahaan Asosiasi/ Associated Company	Status/ Status	Persentase Kepemilikan/ Percentage Ownership	Nilai Tercatat Penyertaan Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of Year	Penambahan (Pengurangan) Penyertaan/ Additions (Deduction) of Investment	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ Portion in Net Profit (Loss)	Penerimaan Dividen/ Dividend Received	Bagian Penghasilan Komprehensif Lain Portion in Net Other Comprehensive Income	Nilai Tercatat Penyertaan Akhir Tahun/ Carrying Value at End of Year
PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	34,83	56.787.000	-	-	-	-	56.787.000
PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	30	16.914.266	-	-	-	-	16.914.266
PT Ismawa Trimitra (IT)	Operasi/ Operate	25	8.802.150	50.629	1.874.689	(906.662)	11.077	9.831.883
PT Bukaka Marga Utama (BMU)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	20	9.436.000	-	-	-	-	9.436.000
PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)	Operasi/ Operate	21,24	157.199.154	(2.205.822)	(6.543.855)	-	-	148.449.477
			249.138.570	(2.155.193)	(4.669.166)	(906.662)	11.077	241.418.626
Dikurangi/ Deducted								
Penurunan Nilai Penyertaan pada CBMP/ Impairment of Investment in CBMP			(56.786.999)					(56.786.999)
Penurunan Nilai Penyertaan pada CGMN/ Impairment of Investment in CGMN			(16.914.265)					(16.914.265)
Penurunan Nilai Penyertaan pada BMU/ Impairment of Investment in BMU			(9.435.999)					(9.435.999)
			(83.137.263)					(83.137.263)
Total			166.001.307					158.281.362

Informasi tambahan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Additional information as of December 31, 2017 and 2016 related investment in associates and joint venture are as follows:

Perusahaan Asosiasi/ Associated Company	Total Aset/ Total Asset	Total Liabilitas/ Total liabilities	Total Pendapatan/ Total revenues	Labanya (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)
2017				
PT Hutama Marga Waskita (HAMAWAS)	14.058.239	563.664	-	(1.505.425)
PT Ismawa Trimitra (IT)	58.706.374	17.168.049	23.436.127	8.572.124
PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)	1.860.753.043	1.642.118.064	293.499.377	(14.220.038)
PT Trans Marga Jateng (TMJ)	6.237.975.620	4.988.726.348	852.700.555	(262.204.362)
2016				
PT Ismawa Trimitra (IT)	51.410.044	2.652.580	22.079.438	7.498.756
PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)	2.567.235.379	1.957.280.876	223.134.050	(30.809.110)

PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP)

CBMP didirikan berdasarkan Akta No. 50, tanggal 11 Desember 1995 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Penyertaan pada CBMP dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol JORR Seksi E2-E3-N (Cikunir-Cakung-Cilincing-Tanjung Priok) untuk jangka waktu 33 tahun yang berakhir pada tahun 2028, Perusahaan memiliki 56.787.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp56.787.000 yang merupakan 34,83% kepemilikan.

PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP)

CBMP was established based on the Deed No.50, dated December 11, 1995, of Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The investment in CBMP was made in relation to the construction and operation of JORR toll road Section E2-E3-N (Cikunir-Cakung-Cilincing-Tanjung Priok) for a period of 33 years ending in 2028. The Company owns 56,787,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp56,787,000, representing 34.83% ownership.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA- NETO (lanjutan)

PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP) (lanjutan)

Pembangunan jalan tol oleh CBMP dibiayai dari fasilitas pinjaman sindikasi bank. Krisis ekonomi telah menyebabkan ketidakpastian terhadap kemampuan CBMP dalam menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo dan dalam merealisasikan fasilitas pinjaman untuk pembiayaan jalan tol tahap konstruksi. Restrukturisasi yang dilakukan terhadap sebagian dari kreditur CBMP telah mengakibatkan penghentian pelaksanaan pembangunan jalan tol. Adanya surat Perusahaan kepada CBMP No. AA.02.1009 tanggal 25 Juli 2000 mengenai pengakhiran PKP No. 96 tanggal 16 Desember 1995 mengakibatkan penyertaan Perusahaan pada entitas asosiasi ini tidak memiliki nilai ekonomis. Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai penyertaan saham pada CBMP pada tahun 2000 sebesar Rp56.786.999.

PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)

CGMN didirikan berdasarkan Akta No. 300, tanggal 22 Desember 1993 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., juncto Akta No. 67 tanggal 7 Juli 1994 dari Notaris Sri Laksmi Damayanti, S.H. Penyertaan pada CGMN dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Cikampek-Padalarang. Perusahaan memiliki 5.310 saham dengan nilai nominal Rp1.841 per lembar saham atau setara dengan Rp9.775.710 yang merupakan 30% kepemilikan.

Berdasarkan surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. KU.201-Mn/68 tanggal 4 Maret 1996 dan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1562/A/52/0496 tanggal 18 April 1996, Perusahaan memperoleh pengalihan *Intellectual Property Rights* (IPR) dalam bentuk disain proyek jalan tol Cikampek - Padalarang sebesar UK Poundsterling 4.700.000 atau setara dengan Rp16.914.266 sebagai Tambahan Modal Disetor Pemerintah pada Perusahaan.

Selanjutnya, Perusahaan mengalihkan IPR tersebut kepada CGMN sebagai penyertaan saham Perusahaan di CGMN. Berdasarkan perjanjian usaha patungan antara Perusahaan dengan CGMN, IPR tersebut dinilai setara dengan US\$8.530.000. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CGMN tanggal 10 Juli 1998 mengenai Peningkatan Modal Disetor, kepemilikan saham pada CGMN sejumlah 8.530 lembar saham dengan nilai nominal US\$8.530.000 atau setara dengan Rp16.914.266.

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE – NET (continued)

PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) (continued)

Toll road construction by CBMP was financed by loan facilities from a bank syndicated loan. The economic crisis created an uncertainty about the ability of CBMP to settle its liabilities at the maturity date and in using its loan facilities to finance the toll road construction progress. A restructuring conducted by certain of CBMP's creditors resulted to the stoppage of toll road construction. The Company issued Letter No. AA.02.1009, dated July 25, 2000, to CBMP regarding the termination of the Concession Agreement No. 96, dated December 16, 1995. As a consequence of this termination, the Company's investment in the associate company has no economic value. The Company has recognized loss on impairment of the investment shares of CBMP in 2000 amounting to Rp56,786,999.

PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)

CGMN was established based on the Deed No. 300, dated December 22, 1993, of Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., in conjunction with the Deed No. 67 dated July 7, 1994 of Notary Sri Laksmi Damayanti, S.H. The investment in CGMN was made in relation to the construction and operation of the Cikampek - Padalarang toll road project. The Company owns 5,310 shares at par value of Rp1,841 per share or equivalent to Rp9,775,710 representing 30% ownership.

Based on the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. KU.201-Mn/68 dated March 4, 1996 and the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1562/A/52/0496 dated April 18, 1996, the Company obtained a transfer of "Intellectual Property Rights (IPR)" in the form of project design of Cikampek - Padalarang toll road amounting to Great Britain Poundsterling 4,700,000 or equivalent to Rp16,914,266 as additional paid-in capital from the Government to the Company.

The Company then transferred the IPR to CGMN as an investment by the Company to CGMN. Based on the joint venture agreement between the Company and CGMN, the IPR was valued at US\$8,530,000. According to the decision during the Extraordinary General Meeting of Shareholders held by CGMN on July 10, 1998 regarding the increase in paid up capital, the Company owns 8,530 shares at par value of US\$8,530,000 or equal to Rp16,914,266.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA- NETO (lanjutan)**

PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)

Berdasarkan surat Perusahaan kepada CGMN No. AA.HK01.1273 tanggal 25 Juli 2001 mengenai pengakhiran PKP No. 297 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia (Menkimpraswil) No. 417 tanggal 18 Juli 2001 mengenai pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 321/KPTS/1994, tanggal 24 Oktober 1994 mengenai Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan Jalan Tol Cikampek - Padalarang kepada Perusahaan dalam bentuk usaha patungan dengan CGMN mengakibatkan penyertaan Perusahaan pada entitas asosiasi ini tidak memiliki nilai ekonomis. Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai penyertaan saham pada CGMN sebagai beban tahun 2001 sebesar Rp16.914.266.

Ismawa Trimitra (IT)

IT didirikan berdasarkan akta notaris No. 69 tanggal 14 Juni 1995 dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., dalam rangka pengusahaan jasa sewa ruang perkantoran. Anggaran dasar IT telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris No. 3 tanggal 16 Oktober 2015 dari Vidhya Shah, S.H. Akta perubahan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0977531 tanggal 4 November 2015.

Perusahaan memiliki 6.250.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp6.250.000, yang merupakan 25% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2017.

PT Bukaka Marga Utama (BMU)

BMU didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 17 Februari 1997 dari Notaris Sri Rahayu Sedyono, S.H. Penyertaan pada BMU dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Ciawi-Sukabumi. Perusahaan memiliki 4.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp2.359 per lembar saham atau setara dengan Rp9.436.000 yang merupakan 20% kepemilikan. Pemegang saham mayoritas BMU tidak dapat memberi kepastian atas pembangunan ruas jalan tol yang telah disetujui sesuai dengan PKP.

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE – NET (continued)**

PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)

Based on the Company's Letter No. AA.HK01.1273 to CGMN regarding termination of the Concession Agreement No. 297 dated July 25, 2001, in order to implement the Decree of the Minister of Settlement and Regional Infrastructure of the Republic of Indonesia No. 417 dated July 18, 2001 regarding cancellation of the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. 321/KPTS/1994 dated October 24, 1994 regarding the Granting of license to Concession Agreement to the Company to operate the Cikampek - Padalarang toll road in the form of a joint venture with CGMN. Due to such termination, the investment in CGMN has no economic value. The Company recognized loss on the impairment of this investment in shares of CGMN in 2001 amounting to Rp16,914,266.

Ismawa Trimitra (IT)

IT was established based on notarial deed No. 69 dated June 14, 1995 of Imas Fatimah, S.H., aimed to develop services in office spaces for rental. IT's articles of association had been amended several times, with the latest of which was based on notarial deed No. 3 dated October 16, 2015 of Vidhya Shah, S.H. The deed of amendment was approved by The Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0977531 dated November 4, 2015.

The Company owns 6,250,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp6,250,000, which represent 25% ownership as of December 31, 2017.

PT Bukaka Marga Utama (BMU)

BMU was established based on the Deed No. 5 dated February 17, 1997 of Notary Sri Rahayu Sedyono, S.H. The investment in BMU was made in relation to the construction and operation of the Ciawi-Sukabumi toll road project. The Company owns 4,000 shares at par value Rp2,359 per share or equivalent to Rp9,436,000, which represent 20% ownership. Since the majority shareholders of BMU could not give assurance regarding the toll road development as agreed under the Concession Agreement,

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA- NETO (lanjutan)**

PT Bukaka Marga Utama (BMU) (lanjutan)

Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham pada BMU sebagai beban tahun 2005 sebesar Rp9.435.999.

PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)

TLKJ didirikan berdasarkan akta notaris No. 18 tanggal 19 Januari 2006 dari Agus Madjid, S.H., dalam rangka pengusahaan ruas tol Cinere-Jagorawi. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-03269.HT.01.01 tanggal 7 Februari 2006.

Anggaran Dasar TLKJ telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris No. 76 tanggal 29 November 2012 dari Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Akta perubahan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-42622 tanggal 30 November 2012. TLKJ berdomisili di Jakarta.

Perusahaan memiliki 131.688 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp131.688.000, yang merupakan 21,24% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2017.

PT Hutama Marga Waskita (PT HAMAWAS)

PT HAMAWAS didirikan berdasarkan akta notaris No. 24 tanggal 20 Februari 2017 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dalam rangka pengusahaan ruas tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0008223.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 21 Februari 2017.

Perusahaan memiliki 4.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp4.500.000 yang merupakan 30% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2017.

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE – NET (continued)**

PT Bukaka Marga Utama (BMU) (continued)

The Company recognized loss on impairment related to this investment in 2005 amounting to Rp9,435,999.

PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)

TLKJ was established based on notarial deed No. 18 dated January 19, 2006 of Agus Madjid, S.H., aimed to develop Cinere-Jagorawi toll road. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-03269.HT.01.01 dated February 7, 2006.

TLKJ's Articles of Association had been amended several times, with the latest of which was based on notarial deed No. 76 dated November 29, 2012 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The deed of amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.10-42622 dated November 30, 2012. TLKJ is domiciled in Jakarta.

The Company owns 131,688 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp131,688,000, which represent 21.24% ownership interest as of December 31, 2017.

PT Hutama Marga Waskita (PT HAMAWAS)

PT HAMAWAS was established based on the deed No. 24 dated February 20, 2017 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., in the framework of exploiting the Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat toll road. The deed of establishment was adopted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0008223.AH.01.01.TAHUN 2017 dated February 21, 2017.

The Company owns 4,500 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share or equivalent to Rp4,500,000 which represent 30% ownership interest as of December 31, 2017.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP – NETO

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

11. FIXED ASSETS – NET

The details of fixed assets are as follows:

		31 Desember 2017/ December 31, 2017						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>			
						Acquisition Cost		
						<i>Direct Acquisition Assets</i>		
Aset Tetap Pemilikan Langsung						<i>Land Rights</i>		
Hak atas Tanah	10.347.752	35.747.663	4.364.423	-	41.730.992			
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	490.408.747	19.485.877	-	68.819.343	578.713.967	<i>Office and Other Buildings</i>		
Peralatan Operasi dan Kantor	1.073.270.829	62.594.725	4.253.239	153.308.058	1.284.920.372	<i>Operational and Office Equipment</i>		
Kendaraan Bermotor	59.881.998	7.121.139	2.423.854	1.529.883	66.109.166	<i>Vehicles</i>		
Sub Total	1.633.909.326	124.949.403	11.041.516	223.657.284	1.971.474.496	<i>Sub Total</i>		
Aset Sewa Pembiayaan	163.282.860	-	-	-	163.282.860	<i>Finance Lease Assets</i>		
Aset Tetap dalam Konstruksi	130.936.656	211.877.991	-	(223.657.284)	119.157.363	<i>Construction in Progress</i>		
Total Harga Perolehan	1.928.128.842	336.827.394	11.041.516	-	2.253.914.719	<i>Total Acquisition Cost</i>		
						Accumulated Depreciation		
						<i>Office and Other Buildings</i>		
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	109.843.590	24.855.408	-	-	134.698.998			
Peralatan Operasi dan Kantor	729.368.935	148.880.813	8.299.575	-	869.950.172	<i>Operational and Office Equipment</i>		
Kendaraan Bermotor	42.784.415	8.167.536	891.571	-	50.060.380	<i>Vehicles</i>		
Sub Total	881.996.940	181.903.757	9.191.146	-	1.054.709.550	<i>Sub Total</i>		
Aset Sewa Pembiayaan	161.466.381	1.816.480	-	-	163.282.861	<i>Finance Lease Assets</i>		
Total Akumulasi Penyusutan	1.043.463.321	183.720.236	9.191.146	-	1.217.992.411	<i>Total Accumulated Depreciations</i>		
Nilai Tercatat	884.665.521				1.035.922.308	Carrying Amount		

		31 Desember 2016/ December 31, 2016						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>			
						Acquisition Cost		
						<i>Direct Acquisition Assets</i>		
Aset Tetap Pemilikan Langsung						<i>Land Rights</i>		
Hak atas Tanah	7.694.209	2.653.543	-	-	10.347.752			
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	247.268.767	1.572.934	-	241.567.046	490.408.747	<i>Office and Other Buildings</i>		
Peralatan Operasi dan Kantor	924.098.213	98.365.789	5.383.796	56.190.623	1.073.270.829	<i>Operational and Office Equipment</i>		
Kendaraan Bermotor	58.583.664	2.563.330	2.262.696	997.700	59.881.998	<i>Vehicles</i>		
Sub Total	1.237.644.853	105.155.596	7.646.492	298.755.369	1.633.909.326	<i>Sub Total</i>		
Aset Sewa Pembiayaan	163.282.860	-	-	-	163.282.860	<i>Finance Lease Assets</i>		
Aset Tetap dalam Konstruksi	400.363.590	180.010.506	-	(449.437.440)	130.936.656	<i>Construction in Progress</i>		
Total Harga Perolehan	1.801.291.303	285.166.102	7.646.492	(150.682.071)	1.928.128.842	<i>Total Acquisition Cost</i>		
						Accumulated Depreciation		
						<i>Office and Other Buildings</i>		
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	94.170.826	15.546.091	-	126.673	109.843.590			
Peralatan Operasi dan Kantor	739.272.300	128.273.268	8.198	(138.168.435)	729.368.935	<i>Operational and Office Equipment</i>		
Kendaraan Bermotor	36.730.685	7.811.864	1.758.134	-	42.784.415	<i>Vehicles</i>		
Sub Total	870.173.811	151.631.223	1.766.332	(138.041.762)	881.996.940	<i>Sub Total</i>		
Aset Sewa Pembiayaan	17.274.699	6.149.920	-	138.041.762	161.466.381	<i>Finance Lease Assets</i>		
Total Akumulasi Penyusutan	887.448.510	157.781.143	1.766.332	-	1.043.463.321	<i>Total Accumulated Depreciations</i>		
Nilai Tercatat	913.842.793				884.665.521	Carrying Amount		

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2017	2016
Beban tol dan usaha lainnya (Catatan 38)	109.359.080	96.844.230
Beban umum dan administrasi (Catatan 39)	74.361.156	60.936.913
Total	183.720.236	157.781.143

Rincian tingkat penyelesaian atas penambahan aset tetap dalam konstruksi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	
	2017	2016
Gedung kantor	81%	89%
Sarana pelengkap	61%	75%

Kelompok Usaha telah mengasuransikan aset tetapnya terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Jasa Raharja Putra, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Bringin Sejahtera dan PT Bosowa Asuransi, dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp2.696.124.805 pada tanggal 31 Desember 2017. Manajemen Kelompok Usaha berpendapat bahwa nilai pertanggungannya cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

11. FIXED ASSETS - NET (continued)

Depreciation of fixed assets are allocated as follows:

Toll and other operating expenses (Note 38)
General and administrative expenses (Note 39)
Total

The details of fixed assets under construction in progress as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

Office buildings
Facility

The Group's fixed assets are insured against fire and other risks with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Jasa Raharja Putra, PT Asuransi Staco Mandiri, , PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Bringin Sejahtera and PT Bosowa Asuransi, with total coverage amounting to Rp2,696,124,805 as of December 31, 2017. Management of the Group believes that the coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

12. PROPERTI INVESTASI - NETO

Akun ini merupakan properti investasi yang dimiliki oleh JMP, entitas anak.

12. INVESTMENT PROPERTIES - NET

This account represents investment properties owned by JMP, a subsidiary.

	31 Desember 2017/ December 31, 2017				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan					
Properti Investasi	235.698.517	15.293.808	-	-	250.992.325
Akumulasi Penyusutan					
Properti Investasi	3.379.545	5.686.657	-	-	9.066.202
Nilai Tercatat	232.318.972				241.926.123

At cost
Investment properties
Accumulated depreciation
Investment properties
Carrying Amount

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

12. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Akun ini merupakan properti investasi yang dimiliki oleh JMP, entitas anak. (lanjutan)

	31 Desember 2016/ December, 31 2016				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan					
Properti Investasi	85.016.445	-	-	150.682.072	235.698.517
Akumulasi Penyusutan					
Properti Investasi	681.335	2.698.210	-	-	3.379.545
Nilai Tercatat	84.335.110				232.318.972

Penyusutan sebesar Rp5.686.657 dan Rp2.698.210 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dibebankan pada akun beban tol dan usaha lainnya. Properti investasi terutama merupakan investasi pada bangunan yang terletak di Jakarta (TB Simatupang dan Wahid Hasyim), Klungkung, dan Manado. Properti investasi tersebut disewakan.

12. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

This account represents investment properties owned by JMP, a subsidiary. (continued)

	31 Desember 2016/ December, 31 2016					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						At cost
Properti Investasi	85.016.445	-	-	150.682.072	235.698.517	Investment properties
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Properti Investasi	681.335	2.698.210	-	-	3.379.545	Investment properties
Nilai Tercatat	84.335.110				232.318.972	Carrying Amount

Depreciation amounting to Rp5,686,657 and Rp2,698,210 for year ended December 31, 2017 and 2016 was charged to toll and other operating expenses. Investment properties represent investment in buildings located in Jakarta (TB Simatupang and Wahid Hasyim), Klungkung, and Manado. These investment properties are rented.

13. HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL - NETO

Aset hak pengusahaan jalan tol merupakan hak konsesi dari Pemerintah Republik Indonesia berupa pengusahaan jalan tol yang diberikan kepada Kelompok Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan					
Akumulasi Amortisasi	40.256.743.590	24.598.449.582	5.710.009.755	2.898.947.961	62.044.131.378
Nilai Tercatat	5.553.432.240	803.198.193	270.196.217	-	6.086.434.216

	31 Desember 2016/ December, 31 2016					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Cost
Akumulasi Amortisasi	29.717.410.595	8.304.072.605	-	2.235.260.390	40.256.743.590	Accumulated Amortization
Nilai Tercatat	4.852.690.323	700.741.917	-	-	5.553.432.240	Carrying Amount

Beban amortisasi hak pengusahaan jalan tol untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp803.198.193 dan Rp700.741.917 dan dibebankan sebagai bagian dari beban tol dan usaha lainnya untuk ruas jalan tol yang sudah beroperasi secara komersial.

13. TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS - NET

Toll road concession rights are granted by the Government of Indonesia in the form of toll road concessions to the Group, with details as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Cost
Akumulasi Amortisasi	40.256.743.590	24.598.449.582	5.710.009.755	2.898.947.961	62.044.131.378	Accumulated Amortization
Nilai Tercatat	5.553.432.240	803.198.193	270.196.217	-	6.086.434.216	Carrying Amount

	31 Desember 2016/ December, 31 2016					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Cost
Akumulasi Amortisasi	29.717.410.595	8.304.072.605	-	2.235.260.390	40.256.743.590	Accumulated Amortization
Nilai Tercatat	4.852.690.323	700.741.917	-	-	5.553.432.240	Carrying Amount

Amortization of toll road concession rights for the year ended December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp803,198,193 and Rp700,741,917, respectively and charged to toll and other operating expenses for the toll road section that already operated.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**13. HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL – NETO
(lanjutan)**

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam hak perusahaan jalan tol - aset konsesi dalam penyelesaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.320.537.783.

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai hak perusahaan jalan tol pada tanggal 31 Desember 2017.

14. ASET TAKBERWUJUD LAINNYA - NETO

Rincian aset tak berwujud lainnya adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2017/ December 31, 2017					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Biaya Perolehan						Cost	
Tanah Pra-Konstruksi	2.173.856.297	804.587.114	-	(2.898.971.260)	79.472.151	Pre-Construction Land	
Perangkat Lunak	87.728.996	42.370.660	-	23.299	130.122.956	Software	
Jumlah Harga Perolehan	2.261.585.293	846.957.774	-	(2.898.947.961)	209.595.107	Total Cost	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Amortization	
Perangkat Lunak	66.004.688	12.270.390	-	-	78.275.078	Software	
Nilai Tercatat	2.195.580.606				131.320.029	Carrying Amount	
		31 Desember 2016/ December, 31 2016					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Disposals Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp		
Biaya Perolehan						Cost	
Tanah Pra-Konstruksi	3.931.544.776	477.571.911	-	(2.235.260.390)	2.173.856.297	Pre-Construction Land	
Perangkat Lunak	74.110.278	13.618.718	-	-	87.728.996	Software	
Jumlah Harga Perolehan	4.005.655.054	491.190.629	-	(2.235.260.390)	2.261.585.293	Total Cost	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Amortization	
Perangkat Lunak	48.585.687	17.419.000	-	-	66.004.688	Software	
Nilai Tercatat	3.957.069.367				2.195.580.605	Carrying Amount	

15. GOODWILL

Saldo *goodwill* merupakan selisih antara nilai wajar aset neto perusahaan yang diakuisisi dari pihak ketiga dengan nilai akuisisi secara keseluruhan, dengan detail sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Nilai Tercatat			Carrying Amount
Akuisisi PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	36.879.508	36.879.508	Acquisition of PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
Akuisisi PT Jasa Layanan Pemeliharaan	2.848.350	2.848.350	Acquisition of PT Jasa Layanan Pemeliharaan
Akuisisi PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	2.120.709	2.120.709	Acquisition of PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
Total	41.848.567	41.848.567	Total

**13. TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS – NET
(continued)**

The borrowing cost capitalized to toll road concession rights - concession assets in progress for year ended December 31, 2017 amounted to Rp1,320,537,783.

The Group's Management believes that there was no impairment in toll road concession rights as of December 31, 2017.

14. OTHER INTANGIBLE ASSETS -NET

Details of other intangible assets are as follows:

15. GOODWILL

The balance of goodwill consists of the difference between fair value of net assets of the following companies acquired from third parties and the total acquisition price:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

16. ASET KEUANGAN LAINNYA

Perusahaan memiliki penyertaan saham yang dikategorikan sebagai aset keuangan tersedia untuk di jual yang dicatat sebagai harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:

16. OTHER FINANCIAL ASSETS

The Company has investment in shares categorized as available-for-sale financial asset that are accounted for at cost with details are as follows:

Perusahaan/ Company	Status/ Status	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016	
		Rp	%	Rp	%
PT Jakarta Lingkar Barat Satu (JLB)	Operasi/ Operate	180.632.000	19,10	180.632.000	19,10
PT Marga Mandala Sakti (MMS)	Operasi/ Operate	28.000.000	1,94	28.000.000	1,94
PT Citra Margatama Surabaya (CMS)	Operasi/ Operate	20.000.000	5,26	20.000.000	5,26
PT Marga Nurindo Bhakti (MNB)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	9.500.000	4,75	9.500.000	4,75
PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	4.725.000	15,00	4.725.000	15,00
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)	Belum Operasi/ Not Yet Operated	7.650.000	1,03	7.650.000	1,03
PT Margaraya Jawa Tol (MJT)	Belum Operasi/ Not Yet Operated	4.143.438	2,47	4.143.438	2,47
PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)	Operasi/ Operate	3.332.000	1,47	3.332.000	1,47
PT Jatim Prasarana Utama (JPU)	Belum Operasi/ Not Yet Operated	3.000.000	7,00	3.000.000	7,00
PT Marga Mawatindo Esprit (MME)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	2.780.862	8,33	2.780.862	8,33
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	Belum Operasi/ Not Yet Operated	540.000	12,00	540.000	12,00
PT Marga Net One Limited (MNOL)	Pengakhiran PKP/ Termination of	15.291	10,00	15.291	10,00
Total		264.318.591		264.318.591	
Dikurangi/Deducted:					
Penurunan Nilai Penyertaan pada MNB/ Impairment of Investment in MNB		(9.499.999)		(9.499.999)	
Penurunan Nilai Penyertaan pada CMSP/ Impairment of Investment in CMSP		(4.724.999)		(4.724.999)	
Penurunan Nilai Penyertaan pada MME/ Impairment of Investment in MME		(2.780.860)		(2.780.860)	
Penurunan Nilai Penyertaan pada MNOL/ Impairment of Investment in MNOL		(15.289)		(15.289)	
		(17.021.147)		(17.021.147)	
Total		247.297.444		247.297.444	

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

a. PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

Perusahaan telah melakukan pengakhiran kerjasama penyelenggaraan jalan tol JORR Seksi W1 dan pencabutan izin kerjasama dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 80/KPTS/1997 tanggal 4 April 1997 sehubungan dengan tidak adanya kejelasan kelanjutan pembangunan proyek jalan tol JORR W-1. Menunjuk surat Menteri Pekerjaan Umum No. JL.0103-Mn/271 tanggal 31 Maret 2005, Menteri Pekerjaan Umum meminta Perusahaan dan JLB melakukan penilaian kembali tentang kelayakan untuk melanjutkan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan ruas jalan tol JORR Seksi W-1.

Pada tanggal 2 Februari 2007, JLB selaku pemegang hak pengusahaan jalan tol JORR Seksi W-1, telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) JORR Seksi W-1 No. 02/PPJT/II/Mn/2007 dengan masa konsesi selama 35 tahun dan berlaku efektif sejak 2 Februari 2007. Berdasarkan perjanjian penyertaan saham pada JLB No. 2 tanggal 4 Februari 2009 dari Notaris Febrian, S.H., Perusahaan melakukan penyertaan pada JLB dengan cara *in-kind* berupa bangunan Simpang Susun Penjaringan dengan nilai penyertaan sebesar Rp180.632.000 atau setara dengan 180.632 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (rupiah penuh) per lembar saham, atau setara dengan 23% penyertaan dari total saham ditempatkan.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 139 tanggal 28 September 2009 dari Notaris Kartono, S.H., penyertaan Perusahaan terdilusi menjadi sebesar 19,1%.

b. PT Marga Mandala Sakti (MMS)

MMS didirikan berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 1989 dari Notaris Kartini Muljadi, S.H. Penyertaan pada MMS dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Tangerang - Merak. Perusahaan memiliki 28.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp28.000.000 yang merupakan 8,68% kepemilikan.

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

a. PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

The Company had terminated its cooperation in completing Toll Road JORR Section W1 and withdrawn its cooperation license in the Decree of the Minister of Public Works No. 80/KPTS/1997 dated April 4, 1997 since there's no clear intention to continue construction project of Toll Road JORR W-1. With reference to the Decree of the Minister of Public Works No. JL.0103-Mn/271 dated March 31, 2005, the Minister of Public Works asked the Company and JLB to conduct re-evaluation on the feasibility of continuing the cooperation in development of Toll Road JORR Section W-1.

On February 2, 2007, JLB as the owner of concession rights of Toll Road JORR Section W1 has entered into Contract of Concession Toll Road JORR Section W-1, No. 02/PPJT/II/Mn/2007 with concession period of 35 years, effective on February 2, 2007. Based on agreement to investments in shares of JLB No. 2 dated February 4, 2009 from Notary Febrian, S.H., the Company transferred the building of Simpang Susun Semanggi as participation in JLB with participation value amounted to Rp180,632,000 or equivalent to 180,632 shares with par value Rp1,000,000 (full amount) per share, or equivalent to 23% participation from total issued share capital.

Based on Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 139 dated September 28, 2009 by Notary Kartono, S.H., the Company's ownership was diluted to 19.1%.

b. PT Marga Mandala Sakti (MMS)

MMS was established based on the Deed No. 14 dated October 4, 1989 of Notary Kartini Muljadi, S.H. The investment in MMS relates to the construction and operation of the Tangerang - Merak toll road. The Company originally owned 28,000,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp28,000,000, which represent 8.68% ownership interest.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

b. PT Marga Mandala Sakti (MMS) (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 4 April 1995 dari Notaris Sutjipto, S.H., penyertaan saham Perusahaan pada MMS sebesar 14.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham telah dijaminan oleh MMS sehubungan dengan fasilitas kredit sindikasi yang diperoleh MMS.

Berdasarkan risalah RUPSLB dengan Akta No. 5 tanggal 9 Desember 2004 dari Notaris Hendra Karyadi, S.H., para pemegang saham menyetujui penerbitan 921.310.773 lembar saham baru kepada pemegang obligasi konversi. Para pemegang saham lama menyatakan telah melepaskan hak masing-masing untuk membeli saham baru yang diterbitkan kepada pemegang obligasi konversi tersebut. Perubahan pemegang saham tersebut sesuai dengan Akta No. 11 tanggal 1 Agustus 2005 dari Notaris Benny Kristianto, S.H., mengenai perubahan pemegang saham MMS dan telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Administrasi Hukum Umum No. C-UM.02.01.14078 tanggal 23 September 2005, sehingga kepemilikan Perusahaan pada MMS menjadi sebesar 1,94%.

c. PT Citra Margatama Surabaya (CMS)

CMS didirikan berdasarkan Akta No. 99 tanggal 26 Desember 1996 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Penyertaan pada CMS dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Waru-Juanda. Perusahaan memiliki 8.550.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau sebesar Rp8.550.000 yang merupakan 15% kepemilikan.

Berdasarkan Akta No. 717 tanggal 27 Juni 2007 dari Notaris Margaretha Dynawati, S.H., para pemegang saham antara lain menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp380.000.000. Perusahaan hanya melakukan setoran modal sebesar Rp20.000.000 dari Rp48.000.000 yang ditetapkan.

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

b. PT Marga Mandala Sakti (MMS) (continued)

Based on the Deed No. 4 dated April 4, 1995 of Notary Sutjipto, S.H., the investment in MMS amounting to 14,000,000 shares with the par value of Rp1,000 (full amount) per share has been pledged by the Company in connection with syndicated credit facilities received by MMS.

Based on the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders as included in the Deed No. 5 dated December 9, 2004 of Notary Hendra Karyadi, S.H., the shareholders agreed with the issuance of 921,310,773 new shares to convertible bondholders. The predecessor shareholders had already waived their rights to subscribe for new shares issued to the convertible bondholders. This change of shareholders, according to the Deed No. 11 dated August 1, 2005 of Notary Benny Kristianto, S.H., regarding the change of MMS shareholders, has been received by the Directorate General of General Law Administration, Department of Law and Human Rights under receipt No.C-UM.02.01.14078 dated September 23, 2005, as a consequence, the Company's ownership in MMS become 1.94%.

c. PT Citra Margatama Surabaya (CMS)

CMS was established based on the Deed No. 99 dated December 26, 1996 of Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The investment in CMS was made in relation to the constructions and operations of the Waru-Juanda toll road project. The Company owns 8,550,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp8,550,000, which represent 15% ownership interest.

Based on the Deed No. 717 dated June 27, 2007 of Notary Margaretha Dynawati, S.H., the shareholders agreed to increase the issued and paid up capital to become Rp380,000,000. The Company had paid up capital amounted to Rp20,000,000 from total of Rp48,000,000.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

**c. PT Citra Margatama Surabaya (CMS)
(lanjutan)**

Dengan demikian kepemilikan Perusahaan di CMS mengalami penurunan menjadi sebesar 5,26% yang merupakan 20.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp20.000.000. Berdasarkan Akta No. 40 tanggal 21 Mei 2005 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Perusahaan dan CMS mengadakan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan yang mengubah wewenang penyelenggaraan jalan tol Waru -Tanjung Perak menjadi kurang lebih 12 Km. Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan telah dialihkan menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Pemerintah dengan CMS pada tanggal 12 Februari 2007 dengan masa hak pengusahaan (konsesi) hingga tahun 2040. Jalan Tol Waru - Juanda telah beroperasi sejak bulan April 2008.

d. PT Marga Nurindo Bhakti (MNB)

MNB didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 2 Desember 1991 dari Notaris BRAY Mahyastoeti Notonogoro, S.H., juncto Akta No. 19 tanggal 4 Maret 1998 dari Agus Madjid, S.H. Penyertaan pada MNB dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol JORR Seksi S dan E1 (Pondok Pinang - Jagorawi - Cikunir). Perusahaan memiliki 1.350 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp13.500.000 yang merupakan 10% kepemilikan.

Anggaran Dasar MNB telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris No. 23 tanggal 25 Desember 2010 dari Ny. ETTY Roeswitha Moelia, S.H. Akta perubahan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-06698 tanggal 3 Maret 2011.

Perusahaan memiliki 950 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp9.500.000 yang merupakan 4,75% kepemilikan.

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

**c. PT Citra Margatama Surabaya (CMS)
(continued)**

Therefore, the Company's ownership in CMS has become 5.26%, representing 20,000,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp20,000,000. Based on the Deed No. 40 dated May 21, 2005 of Notary Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., the Company and CMS entered into a Joint Operation Agreement that changed the authority of Waru - Tanjung Perak toll road to become approximately 12 Km. On February 12, 2007, such Joint Operation Agreement has been changed to a Concession Rights Agreement between the Government and CMS with concession right until year 2040. Waru - Juanda toll road has been operating since April 2008.

d. PT Marga Nurindo Bhakti (MNB)

MNB was established based on The Deed No. 9 dated December 2, 1991 of Notary BRAY Mahyastoeti Notonogoro, S.H., in conjunction with the Deed No. 19 dated March 4, 1998 of Agus Madjid, S.H. The investment in MNB relates to the construction and operation of the JORR toll road Section S and E1 (Pondok Pinang - Jagorawi - Cikunir). The Company owns 1,350 shares at par value of Rp10,000 (full amount) per share or equivalent to Rp13,500,000, which represent 10% ownership interest.

MNB's Articles of Association had been amended several times, with the latest of which was based on notarial deed No. 23 dated December 25, 2010 of Ny. ETTY Roeswitha Moelia, S.H.. The deed of amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.10-06698 dated March 3, 2011.

The Company has 950 shares with par value Rp10,000 (full amount) per share or equivalent to Rp9,500,000, which represent 4.75% ownership interest.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

d. PT Marga Nurindo Bhakti (MNB) (lanjutan)

Berdasarkan surat Perusahaan kepada MNB No. AA.HK.02.1143 tanggal 11 Agustus 2000, Perusahaan mengambil alih proyek yang dibangun oleh MNB. Pengambilalihan proyek ini mengakibatkan penyertaan Perusahaan dinilai sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan mengakui kerugian atas penurunan nilai penyertaan yang bersifat permanen tahun 2000 sebesar Rp9.499.999.

e. PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP)

CMSP didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 12 April 1996 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Penyertaan pada CMSP dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol JORR Seksi W2 (Kebon Jeruk - Pondok Pinang).

Perusahaan memiliki 4.725.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp4.725.000 yang merupakan 15% kepemilikan.

Berdasarkan surat Perusahaan kepada CMSP No. AA.HK.02.820 tanggal 21 Juni 2000, dinyatakan mengenai pengambilalihan proyek dan pengakhiran PKP. Penyertaan Perusahaan pada CMSP ini dipandang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga Perusahaan mengakui kerugian atas penurunan nilai penyertaan tahun 2000 sebesar Rp4.724.999.

f. PT Margaraya Jawa Tol (MJT)

MJT didirikan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 6 Juni 1997 dari Notaris Enimarya Agoes Suwarako, S.H. Penyertaan pada MJT dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Waru (Aloha) - Tanjung Perak. Perusahaan memiliki 4.143.438 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp4.143.438 yang merupakan 5% kepemilikan.

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

d. PT Marga Nurindo Bhakti (MNB) (continued)

Based on the Company's Letter No. AA.HK.02.1143 dated August 11, 2000 to MNB, the Company took over the JORR sections being built by MNB. As on consequence, the Company's investment in MNB has no more economic value, therefore, the Company recognized the loss on the permanent impairment of its investment in year 2000 amounting to Rp9,499,999.

e. PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP)

CMSP was established based on the Deed No. 36 dated April 12, 1996 of Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The investment in CMSP relates to operation of the JORR Section W2 (Kebon Jeruk - Pondok Pinang) toll road project.

The Company owns 4,725,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp4,725,000, which represent 15% ownership interest.

Based on the Company Letter No. AA.HK.02.820 dated June 21, 2000 to CMSP, regarding the takeover of the project and termination of Concession Agreement, the Company's investment in CMSP was deemed to have no economic value, therefore, the Company has recognized the loss caused by the impairment of this investment in 2000 amounting to Rp4,724,999.

f. PT Margaraya Jawa Tol (MJT)

MJT was established based on the Deed No. 18 dated June 6, 1997 of Notary Enimarya Agoes Suwarako, S.H. The investment in MJT relates to the construction and operation of the Waru (Aloha) - Tanjung Perak toll road project. The Company originally owned 4,143,438 shares at par value of Rp1,000 (full amount), amounting to Rp4,143,438, which represent 5% ownership interest.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (LANJUTAN)

f. PT Margaraya Jawa Tol (MJT) (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai restrukturisasi MJT yang tercantum dalam Akta Notaris Adrian Djuaini, S.H., No. 17 tanggal 20 Oktober 2004, Perusahaan memperoleh 1.250.000 lembar saham dari hasil kapitalisasi atau konversi 20.000.000 saham baru sehingga kepemilikan saham Perusahaan menjadi 5.393.438 lembar saham atau setara dengan Rp5.393.438. Selain itu, MJT juga mengeluarkan saham baru dari saham portepel sebanyak 110.458.000 lembar saham.

Perusahaan tidak ambil bagian dalam tambahan setoran modal disetor tersebut sehingga kepemilikan Perusahaan mengalami penurunan menjadi sebesar 2,47%. Pemerintah dan MJT telah menandatangani PPJT pada tanggal 19 Juli 2007 dengan masa konsesi hingga tahun 2047.

g. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)

BMN didirikan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 12 April 1993 dari Notaris Mestariy Habie, S.H. Penyertaan pada BMN dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Ujung Pandang yaitu Jalan Satando - Simpang Urip Sumoharjo/Petta Rani (tahap I) - Jalan Sultan Alauddin (tahap II). Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 5 September 1998, Perusahaan memiliki 3.332 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp3.332.000 yang merupakan 10% kepemilikan.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 276/KPTS/1994 tanggal 26 Agustus 1994 dan Akta No. 322 tanggal 29 Agustus 1994, dari Notaris Mestariy Habie, S.H., menyatakan bahwa BMN mengoperasikan jalan tol selama 30 tahun untuk tahap I dan tahap II akan ditentukan kemudian namun tidak lebih dari 30 tahun sejak dioperasikannya jalan tol baik sebagian atau seluruhnya. Ruas jalan tol Ujung Pandang tahap I dan II telah dioperasikan sejak tahun 1998.

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

f. PT Margaraya Jawa Tol (MJT) (continued)

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders, regarding MJT restructuring, as included in the Deed No. 17 dated October 20, 2004 of Notary Adrian Djuaini, S.H., the Company acquired 1,250,000 shares from capitalization or conversion of convertible bond to 20,000,000 new shares, hence, the Company's shares became 5,393,438 shares or equivalent to Rp5,393,438. In addition, MJT issued new shares from its portfolio of 110,458,000 shares.

The Company did not increase its investment and as a result, the Company's ownership decreased to 2.47%. The Government and MJT have entered into Concession Rights Agreement on July 19, 2007 with concession period until year 2047.

g. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)

BMN was established based on the Deed No. 20 dated April 12, 1993 of Notary Mestariy Habie, S.H. The investment in BMN was made in relation to the construction and operation of the Ujung Pandang toll roads that is Jalan Satando - Urip Sumoharjo Interchange/Petta Rani (phase I) - Jalan Sultan Alauddin (phase II). Based on the Deed No. 25 dated September 5, 1998, the Company owns 3,332 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp3,332,000, which represent 10% ownership interest.

The Decree of the Minister of Public Work No. 276/KPTS/1994 dated August 26, 1994 and the Deed No. 322 dated August 29, 1994 of Notary Mestariy Habie, S.H., states that BMN would operate phase I of the toll road for 30 years and phase II will be decided later but not for a period longer than 30 years for the operation of either part or all of the toll road. Phase I and Phase II of the Ujung Pandang toll road has been operating since 1998.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

**g. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)
(lanjutan)**

Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar BMN yang tercantum dalam Akta Karin Christiana Basoeki, S.H., No.13 tanggal 16 Mei 2008 terdapat peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor perusahaan. Akibat perubahan tersebut, kepemilikan saham Perusahaan terdilusi menjadi sebesar 1,47%.

h. PT Jatim Prasarana Utama (JPU)

JPU didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 27 Desember 2002 dari Notaris Rosida, S.H., Perusahaan memiliki 12.858 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp12.858 yang merupakan 30% kepemilikan.

JPU merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah Jawa Timur. Perusahaan patungan ini didirikan dengan maksud untuk meneruskan kelanjutan proyek jalan tol Surabaya - Mojokerto yang telah terhenti setelah Menteri Permukiman, Prasarana dan Wilayah Tertinggal mencabut izin konsesi yang diberikan kepada PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM) melalui surat Menkimpraswil No.418/KPTS/M/2001 tanggal 18 Juli 2001. Setelah Mahkamah Agung menolak pengajuan Peninjauan Kembali dari Menkimpraswil pada tanggal 31 Maret 2005, maka hak penyelenggaraan jalan tol dikembalikan kepada JSM. Sebagai akibatnya, JPU tidak lagi terlibat dalam proyek jalan tol tersebut. Pada tanggal 8 Mei 2007, JPU ikut serta dalam penyertaan saham TJP untuk proyek jalan tol Gempol Pasuruan dengan kepemilikan sebesar 1,4%.

Berdasarkan Berita Acara RUPS JPU tanggal 6 Mei 2013, pemegang saham JPU memutuskan penurunan modal dasar menjadi Rp150.000.000 (sebelumnya Rp171.400.000) dan modal disetor menjadi Rp40.502.000 yang terdiri dari kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp37.502.000 atau setara dengan 93%, dan Perusahaan sebesar Rp3.000.000 atau setara dengan 7%.

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

**g. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)
(continued)**

Based on the amendment of the Article of Association of BMN as stated on the Deed No.13 dated May 16, 2008 of notary Karin Christiana Basoeki, S.H., there was an increase in BMN's authorized, issued and fully paid in capital. A result of such amendment, the Company's ownership interest diluted to 1.47%.

h. PT Jatim Prasarana Utama (JPU)

JPU was established based on the Deed No. 25 dated December 27, 2002 of Notary Rosida, S.H., The Company owns 12,858 shares at a par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp12,858, which represent 30% ownership interest.

JPU is a joint venture company with Local Government of East Java. JPU was established in order to continue the construction of the Surabaya - Mojokerto toll road project that was suspended after the Minister of Settlement and Regional Infrastructure cancelled the concession granted to PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM) as stated in its Letter No.418/KPTS/M/2001 dated July 18, 2001. After the Supreme Court refused the application for Judicial Review of Minister of Settlement and Regional Infrastructure, dated March 31, 2005, the concession rights have been returned to JSM. As a result, JPU is not longer involved in such toll road project. On May 8, 2007, JPU participated in investment in shares of TJP to develop toll road project of Gempol Pasuruan, with ownership of 1.4%.

Based on Minutes of General Meeting of Shareholders of JPU dated May 6, 2013, JPU's shareholders decreased its authorized capital to Rp150,000,000, previously Rp171,400,000 and paid in capital to Rp40,502,000 with ownership consisting of East Java Provincial Government amounting to Rp37,502,000 or equivalent to 93% ownership, and the Company amounting to Rp3,000,000 or equivalent to 7% ownership interest.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

h. PT Jatim Prasarana Utama (JPU) (lanjutan)

Penurunan tersebut akibat dari penghapusan piutang modal disetor ke Perusahaan sebesar Rp9.858.000. Perusahaan mereklasifikasi nilai saldo penyertaan sebesar Rp3.000.000 ke pos Aset Keuangan Lainnya sejak bulan Agustus 2014.

i. PT Marga Mawatindo Esprit (MME)

MME didirikan berdasarkan Akta No. 96 tanggal 30 Mei 1997 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Penyertaan pada MME dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Semarang - Demak. Perusahaan memiliki 1.154.364 lembar saham dengan nilai nominal Rp2.409 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp2.780.862 yang merupakan 8,33% kepemilikan.

Berdasarkan Surat No. 001/SPK-DIR/2003 tanggal 6 Januari 2003, Perusahaan dan MME sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan No. 58 tanggal 25 Februari 1998. Pengakhiran PKP ini mengakibatkan penyertaan pada perusahaan ini tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga Perusahaan mengakui adanya kerugian atas penurunan nilai penyertaan tahun 2002 sebesar Rp2.780.861.

j. PT Marga Net One Limited (MNOL)

MNOL didirikan berdasarkan hukum Negara Bangladesh sebagaimana termuat dalam Incorporated Under The Company Act 1994 (ACT-XVIII of 1994) (*Private Company Limited By Shares*) dan *Memorandum of Association of Marga Net One Limited* tanggal 29 Februari 2003 *juncto Certificate of Incorporation No. C-50732 (1027)/ 2003* tanggal 11 Oktober 2003 yang dikeluarkan *Registrar of Joint Stock Companies Bangladesh*.

Berdasarkan *Memorandum of Association of MNOL* tanggal 29 Februari 2003, Perusahaan memiliki 200 lembar saham dengan nominal TK 100 (mata uang Taka penuh) per lembar saham atau 10% kepemilikan dan setoran modal sejumlah US\$1.800 atau setara dengan Rp15.291 yang dilakukan pada tanggal 2 September 2003.

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

h. PT Jatim Prasarana Utama (JPU) (continued)

The decrease was a result of the write off of the paid in capital receivables from the Company amounting to Rp9,858,000. The company reclassified the balance of investment amounting to Rp3,000,000 to Other Financial Assets since August 2014.

i. PT Marga Mawatindo Esprit (MME)

MME was established based on the Deed No. 96 dated May 30, 1997 of Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The investment in MME relates to the construction and operation of the Semarang - Demak toll road. The Company owns 1,154,364 shares at par value of Rp2,409 (full amount) per share or equivalent to Rp2,780,862, which represent 8.33% ownership.

Based on Letter No. 001/SPK-DIR/2003 dated January 6, 2003, the Company and MME agreed to terminate the Concession Rights Agreement No. 58 dated February 25, 1998. The result of such termination of Concession Rights Agreement caused the Company's investment to have no economic value, therefore, the Company recognized the loss on impairment of the investment in year 2002 amounting to Rp2,780,861.

j. PT Marga Net One Limited (MNOL)

MNOL was established based on the Law of Bangladesh as stated in The Company Act 1994 (ACT-XVIII of 1994) (*Private Company Limited by Shares*) and *Memorandum of Association of Marga Net One Limited* dated February 29, 2003, in conjunction with *Certificate of Incorporation No. C-50732(1027)/ 2003* dated October 11, 2003, issued by the *Bangladesh Registrar of Joint Stock Companies*.

Based on the *Memorandum of Association of MNOL* dated February 29, 2003, the Company owns 200 shares at par value of TK 100 (full Taka amount) per share or 10% ownership and subscribed to paid in capital amounting to US\$1,800 or equivalent to Rp15,291 on September 2, 2003.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (LANJUTAN)

**j. PT Marga Net One Limited (MNOL)
(lanjutan)**

Perusahaan menganggap penyertaan pada MNOL sudah tidak memiliki nilai ekonomis disebabkan tidak adanya kepastian pengembalian investasi atas penyertaannya dan mengakui kerugian atas penurunan nilai penyertaan sebagai beban tahun 2006 sebesar Rp15.290.

Perusahaan sepakat melakukan kerjasama pemberian jasa teknik dalam manajemen pengumpulan tol, manajemen lalu lintas dan manajemen pemeliharaan atas pengelolaan dan pengoperasian jembatan tol Jamuna di Bangladesh selama 5 tahun.

k. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

PSBI didirikan berdasarkan akta notaris No. 21 tanggal 2 Oktober 2015 dari Mala Mukti, S.H., LL.M, dalam rangka pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-2460435.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015.

Perusahaan memiliki 540 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp540.000.000 (rupiah penuh) yang merupakan 12% dari kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2017.

l. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)

KKDM didirikan berdasarkan Akta No. 94 tanggal 20 Desember 1996 dari Notaris Mudofir Hadi, S.H. Penyertaan pada KKDM dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Bekasi Timur-Cawang-Kampung Melayu yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Perusahaan memiliki 7.650.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp7.650.000 yang merupakan 10% kepemilikan di KKDM. Berdasarkan akta notaris No. 24 tanggal 17 Oktober 2014 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., kepemilikan Perusahaan terdilusi dari 10% menjadi 1,03%.

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

**j. PT Marga Net One Limited (MNOL)
(Continued)**

The Company has identified that the investment in MNOL does not have any expected future economic benefit and, therefore, the Company recognized the loss on impairment its investment in 2006 amounting to Rp15,290 as an expense.

The Company agreed to render technical services by providing a management of toll collection, traffic management, and management of maintenance for the operations of the Jamuna toll bridge in Bangladesh for 5 years.

k. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

PSBI was established based on notarial deed No. 21 dated October 2, 2015 from notary Mala Mukti, S.H., LL.M, for Jakarta-Bandung high speed train operation. Deeds of establishment were legalized by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU-2460435.AH.01.01 year 2015 dated October 12, 2015.

The Company has 540 shares with par value Rp1,000,000 (full amount) per share or equivalent to Rp540,000,000 (full amount) which represents 12% ownership interest as of December 31, 2017.

l. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)

KKDM was established based on the Deed No. 94 dated December 20, 1996 of Notary Mudofir Hadi, S.H., The investment in KKDM relates to the operation of the Bekasi Timur-Cawang Kampung Melayu toll road project, which comprise construction, operation and maintenance of the toll road. The Company owns 7,650,000 shares with a par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp7,650,000 which represent 10% ownership of KKDM. Based on notarial deed No. 24 dated October 17, 2014 from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company's ownership was diluted from 10% to 1.03%.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Uang Muka Kontraktor	257.222.073	689.413.950	Advances for Contractors
Uang Muka Dana Talangan	22.998.331	126.777.607	Advances for bridging fund
Biaya perolehan pinjaman yang ditangguhkan			Deferred Transaction Cost
Aset Diambil Alih	34.203.916	34.203.915	Foreclosed Assets
Jalan Tol Ruas Surabaya – Gempol Seksi Porong – Gempol	12.027.508	12.027.508	Surabaya – Gempol Toll Road Porong-Gempol Section
Jaminan		-	Guarantees
Lainnya	284.464.000	46.855.747	Others
Total Aset Lain-lain	610.915.828	909.278.727	Total Other Assets
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	<u>(26.302.053)</u>	<u>(26.302.053)</u>	Allowance for Impairment Losses
Total – Bersih	<u>584.613.775</u>	<u>882.976.674</u>	Total – Net

a. Uang muka kontraktor

Merupakan uang muka kontraktor dan konsultan dalam rangka pembangunan jalan tol, pelapisan ulang, pengadaan peralatan jalan tol dan pengadaan jalan lain yang akan diperhitungkan dengan tagihan atas kemajuan pekerjaan kontraktor dan konsultan.

a. Advances to contractors

Represents down payments to contractors and consultants for toll road construction, overlay, toll road equipment procurement and other road procurements and are calculated from the invoice of working progress from the contractors and consultants.

b. Jaminan

Merupakan garansi bank yang ditempatkan Perusahaan selaku pemegang hak pengusahaan jalan tol sebagai jaminan pelaksanaan dan penyelesaian konstruksi jalan tol.

b. Guarantee

This represents bank guarantee which was placed by the Company related to the concession right of toll road, as a guarantee of execution and completion of the toll road construction.

c. Aset diambil alih

c. Foreclosed assets

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Ruas Tol Semarang-Demak (MME)	20.129.778	20.129.778	Semarang-Demak Toll Road (MME)
Ruas Tol Cileunyi-Nagrek (PT Wijaya Karya (Persero) Tbk)	12.000.000	12.000.000	Cileunyi-Nagrek Toll Road (PT Wijaya Karya (Persero) Tbk)
Ruas Tol Pandaan-Pasuruan (PT Giri Adya Sejati)	2.074.137	2.074.137	Pandaan-Pasuruan Toll Road (PT Giri Adya Sejati)
Sub Total	<u>34.203.915</u>	<u>34.203.915</u>	Sub Total
Penyisihan Penurunan Nilai Aset:			Allowance for Impairment Losses:
Ruas Tol Porong - Gempol	12.027.508	12.027.508	Porong - Gempol Toll Road
Ruas Tol Cileunyi-Nagrek (PT Wijaya Karya (Persero) Tbk)	12.000.000	12.000.000	Ruas Tol Cileunyi-Nagrek (PT Wijaya Karya (Persero) Tbk)
Ruas Tol Pandaan-Pasuruan (PT Giri Adya Sejati)	2.074.137	2.074.137	Ruas Tol Pandaan-Pasuruan (PT Giri Adya Sejati)
Lainnya	200.408	200.408	Others
Sub Total	<u>26.302.053</u>	<u>26.302.053</u>	Sub Total
Total	<u>7.901.862</u>	<u>7.901.862</u>	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

d. Jalan Tol Ruas Surabaya - Gempol Seksi Porong - Gempol

Jalan tol Seksi Porong - Gempol merupakan bagian dari jalan tol Surabaya - Gempol yang mengalami dampak dari musibah genangan lumpur PT Lapindo Brantas sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya jalan tol tersebut (Catatan 46b).

Sehubungan dengan dilakukannya penutupan sebagian jalan tol Surabaya - Gempol Seksi Porong - Gempol pada tanggal 11 Juli 2006, dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum No. 297/KPTS/M/2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Pencabutan Sementara Status Sebagai Jalan Tol Sebagian Ruas Jalan Tol Porong - Gempol Seksi Surabaya - Gempol, Perusahaan mencatat aset jalan tol seksi Porong - Gempol ke dalam Aset Tidak Lancar Lainnya sebesar Rp12.027.508.

e. Penempatan dana proyek Andara

Pada tanggal 9 Juni 2017, JMP, entitas anak, mengadakan perjanjian penempatan dana dalam rangka pembangunan properti Andara Habitat dengan PT Asiana Andara Jaya. JMP menempatkan dana sebesar Rp200.000.000. Pengembalian dana beserta *return on investment* telah ditentukan sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati selama masa 4 tahun hingga tahun 2021.

18. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	31 Desember 2017	31 Desember 2016/
	December 31, 2017	December 31, 2016
Perusahaan		
Pajak Penghasilan Pasal 21	-	5.591.197
Pajak Penghasilan Pasal 28a tahun 2013	-	120.817.859
Sub Total	-	126.409.056
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4 ayat 2	435	435
Pasal 21	173.858	65.790
Pasal 23	38.250	35.493
Pasal 25	-	196.562
Pajak Pertambahan Nilai	47.507.017	27.326.629
Sub Total	47.719.560	27.624.909
Total	47.719.560	154.033.965

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

d. Surabaya - Gempol Toll Road Porong - Gempol Section

Section Porong - Gempol toll road which is part of Surabaya - Gempol toll road has been affected by mud disaster of PT Lapindo Brantas which resulted in malfunction of the toll road (Note 46b).

In line with the partial closure of Section Porong - Gempol of Surabaya-Gempol toll road on July 11, 2006, which followed up by letter from the Minister of Public Works No. 297/KPTS/M/2006 dated August 11, 2006 regarding the Temporary Revocation of Status of Some Part of Section Porong - Gempol in Surabaya - Gempol Toll Road, the Company recognised the Section Porong - Gempol toll road into Other Non-Current Assets amounting to Rp12,027,508.

e. Fund placement in Andara project

On June 9, 2017, JMP, a subsidiary, entered into a placement agreement for development of property named Andara Habitat with PT Asiana Andara Jaya. JMP placed amount of Rp200,000,000. The repayment and return on investment have been determined based on the agreed payment schedule within 4 years until 2021.

18. TAXATION

a. Prepaid taxes

The Company
Income Tax Article 21
Income Tax Article 28a Year 2013
Sub Total
Subsidiaries
Income Taxes:
Article 4 (2)
Article 21
Article 23
Article 25
Value Added Tax
Sub Total
Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

18. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember 2017	31 Desember 2016/	
	December 31, 2017	December 31, 2016	
Perusahaan			<i>The Company</i>
Pajak Penghasilan:			<i>Income Tax:</i>
Pasal 4 (2)	13.710.933	7.388.440	<i>Article 4 (2)</i>
Pasal 21	17.078.472	-	<i>Article 21</i>
Pasal 22	156.785	56.211	<i>Article 22</i>
Pasal 23	1.899.460	1.421.430	<i>Article 23</i>
Pasal 25	71.128.336	58.910.412	<i>Article 25</i>
Pasal 29			<i>Article 29</i>
2017	106.603.717	-	<i>2017</i>
2016	-	16.197.290	<i>2016</i>
Pajak Pertambahan Nilai	43.108.231	3.568.673	<i>Value Added Tax</i>
Pajak Bumi dan Bangunan	-	28.928.255	<i>Property Tax</i>
	253.685.935	116.470.711	
Entitas Anak			<i>Subsidiaries</i>
Pajak Penghasilan:			<i>Income Tax:</i>
Pasal 4 (2)	31.111.192	24.278.822	<i>Article 4 (2)</i>
Pasal 21	7.811.900	1.760.349	<i>Article 21</i>
Pasal 22	2.330	2.300	<i>Article 22</i>
Pasal 23	8.729.259	751.871	<i>Article 23</i>
Pasal 25	1.026.571	701.331	<i>Article 25</i>
Pasal 26	17.027	15.745	<i>Article 26</i>
Pasal 29	2.386.561	5.239.759	<i>Article 29</i>
Pajak Bumi dan Bangunan	1.973.689	-	<i>Property Tax</i>
Pajak Pertambahan Nilai	10.500.949	9.175.614	<i>Value Added Tax</i>
Kewajiban Pajak Lainnya	500	165.272	<i>Other Tax Liabilities</i>
	63.559.978	42.091.063	
Total	317.245.913	158.561.774	Total

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expenses

Beban pajak penghasilan Kelompok Usaha terdiri dari:

The income tax expense of the Group consists of the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Perusahaan			<i>The Company</i>
Pajak Kini	990.604.007	706.127.037	<i>Current tax</i>
Pajak Tangguhan	73.169.612	63.355.701	<i>Deferred Tax</i>
	1.063.773.619	769.482.738	
Entitas Anak			<i>Subsidiaries</i>
Pajak Kini	20.617.461	19.028.836	<i>Current tax</i>
Pajak Tangguhan	72.405.318	58.113.224	<i>Deferred Tax</i>
	93.022.779	77.142.060	
Konsolidasian			<i>Consolidated</i>
Pajak kini	1.011.221.468	725.155.873	<i>Current Tax</i>
Pajak Tangguhan	145.574.930	121.468.925	<i>Deferred Tax</i>
Total	1.156.796.398	846.624.798	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

18. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expenses (continued)

Pajak kini

Current tax

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak:

A reconciliation between the consolidated income before income tax as reported in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Laba Konsolidasian Sebelum Pajak			Consolidated Income Before Tax
Penghasilan Badan	3.250.452.460	2.649.679.254	Corporate Income
Dikurangi: Laba (Rugi) Entitas Anak	172.922.212	158.728.247	Less: Portion of Subsidiaries Income (Loss)
Efek eliminasi	(26.634.950)	(149.612.038)	Elimination effect
Laba Sebelum Pajak Penghasilan - Perusahaan	3.396.739.722	2.658.795.463	Income Before Tax - The Company
Beda temporer			Temporary differences
Provisi (pembayaran) pelapisan ulang	3.188.871	166.853.987	Provision (payment) of overlay
Penyisihan piutang tak tertagih	13.024.372	55.156.399	Allowance for doubtful accounts
Penyisihan atas liabilitas imbalan kerja	(81.082.692)	(342.830.833)	Provision of employee benefits liabilities
Penyusutan aset tetap dan hak pengusahaan jalan tol	(172.652.601)	(132.602.362)	Depreciation of fixed assets and toll road concession rights
Sub-Total	(237.522.050)	(253.422.809)	Sub-Total
Beda tetap			Permanent differences
Beban tol dan usaha lainnya	(73.555.181)	197.733.341	Toll and other operating expense
Bagian rugi entitas anak dan entitas asosiasi	285.307.139	158.428.291	Share in income of subsidiaries and associates
Beban bunga	166.390.078	72.981.627	Interest expenses
Beban umum dan administrasi	129.205.448	49.883.796	General and administrative expenses
Biaya perolehan penghasilan dikenakan pajak final	(2.356.780)	21.209.767	Acquisition cost of income subject to final tax
Beban pajak	8.025.419	8.194.986	Tax expenses
Beban konstruksi	730.584.532	4.788.023	Construction expenses
Beban bunga efektif	4.830.603	4.271.379	Effective interest rate expenses
Beban lainnya - bersih	108.099.430	-	Other expenses - net
Tantiem	12.570.000	3.600.000	Tantiem
Beban pajak atas penghasilan keuangan	29.292.220	20.357.495	Tax expense on interest income
Beban piutang karyawan	1.508.227	1.512.860	Employee receivable expenses
Penghasilan dikenakan pajak final	(121.074.159)	(127.029.886)	Income subject to final tax
Pendapatan konstruksi	(744.465.638)	(4.878.995)	Construction revenues
Pendapatan bunga yang telah dikenakan PPh Final	(147.053.961)	(101.765.972)	Interest income subjected to final tax
Pendapatan tol dan usaha lainnya	(14.008.168)	-	Toll and other operating revenue
Sub-Total	373.299.210	309.286.712	Sub-Total
Total	135.777.161	55.863.903	Total
Taksiran Penghasilan Kena Pajak Perusahaan	3.532.516.883	2.714.659.366	Estimated Taxable Income of the Company
Total beban pajak kini			Current income tax provision
Beban pajak kini Perusahaan	883.129.221	678.664.842	Current income tax expense - Company
Beban Pajak atas Koreksi Pajak	107.474.786	27.462.195	Tax expense from correction
Total	990.604.007	706.127.037	Total
Pajak penghasilan dibayar dimuka			Prepayment of income taxes
Pajak Penghasilan Pasal 23	11.873.751	2.901.372	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	764.651.754	659.566.180	Income Tax Article 25
Total	776.525.505	662.467.552	Total
Utang pajak penghasilan			Income Tax Payable
Perusahaan	106.603.716	16.197.290	Company
Entitas Anak	2.386.561	5.239.759	Subsidiaries
Total Utang Pajak - Konsolidasian	108.990.277	21.437.049	Income Tax Payable - Consolidated

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan sebagai berikut:

	2017				31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Diakui di laba rugi/ Recognized in Profit or loss	Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain/ Recognized in Other Comprehensive Income	Dampak Dekonsolidasi Entitas Anak/ Deconsolidated Subsidiary Impact		
Liabilitas (Aset) Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities (Assets)
Perusahaan						Company
Aset Tetap dan Aset Takberwujud	753.340.660	43.163.150	-	-	796.503.810	Fixed Assets and Intangible Assets
Provisi Pelapisan Jalan Tol	(117.258.756)	(797.218)	-	-	(118.055.974)	Provision for Overlay
Liabilitas Imbalan Kerja	(182.165.924)	20.270.673	(86.677.429)	-	(248.572.680)	Employee Benefits Liabilities
Penyisihan piutang tak tertagih	(13.789.100)	10.533.007	-	-	(3.256.093)	Allowance for doubtful accounts
Efek Tersedia Untuk Dijual KIK EBA Mandiri JSMR01	-	-	1.661.400	-	1.661.400	Marketable Securities Available for Sale KIK EBA Mandiri JSMR01
Total	440.126.880	73.169.612	(85.016.029)	-	428.280.463	Total
Entitas Anak						Subsidiaries
Aset Tetap dan Aset Takberwujud	260.366.616	62.957.919	-	(123.245.926)	200.078.609	Fixed Assets and Intangible Assets
Provisi Pelapisan Jalan Tol	(6.895.081)	(5.346.757)	-	11.034.007	(1.207.831)	Provision for Overlay
Liabilitas Imbalan Kerja	(6.397.568)	(2.751.884)	(8.657.517)	1.191.425	(16.615.544)	Employee Benefits Liabilities
Penyisihan Kerugian Penurunan Piutang	(202.693)	(22.863.504)	-	(11.382.160)	(34.448.357)	Allowance for Impairment Losses
Rugi Fiskal	(56.032.929)	39.594.294	-	-	(16.438.635)	Loss on Fiscal
Beban Akrua	(666.562)	815.250	-	(265.906)	(117.218)	Accrued Expenses
Total	190.171.783	72.405.318	(8.657.517)	(122.668.560)	131.251.024	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan Konsolidasian	630.298.663	145.574.930	(93.673.546)	(122.668.560)	559.531.487	Consolidated Deferred Tax Liability

18. TAXATION (continued)

c. Income tax expenses (continued)

Current tax (continued)

Under the taxation laws of Indonesia, the Company should submit its tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxes may assess and amend the tax payable within 5 years after the date when the tax becomes payable.

Deferred tax

Deferred tax is calculated using all temporary differences between tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. The details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expenses (continued)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Deferred tax (continued)

	2016				31 Desember 2016/ December 31, 2016	
	1 Januari 2016/ January 1, 2016	Diakui di laba rugi/ Recognized in Profit or loss	Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain/ Recognized in Other Comprehensive Income	Dampak Dekonsolidasi Entitas Anak/ Deconsolidated Subsidiary Impact		
Liabilitas (Aset) Pajak Tangguhan						<i>Deferred Tax Liabilities (Assets)</i>
Perusahaan						<i>Company</i>
Aset Tetap dan Aset Takberwujud	720.190.070	33.150.590	-	-	753.340.660	<i>Fixed Assets and Intangible Assets</i>
Provisi Pelapisan Jalan Tol	(75.545.259)	(41.713.497)	-	-	(117.258.756)	<i>Provision for Overlay</i>
Liabilitas Imbalan Kerja	(234.058.742)	85.707.708	(33.814.890)	-	(182.165.924)	<i>Employee Benefits Liabilities</i>
Penyisihan piutang tak tertagih	-	(13.789.100)	-	-	(13.789.100)	<i>Allowance for doubtful accounts</i>
Total	410.586.069	63.355.701	(33.814.890)	-	440.126.880	<i>Total</i>
Entitas Anak						<i>Subsidiaries</i>
Aset Tetap dan Aset Takberwujud	179.080.014	81.286.602	-	-	260.366.616	<i>Fixed Assets and Intangible Assets</i>
Provisi Pelapisan Jalan Tol	(8.972.590)	2.077.509	-	-	(6.895.081)	<i>Provision for Overlay</i>
Liabilitas Imbalan Kerja	(5.629.873)	1.033.942	(1.801.637)	-	(6.397.568)	<i>Employee Benefits Liabilities</i>
Penyisihan Kerugian Penurunan Piutang	(14.951)	(187.742)	-	-	(202.693)	<i>Allowance for Impairment Losses</i>
Rugi Fiskal	(29.574.296)	(26.458.633)	-	-	(56.032.929)	<i>Loss on Fiscal</i>
Beban Akruwal	(1.028.108)	361.546	-	-	(666.562)	<i>Accrued Expenses</i>
Total	133.860.196	58.113.224	(1.801.637)	-	190.171.783	<i>Total</i>
Liabilitas Pajak Tangguhan Konsolidasian	544.446.265	121.468.925	(35.616.527)	-	630.298.663	<i>Consolidated Deferred Tax Liability</i>

Rekonsiliasi antara laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku dan beban pajak penghasilan sebagai berikut:

The reconciliation between the accounting income before income tax with the current tax rate and income tax expense are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	3.396.739.722	2.658.795.463	<i>Income Before Tax of the Company</i>
Beban Pajak atas Laba dengan Tarif Pajak yang Berlaku (25%)	849.184.931	664.698.866	<i>Revenue Tax Expense with effective tax rate (25%)</i>
Beda temporer	(59.380.512)	(63.355.702)	<i>Temporary differences</i>
Beda tetap	93.324.803	77.321.679	<i>Permanent differences</i>
Total	33.944.290	13.965.976	<i>Total</i>
Total beban pajak	883.129.221	678.664.842	<i>Total of tax expenses</i>
Koreksi pajak	107.474.786	27.462.195	<i>Tax correction</i>
Perusahaan	990.604.007	706.127.037	<i>Company</i>
Entitas Anak	20.617.461	19.028.836	<i>Subsidiaries</i>
Total beban pajak kini	1.011.221.468	725.155.873	<i>Total current tax expense</i>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Denda Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2016, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPKB) dari Kantor Pajak sehubungan dengan pajak penghasilan Badan tahun pajak 2012. Perusahaan berkewajiban untuk membayar kekurangan pajak penghasilan sebesar Rp27.462.195. Selanjutnya, Perusahaan juga berkewajiban untuk membayar kekurangan berbagai jenis pajak selama tahun pajak 2016 sebesar Rp8.194.986. Saldo kurang bayar pajak telah dibayar pada tanggal 15 April 2016 dan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2016.

Pada tanggal 17 Maret 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dari Kantor Pajak sehubungan dengan pajak penghasilan Badan tahun pajak 2013 sebesar Rp13.343.073 dan sisa sebesar Rp107.474.786 dibebankan di biaya pajak kini tahun berjalan. Selanjutnya, Perusahaan juga berkewajiban untuk membayar kekurangan berbagai jenis pajak selama tahun pajak 2017 sebesar Rp8.021.855 atas surat Tagihan Pajak PPN dan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 4 ayat 2. Saldo kurang bayar pajak telah dibayar dan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2017.

e. Administrasi Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun setelah tanggal pajak terutang.

18. TAXATION (continued)

d. Tax Penalties

On March 31, 2016, the Company received tax assessment letter related to under-payment tax assessment (SKPKB) from Tax Office in connection with corporate income tax for fiscal year 2012. The Company was liable for underpayment of corporate income tax amounting to Rp27,462,195. Additionally, the Company was also liable for underpayments related to various types of taxes for fiscal 2016 totalling Rp8,194,986. The aforesaid tax underpayment was fully paid on April 15, 2016 and charged directly to the 2016 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

On March 17, 2017, the Company received tax assessment letter related to over-payment tax assessment (SKPLB) from Tax Office in connection with corporate income tax for fiscal year 2013 amounting to Rp13,343,073 and the remaining balance of Rp107,474,786 is charged to current tax expense of the current year. Additionally, the Company was also liable for underpayments related to various types of taxes for fiscal 2017 totalling Rp8,021,855 based on Tax Invoice Letter VAT and Income Tax 21, Income Tax 23 and Income Tax 4 article 2. The underpayment balance of the tax has been paid and charged to the consolidated statements of income and other comprehensive income of 2017.

e. Tax Administration

Under the taxation law of Indonesia, the Company submit tax returns on the basis of self-assessment and amend the tax payable within five years after the date when the tax becomes payable.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

19. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang kepada pemasok terkait dengan pengadaan barang cetakan, alat tulis kantor, karcis tol, obat-obatan dan pakaian dinas serta utang usaha atas jasa pemeliharaan dan pembersihan jalan tol.

19. TRADE PAYABLES

This account represents payables to suppliers related to the procurement of printing goods, office stationery, toll tickets, medicine, uniform, toll road maintenance and cleaning services.

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Pihak Ketiga	302.119.438	113.829.104	Third Party
Pihak Berelasi (Catatan 44)	48.804.625	20.942.458	Related Party (Note 44)
Total	<u>350.924.063</u>	<u>134.771.562</u>	Total

20. UTANG KONTRAKTOR

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor, konsultan dan rekanan sehubungan dengan pembangunan jalan, pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol dan bangunan lain.

20. CONTRACTORS PAYABLES

This account represents payables to contractors, consultants and partners associated with the construction of roads, overlay and procurement of toll facilities and other buildings.

Utang kontraktor jangka pendek

Short-term contractors payables

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Pihak Berelasi (Catatan 44)	1.008.237.960	973.757.332	Related Party (Note 44)
Pihak Ketiga			Third Party
PT Utama - Gorip KSO	39.450.335	-	PT Utama - Gorip KSO
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama	17.487.321	-	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama
PT Module Intracs Yasatama	16.229.323	12.296.762	PT Module Intracs Yasatama
PT Dirgantara Yudha Artha	15.177.335	-	PT Dirgantara Yudha Artha
PT Marga Maju Mapan	14.460.398	61.231.403	PT Marga Maju Mapan
PT Waskita - Gorip KSO	13.254.172	-	PT Waskita - Gorip KSO
PT Kadi International	9.520.953	35.784.722	PT Kadi International
PT Delameta Bilano	8.967.304	12.778.413	PT Delameta Bilano
KSO ARP JLP 3M	8.284.019	19.157.143	KSO ARP JLP 3M
PT Widya Sapta Colas	7.919.957	12.661.302	PT Widya Sapta Colas
PT Mulus Natausaha	6.965.245	19.739.880	PT Mulus Natausaha
PT Sinarindo	6.783.725	5.036.312	PT Sinarindo
PT Perkasa Adiguna Sembada	6.116.484	6.911.048	PT Perkasa Adiguna Sembada
PT Aremix Planindo	5.718.233	11.062.003	PT Aremix Planindo
KSO Dressa Badja	5.070.053	2.236.377	KSO Dressa Badja
KSO Buana	4.531.130	-	KSO Buana
PT Eskapindo Matra	4.258.712	5.978.194	PT Eskapindo Matra
PT Perentjana Djaja	4.005.161	2.472.835	PT Perentjana Djaja
PT Multi Karya Cemerlang	3.997.436	3.247.634	PT Multi Karya Cemerlang
PT Multi Phi Beta	3.921.666	-	PT Multi Phi Beta
PT Cipta Marga Mandiri	3.558.489	-	PT Cipta Marga Mandiri
PT Gienda Putra	3.530.353	4.555.091	PT Gienda Putra
JLP - 3M KSO	3.123.659	-	JLP - 3M KSO

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

20. UTANG KONTRAKTOR (lanjutan)

20. CONTRACTORS PAYABLES (continued)

Utang kontraktor jangka pendek (lanjutan)

Short-term contractors payables (lanjutan)

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
PT Hajar Aswad Konstruksindo	2.539.545	-	PT Hajar Aswad Konstruksindo
PT Purnajasa Bimapatama	2.362.450	-	PT Purnajasa Bimapatama
PT Annisa Bintang Blitar	1.667.520	4.154.391	PT Annisa Bintang Blitar
PT Sarma Raya Cipta	-	4.039.176	PT Sarma Raya Cipta
PT Mahardika Jaya Utama	-	3.244.811	PT Mahardika Jaya Utama
PT Roadmixindo Raya	-	2.877.169	PT Roadmixindo Raya
PT Amber Hasya	-	2.756.099	PT Amber Hasya
PT Buana Archicon	-	2.615.164	PT Buana Archicon
PT Sarana Kontruksindo Utama	-	2.610.862	PT Sarana Kontruksindo Utama
PT Wiranta Bhuana Raya	-	2.102.537	PT Wiranta Bhuana Raya
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2 Miliar)	62.071.818	65.818.845	Others (each below Rp 2 Billion)
Subtotal	<u>280.972.796</u>	<u>305.368.174</u>	Subtotal
Total	<u>1.289.210.756</u>	<u>1.279.575.017</u>	Total

Utang kontraktor jangka panjang

Long-term contractors payables

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Pihak Berelasi (Catatan 44)	483.679.173	389.282.145	Related Party (Note 44)
Pihak Ketiga			Third Party
KSO Utama - Gorib	12.735.428	-	KSO Utama - Gorib
KSO Maju Mapan	-	4.063.260	KSO Maju Mapan
Lain - lain (dibawah 2 Miliar)	285.350	1.124.171	Others (each below Rp 2 Billion)
Subtotal	<u>13.020.778</u>	<u>5.187.431</u>	Subtotal
Total	<u>496.699.951</u>	<u>394.469.576</u>	Total

21. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

21. OTHER CURRENT FINANCIAL LIABILITIES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Utang dana talangan tanah - pihak berelasi (Catatan 44)	2.446.946.866	1.855.294.470	Bridging fund for land - related parties (Note 44)
Pihak Ketiga			Third Parties
Sumbangan Area Pramuka Cibubur & TMII	2.388.715	2.388.715	Contribution to Pramuka Cibubur Area & TMII
Lainnya	517.895.028	98.343.852	Others
Sub Total	<u>520.283.743</u>	<u>100.732.567</u>	Sub Total
Total	<u>2.967.230.609</u>	<u>1.956.027.037</u>	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK
LAINNYA (lanjutan)**

Utang dana talangan tanah adalah utang entitas anak kepada pemegang saham minoritas seperti kepada PT Waskita Toll Road, PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk keperluan pembebasan lahan (Catatan 44 dan 45c).

Utang lain-lain Area Pramuka Cibubur dan Taman Mini Indonesia Indah merupakan sumbangan Perusahaan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Taman Mini Indonesia Indah yang didasarkan pada Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1981 tentang penggunaan sebagian dari pendapatan tol pada pintu gerbang menuju/dari Taman Mini Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur. Namun, sejak tanggal 26 Januari 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2008 mengenai pencabutan Keputusan Presiden No.14 Tahun 1981.

22. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Beban kontraktor dan konsultan	14.508.722.858	2.724.772.635
Beban umum dan administrasi	892.355.401	180.118.537
Beban bunga		
Utang dana talangan tanah	293.510.591	51.803.849
Utang pembebasan tanah (BLU)	144.177.862	99.505.258
Utang obligasi	43.801.389	29.252.996
Utang bank sindikasi	22.459.972	18.317.703
Utang lembaga keuangan bukan bank	118.056	13.876.389
Utang bank		
PT Bank Central Asia Tbk	11.000.000	4.746.667
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.693.750	5.100.000
PT Bank ICBC Indonesia	-	1.733.333
Beban bagi hasil		
PT Bank Maybank Indonesia	7.644.444	358.333
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.296.667	592.708
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.298.611	-
Lain-lain	76.609.097	80.064.227
Total	16.011.688.698	3.210.242.635
Dikurangi bagian lancar	13.814.454.297	2.601.438.550
Bagian tidak lancar	2.197.234.401	608.804.085

**21. OTHER CURRENT FINANCIAL LIABILITIES
(continued)**

Bridging fund for land payable are the subsidiaries payable to the minority shareholders such as PT Waskita Toll Road, PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for land acquisition (Notes 44 and 45c).

Other payables Pramuka Cibubur Area and Taman Mini Indonesia Indah (TMII) represent the Company's contribution to Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Cibubur and TMII that is based on Presidential Decree No. 14 year 1981 regarding the use of a portion of toll revenue at the gateway to/from Taman Mini Indonesia Indah and Cibubur Scout Area Toll gates. However, on January 26, 2008, the Government issued Presidential Regulation No. 3 Year 2008 for the revocation of the Presidential Decree No. 14 year 1981.

22. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

Contractors and consultant expense
General and administrative expenses
Interest expenses
Bridging fund for land
Land acquisition liability (BLU)
Bonds payable
Syndicated bank loan
Non-bank financial institutions loan
Bank loans
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank ICBC Indonesia
Profit sharing expenses
PT Bank Maybank Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Others
Total
Net of current portion
Non - current portion

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK

Utang bank jangka pendek:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Pihak Berelasi (Catatan 44)	1.278.658.584	2.440.848.584	<i>Related Party (Note 44)</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Party</i>
PT Bank Central Asia Tbk	-	550.000.000	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank ICBC Indonesia	-	750.000.000	<i>PT Bank ICBC Indonesia</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	850.000.000	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
Sub total	-	2.150.000.000	<i>Sub total</i>
Total	1.278.658.584	4.590.848.584	Total

23. BANK LOANS

Short-term bank loans:

Utang bank jangka panjang:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun - Utang Bank Jangka Panjang			Current Maturities of Long-term Bank Loan
Pihak Berelasi (Catatan 44)	378.901.054	317.425.264	<i>Related Party (Note 44)</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Party</i>
PT Bank Central Asia Tbk	176.401.896	1.953.754	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank DKI	2.203.000	14.365.162	<i>PT Bank DKI</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	1.701.000	1.709.599	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.701.000	1.709.599	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	981.647	976.878	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Bali</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3.949.872	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah</i>
PT Bank DBS Indonesia	-	-	<i>PT Bank DBS Indonesia</i>
Sub total	182.988.544	24.664.864	<i>Sub total</i>
Biaya belum diamortisasi	(4.094.114)	-	<i>Unamortized Cost</i>
Total Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun - Utang Bank Jangka Panjang	557.795.484	342.090.128	Total Current Maturities of Long Term Bank Loans
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			Long-Term Portion - net off Current Maturities
Pihak Berelasi (Catatan 44)	13.332.773.791	9.242.332.923	<i>Related Party (Note 44)</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Party</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.400.000.000	-	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Maybank Indonesia Tbk	2.000.000.000	500.000.000	<i>PT Maybank Indonesia Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	1.256.467.558	297.179.875	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	564.131.246	194.473.739	<i>Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	429.338.076	301.781.828	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	471.857.354	302.874.602	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	239.967.881	182.306.029	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	187.929.028	207.902.850	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah</i>
PT Bank DKI	123.051.388	249.589.968	<i>PT Bank DKI</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	98.252.142	99.951.904	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk</i>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	69.072.281	69.790.976
PT Bank ICBC Indonesia	59.161.372	-
Subtotal	<u>7.899.228.324</u>	<u>2.405.851.771</u>
Biaya belum diamortisasi	<u>(71.635.750)</u>	<u>(50.800.243)</u>
Total Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>21.160.366.364</u>	<u>11.597.384.451</u>
Total Utang Bank Jangka Panjang	<u>21.718.161.848</u>	<u>11.939.474.579</u>

Persyaratan rasio keuangan Perusahaan berdasarkan perjanjian kredit masing-masing bank adalah Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) maksimal 5:1 dan *Interest Coverage Ratio (ICR)* minimal 1,25:1. Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan rasio keuangan.

Pinjaman pada PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 37 tanggal 25 Oktober 2005 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan proyek jalan tol JORR II (Seksi E1, E3) sebesar Rp350.000.000. Akta ini diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Investasi No. 53 tanggal 28 April 2006 untuk fasilitas kredit investasi sebesar Rp310.000.000 dan Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 28 April 2006 sebagaimana kemudian diubah dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 6 tanggal 10 Agustus 2006 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 29 Maret 2007 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 06 tanggal 6 Juni 2007 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.

Perusahaan memperoleh fasilitas time loan revolving sebesar Rp40.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun dan mendapat tambahan jumlah pokok fasilitas kredit sebesar Rp596.000.000. Sehingga tambahan jumlah fasilitas yang diterima Perusahaan menjadi sebesar Rp636.000.000.

23. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

Long-Term Portion - net off Current Maturities

PT Bank Pembangunan Daerah Bali
PT Bank ICBC Indonesia
Subtotal
Unamortized Cost

Long-Term Portion - net off Current Maturities

Total Long-term Bank Loans

The Company's financial ratios requirement based on each bank's credit agreement is a Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 5:1 and Interest Coverage Ratio (ICR) minimum of 1.25:1. As of Desember 31, 2017, the Company has complied with the financial ratios.

Loan from PT Bank Central Asia Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 37 dated October 25, 2005 of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company obtained loan facilities amounted to Rp350,000,000 for the purpose of financing JORR II toll road project (E1, E3 Section). The Deed was changed with the Deed of Credit Agreement No. 53 dated April 28, 2006 for the loan facilities amounted to Rp310,000,000, and on the Deed of Credit Agreement No. 54 dated April 28, 2006 as changed in Deed of Amendment to Working Capital Credit Agreement No. 6 dated August 10, 2006, Deed of Addendum to Credit Agreement No. 47 dated March 29, 2007 and Deed of Amendment to Credit Agreement No. 06 dated June 6, 2007 of Notary Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.

The Company obtained time loan revolving facility amounted to Rp40,000,000, for a period of 1 year and an additional credit facility amounted to Rp596,000,000. Therefore, total additional facilities obtained by the Company amounted to Rp636,000,000.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman pada PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Addendum No. 09 tanggal 2 Maret 2017 oleh Notaris Karin Christiana Basoeki, S.H., jangka waktu kredit diperpanjang dari tanggal 13 Agustus 2016 menjadi jatuh tempo pada tanggal 13 Agustus 2019. Utang bank diberikan secara *Negative Pledge*, sehingga debitur tidak menyerahkan jaminan/ agunan yang sifatnya preferen dan/atau terpisah baik kepada bank maupun kepada kreditur lainnya.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah :

- Interest Coverage Ratio* minimum 1,25 kali,
- Debt to equity ratio* maksimal 5 kali,

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dan memiliki saldo hutang pada fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp1.000.000.000.

Pinjaman pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 9 Agustus 2010, yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Addendum No.38 tanggal 13 Juni 2016 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Batas waktu jatuh tempo fasilitas kredit modal kerja tersebut diperpanjang menjadi tanggal 8 Agustus 2018. Utang bank diberikan secara *Negative Pledge*, sehingga debitur tidak menyerahkan jaminan/ agunan yang sifatnya preferen dan/atau terpisah baik kepada bank maupun kepada kreditur lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki saldo hutang fasilitas pinjaman sebesar Rp750.000.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No. 40 tanggal 13 Juni 2016, dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp1.400.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian atau maksimum 1 (satu) bulan setelah dana penerbitan obligasi diterima, mana yang terjadi lebih dahulu. Utang bank diberikan secara *Negative Pledge*, sehingga Perusahaan tidak diharuskan untuk menyerahkan jaminan/ agunan yang sifatnya preferen dan/atau terpisah baik kepada bank maupun kepada kreditur lainnya.

23. BANK LOANS (continued)

Loan from PT Bank Central Asia Tbk (continued)

Based on deed of Amendment No. 09 dated March 2, 2017 by Karin Christiana Basoeki, S.H., the maturity date of loan has been extended from August 13, 2016 to August 13, 2019. The bank loan is guaranteed with Negative Pledge, so that the Company is not required to submit a guarantee/collateral that are reserved and/or separated to the bank or other creditors.

The major covenant of this facility include the following:

- Minimum Interest Coverage is 1.25 times*
- Maximum debt to equity ratio is 5 times*

As of Desember 31, 2017, the Company has met the financial ratio requirements based on the agreement and has a total outstanding loan amounting to Rp1,000,000,000.

Loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 22 dated August 9, 2010 which was lastly amended by the Deed of Amendment to Credit Agreement No.38 dated June 13, 2016, of Notary Jr. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company has obtained loan facilities amounted to Rp1,000,000,000, for a period of 1 year. The maturity of this working capital credit facility has been extended to August 8, 2018. The bank loan is guaranteed with Negative Pledge, so that the Company is not required to submit guarantee/collateral that are reserved and/or separated either to the bank or other creditors.

As of Desember 31, 2017, the Company has a total outstanding loan amounting to Rp750,000,000.

Based on the Deed of Special Transaction Loan Agreement No. 40 dated June 13, 2016, of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company obtained loan facilities amounted to Rp1,400,000,000 for a period of 1 year from the date of signing the agreement or a maximum of 1 (one) month after the bond proceeds were received, whichever occurs first. The bank loan is guaranteed with Negative Pledge, so that the Company is not required to submit guarantee/collateral that are reserved and/or separated either to the bank or other creditors.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(lanjutan)**

Pada bulan Juni 2017, Perusahaan telah melunasi pinjaman fasilitas ini sebesar Rp1.400.000.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No. 125 tanggal 20 Juni 2017 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp3.000.000.000 untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Utang bank diberikan secara *Negative Pledge*, sehingga debitur tidak menyerahkan jaminan/ agunan yang sifatnya preferen dan/atau separatis baik kepada bank maupun kepada kreditur lainnya.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- Interest coverage ratio minimum 1,25 kali
- Debt to equity ratio maksimal 5 kali

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dan memiliki saldo hutang pada fasilitas pinjaman ini sebesar Rp2.400.000.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 40 tanggal 18 September 2015 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. dan terakhir kali diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit tanggal 12 September 2017, JPT, Entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp28.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2018. Pada tanggal 31 Desember 2017, JPT masih memiliki saldo hutang pada fasilitas pinjaman ini sebesar Rp28.000.000.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. B.217/KC-V/ADK/01/2013 tanggal 11 Januari 2013 dibuat dihadapan Notaris Imran Ilyas S. Guchita, S.H., JLP, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi dengan tujuan pembelian mesin AMP Almix Model ALB 1500 (120 TPH) beserta mesin-mesin sarana pendukung lainnya serta fasilitas bank garansi dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp21.000.000 dan Rp5.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2018 atau masa kredit selama 60 bulan, sementara fasilitas bank garansi akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan. Atas pinjaman ini, JLP dikenakan suku bunga sebesar 10% per tahun.

23. BANK LOANS (continued)

**Loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(lanjutan)**

In June 2017, the Company settled this all facility amounted to Rp1,400,000,000.

Based on the Deed of Special Transaction Loan Agreement No. 125 dated June 20, 2017 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company obtained loan facilities amounted to Rp3,000,000,000 for a period of 3 year from the date of signing the agreement. The bank loan is guaranteed with Negative Pledge, so that the Company does not need to submit guarantee/collateral that are reserved and/or separated either to the bank or other creditors.

The major covenant of this facility include the following:

- Minimum interest coverage is 1.25 times
- Maximum debt to equity ratio is 5 times

As of December 31, 2017, the Company has met the financial ratio requirements and has total loan facilities amounting to Rp2,400,000,000.

Based on loan agreement No. 40 dated September 18, 2015 of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. and last amended by a Credit Offer Letter dated September 12, 2017, JPT, a subsidiary, obtained a loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted Rp28,000,000 and due on August 8, 2018. As of December 31, 2017, JPT still has an outstanding balance on this loan facility amounting to Rp28,000,000.

Based on the Deed of Credit Agreement No. B.217/KC-V/ADK/01/2013 dated January 11, 2013 of Notary Imran Ilyas S. Guchita, S.H., JLP, a subsidiary, obtained loan facilities amounting to Rp21,000,000 and Rp5,000,000 for the purpose of financing AMP Almix Machine Model ALB 1500 (120 TPH) with other supporting machines which will due on January 18, 2018, or for 60 months, and for the purpose of bank guarantee which will due for 12 months, respectively. The loan bears interest at a rate of 10% per annum.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. B.217/KC-V/ADK/01/2013 tanggal 11 Januari 2013 dibuat dihadapan Notaris Imran Ilyas S. Guchita, S.H., JLP, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi dengan tujuan pembelian mesin AMP Almix Model ALB 1500 (120 TPH) beserta mesin-mesin sarana pendukung lainnya serta fasilitas bank garansi dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp21.000.000 dan Rp5.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2018 atau masa kredit selama 60 bulan, sementara fasilitas bank garansi akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan.

Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Waktu dan Membuka Tambahan Kredit yang dituangkan dalam akta notaris Imran Ilyas S. Guchita, S.H., No. 3 tanggal 4 Maret 2016, JLP memperoleh fasilitas pinjaman sebagai berikut :

- Kredit modal kerja konstruksi Plafond sebesar Rp50.000.000 dengan maksimum CO tetap.
- Fasilitas Penangguhan Jaminan Import sebesar Rp10.000.000.
- Fasilitas bank garansi sebesar Rp20.000.000

Atas fasilitas pinjaman ini JLP dikenakan suku bunga sebesar 11,50% per tahun dan dibayarkan setiap bulan dengan jaminan sebagai berikut:

- Mesin AMP dan mesin pendukung yang telah terikat secara fidusia sebesar Rp20.159.548;
- Sebidang tanah hak guna bangunan No. 404/ Cipayung berukuran 801m² yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung.

Pada tanggal 31 Desember 2017, JLP memiliki saldo hutang fasilitas pinjaman sebesar Rp1.731.083.

23. BANK LOANS (continued)

Loan from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. B.217/KC-V/ADK/01/2013 dated January 11, 2013 of Notary Imran Ilyas S. Guchita, S.H., JLP, a subsidiary, obtained loan facilities amounting to Rp21,000,000 and Rp5,000,000 for the purpose of financing AMP Almix Machine Model ALB 1500 (120 TPH) with other supporting machines which will due on January 18, 2018, or for 60 months, and for the purpose of bank guarantee which will due for 12 months, respectively.

Based on Perjanjian Perpanjangan Waktu dan Membuka Tambahan Kredit dated March 4, 2016 of Notary Imran Ilyas S. Guchita, S.H., JLP will obtain the following facilities:

- Construction working capital credit with plafond amounted to Rp50,000,000 with maximum fixed CO.
- Suspension of import guarantee facilities amounted to Rp10,000,000.
- Bank guarantee facilities amounted to Rp20,000,000.

These facilities bear interest rate of 11.50% per annum and should be paid monthly with the following guarantees:

- AMP machine and its supporting machines that has been bounded fiducially amounted to Rp20,159,548.
- A plot of land building rights No. 404/ Cipayung sized to 801m² located in Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung.

As of December 31, 2017, JLP has a total outstanding loan facility amounted to Rp1,731,083.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman pada PT Bank ICBC Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 51 tanggal 16 September 2016 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp1.000.000.000 dengan jangka waktu 1 (Satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Utang bank diberikan secara *Negative Pledge*, sehingga debitur tidak diharuskan untuk menyerahkan jaminan/agunan yang sifatnya preferen dan/atau terpisah baik kepada bank maupun kepada kreditur lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah melunasi pinjaman kredit tersebut.

Pinjaman pada PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 105/CB/JKT/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang sudah legalisasi oleh Notaris Karin Christiana Basoeki, S.H., dan Perubahan ke 1 dan pernyataan kembali pada tanggal 27 Desember 2016 yang sudah legalisasi oleh Notaris Engawati Gazali, S.H., Perusahaan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja – Musyarakah sebesar Rp1.000.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Fasilitas Pembiayaan diberikan secara *Negative Pledge*, sehingga Perusahaan tidak diharuskan untuk menyerahkan jaminan/agunan yang sifatnya preferen dan/atau terpisah baik kepada bank maupun kepada kreditur lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah melunasi pinjaman kredit modal kerja tersebut.

Berdasarkan Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 067/PPF/CB/JKT/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang sudah legalisasi oleh Notaris Engawati Gazali, S.H. Perseroan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja – Musyarakah sebesar Rp4.000.000.000 untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Fasilitas Pinjaman diberikan secara *Negative Pledge*, sehingga Perusahaan tidak diharuskan untuk menyerahkan jaminan/ agunan yang sifatnya preferen dan/atau separatis baik kepada bank maupun kepada kreditur lainnya.

23. BANK LOANS (continued)

Loan from PT Bank ICBC Indonesia

Based on the Deed of Credit Agreement No. 51 dated September 16, 2016, of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company obtained loan facilities amounted to Rp1,000,000,000 for a period of 1 year since the signing date. The bank loan is guaranteed with Negative Pledge, so that the Company does not require to submit guarantee/collateral that are reserved and/or to be separated either to the bank or other creditors.

As of December 31, 2017, the Company has paid all of this loan facility.

Loan from PT Bank CIMB Niaga Tbk

Based on Credit Agreement No. 105 / CB / JKT / 2016 dated October 19, 2016 which has been legalized by the Notary Karin Christiana Basoeki, S.H., and the amendment 1 and restatement on December 27, 2016 which has been legalized by Notary Engawati Gazali, S.H., the Company obtained Working Capital Financing Facility - Musharaka of Rp1,000,000,000 with terms of 1 year since the signing date.

The investment facilities is guaranteed with Negative Pledge, so that the Company is not need require to submit guarantee/collateral that are reserved and/or separated either to the Bank or other creditors.

As of December 31, 2017, the Company has paid all of the working capital loan facility.

Based on on First Amendment and Re-Statement of Credit Agreement 067/PPF/CB/JKT/2017 dated June 02, 2017 which has been legalized by Notary Engawati Gazali, S.H. The Company obtained Working Capital Financing Facility - Musharaka of Rp4,000,000,000 with terms of 2 year since the signing date. The investment facilities is guaranteed with Negative Pledge, so that the Company does not required to submit a guarantee/collateral that are reserved and/or separated to the bank or other creditors.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- a. Interest Coverage Ratio minimum 1,25 kali
- b. Debt to equity ratio maksimal 5 kali

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dan memiliki saldo hutang pada fasilitas pembiayaan ini sebesar Rp2.400.000.000.

Pinjaman pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Akad Line Fasilitas Pembiayaan Musyarakah No. 05 tanggal 7 Desember 2016 dari Notaris Bambang Sularso, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakah Line sebesar Rp2.000.000.000. Fasilitas ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan kewajiban pembiayaan lainnya ataupun obligasi, dengan jangka waktu selama 3 tahun. Tingkat bagi hasil yang ditawarkan setara dengan 8,6% per tahun. Fasilitas Investasi diberikan secara *Negative Pledge*, sehingga debitur tidak menyerahkan jaminan/ agunan yang sifatnya preferen dan/atau separatis baik kepada bank maupun kepada kreditur lainnya.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- a. Interest coverage ratio minimum 1,25 kali
- b. Debt to equity ratio maksimal 5 kali

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dan memiliki saldo hutang pada fasilitas pembiayaan ini sebesar Rp2.000.000.000.

23. BANK LOANS (continued)

Loan from PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

The major covenant of this facility include the following:

- a. Minimum Interest Coverage is 1.25 times*
- b. Maximum debt to equity ratio is 5 times*

As of December 31, 2017, the Company has met the financial ratio requirements and has an outstanding balance on this financing facility amounting to Rp2,400,000,000.

Loan from PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Based on Deed of Musharaka Financing Facility Agreement No. 05 dated December 7, 2016 of Notary Bambang Sularso, S.H., the Company obtained Musharaka Line Financing amounted to Rp2,000,000,000. The facilities can be used to finance the investment activities, including but not limited to the settlement of liabilities from the other facilities or bonds, and with terms of 3 years. The rate of return offered equals to 8.6% p.a. The investment facilities is guaranteed with Negative Pledge, so that the Company is not require to submit a guarantee/collateral that are reserved and/or separated to the bank or other creditors

The major covenant of this facility include the following:

- a. Minimum interest coverage is 1.25 times*
- b. Maximum debt to equity ratio is 5 times*

As of December 31, 2017, the Company has met the financial ratio requirements and has based outstanding balance on this financing facility amounting to Rp2,000,000,000.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 14 Maret 2017 dari Notaris Bambang Sularso, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.000.000.000 dengan jangka waktu 1 (Satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Utang bank diberikan secara *Negative Pledge*, sehingga Perusahaan tidak diharuskan untuk menyerahkan jaminan/agunan yang sifatnya preferen dan/ atau terpisah baik kepada bank maupun kepada kreditur lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan sudah tidak memiliki saldo hutang pada fasilitas pinjaman ini.

Pinjaman pada PT Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan Akta Perjanjian Akad Line Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Nomor 15 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. tanggal 12 Juni 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah sebesar Rp1.000.000.000. Fasilitas ini dapat digunakan untuk terkait modal kerja operasional perusahaan jangka waktu selama 1 tahun. Fasilitas Investasi diberikan secara *Negative Pledge*, sehingga Perusahaan tidak diharuskan untuk menyerahkan jaminan/ agunan yang sifatnya preferen dan/atau separatis baik kepada bank maupun kepada kreditur lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan masih memiliki saldo hutang pada fasilitas pembiayaan ini sebesar Rp500.000.000.

Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank

a. PT Marga Sarana Jabar (MSJ)

Pada tanggal 18 November 2009, MSJ mengadakan perjanjian kredit sindikasi antara MSJ dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 64 dibuat dihadapan notaris Imas Fatimah, S.H., dan yang kemudian terakhir kali diubah dengan Akta Addendum Ke III (Tiga) Perjanjian Kredit Sindikasi No. 39 tanggal 22 Januari 2014 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H.

23. BANK LOANS (continued)

Loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 15 dated March 14, 2017 of Notary Bambang Sularso, S.H., the Company obtained loan facilities amounted to Rp1,000,000,000 for a period of 1 year since the signing date. The bank loan is guaranteed with *Negative Pledge*, so that the Company is not require to submit guarantee/collateral that are reserved and/or separated either to the bank or other creditors. As of December 31, 2017, The Company has no outstanding debt on this loan facility.

Loan from PT Bank Syariah Mandiri

Based on Deed of Musharaka Financing Facility Agreement No. 15 by Ashoya Ratam, S.H., MKn dated June 12, 2017 the Company obtained Musharaka Line Financing amounted to Rp1,000,000,000. The facilities can be used to finance the Company's working capital. with terms of 1 years. The investment facilities is guaranteed with *Negative Pledge*, so that the Company is not require to submit a guarantee/collateral that are reserved and/or separated to the bank or other creditors.

As of December 31, 2017, the Company has an outstanding balance on this financing facility amounted to Rp500,000,000.

Syndicated Loan with several banks

a. PT Marga Sarana Jabar (MSJ)

On November 18, 2009, MSJ signed a syndicated loan agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk based on Notarial Deed of Syndicated Loan Agreement No. 64 of Notary Fatimah, S.H., which later amended by third addendum No. 39 dated January 22, 2014 of notary Fathiah Helmy, S.H.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

a. PT Marga Sarana Jabar (MSJ) (lanjutan)

Fasilitas kredit yang diterima MSJ adalah maksimum sebesar Rp1.053.447.000 terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp960.939.000 dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction*) sebesar Rp92.508.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2022. Pinjaman ini dikenakan suku bunga dengan menghitung rata-rata tertimbang ditambah margin 6 % per tahun. Jaminan pinjaman antara lain berupa hak perusahaan jalan tol dan seluruh tagihan serta pendapatan dari perusahaan jalan tol, termasuk pendapatan tol dan tagihan atas pendapatan usaha lain selama masa konsesi yang diikat secara fidusia.

Pada tanggal 22 Juli 2016, MSJ telah melakukan pelunasan Kredit Sindikasi sebesar Rp540.000.000 berdasarkan surat keterangan lunas dari Agen Fasilitas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2/SID.188/2016 tanggal 25 Juli 2016.

b. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM)

Pada tanggal 24 Januari 2007, JSM telah mengadakan perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Bukopin Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 33 yang kemudian terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan II atas Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi No. 01 tanggal 3 Desember 2015 dari notaris Rina Utami Djauhari, S.H. yang mana terdapat penambahan kreditur yaitu PT Bank Pembangunan Jawa Timur dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

23. BANK LOANS (continued)

Syndicated Loan with some banks (continued)

a. PT Marga Sarana Jabar (MSJ) (continued)

The maximum credit facility given amounted to Rp1,053,447,000 consists of Investment Loan Facility amounted to Rp960,939,000 and Interest During Construction Loan Facility amounted to Rp92,508,000 which will due on March 6, 2022. The loan bears interest rate equals to the average time deposits plus a margin of 6% per annum. Loan guarantees, among others, include concession rights and the entire billing and revenue from toll collection, including toll revenue and billing from other operating income during the concession period are pledged with fiduciary loan guarantee.

On July 22, 2016, MSJ had settled its syndicated loan which amounts Rp540,000,000 based on debt settlement letter from the facility agent of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2./SID.188/2016 dated July 25, 2016.

b. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM)

On January 24, 2007, JSM signed a syndicated loan agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Bukopin based on Notarial Deed of Syndicated Loan Agreement No. 33, which was amended by Notarial Deed of Amendment II Syndicated Loan Agreement No. 01 dated December 3, 2015 of Notary Rina Utami Djauhari, S.H. This amendment added another two creditors, PT Bank Pembangunan Jawa Timur and PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

**b. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM)
(lanjutan)**

Maksimum fasilitas kredit yang diterima JSM adalah sebesar Rp2.652.845.000 terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp2.304.104.000 dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (Interest During Construction) sebesar Rp348.741.000 dengan jangka waktu kredit sejak tanggal efektif perjanjian sampai dengan tanggal 23 Desember 2026. Atas pinjaman ini JSM dikenakan suku bunga secara *Weighted Average* yang akan diperhitungkan oleh Agen Fasilitas yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan ketentuan Suku Bunga yang disepakati dan diberlakukan kepada para Kreditur.

Berdasarkan Surat No. SDK/3/420 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 16 November 2016, PT Bank Bukopin Tbk mengundurkan diri sebagai kreditur dalam kredit sindikasi dan porsinya digantikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tanggal 9 Oktober 2017 telah diperbaharui kembali dengan Akta Notaris No. 01 oleh Rina Utami Djauhari S.H., dengan jumlah fasilitas kredit, maksimum sebesar Rp3.486.403.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp3.093.353.000 dan Fasilitas IDC sebesar Rp393.050.000 dengan jangka waktu kredit yang telah diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Desember 2028.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- a. Debt to equity ratio maksimal 2,2 kali
- b. Current ratio minimal 1 kali

Jaminan pinjaman antara lain berupa tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan usaha lain yang diikat secara fidusia. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.016.306.029 dan biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp9.298.242.

23. BANK LOANS (continued)

Syndicated Loan with some banks (continued)

**b. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM)
(continued)**

The maximum credit facility amounted to Rp2,652,845,000, consists of Investment Loan Facility amounting to Rp2,304,104,000 and Interest During Construction Loan amounting to Rp348,741,000 that effective from the date of agreement until December 23, 2026. The loan bears Weighted Average Interest Rate determined by the Facility Agent of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, whereby referred to the agreed interest rate and charged to the creditors.

Based on Letter No. SDK/3/420 from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dated November 16, 2016, PT Bank Bukopin Tbk has retired its portion in the syndicated loan and has been replaced with PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

On October 9, 2017 has been renewed by Notarial Deed No. 01 by Rina Utami Djauhari S.H., with total credit facility amounting to Rp3,486,403,000 consisting of Investment Credit Facility amounting to Rp3,093,353,000 and IDC Facility amounting to Rp393,050,000 with loan period extended to December 23, 2028.

The major covenant of this facility include the following:

- a. Maximum debt to equity ratio is 2.2 times*
- b. Minimum current ratio is 1 time*

Loan guarantees, among others, include claims on toll revenues and other operating income are pledged with fiduciary loan guarantee. Loan payable balance for this credit facility as of December 31, 2017 amounted to Rp3,016,306,029 and unamortized issuance cost amounted to Rp9,298,242.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

c. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 13 tanggal 13 Oktober 2011, MLJ menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank DKI untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Lingkarluar Jakarta Seksi W2 Utara.

Maksimum kredit yang tersedia adalah sebesar Rp1.554.000.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp1.386.000.000 dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction*) sebesar Rp168.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun sejak ditandatanganinya akta perjanjian kredit.

Tingkat suku bunga untuk 1 tahun pertama adalah 10%, untuk selanjutnya menggunakan tingkat suku bunga *rata-rata deposito* untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi yang dimuat di media massa ditambah margin 4%. Jaminan yang diberikan berupa tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya yang diikat secara fidusia.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- a. Debt to equity ratio maksimal 2,3 kali
- b. Debt service coverage ratio minimal 1 kali

Pada tanggal 31 Desember 2017, MLJ sudah tidak memiliki saldo hutang pada fasilitas pinjaman ini.

23. BANK LOANS (continued)

**Syndicated Loan with several banks
(continued)**

c. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)

On October 13, 2011, MLJ signed a Syndicated Loan Agreement No. 13 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank DKI for financing toll road project of JORR North W2.

The maximum credit facility given amounted to Rp1,554,000,000, which consists of Investment Loan Facility amounting to Rp1,386,000,000 and Interest During Construction Loan Facility amounting to Rp168,000,000. Loan facility period is 15 years since the signing date of the loan agreement.

The loans bear an interest rate of 10% for the first year, and the average of 3-month time deposit rate published by syndicated banks plus a margin of 4% per annum for the following years. Loan guarantees including claims on toll revenues and other operating income are pledged with fiduciary loan guarantee.

The covenants of this facility include the following:

- a. Maximum debt to equity ratio is 2.3 times
- b. Minimum debt service coverage ratio is 1 time

As of December 31, 2017, MLJ has no outstanding debt on this loan facility.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

d. PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 22 Juni 2012, JBT telah memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) Sindikasi Pembiayaan Proyek Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang kemudian terakhir kali diubah dengan Akta Addendum III Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 12 Januari 2017 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Maksimum fasilitas kredit sebesar Rp1.739.300.000 yang terdiri dari kredit investasi sebesar Rp1.622.000.000 dan fasilitas bunga masa konstruksi sebesar Rp117.300.000. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun sejak ditandatanganinya akta. Tingkat suku bunga untuk 1 tahun pertama adalah 10%, untuk selanjutnya menggunakan tingkat suku bunga *Simple Interest Rate* ditambah margin sebesar 5% dan telah berubah menjadi 4% untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan Akta Addendum III Perjanjian Kredit. Jaminan yang diberikan berupa hak konsesi, pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya yang diikat secara fidusia.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- Debt to equity ratio* maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
- Debt service coverage ratio* minimal lebih dari 1 kali

Pada tanggal 31 Desember 2017, JBT tidak dapat memenuhi salah satu pembatasan rasio keuangan, akan tetapi JBT telah mendapatkan surat *waiver* dari para kreditur pada tanggal 29 Desember 2017.

Selama tahun 2017, JBT telah melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp8.536.897.

23. BANK LOANS (continued)

Syndicated Loan with several banks (continued)

d. PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

Based on deed of Syndicated Loan Agreement No. 79 dated June 22, 2012 with PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Bali, JBT obtained investment loan for financing project Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa toll road. The last amended deed were Addendum III Credit Agreement No. 3 on January 12, 2017 of Notary Fathiah Helmi, S.H.

The maximum credit facility amounted to Rp1,739,300,000 consist of investment credit amounted Rp1,622,000,000 and Interest During Construction facility amounted to Rp117,300,000. Loan facility period is 15 years from the signing date of the loan agreement. The loan bears interest rate of 10% for the first year, and at the *Simple Interest Rate* plus a margin of 5% and has changed to 4% for the following years based on Addendum III Credit Agreement. Loan guarantees including concession rights, claims on toll revenues and other operating income are pledged with fiduciary loan guarantee.

The covenants of this facility include the following:

- Maximum debt to equity ratio is 70:30 between creditors and debtors
- Minimum Debt service coverage ratio is more than 1 time

As of December 31, 2017, JBT has not complied with one of the financial covenant, however JBT has received *waiver* statement from the creditors on December 29, 2017.

During 2017, JBT has paid the loan principal amounting to Rp8,536,897.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

d. PT Jasamarga Bali Tol (JBT) (lanjutan)

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.218.447.969 dan biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp2.300.551.

Pada tanggal 7 Juni 2016, JBT telah menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) No. 15 dengan pagu kredit sebesar Rp45.000.000 dan bunga sebesar 10,5% per tahun dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung tanggal sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 sesuai dengan Akta Addendum I Perjanjian KMK No. 17 tanggal 2 Juni 2017.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, JBT masih memiliki saldo utang KMK adalah sebesar Rp7.900.000.

e. PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 38 tanggal 12 Juni 2012, JPT menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan yang terakhir kali diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Kredit Sindikasi No. 35 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H.

Kemudian pada tanggal 14 September 2015 JPT mengadakan perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk pembiayaan tambahan biaya proyek pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan (Tranche IA).

23. BANK LOANS (continued)

Syndicated Loan with several banks (continued)

d. PT Jasamarga Bali Tol (JBT) (continued)

The outstanding balance on this credit facility as of December 31, 2017 is amounted to Rp1,218,447,969 and unamortized issuance cost amounted to Rp2.300.551.

On June 7, 2016, JBT signed a Working Capital Credit (WCC) Agreement No. 15 with maximum amount of Rp45,000,000 and interest rate of 10.5% per annum with loan period of 1 year from June 7, 2016 until June 7, 2017 and has been extended until August 8, 2018 based on Addendum I WCC Agreement No. 17 dated June 2, 2017.

As of December 31, 2017, JBT still has an outstanding balance on the WCC loan facility amounting to Rp7,900,000.

e. PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)

On June 12, 2012, JPT signed a Syndicated Loan Agreement No. 38 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk for financing project Gempol-Pandaan toll road. The last amended deed was addendum deed syndication loan No. 35 dated September 14, 2015 of Notary Nanette C.H. Adi Warsito, S.H.

On September 14, 2015 JPT had signed syndicated loan agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur for additional financing Gempol-Pandaan toll road project (Tranche IA).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

e. PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) (lanjutan)

Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp817.000.000 termasuk Fasilitas IDC sebesar Rp84.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun sejak ditandatanganinya akta. Tingkat suku bunga untuk 1 tahun pertama adalah 10,50%, untuk selanjutnya menggunakan tingkat suku bunga *Simple Interest Rate* ditambah margin 5,25% per tahun, sedangkan maksimal fasilitas kredit sindikasi Tranche IA adalah sebesar Rp126.290.000 termasuk IDC sebesar Rp7.000.000.

Tingkat suku bunga yang dikenakan sebesar rata-rata deposito berjangka 3 bulanan para kreditur yang dipublikasikan dalam harian *Bisnis Indonesia* ditambah margin sebesar 5% per tahun. Jaminan yang diberikan berupa tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya yang diikat secara fidusia.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- a. Debt to equity ratio maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
- b. Debt service coverage ratio minimal 1 kali

Berdasarkan perjanjian kredit modal kerja No. 40 tanggal 18 September 2015 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan modal kerja, dan sesuai surat no WBG.CB2/STR.SPPK.040/2017 tanggal 12 September 2017 JPT mendapatkan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp28.000.000 dengan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018. Tingkat suku bunga adalah 9% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2017, JPT telah memenuhi semua pembatasan rasio keuangan.

Saldo pinjaman sindikasi dan kredit modal kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp795.664.560 dan biaya penerbitan belum diamortisasi sebesar Rp2.615.443.

23. BANK LOANS (continued)

Syndicated Loan with several banks (continued)

**e. PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)
(continued)**

The maximum credit facility amounted to Rp817,000,000 which includes Interest During Construction Loan Facility amounting to Rp84,000,000. Loan facility period is 15 years from the signing date of the loan agreement. The loan bears interest rate of 10.50% for the first year, and Simple Interest Rate plus a margin of 5.25% per annum for the following years, the maximum credit facility for Tranche IA is Rp126,290,000 includes IDC amounting Rp7,000,000.

Interest rate charged based on three months average time deposit plus margin 5% per annum. Loan guarantees including claims on toll revenues and other operating income are pledged with fiduciary loan guarantee.

The covenants of this facility include the following:

- a. Maximum debt to equity ratio is 70:30 between creditors and debtors
- b. Minimum debt service coverage ratio is 1 time

Based on the working capital credit agreement No. 40 dated September 18, 2015, and the letter no. WBG.CB2/STR.SPPK.040/2017 dated September 12, 2017 from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, JPT obtained working capital credit facility with Maximum credit facility is Rp28,000,000 with time period credit facilities up to August 8, 2018. The interest rate is 9% per annum.

As of December 31, 2017, JPT has comply with all of financial covenant.

The outstanding balance on these credit facilities as of December 31, 2017 amounted to Rp795,664,560 and unamortized issuance cost amounted to Rp2,615,443.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

f. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 22 tanggal 9 Agustus 2010 dari notaris Fathiah Helmi, S.H., TJP menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan. Perjanjian telah diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian No.44 tanggal 15 April 2015 dari notaris Fathiah Helmi, S.H.

Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp1.937.600.000. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun sampai dengan tanggal 30 Juni 2027. Tingkat suku bunga menggunakan tingkat suku bunga rata-rata deposito berjangka untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi yang dimuat di media massa ditambah margin 5,25% selama masa konstruksi dan marjin sebesar 5,00% sejak tanggal pengoperasian.

TJP telah melakukan pelunasan atas utang kredit sindikasi sebesar Rp534,189,089 berdasarkan surat keterangan lunas dari Agen Fasilitas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. nomor B.1668-DIS/TCS/11/2016 tanggal 24 November 2016.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 44 tanggal 25 Agustus 2017 dari notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, TJP menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan.

Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp2.821.786.000 (termasuk fasilitas IDC Rp246.745.878). Jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun sejak ditandatanganinya akta. Tingkat suku bunga menggunakan tingkat suku bunga rata-rata deposito berjangka untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi yang dimuat di media massa ditambah margin ditambah margin 4,50% selama masa konstruksi dan margin 4,25% pada masa operasional.

23. BANK LOANS (continued)

Syndicated Loan with several banks (continued)

f. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)

Based on the Deed of Syndicated Loan Agreement No. 22 dated August 9, 2010 of notary Fathiah Helmi, S.H., TJP signed a syndicated loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk for financing Gempol-Pasuruan toll road project. This agreement is notarized by Notary. The agreement has been amended lastly by The Deed of Agreement No. 44 dated April 15, 2015 of notary Fathiah Helmi, S.H.

The maximum credit facility given amounted to Rp1,937,600,000. Loan facility period is 15 years up to June 30, 2027. The loan bears interest rate of the average of 3-month time deposit rate published by syndicated banks plus a margin of 5.25% for construction period and margin 5.00% for operational period.

TJP had settled its syndicated loan payable amounted Rp534,189,089 based on the debt settlement letter from facility agent PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. number B.1668-DIS/TCS/11/2016 dated November 24, 2016.

Based on the Deed of Syndicated Loan Agreement No. 44 dated August 25, 2017, TJP signed syndicated loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk for financing Gempol-Pasuruan toll road project.

The maximum credit facility given amounted to Rp2,821,786,000 (including Interest During Construction Loan Facility amounting to Rp246,745,878). Loan facility period is 15 years from the signing date of the loan agreement. The loan bears interest rate of the average of 3-month time deposit rate published by syndicated banks plus a margin of margin of 4.50% for construction period and margin 4.25% for operational period.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

**f. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)
(lanjutan)**

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- a. Debt to equity ratio maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan TJP
- b. Debt service coverage ratio minimal 1 kali sejak tahun keempat setelah tanggal pengoperasian
- b. Current ratio minimal 1 kali selama masa pengoperasian

Pada tanggal 31 Desember 2017, TJP telah memenuhi semua pembatasan rasio keuangan serta saldo pinjaman adalah sebesar Rp1.065.451.487 dan biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp4.630.662.

g. PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 33 tanggal 14 Juli 2015, JMKT menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

Maksimum fasilitas kredit yang disediakan sebesar Rp2.850.000.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp2.638.395.000 dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction*) sebesar Rp211.605.000 dengan jangka waktu kredit maksimum 15 tahun sampai dengan tanggal 14 Juli 2030. Tingkat suku bunga menggunakan rata-rata deposito berjangka untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi ditambah margin 3,25% selama masa konstruksi dan 3,00% sejak tanggal pengoperasian.

Perjanjian tersebut dijamin dengan segala harta kekayaan JMKT, baik yang bergerak dan tidak bergerak, akta pengalihan pengelolaan hak konsesi jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari pengoperasian jalan tol dan pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari Pemerintah.

23. BANK LOANS (continued)

Syndicated Loan with several banks (continued)

**f. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)
(continued)**

The major covenant of this facility include the following:

- a. Maximum debt to equity ratio is 70:30 between creditors and debtor
- b. Minimum Debt service coverage ratio is more than 1 time since four years after operational date.
- c. Minimum Current ratio is 1 time since operational period.

As of Desember 31, 2017, TJP has comply with all of financial covenants and the outstanding balance for this credit facility amounted to Rp1,065,451,487 and unamortized transaction cost amounted to Rp4,630,662.

g. PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT)

On July 14, 2015, JMKT signed a Syndicated Loan Agreement No. 33 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk for financing project Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi toll road.

The maximum credit facility amounted to Rp2,850,000,000 which consists of Investment Loan Facility amounting to Rp2,638,395,000 and Interest During Construction Loan Facility amounting to Rp211,605,000 with a maximum loan period of 15 years up to July 14, 2030. The loan bears interest at average of 3-month time deposit rate published by syndicated banks plus a margin of 3.25% during construction time and 3.00% from the date of toll operation period.

The agreement is pledged by all movable and immovable JMKT assets, deed of transfer to manage Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi toll road concession rights, all invoices and operating revenues from toll road operations and revenues from insurance claims, bank guarantee and reimbursement of funds from the Government.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank (lanjutan)

g. PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT) (lanjutan)

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- Debt to equity ratio maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
- Debt service coverage ratio minimal lebih dari 1 kali
- Menjaga ekuitas JMKT selalu positif

Saldo fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.883.316.651 dan biaya penerbitan belum diamortisasi sebesar Rp8.924.361.

Pada tanggal 31 Desember 2017, JMKT tidak dapat memenuhi salah satu pembatasan rasio keuangan, akan tetapi JMKT telah mendapatkan surat waiver dari para kreditur pada tanggal 29 Desember 2017.

h. PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 7 tanggal 14 April 2016 dari Notaris Ati Mulyati, S.H.M.Kn., SNJ, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Solo-Mantingan-Ngawi.

Maksimum fasilitas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp4.370.220.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp3.839.127.000 dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (Interest During Construction) sebesar Rp531.093.000.

Jangka waktu kredit sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 14 April 2031. Tingkat suku bunga menggunakan rata-rata deposito berjangka untuk jangka waktu 3 bulan ditambah margin 4,75% per tahun selama masa konstruksi dan 4,50% per tahun sejak tanggal pengoperasian. Jaminan pinjaman berupa hak konsesi perusahaan jalan tol, pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya selama masa konsesi.

23. BANK LOANS (continued)

Syndicated Loan with several banks (continued)

g. PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT) (continued)

The covenants of this facility include the following:

- Maximum debt to equity ratio is 70:30 between creditors and debtors*
- Minimum debt service coverage ratio is more than 1 time*
- Maintain the JMKT's equity to continuously positive*

The outstanding balance on this credit facility as of December 31, 2017 is amounted to Rp1,883,316,651 and unamortized issuance cost amounted to Rp8,924,361.

As of December 31, 2017, JMKT has not complied with one of the financial covenant, however JMKT has received waiver statement from creditors on December 29, 2017.

h. PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)

Based on the Deed of Syndicated Loan Agreement No.7 dated April 14, 2016 of Notary Ati Mulyati, S.H.M.Kn., SNJ, a subsidiary, signed syndicated loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta for financing Solo-Mantingan-Ngawi toll road project.

The maximum credit facility amounted to Rp4,370,220,000 which consists of Investment Loan Facility amounting to Rp3,839,127,000 and Interest During Construction Loan Facility amounting to Rp531,093,000.

The loan facility period is from the signing date of the loan agreement until April 14, 2031. The loan bears interest at the average of 3-month time deposit rate as published by syndicated banks plus a margin of 4.75% per annum during construction time and 4.50% per annum from the date of toll operation period. Loan guarantees are the concession rights, toll revenues and other operating income during the concession period.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

h. PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) (lanjutan)

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- a. Debt to equity ratio maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
- b. Debt service coverage ratio minimal 1 kali
- c. Current ratio minimal 1 kali

Saldo fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.609.726.423 dan biaya penerbitan belum diamortisasi sebesar Rp25.247.975.

Pada tanggal 31 Desember 2017, SNJ telah memenuhi semua pembatasan rasio keuangan.

i. PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 14 tanggal 14 April 2016 dari Notaris Ati Mulyati, S.H.M.Kn., NKJ, entitas anak, menanda-tangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pembiayaan proyek pembangunan ruas jalan tol Ngawi-Kertosono.

Maksimum fasilitas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp3.369.158.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp2.950.107.000 dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction*) sebesar Rp419.051.000.

Jangka waktu kredit sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 14 April 2031. Tingkat suku bunga menggunakan rata-rata deposito berjangka untuk jangka waktu 3 bulan ditambah margin 4,75% per tahun selama masa konstruksi dan 4,50% per tahun sejak tanggal pengoperasian. Jaminan pinjaman berupa hak konsesi perusahaan jalan tol, pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya selama masa konsesi.

23. BANK LOANS (continued)

Syndicated Loan with some banks (continued)

h. PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) (continued)

The covenants of this facility include the following:

- a. Maximum debt to equity ratio is 70:30 between creditors and debtors
- b. Minimum debt service coverage ratio is 1 time
- c. Minimum current ratio is 1 time

The outstanding balance on this credit facility as of December 31, 2017 is amounted to Rp2,609,726,423 and unamortized issuance cost amounted to Rp25,247,975.

As of December 31, 2017, SNJ has complied with all of financial covenant.

i. PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)

Based on the Deed of Syndicated Loan Agreement No. 14 dated April 14, 2016 of Notary Ati Mulyati, S.H.M.Kn., NKJ, a subsidiary, signed syndicated loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah and PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta for financing Ngawi-Kertosono toll road project.

The maximum credit facility amounting to Rp3,369,158,000 which consists of Investment Loan Facility amounting to Rp2,950,107,000 and Interest During Construction Loan Facility amounting to Rp419,051,000.

The loan facility period is from the signing date of the loan agreement until April 14, 2031. The loan bears interest at the average of 3-month time deposit rate published by syndicated banks plus a margin of 4.75% per annum during construction time and 4.50% per annum from the date of toll operation period. Loan guarantees are the concession rights, toll revenues and other operating income during the concession period.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

i. PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ) (lanjutan)

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- a. Debt to equity ratio maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
- b. Debt service coverage ratio minimal 1 kali
- c. Current ratio minimal 1 kali

Saldo terutang fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.689.782.387 dan biaya penerbitan belum diamortisasi sebesar Rp16.337.301.

Pada tanggal 31 Desember 2017, NKJ telah memenuhi semua pembatasan rasio keuangan.

j. PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 01 tanggal 3 November 2016 dari Notaris Ati Mulyati, S.H.M.Kn., JPM, entitas anak, menanda-tangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Central Asia Tbk. Maksimum fasilitas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp1.350.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan sebagian dana talangan tanah jalan tol Pandaan – Malang termasuk untuk pelunasan pinjaman pemegang saham. Jangka waktu kredit 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 3 November 2018. Tingkat suku bunga sebesar 9% per tahun.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah *debt to equity ratio* maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur.

Saldo terutang fasilitas kredit pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp523.315.804 dan biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp4.094.114.

Selama tahun 2017, JPM telah melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp826.364.823.

23. BANK LOANS (continued)

Syndicated Loan with several banks (continued)

i. PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ) (continued)

The covenants of this facility include the following:

- a. Maximum debt to equity ratio is 70:30 between creditors and debtor
- b. Minimum debt service coverage ratio is 1 time
- c. Minimum current ratio is 1 time

The outstanding balance on this credit facility as of December 31, 2017 is amounted to Rp1,689,782,387 and unamortized issuance cost amounted to Rp16,337,301.

As of December 31, 2017, NKJ has complied with all of financial covenant.

j. PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)

Based on the Deed of a Syndicated Loan Agreement No. 01 date November 3, 2016 by notary Ati Mulyati, S.H.M.Kn., JPM, a subsidiary, signed syndicated loan agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Central Asia Tbk. The maximum credit facility given is amounting to Rp1,350,000,000 used to finance part of bridging fund for acquisition of land Pandaan – Malang toll road include repayment of shareholder's loan. The loan facility is valid 24 months from the signing date of the loan agreement until November 03, 2018. The loan bears interest at 9% per year.

The covenants of this facility include maximum debt to equity ratio is 70:30 between creditors and debtors.

The outstanding balance on this credit facility as of December 31, 2017 is amounted to Rp523,315,804 and unamortized issuance cost is amounted to Rp4,094,114.

During 2017, JPM has made the principal payment amounting to Rp826,364,823.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

**j. PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)
(lanjutan)**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 15 tanggal 13 Oktober 2017, JPM menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Pandaan-Malang.

Maksimum fasilitas kredit yang disediakan sebesar Rp4.179.000.000. yang terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp3.738.357.000 dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction*) sebesar Rp440.643.000 dengan jangka waktu kredit maksimum 15 tahun sampai dengan tanggal 13 Oktober 2032. Tingkat suku bunga menggunakan rata-rata deposito berjangka untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi ditambah margin 4,50% selama masa konstruksi dan 4,25% sejak tanggal pengoperasian.

Perjanjian tersebut dijamin dengan segala harta kekayaan JPM, baik yang bergerak dan tidak bergerak, akta pengalihan pengelolaan hak konsesi jalan tol Pandaan-Malang, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari pengoperasian jalan tol dan pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari Pemerintah.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- a. Debt to equity ratio maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
- b. Debt service coverage ratio minimal lebih dari 1 kali
- c. Menjaga ekuitas JPM selalu positif

Saldo terutang fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp494.471.715 dan biaya penerbitan belum diamortisasi sebesar Rp4.915.378.

23. BANK LOANS (continued)

Syndicated Loan with several banks (continued)

**j. PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)
(continued)**

Based on the Deed of Credit Agreement No. 15 dated October 13, 2017, JPM, a subsidiary, signed syndicated loan agreement with PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah to finance the construction of Pandaan – Malang toll.

The maximum credit facility amounted to Rp4,179,000,000 which consists of Investment Loan Facility amounting to Rp3,738,357,000 and Interest During Construction Loan Facility amounting to Rp440,643,000 with a maximum loan period of 15 years up to October 13, 2032. The loan bears interest at average of 3-month time deposit rate published by syndicated banks plus a margin of 4.5% during construction time and 4.25% from the date of toll operation period.

The agreement is pledged by all movable and immovable JPM's assets, deed of transfer to manage Pandaan-Malang toll road concession rights, all invoices and operating revenues from toll road operations and revenues from insurance claims, bank guarantee and reimbursement of funds from the Government.

The covenants of this facility include the following:

- a. Maximum debt to equity ratio is 70:30 between creditors and debtors
- b. Minimum debt service coverage ratio is more than 1 time
- c. Maintain the JMKT's equity to continuously positive

The outstanding balance on this credit facility as of December 31, 2017 is amounted to Rp494,471,715 and unamortized issuance cost amounted to Rp4,915,378.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. Utang Bank (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

k. PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 29 Maret 2017 dari Notaris Ati Mulyati, S.H.M.Kn., JSB, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk. Maksimum fasilitas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp1.870.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan sebagian dana talangan tanah jalan tol Semarang – Batang termasuk untuk pelunasan pinjaman pemegang saham. Jangka waktu kredit adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan tanggal 28 Maret 2019. Tingkat suku bunga sebesar 9% per tahun.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah *debt to equity ratio* maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur dan leverage ratio maksimal 400%.

Pada tanggal 31 Desember 2017, JSB telah memenuhi semua persyaratan rasio keuangan

Saldo fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp766.673.001 dan biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp2.981.154.

Selama tahun 2017, JSB telah melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp669.949.066.

l. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 20 Januari 2017 dari Notaris Ati Mulyati, S.H.M.Kn., JBS, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Maksimum fasilitas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp250.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan dana talangan tanah jalan tol Balikpapan – Samarinda. Jangka waktu kredit 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan tanggal 19 Januari 2019. Tingkat suku bunga sebesar 9% per tahun.

23. Bank Loans (continued)

Syndicated Loan with several banks (continued)

k. PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)

Based on the Deed of Credit Agreement No. 13 dated March 29, 2017 by Notary Ati Mulyati, S.H.M.Kn., JSB, a subsidiary, signed credit agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, and PT Bank Central Asia (Persero). The maximum credit facility given is amounting to Rp1,870,000,000 which is used to finance part of bridging fund for land acquisition of Semarang - Batang toll road include repayment of shareholder's loan. Loan facility period is 24 months since the date of signing the agreement until March 28, 2019. The loan bears interest rate is 9% per year

The covenants of this facility include maximum debt to equity ratio is 70:30 between creditors and debtors.

As of December 31, 2017, JSB has complied with the financial ratio.

The outstanding balance on this credit facility as of of December 31, 2017 is amounted to Rp766,673,001 and the unamortized issuance cost amounted to Rp2,981,154

During 2017, JSB has made the principal payment amounting to Rp669,949,066.

l. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS)

Based on the Deed of Credit Agreement No. 13 dated January 20, 2017 of Notary Ati Mulyati, S.H.M.Kn., JBS, a subsidiary, signed credit agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,. The maximum credit facility given is amounting to Rp250,000,000 and used to finance bridging fund for land acquisition of Balikpapan – Samarinda toll road. Loan facility period is 24 months since the date of signing the agreement until January 19, 2019. The loan bears interest rate at 9% per annum.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**I. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS)
(lanjutan)**

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah *debt to equity ratio* maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur.

Saldo terutang fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp266.487.502 dan biaya penerbitan belum diamortisasi sebesar Rp423.541.

Pada tanggal 31 Desember 2017, JBS telah memenuhi semua persyaratan rasio keuangan.

m. PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 20 Januari 2017 dari Notaris Ati Mulyati, S.H.M.Kn., JMB, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Maksimum fasilitas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp816.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan dana talangan tanah jalan tol Manado - Bitung. Jangka waktu kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan tanggal 19 Januari 2019. Tingkat suku bunga sebesar 9% per tahun.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah *debt to equity ratio* maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 23 tanggal 13 Oktober 2017, JMB menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung.

23. BANK LOANS (continued)

**I. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS)
(continued)**

The covenants of this facility include maximum debt to equity ratio is 70:30 between creditors and debtor.

The outstanding balance on this credit facility as of of December 31, 2017 is amounted to Rp266,487,502 and unamortized issuance cost amunted to Rp423,541.

As of December 31, 2017, JBS has complied with the financial ratio.

m. PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)

Based on the Deed of Credit Agreement No. 10 dated January 20, 2017 of Notary Ati Mulyati, S.H.M.Kn., JMB, a subsidiary, signed credit agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The maximum credit facility given is amounting to Rp816,000,000 and used to finance bridging fund for land acquisition of Manado - Bitung toll road. Loan facility period is 24 months since the date of signing the agreement until January 19, 2019. The loan bears interest rate is 9% per annum.

The covenants of this facility include maximum debt to equity ratio is 70:30 between creditors and debtor.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 23 dated October 13, 2017 of Notary Ati Mulyati, S.H.M.Kn., JMB, a subsidiary, signed syndicated credit agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat and used to finance bridging fund for land acquisition of Manado - Bitung toll road.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. UTANG BANK (lanjutan)

**m. PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)
(lanjutan)**

Maksimum fasilitas kredit yang disediakan sebesar Rp3.586.296.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp3.270.504.000 dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction*) sebesar Rp315.792.000 dengan jangka waktu kredit maksimum 15 tahun sampai dengan tanggal 13 Oktober 2032. Tingkat suku bunga menggunakan *Average Time Deposit* untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi ditambah margin 4,50% selama masa konstruksi dan 4,25% sejak tanggal pengoperasian.

Perjanjian tersebut dijamin dengan segala harta kekayaan JMB, baik yang bergerak dan tidak bergerak, akta pengalihan pengelolaan hak konsesi jalan tol Manado-Bitung, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari pengoperasian jalan tol dan pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari Pemerintah.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- Debt to equity ratio maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
- Debt service coverage ratio minimal lebih dari 1 kali
- Menjaga ekuitas JMB selalu positif

Saldo terutang fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp422.290.290.

24. UTANG LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

**Pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero) (SMI)**

Berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 19 Juni 2015 dari Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Addendum No.190 tanggal 13 Juni 2016 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp750.000.000 dari SMI. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah menarik seluruh fasilitas pinjaman sebesar Rp500.000.000.

23. BANK LOANS (continued)

**m. PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)
(continued)**

The maximum credit facility amounted to Rp3,586,296,000 which consists of Investment Loan Facility amounting to Rp3,270,504,000 and Interest During Construction Loan Facility amounting to Rp315,792,000 with a maximum loan period of 15 years up to October 13, 2032. The loan bears interest at average of 3-month time deposit rate published by syndicated banks plus a margin of 4.5% during construction time and 4.25% from the date of toll operation period.

The agreement is pledged by all movable and immovable JMB's assets, deed of transfer to manage Manado-Bitung toll road concession rights, all invoices and operating revenues from toll road operations and revenues from insurance claims, bank guarantee and reimbursement of funds from the Government..

The covenants of this facility include the following:

- Maximum debt to equity ratio is 70:30 between creditors and debtors
- Minimum debt service coverage ratio is more than 1 time
- Maintain the JMB's equity to continuously positive

The outstanding balance on this credit facility as of December 31, 2017 is amounted to Rp422,290,290.

24. NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS LOAN

**Loan from PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero) (SMI)**

Based on Notarial Deed No. 44 dated June 19, 2015 of Notary Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., which was lastly amended by the Deed of Amendment to Credit Agreement No.190 dated June 19, 2017, of Notary Jr. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., related to Working Capital Financing Agreement, the Company has obtained a loan facility amounting to Rp750,000,000 from SMI. As of December 31, 2017, the Company has drawn the entire loan facility amounting to Rp500,000,000.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**24. UTANG LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
(lanjutan)**

**Pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero) (SMI) (lanjutan)**

Berdasarkan akta notaris No. 11 tanggal 19 Juli 2016 dari Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tentang Perjanjian Pembiayaan Dana Talangan, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan untuk Dana Talangan Tanah sebesar Rp3.254.848.787 dari SMI dengan jangka waktu 1 (Satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Perusahaan melakukan pelunasan pada fasilitas pinjaman sebesar Rp1.083.470.860.

Berdasarkan akta No. 42 tanggal 30 Oktober 2015, NKJ, entitas anak, memperoleh pinjaman kredit modal kerja dari SMI dengan pagu pinjaman sebesar Rp230.000.000 Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,85% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2016, NKJ telah melunasi pinjaman kredit modal kerja tersebut.

Berdasarkan akta No. 40 tanggal 30 Oktober 2015, SNJ, entitas anak, memperoleh pinjaman kredit modal kerja dari SMI dengan pagu pinjaman sebesar Rp470.000.000 Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,85% per tahun. Pada tanggal 16 Juni 2016, SNJ telah melunasi pinjaman kredit modal kerja tersebut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan No. 119 dari notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., pada tanggal 16 Agustus 2016, MSJ menandatangani perjanjian kredit dengan SMI untuk membiayai proyek jalan tol. Fasilitas kredit yang diterima MSJ adalah sebesar Rp540.000.000 dengan jangka waktu selama 10 tahun. Tingkat suku bunga menggunakan JIBOR (3 bulan) ditambah dengan margin sehingga setara dengan 9,8% pada tahun ini.

Jaminan pinjaman berupa hak konsesi perusahaan jalan tol, pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya selama masa konsesi. Saldo utang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp534.051.687.

Pada tanggal 13 Oktober 2017, Perusahaan melakukan pembayaran cicilan fasilitas pinjaman sebesar Rp250.000.000.

Saldo terutang fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp500.000.000

**24. NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS LOAN
(continued)**

**Loan from PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero) (SMI) (continued)**

Based on notarial deed No. 11 dated July 19, 2016 of Notary Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., regarding Land Bridging Fund Loan Agreement, the Company obtained a Financing Facility of Rp3,254,848,787 from SMI with terms of 1 year from the signing date.

On July 18, 2017, the Company has paid loan settlement on this loan facility amounting to Rp1,083,470,860.

Based on Notarial Deed No. 42 dated October 30, 2015, NKJ, a subsidiary, obtained a working capital loan facility from SMI amounted to Rp230,000,000. The loan bears interest at 9.85% per annum. On June 30, 2016, NKJ has paid all of the working capital loan facility.

Based on Notarial Deed No. 40 dated October 30, 2015, SNJ, a subsidiary, obtained a working capital loan facility from SMI amounted to Rp470,000,000. The loan bears interest at 9.85% per annum. On June 16, 2016, SNJ has paid all of the working capital loan facility.

Based on Notarial Deed of Financing Agreement No. 119 of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., on August 16, 2016, MSJ signed a credit agreement with SMI to finance the toll road project. Credit facility received by MSJ amounted to Rp540,000,000 with terms of 10 years. The loan bears interest at JIBOR (3 months) plus margin rate which equals to 9.8% in this year.

Loan guarantees are the concession rights, toll revenues and other operating income during the concession period. The outstanding balance as of December 31, 2017 is amounted to Rp534,051,687.

On October 13, 2017, the Company has paid loan installment on this loan facility amounting to Rp250,000,000.

The outstanding balance on this credit facility as of December 31, 2017 is amounted to Rp500,000,000.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

25. UTANG OBLIGASI

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>
Obligasi Jasa Marga:		
Global	4.000.000.000	-
XIV Seri JM - 10	1.000.000.000	1.000.000.000
Seri S C	1.000.000.000	1.000.000.000
Seri T	1.000.000.000	1.000.000.000
XIII Seri R	-	1.500.000.000
Subtotal	<u>7.000.000.000</u>	<u>4.500.000.000</u>
Obligasi PT Marga Lingkar Jakarta :		
Seri A	200.000.000	-
Seri B	217.000.000	-
Seri C	299.000.000	-
Seri D	320.000.000	-
Seri E	464.000.000	-
Subtotal	<u>1.500.000.000</u>	<u>-</u>
Biaya Penerbitan Obligasi yang Belum Diamortisasi	<u>(81.608.202)</u>	<u>(6.558.397)</u>
Total Utang Obligasi	<u>8.418.391.798</u>	<u>4.493.441.603</u>
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	<u>(1.000.000.000)</u>	<u>(1.500.000.000)</u>
Utang Obligasi Bagian Jangka Panjang	<u>7.418.391.798</u>	<u>2.993.441.603</u>

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah pembayaran kembali untuk utang obligasi menurut tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

<u>Tahun Jatuh Tempo/ Year of Maturity</u>	<u>Total Rp</u>
2018	1.000.000.000
2019	1.000.000.000
2020	5.200.000.000
2022	217.000.000
2024	299.000.000
2027	320.000.000
2029	464.000.000
Total	<u>8.500.000.000</u>

a. Global Notes

Pada tanggal 11 Desember 2017, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Senior ("Global Notes") sebesar Rp4.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada bulan Desember 2020. Global Notes dikenakan bunga 7,5% per tahun, yang terutang setiap tahunnya pada tanggal 11 Juni dan 11 Desember dimulai pada tanggal 11 Juni 2018. Global Notes ini tercatat di London Stock Exchange dan Singapore Stock Exchange. Pokok dan bunga Global Notes akan diubah ke dalam dan dilunasi dalam Dolar AS pada saat jatuh tempo.

25. BONDS PAYABLE

The details of bonds payable are as follows:

<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>
	<i>Jasa Marga Bond:</i>
	<i>Global</i>
	<i>XIV JM - 10 Series</i>
	<i>Seri S C</i>
	<i>Seri T</i>
	<i>XIII - R Series</i>
	<i>Subtotal</i>
	<i>PT Marga Lingkar Jakarta Bond :</i>
	<i>Seri A</i>
	<i>Seri B</i>
	<i>Seri C</i>
	<i>Seri D</i>
	<i>Seri E</i>
	<i>Subtotal</i>
	<i>Unamortized Bond Issuance Cost</i>
	<i>Total Bond Payable</i>
	<i>Current Maturities</i>
	<i>Bond Payable of Long - Term Portion</i>

As of December 31, 2017, the amounts of repayments of bonds payable by years of maturity are as follows:

a. Global Notes

On December 11, 2017, the Company issued Senior Notes ("Global Notes") amounting to Rp4,000,000,000 which will due in December 2020. Global Notes bear interest at 7.5% per annum, payable semi-annually on June 11 and December 11 each year, commencing on June 11, 2018. Global Notes are listed on the London Stock Exchange and the Singapore Stock Exchange. Principal and interest on the Notes will be translated into and, all payments will settled in, U.S. Dollars at due dates.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

a. Global Notes (lanjutan)

Jumlah dari pokok dan bunga akan dihitung oleh Agen Penghitung dari Rupiah ke Dolar AS pada Tanggal Penetapan Kurs Terjadwal (Kurs Acuan) yang berlaku yang merupakan kurs dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada dua hari kerja penentuan sebelum Tanggal Penebusan atau Tanggal Pembayaran Bunga atau tanggal lain dimana Global Notes menjadi jatuh tempo dan terutang.

Bertindak selaku wali amanat adalah The Bank of New York Mellon dan Global Notes mendapatkan peringkat "Baa3" dari Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's") dan "BB+" dari S&P Global Ratings, divisi dari S&P Global Inc. ("Standard & Poor's").

Sepanjang masih ada Global Notes yang terutang, Perusahaan dan entitas anak tertentu tidak akan membuat atau mengizinkan untuk mengadakan suatu Hak Gadai untuk kepentingan pemegang suatu Efek atas seluruh atau setiap bagian dari properti atau aset, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, untuk menjamin: (i) pembayaran Efek; (ii) pembayaran berdasarkan suatu jaminan atas Efek; atau (iii) setiap ganti rugi atau kewajiban serupa sehubungan dengan Efek, tanpa, pada saat yang sama atau sebelumnya, membuat suatu ketentuan yang berlaku dimana terhadap Global Notes diberikan (x) Hak Gadai yang sama rata sebagaimana diberikan untuk Efek tersebut atau (y) Hak Gadai lain sebagaimana dapat disetujui oleh para pemegang mayoritas dari jumlah Global Notes yang terutang.

25. BONDS PAYABLE (continued)

a. Global Notes (continued)

The amount of principal and interest will be calculated by the Calculation Agent from Indonesian Rupiah to U.S. dollars at applicable Scheduled Rate Fixing Date (Reference Rate) which will be the Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) at two Fixing Business Days prior to the Redemption Date or Interest Payment Date or such other date on which an amount in respect of Global Notes is due and payable.

Acting as trustee for Global Notes is The Bank of New York Mellon and are rated "Baa3" by Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's") and "BB+" by S&P Global Ratings, a division of S&P Global Inc. ("Standard & Poor's").

As long as there is any outstanding Global Notes, the Company and its certain subsidiaries will not create or permit to exist any Lien for the benefit of the holders of any Securities on the whole or any part of its property or assets, present or future, to secure: (i) payment of any sum due in respect of any Securities; (ii) any payment under any guarantee of any Securities; or (iii) any indemnity or other like obligation in respect of any Securities, without in any such case, at the same time or prior thereto, making effective provision whereby the Notes are accorded (x) the same Liens equally and ratably as are created or subsisting to secure any such Securities or (y) such other Liens as may be consented to by the holders of a majority in aggregate principal amount of the outstanding Global Notes.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

a. Global Notes (lanjutan)

Namun, setiap larangan di atas tidak berlaku terhadap (i) setiap Hak Gadai yang telah ada atas properti atau aset apapun pada saat perolehan properti atau aset tersebut oleh Perusahaan, dengan ketentuan bahwa Hak Gadai tersebut tidak dibuat, dan jumlah pokok atau nominal dari Efek yang dijamin dengan Hak Gadai tersebut yang terutang pada saat perolehan tersebut tidak meningkat, dan (ii) suatu Hak Gadai yang timbul dari pembiayaan ulang, perpanjangan, pembaharuan atau pendanaan kembali dari setiap Efek yang dijamin dengan Hak Gadai, dengan ketentuan bahwa jumlah pokok atau nominal dari Efek tersebut tidak meningkat dan Efek tersebut tidak dijamin dengan harta kekayaan atau aset tambahan dan (iii) setiap Hak Gadai atas aset-aset dari suatu Perusahaan Proyek atau saham dalam suatu Perusahaan Proyek dimana Hak Gadai tersebut diciptakan untuk maksud memjamin Utang yang ditimbulkan untuk memperoleh dan/atau mengembangkan aset dari Perusahaan Proyek tersebut dan dimana Utang tersebut merupakan Utang Pembiayaan Proyek dari Perusahaan Proyek tersebut.

b. Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Tahun 2010

Pada bulan Oktober 2010, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk menerbitkan Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Tahun 2010. Nilai nominal obligasi adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (rupiah penuh) dengan tingkat bunga tetap 9,35% per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.

Jangka waktu obligasi yaitu 10 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Oktober 2020. Bertindak selaku wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk. Berdasarkan surat No.1044/PEF-DirN11/2010 tanggal 29 Juli 2010, peringkat obligasi dari Pefindo adalah idAA (double A: Stable Outlook).

25. BONDS PAYABLE (continued)

a. Global Notes (continued)

However, the foregoing restriction shall not apply to (i) any Lien existing on any property or assets at the time of acquisition of such property or assets by the Company, provided that such Lien was not created, and the principal, capital or nominal amount of the Securities secured by such Lien outstanding at the time of such acquisition was not increased, in contemplation of such acquisition or in connection therewith, and (ii) any Lien arising out of the refinancing, extension, renewal or refunding of any Securities secured by any such Lien, provided that the principal, capital or nominal amount of such Securities is not increased and such Securities are not secured by any additional property or assets and (iii) any Lien over the assets of a Project Company or the shares in a Project Company where such Lien was created for the purpose of securing Indebtedness incurred to acquire and/or develop the assets of such Project Company and where such Indebtedness constitutes Project Finance of such Project Company.

b. Jasa Marga Bonds XIV Series JM-10 Year 2010

In October 2010, the Company received effective statement from the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) for offering Jasa Marga Bond XIV Series JM-10 Year 2010. The par value of bonds is Rp1,000,000,000,000 (full amount) with fixed interest rate of 9.35% per annum. The bonds were offered at 100% of the principal amount. The interests payable paid quarterly.

The bond's term is 10 years and will mature on October 12, 2020. Acting as trustee for the bonds is PT Bank Mega Tbk. Based on letter No.1044/PEF-DirN11/2010 dated July 29, 2010, the bonds rating is idAA (double A: Stable Outlook) as given by Pefindo.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

b. Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Tahun 2010 (lanjutan)

Tujuan penerbitan obligasi adalah untuk pelunasan Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002, percepatan pelunasan Kredit Investasi Bank BCA, pengembangan investasi pada bidang usaha non-tol (bidang properti, bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta bidang engineering), dan pembiayaan modal kerja Perusahaan dengan proporsi masing-masing sebesar 43%, 27%, 25% dan 5%.

Persyaratan rasio keuangan Perusahaan yang harus dijaga atas semua hutang obligasi adalah Rasio Utang terhadap Ekuitas maksimal 5:1 dan *Interest Coverage Ratio* minimal 1,25: 1.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan rasio keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki saldo hutang obligasi sebesar Rp1.000.000.000.

c. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S

Pada bulan September 2013, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerbitkan Obligasi berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S dengan nilai nominal sebesar Rp2.100.000.000 yang terdiri dari Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dengan nilai nominal Rp700.000.000, Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai nominal Rp400.000.000, Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai nominal Rp1.000.000.000.

25. BONDS PAYABLE (continued)

b. Jasa Marga Bonds XIV Series JM-10 Year 2010 (continued)

The purpose of the bonds is for settlement the *Jasa Marga Bonds X Series O Year 2002*, accelerated settlement of the *Investment Credit due to Bank BCA*, non-toll investment development (property, information technology and communication, and also engineering), and financing the Company's working capital with the following proportions: 43%, 27%, 25% and 5%, respectively.

The Company's financial ratios to be maintained for all bonds payable are maximum *Debt to Equity Ratio* of 5:1 and minimum *Interest Coverage Ratio* of 1.25:1.

As of December 31, 2017, the Company has complied with the above mentioned financial ratio.

As of December 31, 2017, the Company has outstanding balance amounted to Rp1,000,000,000.

c. Jasa Marga Bond I Phase I Year 2013 Series S

In September 2013, the Company received an effective statement from *Financial Services Authority (OJK)* for offering *Jasa Marga Bonds Phase I Year 2013 Series S* with the par value of Rp2,100,000,000, consisting of, *A Series Bonds* with fixed interest rate of 8.40% per annum a term of 370 (three hundreds and seventy) days and par value of Rp700,000,000, *B Series Bonds* with fixed interest rate of 8.70% per annum, a term of 3 (three) years and par value of Rp400,000,000, and *C Series Bonds* with fixed interest rate of 8.90% per annum, a term of 5 (five) years and par value of Rp1,000,000,000.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

c. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S (lanjutan)

Berdasarkan Prospektus Final Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S tujuan penerbitan obligasi adalah sekitar 84,36% digunakan untuk pelunasan Obligasi Perseroan XI Seri P Tahun 2003, pelunasan Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa Bunga (*zero coupon*), dan pelunasan Obligasi Jasa Marga JORR I, kemudian 7,48% digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha Perusahaan melalui penyertaan modal di Entitas Anak Perusahaan (JSM, MLJ, JPT) dan 8,16% digunakan untuk modal kerja Perusahaan, yaitu peningkatan kapasitas jalan. Yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Berdasarkan surat dari Pefindo No. 1150/PEF-Dir/IV/2013 tanggal 26 Juni 2013, hasil pemeringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013 Perusahaan adalah idAA (*double A*).

Persyaratan rasio keuangan Perusahaan yang harus dijaga atas semua hutang obligasi adalah Rasio Utang terhadap Ekuitas maksimal 5:1 dan *Interest Coverage Ratio* minimal 1,25:1.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan rasio keuangan.

Pada tanggal 27 September 2016, Perusahaan telah membayar lunas hutang obligasi seri B sebesar Rp400.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki saldo hutang obligasi Seri C sebesar Rp1.000.000.000.

25. BONDS PAYABLE (continued)

c. Jasa Marga Bond I Phase I Year 2013 Series S (continued)

Based on the Prospectus of Jasa Marga bonds Phase I Year 2013 Series S, the purpose of the the bonds are: 84.36% is for settlement The Jasa Marga Bond XI Series P Year 2003, The Jasa Marga Bond I Series JM-10 (*zero coupon*), and The Jasa Marga Bond JORR I, 7.48% is for expansion of equity investment in Subsidiaries (JSM, MLJ, JPT), and 8.16% is for the Company's working capital in enhancement of toll road capacity. Acting as trustee for the bonds is PT Bank Mega Tbk.

Based on a letter No. 1150/PEF-Dir/IV/2013, dated June 26, 2013, the Bonds rating is idAA (*Double A*) from Pefindo.

The Company's financial ratios to be maintained for all bonds payable are maximum Debt to Equity Ratio of 5:1 and minimum Interest Coverage Ratio of 1.25:1.

As of December 31, 2017, the Company has complied with the abovementioned financial ratio.

On September 27, 2016, the Company has fully paid the B Series Bonds amounted to Rp400,000,000.

As of December 31, 2017, the Company has outstanding C series Bonds balance is amounted to Rp1,000,000,000, for C Series Bonds, respectively.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

d. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 seri T diterbitkan tanggal 19 September 2014. Nilai nominal Obligasi adalah sebesar Rp1.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap 9,85% dan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Informasi Tambahan (INTAM) Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T tujuan penerbitan obligasi adalah sekitar 70% digunakan untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-A, dan sisanya sekitar 30% digunakan untuk pembayaran pinjaman kredit modal kerja Perusahaan. Bertindak selaku wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Berdasarkan No. 884/PEF-Dir/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 dari Pefindo, hasil pemeringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013 Perusahaan adalah idAA (double A).

Persyaratan rasio keuangan Perusahaan yang harus dijaga atas semua hutang obligasi adalah Rasio Utang terhadap Ekuitas maksimal 5:1 dan *Interest Coverage Ratio* minimal 1,25: 1.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan rasio keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki saldo hutang obligasi tersebut sebesar Rp1.000.000.000.

e. Obligasi MLJ

Pada tanggal 31 Oktober 2017, PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ), entitas anak, MLJ memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 ("Obligasi") 5 (lima) seri dengan dengan nilai, suku bunga dan jatuh tempo sebagai berikut:

25. BONDS PAYABLE (continued)

d. Jasa Marga Bond I Phase II Year 2014 Series T

Jasa Marga Bond I Phase II 2014 T series was issued on September 19, 2014. The face value of bond is Rp1,000,000,000, with a fixed interest rate of 9.85% and a 5 (five) year term.

In the Additional Information (INTAM) Report of Jasa Marga Bond I Phase II 2014 T Series, 70% of fund raised from the bond issuance, is for the repayment of Jasa Marga Bond I Year 2013 Series S-A, while the remaining 30% is for funding the Company's working capital. The trustee for this bond is PT Bank Mega Tbk.

Based on the letter No. 884/PEF-Dir/VI/2014 dated June 4, 2014 from Pefindo, the rating of Jasa Marga Bond I Year 2013 is idAA (double A).

The Company's financial ratios to be maintained for all bonds payable are maximum Debt to Equity Ratio of 5:1 and minimum Interest Coverage Ratio of 1.25:1.

As of December 31, 2017, the Company has complied with the above mentioned financial ratio.

As of December 31, 2017, the Company has an outstanding bond balance amounted to Rp1,000,000,000.

e. MLJ Bonds

On October 31, 2017, PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ), a subsidiary, obtained an effective statement from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on the issuance of Bonds I Marga Lingkar Jakarta Year 2017 ("Bonds") with five (5) series with par value, annual interest rate and maturity dates as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

e. Obligasi MLJ (lanjutan)

- a) Seri A sebesar Rp200.000.000 dan suku bunga 7,45% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 November 2020
- b) Seri B sebesar Rp217.000.000 dan suku bunga 7,75% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 November 2022
- c) Seri C sebesar Rp299.000.000 dan suku bunga 8,30% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 November 2024
- d) Seri D sebesar Rp320.000.000 dan suku bunga 8,70% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 November 2027
- e) Seri E sebesar Rp464.000.000 dan suku bunga 8,85% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 November 2029.

Total dana yang diterima MLJ pada tanggal 8 November 2017 dari hasil penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp1.500.000.000 yang digunakan untuk melunasi seluruh fasilitas kredit investasi (Catatan 23c). Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk dan sesuai dengan prospektus penerbitan obligasi MLJ, sekitar 90% dari dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan seluruh kredit investasi dan sekitar 8% untuk penyesihan dana cadangan pembayaran bunga sebesar 12 (dua belas) bulan bunga untuk seluruh seri obligasi yang tersedia paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal emisi, dan sisanya untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya layanan transaksi, biaya layanan lalu lintas dan biaya layanan konstruksi.

MLJ juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- a) Interest Coverage Ratio (ICR) (rasio cakupan bunga) lebih atau sama dengan 1,5 kali
- b) Debt to Equity Ratio (DER) (rasio utang) kurang atau sama dengan 4 kali

25. BONDS PAYABLE (continued)

e. MLJ Bonds (continued)

- a) Seri A amounting to Rp200,000,000 and annual interest rate of 7.45%, will mature on November 8, 2020
- b) Seri B amounting to Rp217,000,000 and annual interest rate of 7.75%, will mature on November 8, 2022
- c) Seri C amounting to Rp299,000,000 and annual interest of 8.30%, will mature on November 8, 2024
- d) Seri D amounting to Rp320,000,000 and annual interest of 8.70%, will mature on November 8, 2027
- e) Seri E amounting to Rp464,000,000 and annual interest of 8.85%, will mature on November 8, 2029

Total fund received by MLJ on November 8, 2017 from the issuance of Bonds was Rp1,500,000,000 and used to repaid all the investment credit facility (Note 23c). Acting as trustee for the bonds is PT Bank Mega Tbk and in accordance with MLJ's prospectus for bonds issuance, approximately 90% of the funds will be used for the full repayment of all investment credit and approximately 8% will be used for reserve of interest payments amounting to interest of 12 (twelve) months which should be available at the latest on 1 (one) month after the date of issuance, and the rest for working capital, including but not limited to costs of transactions, traffics and constructions.

MLJ is also required to maintain certain financial ratios base on annual financial statements which have been audited by public accounting firm registered in Financial Services Authority (OJK) during the bonds payable as follows:

- a) Interest Coverage Ratio (ICR) more or equal to 1.5 times
- b) Debt to Equity Ratio (DER) less or equal to 4 times

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

e. Obligasi MLJ (lanjutan)

MLJ juga akan dianggap wanprestasi terhadap kewajibannya sehubungan dengan utang obligasinya apabila MLJ membuat utang baru, kecuali untuk menambah keperluan modal kerja MLJ dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional dan/atau dana cadangan pelunasan pokok Obligasi dan/atau dana cadangan pemeliharaan atau apabila MLJ mengeluarkan obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Obligasi.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan MLJ baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pada tanggal 31 Desember 2017, MLJ telah memenuhi semua persyaratan rasio keruangan.

25. BONDS PAYABLE (continued)

e. MLJ Bonds (continued)

MLJ will also be declared in compliance with its covenant relating to the bonds payable if MLJ makes new debts, except to increase MLJ's working capital in order to meet the operational needs and/or reserve fund of Bonds principal and/or reserve fund for maintenance or if MLJ issues bonds or other similar debt instruments with a higher position, or the payment takes precedence over the Bonds.

The Bonds are not collateralized by a specific collateral, but are collateralized by MLJ's entire assets, either movable or immovable, whether existing or will exist in the future.

As of December 31, 2017, MLJ has complied with the above mentioned financial ratio.

26. LIABILITAS KERJASAMA OPERASI

Akun ini merupakan liabilitas kerjasama operasi kepada investor dalam pembiayaan pembangunan jalan tol.

26. JOINT OPERATION LIABILITIES

This account represents liabilities under joint operation agreements with investors arising from the construction of toll road.

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Bagi Pendapatan Tol			Toll Revenue Sharing
PT Jakarta Baru Cosmopolitan	820.300	820.300	PT Jakarta Baru Cosmopolitan
Total	<u>820.300</u>	<u>820.300</u>	Total

27. LIABILITAS PEMBEBASAN TANAH

Akun ini merupakan liabilitas entitas anak atas dana talangan pembelian tanah, untuk pembangunan ruas Jalan, dengan menggunakan dana talangan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol. Penggunaan dana talangan tersebut oleh JSM adalah untuk pembangunan ruas jalan tol Surabaya - Mojokerto, untuk TMJ adalah untuk ruas tol Semarang - Solo, untuk TJP adalah untuk ruas tol Gempol-Pasuruan, untuk MTN adalah ruas Tol Kunciran-Serpong, dan untuk MLJ adalah ruas Tol Ulujami-Kebon Jeruk (JORR W2 Utara), serta untuk JKC adalah ruas tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran.

27. LAND ACQUISITION LIABILITIES

This account represents liabilities of the subsidiaries for the bail-out loan for land acquisition and for construction of roads by using bail out from the Public Service Assistance Unit - the Indonesian Toll Road Authority. The use of bail out funds by JSM is for construction of Surabaya - Mojokerto toll road, TMJ is for construction of Semarang - Solo toll Road, TJP is for construction of Gempol- Pasuruan Toll Road, MTN is for construction Kunciran - Serpong Toll road, MLJ is for construction of Ulujami-Kebon Jeruk (JORR North W2) and JKC is for construction of Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran Toll Road.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. LIABILITAS PEMBEBASAN TANAH (lanjutan)

Selain itu, kewajiban pembebasan tanah merupakan kewajiban pembebasan tanah untuk pelunasan utang ganti rugi Jalan Tol Sedyatmo ke Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT).

28. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Module Intracs Yasatama, PT New Module Int Ekom AG untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Tol pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek, Jalan Tol Cipularang dan Jalan Tol Padaleunyi dengan sistem pendanaan dari pihak kontraktor. Selanjutnya Pihak Kontraktor menyewakan peralatan tol kepada Perusahaan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Pengoperasian.

Saldo utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Utang Sewa Pembiayaan	23.580.618	37.333.408	<i>Finance Lease Payable</i>
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	(4.542.380)	(8.802.921)	<i>Current Maturities Portion</i>
Bagian Jangka Panjang	19.038.238	28.530.487	<i>Long - Term Portion</i>

29. PROVISI PELAPISAN JALAN TOL

Jumlah dari provisi pelapisan jalan tol ini terdiri dari:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Saldo Awal	554.170.295	339.777.937	<i>Beginning Balance</i>
Penambahan	479.007.780	489.398.336	<i>Addition</i>
Pengurangan	(44.184.562)	-	<i>Disposal</i>
Realisasi	(445.370.694)	(275.005.978)	<i>Realization</i>
Saldo Akhir	543.622.819	554.170.295	<i>Ending Balance</i>
Bagian Jangka Pendek	341.344.474	332.374.143	<i>Current Portion</i>
Bagian Jangka Panjang	202.278.345	221.796.152	<i>Long Term Portion</i>
Total	543.622.819	554.170.295	<i>Total</i>

30. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Pendapatan diterima dimuka	118.982.816	112.679.518	<i>Unearned income</i>
Pendapatan ditangguhkan - neto	1.874.860.610	-	<i>Deferred income - net</i>
Sub total	1.993.843.426	112.679.518	<i>Sub total</i>
Dikurangi bagian jangka pendek	(374.712.521)	-	<i>Less: short-term portion</i>
Bagian jangka panjang	1.619.130.905	112.679.518	<i>Long-term portion</i>

27. LAND ACQUISITION LIABILITIES (continued)

In addition, the land acquisition liabilities also represent settlement of payable for widening of Sedyatmo Toll Road to Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT).

28. FINANCE LEASE PAYABLE

The Company entered into a agreements with PT Module Intracs Yasatama, PT New Module Int Ekom AG for Work Procurement and Maintenance of Toll Equipments at Jakarta-Cikampek Toll Road, Cipularang Toll Road and Padaleunyi Toll Road under financing system from the contractor. Then the Contractor party would rent units of toll equipment to the Company for a period of 8 (eight) years from the signing of the Minutes of Operation.

Total finance lease payable are as follows:

29. PROVISION FOR OVERLAY

The amounts of provision for overlay are as follows:

30. DEFERRED REVENUES

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

30. PENDAPATAN DITANGGUHKAN (lanjutan)

Pendapatan diterima dimuka merupakan jumlah dari pendapatan sewa iklan, lahan, tempat peristirahatan dan digunakan atas pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol (Rumijatotl).

Pendapatan ditangguhkan adalah hak atas pendapatan tol ruas Jakarta-Bogor-Ciawi yang ditangguhkan yang berasal dari imbalan yang diterima dari pengalihan hak atas pendapatan tol ruas Jakarta-Bogor-Ciawi selama jangka waktu lima tahun sebagaimana dijelaskan dalam paragraf di bawah ini dan akan diamortisasi sebagai pendapatan tol Perusahaan selama jangka waktu tersebut.

Pada tanggal 15 Mei 2017, PT Mandiri Manajemen Investasi ("MMI") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") mengadakan perjanjian dalam rangka pembentukan Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset Mandiri JSMR01 Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi ("KIK EBA") dimana MMI akan bertindak sebagai Manajer Investasi KIK EBA dan BRI akan bertindak sebagai Bank Kustodian.

Pada tanggal 26 Juli 2017, Perusahaan mengadakan Perjanjian Penerbitan Surat berharga Pendapatan Tol atas Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi ("Jagorawi") dengan MMI dan BRI (keduanya disebut sebagai "Pemegang surat berharga") yang menyepakati antara lain :

- a. Perusahaan akan menerbitkan surat berharga hak pendapatan tol yang akan dibeli oleh Pemegang Surat Berharga seharga Rp2.000.000.000 dimana surat berharga tersebut akan memberikan hak kepada pemegang surat berharga atas pendapatan tol ruas Jagorawi sampai dengan jumlah sebesar Rp2.600.000.000 selama jangka waktu sejak surat berharga diterbitkan sampai dengan lima tahun ("jangka waktu hak pendapatan tol")

30. DEFERRED REVENUES (continued)

Unearned revenue represents amounts received from rental of advertisements, space and rest areas, and for use of the Space Owned Toll Road Area (Rumijatotl).

Deferred income represents the deferred rights on tolls revenue of the Jakarta-Bogor-Ciawi segment that arising from the consideration received from the transfer of rights on revenues from the Jakarta-Bogor-Ciawi segment over the five year period as described in the following paragraphs and will be amortized as toll revenues of the Company during that period.

On May 15, 2017, PT Mandiri Manajemen Investasi ("MMI") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") entered into an agreement in order to form of a Collective Investment Contract - Asset-Backed Securities Mandiri JSMR01 Rights on Jagorawi Toll Revenues (" KIK EBA ") whereby MMI will act as an Investment Manager of KIK EBA and BRI will act as a Custodian Bank.

On July 26, 2017, the Company entered into an Agreement of Issuance of Rights on Toll Revenue Securities of the Jakarta-Bogor-Ciawi ("Jagorawi") toll road segment with MMI and BRI (both referred to as "Securities Holders") which agreed that:

- a. *The Company will issue toll revenue rights securities to be purchased by the Securities Holder at Rp2,000,000,000 whereby the securities will grant rights to securities holders of Jagorawi toll road revenues up to Rp2,600,000,000 for the period from the issuance date of securities until five years ("rights on tol revenues period")*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

30. PENDAPATAN DITANGGUHKAN (lanjutan)

- b. Dengan diterbitkannya surat berharga tersebut maka secara hukum pendapatan tol beralih menjadi milik Pemegang Surat Berharga selama jangka waktu hak pendapatan tol tersebut.
- c. Pendapatan tol akan diterima *collection agent* untuk dan atas nama Pemegang Surat Berharga dan *collection agent* akan menyerahkan pendapatan tol tersebut kepada Pemegang Surat Berharga sesuai dengan jadwal yang akan diatur dalam perjanjian pengumpulan pendapatan tol.
- d. Seluruh pendapatan tol yang diterima *collection agent* merupakan hak milik Pemegang Surat Berharga yang akan diakui secara harian dan ditempatkan dalam rekening yang khusus disiapkan oleh *collection agent* untuk kepentingan Pemegang Surat Berharga.
- e. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu hak pendapatan terdapat akumulasi kekurangan jumlah pendapatan tol, maka kekurangan tersebut merupakan risiko Pemegang Surat berharga dan Perusahaan tidak dapat dimintakan untuk menutupi kekurangan tersebut, dan
- f. Perusahaan menjamin pendapatan tol yang menjadi basis surat berharga sepenuhnya merupakan hak Pemegang Surat Berharga dan pendapatan tol yang disimpan oleh *collection agent* selama jangka waktu hak pendapatan bukan merupakan harta Perusahaan.

Pada tanggal 26 Juli 2017, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pengumpulan Pendapatan Tol Ruas Jakarta-Bogor-Ciawi dengan Pemegang surat berharga dan mengadakan addendum terhadap perjanjian tersebut pada tanggal 28 Agustus 2017, dimana para pihak menyepakati antara lain bahwa :

- a. Pemegang Surat Berharga menunjuk Perusahaan sebagai *collection agent* untuk melakukan pengumpulan dan penyerahan pendapatan tol selama waktu hak pendapatan tol.
- b. Jadwal penyerahan pendapatan tol oleh *collection agent* ke rekening Pemegang Surat Berharga.

30. DEFERRED REVENUES (continued)

- b. *With the issuance of such securities, legally the toll revenues will be transferred to be owned by the Securities Holder during the rights on toll revenues period.*
- c. *Toll revenue will be received by the collection agent for and on behalf of the Securities Holder and the collection agent shall deliver the toll revenue to the Securities Holders in accordance with the schedule to be stipulated in the toll revenue collection agreement.*
- d. *The Securities Holders shall be the owner of all toll revenue received by the collection agent and to be recognized on a daily basis and placed in a bank account specially made by the collection agent for the benefit of the Securities Holders.*
- e. *If until the expiration of the rights on toll revenues period, there is an accumulated shortage of amount of the toll revenue, it is the risk of the Securities Holders and the Company cannot be requested to cover the shortfall, and*
- f. *The Company guarantees the toll revenue on the basis of securities is entirely the rights of the Securities Holder and toll revenue kept by the collection agent for the rights on toll revenues period is not an asset of the Company*

On July 26, 2017, the Company entered into a Toll Revenue Collection of Jakarta-Bogor-Ciawi Segment Agreement with the Securities Holders and also entered into an addendum to such agreement on August 28, 2017, whereby the parties agreed that:

- a. *The Securities Holder appoints the Company as a collection agent to collect and transfer all toll revenues during the rights on toll revenues period.*
- b. *The schedule of transfer of toll revenues by the collection agent to the Securities Holder's bank account.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

30. PENDAPATAN DITANGGUHKAN (lanjutan)

- c. Bila sampai berakhirnya waktu hak pendapatan tol dan pendapatan tol tidak mencapai Rp2.600.000.000 atau terdapat kekurangan pendapatan tol, maka kekurangan tersebut merupakan risiko Pemegang Surat Berharga dan *collection agent* tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk menutupi kekurangan tersebut.
- d. *Collection agent* akan menerima imbalan sebesar Rp100.000 per tahun dan
- e. *Collection agent* mengakui bahwa pendapatan tol yang dikumpulkan dan diserahkan dalam benar-benar hak dan milik Pemegang Surat Berharga.

30. DEFERRED REVENUES (continued)

- c. *If until the expiry of the rights on toll revenues period and toll revenues do not reach Rp2,600,000,000 or there is a shortage of toll revenues, the shortfall is the risk of the Securities Holders and the collection agent cannot be held accountable to cover the shortfall.*
- d. *The collection agent will receive a fee of Rp100,000 per annum and*
- e. *The collection agent acknowledges that the toll revenue collected and submitted is indeed the rights of and owned by the Securities Holders.*

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit Method* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang. Keuntungan/kerugian aktuarial yang terjadi diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain.

Rincian liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut :

31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Employee benefits liability is estimated using the Projected-Unit-Credit Method based on long-term actuarial assumptions. Actuarial gains/ losses incurred are recognized directly in Other Comprehensive Income.

The long-term employee benefits liability with detail are follows :

	31 Desember 2017 December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Perusahaan			<i>The Company</i>
Program Kesehatan Pensiunan	656.527.041	557.610.831	<i>Pension Health - Care Program</i>
Program Pensiun	56.525.453	21.865.443	<i>Pension Plan</i>
Program Purna Karya	115.837.468	67.653.088	<i>Post-Retirement Benefits Program</i>
Program Pasca Kerja Lainnya	85.928.499	81.534.331	<i>Other Post-Employment Benefits Program</i>
Program Jangka Panjang Lainnya	12.427.830	-	<i>Other Long Term Employee Benefits Program</i>
Sub Total	<u>927.246.291</u>	<u>728.663.693</u>	<i>Sub Total</i>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

**31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS
LIABILITIES (continued)**

	<u>31 Desember 2017</u> <u>December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/</u> <u>December 31, 2016</u>	
Entitas Anak			Subsidiaries
Program Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya			Pension Program and Other Post Benefits Program
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	51.532.637	18.968.245	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
PT Jasa Layanan Operasi	13.941.408	2.206.705	PT Jasa Layanan Operasi
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	8.230.167	6.141.727	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Marga Lingkar Jakarta	2.442.603	1.539.764	PT Marga Lingkar Jakarta
PT Jasamarga Pandaan Tol	860.301	446.879	PT Jasamarga Pandaan Tol
PT Jasa layanan Pemeliharaan	788.505	1.142.992	PT Jasa layanan Pemeliharaan
PT Jasamarga Bali Tol	670.714	881.756	PT Jasamarga Bali Tol
PT Marga Sarana Jabar	25.695	17.827	PT Marga Sarana Jabar
PT Trans Marga Jateng	-	342.063	PT Trans Marga Jateng
Sub Total	<u>78.492.030</u>	<u>31.687.958</u>	Sub Total
Total	<u>1.005.738.321</u>	<u>760.351.651</u>	Total

Estimasi liabilitas imbalan kerja yang diakui Perusahaan adalah sebagai berikut:

The estimated employee benefits liabilities recognized by the Company are as follows:

a. Program kesehatan pensiunan

a. Pension healthcare program

Perusahaan menyelenggarakan program fasilitas kesehatan untuk karyawan yang sudah pensiun bersama dengan keluarganya sesuai Peraturan Perusahaan. Perusahaan tidak melakukan pendanaan untuk Program ini.

The Company established a healthcare program for employees who had retired together with their families in accordance with the Company Regulation. The Company does not undertake any funding for this Program.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebanyak 2.748 karyawan.

The number of employees as of December 31, 2017 entitled to this program is 2,748 employees.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

**31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS
LIABILITIES (continued)**

a. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

a. Pension healthcare program (continued)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir kini liabilitas adalah sebagai berikut:

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of obligation is as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016 December 31, 2016	
Nilai Kini Liabilitas - Awal Tahun	557.610.831	469.725.694	<i>Present Value Liability - Beginning of Year</i>
Biaya Bunga	40.343.617	41.277.395	<i>Interest Cost</i>
Biaya Jasa Kini	19.233.492	10.359.793	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Jasa Lalu	(28.482.769)	-	
Pembayaran Imbalan	(11.509.566)	(13.538.728)	<i>Benefits Payments</i>
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	<u>577.195.605</u>	<u>507.824.154</u>	<i>Present Value Liability - End of Year</i>
Pengukuran kembali liabilitas (Aset) imbalan pasti neto			<i>Re-measurement of liability (asset) defined return</i>
- Keuntungan/Kerugian dari Perubahan Asumsi	96.788.082	40.147.088	<i>Gain/Loss from Assumption Changes -</i>
- Penyesuaian atas Pengalaman	(17.456.646)	9.639.589	<i>Experiences Adjustment -</i>
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	<u>656.527.041</u>	<u>557.610.831</u>	<i>Present Value Liability - End of Year</i>

Rincian keuntungan/(kerugian) aktuarial dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of actuarial gain/(loss) in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	
Penghasilan Komprehensif Lain			<i>Other Comprehensive Income</i>
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto			<i>Re-Measurement of define benefits liability (asset) net</i>
Keuntungan dan kerugian aktuarial			<i>Actuarial gain and loss</i>
- Perubahan asumsi aktuarial	96.788.082	40.147.088	<i>Actuarial assumption changes -</i>
- Penyesuaian atas pengalaman	(17.456.646)	9.639.589	<i>Experiences adjustment -</i>
Biaya yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	<u>79.331.436</u>	<u>49.786.677</u>	<i>Recognized cost at Other Comprehensive Income</i>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

a. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2017	2016
Biaya Jasa Kini	19.233.492	10.359.793
Biaya Jasa Lalu	(28.482.769)	-
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset)	40.343.617	41.277.395
Beban yang Diakui	31.094.340	51.637.188

Rekonsiliasi saldo pengukuran kembali atas liabilitas/(aset) neto di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Jumlah Pengukuran Kembali Awal Periode	43.193.218	(6.593.459)
(Keuntungan) Kerugian Aktuaria	79.331.436	49.786.677
Akumulasi Jumlah Pengukuran Kembali	122.524.654	43.193.218

Mutasi liabilitas yang diakui laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Liabilitas Neto Awal Tahun	557.610.831	469.725.694
Beban Periode Berjalan	31.094.340	51.637.188
Pembayaran Imbalan Kerja oleh Entitas Pemberi Kerja	(11.509.566)	(13.538.728)
Pengukuran Kembali Liabilitas/ Aset	79.331.436	49.786.677
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	656.527.041	557.610.831

**31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS
LIABILITIES (continued)**

a. Pension healthcare program (continued)

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

Current Service Cost
Post Service Cost
Net Interest of Liability (Assets)
Recognized Expenses

The reconciliation of re-measurement on net of liability/(asset) in the consolidated statement of financial position are as follow:

Re-Measurement Amount - Beginning of Period
Actuarial Loss (Gain)
Accumulated Amount of Re-Measurement

The movements in the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

Net Liability - Beginning of Year
Recognized Expenses
Payment of Employee Benefits from Employer
Re-Measurement of Liability/ Assets
Net Liability - End of Year

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

a. Pension healthcare program (continued)

Pada tahun berjalan saat ini dan lima tahun sebelumnya dari nilai kini kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset program dan defisit pada program adalah sebagai berikut:

The current year and previous five years of funded status of present value of benefit obligation, fair value of plan asset and deficit in the program are as follows:

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	656.527.041	557.610.831	Present value of Defined Benefit Liability
Posisi Pendanaan	<u>656.527.041</u>	<u>557.610.831</u>	Funding

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut

The actuarial assumptions used to determine post-employment benefits expense and liabilities are as follows:

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Tingkat Bunga Aktuarial Awal Tahun	7,75%	9,00%	Discount Rate - Beginning of Year
Estimasi Kenaikan Biaya Kesehatan	6,0%	6,0%	Health Care Increment
Proporsi Usia Pensiun Normal		100%	Proportion of normal retirement age
Tingkat Mortalita		TMI 2011 & GAM 1971	Mortality Rate
Tingkat Cacat		10 % dari TMI 3	Disability Rate
		<u>Usia/ Age</u>	
		15 – 29	
		30 – 34	
		35 – 39	
		40 – 50	
		51 – 52	
		> 52	
Metode Aktuarial		Projected Unit Credit	Actuarial Method
Usia Pensiun Normal	56	56	Pension Normal Age
Analisis Sensitivitas			Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	656.527.041	557.610.831	PV Defined Benefit Obligations
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
+ 1,00%	706.815.063	605.097.715	+ 1,00%
- 1,00%	628.525.651	567.558.201	- 1,00%
Asumsi Tingkat Inflasi Biaya Kesehatan			Healthcare Inflation Rate Assumptions
+ 1,00%	651.435.121	562.407.689	+ 1,00%
- 1,00%	640.101.962	552.771.445	- 1,00%

b. Program pensiun

b. Pension Plan

Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang. Keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul diakui langsung pada Penghasilan Komprehensif Lain.

Employee benefits liability are estimated using the *Projected-Unit-Credit Method* based on the long-term actuarial assumptions. Actuarial gains/ losses incurred are recognized directly in Other Comprehensive Income.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Program pensiun (lanjutan)

Program pensiun ini dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun JASA MARGA yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia KEP-379/KM.6/2004 pada tanggal 14 September 2004. Per 31 Oktober 2017, jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut adalah sebanyak 4.009 karyawan aktif, 201 karyawan keluar dengan pensiun ditunda dan 1.200 pensiunan.

Program Pensiun ini juga dikelola oleh PT Jiwasraya yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: Kep. 171-KMK/7/1993 tanggal 16 Agustus 1993 Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut adalah sebanyak 269.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir kini liabilitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Nilai Kini Liabilitas - Awal Tahun	1.210.199.109	1.064.772.307	<i>Present Value Liability - Beginning of Year</i>
Biaya Bunga	96.479.924	64.147.360	<i>Interest Cost</i>
Biaya Jasa Kini	24.417.843	24.159.214	<i>Current Service Cost</i>
Pembayaran Imbalan	<u>(70.295.342)</u>	<u>(56.654.467)</u>	<i>Benefits Payments</i>
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun (Ekspektasi)	<u>1.260.801.534</u>	<u>1.096.424.414</u>	<i>Present Value Liability - End of Year (Expectation)</i>
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto			<i>Re-Measurement of liability (asset) defined return</i>
- Keuntungan/Kerugian dari Perubahan Asumsi	78.100.816	76.277.656	<i>Gain/Loss from Assumption Changes -</i>
- Penyesuaian atas Pengalaman	<u>10.114.239</u>	<u>37.497.039</u>	<i>Adjustment of Experiences -</i>
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	<u>1.349.016.589</u>	<u>1.210.199.109</u>	<i>Present Value Liability - End of Year</i>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Nilai Wajar Aset Program Awal Tahun	1.188.333.667	798.581.896	<i>Plan Assets - Beginning of Year</i>
Ekspektasi Imbal Hasil dari Aset Program	95.066.693	71.872.371	<i>Return on Investments</i>
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto			<i>Re-Measurement of Liability (Asset) Nett Defined Return</i>
- Imbal Hasil Aset Program	19.312.363	12.428.403	<i>-Return of Plan's Asset</i>
Pembayaran iuran - Pemberi Kerja	55.602.871	357.485.658	<i>Payment of Contributions from Employer</i>
Pembayaran iuran - Peserta Program	4.470.884	4.619.806	<i>Payment of Contributions from Employee</i>
Pembayaran Imbalan Kerja	<u>(70.295.342)</u>	<u>(56.654.467)</u>	<i>Benefits Paid</i>
Aset Program Akhir Tahun (Aktual)	<u>1.292.491.136</u>	<u>1.188.333.667</u>	<i>Plan Assets - End of the Year (Actual)</i>
Nilai Kini Liabilitas Tidak Didanai - Akhir Tahun	1.349.016.589	1.210.199.109	<i>Present Value Liability Unfunded - End of Year</i>
Nilai Kini Liabilitas Didanai - Akhir Tahun	<u>(1.292.491.136)</u>	<u>(1.188.333.667)</u>	<i>Present Value Liability Funded - End of Year</i>
Nilai Kini Liabilitas Neto - Akhir Tahun	<u>56.525.453</u>	<u>21.865.442</u>	<i>Present Value Liability Net - End of Year</i>

31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Pension Plan (continued)

The pension plan is managed by Yayasan Dana Pensiun JASA MARGA which has been approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia KEP-379/KM.6 /2004 on September 14, 2004. As of October 31, 2017, the number of employees which are entitled to these benefits are 4,009 active employees, 201 resigned employees with deferred pensions and 1,200 retired employees.

This Pension Plan is also managed by PT Jiwasraya which has been approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Number: Kep. 171-KMK/7/1993 on Agustus 16, 1993 The employees entitled to this benefit are 269.

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of obligation is as follows:

The reconciliation of beginning and ending balance of assets program is as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

**31. LONG-TERM EMPLOYEE
LIABILITIES (continued)**

b. Program pensiun (lanjutan)

b. Pension Plan (continued)

Rincian keuntungan/(kerugian) aktuarial dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of actuarial gain/(loss) in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	
Penghasilan Komprehensif Lain			Other Comprehensive Income
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbangan pasti neto			Re-Measurement of define benefit liability (asset),net
Keuntungan dan kerugian aktuarial			Actuarial gain and loss
- perubahan asumsi aktuarial	78.100.816	76.277.656	Actuarial Assumption Changes -
- penyesuaian atas pengalaman	10.114.239	37.497.039	Adjustment for Experience -
Imbal hasil atas aset program	(19.312.363)	(12.428.403)	Return of plan's asset
Biaya yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	68.902.692	101.346.292	Recognized cost at Other Comprehensive Income

Rincian beban yang diakui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	
Biaya Jasa Kini			Current Service Cost
- luran peserta	19.946.959	19.539.408	Contributions -
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset)	1.413.231	(7.725.011)	Net Interest of Liability (Assets)
Beban yang Diakui	21.360.190	11.814.397	Recognized Expenses

Rekonsiliasi saldo pengukuran kembali atas liabilitas/(aset) neto di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of re-measurement on net of liability/(asset) in the consolidated statement of financial position are as follow:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Jumlah Pengukuran Kembali Awal Tahun (Keuntungan) Kerugian Aktuarial	426.342.245 68.902.693	324.995.952 101.346.293	Re-Measurement Amount - Beginning of Year Actuarial Gain (Loss)
Akumulasi Jumlah Pengukuran Kembali	495.244.938	426.342.245	Accumulated Amount of Re-Measurement

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

b. Program pensiun (lanjutan)

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Liabilitas Bersih Awal Tahun	21.865.442	266.190.411
Beban Tahun Berjalan	21.360.190	11.814.397
Pembayaran Iuran Tahun Berjalan	(55.602.871)	(357.485.658)
Pengukuran Kembali Liabilitas/ Aset	68.902.692	101.346.292
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	56.525.453	21.865.442

Pada tahun berjalan dan lima tahun sebelumnya dari nilai kini kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset program dan defisit pada program adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	1.349.016.589	1.210.199.109
Nilai Wajar Aset Program	(1.292.491.136)	(1.188.333.667)
Posisi Pendanaan	56.525.453	21.865.442

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan program pensiun adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Tingkat Diskonto	6,75%	8,00%
Estimasi Kenaikan Gaji	5,00%	5,00%
Tingkat Mortalita	100% TMI III	
Tingkat Cacat	10 % Tabel Mortalita	
Tingkat Mengundurkan Diri	> 52	
Metode Aktuarial	Projected Unit Credit	
Usia Pensiun Normal	56 tahun/ year	
Usia Pensiun Dini	46	
Proporsi Pengambilan Usia Pensiun Normal	100%	
Analisis Sensitivitas		
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	1.349.016.589	1.210.199.109
Asumsi Tingkat Diskonto		
- 1,00%	1.421.411.045	1.275.143.977
+ 1,00%	1.283.740.264	1.151.639.894
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji		
- 1,00%	1.267.758.635	1.137.302.818
+ 1,00%	1.441.126.393	1.292.830.562

**31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS
LIABILITIES (continued)**

b. Pension Plan (continued)

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

Net Liability - Beginning of Year
Recognized Expenses
Contribution of Employer for the year
Re-Measurement of Liability/ Assets
Net Liability - End of Year

The current year and previous five years of funded status of present value of benefit obligation, fair value of plan asset and deficit in the program are as follows:

Present value - Defined Benefit Liability
Fair Value of Program Assets
Funding

The actuarial assumptions used to determine pension plan expenses and liabilities are as follows:

Discount Rate
Salary Increment
Mortality Rate
Disability Rate
Early Retirement Rate

Actuarial Method
Pension Normal Age
Early Pension Age
Proportion of normal retirement age

Sensitivity Analysis
PV Defined Benefit Obligations

Discount Rate Assumptions
- 1,00%
+ 1,00%

Salary Increment Assumptions
- 1,00%
+ 1,00%

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

b. Program pensiun (lanjutan)

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan program pensiun adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Metode Analisis Sensitivitas	<i>Deterministic Method</i>	
Komposisi Nilai Wajar Aset Program		
Instrumen Ekuitas	6%	7%
Deposito Berjangka	7%	18%
Reksadana	27%	26%
Obligasi	52%	35%
Properti	2%	2%
Asset Lainnya	6%	12%
Total	100%	100%

c. Program purna karya

Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit Method* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang. Perusahaan menyelenggarakan program ini sesuai perjanjian kerja bersama. Perusahaan melakukan pendanaan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut yang ditempatkan pada program asuransi yang dikelola oleh AJB Bumiputera.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebanyak 4.277 karyawan.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Nilai Kini Liabilitas - Awal Tahun	557.852.958	532.927.309
Biaya Bunga	42.300.273	43.314.338
Biaya Jasa Kini	22.810.990	19.363.169
Biaya Jasa Lalu	(51.016.781)	-
Pembayaran Imbalan	(57.442.931)	(59.665.345)
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun (Ekspektasi)	514.504.509	535.939.471
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset)		
Imbalan Pasti Neto		
- Penyesuaian atas Pengalaman	56.278.554	(9.192.198)
- Keuntungan/Kerugian dari Perubahan Asumsi	43.554.736	31.105.685
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	614.337.799	557.852.958

**31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS
LIABILITIES (continued)**

b. Pension Plan (continued)

The actuarial assumptions used to determine pension plan expenses and liabilities are as follows: (continued)

c. Post-retirement benefits program

Employee benefits liabilities are estimated using the *Projected-Unit-Credit Method* based on long-term actuarial assumptions. The Company maintains its program based on collective labor agreement. The Company committed funding the employee benefits program through an insurance program managed by AJB Bumiputera.

The employees as of December 31, 2017 entitled to this benefit are 4,277 employees.

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

Present Value Liability - Beginning of Year
Interest Cost
Current Service Cost
Past Service Cost
Benefits Payments
Present Value Liability - End of Year (Expectation)
Re-Measurement of Actuarial Gain (Loss)
Adjustment of Experiences -
Gain/Loss from Assumption Changes -
Present Value Liability - End of Year

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

c. Program purna karya (lanjutan)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Nilai Wajar Aset Program Awal Tahun	490.199.870	417.210.101
Ekspektasi Imbal Hasil dari Aset Program	40.023.572	37.380.447
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto		
- Imbal Hasil Aset Program	7.200.083	39.352.922
Pembayaran Iuran - Pemberi Kerja	66.527.403	49.195.560
Pembayaran Iuran - Peserta Program	11.105.086	6.726.185
Pembayaran Imbalan Kerja	(114.282.115)	(59.665.345)
Nilai Wajar Aset - Akhir Tahun	500.773.899	490.199.870
Nilai Kini Liabilitas Tidak Didanai - Akhir Tahun	614.337.799	557.852.958
Nilai Kini Liabilitas Didanai - Akhir Tahun	(498.500.331)	(490.199.870)
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	115.837.468	67.653.088

**31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS
LIABILITIES (continued)**

**c. Post-retirement benefits program
(continued)**

The reconciliation of beginning and ending balance of assets program is as follows:

Fair Value Assets Program - Beginning of Year
Return on Investments
Re-Measurement of Define Benefits Liability (Asset), Net
Return of Plan Asset -
Payment of Contributions from Employer
Payment of Contributions from Employee
Benefits Paid
Fair Value Assets Program - End of Year
Present Value Liability Unfunded - End of Year
Present Value Liability Funded - End of Year
Present Value Liability - End of Year

Rincian keuntungan (kerugian) aktuarial dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of actuarial gain (loss) in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	
Penghasilan Komprehensif Lain			Other Comprehensive Income
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto			Re-Measurement of define benefits liability (asset), net
Keuntungan dan Kerugian Aktuarial			Actuarial gain and loss
- Perubahan Asumsi Aktuarial	43.554.736	31.105.685	Actuarial Assumption Changes -
- Penyesuaian atas Pengalaman	62.100.957	(9.192.198)	Adjustment for Experience -
Imbal Hasil atas Aset Program	(7.200.083)	(39.352.922)	Return of Plan Asset
Biaya yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	98.455.610	(17.439.435)	Recognized Expenses at Other Comprehensive Income

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

**31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS
LIABILITIES (continued)**

c. Program purna karya (lanjutan)

**c. Post-retirement benefits program
(continued)**

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The detail of expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	
Biaya Jasa Kini	11.705.903	12.636.984	Current Service Cost
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset)	4.550.269	5.933.891	Net Interest of Liability (Assets)
Beban yang Diakui	16.256.172	18.570.875	Recognized Expenses

Mutasi saldo pengukuran kembali atas liabilitas/(aset) neto di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of re-measurements on net of liability/(asset) in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Jumlah Pengukuran Kembali Awal Tahun	95.091.642	112.531.077	Re-Measurement Amount - Beginning of Year
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial	98.455.610	(17.439.435)	Actuarial Loss (Gain)
Akumulasi Jumlah Pengukuran Kembali	193.547.252	95.091.642	Accumulated Amount of Re-Measurement

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Liabilitas Bersih Awal Tahun	67.653.088	115.717.208	Net Liability - Beginning of Year
Beban Tahun Berjalan	16.256.172	18.570.875	Recognized Expenses
Pembayaran luran Tahun Berjalan	(66.527.403)	(49.195.560)	Contribution of Employer for the Year
Pengukuran Kembali Liabilitas/ Aset	98.455.611	(17.439.435)	Re-Measurement of Liability/ Assets
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	115.837.468	67.653.088	Net Liability - End of Year

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

c. Program purna karya (lanjutan)

Pada tahun berjalan dan lima tahun sebelumnya dari nilai kini kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset program dan defisit pada program adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pasti	614.337.799	557.852.958	<i>Present value of Defined Benefit Liability Fair Value of Program Assets</i>
Nilai Wajar Aset Program	(498.500.331)	(490.199.870)	
Posisi Pendanaan	115.837.468	67.653.088	Funding

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas purna karya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Tingkat Diskonto	6,75%	8,00%	<i>Discount Rate</i>
Estimasi Kenaikan Gaji Pegawai Aktif	6,50%	6,50%	<i>Salary Increment</i>
Tingkat Mortalita		100% TMI3	<i>Mortality Rate</i>
Tingkat Cacat		10 % dari TMI3	<i>Disability Rate</i>
Tingkat Mengundurkan Diri			<i>Early Retirement Rate</i>
		<i>Usia/ Age</i>	
		15 – 29	
		30 – 34	
		35 – 39	
		40 – 50	
		51 – 52	
		> 52	
Metode Aktuarial			<i>Actuarial Method</i>
Usia Pensiun Normal		56 tahun/year	<i>Pension Normal Age</i>
Proporsi Pengambilan Usia Pensiun Normal		100%	<i>Proportion of normal retirement age</i>
Analisis Sensitivitas			<i>Sensitivity Analysis</i>
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	614.337.799	557.852.958	<i>PV Defined Benefit Obligations</i>
Asumsi Tingkat Diskonto			<i>Discount Rate Assumptions</i>
- 1,00%	654.229.656	594.076.987	- 1,00%
+ 1,00%	578.393.390	525.213.432	+ 1,00%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			<i>Salary Increment Assumptions</i>
- 1,00%	577.196.607	524.126.686	- 1,00%
+ 1,00%	654.880.689	594.668.161	+ 1,00%

**31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS
LIABILITIES (continued)**

**c. Post-retirement benefits program
(continued)**

The current year and previous five years of funded status of present value of benefit obligation, fair value of plan asset and deficit in the program are as follows:

The current assumptions used to determine post-retirement benefits expenses and liabilities are as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

d. Program pasca kerja lainnya

d. Other post-retirement benefits program

Perusahaan menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan (post-retirement benefit) sesuai perjanjian kerja bersama dengan memberikan imbalan sesuai UU No. 13/2003 bagi karyawan meninggal atau sakit berkepanjangan imbalan emas untuk karyawan yang berhenti bekerja selain dikarenakan pengunduran diri dan program pengalihan pekerjaan, atau perubahan jalur karier ke bidang yang berbeda dengan bidang sebelumnya (A-life). Perusahaan tidak melakukan pendanaan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut.

The Company maintains its employee post-retirement benefits program based on collective labor agreement by providing benefits according to UU No. 13/2003 for deceased employees or employees with prolonged illness gold reward benefits for employees who retire other than those who resigned and job transfer program or career path change to a different field from the previous job (A-life). The Company does not undertake any funding for this program.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas yang adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of obligation is as follows:

	December 31, 2017	December 31, 2016	
Nilai Kini Liabilitas - Awal Tahun	81.534.331	84.601.653	Present Value Liability - Beginning of Year
Biaya Bunga	6.392.563	6.639.863	Interest Cost
Biaya Jasa Kini	2.447.602	1.899.784	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	(7.798.189)	-	Past Service Cost
Pembayaran Imbalan	(29.623.327)	(13.172.994)	Benefits Payments
Akrual Pembayaran Alih Profesi 2017	74.460.327	-	Accrual of 2017 Profession Shift's Payments
Pembayaran Alih Profesi	(74.460.352)	-	Payment of 2017 Profession Shift
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun (Ekspektasi)	<u>52.952.955</u>	<u>79.968.306</u>	Present Value Liability - End of Year (Expectation)
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto			Re-Measurement of Actuarial Gain (Loss)
- Keuntungan/Kerugian dari Perubahan Asumsi	1.162.536	517.250	Gain/Loss from Assumption Changes -
- Penyesuaian Pengalaman	31.813.008	1.048.775	Adjustment of Experiences -
Akrual Pembayaran Alih Profesi 2018	108.099.430	-	Accrual of 2018 Profession Shift's Payment
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	<u>194.027.929</u>	<u>81.534.331</u>	Present Value Liability - End of Year

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas yang adalah sebagai berikut (lanjutan):

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of obligation is as follows (continued):

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Nilai Kini Liabilitas Tidak Didanai - Akhir Tahun	85.928.499*	81.534.331	Present Value Liability Unfunded - End of Year
Akrual Pembayaran Alih Profesi 2018	108.099.430**	-	Accrual of 2018 Profession Shift's Payment
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	<u>194.027.929</u>	<u>81.534.331</u>	Present Value Liability - End of Year

* Disajikan sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang/Presented as long-term employee benefits liability

** Disajikan sebagai liabilitas imbalan kerja jangka pendek/Presented as short-term employee benefits liability

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

d. Program pasca kerja lainnya (lanjutan)

Rincian keuntungan (kerugian) aktuarial dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2017	2016
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset)		
Imbalan Pasti Neto		
Keuntungan dan Kerugian Aktuarial		
- Perubahan Asumsi Aktuarial	1.162.536	517.250
- Penyesuaian atas Pengalaman	31.813.008	1.048.775
Imbal Hasil atas Aset Program		
Biaya yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	32.975.544	1.566.025

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2017	2016
Biaya Jasa Kini	2.447.602	1.899.784
Biaya Jasa Lalu	(7.798.189)	-
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset)	6.392.563	6.639.863
Akrual Pembayaran Alih Profesi 2017	74.460.327	-
Akrual Pembayaran Alih Profesi 2018	108.099.430	-
Beban yang Diakui	183.601.733	8.539.647

Mutasi saldo pengukuran kembali atas liabilitas/(aset) neto di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Jumlah Pengukuran Kembali Awal Periode	(2.378.729)	(3.944.754)
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial	32.975.544	1.566.025
Akumulasi Jumlah Pengukuran Kembali	30.596.815	(2.378.729)

31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

d. Other post-retirement benefits program (continued)

The details of actuarial gain (loss) in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follow:

Other Comprehensive Income
Re-Measurement of liability (asset) net defined return
Actuarial gain and loss
Actuarial Assumption Changes -
Adjustment for Experience -
Return of Asset Program
Recognized Expenses at Other Comprehensive Income

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

Current Service Cost
Past Service Cost
Net Interest of Liability (Assets)
Accrual of 2017 Profession Shift's Payment
Accrual of 2018 Profession Shift's Payment
Recognized Expenses

The movements of re-measurements on net of liability/(asset) in the consolidated statement of financial position are as follows:

Re-Measurement Amount - Beginning of Period
Actuarial Gain (Loss)
Accumulated Amount of Re-Measurement

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

d. Program pasca kerja lainnya (lanjutan)

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Liabilitas Bersih Awal Tahun	81.534.332	84.601.653
Beban Tahun Berjalan	183.601.733	8.539.647
Pembayaran luran Tahun Berjalan	(29.623.327)	(13.172.994)
Pengukuran Kembali Liabilitas/ Aset	32.975.544	1.566.025
Pembayaran Manfaat Alih Profesi 2017	(74.460.328)	-
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	194.027.955	81.534.332

Pada tahun berjalan dan lima tahun sebelumnya dari nilai kini kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset program dan defisit pada program adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pasti/	85.928.499	81.534.331
Nilai Wajar Aset Program	108.099.430	-
Posisi Pendanaan	194.027.929	81.534.331

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Tingkat Diskonto	6,75%	8,00%
Estimasi Kenaikan Gaji Pegawai Aktif	6,50%	6,50%
Tingkat Mortalita		100% TMI3
Tingkat Cacat		5% dari TMI3
Tingkat Mengundurkan Diri		Usia/ Age
		15 – 29
		30 – 34
		35 – 39
		40 – 50
		51 – 52
		> 52
Metode Aktuarial		Projected Unit Credit
Usia Pensiun Normal		56 tahun/ year
Proporsi Pengambilan Usia Pensiun Normal		100%

**31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS
LIABILITIES (continued)**

**d. Other post-retirement benefits program
(continued)**

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

Net Liability - Beginning of Year
Recognized Expenses
Contribution of Employer for the Year
Re-Measurement of Liability/ Assets
Payment of 2017 Profession Shift
Net Liability - End of Year

The current year and previous five years of funded status of present value of benefit obligation, fair value of plan asset and deficit in the program are as follows:

Present value of Defined Benefit Liability
Fair Value of Program Assets
Funding

The current assumptions used to determined other post-retirement benefits expenses and liabilities.

Discount Rate
Salary Increment
Mortality Rate
Disability Rate
Early Retirement Rate
Actuarial Method
Pension Normal Age
Proportion of normal retirement age

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

d. Program pasca kerja lainnya (lanjutan)

Analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Analisis Sensitivitas		
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	85.928.500	81.534.332
Asumsi Tingkat Diskonto		
- 1,00%	91.508.243	86.828.741
+ 1,00%	80.900.892	76.763.823
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji		
- 1,00%	80.733.496	76.604.987
+ 1,00%	91.599.304	86.915.145

e. Program imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan penghargaan kesetiaan kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja 20, 25, 30 dan 35 tahun berupa piagam penghargaan dan emas masing-masing 5 gram.

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Nilai Kini Liabilitas - Awal Tahun	-	-
Biaya Bunga	985.467	-
Biaya Jasa Kini	630.842	-
Biaya Jasa Lalu	11.982.386	-
Pembayaran Imbalan	(2.436.940)	-
Nilai Kini Laibilitas - Akhir Tahun (Ekspektasi)	11.161.755	-
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto		
- Keuntungan/Kerugian dari Perubahan Asumsi	1.334.084	-
- Penyesuaian Pengalaman	(68.009)	-
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	12.427.830	-

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas yang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Nilai Kini Liabilitas Tidak Didanai - Akhir Tahun	12.427.829	-
Nilai Kini Liabilitas Didanai - Akhir Tahun	-	-
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	12.427.829	-

31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

d. Other post-retirement benefits program (continued)

Sensitivity analysis on December 31, 2017 and 2016 is as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Sensitivity Analysis		
PV Defined Benefit Obligations		
Discount Rate Assumptions		
- 1,00%	91.508.243	86.828.741
+ 1,00%	80.900.892	76.763.823
Salary Increment Assumptions		
- 1,00%	80.733.496	76.604.987
+ 1,00%	91.599.304	86.915.145

e. Other long-term employment benefits program

The company rewards employees with working period of 20, 25, 30 and 35 years in the form of award and gold certificates of 5 grams each.

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Present Value Liability - Beginning of Year	-	-
Interest Cost	985.467	-
Current Service Cost	630.842	-
Past Service Cost	11.982.386	-
Benefits Payments	(2.436.940)	-
Present Value Liability - End of Year (Expectation)	11.161.755	-
Re-Measurement of Actuarial Gain (Loss)		
Gain/Loss from Assumption Changes -	1.334.084	-
Adjustment of Experiences -	(68.009)	-
Present Value Liability - End of Year	12.427.830	-

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of obligation is as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Present Value Liability Unfunded - End of Year	12.427.829	-
Present Value Liability Funded - End of Year	-	-
Present Value Liability - End of Year	12.427.829	-

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

e. Program imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2017	2016
Biaya Jasa Kini	630.842	-
Biaya Jasa Lalu	11.982.386	-
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset) (Keuntungan) Kerugian Aktuarial	985.467	-
	1.266.074	-
Beban yang Diakui	14.864.769	-

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ 31 Desember 2017/	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Liabilitas Bersih Awal Tahun	-	-
Beban Tahun Berjalan	14.864.769	-
Pembayaran Iuran Tahun Berjalan	(2.436.940)	-
Pengukuran Kembali Liabilitas/ Aset	-	-
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	12.427.830	-

Pada tahun berjalan dari nilai kini kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset program dan defisit pada program adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ 31 Desember 2017/	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pasti/	12.427.829	-
Nilai Wajar Aset Program	-	-
Posisi Pendanaan	12.427.829	-

31. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

e. Other long-term employment benefits program (continued)

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as follows:

-	Current Service Cost
-	Past Service Cost
-	Net Interest of Liability (Assets)
-	Actuarial (Gain) Loss
-	Recognized Expenses

The movements in the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

-	Net Liability - Beginning of Year
-	Recognized Expenses
-	Contribution of Employer for the Year
-	Re-Measurement of Liability/ Assets
-	Net Liability - End of Year

The current year and previous five years of funded status of present value of benefit obligation, fair value of plan asset and deficit in the program are as follows:

-	Present value of Defined Benefit Liability
-	Fair Value of Program Assets
-	Funding

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

e. Program imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ 31 Desember 2017/	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Tingkat Diskonto		6,75%	Discount Rate
Tingkat Mortalita		100% TMI3	Mortality Rate
Tingkat Cacat		10% dari TMI3	Disability Rate
Tingkat Mengundurkan Diri			Early Retirement Rate
		<u>Usia/ Age</u>	
		15 – 29	
		30 – 34	
		35 – 39	
		40 – 50	
		51 – 52	
		> 52	
Usia Pensiun Normal		56 tahun/ year	Pension Normal Age
Proporsi Pengambilan Usia Pensiun Normal		100%	Proportion of normal retirement age
Analisis Sensitivitas			Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	12.427.830	-	PV Defined Benefit Obligations
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
- 1,00%	13.074.212	-	- 1,00%
+ 1,00%	11.837.679	-	+ 1,00%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
- 1,00%	11.880.208	-	- 1,00%
+ 1,00%	13.016.034	-	+ 1,00%

32. MODAL SAHAM

32. CAPITAL STOCK

31 Desember 2017/ December 31, 2017

Pemegang Saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Presentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Total (Rupiah Penuh)/ (Full Rupiah)	Shareholders
Saham Seri A Dwiwarna				Series A Dwiwarna - Share
Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00	500	The Government of the Republic of Indonesia
Saham Seri B				Series B - Share
Pemerintah Republik Indonesia	5.080.509.839	70,00	2.540.254.919.500	The Government of the Republic of Indonesia
Manajemen:				Management:
Desi Arrayani (Direktur Utama)	996.500	0,01	498.250.000	Desi Arrayani (President Director)
Hasanudin (Direktur Pengembangan)	8.500	0,00	4.250.000	Hasanudin (Development Director)
Donny Arsal (Direktur Keuangan/Independen)	33.600	0,00	16.800.000	Donny Arsal (Finance/Independent Director)
Subakti Syukur (Direktur Operasi II)	154.000	0,00	77.000.000	Subakti Syukur (Operations II Director)
Karyawan	6.146.310	0,08	3.073.155.000	Employees
Total Manajemen dan Karyawan	7.338.910	0,10	3.669.455.000	Total Management and Employees
BPJS Ketenagakerjaan - JHT	228.470.033	3,15	114.235.016.500	BPJS Ketenagakerjaan - JHT
Masyarakat (masing-masing dibawah 2%)	1.941.552.417	26,75	970.776.208.500	Public (each below 2%)
Total	7.257.871.200	100,00	3.628.935.600.000	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. MODAL SAHAM (lanjutan)

32. CAPITAL STOCK (continued)

31 Desember 2016/ December 31, 2016				
Pemegang Saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Presentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Total (Rupiah Penuh)/ (Full Rupiah)	Shareholders
Saham Seri A Dwiwarna				Series A Dwiwarna - Share
Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00	500	The Government of the Republic of Indonesia
Saham Seri B				Series B - Share
Pemerintah Republik Indonesia	5.080.509.839	70,00	2.540.254.919.500	The Government of the Republic of Indonesia
Manajemen:				Management:
Hasanudin (Direktur Pengembangan)	8.500	0,00	4.250.000	Hasanudin (Development Director)
Muh Najib Fauzan (Direktur Operasi I)	117.600	0,00	58.800.000	Muh Najib Fauzan (Operations I Director)
Subakti Syukur (Direktur Operasi II)	154.000	0,00	77.000.000	Subakti Syukur (Operations II Director)
Karyawan	7.860.410	0,11	3.930.205.000	Employees
Total Manajemen dan Karyawan	8.140.510	0,11	4.070.255.000	Total Management and Employees
BPJS Ketenagakerjaan - JHT	205.555.933	2,83	102.777.966.500	BPJS Ketenagakerjaan - JHT
Masyarakat (masing-masing dibawah 2%)	1.963.664.917	27,06	981.832.458.500	Public (each below 2%)
Total	7.257.871.200	100,00	3.628.935.600.000	Total

Pemegang Saham Seri A mempunyai hak istimewa tertentu sebagai tambahan atas hak Pemegang Saham Seri B. Hak istimewa tersebut mencakup hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan komisaris dan untuk memberikan persetujuan atas: (a) peningkatan modal, (b) perubahan anggaran dasar, (c) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, (d) pembubaran dan likuidasi, (e) pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris.

The Shareholder of Series A shares has certain privileges in addition to any rights of Series B Shareholders. These privileges include the exclusive rights to nominate directors and commissioners and to give approval for: (a) an increase in capital, (b) changes in the article of association, (c) merger, consolidation and acquisition, (d) dissolution and liquidation, (e) appointment and dismissal of directors and commissioners.

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR-NETO

33. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL-NET

	31 Desember 2017 December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Tambahan Modal Disetor dari:			Additional Paid in Capital from:
Penawaran Umum Perdana			Initial Public Offering
Saham Tahun 2007	2.343.266.337	2.343.266.337	Year 2007
Pembelian Saham			Repurchase of Shares
Kembali (Treasury Shares)	(7.741.303)	(7.741.303)	Net Proceeds from
Hasil Bersih			Sales of Treasury Shares
Penjualan Treasury Shares	118.365.066	118.365.066	Net Proceeds from
Hasil Bersih			right issue
Penambahan Modal HMETD	1.543.194.931	1.543.194.931	
Total	3.997.085.031	3.997.085.031	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. DIVIDEN DAN LABA YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA**

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 mengenai Perseroan Terbatas mengharuskan untuk membuat penyisihan cadangan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. UU tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk penyisihan cadangan tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut maka dengan memperhatikan Keputusan RUPS tanggal 29 April 2008 dan Keputusan Rapat Direksi No. 51 tahun 2008 tanggal 9 Desember 2008, Perusahaan memutuskan membentuk Dana Cadangan Wajib sebesar Rp25.000.000.

Berdasarkan keputusan RUPS masing-masing pada tanggal 15 Maret 2017 dan 30 Maret 2016, dengan penggunaan sebagai berikut:

	Laba tahun 2016/ Income for the year 2016	Laba tahun 2015/ Income for the year 2015	
Dividen	566.793.877	293.276.317	<i>Dividend</i>
Cadangan Umum	1.297.518.847	1.148.105.269	<i>General Reserve</i>
Cadangan Wajib	25.000.000	25.000.000	<i>Statutory Reserve</i>
Total	1.889.312.724	1.466.381.586	Total

**34. DIVIDENDS AND APPROPRIATE OF RETAINED
EARNINGS**

Law No. 40 Year 2007 dated August 16, 2007 regarding Limited Liability Company requires that companies to provide reserves at least 20% of the issued and paid up capital. The Law does not require a time frame for the provision of such reserves.

Based on decision in the General Meeting of Shareholders dated April 29, 2008 and decision of Directors Meeting No. 51 Year 2008 dated December 9, 2008, the Company decided to provide statutory reserves amounting to Rp25,000,000.

Based on the General Meeting of Shareholders held on March 15, 2017 and March 30, 2016 the Shareholders agreed to distribute dividend from income as follows:

35. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Akun ini merupakan hak pemegang saham non pengendali atas aset bersih dan bagian rugi bersih entitas anak yang dikonsolidasikan.

- a. Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
PT Solo Ngawi Jaya	550.061.866	368.046.544	<i>PT Solo Ngawi Jaya</i>
PT Jasamarga Kualanamou Tol	418.718.532	214.283.944	<i>PT Jasamarga Kualanamou Tol</i>
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	415.758.823	392.088.988	<i>PT Jasamarga Surabaya Mojokerto</i>
PT Ngawi Kertosono Jaya	394.558.022	185.979.781	<i>PT Ngawi Kertosono Jaya</i>
PT Jasamarga Bali Tol	243.594.771	317.212.048	<i>PT Jasamarga Bali Tol</i>
PT Jasamarga Pandaan Malang	279.397.894	32.454.062	<i>PT Jasamarga Pandaan Malang</i>
PT Marga Lingkar Jakarta	176.403.513	195.612.152	<i>PT Marga Lingkar Jakarta</i>
PT Marga Trans Nusantara	133.162.552	101.220.448	<i>PT Marga Trans Nusantara</i>
PT Marga Sarana Jabar	130.444.322	124.143.667	<i>PT Marga Sarana Jabar</i>
PT Jasamarga Manado Bitung	113.598.423	25.057.011	<i>PT Jasamarga Manado Bitung</i>
PT Cinere Serpong Jaya	97.393.910	95.491.441	<i>PT Cinere Serpong Jaya</i>

35. NON-CONTROLLING INTERESTS

This account represents non-controlling interests in net assets and portion of net loss of the consolidated subsidiaries.

- a. Net equity attributable to non-controlling interests is shown below:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

35. KEPENTINGAN NON PENGENDALI (lanjutan)

- a. Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	77.964.358	67.638.530
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	82.855.355	60.260.416
PT Jasamarga Semarang Batang	58.188.502	51.840.302
PT Jasa Layanan Pemeliharaan	32.724.646	32.670.348
PT Jasamarga Pandaan Tol	21.132.616	22.708.245
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	18.352.533	4.402.102
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	15.364.632	15.392.812
PT Transmarga Jatim Pasuruan	1.938.482	2.666.378
PT Jasamarga Properti	134.552	121.132
PT Jasa Layanan Operasi	59.003	47.819
PT Jasamarga Transjawa Tol	(20.732)	-
PT Trans Marga Jateng	-	350.376.758
Total	3.261.786.575	2.659.714.928

35. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

- a. Net equity attributable to non-controlling interests is shown below: (continued)

<i>PT Jasamarga Kunciran Cengkareng</i>
<i>PT Jasamarga Balikpapan Samarinda</i>
<i>PT Jasamarga Semarang Batang</i>
<i>PT Jasa Layanan Pemeliharaan</i>
<i>PT Jasamarga Pandaan Tol</i>
<i>PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek</i>
<i>PT Jalantol Lingkarluar Jakarta</i>
<i>PT Transmarga Jatim Pasuruan</i>
<i>PT Jasamarga Properti</i>
<i>PT Jasa Layanan Operasi</i>
<i>PT Jasamarga Transjawa Tol</i>
<i>PT Trans Marga Jateng</i>

- b. Laba rugi bersih dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2017	2016
PT Ngawi Kertosono Jaya	6.614.414	4.780.468
PT Jasamarga Semarang Batang	6.348.200	1.014.028
PT Marga Sarana Jabar	6.300.655	(2.938.978)
PT Solo Ngawi Jaya	6.234.530	6.396.937
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	3.394.939	(39.584)
PT Marga Trans Nusantara	3.302.104	(604.534)
PT Cinere Serpong Jaya	1.902.469	(1.172.474)
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	1.150.432	2.102
PT Jasamarga Pandaan Malang	951.832	(345.938)
PT Jasa Layanan Pemeliharaan	54.297	26.278
PT Jasamarga Properti	13.420	9.997
PT Jasa Layanan Operasi	11.184	20.238
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	(8.790)	339
PT Jasamarga Manado Bitung	(358.588)	(142.989)
PT Jasamarga Transjawa Tol	(458.232)	-
PT Transmarga Jatim Pasuruan	(727.897)	16.925
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	(914.055)	(471.044)
PT Jasamarga Pandaan Tol	(1.575.628)	(5.822.578)
PT Trans Marga Jateng	(11.888.322)	(37.054.814)
PT Jasamarga Kualanamu Tol	(16.815.412)	889.149
PT Marga Lingkar Jakarta	(19.208.639)	23.084.496
PT Jasamarga Bali Tol	(29.651.740)	(34.276.624)
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	(61.497.064)	(39.872.160)
Total	(106.825.892)	(86.500.760)

<i>PT Ngawi Kertosono Jaya</i>
<i>PT Jasamarga Semarang Batang</i>
<i>PT Marga Sarana Jabar</i>
<i>PT Solo Ngawi Jaya</i>
<i>PT Jasamarga Balikpapan Samarinda</i>
<i>PT Marga Trans Nusantara</i>
<i>PT Cinere Serpong Jaya</i>
<i>PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek</i>
<i>PT Jasamarga Pandaan Malang</i>
<i>PT Jasa Layanan Pemeliharaan</i>
<i>PT Jasamarga Properti</i>
<i>PT Jasa Layanan Operasi</i>
<i>PT Jalantol Lingkarluar Jakarta</i>
<i>PT Jasamarga Manado Bitung</i>
<i>PT Jasamarga Transjawa Tol</i>
<i>PT Transmarga Jatim Pasuruan</i>
<i>PT Jasamarga Kunciran Cengkareng</i>
<i>PT Jasamarga Pandaan Tol</i>
<i>PT Trans Marga Jateng</i>
<i>PT Jasamarga Kualanamu Tol</i>
<i>PT Marga Lingkar Jakarta</i>
<i>PT Jasamarga Bali Tol</i>
<i>PT Jasamarga Surabaya Mojokerto</i>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

35. KEPENTINGAN NON PENGENDALI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat Entitas Anak yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material secara individu terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

36. PENDAPATAN TOL DAN USAHA LAINNYA

Rincian pendapatan tol dan usaha lainnya adalah sebagai berikut:

35. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

As of December 31, 2017, the Company's management believes that there are no Subsidiaries with non-controlling interests that are individually material to the Company's consolidated financial statements.

36. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES

The details of toll and other operating revenues are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	
Perusahaan			The Company
Jakarta - Cikampek	1.265.742.385	1.232.543.844	Jakarta - Cikampek
JORR Seksi non S	868.979.989	851.187.052	JORR Seksi non S
Cikampek - Padalarang	967.308.897	990.936.606	Cikampek - Padalarang
Cawang - Tomang - Pluit	934.031.476	900.878.444	Cawang - Tomang - Pluit
Jakarta - Bogor - Ciawi	874.006.115	696.994.795	Jakarta - Bogor - Ciawi
Jakarta - Tangerang	755.676.398	580.653.666	Jakarta - Tangerang
Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	541.152.127	511.836.863	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo
Surabaya - Gempol	418.581.308	402.048.143	Surabaya - Gempol
Padalarang - Cileunyi	331.685.269	359.688.538	Padalarang - Cileunyi
Palimanan - Kanci	181.223.951	169.493.134	Palimanan - Kanci
Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	155.841.084	146.080.225	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami
Semarang Seksi A,B,C	138.948.016	136.594.592	Semarang Seksi A,B,C
Belawan - Medan - Tanjung Morawa	113.739.170	105.489.283	Belawan - Medan - Tanjung Morawa
JORR S	-	12.973.882	JORR S
Total	7.546.916.184	7.097.399.067	Total
Entitas Anak			Subsidiaries
Ulujami-Kebon jeruk	276.532.952	337.290.843	Ulujami-Kebon jeruk
Nusa Dua - Bena	149.892.075	143.250.846	Nusa Dua - Bena
Bogor Outer Ring Road	98.690.035	100.212.022	Bogor Outer Ring Road
Gempol - Pandaan	68.114.770	59.725.225	Gempol - Pandaan
Semarang - Solo	57.736.787	152.799.045	Semarang - Solo
Surabaya - Mojokerto	50.531.084	35.999.885	Surabaya - Mojokerto
Medan - Kualanamu	24.243.806	-	Medan - Kualanamu
Gempol - Pasuruan	8.613.553	-	Gempol - Pasuruan
Total	734.355.063	829.277.866	Total
Total	8.281.271.247	7.926.676.933	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PENDAPATAN TOL DAN USAHA LAINNYA
(lanjutan)**

**36. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES
(continued)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	
	Pendapatan pemeliharaan jalan tol	103.960.681	
Jasa Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain	212.770.376	208.750.362	Third Party Toll Road Operating Services
Sewa Lahan	145.681.719	146.859.423	Land Rent
Pendapatan BBM SPBU	109.617.516	180.772.310	Petroleum Revenues
Properti	34.454.591	24.437.106	Property
Pendapatan Iklan	15.625.151	6.294.871	Advertisement
Lainnya	18.285.915	45.195.382	Others
Total	640.395.949	905.670.771	Total

Berdasarkan Kepmen PU No. 783/KPTS/M/2016 tanggal 6 Oktober 2016 untuk ruas Prof. Dr. Ir. Sedyatmo dan berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2016, tarif terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of Minister of Public Works and Public Housing (Men PU) No. 783/KPTS/M/2016, dated October 6, 2016, effective on October 14, 2016, the toll tariff for Prof. Dr. Ir. Sedyatmo section toll road is as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Prof DR IR Sedyatmo	7.000	8.500	10.000	12.500	15.000

Tarif tol berdasarkan KEPMEN PU RI No. 799/KPTS/M/2016 tanggal 14 Oktober 2016 untuk ruas Jakarta - Cikampek dan berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2016, berikut tarif terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of (Men PU) No. 799/KPTS/M/2016 dated October 14, 2016, effective on October 22, 2016, the toll tariff for Jakarta - Cikampek section toll road is as follows:

No.	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Sistem Transaksi Terbuka/ Open System Transaction	4.500	6.500	9.000	11.000	13.000
2	Sistem Transaksi Tertutup/ Close System Transaction	10.500	17.000	21.000	26.000	31.000
3	Ramp/ Ramp	1.500	1.500	1.500	2.000	2.500

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PENDAPATAN TOL DAN USAHA LAINNYA
(lanjutan)**

Berdasarkan Kepmen PU No. 507/KPTS/M/2015 tanggal 28 Oktober 2015 untuk ruas Tol Dalam Kota Jakarta dan berlaku sejak tanggal 1 November 2015 untuk ruas-ruas Jakarta - Tangerang, Serpong - Pondok Aren, Ulujami - Pondok Aren, Padaleunyi, Cipularang, Surabaya - Gempol, Belmera, Palikanci, Semarang (Seksi A.B. dan C), JORR (W.S.E) dan Jagorawi, tarif terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

**36. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES
(continued)**

Based on the Decree of (Men PU) No. 507/KPTS/M/2015 dated October 28, 2015, effective on November 1, 2015, the toll tariff for the longest distance: Jakarta - Tangerang, Serpong - Pondok Aren, Ulujami - Pondok Aren, Padaleunyi, Cipularang, Surabaya - Gempol, Belmera, Palikanci, Semarang (Section A.B. and C). JORR (W.S.E) and Jagorawi is as follows:

No.	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Jakarta-Bogor-Ciawi					
	- Ramp Taman Mini / Dukuh	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	- Jakarta IC-Cimanggis (Sitem transaksi terbuka)	3.500	4.000	5.000	6.000	7.500
	- Cimanggis Ciawi (Sistem transaksi tertutup)	5.000	7.000	10.000	13.000	15.000
2	Lingkar Luar Jakarta (JORR)	9.500	11.500	13.500	17.000	20.500
3	Pondok Aren Ulujami	3.000	5.500	6.500	8.500	10.000
4	Jakarta - Tangerang					
	- Ramp Meruya/Meruya Utara/Kebon Jeruk	2.500	2.500	2.500	3.000	3.500
	- Tomang IC-Tangerang Barat	5.500	6.500	9.000	11.000	13.000
5	Cipularang	37.500	56.000	75.000	93.500	112.000
6	Padaleunyi	9.000	14.500	16.500	21.000	25.000
7	Palikanci	5.500	6.500	10.000	12.500	15.000
8	Semarang (Jatingaleh - Krpyak)	2.500	2.500	3.500	4.500	5.000
	Semarang (Jatingaleh - Srongol)	2.500	2.500	3.500	4.500	5.000
	Semarang (Jatingaleh - Kaligawe)	2.500	3.500	4.500	5.500	7.000
	Semarang (Jatingaleh - Gayamsari)	2.500	3.500	4.500	5.500	7.000
	Semarang (Gayamsari - Kaligawe)	2.500	3.500	4.500	5.500	7.000
9	Surabaya - Gempol					
	Sistem Transaksi Terbuka/ <i>Open System Transaction</i>	3.500	4.500	5.500	7.000	8.000
	Sistem Transaksi Tertutup/ <i>Close System Transaction</i>	4.500	5.500	9.000	11.000	13.000
10	Belmera	7.000	12.000	13.000	16.500	19.500

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PENDAPATAN TOL DAN USAHA LAINNYA
(lanjutan)**

Berdasarkan Kepmen PU No. 214.1/KPTS/M/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan tarif dan sistem pengumpulan tol secara integrasi pada jalan tol Jakarta – Tangerang dan jalan tol Tengerang – Merak Segmen SS Tomang – Tangerang Barat Cikupa. Berlaku Efektif sejak tanggal 10 April 2017. Berikut tarif tol terjauh:

No	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	SS Tomang - Tangerang Barat - Cikupa	7.000	9.500	12.000	16.000	20.000

Sesuai Kepmen PU Nomor: 692/KPTS/M/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Tentang Penetapan Tarif dan Perubahan Sistem Transaksi Pembayaran Tol Pada Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, sehingga adanya perubahan dari sistem transaksi terbuka pada segmen Jakarta IC - Cimanggis dengan Ramp Taman Mini dan Ramp Dukuh dan sistem transaksi tertutup pada segmen Cimanggis – Bogor – Ciawi menjadi sistem terbuka dengan 1 (satu) kali transaksi pada Jalan Tol Jakarta – Bogor - Ciawi.

Berdasarkan peraturan tersebut maka dilakukan penyesuaian tarif sebagai berikut:

No	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Jakarta IC - Bogor - Ciawi	6.500	9.500	13.000	16.000	19.500

Berdasarkan Kepmen PU No. 973 /KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian tarif tol ruas Cawang – Tomang– Pluit dan Cawang – Tanjung Priuk - Ancol Timur – Jembata Tiga dan berlaku sejak tanggal 30 November 2017, tarif tol terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

No	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Jalan Tol Dalam Kota	9.500	11.500	15.500	19.000	23.000

**36. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES
(continued)**

Based on the Decree of (Men PU) No. 214.1/KPTS/M/2017, dated April 3, 2017 regarding Toll tariff adjustment and integrated toll collection system of Jakarta – Tangerang and Tangerang – Merak Segment SS Tomang - Tangerang Cikupa has become effective on April 10, 2017. The changes are follows:

Based on Decree of (Men PU) Number: 692/KPTS/M/2017 dated August 31, 2017 Regarding Tariff Determination and Transaction Change of Toll Road Transaction System at Jakarta-Bogor-Ciawi Toll Road, so that there is a change from open transaction system in Jakarta IC - Cimanggis segment with Ramp Taman Mini and Ramp Dukuh and closed transaction system in the Cimanggis - Bogor - Ciawi segment into an open system with 1 (one) time transaction on Jakarta - Bogor - Ciawi Toll Road.

Based on the regulation, tariff adjustment is as follows:

Based on the Decree of Public Works. 973 / KPTS/M/2017 concerning toll tariff Adjustment of Cawang - Tomang - Pluit and Cawang - Tanjung Priuk – Ancol Timur - Jembatan Tiga and effective on November 30, 2017, the toll tariff for the longest distance is as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PENDAPATAN TOL DAN USAHA LAINNYA
(lanjutan)**

Berdasarkan Kepmen PU No. 974 /KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian tarif tol ruas Surabaya – Gempol dan Kejapanan – Gempol dan berlaku sejak tanggal 30 November 2017, tarif tol terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

No	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Surabaya - Gempol					
	- Sistem Transaksi Terbuka/ <i>Open System Transaction</i>	4.500	6.000	9.500	12.000	14.000
	- Sistem Transaksi Tertutup/ <i>Close System Transaction</i>	3.500	4.500	6.000	8.000	9.500

Berdasarkan Kepmen PU No. 975 /KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian tarif tol ruas Belawan – Medan – Tanjung Morawa dan berlaku sejak tanggal 30 November 2017, tarif tol terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

No	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Belmera	8.000	13.000	14.500	18.000	21.500

Berdasarkan Kepmen PU No. 976 /KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian tarif tol ruas Palimanan - Kanci dan berlaku sejak tanggal 30 November 2017, tarif tol terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

No	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Palikanci	6.000	7.000	10.500	13.500	16.000

Berdasarkan Kepmen PU No. 977 /KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian tarif tol ruas Semarang Seksi A, B, C dan berlaku sejak tanggal 30 November 2017, tarif tol terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

No	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Semarang Seksi A, B, C	2.500	3.500	5.000	6.000	7.000

37. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi adalah kompensasi untuk jasa yang dilakukan Kelompok Usaha dalam pembangunan jalan tol baru dan peningkatan kapasitas jalan tol. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode *cost-plus*, dimana seluruh biaya yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tambahan dengan margin tertentu.

**36. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES
(continued)**

Based on the Decree of Public Works. 974 / KPTS/M/2017 concerning Toll Tariff Adjustment of Surabaya – Gempol and Kejapanan - Gempol and effective on November 30, 2017, the toll tariff for the longest distance is as follows:

Based on the Decree of Public Works. 974 / KPTS/M/2017 concerning Toll Tariff Adjustment of Belawan – Medan – Tanjung Morawa and effective on November 30, 2017, the toll tariff for the longest distance is as follows:

Based on the Decree of Public Works. 976 / KPTS/M/2017 concerning Toll Tariff Adjustment of Palimanan - Kanci and effective on November 30, 2017, the toll tariff for the longest distance is as follows:

Based on the Decree of Public Works. 976 / KPTS/M/2017 concerning Toll Tariff Adjustment of Semarang Section A, B, C and effective on November 30, 2017, the toll tariff for the longest distance is as follows:

37. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSE

Construction revenue is the compensation for the service performed by the Group for building new toll roads and upgrading toll roads capacity. Construction revenue is measured using *cost-plus* method, which specifies the margin and added up to all cost directly attributable to the acquiring cost of the assets.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI
(lanjutan)**

**37. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSE
(continued)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	
Pendapatan Konstruksi	26.170.528.996	7.829.055.294	<i>Construction Revenues</i>
Beban Konstruksi	(26.012.247.894)	(7.782.154.327)	<i>Construction Expenses</i>
Pendapatan Konstruksi - Bersih	158.281.102	46.900.967	<i>Profit from Construction - Net</i>

38. BEBAN TOL DAN USAHA LAINNYA

38. TOLL AND OTHER OPERATING EXPENSES

Akun ini terdiri dari :

This account consist of ;

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	
Gaji dan Tunjangan	1.165.484.075	1.167.044.091	<i>Salaries and Allowance</i>
Penyusutan dan Amortisasi	918.243.930	797.078.131	<i>Depreciation and Amortization</i>
Provisi Pelapisan Ulang	479.007.780	489.398.337	<i>Provision for overlay</i>
HPP Jasa Layanan Pemeliharaan, BBM SPBU & Properti	176.113.546	463.097.221	<i>Cost of sales maintenance services, fuel sold and property</i>
Pajak	294.785.152	276.457.195	<i>Tax expense</i>
Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap	219.577.020	186.664.688	<i>Fixed Asset Repair and Maintenance</i>
Beban Kerja Sama Operasi (KSO)	-	170.930.126	<i>Joint operation expenses</i>
Bahan Bakar, Listrik dan Air	91.480.326	92.552.480	<i>Fuel, Electricity and Water</i>
Sewa Kendaraan dan Peralatan Tol	66.743.515	62.171.264	<i>Car Rental and Equipment Tol</i>
Pelayanan Pemakai Jalan Tol	79.868.366	59.845.082	<i>Toll road user services</i>
Administrasi dan Perlengkapan Tol	50.494.877	49.354.506	<i>Administration and Toll Supplies</i>
Pembersihan Jalan dan Pertamanan	53.713.016	43.233.972	<i>road and landscape Cleaning</i>
Jasa Penjemputan Hasil Tol	40.511.490	38.598.922	<i>Delivery services toll revenue</i>
Lainnya (Masing-Masing Dibawah 3 Miliar)	136.038.380	126.431.334	<i>Others (each below Rp 3 Billion)</i>
Total	3.772.061.472	4.022.857.349	<i>Total</i>

Pada tahun 2016, beban kerjasama operasi merupakan selisih antara jumlah pendapatan tol untuk investor dengan pembayaran liabilitas kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan, termasuk bagian bunga atas liabilitas kerjasama operasi dalam bentuk bagi pendapatan tol dengan jumlah minimum dan angsuran pasti. Beban ini merupakan beban kerjasama operasi dengan PT Bangun Tjipta Sarana dan PT Surya Cipta Swadaya.

In 2016, joint operations expenses represent the difference between the amount of toll revenues for investors' share over the liabilities under joint operation agreements without concession rights, including the share of interest charges on joint operation payable in the form of revenue sharing with minimum payments and fixed installments. These expenses are related with PT Bangun Tjipta Sarana and PT Surya Cipta Swadaya.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

39. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2017	2016
Gaji dan Tunjangan	633.951.607	553.138.600
Administrasi Kantor dan Sumbangan	91.980.684	73.342.513
Penyusutan dan Amortisasi	86.631.546	81.562.139
Jasa Profesional	48.819.165	42.630.466
Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap	73.191.530	48.949.365
Pajak luran dan Retribusi	31.261.849	26.386.509
Sewa	40.200.490	28.674.584
Transportasi dan Perjalanan Dinas	27.533.059	23.226.323
Bahan Bakar, Listrik dan Air	23.510.487	22.352.272
Publikasi	26.826.851	14.209.564
Lainnya (Masing-Masing Dibawah 3 Miliar)	68.559.127	34.528.628
Total	1.152.466.396	949.000.963

39. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expenses are as follows:

Salaries and allowance
Office administration and donation
Depreciation and amortization
Professional fees
Fixed asset repair and maintenance
Taxes, contribution and retribution
Rental
Transportation and business travel
Fuel, electricity and water
Publications
Others (each below Rp 3 Billion)
Total

40. PENGHASILAN KEUANGAN DAN PENGHASILAN LAIN-LAIN

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2017	2016
Penghasilan bunga pinjaman entitas asosiasi dan ventura bersama	45.441.184	-
Penghasilan bunga deposito	154.391.508	178.007.743
Penghasilan jasa giro	84.122.612	24.669.513
Beban pajak deposito	(30.822.841)	(35.616.041)
Beban pajak giro	(16.771.410)	(4.938.203)
Keuntungan penjualan aset tetap	278.726	269.316
Lainnya	55.579.008	194.729.160
Total	292.218.787	357.121.488

Income interest on in associates and joint ventures
Deposits interest income
Current accounts income
Deposits interest expense
Current accounts expense
Gains on disposal of fixed assets
Others
Total

41. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan beban administrasi bank, provisi pinjaman dan lainnya.

Pada tahun 2017, didalam akun beban lain-lain termasuk beban pensiun dini sebesar Rp182.559.758.

41. OTHER EXPENSES

Other expenses represent bank administration expenses, loan provision and other.

In 2017, in other expenses account including early retirements expenses amounted to Rp182,559,758.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

42. BIAYA KEUANGAN - NETO

Rincian biaya keuangan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	
Utang bank	334.107.055	833.220.697	Bank loans
Utang obligasi	396.347.919	548.979.767	Bonds
Utang lembaga keuangan bukan bank	207.705.945	99.296.614	Non-bank financial institutions loan
Pembiayaan syariah	316.125.148	951.798	Syaria financing
Lainnya	14.584.345	26.554.496	Others
Total	1.268.870.413	1.509.003.372	Total

42. FINANCE COSTS - NET

The details of finance costs are as follows:

43. LABA PER SAHAM

Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) sesuai dengan surat persetujuan OJK nomor S-377/D.01/2016 tanggal 18 November 2016 yang menyebabkan jumlah saham Perusahaan berubah dari 6.800.000.000 lembar saham menjadi 7.257.871.200 lembar saham. Jumlah rata-rata tertimbang saham pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 6.821.267.242 lembar saham.

Selama tahun 2017, Perusahaan tidak melakukan pembelian kembali saham maupun menerbitkan saham baru, sehingga jumlah saham pada 31 Desember 2017 adalah 7.257.871.200 lembar.

43. EARNINGS PER SHARE

In 2016, the Company granted a rights issue in accordance to Financial Services Authorization's letter no. S-377/D.01/2016 dated November 18, 2016 resulting in the outstanding shares of the Company increase from 6,800,000,000 shares to 7,257,871,200 shares. The weighted average of outstanding shares as of December 31, 2016 is 6,821,267,242 shares.

During 2017, the Company did not buy repurchase its shares or issued new shares, so the number of shares as of December 31, 2017 is 7,257,871,200 shares.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

43. LABA PER SAHAM (lanjutan)

Laba bersih per saham dihitung dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham pada tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	
Laba bersih (Rupiah penuh)	2.200.256.363.885	1.889.312.723.412	Net income (full Rupiah)
Rata-rata tertimbang saham beredar (lembar)	7.257.871.200	6.821.267.242	Weighted average of outstanding shares
Laba Bersih Per Saham (Rupiah penuh)	303,15	276,97	Earnings per Share (full Rupiah)

44. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Berikut adalah transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang material:

43. EARNINGS PER SHARE (continued)

Earnings per share is calculated from profit of the current year attributable to owners of the parent divided by the weighted average of outstanding shares during the year, with details as follows:

44. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS

The Group normally enters into transactions with related parties. Below are the material transactions with related parties:

Pihak Berelasi/ Related Party	Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transactions
Pemerintah Republik Indonesia Kementerian Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Hak Konsesi atas Ruang Tol, Utang Bantuan Pemerintah, Dana Talangan Pembebasan Tanah dan Perpajakan/ Grantor of Toll Road Concession Rights, Loan from Government Ball Out of Land Acquisition and Taxation
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ Contractor for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Beban Penghargaan Masa Kerja kepada Karyawan/ Expenses of Achievement Rewards to Employees
BPJS Kesehatan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Beban Asuransi Kesehatan Karyawan/ Health Insurance Expenses for Employees
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Beban Asuransi Jiwa Pensiunan Karyawan/ Life Insurance Expenses for Pension Employees
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Investasi Jangka Pendek, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi, Biaya Keuangan dan Pendapatan Bunga/ Placement of Current Accounts, Time Deposits, Short Term Investments, Appropriated Funds, Working Capital Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Finance Charges and Interest Income
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Fasilitas Kredit Investasi, Fasilitas Kredit Sindikasi, Bank untuk Pengumpulan Tol, Biaya Keuangan dan Pendapatan Bunga/ Placement of Current Accounts, Time Deposits, Investment Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Bank for Toll Collection, Finance Charges and Interest Income
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Fasilitas Kredit Investasi, Fasilitas Kredit Sindikasi, Bank untuk Pengumpulan Tol, Biaya Keuangan dan Pendapatan Bunga/ Placement of Current Accounts, Time Deposits, Investment Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Bank for Toll Collection, Finance Charges and Interest Income

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

44. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

44. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

Pihak Berelasi/ Related Party	Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transactions
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Fasilitas Kredit Investasi, Fasilitas Kredit Sindikasi, Biaya Keuangan dan Pendapatan Bunga/ Placement of Current Accounts, Time Deposits, Investment Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Finance Charges and Interest Income
PT Utama Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ Contractor for Construction and Maintenance of Property and Equipment and Toll Roads
PT Istaka Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ Contractor for Construction and Maintenance of Property and Equipment and Toll Roads
BPJS Ketenagakerjaan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Beban Asuransi Kecelakaan Kerja Karyawan, Pemegang Saham Non Pengendali/ Insurance Expenses for Employees and Non Controlling Shareholder
PT Nindya Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ Contractor for Construction and Maintenance of Property and Equipment and Toll Roads
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan, Dana Talangan Tanah Contractor for Construction and Maintenance of Property and Equipment and Toll Roads, Shareholder Loan
PT Pertamina Retail	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Kerjasama Bagi Hasil SPBU, Beban Bahan Bakar Minyak Sebagai Pemasok Persediaan Bahan Bakar Tempat Istirahat/ Revenue from Profit Sharing of SPBU, Engine Fuel Expenses as Supplier of Rest Area's Fuel Inventory
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Beban Listrik Peralatan Tol dan Gedung/ Electricity for Toll Equipment and Buildings
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Dana Talangan Tanah Toll Contractor for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads, Shareholder Loan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Dana Talangan Tanah Toll Contractor for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads, Shareholder Loan
Wika - Adhi - Utama JO	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ Contractor for Construction and Maintenance of Property and Equipment and Toll Roads
Koperasi Jasa Marga Bhakti	Pengendalian Manajemen Kunci/ Key Management Control	Pembelian Aset dan Perlengkapan, Beban Outsourcing Pegawai, Sewa Kendaraan dan Peralatan Tol/ Purchase of Property and Equipment, Outsourcing Expenses, Vehicles and Toll Equipment Lease
Yayasan Dana Pensiun Jasa Marga	Pengendalian Manajemen Kunci/ Key Management Control	Penempatan Dana Imbalan Kerja Karyawan/ Placement of Employee Benefit Funds
PT Ismawa Trimitra	Entitas Asosiasi/ Associated Company	Investasi pada Perusahaan Asosiasi/ Investments in Associated Company
PT Trans Lingkar Kita Jaya	Entitas Asosiasi/ Associated Company	Investasi pada Perusahaan Asosiasi/ Investments in Associated Company
PT Trans Marga Jateng	Entitas Bersama/ Joint Entity	Investasi Entitas Bersama/ Joint Entity Investment
JLP - Kadi International KSO	Dikendalikan bersama oleh JLP/ Joint controlled by JLP	Kerjasama Operasi/ Joint Operation
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Entitas Asosiasi/ Associated Company	Investasi pada Perusahaan Asosiasi dan Pinjaman Pemegang Saham/ Investments in Associated Company and Shareholder Loan
Badan Pengatur Jalan Tol	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Liabilitas Pembebasan Tanah/ Land Acquisition Liabilities
PT Mandiri Manajemen Investasi	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Investasi jangka pendek/ Short-term investment

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

44. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

44. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

a. Pemerintah

a. Government

Kelompok Usaha memiliki Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) mengenai penggunaan fasilitas pinjaman dana untuk pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol baru. Ketika PPJT dialihkan dari Entitas Induk ke Entitas Anak, utang BLU secara otomatis menjadi milik Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:

The Group has a Toll Road Concession Agreements (PPJT) with the General Services Agency-Toll Road Regulatory Agency (BLU-BPJT), Regarding the use of funds loan facilities for land acquisition designated for the development of new toll roads. When PPJT is transferred from the Parent Company to its Subsidiaries, these BLU payables automatically belonged to the Subsidiaries, with detail as follows:

	31 December 2017	31 Desember 2016/	
	December 31, 2017	December 31, 2016	
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	1.219.460.000	1.219.460.000	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Marga Trans Nusantara	973.636.000	973.636.000	PT Marga Trans Nusantara
PT Trans Marga Jateng	-	558.800.000	PT Trans Marga Jateng
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	350.080.120	350.080.120	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Transmarga Jatim Pasuruan	256.000.000	256.000.000	PT Transmarga Jatim Pasuruan
PT Marga Lingkar Jakarta	610.170.000	610.170.000	PT Marga Lingkar Jakarta
Total	3.409.346.120	3.968.146.120	Total

Kelompok Usaha melakukan transaksi atas pekerjaan pelapisan ulang aset tak berwujud jalan tol untuk memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pekerjaan pelapisan ulang diserahkan kepada kontraktor BUMN maupun kontraktor swasta. Total pekerjaan pelapisan ulang dengan PT Yodya Karya (Persero) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp965.312.

The Group entered into toll roads overlay transactions for its intangible assets in fulfilling the minimum level of services (Standar Pelayanan Minimum - SPM) decided by the Indonesian Toll Road Authority (Badan Pengatur Jalan Tol - BPJT). The work of overlay are submitted to both the BUMN and private contractors. The total work of overlay transaction with PT Yodya Karya (Persero) as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp0 and Rp965,312, respectively.

Dalam kegiatan usahanya, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi normal. Transaksi ini termasuk pembayaran oleh Kelompok Usaha atas beban-beban pihak-pihak berelasi atau sebaliknya. Saldo transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with the related parties conducted by normal terms and conditions. These transactions include payments made by the Group to the related parties or vice versa. Balance of related parties accounts as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

44. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

44. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

a. Pemerintah (lanjutan)

a. Government (continued)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	Persentase dari Total Aset/ Percentage from Total Asset	
			31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Aset/ Assets				
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalents				
<i>Bank/ Cash in Banks</i>				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.211.684.364	1.193.247.231	1,53%	2,23%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	279.060.842	864.652.496	0,35%	1,62%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	165.063.406	456.597.389	0,21%	0,85%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	9.198.199	10.187.660	0,01%	0,02%
Sub Total	1.665.006.811	2.524.684.776	2,10%	4,72%
Dolar Amerika Serikat/ <i>United States Dollar</i>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.497	-	0,00%	0,00%
Sub Total	30.497	-	0,00%	0,00%
Deposito Berjangka/ <i>Time Deposits</i>				
Rupiah				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.801.675.588	273.439.508	2,28%	0,51%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.762.000.000	253.500.000	2,22%	0,47%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	377.607.236	24.607.236	0,48%	0,05%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.339.508	535.000.000	0,04%	1,00%
PT Bank Mandiri Taspen Pos	54.000.000	-	0,07%	0,00%
Sub Total	4.030.622.332	1.086.546.744	5,09%	2,03%
Dolar Amerika Serikat/ <i>United States Dollar</i>				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	14.902.800	14.779.600	0,02%	0,03%
Sub Total Deposito Berjangka/ <i>Time Deposits</i>	14.902.800	14.779.600	0,02%	0,03%
Total Kas dan Setara Kas/ Total Cash and Cash Equivalents	5.710.562.440	3.626.011.120	7,21%	6,78%
Investasi Jangka Pendek/ Short - Term Investments				
PT Mandiri Manajemen Investasi	146.529.650	4.529.650	0,19%	0,01%
Piutang Lain-lain/ Other Receivables				
Lancar/ Current				
Kementerian Pekerjaan Umum	9.972.549.597	7.888.497.972	12,59%	14,74%
Bank Penyedia Uang Elektronik	501.183.796	-	0,63%	0,00%
PT Trans Marga Jateng	396.570.199	-	0,50%	0,00%
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	252.166.297	90.562.925	0,32%	0,17%
PT Trans Lingkar Kita Jaya	100.254.560	153.588.647	0,13%	0,29%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75.311.198	21.402.473	0,10%	0,04%
PT Utama Karya (Persero)	38.814.033	8.708.535	0,05%	0,02%
Badan Pengatur Jalan Tol	24.574.490	-	0,03%	0,00%
KSO JLP - Marga Maju Mapan	17.317.613	-	0,02%	0,00%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.949.950	67.432	0,01%	0,00%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.616.037	134.330	0,01%	0,00%
PT Wika Realty	4.773.241	4.222.661	0,01%	0,01%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3.599.189	103.504	0,00%	0,00%
Inkopar Jaga	1.138.750	1.138.750	0,00%	0,00%
KSO JLP - Kadi	913.339	-	0,00%	0,00%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	754.245	741.979	0,00%	0,00%
PT Pertamina Retail	552.202	1.005.810	0,00%	0,00%
KSO JLP - Wijaya Karya	483.641	89.843	0,00%	0,00%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	317.235	763.270	0,00%	0,00%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	180.404	1.716.118	0,00%	0,00%
KSO Waskita - Wika	89.843	-	0,00%	0,00%
PT Utama Marga Waskita	66.517	-	0,00%	0,00%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	22.869	113.574	0,00%	0,00%
PT Pejagan Pemalang Toll Road	22.369	-	0,00%	0,00%
PT Pam Jaya	14.867	-	0,00%	0,00%
PT Bank Syariah Mandiri	282	-	0,00%	0,00%
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	-	103.125	0,00%	0,00%
Lainnya	-	3.716	0,00%	0,00%
Total	11.413.236.763	8.172.964.663	14,41%	15,28%

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

44. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

44. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

a. Pemerintah (lanjutan)

a. Government (continued)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	Persentase dari Total Liabilitas/ Percentage from Total Liabilities	
			31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Utang Bank Jangka Panjang - Bagian Jangka Pendek/ Long Term Bank Loans - Current Maturities				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.263.331	198.821.807	0,03%	0,54%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	178.806.932	67.860.303	0,29%	0,18%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.368.331	49.724.271	0,01%	0,13%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.023.858	1.018.883	0,00%	0,00%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	174.438.602	-	0,29%	0,00%
Subtotal	378.901.054	317.425.264	0,34%	0,85%
Utang Bank Jangka Panjang - Bagian Jangka Panjang/ Long Term Bank Loans - Long Term Portion				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.305.583.928	3.565.634.381	8,72%	9,59%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.016.331.197	2.728.394.180	6,60%	7,34%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.985.750.702	2.301.791.535	4,91%	6,19%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	879.572.448	573.720.839	1,45%	1,54%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	72.042.389	72.791.988	0,12%	0,20%
PT Bank BNI Syariah	73.493.128	-	0,12%	0,00%
Subtotal	13.332.773.791	9.242.332.923	21,80%	24,87%
Total Utang Bank/ Bank Loans	14.990.333.428	12.000.606.771	23,07%	31,44%
Utang Usaha/ Accounts Payable				
PT Utama Karya (Persero)	26.627.132	9.874.008	0,04%	0,03%
Dana Pensiun Jasa Marga	-	-	0,00%	0,00%
Koperasi Jasa Marga Bhakti	4.227.893	5.425.963	0,01%	0,01%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.343.162	2.403.624	0,01%	0,01%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.428.779	633.950	0,00%	0,00%
Lainnya/ Others	13.177.658	2.604.913	0,02%	0,01%
Total Utang Usaha/ Accounts Payable	48.804.624	20.942.458	0,08%	0,06%
Utang Kontraktor Jangka Pendek/ Short-Term Contractors Payable				
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	511.213.854	207.979.459	0,84%	0,56%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	176.687.165	273.722.394	0,29%	0,74%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	179.767.251	187.578.156	0,30%	0,50%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	111.686.871	239.664.151	0,18%	0,64%
Wika-Adhi-Hutama JO	18.282.640	18.282.640	0,03%	0,05%
PT Nindya Karya (Persero)	-	36.162.971	0,00%	0,10%
PT Yodya Karya (Persero)	708.717	2.763.920	0,00%	0,01%
PT Utama Karya (Persero)	-	3.271.300	0,00%	0,01%
PT Virama Karya (Persero)	2.219.734	2.256.918	0,00%	0,01%
PT Jasa Layanan Pemeliharaan	7.430.992	-	0,01%	0,00%
PT Jasa Layanan Pemeliharaan, KSO Wika Industri Energi	-	1.600.801	0,00%	0,00%
Lain-lain (Dibawah 2 Miliar)	240.737	474.622	0,00%	0,00%
	1.008.237.960	973.757.332	1,66%	2,62%
Liabilitas Pembebasan Tanah Jangka Panjang - Bagian Jangka Pendek/ Long-term Land Acquisition Liabilities - Current Maturities				
Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol	1.872.488.859	507.383.043	3,07%	5,42%
Liabilitas Pembebasan Tanah Jangka Panjang - Bagian Jangka Panjang/ Long-term Land Acquisition Liabilities - Long-term Portion				
Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol	109.008.350	320.214.853	0,17%	0,86%
Beban Akrua Jangka Panjang/ Long - term Accrued Expenses				
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.553.236.286	101.421.042	4,20%	0,27%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.110.472.870	507.383.043	3,47%	1,37%
	4.663.709.156	608.804.085	7,67%	1,64%
Utang Kontraktor Jangka Panjang/ Long - term Contractors Payable				
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	255.405.471	210.499.684	0,42%	0,57%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	115.941.654	33.022.735	0,19%	0,09%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	48.364.589	51.665.161	0,08%	0,14%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	63.245.250	82.140.028	0,10%	0,22%
PT Nindya Karya (Persero)	-	11.135.673	0,00%	0,03%
Lain-lain (Dibawah Rp2 Miliar)	722.210	818.864	0,00%	0,00%
	483.679.174	389.282.145	0,80%	1,05%

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

44. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

b. Remunerasi Komisaris dan Direksi

- (i) Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp14.293.811 dan Rp11.448.033.
- (ii) Jumlah remunerasi yang diterima Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp30.419.198 dan Rp27.512.309.

45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)

- (i) Perusahaan telah memperoleh penetapan hak pengusahaan jalan tol (Hak Konsesi) yang diterbitkan oleh Pemerintah meliputi 13 (tiga belas) ruas jalan tol berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 242/KPTS/M/2006 tanggal 8 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan PPJT pada tanggal 7 Juli 2006 untuk masing-masing ruas jalan tol, dengan masa konsesi selama 40 (empat puluh) tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2045, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ruas Jakarta - Bogor - Ciawi, berdasarkan PPJT No. 246/PPJT/VII/Mn/2006;
2. Ruas Jakarta - Tangerang, berdasarkan PPJT No. 247/PPJT/VII/Mn/2006;
3. Ruas Surabaya - Gempol, berdasarkan PPJT No. 248/PPJT/VII/Mn/2006;
4. Ruas Jakarta - Cikampek, berdasarkan PPJT No. 249/PPJT/VII/Mn/2006;
5. Ruas Padalarang - Cileunyi, berdasarkan PPJT No. 250/PPJT/VII/Mn/2006;
6. Ruas Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, berdasarkan PPJT No. 251/PPJT/VII/Mn/2006;

44. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

b. Remuneration of Commissioners and Directors

- (i) Total remuneration received by the Board of Commissioners for the year ended on December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp14,293,811 and Rp11,448,033, respectively
- (ii) Total remuneration received by the Board of Directors for the year ended on December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp30,419,198 and Rp27,512,309, respectively

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)

- (i) The Company has acquired the right of toll road concession (Concession Right) issued by the Government, which consists of 13 (thirteen) toll roads, in accordance with the Minister of Public Works Decree No.242/KPTS/M/2006: dated June 8, 2006, followed by the signing of the PPJT for each toll road dated July 7, 2006 with concession period of 40 (forty) years, and effective on January 1, 2005 until December 31, 2045 with details as follows:

1. Jakarta - Bogor - Ciawi Toll Road, according to PPJT No. 246/PPJT/VII/Mn/2006;
2. Jakarta - Tangerang Toll Road, according to PPJT No. 247/PPJT/VII/Mn/2006;
3. Surabaya - Gempol Toll Road, according to PPJT No. 248/PPJT/VII/Mn/2006;
4. Jakarta - Cikampek Toll Road, according to PPJT No. 249/PPJT/VII/Mn/2006;
5. Padalarang - Cileunyi Toll Road, according to PPJT No. 250/PPJT/VII/Mn/2006;
6. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo Toll Road, according to PPJT No. 251/PPJT/VII/Mn/2006;

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

7. Ruas Cawang - Tomang - Pluit, berdasarkan PPJT No. 252/PPJT/VII/Mn/2006;
8. Ruas Belawan - Medan - Tanjung Morawa, PPJT No. 253/PPJT/VII/Mn/2006;
9. Ruas Semarang Seksi A. B. C, berdasarkan PPJT No. 254/PPJT/VII/Mn/2006;
10. Ruas Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami, berdasarkan PPJT No. 255/PPJT/VII/Mn/2006;
11. Ruas Palimanan - Kanci, berdasarkan PPJT No. 256/PPJT/VII/Mn/2006;
12. Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Ruas E1. E2. E3. W2, berdasarkan PPJT No. 257/PPJT/VII/Mn/2006; dan
13. Ruas Cikampek - Padalarang, berdasarkan PPJT No. 258/PPJT/VII/Mn/2006.

Sehubungan dengan perolehan Hak Konsesi dimaksud, Perusahaan diwajibkan membentuk jaminan pemeliharaan dengan nilai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan tol dan pendapatan usaha lain yang diterima pada atau sebelum tahun terakhir masa konsesi dimana besarnya berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang tersedia dan telah diaudit. Jaminan pemeliharaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa konsesi berakhir dan jaminan pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya masa konsesi.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

7. Cawang - Tomang - Pluit Toll Road, according to PPJT No. 252/PPJT/VII/Mn/2006;
8. Belawan - Medan - Tanjung Morawa Toll Road, according to PPJT No. 253/PPJT/VII/Mn/2006;
9. Semarang Toll Road, Sections A. B. C according to PPJT No. 254/PPJT/VII/Mn/2006;
10. Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami Toll Road, according to PPJT No. 255/PPJT/VII/Mn/2006;
11. Palimanan - Kanci Toll Road, according to PPJT No. 256/PPJT/VII/Mn/2006;
12. Jakarta Outer Ring Road (JORR) Toll Road, Sections E1. E2. E3. W2, according to PPJT No. 257/PPJT/VII/Mn/2006; and
13. Cikampek - Padalarang Toll Road, according to PPJT No. 258/PPJT/VII/Mn/2006.

In connection with the aforementioned Concession Rights, the Company is required to establish a maintenance guarantee with a value of not less than 10% (ten percent) of the actual toll revenue and revenue obtained from other businesses on or before the last year of the concession period whereby such amount is calculated based on the latest audited annual financial statements. The aforementioned maintenance guarantee shall be given to the Government through Indonesian Toll Road Authority (BPJT) within 6 (six) months before the expiration of concession period and shall continue for the successive 12 (twelve) months following the expiration of concession period.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol

1. Ruas Bogor Outer Ring Road

Perusahaan dan PT Jasa Sarana telah menandatangani Akta Kerjasama Pendanaan dan Investasi Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar No. 10 tanggal 3 Oktober 2006 dari Notaris Agus Madjid, S.H., dan Perjanjian Usaha Patungan No. 9 tanggal 11 Mei 2007, dari Notaris Iwan Ridwan, S.H., untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya yang terkait. Perjanjian Usaha Patungan tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan akhir masa konsesi sesuai PPJT (Catatan 1e).

2. Ruas tol Gempol - Pasuruan

Perusahaan dan PT Jatim Marga Utama telah menandatangani Akta Kerjasama Pendanaan dan Investasi Pengusahaan Jalan Tol Gempol - Pasuruan No. 11 tanggal 3 Oktober 2006, dari Notaris Agus Madjid, S.H., dan Akta Perjanjian Usaha Patungan No. 28 tanggal 8 Mei 2007 dari Notaris Retno Suharti, S.H., untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya yang terkait. Perjanjian Usaha Patungan tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan akhir masa konsesi sesuai PPJT.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

(ii) Toll Road Investment Agreements

1. Bogor Outer Ring Road

The Company and PT Jasa Sarana signed a Deed of Financing and Investment of Toll Road Concession Cooperation for Bogor Outer Ring Road No. 10 dated October 3 2006, of Notary Agus Madjid, S.H., and Deed of Joint Venture Agreement No. 9 dated May 11, 2007, of Notary Iwan Ridwan, S.H., in order to implement the toll road concession, which consists of financing, technical planning, construction, operation and maintenance of the toll roads, as well as other related businesses. Such Joint Venture Agreement is effective from the date of signing until the expiration date of concession period in accordance with the PPJT (Note 1e).

2. Gempol - Pasuruan Toll Road

The Company and PT Jatim Marga Utama signed a Deed of Financing and Investment of Toll Road Concession Cooperation of Gempol - Pasuruan No. 11 dated October 3, 2006, of Notary Agus Madjid, S.H., and Deed of Joint Venture Agreement No. 28 dated May 8, 2007, from Notary Retno Suharti, S.H., in order to implement the toll road concession, which consists of financing, technical planning, construction, operation and maintenance of toll road, as well as other related businesses. The Joint Venture Agreement is effective from the date of signing until the expiration date of concession period in accordance with the PPJT.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

3. Ruas tol Semarang - Solo

Perusahaan dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah telah menandatangani Akta Perjanjian Usaha Patungan No. 35 tanggal 8 Juni 2007 dari Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya yang terkait.

Perjanjian Usaha Patungan (PUP) tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan akhir masa konsesi sesuai PPJT. PUP telah dirubah beberapa kali termasuk penambahan PT Astratel Nusantara sebagai salah satu pemegang saham.

4. Ruas tol Cengkareng – Kunciran

Perusahaan telah menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium No. 03/CMS/PKK-XII/05 berdasarkan Akta No. 53 tanggal 21 Mei 2007 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. Konsorsium tersebut terdiri dari (i) Perusahaan; (ii) CMS Works International Limited. Malaysia; (iii) PT Wijaya Karya (Persero); (iv) PT Nindya Karya (Persero); dan (v) PT Istaka Karya (Persero) untuk membangun ruas tol Cengkareng - Kunciran. Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 20% (dua puluh persen).

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

3. Semarang - Solo Toll Road

The Company and PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah have signed a Deed of Joint Venture Agreement No. 35 dated June 8, 2007 from Notary Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., in order to implement the toll road concession, which consists of financing, technical planning, constructing, operating and maintaining of toll road as well as other related businesses.

Such Joint Venture Agreement (JVA) is effective from the date of signing until the expiration date of concession period in accordance with the PPJT. JVA has been amended several times including the addition of PT Astratel Nusantara as the shareholder.

4. Cengkareng - Kunciran Toll Road

The Company entered into the Consortium Agreement No. 03/CMS/PKK-XII/05 as set forth in Deed No. 53 dated May 21, 2007 of Notary Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. The Consortium consists of (i) the Company; (ii) CMS Works International Limited. Malaysia; (iii) PT Wijaya Karya (Persero); (iv) PT Nindya Karya (Persero); and (v) PT Istaka Karya (Persero) to build Cengkareng - Kunciran Toll Road Segment. The Company's shares portion in such Consortium is 20% (twenty percent).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

**4. Ruas tol Cengkareng – Kunciran
(lanjutan)**

Berdasarkan Adendum Perjanjian Konsorsium No. 03/CMS/PKK-XII/05 dengan Akta No. 52 tanggal 21 Mei 2007 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito. S.H., porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar 55%.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 14 Mei 2008 dari Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., telah didirikan PT Jasa Marga Cengkareng (dahulu PT Marga Kunciran Cengkareng) sehubungan dengan proyek Jalan Tol Kunciran - Cengkareng.

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 13 Desember 2010, Akta No. 23 tanggal 13 Desember 2010, Akta No. 32 tanggal 15 Desember 2010 dan Akta No. 37 tanggal 16 Desember 2010 yang seluruhnya dari Notaris Dra. Ayu Tiara Siregar, S.H., perihal Jual Beli Saham antara Perusahaan dengan PT Istaka Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan CMS Works International Limited (CMS WIL) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Jasamarga Kunciran Cengkareng No. 40 tanggal 17 Desember 2010, Proporsi Perusahaan dalam penyertaan saham atas PT Marga Kunciran Cengkareng berubah menjadi 76,2%.

Sejak bulan Desember 2016, PT Marga Kunciran Cengkareng telah mengalami perubahan nama menjadi PT Jasamarga Kunciran Cengkareng yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0023320.AH.01.02 tahun 2016, tanggal 6 Desember 2016.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

**4. Cengkareng - Kunciran Toll Road
(continued)**

Based on Amendment of Consortium Agreement No. 03/CMS/PKK-XII/05 as set forth in Deed No. 52 dated May 21, 2007 of Notary Ny. Poerbaningsih Adi Warsito. S.H., the Company's shares portion in such Consortium has increased to 55%.

Based on Deed of Establishment No. 7 dated May 14, 2008, of Notary Suzy Anggraini Muharam S.H., PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng (previously PT Marga Kunciran Cengkareng) was established in relation to the Kunciran - Cengkareng Toll Road project.

Based on Deed No. 22 dated December 13, 2010, Deed No. 23 dated December 13, 2010, Deed No. 32 dated December 15, 2010 and Deed No. 37 dated December 16, 2010, all of which from Notary Dra. Ayu Tiara Siregar, S.H., regarding the Sale and Purchase of Shares between PT Istaka Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and CMS Works International Limited (CMS WIL), and Deed of Statement of Resolution of General Meeting of Shareholders of PT Jasamarga Kunciran Cengkareng No. 40 dated December 17, 2010, has the Company's shares portion in PT Jasamarga Kunciran Cengkareng is increased to 76.2%.

Since December 2016, PT Marga Kunciran Cengkareng has changed its name to PT Jasamarga Kunciran Cengkareng which was approved by the Minister of Law and Human Rights by Decree No. AHU-0023320.AH.01.02 2016, dated December 6, 2016.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

- (ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

5. Ruas Tol Kunciran - Serpong

Perusahaan telah menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium No. 60 tanggal 22 Mei 2007, dari Notaris Benny Kristianto, S.H., Konsorsium tersebut terdiri dari (i) Perusahaan; (ii) PT Astratel Nusantara; (iii) PT Leighton Contractors Indonesia; dan (iv) PT Transutama Arya Sejahtera untuk membangun ruas tol Kunciran - Serpong. Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 10%.

Berdasarkan Perjanjian Para Pendiri Konsorsium dengan Akta No. 24 tanggal 22 Mei 2007 dari Notaris Benny Kristianto, S.H., antara lain menyebutkan bahwa porsi kepemilikan Perusahaan dalam konsorsium tersebut meningkat menjadi 60%, dimana para pihak setuju untuk merealisasikan porsi kepemilikan final sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada. Para pihak mengindikasikan bahwa realisasi tersebut akan diusahakan untuk diberlakukan segera setelah konsorsium dinyatakan sebagai pemenang proyek dan sebelum pembentukan entitas.

Berdasarkan Akta No. 8 dari Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., pada tanggal 14 Mei 2008, telah berdiri perusahaan konsorsium PT Marga Trans Nusantara sehubungan dengan proyek Jalan Tol Kunciran-Serpong.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

- (ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

5. Kunciran - Serpong Toll Road

The Company signed a Deed of Consortium Agreement No. 60 dated May 22, 2007 of Notary Benny Kristianto, S.H., The Consortium consists of (i) the Company; (ii) PT Astratel Nusantara; (iii) PT Leighton Contractors Indonesia; and (iv) PT Transutama Arya Sejahtera to build Kunciran - Serpong Toll Road. The Company's shares portion in such Consortium is 10%.

Based on the Deed of Consortium Founder Agreement No. 24 dated May 22, 2007 of Notary Benny Kristianto, S.H., the Company's shares portion in the Consortium has increased to 60%, whereby the parties agreed to promptly finalize the realization of such shares proportion in accordance with the prevailing terms and conditions of the consortium. The parties indicated that such realization shall be made effective when the Consortium wins the bid for the project and prior to the establishment of the entity.

Based on the Deed of Establishment No. 8 dated May 14, 2008 of Notary Suzy Anggraini Muharam, S.H., PT Marga Trans Nusantara was established in relation to the Kunciran - Serpong Toll Road project.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

6. Ruas tol JORR seksi W2 utara

Pada tanggal 2 April 2007, Perusahaan bersama-sama dengan PT Jakarta Propertindo telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan tentang Rencana Kerjasama Pengusahaan Jalan Tol JORR W2 Utara. Pada tanggal 24 Agustus 2009, konsorsium mendirikan PT Marga Lingkar Jakarta berdasarkan Akta No. 26 dari Notaris Edi Priyono, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-98-HT.03.02-Th 2002. Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham dalam konsorsium tersebut sebesar 65%.

**7. Ruas tol Medan - Kualanamu -
Tebing Tinggi**

Perusahaan sebagai salah satu peserta konsorsium telah menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium pada tanggal 5 Desember 2012. Akta telah disahkan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-36748.40.10.2014 tanggal 27 November 2014 dengan kemitraan terdiri dari (i) Perusahaan; (ii) PT Waskita Karya (Persero) Tbk; (iii) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; dan (iv) PT Utama Karya (Persero); untuk membangun ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 55%.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 25 November 2014 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., telah didirikan PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT) sehubungan dengan proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

6. JORR toll road section W2 north

On April 2, 2007, the Company and PT Jakarta Propertindo have signed the Preliminary Agreement concerning Cooperation Plan of Toll Road Concession of North Jakarta Outer Ring Road Section W2. Furthermore, by Deed No. 26 dated August 24, 2009 of Notary Edi Priyono, S.H., the Consortium Party has incorporated PT Marga Lingkar Jakarta, which has been legalized with the Minister of Law and Human Rights Decree No. C-98-HT.03.02-Th 2002. The shares portion of the Company shares in such Consortium has been defined as 65%.

**7. Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi
Toll Road**

The Company, as one of consortium participants signed a notarial deed of Consortium Agreement dated December 5, 2012. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-36748.40.10.2014 dated on November 27, 2014, with the partnership consists of (i) The Company; (ii) PT Waskita Karya (Persero) Tbk; (iii) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; and (iv) PT Utama Karya (Persero); to build Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Toll Road. The portion of the Company's shareholding in the consortium is 55%.

Based on the notarial deed of establishment No. 56 dated November 25, 2014 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT) was established and aimed to develop Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi toll road.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

JMKT telah menandatangani PPJT untuk ruas jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi pada tanggal 5 Januari 2015.

8. Ruas tol Solo - Ngawi - Kertosono

Perusahaan bersama-sama dengan PT Waskita Toll Road mengambil alih PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) selaku badan usaha pemegang hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi dan PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ) selaku badan usaha pemegang hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi-Kertosono.

Pengambilalihan dilakukan melalui Perjanjian Penjualan dan Pembelian saham Bersyarat sesuai Akta No. 71 tanggal 31 Maret 2015 dan Amendemen Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham Bersyarat sesuai Akta No. 54 tanggal 29 Mei 2015 serta ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli No. 33 tanggal 15 Mei 2015.

Dengan adanya pengambilalihan tersebut, maka Perusahaan memiliki penyertaan saham pada SNJ sebesar 59,99% dan pada NKJ sebesar 59,99%.

Berdasarkan Akta Nomor 11 Tanggal 13 Desember 2016 dan Akta Nomor 02 Tanggal 3 Januari 2017 yang keduanya dibuat oleh Notaris Aliah, S.H., menyatakan bahwa Perusahaan mengambil alih satu lembar saham dari PT Ferino Putra sehingga Perusahaan memiliki penyertaan saham pada SNJ sebesar 60% dan pada NKJ sebesar 60%.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

JMKT has signed PPJT for Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi toll road on January 5, 2015.

8. Solo - Ngawi - Kertosono Toll Road

The Company, together with PT Waskita Toll Road took over PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) as business entity concession holder for Solo-Ngawi Toll Road, and PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ) as business entity concession holder for Ngawi-Kertosono Toll Road.

The takeover is done through the Agreement of Sale and Purchase of shares in accordance with Conditional Deed No. 71 dated March 31, 2015 and Amendment of Conditional Sales and Purchase of Shares Agreement in accordance with Deed No. 54 dated May 29, 2015, and followed up by the Sale and Purchase notarial deed No. 33 dated May 15, 2015.

After the takeover, the Company owns 59.99% of shares of SNJ and 59.99% of shares of NKJ.

Based on the Deed No. 11 dated December 13, 2016 and the Deed No. 02 dated January 3, 2017 which are both made by Notary of Aliah S.H., said that the Company took over the shares of PT Ferino Putra so that the Company now owns 60% of shares of SNJ and 60% of shares of NKJ.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

- (ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

9. Ruas tol Cinere-Serpong

Perusahaan bersama-sama dengan PT Waskita Toll Road dan PT Jakarta Propertindo telah melakukan pengambilalihan saham PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) selaku badan usaha pemegang hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Cinere-Serpong.

Pengambilalihan dilakukan melalui Perjanjian Penjualan dan Pembelian saham Bersyarat sesuai Akta No. 33, tanggal 15 Mei 2015, serta ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli No. 79 tanggal 29 Juni 2015.

Dengan adanya pengambilalihan tersebut, maka Perusahaan memiliki penyertaan saham dalam CSJ sebesar 55%.

10. Ruas tol Gempol - Pandaan

Perusahaan bersama dengan PT Margabumi Matraya, PT Tirtobumi Adyatunggal dan PT Adhika Prakarsatama mengadakan Perjanjian Usaha Patungan No. 141 tanggal 25 September 1996 untuk menyelenggarakan Jalan Tol Gempol - Pandaan dengan mendirikan PT Margabumi Adhikaraya berdasarkan Akta No. 142 tanggal 25 September 1996.

PT Margabumi Adhikaraya berubah nama menjadi PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) melalui Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 20 Juni 2013.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

- (ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

9. Cinere-Serpong Toll Road

The Company together with PT Waskita Toll Road and PT Jakarta Propertindo took over PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) as business entity concession holder of Cinere-Serpong Toll Road.

The takeover is done through the Agreement of Sale and Purchase of shares in accordance with Conditional Deed No. 33 dated May 15, 2015 and followed up with the Sale and Purchase Deed No. 79 dated June 29, 2015.

After the takeover, the Company owns 55% of shares of CSJ.

10. Gempol - Pandaan Toll Road

The Company, together with PT Margabumi Matraya, PT Tirtobumi Adyatunggal and PT Adhika Prakarsatama has signed a Deed of Joint Venture Agreement No. 141 dated September 25, 1996 in order to operate Gempol - Pandanaan Toll Road by establishing PT Margabumi Adhikaraya based on Deed No. 142 dated September 25, 1996.

PT Margabumi Adhikaraya changed its name to PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) through the Resolution of Extraordinary Meeting of Shareholders No. 4 dated June 20, 2013.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

**10. Ruas tol Gempol – Pandaan
(lanjutan)**

Perusahaan melakukan pembelian saham PT Margabumi Matraya sebesar 9,01% melalui Akta Jual Beli No. 30 tanggal 17 Juni 2015. Sehingga dengan adanya pembelian saham tersebut, maka Perusahaan memiliki penyertaan saham di JPT sebesar 88,86%.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham JPT tanggal 26 November 2015, pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar JPT. Setelah penyetoran oleh Perusahaan, maka porsi saham Perusahaan di JPT meningkat menjadi sebesar 90,71%.

11. Ruas tol Nusa Dua - Tanjung Benoa

PT Jasamarga Bali Tol (JBT) didirikan berdasarkan akta notaris No. 2 tanggal 22 Agustus 2011 dari Paulina S.S. Endah Putri, S.H., dalam rangka pengusahaan ruas tol Nusa Dua-Tanjung Benoa. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011.

JBT mulai beroperasi secara komersial tanggal 1 Oktober 2013. Pada tanggal 31 Desember 2017, kepemilikan saham Perusahaan di JBT adalah sebesar 55%.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

**10. Gempol - Pandaan Toll Road
(continued)**

The Company purchased 9.01% shares of PT Margabumi Matraya through the Sale and Purchase Deed No. 30 dated June 17, 2015. Thereafter, the Company holds an equity stake in JPT of 88.86%.

Based on the Deed of Shareholders resolution in lieu of General Meeting of JPT's shareholders dated November 26, 2015, the shareholders agreed to increase the authorized capital of JPT. After the payment of shares by the Company, the portion of the Company's shares in JPT increased to 90.71%.

11. Nusa Dua - Tanjung Benoa Toll Road

PT Jasamarga Bali Tol (JBT) was established based on notarial deed No. 2 dated August 22, 2011 of Paulina S.S. Endah Putri, S.H., aimed to develop Nusa Dua-Tanjung Benoa toll road. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-57740.AH.01.01 Year 2011 dated November 25, 2011.

JBT started its commercial operation on October 1, 2013. As of December 31, 2017, the Company's ownership in JBT is 55%.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

12. Ruas Tol Surabaya - Mojokerto

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (dahulu PT Marga Nujyasmo Agung) didirikan berdasarkan akta notaris No. 121 tanggal 19 Agustus 1994 dari Sutjipto, S.H., dalam rangka pengusahaan ruas tol Surabaya – Mojokerto. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C2-3473 Tahun 1995 tanggal 22 Maret 1995.

Anggaran Dasar telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir adalah tentang perubahan nama menjadi PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM) yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0011880.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016.

Perusahaan memiliki 55% kepemilikan di JSM.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, ruas jalan tol yang sudah beroperasi diantaranya : Waru - Sepanjang (Seksi A) dan Krian - Mojokerto (Seksi 4).

13. Ruas Tol Semarang - Batang

Perusahaan menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium pada tanggal 23 Desember 2015 dengan PT Waskita Toll Road untuk membangun ruas tol Semarang - Batang.

Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 60%.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

12. Surabaya - Mojokerto Toll Road

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (formerly PT Marga Nujyasmo Agung) were established based on notarial deed No.121 dated August 19, 1994 of Sutjipto, S.H., aimed to develop Surabaya – Mojokerto toll road. The deed of establishment were approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2-3473, dated March 22, 1995.

Article of Association has been amended several times, with the last changes related to the change of the entity name to become PT Jasamarga Surabaya Mojokerto which were validated by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-0011880.AH.01.02 Year 2016 dated June 23, 2016.

The Company has 55% of ownership interest in JSM.

As of December 31, 2017, toll roads which are already operating are: Waru - Sepanjang (Section A) and Krian - Mojokerto (Section 4).

13. Semarang - Batang Toll Road

The Company signed a notarial deed of Consortium Agreement dated December 23, 2015 with PT Waskita Toll Road to build Semarang – Batang Toll Road.

The portion of the Company's ownership in the consortium is 60%.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

**13. Ruas Tol Semarang – Batang
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Pendirian No. 128 tanggal 21 April 2016 dari Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., telah didirikan PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) dalam rangka proyek Jalan Tol Semarang - Batang.

Pada tanggal 27 April 2016, JSB telah menandatangani PPJT untuk ruas jalan tol Semarang - Batang.

14. Ruas Tol Manado - Bitung

Perusahaan sebagai salah satu peserta konsorsium telah menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan kemitraan terdiri dari (i) Perusahaan; (ii) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; (iii) PT PP (Persero) Tbk untuk membangun ruas tol Manado - Bitung.

Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 65%.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 6 Juni 2016 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H.,M.Kn., telah didirikan PT Jasamarga Manado Bitung dalam rangka proyek Jalan Tol Manado - Bitung.

Pada tanggal 9 Juni 2016, JMB telah menandatangani PPJT untuk ruas jalan tol Manado - Bitung.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

**13. Semarang - Batang Toll Road
(continued)**

Based on the notarial deed of establishment No. 128 dated on April 21, 2016 of Notary H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) was established and aimed to develop Semarang - Batang toll road.

On April 27, 2016, JSB has signed PPJT for Semarang – Batang toll road.

14. Manado - Bitung Toll Road

The Company, as one of consortium participants signed a notarial deed of Consortium Agreement dated August 26, 2015 with the partnership consists of (i) The Company; (ii) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; (iii) PT PP (Persero) Tbk. to build Manado – Bitung Toll Road.

The portion of the Company's ownership in the consortium is 65%.

Based on the notarial deed of establishment No. 07 dated on June 6, 2016 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H.,M.Kn, PT Jasamarga Manado Bitung was established and aimed to develop Manado - Bitung toll road.

On June 9, 2016, JMB has signed PPJT for Manado – Bitung toll road.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

15. Ruas Tol Balikpapan - Samarinda

Perusahaan sebagai salah satu peserta konsorsium telah menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan kemitraan terdiri dari (i) Perusahaan; (ii) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; (iii) PT PP (Persero) Tbk; (iv) PT Bangun Tjipta Sarana untuk membangun ruas tol Balikpapan - Samarinda. Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 55%.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tanggal 6 Juni 2016 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., telah didirikan PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) sehubungan dengan proyek Jalan Tol Balikpapan - Samarinda.

Pada tanggal 9 Juni 2016, JBS telah menandatangani PPJT untuk ruas jalan tol Balikpapan - Samarinda.

16. Ruas Tol Pandaan - Malang

Perusahaan sebagai salah satu peserta konsorsium telah menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan kemitraan terdiri dari (i) Perusahaan; (ii) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; (iii) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk membangun ruas tol Pandaan - Malang. Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 60%.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

15. Balikpapan - Samarinda Toll Road

The Company, as one of consortium participants signed a notarial deed of Consortium Agreement dated August 26, 2015 with the partnership consists of (i) The Company; (ii) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; (iii) PT PP (Persero); (iv) PT Bangun Tjipta Sarana to build Balikpapan - Samarinda Toll Road. The portion of the Company's ownership in the consortium is 55%.

Based on the notarial deed of establishment No. 05 dated on June 6, 2016 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) was established and aimed to develop Balikpapan - Samarinda toll road.

On June 9, 2016, JBS has signed PPJT for Balikpapan - Samarinda toll road.

16. Pandaan - Malang Toll Road

The Company, as one of consortium participants signed a notarial deed of Consortium Agreement dated October 19, 2015 with the partnership consists of (i) The Company; (ii) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; (iii) PT Sarana Multi Infrastruktur to build Pandaan - Malang Toll Road. The portion of the Company's ownership in the consortium is 60%.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

**16. Ruas Tol Pandaan - Malang
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 6 Juni 2016 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., telah didirikan PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) untuk pembangunan proyek Jalan Tol Pandaan - Malang.

Pada tanggal 9 Juni 2016, JPM telah menandatangani PPJT untuk ruas jalan tol Pandaan - Malang.

**17. Ruas Tol Jakarta - Cikampek II
Elevated**

Perusahaan telah menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium pada tanggal 1 Februari 2016 dengan kemitraan terdiri dari (i) Perusahaan; (ii) PT Rangi Sugironperkasa untuk membangun ruas tol Jakarta - Cikampek II Elevated. Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 80%.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 24 September 2016 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., telah didirikan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) untuk pembangunan proyek Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Elevated.

Pada tanggal 5 Desember 2016, JJC telah menandatangani PPJT untuk ruas Jakarta - Cikampek II Elevated.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

**16. Pandaan - Malang Toll Road
(continued)**

Based on the notarial deed of establishment No. 09 dated on June 6, 2016 of Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) was established and aimed to develop Pandaan - Malang toll road.

On June 9, 2016, JPM has signed PPJT for Pandaan - Malang toll road.

**17. Jakarta - Cikampek II Elevated Toll
Road**

The Company has signed a notarial deed of Consortium Agreement dated February 1, 2016 with the partnership consists of (i) The Company; (ii) PT Rangi Sugironperkasa to build Jakarta - Cikampek II Elevated Toll Road. The portion of the Company's ownership in the consortium is 80%.

Based on the notarial deed of establishment No. 13 dated on September 24, 2016 of Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) was established and aimed to develop Jakarta - Cikampek II Elevated toll road.

On December 5, 2016, JJC has signed PPJT for Jakarta - Cikampek II Elevated.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

**18. Ruas Tol Jakarta - Cikampek II Sisi
Selatan (Jatiasih-Cipularang-
Sadang)**

Perusahaan sebagai telah menandatangani Akta perjanjian Konsorsium pada tanggal 21 September 2016 dengan kemitraan terdiri dari (i) Perusahaan ; (ii) PT Wira Nusantara Bumi untuk membangun ruas tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan (Jatiasih-Cipularang-Sadang). Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 80%.

Berdasarkan Akta Pendirian No.19 tanggal 29 Desember 2017 dan Akta Perjanjian Usaha Patungan No. 18 tanggal 29 Desember 2017 telah didirikan PT Jasamarga Japek Selatan (JJS).

Pada tanggal 29 Desember 2017, JJS telah menandatangani PPJT untuk ruas tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan Jatiasih-Cipularang-Sadang).

19. Ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi

Perusahaan telah menandatangani Akta perjanjian Konsorsium pada tanggal 25 September 2015 dengan kemitraan terdiri dari (i) Perusahaan ; (ii) PT Waskita Toll Road; (iii) PT Brantas Abipraya (Persero) untuk membangun ruas tol Probolinggo – Banyuwangi. Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di Konsorsium tersebut sebesar 55%.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

**18. Jakarta - Cikampek II Selatan
(Jatiasih-Cipularang-Sadang) Toll
Road**

The Company has signed the consortium agreement on September 21, 2016 with partnership consisting of (i) the Company; (ii) PT Wira Nusantara Bumi to build the Jakarta-Cikampek II South Side (Jatiasih-Cipularang-Sadang) toll road section. The portion of the Company's ownership in the consortium is 80%.

Based on the Establishment Deed No.19 dated December 29, 2017 and Deed of Joint Venture Agreement No. 18 dated December 29, 2017 has been established PT Jasamarga Japek Selatan (JJS)

On December 29, 2017, JJS signed the PPJT for the Jakarta-Cikampek II toll-section of South Jatiasih-Cipularang-Sadang toll road).

**19. Probolinggo – Banyuwangi Toll
Road**

The Company as one of the consortium participants has signed the consortium agreement on September 25, 2015 with partnership consisting of (i) the Company; (ii) PT Waskita Toll Road; (iii) PT Brantas Abipraya (Persero) to build the Probolinggo - Banyuwangi toll road. The portion of the Company's ownership in the consortium is 55%.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

**19. Ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Pendirian No.21 tanggal 29 Desember 2017 dan Akta Perjanjian Usaha Patungan No. 20 tanggal 29 Desember 2017 telah didirikan PT Jasamarga Probolinggo-Banyuwangi (JPB).

Pada tanggal 29 Desember 2017, JPB telah menandatangani PPJT untuk ruas tol Probolinggo-Banyuwangi.

b. Perjanjian Penggunaan Dana Bergulir Pembelian Tanah untuk Jalan Tol dengan Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol (BLU - BPJT)

Entitas anak memiliki perjanjian dengan BLU - BPJT mengenai penggunaan dana bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka pengusahaan ruas jalan tol yang dikelola oleh Entitas Anak sebagai berikut:

	31 December 2017 December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	1.219.460.000	1.219.460.000
PT Marga Trans Nusantara	973.636.000	973.636.000
PT Trans Marga Jateng	-	558.800.000
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	350.080.120	350.080.120
PT Transmarga Jatim Pasuruan	256.000.000	256.000.000
PT Marga Lingkar Jakarta	610.170.000	610.170.000
Total	3.409.346.120	3.968.146.120

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

**19. Probolinggo – Banyuwangi Toll
Road (continued)**

Based on the Establishment Deed No.21 dated December 29, 2017 and the Deed of Joint Venture Agreement No. 20 dated December 29, 2017, it has been established PT Jasamarga Probolinggo-Banyuwangi (JPB).

On December 29, 2017, JPB has signed the PPJT for Probolinggo-Banyuwangi toll road.

b. Agreement of Fund Facility for Reimbursement of Land Aquisition for Toll Road with BLU – BPJT

The Subsidiaries has agreements with the BLU - BPJT concerning the usage of fund for reimbursement of land acquisition cost of toll roads developed by the subsidiaries with values as follows:

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Marga Trans Nusantara
PT Trans Marga Jateng
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Transmarga Jatim Pasuruan
PT Marga Lingkar Jakarta

Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**b. Perjanjian Penggunaan Dana Bergulir
Pembelian Tanah untuk Jalan Tol dengan
Badan Layanan Umum - Badan Pengatur
Jalan Tol (BLU - BPJT) (lanjutan)**

Tata cara penggunaan dana bergulir pada BLU-BPJT untuk pengadaan tanah jalan tol diatur dalam Peraturan Menteri PU No.04/PRT/M/2007, tanggal 26 Februari 2007. BLU-BPJT akan melaksanakan pembayaran terlebih dahulu (dana talangan), untuk pembelian tanah untuk pembangunan ruas jalan tol yang merupakan kewajiban dari Entitas Anak kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam PPJT. Dalam hal 1 (satu) seksi selesai dibebaskan, Entitas Anak harus mentransfer seluruh biaya ganti rugi tanah termasuk bunga ke Rekening BLU-BPJT dan BLU-BPJT membuat Berita Acara Serah Terima Tanah kepada entitas.

Dalam hal Perjanjian Pengusahaan Ruas Jalan Tol untuk ruas jalan tol dialihkan kepada Entitas Anak dari Perusahaan, maka hak dan kewajiban Perusahaan dalam Perjanjian Penggunaan Dana BLU ini akan dialihkan kepada Entitas Anak.

Menunjuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2008 tentang tata cara penggunaan dana bergulir pada Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol untuk pengadaan tanah jalan tol diatur penghapusan *surety bond* (jaminan) dalam perjanjian Penggunaan Dana Bergulir BLU, maka sebagai pengganti jaminan atas pengembalian dana bergulir ini akan diberlakukan *cross default* PPJT apabila Perusahaan gagal membayar dana bergulir BLU.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**b. Agreement of Fund Facility for
Reimbursement of Land Acquisition for Toll
Road with BLU – BPJT (continued)**

The procedure using of pre-fund at BLU-BPJT for toll road land acquisition is based on the Decree of Public Works No.04/PRT/M/2007 dated February 26, 2007. BLU-BPJT will conduct the payment firstly, for acquisition land for toll road construction, which represents the Subsidiaries obligation to the Government, according to concession rights agreement (PPJT). In case one section has been completed, the Subsidiaries should transfer all land acquisition costs including interest to BLU-BPJT account and BLU-BPJT should provide of land hand over report to the entity.

After the transfer of the Company's rights under the Concession to its Subsidiaries, the Company's rights and obligations in the BLU Fund Usage Agreement will be transferred to its Subsidiaries.

Referring to the Decree of the Minister of Public Works No.14/PRT/M/2008 regarding the procedure for pre-fund usage at Public Service Assistance Unit ("Badan Layanan Umum /BLU") for land acquisition of toll road which stipulated the cancellation of surety bond on pre-fund usage agreement of BLU, and as a replacement of guarantee on the prepayment of pre-fund the cross default will be applied on PPJT if the Company failed to repay such pre-fund to BLU.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**c. Perjanjian Dana Talangan Tanah untuk
Entitas Anak dan Ventura Bersama**

Untuk kepentingan percepatan penyelesaian pembebasan lahan, Perusahaan dan pemegang saham minoritas telah memberikan pinjaman dana talangan tanah untuk Entitas Anak dan Ventura Bersama berikut:

1. PT Trans Marga Jateng (TMJ)
2. PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)
3. PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)
4. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM)
5. PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT)
6. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)
7. PT Marga Trans Nusantara (MTN)
8. PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC)
9. PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)
10. PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)
11. PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)
12. PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)
13. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS)
14. PT Marga Sarana Jabar (MSJ)

**d. Kerjasama Pengoperasian Jalan Tol dengan
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta**

Berdasarkan Surat Kuasa No.111/SK/2003 tanggal 21 November 2003, Perusahaan telah memberi kuasa kepada JLJ, entitas anak, untuk melakukan pengoperasian, pengamanan dan pemeliharaan aset proyek JORR termasuk penyerahan pelaksanaan pekerjaan usaha lain. Surat Kuasa tersebut terakhir diubah dengan Surat Perubahan II tanggal 29 Desember 2006 jangka waktu kuasa selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2006.

Berdasarkan akta perjanjian No. 068/KONTRAK-DIR/2010 tanggal 30 Desember 2010, Perusahaan telah menyerahkan pelaksanaan pengoperasian, pengamanan dan pemeliharaan jalan tol ruas JORR dan ruas Ulujami-Pondok Aren selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 akta perjanjian tersebut telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Adendum XIII atas Perjanjian Pengoperasian, Pengamanan dan Pemeliharaan Jalan Tol Ruas JORR Seksi W2, S, E1 dan E2+E3 serta Ruas Ulujami - Pondok Aren.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**c. Loan Agreement with Subsidiaries and A
Joint Venture Land Bridging Fund.**

To accelerate land acquisition, the Company and minority shareholders had provided land bridging fund to the following Subsidiaries and a Joint Venture:

1. PT Trans Marga Jateng (TMJ)
2. PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)
3. PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)
4. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM)
5. PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT)
6. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)
7. PT Marga Trans Nusantara (MTN)
8. PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC)
9. PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)
10. PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)
11. PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)
12. PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)
13. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS)
14. PT Marga Sarana Jabar (MSJ)

**d. Toll Road Joint Operation with PT Jalantol
Lingkarluar Jakarta**

Based on the Power of Attorney No.111/SK/2003 dated November 21, 2003, the Company has given authority JLJ, a subsidiary, to operate, safeguard and maintain JORR project assets and to manage other operations. The Power of Attorney mentioned was changed with Alteration Letter II dated December 29, 2006, to extend the due date for 1 (one) year effective from December 29, 2006.

Based on the agreement No. 068/KONTRAK-DIR/2010 dated December 30, 2010, the Company has appointed the implementation of the operation, safe guarding and maintenance of the JORR and Ulujami-Pondok Aren toll road sections for over 3 years start which be effective since January 1, 2011 until December 31, 2013. As of October 31, 2017, has amended several times, the latest with Amendment XIII of Agreement of the Operation, Safe Guarding and Maintenance of JORR W2, S, E1 and E2+E3 Toll Road section and Ulujami - Pondok Aren toll road section.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**d. Kerjasama Pengoperasian Jalan Tol dengan
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (lanjutan)**

Berdasarkan Adendum XI, kedua belah pihak menyetujui tentang penambahan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya, pada Adendum XII dan Adendum XIII, kedua belah pihak menyetujui tentang perubahan biaya pengoperasian, pengamanan dan pemeliharaan atas ruas tersebut untuk tahun 2016 dan 2017.

**e. Kerjasama Pengoperasian Jalan Tol dengan
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
(CMNP)**

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan CMNP dalam bentuk pengoperasian jalan tol secara terpadu yang dimuat dalam Akta No. 42 tanggal 4 Juni 1993 juncto Akta No. 386 tanggal 31 Desember 1994.

Dalam Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum No. 272-A/KPTS/2996 dan Menteri Keuangan No. 434/KMK.016/2996 tanggal 20 Juni 1996 tentang Pengoperasian Terpadu Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta (Tomang-Cawang Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga Pluit-Grogol Tomang) serta Penetapan Angka Perbandingan Pembagian Pendapatan Tol dinyatakan bahwa jalan tol lingkar dalam kota dijadikan sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan tol dalam kota Jakarta yang pengoperasiannya dilakukan secara terpadu dengan bagi pendapatan tol masing-masing sebesar 25% untuk Perusahaan dan sebesar 75% untuk CMNP.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.JL.01.04-Mn/582 tanggal 7 November 2002, ditetapkan persentase bagi hasil jalan tol dalam kota Jakarta antara CMNP dan Perusahaan sebagai berikut:

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**d. Toll Road Joint Operation with PT Jalantol
Lingkarluar Jakarta (continued)**

Based on Amendment XI, both parties agreed to extend the agreement period for 3 (three) years and commencing from January 1, 2016 up to December 31, 2019. Furthermore, on Addendum XII and Addendum XIII, both of parties agreed about operating costs, security, and maintenance cost changes of these toll road section for year 2016 and 2017.

**e. Toll Road Joint Operation with PT Citra
Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP)**

The Company has entered into a joint operation agreement with CMNP in the form of integrated toll road operation as put forth in the Deed No. 42 dated June 4, 1993 in conjunction with the Deed No.386 dated December 31, 1994

Based on the Joint Decrees of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. 272-A/KPTS/2996 and the Minister of Finance No. 434/KMK.016/2996 dated June 20, 1996 regarding the integrated operation of the Jakarta Inner Ring Road (Tomang-Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga Pluit-Grogol Tomang) and determination of Toll Revenue Sharing Ratio, the inner city ring road will be operated as one toll road network system with toll road revenue sharing of 25% for the Company and 75% for CMNP.

Based on the subsequent Decree of the Minister of Housing and Regional Infrastructure No.JL.01.04-Mn/582 dated November 7, 2002, the Jakarta Inner Ring Road revenue sharing between CMNP and the Company is set forth as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**e. Kerjasama Pengoperasian Jalan Tol dengan
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
(CMNP) (lanjutan)**

	Persentase Bagi Hasil/ Percentage of Revenue Sharing	
	CMNP	Perusahaan/ Company

•Mulai Awal Konsesi s/d 9 Mei 2002	75%	25%
•Mulai 10 Mei 2002 s/d 31 Desember 2002	65%	35%
•Mulai 1 Januari 2003 s/d Akhir Masa Konsensi (Tahun 2025)	55%	45%

**f. Kerjasama Pengoperasian Jalan Tol dengan
PT Bintaro Serpong Damai (BSD)**

Perusahaan telah mengadakan kerjasama kontrak manajemen dengan BSD sebagai operator jalan tol berdasarkan perjanjian kerjasama pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol Pondok Aren - Serpong No.004/SPK-DIR/1998 tanggal 19 Mei 1998, yaitu dimulai sejak tanggal pengoperasian sampai dengan berakhirnya masa penyelenggaraan jalan tol Pondok Aren-Serpong atau pada saat diakhirinya perjanjian ini mana yang lebih awal. Berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.217/1/ARB-BANI/2006 tanggal 31 Agustus 2006, lingkup pengoperasian Perusahaan sebagai berikut:

1. Pengoperasian gerbang tol Pondok Ranji (Pondok Aren Timur).
2. Pelayanan lalu lintas dan keamanan pengguna jalan tol serta pengamanan aset, dengan catatan yang dilakukan oleh Perusahaan adalah yang menyangkut patroli seperti kendaraan rusak dan kecelakaan sesuai lingkup pekerjaan patroli sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol yang dikeluarkan Menteri Pekerjaan Umum.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**e. Toll Road Joint Operation with PT Citra
Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP)
(continued)**

•Beginning of Concession Period until May 9, 2002
•From May 10, 2002 to December 31, 2002
•From January 1, 2003 to the End of Concession Period (Year 2025)

**f. Toll Road Joint Operation with PT Bintaro
Serpong Damai (BSD)**

The Company has entered into a joint operation agreement with BSD as toll road operator for Pondok Aren - Serpong section based on toll road operation and maintenance agreement No.004/SPK-DIR/1998 dated May 19, 1998, which started from the date of operation until the expiration of the toll concession for Pondok Aren-Serpong or at the time of the termination of the agreement, whichever is earlier. Based on the Decree of the Indonesian Board of Arbitration No.217/1/ARB-BANI/2006 dated August 31, 2006, the scope of operations are as follows:

1. Operation of Pondok Ranji toll gates (East Pondok Aren).
2. Providing patrol and safety service for toll road users and safeguarding toll road assets whereby the Company is dealing with toll road users in the patrol area including damaged vehicles and accidents on toll roads in compliance with Standard of Minimum Service (SPM) for toll roads issued by the Minister of Public Works.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

g. Perjanjian Kerjasama Operasi

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama operasi dengan sejumlah investor dalam rangka pembangunan, pembiayaan dan penyelenggaraan jalan tol. Secara umum, pokok yang diatur dalam perjanjian kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan adalah sebagai berikut:

- (i) Investor membangun dan mendanai pembangunan jalan tol sesuai dengan desain, spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (ii) Investor menyerahkan jalan tol tersebut yang telah selesai dibangun kepada Perusahaan untuk dikelola dan dioperasikan.
- (iv) Pembayaran kepada investor selama masa kerja operasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Bagi hasil pendapatan tol; atau
 2. Bagi hasil pendapatan tol dengan jaminan pembayaran minimum; atau
 3. Pembayaran secara angsuran dalam jumlah tetap (angsuran pasti) selama masa kerjasama operasi.

Rincian proyek kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan adalah sebagai berikut:

Investor/ Investors	Proyek Kerjasama Operasi/ Joint Operation Project	Bagian Pendapatan Tol/ Toll Revenue Sharing	Masa Kerjasama Operasi/ Joint Operation Period
<u>Bagi Hasil Pendapatan Tol/ Toll Revenue Sharing</u>			
<i>Pelebaran Ruas Jalan/ Widening of Toll Road</i>			
PT Bangun Tjipta Sarana	Cikampek Cibitung	69%	20 Tahun, sejak 1989/ 20 Years, since 1989
PT Bangun Tjipta Sarana	Cawang Cibitung	41%	22 Tahun, sejak 1994/ 22 Years, since 1994
PT Adhika Prakarsatama	Jakarta - Tangerang	27%	17 Tahun 9 Bulan, sejak 1994/ 17 Years 9 Month, since 1994
<u>Simpang Susun/ Toll Road Interchanges</u>			
PT Surya Cipta Swadaya	Karawang Timur II	4 - 14%	17 Tahun, sejak 1998/ 17 Years, since 1998

Semua perjanjian kerjasama operasi diatas telah berakhir pada tahun 2016.

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

g. Joint Operation Agreements

The Company has entered into joint operation agreements with several investors for the construction, financing and operation of toll roads. Generally, the key provisions stipulated in such agreements are as follows:

- (i) The investor builds and finances toll road projects according to the design, specification and requirements.
- (ii) The investor hands over the completed toll road projects to be managed and operated by the Company.
- (iv) Payments to the investors during the operations period are arranged under one of the following:
 1. Toll revenue sharing; or
 2. Toll revenue sharing with minimum guaranteed payment; or
 3. Fixed installments during the joint operations period.

Details of joint operations agreement without operating rights are as follows:

All of the above joint operation agreement have been expired in 2016.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR

Estimasi nilai liabilitas yang diambil alih sesuai dengan Surat Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSKS) No.KEP-02/K.KSKS/02/2001 tanggal 5 Februari 2001, sebesar Rp1.070.521.000 dengan rincian sebagai berikut:

Ruas Jalan Tol dan Investor/ JORR Sections and Investors	Estimasi Kewajiban/ Estimated Liabilities	Surat Ketetapan Dasar Estimasi/ Letter of Liability Estimation Basis
Pondok Pinang - Cikunir (Seksi/ Section S dan/ and E1) - MNB	721.149.000	No. IJK/5/0257 tanggal 12 Januari 2001/ dated January 12, 2001
Cikunir - Tanjung Priok (Seksi/ Section E2, E3, N) - CBMP	243.415.000	No. SFN/031/2000 tanggal 11 Januari 2000/ dated January 11, 2000
Kebon Jeruk - Pondok Pinang (Seksi/ Section W2) - CMSP	105.957.000	No. 2000.1128/DIRCO - DPI tanggal 1 Nopember 2000/ dated November 1, 2000
Total	1.070.521.000	

Berdasarkan Akta No. 42 dan 43 tanggal 19 November 2003 dari Notaris Imas Fatimah S.H., dicapai kesepakatan antara Perusahaan, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA sebelumnya disebut Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN) dan para kreditur JORR berkenaan dengan penyelesaian utang yang terkait dengan proyek JORR sebagai berikut:

1. Utang kepada PPA dan para kreditur JORR lainnya senilai Rp1.070.521.000 tidak dikonversi menjadi ekuitas di JLJ melainkan akan diselesaikan oleh Perusahaan;
2. Utang yang berhubungan dengan JORR Seksi non S sebesar Rp548.521.000 diselesaikan dengan pembayaran tunai sebesar Rp274.260.500 dan sisanya dengan penerbitan obligasi JORR I Tahun 2003 sebesar Rp274.260.500 kepada PPA dan para kreditur JORR; dan
3. Sisa utang JORR sebesar Rp522.000.000 yang berhubungan dengan Seksi S (JORR Seksi S) akan diselesaikan Perusahaan setelah terdapat pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. JORR Debt Restructuring

The estimated liability to be taken over, according to the Decree of the Committee for Financial Sector Policy (KSKS) No.KEP-02/K.KSKS/02/2001 dated February 5, 2001, was Rp1,070,521,000, with details as follows:

Based on the Deed No. 42 and 43 dated November 19, 2003 of Notary Imas Fatimah S.H., the Company has reached agreements with PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA formerly the Indonesian Banking Restructuring Agency or IBRA) and other JORR creditors regarding the final settlement of JORR debt obligation as follows:

1. JORR debt obligations to PPA and other JORR creditors amounting to Rp1,070,521,000 will be settled by the Company instead of being converted into equity in JLJ;
2. Part of debt obligations associated with JORR Section excluding Section S, amounting to Rp548,521,000 will be settled by cash payment of Rp274,260,500 and the remaining balance of Rp274,260,500 will be settled by the issuance of JORR I Bond year 2003 series to PPA and the other JORR creditors; and
3. The remaining JORR debt obligations associated with Sections (JORR Section S), amounting to Rp522,000,000 will be settled by the Company after the execution of the Supreme Court Verdict validating the Company's concession rights for Section S.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR (lanjutan)

Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. 154/01.10/FU.1/10/2003 tanggal 14 Oktober 2003 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perampasan Barang Bukti tanggal 7 April 2004, Menteri Pekerjaan Umum dalam Surat Keputusan No.276/KPTS/M/2005, tanggal 9 Juni 2005 tentang Perubahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang - Jagorawi (JORR Seksi S) kepada Perusahaan, telah diputuskan antara lain:

1. Mengubah wewenang penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang - Jagorawi (JORR Seksi S) kepada Perusahaan untuk melunasi kredit dari Kreditur Sindikasi; dan
2. Dana sebesar Rp50.431.648 dalam *Escrow Account* yang tidak ada kaitan dan relevansi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tegas dan jelas terhadap JORR Seksi S untuk sementara tidak diperhitungkan dalam pembayaran utang sampai adanya klarifikasi berdasarkan penelitian lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Setelah seluruh kredit dari Kreditur Sindikasi untuk pembangunan JORR S dilunasi, Pemerintah akan menentukan kemudian pengelolaan JORR Seksi S sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 276/KPTS/M/2005 dan Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) JORR Seksi S tanggal 29 Desember 2005, Perusahaan mencatat aset hak pengusahaan jalan tol dan kewajiban karena pemberian hak pengusahaan jalan tol masing-masing sebesar Rp522.000.000. Perusahaan telah melunasi kewajiban JORR Seksi S sebesar Rp522.000.000 dengan pembayaran tunai sebesar Rp261.000.000 pada tanggal 3 Januari 2006 dan sisanya diselesaikan melalui penerbitan obligasi JORR II Tahun 2005 pada tanggal 5 Januari 2006.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. JORR Debt Restructuring (continued)

By reference to the Decree of the Supreme Court No.720 K/Pid/2001 dated October 11, 2001, Instruction Letter of Execution of the Decree from District Attorney of Central Jakarta No.154/01.10/FU.1/10/2003 dated October 14, 2003, Minutes of Execution of the Confiscation of Evidence dated April 7, 2004, the Minister of Public Works Decision Letter No.276/KPTS/M/2005 dated June 9, 2005, regarding the change of authority of the operator of JORR Pondok Pinang - Jagorawi Section (JORR Section S) to the Company, it has been decided as follows:

1. To change the authority of the operator of JORR Pondok Pinang - Jagorawi Section (JORR Section S) to the Company in order to settle the credits from the syndicated loans; and
2. The funds of Rp50,431,648 in the escrow account, which were not related to and relevant to the project accountability were temporarily not included for debt repayment until there is a clarification based on further investigation by the Development and Finance Supervisory Board.
3. After the syndicated loans for construction of JORR S are fully paid off, the Government will decide the authority upon JORR Section S in accordance to the Decree of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Based on Decree of Minister of Public Works No. 276/KPTS/M/2005 and the Debt Settlement Agreement for JORR Section S dated December 29, 2005, the Company registers its toll roads concession right and obligation for handing over the right to development of toll roads each in the amount of Rp522,000,000. The Company has settled the JORR Section S debt obligations in the amount of Rp522,000,000 by paying in cash of Rp261,000,000 on January 3, 2006 and the remaining balance through the issuance of JORR II Year 2005 bonds on January 5, 2006.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR (lanjutan)

Di dalam surat dari BPJT No. 845/BPJT/KE/PW.10.01/ 2009 tanggal 15 Oktober 2009 dan No. 993/BPJT/KU.09.03/2009 tanggal 15 Desember 2009, disebutkan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan tol JORR Section S diberikan kepada Perusahaan sampai dengan tercapainya pelunasan utang dari Kreditur Sindikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penunjukan pihak independen untuk melakukan analisa/kajian terhadap pendapatan tol, beban serta arus kas JORR Seksi S dalam kaitannya dengan proyeksi pelunasan utang tersebut.

Perusahaan telah mengirimkan surat kepada BPJT pada bulan September 2011 mengenai hasil analisa/kajian pihak independen tersebut. Pada tanggal 23 Januari 2013, Perusahaan mendapatkan surat dari Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum (PU) perihal pemisahan pendapatan tol JORR Seksi S dari pendapatan JORR dan Perusahaan telah melakukannya.

Pada tanggal 20 Maret 2013, Perusahaan telah menerima Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 80.1/KPTS/M/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Seksi Pondok Pinang - Jagorawi (JORR Seksi S) yang berisi antara lain:

1. Menugaskan Perusahaan untuk melaksanakan pengoperasian sementara dan pemeliharaan Jalan Tol JORR Seksi S sampai dengan BPJT menetapkan operator tetap.
2. Tugas operasi dan pemeliharaan jalan tol JORR S meliputi sebagai berikut:
 - a. Pengoperasian dan pemeliharaan rutin Jalan Tol JORR Seksi S termasuk penanganan darurat.
 - b. Pemeliharaan berkala dan rehabilitasi/rekonstruksi kerusakan akibat bencana alam setelah mendapat persetujuan Menteri cq. Kepala BPJT.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. JORR Debt Restructuring (continued)

In the letters from BPJT No. 845/BPJT/KE/PW.10.01/2009 dated October 15, 2009 and No. 993/BPJT/KU.09.03/2009 dated December 15, 2009, it was stated that the authority of developing JORR Seksi S Toll Road is handed over to the Company until debt obligations with the Syndicated creditors have been fully settled. As such an independent body must be selected to perform an analysis/review of the toll revenues, liabilities as well as the cash flow of JORR Section S in relation to the projected settlement of such debt.

The Company has sent letters to BPJT in September 2011 the results of analysis/assessment of independent party. On January 23, 2013, the Company obtained a letter from the Secretary-General of the Ministry of Public Works (PU) with respect to separation of toll revenue from income JORR Section S and the Company has separated the revenue.

On March 20, 2013, the Company received Decree Letter from the Minister of Public Works No. 80.1/KPTS/M/2013 dated February 25, 2013, regarding the temporary operation of Jakarta Outer Ring Road Section Pondok Pinang - Jagorawi (JORR Section S) which stipulated that:

1. The Company is assigned to temporarily operate and maintain JORR Section S until BPJT legally decides the legitimate operator.
2. Operation and maintenance of JORR Section S includes among others are:
 - a. Regular operation and maintenance of JORR Section S including emergency responses.
 - b. Periodic maintenance and rehabilitation/ reconstruction of damages due to natural disasters, after obtaining approval from the Head of BPJT.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR (lanjutan)

3. Pendapatan dari Pengoperasian Jalan Tol JORR Seksi S setelah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud diktum kedua, dipisahkan dan dimasukkan kedalam rekening khusus.
4. Melaporkan secara periodik setiap bulan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol JORR Seksi S termasuk status rekening khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum cq. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol.
5. Koneksi Jalan Tol JORR Seksi S akan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum secara proporsional berdasarkan hasil audit dari auditor yang ditunjuk bersama Perusahaan, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Marga Nurindo Bhakti.
6. Sampai dengan tanggal berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 276/KPTS/M/2005 tentang Perubahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Seksi Pondok Pinang - Jagorawi (JORR Seksi S) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 26 Juni 2013, melalui surat No. JL.01.03-Mn/417 Menteri Pekerjaan Umum memerintahkan agar PT Hutama Karya (Persero), PT Marga Nurindo Bhakti dan Perusahaan membuat kesepakatan bersama untuk menunjuk auditor independen dalam rangka mengaudit JORR Seksi S selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal diterimanya surat dimaksud. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan PT Hutama Karya, PT Marga Nurindo Bhakti dan Perusahaan tidak menyerahkan kesepakatan bersama terkait penunjukan auditor independen dimaksud maka Pemerintah akan menunjuk auditor untuk mengaudit Perusahaan Tol JORR Seksi S.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. JORR Debt Restructuring (continued)

3. Operation and toll revenue of JORR Section S, after deduction of fees referred to in the second point, is separated and placed in a particular bank account.
4. Periodic report is compulsory to be submitted monthly to the Minister of Public Works cq. Head of BPJT clarifying the operation and maintenance of JORR Section S, including the statement of balance of particular bank accounts.
5. JORR Section S concession will be determined by the Minister of Public Works proportionally based on the results of the audit by the appointed auditors agreed by the Company, PT Hutama Karya (Persero) and PT Marga Nurindo Bhakti.
6. As of the date of this Decree Letter, the Decree of the Minister of Public Works No. 276/KPTS/M/2005 regarding the change of authority of JORR Section S operation is revoked and no longer valid.
7. This decree is valid starting from the date of enactment.

On June 26, 2013, by letter No. JL.01.03-Mn/417, the Minister of Public Works has assigned PT Hutama Karya (Persero), PT Marga Nurindo Bhakti and the Company to make a mutual agreement regarding the appointment of an independent auditor to perform audit of JORR Section S at the latest 14 days after date of receipt of the letter referred to. If until the specified time, PT Hutama Karya, PT Marga Nurindo Bhakti and the Company did not submit the relevant collective agreement of the appointment of independent auditors, the government would appoint an auditor to audit the JORR Section S Toll Concession.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR (lanjutan)

Mengingat tidak tercapainya kesepakatan dalam waktu 14 hari tersebut, maka Pemerintah menunjuk BPK sebagai auditor untuk melakukan audit terhadap JORR Seksi S.

Pada tanggal 5 September 2014, Perusahaan menerima Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 515/KPTS/M/2014 dimana antara lain berisi:

1. Hak Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR "S") diberikan kepada: (i) PT Marga Nurindo Bhakti untuk melunasi kewajiban sisa hutang kepada sindikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; dan (ii) Perusahaan untuk pengembalian biaya investasi terkait Jalan Tol JORR S dengan masa konsesi sampai tahun 2029.
2. Sisa hutang PT Marga Nurindo Bhakti kepada sindikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, sedangkan pengembalian biaya investasi Perusahaan sesuai dengan hasil audit BPK.
3. PT Marga Nurindo Bhakti dan Perusahaan berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan rutin dan berkala serta rehabilitasi/ rekonstruksi kerusakan Jalan Tol JORR S akibat Bencana Alam.
 - b. Memenuhi aturan Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 390/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaporkan secara periodik setiap triwulan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol JORR S termasuk tetapi tidak terbatas mengenai pendapatan tol kepada Menteri PU cq. Kepala BPJT.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. JORR Debt Restructuring (continued)

Considering the disagreement within such 14 days, then the Government appointed BPK as the auditor to perform audit of JORR Section S.

On September 5, 2014, the Company received the Decision Letter of the Minister of Public Works No. 515/KPTS/M/2014 with some important points as follows:

1. The Concession Rights of Jakarta Outer Ring Road Section Pondok Pinang-Jagorawi (JORR S) is delegated to: (i) PT Marga Nurindo Bakti in order to settle remaining debt to syndicate of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; and (ii) the Company as the repayment of investment costs related to JORR S toll road, for a period up to 2029.
2. The remaining debt of PT Marga Nurindo Bakti to bank syndicate of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is defined in accordance with the FIRST dictum, which was determined by the Directorate General of State of Ministry of Finance, while the repayment of the investment costs of the Company is defined in accordance with the BPK audit results.
3. PT Marga Nurindo Bhakti and the Company are obliged to:
 - a. Carry out the operation, routine and periodical maintenance, and also rehabilitation/ reconstruction of defective JORR S toll road, caused by natural disasters.
 - b. Comply to the Minimum Service Standards of toll road as specified in the regulation from the Minister of Public Works No. 390/PRT/M/2005 on Minimum Service Standards of Toll Road, and comply to all associated legislation.
 - c. Submit quarterly report on the implementation of operation and maintenance of JORR S toll road, including but not limited to the toll revenue report to the Minister of Public Works cq. Head of BPJT.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR (lanjutan)

4. PT Marga Nurindo Bhakti wajib membayar hutangnya kepada negara cq Kementerian Keuangan RI qq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan melaporkan status pelunasan hutang secara periodik setiap triwulan kepada Menteri PU cq Kepala BPJT.
5. PT Marga Nurindo Bhakti dan Perusahaan berhak mendapatkan jasa pengoperasian dan keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama masa pengoperasian sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.
6. Dalam hal pelunasan sisa hutang PT Marga Nurindo Bhakti dan pengembalian biaya investasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA telah terpenuhi sebelum masa konsesi berakhir sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, maka perusahaan Jalan Tol JORR S wajib diserahkan kepada Negara/Pemerintah cq PT Utama Karya (Persero).
7. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol JORR "S" akan ditandatangani oleh Badan Pengatur Jalan Tol berdasarkan kesepakatan antara PT Marga Nurindo Bhakti dan Perusahaan, dengan masa konsesi yang berlaku sejak pelunasan hutang PT Marga Nurindo Bhakti yang ditanggung PPA oleh Perusahaan, sedangkan hal-hal terkait tindakan korporasi dari pihak lain wajib diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 80.1/KPTS/M/2013 tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang - Jagorawi (JORR S) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. JORR Debt Restructuring (continued)

4. *PT Marga Nurindo Bhakti is obliged to pay its debt to the state cq Directorate General of State of Ministry of Finance as referred to the SECOND dictum and to submit report on the status of debt payment, periodically every three months, to the Minister of Public Works cq Head of BPJT.*
5. *PT Marga Nurindo Bhakti and the Company are entitled to the economic benefits in accordance with the services performed during the operation period, as stated in the FIRST dictum.*
6. *In terms of the repayment of the remaining debt of PT Marga Nurindo Bhakti and the repayment of investment costs of the Company, as referred to in the SECOND dictum, as achieved before the end of concession period, as referred to in the FIRST dictum, the concession rights of JORR S toll road must be handed over to the State/government cq PT Utama Karya (Persero).*
7. *Concession Agreement of JORR S toll road will be signed by the Toll Road Regulatory Agency, based on agreement between PT Marga Nurindo Bhakti and The Company, with the concession period since the debt settlement of PT Marga Nurindo Bhakti, which is guaranteed by Indonesian PPA by the Company, meanwhile the related matters to corporate actions with the other party shall be resolved in accordance with the legislation.*
8. *With the enactment of this decree, the decree of The Minister of Public Works No. 80.1/KPTS/M/2013 on Temporary Operation of Jakarta Outer Ring Road Section Pondok Pinang - Jagorawi (JORR S) is revoked and declared invalid.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR (lanjutan)

9. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol JORR S.

Perusahaan telah menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 515/KPTS/M/2014 dengan mengirimkan surat No. AA.HK.1092 tanggal 16 Oktober 2014, dimana antara lain berisi:

- Perusahaan telah menghitung kembali tambahan investasi di JORR S dan fee jasa pengoperasian. Atas perhitungan tersebut, Perusahaan menyatakan lunas pada bulan April 2013.
- Dengan penyelesaian Penetapan Pengembalian tambahan investasi dan fee jasa pengoperasian, Perusahaan tidak menjadi pihak dalam PPJT JORR S.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia melalui surat No. JL 03.04-Mn/546 menyampaikan sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum memahami bahwa seluruh nilai investasi tambahan dari Perusahaan dan fee jasa pengoperasian jalan Tol JORR S sudah terlunasi pada bulan April 2013, dan juga usulan mengenai Perusahaan tidak menjadi pihak dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
2. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka penetapan PPJT JORR S kiranya Perusahaan segera membahas lebih lanjut dengan Badan Pengatur Jalan Tol untuk: i) penetapan pengembalian investasi, dan ii) fee jasa pengoperasian jalan Tol JORR S.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. JORR Debt Restructuring (continued)

9. This decision takes effect from the signing date of Concession Agreement of JORR S toll road.

The Company responded to Decision Letter from the Minister of Public Works No. 515/KPTS/M/2014 by letter No. AA.HK.1092 dated October 16, 2014, with some important points as follows:

- The Company had made recalculations of additional investment in JORR S and its associated operating fees. From the recalculations, the Company stated that the cost that had been disbursed was fully paid off in April 2013.
- At the time the decision of return on additional investment and its associated operation fees was assigned, the Company was no longer a part of the PPJT of JORR S.

The Company received a response from the Minister of Public Works by letter No. JL 03:04-Mn/546 dated October 17, 2014, which stated that:

1. The Ministry of Public Works comprehends that the total amount of additional investment and its associated operating fees, which the Company had been disbursed for JORR S, had been paid off in April 2013 and has received proposal of withdrawal from the concession agreement (PPJT).
2. Based on the above statement and in accordance with the arrangement of Concession Agreement of JORR S, the Company should immediately discuss with the Toll Road Regulatory Agency in order to determine the repayment of: i) additional investment, and ii) the associated operational fees of JORR S.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR (lanjutan)

Atas hal tersebut, mengingat investasi di JORR S telah lunas sejak bulan April 2013 dan selain itu sejak tanggal 25 Februari 2013, Perusahaan tidak lagi mengakui pendapatan tol dari aset tersebut, maka Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi atas aset perusahaan jalan tol JORR S dan menghapusbukukan aset JORR S dari laporan keuangan Perusahaan mulai bulan Mei 2013.

Pada tanggal 16 Maret 2016, Perusahaan telah menyerahkan kembali penugasan pelaksanaan pengoperasian sementara dan pemeliharaan Jalan Tol JORR S (sebagaimana yang diamanatkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 80.1/KPTS/M/2013 tanggal 25 Februari 2013) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Kembali Penugasan Pelaksanaan Pengoperasian Sementara dan Pemeliharaan Jalan Tol JORR Seksi S (Pondok Pinang - Jagorawi) Nomor 01/BA/M/2016 dan Nomor 12/BA-DIR/2016.

Adapun lingkup penyerahan dari Berita Acara tersebut meliputi penyerahan seluruh aset jalan tol JORR Seksi S dan hasil pengoperasian jalan tol JORR Seksi S sejak shift 1 tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan shift 3 tanggal 15 Maret 2016, yang terdapat dalam escrow account Bank tersendiri sebesar Rp1.112.606 (Catatan 9).

Pada tanggal 31 Mei 2017, Perusahaan menyerahkan pendapatan Tol Elektronik (non Tunai) periode tanggal 1 Januari 2016 (Shift 1) sampai dengan 6 Maret 2016 (Shift 1), bunga jasa giro, pendapatan iklan, dan pendapatan tol tunai pada tanggal 16 Maret 2016 (Shift 1) kepada kas negara sebesar Rp16.850.367.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. JORR Debt Restructuring (continued)

Given these conditions, the investment in JORR S has been paid since April 2013, and in addition to that, from February 25, 2013, the Company no longer recognized toll revenue from these assets, and changed its accounting treatment on toll road concession rights for JORR S and write-off JORR S asset in the Company's financial statements starting May 2013.

On March 16, 2016, the Company had restored the temporary assignment to operate and maintain JORR S toll road (as mandated on Decision Letter Ministry of Public Works No.80.1/KPTS/M/2013 dated February 25, 2013) to the Ministry of Public Works and Housing through Agreement to Hand Back Assignment to Operate and Maintain temporary JORR S Toll Road (Pondok Pinang - Jagorawi) No. 01/BA/M/2016 and No. 12/BA-DIR/2016.

The scope of restoration mentioned above are all of JORR S assets and revenue of JORR S toll road since February 25, 2013 shift 1 up to March 15, 2016 shift 3, which includes on separated escrow bank account amounting to Rp1,112,606 (Note 9).

On May 31, 2017, the Company granted Toll Electronic (non-Cash) revenues for the period January 1, 2016 (Shift 1) until March 6, 2016 (Shift 1), current account interest, advertising revenue and cash toll revenue at March 16, 2016 (Shift 1) to the state treasury amounting to Rp16,850,367.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**i. Perjanjian Pengoperasian Jalan Tol
Jembatan Surabaya - Madura (Suramadu)**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Penugasan Kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol untuk menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, maka Perusahaan telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja No. 446/BPJT/SPMK/KE/2009 dengan Badan Pengatur Jalan Tol atas nama Menteri Pekerjaan Umum.

Sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum No. KU.03.01-Mn/339 tanggal 18 Juni 2012, perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Suramadu, Perusahaan ditetapkan untuk melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Jembatan Suramadu dengan jadwal pelaksanaan selama 6 tahun (2012-2017).

Pada tanggal 11 Juli 2014, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) mengenai pengusahaan Jalan Tol Jembatan Suramadu yang merupakan bagian dari pengusahaan Jalan Tol Jembatan Suramadu.

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Jembatan Suramadu telah ditandatangani antara Perusahaan dengan BPJT dalam akta notaris Rina Utami Djauhari, S.H., No. 15 tanggal 20 Agustus 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah tagihan Perusahaan adalah sebesar Rp26.232.182.

j. Pinjaman Pemegang Saham

Masing-masing pada tanggal 9 Desember 2016 dan 26 Januari 2017, Perusahaan dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia telah menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham dengan total nilai sebesar Rp228.951.256. Pengembalian dana dan tingkat suku bunga telah ditentukan sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati sampai dengan tanggal 25 Januari 2018.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**i. Agreement Toll Road Operation of Surabaya
- Madura (Suramadu) Bridge**

Based on the Decree of Minister of Public Works No. 391/KPTS/M/2009 dated June 4, 2009 about the Assignment for Head of Toll Road Coordination to sign the concession toll road, the Company signed Instruction Letter Work Beginning No. 446/BPJT/SPMK/KE/2009 with Toll Road Coordination Board in the name of the Minister of Public Works.

Based on the Decree of Minister of Public Works No. KU.03.01-Mn/339 dated June 18, 2012, about the Auction Winner Determination of Suramadu Toll Road Operation and Maintenance, the Company was assigned to perform Suramadu Toll Road operation and maintenance with the implementation schedule for six years (2012-2017).

On July 11, 2014, the Company signed the agreement with Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) regarding Concession of Suramadu Toll Road, which is part of the concession of Suramadu Toll Road.

Concession Agreement of Suramadu Toll Road was signed by the Company and BPJT as stated in notarial deed No. 15 dated August 20, 2014 of Notary Rina Utami Djauhari, S.H.

As of December 31, 2017, the Company's outstanding receivable amounted to Rp26,232,182.

j. Shareholder Loan Agreement

On December 9, 2016 and January, 26, 2017, respectively, the Company and PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia has signed shareholder loan agreements with total value of Rp228,951,256. The repayment and interest rate have been determined based on the agreed payment schedule on January 25, 2018.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

j. Pinjaman Pemegang Saham (lanjutan)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, jumlah tagihan adalah sebesar Rp252.166.297 (termasuk bunga).

k. Proyek Jalan Tol – Porsi Pemerintah

Merupakan jalan tol ruas Semarang-Solo seksi Bawen-Solo yang dibangun berdasarkan surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia kepada Perusahaan No.JL.03.04-Mn/858 tertanggal 6 September 2016 mengenai dukungan Pemerintah pada beberapa ruas jalan tol yang belum teralokasi, diantaranya pembangunan jalan tol Semarang-Solo seksi Bawen-Solo yang pekerjaannya dilaksanakan oleh SNJ, entitas anak.

Pada tanggal 28 Desember 2016, SNJ mengadakan Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Salatiga-Kartasura dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") dimana Waskita berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan jalan tol dengan nilai kontrak sebesar Rp3.119.280.997 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai). Pembayaran atas total nilai kontrak dilakukan oleh SNJ kepada Waskita secara sekaligus selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara (*Provisional Hand Over*).

Pada tanggal 20 Desember 2017, SNJ telah menandatangani addendum PPJT sehingga biaya konstruksi tersebut dicatat sebagai bagian dari Hak Pengelolaan Jalan Tol.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

j. Shareholder Loan Agreement (continued)

As of December 31, 2017, the outstanding receivable amounted to Rp252,166,297 (include interest).

k. Toll Road Project – Government Portion

Represents toll road of Semarang-Solo segment Bawen-Solo section that constructed based on a letter from the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic Indonesia issued to the Company No.JL.03.04-Mn/858 dated September 6, 2016 concerning Government support on several unallocated toll road sections among others Semarang-Solo of Bawen-Solo section whose work is carried out by SNJ, a subsidiary.

On December 28, 2016, SNJ entered into a construction service contract for Semarang- Solo Toll Road Construction of Salatiga- Kartasura section with PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") whereby Waskita is responsible to perform toll road construction and maintenance works with a contract value of Rp3,119,280,997 (including Value Added Tax). The payment of the total contract value will be done by SNJ to Waskita in full at once at the latest 60 (sixty) working days after the signing of Provisional Hand Over Report.

On December 20, 2017, SNJ has signed PPJT addendum therefore the toll road construction cost recorded as part of Toll Road Concession Rights.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI

a. Kewajiban Karena Pengakhiran Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan

Pada tahun 1994, Perusahaan melakukan kerjasama operasi dengan PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) untuk pembangunan Jalan Tol Cikampek – Padalarang, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) No. 297 tanggal 21 Desember 1994. Namun demikian, pada 18 Juli 2001, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) dengan Surat Keputusan No.417 mencabut keputusan pemberian izin Kerjasama Penyelenggaraan Jalan Tol antara Perusahaan dengan CGMN. Pada tanggal 25 Juli 2001, Perusahaan mengakhiri PKP dengan CGMN.

Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) No. 297 tanggal 21 Desember 1994 menyebutkan bahwa bila terjadi pengakhiran masa penyelenggaraan jalan tol lebih awal sebelum masa konsesi berakhir, maka Perusahaan berkewajiban untuk mengambil alih seluruh utang dan harus memenuhi hak Penanam Modal (CGMN). Dalam pasal 14.1 PKP disebutkan bahwa Perusahaan harus membayar sejumlah uang atas nilai buku jalan tol setelah dikurangi nilai kewajiban yang harus diambil alih Perusahaan.

Perusahaan telah melakukan estimasi nilai aset akibat pengakhiran PKP dengan CGMN sebesar Rp202.454.407 yang merupakan nilai buku yang telah diaudit atas aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 1999. Perusahaan masih terus mengupayakan penyelesaian penetapan secara definitif atas jumlah liabilitas.

Perusahaan telah membentuk tim untuk mengkaji penyelesaian permasalahan akibat pengakhiran PKP Jalan Tol Cikampek – Padalarang antara Perusahaan dan CGMN.

Pada tanggal 23 Juni 2014 melalui surat No. AA.HK05.0.645, Perusahaan telah memberikan tanggapan atas surat dari Kementerian BUMN No. S-268/MBU/D2/2014 tanggal 10 Juni 2014 mengenai rencana pengajuan gugatan oleh Trafalgar House Construction (Jersey) Limited (THCJ) yang bertindak sebagai pemegang saham mayoritas CGMN melalui Arbitrase Internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia.

46. CONTINGENCIES

a. Obligation Due to Termination of Concession Agreement

In 1994, the Company entered into a joint operation with PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) for construction of the Cikampek – Padalarang Toll Road as set forth in the Concession Agreement No. 297 dated December 21, 1994. However, on July 18, 2001, the Minister of Housing and Regional Infrastructure with the Letter No.417 revoked the decision granting permission of Toll Road Joint Operation license between the Company and CGMN. For that reason, on July 25, 2001, the Company terminated the Concession Agreement with CGMN.

The Concession Agreement No. 297 dated December 21, 1994 states that if there is termination of concession agreement before the concession period is due, the Company has an obligation to take over the overall liabilities and should fulfill the rights of shareholders (CGMN). Article 14.1 of the Concession Agreement states that the Company should pay some amount over the book value of the toll road after deducting amount of liabilities taken over by the Company.

The Company has recorded the estimated assets value as a result of termination of PKP with CGMN amounting to Rp202,454,407 which constitutes the book value that has been audited on the settlement assets on December 31, 1999. The Company is still on the process of determining the definitive value of liabilities.

The Company has formed a team to analyze the disputed settlement that has arisen from the termination of the Cikampek-Padalarang Toll Road PKP between the Company and CGMN.

On June 23, 2014, through Letter No. AA.HK05.0.645, the Company has responded to the letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. S-268/MBU/D2/2014 dated June 10, 2014, regarding the filing plan by Trafalgar House Construction (Jersey) Limited, (THCJ) which acts as the majority shareholder of CGMN, through International Arbitration to the government of the Republic of Indonesia.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

a. Kewajiban Karena Pengakhiran Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (lanjutan)

Pada tanggal 28 Februari 2017, THCJ menyampaikan surat kepada BKPM mengenai rencana pengajuan gugatan arbitrase terhadap Pemerintah Indonesia. Dalam hal untuk menjawab surat dari THCJ, BKPM mengundang rapat Perusahaan melalui surat Nomor 18/B.6/A.3/2017 tanggal 7 Maret 2017.

Perusahaan secara lisan menyampaikan bahwa penyelesaian permasalahan terkait pengakhiran PKP dengan CGMN diselesaikan sesuai ketentuan dalam PKP. Dalam hal ini, pembayaran kompensasi kepada CGMN berdasarkan nilai buku CGMN yang telah diaudit oleh auditor yang ditunjuk bersama.

b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol Surabaya – Gempol Seksi Porong –Gempol

Sebagai dampak dari bencana luapan Lumpur PT Lapindo Brantas yang mengakibatkan kerusakan pada sebagian jalan tol Surabaya – Gempol, Perusahaan telah mengirimkan beberapa surat permintaan ganti rugi dan somasi pada tahun 2006 atas kehilangan pendapatan tol dan pengeluaran berbagai biaya kepada PT Lapindo Brantas.

Klaim kerusakan jalan tol tersebut akan meningkat menjadi klaim biaya relokasi ruas jalan tol Porong – Gempol, yang akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Surabaya – Gempol dan kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian dampak semburan Lumpur di Sidoarjo, sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 394/KPTS/M/2006 tanggal 30 November 2006 tentang penutupan sebagian Jalan Tol Surabaya – Gempol.

46. CONTINGENCIES (continued)

a. Obligation Due to Termination of Concession Agreement (continued)

On February 28, 2017, THCJ was sent a letter to the BKPM about the plan to propose arbitration claim against the Government of Indonesia. In the case to answer the letter of THCJ, BKPM invite the Company through a letter No. 18/B.6/A.3/2017 dated March 7, 2017.

The Company has conveyed that the dispute settlement regarding the termination of concession agreement with CGMN shall be settled in accordance with the stipulation on the Concession Agreement. In this case, the payment of compensation to CGMN shall be based on book value CGMN which has been audited by the appointed auditor

b. Claim of Compensation Against PT Lapindo Brantas and Closing of Part of the Surabaya – Gempol Toll Road Section Porong – Gempol

As a consequence of the mud flood disaster in PT Lapindo Brantas was damaged part of the Surabaya – Gempol toll road. In 2006, the Company has submitted several claims of compensation to PT Lapindo Brantas covering loss of toll revenues and expenditures.

The claim for damage to the toll roads is expected to increase and later include a claim for cost to relocate the Porong – Gempol Section toll road and will be settled in connection with the stipulation in the Concession Agreement of the Surabaya – Gempol toll road and the Government policy in settlement of the effects of the mud flood disaster at Sidoarjo in accordance with the Decree of the Minister of Public Works No. 394/KPTS/M/2006 dated November 30, 2006 regarding the Closure of Part of the Surabaya – Gempol Toll Road.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol Surabaya – Gempol Seksi Porong –Gempol (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006 tanggal 3 September 2006 mengenai Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, semua biaya yang timbul sebagai akibat relokasi pembangunan jalan tol dimaksud selain biaya rehabilitasi kerusakan sarana menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas. Selain itu, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 394/KPTS/M/2006 tanggal 30 November 2006, mengenai Penutupan sebagian Jalan Tol Surabaya – Gempol seksi Porong Gempol. Menyatakan antara lain sebagai berikut:

1. Menutup dan tidak mengoperasikan kembali sebagian jalan tol Surabaya – Gempol Seksi Porong –Gempol; dan
2. Segala hal yang timbul pada perusahaan jalan tol Surabaya – Gempol sebagai akibat dari penutupan seksi Porong – Gempol akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam PPJT Surabaya – Gempol dan kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian dampak semburan lumpur di Sidoarjo.

Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum No. JL.0103-Mn/131 tanggal 30 Maret 2007, dalam rangka relokasi jalan tol seksi Porong – Gempol, kebutuhan tanah untuk relokasi infrastruktur akan disediakan oleh Pemerintah dan pelaksana konstruksi.

Berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-196/MBU/2007 tanggal 4 April 2007 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan sehubungan dengan kerugian atas hilangnya sebagian aset jalan tol seksi Porong – Gempol, maka sejalan dengan Undang-undang Jalan No. 38 Tahun 2004 dan Undang-undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003, klaim atas kerugian dimaksud seharusnya dilakukan oleh Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum kepada PT Lapindo Brantas.

46. CONTINGENCIES (continued)

b. Claim of Compensation Against PT Lapindo Brantas and Closing of Part of the Surabaya – Gempol Toll Road Section Porong – Gempol (continued)

Based on the Decree of the President No. 13 Year 2006 dated September 3, 2006 regarding the National Team for Mud Floods Disaster at Sidoarjo, all expenditures incurred due to the relocation of toll road development, except for rehabilitation expenses for damaged facilities, will become the responsibility of PT Lapindo Brantas. In addition, the Decree of the Minister of Public Works No. 394/KPTS/M/2006 dated November 30, 2006 related to the Closure of Part of the Surabaya – Gempol Toll Road Porong – Gempol Section provides:

1. To close and stop the operation of a part of the Surabaya – Gempol toll road Porong Gempol Section; and
2. Those all matter which impacted on the operation of the Surabaya – Gempol toll road as a result of the closure of the Porong Gempol Section will be handled according to the regulation of Surabaya – Gempol Toll Road Concession Agreement and the Government policy for settlement of the effect of the mud flood disaster at Sidoarjo.

Based on the Minister of Public Works Letter No. JL.0103-Mn/131 dated March 30, 2007 in order to relocate the Porong – Gempol toll road section, the land requirements for relocation of the infrastructure will be provided by the Government and contractors.

Based on the Minister of State-Owned Enterprises Letter No. S-196/MBU/2007 dated April 4, 2007 regarding the loss of part of Porong – Gempol toll road assets and according to the Road Law No. 38 of 2004 and the State Finance Law No. 17 of 2003, the claim for losses should be submitted by the Government through the Department of Public Works to PT Lapindo Brantas.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol Surabaya – Gempol Seksi Porong –Gempol (lanjutan)

Pada tanggal 17 Juli 2007, melalui Surat Perusahaan No. AA.TN.02.1153, Perusahaan mengajukan tuntutan ganti rugi akibat genangan lumpur pada ruas jalan tol seksi Porong – Gempol kepada PT Lapindo Brantas. Klaim atas kerugian kehilangan pendapatan tol dan biaya tambahan lainnya akibat genangan lumpur pada ruas Porong – Gempol sampai dengan bulan Mei 2007 adalah sebesar Rp24.724.788 dan klaim atas kerusakan jalan tol sebesar Rp16.334.396.

Dalam Surat Perusahaan No.AA.KU.02.1268, tanggal 7 Agustus 2007 kepada Menteri Pekerjaan Umum, Perusahaan menyampaikan antara lain mengenai kesediaan Perusahaan untuk membiayai pembangunan relokasi ruas jalan tol Porong – Gempol dengan memperhitungkan pengembalian investasi dari tarif baru (termasuk pengembalian akibat tidak berfungsinya ruas jalan tol Porong – Gempol).

Surat Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo/ Menteri Pekerjaan Umum No. 20/DPBPLS/2007 tanggal 24 September 2007 kepada Menteri Negara BUMN menyebutkan antara lain mengenai usulan pelaksanaan konstruksi jalan tol Porong – Gempol dapat dilakukan oleh Perusahaan.

Pada tanggal 14 Januari 2008, melalui Surat Perusahaan No. AA.TN.02.50 kepada Menteri Negara BUMN. Perusahaan menyampaikan antara lain mengenai jumlah klaim total kerugian sampai dengan bulan Mei 2007 sebesar Rp24.724.788 dan permohonan bantuan agar Pemerintah memfasilitasi melalui Biro Hukum dan Humas Kementerian BUMN dalam menyelesaikan permasalahan dengan PT Lapindo Brantas dengan musyawarah mufakat dan apabila musyawarah mufakat tersebut tidak dapat ditempuh dapat mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan.

46. CONTINGENCIES (continued)

b. Claim of Compensation Against PT Lapindo Brantas and Closing of Part of the Surabaya – Gempol Toll Road Section Porong – Gempol (continued)

On July 17, 2007, through the Company's Letter No.AA.TN.02.1153, the Company claimed compensation caused by mud floods in Porong Gempol Section to PT Lapindo Brantas. The claim for loss of toll revenue and additional expenditures arising from mud in Porong – Gempol Section until May 2007 amounted to Rp24,724,788 and the claim for damage to the toll road amounted to Rp16,334,396.

Based on the Company's Letter No.AA.KU.02.1268 dated August 7, 2007, to the Minister of Public Works, the Company delivered such matter as readiness to finance development for relocation Porong – Gempol toll road by estimating the reversion of investment from new tariff (included reversion caused by un-function Porong – Gempol toll road section).

The letter of the Chairman of Direction Board of Mud Prevention Agency Sidoarjo/ the Minister of Public Works No. 20/DPBPLS/2007 dated September 24, 2007 to Minister of State-Owned Enterprises, mentioned such proposal of construction and implementation of Porong – Gempol toll road can be performed by the Company.

On January 14, 2008, through the Company's Letter No. AA.TN.02.50 to the Minister of State-Owned Enterprises, the Company reported loss until May 2007 amounting to Rp24,724,788 and requested assistance from the Government to facilitate through Law Bureau and Public Relation of the Minister of State-Owned Enterprises in solving the problem with PT Lapindo Brantas by deliberation. Otherwise, the Company will take the case to the court.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol Surabaya – Gempol Seksi Porong –Gempol (lanjutan)

Pada tanggal 13 Mei 2009, melalui Surat Perusahaan No. AA.TN.02.730 kepada Direktur Utama PT Lapindo Brantas, Perusahaan kembali mengajukan tuntutan ganti rugi akibat penutupan Ruas Jalan Tol Porong – Gempol. Adapun klaim atas kehilangan pendapatan tol dan kehilangan keuntungan atas bunga sampai dengan bulan Maret 2009 beserta biaya-biaya lainnya, termasuk biaya pembongkaran Jembatan Tol Porong adalah sebesar Rp71.976.187.

Pada tanggal 17 September 2009, melalui surat Perusahaan No. AA.TN.02.1286 kepada Direktur Utama PT Lapindo Brantas. Perusahaan kembali mengajukan tambahan kenaikan besaran rugi atas kehilangan pendapatan tol sebesar Rp76.942.149 dan kehilangan keuntungan atas bunga sampai dengan bulan Juni 2009 yakni sebesar Rp4.965.962.

Pada tanggal 9 Februari 2010, Perusahaan mengirimkan surat No. AA.PR.02.94 tentang Relokasi Jalan Tol Ruas Porong – Gempol kepada BPJT yang ditembuskan kepada Menteri Negara BUMN. Surat tersebut dibuat dengan dasar bahwa Pemerintah (Kementerian PU) mempunyai rencana untuk melakukan relokasi terhadap jalan tol Ruas Porong – Gempol yang terendam luapan lumpur Sidoarjo.

Sejak bulan Mei 2011, Perusahaan telah melakukan aktivitas pembangunan relokasi jalan tol ruas Porong – Gempol dan sampai dengan September 2017, Perusahaan telah mengeluarkan dana sebesar Rp1.330.100.819.

46. CONTINGENCIES (continued)

b. Claim of Compensation Against PT Lapindo Brantas and Closing of Part of the Surabaya – Gempol Toll Road Section Porong – Gempol (continued)

On May 13, 2009, through Letter No.AA.TN.02.730 to the President Director of PT Lapindo Brantas, the Company claimed compensation due to closure of the Porong – Gempol Toll Road Section. The claim for loss of toll revenue, loss of interest income and other expenses, including demolishing cost of Porong Toll Bridge until March 2009 totaling Rp71,976,187.

On September 17, 2009, through Letter No. AA.TN.02.1286 to the President Director of PT Lapindo Brantas, the Company claimed additional compensation for the loss of toll revenue amounting to Rp76,942,149 and the loss of interest income until June 2009 amounting to Rp4,965,962.

On February 9, 2010, the Company sent Letter No. AA.PR.02.94 to BPJT and the copy was forwarded to the Minister of State-Owned Enterprises. The letter was made based on the plan of Government (Ministry of Public Works) to relocate Porong – Gempol Toll Road affected by the mud overflow.

Since May 2011, the Company has constructed the relocation of Porong – Gempol toll road, and until September 2017, the Company has spent Rp1,330,100,819.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

c. Gugatan Ganti Rugi dari Pemilik Tanah untuk Jalan Tol

Perusahaan masih menghadapi beberapa perkara litigasi/gugatan dari beberapa orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan Ruas Jalan Tol Semarang Seksi C, Jalan Tol Surabaya, Jalan Tol JORR E1, Jalan Tol JORR W2, Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami, dan Jalan Tol Jakarta -Tangerang (Gerbang Tol Mabar dan Kantor Cabang JTC). Penanganan perkara litigasi tersebut masih dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

d. Gugatan PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) Terkait Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cawang-Cibitung (Gugatan BTS BANI I)

Perusahaan dan BTS telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek ruas Cawang-Cibitung. Perjanjian ini dinyatakan di dalam akta notaris No. 171 tanggal 17 Maret 1993 yang kemudian diubah dengan Akte No. 139 tanggal 15 Februari 1997, akte No. 111 tanggal 29 September 1997 dan Akta No. 236 tanggal 23 September 2004 (selanjutnya disebut Perjanjian Bagi Hasil).

BTS berkewajiban membangun atau melebarkan 2 lajur Jalan Tol tambahan dari arah Cawang ke arah Cibitung dan sebaliknya beserta sarana penunjangnya dan atas hal tersebut BTS akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.

Sampai ada kesepakatan rekonsiliasi data, Perusahaan menunda pembayaran atas bagi hasil pendapatan tol kepada BTS dan telah mencatat utang bagi hasil tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian tentang beban akrual sebesar Rp66.098.674 dan telah dibayarkan oleh Perusahaan pada tanggal 10 September 2014.

Pada tanggal 13 Oktober 2014, sesuai dengan surat No. 04/BTS/X/2014, BTS mengajukan kompensasi atas keterlambatan pembayaran bagi hasil dimaksud.

46. CONTINGENCIES (continued)

c. Claims from Land Owners for Toll Road

The Company is facing several litigation cases filed by several parties that claimed to be the land owners of land whose land is used for the construction of Semarang Toll Road C Section, Surabaya Toll Road Section, JORR E1 Toll Road Section, JORR W2 Toll Road Section, Pondok Aren-Ulujami Toll Road, and Jakarta -Tangerang Toll Road (Mabar Toll Gate and JTC Branch Office). These litigation cases are still under trial in the District Courts, the High Courts and the Supreme Court.

d. Lawsuit from PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) Regarding Toll Revenue Sharing of Jakarta-Cikampek Toll Road Section Cawang-Cibitung (BTS BANI I Lawsuit)

The Company and PT Bangun Tjipta Sarana signed an Agreement of Widening of Jakarta-Cikampek Toll Road Segment Cawang-Cibitung. This agreement was stated in notarial deed No. 171 dated March 17, 1993, and was later amended by notarial deed No. 139 dated February 15, 1997, No. 111 dated September 29, 1997 and No. 236 dated September 23, 2004 (hereinafter referred to as Revenue-Sharing Agreement).

BTS was obliged to build or widen additional two lane of the toll road from and to Cawang-Cibitung, along with its supporting facilities. This was the underlying reason for BTS to get the sharing revenue, in accordance with the related agreement.

Until there was a data reconciliation agreement, the Company had deferred the payment of sharing revenue to BTS and had recognized payable from revenue sharing in the consolidated financial statements and had disclosed it in the consolidated financial statements as accrued expenses amounting to Rp66,098,674 was finally paid by the Company on September 10, 2014.

On October 13, 2014, in the letter No. 04/BTS/X/2014, BTS requested some amount as compensation for the late payment of sharing revenue.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

**d. Gugatan PT Bangun Tjipta Sarana (BTS)
Terkait Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil
Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cawang-
Cibitung (Gugatan BTS BANI I) (lanjutan)**

Di dalam Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek ruas Cawang-Cibitung tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur terkait denda atau bunga akibat keterlambatan pembayaran bagi hasil pendapatan tol kepada BTS. Untuk itu atas tagihan kompensasi tersebut Perusahaan meminta pendapat dan rekomendasi kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat No. AA.KS01.02.1137 tanggal 23 Oktober 2014.

Hasil Audit BPKP Nomor LHR-12/0501/3/2015 tanggal 20 Februari 2015, menyatakan bahwa Perusahaan tidak punya dasar untuk membayar denda atau bunga keterlambatan.

Pada tanggal 22 Juni 2016, BTS mengajukan permohonan arbitrase terhadap Perusahaan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan Nomor 866/VI/ARB-BANI/2016 sehubungan dengan pembayaran denda atau bunga keterlambatan tersebut.

Pada tanggal 9 Maret 2017 dalam agenda sidang pembacaan putusan, Majelis Arbiter BANI membacakan putusan dengan salah satu amar menyatakan menerima sebagian permohonan arbitrase yang diajukan oleh BTS dan mengharuskan Perusahaan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp30.185.050.

Perusahaan telah membayar ganti rugi tersebut kepada BTS pada tanggal 21 April 2017.

Saat ini Perusahaan sedang berperkara dengan BTS terkait Akta No.109 tanggal 16 Oktober 1992 beserta perubahannya. Perkara tersebut telah diputus ditingkat Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juli 2012 dengan bunyi "Menolak permohonan kasasi dari para pemohon: 1. Perusahaan, 2. PT Bangun Tjipta Sarana". Salinan resmi pemberitahuan isi putusan diterima oleh Perusahaan pada tanggal 24 April 2013.

46. CONTINGENCIES (continued)

d. Lawsuit from PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) Regarding Toll Revenue Sharing of Jakarta-Cikampek Toll Road Section Cawang-Cibitung (BTS BANI I Lawsuit) (continued)

In the Agreement of the Widening of Jakarta-Cikampek Toll Road Segment Cawang-Cibitung, there has never been a clause arranging penalty or interest for late payment of sharing revenue to BTS. For this, the Company requested for opinion and recommendation from Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) in the Letter No. AA.KS01.02.1137 dated October 23, 2014.

Based on BPKP Audit Results No. LHR-12/0501/3/2015 dated February 20, 2015, stated that the Company has no basis to pay a penalty or interest for late payment.

On June 22, 2016, BTS filed request for arbitration to Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No 866/VI/ARB-BANI/2016 regarding the payment of fines or its interest of such delays.

On March 9, 2017 in the agenda of the trial verdict, BANI Arbiter Assembly read out the verdict to one of the states partially approved the ruling of the arbitration filed by BTS and required the Company to pay compensation of Rp30,185,050.

The Company has paid the indemnity to BTS on April 21, 2017.

The Company has litigated with BTS in accordance with notarial deed No. 109 dated October 16, 1992 along with its amendments. The case has been decided by the Supreme Court on July 24, 2012 stating "Rejecting the appeal of the applicants. 1. The Company, 2. PT Bangun Tjipta Sarana". A copy of the official notification of the decision was received by the Company on April 24, 2013.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

d. Gugatan PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) Terkait Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cawang-Cibitung (Gugatan BTS BANI I) (lanjutan)

1. Posisi Perusahaan dan BTS kembali ke keadaan semula, mengingat baik gugatan Perusahaan maupun gugatan rekonsvansi BTS sama-sama ditolak seluruhnya;
2. Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta – Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung Akta Nomor 109 tanggal 16 Oktober 1992 dianggap berlaku yaitu sejak 1989 dan berakhir pada 9 Juli 2015 pukul 24.00 WIB.

Berdasarkan amandemen kerjasama bagi hasil pembangunan pelebaran jalan tol Jakarta – Merak No. 8 tanggal 28 Februari 2003, Perusahaan dan PT Adhika Prakarsatama telah menyepakati pengurangan masa kerjasama bagi hasil yang semula 18 tahun menjadi 17 tahun 9 bulan dan berakhir pada tanggal 29 Februari 2012.

e. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk – Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama

Pada tanggal 4 Januari 2011 dan 2 Februari 2011, PT Tirtobumi Prakarsatama (dahulu bernama PT Adhika Prakarsatama) menyampaikan permohonan kepada Perusahaan untuk melakukan pengkajian perpanjangan masa kerjasama bagi hasil dan meminta Perusahaan meneruskan hal tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum. Alasan permohonan perpanjangan adalah karena PT Tirtobumi Prakarsatama berpendapat tidak ada kenaikan tarif tol dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2005.

Masa perpanjangan kerjasama bagi hasil yang diajukan sekitar 24 tahun 2 bulan. Perusahaan telah menjawab permohonan tersebut dengan surat No. EC.HK.02.082 pada tanggal 9 Februari 2011 yang intinya menyatakan bahwa Perusahaan sedang mengkaji permohonan dimaksud.

46. CONTINGENCIES (continued)

d. Lawsuit from PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) Regarding Toll Revenue Sharing of Jakarta-Cikampek Toll Road Section Cawang-Cibitung (BTS BANI I Lawsuit) (continued)

1. The Company and BTS position back to beginning, since either the Company's nor BTS's claim were rejected completely;
2. Profit sharing agreement for Jakarta – Cikampek Toll Road Cikampek – Cibitung section deed No. 109 dated October 16, 1992 was considered valid since 1989 and ended on July 9, 2015 on 24.00 WIB.

Based on the amendment of revenue sharing agreement of Jakarta – Merak toll road widening No. 8 dated February 28, 2003, the Company and PT Adhika Prakarsatama agreed to reduce the period of agreement from 18 years to 17 years and 9 months and ended on February 29, 2012.

e. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk – Tangerang Highway

On January 4, 2011 and February 2, 2011, PT Tirtobumi Prakarsatama (formerly named as PT Adhika Prakarsatama) submitted requests to the Company to review the extension period of revenue sharing agreement and urged the Company to forward the proposal to the Minister of Public Works. The reason of this proposal was due to PT Tirtobumi Prakarsatama claimed that there has never been toll rates increase during the years 1993 to 2005.

The extension period proposed by PT Tirtobumi Prakarsatama was approximately 24 years and 2 months. The Company responded to the requests with the letter No. EC.HK.02.082 dated February 9, 2011, which mainly stated that the Company is in the process of reviewing the respective requests.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

e. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk – Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama (lanjutan)

Pada tanggal 7 Juni 2011, PT Tirtobumi Prakarsatama mengajukan gugatan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perusahaan tidak berhak dan/ atau berwenang untuk melakukan kajian dan/ atau mengambil pertimbangan apapun terkait permohonan perpanjangan masa kerjasama bagi hasil oleh PT Tirtobumi Prakarsatama melalui Perusahaan kepada pihak yang berwenang.
3. Kelalaian Perusahaan untuk meneruskan permohonan perpanjangan masa kerjasama bagi hasil kepada pihak yang berwenang dapat menimbulkan kerugian bagi PT Tirtobumi Prakarsatama.
4. Memerintahkan Perusahaan untuk dengan segera meneruskan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama tersebut di atas kepada pihak yang berwenang.
5. Mengharuskan Perusahaan untuk mengganti segala kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kelalaian tersebut di atas serta membayar seluruh biaya proses arbitrase ini, termasuk biaya yang telah dan akan terjadi oleh PT Tirtobumi Prakarsatama.

BANI menerbitkan keputusan No. 406/VI/ARB-BANI/2011 pada tanggal 5 Januari 2012 dengan uraian sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk sebagian.
2. Mewajibkan Perusahaan untuk menyampaikan dan mendiskusikan kajian mengenai perpanjangan kerjasama bagi hasil kepada PT Tirtobumi Prakarsatama dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Putusan.
3. Mewajibkan Perusahaan dalam Jangka waktu 40 hari sejak Putusan diterbitkan untuk meneruskan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama disertai hasil Kajian Perusahaan kepada Menteri Pekerjaan Umum.

46. CONTINGENCIES (continued)

e. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk – Tangerang Highway (continued)

On June 7, 2011, PT Tirtobumi Prakarsatama sued the Company in the National Arbitration Board (BANI) with the following terms:

1. Accept the proposal for PT Tirtobumi Prakarsatama entirely.
2. Declare that the Company has no right and/ or authorized to conduct the review and/ or take any considerations related to the proposed extension period of revenue sharing agreement by PT Tirtobumi Prakarsatama through the Company to the Authorities.
3. Omission of the Company to forward the proposal to the Authorities may create damages for PT Tirtobumi Prakarsatama.
4. Instruct the Company to immediately forward the proposal of PT Tirtobumi Prakarsatama to the Authorities.
5. Obligated the Company to replace any losses that might arise as a result of that omission and pay all costs that may arise from the arbitration process, including the costs that have been and will be incurred by PT Tirtobumi Prakarsatama.

BANI issued the verdict No. 406/VI/ARB-BANI/2011 on January 5, 2012 with the following terms:

1. Consented to the claim of PT Tirtobumi Prakarsatama partially.
2. Obligated the Company to discuss the review with PT Tirtobumi Prakarsatama within 30 days from the date of this decision.
3. Obligated the Company to forward the request of PT Tirtobumi Prakarsatama along with the result of the review to the Minister of Public Works within 40 days from the date of this decision.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

e. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk – Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama (lanjutan)

4. Menolak permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk selebihnya.
5. Menyatakan Putusan ini merupakan Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak.
6. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan Putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BANI mendaftarkan keputusan No. 406/VI/ARB-BANI/2011 tanggal 5 Januari 2012 dan pada tanggal 30 Januari 2012 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan disampaikan kepada para pihak oleh BANI melalui surat No. 12.209/II/BANI/ED tanggal 7 Februari 2012 dengan tambahan amar putusan menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk sebagian.
2. Mewajibkan Perusahaan untuk menyampaikan dan mendiskusikan kajian mengenai perpanjangan kerjasama bagi hasil kepada PT Tirtobumi Prakarsatama dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Putusan diucapkan.
3. Mewajibkan Perusahaan dalam Jangka waktu 40 hari sejak Putusan diucapkan. Untuk meneruskan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama disertai hasil Kajian Perusahaan kepada Menteri Pekerjaan Umum
4. Menolak Permohonan PT Tirtobumi untuk selebihnya.
5. Menyatakan Putusan ini merupakan Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak.
6. Mewajibkan Perusahaan untuk mengembalikan setengah biaya administrasi sebesar Rp255.000 kepada PT Tirtobumi Prakarsatama.
7. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan Putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

46. CONTINGENCIES (continued)

e. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk – Tangerang Highway (continued)

4. Rejected the rest of PT Tirtobumi Prakarsatama's claims.
5. Declared the Verdict as the first decree and final and bounded all parties.
6. Asked to the Secretary Council to register the Verdict to Central Jakarta District Court.

BANI has registered the above Verdict No. 406/VI/ARB-BANI/2011 on January 5, 2012 to the Central Jakarta District Court on January 30, 2012 and delivered to all parties by BANI through letter No. 12.209/II/BANI/ED dated February 7, 2012 with additional verdict as follows:

1. Consented the claim of PT Tirtobumi Prakarsatama partially.
2. Obligated the Company to submit and discuss the review of extension of revenue sharing agreement with PT Tirtobumi Prakarsatama within 30 days from the date of this decision.
3. Obligated the Company to forward the request of PT Tirtobumi Prakarsatama along with the result of the review to the Minister of Public Works within 40 days from the date of this decision.
4. Rejected the rest of PT Tirtobumi Prakarsatama's claims.
5. Declared the Verdict as the first decree and final and bounded all parties.
6. Obligated the Company to indemnify half of the administration fee amounting to Rp255,000 to PT Tirtobumi Prakarsatama.
7. Asked to the Secretary Council to register the Verdict to Central Jakarta District Court.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

e. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk – Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama (lanjutan)

Pada tanggal 27 Februari 2012, Perusahaan telah melaksanakan keputusan BANI tersebut dengan mengirimkan hasil kajian dan permohonan perpanjangan kerjasama bagi hasil kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Pada tanggal 15 Maret 2012, Perusahaan telah membayarkan setengah dari biaya perkara sebesar Rp255.000 kepada PT Tirtobumi Prakarsatama.

Terdapat perbedaan persepsi terhadap Putusan BANI: PT Tirtobumi Prakarsatama berpendapat bahwa hasil Putusan tersebut seharusnya dipenuhi setelah Putusan diterbitkan, sedangkan Perusahaan meyakini bahwa berdasarkan Hukum Arbitrase Pasal 59, seharusnya Putusan BANI dilaksanakan setelah Putusan didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan perbedaan persepsi di atas PT Tirtobumi Prakarsatama menuntut Perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan Perusahaan tidak melaksanakan putusan BANI. Perkara ini telah diputuskan berdasarkan Putusan No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM pada tanggal 10 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Perusahaan harus mengganti rugi kepada PT Tirtobumi Prakarsatama sebesar Rp1.247.576.000 atau setara dengan perpanjangan waktu bagi hasil tol selama 24 tahun 2 bulan.

Atas putusan ini Perusahaan telah mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan banding telah dibacakan pada tanggal 15 Juli 2013 dengan inti putusan mengabulkan permohonan banding Perusahaan dan Menteri Pekerjaan Umum dan membatalkan Putusan No.64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM pada tanggal 10 Desember 2012.

46. CONTINGENCIES (continued)

e. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk – Tangerang Highway (continued)

On February 27, 2012, the Company has conducted BANI's Verdicts by forwarding the review and the proposed of extension period of revenue sharing agreement to the Minister of Public Works.

On March 15, 2012, the Company has paid half of the administration fee amounting to Rp255,000 to PT Tirtobumi Prakarsatama.

There was a different perception on BANI's verdicts: PT Tirtobumi Prakarsatama believed that the verdicts should be executed after the verdicts were declared, whereas the Company believed that, based on Law of Arbitration Article 59, the verdicts should be executed after they were registered at District Court.

Based on the different perception stated above, PT Tirtobumi Prakarsatama sued the Company in District Court of Jakarta Timur with the argument that the Company did not fulfill the BANI's verdicts. The claims had been declared based on the verdict No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM on December 10, 2012, which stated that the Company has to indemnify PT Tirtobumi Prakarsatama for Rp1,247,576,000 or equivalent to the extension period of the toll roads for 24 years and 2 months.

According to the Verdict, the Company registered the appeal statement to the Jakarta High Court. The verdict was read on July 15, 2013, which granted the appeal from the Company and the Minister of Public Works and cancelled the verdict No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM on December 10, 2012.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

e. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk – Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama (lanjutan)

Atas Putusan Banding tersebut, PT Tirtobumi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Februari 2014 dan telah diputus tanggal 22 Desember 2014. Akan tetapi, pada tanggal 5 Februari 2016, Perusahaan baru menerima Rilis Pemberitahuan dari MA atas Permohonan Kasasi PT Tirtobumi Nomor 1946K/PDT/2014.Jo.No.64/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Tim, dengan Isi Putusan yaitu mengabulkan sebagian Gugatan PT Tirtobumi dan Perusahaan wajib membayar ganti rugi PT Tirtobumi sebesar Rp1.247.576.000 atau setara dengan tambahan waktu Kerjasama Bagi Hasil selama 24 tahun 2 bulan.

Atas Putusan Kasasi Nomor 1946 K/Pdt/2014 tersebut pada tanggal 12 Mei 2016, Perusahaan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui PN Tangerang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi No. 240 K/PDT/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 200/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Januari 2010.

Berdasarkan situs resmi Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali oleh Perusahaan telah dikabulkan.

Pada tanggal 23 Mei 2017, Perusahaan telah menerima salinan putusan Peninjauan Kembali dari konsultan hukum Kailimang dan Ponto.

46. CONTINGENCIES (continued)

e. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk – Tangerang Highway (continued)

Over the Jakarta High Court Decision, PT Tirtobumi Prakarsatama filed an appeal to the Supreme Court on February 24, 2014 and the verdict was read on December 22, 2014. However, on February 5, 2016, the Company just received Release Notification from Supreme Court regarding appeal request No. 1946K/PDT/2014.Jo.No.64/Pdt.G/2012/PN.Jk. Tim with contents as follows consented the claim of PT Tirtobumi partially and the Company was obligated to pay losses of PT Tirtobumi amounting to Rp1,247,576,000 or equivalent to additional period of profit sharing agreement for 24 years and 2 months.

Regarding the appeals decision no 1946 K/Pdt/2014 aforementioned on May 12, 2016, the Company applied for judicial review to Supreme Court through Tangerang District Court, with detail as follows :

1. Accepted the request for judicial review from pleader entirely.
2. Revoked Supreme Court's appeal decision No. 240 K/PDT/2012, dated July 24, 2012 Jo. Jakarta Pusat District Court's decision No. 200/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. dated January 25, 2010.

According to Supreme Court's official website, the request for judicial review had been granted.

On May 23, 2017, the Company received a copy of the judicial review award from lawyer Kailimang and Ponto.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

f. Penggantian Lahan

JBT, entitas anak, memiliki kewajiban untuk membangun gedung kantor sesuai ketentuan di PPJT. Pembangunan gedung kantor tersebut akan dilakukan di area lahan yang dimiliki oleh PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III). Karena pembangunan gedung kantor tersebut di area lahan AP I dan Pelindo III, maka JBT memiliki kewajiban untuk memberikan penggantian lahan untuk AP I dan Pelindo III dengan nilai sebagai berikut:

Nomor/ Number	Dimiliki/ Owned by	Area/ Area	NJOP/ NJOP	Harga Penilaian/ Appraisal Price
1.	Angkasa Pura I	3.404 m ²	3.581.003	29.291.420
2.	Pelindo III (darat) Pelindo III (perairan)	522 m ² 41.490 m ²	1.227.744 -	2.589.120 -
Total			4.808.747	31.880.540

Perusahaan menerima surat tembusan dari Dirjen Bina Marga Nomor TB09.02-DB/496 tanggal 16 Juni 2017 Perihal Tanah HPL Angkasa Pura I. Dalam surat tersebut Dirjen Bina Marga berpendapat bahwa lahan HPL milik PT Angkasa Pura I tidak dapat diberikan ganti rugi kecuali terhadap bangunan, tanaman, dan benda-benda di atas lahan HPL.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, penggantian lahan masih dalam proses menunggu putusan Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

g. Klaim Kontraktor

PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") adalah kontraktor untuk paket 2 dan 4 jalan tol ruas Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa. Pada tanggal 5 November 2015, kantor hukum Nengah Sujana & Rekan dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan Waskita telah mengirimkan surat kepada JBT terkait klaim atas penambahan pekerjaan untuk paket 2 dan 4 dengan total nilai klaim sebesar Rp54.342.889 (tidak termasuk PPN dan bunga).

46. CONTINGENCIES (continued)

f. Land Exchange

JBT, a subsidiary, has a liability to construct office building as required in PPJT. The construction of office building will be conducted in land owned by PT Angkasa Pura I (AP I) and PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III). Since the construction of the office building conducted in land owned by AP I and Pelindo III, JBT has liabilities to give the land compensation to AP I and Pelindo III as follows:

The Company received a copy letter from the Director General of Highways No. TB09.02-DB / 496 dated June 16, 2017 regarding the Land of HPL Angkasa Pura I. In the letter DGH Bina Marga believes that PT Angkasa Pura I HPL land can not be given compensation for building, plants and objects on HPL land.

As of December 31, 2017, this land compensation is still in process for decision from Direktorat Jendral Bina Marga, Ministry of Public Work and Housing.

g. Claim Contractor

PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") is contractor of Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Highway for Package 2 and 4. In November 5, 2015, Nengah Sujana & Rekan as Waskita's Law Firm, had given summon letter to JBT related to the claim for extra piling for package 2 and 4 with total claim amounting to Rp54,342,889 (excluded VAT and interest).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

g. Klaim Kontraktor (lanjutan)

JBT dan Waskita telah menunjuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai mediator atas kondisi ini. BPKP telah berkonsultasi kepada Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan LPJKN telah menunjuk Bapak Sarwono Hadjomujadi sebagai tenaga ahli FIDIC.

Pada tanggal 14 Desember 2015, JBT telah menerima surat pemanggilan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Berdasarkan berita acara menyatakan bahwa JBT telah diminta untuk membayar klaim materiil dengan nilai sebesar Rp64.576.068 dan bunga sebesar 2 % setiap bulan sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.

Pada tanggal 23 Desember 2015, Waskita mengajukan gugatan kepada JBT ke pengadilan negeri Denpasar. JBT telah menerima Putusan Dari Pengadilan Negeri Denpasar No 903/Pdt.G/2015/PN.DPS tanggal 20 Juni 2016 yang menyatakan bahwa JBT harus membayar klaim kepada Waskita. Pada tanggal 28 Juni 2016, JBT telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar.

Pada tanggal 20 Desember 2016, Pengadilan Negeri Denpasar telah menerima permohonan banding JBT melalui Putusan No.156/PDT/2016/PT.DPS dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.903/Pdt.G/2015/PN.DPS.

Pada tanggal 14 Februari 2017, Waskita telah menyatakan kasasi dan pada tanggal 27 Februari 2017, Waskita telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Atas memori kasasi yang diajukan oleh Waskita, JBT telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 17 Maret 2017 yang telah teregister di Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juni 2017 dengan nomor register 1680/Pdt/2017.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, JBT belum mendapatkan putusan atas kontra memori kasasi tersebut.

46. CONTINGENCIES (continued)

g. Claim Contractor (continued)

JBT and Waskita have chosen Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) as mediator for this case. BPKP has already consulted to Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) and LPJKN has already appointed Mr. Sarwono Hadjomujadi as FIDIC expert.

On December 14, 2015, JBT received a Court summons letter from the Denpasar District Court. Based on the report JBT has been asked to pay material claims amounting to Rp64,576,0678 and interest of 2% per month since this award has been registered in Secretariat of Denpasar District Court.

On December 23, 2015, Waskita filed a lawsuit against JBT to the Denpasar District Court. JBT has received a Decision from the Denpasar District Court No. 903 / Pdt.G / 2015 / PN.DPS dated June 20, 2016 stating that JBT must pay a claim to Waskita. On June 28, 2016, JBT has filed an appeal to the Denpasar High Court.

On December 20, 2016, according to decision letter no 156/PDT/2016/PT.DPS Denpasar District Court received appeal petition from JBT and canceled the Denpasar District Court's decision No. 903/Pdt.G/PN.

On February 14, 2017, Waskita has declared the appeal and on February 27, 2017, Waskita has filed an appeal to the Supreme Court.

Based on memory of the appeal filed by Waskita, JBT has filled a counter appeal against the cassation on March 17, 2017 which has been registered in Supreme Court on June 8, 2017 with register number 1680/Pdt/2017.

As of December 31, 2017, JBT has not received the decision related a counter appeal against the cassation.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

h. Pengembalian Investasi Pemerintah

JMKT, entitas anak, wajib mengembalikan investasi Pemerintah sebesar Rp203.792.000 yang dilakukan atas pembangunan ruas tol seksi I dan II. Investasi tersebut akan dikembalikan sesuai berita acara yang terlampir di PPJT. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, JMKT belum mengakui besaran jumlah terhutang karena belum adanya nilai estimasi yang valid atas progres dan belum ada serah terima atas aset tersebut.

JMB, entitas anak, wajib mengembalikan investasi Pemerintah sebesar Rp356.800.000 yang dilakukan atas pembangunan ruas tol dari Ring Road Manado sampai dengan SS Air Madidi sepanjang 14 Km. Investasi tersebut akan dikembalikan sesuai berita acara yang terlampir di PPJT selambat-lambatnya tahun 2054. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, JMB belum mengakui besaran jumlah terhutang karena belum adanya nilai estimasi yang valid atas progres dan belum ada serah terima atas aset tersebut.

i. Gugatan PT Bangun Tjipta Sarana terkait Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Jalan Tol Ruas Cawang - Cibitung (Gugatan BTS BANI II)

Pada tanggal 17 Maret 1993, Perusahaan dan BTS membuat perjanjian kerjasama pelebaran Jalan Tol Jakarta – Cikampek ruas Cawang – Cibitung (BTS II) di mulai STA 21+120 untuk jangka waktu 22 tahun dan berakhir pada tanggal 15 September 2016.

Pada tanggal 11 Agustus 2016, BTS melalui konsultan hukumnya menyampaikan surat tagihan Nomor 233/wecolaw/AE-AI-RBP/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 kepada Perusahaan mengenai tagihan porsi bagi hasil milik BTS atas pendapatan Tol pada Ruas Cawang-Cibitung (Gugatan BTS II). BTS mengklaim Perusahaan tidak pernah membagi porsi bagi hasil pada ruas jalan tol STA 21+120 sampai dengan STA 21+787.

46. CONTINGENCIES (continued)

h. Return on Government Investment

JMKT, a subsidiary, is obliged to return the Government's investment amounting to Rp203,792,000 made on the construction of toll road sections I and II. The investment will be returned according to the minutes attached on PPJT. As of December 31, 2017, JMKT has not recognized the amount owed due to the absence of a valid estimate of the value on the progress and no handover of the asset.

JMB, a subsidiary, is obliged to return the Government's investment amounting to Rp356,800,000 made on the construction of toll road from Ring Road Manado until SS Air Madidi ranging 14 Km. The investment will be returned according to the minutes attached on PPJT. At the latest in year 2054. As of December 31, 2017, JMB has not recognized the magnitude of the amount owed due to the absence of a valid estimate of the value on the progress and no handover of the asset.

i. Lawsuit of PT Bangun Tjipta Sarana regarding Toll Road Revenue Sharing Agreement Cawang – Cibitung Section (BTS BANI II Lawsuit)

On March 17, 1993, the Company and BTS signed an agreement to widen Jakarta-Cikampek toll road Cawang-Cibitung section (BTS II) on STA21+120. The agreement was held for 22 years and ended on September 15, 2016.

On August 11, 2016, BTS through its legal consultant submitted a bill No. 233/wecolaw/AE-AI-RBP/VIII/2016 dated August 11, 2016 to the Company regarding claim of BTS's portion of revenue sharing on Cawang-Cibitung section (BTS Lawsuit II). BTS claimed the Company had never share their revenue sharing portion on section STA 21+120 to STA 21+787.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

i. Gugatan PT Bangun Tjipta Sarana terkait Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Jalan Tol Ruas Cawang - Cibitung (Gugatan BTS BANI II) (lanjutan)

Pada tanggal 16 Agustus 2016, BTS telah menyampaikan gugatan kepada Perusahaan melalui BANI dengan No Registrasi 880/VIII/ARB-BANI/2016 mengenai tagihan sebagaimana tersebut di atas dengan pokok gugatan agar Perusahaan membayar kepada BTS sebagai berikut :

- a. Bagi hasil atas ruas Cawang-Cibitung (BTS BANI II) sebesar Rp211.958.032
- b. Bunga atas tidak dibaginya porsi bagi hasil pendapat tol ruas Cawang-Cibitung sebesar 11% per tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 1999 sampai dengan berakhirnya perjanjian (15 September 2016).

Pada tanggal 19 Agustus 2016, Perusahaan telah membalas melalui surat Nomor AA.HK 02.1199 tanggal 19 Agustus 2016 tersebut yang intinya mohon kepada BTS untuk menyampaikan bukti-bukti pendukung yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Perusahaan.

Pada tanggal 31 Agustus 2016, Sekjen BANI menyampaikan surat kepada Perusahaan yang intinya Perusahaan diminta untuk memberikan jawaban secara tertulis dan memilih serta menunjuk seorang arbiter.

Pada tanggal 13 Juni 2017, BANI telah menerbitkan Putusan No. 880/VIII/ARB-BANI/2016, yang pada intinya:

1. Memerintahkan dan mewajibkan Perusahaan untuk membayar kepada BTS sebesar Rp113.160.713.
2. Mewajibkan kepada Perusahaan untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp1.528.052 kepada BTS.

Pada tanggal 3 Agustus 2017, Perusahaan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada tanggal 10 Oktober 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menolak Permohonan Pembatalan Putusan BANI dari Perusahaan.

46. CONTINGENCIES (continued)

i. Lawsuit of PT Bangun Tjipta Sarana regarding Toll Road Revenue Sharing Agreement Cawang – Cibitung Section (BTS BANI II Lawsuit) (continued)

On August 16, 2016, BTS had filed a claim to the Company through BANI with registration number 880/VIII/ARB-BANI/2016 with primary claim for the Company to pay BTS as follows:

- a. Revenue sharing of Cawang-Cibitung section (BTS BANI II) amounted Rp211,958,032
- b. Interest of undistributed revenue sharing portion amounted 11% per annum since June 30 1999 to the termination of agreement (September 15, 2016).

On August 19, 2016, the Company replied by letter No. AA.HK02.1199 dated August 19, 2016 which asked BTS to submit supporting documents which will be used as evaluation by the Company.

On August 31, 2016, the Secretary General of BANI delivered a letter to the Company that essentially requested the Company to provide written answers and to select and appoint an arbitrator.

On June 13, 2017, BANI has issued Decision Number 880 / VIII / ARB-BANI / 2016, which in essence:

1. Order and require the Company to pay to BTS amounting to Rp113,160,713.
2. Require the Company to refund $\frac{1}{2}$ (half of) administrative fees, inspection fees and arbitrator fees of Rp1,528,052 to the BTS.

On August 3, 2017, the Company has submitted the plea of cancellation regarding the award of BANI to East Jakarta District Court. On October 10, 2017, the East Jakarta District Court has rejected the Company's Request for Termination of the BANI Decision.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

i. Gugatan PT Bangun Tjipta Sarana terkait Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Jalan Tol Ruas Cawang - Cibitung (Gugatan BTS BANI II) (lanjutan)

Pada tanggal 20 Oktober 2017, Perusahaan telah mengajukan pernyataan Banding kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Perusahaan melalui Konsultan Hukum Adnan Buyung Nasution and Partner pada tanggal 20 Desember 2017 telah menerima Relas pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding BTS. Dalam Relas tersebut diberitahukan bahwa BTS telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 Desember 2017.

Berkas Banding telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Mahkamah Agung pada tanggal 19 Januari 2018.

47. SEGMENT OPERASI

Kelompok Usaha dikelola dan dikelompokkan dalam segmen usaha yang terdiri dari beberapa cabang sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

46. CONTINGENCIES (continued)

i. Lawsuit of PT Bangun Tjipta Sarana regarding Toll Road Revenue Sharing Agreement Cawang – Cibitung Section (BTS BANI II Lawsuit) (continued)

On October 20, 2017, the Company filed an appeal to the Supreme Court through the East Jakarta District Court;

The Company through Legal Consultant Adnan Buyung Nasution and Partner on December 20, 2017 has received Relas notice and Delivery Counter Appeal Memorandum of BTS. In Relas it is notified that BTS has submitted Counter Memorandum Appeal on December 5, 2017.

The appeal file has been delegated by the East Jakarta District Court to the Supreme Court on January 19, 2018.

47. OPERATING SEGMENTS

The Group is managed and classified into business segments which consist of branches as follow (in million rupiah) :

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 / Year Ended December 31, 2017								
	Pusat/ Head Office	Jagorawi	Jakarta Cikampek	Purbaleunyi	Jakarta Tangerang	Camareng	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Pendapatan/ Revenues									
Total Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya untuk Segmen dilaporkan/ Total Segment Toll Revenues & Other Revenues	1.041.531	887.710	1.289.979	1.316.376	766.598	1.512.999	3.108.770	(1.002.295)	8.921.667
Pendapatan konstruksi/ Construction revenues	744.466	-	-	-	-	-	25.339.974	86.090	26.170.529
Pendapatan Entitas/ Total Revenues	1.785.996	887.710	1.289.979	1.316.376	766.598	1.512.999	28.448.744	(916.206)	35.092.196
Beban Pendapatan/ Cost of Revenues									
Beban Tol dan Usaha Lainnya/ Toll and other operating expenses	(662.502)	(328.121)	(428.528)	(413.391)	(217.571)	(433.586)	(2.116.820)	828.457	(3.772.061)
Beban Konstruksi/ Construction Expenses	(730.585)	-	-	-	-	-	(25.195.574)	(86.090)	(26.012.248)
Laba Bruto/ Gross profit	392.910	559.589	861.451	902.985	549.027	1.079.413	1.136.350	(173.838)	5.307.886
Penghasilan Lain - lain/ Other Income (Penghasilan) keuangan / Financial Income	730.431	1.521	2.164	1.707	2.392	881	(556.434)	(126.806)	55.858
Keuntungan dari pelepasan investasi/ Gain on divestment	900.943	371	224	346	1.115	325	91.639	(711.007)	283.955
Beban pajak atas penghasilan keuangan/ Tax expense of financial income	-	-	-	-	-	-	563.463	-	563.463
Beban Umum dan Administrasi/ General and Administrative Expenses	(29.292)	-	-	-	-	-	(18.302)	-	(47.594)
Beban Lain - lain/ Other Expenses	(656.700)	(35.032)	(51.753)	(33.612)	(17.102)	(49.850)	(461.048)	152.631	(1.152.466)
Laba Usaha/ Profit on operations	848.645	508.863	794.888	858.190	511.297	1.008.335	695.978	(578.116)	4.648.080
Laba Rugi/ Profit and Loss									
Biaya Keuangan/ Finance Charges	(1.230.857)	-	-	-	-	-	(642.764)	604.751	(1.268.870)
Bagian Laba-Rugi atas Entitas Asosiasi/ Net Equity on Associates	(128.757)	-	-	-	-	-	-	-	(128.757)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan/ Earning Before Income Tax	(510.969)	508.863	794.888	858.190	511.297	1.008.335	53.214	26.635	3.250.452
Beban Pajak Penghasilan/ Income Tax	(1.063.774)	-	-	-	-	-	(93.022)	-	(1.156.796)
Laba Tahun Berjalan/ Income for the Year	(1.574.743)	508.863	794.888	858.190	511.297	1.008.335	(39.809)	26.635	2.093.656
Aset Segmen Dilaporkan/ Segment Assets	7.200.195	3.988.454	4.947.066	7.506.741	2.901.358	9.957.100	58.202.753	(15.510.894)	79.192.773
Liabilitas Segmen Dilaporkan/ Segment Liabilities	21.041.113	408.965	232.811	350.769	159.453	320.544	47.042.021	(8.722.342)	60.833.333

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

47. OPERATING SEGMENTS (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 / Year Ended December 31, 2016								
	Pusat/ Head Office	Jagorawi	Jakarta Cikampek	Purbaleunyi	Jakarta Tangerang	Camareng	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Pendapatan/ Revenues									
Total Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya untuk Segmen dilaporkan/ Total Segmented Toll Revenues & Other Revenues	1.046.822	708.835	1.280.136	1.365.207	596.827	1.448.382	2.779.307	(393.168)	8.832.348
Pendapatan Konstruksi/ Construction Revenues	4.879	-	-	-	-	-	7.824.176	-	7.829.055
Pendapatan Entitas/ Total Revenues	1.051.701	708.835	1.280.136	1.365.207	596.827	1.448.382	10.603.483	(393.168)	16.661.403
Beban Pendapatan/ Cost of Revenues									
Beban Tol dan Usaha Lainnya/ Toll and other operating expenses	(558.230)	(316.209)	(596.574)	(358.940)	(244.232)	(426.490)	(1.783.314)	261.132	(4.022.857)
Beban Konstruksi/ Construction Expenses	(4.788)	-	-	-	-	-	(7.777.366)	-	(7.782.154)
Laba Bruto/ Gross profit	488.683	392.626	683.562	1.006.267	352.595	1.021.892	1.042.803	(132.036)	4.856.392
Penghasilan Lain - lain/ Other Income	290.761	2.689	2.072	1.152	547	2.992	25.511	(130.726)	194.998
(Penghasilan) keuangan / Financial Income	100.677	170	212	119	174	235	101.090	-	202.677
Beban pajak atas penghasilan keuangan/ Tax expense of financial income	(20.357)	-	-	-	-	-	(20.197)	-	(40.554)
Beban Umum dan Administrasi/ General and Administrative Expenses	(592.309)	(20.435)	(27.478)	(22.433)	(25.268)	(34.348)	(358.765)	132.035	(949.001)
Beban Lain - lain/ Other Expenses	(298.893)	(282)	(117)	(735)	(601)	(55)	(70.770)	272.448	(99.005)
Laba Usaha/ Profit on operations	(31.438)	374.768	658.251	984.370	327.447	990.716	719.672	141.721	4.165.507
Laba Rugi/ Profit and Loss									
Biaya Keuangan/ Finance Charges	(791.916)	-	-	-	-	-	(724.978)	7.891	(1.509.003)
Bagian Laba-Rugi atas Entitas Asosiasi/ Net Equity on Associates	(6.824)	-	-	-	-	-	-	-	(6.824)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan/ Earning Before Income Tax	(830.178)	374.768	658.251	984.370	327.447	990.716	(5.306)	149.612	2.649.680
Beban Pajak Penghasilan/ Income Tax	(769.474)	-	-	(1)	-	(7)	(77.143)	-	(846.625)
Laba Tahun Berjalan/ Income for the Year	(1.599.652)	374.768	658.251	984.369	327.447	990.709	(82.449)	149.612	1.803.055
Aset Segmen Dilaporkan/ Segment Assets	3.735.639	3.216.826	4.118.727	6.500.980	2.351.997	8.887.929	37.825.940	(13.137.715)	53.500.323
Liabilitas Segmen Dilaporkan/ Segment Liabilities	15.189.266	146.199	199.360	203.198	121.389	259.708	27.915.522	(6.873.159)	37.161.483

48. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Bisnis Kelompok Usaha mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Kelompok Usaha adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola sistem manajemen risiko.

The business of the Group includes risks - taking activities with certain target by professional management. The main function of the risk management of the Group is to identify all key risks, to measure these risks and manage risk positions.

Kelompok Usaha mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Kelompok Usaha.

The Group defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by internal factors as well as external factors that may potentially have negative impact on achievement of The Group goals.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

48. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan Kelompok Usaha dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Kelompok Usaha.

Risiko keuangan utama yang dihadapi Kelompok Usaha adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

Risiko keuangan utama yang dihadapi Kelompok Usaha adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak dari instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Instrumen keuangan Kelompok Usaha yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang lain dan investasi tertentu. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

	0 - 1 Tahun/ Year 0 - 1	> 1 Tahun/ > 1 Years	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	
Piutang Lain-lain				Other Receivables
Lancar - Bersih				Current - Net
Pihak Berelasi	11.413.236.763	-	11.413.236.763	Related Party
Pihak Ketiga	134.127.401	-	134.127.401	Third Party
Total	11.547.364.164	-	11.547.364.164	Total
Tidak Lancar - Bersih				Non Current - Net
Pihak Ketiga	-	264.241.068	264.241.068	Third Party
Total	-	264.241.068	264.241.068	Total

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued))

The purpose of the Group in managing financial risks is to achieve an appropriate balance between risks and returns and minimize potential adverse effects of the financial performance of the Group.

The main financial risks of the Group are credit risk, interest rate risk, liquidity risk, foreign currency exchange rates and the risk of changes in government policy, socio - economic and political conditions. Attention to this risk management has increased significantly by considering changes and financial market volatility in Indonesia and internationally.

The main financial risks of the Group are credit risk, interest rate risk, liquidity risk, foreign currency exchange rates and the risk of changes in government policy, socio - economic and political conditions. Attention to this risk management has increased significantly by considering changes and financial market volatility in Indonesia and internationally.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that one party of a financial instrument will fail to meet its obligations and cause the other party to suffer financial losses.

The Group's financial instruments that have the potential for credit risk consist of cash and cash equivalents, other receivables and certain investments. Total maximum credit risk exposure equal to the carrying value of these accounts.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

48. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Pendapatan, pendanaan dan sebagian besar biaya operasi dari Kelompok Usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah oleh karena itu Kelompok Usaha tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Kelompok Usaha akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.

Kelompok Usaha mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Kelompok Usaha dalam memenuhi komitmen Kelompok Usaha untuk operasi normal Kelompok Usaha. Selain itu Kelompok Usaha juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

d. Risiko Suku Bunga

Risiko bunga atas arus kas adalah risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Eksposur terhadap suku bunga Kelompok Usaha dinilai rendah apabila ditinjau dari sisi posisi keuangan konsolidasian, namun Kelompok Usaha terus memonitor hal ini untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Kelompok Usaha. Pinjaman yang dikeluarkan pada tingkat suku bunga variabel mengekspos Kelompok Usaha terhadap arus kas dari risiko tingkat suku bunga.

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Currency Risk

Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.

Revenue, funding and most of the operating costs of the Group are made in the Rupiah currency and therefore the Group do not have significant exposure to fluctuations in foreign currency exchange rates.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk in which the Group will experience difficulties in acquiring funds to meet commitments associated with financial instruments.

The Group manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalents to enable the Group to meet its commitment to the normal operation of the Group. In addition, the Group also controls its cash flow projections and actual cash flow and continuously monitors the maturity dates of financial assets and liabilities.

d. Interest Rate Risk

Interest on the cash flow risk is the risk that future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates.

The Group's exposure to interest rate is considered low when viewed from the consolidated statement of financial position, but continue to monitor these companies to minimize the negative impact on the Group. Borrowings issued at variable interest rates expose the Company to cash flows from interest rate risk.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

48. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

e. Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. Aset dan liabilitas keuangan Kelompok Usaha yang diukur dan diakui pada nilai wajar adalah piutang dan utang derivatif.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Kelompok Usaha untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan adalah harga permintaan (*ask price*).

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi, apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Fair Value

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes. The Group's financial assets and liabilities that are measured and recognised at fair value are derivative receivables and payables.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price, for financial liabilities is the current ask price.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates, if all significant inputs required to fair value an instrument are observable.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, specific valuation techniques are used to value financial instrument include:

- *The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;*
- *Other techniques such as discounted cash flows analysis are used to determine fair value for the remaining financial instruments.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

48. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Nilai Wajar (lanjutan)

e. Fair Value (continued)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follow:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	6.873.020.928	6.873.020.928	Cash and cash equivalents
Dana ditetapkan penggunaannya	780.085.156	780.085.156	Restricted funds
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama - neto	886.617.944	886.617.944	Investment in associates and joint ventures - net
Piutang lain-lain - neto	11.811.605.233	11.811.605.233	Other receivables - net
Investasi jangka pendek	157.354.246	157.354.246	Short term investments
Total	20.508.683.506	20.508.683.506	Total
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang kontraktor jangka pendek	1.289.210.757	1.289.210.757	Short-term contractors payable
Utang kontraktor jangka panjang	496.699.951	496.699.951	Long-term contractors payable
Utang usaha	350.924.063	350.924.063	Accounts payable
Beban akrual	13.814.454.297	13.814.454.297	Accrued expense
Utang bank jangka pendek	1.287.658.584	1.287.658.584	Short-term bank loan
Utang lembaga keuangan bukan bank	500.000.000	500.000.000	Non-bank financial institutions loan
Beban akrual jangka panjang	2.197.234.400	2.197.234.400	Long-term accrued expense
Liabilitas keuangan lainnya	2.967.230.609	2.967.230.609	Other financial liabilities
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			Current maturities of long - term Liabilities
Liabilitas pembebasan tanah	1.872.488.859	1.872.488.859	Land acquisition liabilities
Utang obligasi	1.000.000.000	1.000.000.000	Bonds payable
Utang bank	557.795.484	557.795.484	Bank loans
Provisi pelapisan jalan tol	341.344.474	341.344.474	Provision for overlay
Utang sewa pembiayaan	4.542.380	4.542.380	Finance lease payable
Liabilitas jangka panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			Long - term liabilities Net of current maturity
Utang bank	21.160.366.364	21.160.366.364	Bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank	534.051.688	534.051.688	Non-bank financial institutions loan
Liabilitas kerjasama operasi	820.300	820.300	Joint operation liabilities
Utang sewa pembiayaan	19.038.238	19.038.238	Finance lease payable
Liabilitas pembebasan tanah	109.008.350	109.008.350	Land acquisition liabilities
Utang obligasi	7.418.391.797	7.418.391.797	Bonds payable
Provisi pelapisan jalan tol	202.278.345	202.278.345	Provision for overlay
Liabilitas jangka panjang lainnya	478.964.671	478.964.671	Other long-term liabilities
Total	56.602.503.611	56.602.503.611	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

48. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

e. Nilai Wajar (lanjutan)

Manajemen Permodalan

Tujuan dari Kelompok Usaha dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Kelompok Usaha dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Kelompok Usaha menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Kelompok Usaha mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari.

Konsisten dengan entitas lain dalam industri, Kelompok Usaha memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (meliputi modal saham, selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing dan saldo laba).

Selama tahun 2017, strategi Kelompok Usaha tidak berubah yaitu mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas sebesar maksimum 5:1. Rasio utang terhadap adalah sebagai berikut:

Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Total Liabilitas
Total Ekuitas
Rasio Utang terhadap Ekuitas

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Fair Value (continued)

Capital Management

The Group's purpose in managing capital is to protect the ability of the Group in maintaining business continuity, so that entities can still deliver results for shareholders and benefits for other stakeholders, and to provide adequate returns to shareholders by pricing products and services that are commensurate with the level of risk.

The Group set a number of capital ratios proportion to the risk. The Group manages its capital structure and makes adjustments taking into account changes in economic conditions and risk characteristics of the underlying asset.

Consistent with other companies in the industry, The Group monitors capital on the basis of the ratio of adjusted debt to capital. This ratio is calculated as follows: net debt divided by adjusted capital. Net debt is total debt (as the amount in the statement of financial position) less cash and cash equivalents. Adjusted capital comprises all components of equity (including capital stock, foreign exchange translation adjustment of foreign currency and retained earnings).

During the year 2017, the Group's strategy has not changed, namely, to maintain the debt to equity ratio at maximum 5:1. The ratio of debt to equity are as follows:

2017

24.997.940.299
35.835.392.971
60.833.333.270
18.359.439.521
3,3 : 1

Short-term Liabilities
Long-term Liabilities
Total Liabilities
Total Equity
Debt to Equity Ratio

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**49. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI
ARUS KAS**

Informasi tambahan atas arus kas terkait aktivitas investasi non kas adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 December 2016 December 31, 2016
Aset Takberwujud -		
Hak Pengusahaan Jalan Tol dan Aset Tak Berwujud Lainnya	14.578.393.941	3.071.860.829
Aset Tetap dan Properti Investasi	(11.908.107)	-
Provisi Pelapisan Jalan Tol	479.007.780	489.398.336
Amortisasi biaya transaksi atas utang bank	42.205.682	50.800.243
Amortisasi biaya transaksi atas utang obligasi	(75.049.805)	(3.965.315)
Total	15.012.649.491	3.608.094.093

49. NON-CASH TRANSACTIONS

Supplemental cash flows information non-cash investing activities is as follows:

Intangible Assets - Toll Road Concession Rights and Others
Fixed Asset and Investment Property
Provision for Overlay
Amortization of bank loan transaction cost
Amortization of bonds payable transaction cost
Total

**50. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.

**50. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE**

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current financial statements are disclosed below.

- SFAS 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted. This SFAS provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.
- SFAS 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers. This SFAS establish the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**50. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF
(lanjutan)**

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pada saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur investasinya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi.
- Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71 Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 Kontrak Asuransi, berlaku efektif 1 Januari 2020. Amandemen ini mengizinkan yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 (*deferral approach*) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (*overlay approach*) untuk aset keuangan yang ditetapkan.
- Amandemen PSAK 53 – Pembayaran Berbasis Saham: Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini bertujuan untuk memperjelas perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.

**50. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

- *Amendments to SFAS 2: Statement of Cash Flows on the Disclosures Initiative, effective 1 January 2018 with earlier application is permitted. This amendments requires entities to provide disclosures that enable the financial statements users to evaluate the changes in liabilities arising from financing activities, including changes from cash flow and non-cash.*
- *Amendments to SFAS 46: Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses, effective 1 January 2018 with earlier application is permitted. This amendments clarifies that to determine whether the taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized; estimates of the most likely future taxable income can include recovery of certain assets of the entity exceeds its carrying amount.*
- *PSAK 15 (2017 Improvement): Investments in Associates and Joint Ventures, effective 1 January 2018 with earlier application is permitted. This improvement Clarifies that at initial recognition an entity may elect to measure its investee at fair value on the basis of an investment-by-investment.*
- *Amendments to SFAS 62: Insurance Contract on Applying PSAK 71 Financial Instruments with SFAS 62 Insurance Contract, effective 1 January 2020. This amendments allows those who meet certain criteria to apply a temporary exclusion of SFAS 71 (deferral approach) or choose to implement overlay approach for financial assets designated.*
- *Amendments to SFAS 53 – Share-based Payment: Classification and Measurement of Share-based Payment Transaction, effective 1 January 2018 with earlier application is permitted. This amendments aims to clarify the accounting treatment related to the classification and measurement of stock-based payment transactions.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**50. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF
(lanjutan)**

- ISAK 33 – Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

**51. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 31 Januari 2018.

**50. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

- *ISAK 33 – Foreign currency Transaction and Advance Consideration, effective 1 January 2019 with earlier application is permitted. This amendments clarify the use of the transaction date to determine the exchange rate used in the initial recognition of the related asset, expense or income at the time the entity has received or paid advance consideration in the foreign currency.*

As at the authorization date of this consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Group's consolidated financial statements.

**51. THE MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

The Company's management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorized for issued on January 31, 2018.

2017

LAPORAN TAHUNAN



PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta, 13550 Indonesia

Telp. : +6221 841 3630,
+6221 841 3526

Fax. : +6221 841 3540

Email : jsmr@jasamarga.com

 Call Center 14080

 @OFFICIAL_JSMR dan @PTJASAMARGA

 PT Jasamarga

 @official.jasamarga

 [www.jasamarga](http://www.jasamarga.com)

 JMCARE